BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

bersama membangun Indonesia

Laporan Tahunan
Annual Report
2019

Akselerasi Kinerja Mendorong Perekonomian Papua

Performance Acceleration Encourages the Papua Economy

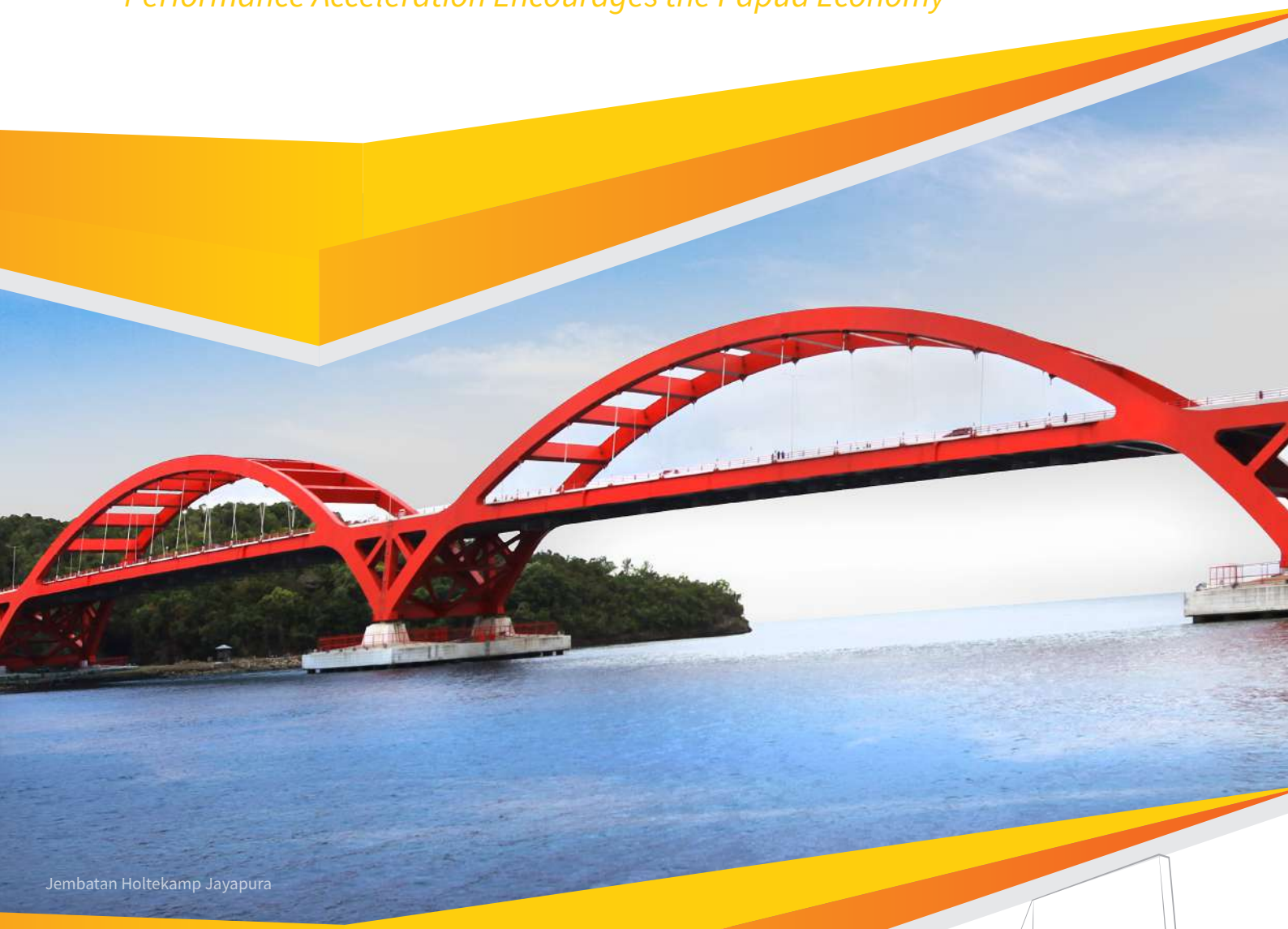

Jembatan Holtekamp Jayapura

Akselerasi Kinerja Mendorong Perekonomian Papua

Performance Acceleration Encourages the Papua Economy

Bank Papua memprioritaskan konsolidasi *Risk Management* dan *Asset Recovery* yang didukung oleh penyempurnaan *Human Capital Management* dan *Corporate Culture* untuk mewujudkan komitmen dalam meningkatkan peran sebagai agen penggerak pembangunan dan berakselerasi mendorong pertumbuhan perekonomian di Papua dan Papua Barat dimana Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menunjukkan dukungannya terhadap langkah tersebut.

Melalui berbagai program untuk mendorong inklusivitas layanan perbankan di masyarakat serta untuk lebih mengedepankan keberpihakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Bank Papua terus berupaya memberdayakan potensi lokal sebagai bagian dari komitmen Bank Papua untuk membangun tanah Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kontribusi Bank Papua guna mendorong perekonomian di daerah diantaranya melalui peningkatan diversifikasi produk, perbaikan kinerja dan penyaluran kredit, penguatan serta perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan demi kenyamanan dan kepuasan nasabah serta penyempurnaan kualitas *governance*.

Bank Papua prioritizes the consolidation of Risk Management and Asset Recovery supported by the refinement of Human Capital Management and Corporate Culture to realize commitment in increasing its role as an agent of development and accelerating accelerating economic growth in Papua and West Papua where the Provincial Governments of Papua and West Papua as Controlling Shareholders has shown its support for this step.

Through various programs to encourage the inclusiveness of banking services in the community and to prioritize the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, Bank Papua continues to work to empower local potential as part of Bank Papua's commitment to develop Papua in particular and Indonesia in general .

Bank Papua's contribution to stimulating the economy in the regions includes increasing product diversification, improving performance and lending, strengthening and expanding networks, improving service quality for the sake of customer satisfaction and satisfaction and improving governance quality.

Kesinambungan Tema
Sustainability Theme

Kesinambungan tema Laporan Tahunan menjadi penting untuk menunjukkan konsistensi Laporan Tahunan dan menggambarkan sejauh mana kinerja perusahaan serta seberapa besar upaya perusahaan dalam meraih pencapaian yang positif. Berikut ini kami sajikan kesinambungan tema selama 4 (empat) tahun terakhir.

The continuity of the Annual Report's theme is important to demonstrate the consistency of the Annual Report and to illustrate the extent to which the company is performing well and how much the company has been striving to achieve. Here we present a continuation of the theme over the last 4 (four) years.

Melanjutkan tema sebelumnya, tema tahun ini merupakan komitmen kami keluarga besar Bank Papua sebagai bank kebanggaan masyarakat Papua untuk lebih berkontribusi dan berakselerasi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua serta memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya

Moving on to the previous theme, this year's theme is the commitment of our extended family of Bank Papua as the proud bank of the people of Papua to further contribute and accelerate in driving economic growth and development on Papua land and providing better performance than the previous year.

2015

Pelopor Pembangunan dari Tanah Papua
Komitmen "Kami segenap insan Bank Papua siap menjadi pelopor pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian masyarakat di daerah-daerah pedesaan dan pesisir di Tanah Papua serta daerah lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kami segenap insan Bank Papua berkomitmen untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memajukan daerah Timur Indonesia"

Pioneer of* Development *from Tanah Papua
Commitment "We are all human of Bank Papua is ready to pioneer regional development by strengthening the economy of people in rural and coastal areas in Tanah Papua and other areas within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is prosperous and prosperous. We are all human beings of Bank Papua is committed to be the driving force of regional development in line with the Central and Regional Government programs to advance the eastern region of Indonesia "

2016

Bertransformasi Menjadi Lebih Unggul
Lingkungan bisnis berubah dengan sangat cepat. Persaingan pun semakin berat. Agar tidak kalah, Bank harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu dan berinovasi terhadap perubahan itu, sehingga Bank Papua dapat berlari dua kali lebih cepat dari tahun sebelumnya untuk menjadi lebih Unggul.

Transformed Become Superior
The business environment is changing very quickly. Competition is getting heavier. In order not to lose, the Bank must be able to adapt to that change and innovate on the change, so that Bank Papua can run twice as faster than the previous year to become more superior.

2017

Transformasi Back On Track
Mengambil pelajaran dari kesalahan dan berusaha untuk Back On Track, menjadikan kami semakin tangguh dalam persaingan bisnis. Transformasi Back On Track adalah semangat kami untuk meraih kembali kejayaan yang dicita-citakan.

Transformation Back On Track
Taking lessons from mistakes and trying to Back On Track, makes us even more resilient in business competition. The Back On Track transformation is our passion to regain the triumphant glory.

2018

Konsolidasi Bank Papua Menuju Kinerja yang Optimal dan Berkelanjutan

Dinamika industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi, namun satu hal yang pasti Bank Papua berpegang teguh untuk selalu fokus dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas disegala bidang demi menghasilkan kinerja yang unggul dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai lebih bagi para nasabah. Kami menyadari perlunya melakukan perbaikan dan konsolidasi di beberapa aspek, untuk itulah kami telah membuat beberapa kebijakan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu sebagai respon untuk memacu pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank Papua Consolidation Towards Optimal Performance and Sustainable

The dynamics of the banking industry in Indonesia are inseparable from the opportunities and challenges faced, but one thing is certain Bank Papua adheres to always being focused and committed to improving quality in all fields in order to produce superior and sustainable performance so as to provide more value for customers. We recognize the need to make improvements and consolidation in several aspects, for this reason we have made several policies and taken actions that are deemed necessary in response to spurring sustainable growth.

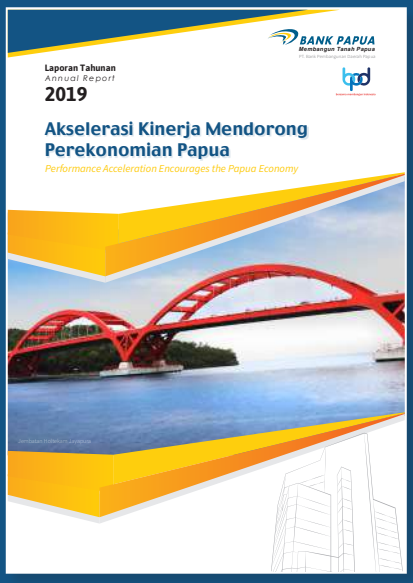

2019

Akselerasi Kinerja Mendorong Perekonomian Papua

Bank Papua memprioritaskan konsolidasi *Risk Management* dan *Asset Recovery* yang didukung oleh penyempurnaan *Human Capital Management* dan *Corporate Culture* untuk mewujudkan komitmen dalam meningkatkan peran sebagai agen penggerak pembangunan dan berakselerasi mendorong pertumbuhan perekonomian di Papua dan Papua Barat dimana Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menunjukkan dukungannya terhadap langkah tersebut.

Melalui berbagai program untuk mendorong inklusivitas layanan perbankan di masyarakat serta untuk lebih mengedepankan keberpihakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Bank Papua terus berupaya memberdayakan potensi lokal sebagai bagian dari komitmen Bank Papua untuk membangun tanah Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kontribusi Bank Papua guna mendorong perekonomian di daerah diantaranya melalui peningkatan diversifikasi produk, perbaikan kinerja dan penyaluran kredit, penguatan serta perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan demi kenyamanan dan kepuasan nasabah serta penyempurnaan kualitas *governance*.

Performance Acceleration Encourages the Papua Economy

Bank Papua prioritizes the consolidation of Risk Management and Asset Recovery supported by the refinement of Human Capital Management and Corporate Culture to realize commitment in increasing its role as an agent of development and accelerating accelerating economic growth in Papua and West Papua where the Provincial Governments of Papua and West Papua as Controlling Shareholders has shown its support for this step.

Through various programs to encourage the inclusiveness of banking services in the community and to prioritize the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, Bank Papua continues to work to empower local potential as part of Bank Papua's commitment to develop Papua in particular and Indonesia in general .

Bank Papua's contribution to stimulating the economy in the regions includes increasing product diversification, improving performance and lending, strengthening and expanding networks, improving service quality for the sake of customer satisfaction and satisfaction and improving governance quality.

Daftar Isi
Table of Contents

Penjelasan Tema	1	*Explanation of the Theme*
Kesinambungan tema	2	*Sustainability Theme*
Daftar Isi	4	*table of contents*
Ringkasan Kinerja Utama 2019	12	*Key Performance Highlight 2019*
Ikhtisar Data Keuangan Tahun 2019	13	*Financial Data Highlight in 2019*
Posisi Keuangan	13	*Financial Position*
Kinerja Keuangan	16	*Financial Performance*
Rasio Keuangan	20	*Finacial Ratios*
Ikhtisar Kinerja lainnya	24	*Other Performance Highlight*
Ikhtisar Efek lainnya	25	*Overview of Other Effects*
Peristiwa Penting Tahun 2019	26	*Important Events in 2019*
34 Laporan Manajemen *Management Report*		
Laporan Dewan Komisaris	36	*Board of Commissioner Report*
Laporan Direksi	44	*Report Of The Board Of Director*
Pernyataan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019	60	*Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding Responsibility for the 2019 Annual Report*
62 Profile Perusahaan *Company Profile*		
Identitas Perusahaan	64	*Corporate Identity*
Riwayat Singkat	66	*Brief History*
Jejak Langkah	68	*Milestones*
Makna Logo	70	*Logo Meaning*
Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan	71	*Vision, Mission and Corporate Values Cultural*
Budaya Kerja	76	*Work Culture*
10 Pedoman Perilaku	76	*Code of Conduct*
Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan	78	*Company Objectives, Targets and Strategies*
Bidang Usaha	83	*Business Fields*
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar	83	*Business Activities According to the Articles of Association*
Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini	84	*Current Business Activities*
Produk Usaha Bank	85	*Banking Product*
Produk Dana	85	*Fund Product*
Produk Kredit	89	*Loan Product*
Jasa Perbankan Lainnya	92	*Other Banking Services*
Struktur Organisasi	96	*Organizational Structure*
Struktur Organisasi	98	*Organizational Structure*
Dewan Komisaris	98	*Board of Commisioners*
Direksi	98	*Board of Director*
Pemimpin Divisi	99	*Division leader*
Pejabar Eksekutif	99	*Executive Officer*
Komite di bawah Komisaris	100	*Committee Under the Board of Commissioners*
Komite Audit	100	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	100	*Risk Oversight Committee*
Komite Nominasi dan Remunerasi	100	*Nomination & Remuneration Committee*
Komite di bawah Direksi	101	*Committees Under the Board of Directors*
Komite Kredit	101	*Credit Committee*
Komite Kebijakan Kredit	101	*Credit Policy Committee*
Komite Manajemen Risiko	102	*Risk Management Committee*
Komite ALCO	102	*ALCO Committee*
Komite Teknologi Informasi	103	*Information Technology Committee*
Komite Pertimbangan Pegawai	103	*Employee Advisory Committee*
Komite Pertimbangan Kasus Pegawai	103	*Employee Case Advisory Committee*
Profil Dewan Komisaris	104	*Board of Commissioners profile*

Profil Direksi	112	*Board of Directors Profile*
Profil Pejabat Eksekutif	122	*Executive Officer's Profile*
Profil Pimpinan Divisi	123	*Leader of Division Profile*
Profil Pegawai Perusahaan	140	*Employee Profile*
Data Pengembangan Kompetensi	149	*Competency Development Data*
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, dan Pemimpin Divisi	150	*Education and / or Training of the Board of Commissioners, Directors, Board of Commissioners' Committees, and Division Leaders*
Struktur & Komposisi Pemegang Saham	158	*Shareholders Structure & Composition*
Identitas Pemegang Saham	163	*Shareholder Identity*
Kronologis Penerbitan Saham & Efek Lainnya	170	*Chronology of Issuance of Share & Other Securities*
Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi	170	*Subsidiaries and/or Associates*
Struktur Grup Perusahaan	171	*The Structure of the Company Group*
Daftar Nama dan Alamat Lembaga Profesi Penunjang	171	*List of Names and Addresses of Supporting Professional Institution*
Penghargaan dan Sertifikat	172	*Award & Certificat*
Daftar Nama & Alamat Kantor Jaringan Bank Papua	175	*List & Adress List of Bank Papua Network Office*
Informasi Website Bank Papua	185	*Bank Papua's Website Information*

186 Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Management Discussion and Analysis of Company Performance

Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan	188	*Banking Economics and Industry Overview*
Kinerja Operasional	211	*Operational Performance*
Segmen Usaha	211	*Business Segment*
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	219	*Review of Operations per Business Segment*
Penghimpunan Dana	219	*Fund Raising*
Penyaluran Dana	236	*Funding*
Tingkat Suku Bunga	246	*Interest Rate*
Jasa & Layanan	247	*Services*
Kinerja Usaha Terkait Peningkatan/Penurunan Pendapatan Penyaluran Kredit	255	*Business Performance Related to Increase / Decrease in Lending Income*
Kinerja Operasional Terkait Pendapatan Usaha	256	*Operating Performance Related to Operating Revenues*
Profitabilitas per Segmen	257	*Profitability per Segment*
Analisis Kinerja Keuangan	258	*Financial Performance Analysis*
Laporan Kinerja Posisi keuangan	258	*Financial Position Performance Report*
Aset	259	*Asset*
Liabilitas/Kewajiban	270	*Liabilities/Obligations*
Ekuitas	276	*Equity*
Laporan Arus Kas	277	*Cash Flow Statement*
Laporan Kinerja Laba Rugi	280	*Earning and Loss Performance Statement*
Tingkat Kesehatan Bank	290	*Bank Sound Rating*
Rasio Keuangan	291	*Financial Ratios*
Kemampuan Membayar Hutang	292	*Ability to Pay Debt*
Tingkat kolektibilitas Kredit	296	*Loan Collectability Level*
Komitmen dan Kontijensi	298	*Commitments and Contingencies*
Kontribusi Kepada Negara	299	*Contributions for the State*
Aset Produktif	300	*Earning Assets*
Struktur Modal	301	*Capital Structure*
Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal	301	*Management Policy on Capital Structure*
Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal	302	*Basis for Selection of Management Policies for Capital Structure*
Struktur Modal Berdasarkan Bunga	302	*Capital Structure Based on Interest*
Struktur Modal Berdasarkan Ekuitas	303	*Equity Based Capital Structure*
Perubahan Struktur Modal Bersifat Kuantitatif	303	*Changes in Capital Structure Are Quantitative*
Peraturan yang Dijadikan Landasan Manajemen	304	*Regulations Used as Management Platform*
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal	304	*Agreement for Capital Expenditure Investment*
Investasi Barang Modal	305	*Capital Expenditure Investment*

Perbandingan antara Target RBB 2019 dengan Realisasi RBB dan Proyeksi 2020	307	*Comparison Between 2019 BBP Target and Realization with 2020 Projection*
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	314	*Information and Material Facts that Occur after the Accountant Date Statement*
Aspek Pemasaran	315	*Marketing Aspect*
Pangsa Pasar	327	*Market share*
Prospek Usaha	329	*Business Prospect*
Penerapan Kebijakan Pembagian Dividen	332	*Dividend Distribution Policy*
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)	333	*Stock Ownership Program by Employee and / or Management that the Company Conduct (ESOP / MSOP)*
Realisasi Perolehan dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	333	*Income Realization and Use of Funds Planning from Public Offering*
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan	334	*Information on Material Transaction that Contains Conflicts of Interest*
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	337	*Laws and Regulations changes*
Perubahan Kebijakan Akuntansi	342	*Accounting Policies Changes*
Informasi Kelangsungan Usaha	345	*Business Continuity Information*

348 Tinjauan Pendukung
Supporting Review

Tinjauan Sumber Daya Manusia	350	*Human Resources Overview*
Teknologi Informasi	378	*Information Technology*

388 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Implementation Report

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	390	*Corporate Governance Implementation Report*
Pernyataan Komitmen GCG Bank Papua	390	*Bank Papua GCG Commitment Statement*
Road Map GCG	391	*GCG Road Map*
Tahapan Implementasi GCG	391	*Stages of GCG Implementation*
Strategi Implementasi	392	*Implementation Strategy*
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	393	*Principles of Good Corporate Governance*
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	397	*Basis for Implementing Good Corporate Governance*
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua	398	*The Purpose of Implementing Bank Papua Corporate Governance*
Kebijakan dan Pedoman Pendukung Tata Kelola Perusahaan	398	*Policies and Supporting Guidelines for Corporate Governance*
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	399	*Submission of State Organizer Asset Report (LHKPN)*
Program Pengendalian Gratifikasi	400	*Gratification Control Program*
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	401	*Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance*
Struktur Tata Kelola Perusahaan	408	*Corporate Governance Structure*
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali	410	*Information Regarding Major and Controlling Shareholders*
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	412	*General Meeting of Shareholders (GMS)*
Dewan Komisaris	423	*Board of Commissioners*
Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris	448	*Independent Commissioner and Independence of the Board of Commissioners*
Direksi	452	*Board of Directors*
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	477	*Composition Policy Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors*
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	479	*Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors*
Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi	483	*Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors*
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat	485	*Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Meeting*
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama	493	*Affiliation Between Members of the Board of Director, Board of Commissioners, and Major Shareholders*

Organ Pendukung Dewan Komisaris	**495**	*Supporting Organs of the Board of Commissioners*
Komite Audit	**406**	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	**503**	*Risk Oversight Committee*
Komite Remunerasi dan Nominasi	**510**	*Remuneration and Nomination Committee*
Komite Dibawah Direksi	**517**	*Committees Under the Directors*
Komite Kredit	**518**	*Credit Committee*
Komite Kebijakan Perkreditan	**524**	*Credit Policy Committee*
Komite Manajemen Risiko	**526**	*Risk Management Committee*
Komite *Asset & Liability* (ALCO)	**529**	*Asset & Liability Committee (ALCO)*
Komite Teknologi Informasi	**534**	*IT Steering Committee*
Komite Pertimbangan Pegawai	**536**	*Employee Advisory Committee*
Komite Pertimbangan Kasus Pegawai	**538**	*Employee Case Advisory Committee*
Sekretaris Perusahaan	**540**	*Corporate Secretary*
Audit Internal	**546**	*Internal Audit*
Akuntan Publik	**563**	*Public Accountant*
Manajemen Risiko	**568**	*Risk management*
Sistem Pengendalian Internal	**608**	*Internal Control System*
Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi	**632**	*Important Cases Faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commssioners, and Board of Director*
Akses Informasi dan Data Perusahaan	**633**	*Access Information and Company Data*
Kode Etik Perusahaan	**636**	*Company Code of Conduct*
Whistleblowing System (WBS)	**642**	*Whistleblowing System (WBS)*
Fungsi Kepatuhan	**658**	*Compliance Function*
Kebijakan *Anti Fraud*	**674**	*Anti Fraud Policy*
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank	**684**	*Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions*
Rencana Bisnis Bank	**689**	*Bank Business Plan*

694 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	**696**	*Corporate Social Responsibility*
Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup	**704**	*Corporate Social Responsibility for the Environment*
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial dan Masyarakat	**707**	*Corporate Social Responsibility Againts Social and Society*
Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	**712**	*Responsibility for Health, Safety, and Work (HSW) (K3)*
Tanggung Jawab terhadap Produk dan Nasabah	**716**	*Responsibility for Product and Customers*
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia	**720**	*Social Responsibility for Human Rights*
Tanggung JawabSosial Terkait Operasi yang Adil	**722**	*Social Responsibilities Regarding Fair Operations*

724 **Referensi Laporan Tahunan**
Annual Report Reference

748 **Laporan Keuangan Auditor Independen**
Auditor Independent Financial Report

Holtekamp,
Ikon Baru Kebangkitan Ekonomi Tanah Papua

Holtekamp, New Icon of Papua's Economic Resurrection

Jembatan Holtekamp atau Youtefa sebagai jembatan terpanjang di Papua dengan tipe pelengkung baja ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 28 Oktober 2019. Jembatan yang terletak di Teluk Youtefa ini dibiayai dari dana SBSN/Sukuk Negara sebesar Rp1,3 triliun dan dilengkapi dengan kontribusi dana APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebesar Rp500 miliar. Jembatan Holtekamp dibangun sejak 2015, dengan panjang 732 meter dan lebar 21 meter tersebut.

Jembatan ini disebut-sebut sebagai ikon baru Papua yang menghubungkan langsung Jayapura dengan kawasan Lintas Batas Negara Skouw. Jembatan berwarna merah ini dianggap bisa memperpendek jarak dan waktu tempuh hingga sekitar 70 menit dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan kawasan Lintas Batas Negara Skow. Perlu diketahui, Distrik Muara Tami merupakan kawasan tempat pembangunan Istana Negara yang rencananya akan dibangun di Papua. Kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan telah selesai dibangun PLBN dan bakal dilanjutkan dengan pembangunan pasar. Selain menjadi sarana perhubungan yang memberikan keuntungan logistik, jembatan ini juga ramai dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar.

Itulah tujuan dari pembangunan infrastruktur, membuat kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru dimana Bank Papua berperan sebagai *agent of development*, membantu perekonomian dan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan memberikan pembiayaan ke masyarakat melalui produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lainnya. Bank Papua juga dapat mewujudkan visi dan misinya sebagai bank yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Tanah Papua yang berkelanjutan, dengan karakter sebagai Bank yang selalu mendukung pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah terkait pembangunan ekonomi di Tanah Papua, melakukan pengembangan bisnis di wilayah *remote*, serta pengembangan teknologi perbankan *digital* yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan berbiaya rendah.

The Holtekamp or Youtefa Bridge is the longest bridge in Papua with this type of steel curb inaugurated by President Joko Widodo on Monday, October 28, 2019. The bridge located in Youtefa Bay is funded by SBSN / State Sukuk Fund of Rp1.3 trillion and equipped with a budget contribution of Papua and Jayapura Provincial Budget of USD 500 billion. The Holtekamp Bridge has been under construction since 2015, at 732 meters long and 21 meters wide.

The bridge is referred to as the New Icon Of Papua which connects Jayapura directly to the Skouw State Crossing area. The red bridge is expected to shorten the distance and travel time of up to 70 minutes from the City of Jayapura to Muara Tami District and the Skow State Crossing area. Please note, the Muara Tami District is the site of the State Palace development which is planned to be built in Papua. The Skouw border area as the embryonic center of the region's economic growth has been completed by the PLBN and will be further developed by the market. In addition to being a means of communication that provides logistical benefits, the bridge is also widely used as a tourist attraction by the locals.

That is the purpose of infrastructure development, creating new area of economic growth where the Bank Papua plays an agent of development, aids the economy and can become a driving force in the region's economy by providing financing to the community through KUR (People's Business Credit) products and more. The Bank Papua can also establish its vision and mission as a bank contributing significantly to economic growth and sustainability in Papua Land, with the character of the Bank always supporting the implementation of Regional Government projects related to economic development in Papua, conducting business development in remote areas, and the development of digital banking technology that enables the expansion of low-cost services.

Prestasi yang diraih Bank Papua sebagai Juara 2 *Annual Report Award* tahun 2019 sangatlah membanggakan. Inilah penghargaan kali kedua yang diterima Bank Papua dalam ajang yang sama, dimana pada tahun 2013, Bank Papua menerima penghargaan ARA sebagai juara 3 untuk kategori BUMD-*Non Listed*. Ajang ini diikuti oleh 236 peserta, yang terdiri atas 231 perusahaan umum dan 5 dana pensiun.

Annual Report Award yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia pada Kamis, 14 November 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat yang diterima oleh Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato dan didampingi Komisaris Bank Papua, Betty J. Parinussa.

Bank Papua's achievements as the 2nd Annual Report Award Winner in 2019 is very exciting. This is the second time Bank Papua has received the same award, in 2013, Bank Papua received the ARA award as the 3rd place winner for the Non-Listed SOE. The event was followed by a total of 236 participants, comprising 231 public companies and 5 pension funds.

Annual Report Award held by the Financial Services Authority (OJK), National Committee on Governance Policy (KNKG), Ministry of SOE, Directorate General of Taxation, Bank Indonesia, Indonesian Stock Exchange and Indonesian Accounting Association on Thursday, November 14, 2019 at the Republic of Finance Ministry's Office Building Indonesia, Jakarta Central received by the Director of the Bank Papua, F. Zendrato and accompanied by the Chairman of the Bank Papua, Betty J. Parinussa.

Bank Papua Juara 2 ARA Award Tahun 2019

Bank Papua, 2nd place winner of ARA Award 2019

Kegiatan ARA memiliki tujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik-praktik GCG. Penilaian ARA dilakukan terhadap laporan tahunan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta. Sejak diselenggarakannya ARA pada 2002 hingga kini, terjadi peningkatan kualitas informasi pada laporan keuangan setiap tahunnya.

"Dunia sekarang sangat detail melihat perkembangan korporasi, termasuk korporasi di Indonesia. Dengan ARA 2018 ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan Indonesia masih mampu tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi global yang masih melambat ini karena masih adanya sejumlah persoalan dari perang dagang AS-China," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan sambutan di Malam Penganugerahan Laporan Tahunan (ARA) 2018 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

The ARA's activities aim to encourage the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in Indonesia through the disclosure of GCG information and practices. The ARA assessment is based on the company's annual report and recommendations for improvement to all participants. Since its inception in ARA in 2002 till now, there has been an increase in the quality of information in its financial statements every year.

"The world today is very detailed looking at corporate developments, including corporations in Indonesia. With this ARA 2018, we can see that Indonesian companies are still able to grow positively amidst the slowing global economic conditions due to a number of issues from the US-China trade war, "said Chairman of the Financial Services Authority Board of Director Wimboh Santoso in a speech at The Annual Report Award (ARA) Night 2018 in Jakarta, Thursday (14/11/2019).

Ringkasan Kinerja Utama 2019

Key Performance Highlight 2019

Bank Papua terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai upaya untuk tetap pada jalur bisnisnya, manajemen telah berhasil membukukan kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Bank Papua continues to work to improve performance growth in a sustainable manner. In an effort to stay on track with its business, management has succeeded in boosting performance in 2019 as follows:

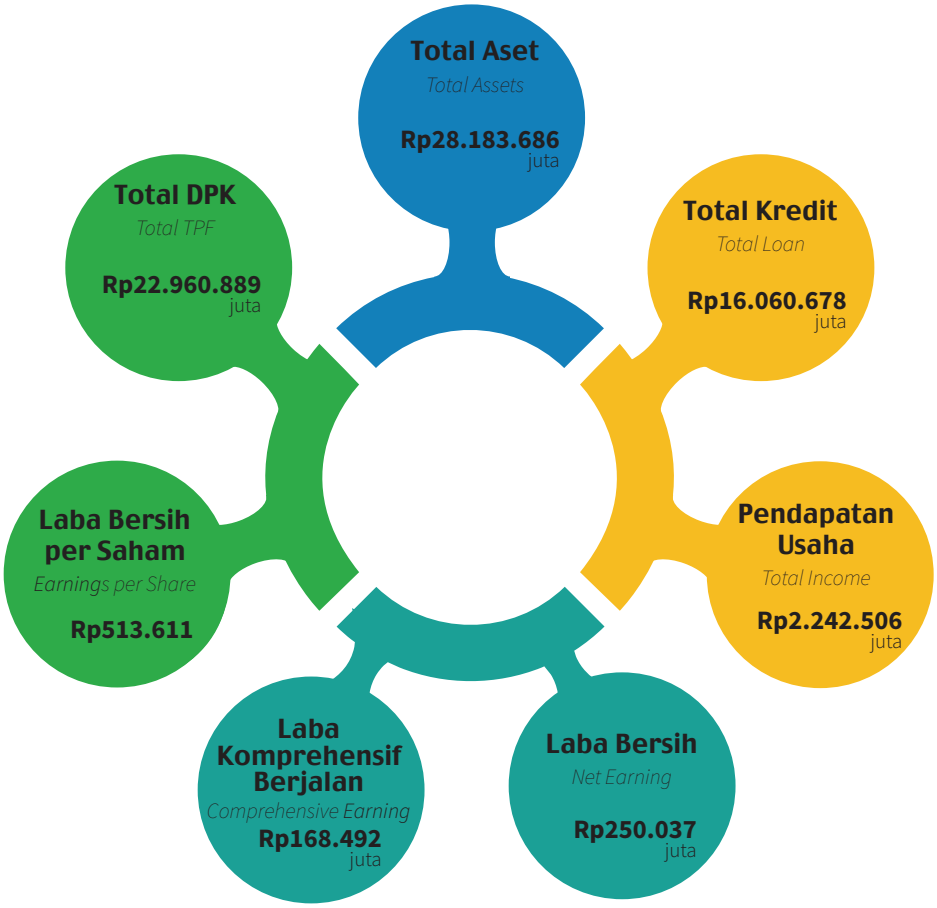

Rasio CAR *CAR Ratio* **21,43%**	**Rasio ROA** *ROA Ratio* **1,35%**	**Rasio ROE** *ROE Ratio* **7,71%**
Rasio NPL Netto *Net NPL Ratio* **2,00%**	**Rasio LDR** *LDR Ratio* **70,30%**	**Rasio BOPO** *OEOI Ratio* **85,18%**

Ikhtisar Data Keuangan Tahun 2019

Financial Data Highlight in 2019

Posisi Keuangan

Financial Position

dalam jutaan *(in millions)* Rp

DATA KEUANGAN	2019	2018	2017	2016	2015	*FINANCIAL DATA*
ASET	**28.183.686**	**22.456.759**	**20.400.813**	**20.611.850**	**20.357.639**	*ASSET*
DPK NON BANK	**22.844.982**	**17.929.809**	**16.563.805**	**16.478.663**	**15.787.213**	*NON BANK TPF*
1. Giro	11.086.817	8.151.733	7.641.693	7.033.795	7.251.987	*1. Current Account*
2. Tabungan	8.804.223	7.361.170	6.572.270	6.287.064	5.877.399	*2. Savings*
3. Deposito	2.953.943	2.416.906	2.349.842	3.157.804	2.657.827	*3. Time Deposits*
DPK BANK	**115.906**	**64.007**	**91.770**	**90.817**	**119.151**	*BANK TPF*
1. Giro	46.754	54.715	89.793	84.250	116.561	*1. Current Account*
2. Tabungan	6.246	4.242	1.727	5.117	1.339	*2. Savings*
3. Deposito	62.906	5.050	250	1.450	1.250	*3. Time Deposits*
TOTAL PENGHIMPUNAN DANA	**22.960.889**	**17.993.816**	**16.655.575**	**16.569.479**	**15.791.142**	*TOTAL COLLECTION OF FUNDS*
1. Giro	11.133.571	8.206.448	7.731.486	7.118.045	7.253.326	*1. Current Account*
2. Tabungan	8.810.469	7.365.412	6.573.996	6.292.181	5.878.738	*2. Savings*
3. Deposito	3.016.848	2.421.956	2.350.092	3.159.254	2.659.077	*3. Time Deposits*
PENGGUNAAN DANA	**26.562.447**	**21.674.321**	**20.252.335**	**20.493.727**	**19.657.097**	*USE OF FUNDS*
Kredit	16.060.678	14.147.217	13.270.908	14.209.840	13.207.177	*Loan*
1. Pihak Berelasi	1.508.984	971.822	720.065	636.141	215.388	*1. Related Parties*
2. Pihak Ketiga	14.551.694	13.175.395	12.550.843	13.573.699	12.991.789	*2. Third Party*
Penempatan	6.373.129	5.236.891	4.372.182	4.333.139	4.203.093	*Placement*
Surat Berharga	4.128.639	2.290.213	2.609.245	1.950.749	2.246.827	*Marketable Securities*
Pembentukan CKPN Kredit	(568.876)	(739.513)	(1.506.741)	(1.272.909)	(927.584)	*Allowance for Impairement loses*
Kas	1.700.444	996.585	831.085	941.681	738.378	*Cash*
Aktiva Tetap & Inventaris	247.569	252.807	290.622	297.971	290.001	*Fixed Assets & Inventory*
Aktiva Lainnya	242.102	272.559	533.511	603.538	599.748	*Other Assets*
LIABILITAS	**24.745.539**	**19.285.891**	**17.725.809**	**18.242.595**	**17.552.306**	*LIABILITY*
EKUITAS	**3.438.147**	**3.170.867**	**2.675.004**	**2.369.256**	**2.805.333**	*EQUITY*
1. Modal Saham	2.300.800	2.030.945	1.907.850	1.698.825	1.490.605	*1. Equity Capital*
2. Tambahan Modal Disetor	133.311	173.233	95.307	58.171	96.160	*2. Additional Paid-in Capital*
3. Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	75	2.979	38	5.452	3.340	*3. Unrealized gain above marketable securities and Government bonds in groups available for sale after tax deferred*
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(243.136)	(164.495)	(305.784)	(257.513)	(55.462)	*Other Comprehensive Income*
SALDO LABA						*RETAINED EARNING*
1. Telah ditentukan penggunaannya	997.060	909.629	864.320	1.101.025	887.347	*1.Appropriated reserved*
2. Belum ditentukan Penggunaannya	250.037	218.576	113.273	(236.704)	383.343	*2. Unappropriated reserved*

Aset
Asset

25,50% (yoy)

Jumlah Aset tahun 2019 sebesar Rp28.183.686 juta atau meningkat sebesar 25,50% dari tahun sebelumnya.

The total assets in 2019 amounting to Rp28,183,686 million or an increase of 25.50% from the previous year.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

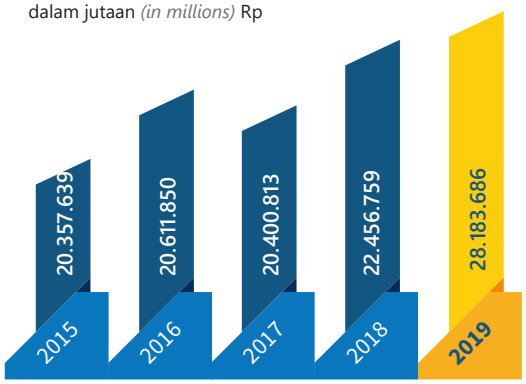

Dana Pihak Ketiga
Third-party Funds

27,60% (yoy)

Jumlah Dana Pihak Ketiga tahun 2019 sebesar Rp22.960.889 juta atau meningkat sebesar 27,60% dari tahun sebelumnya.

Third Party Funds in 2019 amounting to Rp22,960,889 million or an increase of 27.60% from the previous year.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

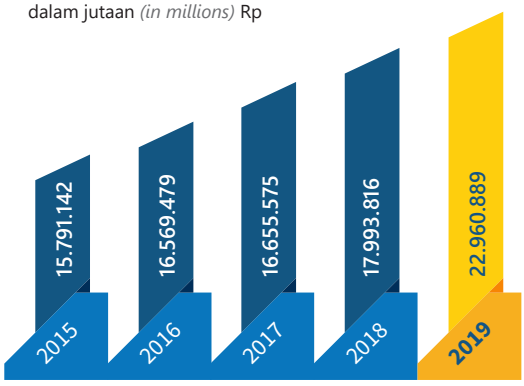

Penggunaan Dana
Use of funds

22,55% (yoy)

Penggunaan Dana tahun 2019 sebesar Rp26.562.447 juta atau meningkat sebesar 22,55% dari tahun sebelumnya.

The use of funds in 2019 amounting to Rp26,562,447 million or an increase of 22.55% from the previous year.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

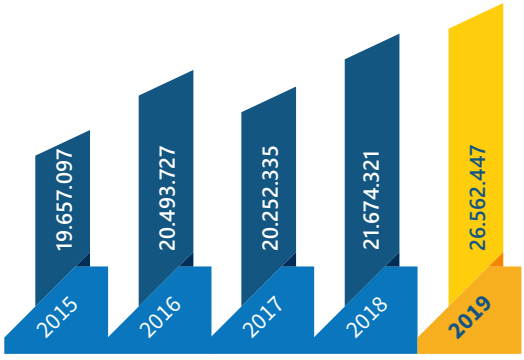

Total Liabilitas
Total Liabilities

28,31% (yoy)

Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp24.745.539 juta atau meningkat sebesar 28,31% dari tahun sebelumnya.

Liabilities in 2019 amounting to Rp24,745,539 million, an increase of 28.31% from the previous year.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

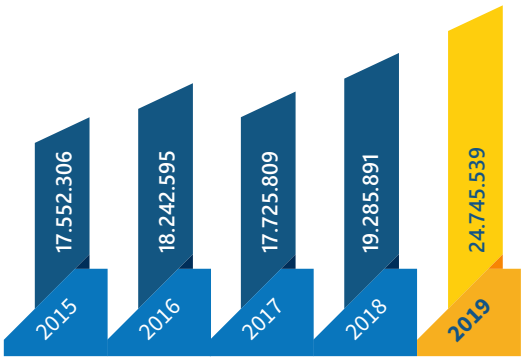

Ekuitas
Equity

8,43% (yoy)

Jumlah Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp3.438.147 juta atau meningkat sebesar 8,43% dari tahun sebelumnya.

The total equity in 2019 was Rp3,438,147 million, an increase of 8.43% from the previous year.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

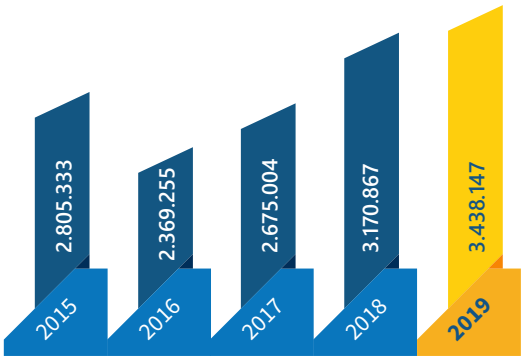

Kinerja Keuangan

Financial Performance

dalam jutaan *(in millions)* Rp

Data Keuangan	2019	2018	2017	2016	2015	*Financial Data*
LABA RUGI KOMPREHENSIF						*COMPREHENSIVE EARNING LOSS*
Pendapatan Bunga	1.997.425	1.892.775	2.114.796	2.088.661	1.985.423	*Interest Income*
Beban Bunga	(415.347)	(351.763)	(431.052)	(445.924)	(578.640)	*Interest Expense*
Pendapatan Bunga Bersih	**1.582.079**	**1.541.013**	**1.683.744**	**1.642.737**	**1.406.783**	***Net Interest Income***
Pendapatan Operasional Selain Bunga	245.081	223.399	180.140	131.361	361.833	*Operating Income Exclude Interest*
Pendapatan Operasional Lainnya	144.529	123.171	81.556	31.005	267.610	*Other Operating Income*
Pendapatan Provisi dan Komisi	100.552	100.228	98.585	100.356	94.223	*Commissions and Provisions*
Beban Operasional Selain Bunga	(1.528.513)	(1.618.873)	(1.737.551)	(1.971.816)	(1.304.276)	*Operational Expenses exclude Interest*
Beban Provisi dan Komisi	(1.916)	(1.689)	(1.331)	(1.821)	(1.590)	*Commissions and Provisions*
Beban Pembentukan CKPN	(180.623)	(530.692)	(687.937)	(879.997)	(281.306)	*CKPN Allowance Expenses*
Beban Operasional Lainnya	(1.345.974)	(1.086.493)	(1.048.283)	(1.089.999)	(1.021.380)	*Other Operating Expenses*
Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	**(1.283.432)**	**(1.395.474)**	**(1.557.410)**	**(1.840.455)**	**(942.443)**	***Operating Income exclude Net Interest***
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**298.647**	**145.539**	**126.333**	**(197.719)**	**464.340**	***OPERATIONAL EARNING (LOSS)***
Pendapatan Bukan Operasional	50.271	141.622	21.204	59.611	69.081	*Non-Operating Income*
Beban Bukan Operasional	(6.294)	(3.368)	(3.151)	(5.972)	(5.120)	*Non-Operational Expenses*
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional Bersih	**43.977**	**138.254**	**18.052**	**53.638**	**63.961**	***Net Non-Operating Income (Expenses)***
LABA SEBELUM PAJAK	**342.624**	**283.793**	**144.386**	**(144.080)**	**528.301**	***EARNING BEFORE TAX***
Pajak Kini	(111.333)	(65.226)	(40.762)	(68.632)	(137.718)	*Current Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	18.746	9	9.649	(23.992)	(7.240)	*Deferred Tax Benefits*
Beban Pajak	(92.587)	(65.217)	(31.113)	(92.624)	(144.958)	*Tax Expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**250.037**	**218.576**	**113.273**	**(236.704)**	**383.343**	***NET CURRENT YEAR EARNING***
Pendapatan (Beban) Penghasilan Komprehensif	(81.545)	144.230	42.884	(147.534)	(52.112)	*Comprehensive Income (Expenses)*
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**168.492**	**362.806**	**156.157**	**(384.238)**	**331.231**	***COMPREHENSIVE EARNING CURRENT YEAR***
LABA PER SAHAM* (Dalam Rupiah Penuh)						***EARNING PER SHARE * (in Full Rupiah)***
Laba Operasional	613.463	330.143	315.336	(562.661)	1.463.164	*Operational Earning*
Laba Bersih	513.611	495.821	282.735	(673.605)	1.207.939	*Net Earning*

Pendapatan Bunga Bersih
Net interest income

2,66% (yoy)

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2019 sebesar Rp1.582.079 juta atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,66% (yoy).

Net interest income in 2019 amounted to Rp1,582,079million or a nincrease from the previous year of 2.66% (yoy).

dalam jutaan *(in millions)* Rp

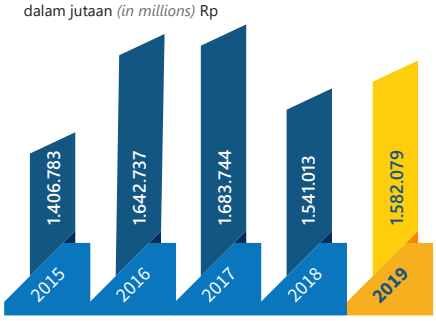

Pendapatan Operasional selain Bunga
Operational income Exclude interest

9,71% (yoy)

Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih tahun 2019 sebesar Rp245.081 juta atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9,71% (yoy).

Operating income (expenses) exclude net interest in 2019 amounting to Rp245,081 million or an increase from the previous year of 9.71% (yoy).

dalam jutaan *(in millions)* Rp

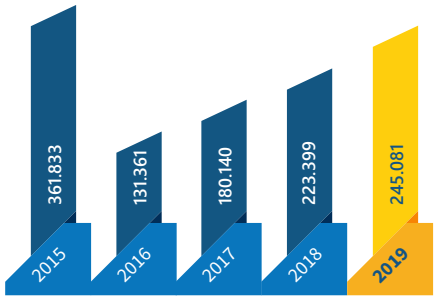

Pendapatan (beban) Operasional selain Bunga Bersih
Operational income (expenses) Exclude Net Interest

-8,03% (yoy)

Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih tahun 2019 minus sebesar Rp1.283.432 juta atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -8,03% (yoy)

Operating income (expenses) other than net interest in 2019 minus Rp1,283,432 million or a decrease from the previous year of -8.03% (yoy)

dalam jutaan *(in millions)* Rp

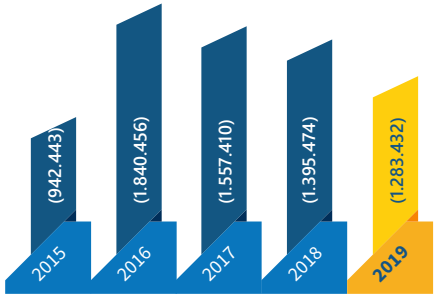

Laba (Rugi) Operasional
Operational Income (Loss)

105,20% (yoy)

Laba (Rugi) Operasional tahun 2019 sebesar Rp298.647 juta atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 105,20% (yoy).

Operational Income (Loss) in 2019 amounting to Rp298,647 million or an increase from the previous year of 105,20% (yoy).

dalam jutaan *(in millions)* Rp

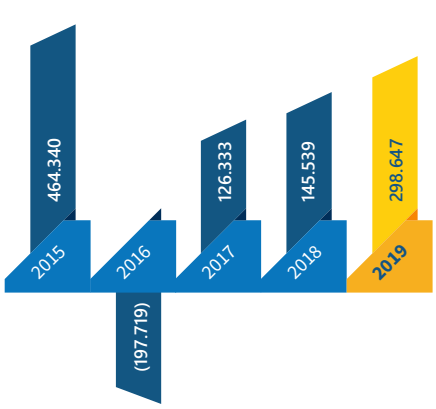

Pendapatan (beban) Bukan Operasional Bersih

Net Non Operational Income (Expenses)

-68,19% (yoy)

Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih tahun 2019 sebesar Rp43.977 juta atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -68,19% (yoy).

Operating income (expenses) exclude net interest in 2019 amounting to Rp43,977 million or a decrease from the previous year of -68.19% (yoy)

dalam jutaan *(in millions)* Rp

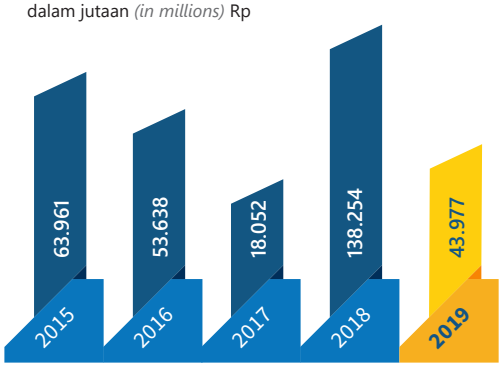

Laba Sebelum Pajak

Earning berfore Tax

20,73% (yoy)

Laba sebelum Pajak tahun 2019 sebesar Rp342.624 juta atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 20,73% (yoy)

Earning before tax in 2019 amounting to Rp342,624 million or an increase from the previous year of 20.73% (yoy)

dalam jutaan *(in millions)* Rp

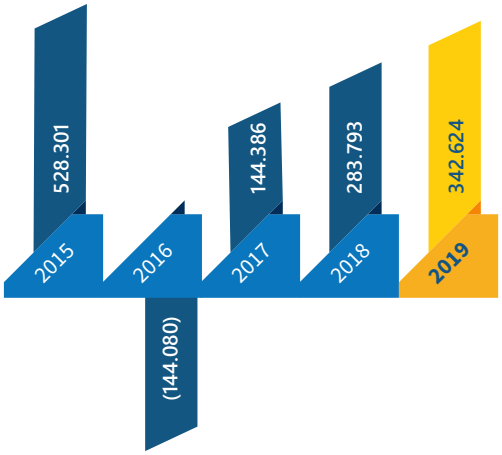

Laba Bersih Tahun Berjalan

Net Earning Current Year

14,39% (yoy)

Laba Bersih Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp250.037 juta atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 14,39% (yoy)

Net Earning Current Year in 2018 amounting to Rp250,037 million or an increase from the previous year of 14.39% (yoy)

dalam jutaan *(in millions)* Rp

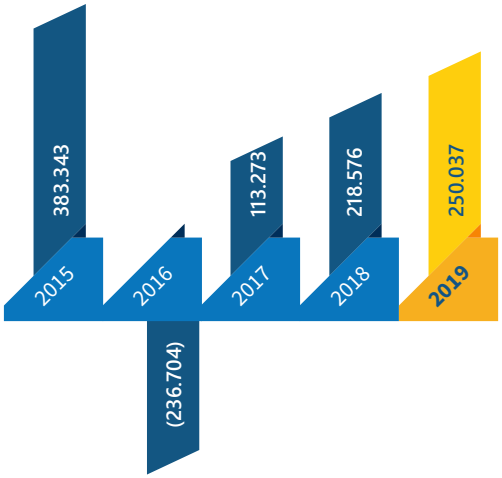

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Earning Current Year

-53,56% (yoy)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp168.492 juta atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -53,56% (yoy).

Comprehensive Earning Current Year in 2019 amounting to Rp168,492 million or a decrease from the previous year of -53.56% (yoy).

dalam jutaan *(in millions)* Rp

Laba per Saham
Laba Operasional
Operational Earning

85,82% (yoy)

Laba Operasional per Saham tahun 2019 sebesar Rp613.463 atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 85,82% (yoy).

Operational earnings per Share in 2019 amounting to Rp613,463 or an increase from the previous year of 85.82% (yoy).

dalam *(in)* Rp

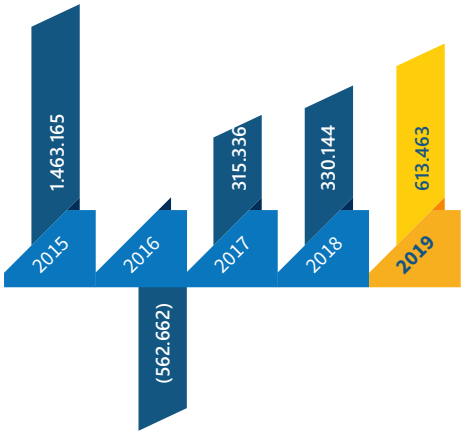

Laba per Saham
Laba Bersih
Net Earning

3,59% (yoy)

Laba bersih per Saham tahun 2019 sebesar Rp513.611 atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,59% (yoy).

Net Earnings per Share in 2019 amounting to Rp513,611 or an increase from the previous year of 3.59% (yoy).

dalam *(in)* Rp

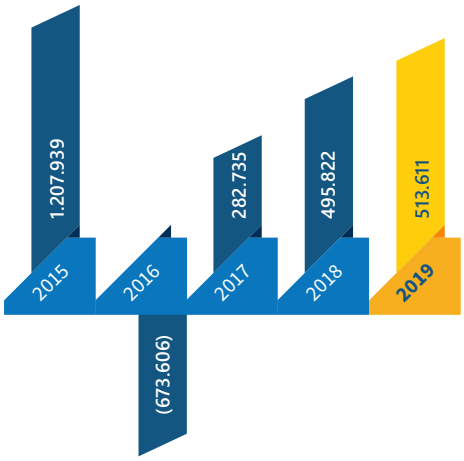

Rasio Keuangan *Financial Ratio*

Rasio Keuangan	2019	2018	2017	2016	2015	*Financial Ratio*
A. Rasio Kinerja						***A. Performance Ratio***
I. PERMODALAN						***I. CAPITAL***
1. KPMM	21,43	22,21	17,99	17,28	22,22	*1. CAR*
II. AKTIVA PRODUKTIF						***II. EARNING ASSETS***
2. Aktiva Produktif Bermasalah	3,48	5,36	10,22	10,91	13,43	*2. Non Performing Earning Assets*
3. PPAP terhadap Aktiva Produktif	3,34	4,86	9,64	10,42	13,44	*3. PPAP on Earning Assets*
4. CKPN terhadap Aset Produktif	2,33	3,41	7,44	8,16	4,73	*4. Allowance for Impairment losses on Earning Assets*
5. NPL (*Gross*)	5,06	7,45	14,72	15,03	9,63	*5. NPL (Gross)*
6. NPL *Netto*	2,00	2,44	3,79	3,95	2,99	*6. Net NPL*
III. RENTABILITAS						***III. Profitability***
7. Laba Terhadap *Asset* (ROA)	1,35	1,24	0,61	-0,61	2,60	*7. Return on Asset(ROA)*
8. Laba Terhadap Modal (ROE)	7,71	7,65	4,37	8,06	13,66	*8. Return on Equity (ROE)*
9. Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	7,00	6,82	7,16	7,01	7,51	*9. Net Interest Margin(NIM)*
10. BOPO	85,18	87,77	94,35	106,54	80,22	*10. OEOI*
IV. LIKUIDITAS						***IV. LIQUIDITY***
11. Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,30	78,90	80,12	86,23	83,03	*11. Loan to Deposit Ratio (LDR)*
12. Nilai Liquidity Coverage Rasio (LCR)						*12. Value of Liquidity Coverage Ratio (LCR)*
a. LCR Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*a. Individual LCR*
b. LCR Konsolidasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*b. LCR Consolidation*
13. Nilai Leverage Ratio (LR)						*13. Value of Leverage Ratio (LR)*
a. LR Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*a. Individual LR*
b. LR Konsolidasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*b. LR Consolidation*
14. Nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR)						*14. Net Stable Funding Ratio (NSFR) Value*
a. LR Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*a. Individual LR*
b. LR Konsolidasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*b. LR Consolidation*
15. CASA	87,07	86,54	85,89	80,93	83,28	*15. CASA*
16. Informasi obligasi, sukuk, obligasi konversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*16. Bond, sukuk, bond information*
B. Kepatuhan (*Compliance*)						***conversion***
I. a. Persentase pelanggaran BMPK						*I.a. Percentage of LLL violations*
1. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*1. Related Parties*
2. Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*2. Non-Related Parties*
b. Persentase pelampauan BMPK						*b. Percentage of excess LLL*
1. Pihak terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*1. Related parties*
2. Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*2. Non-Related Parties*
II. Giro Wajib Minimum (GWM)						*II. Statutory Reserves (GWM)*
1. GWM Utama Rupiah	8,80	8,10	7,93	7,43	83,03	*1. Main Rupiah Statutory Reserves*
2. GWM Valuta asing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*2. Foreign Exchange Statutory Reserves*
III. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*III. Overall Net Open Position (NOP)*

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR)

-3,51% (yoy)

Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum tahun 2019 sebesar 21,43% atau menurun sebesar -3,51% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Minimum Capital Adequacy Ratio for 2019 is 21.43% or decrease of -3.51% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

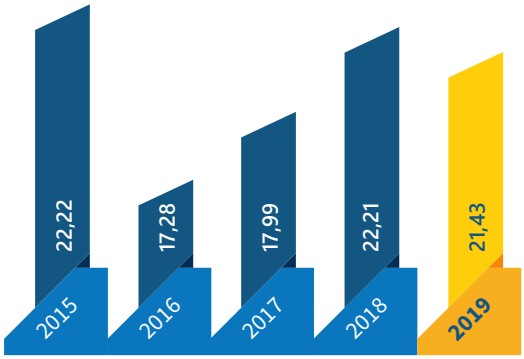

NPL *Gross*
Gross NPL

-32,08% (yoy)

Rasio NPL *Gross* tahun 2019 sebesar 5,06% atau menurun sebesar -32,08% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Gross NPL ratio in 2019 is 5.06% or a decrease of -32.08% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

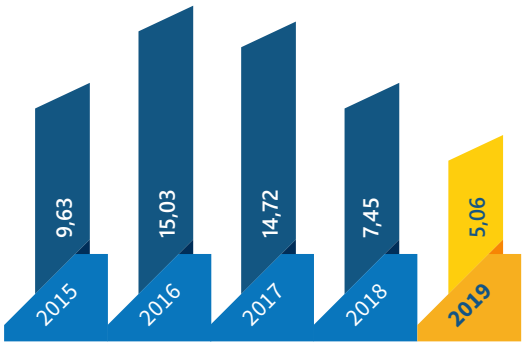

NPL *Netto*
Net NPL

-18,03% (yoy)

Rasio NPL *Netto* tahun 2019 sebesar 2,00% atau menurun sebesar -18,03% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Net NPL ratio in 2019 is 2.44% or a decrease of -18.03% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

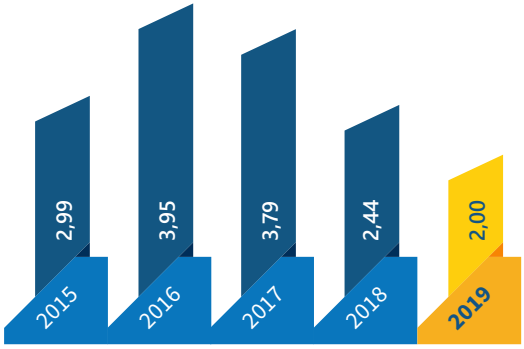

Laba terhadap Aset (ROA)
Return on Asset (ROA)

8,87% (yoy)

Rasio laba terhadap aset (ROA) tahun 2019 sebesar 1,35% atau meningkat sebesar 8,87% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Return on Asset ratio (ROA) in 2019 is 1.35% or an increase of 8.87% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

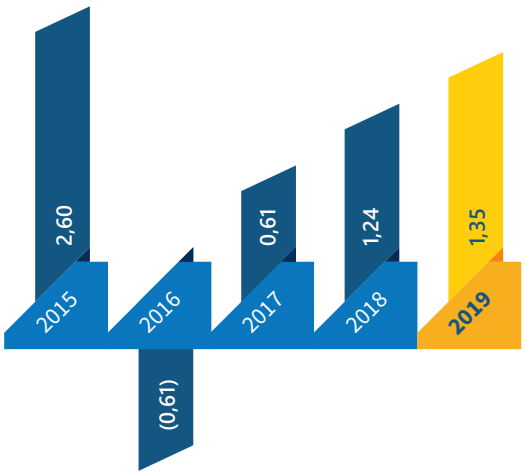

Laba terhadap Modal (ROE)
Return on Equity (ROE)

0,78% (yoy)

Rasio laba terhadap modal (ROE) tahun 2019 sebesar 7,71% atau meningkat sebesar 0,78% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Return on Equity ratio (ROE) in 2019 is 7.71% or an increase of 0.78% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

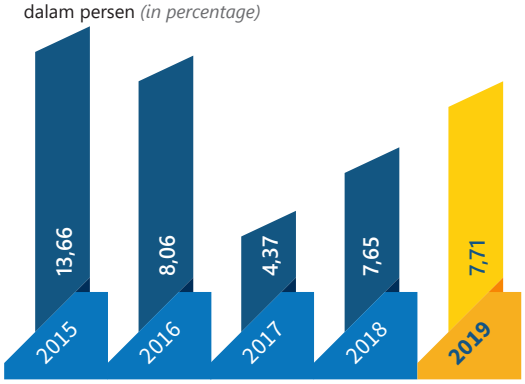

Pendapatan Bunga terhadap Aset
Net Interest Margin

2,64% (yoy)

Rasio pendapatan bunga terhadap aset tahun 2019 sebesar 7,00% atau meningkat sebesar 2,64% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Net Interest Margin ratio for assets in 2019 is 7.00% or an increase of 2.64% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

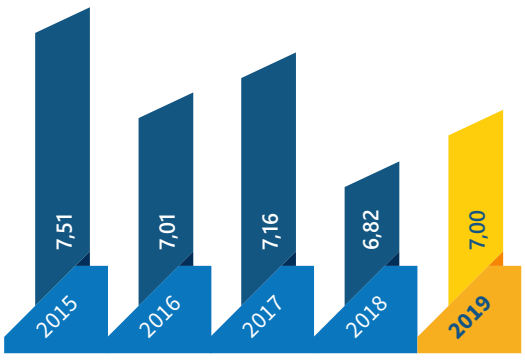

BOPO
Operating Expenses to Operating Incomes

-2,95% (yoy)

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tahun 2019 sebesar 85,18% atau menurun sebesar -2,95% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Operating expenses to operating income ratio in 2019 is 85.18% or an decrease of -2.95% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

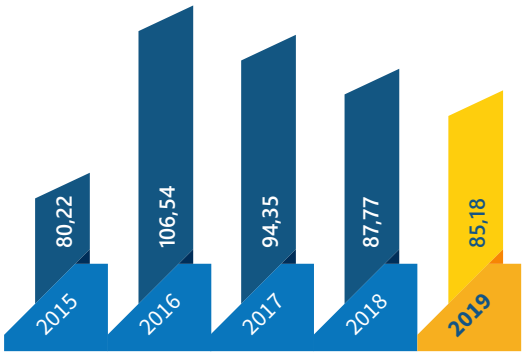

LDR
Loan to Deposit Ratio

-10,90% (yoy)

Rasio LDR tahun 2019 sebesar 70,30% atau menurun sebesar -10,90% (yoy) dari tahun sebelumnya.

LDR ratio in 2019 is 70.30% or an decrease of -10.90% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

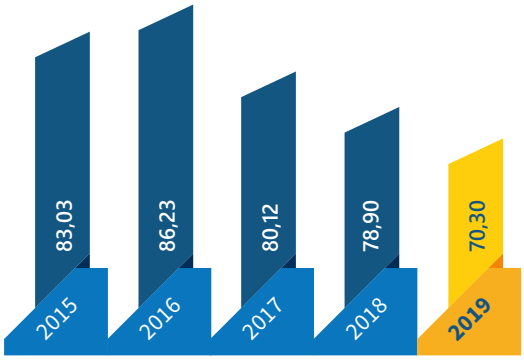

CASA
Current Accout Saving Account

1,37% (yoy)

Rasio CASA tahun 2019 sebesar 87,07% atau meningkat sebesar 1,37% (yoy) dari tahun sebelumnya.

CASA ratio in 2019 is 87.07% or an increase of 1.37% (yoy) from the previous year.

dalam persen *(in percentage)*

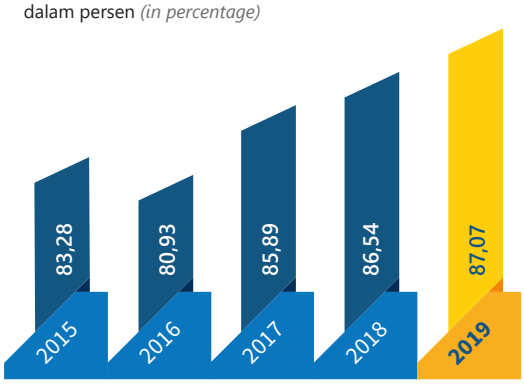

Ikhtisar kinerja lainnya
Other Performance Highlight

Ikhtisar Kinerja Lainnya	2019	2018	2017	2016	2015	*Other Performance Overview*
JUMLAH PEGAWAI	**2.421**	**2.462**	**2.565**	**2.701**	**2.590**	***TOTAL EMPLOYEES***
JARINGAN KANTOR	**220**	**216**	**223**	**222**	**203**	***OFFICE NETWORK***
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	*Head Office*
Kantor Cabang	36	36	37	37	35	*Branch offices*
Kantor Cabang Pembantu	66	66	70	73	74	*Sub Branch offices*
Kantor Kas	115	113	113	109	91	*Cash offices*
Mobil Kas Keliling	2	2	2	2	2	*Mobile Cash Car*
DELIVERY CHANNEL	**583**	**522**	**506**	**574**	**561**	***DELIVERY CHANNEL***
Anjungan Tunai Mandiri	365	314	301	296	296	*Automated Teller Machines*
EDC	83	95	95	176	176	*EDC*
CDM	8	8	8	8	8	*CDM*
Kasda *Online*	19	19	19	19	19	*Kasda Online*
Samsat *Online*	23	23	23	23	23	*Samsat Online*
Kartu Pegawai Elektronik	23	23	23	22	19	*Electronic Employee Card*
CMS	19	5	4	3	0	*CMS*
Payment Point	38	28	28	25	20	*Payment Point*
Kas Titipan Bank Indonesia	5	5	5	1	0	*Cash for Bank Indonesia Deposits*
OPINI KANTOR AKUNTAN PUBLIK	**Wajar Tanpa Pengecualian** ***Unqualified***	**Wajar Tanpa Pengecualian** ***Unqualified***	**Wajar Tanpa Pengecualian** ***Unqualified***	**Wajar Tanpa Pengecualian** ***Unqualified***	**Wajar Tanpa Pengecualian** ***Unqualified***	***PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE OPINION***

Ikhtisar Efek lainnya
Other Stocks Highlight

Informasi Harga Saham

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume perdagangan.

Stock Price Information

As of the end of December 2019, Bank Papua does not issue shares and is not listed in the capital market, so there is no relevant information regarding the number of shares outstanding, market capitalization, highest, lowest and closing stock prices and trading volume.

Informasi Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/ obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Bond, Sukuk or Conversion Bond Information

As of the end of December 2019, Bank Papua does not issue bonds, sukuk or convertible bonds, so there is no information about the number of bonds / sukuk / convertible bonds outstanding, interest rates, maturity dates and bond / sukuk ratings.

Peristiwa Penting
Important Events

8 Januari 2019
Lepas Sambut Dewan Komisaris Bank Papua (Komisaris Utama & Komisaris)
January 8, 2019
Farewell of Bank Papua Board of Director (President Commissioner & Commissioner)

10 Januari 2019
Audiensi Direksi Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak
January 10, 2019
Hearings of the Bank Papua's BOD with the Biak Regency Government

11 Januari 2019
Audiensi Direksi Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
January 11, 2019
Hearings of the Bank Papua's BOD with the Puncak Jaya Regency Government

12 Januari 2019
Kunjungan Direksi Dalam Rangka Natal Bersama BMPD Jayapura
January 12, 2019
BOD's Visit In Christmas With BMPD Jayapura

16 Januari 2019
Pertemuan Antara Direksi Bank Papua Dengan Asisten 1, Pemerintah Provinsi Papua
January 16, 2019
Meeting Between the BOD of Bank Papua With 1st Assistant, Government of the Papua Province

16 Januari 2019
Penandatanganan MoU ***(Memorandum Of Understanding)*** Antara Bank Papua Dengan Persipura Jayapura
January 16, 2019
Signing Of MoU (Memorandum Of Understanding) Between Bank Papua And Persipura Jayapura

25 Januari 2019
Pelaksanaan Business Meeting Bank Papua (Tema: *Transformation Growth And Sustainable*)
January 25, 2019
Implementation of Business Meeting Bank Papua (Theme: Transformation Growth And Sustainable)

29 Januari 2019
Penandatanganan Perjanjian Kredit Antara Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw
January 29, 2019
Signing of Loan Agreement Between Bank Papua With Tambrauw Regency Government

29 Januari 2019
Penandatanganan PKS Antara Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tentang Penerimaan Penyetoran Retribusi Non Tunai Pasar Sentral Hamadi
January 29, 2019
Signing of SMEs Between Bank Papua With Jayapura Municipal Government On Acceptance Of Non-Cash Retirement Deposits Of Hamadi Central Market

5 Februari 2019

Kunjungan Direksi Ke Nasabah-Nasabah Prima Bank Papua Dalam Rangka Silahturahmi Memperingati Tahun Baru China (Imlek)

February 5, 2019

BOD Visit to Bank Papua Prime Customers in Order to Celebrate Chinese New Year (China)

01 Maret 2019

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Konsumtif Antara Bank Papua Dengan PT. Asuransi Jasindo

March 01, 2019

Signing of Consolidated Credit Insurance Cooperation Agreement Between Bank Papua With PT. Jasindo Insurance

11 Maret 2019

Pertemuan Direksi Dengan Kementerian PUPR Prov. Papua terkait Pembahasan Perumahan yang terkena dampak dari banjir bandang di Sentani

March 11, 2019

BOD's Meeting with the Ministry of PUPR Papua Province related to mortgage discussion affected by floods in Sentani

17 Maret 2019

Kunjungan Direksi Dalam Rangka Meninjau Lokasi Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kabupaten Jayapura, Sentani

March 17, 2019

BOD's Visit In order to review the Floodplain Locations in Jayapura Regency, Sentani

20 Maret 2019

Pemberian Bank Papua Peduli Sentani Kepada Korban Banjir Bandang

March 20, 2019

Bank Papua Offers Concerned Victims Of Flood Victims

27 Maret 2019

Briefing Direksi Bersama Pemimpin dan Seluruh Staff di Kantor Cabang Sorong

March 27, 2019

BOD's Briefing with Leaders and All Staff at the Sorong Branch Office

29 Maret 2019

RUPS Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2018 (Tema: Transformasi- *Growth And Sustainable*) Di Waisai

March 29, 2019

EGMS Bank Papua Financial Report for fiscal yerar 2018 (Themes: Transformation - Growth And Sustainable) In Waisai

13 April 2019

Perayaan HUT Bank Papua Ke- 53 Bagi Seluruh Insan Bank Papua

April 13, 2019

53rd Bank Papua Anniversary for All Bank Papua human

13 April 2019

Family Gathering Bank Papua 2019 Dalam Rangka Perayaan HUT Bank Papua Ke- 53

April 13, 2019

Family Gathering Bank Papua 2019 In Celebration of 53rd Bank Papua Anniversary

02 Mei 2019

Penandatanganan Perjanjian Kredit Antara Bank Papua PT. Jasa Marga Solo Ngawi

May 02, 2019

Signing Loan Agreement Between Bank Papua PT. Jasa Marga Solo Ngawi

09 Mei 2019

Briefing Direktur Bisnis Bersama Pemimpin Cabang dan Seluruh Staff KC. Timika

May 09, 2019

Briefing of Business Director with Branch Manager and All Staff. of Timika Branch

09 Mei 2019

Supervisi Direktur Bisnis di Timika, Pembiayaan Perumahan Kepada Nasabah

May 9, 2019

Supervision of the Business Operation Director in Timika, Mortgage loan to Customers

16 Mei 2019

Kegiatan Media *Gathering* Sekaligus Buka Puasa Bersama Antara Manajemen Bank Papua Dengan Awak Media Di Kantor Pusat Bank Papua, Jayapura

May 16, 2019

Media Gathering Activities and Joint Break Fasting Between Bank Papua Management and Media Crews at Bank Papua Head Office, Jayapura

21 Mei 2019

Sosialisasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Prov Papua Terkait (1). Korupsi, (2). Gratifikasi, (3). Optimalisasi Pengelolaan Kasda, (4). Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pajak PHRI, BPHTB, Pbb P2 dan Penerimaan Lainnya

May 21, 2019

Socialization of KPK (Corruption Eradication Commission) Related Provinces of Papua (1). Corruption, (2). Gratuities, (3). Optimizing Kasda Management, (4). Optimization of Regional Revenue Through PHRI Tax, BPHTB, PB P2 and Other Revenues

24 Mei 2019

Kegiatan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Di *Banking Hall* Kantor Pusat Bank Papua, Jayapura

May 24, 2019

Break Fasting Activities with the Financial Services Industry Communication Forum (FKIJK) at the Banking Hall of Bank Papua Head Office, Jayapura

01 Juni 2019

Pertandingan Persahabatan Antara Bank Papua Dengan PT. Freeport Indonesia

June 1, 2019

Friendship Match between Bank Papua and PT. Freeport Indonesia

15 Juni 2019

Halal Bi Halal Bank Papua

June 15, 2019

Halal Bi Halal Bank Papua

19 Juni 2019

Pertemuan Antara Manajemen Bank Papua Dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)

June 19, 2019

Meeting Between Bank Papua Management and the Indonesian Supreme Audit Board (BPK RI)

20 Juni 2019

Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan Prof. Dr. Yohana Susana Yembise PhD di Kantor Pusat Bank Papua, Jayapura

June 20, 2019

The Visit of the Minister of Women's Empowerment Prof. Dr. Yohana Susana Yembise PhD at Bank Papua Head Office, Jayapura

21 Juni 2019

Penyerahan Gerobak Pinang Kepada Nasabah Binaan Bank Papua (Mama-Mama Penjual Pinang)

June 21, 2019

Handover of Pinang Carts to Bank Papua Assisted Customers (Pinang Mothers Sales)

25 Juni 2019

Anjangsana Ke Lapas Abepura Dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan & Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440H

June 25, 2019

Visit to Abepura Prison in the context of the Holy Month of Ramadan & Welcoming Eid al-Fitr 1440H

25 Juni 2019

Penandatanganan PKS Antara Bank Papua Dengan PT. Taspen (Persero) Terkait Pembayaran Tabungan Hari Tua , Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank

June 25, 2019

MOU Signing Between Bank Papua and PT. Taspen (Persero) Related to Payments for Old Age Savings, Pension, Work Accident Guarantee and Death Insurance through a Bank Account

19 Juli 2019

Pertemuan Direksi Dengan Asuransi PT. Purna Artanugrah

July 19, 2019

Meeting of the BOD with Insurance PT. Purna Artanugrah

24 Juli 2019

Penandatanganan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah (*Cash Management System*) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

July 24, 2019

Signing of the Use of the Regional Cash Application (Cash Management System) in the Financial Management of the Regional Government of Peguunungan Bintang Regency

05 Agustus 2019

Festival Teluk Humbolt

August 5, 2019

Humbolt Bay Festival

13 Agustus 2019

Ngopi Bersama Media

August 13, 2019

Coffee with the Media

14 Agustus 2019

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bank Papua Dengan Bank BRI (Persero) Tbk Tentang Penerbitan *Corporate Card* (Kartu Kredit)

August 14, 2019

Signing of the Cooperation Agreement between Bank Papua and Bank BRI (Persero) Tbk Regarding the Issuance of Corporate Cards (Credit Cards)

17 Agustus 2019

Upacara Bendera 17 Agustus 2019, Dalam Rangka Hari Kemerdekaan RI Ke-74, Kantor Pusat Bank Papua, Jayapura

August 17, 2019

Flag Ceremony on August 17, 2019, in the framework of the 74th Indonesian Independence Day, Bank Papua Head Office, Jayapura

23 September 2019

Pembukaan *In House Training* Orientasi PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu) Tahun 2019 Dihadiri Oleh Direktur Keuangan Dan Pejabat Eksekutif

September 23, 2019

Opening of 2019 PKWT Orientation (Specific Contract Employee) In House Training Attended by Finance Director and Executive Officer

24 September 2019

Prudential Meeting Antara Bank Papua Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Prov. Papua Dan Papua Barat

September 24, 2019

Prudential Meeting Between Bank Papua and the Financial Services Authority (OJK) Representative Papua and West Papua Province

25 September 2019

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Melalui CMS (*Cash Management System*) Kabupaten Keerom

September 25, 2019

Socialization of the Implementation of Non-Cash Transactions through CMS (Cash Management System) of Keerom Regency

30 September 2019

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Papua Dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Terkait *Payroll* Gaji

September 30, 2019

Signing of Cooperation Agreement between Bank Papua and the Government of West Papua Province Regarding Salary Payroll

8 Oktober 2019

Kegiatan UMKM *Go* Digital Dalam Rangka Jayapura Menuju *Smart City* Dihadiri Oleh Manajemen Bank Papua, Pemerintah Kota Jayapura Dan Bank Indonesia

October 8, 2019

Go Digital SME Activities in the Framework of Jayapura Towards Smart City Attended by the Management of Bank Papua, Jayapura Municipal Government and Bank Indonesia

14 Oktober 2019

Audiensi Antara Manajemen Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen

October 14, 2019

Hearings between Bank Papua Management and the Regional Government of Waropen Regency

21 Oktober 2019

Penyerahan Hadiah Kepada Pemenang Lomba Kebersihan Dalam Rangka HUT Bank Papua Ke 53

October 21, 2019

Awarding Prizes to the Winners of the Cleanliness Competition in the Context of the 53rd Bank Papua Anniversary

23 Oktober 2019

Audiensi Antara Manajemen Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga

October 23, 2019

Hearings between Bank Papua Management and the Regional Government of Nduga Regency

24 Oktober 2019
Pemberian Bantuan CSR Berupa 6 Unit Pondok Kelapa Di Bukit Jokowi

October 24, 2019
Providing CSR Donation in the Form of 6 units Pondok Kelapa in Bukit Jokowi

30 Oktober 2019
Penyerahan 1 (Satu) Unit Truk Sampah Kepada Pemda Kabupaten Supiori

October 30, 2019
Submission of 1 (One) Garbage Truck Unit to Supiori Regency Government

02 November 2019
Pembukaan Porsebank 2019

November 2, 2019
Opening of Porsebank 2019

06 November 2019
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Papua Dengan Jamkrida

November 6, 2019
Signing of the Cooperation Agreement between Bank Papua and Jamkrida

14 November 2019
Malam Penganugerahan *Annual Report Award* Dan Pengumuman PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Sebagai Juara II *Annual Report Award* , Kategori Bumd Non Listed

November 14, 2019
Awarding Night of Annual Report Award and Announcement of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua As Second Place Winner for Annual Report Award, Non Listed Bumd Category

15 November 2019
Penandatanganan Perjanjian Kredit Antara Bank Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan

November 15, 2019
Signing of Loan Agreement between Bank Papua and the Regional Government of South Manokwari Regency

16 November 2019
Perayaan HUT Kabupaten Manokwari Selatan, Ransiki

November 16, 2019
South Manokwari Regency Anniversary Celebration, Ransiki

18 November 2019
Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sorong

November 18, 2019
Promulgation of Corruption Prevention in the Context of Increasing Local Revenue Receipts (PAD) in Sorong

23 November 2019
Penyelenggaraan SEA (*Service Excellence Award*) Bank Papua (Seleksi 6 Cluster)

November 23, 2019
Implementation of Bank Papua SEA (Service Excellence Award) (6 Cluster Selection)

01 Desember 2019

Direktur Keuangan Bank Papua Menjadi Narasumber Dalam *Workshop* Yang Diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Terkait *Workshop* Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui *Interoperability*/Interkoneksi Aplikasi *E-Government*

December 1, 2019

Finance Director of Bank Papua Becomes a Speaker in a Workshop Organized by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Related to the Workshop on Improving the Internal Control System of Regional Financial Management through Interoperability / Interconnection of E-Government Applications

05 Desember 2019

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (Bank Indonesia Award)

December 5, 2019

Bank Indonesia Annual Meeting (Bank Indonesia Award)

05 Desember 2019

Exit Meeting OJK di Hotel Fame Jayapura

December 5, 2019

OJK's Exit Meeting at Jayapura Fame Hotel

06 Desember 2019

Penerimaan Penghargaan *Economic Review* 2019 Oleh Direktur Bisnis Bank Papua

December 6, 2019

Acceptance of the 2019 Economic Review Award by the Business Operation Director of Bank Papua

10 Desember 2019

Peresmian Kantor Kas Wami di Wilayah Operasional Kantor Cabang Nabire

December 10, 2019

Inauguration of the Wami Cash Office in the Nabire Branch Office Operational Area

11 Desember 2019

Direktur Utama Memberikan Materi Terkait Transformasi Bank Papua Kepada Peserta ODP Bank Papua di Jakarta

December 11, 2019

President Director Proceeding Related to Bank Papua Transformation to Bank Papua ODP Participants in Jakarta

12 Desember 2019

Konferensi Pers Bank Papua Terkait Ketersediaan Likuiditas Akhir Tahun

December 12, 2019

Bank Papua Press Conference Regarding Availability of Year-End Liquidity

13 Desember 2019

Peresmian *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori

December 13, 2019

Inauguration of Supiori Regency Government Cash Management System (CMS)

16 Desember 2019

Peresmian *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah Kabupaten Biak

December 16, 2019

Inauguration of the Cash Management System (CMS) of the Regional Government of Biak Regency

20 Desember 2019

Perjanjian Kerja Sama Antara Bank DKI dengan Bank Papua untuk Kerjasama *Payment* Jak-one

December 20, 2019

Cooperation Agreement Between Bank DKI and Bank Papua for Payment Cooperation Jak-one

31 Desember 2019

Old And New (Perayaan Tahun Baru) Manajemen dan Seluruh Staff Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Jayapura

December 31, 2019

Old And New (New Year Celebration) Management and All Staff of Jayapura Head Office and Main Branch Offices

- 02 -
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Director Report

Bank Papua mengemban amanah sebagai
roda penggerak perekonomian dan pionir pembangunan
di tanah Papua.

Bank Papua carries the mandate as
the booster of the economy and the pioneers of
development in the land of Papua.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si
Komisaris Utama
President Commissioner

Syaloom,
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Bank Papua mampu melalui tahun 2019 yang penuh tantangan ini dengan baik serta mencatatkan kinerja yang memuaskan. Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Direksi serta semua insan Bank Papua sehingga mampu menyelesaikan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 dan *Corporate Plan* dengan baik.

Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan dan penasehatan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Papua sepanjang tahun 2019.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Di tahun 2019, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Bank Papua dalam menjalankan operasional Perbankan telah sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan Manajemen Risiko, serta memberikan masukan kepada manajemen untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. Pengawasan juga difokuskan pada pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), *Human Capital management*, *Corporate Culture* dan *Risk Management & Asset Recovery*. Selain kegiatan pengawasan terhadap target yang telah telah ditetapkan, Dewan Komisaris juga memastikan bahwa pelaksanaan 3 Bidang Pedukung pelaksanaan RBB, yaitu 1) Proses & Organisasi Bisnis, 2) Kanal Distribusi & Produk, dan 3)Teknologi Pendukung, telah dilaksanakan secara terencana, efektif dan menyeluruh sehingga semua kegiatan operasional Bank senantiasa berjalan dalam kondisi yang baik, aman dan bijaksana.

Syaloom,
Peace be with all of us,

Our praise and gratitude for the presence of God Almighty who has bestowed His gift upon us all so that the Bank Papua is able to go through this challenging 2019 well and record a satisfying performance. The Board of Commissioners also appreciates the steps taken by the Board of Director and all people of Bank Papua so that they are able to complete the performance plans and targets set in the 2019 Bank Business Plan and Corporate Plan properly.

On behalf of the Board of Commissioners, allow us to submit a report of responsibility for the implementation of supervisory and advisory tasks to the Board of Director in carrying out Bank Papua's business activities throughout 2019.

Assessment of Board of Director's Performance

In 2019, the Board of Commissioners ensured that the Board of Director of Bank Papua in carrying out banking operations were in accordance with the principles of Good Corporate Governance and Risk Management, and provided input to management to pay attention to the prudential principle in managing the company. Supervision is also focused on achieving the goals and targets set in the Bank's Business Plan (BBP), Human Capital management, Corporate Culture and Risk Management & Asset Recovery. In addition to monitoring the targets that have been set, the Board of Commissioners also ensures that the implementation of 3 Supporting Areas of BBP implementation, namely 1) Business Processes & Organizations, 2) Distribution Channels & Products, and 3) Supporting Technology, has been implemented in a planned, effective and comprehensive so that all operational activities of the Bank are always running in good, safe and prudent conditions.

Tinjauan Makro Ekonomi

Dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi, salah satu yang menjadi pertimbangan Dewan Komisaris adalah kondisi makro ekonomi. Di tahun 2019 ini, berbagai isu global masih terus berkembang dinamis dan membayangi prospek perekonomian global, terutama adanya perubahan kebijakan dari negara dengan perekonomian besar.

Pada sektor perbankan, sentimen pasar global berdampak pada ketatnya likuiditas di industri perbankan dan akhirnya menyebabkan kenaikan biaya dana bank. Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berorientasi pada perekonomian dalam negeri akhirnya berujung pada perang dagang yang berkepanjangan. Perang dagang ini akhirnya berdampak pada perdagangan dunia serta menciptakan ketidakpastian pada aktivitas investasi serta aliran modal termasuk Indonesia.

Perlambatan aktivitas manufaktur terjadi di berbagai negara dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus terkoreksi. Perang dagang AS-Tiongkok sebagai salah satu isu yang cukup kuat memang sudah mulai memasuki tahapan negosiasi dan kompromi. Namun demikian, bercermin dari kesepakatan AS-Tiongkok di forum G-20 Osaka yang meleset dan tidak berkelanjutan, kita tentu harus siap jika sewaktu-waktu muncul momentum yang dapat menimbulkan syok pada perekonomian.

Potensi ketidakpastian masih akan terus membayangi. Dengan beragam dinamika dan pelemahan yang terjadi secara luas di perekonomian global, banyak negara yang menerapkan kebijakan yang akomodatif untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih dalam. *Outlook* pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 diperkirakan melambat pada tingkat terendah sejak krisis keuangan global, dan diperkirakan membaik di 2020 meskipun risiko yang membayangi tinggi.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,17% (yoy), sebagai pengaruh dari melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor yang masih belum pulih, meskipun konsumsi masih tumbuh cukup baik

Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga terefleksi pada kredit yang tumbuh moderat sebesar 6,08% (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 11,75% (yoy). Meski demikian, fungsi intermediasi perbankan berjalan baik disertai kondisi likuiditas yang memadai dengan didukung pertumbuhan DPK sebesar 6,54% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,45%

Macroeconomic Review

In evaluating the performance of the Board of Director, one of the considerations of the Board of Commissioners is the macroeconomic condition. In 2019, various global issues will continue to develop dynamically and overshadow the prospects of the global economy, especially the changes in policies from countries with large economies.

In the banking sector, global market sentiment has an impact on the tight liquidity in the banking industry and ultimately leads to an increase in the cost of bank funds. Trade policies that are increasingly protective and oriented towards the domestic economy ultimately lead to a prolonged trade war. This trade war eventually impacted world trade and created uncertainty in investment activities and capital flows including Indonesia.

Slowing manufacturing activity occurred in various countries and projections of global economic growth continue to be corrected. The US-China trade war as one of the strong issues has indeed begun to enter the stages of negotiation and compromise. However, reflecting on the US-China agreement at the Osaka G-20 forum which is misguided and unsustainable, we certainly must be prepared if at any time there arises a momentum that could cause shock to the economy.

The potential for uncertainty will continue to haunt. With a variety of dynamics and weaknesses that occur widely in the global economy, many countries are implementing accommodative policies to prevent a deeper economic slowdown. The outlook for global economic growth in 2019 is expected to slow at the lowest level since the global financial crisis, and is expected to improve in 2020 despite the looming risks.

Indonesia's economy in 2019 grew by 5.02 percent (yoy) compared to the previous year which grew 5.17% (yoy), as a result of slowing investment, government spending and export performance that has still not recovered, even though consumption is still growing quite well

From the banking side, the slowdown in domestic economic growth was also reflected in the moderate growth of loans of 6.08% (yoy), compared to the same period the previous year which grew 11.75% (yoy). Nevertheless, the banking intermediation function went well with adequate liquidity conditions supported by TPF growth of 6.54% (yoy), an increase compared to last year's 6.45% (yoy). Along with the easing of global financial pressures due to

(yoy). Seiring dengan meredanya tekanan keuangan global akibat rencana trade deal AS-Tiongkok tersebut dan disertai upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga kestabilan sistem keuangan melalui kebijakan yang akomodatif, persepsi terhadap prospek ekonomi domestik membaik tercermin dari penurunan ekspektasi risiko kedepan dan meningkatnya *capital inflow* khususnya ke pasar SBN. Hal tersebut membuat profil risiko perbankan masih tetap terjaga.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilaksanakan dengan baik, salah satu indikatornya adalah kinerja operasional dan keuangan pada tahun 2019 secara umum menunjukan pencapaian yang positif, antara lain;

- Peningkatan total aset menjadi sebesar Rp28.183.686 juta atau tumbuh 25,50% dengan tingkat penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,53% menjadi sebesar Rp16.060.678 juta. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 27,60% atau menjadi Rp22.960.889 juta, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp17.993.816 juta. Total ekuitas pada tahun 2019 meningkat 8,43% menjadi sebesar Rp3.438.147 juta dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.170.867 juta.
- Pendapatan operasional bersih yang berasal dari bunga meningkat 2,66% menjadi sebesar Rp1.582.079 juta jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.541.013 juta. Namun peningkatan pendapatan operasional dan bunga tidak sebanding dengan perolehan laba komprehensif periode berjalan yang mengalami penurunan sebesar -53,56% menjadi sebesar Rp168.492 juta dibandingkan tahun 2018 yang disebabkan oleh meningkatnya beban komprehensif.
- Beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp180.623 juta menurun sebesar -65,96% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp530.692 juta. Dengan pertumbuhan yang cukup seimbang antara pinjaman dan DPK ini, maka nilai rasio LDR Bank Papua tahun 2019 sebesar 70,30%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 78,90%.
- NIM tercatat meningkat menjadi sebesar 7,00%, rasio BOPO membaik menjadi sebesar 85,18%, ROA sebesar 1,35% dan ROE sebesar 7,71%. Rasio NPL Net pada tahun 2019 sebesar 2,00% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,44%. Dalam hal kecukupan modal, kemampuan Bank Papua dalam memenuhi kecukupan modal pada tahun 2019 adalah sebesar 21,43% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 22,21% yang menunjukkan bahwa Bank Papua memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi semua kewajibannya melalui kecukupan modal yang dimiliki.

the US-China trade deal plan and the efforts of the Government and related authorities in maintaining financial system stability through accommodative policies, perceptions of the improving domestic economic outlook are reflected in the decline in future risk expectations and rising capital inflow especially to the SBN market. This makes the banking risk profile still maintained.

Operational and Financial Performance

The directives given by the Board of Commissioners to the Board of Director have been implemented well, one of the indicators being that operational and financial performance in 2019 in general showed positive achievements, including:

- *Increase in total assets to Rp28,183,686 million or grow 25.50% with a loan portfolio growth of 13.53% to Rp16,060,678 million. Third party funds (TPF) grew by 27.60% or to Rp22,960,889 million, compared to 2018 amounting to Rp17,993,816 million. Total equity in 2019 increased by 8.43% to Rp3,438,147 million compared to 2018 of Rp3,170,867 million.*
- *Net operating income from interest increased by 2.66% to Rp1,582,079 million compared to 2018 which was Rp1,541,013 million. However, the increase in operating income and interest was not proportional to the comprehensive earning of the current period which decreased by -53.56% to Rp168,492 million compared to 2018 due to increased comprehensive expenses.*
- *Allowance for impairment losses (CKPN) on financial assets in 2019 amounted to Rp180,623 million men -65.96% compared to 2018 amounting to Rp530,692 million. With this fairly balanced growth between loans and deposits, the Bank Papua LDR ratio in 2019 is 70.30%, lower than in 2018 of 78.90%.*
- *NIM increased to 7.00%, OEOI ratio improved to 85.18%, ROA of 1.35% and ROE of 7.71%. Net NPL ratio in 2019 is 2.00% or lower than 2018 of 2.44%. In terms of capital adequacy, the ability of Bank Papua to meet capital adequacy ratio in 2019 is 21.43% which is lower than in 2018 of 22.21% which shows that Bank Papua has sufficient ability to repay all liabilities through the adequacy of capital owned .*

Pencapaian Realisasi Target Perseroan

Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen beserta seluruh jajarannya sepanjang tahun 2019 cukup baik dan memuaskan, hal tersebut tercermin dari perbaikan kinerja keuangan Bank dibandingkan tahun sebelumnya serta pencapaian aspek operasional dan keuangan yang berkaitan erat dengan perkembangan usaha bank sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RBB Bank Papua 2019 dan *Core Plan* Bank Papua 2019.

Pencapaian target perseroan pada tahun 2019 telah menunjukan hasil yang positif, antara lain;

- Total asset tumbuh melebihi target yaitu mencapai Rp28.183.686 melampaui target 119,90 Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp22.960.889 atau 123,20% melebihi target. Kredit yang disalurkan sebesar Rp16.060.678 juta, melebih target 102,27%.
- Dari segi rasio, bank berhasil menekan BOPO menjadi 85,18% dari tahun sebelumnya sebesar 87,77%. Sedangkan ROE berhasil ditingkatkan menjadi 7,71%

Tingkat Kesehatan Bank

Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara *self assessment*. Tingkat Kesehatan Bank digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola bank dalam suatu periode tertentu dibawah kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Selama tahun 2019 secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank memperoleh **peringkat 2**. Dengan tingkat kesehatan Bank **Komposit 2 (dua)** dan Profil Risiko **Moderat**, artinya kondisi Bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, antara lain:

1. Profil Risiko *(Risk Profil).*
2. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance).*
3. Rentabilitas *(Earnings).*
4. Permodalan (*Capital*).

Hal ini mencerminkan bahwa Kinerja Bank tergolong baik dan manajemen mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Achievement of the Company's Target Realization

In general, the Board of Commissioners considers that the performance that has been carried out by management and all of its staff throughout 2019 is quite good and satisfying, this is reflected in the improvement of the Bank's financial performance compared to the previous year and the achievement of operational and financial aspects that are closely related to the development of the bank's business as has been formulated in the 2019 Bank Papua Business Plan and the 2019 Bank Papua Core Plan.

The company's target achievement in 2019 has shown positive results, including;

- *Total assets grew beyond the target, reaching Rp28,183,686 exceeding the target of 119.90 Third Party Funds (TPF) reaching Rp22,960,889 or 123.20% exceeding the target. Loans amounted to Rp16,060,678 million, exceeding the target of 102.27%.*
- *In terms of ratio, the bank managed to push OEOI to 85.18% from 87.77% the previous year. Whereas ROE was successfully increased to 7.71%*

Bank Sound Rating

The Bank conducts a Sound Level rating by Self-Assessment. Bank Soundness is used to measure the ability of management to manage banks in a certain period under conditions of the economy and the financial industry.

*During 2019, overall the Bank's Sound Level is **ranked 2**. With the Bank sound level of 2 (two) composite and Moderate Risk Profile, it means that the Bank's condition is generally quite sound so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions and other external factors reflected by the ranking of assessment factors, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 14 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Rating of Commercial Banks, including:*

1. *Risk Profile.*
2. *Implementation of GCG (Good Corporate Governance).*
3. *Profitability (Earnings).*
4. *Capital.*

This reflects that the Bank's performance is relatively good and management is able to overcome the negative effects of economic conditions and the financial industry.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Core Plan* Bank Papua, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya strategi perseroan yang telah dirumuskan dalam RBB dan *Core Plan*, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris menerapkan pengawasan yang berkesinambungan dengan model berjenjang sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pandangan Atas Prospek Usaha Bank 2020

Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi telah berdasarkan pada jalur dan asumsi yang tepat dan realistis dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian domestik dan global. Dewan Komisaris memproyeksikan bahwa strategi dan rencana kerja tersebut dapat tercapai dengan mempertahankan kinerja yang baik, memanfaatkan peluang-peluang yang ada serta memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Bank Papua dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi dan perbankan baik nasional maupun global sehingga Bank Papua bisa tetap bertumbuh berkelanjutan memberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Papua.

Penerapan *Whistleblowing System*

Dalam usahanya untuk menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, menghindari fraud dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi, Bank Papua telah mensosialisasikan penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dengan membuka saluran pengaduan melalui telepon ataupun *e-mail*.

Dewan Komisaris memantau selama 3 bulan sekali dan memastikan bahwa WBS telah berjalan secara efektif. Sepanjang tahun 2019 tidak ada pengaduan yang diterima melalui sarana yang telah disediakan kepada Departemen *Anti Fraud* (SKAF). Namun demikian, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa jikalau ada laporan yang masuk maka akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi dengan baik dan jika terbukti telah terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Supervision on the Implementation of the Company's Strategy

Based on the Bank Business Plan (BBP) and Bank Papua Core Plan, the Board of Commissioners has the duty and responsibility to carry out supervision of the company's policies and strategies that have been formulated in the BBP and Core Plan, in carrying out its duties and responsibilities the Board of Commissioners implements continuous supervision with a tiered model in accordance with its scope.

View of the Bank's Business Prospects in 2020

Based on the assessment of the Board of Commissioners, the business prospects that have been prepared by the Board of Director have been based on appropriate and realistic paths and assumptions while still taking into account domestic and global economic conditions. The Board of Commissioners projects that the strategy and work plan can be achieved by maintaining good performance, taking advantage of existing opportunities and taking advantage of the advantages of the Bank Papua by taking into account economic and banking developments both nationally and globally so that the Bank Papua can continue to grow sustainably beneficial for all Papuans.

Implementation of Whistleblowing System

In its efforts to uphold the principles of Good Corporate Governance, avoid fraud and conduct early detection of potential fraud, Bank Papua has promoted the application of the Whistleblowing System (WBS) by opening a complaint channel by telephone or e-mail.

The Board of Commissioners monitors every 3 months and ensures that WBS is operating effectively. Throughout 2019 no complaints were received through the facilities provided to the Anti-Fraud Work Unit (SKAF). However, the Board of Commissioners always ensures that if there is a report that comes in, it will be followed up and properly investigated and if it is proven that a fraud has occurred then will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko, telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Setiap komite telah memberikan masukan dan rekomendasi yang independen, profesional dan berkualitas, yang dilengkapi dengan penjelasan latar belakang permasalahan dan argumentasi yang relevan untuk setiap permasalahan yang dibahas.

Peranan Komite Audit tercermin dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan serta tindak lanjut dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga telah melakukan kajian terhadap efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku. Selain itu, Komite audit juga telah melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit Bank Indonesia/ OJK, BPK maupun Kantor Akuntan Publik. Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 5 kali rapat, termasuk di dalamnya rapat bersama Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pejabat eksekutif dan pegawai mengacu pada Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat internal sebanyak 4 kali.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta menyampaikan rekomendasi terkait dengan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Disamping itu, keberadaan Pemantau Risiko diharapkan dalam proses pengambilan keputusan dapat lebih cermat dan teliti dalam memetakan arah perusahaan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, mendorong upaya menghindari risiko dan pengaruh terjadi kerugian baik secara finansial ataupun reputasi bank. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat internal sebanyak 2 kali.

Evaluation of Committee Performance Under the Board of Commissioners

Throughout 2019, the Committees under the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee and the Risk Oversight Committee, have carried out their respective roles and responsibilities well and provided significant and positive support for the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners . Each committee has provided input and recommendations that are independent, professional and quality, which are equipped with a background explanation of the problem and relevant arguments for each problem discussed.

The role of the Audit Committee is reflected in monitoring and evaluating planning, implementation and follow-up in ensuring the adequacy of internal controls including the adequacy of the financial reporting process. The Audit Committee has also reviewed the effectiveness and appropriateness of the audit by the Public Accounting Firm and reviewed the financial statements and other financial information in order to ensure compliance with applicable standards and regulations. In addition, the Audit Committee has also evaluated and monitored the follow-up on the results of the Bank Indonesia / OJK audit, BPK and the Public Accountant Office. During 2019, the Audit Committee held 5 meetings, including meetings with the Board of Commissioners.

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are to provide recommendations on the remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Director, including executive officers and employees, referring to the Work Guidelines for the Remuneration and Nomination Committee. During 2019, the Remuneration and Nomination Committee held 4 internal meetings.

The Risk Oversight Committee is responsible for monitoring and evaluating the planning and implementation of the Bank's risk management as well as providing recommendations related to the compatibility between risk management policies and their implementation. In addition, it is expected that the presence of Risk Monitoring in the decision making process can be more careful and thorough in mapping the direction of the company for the long term or short term, encouraging efforts to avoid risks and the effects of losses both financially and in the bank's reputation. During 2019, the Risk Oversight Committee held 2 internal meetings.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris Bank Papua di tahun 2019. Susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Changes in the Board of Commissioners Composition

There was no change in the composition of the Board of Commissioners of Bank Papua in 2019. The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2019 is as follows:

Nama	Jabatan	Masa Aktif	*Active Period*
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.Ip, M.Kp, M.Si	Komisaris Utama (Non Independen)	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No.03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tanggal 29 November 2018	*Year 2019-2021 according to the Circular of Shareholders No.03 / SK / SIRKULER-BPD / XI / 2019 dated November 29, 2019*
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan	Komisaris (Non Independen)	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No.04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tanggal 29 November 2018	*Year 2019-2021 according to Circular of Shareholders No.04 / SK / SIRKULER-BPD / XI / 2019 dated November 29, 2019*
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Komisaris Independen	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No.01/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 Tanggal 25 April 2018	*Year 2019-2021 according to Circular Shareholders Decree No.01 / SK / SIRKULER-BPD / IV / 2019 Date 25 April 2019*
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No.02/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 Tanggal 25 April 2018	*Year 2019-2021 according to Circular Shareholders Decree No.02 / SK / SIRKULER-BPD / IV / 2019 Date 25 April 2019*

Seluruh Dewan Komisaris Bank Papua berkomitmen terus meningkatkan peran aktif setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada manajemen Bank, sehingga kinerja Bank Papua terus tumbuh berkelanjutan di masa mendatang.

The entire Board of Commissioners of Bank Papua is committed to continue to increase the active role of each member of the Board of Commissioners in carrying out the supervisory and coaching functions to the management of the Bank, so that the performance of Bank Papua continues to grow sustainably in the future.

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan kami mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2019. Tidak lupa kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, nasabah, mitra usaha, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Papua atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Bank Papua akan terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan kinerja terbaiknya sehingga dapat berfungsi sebagai *agent of development* di tanah Papua.

Demikian kami sampaikan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris atas pelaksanaan usaha perseroan tahun 2019.

Appreciation

Finally, please allow us to represent the Board of Commissioners, express our gratitude for the performance and implementation of the Company's business in 2019. Do not forget, we give our highest appreciation to shareholders, customers, business partners, all stakeholders and the people of Papua for their trust and support all this time. The Board of Commissioners believes that Bank Papua will continue to achieve sustainable growth and its best performance so that it can function as an agent of development in Papua.

Thus we submit the supervisory report by the Board of Commissioners of the implementation of the company's business in 2019.

Jayapura, 31 Desember 2019
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,

Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Director Report

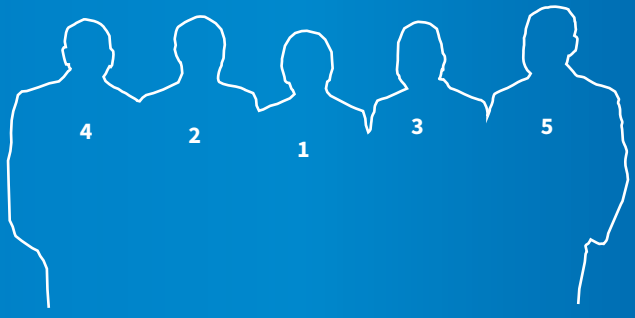

1. F. Zendrato - Direktur Utama / *President Director*
2. Jefri Sani P.S - Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*
3. Sadar Sebayang - Direktur Bisnis / *Business Director*
4. Rudhy Dharma - Direktur Keuangan / *Finance Director*
5. Isak S. Wopari - Direktur Operasional / *Banking Operation Director*

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, anugerah dan penyertaan-Nya, yang telah memberikan kita semua kekuatan sehingga dapat melewati tahun 2019 dengan kinerja yang baik dan memuaskan.

Bank Papua telah berhasil menunjukan kinerja yang baik dan memuaskan di tahun 2019, pencapaian ini semakin memperkokoh posisi Bank Papua *agent developmet*, mendorong perekonomian di tanah Papua. Komitmen kami untuk terus mengedepankan keberpihakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya melalui peningkatan diversifikasi produk, perbaikan kinerja dan penyarluran kredit, penguatan serta perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan demi kenyamanan dan kepuasan nasabah serta penyempurnaan kualitas *governance*.

Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perseroan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam ringkasan kinerja Bank Papua sepanjang tahun 2019.

Analisis Pencapaian Kinerja

Kebijakan Strategis

Arah dan kebijakan pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Bank Papua pada tahun 2019 mengacu pada *corporate plan* 2018-2022 yakni fokus pada 3 bidang utama yaitu :

1. *Human Capital Management*
   a. Revitalisasi manajemen *Human Capital*.
   b. Pengembangan strategi dan kebijakan *Human Capital*.
2. *Corporate Culture*
   a. Pengembangan dan penerapan *corporate culture* berbasis kinerja.
   b. Pengembangan *Performance Management System* (PMS) dan *Project Piloting*.

Respected Shareholders and Stakeholders,

Praise us for the presence of Almighty God for His love, grace and bless, which has given us all the strength so we can get through 2019 with a good and satisfying performance.

Bank Papua has succeeded in showing good and satisfying performance in 2019, this achievement has further strengthened the position of Bank Papua as agent of development, encouraging the economy in the land of Papua. Our commitment to continue to prioritize the Small and Medium Enterprises (MSME) sector, among others through increasing product diversification, improving performance and lending, strengthening and expanding networks, improving service quality for customer comfort and satisfaction and improving governance quality.

On this occasion, allow us to submit a report on the implementation of the Company's management and performance achievements that have been set in the summary of the performance of Bank Papua throughout 2019.

Performance Achievement Analysis

Strategic Policy

The direction and policy of business development to be carried out by Bank Papua in 2019 refers to the 2018-2022 corporate plan, which is to focus on 3 main areas, namely:

1. *Human Capital Management*
   a. Revitalizing Human Capital management.
   b. Development of Human Capital strategies and policies.
2. *Corporate Culture*
   a. Development and implementation of performance-based corporate culture.
   b. Development of Performance Management System (PMS) and Project Piloting.

3. *Risk Management & Asset Recovery*
   a. Penyempurnaan kebijakan dan proses pelaksanaan bisnis dan operasional bank, serta penguatan penerapan *Risk Management* pada seluruh bidang terkait potensi risiko.
   b. Penguatan kapabilitas *asset recovery* secara temporer, serta peningkatan intensitas *credit recovery*. Opsi pemanfaatan *pro hire/specialist* terkait asset recovery/ *disposal.*

Selain itu *corporate plan* juga telah menggariskan 3 Bidang Pendukung, yaitu:

1. Proses dan Organisasi Bisnis
   a. Penyempurnaan organisasi dalam mendukung proses bisnis Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
   b. Pemenuhan perangkat dalam mendukung peningkatan bisnis.
2. Kanal Distribusi & Produk
   a. Revitalisasi kanal distribusi (cabang, *e-channel*).
   b. Pengembangan produk dan jasa, *digital banking*, guna mempertahankan *captive market* (pemda, dan turunan, ASN).
3. Teknologi Pendukung
   a. Pengembangan kapabilitas IT untuk dukungan pengembangan *Performance Management System* (PMS).
   b. Peningkatan kapabilitas *platforms* IT untuk dukungan model dan proses bisnis Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan pengembangan *e-channel* dengan skala terbatas.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut di atas maka Bank Papua juga melakukan transformasi secara menyeluruh pada 6 point, yaitu :

1. *Leadership System*
   a. Terciptanya kepemimpinan Bank yang kuat.
   b. Terlaksananya *Governance*, *Risk Management & Compliance* yang baik.
   c. Terlaksananya *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. *Strategic Planning System*
   Terciptanya perencanaan strategis untuk mendukung pertumbuhan bank yang berkelanjutan.
3. *Customer Management System*
   a. Terciptanya *Customer Engagement* (Keterikatan Nasabah).
   b. Memahami dan memenuhi keinginan nasabah.

3. *Risk Management & Asset Recovery*
   a. *Improving policies and processes for implementing business and bank operations, and strengthening the Implementation of Risk Management in all fields related to potential risks.*
   b. *Strengthening the capability of temporary asset recovery, as well as increasing the intensity of credit recovery. Option to use pro hire / specialist including asset recovery / disposal.*

In addition, the corporate plan also outlines 3 Supporting Sectors, namely:

1. *Business Processes and Organizations*
   a. *Improving the organization in supporting the business processes of the Head Office and Branch Offices.*
   b. *Fulfillment of devices in support of increasing business.*

2. *Distribution Channels & Products*
   a. *Revitalizing distribution channels (branches, e-channels).*
   b. *Development of products and services, digital banking, in order to maintain the captive market (local government, and derivatives, SCA).*
3. *Supporting Technology*
   a. *Development of IT capabilities to support the development of Performance Management System (PMS).*
   b. *Increased capabilities of IT platforms to support business models and business processes at Head Office and Branch Offices and e-channel development on a limited scale.*

In line with the policy directions mentioned above, Bank Papua also carried out a comprehensive transformation at 6 points, namely:

1. *Leadership System*
   a. *The creation of a strong Bank leadership.*
   b. *Good governance, risk management & compliance.*
   c. *Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).*

2. *Strategic Planning System*
   The creation of strategic planning to support sustainable bank growth.
3. *Customer Management System*
   a. *Creation of Customer Engagement.*
   b. *Understand and fulfill customer desires.*

4. *Knowledge Management System*
   a. Terciptanya metode pengukuran, analisa dan peningkatan kinerja organisasi.
   b. Tersedianya informasi manajemen, *knowledge* dan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan.
5. *Workforce Engagement System*
   a. Meningkatkan *engagement* Sumber Daya Manusia.
   b. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk Sumber Daya Manusia.
6. *Operational Focus System*
   Terciptanya perbaikan sistem kerja dan proses kerja secara berkelanjutan.

Penerapan kebijakan strategis menjadikan perusahaan dapat mengembangkan usahanya serta mengantisipasi kejadian yang dapat menganggu jalannya perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Pada tahun 2019, Bank Papua mencapai kinerja yang positif. Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan yang dicapai, dimana hampir semuanya di atas target. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan dapat dilihat sebagai berikut :

4. *Knowledge Management System*
   a. *The creation of methods of measuring, analyzing and improving organizational performance.*
   b. *The availability of management information, knowledge and information technology for decision making.*
5. *Workforce Engagement System*
   a. *Increasing Human Resources engagement.*
   b. *Creating a conducive environment for Human Resources.*
6. *Operational Focus System*
   The creation of work system improvements and work processes on an ongoing basis.

Implementation of strategic policies makes the company can expand its business and anticipate events that can disrupt the course of the company so that the company can run effectively and efficiently.

Comparison between Achieved and Targeted Results

In 2019, Bank Papua achieved a positive performance. This can be seen from the financial performance achieved, where almost everything is above the target. Comparison between the results achieved and those targeted can be seen as follows:

Indikator Utama	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian %	*Key Performance Indikator*
Aset	22.456.759	23.506.512	28.183.686	119,90%	*Assets*
Dana Pihak Ketiga	17.993.816	18.610.618	22.844.982	123,38%	*Third Party Fund*
Giro	8.206.448	8.475.125	11.133.571	131,37%	*Current Account*
Tabungan	7.365.412	7.618.132	8.810.469	115,65%	*Saving*
Deposito	2.421.956	2.517.361	2.953.943	119,84%	*Time Deposit*
Aktiva Produktif	21.674.321	18.906.259	26.562.447	128,82%	*Earning Asset*
Kredit	14.147.217	15.704.881	16.060.678	102,27%	*Loan & Financing*
Penempatan	5.236.891	1.991.010	6.373.129	209,24%	*Placement*
Surat Berharga	2.290.213	1.210.368	4.128.639	341,11%	*Marketable Seccurities*
Laba Bersih Tahun Berjalan	218.576	248.758	250.037	100,51%	*Net Earning*
Rasio - Rasio Keuangan					
KPPM	22,21%	20,84%	21,43%	102,83%	*CAR*
NPL (*Gross*)	7,45%	6,75%	5,06%	75,64%	*Non Performing Loan (Gross)*
NPL (*Netto*)	2,44%	3,55%	2,00%	56,34%	*Non Performing Loan (Netto)*
Laba Terhadap *Asset* (ROA)	1,24%	1,44%	1,35%	93,75%	*Return on Asset*
Laba Terhadap Modal (ROE)	7,65%	7,22%	7,71%	106,79%	*Return on Equity*
Pendapatan Bunga Bersih terhadap Aktiva Produktif (NIM)	6,82%	6,60%	7,00%	106,06%	*Net Interest Margin*
BOPO	87,77%	86,73%	85,18%	98,21%	*Operational Expese/Income*
L D R	78,90%	84,69%	70,30%	83,01%	*Loan to Deposit Ratio*

1. Aset ditargetkan tumbuh sebesar Rp23.506.512 juta dan terealisasi sebesar Rp28.183.686 juta atau pencapaian sebesar 119,90% dari target.
2. Dana Pihak Ketiga ditargetkan tumbuh sebesar Rp18.543.186 juta dan terealisasi sebesar Rp22.844.934 juta atau pencapaian sebesar 123,20% dari target. Pencapaian masing-masing produk sebagai berikut:
   a. Dana Giro Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp8.418.148 juta dan terealisasi sebesar Rp11.086.817 juta atau pencapaian sebesar 131,70% dari target.
   b. Dana Tabungan Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp7.613.715 juta dan terealisasi sebesar Rp8.804.223 juta atau pencapaian sebesar 115,64% dari target.
   c. Dana Deposito Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp2.511.323 juta dan terealisasi sebesar Rp2.953.894 juta atau pencapaian sebesar 117,62% dari target.
3. Aktiva Produktif ditargetkan tumbuh sebesar Rp18.906.259 juta dan terealisasi sebesar Rp24.355.334 juta atau pencapaian sebesar 128,82% dari target. Realisasi Aktiva Produktif tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kredit yang disalurkan ditargetkan tumbuh sebesar Rp15.704.881 juta dan terealisasi sebesar Rp16.060.678 juta atau pencapaian sebesar 102,27% dari target.
   b. Penempatan pada BI dan Bank Lain ditargetkan tumbuh sebesar Rp1.991.010 juta dan terealisasi sebesar Rp4.166.017 juta atau pencapaian sebesar 209,24% dari target.
   c. Surat Berharga ditargetkan tumbuh sebesar Rp1.210.368 juta dan terealisasi sebesar Rp4.128.639 juta atau pencapaian sebesar 341,11% dari target.
4. Laba bersih ditargetkan tumbuh sebesar Rp248.768 juta dan terealisasi sebesar Rp250.037 juta atau pencapaian sebesar 100,51% dari target.
5. Rasio Keuangan sebagai berikut :
   a. KPPM, pada tahun 2019 dicapai rasio sebesar 21,43% atau melampaui batas yang ditargetkan sebesar 20,84%.
   b. NPL *Gross* sebesar 5,06% dari target maksimal sebesar 6,75% atau sebesar 74,96% dari target. Pencapaian NPL *Gross* dibawah target, mencerminkan pecapaian yang sangat bagus. Semakin kecil NPL, berarti semakin rendah kredit macet yang diterima oleh bank. NPL *Netto* sebesar 2,00% atau 56,34% dari target sebesar 3,55%.
   c. ROA dicapai sebesar 1,35% dari target sebesar 1,44% atau pencapaian sebesar 92,75%.
   d. ROE yang dicapai sebesar 7,71% dari target sebesar 7,22% atau pencapaian sebesar 106,79%

1. *Assets are targeted to grow by Rp23,506,512 million and realized by Rp28,183,685 million or an achievement of 119.90% of the target.*
2. *Third Party Funds are targeted to grow by Rp11.086.817 million and realized by Rp22,844,934 million or an achievement of 123.20% of the target. The achievements of each product are as follows:*
   a. *Bank Papua Current Account Funds are targeted to grow by Rp8,418,148 million and realized by Rp8,804,223 million or an achievement of 131.70% of the target.*
   b. *Bank Papua Savings Fund is targeted to grow by Rp7.613.715 million and realized by Rp8.804.223 million or an achievement of 115.64% of the target.*
   c. *Bank Papua Time Deposit Funds are targeted to grow by Rp2.511.323 million and realized by Rp2,953,894 million or an achievement of 117.62% of the target.*
3. *Earning Assets are targeted to grow by Rp18,906,259 million and realized Rp22,844,934 million or an achievement of 128.82% of the target. Realization of Productivity Assets in 2019, with the following details:*
   a. *Loans are targeted to grow by Rp15,704,881 million and realized by Rp16,060,678 million or an achievement of 102.27% of the target.*
   b. *Placement in BI and Other Banks is targeted to grow by Rp1,991,010 million and realized by Rp4,166,017 million or an achievement of 209.24% of the target.*
   c. *Marketable Securities are targeted to grow by Rp1,210,368 million and realized Rp4,128,639 million or an achievement of 341.11% of the target.*
4. *Net earning is targeted to grow by Rp248,768 million and realized by Rp250,037 million or an achievement of 100.51% of the target.*
5. *Financial Ratios as follows:*
   a. *CAR, in 2019 reached a ratio of 21.43% or exceeded the targeted limit of 20.84%.*
   b. *Gross NPL of 5.06% of the maximum target of 6.75% or of 74.96% of the target. The achievement of Gross NPL was below the target, reflecting very good achievement. The smaller the NPL, the lower the bad credit received by the bank. Net NPL of 2.00% or 56.34% of the target of 3.55%.*
   c. *ROA achieved 1.35% of the target of 1.44% or an achievement of 92.75%.*
   d. *ROE achieved by 7.71% of the target of 7.22% or achievement of 106.79%*

e. NIM yang dicapai sebesar 7,00% dari 6,60% yang ditargetkan atau pencapaian sebesar 106,06%.
f. BOPO yang dicapai sebesar 85,18% dari target sebesar 86,73% atau pencapaian 98,21%. Pencapaian nilai BOPO yang lebih rendah dari target, mencerminkan manajemen telah melakukan operasional usahanya sangat efisien.
g. LDR yang dicapai sebesar 70,30% dari target sebesar 84,69% atau pencapaian 83,01% dari target. Dengan LDR yang menurun/rendah, mencerminkan Bank Papua memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasional usahanya.

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Papua tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2019, diantaranya:

1. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
   - Penempatan pegawai belum sesuai dengan persyaratan jabatan.
   - Belum maksimalnya pelayanan kepada nasabah sehingga menyebabkan masih dijumpai layanan kepada nasabah/debiturnya tidak ada batas waktu/SLA, serta belum bisa membedakan antara penjualan produk dan pemberian layanan untuk nasabah prima, menengah dan bawah.
   - Kurangnya pemahaman (*Product Knowledge*) bagi sebagian besar insan Bank Papua, sehingga banyak produk dan jasa yang telah dimiliki oleh Bank Papua, namun tidak diketahui oleh insan Bank Papua sehingga sosialisasi kepada Nasabah/Debitur masih kurang.
   - Penempatan Sumber Daya Manusia pada unit-unit kerja masih perlu penyesuaian kembali sesuai dengan bidang keahlian masing-masing individual.
2. Teknologi
   - Pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi masih terbatas.
   - Sistem teknologi perbankan yang masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pengembangan produk dari segi teknologi masih tertinggal dari para bank pesaing dan lembaga keuangan lainnya.
   - Dari segi teknologi sistem baik untuk *Core Banking*, pelayanan gangguan, perangkat dan sarana pendukung teknologi terkait produk masih memerlukan pembenahan/ perbaikan.

e. Achieved NIM of 7.00% from 6.60% targeted or achievement of 106.06%.
f. OEOI reached 85.18% of the target of 86.73% or 98.21% achievement. Achieving a OEOI value that is lower than the target, reflects that management has conducted its business operations very efficiently.
g. LDR achieved by 70.30% of the target of 84.69% or 83.01% of the target. With a declining / low LDR, it reflects that Bank Papua has a healthy condition in carrying out its business operations.

Challenges and Constraints Faced

In carrying out business activities, Bank Papua is inseparable from the various challenges and obstacles encountered throughout 2019, including:

1. Organization and Human Resources
   - *Employee placement is not in accordance with job requirements.*
   - *The service has not been maximized so that the service to customers / debtors has no time limit / SLA, and cannot differentiate between selling products and providing services for prime, middle and lower customers.*
   - *Lack of understanding (Product Knowledge) for most people of Bank Papua, so that many products and services that have been owned by Bank Papua, but not known by the people of Bank Papua so that socialization to Customers / Debtors is still lacking.*
   - *Placement of Human Resources in work units still needs to be adjusted according to each individual's area of expertise.*

2. Technology
   - *Information technology-based business development is still limited.*
   - *The banking technology system is still in the development stage so that in meeting the service needs and product development in terms of technology is still lagging behind the competitor banks and other financial institutions.*
   - *In terms of system technology both for Core Banking, disruption services, devices and supporting devices for technology related products still need improvement / repair.*

3. Manajemen risiko dan kepatuhan
   - Adanya penyaluran kredit tanpa standarisasi analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal.
   - Masih lemahnya pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi semua insan Bank Papua.
   - Masih terjadi Fraud sebagai akibat lemahnya pengawasan dan pemantauan (*Internal Control*) yang dilakukan oleh atasan yang bertanggung jawab langsung untuk memimpin unit.
4. Kondisi geografis dan Jaringan kantor
   - Kondisi geografi yang relatif menimbulkan *high cost* untuk pengembangan dan pengendalian dari kantor pusat.
   - Layanan terbatas dan belum dipersiapkan untuk dapat bersaing.

Untuk itu manajemen telah menyususun beberapa strategi sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia :
   - Penyempurnaan SOP, *Job Description*, dan SLA seluruh unit bisnis dan pendukung bisnis langsung pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang (peningkatan efisiensi waktu proses, mengurangi *overlap* dan aktivitas yang bersifat joint effort).
   - Peningkatan spesialisasi tugas dan tanggung jawab pengembangan bisnis (termasuk *marketing*) seluruh segmen bisnis (*Mikro, Small, Medium, Corporate, Consumer*) opsi pemekaran terbatas s.d level Deputi/ WakaDiv. pada Divisi Bisnis UMK dan Konsumer dan Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi.
   - Pengenalan pegawai dengan membentuk pedoman strategi pengenalan dan pemantauan terhadap pegawai serta pengawasan terhadap pegawai dan penerapan kebijakan SDM yaitu dengan sosialisasi kebijakan dan prosedur tentang mekanisme KYE.
   - Pengembangan manajemen *talent* (pembentukan *talent pool* seluruh level dan rencana pengembangan *talent*).
   - Pemenuhan kebutuhan *Human Capital* sesuai standar kompetensi pada bidang bisnis dan pendukung bisnis langsung Kantor Pusat dan Cabang.
2. Teknologi
   - Melakukan riset produk baru atas *Financial Technology* (*Fintech*) dan *e-Commerce* UMKM maupun pembayaran/ pembelian pada tahun 2019, hal ini untuk mengetahui pasar yang akan dituju dan kesesuaian teknologi yang akan dipilih Bank Papua.

3. Risk management and compliance
   - *The existence of lending without standardization of debtor candidate analysis and supervision that is not optimal.*
   - *Still weak understanding of the importance of implementing Good Corporate Governance for all Bank Papua personnel.*
   - *Fraud still occurs as a result of weak supervision and monitoring (Internal Control) conducted by superiors who are directly responsible for leading the unit.*

4. Geographical conditions and office network
   - *Geographical conditions that relatively lead to high costs for the development and control of the central office.*
   - *Services are limited and not yet prepared to compete.*

For this reason, management has composed the following strategies:

1. Human Resources:
   - *Improving SOPs, Job Descriptions, and SLAs for all business units and direct business support at the Head Office and Branch Offices (increasing process time efficiency, reducing overlap and point-of-effort activities).*
   - *Increased specialization of business development tasks and responsibilities (including marketing) for all business segments (Micro, Small, Medium, Corporate, Consumer) limited expansion options until the Deputy level in the SME and Consumer Business Division and the Commercial and Corporate Business Division.*
   - *Recognition of employees by establishing guidelines for introducing and monitoring employees and supervising employees and implementing HR policies, namely by socializing policies and procedures about the KYE mechanism.*
   - *Development of talent management (the formation of talent pool at all levels and talent development plans).*
   - *Meeting the needs of Human Capital in accordance with competency standards in the field of business and direct business support to the Head Office and Branches.*

2. Technology
   - *Researching new products on Financial Technology (Fintech) and e-Commerce of MSMEs as well as payment / purchase in 2019, this is to find out the market to be targeted and the technological suitability that will be chosen by Bank Papua.*

- Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis Bank Papua diantaranya :
  1) Pembangunan Data *Warehouse/Management Information System* (MIS) Bank Papua, yaitu suatu media yang akan dapat digunakan untuk mendukung Divisi Manajemen Risiko Bank untuk pengelolaan profil risiko, Divisi Kepatuhan untuk keperluan pelaporan APU/PTT, Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Divisi Perencanaan Strategis untuk penyusunan dan *monitoring* Rencana Bisnis Bank.
  2) Dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional (SKN) yang saat ini dikelola oleh Kantor Cabang Utama maka pada tahun 2018 dikelola oleh Divisi *Treasury*.
  3) Peningkatan *security* aplikasi dan jaringan.
  4) *Capacity planning bandwidth*.
  5) Pergantian *core banking* dan Pembangunan Data Center.
- Pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi Informasi baik untuk penambahan SDM yang baru maupun peningkatan kapasitas yang telah ada untuk memberikan kesempatan mengikuti pendidikan pada universitas yang memiliki teknologi yang unggul.

3. Manajemen Risiko dan Kepatuhan :
   - Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang perkreditan dan pendanaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   - Melakukan sosialisasi secara teratur atas pentingnya GCG kepada semua jenjang insan Bank Papua.
   - Melakukan Sosialisasi *Anti Fraud Statement* dengan meningkatkan pemahaman pegawai tentang bahaya/ dampak fraud.
   - Memperkuat *Whistleblower System*.
4. Kondisi geografis dan jaringan kantor
   - Mengembangkan teknologi Laku Pandai, layanan tanpa kantor (*branchless banking*)
   - Mengembangkan CMS *Corporate* yang akan mampu melayani Pemerintah Daerah untuk melakukan transaksi pengeluaran maupun pembayaran, sehingga mampu menyukseskan gerakan transaksi non tunai yang saat ini telah dicanangkan baik oleh OJK, Bl, Kemendagri, KPK.

- *Strengthening information technology infrastructure in supporting Bank Papua business processes including:*
  1) *Development of Bank Papua's Data Warehouse / Management Information System (MIS), which is a media that will be able to be used to support the Bank's Risk Management Division for managing risk profiles, the Compliance Division for the purposes of APU / PTT reporting, the SME and Consumer Business Division, the Planning Division Strategic for preparation and monitoring of the Bank's Business Plan.*
  2) *In the operation of the National Clearing System (SKN) currently managed by the Main Branch Office, in 2018 it will be managed by the Treasury Division.*
  3) *Improved security application and network.*
  4) *Capacity planning bandwidth.*
  5) *Substitution of core banking and Data Center Development.*
- *Fulfillment of human resources who have the ability to develop information technology both for the addition of new human resources and the improvement of existing capacity to provide opportunities to attend education at universities that have superior technology.*

3. Risk Management and Compliance:
- *Improve the competence and quality of human resources, especially in the areas of loan and funding in accordance with the prudential principle .*
- *Conduct regular socialization of the importance of GCG to all levels of Bank Papua people.*
- *Conduct Anti-Fraud Statement Socialization by increasing employee understanding of the dangers / effects of fraud.*
- *Strengthening the Whistleblower System.*

4. Geographical conditions and office network
- *Developing Branchless banking technology.*
- *Developing a Corporate CMS that will be able to serve the Regional Government to conduct expenditure and payment transactions, so as to be able to succeed in the non-cash transaction movement that has been announced by OJK, BI, Ministry of Home Affairs, KPK.*

Prospek Usaha

Dalam menjalankan kegiatan operasional sepanjang tahun 2019, Bank Papua telah memperoleh hasil yang baik dibandingkan tahun 2018, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global maupun lokal serta kondisi sosial dalam negeri, Bank Papua memiliki kewajiban untuk mendorong dan memaksimalkan potensi pertumbuhan perekonomian Papua. Membaiknya perekonomian dan perbankan nasional, memperlihatkan bahwa prospek usaha Bank Papua kedepannya sangat baik. Namun demikian, masih tingginya tantangan di lingkungan perekonomian global mendorong Bank Papua untuk tetap selektif dalam memilih strategi sehingga peluang-peluang bisnis yang ada bisa ditangkap dengan baik.

Bank Papua optimis bahwa prospek usaha Bank Papua akan sangat baik. Hal ini didukung oleh kekuatan dan kelebihan yang dimiliki Bank Papua, antara lain:

1. Bank Papua memiliki Image sebagai Bank milik Pemerintah Daerah.
2. Lebih memahami karakteristik dan potensi daerah seluruh wilayah Papua.
3. *Brand* yang dikenal baik di Papua.
4. Memiliki jaringan distribusi di wilayah-wilayah pengembangan ekonomi Papua.
5. Dukungan dari otonomi daerah dan otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.
6. Telah memiliki jaringan kantor di seluruh pelosok Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta beberapa tempat di Indonesia sehingga memiliki daya saing untuk memasarkan produk dana dan jasa kepada nasabah/debitur.
7. Permodalan cukup.
8. Akses ke Pemerintah Daerah (PEMDA) yang cukup baik.
9. Bank Papua telah dikenal luas oleh seluruh masyarakat di tanah Papua.
10. Memiliki jaringan *online* antar Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas serta tergabung dalam ATM Bersama dan ATM Prima.
11. Telah memiliki layanan *payment* untuk *multybiller*, dan layanan penerimaan Pajak (MPN G2) yang akan melayani penerimaan negara berupa Pajak, bukan pajak dan Bea Cukai sehingga wajib pajak dimanapun bilamana akan melunasi kewajiban kepada negara dapat dilakukan selama 24 jam melalui mesin ATM maupun dilayani melalui *teller* selama jam kerja kantor.

Business Prospect

In carrying out operational activities throughout 2019, Bank Papua has obtained good results compared to 2018, taking into account global and local economic conditions as well as domestic social conditions, Bank Papua has the obligation to encourage and maximize the growth potential of the Papuan economy. The improvement in the national economy and banking shows that the business prospects of Bank Papua in the future is very good. However, the still high challenges in the global economic environment encourage Bank Papua to remain selective in choosing strategies so that existing business opportunities can be well captured.

Bank Papua is optimistic that the business prospects of Bank Papua will be very good. This is supported by the strengths and advantages of Bank Papua, including:

1. *Bank Papua has an Image as a Bank owned by the Regional Government.*
2. *Better understand the characteristics and potential of the whole area of Papua.*
3. *Brands that are well known in Papua.*
4. *Has a distribution network in areas of economic development in Papua.*
5. *Support from regional autonomy and special autonomy for the Provinces of Papua and West Papua.*
6. *Have offices in all corners of Papua and West Papua Provinces as well as several places in Indonesia so that they have the competitiveness to market fund products and services to customers / debtors.*
7. *Enough capital.*
8. *Good access to local government (LG).*
9. *Bank Papua has been widely known by all people in the land of Papua.*
10. *Has an online network between Branch Offices / Sub-Branch Offices / Cash Offices and is incorporated in ATM Bersama and ATM Prima.*
11. *Already have a payment service for multybiller, and Tax revenue service (MPN G2) which will serve state revenue in the form of Taxes, not taxes and Customs so that taxpayers everywhere when paying off obligations to the state can be done 24 hours through ATM machines or served through tellers during office hours.*

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Manajemen melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) secara terintegrasi melibatkan berbagai unsur masyarakat, lingkungan dan juga internal Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin terciptanya keseimbangan antara manfaat dari hasil operasional secara bisnis Perusahaan maupun secara sosial dan ekonomi bagi kepentingan masyarakat melalui program program tanggung jawab sosial Perusahaan.

Kegiatan CSR yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 pada garis besarnya terdiri atas 1) Program Bina Lingkungan yang meliputi: bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan, lingkungan, sosial; dan 2) Program Kemitraan. Pada tahun 2019, jumlah dana yang dianggarkan Bank Papua untuk menjalankan program CSR adalah sebesar Rp6 miliar dan terealisasi sebesar Rp3.436.346.777, lebih tinggi 16,31% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku

Bank Papua secara berkala melakukan penilaian GCG yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum. Hasil *Self-Assessment* GCG tahun 2019 menghasilkan peringkat komposit 2 dengan predikat "Baik". Manajemen selalu memastikan bahwa dengan penerapan GCG kepada seluruh insan Bank Papua guna peningkatan pemahaman dan penerapan GCG bagi setiap Insan Bank Papua akan mendorong dan menciptakan kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. Memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjamin bisnis Bank Papua yang lebih TARIF (Transparansi, Akuntabel, *Responsibility* dan *Fairness*), dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Action plan* GCG yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan sesuai Aturan dan Komitmen yang dibuat.
2. Monitoring *Action Plan* secara berkala.
3. Perbaikan dan pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melakukan penelahaan kelemahan yang terjadi dan melakukan perbaikan untuk di masa yang akan datang.
4. Melakukan sosialisasi secara teratur atas pentingnya GCG kepada semua jenjang insan Bank Papua.

Implementation of Social Responsibility

The management implements various corporate social responsibility programs (CSR) in an integrated manner involving various elements of society, the environment and also the internal company. This is intended to further ensure the creation of a balance between the benefits of the Company's operational results as well as socially and economically for the benefit of the community through the Company's social responsibility programs.

CSR activities that have been carried out throughout 2019 mainly consist of 1) Community Development programs which include: religious, education, sports, health, environmental, social fields; and 2) partnership program. In 2019, the amount of funds budgeted by Bank Papua to carry out CSR programs amounted to Rp6 billion and realized amounted to Rp3,436,346,777, 16.31% higher than the previous year.

Development of Corporate Governance Implementation in Fiscal Year

Bank Papua periodically conducts GCG assessments that refer to the Financial Services Authority Circular No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The results of the GCG Self-Assessment in 2019 resulted in a composite rating of 2 with the predicate of "Good". Management always ensured that the implementation of GCG to all Bank Papua people in order to increase the understanding and implementation of GCG for every Bank Papua Individual would encourage and create long-term business sustainability. Strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in order to guarantee the business of Bank Papua that is more rates (Transparency, Accountability, Responsibility and Fairness), by taking the following steps:

1. *GCG action plan prepared by the Compliance Division according to the Rules and Commitments made.*
2. *Monitoring Action Plan regularly.*
3. *Improvement and development of Good Corporate Governance (GCG) by reviewing the weaknesses that occur and making improvements for the future.*
4. *Conduct regular socialization of the importance of GCG to all levels of Bank Papua people.*

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terus diupayakan menyatu dalam proses bisnis yang dijalankan, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi dan evaluasi, dan selalu dibatasi oleh pengelolaan manajemen risiko, yang akan terus ditingkatkan penerapannya. Bank Papua juga menyakini bahwa implementasi GCG akan mendorong dan menciptakan kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. Untuk itulah, implementasi GCG perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis di masa mendatang.

The implementation of the good corporate governance (GCG) principles continues to be integrated in the business processes that are carried out, starting from the planning stage to the execution and evaluation, and are always limited by risk management, which will continue to be enhanced. Bank Papua also believes that implementing GCG will encourage and create long-term business sustainability. For this reason, GCG implementation needs to be carried out continuously and systematically in the future.

Selama tahun 2019, Bank Papua terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi GCG dengan menindaklanjuti beberapa rekomendasi sesuai hasil *assessment* dan masukan seluruh pemangku kepentingan.

During 2019, Bank Papua continued to improve the quality of GCG implementation by following up on several recommendations in accordance with the results of the assessment and input of all stakeholders.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Bank Papua telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 POJK No.55/POJK.03/2016 tentang jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Komisaris. Sampai dengan tahun 2019, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Papua berjumlah 4 (empat) orang dengan perbandingan komposisi antara Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen adalah 50% : 50%. Jumlah Dewan Komisaris telah memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Perseroan, unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Komposisi Dewan komisaris tersebut telah menunjukkan komposisi yang cukup ideal dikarenakan adanya perimbangan antara Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Keragaman dari latar belakang Dewan Komisaris diperlukan untuk menunjang efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Function and Role of the Board of Commissioners

Bank Papua has fulfilled the provisions as regulated in Article 23 POJK No.55 / POJK.03 / 2016 concerning the number, composition, criteria and independence of the Board of Commissioners, that Banks must have at least 3 (three) Commissioners. Until 2019, the number of members of the Bank Papua Board of Commissioners is 4 (four) person, with a composition ratio between Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners of 50%: 50%. The number of the Board of Commissioners has considered the needs and complexity of the Company's business, elements of diversity of expertise, educational background, and experience and does not differentiate gender. The composition of the Board of Commissioners has shown an ideal composition due to a balance between Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners. The diversity of the Board of Commissioners backgrounds is needed to support the effectiveness of the Board of Commissioners supervisory duties.

Fungsi dan Peran Direksi

Jumlah Direksi Bank Papua sebagai Perusahaan Publik mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Pasal 4 POJK No.55/POJK.03/2016 tentang jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi, menyatakan bawa bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Sampai akhir tahun 2019, Direksi Bank Papua terdiri atas 5 (lima) orang. Keberagaman latar belakang kompetensi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks dihadapi Perseroan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi suatu keputusan yang telah mempertimbangkan segala aspek yang terkait.

Function and Role of Board of Directors

The number of Board of Director of Bank Papua as a Public Company refers to the provisions of the prevailing laws and regulations, which based on Article 4 POJK No.55 / POJK.03 / 2016 concerning the number, composition, criteria and independence of Board of Director, states that banks must have members of the Board of Director with at least 3 (three) person. Until the end of 2019, the Board of Director of Bank Papua consist of 5 (five) person. The diversity of the competency backgrounds of the Board of Director is expected to provide alternative solutions to an increasingly complex problem faced by the Company, so that the resulting decision becomes a decision that has considered all related aspects.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Perseroan mempunyai beberapa kebijakan/peraturan yang pada intinya memberikan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dan tidak terbatas pada pemegang saham Bank Papua. Perlindungan itu antara lain dalam bentuk:

1. *Anti Fraud*

   Untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Bank Papua telah memiliki kebijakan Strategi *Anti Fraud*. Penerapkan Strategi *Anti Fraud* yang dilakukan Bank saat ini merupakan pelaksanaan atas diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011, yang direvisi oleh POJK Nomor 39/ POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum mengatur mengenai kewajiban bagi Bank untuk menerapkan strategi anti Fraud serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah, serta Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.A / DIR BPD/II/2017, tanggal: 07 Februari 2017 perihal Standar Operasional Prosedur Pencegahan *Anti Fraud*. Melalui unit Departemen *Anti Fraud*, maka penerapan Strategi *Anti Fraud* diwujudkan oleh manajemen Bank sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank.

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

   Terkait dengan kegiatan pengadaan, Bank Papua telah memiliki kebijakan tentang seleksi Penyedia Barang dan Jasa (*vendor*) untuk memastikan agar Bank Papua memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan berkualitas. Kriteria seleksi vendor ditinjau secara periodik sebagai landasan seleksi menjadi rekanan. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor di Bank Papua diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, 15/DIR-BPD/IV/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/DIR-BPD/II/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Setiap kegiatan seleksi pemasok atau vendor untuk pengadaan barang atau jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen di Bank Papua akan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, sumber pendanaan, jangka waktu pelaksanaan, dan spesifikasi teknis, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

Stakeholder Participation

The Company has several policies / regulations which basically provide protection to stakeholders and are not limited to Bank Papua shareholders. Such protection includes:

1. *Anti-Fraud*

   To ensure that the Company's business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance, Bank Papua has an Anti Fraud Strategy policy. The implementation of the Anti Fraud Strategy undertaken by the Bank at present is an implementation of the issuance of Bank Indonesia Circular No. 13/28 / DPNP dated 9 December 2011, which was revised by POJK Number 39 / POJK.03 / 2019 Concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks regulates the obligation for Banks to implement anti-Fraud strategies and reporting obligations for more comprehensive Banks to provide value added, and Board of Director Decree Number: 02.A / DIR BPD / II / 2017, dated: 07 February 2017 concerning Standard Operating Procedures for Anti-Fraud Prevention. Through the Anti Fraud Department unit, the implementation of the Anti Fraud Strategy is realized by the Bank's management as a form of corporate commitment in controlling the Fraud that is implemented in the form of a Fraud control system that is part of the Bank's internal control system.

2. *The Process of Procurement of Goods and Services*

   In relation to procurement activities, Bank Papua has a policy regarding the selection of Goods and Services Providers (vendors) to ensure that Bank Papua obtains the goods or services needed at competitive prices and quality. The vendor selection criteria are reviewed periodically as a basis for selection to become partners. The policy on supplier or vendor selection at Bank Papua is stipulated in the Decree of the Board of Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, 15 / DIR-BPD / IV / 2017 concerning the Second Amendment to Board of Director Decree Number: 15 / DIR-BPD / II / 2013 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services Every supplier or vendor selection activity for the procurement of goods or services, then the Committing Officer in the Bank Papua will create a Terms of Reference (KAK) containing the background, intentions and objectives, legal basis, funding sources, implementation period, and technical specifications, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.

3. Nasabah
   Pemangku kepentingan lainnya adalah Nasabah dari Bank Papua. Untuk itu, Bank Papua menyusun kebijakan guna menjaga kepentingan nasabah yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan Kebijakan yang mengharuskan di dalam setiap pemberian layanan produk dan/ atau jasa memperhatikan hak-hak nasabah SE OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen atau Masyarakat dan SE OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kedua SE tersebut merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berlaku efektif pada 6 Agustus 2014.

4. *Whistleblowing System*
   Whistleblowing System (WBS) di Bank Papua diimplementasikan melalui aplikasi WBS yang menjadi sarana penyampaian laporan pengaduan fraud atau indikasi fraud, baik dari pegawai maupun rekanan kepada Direksi sebagai sarana pengendalian internal di lingkungan Bank Papua.

Keterbukaan Informasi

Bank Papua telah memanfaatkan TI secara luas sebagai media keterbukaan informasi melalui penggunaan situs web Bank Papua dan sarana teknologi lainnya seperti *SMS Banking*, *Mobile Banking*, Instagram, dan Facebook.

Laporan Tahunan Bank Papua juga telah mengungkapkan berbagai informasi penting termasuk informasi kepemilikan saham, khususnya informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan.

3. *Customer*
   Other stakeholders are Customers from Bank Papua. For this reason, Bank Papua has developed policies to safeguard the interests of customers as stipulated in the Standard Operational Procedure (SOP) for Customer Complaints Management and Policies that require every product and / or service to pay attention to the rights of SE OJK customers number 1 / SEOJK.07 / 2014 concerning the Implementation of Education in the Context of Improving Financial Literacy to Consumers or the Community and SE OJK Number 2 / SEOJK.07 / 2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints in Financial Services Business Actors. Both OJK Letters are implementing regulations of POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 of 2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector which took effect on 6 August 2014.

4. *Whistleblowing System*
   The Whistleblowing system (WBS) at Bank Papua is implemented through the WBS application which is a means of submitting reports of fraud complaints or indications of fraud, both from employees and partners to the Board of Director as a means of internal control within Bank Papua.

Information Disclosure

Bank Papua has made extensive use of IT as a medium of information disclosure through the use of the Bank Papua website and other technological facilities such as SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, and Facebook.

Bank Papua's Annual Report has also revealed a variety of important information including share ownership information, specifically information about Shareholders who own 5% or more of the Company's shares.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu :

1. Komite Kredit
   Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya *loan risk premium* per produk dan sektoral serta menetapkan batas tertinggi tarif bunga kredit, menetapkan *portfolio/ exposure/sectoral limit* untuk masing-masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasannya. Komite kredit ditetapkan berdasarkan SK Direksi nomor 40/ DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 144 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Komite Kebijakan Perkreditan
   Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya *loan risk premium* per produk dan sektoral serta menetapkan batas tertinggi tarif bunga kredit, menetapkan *portfolio/exposure/sectoral limit* untuk masing-masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasannya. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 2 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Komite Manajemen Risiko
   Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dalam berbagai macam kegiatan perbankan yang mengandung tingkat risiko termasuk untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis Perseroan, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko menetapkan kebijakan pengendalian risiko, dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 4 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Performance Evaluation of Committee Under the Board of Directors

In carrying out its management tasks, the Board of Director are also assisted by Committees under the Board of Director, namely:

1. *Credit Committee*
   It is a committee that assists the Board of Director in setting policy proposals, management systems and credit procedures, determining the amount of loan risk premium per product and sectoral and setting the highest credit interest rates, setting portfolio / exposure / sectoral limits for each industry and setting measurement tools and controlling credit risk and its limits. The credit committee is determined based on Board of Director' Decree number 40 / DIR-BPD / VII / 2017 dated 19 July 2017. During 2019, 144 meetings were held and the duties were carried out properly.

2. *Credit Policy Committee*
   It is a committee that assists the Board of Director in setting policy proposals, management systems and credit procedures, determining the amount of loan risk premium per product and sectoral and setting the highest credit interest rates, setting portfolio / exposure / sectoral limits for each industry and setting measurement tools and controlling credit risk and its limits. During 2019, has held 2 meetings and carried out his duties well.

3. *Risk Management Committee*
   It is a committee that assists the Board of Director in establishing policies relating to asset and liability management in various types of banking activities that contain a level of risk including to identify all risks originating from all business activities of the Company's business units, establishing policies and strategies for risk management, setting control policies risk, and periodically monitoring the impact of implementing policies and strategies on certain risk parameters. During 2019, has held 4 meetings and carried out his duties well.

4. Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO)
   Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan petunjuk pengelolaan aktiva dan kewajiban Perseroan dengan memperhitungkan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi dan risiko likuiditas, serta mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan fungsi *Asset and Liabilities Management* (ALMA) yang dapat meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management* dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan dampaknya kepada posisi Bank Papua; menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate* dan bunga giro, tabungan dan deposito; dan menetapkan internal *funds transfer price*. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 12 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
   Merupakan komite yang berfungsi untuk mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi (risiko teknologi) melalui perumusan dan penetapan kebijakan/ strategi pengembangan serta pengelolaan sistem teknologi informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit-unit dan menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan nasabah dan pasar. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 2 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
6. Komite Pertimbangan Pegawai
   Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku, usulan nominasi pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan, pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya dan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 3 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
7. Komite Pertimbangan Kasus Pegawai
   Merupakan komite dibentuk untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas Direksi terkait penyelesaian kasus kepegawaian yang sangat kompleks. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 3 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. *Asset & Liability Committee (ALCO)*
   It is a committee that assists the Board of Director in providing instructions for managing the Company's assets and liabilities by calculating interest rate risk, exchange rate risk, position risk and liquidity risk, as well as complying with the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority, performing Asset and Liabilities Management (ALMA) functions that can covering liquidity management, gap management, forex management, earnings and investment management by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of Bank Papua; calculate the cost of funds, determine the base lending rate and interest on current accounts, savings and deposits; and set an internal funds transfer price. During 2019, has held 12 meetings and carried out his duties well.

5. *Information Technology Steering Committee*
   It is a committee that functions to manage operational risks related to technology (technology risk) through the formulation and determination of policies / strategies for developing and managing information technology systems in order to meet the needs of units and adjust to customer and market satisfaction demands. During 2019, has held 2 meetings and carried out his duties well.

6. *Employee Advisory Committee*
   It is a committee that assists the Board of Director in providing suggestions and considerations to the Board of Director regarding the follow-up of determining sanctions to employees who are proven negligent or violating applicable regulations, proposals for employee nominations to be promoted or mutations based on requirements and position competencies, consideration to the Board of Director regarding objections and / or reviews return submitted by the employee for sanctions imposed on him and consideration to the Board of Director regarding rehabilitation of sanctions for employees. During 2019, has held 3 meetings and carried out his duties well.

7. *Employee Case Advisory Committee*
   A committee was formed to assist the effectiveness of the implementation of the Board of Director' duties related to the settlement of very complex staffing cases. During 2019, has held 3 meetings and carried out his duties well.

Perubahan Komposisi Direksi

Sampai akhir tahun 2019, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Bank Papua. Susunan Direksi Bank Papua adalah :

Changes in Board of Directors Composition

Until the end of 2019, there was no change in the composition of the Board of Director of Bank Papua. The composition of the Board of Director of Bank Papua is:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Surat Persetujuan *Approval Letter*	Periode Jabatan *Term of Office*
F. Zendrato	Direktur Utama	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	Periode 1 : 2017-2021
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	Periode 1 : 2017-2021
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	Periode 1 : 2017-2021
Isak S.Wopari	Direktur Operasional	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	Periode 1 : 2017-2021
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	Periode 1 : 2017-2021

Apresiasi

Seluruh pencapaian Bank Papua tahun 2019 adalah berkat Kuasa, Kasih, Anugerah dan Penyertaan-Nya serta seluruh insan Bank Papua yang ditopang oleh kepercayaan dan kerjasama manajemen dalam mengarahkan langkah sehingga Bank Papua mampu untuk menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan.

Mewakili Direksi, saya mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan kerjasama yang diberikan, khususnya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Bank Papua. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada seluruh insan Bank Papua yang telah menunjukkan kerja keras dan kerja ikhlas di tengah tantangan yang dihadapi, sehingga Bank Papua berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2019. Semoga kinerja ini akan tetap terus dipertahankan dan semakin tumbuh kuat di tahun-tahun berikutnya.

Demikian laporan Direksi atas kegiatan kepengurusan Bank Papua selama tahun 2019.

Appreciation

All of the achievements of Bank Papua in 2019 are due to His Power, Love, Grace and Bless so that all of the people of Bank Papua are supported by the trust and cooperation of management in directing the steps so that Bank Papua is able to produce good and satisfying performance.

On behalf of the Board of Director, I would like to thank all the support and cooperation provided, especially to the shareholders, customers and business partners of the Company. Highest appreciation to the Board of Commissioners for the supervision and advice given to the Board of Director in the context of carrying out the management of Bank Papua. I do not forget to say thank you to all the people of Bank Papua who have shown hard work and sincere work in the midst of the challenges faced, so that Bank Papua has succeeded in improving its performance in 2019. Hopefully this performance will continue to be maintained and grow stronger in the following years .

Thus the Board of Director report on the management of Bank Papua during 2019.

Jayapura, 31 Desember 2019
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,

F. Zendrato
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jayapura, 23 April 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioner

DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si
Komisaris Utama
President Commissioner

Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
Komisaris
Commissioner

Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
Komisaris
Commissioner

Dortheis Sesa, SE
Komisaris
Commissioner

Statement of The Board of Commissioners and Board of Director Regarding Responsibility For The Annual Report of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Fiscal Year 2019

We the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2019 fiscal year is complete and full responsibility for the accuracy of the content of the company's annual report.

This statement was made with actual.

Direksi
Board of Director

F. Zendrato, SE. MM
Direktur Utama
President Director

Ir. Sadar Sebayang
Direktur Bisnis
Business Director

Rudhy Dharma, SE
Direktur Keuangan
Finance Director

Isak S. Wopari, SE. MM
Direktur Operasional
Banking Operation Director

Ir. Jefri Sani P. S
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

- 03 -

Profile Perusahaan

Company Profile

Senyuman tulus, sapaan yang hangat, adalah bentuk penghargaan dan pengabdian kami yang selalu berupaya untuk selalu memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Papua.

A sincere smile, a warm greeting, is a form of our appreciation and dedication that always strives to provide more benefits for the people of Papua.

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan / *Company name*
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Nama Panggilan / *Nick name*
Bank Papua

Bidang Usaha / *Business fields*
Perbankan

Status Perusahaan / *Company Status*
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pendirian Perusahaan / *Company Establishment*
13 April 1966

Alamat Kantor / *Office Address*
Corporate ***secretary,***
Gedung Kantor Pusat Bank Papua
Lt.4 Jl. A. Yani No.5-7 Jayapura 99111, Papua

Kantor Pusat / *Office Center*
Jl. A. Yani No. 5-7 Jayapura 99111, Papua

Nomor Telepon / *Phone number*
Telp. 62-967 532012, 533608, 531944, 532351

***Card* center**
0967-521555 (*direct*), HP 081344605555, *hunting* 0967-532011 (*hunting*) ext. 724/325

Nomor Fax
Fax. 62-967 533019

Situs Perusahaan / *Company Site*
www.bankpapua.co.id

Email
sekper@bankpapua.co.id
info@bankpapua.co.id

Facebook
https://web.facebook.com/bankPapua1966/

Twitter
https://twiter.com/bankPapua1966

Instragram
https://web.instragram.com/bankPapua_id

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002.
- Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-13031 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002.
- Berita Negara RI Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002.
- SK Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

Pemegang Saham Bank Papua

SERI A

- Pemerintah Provinsi Papua.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Papua.
- Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Papua Barat.

SERI B

- KSU Bank Papua Berdikari.

Legal Basis

- *Regional Regulation Number 2 of 2002 dated May 21, 2002.*
- *Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: C-13031 HT.01.01.TH.2002 dated July 16, 2002.*
- *News of the Republic of Indonesia Number 61 dated 30 July 2002.*
- *Decree of Bank Indonesia Deputy Governor No.4 / 147 /KEP.Dp.6/2002 dated September 11, 2002.*

Bank Papua Shareholders

SERIES A

- *Government of Papua Province.*
- *Government of West Papua Province.*
- *Municipal and Regency Governments in Papua Province.*
- *Municipal and Regency Governments in West Papua Province.*

SERIES B

- *KSU Bank Papua Berdikari.*

Modal Dasar
Rp4.000.000.000,000,-

Authorized capital
Rp4,000,000,000,000,-

Modal Disetor
Rp2.434.111.022.106,00

Paid-in Capital
Rp2,434,111,022,106.00

Jumlah Aset
Rp28.183.686.506.901,00

Total Assets
Rp28,183,685,506,901.00

Jumlah Karyawan
2.421 orang

Number of Employees
2,421 people

NPWP
01.135.393.5-952.000

TIN
01,135,393.5-952,000

NPWPD
P.2.0007813.01.001

Regional TIN
P.2.0007813.01.001

Tanda Daftar Perusahaan
2608.1.64.020.27

Certificate of Company Registration
2608.1.64.020.27

Produk
- Dana Pihak Ketiga.
- Pembiayaan/kredit.
- Layanan Jasa Bank Papua.

Products
- *Third Party Funds.*
- *Financing / Loan.*
- *Bank Papua Services.*

Jumlah Jaringan Kantor
Total Jaringan sebanyak 803 meliputi: total Jaringan Kantor 218 dan total *Delivery channel* sebanyak 585 yang terdiri dari 365 ATM (tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 79 bank dengan 7.500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6.500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia), 83 Unit EDC, 8 unit CDM, 19 Kasda *Online*, 23 Kantor Samsat *Online*, 23 Kartu Pegawai Elektronik (KPE), 19 *Cash Management System*, 38 *Payment point*, 2 Mobil Kas Keliling dan 5 Kantor Kas Titipan Bank Indonesia.

Number of Office Networks
The total network of 803 includes: total Office Network as 218 and total Delivery channel as many as 585 consisting of 365 ATMs (inCorporated with the ATM Bersama Network with a total of 79 banks with 7,500 more ATMs and Prima ATM Networks with 29 banks with 6,500 more ATMs) spread throughout Indonesia), 85 EDC Units, 8 CDM units, 19 Kasda Online, 23 Samsat Online Offices, 23 Electronic Employee Cards (KPE), 19 Cash Management Systems, 38 Payment points, 2 Mobile Cash Cars and 5 Cash Offices Bank Indonesia Deposits.

Riwayat Singkat

Bank Papua's Brief History

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor : 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp4 juta.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua which was named Irian Jaya Regional Development Bank before it turned into a Limited Company, was established on 13th of April 1966 based on the Decree of the governor of the Province of West Irian No: 37/GIB/1966 and ratified into regulation of the Province of West Irian No. 1 year 1970 dated 23 March 1970, in West Irian Province Gazette No. 42 years 1970, then by the Decree of the Minister of Finance No.Kep.283/DDK/II/1972 dated 15 July 1972 on licensing of West Irian Regional Development Bank, which located in Jayapura, performs banking operations as other public/general banks do, with first authorized capital of Rp4 million.

Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp50 milyar, Kemudian sesuai hasil Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp150 milyar.

Furthermore, according to Regional Regulation (PERDA) No. 7 year 1996, the authorized capital of Bank Papua was increased to Rp50 billion. Then, pursuant to the decree of Annual General Meeting No: 05/SK/ RUPS-BPD/XII/2000 it was decided to change the legal form of the Irian Jaya Regional Development Bank from the Regional Company (PD) to Limited Company (PT), and thereafter according to the Annual Shareholder General Meeting (SGM) held on 17 June 2001, the authorized capital of Bank Papua was increased to Rp150 billion.

Perubahan menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi

Amendment to Limited Company (Ltd) is then stated in the Regional Regulation No. 2 year 2002, dated May 21, 2002 on PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and has been promulgated in the Provincial Gazzete No. 23 year 2002, deed of Limited company

Nomor 23 tahun 2002, Akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-13031 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan berita Negara RI Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002. Dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

before the Notary Maryatie Simanjuntak, SH No. 1 dated June 19, 2002 and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. C-13031 HT.01.01.TH.2002 dated July 16, 2002, and the national gazette of Republic of Indonesia No. 61 dated July 30, 2002. It was also approved by the Deputy Governor of Bank Indonesia No.4/147/KEP. Dp.6/2002 dated September 11, 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 komposisi modal dasar Bank Papua dari Rp150 milyar menjadi Rp500 milyar, selanjutnya untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam hal Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital* Requirement) hingga tahun 2010, maka sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp1 Triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No. 08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham.

Based on the Decree of the General Meeting of Shareholders (SGM) of PT. *Bank Pembangunan Daerah Papua . Number: 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 dated June 22, 2004, the composition of the authorized capital of Bank Papua increased from Rp150 billion to Rp500 billion, then to comply with Bank Indonesia's Policy on Indonesian Banking Architecture (API) in the case of Bank Minimum Capital Adequacy Requirement (Capital Requirements) until the end of 2010, then in line with the decision of the General Meeting of Shareholders (SGM) of* PT. *Bank Pembangunan Daerah Papua . Number: 07/SK/RUPS-BPD/V/2007, authorized capital of the Bank Papua is agreed to be Rp1 Trillion. According to Deeds of Notary and Land Deed Maker Official Heryeni Lilis, SH dated August 8, 2008 No. 08, company's authorized capital is divided into 200,000 shares, consisting of 180,000 sheets of A series-A and 20,000 sheets of B series-B.*

Pada Rapat Umum Pemegang Saham terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua yaitu perubahan dari Rp1 Triliun Menjadi Rp2 Triliun yang kemudian disahkan dalam SK Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 11/ SK/RUPS BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Papua sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH, M.Si tanggal 20 April 2010 No. 05, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 30935.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

At the General Meeting of Shareholders , the Bank's authorized capital changes of Bank Papua changed from Rp1 trillion to Rp2 trillion, which is then passed in the General Meeting of Shareholders Decree No. 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 dated March 29, 2010 on the amendment of the authorized capital of Bank Papua corresponding Deed and Land Deed Official Lilis Heryeni, SH, M.Si dated 20 April 2010 No. 05, which is then determined according to the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-30935.AH.01.02. Than 2010 on Approval of Amendment of Articles of Association of the Company.

Di tanggal 21 Agustus 2013, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor: 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi Rp4 triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Maryatie Simanjuntak, SH tanggal 21 Agustus 2013 No. 17 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 728.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 72.000 lembar saham dan disahkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor: 19 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013.

At the date of August 21, 2013, in accordance the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (ESGM) numbers: 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013, authorized capital of Bank Papua was agreed to Rp4 trillion. Corresponding on Official Notary Deed of Maryatie Simanjuntak, SH dated August 21, 2013 No. 17 The Company's authorized capital consists of 800,000 shares consisting of as many as 728,000 shares of A series shares and 72,000 of B series shares was passed into the Papua Provincial Regulation number: 19 of 2013 on Amendment of Papua Provincial Regulation No. 2 year 2002 in PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , dated December 30, 2013.

Jejak Langkah
Milestones

1966

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . prior to becoming a Limited Liability Company, was named Irian Jaya Regional Development Bank, established on 13 April 1966.

1970

Disahkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun1970.

Ratified into West Irian Provincial Regulation No. 1 of 1970 dated March 23, 1970, on the West Irian Provincial Regional gazette No. 42 Year1970.

1972

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.283/ DDK/ II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp4juta

In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. RI. Kep.283 / DDK / II / 1972 dated July 15, 1972 concerning the granting of business licenses of Bank Pembangunan Daerah Irian Baratk located in Jayapura conducting operations as other commercial banks with the authorized capital of Rp4 million.

1996

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp50 milyar.

In accordance with the Regional Regulation (PERDA) No. 7 of 1996, there was a change in the basic capital of Bank Papua to Rp50 billion.

2010

SK RUPS: 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi Rp2 Triliun, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 30935.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Decree of the Shareholder General Meetings: 11 / SK / RUPS-BPD / III / 2010 dated March 29, 2010 regarding Amendment of Authorized Capital of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . to Rp2 Trillion, which was then decided in accordance with the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU- 30935.AH.01.02. Year 2010 on Approval of Deed of Amendment of Company's Articles of Association.

2013

RUPS tanggal 21 Agustus 2013 perubahan modal dasar menjadi Rp4 triliun yang telah disahkan dalam SK RUPS nomor : 02/SK/RUPS-LB/ BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

SGM dated August 21, 2013 the change of authorized capital to Rp4 trillion, which has been ratified in the SGM of Decision Number 02 / SK / RUPS-LB / BPD / VIII / 2013 dated August 21, 2013 on the increase of Authorized Capital of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

2014

RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.4/SK/RUPS-LB/ BPD/XI/2014 pengambilan keputusan di luar RUPS (Circular Resolution) untuk pengesahan modal disetor oleh pemegang saham.

SGM of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . No.4 / SK / RUPS-LB / BPD / XI / 2014 decision-making outside the SGM (Circular Resolution) for the approval of paid in capital by shareholders.

2015

Pada tahun 2015 ini Bank Papua mengembangkan program greemen bank dan sparkasen melalui program mencetak 1000 wirausaha asli Papua yang dapat menciptakan pioneer sebagai kader yang dapat menjadi motivator, trainer, wirausahawan yang menjadi sumber inspirasi masyarakat Papua dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah yaitu Papua BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

In 2015, Bank Papua develops bank greemen and sparkasen program through a program of printing 1000 original entrepreneurs of Papua that can create a pioneer as a cadre that can be a motivator, trainer, entrepreneur who became a source of inspiration of the people of Papua in realizing the vision of the Local Government that is Papua RISE, INDEPENDENT AND PROSPEROUS.

2000

SK Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/ XII/2000 memutuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Decree Number: 05 / SK / RUPS-BPD / XII / 2000 decided to change the legal form of Irian Jaya Regional Development Bank from Regional Company (PD) to Limited Liability Company (PT).

2001

RUPS tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp150 milyar.

The ASGM dated June 17, 2001 approved the change of authorized capital of Bank Papua to Rp150 billion.

2002

Berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2002.

Turned into a Limited Liability Company (PT) hereinafter set forth in Local Regulation No. 2 of 2002 dated May 21, 2002 of the PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and has been promulgated in the Provincial sheet No. 23 of 2002.

2008

RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp1 Triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No.08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham.

SGM of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . Number: 07 / SK / RUPS-BPD / V / 2007 Bank Papua's authorized capital is agreed to be Rp1 trillion. Pursuant to Notarial Deed and Land Acquisition Officer Lilis Heryeni, SH dated August 8, 2008 No.08 of the Company's authorized capital is divided into 200,000 shares consisting of Series A shares of 180,000 shares and 20,000 Series B shares.

2016

Bank Papua sukseskan "Program 1000 Wirausaha Asli Papua".

Bank Papua succeeds "1000 Indigenous Papuan Entrepreneur Program".

2018

- Sesuai RUPS sirkuler Bank Papua No. 44 tanggal 25 April 2018, telah ditetapkan 4 orang Dewan komisaris baru Bank Papua.
- Perubahan Nomenklatur pada Struktur Organisasi Bank Papua.
- *In accordance with the circular RUPS Bank Papua No. 44 dated 25 April 2018, 4 new Board of commissioners of Bank Papua have been established.*
- *Change in Nomenclature of the Bank Papua Organizational Structure.*

2017

Sesuai RUPS LB tahun 2017, tanggal 6 Maret 2017, manajemen baru Bank Papua resmi dilantik. Manajemen bertekad menjadikan Bank Papua sebagai Bank yang sehat dengan menitikberatkan kepada pengembangan Sumber Daya Manusia dan bekerja sesuai SOP serta bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dibentuk 2 Divisi baru yaitu Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Pembinaan Cabang.

In accordance with the ESGM in 2017, dated March 6, 2017, the new management of Bank Papua was officially inaugurated. Management is determined to make Bank Papua as a sound bank by focusing on human resource development and working as SOP as well as responsible so as to improve company performance. Formed 2 new divisions which are the Business Risk Division and the Branch Development Division.

2019

Fokus pada 3 bidang utama yaitu *1)* Human *Capital* Management, *2) Coporate Culcture* dan *3) Risk Management & Asset Recovery* untuk menjadikan Bank Papua menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Focus on 3 main areas, namely 1) Human Capital Management, 2) Coporate Culcture and 3) Risk Management & Asset Recovery to make Bank Papua a Regional Bank that is strong, reliable, competitive, and supports economic development in the Land of Papua.

Makna Logo

Logo Meaning

1. Grafis merupakan bentuk dari SAYAP DAN BULU **BURUNG CENDERAWASIH**, membentuk huruf/tulisan BPD yang memberikan kesan melesat ke atas melambangkan visi dan misi perusahaan dengan bisnis jasa keuangan yang kuat, terpercaya dan berkinerja tinggi. Burung Cenderawasih merupakan burung khas dan kebanggaan Masyarakat Papua sehingga bila menyebut Cenderawasih akan teringat atau identik dengan Papua.
2. Grafis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu 2 (dua) bulu dan sayap. Tiga bagian ini mencerminkan tiga pilar yaitu :
   a. Tiga tungku pembangunan Papua yaitu Agama, Pemerintah dan Adat.
   b. Tiga Pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, Karyawan / Masyarakat / Pihak ketiga.
   c. Budaya kerja BPD Papua, Yaitu : Berpikir, Bertindak secara Bisnis.
3. Sayap membentuk huruf B melambangkan fleksibilitas, dinamis dalam mengikuti perkembangan dan kondisi lingkungan usaha perbankan yang semakin mengglobal. Warna biru melambangkan ketenangan, konsentrasi, kerjasama dan bersatu.
4. Warna emas (***gold***) pada bulu membentuk huruf P menggambarkan Tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam (hasil bumi) dan juga mencerminkan ***core business*** Bank Pembangunan Daerah Papua pada usaha ritel yang sangat menjanjikan.
5. Bulu membentuk huruf D merupakan cermin sebagai bank yang memiliki kepedulian sebagai pendorong untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional khususnya pembangunan di Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
6. Grafis membentuk gambaran yang kompak dan harmonis mencerminkan sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai etika dan hubungan harmonis antara pemilik dan pengurus bank serta nasabah.

1. *The graphic is a shape of **WING AND FEATHER OF CENDERAWASIH**, shaping letters/words of BPD, which gives a sense like it flies away up there. It symbolizes the company's vision and mission with financial service business which is strong, trusted and has high work activity. Cendrawasih bird is a typical and a pride bird of Papua so that when it's said about Cenderawasih, people will be remained to Papua*
2. *The graphic consisted of 3 parts which are 2 feathers and a wing. These three parts reflected three pillars, which are:*
   a. 3 Papua's stove of development, which are Religion, Government and Culture.
   b. 3 Stakeholders which are Regional Province Government, Regency/Municipality, Employees/Society/Third Party.
   c. BPD Papua's culture of work, which are: thinking, acting in a business way.
3. *The wing shapes a B letter, symbolized a flexible, dynamic in following the development and banking working environment condition which globalize more. The blue color symbolizes tranquility, concentration, cooperation, and unity.*
4. ***(Gold)** color at the feather shapes P letter, images the rich Papua's land with natural resources and also reflects the core **business** of the Regional Development Bank in very promising retail business.*
5. *The feather shapes D letter reflection of a bank having cares as a supporter to push forward national and regional economy growth, especially for development in Papua Province and West Papua Province.*
6. *The graphic shapes a compact and harmonic picture reflects the professional attitude and respect, ethics values and harmonic bond between the bank's owner, management, and customer.*

Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Corporate Values and Culture

Visi
Vision

"Menjadi Bank Regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua."

"Become a Regional Bank that is strong, trustworthy, competitive and supports economic development in the land of Papua."

Menjadi Bank Regional

Mencerminkan arah pengembangan Bank Papua dari Bank Komersial yang selama ini menjalankan bisnisnya di beberapa wilayah di Indonesia, untuk melakukan transformasi menjadi Bank Komersial yang fokus pada pengembangan bisnis dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Kuat

Mencerminkan Bank Komersial yang sehat, berkinerja baik, memiliki daya tahan terhadap risiko bank yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, dengan rasio kecukupan modal yang selalu berada diatas batas minimum sesuai regulasi yang berlaku, serta menjalankan kegiatan bisnis dan operasional-nya berdasarkan praktek terbaik dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, *Risk Management* dan *Compliance* pada industri perbankan.

Become a Regional Bank

Reflecting the direction of the development of Bank Papua from a Commercial Bank that has been running its business in several regions in Indonesia, to transform into a Commercial Bank that focuses on business development and economic development in Papua.

Strong

Reflecting a sound, well performing, commercial bank with predictable and unpredictable bank risk, with a capital adequacy ratio that is always above the minimum according to applicable regulations, and carrying out business and operational activities based on the best practice of the application of the principles of Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance in the banking industry.

Terpercaya

Mencerminkan Bank yang selalu dipercaya oleh seluruh *stakeholder*, dengan karakter sebagai Bank milik Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, serta pengusaha dan masyarakat umum sebagai nasabah, dengan menyediakan produk-produk dan memberikan pelayanan terbaik, serta selalu menjaga kerahasiaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Trusted

Reflecting the Bank that is always trusted by all stakeholders, with the character as a Regional Government-owned Bank that can fulfill needs and provide satisfaction to the Regional Government as shareholders, as well as entrepreneurs and the general public as customers, by providing products and providing the best services, and always maintain customer confidentiality in accordance with applicable regulations.

Berdaya Saing

Mencerminkan Bank Komersial yang mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, sehingga bisnis-nya dapat tumbuh sehat secara berkelanjutan, dengan karakter sebagai Bank Komersial yang memiliki brand image sebagai Bank milik Pemerintah Daerah, memahami karakteristik dan potensi daerah di seluruh wilayah Tanah Papua, memiliki jaringan distribusi di wilayah-wilayah pengembangan ekonomi Tanah Papua, serta tetap terus menaikkan daya saing-nya yang tinggi dengan meningkatkan kualitas produk, pelayanan, teknologi dan kompetensi sumber daya manusia.

Competitive

Reflecting Commercial Banks that have competitive advantages compared to competitors, so that their businesses can grow sustainably in a Sound manner, with the character as a Commercial Bank that has a brand image as a Regional Government-owned Bank, understanding the characteristics and potential of the entire Papua Land area, having a distribution network in the areas of economic development in Papua Land, and continue to increase its high competitiveness by improving the quality of products, services, technology and competency of Human Resources.

Mendukung Pembangunan Ekonomi

Mencerminkan Bank yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Tanah Papua yang berkelanjutan, dengan karakter sebagai Bank yang selalu mendukung pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah terkait pembangunan ekonomi di Tanah Papua, melakukan pengembangan bisnis di wilayah remote, serta pengembangan teknologi perbankan *digital* yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan berbiaya rendah.

Supporting Economic Development

Reflecting the Bank that contributes significantly to economic growth and equity in sustainable Papua, with a character as a Bank that always supports the implementation of Local Government projects related to economic development in Papua Land, conducting business development in remote areas, and developing digital banking technology that enables the expansion of coverage low-cost service.

di Tanah Papua

Mencerminkan seluruh wilayah yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat.

in Papua Land

Reflects all regions covering the provinces of Papua and West Papua.

Misi
Missions

Misi Bank Papua

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*.
2. Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat.
3. Menjalankan bisnis secara profesional.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Tanah Papua.

Bank Papua's Mission

1. *Providing the best service to stakeholders.*
2. *Manage business through sound banking practices.*
3. *Doing business professionally.*
4. *Encouraging economic growth and development in the Land of Papua.*

Misi 1. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada *Stake Holder*

1. Bank Papua berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dalam memenuhi setiap kebutuhan nasabah melalui variasi produk, layanan dan jaringan yang menjangkau sampai ke kampung-kampung atau pedalaman di Tanah Papua.
2. Bank Papua inovatif, kreatif, dan *professional* dengan dukungan finansial teknologi yang handal serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih baik.
3. Bank Papua fokus dan lebih memahami karakteristik dan potensi daerah di seluruh tanah Papua agar dapat memberikan pelayanan terbaik.

Misi 2. Mengelola Bisnis Melalui Praktek Perbankan Yang Sehat.

1. Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian secara kontinu dan konsisten dalam pengelolaan bisnis agar bank senantiasa dalam kondisi sehat.
2. Bank Papua senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai pengelolaan bisnis.
3. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai selaras pertumbuhan Bank Papua.
4. Bank Papua senantiasa menjaga pertumbuhan bisnis dengan perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk menjaga pertumbuhan keuangan berkelanjutan.

Mission 1. Providing the Best Service to the Stake Holder

1. *Bank Papua is committed to continuously improving the quality of service in meeting every customer need through a variety of products, services and networks that reach out to the villages or inland areas of Papua.*
2. *Bank Papua is innovative, creative, and professional with reliable financial technology support and better human resource competencies.*
3. *Bank Papua focuses and better understands the characteristics and potential of regions in all of Papua's land in order to provide the best service.*

Mission 2. Managing Business Through Sound Banking Practices.

1. *Application of Risk Management and prudential principles continuously and consistently in business management so that the bank is always in good condition.*
2. *Bank Papua always complies with the rules and regulations that apply in every activity as a business management.*
3. *Increased competency and employee welfare are in line with the growth of Bank Papua.*
4. *Bank Papua always maintains business growth with careful planning so that it can provide optimal results to maintain sustainable financial growth.*

Misi 3. Menjalankan Bisnis Secara Profesional

1. Bank Papua berkomitmen menjunjung prinsip Transparansi, akuntabel, responsif, berintegritas dan rasa berkeadilan dalam menjalankan bisnis.
2. Bank Papua peduli lingkungan dan turut serta melestarikan kearifan dan budaya lokal dengan bersinergi dengan masyarakat dan adat lokal.
3. Bank Papua berkomitmen menjalin hubungan kerja sama yang *professional* dengan semua pihak (*stakeholder*) dengan prinsip saling memberi nilai tambah dan manfaat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Misi 4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Tanah Papua

1. Sebagai Bank milik pemerintah daerah di Tanah Papua dan menjadi mitra dalam menjalankan bisnis, Bank Papua berkomitmen mendukung program-program pemerintah daerah melalui layanan perbankan yang ada dan memberikan hasil usaha berupa dividen.
2. Bank Papua berkomitmen berkontribusi bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua dalam peran sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana nasabah dan menyalurkan pinjaman dengan variasi produk dan layanan yang ada.
3. Membina dan mengembangkan usaha masyarakat lokal.

Mission 3. Running Business Professionally

1. *Bank Papua is committed to upholding the principles of Transparency, accountability, responsiveness, integrity and a sense of fairness in conducting business.*
2. *Bank Papua cares about the environment and participates in preserving local wisdom and culture by synergies with local communities and customs.*
3. *Bank Papua is committed to establishing professional cooperation relationships with all stakeholders with the principle of mutual added value and benefits in every activity.*

Mission 4. Encouraging Economic Growth in Papua

1. *As a regional government-owned bank in Papua Land and being a partner in conducting business, Bank Papua is committed to supporting local government programs through existing banking services and providing business results in the form of dividends.*
2. *Bank Papua is committed to contributing to regional development and economic growth in the Land of Papua in its role as an intermediary institution, namely collecting customer funds and lending with a variety of existing products and services.*
3. *Fostering and developing the business of local communities.*

Tagline
Tagline

“ **Membangun Tanah Papua.**

Building Papua Land. ”

Budaya Kerja
Work Culture

Budaya kerja Bank Papua yaitu: "**Berpikir, Bertindak secara Bisnis**" yang memiliki makna:

"Memikirkan dan melakukan setiap tindakan *professional* yang memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait dengan Bank Papua".

Budaya kerja Bank Papua didasarkan kepada nilai-nilai:

1. Melayani
   Pelayanan yang tulus kepada setiap orang dengan cepat, tepat & efektif yang dilakukan oleh semua unit kerja dan insan Bank Papua secara terus menerus guna kepuasan semua pihak terkait.
2. Efisien
   Melakukan setiap tindakan secara terencana, dilandasi dengan kejujuran untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi perusahaan.
3. Responsif
   Tanggap terhadap perubahan, memberikan solusi cepat dan tepat serta peka terhadap situasi internal dan eksternal yang berhubungan dengan perusahaan.
4. Kewirausahaan
   Jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam pribadi-pribadi seorang pegawai yang mampu menangkap, mengembangkan dan menciptakan peluang guna menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan.
5. Asas Manfaat
   Menetapkan skala prioritas dan melaksanakannya dengan memanfaatkan sumber daya jangka pendek dan jangka panjang untuk kepentingan perusahaan.
6. Risiko yang Diperhitungkan
   Setiap tindakan harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhitungkan risiko.
7. Kerjasama
   Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh insan Bank Papua (dengan memanfaatkan perbedaan dan kemajemukan) untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

*Bank Papua work culture that is: "**Thinking, Acting Business**" which has a meaning:*

"Thinking and taking every precaution to professionals who provide added value to all related parties with the Bank Papua".

Bank Papua work culture based on values:

1. *Serve*
   Sincere service to everyone quickly, precisely and effectively carried out by all the working units and Bank Papua beings continuously to the satisfaction of all parties concerned.
2. *Efficient*
   Perform each action in a planned, based on the honesty to obtain optimum benefit for the company.
3. *Responsive*
   Responsive to change, providing quick and precise solution and sensitive to internal and external situations related to the company
4. *Entrepreneurship*
   Entrepreneurial spirit that is inherent in every employee who is able to capture, develop and create opportunities to generate economic added value for the company.
5. *Utility Function*
   Establishes priorities and implement them by utilizing the resources of short-term and long-term interests of the company.
6. *Calculated Risk*
   Each action should provide added value to the company taking into account the risk.
7. *Cooperation*
   Actions carried out jointly by the Bank Papua beings (by exploiting the differences and plurality) in order to achieve optimal business performance.

10 Pedoman Perilaku
Code of Conduct

1 Mengutamakan Kebutuhan Pelanggan *Prioritize Customer Needs*

Melayani dengan cepat, tepat dan efektif yang dilakukan oleh semua insan Bank Papua dengan berusaha memenuhi dan memuaskan pelanggan dengan memberikan layanan prima serta mengupayakan solusi tuntas atas segala masalah nasabah.

Serve quickly, appropriately and effectively by all Bank Papua personnel by trying to satisfy and satisfy customers by providing excellent service and pursue a thorough solution to all customer problems.

2 Jujur, Tulus, Terbuka Dan Berempati *Honest, Sincere, Open And Empathy*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghindari penyelewengan wewenang jabatan dan konflik kepentingan. Tulus dalam memberikan pelayanan dan terbuka dalam menerima saran/kritik yang membangun serta berempati terhadap kebutuhan dan keluhan nasabah.

Uphold the values of honesty and avoid misuse of the authority of the positions and conflicts of interest. Sincere in providing services and open in receiving suggestions / criticisms that build and empathize with customer needs and complaints.

3 Memberi Solusi Dan Hasil Terbaik *Providing The Best Solutions And Results*

Mampu memberi solusi terhadap permasalahan perusahaan dan menindaklanjutinya serta memastikan penyelesaiannya sampai tuntas dengan tidak mengesampingkan faktor efisiensi.

Be able to provide solutions to the company's problems and follow up as well as ensure completion to the end without denying the efficiency factor.

4 Peduli Lingkungan *Environmental care*

Peka terhadap situasi lingkungan internal dan eksternal Bank dan mampu beradaptasi sehingga fungsi dan tanggungjawab Bank tetap terjaga.

Sensitive to the Bank's internal and external environment situation and able to adapt so that the Bank's functions and responsibilities are maintained.

5 Inovatif, Proaktif Dan Kreatif *Innovative, Proactive and Creative*

Selalu berinisiatif melakukan pembaharuan, berperan aktif dan memiliki banyak ide dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi kemajuan perusahaan.

Always initiative to make updates, active role and have many ideas in carrying out its duties and responsibilities for the sake of the company's progress.

6 Disiplin Dan Konsisten

Discipline And Consistent

Selalu tepat waktu dan patuh terhadap aturan yang ada dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukannya secara terus menerus.

Always on time and obedient to the rules that exist in carrying out their duties and responsibilities and do it continuously.

7 Berpikir, Berkata Dan Bertindak Terpuji

Thinking, Saying And Acting Praiseworthy

Dalam setiap perilaku insan Bank Papua harus berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin pegawai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

In every human behaviour Bank Papua should think, say and act in accordance with the Code of Conducts and discipline rules of employees and norms that apply in the community.

8 Menciptakan Rasa Aman Dan Nyaman

Creating Secure and Comfortable

Mampu menciptakan suasana atau kondisi yang terkesan baik, aman dan nyaman di lingkungan kerja dan kepada nasabah sekalipun dalam situasi lingkungan yang kurang kondusif.

Able to create an atmosphere or conditions that impressed good, safe and comfortable in the work environment and to the customer even in a less conducive environment.

9 Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Perbaikan Terus Menerus

Orientation On Added Value and Continuous Improvement

Selalu kreatif dan inovatif dalam berpikir dan bertindak dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang dilakukan secara terus menerus.

Always creative and innovative in thinking and acting by doing renewal and improvement to provide added value to the company that is done continuously.

10 Bekerja Sama, Saling Menghargai dan Mempunyai Rasa Memiliki

Working Together, Mutual Respecting And Having Ownership

Mampu bekerja secara tim, mudah berkoordinasi dengan semua insan Bank Papua maupun dengan pihak terkait lainnya, menghargai orang lain serta memiliki kecintaan yang besar terhadap perusahaan.

Able to work in a team, easy to coordinate with all people of Bank Papua and with other related parties, appreciate others and have a great love for the company.

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan
Company Objectives, Target and Strategies

Tujuan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Papua dan Papua Barat, Bank Papua bertujuan untuk mengelola keuangan daerah, yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

Sasaran
Sesuai dengan rencana bisnis Bank Papua, sasaran yang akan dicapai adalah mengimplementasikan program BPD Transformasi yang meliputi 5 (lima) *workstream* ke dalam *action plan* nya masing-masing Divisi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan Modal guna memperkuat ketahanan kelembagaan.
2. *Human Capital Development*.
3. *Product and Service Development*.
4. Teknologi Informasi dan *Management Information System* (MIS)
5. *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Risk Management*.

Strategi
Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan 5 (lima) arah kebijakan Bank Papua sehingga visi dan misi Bank Papua dapat terpenuhi, adalah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan modal guna memperkuat ketahanan kelembagaan.
   Mengawal Komitmen setoran modal 4 Trilyun dengan kunjungan kerja secara intensif kepada pemerintah daerah dan Provinsi serta para pengelola keuangan daerah, dengan memberikan laporan keuangan publikasi triwulanan sehingga para pemilik mengetahui keberadaan Bank Papua.

2. *Human Capital Development*
   Human capital development ini memegang peran penting dalam pengembangan bisnis Bank Papua, karena itu akan dikoordinir Divisi Manajemen Modal Manusia dengan membuat kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Objective
In accordance with the Company's Articles of Association and as a Bank belonging to the Papua and West Papua Provincial Governments together with the Regency/Municipal Governments of Papua and West Papua, Bank Papua aims to manage regional finance, namely as Regional Cash holders and help improve the regional economy by providing Loan to small entrepreneurs.

Target
In line with Bank Papua's business plan, the target to be achieved is implementing the BPD Transformation program which includes 5 (five) workstreams in the action plans of each Division, with details as follows:

1. *Strategic increase in capital to strengthen institutional resilience.*
2. *Human Capital Development.*
3. *Product and Service Development.*
4. *Information Technology and Management Information System (MIS).*
5. *Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management.*

Strategy
SDMe strategic steps that will be taken in order to realize the 5 (five) policies of Bank Papua so that the vision and mission of Bank Papua can be fulfilled, are as follows:

1. *Strategic capital increase to strengthen institutional resilience.*
   Escort the 4 trillion capital deposit commitment with intensive work visits to regional and provincial governments and regional financial managers, by providing quarterly published financial reports so that the owners are aware of the existence of Bank Papua.

2. *Human Capital Development*
   This human capital development plays an important role in the development of Bank Papua's business, because it will be coordinated by the Human Capital Management Division by making the following policies and strategies:

a. Menerima Calon Pegawai sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan didasarkan pada jumlah kebutuhan untuk memenuhi pengembangan struktur organisasi, jumlah sumber daya manusia yang pensiun, yang meninggal, yang di PHK, dan yang mengundurkan diri, sehingga antara penambahan dengan kebutuhan tidak terjadi *mismatch* (*gap*) dan selalu terjaga kuotanya.
b. Membangun Manajemen Sumber Daya Manusia yang sehat dan tumbuh berkembang secara berkesinambungan dan berkeadilan dengan penentuan kepastian *Job Grade* sehingga dapat menjadi *career path* pegawai yang tepat dan menarik
c. Program rekruitmen pengembangan pegawai melalui 3 jalur antara lain :
   - Program Jalur Spesialis Rekruitmen
   - Program Jalur Khusus (pengalaman+pendidikan)
   - Program Jalur Biasa
d. Program rekruitmen *afirmasi Bankers* khusus Putra Daerah.
e. Penerapan Aplikasi Sistem Karir dan Suksesi
f. Melakukan pengembangan keahlian melalui *training and development*:
   - Bidang Perkreditan yaitu memberikan pendidikan khusus analis kredit sesuai dengan segmentasi sektor kredit yang diberikan pendidikan dan *training* Kredit Konsumsi, Kredit Program dan UKM, Kredit Produktif sesuai dengan sektornya.
   - Bidang Pemasaran yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut pemasaran produk dana dan jasa.
   - Bidang *Dealer* yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut penempatan dana di pasar uang dan modal.
   - Bidang *programmer*, analis teknologi informasi dan *networking*.
   - Bidang *Auditor*, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
   - Bidang *Teller*, *Customer Service* untuk meningkatkan layanan, *service excelent*.
   - Bidang akuntansi, perencanaan keuangan, perpajakan dan pengadaan.
   - Bidang umum untuk memenuhi pengembangan bisnis, sekretaris, serta umum.
   - *Leadership*, strategi untuk semua yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional bisnis.

a. Receiving Candidates for Employees in accordance with the needs of Human Resources based on the number of needs to meet the development of organizational structures, the number of retired Human Resources, those who died, those who were laid off, and those who resigned, so there was no mismatch (gap) and always keep the quota.

b. Building a sound Human Resource Management and growing in a sustainable and equitable manner by determining the certainty of Job Grade can be the right and interesting Career Path for employees.

c. The employee development recruitment program through 3 lines includes:
   - *Recruiting Specialist Pathway Program*
   - *Special Pathways Program (experience + education)*
   - *Ordinary Pathway Program*

d. Bankers affirmation Recruitment Program for local employees.
e. Implementation of Career and Succession System Applications
f. Developing skills through training and development:
   - *Loan Sector is to provide special Loan analysis in accordance with the Loan sector segmentation which is given education and training in Consumption Loan, Program Loan and SMEs, Productive Loan in accordance with the sector.*
   - *The field of marketing is to provide special education concerning the marketing of funds and services.*
   - *The Dealer field is to provide special education concerning the placement of funds in the money market and capital.*
   - *Programmers, information technology analysts and networking.*
   - *Auditor, Risk Management, Compliance, Law in accordance with his educational background.*
   - *Field Teller, Customer Service to improve services, excel service.*
   - *Field of accounting, financial planning, taxation and procurement.*
   - *General fields to fulfill business, secretary, and public development.*
   - *Leadership, a strategy for all that is tailored to the operational needs of the business.*

g. Meningkatkan pengetahuan di bidang perkreditan, pasar uang dan modal, perekonomian bagi para pengambil keputusan baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui *workshop*, seminar.
h. Implementasi Sistem Manajemen *Talent*a dengan melakukan *talent Pool*, sehingga kebutuhan para Manajer *Lini, Middle* dan *Top* akan terpenuhi secara dini.

3. Pengembangan Produk dan Layanan.
Pengembangan produk dan layanan juga sangat penting dalam mendukung kesuksesan operasional Bank Papua, karena itu dalam implemetasinya akan dikoordinir oleh beberapa Divisi yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan strategi ini.
a. Meningkatkan/mempertahankan kecepatan layanan serta kondisi kenyamanan bagi nasabah guna membangun emosional loyalitas terhadap Bank Papua.
b. Mengembangkan produk dan *service* perbankan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang didasari pada riset terpadu yang dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis maupun dari Divisi-Divisi lainnya.
c. Meningkatkan *Fee Based Income* dari Produk dan jasa melalui pengembangan sistim IT, Mengembangkan fitur Produk.
d. Secara baik berkomunikasi dan melakukan aliansi strategis dengan Institusi Pemerintah dan Swasta guna membangun bisnis perusahaan.
e. Melakukan tinjauan *Pricing* produk secara berkala dengan memperhatikan kondisi persaingan antar Bank.
f. Mensosialisasikan produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat dalam bentuk program edukasi secara konsisten.
g. Menambah jaringan *delivery channel* baik berupa penambahan mesin ATM, EDC, CDM, Laku Pandai yang akan dikoordinir oleh Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan *E-Banking*.
h. Evaluasi dan *monitoring* terhadap Produk dan Layanan Bank secara berkala yang akan dilakukan baik oleh Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan *E-Banking* maupun oleh Divisi lainnya.
i. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara Bank Papua dan Pemerintah Daerah sebagai nasabah prima untuk menjaga penempatan dana tetap berada di Bank Papua dengan membuat mekanisme pelayanan dan protokoler khusus yang melayani nasabah Pemerintah Daerah.

g. Increasing knowledge in the fields of Loan, money market and capital, the economy for decision makers both domestically and abroad through workshops, seminars.
h. Implementation of the Talent Management System by performing Pool talent, so that the needs of Line, Middle and Top Managers will be fulfilled early.

3. Product and Service Development.
Product and service development is also very important in supporting the operational success of Bank Papua, therefore the implementation will be coordinated by several Divisions that are directly related to these policies and strategies.

a. Increase / maintain service speed and comfort conditions for customers to build emotional loyalty to Bank Papua.
b. Develop banking products and services that are in accordance with the needs of the community based on integrated research carried out by the Strategic Planning Division and other Divisions.
c. Increase Fee Based Income from Products and services through the development of IT systems, Developing Product features.
d. Good communication and strategic alliances with Government and Private Institutions to build the company's business.
e. Periodically review product pricing by taking into account the conditions of competition between banks.
f. Socialize bank products and services to the community in the form of consistent education programs.
g. Add network delivery channels in the form of adding ATM machines, EDC, CDM, Branchless Banking which will be coordinated by the Strategic Planning Division, Information Technology Division, Fund Management, Services & E-Banking Division.
h. Periodically evaluate and monitor Bank Products and Services that will be carried out by the Strategic Planning Division, Fund Management, Services, & E-Banking and other divisions.
i. Establish good relations and communication between Bank Papua and LGs as prime customers to maintain the placement of funds while at Bank Papua by creating a special service mechanism and protocol that serves LG customers.

4. Teknologi Informasi dan *Management Information System* (MIS)
   Peranan Teknologi dan Informasi ini sangat penting dalam rangka pengembangan operasional Bank, karena itu dalam melayani kebutuhan nasabah/debiturnya harus disesuaikan dengan perilaku nasabah/debitur saat ini, karena itu dalam mengklasifikasikan nasabahnya perlu dilakukan pemetaan yang signifikan antara kebutuhan yang diminta dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh Bank Papua, yang meliputi :
   a. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah seperti Pengembangan dan memperluas cakupan *Biller* Lokal/ Daerah (*payment point*) baik pada Provinsi, Kabupaten/Kota.
   b. Menyempurnakan aplikasi *payment point*.
   c. Penggantian *Core Banking* dan Pembentukan/ Pembangunan *Data Center*.
   d. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan perusahaan korporasi, menengah dan kecil.
   e. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan nasabah/debitur umum yang meliputi nasabah/debitur kelas atas, menengah dan bawah.
   f. Pemenuhan untuk kebutuhan internal Bank Papua yang akan dipergunakan untuk MIS yang mampu menelaah perkembangan pencapaian kinerja, pengukuran risiko, serta audit yang berbasis resiko yaitu dalam bentuk *Warehouse database*.
   g. Mengoptimalisasi *helpdesk* dengan memberikan informasi dengan cepat atas komplein nasabah
   h. Fokus terhadap pengembangan Laku Pandai.
   i. Pemenuhan teknologi informasi guna Ikut serta dalam program pemerintah terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
5. *Good Corporate Governance* (GCG) and *Risk Management*.
   Penyelenggaraan operasional bisnis Bank Papua perlu diimbangi dengan implementasi GCG, *Risk Management* dan Kepatuhan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Papua terus tumbuh dan berkembang, namun tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku, dengan menyelenggarakan :
   a. Memastikan Penerapan GCG kepada seluruh insan Bank Papua guna peningkatan pemahaman dan penerapan GCG bagi setiap Insan Bank Papua.

4. *Information Technology and Management Information System (MIS)*
   The role of Technology and Information is very important in the framework of developing the Bank's operations, because in serving the needs of its customers / debtors it must be adjusted to the behavior of current customers / debtors, therefore classifying its customers requires a significant mapping between the needs demanded and information technology owned by Bank Papua, which includes:
   a. *Fulfillment of information technology for the needs of Regional Governments such as Development and expanding the scope of Local / Regional Billers (paymetn points) both at the Province, Regency / Municipal*
   b. *Improve the payment point application.*
   c. *Replacement of Core Banking and Establishment / Development of Data Center.*
   d. *Fulfillment of information technology for the needs of Corporate, medium and small companies.*
   e. *Fulfillment of information technology for the needs of customers / general debtors which includes customers, debtors of the upper, middle and lower classes.*
   f. *Fulfillment of Bank Papua's internal needs that will be used for MIS that is able to review the progress of performance achievement, risk measurement, and risk-based audits in the form of a database Warehouse.*
   g. *Optimizing the help-desk by providing information quickly on customer components*
   h. *Focus on developing Branchless Banking.*
   i. *Fulfillment of information technology to participate in government programs related to the National Non-Cash Movement (GNNT).*
5. *Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management.*
   The implementation of Bank Papua's business operations needs to be balanced with the implementation of GCG, Risk Management and Compliance, so that activities carried out by Bank Papua continue to grow and develop, but remain within the corridor of the applicable provisions, by organizing:
   a. *Ensuring GCG Implementation for all Bank Papua personnel to improve understanding and implementation of GCG for every Bank Papua employee.*

b. Melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi pada setiap aktifitas bank. Yakni dengan melakukan kajian atas setiap aktifitas fungsional (kajian inisiatif) berdasarkan atas kejadian/ fakta-fakta dalam kurun waktu tertentu serta merekomendasikan pengendalian dalam rangka perbaikan/ pemulihan dari hal-hal yang merugikan bank.

c. Mengoptimalkan fungsi dan peran Staf Manajemen Risiko di Kantor Cabang yang bertanggung jawab kepada Divisi Manajemen Risiko Bank Kantor Pusat sebagai perpanjangan tangan untuk me*monitoring* seluruh aktifitas operasional yang ada di Kantor Cabang dan dapat dilaporkan dalam Laporan Profil Risiko Cabang (PRC).

d. Melakukan sosialisasi terhadap optimalisasi Penanaman Budaya *Awareness* (Budaya Peka) terhadap Risiko bagi seluruh Insan Bank Papua dan meminimalisir potensi Risiko yang akan timbul di kemudian hari.

e. Implementasi *Risk Based Approach* sesuai kelompok nasabah *(Low, Moderate* dan *High)* dengan menggunakan *system* teknologi informasi.

f. Penyajian Pelaporan Manajemen Risiko berupa Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko, KPMM, ICAAP, & LED yang lebih komprehensif kepada pihak manajemen maupun pihak eksternal terkait, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan Perusahaan (8 risiko).

g. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap Komitmen/ Janji dengan Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi :
   - *Monitoring* dan Pemantauan Penyelesaian Komitmen dan/atau janji Bank pada BI dan Otoritas Pengawasan lainnya serta penerapan Budaya Kepatuhan Seluruh Unit Kerja Bank Papua.
   - Penyusunan *Compliance Information System* (CIS).
   - Sosialisasi *Compliance Information System* (CIS).
   - Pemantauan terhadap Rasio-Rasio Keuangan Bank.

b. Identify, measure and mitigate each bank's activities. Namely by conducting a study of each functional activity (study initiative) based on the events / facts in a certain period of time and recommending control in the framework of improvement / recovery from things that harm the bank.

c. Optimizing the functions and roles of Risk Management Staff in Branch Offices who are responsible to the Leader Office Bank Risk Management Division as an extension to monitor all operational activities at the Branch Office and can be reported in the Branch Risk Profile Report (PRC).

d. Disseminate information on optimizing Awareness (Sensitive Culture) for Risks for all Bank Papua Individuals and minimizing potential risks that will arise in the future.

e. Implementation of the Risk Based Approach according to the customer group (Low, Moderate and High) using an information technology system.

f. The presentation of Risk Management Reporting in the form of a more comprehensive Bank Sound Rating, Risk Profile, CAR, ICAAP & LED to the management as well as related external parties, as an ingredient in determining Company Policy (8 risks).

g. Ensuring Bank Compliance with Commitments / Promises with Bank Indonesia (BI) and or the Financial Services Authority (OJK) includes:
   - *Monitoring and Monitoring of Settlement of Commitments and or promises of the Bank to BI and other Oversight Authorities as well as implementing the Compliance Culture for All Bank Papua Work Units.*
   - *Compliance Information System (CIS) Compilation.*
   - *Compliance Information System (CIS) Dissemination.*
   - *Monitoring of Bank Financial Ratios.*

Bidang Usaha

Business Fields

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Bank Papua melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

Business Activities According to the Articles of Association

In accordance with the Articles of Association, Bank Papua does business in the banking sector in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations with business activities as follows:

1. *Collecting funds from the public in the form of deposits in the form of current accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and / or other similar forms;*
2. *Giving Loan;*
3. *Issue debt recognition documents;*
4. *Buy, sell or guarantee at their own risk or for the interests and on the orders of their customers:*
   a. *Notes including notes drawn by the Bank whose validity period is not longer than the habit in the trading of said documents;*

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
d. Sertifikat Bank Indonesia;
e. Obligasi;
f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Papua, Bidang usaha Bank Papua adalah jasa keuangan perbankan, dengan beberapa produk jasa keuangan perbankan meliputi Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan/kredit, dan Layanan jasa Bank Papua.

b. Letter of acknowledgment of debt and other trade papers whose validity period is no longer than the habit in the trading of said documents;
c. State Treasury papers and government guarantee letters;
d. Bank Indonesia Certificate;
e. Bond;
f. Commercial papers with maturities of up to 1 (one) year;
g. Other securities instruments with maturities of up to 1 (one) year.

5. Transferring money for both their own interests and the interests of customers;
6. Placing funds in, lending funds from, or lending funds to other banks, either by using letters, telecommunication facilities or by money orders, checks or other facilities;
7. Receiving payments from bills for securities and calculating with or between third parties;
8. Other information deemed necessary by the Board of Director.

Current Business Activities

Based on Bank Papua's Articles of Association, the business sector of Bank Papua is banking financial services, with several banking financial services products including Third Party Funds, Financing / Loan, and Bank Papua services.

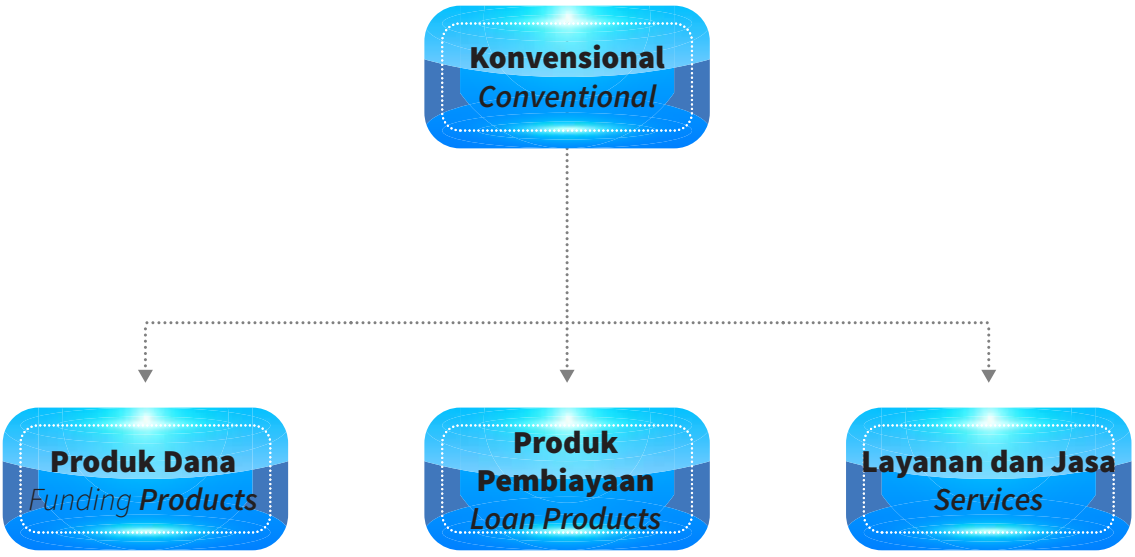

Produk Usaha Bank
Banking Products

Salah satu strategi untuk meningkatkan pencapaian target perusahaan serta kepuasan dalam pelayanan kepada seluruh nasabah, Bank Papua pun senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, Bank Papua telah menyediakan dan mengembangkan produk dan layanan jasa bank, antara lain:

One strategy to improve the achievement of company targets and satisfaction in service to all customers, Bank Papua also continues to improve service to all customers and meet the community's needs for banking products and services, Bank Papua has provided and developed bank products and services, including:

A. Produk Dana

Giro Bank Papua
adalah simpanan nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Penarikannya dilakukan dengan Cek, Bilyet Giro atau Surat Perintah Pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Deposito Berjangka
Produk ini merupakan simpanan nasabah yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Bank Papua menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

A. Fund Products

Bank Papua Current Account
is customer deposits that can be withdrawn at any time by the customer. The withdrawal is done by Check, Transfer form or other Payment Order in accordance with applicable regulations.

Time deposit
This product is a customer deposit whose withdrawal is based on a certain period of time that has been agreed upon and is intended for individuals and business entities in the form of legal entities. Bank Papua offers several options over time with competitive interest rates, can be extended automatically according to initial confirmation. The advantages of Time Deposits can be used as collateral for Loan.

Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan SIMPEDA merupakan produk tabungan nasional seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Indonesia dengan menawarkan bunga yang menarik dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk bertransaksi.

Tabungan Simanja (Simpanan Aman dan Sejahtera)

Tabungan Simpanan Aman dan Sejahtera (SIMANJA) merupakan produk tabungan khas Bank Papua yang dirancang khusus sebagai pilihan investasi yang menarik dan memiliki fitur asuransi.

TABUNGANKU (Tabungan Masa Depanku)

Tabunganku Bank Papua merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi perorangan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) Bank Papua

adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tujuannya adalah agar para pelajar sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadikan kegiatan menabung sebagai kebutuhan atau bahkan gaya hidup, bukan hanya sebagai kewajiban.

Simpeda Savings (Regional Development Deposits)

SIMPEDA Savings is a national savings product for all Regional Development Banks (BPD) Indonesia by offering attractive interest and providing various facilities to transact.

Simanja Savings (Safe and Prosperous Deposits)

Simpanan Aman dan Sejahtera Saving (SIMANJA) is a typical savings product of Bank Papua specifically designed as an attractive investment option and has insurance features.

MY SAVINGS (TabunganKu Account)

Tabunganku Bank Papua is a savings product intended for individuals issued jointly by banks in Indonesia to foster a culture of saving and improving people's welfare.

Simpanan Pelajar (SIMPEL) of Bank Papua

is savings for students issued nationally by attractive banks in the context of financial education and investment to encourage a culture of saving from an early age. The goal is so that students as the next generation of the nation can make saving activities as a need or even a lifestyle, not just as an obligation.

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
Tabungan
SIMANJA
Suku Bunga & Fitur Menarik
SIMANJA
BANK PAPUA
www.bankpapua.co.id
BANK PAPUA
0967 - 532011

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
Tabungan
SIMPEDA
Simpanan Pembangunan Daerah
Panen
Rejeki
Bank
BPD
Total Hadiah
Milyaran Rupiah
Diundi 2 x Setahun
www.bankpapua.co.id
BANK PAPUA
0967 - 532011

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
KARTU DEBIT
PERSIPURA
BANK PAPUA
PERSIPURA
mutiara hitam
Debit Card
www.bankpapua.co.id
BANK PAPUA
0967 - 532011

OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN
BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
Anak Sekolah...
Nabungnya di
SimPel BANK PAPUA
Simpanan Pelajar
Bebas Biaya Administrasi Bulanan
Setoran Awal Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
Syarat Mudah dan banyak Fitur Menarik
www.bankpapua.co.id
BANK PAPUA
0967 - 532011

B. Produk Kredit

Guna pembiayaan ekspansi bisnis yang prospektif atau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil, menengah dan besar, Bank Papua menawarkan berbagai kredit menurut jenis penggunaannya, antara lain:

Kredit Modal Kerja

adalah Kredit untuk perorangan atau badan usaha lainnya sebagai tambahan permodalan untuk pengembangan usaha yang telah berjalan dan biasanya akan habis dalam satu siklus usaha/produksi proyek misalnya bahan baku, bahan pembantu, biaya operasional, biaya proyek dan lain-lain.

Kredit modal kerja yang diberikan Bank Papua memiliki jenis yang beragam baik untuk usaha kecil menengah maupun besar yaitu:

- KMK Bank Papua Peduli.
- KMK Kontrakting.
- KMK R/C Perdagangan.
- KMK Dana Sendiri.
- KMK Dana Sendiri PRK.
- KMK Pemerintah Daerah.
- KMK Peduli Papua (Dijamin Pemerintah Daerah Provinsi).
- KMK Kontruksi dengan Penjaminan.
- KMK KUMK SUP-005.
- KMK R/C Perdagangan SUP 005.
- KMK Kontruksi SUP-005.
- KMK Peduli Papua (dijamin Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten).
- Pinjaman Usaha Mikro (PUM).
- KMK Mikro.
- KMK Kecil.

B. Loan Products

To finance prospective business expansion or to improve community welfare through small, medium and large businesses, Bank Papua offers a variety of loans according to the type of usage, including:

Working Capital Loan

is Loan for individuals or other business entities in addition to capital for ongoing business development and will usually run out in one business cycle / production project such as raw materials, auxiliary materials, operational costs, project costs and others.

Working capital loans provided by Bank Papua have a variety of types both for small and medium businesses, namely:

- *Bank Papua Cares WCL.*
- *Contracting WCL.*
- *R / C Trade WCL.*
- *Own Fund WCL.*
- *Own funds PRK WCL.*
- *Regional Government WCL.*
- *Cares for Papua (Guaranteed by the Provincial Government) WCL.*
- *Construction with Guarantee WCL.*
- *KSME SUP-005 WCL.*
- *R / C Trade SUP 005 WCL.*
- *Kontruksi SUP-005 WCL.*
- *Cares for Papua (guaranteed by the City / Regency Regional Government) WCL.*
- *Micro Business Loans (PUM) .*
- *Micro WCL.*
- *Small WCL.*

Kredit Konsumsi

adalah kredit yang diberikan untuk perseorangan, termasuk pegawai untuk keperluan barang konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Kredit ini terdiri atas :

- KKs Griya Bhakti.
- KKs Wira Bhakti.
- KKs Purna Bhakti.
- KKs Multi Guna.
- KKs PUMP-KB Jamsostek.
- Kks Kendaraan.

Consumption Loan

is loans granted to individuals, including employees for consumption goods by buying, renting or by other means. This Loan consists of:

- *Griya Bhakti CLs.*
- *Wira Bhakti CLs.*
- *Purna Bhakti CLs.*
- *Multi-purpose CLs.*
- *Jamsostek PUMP-KB CLs.*
- *Vehicle CLs.*

Kredit Sindikasi

adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Kredit ini terdiri atas :

- KS Investasi.
- KS Modal Kerja.
- KS KMK RC.

Syndication Loan

is the loan granted by a group of banks to one debtor whose Loan is too large if given by only one bank. This Loan consists of:

- *Investment SL.*
- *Working Capital SL.*
- *KMK RC SL.*

Kredit Investasi

adalah Kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk pembelian investasi atau barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

Jenis dari Kredit Investasi yaitu :

- KI Dana Sendiri.
- KI Papua Peduli (Dijamin Pemerintah Daerah).
- KI KUMK SUP-005.
- KI Mikro.
- KI Kecil.
- KI Kendaraan Usaha.

Investment Loan

is a medium / long term loan granted to (prospective) debtors for the purchase of investments or capital goods in the context of rehabilitation, modernization, expansion or establishment of new projects.

Types of Investment Loan, namely:

- *Dana Sendiri IL.*
- *Papua Peduli IL(Guaranteed by the Regional Government).*
- *KSME SUP-005 IL.*
- *Micro IL.*
- *Small IL.*
- *Business Vehicles IL.*

Kredit Program Pemerintah

adalah skim kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong sektor UMKM. Kredit ini terdiri atas :

- KPP Koperasi dan Anggota.
- KPP Ketahanan Pangan.
- KPP KMK KUR.
- KPP KI KUR.
- KPP KMK KUR R/C Perdagangan.
- KPP KMK KUR Konstruksi.

Kredit Pegawai Dan Pensiun

adalah kredit pegawai berpenghasilan tetap dan pensiunan diperuntukkan bagi : Pegawai Negeri Sipil Otonom Pegawai Instansi Vertikal BUMN/BUMD, TNI/POLRI, Anggota Badan Legislatif (DPR-RI, DPD, DPRP, DPRD, MRP), Pegawai Swasta/ lembaga tertentu CPNS dan Pensiunan Profesional

Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE)

Merupakan fasilitas kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan kepada Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program Ketahanan Pangan dan Energi.

KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan kepada UMKM baik langsung maupun melalui lembaga linkage yang memiliki kelayakan usaha dalam sektor ekonomi produktif namun belum bankable dalam bentuk kredit modal kerja atau investsi.

Government Program Loan

is a loan scheme issued by the government in order to encourage the MSME sector. This loan consists of:

- *Cooperative KPP and Members GPL.*
- *Food Security GPL.*
- *KMK KUR GPL.*
- *KI KUR GPL.*
- *KMK KUR R / C Trading GPL.*
- *KMK KUR Construction GPL.*

Employee and Pension Loan

is loan for permanent and retired income employees intended for: Autonomous Civil Servants Employees of BUMN / BUMD Vertical Agencies, TNI / POLRI, Members of the Legislative Body (DPR-RI, DPD, DPRP, DPRD, MRP), Private Employees / CPNS and Pensioners Professional

Food and Energy Security Loan (KKPE)

It is an investment loan facility and or working capital provided to Farmers, Planters, Farmers, Fishermen and fish farmers in order to support the implementation of Food and Energy Security programs.

KUR (People's Business Loan)

People's Business Loan (KUR) is loans given to MSMEs both directly and through linkage institutions that have business feasibility in productive economic sectors but are not yet bankable in the form of working capital loans or investments.

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
KUR
Kredit Usaha Rakyat
BANK PAPUA
bunga
7%
per tahun
dengan cicilan Murah & Ringan
untuk mengembangkan usaha Anda
Syarat Mudah
Jangka Waktu s/d 5 Tahun
100% Menggunakan Dana Bank Papua
PON XX
2020
Papua

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
Wujudkan Impian Anda
dengan Kredit Pegawai BANK PAPUA
Bagi Anda PNS, TNI, POLRI dan Karyawan Swasta
bunga mulai
0,75%
per bulan flat
PROSES
ONE DAY SERVICE
SATU HARI CAIR
KENDARAAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
Syarat Mudah
Jangka Waktu s/d 15 Tahun
Segera hubungi BANK PAPUA terdekat di kota Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
www.bankpapua.co.id

BANK INDONESIA
BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
KARTU DEBIT GPN BANK PAPUA
AMAN, ANDAL dan TERPERCAYA
Untuk kemudahan bertransaksi non tunai di seluruh Indonesia
Segera tukarkan kartu Debit Bank Papua Card lama Anda
dengan debit Bank Papua Card berlogo GPN yang baru secara GRATIS
di seluruh jaringan Kantor Bank Papua
PON XX
2020
Papua
www.bankpapua.co.id

BANK INDONESIA
BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
Kartu Debit GPN BANK PAPUA
Gerbang Pembayaran Nasional
Aman, Andal, Terpercaya
Untuk kemudahan bertransaksi non tunai di seluruh Indonesia
Segera tukarkan kartu Debit Bank Papua Card lama Anda
dengan debit Bank Papua Card berlogo GPN yang baru secara GRATIS
di seluruh jaringan Kantor Bank Papua
PON XX
2020
Papua
www.bankpapua.co.id

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
KPR
Sejahtera
DP 1%
MULAI
BUNGA
5% FIXED
s/d
JATUH TEMPO
Proses Cepat
Syarat Mudah
Jangka Waktu s/d 20 Tahun
Perlindungan Asuransi Jiwa & Kebakaran
BANK PAPUA bersama Pemerintah siap mewujudkan
Program Sejuta Rumah untuk Rakyat Indonesia
Segera hubungi BANK PAPUA
terdekat di kota Anda
*Subsidi Pemerintah
*Syarat dan ketentuan berlaku
BANK PAPUA
0967 - 532011
www.bankpapua.co.id

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
KPR
Sejahtera
DP 1%
MULAI
BUNGA
5% FIXED
s/d
JATUH TEMPO
Saatnya Semua
Bisa Punya RUMAH...!!
*Syarat dan ketentuan berlaku
www.bankpapua.co.id
BANK PAPUA
0967 - 532011

C. Jasa Perbankan lainnya

Bank Papua *Card*.
Untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM, CDM yang memberikan kemudahan 24 jam (7 hari dalam seminggu) serta dapat digunakan sebagai kartu debet dalam bertransaksi di EDC *Merchant* berlogo Bank Papua dan prima. Kartu ini dapat memberikan kemudahan bertransaksi seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer dana dan *payment point*.

Transfer/Kliring/RTGS.
Kartu ATM/ Debit Bank Papua.
Kemudahan bertransaksi dalam satu kartu.

EDC (*Electronic Data Capture*).
Mesin pembayaran menggunakan Kartu ATM Bank Papua yang menjadikan pembayaran pembelanjaan menjadi lebih mudah dan aman.

CDM (*Cash Deposit Machine*).
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Setoran yang disediakan khusus untuk setoran tunai secara realtime dan bebas biaya ke rekening sendiri di Bank Papua.

Samsat *Online*.
Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi jasa ketatausahaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendapatan lain-lain secara *online*.

Layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
Layanan kartu identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan fasilitas perbankan. Layanan ini berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, Kartu Taspen, Kartu Askes, Bapertarum dan sebagai Kartu ATM Bank Papua.

BPDNet *Online*.
Kemudahan setoran tunai ke seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara realtime melalui *Teller* Bank Papua.

Save Deposit Box (SDB).
Fasilitas jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

C. Other Banking Services

Bank Papua Card.
To conduct banking transactions through an ATM machine, CDM that provides 24-hour convenience (7 days a week) and can be used as a debit card when transacting on EDC Merchants bearing the Bank Papua logo and prime. This card can provide easy transactions such as cash withdrawals, balance checks, fund transfers and payment points.

Remmitance / Clearing / RTGS.
Bank Papua ATM / Debit Card.
Easy transaction on one card.

EDC (Electronic Data Capture).
The payment machine uses the Bank Papua ATM Card which makes shopping payments easier and safer.

CDM (Cash Deposit Machine).
Automated Teller Machines (ATM) Deposits provided specifically for cash deposits in real time and free of charge to own accounts at Bank Papua.

Samsat Online.
Motorized vehicle tax payment services (PKB), administrative service fees, motor vehicle name transfer fees (BBNKB) and other income online.

Electronic Employee Card Service (KPE).
Civil Servants (PNS) identity card services with banking facilities. This service functions as a PNS Identity Card, Taspen Card, Askes Card, Bapertarum and as a Bank Papua ATM Card.

BPDNet Online.
Ease of cash deposits to all Regional Development Banks (BPD) in real time through Bank Papua Teller.

Save Deposit Box (SDB).
Service facilities for customers to store valuables and confidential personal documents with a modern technology security system.

Kas Daerah *Online* (KASDA *ONLINE*).

Merupakan layanan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan informasi transaksi rekening Giro Pemerintah Daerah secara *Online*.

Garansi Bank.

Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Regional Cash Online (KASDA ONLINE).

Is a service to the Regional Government in terms of providing information on Transactions of Regional Government Current Account Accounts Online.

Bank Guarantee.

Guarantee of payment given to the recipient of the guarantee (can be individuals or companies), if the guaranteed party cannot fulfill its obligations.

Referensi Bank.
Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah Perorangan atau Perusahaan.

Bank's reference.
Certificate issued by the Bank at the request of an individual or company customer.

Automatic Teller Machine (ATM) Bank Papua
Mesin pengambil uang dengan banyak fungsi dan tergabung dalam jaringan Bank Papua, ATM Bersama dan jaringan Prima di seluruh Indonesia.

Automatic Teller Machine (ATM) Bank Papua
A multi-function money-taking machine and inCorporated into the Bank Papua network, ATM Bersama and Prima networks throughout Indonesia.

Payment point Telkomsel.
Layanan pembayaran tagihan Telkomsel dan pembelian pulsa melalui ATM dan *Teller* Bank Papua.

Telkomsel Payment point.
Telkomsel bill payment services and Loan purchases through ATMs and Bank Papua Teller.

Payment point Indosat.
Layanan pembayaran tagihan Indosat dan pembelian pulsa melalui ATM.

Indosat Payment point.
Indosat bill payment services and Loan purchases via ATM.

Payment point PLN.
Layanan yang diberikan kepada nasabah terutama dalam pembayaran listrik PLN yang meliputi Pembayaran Tagihan Listrik, Tagihan dan Pembayaran Lainnya secara terpusat yang dapat dilakukan melalui *Teller* maupun secara Autodebet/ Pemindah bukuan.

PLN Payment point.
Services provided to customers, especially in PLN electricity payments, which include centralized Electricity Bill, Bill and Other Payments, which can be done through Teller or Autodebet / Book Transfer.

Layanan *Airport Executive Lounge*.
Fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Papua berupa pemanfaatan ruangan *Airport Executive Lounge* dibeberapa Bandara diseluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank Papua. Fasilitas ini diberikan gratis bagi nasabah pemegang Platinum *Card* Bank Papua.

Airport Executive Lounge Service.
Service facilities provided to Bank Papua customers in the form of Airport Executive Lounge use in several Airports throughout Indonesia that have collaborated with Bank Papua. This facility is provided free for customers of the Bank Papua Platinum Card.

SMS Banking Bank Papua.
Kemudahan bertransaksi perbankan kapan saja dan dimana saja melalui handphone.

Bank Papua SMS Banking.
Ease of banking transactions anytime and anywhere via mobile.

Bank Papua Mobile Banking
adalah fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi langsung melalui *smartphone* secara aman, mudah, dan cepat. Bank Papua *Mobile Banking* memberikan layanan transaksi informasi saldo, transfer (internal dan external), pembelian (voucher pulsa telephone, listrik PLN dan lainnya), pembayaran (tagihan telepon, Listrik PLN danlainnya). Aplikasi Bank Papua *Mobile Banking* support untuk *smartphone* dengan OS Android.

Bank Papua Mobile Banking
is a banking service facility that makes it easy for customers to transact directly through smartphones safely, easily, and quickly. Bank Papua Mobile Banking provides balance information transaction services, transfers (internal and external), purchases (telephone pulse vouchers, PLN electricity and others), payments (telephone bills, PLN electricity and others). Bank Papua Mobile Banking application support for smartphones with Android OS.

DOWNLOAD APLIKASINYA DI :

GET IT ON Google Play

PRIMA ATM BERSAMA DEBIT BCA EDC BANK PAPUA

Struktur Organisasi
Organization Structure

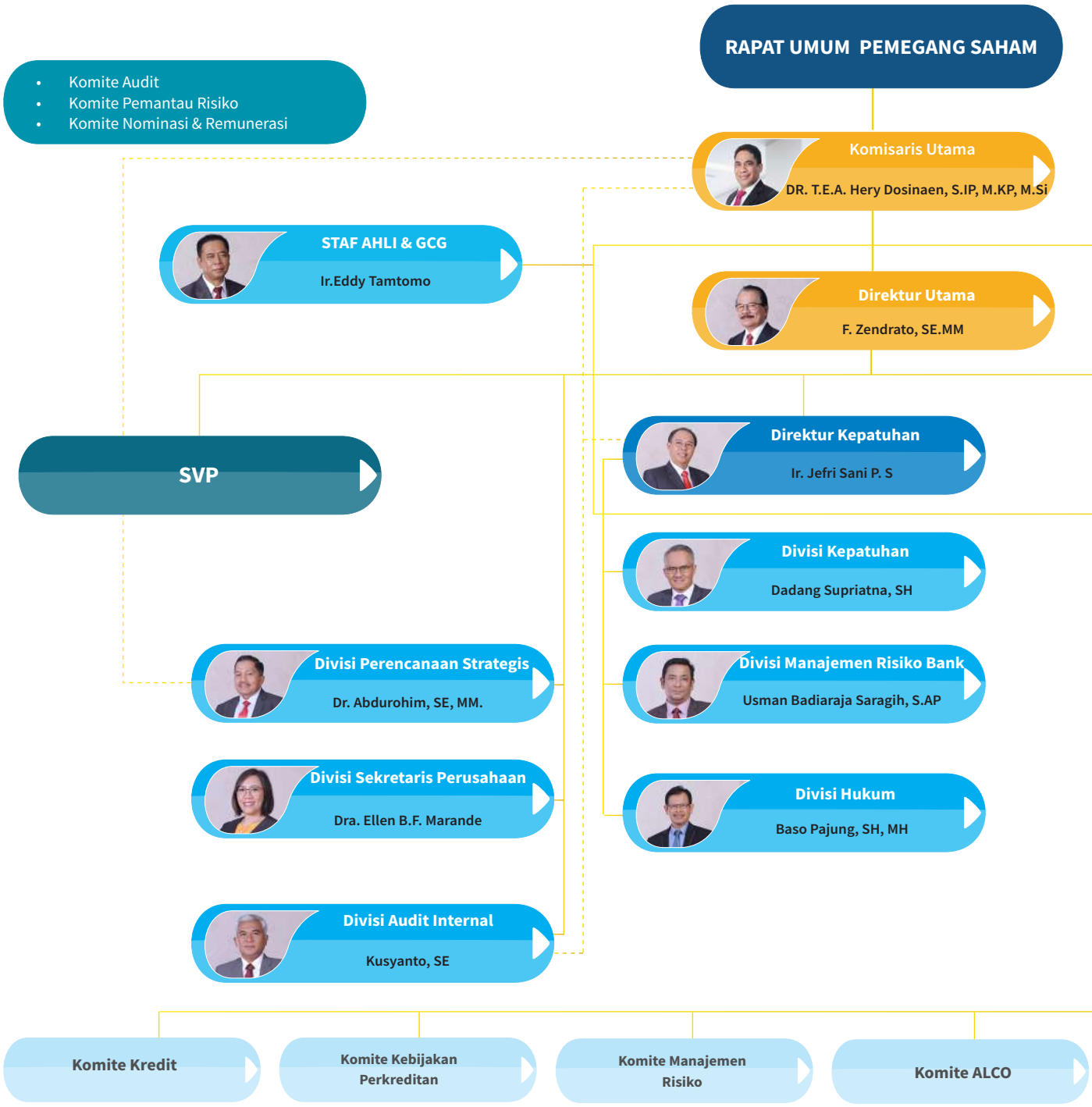

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/DIR-BPD/XI/2019 Tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (*Job Profile*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka Struktur Organisasi Bank Papua adalah sebagai berikut:

Based on Board of Director Decree No. 54 / DIR-BPD / XI / 2019 November 26, 2019 concerning Organizational Structure and Job Profile (Job Profile) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ., so the Bank Papua Organizational Structure is as follows:

Struktur Organisasi
Organization Structure

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Surat OJK No. SR-247/PB.12/2018 tanggal 12 November 2018
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Surat OJK No. : SR-213/PB.12/2018 tanggal 8 Oktober 2018
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris	Surat OJK No. SR-31/PB.12/2018 tanggal 26 Februari 2018
Dortheis Sesa, SE	Komisaris	Surat OJK No. SR-31/PB.12/2018 tanggal 26 Februari 2018

Direksi *Board of Directors*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
F. Zendrato, SE.MM	Direktur Utama	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua)
Ir. Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua)
Rudhy Dharma, SE	Direktur Keuangan	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua)
Isak Samuel Wopari, SE.MM	Direktur Operasional	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua)
Ir. Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua)

Pemimpin Divisi *Division Leader*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dr. Abdurohim, SE, MM.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	SK Direksi Nomor : 297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
Dra. Ellen B.F Marande	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	SK Direksi Nomor : 297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
Kusyanto, SE.	Pemimpin Divisi Audit Internal	SK Direksi Nomor : 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019.
Dadang Supriatna, SH	Pemimpin Divisi Kepatuhan	SK Direksi Nomor: 421/KEPEG/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
Usman Badiaraja Saragih, S.AP	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	SK Direksi Nomor :297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
Baso Pajung SH, MH.	Pemimpin Divisi Hukum	SK Direksi Nomor : 421/KEPEG/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018
Wastu Anggoro Wijonarko, SE.MM	Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & E Banking	SK Direksi Nomor: 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.
Daniel Palulungan, S.Pi, MM	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Korporasi	SK Direksi Nomor: 132/KEPEG/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
Dr. Abraham Krey	Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer	SK Direksi Nomor: 03/KEPEG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.
Petrus Agus Soleman, SE	Pemimpin Divisi *Treasury*	SK Direksi Nomor: 94/KEPEG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
Andreas Didik Wijayanta, SE	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	SK Direksi Nomor: 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.
Yuliana D Yembise, SH.MH	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	SK Direksi Nomor: 03/KEPEG/I/2017 tanggal 07 Januari 2019.
Olvie Ineke Kembuan, SE, MM	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan	SK Direksi Nomor: 03/PK-KWT/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.
Martha Agustina Rumaseuw, SE	Pemimpin Divisi Akuntansi	SK Direksi Nomor: 94/KEPEG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
Imran, SE	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	SK Direksi Nomor: 94KEPEG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
Octovina Paulina, SE.Msi	Pemimpin Divisi Umum	SK Direksi Nomor: 03/KEPEG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.
Ir. Pujianto, M.Si	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	SK Direksi Nomor: 94/KEPEG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

Pejabat Eksekutif *Executive Officer*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Ir.Eddy Tamtomo	Staf Ahli dan GCG	SK Direksi Nomor : 03/KEPEG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.

Komite dibawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Komite Audit

Audit Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dortheis Sesa, SE	Ketua	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Jonathan Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Marthin Y. Warikar, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Ketua	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Dortheis Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Jonathan Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Ivant B. Simamora, S.Sos	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Ketua	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Dortheis Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Komite dibawah Direksi

Committees under the Board of Directors

Komite Kredit

Credit Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Ketua	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Divisi Risiko BIsnis	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Departemen Kredit Korporasi dan Sindikasi	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Departemen Kredit Komserial	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Pemimpin Departemen Kredit Risiko Bisnis Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Analis Risiko Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017
Relationship Manager (RM)	Anggota	SK Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017

Komite Kebijakan Perkreditan

Credit Policy Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ketua	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi	Sekretaris	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Direktur Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Direktur Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Direktur Keuangan	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Direktur Operasional	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Anggota	SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Perubahan SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Komite Manajemen Risiko

Risk Management ***Committee***

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ketua	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Direktur Kepatuhan	Wakil Ketua	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Sekretaris	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Wakil Sekretaris	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Direktur Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Direktur Keuangan	Anggota	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Direktur Operasional	Anggota	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota	SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017

Komite ALCO

ALCO Committee

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ketua I	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Direktur Bisnis	Ketua II	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Direktur Keuangan	Ketua III	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi *Treasury*	Sekretaris	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Direktur Operasional	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Direktur Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Teknologi dan Informasi	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Dana, Jasa & *E-Banking*	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Akuntansi	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019
Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura	Anggota	SK Direksi Nomor 20/DIR-BPD/IV/2019 tanggal 08 April 2019

Komite Teknologi Informasi *Information Technology Committee*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Direktur Operasional	Ketua	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Direktur Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Direktur Keuangan	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Teknologi Informasi	Sekretaris /Angota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Akuntansi	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Perencanaan Strategis	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi *Treasury*	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Umum	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Manajemen Risiko Bank	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Bisnis UMK & Konsumer	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Kantor Cabang Utama Jayapura	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Risiko Bisnis	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & *E-Banking*	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan	Anggota	SK Direksi Nomor 26/DIR-BPD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017

Komite Pertimbangan Pegawai *Employee Advisory Committee*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Direktur Operasional	Ketua	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Wakil Ketua	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Departemen Administrasi SDM	Sekretaris	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDM	Sekretaris	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
Ketua Departemen *Anti Fraud*	Anggota	SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017

Komite Pertimbangan Kasus Pegawai *Employee Case Advisory Committee*

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Ketua Departemen *Anti Fraud*	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Tim Investigasi	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
Pemimpin Departemen Administrasi SDM	Anggota	SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017

Catatan
SK Direksi No. 65/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 desember 2017 perihal: Komite Pertimbangan Kasus Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (data di atas sementara masih menggunakan data SK yang lama, dikarenakan SK terbitan yang baru sementara dalam proses).

Note
Board of Directors Decree No. 65 / DIR-BPD / XII / 2017 dated December 4, 2017 regarding: The Employee Case Advisory Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (the data above is still using the old decree data, due to the new SK issuance while in process).

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Profile

DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si
Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan *Term of Office*	12 November 2018 - sampai penutupan RUPS 2022 (periode 1)	*November 12, 2018 - until the closing of the 2022 GMS (period 1)*
Usia *Age*	52 Tahun. Lahir di Flores Timur 4 Mei 1967.	*52 years old. Born in East Flores May 4, 1967.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada tahun 1997 dan Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Cenderawasih tahun 2015.	*He completed his Bachelor's education at Gadjah Mada University, Jogjakarta in 1997 and Post-graduate Government Science at Cenderawasih University in 2015.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	Seminar Penguatan Permodalan BPD dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Fungsi *Agent of Development*, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) tanggal 21-23 November 2019 di Mataram, NTB.	*The Seminar on Strengthening BPD Capital in the Context of Improving the Competitiveness and Function of the Agent of Development, was held by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI) on 21-23 November 2019 in Mataram, NTB.*

Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain : • Kepala Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2000. • Kepala Bagian Informasi & Komunikasi Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2002 . • Sekretaris DPRD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2003. • Asisten II Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 • Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010. • Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Tahun 2013. • Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tahun 2014.	*Other positions that have been or are being held include:* • *Head of the Mulia District of Puncak Jaya Regency in 2000.* • *Section Head of Information & Communication Puncak Jaya Regency in 2002.* • *DPRD Secretary of the Puncak Jaya Regency in 2003.* • *Assistant II for Government of the Regional Secretary of Puncak Jaya Regency in 2008.* • *Act. Regional Secretary of Puncak Jaya Regency in 2010.* • *Assistant for the Governance and Welfare of the Papua Province in 2013.* • *Regional Secretary of the Papua Province in 2014.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Komisaris Bank Papua pada tanggal 21 Desember 2018. • Surat OJK No. SR-247/PB.12/2018 tanggal 12 November 2018 tentang penyampaian salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atas pengangkatan komisaris utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). • Surat OJK tentang salinan keputusan anggota Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-185/D.03/2018 tentang Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr. DR. T.E.A. Hery Dosinaen selaku komisaris utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Occupied as Commissioner of Bank Papua on December 21, 2018.* • *OJK letter No. SR-247 / PB.12 / 2018 dated 12 November 2018 concerning the submission of a copy of the decision on the results of the fit and proper test (PKK) for the appointment of the president commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . (Bank Papua).* • *OJK letter concerning a copy of the decision of the member of the financial service authority commissioner number KEP-185 / D.03 / 2018 regarding the results of the evaluation of the ability and appropriateness of Mr. DR. T.E.A. Hery Dosinaen as the president commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	*Certificate of Competence level* 1 Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	*Certificate of Competence 1st level Banking Risk Management from the Banking Professional Certification Institute*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan *Term of Office*	8 Oktober 2018 - sampai penutupan RUPS 2022 (periode 1)	*October 8, 2018 - until the closing of the 2022 GMS (period 1)*
Usia *Age*	57 Tahun. Lahir di Manokwari, 11 November 1962.	*57 years old. Born in Manokwari, November 11, 1962.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan
Education

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura pada tahun 1987 dan Pendidikan Pasca Sarjana di bidang Kebijakan Publik MAP Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada tahun 2004.

Graduated with a Bachelor's degree in the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Cenderawasih Jayapura in 1987 and Post-Graduate Education in the field of Public Policy MAP Gadjah Mada University Jogjakarta in 2004.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019
Training and Educaton had followed in 2019

- *Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI), tanggal 7 Oktober 2019 di Jakarta.
- Seminar Penguatan Permodalan BPD dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Fungsi *Agent of Development*, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) tanggal 21-23 November 2019 di Mataram, NTB.
- Seminar Nasional *The 3rd Consumer Banking Forum: The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties*, diselenggarakan oleh PT. Sinergi Indonesia Asia Pintar, tanggal 27 November 2019, di Jakarta.

- *Workshop on the Impact of Non Performing Loan and Bankrupt Debtors in BPD in the Law and Tax Perspective organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI), 7 October 2019 in Jakarta.*
- *Seminar on Strengthening BPD Capital in the Context of Improving Competitiveness and Function of Agent of Development, organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI) on 21-23 November 2019 in Mataram, NTB.*
- *The 3rd Consumer Banking Forum National Seminar: The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties, organized by PT. Synergy of Indonesia Smart Asia, 27 November 2019, in Jakarta.*

Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain : • Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari Tahun 1994-2001. • Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) Tahun 2003-2008. • Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2008-2010. • Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2014. • Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2017.	*Other positions that have been or are being held include:* • *Head of Staffing Section of the Regional Secretariat of Manokwari Regency 1994-2001* • *Head of Regional Secretariat Bureau of West Papua Province (West Irian Jaya) 2003-2008.* • *Head of Regional Office IX of Jayapura BKN 2008-2010.* • *Assistant for Economic Development and Social Welfare for 2011-2014.* • *Regional Secretary of West Papua Province 2014-2017.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Komisaris Bank Papua pada tanggal 21 Desember 2018. • Surat OJK No. SR-213/PB.12/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang penyampaian salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atas pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). • Surat OJK tentang salinan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-169/D.03/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan SDr. Nataniel Dominggus Mandacan selaku anggota dewan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Occupied as Commissioner of Bank Papua on December 21, 2018.* • *OJK letter No. SR-213 / PB.12 / 2018 dated October 8, 2018 concerning the submission of a copy of the decision on the results of the fit and proper test (PKK) for the appointment of the board of commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . (Bank Papua).* • *OJK letter regarding a copy of the decision of the members of the Financial Services Authority Board of Commissioners number KEP-169 / D.03 / 2018 dated 2 October 2018 concerning the results of the evaluation of the ability and appropriateness of Mr. Nataniel Dominggus Mandacan as a member of the board of commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	*Certificate of Competence level* 1 Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.	*Certificate of Competence 1st level Banking Risk Management from the Banking Professional Certification Institute.*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan *Term of Office*	26 Februari 2018 - sampai penutupan RUPS 2022 (periode 1)	*February 26, 2018 - until the closing of GMS 2022 (period 1)*
Usia *Age*	66 tahun. Lahir di Sorong 01 November 1953	*66 years old. Born in Sorong on November 1, 1953*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Bsc Administrasi Niaga di Universitas Cenderawasih Jayapura pada tahun 1982. Sarjana Ekonomi, di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1996. Magister Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 2000.	*She obtained his BSc Business Administration degree at Cenderawasih Jayapura University in 1982. Bachelor of Economics, at Krisnadwipayana University, Jakarta in 1996. Master of Financial Management at the IPWI Jakarta College of Economics in 2000.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• *Training* Bimbingan Teknis Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Melalui *e-filling* dan Penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN, diselenggarakan oleh ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), tanggal 14-15 Februari 2019, di Batam, Kepri. • *Workshop Expand Leadership* Program for BOD/ BOC, diselenggarakan oleh *Corporate Leadership Development Institute* (CLDI), tanggal 20 - 23 Februari 2019, di Jakarta. • *Workshop* Kupas Tuntas Pengujian Model Bisnis, SPPI *Test dan Forward Looking*, diselenggarakan oleh *Awesome Consulting*, tanggal 11 - 12 April 2019 di Jakarta. • *Workshop Risk Based Auditing* diselenggaraka oleh Prospero *Consulting and Training*, tanggal 18 - 19 Juni 2019 di Jakarta. • Seminar FKDKP dan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2019 diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), tanggal 27 Juni 2019 di Jakarta. • *Refreshment* Program Manajemen Risiko diselenggaraka oleh ASBANDA tanggal 30 Juli 2019 - 06 Agustus 2019 di Moscow. • Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Bali diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 23 Agustus 2019 di Bali.	• *Technical Guidance Training for Submission of Annual Personal Income Tax Return (OP) Through e-filling and Submission of LHKPN through e-LHKPN, organized by ASBANDA (Regional Development Bank Association), 14-15 February 2019, in Batam, Riau Islands.* • *Expand Leadership Program Workshop for BOD / BOC, organized by the Corporate Leadership Development Institute (CLDI), February 20-23, 2019, in Jakarta.* • *A Completion Workshop for Business Model Testing, SPPI Test and Forward Looking, organized by Awesome Consulting, April 11-12, 2019 in Jakarta.* • *Workshop on Risk Based Auditing held by Prospero Consulting and Training, 18-19 June 2019 in Jakarta.* • *FKDKP Seminar and 2019 General Meeting of Members (RUA) was held by the Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP), on 27 June 2019 in Jakarta.* • *Refreshment of the Risk Management Program organized by ASBANDA on July 30, 2019 - August 6, 2019 in Moscow.* • *BPD SI National Seminar and SIMPEDA Savings National Draw Drawing in Bali were held by ASBANDA on August 23, 2019 in Bali.*

	• Seminat PSAK 71 for BOC diselenggarakan oleh PT. *Risk Management* Guard (RMG) tanggal 29 - 30 Agustus 2019 di Jakarta. • *Workshop* APU PPT: *Risk Assessment*, *Risk Based Approach* dan Simulasi tanggal 12 - 13 September 2019 di Bandung. • Seminar FKDKP Untuk Level Komisaris, Direksi, Pejabat Level Eksekutif dengan Topik Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan diterapkan pada tahun Beserta Dampaknya serta Diskusi Mengenai Pendalaman Dalam Penyusunan POJK 51 diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) tanggal 26 September 2019 di Jakarta. • *Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI), tanggal 7 Oktober 2019 di Jakarta. • *Focus Group Discussion* (FGD) Buku Panduan/ *Manual Book* Direksi dan Komisaris Bank serta *Code of Conduct* diselenggarakan oleh ASBANDA, tanggal 07 - 08 November 2019 di Bandung. • Seminar Penguatan Permodalan BPD dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Fungsi *Agent of Development*, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) tanggal 21-23 November di Mataram, NTB. • Seminar Nasional *The 3rd Consumer Banking Forum: The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties*, diselenggarakan oleh PT. Sinergi Indonesia Asia Pintar, tanggal 27 November 2019, di Jakarta.	• *Seminat PSAK 71 for BOC is organized by PT. Risk Management Guard (RMG) 29 - 30 August 2019 in Jakarta.* • *APU PPT Workshop: Risk Assessment, Risk Based Approach and Simulation on 12-13 September 2019 in Bandung.* • *FKDKP Seminar for Commissioner, Board of Director, Executive Level Officers with Topics for Understanding the Implementation of PSAK 71 & 73 which will be implemented in the year along with its Impacts and Discussions Regarding Deepening in the Formulation of POJK 51 organized by the Communication Forum for Banking Compliance Board of Director (FKDKP) on September 26, 2019 in Jakarta.* • *Workshop on the Impact of Non Performing Loan and Bankrupt Debtors in BPD in the Law and Tax Perspective organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI), 7 October 2019 in Jakarta.* • *Focus Group Discussion (FGD) The Board of Director and Commissioners of the Bank's Manual and Code of Conduct are held by ASBANDA, November 7-08, 2019 in Bandung.* • *Seminar on Strengthening BPD Capital in the Context of Improving the Competitiveness and Function of the Agent of Development, organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI) on November 21-23 in Mataram, NTB.* • *The 3rd Consumer Banking Forum National Seminar: The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties, organized by PT. Synergy of Indonesia Smart Asia, 27 November 2019, in Jakarta.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	• Pensiun dari Bank Indonesia (BI), Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) pada 1 Desember 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Grup Pengaturan Bank-2/DPNP. • Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT. Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2010-2013. • Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT. Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2013-2014. • Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko PT. Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2014-2015. • Komisaris Independen PT. Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2015 - 2017.	• *Pension from Bank Indonesia (BI), Directorate of Banking Research and Regulation (DPNP) on December 1, 2009 with the last position as Executive Researcher / Chairperson of the Bank-2 Arrangement Focus Group / DPNP.* • *Risk Management Director (Non-Operational) PT. Bank KEB Hana Indonesia Year 2010-2013.* • *Risk Management Director (Non-Operational) PT. Bank KEB Hana Indonesia in 2013-2014.* • *Compliance Director and Risk Management Director of PT. Bank KEB Hana Indonesia 2014-2015.* • *Independent Commissioner of PT. KEB Hana Bank Indonesia in 2015 - 2017.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak 19 April 2018 berdasarkan SK RUPS Nomor: 01/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 tanggal 25 April 2018.	*Occupied as Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . since April 19, 2018 based on SGM Decree Number: 01 / SK / SIRKULER-BPD / IV / 2018 dated April 25, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	*Certificate of Competence level* 5 Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.	*Certificate of Competence 5th level Banking Risk Management from the Banking Professional Certification Institute.*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali.	*She has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Dortheis Sesa, SE

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan *Term of Office*	26 Februari 2018 - sampai penutupan RUPS 2022 (periode 1)	*February 26, 2018 - until the closing of GMS 2022 (period 1)*
Usia *Age*	58 tahun. Lahir di Wehali Teminabuan 03 Desember 1961	*58 years old. Born in Wehali Teminabuan December 3, 1961*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1989.	*He obtained a Bachelor of Economics (S1) degree at Cenderawasih University Jayapura in 1989.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• *Training* Bimbingan Teknis Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Melalui *e-filling* dan Penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN, diselenggarakan oleh ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), tanggal 14-15 Februari 2019, di Batam, Kepri. • *Workshop* Kupas Tuntas Pengujian Model Bisnis, SPPI *Test* dan *Forward Looking*, diselenggarakan oleh *Awesome Consulting*, tanggal 11 - 12 April 2019 di Jakarta. • *Workshop Risk Based Auditing* diselenggarakan oleh Prospero *Consulting and Training*, tanggal 18 - 19 Juni 2019 di Jakarta. • Seminar FKDKP dan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2019 diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), tanggal 27 Juni 2019 di Jakarta. • *Refreshment* Program Manajemen Risiko diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 30 Juli 2019 - 06 Agustus 2019 di Moscow.	• *Technical Guidance Training for Submitting Annual Personal Income Tax Return (OP) through e-filling and Submission of LHKPN through e-LHKPN, organized by ASBANDA (Regional Development Bank Association), 14-15 February 2019, in Batam, Riau Islands.* • *A Completion Workshop for Business Model Testing, SPPI Test and Forward Looking, organized by AweSDMe Consulting, April 11-12, 2019 in Jakarta.* • *Workshop on Risk Based Auditing held by Prospero Consulting and Training, 18-19 June 2019 in Jakarta.* • *FKDKP Seminar and 2019 General Meeting of Members (RUA) organized by the Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP), on 27 June 2019 in Jakarta.* • *Refreshment of the Risk Management Program organized by ASBANDA on July 30, 2019 - August 6, 2019 in Moscow.*

	• Seminar PSAK 71 for BOC diselenggarakan oleh PT. *Risk Management* Guard (RMG) tanggal 29 - 30 Agustus 2019 di Jakarta. • *Workshop* APU PPT: *Risk Assessment*, *Risk Based Approach* dan Simulasi tanggal 19-20 September 2019 di Bandung. • *Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI), tanggal 7 Oktober 2019 di Jakarta. • *Focus Group Discussion* (FGD) Buku Panduan/ *Manual Book* Direksi dan Komisaris Bank serta *Code of Conduct* diselenggarakan oleh ASBANDA, tanggal 07 - 08 November 2019 di Bandung. • Seminar Penguatan Permodalan BPD dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Fungsi *Agent of Development*, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) tanggal 21-23 November 2019 di Mataram, NTB.	• *Seminar of PSAK 71 for BOC is organized by PT. Risk Management Guard (RMG) 29 - 30 August 2019 in Jakarta.* • *APT PPT Workshop: Risk Assessment, Risk Based Approach and Simulation on 19-20 September 2019 in Bandung.* • *Workshop on the Impact of Non Performing Loan and Bankrupt Debtors in BPD in the Law and Tax Perspective organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI), 7 October 2019 in Jakarta.* • *Focus Group Discussion (FGD) of the Board of Director and Commissioners of the Bank's Manual and Code of Conduct organized by ASBANDA, November 7-08 November 2019 in Bandung.* • *Seminar on Strengthening BPD Capital in the Context of Improving Competitiveness and Function of Agent of Development, organized by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI) on 21-23 November 2019 in Mataram, NTB.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	• Kepala bagian Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari Tahun 1995 s/d 1998. • Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari Tahun 1998 s/d 2001. • Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2001 s/d 2004. • Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari 2005-2009 Sekretaris Daerah. • Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009 s/d 2015.	• *Head of the Regional Development Section of the Regional Secretariat of Manokwari Regency from 1995 to 1998.* • *Head of the Regional Secretariat for the preparation and control of the Regional Secretariat Program in Manokwari Regency in 1998 to 2001.* • *Head of the Regional Planning and Development Agency of Manokwari Regency 2001 to 2004.* • *Head of the Manokwari District Regional Development Planning and Control Agency 2005-2009 Regional Secretary.* • *Regional Secretary of South Sorong Regency, South Sorong Regency, 2009 to 2015.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak 19 April 2018 berdasarkan SK RUPS Nomor: 01/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018 tanggal 25 April 2018.	*Occupied as Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . since April 19, 2018 based on SGM Decree Number: 01 / SK / SIRKULER-BPD / IV / 2018 dated April 25, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	*Certificate of Competence level* 2 Manajemen Risiko Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.	*Certificate of Competence 2nd level Banking Risk Management from the Banking Professional Certification Institute*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Profil Direksi
Board of Director's Profile

F. Zendrato, SE.MM
Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan *Term of Office*	Maret 2017 - Maret 2021 (periode 1)	*March 2017 - March 2021 (period 1)*
Usia *Age*	61 tahun. Lahir di Gn. Sitoli 15 November 1958	*61 years old. Born in Mt. Sitoli November 15, 1958*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar pendidikan Magister Manajemen di STIE IPWIJA Jakarta tahun 1997.	*He obtained his Masters in Management degree from STIE IPWIJA Jakarta in 1997.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• Pemeliharaan Sertifikasi *Dealer Treasury* diselenggarakan oleh ACI FMAIndonesia tanggal 18 - 19 Januari 2019 di Bali. • Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Solo - Jawa Tengah diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 22 Februari 2019 di Solo, Jateng. • *Refreshment* Program Manajemen Risiko diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 30 Juli 2019 - 06 Agustus 2019 di Moscow, • Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Bali diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 23 Agustus 2019 di Bali.	• *Maintenance of the Treasury Dealer Certification held by ACI FMAIndonesia on 18-19 January 2019 in Bali.* • *BPD SI National Seminar and SIMPEDA Savings National Draw Drawing in Solo - Central Java are held by ASBANDA on February 22, 2019 in Solo, Central Java.* • *Refreshment of the Risk Management Program organized by ASBANDA on July 30, 2019 - August 6, 2019 in Moscow,* • *National Seminar on BPD SI and Withdrawal of National SIMPEDA Savings in Bali are held by ASBANDA on August 23, 2019 in Bali.*

	• *Workshop* APU PPT : *Risk Assessment*, *Risk Based Approach* dan Simulasi diselenggarakan oleh RMG (*Risk Management Guard*) tanggal 19 - 20 September 2019 di Jakarta. • *Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum Serta Perpajakan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) tanggal 07 Oktober 2020 di Jakarta.	• *APU PPT Workshop: Risk Assessment, Risk Based Approach and Simulation organized by RMG (Risk Management Guard) on 19 - 20 September 2019 in Jakarta.* • *Workshop on the Impact of Non Performing Loan and Bankrupt Debtors in BPD in the Legal and Tax Perspective held by the Communication Forum of the Board of Commissioners of the Regional Development Banks of All Indonesia (FKDK BPD SI) on October 7, 2020 in Jakarta.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Bank BNI CEO Region/Pemimpin Wilayah Jakarta	*Bank BNI CEO Region/ Jakarta Regional Leader*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021 berdasarkan SK tanggal 06 Maret 2017 Nomor 03/ SK/RUPSLB-BPD/III/2017.	*Occupied as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . period 2017-2021 based on Decree dated March 6, 2017 Number 03 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Manajemen Risiko tingkat 5 Penyelenggara BSMR. • Sertifikat *Treasury Dealer Level Advance* Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.	• *5th Level Risk Management BSMR Operator.* • *Treasury Dealer Level Advance Certificate in Banking Profession Certification Agency.*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Ir. Sadar Sebayang
Direktur Bisnis
Business Director

Periode Jabatan *Term of Office*	Maret 2017 - Maret 2021 (periode 1)	*March 2017 - March 2021 (period 1)*
Usia *Age*	57 tahun. Lahir di Medan, 3 Desember 1962	*57 years old. Born in Medan, December 3, 1962*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar pendidikan Magister Management di Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta tahun 1998.	*Obtained a Master Management degree in the Indonesian Entrepreneurship Development Institute Jakarta in 1998.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Solo - Jawa Tengah diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 22 Februari 2019 di Solo, Jateng. • Pertemuan Direktur Pemasaran yang Menangani Kredit dan Pemimpin Divisi Kredit Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia (BPD SI) diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 11-12 Juli 2019 di Banyuwangi, Jatim. • Pembekalan Sertifikasi *Dealer Treasury Level Advance* diselenggarkan oleh ACI FMAIndonesia tanggal 12 Oktober 2019 di Jakarta. • *Workshop & Discussion* Metode *Stress Testing* untuk Mengukur Risiko Pasar, Likuiditas dan Kredit diselenggarakan oleh Infobank *Institute* tanggal 25-26 Oktober 2019 di Jakarta.	• *BPD SI National Seminar and SIMPEDA Savings National Draw Drawing in Solo - Central Java are held by ASBANDA on February 22, 2019 in Solo, Central Java.* • *A Meeting of Marketing Directors Handling Credit and Head of the Credit Division of the Regional Development Bank of Indonesia (BPD SI) was held by ASBANDA on 11-12 July 2019 in Banyuwangi, East Java.* • *Provision of Advance Level Treasury Dealer Certification was held by ACI FMAIndonesia on October 12, 2019 in Jakarta.* • *Workshop & Discussion Stress Testing Methods to Measure Market, Liquidity and Credit Risk organized by the Infobank Institute on October 25-26, 2019 in Jakarta.*

	• Ujian Sertifikasi *Dealer Treasury Level Advance* (*Fast Track*) diselenggarakan oleh LSPP tanggal 2 November 2019 di Jakarta. • Seminar Indonesia *Risk Management Outlook* 2020 diselenggarakan oleh LPPI tanggal 12 November 2019 di Bali. • *Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD SI diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 28 November 2019 di Tanjung Binga - Belitung. • Undangan Anugerah Perbankan Indonesia VIII - 2019 yang diselenggarakan oleh *Economic Review*, tanggal 06 - 07 Desember 2019 di Yogyakarta.	• *The Dealer Treasury Level Advance (Fast Track) Certification Test is held by LSPP on November 2, 2019 in Jakarta.* • *Indonesia Risk Management Outlook 2020 Seminar was held by the LPPI on November 12, 2019 in Bali.* • *The Year-End Liquidity Provision Workshop at BPD SI was organized by ASBANDA on November 28, 2019 in Tanjung Binga - Belitung.* • *Invitation to the Indonesian Banking Award VIII - 2019 organized by the Economic Review, December 6 - 07 December 2019 in Yogyakarta.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Kepala Biro *Corporate Loan Risk Management*, di Bank BCA sejak 1 Desember 2010.	*Head of Corporate Loan Risk Management Bureau, at Bank BCA since December 1, 2010.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021 berdasarkann SK tanggal 06 Maret 2017 Nomor 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017.	*Occupied as Business Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . period 2017-2021 based on SK dated March 6, 2017 Number 04 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Manajemen Risiko tingkat 5 Penyelenggara BSMR. • Sertifikat *Dealer Treasury Level Advance* (*Fast Track*) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).	• *5th Level Risk Management organized by BSMR.* • *Dealer Treasury Level Advance (Fast Track) Certificate by the Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Rudhy Dharma, SE
Direktur Keuangan
Finance Director

Periode Jabatan *Term of Office*	Maret 2017 - Maret 2021 (periode 1)	*March 2017 - March 2021 (period 1)*
Usia *Age*	62 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Mei 1957	*62 years old. Born in Jakarta, May 13, 1957*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana tahun 1986.	*He obtained his Bachelor of Economics degree at Krisnadwipayana University in 1986.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• Pemeliharaan Sertifikasi *Dealer Treasury* diselenggarakan oleh ACI FMAIndonesia tanggal 18 - 19 Januari 2019 di Bali. • *Training Corporate Finance* in Digital Era diselenggarakan oleh *Money and Capital Institute* tanggal 23 - 24 April 2019 di Jakarta. • Seminar *CEO Mentoring* diselenggarakan oleh PT. Intipesan Pariwara tanggal 27 November 2019 di Jakarta.	• *Maintenance of the Treasury Dealer Certification held by ACI FMAIndonesia on 18-19 January 2019 in Bali.* • *Corporate Finance in* Digital *Era Training organized by the Money and Capital Institute on April 23-24, 2019 in Jakarta.* • *CEO Mentoring Seminar organized by PT. Intellectuals of Pariwara on 27 November 2019 in Jakarta.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Jabatan terakhir Koordinator Wilayah/Kakanwil Jakarta, di PT. Bank J-TRUST IND sejak bulan Juli 2016.	*The last position was Regional Coordinator / Regional Office of Jakarta, at PT. Bank J-TRUST IND since July 2016.*

Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021 berdasarkan SK tanggal 06 Maret 2017 Nomor 05/ SK/RUPSLB-BPD/III/2017.	*Occupied as Finance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the period 2017-2021 based on SK dated March 6, 2017 Number 05 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Manajemen Risiko *Level* 5 penyelenggara BSMR. • Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. • Sertifikasi *Dealer Treasury Level Advance* oleh LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	• *5th Level Risk Management organizers of BSMR.* • *Banking Profession Certification Agency* • *Dealer Treasury Level Advance Certification by LSPP (Banking Professional Certification Institute)*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Isak Semuel Wopari, SE.MM

Direktur Operasional
Banking Operation Director

Periode Jabatan *Term of Office*	Maret 2017 - Maret 2021 (periode 1)	*March 2017 - March 2021 (period 1)*
Usia *Age*	45 tahun. Lahir di Serui, 22 Agustus 1974	*45 years old. Born in Serui, August 22, 1974*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar pendidikan Magister Manajemen di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2016.	*He obtained his Masters in Management from Cenderawasih Jayapura University in 2016.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• *Workshop Human Capital Management With Big Data* diselenggarakan oleh Asia *Anti Fraud* tanggal 21 - 22 Maret 2019 di Bandung. • *Workshop* Kerjasama Bank dan *Fintech* di Era Digitalisasi Ekonomi diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 02 - 03 Agustus 2019 di Manado.	• *Human Capital Management With Big Data Workshop organized by Asia Anti Fraud on March 21-22, 2019 in Bandung.* • *Workshop on Bank and Fintech Cooperation in the Era of* Digital Digitalization *held by ASBANDA on 02 - 03 August 2019 in Manado.*

	• Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Bali diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 23 Agustus 2019 di Bali. • *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi diselenggarakan oleh *Talent*s Indonesia tanggal 26 - 27 September 2019 di Jakarta. • *Public Training* Building *Corporate Culture* diselenggarakan oleh PT. Kreatif Indonesia Satu tanggal 17 - 18 Oktober 2019 di Bandung.	• *National Seminar on BPD SI and Withdrawal of National SIMPEDA Savings in Bali are held by ASBANDA on August 23, 2019 in Bali.* • *Refreshment of Information Technology Risk Management Certification organized by Talents Indonesia on 26-27 September 2019 in Jakarta.* • *The Corporate Culture Building Public Training is organized by PT. Kreatif Indonesia Satu dated 17-18 October 2019 in Bandung.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain dikarenakan Jabatan Direktur Operasional diangkat dari Pegawai Internal Bank Papua.	*Does not have the Experience and Position at another company because the Operational Director Position is appointed from the Bank Papua Internal Employee.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021 berdasarkan SK tanggal 06 Maret 2017 Nomor 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen *Anti Fraud* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Maret 2016 sesuai SK Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016.	*Occupied as Banking Operation Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . period 2017-2021 based on Decree dated March 6, 2017 Number 06 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017.* *Previously he occupied as Leader of the Anti-Fraud Work Unit at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . since March 1, 2016 in accordance with Board of Director Decree Number: 73 / KEPEG / III / 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 5 penyelenggara BSMR.	*5th Level Risk Management Certificate organized by BSMR.*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Ir. Jefri Sani P. S

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Periode Jabatan *Term of Office*	Maret 2017 - Maret 2021 (periode 1)	*March 2017 - March 2021 (period 1)*
Usia *Age*	56 tahun. Lahir di Palu, 17 Agustus 1963	*56 years old. Born in Palu, August 17, 1963*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi Pertanian di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1989.	*Obtained a degree in Agriculture from the University of Cenderawasih Jayapura in 1989.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• Seminar FKDKP dan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2019 diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) tanggal 27 Juni 2019 di Jakarta. • Seminar FKDP untuk Level Komisaris, Direksi, Pejabat Bank Level Eksekutif dengan Topik Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan diterapkan pada Tahun Beserta Dampaknya Serta Diskusi Mengenai Pendalaman dalam Penyusunan POJK 51 diselenggarakan oleh FKDKP tanggal 26 September 2019 di Jakarta.	• *FKDKP Seminar and 2019 General Meeting of Members (RUA) was held by the Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP) on 27 June 2019 in Jakarta.* • *FKDP Seminar for Commissioner, Board of Director, Executive Level Bank Officers with Topics for Understanding the Implementation of PSAK 71 & 73 which will be implemented in the Year Along with the Impacts and Discussion on Deepening in the Arrangement of POJK 51 organized by FKDKP on September 26, 2019 in Jakarta.*

	• Sosialisasi dalam Rangka *Refreshment* tentang *Market Conduct* dan POJK No. 1/POJK.07/2013 diselenggarakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. • *Focus Group Discussion* (FGD) Buku Panduan/ *Manual Book* Direksi dan Komisaris Bank Serta *Code of Conduct* diselenggarakan oleh ASBANDA tanggal 07 - 08 November 2019 di Bandung. • Sosialisasi Ketentuan Bank Umum diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK tanggal 02 - 03 Desember 2019 di Jakarta.	• *Socialization in Refreshment Framework about Market Conduct and POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 organized by the Financial Services Authority (OJK) on October 15, 2019 in Jakarta.* • *Focus Group Discussion (FGD) Manual for Board of Director and Commissioners of the Bank and Code of Conduct organized by ASBANDA on 07 - 08 November 2019 in Bandung.* • *Dissemination of Commercial Bank Regulations held by Bank Indonesia and OJK on 02 - 03 December 2019 in Jakarta*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain dikarenakan Jabatan Direktur Kepatuhan diangkat dari Pegawai Internal Bank Papua.	*Does not have the experience and Position at another company because the Position of Compliance Director is appointed from the Bank Papua Internal Employee.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021 berdasarkan SK t tanggal 06 Maret 2017 Nomor 07/ SK/RUPSLB-BPD/III/2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Timika pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Maret 2016 sesuai SK Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016.	*Occupied as Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . for the period 2017-2021 based on decree dated March 6, 2017 Number 07 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017.* *Previously occupied as Leader of the Timika Branch at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . since March 1, 2016 in accordance with Board of Director Decree Number: 73 / KEPEG / III / 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 5 penyelenggara BSMR.	*5th Level Risk Management organized by BSMR.*
Hubungan Afiliasi *Affiliate Relations*	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham utama dan/ atau pengendali.	*He has no affiliation with members of the Board of Director and other members of the Board of Commissioners, as well as major shareholders and / or controllers.*

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officer's Profile

Ir.Eddy Tamtomo

Staf Ahli dan GCG

Expert Staff and GCG

Periode Jabatan *Term of Office*	7 Januari 2019-sekarang	*January 7, 2019 - now*
Usia *Age*	53 tahun, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 1966.	*53 years old. Born in Yogyakarta on May 29, 1966.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Peternakan di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1990.	*Obtained a Bachelor of Animal Husbandry degree at Cenderawasih University, Jayapura in 1990.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	-	-
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Utama Jayapura sesuai SK Direksi nomor : 297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.	*Previously he occupied as Leader of Jayapura Main Branch Office according to Board of Director Decree number: 297 / KEPEG / X / 2018 on October 17, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 23 November 2013.	*4th Level Risk Management of BSMR Providers on November 23, 2013.*

Profil Pimpinan Divisi

Leader of Division Profile

Dra. Ellen B.F. Marande

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan

Leader of Corporate Secretary Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Januari 2017 - sekarang	*Januari 20, 2017 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Limboto pada tanggal 09 Februari 1965	*54 years old. Born in Limboto on February 9, 1965*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1989.	*She obtained a Bachelor of State Administration degree at Sam Ratulangi University in Manado in 1989.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 24 - 25 April 2019, *Workshop Annual Report* Berbasis Kriteria Award 2018 • 17 - 18 Juli 2019, Seminar *the 7th* Corporate *Communication Summit*. • 23 - 24 Oktober 2019, *10th The Real CSR Seminar* tentang Peran CSR dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia	• *24 - 25 April 2019, Workshop of Criteria-Based Annual Report 2018 Award* • *17 - 18 July 2019, the 7th Corporate Communication Summit Seminar* • *23 - 24 October 2019, 10th The Real CSR Seminar on the Role of CSR in improving the standard of living of the people of Indonesia*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pembinaan & Supervisi Kredit Bank Papua sesuai SK Direksi nomor: 117/KEPEG/IV/2016 tanggal 29 April 2016.	*Previously she occupied as Leader of the Bank Papua Loan Supervision & Supervision Department according to the Board of Director' Decree number: 117 / KEPEG / IV / 2016 dated 29 April 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 28 September 2015.	*4th Level Risk Management organized by BSMR on 28 September 2015.*

Dr. Abdurohim, SE, MM.

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Leader of Planning and Development Division

Periode Jabatan *Term of Office*	06 Juni 2018 - sekarang	*June 06, 2018 - now*
Usia *Age*	55 tahun. Lahir di Cirebon pada tanggal 12 April 1964.	*55 years old. Born in Cirebon on April 12, 1964.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Doktor dari Universitas Cenderawasih, Program Manajemen Keuangan Tahun 2017.	*Obtained a Doctorate from Cenderawasih University, 2017 Financial Management Program.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 07 - 08 Februari 2019, Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • 22 Februari 2019, Peran BPD SI Dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah. • 21 - 22 Maret 2019, Konsinyering Change Management Office (CMO) BPD SI.	• *February 07 - 08, 2019, Preparation of a Sustainable Financial Action Plan.* • *22 February 2019, Role of BPD SI in Supporting the Regional Revenue Optimization Program.* • *March 21 - 22, 2019, BPD SI Consignment Change Management Office (CMO).*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Quality Assurance Bank Papua berdasarkan SK Direksi No. 208/KEPEG/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.	*Previously he occupied as Quality Assurance of Bank Papua based on Board of Director Decree No. 208 / KEPEG / V / 2017 dated May 26, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR	*4th Level Risk Management BSMR Providers*

Kusyanto, SE

Pemimpin Divisi Audit Internal

Leader of Internal Audit Division

Periode Jabatan *Term of Office*	9 April 2019 - Sekarang	*April 9, 2019 - now*
Usia *Age*	51 tahun. Lahir di Merauke pada tanggal 07 Mei 1968.	*51 years old. Born in Merauke on May 7, 1968.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 1992.	*Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih Manokwari University in 1992.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 15 Februari 2019, *Fraud Auditing* 1. • 26 April 2019, *Fraud Auditing* 2. • 8 - 19 Juli 2019, Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* tingkat lanjutan II. • 05 Agustus 2019 - 20 September 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Cabang (SESPIBANK) Angkatan 71.	• *February 15, 2019, Auditing Fraud 1.* • *April 26, 2019, Auditing Fraud 2.* • *July 8 - 19, 2019, Advanced level Qualified Internal Auditor Certification II.* • *August 5 2019 - September 20, 2019, School of Staff and Branch Leaders (SESPIBANK) Batch 71.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Departemen *Anti Fraud* berdasarkan SK Direksi nomor : 03/KEPEG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.	*Previously he occupied as the Leader of the Anti Fraud Work Unit based on Board of Director' Decree number: 03 / KEPEG / I / 2019 dated January 7, 2019.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2013.	*4th 4th Level Risk Management Organizers of BSMR on October 26, 2013.*

Baso Pajung, SH, MH

Pemimpin Divisi Hukum

Leader of Legal Division

Periode Jabatan *Term of Office*	14 Desember 2018 - sekarang	*December 14, 2018 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Wajo pada tanggal 14 Agustus 1965	*54 years old. Born in Wajo on August 14, 1965*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar tahun 2015.	*Graduated with a Bachelor of Law at the Muslim University of Indonesia, Makassar in 2015.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 22 Februari 2019, Pelatihan Persiapan Pra Purnabakti *Batch* 1 2019. • 3 Juli 2019, Pelatihan Train The Trainer. • 21 Agustus 2019, *Workshop* Mekanisme Penanganan Perkara Hukum Perusahaan. • 8 November 2019, FGD Buku panduan/manual book Direksi dan Komisaris Bank serta *Code of Conduct*.	• *22 February 2019, Pre-Retirement Preparation Training for Batch 1 2019.* • *July 3, 2019, Train The Trainer's Training.* • *21 August 2019, Workshop on Mechanisms for Handling Corporate Law Cases.* • *8 November 2019, FGD Manual / manual book for Board of Director and Commissioners of the Bank and Code of Conduct.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Utama Manokwari sesuai SK nomor : 73/ KEPEG/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.	*Previously he occuppied as Manokwari Main Branch Manager in accordance with Decree number: 73 / KEPEG / III / 2016 on March 1, 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2013.	*4th Level Risk Management Organizers of BSMR on October 26, 2013.*

Usman Badiaraja Saragih, S.AP

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

Leader of the Bank's Risk Management Division

Periode Jabatan *Term of Office*	30 April 2018 - sekarang	*April 30, 2018.- now*
Usia *Age*	50 tahun. Lahir di Sibuntuon, pada tanggal 10 Juni 1969.	*50 years. Born in Sibuntuon, on June 10, 1969.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di STIA LAN Jakarta pada tahun 2009.	*Obtained his Bachelor of Public Administration degree at STIA LAN Jakarta in 2009.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 08 Februari 2019, Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • 06 Agustus 2019, *Training* PSAK 71. • 30 Agustus 2019, Persiapan Implementasi PSAK 71 • 26 Oktober, Ext-*Workshop & Discussion* metode stress testing untuk mengukur risiko pasar, likuiditas dan kredit.	• *February 8, 2019, Preparation of a Sustainable Financial Action Plan.* • *August 6, 2019, PSAK 71 Training.* • *August 30, 2019, Preparation for the Implementation of PSAK 71* • *October 26th, Ext-Workshop & Discussion stress testing methods to measure market risk, liquidity and Loan.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komersial & Korporasi sesuai SK No. 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously he occupied as Head of the Commercial & Corporate Division in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada November 2019.	*4th Level Risk Management Organizers of BSMR in November 2019.*

Dadang Supriatna, SH

Pemimpin Divisi Kepatuhan

Leader of Compliance Division

Periode Jabatan *Term of Office*	14 Desember 2017 - sekarang	*December 14, 2017 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1965.	*54 years old. Born in Bandung on April 10, 1965.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*
Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran Bandung tahun 1990.	*Obtained a Bachelor of Laws degree at Padjajaran University in Bandung in 1990.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 22 Februari 2019, Pelatihan Persiapan Pra Purnabakti *Batch* 1 2019. • 03 Agustus 2019, Sertifikasi Kepatuhan Level 2. • 03 Desember 2019, Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	• *22 February 2019, Pre-Retirement Preparation Training for Batch 1 2019.* • *August 3, 2019, Level 2 Compliance Certification.* • *December 3, 2019, Dissemination of Commercial Bank Provisions*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum Bank Papua sesuai SK No. 89/ KEPEG/IX/2015 tanggal 11 September 2015.	*Previously he occupied as Head of the Legal Division of Bank Papua in accordance with Decree No. 89 / KEPEG / IX / 2015 on September 11, 2015.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 10 September 2011.	*4th Level Risk Management of BSMR Providers on September 10, 2011.*

Wastu Anggoro Wijonarko, SE.MM

Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & *E-Banking*

Leader of Fund Management, Services & E-Banking Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Januari 2017 - sekarang	*January 20, 2017 - now*
Usia *Age*	45 tahun. Lahir di Biak pada tanggal 09 April 1974.	*45 years old. Born in Biak on April 9, 1974.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2014.	*Obtained his Master of Management degree at Cenderawasih University Jayapura in 2014.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 23 Februari 2019, Peran BPD SI Dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah. • 27 Februari 2019, Roadmap Bank 4.0 dan Era *Fintech* Strategi dan *Leadership* Menghadapi Revolusi. • 03 Mei 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Bank (SESPIBANK) angkatan 70.	• *23 February 2019, Role of BPD SI in Supporting the Regional Revenue Optimization Program.* • *February 27, 2019, Bank 4.0 Roadmap and Era of Fintech Strategy and Leadership to Face the Revolution.* • *May 3, 2019, School Staff and Bank Leaders (SESPIBANK) class of 70.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Biak sesuai SK No. 02/KEPEG/I/2015 tanggal 08 Januari 2015.	*Previously he occupied as Biak Branch Manager in accordance with Decree No. 02 / KEPEG / I / 2015 dated January 8, 2015.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 22 Februari 2014. • Sertifikasi Kompetensi Bidang General Banking level 3 penyelenggara LSPP pada tanggal 15 April 2019.	• *4th Level Risk Management of BSMR Providers on February 22, 2014.* • *Competency Certification for Level 3 General Banking in LSPP organizers on April 15, 2019.*

Daniel Palulungan, S.Pi, MM

Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Korporasi

Leader of Commercial & Corporate Business Division

Periode Jabatan *Term of Office*	30 April 2018 - sekarang	*April 30, 2018 - now*
Usia *Age*	50 tahun. Lahir di Rantepao, pada tanggal 07 September 1969.	*50 years. Born in Rantepao, on September 7, 1969.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Perikanan, Jurusan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994. Gelar Magister Manajemen Jurusan *Marketing* Paska Sarjana Universitas Cenderawasih tahun 2009.	*Obtained his Bachelor of Fisheries degree, Department of Fisheries Resources, Faculty of Animal Science, Hasanuddin University, Makassar in 1994. He obtained his Masters in Management from the Postgraduate Marketing Department of Cenderawasih University in 2009.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 3 Juli 2019, Pelatihan Train The Trainer • 12 Juli 2019, Pertemuan Direktur pemasaran yang menangani kredit dan pemimpin Divisi Kredit Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia. • 20 September 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Cabang (SESPIBANK) Angkatan 71. • 22 November 2019, *Workshop* Project *Finance* for Infrastructure.	• *July 3, 2019, Train The Trainer's Training* • *July 12, 2019, meeting of marketing directors handling Loan and leaders of the Regional Development Bank Loan Division in Indonesia.* • *September 20, 2019, School of Staff and Branch Leaders (SESPIBANK) Batch 71.* • *22 November 2019, Project Finance for Infrastructure Workshop.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Bank Bank Papua sesuai SK nomor : 315/KEPEG/IX/2017 tanggal 12 September 2017.	*Previously he occupied as Head of the Bank Papua Business Risk Division in accordance with Decree number: 315 / KEPEG / IX / 2017 dated September 12, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 25 Juni 2011.	*4th Level Risk Management of BSMR Providers on June 25, 2011.*

Dr. Abraham Krey, SE.MM

Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer

Leader of SME & Consumer Business Division

Periode Jabatan *Term of Office*	7 Januari 2019 - sekarang	*January 7, 2019 - now*
Usia *Age*	51 tahun. Lahir di Jayapura tanggal 13 Januari 1968.	*51 years old. Born in Jayapura on January 13, 1968.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*
Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya Malang tahun 2014.	*Obtained a Doctorate in Management at Universitas Brawijaya Malang in 2014.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 5 April 2019, *Workshop Fintech* peluang dan tantangan industry perbankan di era *digital*.	• *5 April 2019, Fintech Workshop on opportunities and challenges of the banking industry in the digital age.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Tim Ahli dan GCG Bank Papua sesuai SK nomor : 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously he occupied as the Bank Papua Expert and GCG Team in accordance with Decree number: 179 / KEPEG / V / 2017 on May 19, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 5 Penyelenggara BSMR.	*5th Level Risk Management of BSMR Providers.*

Imran, SE

Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus

Leader of Special Asset Management Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Juni 2019 - sekarang	*June 20, 2019 - now*
Usia *Age*	53 tahun. Lahir di Mario pada tanggal 23 Januari 1966.	*53 years old. Born in Mario on January 23, 1966.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1990.	*Obtained his Bachelor of Economics degree at Hasanuddin University Makassar in 1990.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 13 Maret 2019, Analisis Laporan Keuangan dan Penentuan Limit *Counterparty*. • 28 Juni 2019, Pra Purna Bakti *Batch* 2. • 03 Juli 2019, Pelatihan Train The Trainer. • 24 April 2019, *Training Corporate Finance* in Digital Era. • 24 Oktober 2019, Pembuatan SOP restrukrasi kredit.	• *March 13, 2019, Analysis of Financial Statements and Determination of Limit Counterparties.* • *June 28, 2019, Pre-Full Service Batch 2.* • *July 3, 2019, Train The Trainer's Training.* • *April 24, 2019, Corporate Finance Training in* Digital *Era.* • *October 24, 2019, Making SOP of Loan restructuring.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Risiko Bisnis sesuai SK nomor : 248.1/KEPEG/ IX/2018 tanggal 03 September 2018.	*Previously he occupied as Head of the Business Risk Division in accordance with Decree number: 248.1 / KEPEG / IX / 2018 on September 3, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 penyelenggara BSMR pada tanggal 23 November 2013	*4th Level Risk Management organizers of BSMR on November 23, 2013*

Andreas Didik Wijayanta, SE

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Leader of Information Technology Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Januari 2017 - sekarang	*January 20, 2017 - now*
Usia *Age*	47 tahun. Lahir di Sleman pada tanggal 24 September 1972.	*47 years old. Born in Sleman on September 24, 1972.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Manokwari tahun 2001.	*Obtained a Bachelor of Economics degree at Manokwari State University in 2001.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 27 Februari 2019, Roadmap Bank 4.0 dan Era *Fintech* Strategi dan *Leadership* Menghadapi Revolusi. • 03 Agustus 2019, *workshop* kerjasama bank & *fintech* di era *digital*isasi ekonomi. • 20 September 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Cabang (SESPIBANK) Angkatan 71.	• *February 27, 2019, Bank 4.0 Roadmap and Era of Fintech Strategy and Leadership to Face the Revolution.* • *August 3, 2019, a workshop on bank & fintech cooperation in the era of economic digitalization.* • *September 20, 2019, School of Staff and Branch Leaders (SESPIBANK) Batch 71.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kaimana Bank Papua sesuai SK No. 73/ KEPEG/III/2016 tanggal 01 Maret 2016.	*Previously he occupied as Head of the Kaimana Branch Manager in accordance with Decree No. 73 / KEPEG / III / 2016 dated March 1, 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 22 Februari 2014.	*4th Level Risk Management of BSMR Providers on February 22, 2014.*

Yuliana D Yembise, SH. MH

Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Leader of Human Capital Management Division

Periode Jabatan *Term of Office*	7 Januari 2019 - sekarang	*January 7, 2019 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Biak pada tanggal 20 Desember 1965.	*54 years old. Born in Biak on December 20, 1965.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1990. Gelar Magister Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2012.	*Obtained a Bachelor of Laws degree at the Cenderawasih University in Jayapura in 1990. A Master's degree in Law at the University of Gajah Mada Yogyakarta in 2012.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 22 Februari 2019, Pelatihan Persiapan Pra Purnabakti *Batch* 1 2019. • 23 Februari 2019, Peran BPD SI Dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah. • 09 Maret 2019, Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Basic*. • 22 Maret 2019, *Workshop Human Capital Management With Big Data*. • 27 Juni 2019, Manajemen umum dana pensiun (MUDP) • 31 Agustus 2019, pembekalan dan sertifikasi *Dealer* level intermediate dan level *advanced* • 18 Oktober 2019, *public training building Corporate culture*	• *22 February 2019, Pre-Retirement Preparation Training for Batch 1 2019.* • *23 February 2019, Role of BPD SI in Supporting the Regional Revenue Optimization Program.* • *March 9, 2019, Basic Level Treasury Dealer Certification Exam.* • *March 22, 2019, Workshop on Human Capital Management With Big Data.* • *June 27, 2019, General management of pension funds (MUDP)* • *August 31, 2019, Intermediate level and advanced level Dealer briefing and certification* • *18 October 2019, public training building on Corporate culture*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum Bank Papua sesuai SK No. 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously she occupied as Head of the General Division of Bank Papua in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat V penyelenggara BSMR pada tanggal 23 Februari 2013.	*Level V Risk Management organizers of BSMR on February 23, 2013.*

Olvie Ineke Kembuan, SE. MM

Pemimpin Divisi Pengelolaan **Jaringan & Layanan**
Leader of Network & Service Management Division

Periode Jabatan *Term of Office*	02 Juni 2017 - sekarang	*June 2, 2017 - now*
Usia *Age*	58 tahun. Lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 1961.	*58 years old. Born in Manado on October 16, 1961.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Sam ratulangi Manado tahun 2005.	*Obtained his Master of Management degree at Sam University in Manado in 2005.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 09 Mei 2019, Study Kelayakan Pembukaan Jaringan Kantor. • 23 Agustus 2019, Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian • 12 Oktober 2019, Half Day Seminar Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.	• *May 9, 2019, Feasibility Study Opening of Office Networks.* • *August 23, 2019, BPD SI National Seminar and Draw Drawing* • *12 October 2019, Half Day Seminar on Sustainable Finance in Indonesia.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan Bank Papua berdasarkan SK No.03/PK-KWT/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.	*Previously she occupied as Head of the Bank Papua Network & Services Management Division based on Decree No. 03 / PK-KWT / VI / 2017 dated June 2, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Sertifikat Wealth Management penyelenggara GWM. • Sertifikat BSMR Level 3	• *Wealth Management Certificate of GWM organizer.* • *BSMR 3rd Level Certificate*

Martha Agustina Rumaseuw, SE

Pemimpin Divisi Akuntansi

Leader of Accounting Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Juni 2019 - sekarang	*June 20, 2019 - now*
Usia *Age*	53 tahun. Lahir di Merauke pada tanggal 21 Agustus 1966.	*53 years old. Born in Merauke on August 21, 1966.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Manajemen di STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang tahun 2013.	*Obtained his Bachelor of Management degree at STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang in 2013.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 26 Februari 2019, APU PPT *Batch* 3. • 27 Februari 2019, Servise Excellence for Branch Maneger dan Sosialisasi Standar Layanan Bank. • 26 April 2019, Overview Manajemen Perkreditan dan Operasional. • 08 November 2019, pelatihan Integrasi Pelaporan Perbankan berbasis metadata. • 19 November 2019, pelatihan withholding TAX-PPN.	• *February 26, 2019, APU PPT Batch 3.* • *February 27, 2019, Servise Excellence for Branch Management and Socialization of Bank Service Standards.* • *26 April 2019, Overview of Loan and Operations Management.* • *November 8, 2019, Metadata-based Banking Reporting Integration training.* • *19 November 2019, TAX-PPN withholding training.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Wamena Bank Papua sesuai SK 315/KEPEG/IX/2017, tanggal 12 September 2017.	*Previously she occupied as the Head of Wamena Bank Papua Branch Office in accordance with Decree No.315 / KEPEG / IX / 2017 on September 12, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 penyelenggara BSMR pada tanggal 10 Agustus 2016.	*4th Level Risk Management organizers of BSMR on August 10, 2016.*

Petrus Agus Soleman, SE

Pemimpin Divisi *Treasury*
Leader of Treasury Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Juni 2019 - sekarang	*June 20, 2019 - now*
Usia *Age*	51 tahun. Lahir di Abepura pada tanggal 25 Oktober 1968.	*51 years old. Born in Abepura on October 25, 1968.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1994.	*Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih University Jayapura in 1994.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 09 Februari 2019, Sertifikasi *Treasury Dealer Level Basic*. • 24 Maret 2019, Pembekalan uji sertifikasi *Treasury Dealer level Intermediate*. • 06 April 2019, Sertifikasi *Treasury Dealer Level Intermediate*. • 26 Oktober 2019, Ext-*Workshop & Discussion* metode stress testing untuk mengukur risiko pasar, likuiditas & kredit.	• *February 9, 2019, Basic Level Treasury Dealer Certification.* • *March 24, 2019, Provision of Intermediate level Treasury Dealer certification test.* • *April 6, 2019, Intermediate Level Treasury Dealer Certification.* • *October 26, 2019, Ext-Workshop & Discussion stress testing methods to measure market risk, liquidity & Loan.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Akuntansi Bank Papua sesuai SK No.297/ KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.	*Previously he occupied as Head of the Accounting Division of Bank Papua in accordance with Decree No.297 / KEPEG / X / 2018 on October 17, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 penyelenggara BSMR pada tanggal 10 Agustus 2016.	*4th Level Risk Management organizers of BSMR on August 10, 2016.*

Octovina Paulina, SE. M.Si

Pemimpin Divisi Umum

Leader of the General Division

Periode Jabatan *Term of Office*	7 Januari 2019 - sekarang	*January 7, 2019 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Jayapura pada tanggal 18 Oktober 1965.	*54 years old. Born in Jayapura on October 18, 1965.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Pasca Sarjana Administrasi Public di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2003.	*Post-graduate Public Administration at the University of Gajah Mada Yogyakarta in 2003.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 14 Maret 2019, Pelatihan dan ujian pengadaan barang/jasa. • 24 Juni 2019, Pra Purna Bakti *Batch* 2. • 12 September 2019, Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa.	• *March 14, 2019, Training and testing of goods / services procurement.* • *June 24, 2019, Pre-Full Service Batch 2.* • *12 September 2019, Training and Examination of Goods & Services Procurement Certification.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia Bank Papua sesuai SK No.297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2017.	*Previously she occupied as the Head of the Human Capital Management Division of Bank Papua in accordance with Decree No.297 / KEPEG / X / 2018 dated on October 17, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 5 Penyelenggara BSMR tanggal 27 Agustus 2016.	*5th Level Risk Management of BSMR Providers on August 27, 2016.*

Ir. Pujianto, M.Si

Pemimpin Divisi Risiko Bisnis

Leader of Business Risk Division

Periode Jabatan *Term of Office*	20 Juni 2019 - sekarang	*June 20, 2019 - now*
Usia *Age*	49 tahun. Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 1970.	*49 years old. Born in Surabaya on December 23, 1970.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 2002. Gelar Magister Sains di Universitas Yapis Papua Tahun 2017.	*Obtained his Bachelor of Agriculture degree at Cenderawasih Manokwari University in 2002. Master of Science degree at Yapis University, Papua in 2017.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 3 Juli 2019, Pelatihan Train The Trainer. • 6 Agustus 2019, *Training* PSAK 71. • 28 September 2019, Sertifikasi Basic *Treasury* • 12 Oktober 2019, Half Day Seminar Keuangan Berkelanjutan di Indonesia • 27 Oktober 2019, pembekalan sertifikasi *Treasury* level intermediate. • 21 Deseember 2019, ujian sertifikasi *Treasury* level intermediate.	• *July 3, 2019, Train The Trainer's Training.* • *6 August 2019, PSAK 71 Training.* • *28 September 2019, Basic Treasury Certification* • *12 October 2019, Half Day Seminar on Sustainable Finance in Indonesia* • *October 27, 2019, debriefing intermediate level Treasury certification.* • *21 December 2019, Intermediate level Treasury certification examination.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Bank Papua sesuai SK No.297/KEPEG/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.	*Previously he occupied as Head of the Bank Papua Special Asset Management Division in accordance with Decree No.297 / KEPEG / X / 2018 on October 17, 2018.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	• Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 22 Juni 2013. • IHT Sertifikasi Profesional Internal *Auditor* (SPIA). • Program Sertifikasi Pemimpin Cabang Angkatan 172.	• *4th Level Risk Management of BSMR Providers on June 22, 2013.* • *IHT Professional Internal Auditor Certification (SPIA).* • *Branch Leader Certification Program Force 172.*

Profil Pegawai Perusahaan

Employees Profile

Bank Papua sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menyadari bahwa perusahaan yang sukses mengelola Sumber Daya Manusia tidak hanya memberikan gaji yang layak bagi pekerja, namun paham bahwa kebutuhan pekerja tidak hanya berhubungan dengan masalah finansial. Perusahaan juga harus memberikan rasa aman, memberikan penghargaan akan jati diri, pengakuan sosial, dan pemberian peluang aktualisasi diri bagi pekerja. Hasilnya sungguh luar biasa, dimana pekerja bekerja dengan mentalitas yang pantang menyerah dan penuh energi yang berlimpah ruah. Para pekerja tidak hanya menjalankan tugas yang harus dikerjakan tetapi berlomba-lomba memberikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, Manajemen Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan. Jumlah pegawai Bank Papua selama tahun 2015 sampai dengan 2019 seperti terlihat pada grafik berikut :

Bank Papua, as a company that upholds human values, realizes that companies that successfully manage Human Resources not only provide decent salaries for workers, but understand that workers' needs are not only related to financial problems. The company must also provide a sense of security, give appreciation for identity, social recognition, and provide opportunities for self-actualization for workers. The results are truly remarkable, where workers work with an unyielding mentality and full of abundant energy. The workers not only carry out the tasks that must be done but are competing to give all their abilities for the progress of the company. For this reason, Bank Papua Management is committed to implementing these principles in managing its Human Resources in accordance with the company's objectives. The number of Bank Papua employees during 2015 to 2019 as shown in the following graph:

Jumlah Pegawai Bank Papua selama Tahun 2015 - 2019

Number of Bank Papua Employees in 2015 - 2019

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Bank Papua memiliki jenjang karir untuk setiap jabatan. Sampai dengan tahun 2019, komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan adalah sebagai berikut:

Employee Composition Based on Position Level

Bank Papua has a Career Path for each position. As of 2019, the composition of employees based on the Position Level is as follows:

Komposisi Pegawai Bank Papua Berdasarkan Jenjang Jabatan Dari Tahun 2015-2019
Bank Papua Employee Composition Based on Position Levels From 2015-2019

No	Urut	Jabatan *Position*	Tahun					Growth	
			2015	2016	2017	2018	2019	+/ -	%
Struktural									
1	1	Pemimpin Divisi	16	15	18	18	**16**	-2	-11,11%
2	2	Kepala Cabang	35	37	38	35	**35**	-	0,00%
3	3	Wakil Kepala Cabang	2	2	1	2	**2**	-	0,00%
4	4	Pimpinan Departemen	148	174	173	156	**161**	5	3,21%
5	5	Pimpinan Unit	139	125	110	72	**82**	10	13,89%
6	6	Pimpinan Cabang Pembantu	72	70	69	65	**63**	-2	-3,08%
7	7	Pimpinan Kantor Kas	91	102	111	108	**123**	15	13,89%
		SUB TOTAL					**482**	**26**	**5,70%**
Fungsional									
8	1	Fungsional	87	76	206	99	33	-66	-66,67%
Pegawai Masa Persiapan Pensiun									
9	1	Peg. Masa Persiapan Pensiun	8	13	6	6	**8**	2	33,33%
Staf Ahli Direksi									
10	1	Staf Ahli Direksi	-	-	-	-	**1**	1	100%
Staf									
11	1	Staf	1.613	1.812	1.612	1.867	**1.810**	-57	-3,05%
Cuti Luar Tanggungan									
12	1	Cuti Luar Tanggungan	-	-	-	-	**15**	15	100%
Profesional Hire (Pro Hire)									
13	1	Pro Hire	38	38	33	33	**2**	-31	-93,94%
PKWT									
14	2	Kontrak / PKWT	341	233	188	1	**70**	69	6900%
Jumlah			**2.590**	**2.701**	**2.565**	**2.462**	**2.421**	**-41**	**-1,67%**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Number of Employees by Position Level (Grade)

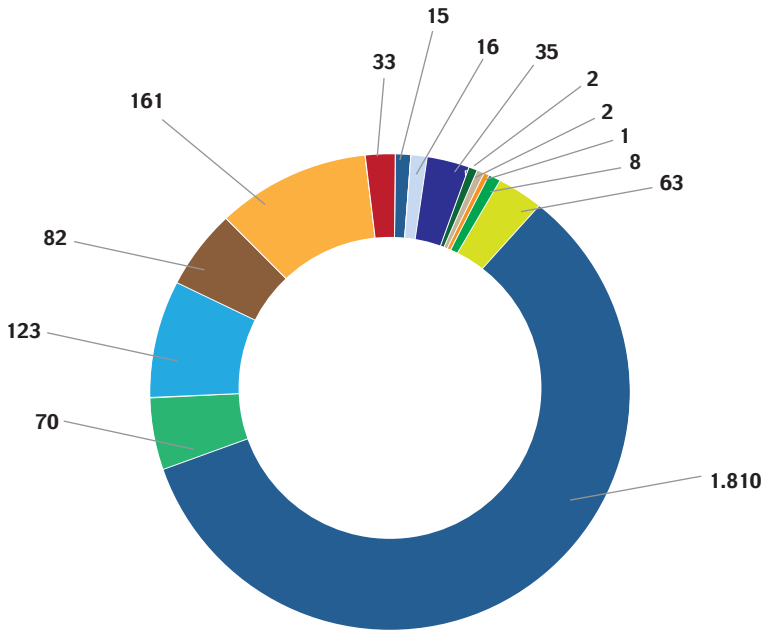

- Pemimpin Divisi
- Kepala Cabang
- Wakil Kepala Cabang
- Pemimpin Departemen
- Pemimpin Unit
- Pemimpin Cabang Pembantu
- Pemimpin Kantor Kas
- Fungsional
- Pegawai Masa Persiapan Pensiun
- Staf Ahli Direksi
- Staf
- Cuti Luar Tanggungan
- Pro Hire
- Kontrak / PKW

Karena adanya pengembangan organisasi, proses mutasi, promosi, dan pensiun ditahun 2019, terjadi perubahan komposisi pegawai berdasarkan jenjang Jabatan pada tahun 2019 yaitu berkurang 41 orang atau -1,67% dari tahun 2018. Untuk Pemimpin Divisi dan pimpinan cabang pembantu masing-masing berkurang sebanyak 2 orang. Pengurangan tenaga kerja terbanyak yaitu pada jenjang staf pegawai sebanyak dan fungsional dengan masing-masing sebanyak 57 orang dan 66 orang.

Due to organizational development, mutation, promotion, and retirement processes in 2019, there was a change in the composition of employees based on their levels in 2019, which was 41 people reduced or -1.67% from 2018. For Division Heads and sub-branch leaders respectively decreased as many as 2 people. The highest number of workforce reductions is at the level of staff as much as functional employees with 57 people and 66 people respectively.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan (*Grade*)

Sampai dengan tahun 2019, karena adanya pengembangan Divisi, serta adanya promosi, rotasi, dan masa pensiun karyawan, maka komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan tergambar seperti tabel dibawah ini:

Number of Employees by Position Level (Grade)

As of 2019, due to the development of the Division, as well as the promotion, rotation and retirement of employees, the composition of employees based on the level of office is illustrated as shown in the table below:

Jumlah Pegawai Bank Papua Berdasarkan Tingkat Jabatan (*Grade*) Dari Tahun 2015-2019
Number of Bank Papua Employees Based on Position Level (Grade) from 2015-2019

No	*Grade*	Tahun					*Growth*	
		2015	2016	2017	2018	2019	+/ -	%
1	16	0	0	0	4	**2**	-2	-50%
2	15	12	14	12	10	**9**	-1	-10%
3	14	19	19	17	20	**21**	1	5%
4	13	33	34	25	24	**20**	-4	-17%
5	12	38	43	32	44	**44**	0	0%
6	11	61	61	65	50	**52**	2	4%
7	10	77	69	62	71	**70**	-1	-1%
8	9	66	88	82	83	**76**	-7	-8%
9	8	64	65	70	47	**51**	4	9%
10	7	60	39	38	163	**241**	78	48%
11	6	184	202	240	190	**159**	-31	-16%
12	5	173	292	293	558	**622**	64	11%
13	4	964	1.035	1.039	921	**762**	-159	-17%
14	3	203	246	298	218	**197**	-21	-10%
15	2	254	148	68	21	**20**	-1	-5%
16	1	3	2	2	3	**3**	0	0%
17	0	370	354	222	35	**72**	37	106%
Total		**2.590**	**2.711**	**2.565**	**2.463**	**2421**	**-41**	**-2%**

Di tahun 2019, terjadi penambahan pegawai yang cukup signifikan di *Grade* 7 sebanyak 78 orang, dan pengurangan cukup besar di *grade* 4 sebanyak 159 orang.

In 2019, there were a significant addition of 78 employees in Grade 7 to 78 people, and a substantial reduction in Grade 4 by 159 people.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Number of Employees by Position Level (Grade)

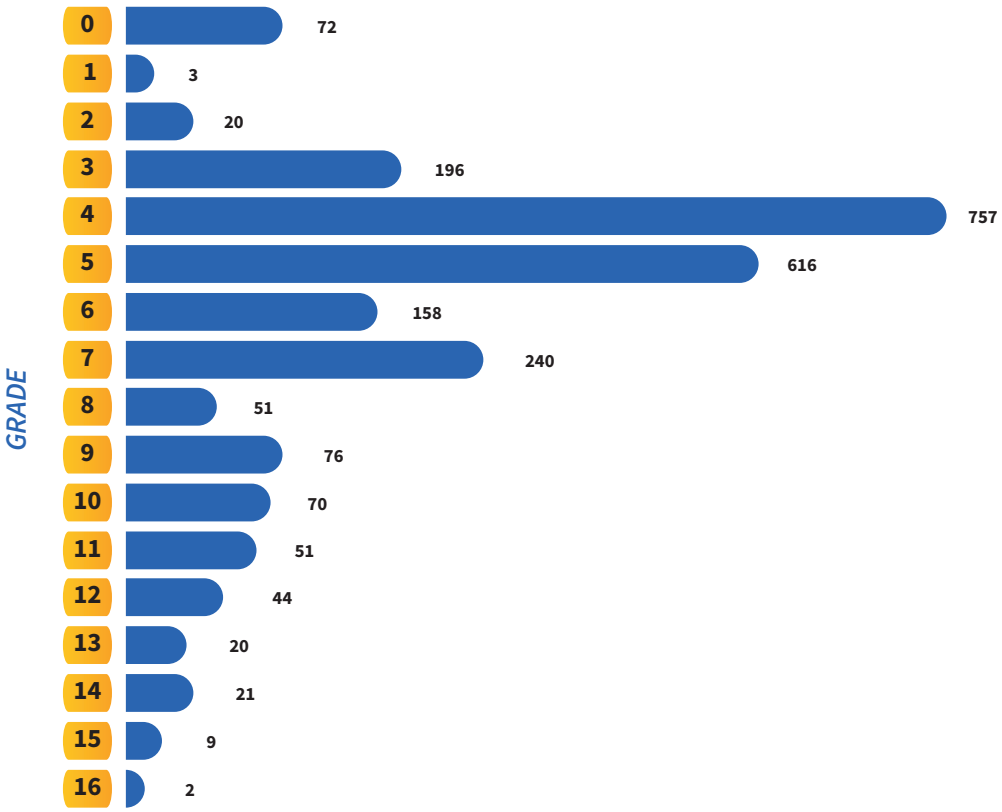

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Doktoral untuk mengakomodir kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan tahun 2019, komposisi pegawai Bank Papua berdasarkan jenjang pendidikan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Employee Composition Based on Education

Bank Papua has employees with varying levels of education from elementary school to doctoral level to accommodate the needs of the workforce according to needs. Until 2019, the composition of Bank Papua employees is based on education levels as shown in the table below:

Jumlah Pegawai Bank Papua Berdasarkan Jenjang Pendidikan dari Tahun 2015-2019
Number of Bank Papua Employees Based on Education Levels from 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					Growth		*Educational Level*
		2015	2016	2017	2018	2019	+/-	%	
1	Doktor (S3)	1	1	1	1	**1**	-	0,00%	*Doctoral (S3)*
2	Pasca Sarjana (S2)	60	67	69	65	**66**	1	1,54%	*Post Graduate (S2)*
3	Sarjana (S1)	1897	2061	1990	1937	**1940**	3	0,15%	*Bachelor Degree)*
4	Diploma (D4)	2	1	1	1	**1**	-	0,00%	*Diploma (D4)*
5	DIPLOMA (D3)	120	112	105	99	**91**	-8	-8,08%	*Diploma (D3)*
6	Diploma (D1)	3	3	3	2	**1**	-1	-50,00%	*Diploma (D1)*
7	SMA / Sederajat	498	447	389	351	**315**	-36	-10,26%	*Senior High / Equal*
8	SMP / Sederajat	4	4	3	3	**3**	-	0,00%	*Junior High / Equal*
9	SD / Sederajat	5	5	4	3	**3**	-	0,00%	*Elementary / Equal*
TOTAL		**2.590**	**2.701**	**2.565**	**2.462**	**2.421**	**-41**	**-1,67%**	*TOTAL*

Secara keseluruhan pada tahun 2019 terjadi pengurangan pegawai sebanyak 41 orang (-1,67%), yang terdiri atas pegawai dengan jenjang pendidikan Diploma D3 sebanyak 8 orang, D1 sebanyak 1 orang, dan SMA sederajat sebanyak 36 orang.

Overall in 2019 there was a reduction in employees by 41 people (-1.67%), consisting of 8 D3 Diploma graduates, 1 D1 graduates and 36 high school equivalents.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education Level

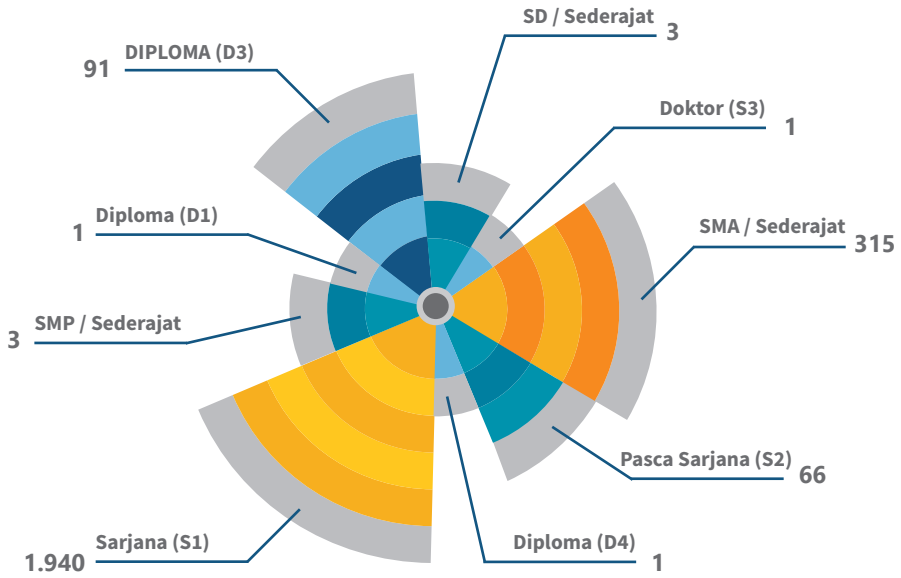

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Number of Employees by Status Sampai dengan tahun 2019 jumlah pegawai Bank Papua sebanyak 2.421 orang, yang terdiri dari 2.334 Pegawai tetap dan 70 pegawai kontrak serta 2 honor diperbantukan yang ditempatkan diseluruh Kantor Bank Papua, dengan jumlah pegawai seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Number of Employees by Status

Employee Composition by Status Number of Employees by Status Up to 2019 the number of Bank Papua employees is 2,421 people, consisting of 2,334 permanent employees and 70 contract employees and 2 seconded honorariums placed throughout the Bank Papua Office, with the number of employees as illustrated in the table below this:

Jumlah Pegawai Bank Papua dari tahun 2015-2019
Number Of Employees Of Bank Papua From 2015-2019

No	Status Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Employee Status*
							+/-	%	
1	Pegawai Tetap	2.211	2.426	2.343	2.428	**2.334**	-94	-3,87%	*Permanent employee*
2	Profesional Hire	-	4	0	-	**2**	2	100,00%	*Professional Hire*
3	PKWT/Kontrak	341	233	188	1	**70**	69	6900,00%	*Contract*
	Sub Total	**2552**	**2663**	**2532**	**2429**	**2.406**	**-23**	**-0,33%**	*Sub-Total*
4	HDP	38	38	33	33	**0**	-33	-100,00%	*HDP*
5	Peg. Cuti Luar Tanggungan	-	-	-	-	**15**	15	100,00%	*HDP*
	Jumlah	**2590**	**2701**	**2565**	**2462**	**2.421**	**-41**	**-1,67%**	*Total*

Pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah pegawai tetap sebanyak 94 orang, sedangkan pegawai kontrak (PKWT) mengalami kenaikan sebanyak 69 orang.

In 2019, there will be a decrease in the number of permanent employees by 94 people, while contract employees (PKWT) will increase by 69 people.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status

Age Based Employee Composition

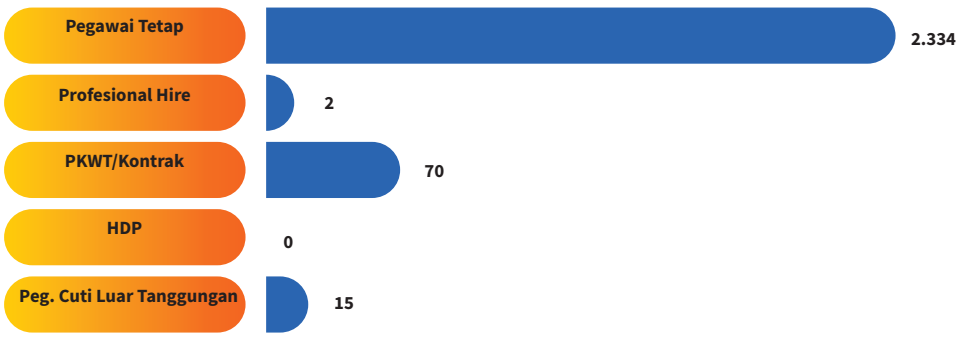

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat usia produktif yang bervariasi. Sampai dengan tahun 2019, komposisi pegawai berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Number of Employee by Age

Bank Papua has employees with varying productive age levels. Until 2019, the composition of employees based on age is as follows:

Komposisi Pegawai Bank Papua Berdasarkan Usia Dari Tahun 2015-2019
Composition of Bank Papua Employees by Age From 2015-2019

NO	JENJANG USIA *AGE OF AGE*	Tahun					Growth	
		2015	2016	2017	2018	2019	+/-	%
1	21 – 25	362	284	280	130	**33**	-97	-74,62%
2	26 – 30	1.102	1.173	1.128	1.040	**716**	-324	-31,15%
3	31 – 35	571	663	638	721	**918**	197	27,32%
4	36 – 40	163	181	173	218	**397**	179	82,11%
5	41 – 45	175	166	151	148	**138**	-10	-6,76%
6	46 – 50	136	120	115	120	**135**	15	12,50%
7	> 50	81	117	80	85	**84**	-1	-1,18%
TOTAL		**2.590**	**2.711**	**2.565**	**2.462**	**2.421**	**-41**	**-1,67%**

Ditahun 2019, terjadi penurunan jumlah pegawai yang cukup banyak pada usia 26-30 tahun yaitu 324 orang dan tejadi penambahan yang signifikan pada usia 31-35 tahun dan 36-40 tahun masing-masing sebanyak 197 orang dan 179 orang.

In 2019, there was a significant decrease in the number of employees at the age of 26-30 years, namely 324 people and there were significant additions at the age of 31-35 years and 36-40 years, as many as 197 people and 179 people.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Number of Employee by Age

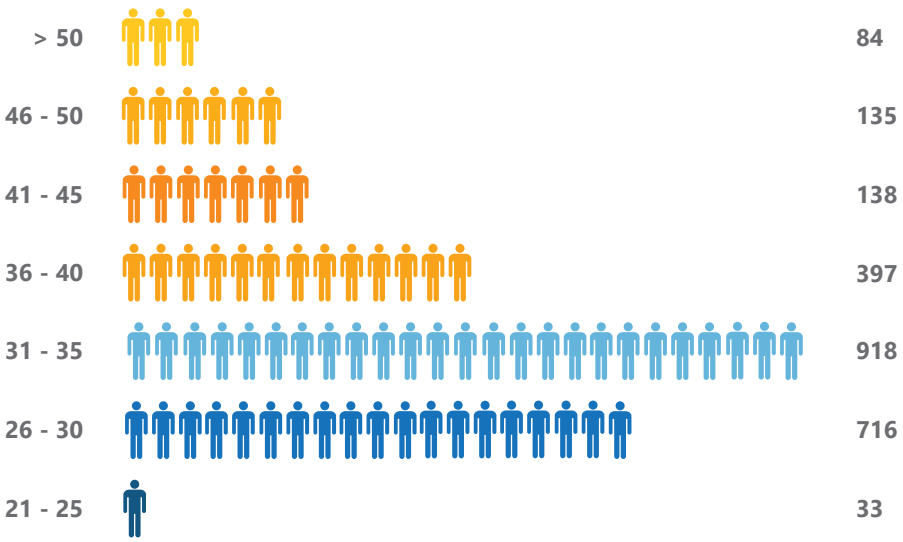

Pendidikan dan Pelatihan yang sudah dilaksanakan di tahun 2019

Guna meningkatkan kompetensi seluruh pegawainya, maka Bank Papua di tahun 2019 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, diantaranya:

Education and Training which have been carried out in 2019

In order to improve the competence of all employees, Bank Papua in 2019 organized education and training for both internal and external parties, including:

Jumlah Pelatihan dan Peserta Bank Papua Tahun 2019
Number of Bank Papua Training and Participants in 2019

No	Jenis Pelatihan *Types of Training*	Jumlah Pelatihan *Number of Training*	Peserta *Participants*
1	Inhouse *Training*	35	2.488
2	Pelatihan Eksternal Dalam Negeri	211	667
	Total	**246**	**3.155**

Biaya Diklat dan Tenaga Kerja di Tahun 2019

Biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan Bank selama tahun 2019 adalah sebesar Rp43.063juta. Terjadi peningkatan biaya yang signifikan dibandingan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp26.348 juta atau sekitar 157,63% Sedangkan untuk biaya tekaga kerja selama tahun 2019 adalah sebesar Rp774.847 juta atau terjadi peningkatan sebesar Rp237.732 juta dari tahun sebelumnya yakni Rp537.115 juta atau sekitar 42,26%.

Education & Training and HR Costs in 2019

The cost of education and training that has been spent by the Bank in 2019 amounted to Rp43,063 million. There was a significant increase in costs compared to the previous year in the amount of Rp26,348 million or around 157.63%. While for labor employment costs during 2019 was Rp774,847 million or an increase of Rp237,732 million from the previous year which was Rp537,115 million or around 42.26%.

dalam jutaan Rupiah - *in million rupiah*

Biaya Pendidikan dan Pelatihan selama Tahun 2015-2019
Education and Training Costs during 2015-2019

Biaya	Tahun					Growth		Cost
	2015	2016	2017	2018	2019	+/-	%	
Realisasi Diklat	25.242	27.443	11.114	16.715	**43.063**	26.348	157,63%	*Realization of Education and Training*
Biaya Tenaga Kerja	490.358	527.696	562.807	537.115	**774.847**	237.732	44,26%	*Labor costs*
Jumlah	**515.600**	**555.139**	**573.921**	**553.831**	**817.910**	**264.079**	**47,68%**	***Total***

Biaya Diklat dan Tenaga Kerja di Tahun 2019

Education & Training and HR Costs in 2019

Data Pengembangan Kompetensi

Competency Development Data

Pihak / Level Jabatan	Jumlah Pelatihan	Jenis Pelatihan	Persentase yang mengikuti Pelatihan
Pemimpin Divisi	40	IHT dan Eksternal Dalam Negeri	100%
Pemimpin Departemen	69	IHT dan Eksternal Dalam Negeri	100%
Pemimpin Cabang	5	IHT dan Eksternal Dalam Negeri	100%
Pemimpin Cabang Pembantu	1	IHT dan Eksternal Dalam Negeri	100%
Staf	145	IHT dan Eksternal Dalam Negeri	100%

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, dan Pemimpin Divisi

Education and / or Training of the Board of Commissioners, Board of Director, Committees under BOC , and Division Leaders

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*

Pendidikan dan Pelatihan Untuk Dewan Komisaris Tahun 2019
Education and Training for the Board of Commissioners in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*
1	*Training* Bimbingan Teknis Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) Melalui *e-filling* dan Penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	14 - 15 Februari 2019	Hotel Haris Batam Center, Kepulauan Riau	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
2	*Workshop* Expand *Leadership Program for BOD/BOC*	*Corporate Leadership Development Institute* (CLDI)	20 - 23 Februari 2019	Hotel Sheraton, Bali	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
3	*Workshop* Kupas Tuntas Pengujian Model Bisnis, SPPI *Test* dan *Forward Looking*	*Awesome Consulting*	11 - 12 April 2019	Hotel Millenium Tanah Abang, Jakarta	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
4	*Workshop Risk Based Auditing*	*Prospero Consulting and Training*	18 - 19 Juni 2019	Aone Hotel, Jakarta	Dortheis Sesa, SE
5	Seminar FKDKP dan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2019	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	27-Jun-19	Ballroom Grand Thamrin 1 Dan 2 Hotel Pullman Thamrin, Jl. Mh Thamrin No.57 Jakarta	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
6	*Refreshment* Program Manajemen Risiko	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	30 Juli 2019 - 06 Agustus 2019	Moskow	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
7	Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Bali	*ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)*	23-Agt-19	Bali	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
8	Seminar PSAK 71 for BOC	PT. *Risk Management* Guard (RMG)	29 - 30 Agustus 2019	Hotel Aloft, Jakarta	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
9	Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)	PT. *Risk Management* Guard (RMG)	12 - 13 September 2019	Marriott Hotel, Bandung	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
10	*Workshop* APU PPT: *Risk Assessment*, *Risk Based Approach* dan Simulasi		19 - 20 September 2019	Jw Marriot Hotel - Jakarta	Dortheis Sesa, SE
11	Seminar FKDKP Untuk Level Komisaris, Direksi, Pejabat Level Eksekutif dengan Topik Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan diterapkan pada tahun Beserta Dampaknya serta Diskusi Mengenai Pendalaman Dalam Penyusunan POJK 51	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	26-Sep-19	Hotel Double Tree By Hilton Jakarta-Diponegoro	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM
12	*Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI)	07 Oktober 2019	Ebony Ballroom, Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci - Jakarta	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE

Pendidikan dan Pelatihan Untuk Dewan Komisaris Tahun 2019 *Education and Training for the Board of Commissioners in 2019*					
No	**Nama Pelatihan** *Training Name*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Pelaksanaan** *Implementation*	**Tempat Kegiatan** *Place of Activity*	**Peserta** *Participants*
13	*Focus Group Discussion* (FGD) Buku Panduan/*Manual Book* Direksi dan Komisaris Bank serta *Code of Conduct*	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	07 - 08 November 2019	Hotel Courtyard By Marriot, Bandung	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
14	Seminar Penguatan Permodalan BPD dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Fungsi *Agent of Development*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI)	21 - 23 November 2019	Lombok Raya Hotel, Kota Mataram Ntb	DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE
15	Seminar Nasional *The 3rd Consumer Banking Forum: The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties*	PT. Sinergi Indonesia Asia Pintar	27-Nov-19	Hotel Le Meridien, Jakarta	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si

Direksi *Board of Directors*

Pendidikan dan Pelatihan Untuk Direksi Tahun 2019 *Education and Training for Board of Directors in 2019*						
No	**Nama Pelatihan** *Training Name*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Pelaksanaan** *Implementation*	**Tempat Kegiatan** *Place of Activity*	**Peserta** *Participants*	**Unit Kerja** *Work unit*
1	Pemeliharaan Sertifikasi *Dealer Treasury*	ACI FMAIndonesia	18 - 19 Januari 2019	Hotel Alila Seminyak - Jl. Taman Ganesha No.9 Petitenget Seminyak - Bali	F. Zendrato Rudhy Dharma	Direktur Utama Direktur Keuangan
2	Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Solo - Jawa Tengah	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	22-Feb-19	Solo - Jawa Tengah	F. Zendrato Sadar Sebayang	Direktur Utama Direktur Bisnis
3	*Workshop Human Capital Management With Big Data*	Asia *Anti Fraud*	21 - 22 Maret 2019	Crowne Plaza Hotel, Bandung	Isak S. Wopari	Direktur Operasional
4	*Training Corporate Finance* in Digital Era	*Money and Capital Institute*	23 - 24 April 2019	Hotel Arya Duta Tugu Tani, Jakarta	Rudhy Dharma	Direktur Keuangan
5	Seminar FKDKP dan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2019	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	27-Jun-19	Ballroom Grand Thamrin 1 Dan 2 Hotel Pullman Thamrin, Jl. Mh Thamrin No.57, Jakarta	Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan
6	Pertemuan Direktur Pemasaran yang Menangani Kredit dan Pemimpin Divisi Kredit Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia (BPD SI)	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	11 - 12 Juli 2019	Jl.raya Jember Km 7 Pakistaji, Banyuwangi, Jawa Timur	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
7	*Refreshment* Program Manajemen Risiko	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	30 Juli 2019 - 06 Agustus 2019	Moskow	F. Zendrato	Direktur Utama
8	*Workshop* Kerjasama Bank dan *Fintech* di *Era Digitalisasi* Ekonomi	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	02 - 03 Agustus 2019	Ballroom Hotel Four Points, Manado, Jl. Piere Tendean, Boulevard, Manado	Isak S. Wopari	Direktur Operasional
9	Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan SIMPEDA di Bali	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	23-Agt-19	Bali	F. Zendrato Isak S. Wopari	Direktur Utama Direktur Operasional
10	*Workshop* APU PPT : *Risk Assessment*, *Risk Based Approach* dan Simulasi	RMG (*Risk Management* Guard)	19 - 20 September 2019	Jw Marriot Hotel - Jakarta	F. Zendrato	Direktur Utama

Pendidikan dan Pelatihan Untuk Direksi Tahun 2019
Education and Training for Board of Directors in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
11	Seminar FKDP untuk Level Komisaris, Direksi, Pejabat Bank Level Eksekutif dengan Topik Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan diterapkan pada Tahun Beserta Dampaknya Serta Diskusi Mengenai Pendalaman dalam Penyusunan POJK 51	FKDKP	26-Sep-19	Hotel Double Tree By Hilton Jakarta - Diponegoro	Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan
12	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi	*Talents* Indonesia	26 - 27 September 2019	Bluesky, Jakarta	Isak S. Wopari	Direktur Operasional
13	*Workshop* Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam Perspektif Hukum Serta Perpajakan	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI)	07-Okt-20	Ebony Ballroom, Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci - Jakarta	F. Zendrato	Direktur Utama
14	Pembekalan Sertifikasi *Dealer Treasury Level Advance*	ACI FMAIndonesia	12-Okt-19	Ayana Mid Plaza, Jakarta	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
15	Sosialisasi dalam Rangka *Refreshment* tentang *Market Conduct* dan POJK No. 1/POJK.07/2013	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	15-Okt-19	Hotel Borobudur, Jakarta	Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan
16	Public *Training* Building *Corporate Culture*	PT. Kreatif Indonesia Satu	17 - 18 Oktober 2019	De Paviljoen, Bandung	Isak S. Wopari	Direktur Operasional
17	***EXT*** *- Workshop & Discussion* Metode *Stress Testing* untuk Mengukur Risiko Pasar, Likuiditas dan Kredit	Infobank *Institute*	25 - 26 Oktober 2019	Le Meridien Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
18	Ujian Sertifikasi *Dealer Treasury Level Advance* ***(Fast Track)***	LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	02-Nov-19	Kantor Bank Indonesia, Jakarta	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
19	*Focus Group Discussion* (FGD) Buku Panduan/*Manual Book* Direksi dan Komisaris Bank Serta *Code of Conduct*	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	07 - 08 November 2019	Hotel Courtyard By Marriot, Bandung	Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan
20	Seminar Indonesia *Risk Management Outlook* 2020	LPPI (Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia)	12-Nov-19	Hotel Le Meridien Jimbaran, Bali	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
21	Seminar *CEO Mentoring*	PT. Intipesan Pariwara	27-Nov-19	Hotel Ritz Carlton - Jakarta	Rudhy Dharma	Direktur Keuangan
22	*Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD SI	ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)	28-Nov-19	Swiss-Belresort Tanjung Binga, Belitung	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis
23	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	02 - 03 Desember 2019	Hotel Sheraton Grand, Jakarta	Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan
24	Undangan Anugerah Perbankan Indonesia - VIII - 2019	Economic *Review*	06 - 07 Desember 2019	Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis

Komite Dekom

Committees under Board of Commissioners

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Dewan Komite Komisaris Tahun 2019
Education and Training for the Board of Commissioners' Committees in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
1	*Workshop* Kupas Tuntas Pengujian Model Bisnis, SPPI *Test* dan *Forward Looking*	*Awesome Consulting*	11 - 12 April 2019	Hotel Millenium Tanah Abang Jakarta	Jonathan Sesa, SE	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
					Ivant B. Simamora, S.Sos	Komite Pemantau Risiko
2	*Workshop Risk Based Auditing*	*Prospero Consulting and Training*	18 - 19 Juni 2019	Aone Hotel Jakarta	Ivant B. Simamora, S.Sos	Komite Pemantau Risiko
3	Perancangan Kertas Kerja *Stress Testing* Risiko Operasional	*Prospero Consulting and Training*	30 - 31 Juli 2019	Ashley Hotel, Jakarta	Marthin Y. Warikar, SE	Komite Audit
					Ivant B. Simamora, S.Sos	Komite Pemantau Risiko

Pemimpin Divisi

Division Leader

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pemimpin Divisi Tahun 2019
Education and Training for Division Leaders in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
1	*Implementation Of Green Banking* : "Integrasi Konsep Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (LST) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Rakb) Sesuai POJK 51/ POJK.03/2017"	Dhaksara *Institute*	07 - 08 Februari 2019	Hotel Aston Rasuna-Kuningan, Jakarta	Usman Badiaraja Saragih	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
					Abdurohim	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
2	Pelatihan Persiapan Pra-Purna Bhakti	PT. Kautsar Inti Prima	18 - 22 Februari 2019	Hotel Kutabex Bali	Baso Pajung	Pemimpin Divisi Hukum
					Dadang Supriatna	Pemimpin Divisi Kepatuhan
					Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Umum
3	Seminar Nasional BPD SI Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Solo - Jawa Tengah	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)	22 Februari 2019	Solo - Jawa Tengah	Abdurohim	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
					Wastu Anggoro W.	Pemimpin Divisi Dana, Jasa Dan *E-Banking*

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pemimpin Divisi Tahun 2019 *Education and Training for Division Leaders in 2019*						
No	**Nama Pelatihan** *Training Name*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Pelaksanaan** *Implementation*	**Tempat Kegiatan** *Place of Activity*	**Peserta** *Participants*	**Unit Kerja** *Work unit*
5	*Roadmap* Bank 4.0 Dan *Era Fintech* Strategi Dan *Leadership* Menghadapi Revolusi Industri	Infobank *Institute*	26 - 27 Februari 2019	The Grove Suites Hotel, Jakarta	Wastu Anggoro W.	Pemimpin Divisi Dana, Jasa Dan *E-Banking*
					Andreas Didik Wijayanta	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
8	Analisis Laporan Keuangan & Penentuan Limit *Counterparty*	LPPI Jakarta	11 - 13 Maret 2019	Kampus Bumi LPPI, Jl. Kemang Raya No. 35 Jakarta	Imran	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
9	Pelatihan Dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LSIA *Training* Center Jakarta	12 - 14 Maret 2019	Hotel Ibis Senen & Gedung Lkpp Lantai 2 Jakarta Selatan	Octovina Paulina	Pemimpin Divisi Umum
10	Sespibank Angkatan 70	LPPI Jakarta	15 Maret 2019 - 03 Mei 2019	Kampus Bumi LPPI, Jl. Kemang Raya No. 35 Jakarta	Wastu Anggoro W.	Pemimpin Divisi Dana, Jasa Dan *E-Banking*
11	*Focus Group Discussion* (FGD) POJK Tentang Penerapan Fungsi Audit internal Pada Bank Umum	OJK Jakarta	19 Maret 2019	Gedung Bi, Ruang Serba Guna Lantai 25 Menara Radius Prawiro, Jl. Mh. Thamrin No. 2 Jakarta	Yunus B. Toding Allo	Pemimpin Divisi Audit Internal
12	Ujian Sertifikasi *Dealer Level Basic*	ACI FMAIndonesia	09 Maret 2019		Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Umum
13	*Workshop Human Capital Management With Big Data*	Asia *Anti Fraud*	21 - 22 Maret 2019	Crowne Plaza Hotel Bandung	Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
14	*Konsinyering Change Management Office* (CMO) BPD SI	Asbanda	21 - 22 Maret 2019	Hotel Crowne Plaza, Bandung	Abdurohim	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
15	Pembekalan Uji Sertifikasi *Treasury Dealer Level Intermediate*	ACI FMAIndonesia	23 - 24 Maret 2019	Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat	Petrus Agus Soleman	Pemimpin Divisi Akuntansi
16	*Workshop Fintech* Peluang Dan Tantangan Industri Perbankan Di Era Digital	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	05-Apr-19	Hotel Veranda, Jl. Kyai Maja No. 63 Jakarta Selatan	Abraham Krey	Pemimpin Divisi Bisnis, Umk & Konsumer
17	Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Intermediate*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	06-Apr-19	Kampus Stia Lan, Jl. Administrasi Ii Pejompongan Jakarta Pusat	Petrus Agus Soleman	Pemimpin Divisi Akuntansi
19	*Training Corporate Finance In Digital Era*	*Money & Capital Institute*	23 - 24 April 2019	Hotel Arya Duta Tugu Tani Jakarta	Imran	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
20	Seminar Nasional Internal Audit 2019	Yayasan Pendidikan Internal *Auditor* (YPIA)	24 - 25 April 2019	Wydham Opi Hotel Palembang	Yunus B. Toding Allo	Pemimpin Divisi Audit Internal
21	*Workshop Annual Report* Berbasis Kriteria Award 2018	Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)	24 - 25 April 2019	Jakarta	Marande B.F. Ellen	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
22	Pelatihan Pembuatan *Study* Kelayakan Pembukaan Jaringan Kantor	InfoBank *Institute*	08 - 09 Mei 2019	Hotel Puri Denpasar, Jakarta	Olvie Ineke Kembuan	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan Dan Layanan

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pemimpin Divisi Tahun 2019
Education and Training for Division Leaders in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
23	Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)	24 - 27 Juni 2019	Menara Taspen Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta	Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
24	Pelatihan Persiapan Pra-Purna Bhakti	PT. Kautsar Inti Prima	24 - 28 Juni 2019	Hotel Kutabex Bali	Octovina Paulina	Pemimpin Divisi Umum
					Imran	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
25	Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* Tingkat Lanjutan Ii	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	08 - 19 Juli 2019	Hotel Oria, Jl. Kh Wahid Hasyim No.85, Jakarta Pusat	Kusyanto	Pemimpin Divisi Audit Internal
26	Pelatihan Train The Trainer	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	01 - 03 Juli 2019	Kampus Bumi LPPI Jakarta	Pujianto	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
					Daniel Palullungan	Pemimpin Bisnis, Komersial & Korporasi
					Baso Pajung	Pemimpin Divisi Hukum
					Imran	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
27	Pertemuan Direktur Pemasaran Yang Menangani Kredit Dan Pemimpin Divisi Kredit Bank Pembangunan Daerah Se Indonesia	Asbanda	11 - 12 Juli 2019	Jl.Raya Jember Km 7 Pakistaji, Banyuwangi, Jawa Timur	Daniel Palullungan	Pemimpin Bisnis, Komersial & Korporasi
28	Seminar *The 7th Corporate Communication Summit*	Inti Pesan	17 - 18 Juli 2019	Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta	Marande B.F. Ellen	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
29	Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Level 2	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKPI)	31 Juli 2019 - 01 Agustus 2019	Griya Perbanas Lt.3 Jl. Perbanas Karet Kuningan, Sretiabudi, Jakarta Selatan	Dadang Supriatna	Pemimpin Divisi Kepatuhan
30	*Workshop* Kerjasama Bank Dan *Fintech* Di Era Digitalisasi Ekonomi	Asbanda	02 - 03 Agustus 2019	Ballroom Hotel Four Points, Manado, Jl. Piere Tendean, Boulevard, Manado	Andreas Didik Wijayanta	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
31	Sertifikasi Kepatuhan Level 2	LSPP	03 Agustus 2019	Kampus Lan Jl.Administrasi Ii Pejompongan Jakarta Pusat	Dadang Supriatna	Pemimpin Divisi Kepatuhan
32	Sekolah Staf Dan Pemimpin Cabang (Sespibank) Angkatan -71	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	05 Agustus 2019 - 20 September 2019	Kampus LPPI & Benchmark	Andreas Didik Wijayanta	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
					Daniel Palullungan	Pemimpin Bisnis, Komersial & Korporasi
					Kusyanto	Pemimpin Divisi Audit Internal
33	*Workshop* Mekanisme Penanganan Perkara Hukum Perusahaan	Indotama *Training*	19 - 21 Agustus 2019	Hotel Prime Plaza Jl.Affandi Gejayan Yogyakarta	Baso Pajung	Pemimpin Divisi Hukum

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pemimpin Divisi Tahun 2019
Education and Training for Division Leaders in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
34	Seminar Nasional BPD SI Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Bali	Asbanda	23 Agustus 2019	Bali	Olvie Ineke Kembuan	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan Dan Layanan
					Abraham Krey	Pemimpin Divisi Bisnis, Umk & Konsumer
					Wastu Anggoro W.	Pemimpin Divisi Dana, Jasa Dan *E-Banking*
35	Pembekalan Dan Sertifikasi *Dealer Level Intermediete* Dan *Level Advance*	LSPP	24 - 31 Agustus 2019	Jakarta	Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
					Petrus Agus Soleman	Pemimpin Divisi *Treasury*
36	Seminar PSAK 71 *For Board Of Commissioner*	PT. *Risk Management Guard*	29 - 30 Agustus 2019	Hotel Aloft Jakarta	Usman Badiaraja Saragih	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
37	Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa	LSIA *Training* Center	10 - 12 September 2019	Hotel Ibis Senen Jakarta (Pelatihan) Gedung Lkpp Jakarta (Ujian)	Octovina Paulina	Pemimpin Divisi Umum
38	Pembekalan Sertifikasi *Basic Treasury*	Pembekalan Sertifikasi Basic *Treasury*	21 - 22 September 2019	Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta	Pujianto	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
39	*Workshop* Dampak Kredit Macet Dan Debitur Pailit Di BPD Dalam Perspektif Hukum Serta Perpajakan	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI)	07 Oktober 2019	Ebony Ballroom, Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci - Jakarta	Baso Pajung	Pemimpin Divisi Hukum
					Imran	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
40	*Public Training Building Corporate Culture*	PT. Kreatif Indonesia Satu	17 - 18 Oktober 2019	De Paviljoen, Bandung	Yuliana D. Yembise	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
41	Pembuatan SOP Restrukturasi Kredit	Pt Rotana Gisbal Permata Lebah	22 - 24 Oktober 2019	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta	Imran	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
42	10th The Real CSR Seminar Tentang Peran CSR Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Indonesia	PT. Inti Pesan	23 - 24 Oktober 2019	Hotel Aryaduta (Tugu Tani), Jakarta	Marande B.F. Ellen	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan

Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pemimpin Divisi Tahun 2019
Education and Training for Division Leaders in 2019

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*	Tempat Kegiatan *Place of Activity*	Peserta *Participants*	Unit Kerja *Work unit*
43	Ext-*Workshop & Discussion* Metode *Stress Testing* Untuk Mengukur Risiko Pasar, Likuiditas Dan Kredit	Infobank *Institute*	25 - 26 Oktober 2019	Le Meridien Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	Usman Badiaraja Saragih	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
					Petrus Agus Soleman	Pemimpin Divisi *Treasury*
44	Pembekalan Sertifikasi *Treasury Level Intermediate*	ACI FMAIndonesia	26 - 27 Oktober 2019	Hotel Grand Mercure-Harmoni Jakarta	Pujianto	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
45	Ujian Sertifikasi *Treasury Level Intermediate*	LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	02-Nov-19	Kampus Stia Lan, Jl.Administrasi Ii Pejompongan Jakarta Pusat	Pujianto	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
46	Focus Discussion (FGD) Buku Panduan/ *Manual Book* Direksi Dan Komisaris Bank Serta *Code Of Conduct*	Asbanda	07 - 08 November 2019	Hotel Courtyard By Marriot Bandung	Baso Pajung	Pemimpin Divisi Hukum
47	Pelatihan Integrasi Pelaporan Perbankan Berbasis Metadata	Infobank *Institute*	07 - 08 November 2019	Hotel Le Meridien Jakarta	Martha A. Rumaseuw	Pemimpin Divisi Akuntansi
48	*Workshop* "*Project Finance For Infrastructure*"	Asbanda	21 - 22 November 2019	El Hotel Royale , Banyuwangi	Daniel Palullungan	Pemimpin Bisnis, Komersial & Korporasi
49	*Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun Pada BPD SI	Asbanda	28-Nov-19	Swiss-Belresort Tanjung Binga, Belitung	Petrus Agus Soleman	Pemimpin Divisi *Treasury*
50	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	BI Dan OJK	02 - 03 Desember 2019	Hotel Sheraton Grand Jakarta	Dadang Supriatna	Pemimpin Divisi Kepatuhan
					Usman Badiaraja Saragih	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Struktur & Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure & Composition

Bank Papua merupakan Bank Pembangunan Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Papua dan Papua Barat. Disamping itu saham Bank Papua dimiliki juga oleh Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari sebagai bagian dari program kepemilikan saham yang dimiliki oleh karyawan Bank Papua. Dari seluruh pemegang saham, persentase kepemilikan saham terbesar adalah Pemerintah Provinsi Papua yakni sebesar 21,24%, sehingga menjadi Pemegang Saham Mayoritas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bank Papua is a Regional Development Bank whose majority shares are owned by the Regional Government consisting of the Governments of the Provinces of Papua and West Papua, Regency and Municipal Governments throughout Papua and West Papua. In addition, Bank Papua shares are also owned by the Bank Papua Berdikari Multipurpose Cooperative as part of the share ownership program owned by Bank Papua employees. Of all shareholders, the largest percentage of share ownership is the Provincial Government of Papua, amounting to 21.24%, thus becoming the Majority Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

Struktur Kepemilikan Saham

Shareholding Structure

Komposisi pemegang saham Bank Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Irnawati Nazar, SH no.41 tanggal 29 Maret 2019 di Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholders of Bank Papua is as stated in Deed Irnawati Nazar, SH no.41 dated 29 March 2019 in Raja Ampat Regency is as follows:

Pemegang Saham

Shareholder

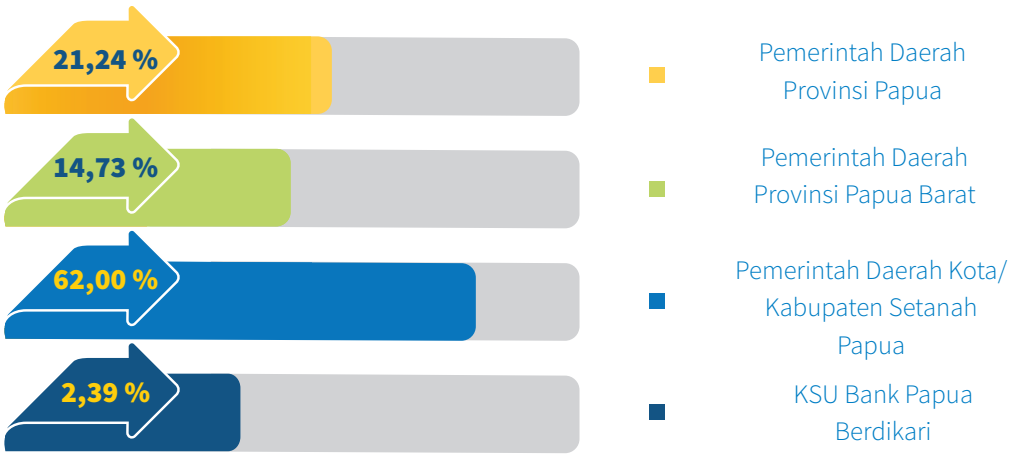

Modal Dasar perseroan berjumlah Rp4.000.000.000.000 per lembar saham yang terbagi atas 800.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,- .

The authorized capital of the company is Rp4,000,000,000,000 per share, divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp5,000,000.

Kronologi Pencatatan Saham

Sharesw Listing Chronology

Tahun 2018					
Jenis Saham *Stock Type*	**Pemegang Saham** *Shareholders*	**Jumlah Lembar** *Number of sheets*	**Nilai saham** *Share value*	**Porsentase** *Percentage*	**Keterangan** *Information*
PEMEGANG SAHAM SERI A	Pemerintah Provinsi Papua	87.721	388.605.000.000	19,13%	
	Pemerintah Provinsi Papua Barat	56.128	280.640.000.000	13,82%	
	Pemerintah kota/kabupaten se Tanah Papua	275.990	1.307.235.000.000	64,37%	
PEMEGANG SAHAM SERI B	KSU Bank Papua Berdikari	10.993	54.465.000.000	2,68%	
	Sub Jumlah	430.832	2.030.945.000.000	100,00%	
	Tambahan Modal Disetor (belum disahkan)	34.647	173.233.073.144		
	Jumlah	**465.479**	**2.204.178.073.144**		**"31 Desember 2018**

Tahun 2019					
Jenis Saham *Stock Type*	**Pemegang Saham** *Shareholders*	**Jumlah Lembar** *Number of sheets*	**Nilai saham** *Share value*	**Porsentase** *Percentage*	**Keterangan** *Information*
PEMEGANG SAHAM SERI A	Pemerintah Provinsi Papua	97.721	488.605.000.000	21,24%	
	Pemerintah Provinsi Papua Barat	66.128	330.640.000.000	14,37%	
	Pemerintah kota/kabupaten se Tanah Papua	285318	1.426.590.000.000	62,00%	
PEMEGANG SAHAM SERI B	KSU Bank Papua Berdikari	10.993	54.965.000.000	2,39%	
	Sub Jumlah	460.160	2.300.800.000.000	100,00%	1 januari s.d. 29 Maret 2019
	Tambahan Modal Disetor (belum disahkan)	26.662	133.311.022.106		
	Jumlah	**486.822**	**2.434.111.022.106**		**30 maret s.d. 31 Desember 2019**

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp2.434.111.022.106.

Tambahan modal disetor sebesar Rp269.855.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Irnawati Nazar,SH No.41 tanggal 29 Maret 2019, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Tambahan modal disetor sebesar Rp133.311.022.106 merupakan setoran modal dari kabupaten di Papua selama tahun 2019 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2020.

The amount deposited by the Shareholders as of 31 December 2019 reached Rp2,434,111,022,106.

Additional paid up capital of Rp269,855,000,000 has been validated as share capital based on notarial deed of Irnawati Nazar, SH No.41 dated 29 March 2019, concerning Minutes of Annual General Meeting of Shareholders. Capital deposit paid up amounting to Rp133,311,022,106 is a capital deposit from regencies in Papua during 2019 which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2020.

Komposisi Saham

Share Composition

Sampai dengan akhir Desember 2019 komposisi saham Bank Papua adalah sebagai berikut :

Until the end of December 2019 the composition of Bank Papua's shares is as follows:

Nama Pemegang Saham *Shareholder Name*	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) *Total Issued and Fully paid (shares*	Persentase Kepemilikan (%) *Precentage of Ownership*	Jumlah Kepemilikan (%) *Total Ownership*
Saham seri A			
a. Provinsi Papua:			
Pem.Prov. Papua	97.721	21,24	488.605.000.000
Pem.Kab. Jayawijaya	7.802	1,70	39.010.000.000
Pem.Kab. Merauke	17.477	3,80	87.385.000.000
Pem.Kota. Jayapura	14.579	3,17	72.895.000.000
Pem.Kab. Jayapura	9.616	2,09	48.080.000.000
Pem.Kab. Yapen	9.094	1,98	45.470.000.000
Pem.Kab. Puncak Jaya	10.350	2,25	51.750.000.000
Pem.Kab. Biak Numfor	5.005	1,09	25.025.000.000
Pem.Kab. Mimika	15.346	3,33	76.730.000.000
Pem.Kab. Asmat	8.600	1,87	43.000.000.000
Pem.Kab. Sarmi	12.500	2,72	62.500.000.000
Pem.Kab. Pegunungan Bintang	11.400	2,48	57.000.000.000
Pem.Kab. Mappi	6.400	1,39	32.000.000.000
Pem.Kab. Nabire	6.356	1,38	31.780.000.000
Pem.Kab. Paniai	3.700	0,80	18.500.000.000
Pem.Kab. Tolikara	7.631	1,66	38.155.000.000
Pem.Kab. Keerom	6.000	1,30	30.000.000.000
Pem.Kab. Waropen	5.510	1,20	27.550.000.000
Pem.Kab. Boven Digul	5.622	1,22	28.110.000.000
Pem.Kab. Yahukimo	2.591	0,56	12.955.000.000
Pem.Kab. Lanni Jaya	2.500	0,54	12.500.000.000
Pem.Kab. Supiori	3.931	0,85	19.655.000.000
Pem.Kab. Memberamo Raya	4.600	1,00	23.000.000.000
Pem.Kab. Nduga	3.333	0,72	16.665.000.000
Pem.Kab. Dogiyai	4.474	0,97	22.370.000.000
Pem.Kab. Intan Jaya	2.147	0,47	10.735.000.000
Pem.Kab. Puncak	3.400	0,74	17.000.000.000
Pem.Kab. Memberamo Tengah	1.036	0,23	5.180.000.000
Pem.Kab. Yalimo	1.419	0,31	7.095.000.000
Pem.Kab. Deiyai	1.800	0,39	9.000.000.000
Sub Jumlah/ Total	**291.940**	**63,45**	**1.459.700.000.000**

Nama Pemegang Saham *Shareholder Name*	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) *Total Issued and Fully paid (shares*	Persentase Kepemilikan (%) *Precentage of Ownership*	Jumlah Kepemilikan (%) *Total Ownership*
b. Provinsi Papua Barat:			
Pem.Prov. Papua Barat	66.128	14,37	330.640.000.000
Pem.Kab. Manokwari	10.128	2,20	50.640.000.000
Pem.Kab. Fak-Fak	10.085	2,19	50.425.000.000
Pem.Kab. Raja Ampat	13.238	2,88	66.190.000.000
Pem.Kab. Kaimana	6.000	1,30	30.000.000.000
Pem.Kab. Manokwari Selatan	2.475	0,54	12.375.000.000
Pem.Kab. Sorong	6.355	1,38	31.775.000.000
Pem.Kab. Sorong Selatan	9.800	2,13	49.000.000.000
Pem.Kab. Teluk Bintuni	12.900	2,80	64.500.000.000
Pem.Kab. Teluk Wondama	5.400	1,17	27.000.000.000
Pem.Kota Sorong	3.453	0,75	17.265.000.000
Pem.Kab. Maybrat	3.815	0,83	19.075.000.000
Pem.Kab. Tambrauw	3.650	0,79	18.250.000.000
Pem.Kab. Pengunungan Arfak	3.800	0,83	19.000.000.000
Sub Jumlah	**157.227**	**34,16**	**786.135.000.000**
Jumlah Saham seri A	**449.167**	**97,61**	**2.245.835.000.000**
Saham seri B			
c. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	10.993	2,39	54.965.000.000
Jumlah Saham seri B	**10.993**	**2,39**	**54.965.000.000**
Jumlah Modal	**460.160**	**100**	**2.300.800.000.000**
Tambahan Modal Disetor	**26.662**	**-**	**133.311.022.106**

20 Pemegang Saham Terbesar

20 Largest Shareholders

No	Nama Pemegang Saham *Shareholder Name*	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) *Total Issued and Fully paid (shares*	Persentase Kepemilikan (%) *Precentage of Ownership*	Jumlah Kepemilikan (%) *Total Ownership*
1	Pem.Prov. Papua	97.721	21,24	488.605.000.000
2	Pem.Prov. Papua Barat	66.128	14,37	330.640.000.000
3	Pem.Kab. Merauke	17.477	3,80	87.385.000.000
4	Pem.Kab. Mimika	15.346	3,33	76.730.000.000
5	Pem.Kota. Jayapura	14.579	3,17	72.895.000.000
6	Pem.Kab. Raja Ampat	13.238	2,88	66.190.000.000
7	Pem.Kab. Teluk Bintuni	12.900	2,80	64.500.000.000
8	Pem.Kab. Sarmi	12.500	2,72	62.500.000.000
9	Pem.Kab. Pegunungan Bintang	11.400	2,48	57.000.000.000
10	Pem.Kab. Puncak Jaya	10.350	2,25	51.750.000.000
11	Pem.Kab. Manokwari	10.128	2,20	50.640.000.000
12	Pem.Kab. Fak-Fak	10.085	2,19	50.425.000.000
13	Pem.Kab. Sorong Selatan	9.800	2,13	49.000.000.000
14	Pem.Kab. Jayapura	9.616	2,09	48.080.000.000
15	Pem.Kab. Yapen	9.094	1,98	45.470.000.000
16	Pem.Kab. Asmat	8.600	1,87	43.000.000.000
17	Pem.Kab. Jayawijaya	7.802	1,70	39.010.000.000
18	Pem.Kab. Tolikara	7.631	1,66	38.155.000.000
19	Pem.Kab. Sorong	6.355	1,38	31.775.000.000
20	Pem.Kab. Kaimana	6.000	1,30	30.000.000.000

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Bank Papua dan/ atau perusahaan lain.

Board of Commissioners and Directors Share Ownership

As of December 31, 2019 there were no members of the Board of Commissioners and Board of Director who owned the shares of Bank Papua and or other companies.

Kepemilikan Saham Masyarakat yang Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2019, Saham Bank Papua belum diperdagangkan di bursa efek sehingga belum terdapat informasi terkait hal tersebut.

Community Share Ownership Less than 5%

As of December 31, 2019, Bank Papua shares have not been traded on the stock exchange so there is no information related to this.

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau lebih Saham

Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat 2 pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham, yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Permerintah Provinsi Papua Barat.

Shareholders who own 5% or more shares

As of December 31, 2019, there were 2 shareholders who owned 5% or more shares, namely the Provincial Government of Papua and the Provincial Government of West Papua.

Identitas Pemegang Saham
Shareholder Identity

Provinsi Papua
Gubernur Provinsi Papua terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Papua Province
Papua province selected during the administration period automatically becomes the controlling shareholder of Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kota Jayapura
Walikota Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Jayapura Municipal Government
Jayapura Mayor elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua,until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Jayapura
Bupati Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Jayapura Regency Government
Jayapura Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Bupati Jayawijaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Jayawijaya Regency Government
Jayawijaya Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
Bupati Puncak Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Puncak Jaya Regency Government
Puncak Jaya Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Merauke
Bupati Merauke terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Merauke Regency Government
Merauke regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Bupati Biak Numfor terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Biak Numfor Regency Government

Biak Numfor Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Yapen

Bupati Kepulauan Yapen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Yapen Regency Government

Yapen Island Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Nabire

Bupati Nabire terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Nabire Regency Government

Nabire Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Paniai

Bupati Paniai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Paniai Regency Government

Paniai Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Mimika

Bupati Mimika terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Mimika Regency Government

Mimika Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua , until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Sarmi

Bupati Sarmi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Sarmi Regency Government

Sarmi Regents elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Tolikara

Bupati Tolikara terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Tolikara Regency Government

Tolikara Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Waropen

Bupati Waropen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

SWaropen Regency Government

Regent Waropen elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Bupati Yahukimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Yahukimo Regency Government

Yahukimo Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Asmat

Bupati Asmat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Asmat Regency Government

Asmat Regents elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Keerom

Bupati Keerom terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Keerom Regency Government

Keerom Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Bupati Pegunungan Bintang terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Pegunungan Bintang Regency Government

Pegunungan Bintang regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Supiori

Bupati Supiori terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Supiori Regency Government

Supiori Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

Bupati Boven Digoel terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Boven Digoel Regency Government

Boven Digoul Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Mappi

Bupati Mappi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Mappi Regency Government

Mappi Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until thefinancial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

Bupati Lanny Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Lanny Jaya Regency Government

Lanny Jaya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Yalimo

Bupati Yalimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Yalimo Regency Government

Yalimo Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya

Bupati Memberamo Raya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Mamberamo Raya Regency Government

Memberamo Raya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Nduga

Bupati Nduga terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Nduga Regency Government

Nduga Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai

Bupati Dogiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Dogiyai Regency Government

Dogiyai Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Puncak

Bupati Puncak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Puncak Regency Government

Puncak Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

Bupati Memberamo Tengah terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Central Mamberamo Regency Government

Central Memberamo Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

Bupati Intan Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Intan Jaya Regency Government

Intan Jaya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Deiyai

Bupati Deiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Deiyai Regency Government

Deiyai Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the fiscal year 2019.

Provinsi Papua Barat

Gubernur Papua Barat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

West Papua Province

Governor of West Papua Province during the period of administration elected automatically become the controlling shareholder of Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kota Sorong

Walikota Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Sorong Municipal Government

Sorong Mayor was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Manokwari

Bupati Manokwari terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Manokwari Regency Government

Manokwari Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Sorong

Bupati Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Sorong Regency Government

Sorong Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Bupati Sorong Selatan terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

South Sorong Regency Government

South Sorong Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Bupati Fak-Fak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Fak-Fak Regency Government

Fak-Fak Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

Bupati Teluk Bintuni terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Teluk Bintuni Regency Government

Teluk Bintuni Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Kaimana

Bupati Kaimana terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Kaimana Regency Government

Kaimana Regent waselected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bupati Raja Ampat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Raja Ampat Regency Government

Raja Ampat Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

Bupati Teluk Wondama terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Teluk Wondama Regency Government

Teluk Wondama Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Bupati Tambrauw terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Tambrauw Regency Government

Tambrauw Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the fiscal year 2019.

Pemerintah Kabupaten Maybrat

Bupati Maybrat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Maybrat Regency Government

Maybrat Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak

Bupati Pegunungan Arfak pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2019.

Pegunungan Arfak Regency Government

Arfak Mountains regent during the reign period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

Bupati Manokwari Selatan pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Hingga tahun buku 2019.

South Manokwari Regency Government

South Manokwari Regent during the period of his rule automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2019.

Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari

Ketua pengurus Koperasi Serba Usaha Bank Papua terpilih pada masa periode kepengurusan otomatis menjadi Pemegang Saham Bank Papua.

Business Multipurpose Cooperative Bank Papua Berdikari

Chairman of the Multipurpose Business Cooperative of Bank Papua was elected during the period of stewardship automatically became a Shareholder of Bank Papua.

Kronologis Penerbitan Saham & Efek Lainnya

Chronology of Issuance of Shares & Other Securities

Kronologi Penerbitan Saham
Chronology of Issuance of Shares

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume perdagangan.

Until the end of December 2019, Bank Papua did not issue shares and were not listed on the capital market, so there was no relevant information regarding the number of shares outstanding, market capitalization, highest, lowest and closing share prices and trading volume.

Kronologi Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua juga tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of December 2019, Bank Papua also did not issue bonds, sukuk or convertible bonds, so there was no information regarding the number of outstanding bonds / sukuk / convertible bonds, interest rates, due dates and bond / sukuk ratings.

Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Subsidiaries and / or Associates

Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
Subsidiaries and / or Associates

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan.

As of the end of December 2019, Bank Papua did not have consolidated subsidiaries and / or associates in the financial statements.

Struktur Grup Perusahaan

The Structure of the Company Group

Struktur Grup Perusahaan
Group Structure Company

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, Bank Papua tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture* maupun *special purpose vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi untuk menggambarkan struktur grup perusahaan yang terkait dengan hal tersebut.

As of the end of December 2019, Bank Papua had no subsidiaries, associates, joint ventures or special purpose vehicles (SPV) so there was no information to describe the structure of the group of companies related to this matter.

Daftar Nama dan Alamat Lembaga Profesi Penunjang

List of Names and Addresses of Supporting Professional Institutions

Daftar Nama dan Alamat Lembaga Profesi Penunjang
List of Names and Addresses of Supporting Professional Institutions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HERTANTO, GRACE dan KARUNAWAN
Palma Tower 18th Floor Lot. F & G, Jl. RA. Kartini II-S Kav. 06, RT.6/RW.14, Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

NOTARIS
MARYATIE SIMANJUNTAK,SH
Komplek Ruko Abepura Mas Blok A No. 2
Jl. Raya Abepura (Samping Toko Central) Abepura
Tlp. 0812 48352214, 0813 44890532

PEMERINGKAT
PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia)
Panin Tower – Senayan City 17th Floor

KONSULTAN HUKUM

KONSULTAN PAJAK

Penghargaan dan Sertifikat

Awards and Certificat

Bank Papua Juara 2 ARA AWARD kategori BUMD Keuangan Non Listed Tahun 2019

Piagam Penghargaan Dari Bank Indonesia Dengan Kategori Kas Titipan Terbaik di Wilayah Kerka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Tanggal 19 April 2019

Sertifikat Bank Indonesia Award, Kategori Bank Pengelola Kas Titipan Dengan Kepatuhan Pelaporan Terbaik, Tanggal 05 Desember 2019

Piala Tetap Juara I Umum Kejuaraan Karate Pangdam CUP 2019, Tanggal 07 Desember 2019

Sertifikat Economic Review-1st The Best Information Technology 2019-Category Bank BPD Buku II (Aset Rp10 T sd Rp25 T), Tanggal 06 Desember 2019

Sertifikat Economic Review-Bank Papua The Big 10 Bank Company-Category Bank BPD Buku II (Aset Rp10T sd Rp25 T), Tanggal 06 Desember 2019

Sertifikat Economic Review-Bank Papua The Big 9 Bank Company-Category Bank BPD Buku II (Aset Rp10T sd Rp25 T), Tanggal 06 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara I Tenis Meja, tanggal 19 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara I Tenis Lapangan, tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara I Stand Up Comedy, tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara I Bulutangkis, tanggal 07 Desember 2019

Juara Umum PORSEBANK BMPD Papua, 07 Desember 2019,

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara I Volley Ball Putra tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara III Fotografi, Tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara II Futsal Tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara III Catur, tanggal 07 Desember 2019

PORSEBANK 2019 BMPD Papua Juara III Fun Run Putra, tanggal 07 Desember 2019

Daftar Nama dan Alamat Kantor Jaringan Bank Papua

List and Address of Bank Papua Network Office

Sejak berdiri pada tahun 1966, Bank Papua telah dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat mengelola dana masyarakat hingga saat ini. Eksistensi Bank Papua hingga saat ini, menjadi bukti nyata bahwa Bank Papua senantiasa menjaga kepercayaan para *stakeholder*, khususnya para nasabah dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan dan pengabdian yang tinggi pada masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dan pihak lainnya sebagai pemegang saham, Bank Papua selalu berkomitmen meningkatkan akses ketersediaan jaringan baik dalam bentuk kantor cabang dan *delivery channel* yang tersebar baik di Tanah Papua maupun diluar Tanah Papua.

Since its establishment in 1966, Bank Papua has been entrusted by the Papua and West Papua Regional Governments to manage public funds to date. The existence of Bank Papua to date has become clear evidence that Bank Papua has always maintained the trust of stakeholders, especially customers by upholding the principle of service and high service to the community. With full support from the Papua, West Papua Regional Government and other parties as shareholders, Bank Papua has always been committed to increasing access to network availability both in the form of branch offices and delivery channels that are spread both in Papua and outside Papua.

Jumlah Jaringan Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Per Desember 2019

Number of Office Networks PT. Bank Pembangunan Daerah Papua as Of December 2019

No	Kantor dan *Delivery Chanel*	2015	2016	2017	2018	2019
A	JARINGAN KANTOR					
1	Kantor Pusat	1	1	1	1	**1**
2	Kantor Cabang	35	37	37	36	**36**
	- Papua	22	28	23	23	**23**
	- Papua Barat	8	9	9	9	**9**
	- Luar Papua	5	5	5	4	**4**
3	Kantor Cabang Pembantu	74	73	70	66	**66**
	- Papua	50	50	50	47	**47**
	- Papua Barat	20	19	19	18	**18**
	- Luar Papua	4	4	1	1	**1**
4	Kantor Kas	91	109	113	113	**115**
	- Papua	49	61	65	65	**67**
	- Papua Barat	42	47	47	48	**48**
	- Luar Papua	0	1	1	0	**0**
	Total Jaringan Kantor	**201**	**220**	**221**	**216**	**218**

Jumlah Jaringan Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Per Oktober 2019
Number of Office Networks PT. Bank Pembangunan Daerah Papua as Of December 2019

B	**JARINGAN** *Delivery channel*	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	296	296	301	314	**365**
	- Papua	200	200	205	211	247
	- Papua Barat	77	77	77	84	102
	- Luar Papua	19	19	19	19	16
2	*Electronic Data Capture* (EDC)	176	176	95	95	**83**
	- Papua	131	131	58	58	48
	- Papua Barat	43	43	37	37	35
	- Luar Papua	2	2	0	0	0
3	*Cash Deposit Machine* (CDM)	8	8	8	8	**8**
	- Papua	6	6	6	6	6
	- Papua Barat	2	3	3	2	2
4	Kasda *Online*	19	19	19	19	**19**
	- Papua	12	12	12	12	12
	- Papua Barat	7	7	7	7	7
5	Samsat *Online*	23	23	23	23	**23**
	- Papua	14	14	14	14	14
	- Papua Barat	9	9	9	9	9
6	Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	19	23	23	23	**23**
	- Papua	12	16	14	16	16
	- Papua Barat	7	7	7	7	7
7	*Cash Management System* (CMS)	0	3	4	5	**19**
	- Papua	-	3	4	5	17
	- Papua Barat	-	-	-	-	2
8	*Payment point* Bank Papua	20	25	28	28	**38**
	- Papua	15	19	20	20	28
	- Papua Barat	5	6	8	8	10
9	Kas Titipan Bank Indonesia	0	1	5	5	**5**
	- Papua	-	1	3	3	3
	- Papua Barat	-	-	2	2	2
10	Mobil Kas Keliling	2	2	2	2	**2**
	- Papua	1	1	1	1	1
	- Papua Barat	1	1	1	1	1
Total *Delivery Chanel*		**563**	**576**	**508**	**522**	**585**
Total Jaringan		**764**	**796**	**729**	**738**	**803**

Alamat Kantor

Offices Address

Jaringan Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua per Desember 2018 *Office Network PT. Bank Pembangunan Daerah Papua as December 2018*					
No	**Jenis Kantor** *Office type*	**Alamat** *Address*	**Kode Pos**	**No Telpon**	**Facs**
1	Kantor Pusat	Jl. Ahmad Yani 5 - 7 Jayapura	99111	(0967) 532011, 533608, 531944	(0967) 533019
Kantor Cabang / *Branch office*					
1	KC. Utama Jayapura	Jl. Ahmad Yani 5-7 Jayapura 99111	99111	(0967) 532011, 532351	(0967) 533207 ; 531303
2	KC. Merauke	Jl. Raya Mandala Muli No. 350 Merauke	99614	(0971) 321850,321112, 321301	(0971) 321340
3	KC. Biak	Jl. Achmad Yani No. 1 Biak	98112	(0981) 23100, 24031, 23102	
4	KC. Wamena	Jl. Yos Sudarso Wamena	99511	(0969) 31167, 31168, 31011	(0969)31402
5	KC. Serui	Jl. Diponegoro, Kel. Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen	98212	(0983) 31763, 31482, 31483, 33193	(0983) 31793, 33364
6	KC. Nabire	Jl. Yos Sudarso No. 15 Nabire	98800	(0984) 21511, 21691, 24044, 22320	(0984) 21556
7	KC. Sentani	Jl. Raya Kemiri Sentani (Ex. Gedung Kantor Dinas Pertanian)	99352	(0967) 592626, 594510	(0967) 591017
8	KC. Timika	Jl. Yos Sudarso No. 4 Timika	99910	(0901) 321051, 322958	(0901) 321015
9	KC. Sarmi	Jl. Inpres Mararena Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi	99373	(0966) 31054	(0966) 31054
10	KC. Arso	Jl. Raya Keerom Kelurahan Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom	99468	(Telp. Vsat) 47 - 10701	
11	KC. Mulia	Jl. Silas Papare, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya	98911	81344324245, (Telp. Vsat) 47 - 70107	(0969)31402
12	KC. Enarotali	Jl. Frans Kaisepo Enarotali, Distrik Paniai Timur Kab. Paniai	98800	(031) 60007012, (Telp. Vsat) 47 - 90101	(031) 60007012
13	KC. Agats	Jl. Sultan Hasannudin Distrik Agats, Kabupaten Asmat	99614	(0902) 31006, (Telp. Vsat) 47 - 40201	(0902) 31206
14	KC. Keppi	Jl. Irian Distrik Obaa Kabupaten Mappi	99614	(Telp. Vsat) 47 - 40401	(0971) 532134
15	KC. Karubaga	Jl. Kota Baru Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara	99562	(Telp. Vsat) 47 - 70301	(0969)31404
16	KC. Waren	Jl. Inpres, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen	98212	(Telp. Vsat) 47 - 80101	(0983) 31793
17	KC. Oksibil	Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang	99573	(Telp. Vsat)47 - 10801	(0967) 591017
18	KC. Tanah Merah	Jl. Trans Papua - Tanah Merah, Distrik Mandobo Kabupaten Bouven Digoel	99663	(0975) 21028	(0971) 532134
19	KC. Kasonaweja	Distrik Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya	99376	-	-
20	KC. Abepura	Jl. Raya Abepura Kotaraja Kota Jayapura Provinsi Papua	99321	(0967) 584503, 585139, 585014,585271	(0967) 584488
21	KC. Sorong	Jl. Ahmad Yani No 18 Sorong/Ada Perubahan Alamat : Jl. Ahmad Yani No.18 Kel.kofkerbu Kota Sorong	98416	(0951) 326380,326381,326382,326383	(0951) 326384
22	KC. Utama Manokwari	Jl. Yos Sudarso No. 57A Manokwari	98312	(0986) 231080, 215855, 213088, 211807, 211809	(0986) 212291
23	KC. Fak-Fak	Jl. Salasa Namudat, Distrik Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak	98611	(0956) 23118,22491,22391,23202	(0956) 22391, 23203
24	KC. Kaimana	Jl. Trikora No. 1A Kaimana	98654	(0957) 21642, 21643, 21956	(0957) 21644

Kantor Cabang / *Branch office*					
25	KC. Teminabuan	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan	98454	(0952) 31053, 31277	(0952) 31176
26	KC. Bintuni	Jl. Raya Bintuni Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni	98364	(0955) 31182,31183, 31124, 311243	(0955) 31243
27	KC. Waisai	Waisai - Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat	98416	(Telp. Vsat) 47 - 20201	(0951) 326384
28	KC. Aimas	Jl. Nangka Km. 19 Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong	98416	(0951) 3123435, (Telp. Vsat) 47 -20301	(0951) 326385
29	KC. Jakarta	Gedung Thamrin City Lt. Dasar Blok A 19 No. 11 Jl Thamrin Boulevard (D/H Jl. Kebon Kacang Raya) Jakarta Pusat 10340	10340	(021) 31990940, 31990941	(021) 31990944
30	KC. Makassar	Jl. Ap. Pettarani Samping Ditlantas Polda Sulsel Keluarahan Masale Kecamatan Panakukuang, Kota Makassar	90224	(0411) 4662785, 4662810, 4662693	(0411) 430345
31	KC. Surabaya	Jl. Raya Darmo No.61 Kecamatan Tegalsari - Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur	60625	(031) 5662280, 5662296	(031) 5662286
32	KC. Yogyakarta	Ruko Raflesia Kavling J Dan K Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta	55281	(0274) 4332886, 4332730, 4332906	(0274) 4332567
33	KC. Waghete	Jalan Poros Waghete Distrik Tigi Kabupaten Deiyai	98800	(0984) 21511, 21691, 24044	(0984) 21558
34	KC. Ilaga	Jl. Raya Ilaga Desa Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak	98972	-	-
35	KC. Dekai	Kompleks Ruko Blok A No. 28- 30 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo	99571	8124843079	(0969)31403
36	KC. Wasior	Jl. Flanden Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama	98312	(Telp. Vsat) 31702	(0986) 212291
Kantor Cabang Pembantu / *Sub Branch office*					
1	KCP. Abepura	Jl. Raya Sentani Distrik Abepura Kota Jayapura	99321	(0967) 581039	(0967) 581027
2	KCP. Waena	Jl. Raya Sentani Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura	99351	(0967) 572241	
3	KCP. Cigombong	Jl Perkutut No 13 Kel Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	99225	(0967) 585051	-
4	KCP. Pasar Youtefa	Kompleks Pertokoan Abepura Trade Center (Atc) Blok A-3 Jln. Baru Distrik Abepura Kota Jayapura	99221	(0967) 581982, 581986	-
5	KCP. Muara Tami	Distrik Muara Tami Kota Jayapura	99326	-	-
6	KCP. Hamadi	Jl. Pasar Hamadi Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura		-	-
7	KCP. Tanah Hitam	Jl. Raya Abe Pantai Distrik Abepura Kota Jayapura	99321	(0967) 589074	-
8	KCP. Dok Ix	Jl. Sulawesi Kel. Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura			-
9	KCP. Mall Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi Apo Kel. Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	99112	(0967) 5150150	-
10	KCP. Entrop	Jalan Raya Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura		(0967) 533485	-
11	KCP. Kurik	Jl. Moh Hatta Distrik Kurik Kabupaten Merauke	99614	(0971) 324453	(0971) 532134
12	KCP. Tanah Miring	Jl. Raya Tanah Miring , Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	99632	-	-
13	KCP. Pasar Ampera	Jl. Tmp Polder Distrik Merauke Kabupaten Merauke	99611	(0971) 326595	(0971) 532134
14	KCP. Simpati Muting	Jl. Tras Papua, Distrik Eligobel Kabupaten Merauke	99652	(0971) 321038, 321112	(0971) 532147

Kantor Cabang Pembantu / *Sub Branch office*					
15	KCP. Tiom	Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya	99563	-	-
16	KCP. Kobakma	Distrik Kobakma - Kabupaten Mamberamo Tengah	99558	-	-
17	KCP. Elelim	Distrik Elelim Kabupaten Yalimo	99581	-	-
18	KCP. Kenyam	Distrik Kenyam Kabupaten Nduga		-	-
19	KCP. Tembagapura	Sentra Niaga Mile 68, Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika	99967	(0901) 351029	(0901) 321015
20	KCP. Sp. IV	Jl. Poros Mapurujaya Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	99910	(Telp. Vsat) 39402	(0901) 321016
21	KCP. Pasar Sentral Timika	Jl. Hasanudin No. 24 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-	-
22	KCP. SP II Timika	Jl. Cendrawasih SP II Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	99910	(0901) 31258881	-
23	KCP. Sorendiweri	Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Komp. Pasar Sentral Supiori)	98161	Vsat #*4722603	
24	KCP. Kampung Baru	Jl. Sorido Raya Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	-	(0981) 26589	-
25	KCP. Numfor Timur	Jl. Raya Kornasoren Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor	98171	(0981) 23100, 23101, 23102	(0981) 23104
26	KCP. Bosnik	Jl. Bosnik Raya Kampung Woniki Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor		-	-
27	KCP. Darfuar	Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor		-	-
28	KCP. Korido	Distrik Korido Kabupaten Supiori	98161	(0981) 23100, 23101, 23102	(0981) 23105
29	KCP. Sp. II Kalisemen	Jl. Bumi Raya Distrik Wanggar Kabupaten Nabire	98856	(0984) 22812, 08114800735.	
30	KCP. Moanemani	Jl. Trans Papua Nabire - Ilaga, Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai	98800	(0984) 21511, 21691, 24044	(0984) 21556
31	KCP. Samabusa	Jl. Poros Nabire Legari - Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire	-	-	-
32	KCP. Sugapa	Jl. Padat Karya - Yokatapa, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya	98768	(0984) 21511, 21691, 24044	(0984) 21557
33	KCP. Karang Tumaritis	Jl. Dr. A. Gobay Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire	98812	(0984) 22236, 081344561499.	-
34	KCP. RSUD Nabire	Jl. R.e.marthadinata Distrik Nabire Kabupaten Nabire			
35	KCP. Urfas	Jl. Inpres Urfas Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen	-	-	-
36	KCP. Bade	Jl. Angkasa Bade, Distrik Edera Kabupaten Mappi	99853	(0974) 21012	(0971) 532136
37	KCP. Assue	Jl. Garuda Distrik Assue Kabupaten Mappi	99874	(Telp.satelit) 086812127142	(0971) 532138
38	KCP. Genyem	Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	99351	(0984) 21511, 21691, 24044	(0967) 591017
39	KCP. Doyo Baru	Jl. Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura		-	-
40	KCP. Nimbokrang	Desa Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura		-	-
41	KCP. Hawai	Jl. Raya Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura		(0967) 594602	-
42	KCP. Menawi	Jalan Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen	98255	(0983) 31481,31482,31484	(0983) 31793
43	KCP. Ansus Yapen Barat	Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen	-	-	-
44	KCP. Skanto	Distrik Skanto Kabupaten Keerom	-	-	-

Kantor Cabang Pembantu / *Sub Branch office*					
45	KCP. Prafi	Jl. Poros Sp3 Aimasi Distrik Prafi-Manokwari	98356	(0986) 811180	-
46	KCP. Bumi Marina Asri	Jl. Angkasa Mulyono Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari		-	-
47	KCP. Babo	Jl. Angkasa Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni	98364	(Telp. Vsat) 31302	(0955) 31123
48	KCP. Tofoi	Jalan Raya Tofoi Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni	98363	-	-
49	KCP. Klasaman	Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Kompleks Ruko Central	98417	(0951) 322456	-
50	KCP. Sausapor	Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw	98473	-	-
51	KCP. Pasar Remu	Jl Jenderal Sudirman Remu Selatan Kota Sorong (Depan Universitas Terbuka)	99451	(0951) 326380,326381	(0951) 326384
52	KCP. Boswezen	Jl. R.a. Kartini No. 25 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong	-	-	-
53	KCP. Jalan Baru	Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong	-	-	-
54	KCP. Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong			
55	KCP. Sp III Aimas	Jl. Poros Tengah Katapop SP III, Kelurahan Maksubun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong			
56	KCP. Kumurkek	Distrik Aifat Kabupaten Maybrat	-	-	-
57	KCP. Ayamaru	Jl. Ayamaru Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat	98461	(0951) 323020	(0952) 31176
58	KCP. Moswaren	Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan	98454	-	-
59	KCP. Kantor Bupati Sesna	Kompleks Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	98454	-	-
60	KCP. Inanwatan	Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan	98455	-	-
61	KCP. Danaweria	Distrik Fak-Fak Tengah Kabupaten Fak-Fak		-	-
62	KCP. Toraja	Jl. P. Diponegoro Kel. Penian Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara	-	(0423) 25339	-
63	KCP. Bonggo	Sp I (Satu) Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi	-	-	-
64	KCP. Atsy	Jln. Frans Kaisepo Distrik Atsy Kabupaten Asmat	99776	(0971) 321038, 321112	(0971) 532144
65	KCP. Ransiki	Jl. Kartini, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan	98355	(0980) 31078	(0986) 212293
66	KCP. Pasar Jibama	Jl. J . B Wenas No. 1 - 3 Wamena (Depan Pasar Jibama) Kabupaten Jayawijaya			
Kantor Kas / *Cash office*					
1	Kantor Kas Rsud	Jl. Kesehatan Dok II Jayapura Kota Jayapura	99111	(0967) 536418	(0967) 533207
2	Kantor Kas Vim	Jl. Raya Sentani Abepura Kantor Dinas Otonom Vim Kotaraja	99225	(0967) 532011, 532351	(0967) 533208
3	Kantor Kas Dok Ii Kantor Gubernur	Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura Komp. Kantor Gubernur	99111	(0967) 524768	(0967) 533209
4	Kantor Kas Rsud Abepura	Jl. Kesehatan No.1 Kelurahan Yobe Distrik Abepura - Kota Jayapura	-	-	-
5	Kantor Kas Kantor Walikota Jayapura	Kompleks Kantor Walikota Jalan Balai Kota Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura		-	-

Kantor Kas / *Cash office*					
6	Kantor Kas Pemda Merauke	Jl. Re. Martadinata Kabupaten Merauke	99611	(0971) 325473	(0971) 532135
7	Kantor Kas Wanam	Komp. PT. Djarma Aru Wanam, Kec. Kaimaam Kabupaten Merauke	99655	(Telp. Satelit) 086812118119	(0971) 532137
8	Kantor Kas Kimaam	Jl. Gotong Royong Kimaam Kabupaten Merauke	99655	(Telp.satelit) 086812127142	(0971) 532139
9	Kantor Kas Okaba	Jl. Bandara Okaba, Distrik Okaba Kabupaten Merauke	99654	(0971) 321038, 321112	(0971) 532142
10	Kantor Kas Senggo	Tawanim Senggo Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi	99875	(Telp.satelit) 086812122512	(0971) 532141
11	Kantor Kas Moor	Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi			
12	Kantor Kas Rsud Mappi	Jl Poros Keppi - Agham Km 6			
13	Kantor Kas Mindiptana	Jl. Trikora, Distrik Mindiptana Kabupaten Bouven Digul	99662	(0971) 321038, 321112	(0971) 532140
14	Kantor Kas Asiki	Komp. PT. Korindo Asiki, Distrik Jair Kabupaten Bouven Digul	99661	(0971) 321038, 321112	(0971) 532146
15	Kantor Kas Pantai Kasuari	Jl. Konohari, Pantai Kasuari Distrik Kamur Kabupaten Asmat	99773	(Telp.satelit) 086812126481	(0971) 532143
16	Kantor Kas Sawa Erma	Jl. Wamap, Distrik Sawa Erma Kabupaten Asmat	99778	(0971) 321038, 321112	(0971) 532145
17	Kantor Kas Oyehe	Jl. Yos Sudarso No. 60 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire	98816	-	-
18	Kantor Kas Kalibobo	Jl. Ch. Martatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire	98818	-	-
19	Kantor Kas Lagari	Jl. Marillephi Kelurahan Legari Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire	98861	-	-
20	Kantor Kas Demta	Distrik Demta Kabupaten Jayapura	99354	(0984) 21511, 21691, 24044	(0967) 591018
21	Kantor Kas Lereh	Kompleks Perkebunan Sinar Mas Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	99364	-	-
22	Kantor Kas Kantor Bupati Jayapura	Kompleks Kantor Bupati Jayapura, Jalan Gunung Merah Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	-	-	-
23	Kantor Kas Kuala Kencana	Jalan Raya Mandala Selatan Ob.3 Kuala Kencana, Gedung Shopping Center Kuala Kencana Kabupaten Mimika	99964	(Telp. Vsat)	(0901) 321015
24	Kantor Kas Kokonao	Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika	99973	(Telp. Vsat) 36202	(0901) 321017
25	Kantor Kas Mapuru Jaya	Jl. Poros Mapuru Jaya Distrik Mapuru Jaya Kabupaten Mimika	99963	-	-
26	Kantor Kas Utikini Baru	Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika	99968	(0901) 521051, 322958	(0901) 321018
27	Kantor Kas Sp V Timika	Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-	-
28	Kantor Kas Pemda Mimika	Jl. Sp 3 (Pusat Pemerintahan Pemda Mimika), Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika		-	-
29	Kantor Kas Beoga	Jl. Bandara Beoga			
30	Kantor Kas Bupati Yapen	Jl. Hasanudin Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen	98212	-	-
31	Kantor Kas Dum (Doom)	Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong	98413	(Telp. Vsat) 22502	(0951) 326385
32	Kantor Kas Rsud Sorong	Kompleks Rsud Jl. Yos Sudarso Kota Sorong	98412	-	-
33	Kantor Kas Malanu	Jl. F. Kalasuat Rt 02/Rw Vi Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong	98416	-	-
34	Kantor Kas Rsud Sele Be Solu	Jl. Basuki Rachmad Km.12 Distrik Sorong Timur Kota Sorong	98417	-	-

Kantor Kas / *Cash office*					
35	Kantor Kas Kalobo	Distrik Kalobo Kabupaten Raja Ampat	98484	(0951) 326380,326381	(0951) 326386
36	Kantor Kas Kabare	Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat	98481	-	-
37	Kantor Kas Waigama	Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat	98483	-	-
38	Kantor Kas Dabatan	Kampung Dabatan Distrik Misool Selatan Kab Raja Ampat	98483	-	-
39	Kantor Kas Samate	Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat	98484	-	-
40	Kantor Kas Pasar Sanggeng	Jl. Yos Sudarso, Komp Pasar Sanggeng	98312	(0986) 211446	(0986) 212291
41	Kantor Kas Oransbari	Jl. Merdeka, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari	98353	(0986) 211807, 211808	(0986) 212292
42	Kantor Kas Masni	Jl. Raya SP VII, Distrik Masni Kabupaten Manokwari	98357	(0986) 211807, 211808	(0986) 212294
43	Kantor Kas Unipa Amban	Kompleks Kampus Unipa Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari	98314	-	-
44	Kantor Kas Rsud Manokwari	Jl. Bhayangkara No. 01 Manokwari	-	-	-
45	Kantor Kas Kokas	Jl. Pelda La Poe, Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fakjl. Abu Talib Heremba Kampung Masina Distrik Kokas Kab. Fakfak	98652	(0956) 23118,22491,22391	(0956) 22291
46	Kantor Kas Bomberai	Distrik Bomberai Kabupaten Fak - Fak	98662	-	-
47	Kantor Kas Dulan Pok Pok	Pasar Sentral Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak	98614	-	-
48	Kantor Kas Rsud Fakfak	Kompleks Rsud Fakfak Jalan Jenderal Sudirman Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak	98613	-	-
49	Kantor Kas Teluk Pattipi	Distrik Teluk Pattipi Kabupaten Fakfak		-	-
50	Kantor Kas Karas	Distrik Karas Kabupaten Fakfak		-	-
51	Kantor Kas Teluk Arguni	Jl. Jaman San Bofuwer, Distrik Teluk Arguni Kab. Kaimana	98653	(0957) 21641, 21642, 21643	(0957) 21644
52	Kantor Kas Pasar Baru Krooy	Pasar Baru Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana	98654	(0957) 21641, 21642, 21643	(0957) 21645
53	Kantor Kas Avona	Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana	98655	(0957) 21641, 21642, 21643	(0957) 21646
54	Kantor Kas Namatota	Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana	98654	-	-
55	Kantor Kas Kajase	Kompleks Pasar Sentral Kajase, Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
56	Kantor Kas Rsud Schoolo Keyen	Jl. Teminabuan Kampung Keyen - Ayamaru Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
57	Kantor Kas Pasar Sentral Bintuni	Pasar Sentral Bintuni Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni	98364	-	-
58	Kantor Kas Kantor Bupati Bintuni	Kompleks Kantor Bupati Bintuni, Kampung Bumi Saniari Sp Iii Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni	-	-	-
59	Kantor Kas Sp Ii	Daerah SP II Kelurahan Mariyai Distrik Mariat Kabupaten Sorong			
60	Kantor Kas Katapop	Daerah Katapop Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong			
61	Kantor Kas Stkip	Jl. Kh.a. Dahlan No.01 Mariyat Pantai Aimas Kabupaten Sorong			
62	Kantor Kas Rsud Madi	Jl. Poros Madi			
63	Kantor Kas Pasar Wouma	Jl. Achmad Yani, Kompleks Pasar Wouma			

Kantor Kas / *Cash office*		
64	Kantor Kas Pasar Potikelek	Jl. Sd Percobaan, Kompleks Pasar Potikelek
65	Kantor Kas Sinakma	Jl. Yos Sudarso
66	Kantor Kas Kimbim	Jl. Raya Wamena Kimbim
67	Kantor Kas Rsud Kaimana	Jl. Batu Putih Km 0, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana
68	Kantor Kas Arso I	Jl. Kusuma Wijaya Kelurahan Sanggaria Arso 1, Distrik Arso, Kabupaten Keerom
69	Kantor Kas Swakarsa	Jl. Bhayangkara, Kelurahan Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom
70	Kantor Kas Kantor Bupati Manokwari	Jl. Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari
71	Kantor Kas Anggi	Jl. Drs. Dominggus Mandacan, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak
72	Kantor Kas Windesi	Distrik Windesi, Kabupaten Teluk Wondama
73	Kantor Kas Ilu	Jl. Kaleb Kayame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya
74	Kantor Kas Korem	Jl. Korem, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor
75	Kantor Kas Sarmi Kota	Jl. Diponegoro, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi
76	Kantor Kas Kppt Kota Sorong	Jl. Pramuka Kantor Pelayanan Perijinan Terpapu (Kppt) Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong
77	Kantor Kas Thumburuni	Jl. Thunburuni, Komp. Plasa Thunburuni, Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak
78	Kantor Kas Wamanggu	Ruko Kompleks Pasar Wamanngu Blok B2, Jl. Papulus Nafi Kabupaten Merauke
79	Kantor Kas Jagebob	Jl. Poros Kampung Gurinda Jaya Distrik Jagebob Kabupaten Merauke
80	Kantor Kas Senggi	SP I Senggi Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom
81	Kantor Kas Dabra	Kampung Dabra Kabupaten Mamberamo Raya
82	Kantor Kas Tomu	Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni
83	Kantor Kas Kantor Bupati Jayawijaya	Jl. Yos Sudarso Kompleks Kantor Bupati Kabupaten
84	Kantor Kas Trimuris	Kampung Trimuris Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya
85	Kantor Kas Werba	Distrik Werba Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
86	Kantor Kas Perum 100	Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
87	Kantor Kas Dorekhar	Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
88	Kantor Kas Depapre	Jalan Raya Depapre - Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
89	Kantor Kas Dispenda Biak	Jalan Jenderal Achmad Yani Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Kantor Kas / *Cash office*					
90	Kantor Kas Yomdori	Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua			
91	Kantor Kas Haju	Jalan Mani Distrik Haju Kabupaten Mappi Provinsi Papua			
92	Kantor Kas Warwanai	Kampung Warwanai Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat			
93	Kantor Kas Arguni	Kampung Taver Distrik Arguni Kabupaten Fakfak			
94	Kantor Kas Aitinyo	Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat			
95	Kantor Kas Kampung Harapan	Jalan Raya Sentani Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura			
96	Kantor Kas Suator	Distrik Suator Kabupaten Agats			
97	Kantor Kas Sota	Distrik Sota Kabupaten Merauke			
98	Kantor Kas Kantor Gubernur Papua Barat	Jl. Arfai Distrik Manokwari Selatan			
99	Kantor Kas Kiwirok	Jl. Polopakyol Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang			
100	Kantor Borme	Jl. Borfelum Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang			
101	Kantor Kas Bomakia	Kompleks Bomakia Ii Distrik Bomakia Kabupaten Bouven Digoel			
102	Kantor Kas Perum Pemda	Jl. Trans Papua Mindiptana Kilometer 03 Tanah Merah Kabupaten Bouven Digoel			
103	Kantor Kas Okbibab	Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang			
104	Kantor Kas Wapoga	Jl. Trans Wapoga Kampung Pirare Distrik Wapoga			
105	Kantor Kas Masirei	Jl. Pendidikan Kampung Obutai Distrik Masirei			
106	Kantor Kas Sinak	Distrik Sinak			
107	Kantor Kas Kebar	Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw			
108	Kantor Kas Kanggime	Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara			
109	Kantor Kas Bokondini	Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara			
110	Kantor Kas Fayid	Distrik Fayid Kabupaten Asmat			
111	Kantor Kas Superblock	Superblock Mile 72 Tembagapura			
112	Kantor Kas Bupati Wasior	Isei, Rasiey, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. 98362			
113	Kantor Kas Esau Sesa/Sowi	Jl. Esau Sesa Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari			
114	Kantor Kas Burmeso	Kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, Kab. Mamberamo Raya			
115	Kantor Kas Wami	Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nabire Baru, Distrik Yaur, KM 54, Kab. Nabire			
Kantor Kas Keliling / *Mobile Cash Office*					
1	Mobil Kas Keliling Manokwari	KC. Utama Manokwari	-	-	-
2	Mobil Kas Keliling Jayapura	KC. Utama Jayapura	-	-	-

Informasi Website Bank Papua

Bank Papua's Website Information

Bank Papua memiliki *website* resmi dengan alamat **www.bankpapua.co.id** yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi *stakeholders*, disamping sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Selain informasi yang bersifat umum, *website* Bank Papua juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Halaman Utama berisikan informasi: Website Perusahaan, Investor, Hubungi Kami, SBDK, Info Kurs, Produk-Produk Bank Papua
2. Website Perusahaan berisikan informasi:
   a. Beranda berisikan informasi mengenai: Bunga Kredit, Jasa Giro, Bunga Tabungan, Bunga Deposito, SBDK, BI Rate, Info Kurs, Produk-Produk Bank Papua
   b. Produk & Layanan berisikan informasi mengenai semua produk dan layanan Bank Papua baik untuk Perorangan maupun Badan Usaha serta Layanan dan Jasa Perbankan Lainnya.
   c. Jaringan berisikan infromasi: Menampilkan seluruh jaringan kantor Bank Papua.
   d. Tentang Kami berisikan informasi: Profil Perusahaan, Informasi Perusahaan, Manajemen, CSR.
   e. Berita berisikan informasi tentang: Info & Berita, Pengumuman Lelang, Lowongan Pekerjaan, Pooling, Informasi Penjualan Agunan.
   f. Investor berisikan informasi: Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Tata Kelola Perusahaan, RUPS, Kode Etik, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi & Kerja Komite serta Audit Internal.
   g. LHKPN
   h. Hubungi Kami

Informasi tambahan terkait *website* Bank Papua dapat dilihat di bagian Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

*Bank Papua has an official website with the address **www.bankpapua.co.id** which is a facility and infrastructure to support the delivery of information to stakeholders, as well as a form of public information disclosure.*

In addition to general information, the Bank Papua website also provides more specific information, including related matters as follows:

1. *Main page contains information: Company Website, Investor, Contact Us, Prime Lending Rate, Exchange Rate Information, Bank Papua Products*
2. *The Company's website contains information:*
   a. *The home page contains information about: Loan Interest, Current Accounts, Savings Interest, Deposit Interest, Prime Lending Rate, BI Rate, Exchange Rate Information, Bank Papua Products*
   b. *Products & Services contain information about all Bank Papua products and services for individuals and business entities as well as other banking services and services.*
   c. *Network contains information: Shows the entire Bank Papua office network.*
   d. *About Us contains information: Company Profile, Company Information, Management, CSR.*
   e. *News contains information about: Info & News, Announcement of Auction, Job Vacancies, Pooling, Collateral Sales Information.*
   f. *The investor contains information: Financial Statements, Annual Reports, Corporate Governance, RUPS, Code of Conduct, Work Guidelines for the Board of Commissioners, Board of Director & Working Committees and Internal Audit.*
   g. *LHKPN*
   h. *Contact us*

Additional information related to the Bank Papua website can be seen in the Access section of Company Information and Data in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

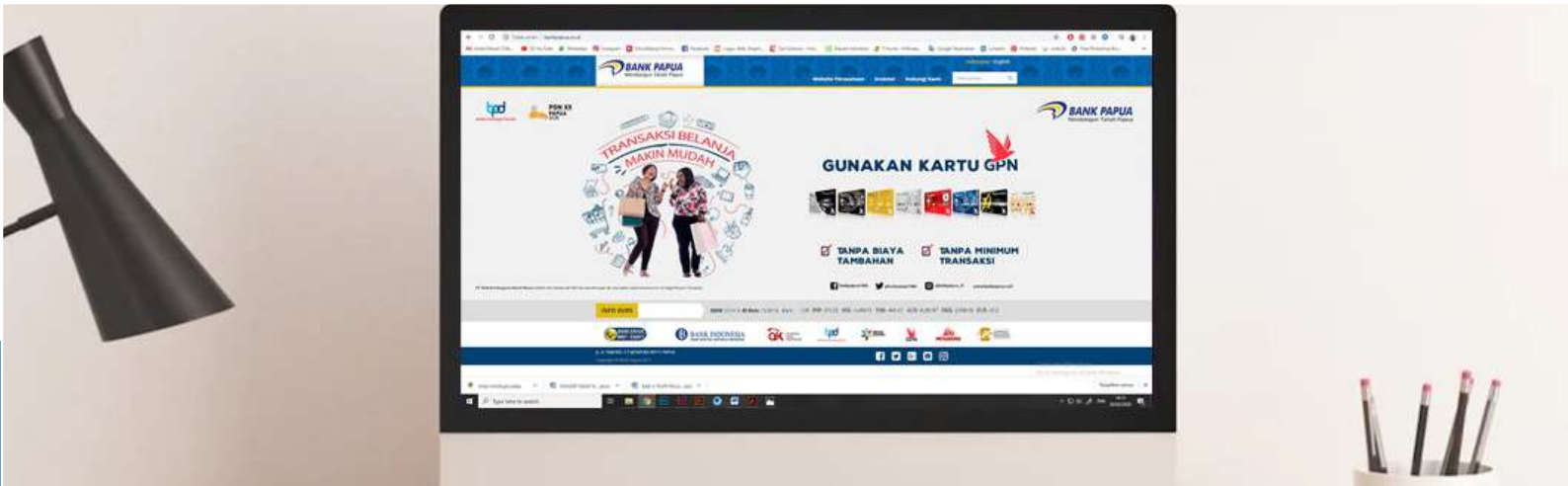

- 04 -

Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

Management Discussion and Analysis of Company Performance

Bank Papua berkomitmen untuk selalu berkontribusi bagi masyarakat Papua dengan memberdayakan kearifan lokal melalui promosi kegiatan pariwisata, budaya, pendidikan dan pengembangan sektor UMKM.

Bank Papua is committed to always contribute to the people of Papua by empowering local wisdom through the promotion of tourism, culture, education and development of the MSME sector.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan

Banking Economics and Industry Overview

Perekonomian Global

Perang dagang meluas, antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan sejumlah negara lain, kebijakan yang mencirikan anti-globalisasi, mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (*inward looking Policy*). Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) menemui jalan buntu, sementara sejumlah risiko geopolitik terjadi silih berganti. Pada saat yang sama, *digitali*sasi ekonomi dan keuangan semakin semarak, dengan segala manfaat dan risikonya. Merasuk ke berbagai segmen ekonomi, dan semakin dikuasai oleh sekelompok perusahaan besar dunia. Fenomena menurunnya globalisasi dan meningkatnya *digitali*sasi seperti ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kita perlu mempertimbangkannya dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, menuju negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Dampak perang dagang terbukti sungguh buruk terhadap perekonomian, tidak saja kepada negara-negara yang terlibat perang dagang, tetapi juga kepada seluruh negara di dunia. Revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara oleh IMF dan sejumlah lembaga internasional berkali-kali terjadi, berubah dari "*uneven global growth*" menjadi "*synchronized global slowdown*". Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3,6% pada tahun 2018 menjadi hanya 3,0% pada tahun 2019 dan 3,1% pada tahun 2020, apabila perang dagang AS dan Tiongkok tidak berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, serta di banyak negara maju dan berkembang juga melambat. Bahkan sejumlah negara telah atau berisiko mengalami resesi. Lebih lanjut, perlambatan ekonomi global tersebut menekan volume perdagangan dan harga komoditas dunia semakin rendah. Peringatan Bapak Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Oktober 2018, dengan merujuk dampak buruk dari perang dalam *Game of Thrones* menjadi kenyataan. Musim dingin telah tiba, dan kita harus siap menghadapinya

Global Economy

The widespread trade war, between the United States (US) and China and a number of other countries, policies that characterize anti-globalization, prioritize domestic economic interests (inward looking policy). The negotiations on the exit of the UK from the European Union (Brexit) were deadlocked, while a number of geopolitical risks occurred one after the other. At the same time, economic and financial digitalization is increasingly lively, with all the benefits and risks. Entering various economic segments, and increasingly controlled by a group of large companies in the world. The phenomenon of declining globalization and increasing digitalization like this is likely to continue in 2020 and the following years. Therefore, we need to consider this in strengthening national economic resilience and growth, towards high-income developed countries in 2045.

The impact of trade wars has proven to be very bad for the economy, not only for countries involved in trade wars, but also for all countries in the world. The downward revision of the projected world economic growth and various countries by the IMF and a number of international institutions has repeatedly occurred, changing from "uneven global growth" to "synchronized global slowdown". Bank Indonesia estimates that world economic growth will decline from 3.6% in 2018 to only 3.0% in 2019 and 3.1% in 2020, if the US and China trade wars are not prolonged. The economic growth of the US, China, and in many developed and developing countries has also slowed. Even a number of countries have or are at risk of recession. Furthermore, the global economic slowdown has pressured trade volumes and lower world commodity prices. President Joko Widodo's warning at the IMF and World Bank Annual Meetings in Bali, October 2018, by referring to the adverse effects of the war in Game of Thrones became reality. Winter has arrived, and we must be prepared to face it

Tabel Ekonomi Global: Pertumbuhan Ekonomi, Volume Perdagangan, dan Harga Komoditas (%, yoy)
Table of Global Economy: Economic Growth, Trade Volume, and Commodity Prices (%, yoy)

	2018	2019	2020*
Pertumbuhan Ekonomi Dunia	**3,6**	**3,0**	**3,4**
Negara Maju	**2,2**	**1,7**	**1,7**
Amerika Serikat	2,9	2,3	2,0
Euro Area	1,8	1,5	1,6
Jepang	0,8	0,9	0,5
Negara Berkembang	**4,5**	**4,5**	**4,8**
Tiongkok	6,6	6,1	5.8
India	7,4	6,1	7,0
Amerika Latin	1,0	0,2	1,9
Volume Perdagangan Dunia	**3,4**	**-0,3**	**0,2**
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	**-2,8**	**-4,1**	**-0,9**

Sumber : World Economic *Outlook* Database 2019, Proyeksi Bank Indonesia
keterangan : *Proyeksi

Bank Sentral AS, *the Fed*, yang pada tahun 2018 menaikkan suku bunga dalam normalisasi kebijakan moneternya, kemudian berbalik arah dengan menurunkan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar 75 bps sejak Juli 2019 untuk pelonggaran kebijakan moneternya. Dengan suku bunga yang sudah nol dan bahkan negatif, pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa, ECB, berlanjut dengan injeksi likuiditas melalui ekspansi neracanya.

The US Central Bank, the Fed, which in 2018 raised interest rates in the normalization of monetary policy, then reversed direction by reducing the Fed Funds Rate (FFR) interest rate 3 (three) times by 75 bps since July 2019 to ease monetary policy. With interest rates that are already zero and even negative, easing monetary policy by the European Central Bank, ECB, continues with liquidity injection through the expansion of its balance sheet .

Grafik Penurunan Suku Bunga Bank Sentral

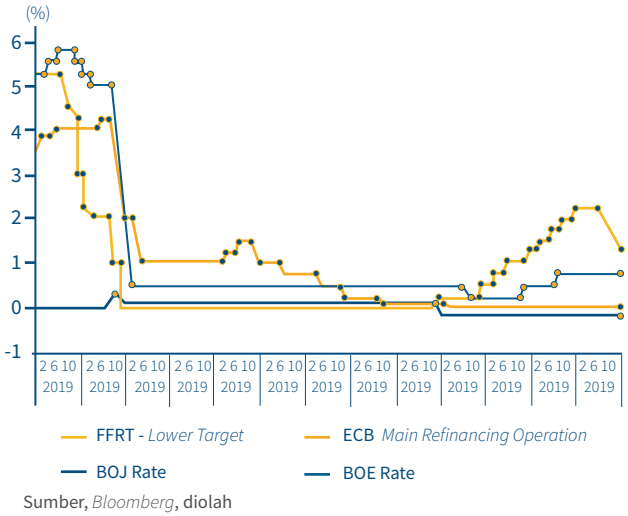

Sumber, *Bloomberg*, diolah

Grafik Injeksi Likuiditas Bank Sentral

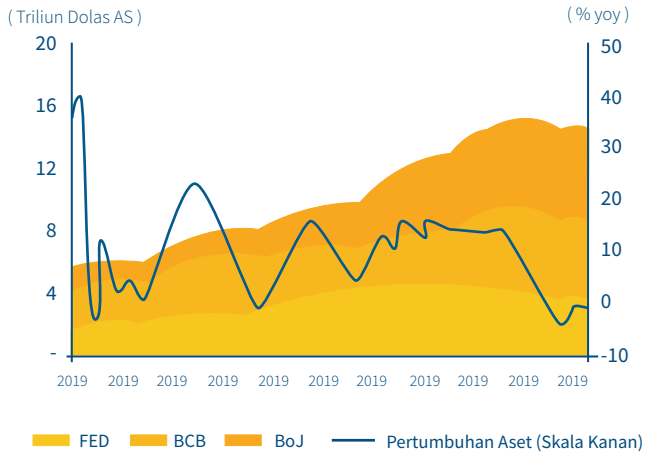

Sumber, *Bloomberg*, diolah

Injeksi likuiditas dan rendahnya suku bunga di negara-negara maju mendorong investor global mencari imbal hasil yang lebih menarik di negara-negara *Emerging Markets*, termasuk Indonesia, dalam bentuk investasi portofolio ke saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Volatilitas aliran investasi portofolio seperti ini relatif tinggi, didorong oleh dinamika perkembangan ekonomi, arah kebijakan moneter, dan ketidakpastian di pasar keuangan global. Tingginya *volatilitas* aliran modal asing berdampak pula pada tingginya *volatilitas* nilai tukar di negara *Emerging Markets*, termasuk nilai tukar Rupiah. Terlebih lagi, dengan ekonomi yang masih lebih baik dari negara-negara lain dan perubahan arah kebijakan moneter bank sentral AS, mata uang dolar AS masih yang terkuat dan karenanya sering berdampak pada nilai tukar negara lain. Volatilitas nilai tukar, termasuk Rupiah, tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga tetapi juga premi risiko investasi. Menariknya imbal hasil suku bunga jelas perlu terus dijaga, tetapi yang juga penting adalah memperkuat sentimen positif akan kredibilitas kebijakan dan prospek ekonomi Indonesia. Karenanya, berbagai kebijakan reformasi ekonomi perlu terus ditempuh termasuk kemudahan investasi dan promosi untuk menarik modal asing ke Indonesia, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

Injection of liquidity and low interest rates in developed countries has prompted global investors to look for more attractive returns in Emerging Markets, including Indonesia, in the form of portfolio investments in stocks, bonds and other securities. The volatility of portfolio investment flows is relatively high, driven by the dynamics of economic development, the direction of monetary policy, and uncertainty on global financial markets. The high volatility of foreign capital flows also has an impact on the high exchange rate volatility in Emerging Markets, including the Rupiah exchange rate. Moreover, with an economy that is still better than other countries and changes in the direction of US central bank monetary policy, the US dollar is still the strongest and therefore often has an impact on the exchange rates of other countries. Exchange rate volatility, including Rupiah, is not only influenced by differences in interest rates but also investment risk premiums. Interestingly, interest-rate yields clearly need to be maintained, but what is also important is strengthening positive sentiment about the credibility of Indonesia's policies and economic prospects. Therefore, various economic reform policies need to be pursued including ease of investment and promotion to attract foreign capital to Indonesia, especially Foreign Investment (PMA).

Grafik Perbedaan Suku Bunga dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah

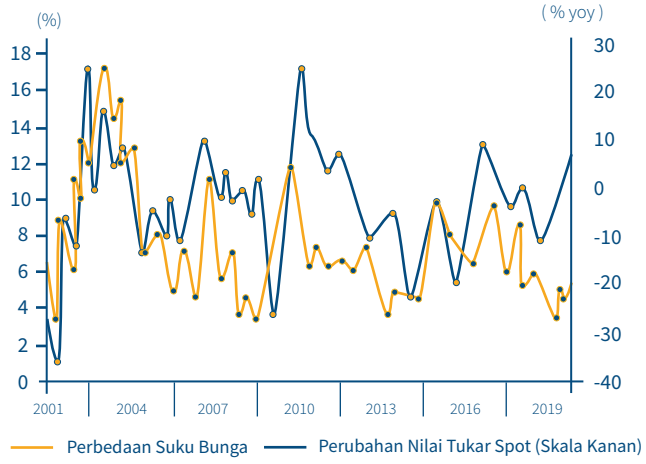

Sumber: CEIC, diolah

Cepatnya perkembangan teknologi *digital* sungguh luar biasa, dari *internet of things* hingga *artificial intelligent* (AI), *block chains*, *distributed ledger technology* (DLT), dan *robotic*. Teknologi *digital* telah merombak secara mendasar proses produksi dalam era industri 4.0, perdagangan ritel melalui *e-commerce*, hingga di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai segmen

The rapid development of digital technology is truly extraordinary, from the internet of things to artificial intelligent (AI), block chains, distributed ledger technology (DLT), and robotic. Digital *technology has fundamentally overhauled the production process in the industrial era 4.0, retail trade through e-commerce, to education, health, and various segments of life. In the financial*

kehidupan. Di dunia keuangan, inovasi teknologi *digital* telah memunculkan pesatnya perkembangan *Financial Technology* (*fintech*) dalam sistem pembayaran maupun berbagai jasa keuangan seperti crowd-*funding*, peer-to- peer lending, asuransi, dan *wealth management*. Bisnis jasa keuangan seperti ini yang biasanya dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya semakin dikembangkan dan diambil alih oleh *fintech*, memunculkan risiko *shadow banking*. Lebih dari itu, besarnya investasi dalam teknologi *digital* mendorong konsentrasi usaha dan memunculkan sejumlah perusahaan raksasa dunia, atau *big tech*.

world, digital technology innovation has led to the rapid development of Financial Technology (fintech) in payment systems and various financial services such as crowd-funding, peer-to-peer lending, insurance, and wealth management. Businesses such as financial services that are usually carried out by banks and other financial institutions are increasingly being developed and taken over by fintech, creating the risk of shadow banking. More than that, the amount of investment in digital technology is driving business concentration and giving rise to a number of giant global companies, or big tech.

Grafik Jenis Jasa Keuangan *Big Tech*

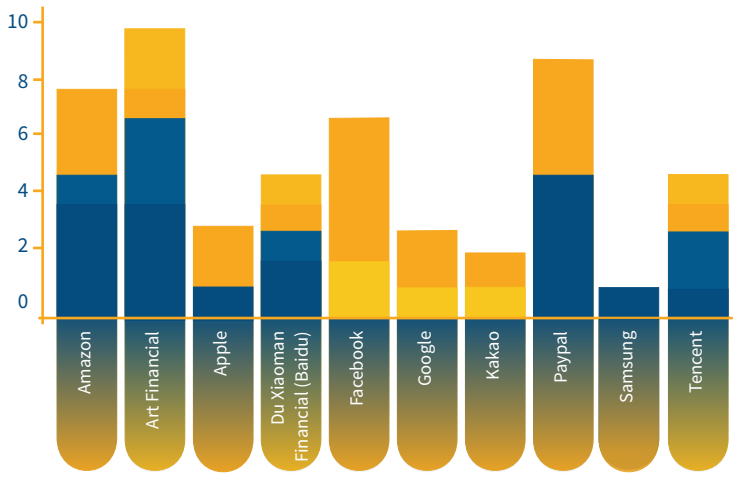

Teknologi *digital* juga merubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk milenial yang mencapai lebih dari 50% jumlah penduduk usia produktif Indonesia, sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik. Milenial jauh lebih cepat dalam adopsi teknologi *digital*, termasuk dalam penggunaan telepon seluler maupun media sosial. Sebagai konsumen, mereka menuntut produk dan pelayanannya yang murah, cepat, dan sesuai selera melalui transaksi ekonomi dan keuangan secara *online* daripada harus pergi ke toko, restoran, ataupun bank. Sebagai tenaga kerja, milenial umumnya cerdas, inovatif, gemar tampil diri, tetapi cenderung cepat bosan dan tidak suka didikte. Mereka potensial untuk berkembang dalam berbagai usaha *start-up* baik di bidang *e-commerce* maupun *fintech*. Perubahan perilaku dalam era *digital* seperti ini jelas menuntut perubahan model bisnis dan *upgrading skill* tenaga kerja.

Digital *technology also changes human behavior, both as consumers and workers. This is in line with the millennial population which reaches more than 50% of the population of Indonesia's productive age, according to data from the Ministry of Women's Empowerment and the Central Statistics Agency. Millennials are much faster in adopting digital technology, including in the use of cell phones and social media. As consumers, they demand products and services that are cheap, fast, and according to taste through online economic and financial transactions rather than having to go to stores, restaurants or banks. As a workforce, millennials are generally intelligent, innovative, like to appear, but tend to get bored quickly and don't like being dictated. They have the potential to develop in various start-up businesses both in the field of e-commerce and fintech. Changes in behavior in the digital age like this clearly require changes in business models and upgrading the skills of the workforce.*

Grafik Persentase Penduduk Indonesia Pengguna Telepon seluler (%)

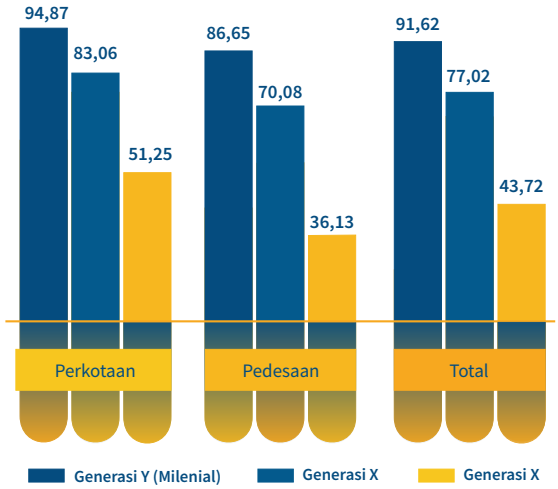

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017, BPS

Perekonomian Nasional

Kita patut bersyukur, di tengah ekonomi global yang memburuk, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia cukup baik. Stabilitas ekonomi nasional terjaga, momentum pertumbuhan berlanjut. Sementara sejumlah negara mengalami resesi atau bahkan krisis. Selama tiga triwulan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai masing-masing sebesar 5,07%, 5,05%, dan 5,02% secara tahunan. Tidak dipungkiri, meskipun telah ditempuh berbagai kebijakan stimulus, memburuknya perekonomian dunia membatasi kemampuan kita untuk dapat tumbuh lebih tinggi seperti yang diharapkan. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil didukung oleh inflasi yang rendah dan penyaluran bantuan sosial Pemerintah, serta semakin besarnya kelompok penduduk berpendapatan menengah ke atas. Demikian pula pertumbuhan investasi bangunan cukup baik didorong oleh pembangunan proyek strategis nasional. Sementara itu, investasi non bangunan belum kuat, meskipun hasil survei terkini menunjukkan akan kembali meningkat pada triwulan IV-2019 ditopang dengan kembali meningkatnya keyakinan pelaku usaha. Pertumbuhan ekspor masih belum kuat, di tengah permintaan global dan harga komoditas global yang menurun, meskipun berangsur membaik. Produk Domestik Bruto (PDB) sampai akhir tahun 2019 terlihat pada tabel berikut :

National Economy

We should be grateful, in the midst of a deteriorating global economy, Indonesia's economic performance and prospects are quite good. National economic stability is maintained, the momentum of growth continues. While a number of countries experienced a recession or even crisis. During the three quarters of 2019, economic growth reached 5.07%, 5.05% and 5.02% respectively. No doubt, despite various stimulus policies adopted, the worsening of the world economy limits our ability to grow higher as expected. Stable growth in household consumption is supported by low inflation and the distribution of Government social assistance, as well as an increasingly large middle-income population group. Likewise, the growth in building investment was quite well driven by the development of national strategic projects. Meanwhile, non-construction investment has not been strong, although the results of the latest survey show that it will increase again in quarter IV-2019 supported by the increasing confidence of business operators. Export growth is still not strong, amid global demand and declining global commodity prices, although gradually improving. Gross Domestic Product (GDP) until the end of 2019 can be seen in the following table:

Komponen PDB	2015	2016	2017	2018	2019[1)]					Komponen PDB
					I	II	III	IV	Total	
Permintaan Domestik [1)]	4,94	4,39	5,13	5,62	5,18	5,34	4,44	4,16	4,76	*Domestic Demand [1)]*
Konsumsi swasta	4,84	5,04	4,98	5,14	5,27	5,40	5,06	4,93	5,16	*Private Consumption*
Konsumsi RT	4,96	5,01	4,94	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	*Household Consumption*
Konsumsi LNPRT	-0,62	6,64	6,93	9,10	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	*LNPRT consumption*
Konsumsi Pemerintah	5,31	-0,14	2,12	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	*Government Consumption*
Investasi	3,00	4,99	5,69	8,49	3,82	1,70	2,95	0,98	2,35	*Investation*
PMTB	5,01	4,47	6,15	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	*PMTB*
Bangunan	6,11	5,18	6,24	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	*Building*
Non Bangunan	1,93	2,43	5,90	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,80	*Non Buildings*
Perubahan Inventori*	-0,59	0,23	-0,07	0,71	-0,29	-0,85	-0,37	-1,07	-0,65	*Inventory Changes **
Net Ekspor*	0,94	0,13	0,30	-0,94	1,21	1,01	1,77	1,69	1,43	*Net Export **
Ekspor	-2,12	-1,66	8,90	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	*Export*
Impor	-6,25	-2,41	8,07	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	*Import*
Produk Domestik Bruto	4,88	5,03	5,07	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	*Gross Domestic Product*

1) Pemintaan Domestik adalah pengeluaran konsumsi (Swasta+pemerintah) dan pembentukan modal tetap domestik bruto
* Konstibusi terhadap PDB
Sumber BPS, diolah

Secara spasial, daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global ditopang oleh perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah menopang konsumsi swasta domestik yang tetap kuat, termasuk melalui perdagangan produk minyak sawit terkait dengan implementasi program B20 dan kebijakan hillirisasi produk tambang. Perkembangan tersebut mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sumatera dari 4,55% (yoy) pada 2018 menjadi 4,57% (yoy) pada 2019. Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) juga meningkat, menjadi 5,07% (yoy), antara lain didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Hal yang sama terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan, yang juga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok.

Spatially, the resilience of domestic economic growth amid the global economic slowdown is supported by trade between regions. Inter-regional trade sustains domestic private consumption that remains strong, including through trade in palm oil products related to the implementation of the B20 program and the policy of hill productization. This development supports the increase in economic growth in Sumatra from 4.55% (yoy) in 2018 to 4.57% (yoy) in 2019. Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) economic growth has also increased, to 5.07% (yoy), partly supported by improved exports of copper and nickel ore commodities. The same thing was seen in Kalimantan's economic growth, which was also supported by improvements in exports of primary commodities, including coal exports to China.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat, terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun, serta kendala produksi tembaga di Sulampua. Secara keseluruhan, pada 2019 terdapat 14 dari 34 provinsi yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Meanwhile, economic growth in the regions of Java and Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) slowed, mainly influenced by declining exports, and constraints on copper production in Sulampua. Overall, in 2019 there were 14 out of 34 provinces that grew higher than the growth of the previous year.

Grafik 9. Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan III 2019 (%)

Sumber : BPS, diolah

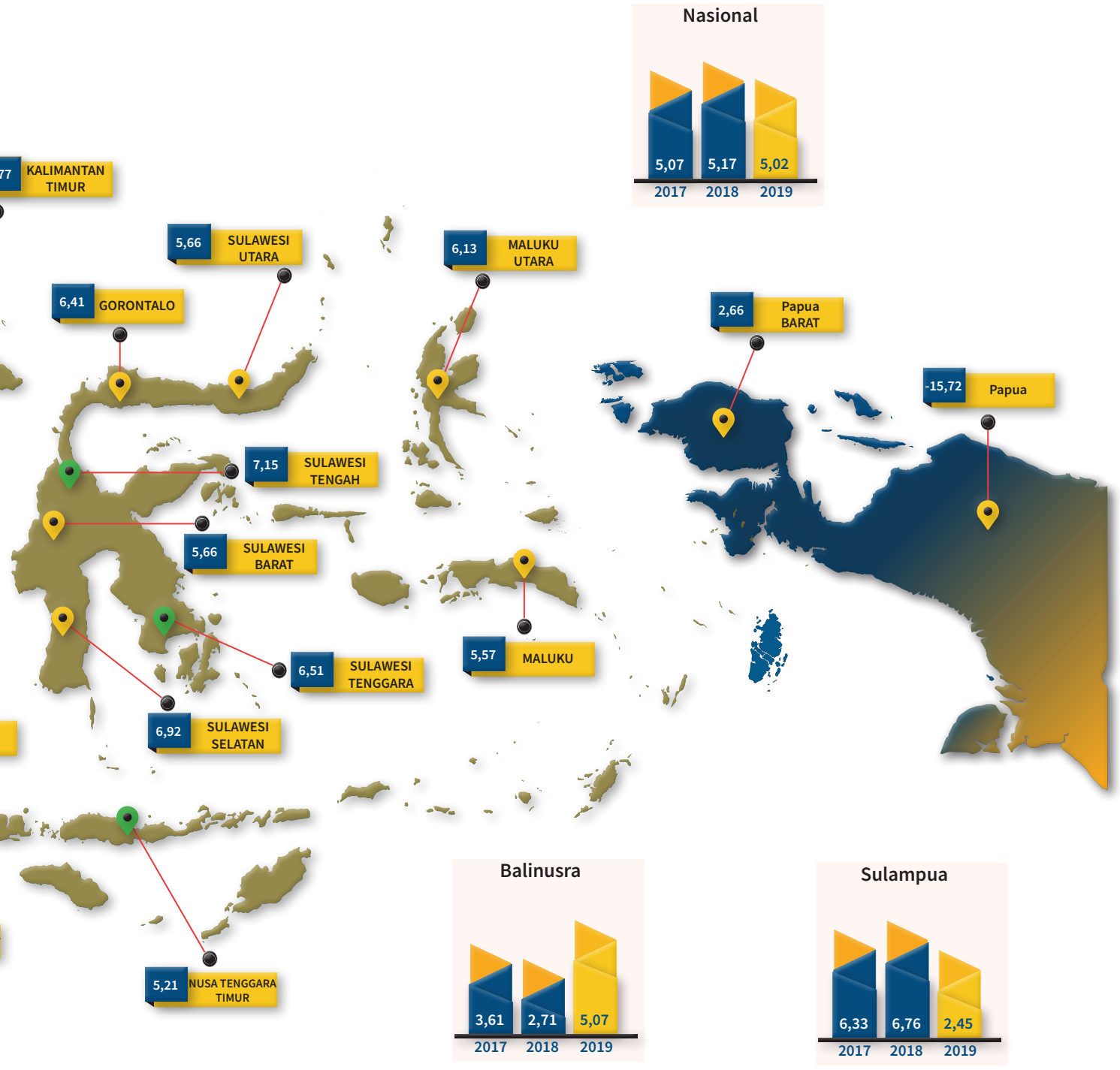

Lebih Tinggi dibandingkan 2018 | Lebih Rendah dibandingkan 2018 | Stabil dibandingkan 2018

Komponen PDB	2017					2018					2019				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III	IV	Total
Transaski Berjalan	-2,0	-4,4	-4,2	-5,6	-16,2	-4,9	-7,8	-8,4	-9,5	-30,6	-6,6	-8,2	-7,5	-8,1	-30,4
A. Barang	5,6	4,8	5,3	3,1	18,8	2,3	0,3	-0,4	-2,5	0,2	1,3	0,6	1,4	0,3	3,5
- Ekspor, fob	40,8	39,2	43,4	45,6	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	180,7	41,2	40,2	43,7	43,4	168,5
- Impor, fob	-35,1	-34,3	-38,1	-42,5	-150,1	-42,1	-43,4	-48,1	-47,4	-181,0	-39,9	-39,6	-42,3	-43,1	-164,,9
a. Nonmigas	7,6	6,1	6,3	5,2	25,3	4,4	3,2	3,4	0,1	11,2	2,9	3,1	2,7	3,2	12,0
b. Migas	-2,2	-1,5	-1,3	-2,4	-7,3	-2,4	-2,7	-3,5	-2,8	-11,4	-2,1	-2,9	-2,1	-3,2	-10,3
B. Jasa - jasa	-1,1	-2,0	-2,1	-2,1	-7,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-6,5	-1,6	-1,9	-2,3	-2,1	-7,8
C. Pendapatan Primer	-7,7	-8,1	-8,6	-7,8	-32,1	-7,4	-8,0	-8,0	-7,4	-30,8	-8,1	-8,9	-8,4	-8,3	-33,8
D. Pendapatan Sekunder	1,1	1,0	1,1	1,2	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	6,9	1,8	2,0	1,8	2,0	7,6
Transaski Modal dan finansial	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,2	3,1	4,0	15,9	25,2	9,9	6,6	7,5	12,4	36,4
1. Investasi Langsung	2,6	4,5	7,0	4,4	18,5	4,7	2,4	4,5	0,9	12,5	5,9	5,6	5,2	3,3	20,0
2. Investasi Portofolio	6,5	8,1	3,8	2,6	21,1	-1,1	0,1	-0,1	10,5	9,3	5,2	4,6	4,8	7,0	21,5
3. Investasi Lainnya	-2,5	-7,3	-1,2	0,2	-10,7	-1,5	0,6	-0,5	4,7	3,3	-1,3	-3,6	-2,7	2,1	-5,4
Neraca Keseluruhan	4,5	0,7	5,4	1,0	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1	2,4	-2,0	0,0	4,3	4,7
Memorandum	0,0														
- Cadangan Devisa	121,8	123,1	129,4	130,2	130,2	126,0	119,8	114,8	121	121	124,5	123,8	124,3	129,2	129,3
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	8,6	8,6	8,6	8,3	83	7,6	6,9	6,3	6,43	6,43	6,7	6,7	6,9	7,3	7,3
- Transaksi Berjalan	-0,8	-1,7	-1,6	-2,16	-1,6	-1,9	-2,9	-3,2	-3,7	-2,9	-2,5	-3,0	-2,6	-2,8	-2,7

Sumber : Bank Indonesia

Perekonomian domestik yang berdaya tahan ditopang oleh ketahanan eksternal sejalan dengan NPI 2019 yang mencatat surplus. NPI 2019 tercatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Cadangan devisa juga meningkat dari 120,7 miliar dolar AS menjadi 129,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,3 bulan impor dan Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Ketahanan eksternal yang membaik juga tercermin dari profil ULN yang aman dan terkendali, dengan rasio ULN terhadap PDB yang berada pada kisaran rata-rata negara peers. Komposisi ULN juga cukup sehat tercermin dari rasio ULN jangka panjang yang lebih dominan mencapai 84,4%. Surplus NPI bersumber dari surplus transaksi modal dan finansial (TMF) yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang menyempit.

NPI 2019 yang membaik mendukung nilai tukar Rupiah yang menguat dengan *volatilitas* yang menurun. Secara rerata nilai tukar Rupiah menguat 0,76% ke level Rp14,139 per dolar AS, dari Rp14.246 per dolar AS pada 2018. Secara *point-to-point* (ptp), Rupiah juga menguat 3,58% dan ditutup di level Rp13.883 per

The resilient domestic economy is supported by external resilience in line with the 2019 NPI which recorded a surplus. The 2019 balance of payments recorded a surplus of 4.68 billion US dollars, reversing the direction of the 2018 condition which experienced a deficit of 7.13 billion US dollars. Foreign exchange reserves have also increased from US $ 120.7 billion to US $ 129.2 billion, equivalent to payments of 7.3 months of imports and government external debt, and are above the international adequacy standard of about three months of imports. Improved external resilience is also reflected in the profile of safe and controlled external debt, with the ratio of external debt to GDP in the average range of peer countries. The composition of external debt was also quite healthy as reflected in the dominant long-term external debt ratio of 84.4%. The BOP surplus was sourced from an increased capital and financial account (TMF) surplus and a narrowing current account deficit.

The improved NPI 2019 supports the strengthening Rupiah exchange rate with declining volatility. On average, the Rupiah exchange rate strengthened 0.76% to the level of Rp14,139 per US dollar, from Rp14,246 per US dollar in 2018. In point-to-point (ptp), the Rupiah also gained 3.58% and closed at Rp13 .883 per US dollar

dolar AS pada akhir 2019. Rupiah menguat bersama dengan peso dan baht di tengah pelemahan beberapa mata uang negara berkembang lainnya. Selain itu, *volatilitas* nilai tukar Rupiah juga menurun dari 8,5% pada 2018 menjadi 7,0% pada 2019, dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *volatilitas* kawasan terutama lira, real, dan rupee.

at the end of 2019. The Rupiah strengthened together with pesos and baht amid weakening in several other developing country currencies. In addition, the volatility of the Rupiah exchange rate also declined from 8.5% in 2018 to 7.0% in 2019, and was lower than the average volatility in the region, especially lira, real, and rupee.

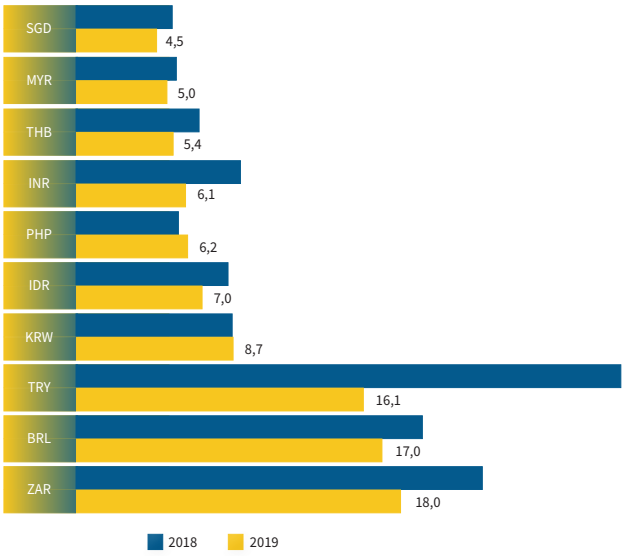

Sumber: Reuters,Blomberg, diolah

Grafik Nilai Tukar Rupiah : Konvergensi Spot, DNDF, dan DNF

(Rupiah per Dollar AS)

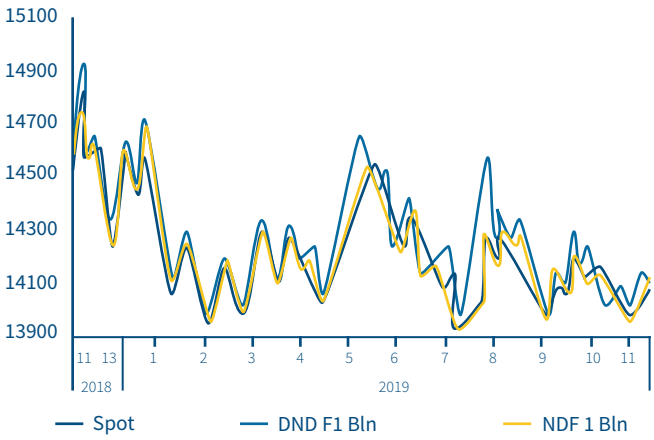

Sumber : Reusters

Stabilitas makroekonomi juga didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran 3,5 ± 1%, melanjutkan pencapaian 4 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Berdasarkan komponennya, inflasi inti dan *administered prices* (AP) tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,02% dan 0,51%. Sementara itu, inflasi *volatile food* (VF) tercatat 4,30%, lebih tinggi dari capaian 2018, akibat kendala impor dan gangguan cuaca. Secara spasial, inflasi IHK 2019 terjaga di seluruh provinsi dengan sebagian besar wilayah mencatat inflasi IHK di bawah batas bawah 2,5%. Daerah dengan inflasi IHK berada di batas atas terjadi di Sulawesi Utara (3,52%) dan Kalimantan Selatan (4,01%), yang terjadi akibat kenaikan inflasi angkutan udara dan VF, seperti tomat sayur, aneka cabai, dan ikan segar.

Macroeconomic stability is also supported by inflation that remains low and under control. Consumer Price Index (CPI) inflation in 2019 recorded 2.72%, down compared with 2018 achievements which reached 3.13%. This development brought CPI inflation back into the target range of 3.5 ± 1%, continuing the achievement of the last 4 years which was also consistently within its target range. By component, core inflation and administered prices (AP) were lower than the previous year at 3.02% and 0.51%. Meanwhile, volatile food (VF) inflation was recorded at 4.30%, higher than 2018 due to import constraints and weather disruptions. Spatially, 2019 CPI inflation is maintained in all provinces with most regions recording CPI inflation below the lower limit of 2.5%. Regions with CPI inflation at the upper limit occurred in North Sulawesi (3.52%) and South Kalimantan (4.01%), which occurred due to an increase in air transportation and VF inflation, such as vegetable tomatoes, various chillies, and fresh fish.

Grafik Inflasi Inti, *Volatile Food*, dan *Administered Prices*

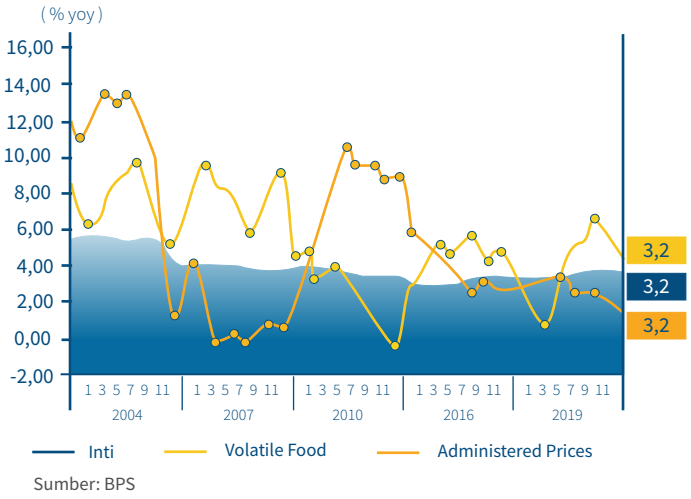

Sumber: BPS

Grafik Permodalan dan *Non Performing Loan* Perbankan

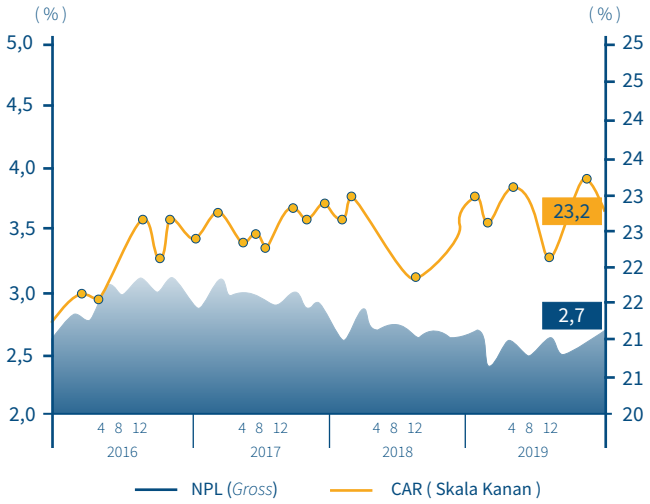

Sumber: OJK, diolah

Perbaikan perekonomian Indonesia akan meningkat lebih tinggi dalam jangka menengah. Transformasi ekonomi melalui rangkaian kebijakan reformasi struktural tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan namun juga memperbaiki kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dapat diraih melalui implementasi kebijakan reformasi struktural yang konsisten dan diarahkan pada: (i) pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan jaringan distribusi, (ii) kemudahan regulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi dan lapangan kerja, (iii) transformasi ekonomi dari sumber daya alam ke manufaktur yang berdaya saing, serta (iv) penguatan kualitas SDM baik kompetensi keahlian maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rangkaian kebijakan reformasi struktural tersebut akan mampu memobilisasi lebih banyak faktor-faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas ekonomi ke depan yang memungkinkan ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas yang tetap terjaga. Ekonomi Indonesia diprakirakan akan mampu tumbuh 5,2-5,6% (yoy) pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,5-6,1% (yoy) pada tahun 2024 dengan defisit transaksi berjalan menurun dari 2,5-3,0% dari PDB pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,3-2,8% dari PDB pada tahun 2024. Inflasi akan tetap terjaga rendah pada kisaran 2,0-4,0% (yoy) sampai dengan tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kami optimis bahwa cita-cita Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045 akan dapat terwujud.

The improvement of the Indonesian economy will increase even higher in the medium term. Economic transformation through a series of structural reform policies will not only increase economic growth going forward but also improve the quality of growth itself. Higher economic growth will be achieved through the implementation of consistent structural reform policies aimed at: (i) infrastructure development that connects economic zones such as industry, tourism and MSME with distribution networks, (ii) ease of regulation and simplification of bureaucracy to encourage investment and employment, (iii) economic transformation from natural resources to competitive manufacturing, and (iv) strengthening the quality of human resources in terms of competency expertise and mastery of science and technology. The series of structural reform policies will be able to mobilize more factors of production both capital and labor and increase economic efficiency and productivity going forward that enables the Indonesian economy to grow higher with stability that is maintained. The Indonesian economy is predicted to grow 5.2-5.6% (yoy) in 2021 and increase to 5.5-6.1% (yoy) in 2024 with the current account deficit declining from 2.5-3.0 % of GDP in 2021 to around 2.3-2.8% of GDP in 2024. Inflation will remain low at a range of 2.0-4.0% (yoy) until 2024. Under these conditions, we optimistic that the ideals of Indonesia to become a high-income developed country in 2045 will be realized.

Perekonomian Papua

Kinerja perekonomian Papua pada triwulan IV 2019 mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya walaupun masih terjadi kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan IV 2019 terkontraksi sebesar -3,73% (yoy) tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -15,05% (yoy). Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua terkontraksi cukup dalam sebesar -15,72% (yoy) menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 7,37% (yoy). Secara umum, penurunan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2019 disebabkan oleh penurunan produksi pertambangan akibat transisi tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Namun demikian, adanya persiapan pelaksanaan PON Papua tahun 2020 dapat menahan kontraksi ekonomi Papua lebih dalam lagi.

Stabilitas Keuangan Daerah di Papua ditopang oleh kinerja keuangan sektor korporasi dan rumah tangga pada triwulan IV 2019 secara umum terjaga dengan baik pada tingkat yang aman. Aspek likuiditas dan rentabilitas korporasi pada triwulan IV 2019 berada dalam kondisi yang positif. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan rumah tangga yang stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja sektor Korporasi di Papua pada triwulan IV 2019 tumbuh positif, baik dari sisi penghimpunan dana maupun kredit yang disalurkan, serta diiringi dengan peningkatan kualitas dari kredit. Secara sektoral, hampir seluruh sektor mengalami penurunan NPL. Selanjutnya, kinerja sektor Rumah Tangga pada triwulan IV 2019 juga tumbuh positif, tercermin dari kondisi dan risiko keuangan di sektor Rumah Tangga yang relatif terjaga, dengan penurunan NPL dari triwulan sebelumnya.

Secara umum perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua cenderung meningkat dan jumlah penduduk miskin di Papua berkurang dari 27,53% pada periode Maret 2019 menjadi 26,55% pada periode September 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan mencapai 6,07 pada periode September 2019 dibandingkan dengan periode Maret 2019 mencapai 7,17. Sementara itu, Nilai Tukar Petani Papua (NTP) Papua bulan Januari 2020 mengalami penurunan dengan indeks sebesar 101,55. Nilai tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kesejahteraan petani di Papua.

Papua's Economy

Papua's economic performance in the fourth quarter of 2019 improved compared to the previous quarter even though there was still a contraction. Papua's economic growth in the fourth quarter of 2019 contracted by -3.73% (yoy), not as deep as the contraction in the previous quarter of -15.05% (yoy). Meanwhile, overall in 2019, Papua's economic growth contracted moderately by -15.72% (yoy) down compared to 2018 which grew by 7.37% (yoy). In general, the decline in Papua's economic performance in 2019 is due to a decline in mining production due to the transition from open pit mines to underground mines. However, preparations for the implementation of the Papua PON in 2020 can hold Papua's economic contraction deeper.

Regional Financial Stability in Papua is supported by the financial performance of the corporate and household sectors in the fourth quarter of 2019 in general maintained at a safe level. The corporate liquidity and profitability aspects in the fourth quarter of 2019 were in a positive condition. Likewise, stable household financial management compared to the previous quarter.

The performance of the corporate sector in Papua in the fourth quarter of 2019 grew positively, both in terms of the collection of funds and loans, and accompanied by an increase in the quality of credit. By sector, almost all sectors experienced a decline in NPL. Furthermore, the performance of the Household sector in the fourth quarter of 2019 also grew positively, reflected in conditions and financial risks in the Household sector that were relatively well maintained, with a decline in NPL from the previous quarter.

In general, the development of the welfare conditions of the Papuan people tends to increase and the number of poor people in Papua has decreased from 27.53% in the March 2019 period to 26.55% in the September 2019 period. The Poverty Depth Index (P1) has decreased to 6.07 in the September period 2019 compared with the March period 2019 reached 7.17. Meanwhile, Papua Farmers Exchange Rates (NTP) in January 2020 decreased with an index of 101.55. This value indicates a decline in the welfare of farmers in Papua.

Secara agregat, perekonomian Papua pada tahun 2020 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Papua diproyeksikan tumbuh sebesar dikisaran 7,3% - 7,7% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar (-14,3)% - (-13,9)% (yoy). Secara umum peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2020 didorong oleh 2 faktor utama. Pertama, perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang bawah tanah sudah mulai meningkat. Namun demikian, berakhirnya tambang terbuka diperkirakan menahan pertumbuhan sektor pertambangan. Kedua, momen pelaksanaan PON XX di Papua diperkirakan dapat mendorong ekonomi khususnya lapangan usaha non tambang seperti konstruksi, akomodasi dan penyediaan makan minum, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pengundangan serta administrasi pemerintahan.

In aggregate, the Papua economy in 2020 is projected to grow higher than the growth in 2019. In 2020, Papua's economic growth is projected to grow by around 7.3% - 7.7% (yoy) higher than the 2019 growth forecast for (- 14.3)% - (-13.9)% (yoy). In general, the improvement of Papua's economic performance in 2020 is driven by 2 main factors. First, the biggest improvement in mining performance in Papua where underground mining production has begun to increase. However, the end of the open pit is expected to restrain the growth of the mining sector. Second, the moment of the implementation of PON XX in Papua is estimated to be able to boost the economy, especially non-mining business fields such as construction, accommodation and provision of food and beverages, trade, transportation, communication and legislation and government administration.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. Secara agregat, pada tahun 2020 komunikasi RT diperkirakan tumbuh sebesar 5,7% - 6,1% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 3,9% - 4,3% (yoy). Peningkatan konsumsi RT pada tahun 2020 secara umum didorong oleh peningkatan UMP 2020 sebesar 8,51% menjadi Rp3.516.700.

On the demand side, household consumption remains the main source of economic growth for Papua. In aggregate, in 2020 household communication is estimated to grow by 5.7% - 6.1% (yoy) higher than the 2019 growth forecast of 3.9% - 4.3% (yoy). The increase in household consumption in 2020 was generally driven by an increase in the 2020 provincial minimum wage by 8.51% to Rp3,516,700.

Kemudian Konsumsi Pemerintah Pada tahun 2020 diperkirakan naik sebesar 6,6% - 7,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2019 sebesar 6,2% - 6,6% (yoy). Secara umum, peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan peningkatan anggaran tahun 2020 terutama untuk penyelenggaran PON XX Papua serta penyelesaian jalan trans Papua.

Then Government Consumption in 2020 is estimated to increase by 6.6% - 7.0% (yoy), higher than the 2019 forecast of 6.2% - 6.6% (yoy). In general, the increase in government consumption is in line with the increase in the 2020 budget, especially for the holding of PON XX Papua and the completion of the trans Papua road.

Perekonomian Papua pada triwulan I 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan di dorong oleh mulai meningkatnya kinerja pertambangan bawah tanah serta *base effect* rendahnya kinerja pertambangan pada triwulan I 2019. Pertumbuhan ekonomi Papua pada periode tersebut diproyeksikan berada pada kisaran 6,3% - 6,7% (yoy), lebih baik dibanding perkiraan pertumbuhan triwulan IV 2019 yang berkisar 3,1% - 3,5% (yoy). Sementara itu, secara agregat perekonomian Papua pada tahun 2020 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Papua diproyeksikan tumbuh sebesar dikisaran 7,3% - 7,7% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar (-14,3)% - (-13,9)% (yoy).

Papua's economy in the first quarter of 2020 is expected to experience an increase in growth driven by the start of an increase in underground mining performance and the low base effect of mining performance in the first quarter of 2019. Papua's economic growth in the period is projected to be between 6.3% - 6.7% (yoy), better than the estimated growth in quarter IV 2019 which ranges from 3.1% - 3.5% (yoy). Meanwhile, in the aggregate Papua's economy in 2020 is projected to grow higher than growth in 2019. In 2020, Papua's economic growth is projected to grow by around 7.3% - 7.7% (yoy) higher than the 2019 growth forecast for (-14.3)% - (-13.9)% (yoy).

Dari sisi inflasi, tingkat inflasi Papua pada triwulan I 2020 diperkirakan mencapai 2,2% - 2,6% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2019 sebesar 1,4% - 1,8% (yoy). Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2020 inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Inflasi tahun 2020 diperkirakan berkisar antara 4,3% - 4,7% (yoy) lebih tinggi dibandingkan perkiraan inflasi tahun 2019 sebesar 1,4% - 1,8% (yoy) inflasi pada tahun 2020 terutama dipicu oleh adanya peningkatan UMP sebesar 8,51%, penghapusan subsidi listrik golongan 900VA serta peningkatan cukai rokok yang rata-rata naik 21,55%.

In terms of inflation, Papua's inflation rate in the first quarter of 2020 is estimated to reach 2.2% - 2.6% (yoy), higher than the 2019 forecast of 1.4% - 1.8% (yoy). Meanwhile, overall inflation in 2020 is estimated to be higher than in 2019. Inflation in 2020 is estimated to range between 4.3% - 4.7% (yoy) higher than 2019 inflation forecast of 1.4% - 1.8% (yoy) inflation in 2020 was mainly triggered by an increase in the UMP by 8.51%, the elimination of 900VA electricity subsidies and an increase in cigarette excise which on average rose by 21.55%.

Perekonomian Papua Barat

West Papua's economy

Perekonomian Papua Barat pada triwulan IV 2019 tumbuh terakselerasi seiring kinerja konsumsi pemerintah yang ekspansif dan investasi yang cukup solid. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU utama yaitu industri pengolahan dan pertambangan tercatat tumbuh sangat tinggi sehingga mendorong ekonomi pada triwulan ini. Dengan demikian, secara kumulatif perekonomian Papua Barat tahun 2019 tercatat 2,66% (yoy), tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Terkontraksinya ekspor menjadi penyebab utama melambatnya perekonomian di tengah masih cukup kuatnya permintaan domestik (konsumsi dan investasi).

The economy of West Papua in the fourth quarter of 2019 accelerated growth in line with the performance of expansive government consumption and fairly solid investment. In terms of business field (LU), the main LU, namely the processing and mining industries, recorded very high growth, which boosted the economy this quarter. Thus, the cumulative economy of West Papua in 2019 was recorded 2.66% (yoy), growing positively albeit lower than in 2018. Export contraction is the main cause of the slowing economy amid still strong domestic demand (consumption and investment).

Berdasarkan perkembangan berbagai indikator dan hasil *liaison*, ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2019 diperkirakan meningkat dibanding triwulan III 2019. Peningkatan ini diperkirakan berasal dari keseluruhan indikator. Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT diperkirakan cukup tinggi seiring daya beli yang masih terjaga dengan inflasi berada pada level rendah. Selain itu, terdapat momen perayaan Natal dan Tahun Baru yang ditengarai akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di Papua Barat. Konsumsi pemerintah diperkirakan akan terakselerasi mengingat realisasi belanja pemerintah saat ini masih di level 41%. Dengan demikian, pemerintah akan fokus untuk membelanjakan dananya pada triwulan akhir di tahun 2019. Kinerja ekspor diperkirakan cenderung lebih baik guna mengejar target ekspor sampai dengan akhir tahun 2019. Hal ini juga didukung dengan kinerja *lifting* LNG yang optimal seiring tidak adanya *maintenance* pada triwulan dimaksud. Ekspor LNG Papua Barat memiliki porsi sekitar 95% dari total ekspor Papua Barat. Sementara itu, impor diperkirakan masih cukup solid namun tidak setinggi triwulan mengingat telah terealisasinya sebagian besar impor alat kerja pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, investasi (PMTB) yang menjadi penopang perekonomian pada triwulan ini diperkirakan masih cukup kuat

Based on the development of various indicators and liaison results, the economy of West Papua in the fourth quarter of 2019 is expected to increase compared to the third quarter of 2019. This increase is expected to come from all indicators. On the expenditure side, household consumption is estimated to be quite high as purchasing power is still maintained with inflation at a low level. In addition, there are moments of Christmas and New Year celebrations that are suspected to be driving increased consumption in West Papua. Government consumption is expected to accelerate given the realization of government spending is currently still at the level of 41%. Thus, the government will focus on spending its funds in the final quarter of 2019. Export performance is expected to be better in pursuit of export targets until the end of 2019. This is also supported by optimal LNG lifting performance in the absence of maintenance during the quarter. West Papua LNG exports account for around 95% of West Papua's total exports. Meanwhile, imports are expected to remain quite solid but not as high as the quarter given the realization of the majority of work equipment imports in the previous quarter. Furthermore, investment (PMTB) which has been the mainstay of the economy this quarter is expected to remain strong due to ongoing private and government-owned

seiring masih berlangsungnya beberapa proyek pembangunan milik swasta maupun milik pemerintah seperti proyek Train III Tangguh LNG, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, pengembangan bandara, serta jalan Trans Papua. Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif walaupun lebih rendah dibanding tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua Barat diperkirakan berada pada kisaran 2,4% - 2,8% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan tahun 2018 sebesar 6,24% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja dan produksi LNG di tahun seiring proses *maintenance* kilang minyak train I di triwulan I dan triwulan II 2019. Sebagaimana diketahui, ekonomi Papua Barat sangat didominasi sektor migas terutama LNG. Terjadinya perlambatan ekonomi dunia termasuk negara mitra dagang utama Papua Barat, yaitu Tiongkok dan Jepang, turut menjadi *downside* risk terhadap permintaan LNG.

development projects such as the Tangguh LNG Train III project, Sorong Special Economic Zone (KEK) development, airport development, and Trans Papua roads. Cumulatively, the economy of West Papua in 2019 is expected to continue to grow positively even though it is lower than in 2018. In 2019, economic growth in West Papua is estimated to be in the range of 2.4% - 2.8% (yoy), slowing compared to 2018 growth of 6.24% (yoy). This slowdown was caused by slowing performance and production of LNG in the year along with the process of maintaining the first refinery in the first quarter and second quarter of 2019. As is known, the economy of West Papua is dominated by the oil and gas sector, especially LNG. The slowdown in the world economy including the main trading partners of West Papua, namely China and Japan, also contributed to the downside risk to LNG demand.

Sektor korporasi di Papua Barat tumbuh cukup solid pada tahun 2019. Kredit perbankan pada sektor korporasi berhasil tumbuh 13,48% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada periode sebelumnya yang tercatat sebesar 11,34% (yoy). Total kredit yang disalurkan oleh perbankan ke sektor korporasi pada periode laporan tercatat sebesar Rp6,16 triliun.

The corporate sector in West Papua grew quite solid in 2019. Banking loan in the corporate sector managed to grow 13.48% (yoy), higher than the growth in the previous period which was recorded at 11.34% (yoy). Total loans disbursed by banks to the corporate sector during the reporting period amounted to Rp6.16 trillion.

Dari sisi rumah tangga, konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2019 tumbuh sebesar 2,28% (yoy). Pertumbuhan ini tercatat lebih kecil dibanding pada tahun 2018 yang mempu mencatatkan pertumbuhan 5,13% (yoy). Meski demikian, hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Papua Barat stabil terjaga.

In terms of households, household consumption in 2019 grew by 2.28% (yoy). This growth is smaller than in 2018 which recorded a growth of 5.13% (yoy). However, the results of the KPw BI Consumer Survey of West Papua Province show that consumer optimism about the economic condition of West Papua is stable.

Aset, penghimpunan DPK, dan penyaluran kredit yang merupakan indikator-indikator utama kinerja perbankan, secara tahunan menunjukkan pertumbuhan yang cukup meyakinkan. Aset perbankan tercatat tumbuh sebesar 25,27% (yoy) sementara DPK juga berhasil tumbuh sebesar 26,31% (yoy) dan kredit berhasil tumbuh 6,37% (yoy).

Assets, collecting TPF and lending, which are the main indicators of bank performance, show annual growth that is quite convincing. Banking assets grew by 25.27% (yoy) while TPF also managed to grow by 26.31% (yoy) and loans successfully grew 6.37% (yoy).

Prospek perekonomian Papua Barat pada triwulan I 2020 diperkirakan meningkat. Sebagaimana historis hasil survei kegiatan dunia usaha, perekonomian pada triwulan kedua menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan awal tahun. Hasil *tracking* memperkirakan pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan I 2020 berada pada kisaran 4,9% - 5.3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 4,6% - 5,0% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh

The prospect of West Papua's economy in the first quarter of 2020 is expected to increase. As historical results of the business activity survey, the economy in the second quarter showed an increase compared to the early quarter of the year. The results of the tracking estimate that West Papua's economic growth in the first quarter of 2020 is in the range of 4.9% - 5.3% (yoy), higher than the estimated economic growth in the first quarter of 2019 of 4.6% - 5.0% (yoy). This increase was driven by solid household

solidnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Secara kumulatif, perekonomian Papua Barat tahun 2020 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonomi Papua Barat tahun 2019. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Papua Barat diperkirakan berada pada kisaran 4,9% - 5,3% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 2,66% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kinerja dari keseluruhan sektor utama baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha.

consumption, investment and overseas exports. Cumulatively, the economy of West Papua in 2020 is estimated to grow higher than the economic forecast of West Papua in 2019. In 2020, economic growth in West Papua is estimated to be in the range of 4.9% - 5.3% (yoy), higher than the realized growth in 2019, it would be 2.66% (yoy). This increase was due to an increase in the performance of all major sectors both in terms of spending and business.

Industri Perbankan Nasional

National Banking Industry

Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik berpengaruh pada melambatnya kredit yang tumbuh 7,89% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,69% (yoy). Sementara itu, kondisi likuiditas tersedia memadai karena didukung pertumbuhan DPK sebesar 7,47% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,60% (yoy). Seiring dengan upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga kestabilan sistem keuangan domestik, persepsi terhadap prospek ekonomi domestik membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya *capital inflow*, khususnya ke pasar SBN. Secara keseluruhan, profil risiko perbankan masih tetap terjaga. Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen.

From the banking side, the slowing down of domestic economic growth had an effect on slowing Loan growth of 7.89% (yoy) compared to 12.69% (yoy) in the previous year. Meanwhile, the available liquidity condition is adequate because it is supported by TPF growth of 7.47% (yoy), an increase compared to last year's 6.60% (yoy). Along with the efforts of the Government and related authorities in maintaining the stability of the domestic financial system, perceptions of the outlook for the domestic economy have improved. This is reflected in the increase in capital inflow, particularly in the SBN market. Overall, the banking risk profile is maintained. To maintain the resilience of the banking industry in the midst of global economic uncertainty, OJK seeks to improve risk mitigation through improving the quality of supervision and strengthening regulations, while maintaining the security and quality of financial service sector services to consumers.

Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Kinerja BUK cukup baik dengan kredit yang tumbuh 7,81% (yoy), disertai pertumbuhan DPK yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,52% (yoy). Hal tersebut membuat *funding gap* semakin menipis sehingga berdampak pada likuiditas yang cukup memadai dalam mengantisipasi penarikan nasabah. Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang terus meningkat. Namun demikian, perlu diperhatikan potensi meningkatnya risiko kredit BUK yang ditunjukkan oleh tren peningkatan NPL *gross* sejak awal tahun.

Conventional Commercial Banks (BUK) Performance

BUK's performance was quite good with loans growing by 7.81% (yoy), accompanied by growth in TPF which began to improve compared to the previous year of 7.52% (yoy). This makes the funding gap even thinner so that it impacts on sufficient liquidity in anticipating customer withdrawals. The resilience of BUK is also still solid with an increasing level of capital. However, it is important to note the potential increase in BUK Loan risk, which is indicated by an upward trend in gross NPL since the beginning of the year.

Tabel Indikator Umum BUK

Table of BUK General Indicator

Indikator	Nominal			qtq		yoy		*Indicator*
	Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19	
Total Aset (Rp Milyar)	7.751.655	7.993.250	8.212.611	0.92%	2.74%	9.18%	5.95%	*Total Assets (Rp Billion)*
Kredit (Rp Milyar)	5.092.584	5.306.141	5.391.846	0.97%	1.62%	11.97%	5.88%	*Loan (Rp Billion)*
DPK (Rp Milyar)	5.372.841	5.624.575	5.709.670	1.66%	1.51%	6.37%	6.27%	*TPF (Rp Billion)*
- Giro (Rp Milyar)	1.287.480	1.393.013	1.423.773	1.88%	2.21%	6.66%	10.59%	*- Current Accounts (Rp Billion)*
- Tabungan (Rp Milyar)	1.737.216	1.744.253	1.844.526	0.43%	5.75%	6.80%	6.18%	*- Savings (Rp Billion)*
- Deposito (Rp Milyar)	2.348.146	2.487.308	2.441.372	2.41%	-1.85%	5.90%	3.97%	*- Time Deposits (Rp Billion)*
CAR (%)	22,97	23,28	23,40	65	12	(21)	43	*CAR (%)*
ROA (%)	2,55	2,48	2,47	(3)	(1)	10	(8)	*ROA (%)*
NIM (%)	5,14	4,90	4,91	(0)	0	(18)	(23)	*NIM (%)*
BOPO (%)	77,86	80,50	79,39	26	(111)	(78)	153	*OEOI (%)*
NPL *Gross* (%)	2,33	2,63	2,50	16	(13)	(17)	17	*Gross NPL (%)*
NPL Net (%)	1,00	1,15	1,16	0	1	(11)	15	*Net NPL (%)*
LDR (%)	94,78	94,34	94,43	(64)	10	474	(35)	*LDR (%)*

Sumber: SPI Desember 2019
Keterangan: Pertumbuhan qtq dqn yoy dalam *Basis Point (bps)*

Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 5,95% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,18% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK dan beberapa komponen modal, diantaranya cadangan modal dan tambahan modal disetor.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset utamanya terjadi pada kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok bank dengan porsi aset besar. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa justru mencatatkan peningkatan pertumbuhan aset, meskipun kedua kelompok bank ini memiliki porsi yang cukup kecil, yaitu 9,29% dari total aset perbankan. Aset perbankan masih dikuasai oleh bank- bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 50,67% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 80,80% dari total aset perbankan.

BUK Assets

BUK assets grew by 5.95% (yoy), slowing compared to the previous year of 9.18% (yoy). The growth of these assets was supported by the growth in deposits and several capital components, including capital reserves and additional paid-in capital.

Based on bank groups, slowing asset growth mainly occurred in the SOE and Foreign Exchange BUSN group, which is a group of banks with a large portion of assets. On the other hand, BPD and Non-Foreign Exchange BUSNs actually recorded an increase in asset growth, even though these two bank groups had a fairly small portion, namely 9.29% of total banking assets. Banking assets are still controlled by large banks as indicated by the Concentration Ratio (CR) of 4 banks' assets which reached 50.67% while the assets of 20 large banks control 80.80% of the total banking assets.

Tabel Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Table of BUK Asset Development by Ownership Group

Kelompok Bank	Nominal (RpM)			Porsi	qtq		yoy		*Bank Group*
	Des' 18	Sep' 19	Des' 19		Sep' 19	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
BUMN	3.342.996	3.413.715	3.574.130	43,52%	0,99%	4,70%	11,93%	6,91%	*SOE*
BUSN Devisa	3.270.606	3.359.953	3.423.794	41,69%	0,44%	1,90%	6,42%	4,68%	*Foreign exchange BUSN*
BUSN Non Devisa	66.698	75.117	79.557	0,97%	2,42%	5,91%	18,87%	19,28%	*Non Foreign Exchange BUSN*
BPD	625.658	687.060	683.617	8,32%	2,95%	-0,50%	7,48%	9,26%	*Regional Development Bank*
KCBA	445.698	457.404	451.514	5,50%	0,78%	-1,29%	11,04%	1,30%	*KCBA*
Total	**7.751.655**	**7.993.250**	**8.212.611**	**100%**	**0,92%**	**2,74%**	**9,18%**	**5,95%**	*Total*

Sumber: SPI Desember 2019

Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 87,29% dari total dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 6,27% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,37% (yoy), didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito. Secara umum, komponen deposito yang memiliki porsi terbesar DPK perbankan tumbuh 3,97% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,90% (yoy).

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang tumbuh 6,72% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,32% (yoy). Peningkatan DPK Rupiah tertinggi terjadi pada kelompok bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang masing-masing tumbuh 13,13% (yoy) dan 12,57% (yoy) pada periode laporan. Pertumbuhan DPK Rupiah utamanya didorong oleh pertumbuhan giro Rupiah yang tumbuh 9,29% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,02% (yoy). Sementara itu, deposito Rupiah yang merupakan komponen terbesar tercatat sedikit melambat sebesar 5,27% (yoy) turun dari 5,40% (yoy) pada Desember 2018.

BUK Funds Source

TPF is the main source of bank funding, reaching 87.29% of total bank funds. During the reporting period, BUK TPF grew 6.27% (yoy), slowing slightly from the previous year at 6.37% (yoy), driven by slowing deposit growth. In general, the deposit component which had the largest portion of bank deposits grew 3.97% (yoy), slowing compared to the previous year which grew 5.90% (yoy).

Based on currencies, the main increase occurred in Rupiah TPF which grew 6.72% (yoy), a slight increase compared to the previous year of 6.32% (yoy). The highest increase in Rupiah TPF occurred in the BUKU 1 and BUKU 2 bank groups, which grew 13.13% (yoy) and 12.57% (yoy) respectively during the reporting period. Growth in Rupiah TPF was mainly driven by growth in Rupiah current accounts which grew 9.29% (yoy) compared to the previous year of 7.02% (yoy). Meanwhile, Rupiah time deposits, which were the largest component, slowed down by 5.27% (yoy) decreased from 5.40% (yoy) in December 2018.

Grafik Tren Pangsa Komposisi DPK

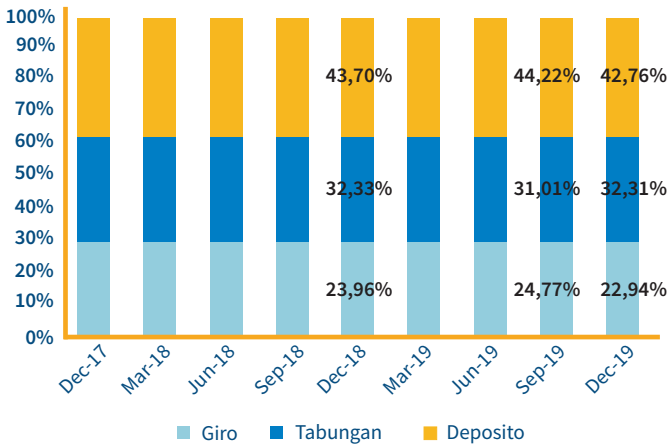

Sumber: SPI Desember 2019

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh giro nominal >Rp2M (21,21% dari total DPK BUK) yang tumbuh 12,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 6,98% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan deposito >Rp2M yang merupakan porsi DPK BUK terbesar (30,04% dari total DPK BUK) justru tercatat melambat sebesar 2,52% (yoy) dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,12% (yoy).

Based on tiering, TPF growth was mainly boosted by a nominal current account> Rp2M (21.21% of total BUK TPF), which grew 12.37% (yoy), higher than the previous year, amounting to 6.98% (yoy). Meanwhile, time deposit growth> Rp2 billion, which was the largest portion of BUK TPF (30.04% of the total BUK TPF) actually recorded a slowdown of 2.52% (yoy) compared to the previous year's growth of 6.12% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 45,21%, diikuti BUSN Devisa sebesar 41,79%. DPK BUMN tumbuh melambat dari 8,97% (yoy) menjadi 7,00% (yoy), sementara BUSN Devisa tumbuh 4,56% (yoy), lebih tinggi dari 3,66% (yoy) tahun sebelumnya.

Based on bank groups, most TPF were in the SOE Bank group at 45.21%, followed by Foreign Exchange BUSN at 41.79%. SOEs TPF slowed down from 8.97% (yoy) to 7.00% (yoy), while Foreign Exchange BUSN grew 4.56% (yoy), higher than 3.66% (yoy) the previous year.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,64%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,53%) diikuti Jawa Timur (9,81%) dan Jawa Barat (8,19%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Spatially, TPF raising are still concentrated in five provinces, namely DKI Jakarta, East Java, West Java, Central Java, and North Sumatra with 77.64% portion. The largest portion was in DKI Jakarta (50.53%), followed by East Java (9.81%) and West Java (8.19%). The amount of TPF collection in the Java region is in line with business activities and the velocity of money which is still concentrated in Java.

Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (67,90%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (11,95%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,15%). Sejalan dengan ketidakpastian ekonomi global yang membuat permintaan kredit cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit cenderung meningkat, salah satu langkah mitigasi risiko bank adalah dengan memilih instrumen yang less risky yaitu pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 6,93% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -11,23% (yoy).

Use of BUK Funds

Most (67.90%) banking funds were channeled in the form of loans to non-bank third parties followed by placements in marketable securities (11.95%) and placements with Bank Indonesia (9.15%). In line with the uncertainty of the global economy which makes credit demand quite weak, coupled with credit risk, which tends to increase, one of the steps to mitigate bank risk is to choose instruments that are less risky, namely securities. Bank placements in securities grew 6.93% (yoy) after the previous year contracted -11.23% (yoy).

Tabel Penggunaan Dana Bank

Table of Use of Bank Funds

Penggunaan Dana	Nominal (RpM)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy(%)		*Use of Funds*
	Des' 18	Sep' 19	Des' 19		Sep' 19	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
Kredit Yang Diberikan	5.155.246	5.362.236	5.458.150	68,74	0,88	1,79	12,28	5,88	*Loan*
- Kepada Pihak Ketiga	5.092.584	5.306.141	5.391.846	67,90	0,97	1,62	11,97	5,88	*- To Third Parties*
- Kepada Bank Lain	62.662	56.094	66.304	0,84	-7,30	18,20	44,31	5,81	*- To Other Banks*
Penempatan Pada bank Lain	216.704	258.246	241.456	3,04	-4,72	-6,50	-6,76	11,42	*Placements with other banks*
Penempatan Pada Bank Indonesia	729.334	661.666	726.425	9,15	5,40	9,79	10,49	-0,40	*Placement with Bank Indonesia*
Surat Berharga	887.433	979.721	948.908	11,95	6,06	-3,15	-11,23	6,93	*Marketable Securities*
Penyertaan	43.451	48.749	50.301	0,63	9,85	3,18	9,65	15,77	*Placement*
CKPN Aset Keuangan	156.963	173.925	164.955	2,08	6,93	-5,16	4,11	5,09	*CKPN Financial Assets*
Tagihan Spot dan Derivatif	22.386	16.135	20.946	0,26	-22,91	29,82	182,14	-6,43	*Spot and Derivative Bill*
Tagihan lainya	290.506	285.490	329.278	4,15	-14	15	34,86	13,35	*Other bills*
TOTAL	**7.502.023**	**7.786.168**	**7.940.419**	**100**	**1,14**	**1,98**	**8,76**	**5,84**	*Total*

Sumber: SPI Desember 2019

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,52%, sedangkan kredit valas sebesar 14,48%. Kredit rupiah tumbuh 10,81% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 11,29% (yoy). Kredit valas juga terkontraksi -3,48% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,81% (yoy).

Based on currency denominations, loan to non-bank third parties was more in the form of rupiah with a portion of 85.52%, while foreign currency loans amounted to 14.48%. Rupiah loan grew by 10.81% (yoy), slowing from the previous year of 11.29% (yoy). Foreign currency loan also contracted -3.48% (yoy), far down compared to the previous year which was 15.81% (yoy).

Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan kurs berlaku, kredit valas masih tercatat tumbuh sebesar 5,73% (yoy), meskipun tetap tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,35% (yoy). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar.

On the other hand, if using the prevailing exchange rate calculation, foreign currency loan still recorded growth of 5.73% (yoy), although it continued to slow down compared to the previous year at 8.35% (yoy). This shows that the growth of foreign currency loans is not only influenced by the amount of loan demand but also influenced by the exchange rate.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,79%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,30% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,48%, sedangkan sisanya sebesar 27,21% adalah kredit konsumsi (KK). Kredit produktif tercatat melambat menjadi 6,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,70% (yoy).

Based on the type of usage, loan is dominated by performing loan (72.79%), which consists of working capital loan (WCL) of 46.30% and investment loan (IC) of 26.48%, while the remaining 27.21% is consumption loan (KK). Productive loans slowed down to 6.07% (yoy) compared to the previous year which grew 12.70% (yoy).

Grafik Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

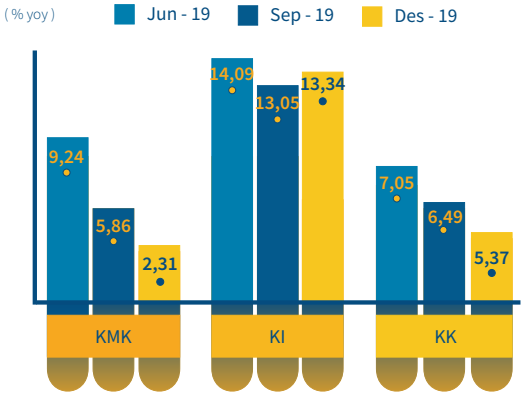

Sumber: SPI Desember 2019

Rentabilitas BUK

Pada Desember 2019, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan sedikit menurun menjadi 2,47% dari 2,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang melambat sebesar 4,28% (yoy) dari 13,15% (yoy), utamanya akibat peningkatan beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank dan pendapatan bunga yang menurun sebagai dampak perlambatan kredit.

BUK Profitability

In December 2019, BUK profitability was still maintained although bank ROA declined slightly to 2.47% from 2.55% in the same period the previous year. This was partly due to slowing earnings by 4.28% (yoy) from 13.15% (yoy), primarily due to an increase in interest expense to non-bank third parties and reduced interest income as a result of slowing credit.

Secara umum, semua kelompok BUKU mengalami penurunan ROA mengikuti trend penurunan suku bunga dan NIM, sedangkan berdasarkan kelompok kepemilikan hanya BUSN Devisa dan KCBA yang masih menunjukan peningkatan ROA menjadi masing-masing 2,11% dan 3,27%.

In general, all BUKU groups experienced a decline in ROA following the downward trend in interest rates and NIM, while based on ownership groups only BUSN Foreign Exchange and KCBA still showed an increase in ROA to respectively 2.11% and 3.27%.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 79,39% dari 77,86% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO antara lain disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan beban operasional selain bunga dari penyusutan/amortisasi.

Meanwhile, banking OEOI was recorded to increase to 79.39% from 77.86% in the previous year. The increase in OEOI was partly due to an increase in interest expense and operational expenses other than interest from depreciation / amortization.

Sejalan dengan penurunan ROA, semua kelompok BUKU mengalami peningkatan BOPO, dan berdasarkan kepemilikan hanya kelompok KCBA yang mencatat penurunan BOPO.

In line with the decrease in ROA, all BUKU groups experienced an increase in OEOI, and based on ownership only the KCBA group recorded a decrease in OEOI.

Tingginya tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan bank juga mendorong pertumbuhan beban bunga DPK yang berdampak kepada menurunnya pendapatan bunga bersih dikarenakan peningkatan cost of fund. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM perbankan menjadi 4,91% dari 5,14% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

The high level of time deposit interest rates offered by banks also drives the growth of third party interest expense, which results in lower net interest income due to an increase in cost of funds. This resulted in a decline in the banking NIM to 4.91% from 5.14% in the same period the previous year.

Tabel Rentabilitas dan CAR Perbankan

Table of Profitability and CAR Banking

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa		Ratio
	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
ROA	3,08%	2,81%	2,07%	2,11%	1,34%	1,22%	ROA
NIM	5,70%	5,26%	4,54%	4,45%	5,94%	5,66%	NIM
BOPO	71,24%	76,39%	81,13%	81,39%	88,70%	89,76%	OEOI
CAR	20,88%	21,18%	21,42%	22,12%	27,63%	30,50%	CAR

Rasio	BPD		KCBA		Industri		Ratio
	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
ROA	2,38%	2,15%	2,74%	3,27%	2,55%	2,47%	ROA
NIM	6,32%	5,95%	3,82%	4,09%	5,14%	4,91%	NIM
BOPO	77,88%	79,56%	88,41%	83,86%	77,86%	79,39%	OEOI
CAR	22,05%	21,19%	47,61%	50,38%	22,97%	23,40%	CAR

Rasio	BUKU 1		BUKU 2		Ratio
	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
ROA	1,36%	1,17%	1,57%	1,42%	ROA
NIM	5,60%	4,87%	5,13%	4,81%	NIM
BOPO	87,90%	89,55%	86,19%	88,32%	OEOI
CAR	22,21%	25,13%	25,71%	25,44%	CAR

Rasio	BUKU 3		BUKU 4		Ratio
	Des' 18	Des' 19	Des' 18	Des' 19	
ROA	1,79%	1,72%	3,23%	3,14%	ROA
NIM	4,21%	3,98%	5,78%	5,48%	NIM
BOPO	85,88%	87,40%	69,18%	72,31%	OEOI
CAR	25,24%	25,34%	21,05%	21,00%	CAR

Sumber: SPI Desember 2019

Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (80,87%) berupa modal inti. Pada Desember 2019, modal inti tumbuh 11,04% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,24% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan cadangan tambahan modal pada bulan laporan. Hal tersebut kemudian mendorong pertumbuhan modal sebesar 8,50% (yoy) relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya (8,89%, yoy).

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 6,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,88% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan modal yang melebihi ATMR membuat CAR BUK naik sebesar 43 bps (yoy) menjadi 23,40%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 50,38%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari head office serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya terdapat bank KCBA.

BUK Capital

In general, BUK's capital is still very adequate with most (80.87%) in the form of core capital. In December 2019, core capital grew 11.04% (yoy), an increase compared to the previous year of 9.24% (yoy). The increase was driven by an increase in the growth of additional capital reserves in the reporting month. This then boosted capital growth by 8.50% (yoy), which was relatively stable compared to the previous year (8.89%, yoy).

Meanwhile, BUK's RWA recorded growth of 6.50% (yoy), lower than the previous year of 9.88% (yoy). Thus, capital growth that exceeded RWA made CAR BUK increase by 43 bps (yoy) to 23.40%.

Based on bank ownership, the highest CAR is at KCBA, which is 50.38%. The high KCBA CAR was partly due to the support of capital equivalent funding from the head office and the placement of mandatory KCBA in high-quality Securities which was calculated as CEMA and had a fairly low risk weighting in the RWA calculation. Along with the high KCBA CAR, the high CAR based on BUKU was recorded in BUKU 2 and BUKU 3, which included KCBA banks.

Tabel Komponen Permodalan BUK

Table of BUK Capital Component

No	Komponen Modal (Rp T)	Dec-18	Sep-19	Dec-19	mtm	qtq	yoy	Porsi
1	Modal Inti	1.003,20	1.079,34	1.114,00	0,99%	3,21%	11,04%	80,87%
A	Modal Inti Utama	1.003,83	1.079,06	1.113,45	0,87%	3,19%	10,92%	80,83%
	Modal disetor	179,25	181,13	181,37	1,00%	0,13%	1,18%	13,17%
	Cadangan Tambahan Modal	900,71	974,98	1.013,36	1,24%	3,94%	12,51%	73,56%
	Laba	648,33	685,96	719,63	1,42%	4,91%	11,00%	52,24%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	509,74	580,17	577,85	-0,44%	-0,40%	13,36%	41,95%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	138,59	105,80	141,78	9,76%	34,01%	2,30%	10,29%
	Dana Setoran Modal Cadangan	5,43	3,06	5,32	68,99%	74,08%	-2,01%	0,39%
	Lainnya	246,96	285,96	288,42	0,05%	0,86%	16,79%	20,94%
	Faktor Pengurang	76,13	77,05	81,28	6,01%	5,50%	6,77%	5,90%
B	Modal Inti Tambahan	(0,63)	0,28	0,55	-167,10%	96,24%	-186,85%	0,04%
2	Modal Pelengkap	90,96	88,78	87,62	-4,63%	-1,31%	-3,68%	6,36%
	Surat berharga subordinasi	26,77	25,60	21,37	-8,33%	-16,53%	-20,18%	1,55%
	Pinjaman Subordinasi	19,14	19,37	19,93	9,69%	2,87%	4,14%	1,45%
	PPA atas aset produktif	51,57	53,52	54,67	1,76%	2,15%	6,01%	3,97%
	Lainnya	(6,52)	(9,71)	(8,35)	150,61%	-14,00%	28,15%	-0,61%
3	CEMA	175	180	176	-3,71%	-2,03%	0,28%	12,77%
4	TOTAL MODAL	1.270	1.348	1.378	-0,01%	2,21%	8,50%	100%
5	ATMR	5.527	5.788	5.886	1,72%	1,70%	6,50%	
	ATMR Kredit	4.692	4.872	4.955	1,55%	1,70%	5,59%	
	ATMR Operasional ATMR Pasar	772	825	825	-0,02%	0,06%	6,98%	
		68	95	110	27,88%	15,81%	63,42%	
Rasio	CAR	22,97%	23,28%	23,40%	(41)	12	43	
	Rasio Modal Inti	21,29%	21,70%	22,49%	26	79	120	

Sumber: SPI Desember 2019

Posisi Bank Papua di Industri Perbankan

Berdasarkan perbandingan kinerja Bank Papua dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan pada tahun 2019, Bank Papua berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK masing-masing sebesar 25,50%, 13,53% dan 27,41%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK pada tahun 2019 (triwulan IV) Bank kategori BUKU 2, tercatat masing-masing sebesar 9,88%, 8,26%, 12,93%. Sedangkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan Bank BPD masing-masing sebesar 9,38%; 10,21%; dan 11,47%, maka pertumbuhan Bank Papua dapat dikatakan diatas rata-rata Bank Umum Kategori Buku 2 dan BPD. Untuk kinerja laba pada tahun 2019, laba yang dibukukan Bank Papua dibawah rata-rata perbankan umum Bank Kategori 2 dan BPD.

Untuk rasio kinerja Bank Papua di tahun 2019, hampir semua rasio dibawah rata-rata perbankan umum kategori BUKU 2 dan BPD, kecuali untuk rasio NIM dan CASA di atas rata-rata.

Bank Papua's Position in the Banking Industry

Based on a comparison of the performance of Bank Papua compared to the banking industry average in 2019, Bank Papua succeeded in growth of Assets, Loans, and Third Party Funds respectively by 25.50%, 13.53% and 27.41%. When compared to the growth of Assets, Loans and Deposits in 2019 (quarter IV) of the BUKU 2 Bank category, they were recorded at 9.88%, 8.26%, 12.93% respectively. Meanwhile, when compared with the growth of BPD Bank each of 9.38%; 10.21%; and 11.47%, the growth of Bank Papua can be said to be above the average for the BUKU 2 and BPD Commercial Banks. For earnings performance in 2019, the earning recorded by Bank Papua is below the average banking category of Bank Category 2 and BPD.

For the Bank's performance ratio in 2019, almost all ratios are below the average of the general banking category of BUKU 2 and BPD categories, except for the above average NIM and CASA ratios.

Kinerja	Tahun 2018 (miliar Rp)			Tahun 2019 (miliar Rp)			Perubahan		
	Bank Papua	BUKU 2	BPD	Bank Papua	BUKU 2	BPD	Bank Papua	BUKU 2	BPD
Aset	22.457	823.832	655.963	28.184	905.190	717.518	25,50%	9,88%	9,38%
Kredit	14.147	525.714	426.051	16.061	569.146	469.530	13,53%	8,26%	10,21%
DPK	17.930	549.986	477.473	22.961	621.089	532.258	27,41%	12,93%	11,47%
Laba Bersih	363	9.180	13.090	250	8.502	12.307	-53,72%	-7,39%	-5,98%
Tahun 2018 (dalam persentase (%))				**Tahun 2019 (dalam persentase (%))**			**dalam persentase (%))**		
CAR	22,21	26,28	22,05	21,43	25,44	21,19	(0,78)	(0,84)	(0,86)
ROA	1,24	1,54	2,38	1,35	1,42	2,15	0,11	(0,12)	(0,23)
NIM	6,82	5,08	6,32	7,00	4,81	5,95	0,18	(0,27)	(0,37)
BOPO	87,77	86,21	77,88	84,18	88,32	79,56	(3,59)	2,11	1,68
LDR	78,9	94,03	88,86	70,30	90,38	88,10	(8,60)	(3,65)	(0,76)
CASA	85,89	44,58	59,19	87,07	46,62	60,76	1,18	2,04	1,57

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2018 dan 2019, diolah.

Adapun untuk pangsa pasar Bank Papua terhadap perbankan umum kategori BUKU 2 dan BPD adalah sebagai berikut :

As for the market share of Bank Papua for general banking, BUKU 2 and BPD categories are as follows:

Pangsa Pasar Bank Papua terhadap		
Kinerja	BUKU 2	BPD
Aset	3,11%	3,93%
Kredit	2,82%	3,42%
DPK	3,68%	4,29%
Laba Bersih	1,98%	1,37%

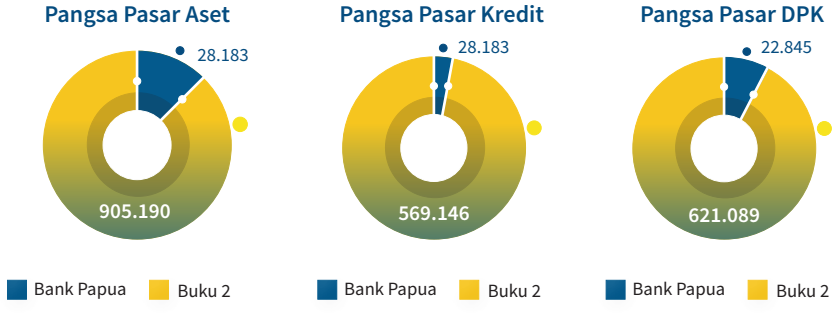

Kinerja Operasional

Operational Performance

Segmen Usaha

Saat ini Bank Papua hanya bergerak dalam perbankan konvensional, dengan memiliki segmen operasi yang terdiri atas 3 (tiga) Segmen yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa dan layanan lainnya.

Business Segment

At present Bank Papua is only engaged in conventional banking, with an operating segment consisting of 3 (three) Segments, namely raising funds, channeling funds, and other services.

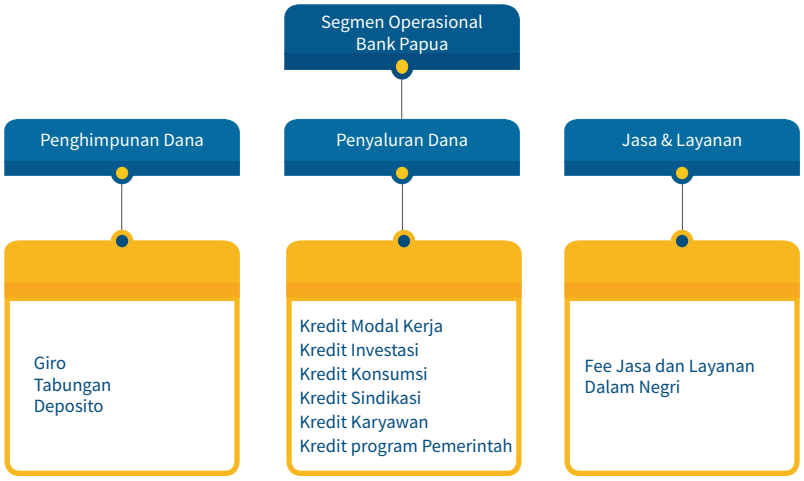

Bank Papua senantiasa melakukan inovasi guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan menitikberatkan pada kualitas layanan, daya saing produk, jasa perbankan yang *update*, serta pengembangan produk inovatif yang berbasis teknologi. Hal ini guna memberikan solusi kepada nasabah dalam memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, Bank Papua juga memberikan variasi tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Bank Papua continues to innovate to meet the needs of customers by emphasizing service quality, product competitiveness, updated banking services, and developing innovative products based on technology. This is to provide solutions to customers in obtaining financial services that are appropriate to their needs. Not only that, Bank Papua also provides variations in interest rates offered.

1. Penjelasan Masing-masing Segmen Usaha

Segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Papua menjalankan segmen operasinya berdasarkan peraturan kebijakan akuntansi.

Bank telah menyajikan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai "Segmen Operasi". Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal Bank yang disiapkan untuk mengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan penilaian atas performanya.

a. Penghimpunan Dana
   Dana pihak ketiga diperoleh dari masyarakat, baik sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Bank Papua menghimpun dana pihak ketiga melalui produk yang terdiri dari Tabungan, Giro dan Deposito.
b. Penyaluran Dana
   Sebagai lembaga intermediasi, Bank Papua melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga sebagai *surplus spending* unit dan menyalurkan kepada *deficit spending* unit dalam bentuk penyaluran kredit. Produk Penyaluran Dana Bank Papua terdiri dari atas kredit umum, kredit program dan kredit konsumtif. Bank Papua memberikan kemudahan layanan dengan memberikan keanekaragaman produk kredit. Berbagai jenis kebutuhan dapat difasilitasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para nasabah.
c. Jasa & Layanan
   Selain menawarkan produk penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Papua juga memberikan produk lain berupa layanan dan *Treasury*. Jasa layanan Bank Papua diperoleh dari *fee* Bank Papua *Card*, EDC, CDM, Samsat *online*, Kartu Pegawai Elektronik, BPDNet *Online*, *Save Deposit Box*, Kasda *Online*, Garansi Bank, Referensi Bank, ATM, *Payment point*, *SMS Banking* dll.

1. Explanation of Each Business Segment

Business segment is a group of assets and operations that provide goods or services that have risks and returns that are different from other business segments. In carrying out business activities, Bank Papua operates its operating segments based on accounting policy regulations.

The Bank has presented operating segments based on PSAK 5 (Revised 2009) regarding "Operating Segments". Operating segments are reported in accordance with the Bank's internal reports prepared to make operational decisions responsible for allocating resources to specific segments and evaluating their performance.

a. Fundraising
   Third party funds are obtained from the public, whether as individuals, companies, governments, households, cooperatives, foundations and others in rupiah or foreign currency. Bank Papua collects third party funds through products consisting of Savings, Current Accounts and Time Deposits.

b. Lending
   As an intermediary, Bank Papua collects funds from third parties as a surplus spending unit and channels it to deficit spending units in the form of lending. Bank Papua's Fund Distribution Products consist of general loans, program loans and consumer loans. Bank Papua provides convenience services by providing a diversity of Loan products. Various types of needs can be facilitated according to the wishes and needs of the customers.

c. Services
   In addition to offering product collection and distribution of funds, Bank Papua also provides other products in the form of services and Treasury. Bank Papua services are obtained from Bank Papua CArd, EDC, CDM, online Samsat fees, Electronic Employee Cards, BPDNet Online, Save Deposit Boxes, Online Kasda, Bank Guarantees, Bank References, ATMs, Payment Points, SMS Banking etc.

Penghimpunan Dana *Fundraising*

Jasa dan layanan *Services*

Jasa dan layanan

- Bank Papua *Card*
- EDC (*Electronic Data Capture*).
- CDM (Cash Deposit Machine).
- Samsat *Online*.
- Kartu Pegawai Elektronik (KPE
- BPDNet *Online*.
- *Save Deposit Box*
- Kas Daerah *Online*
- Garansi Bank
- Referensi Bank
- Automatic Teller Machine
- *Payment* point Telkomsel
- *Payment* point PLN
- Layanan Airport Executive Lounge
- *SMS Banking* Bank Papua

Penyaluran Dana *Lending*

2. Kinerja per Segmen Usaha

a. Penghimpunan Dana

Total dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Papua pada tahun 2019 sebesar Rp22.960.889 juta meningkat 27,60% dibandingkan tahun 2018. Faktor utama peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan dana khususnya pada giro dan tabungan.

Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

2. Performance per Business Segment

a. Fundraising

Total third party funds raised by Bank Papua in 2019 amounted to Rp22.960.889 million, an increase of 27,60% compared to 2018. The main factor of the increase was due to an increase in funds, especially in current accounts and savings.

The growth of Bank Papua third party funds is illustrated in the table below:

Pertumbuhan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Third Party Fund Raising 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Giro	7.253.326	7.118.046	7.731.486	8.206.448	11.133.571	2.927.123	35,67%	*Current Account*
Tabungan	5.878.738	6.292.181	6.573.996	7.365.412	8.810.469	1.445.057	19,62%	*Saving*
Deposito	2.659.077	3.159.254	2.350.093	2.421.956	3.016.848	594.893	24,56%	*Time Deposit*
TOTAL	**15.791.142**	**16.569.481**	**16.655.575**	**17.993.816**	**22.960.889**	**4.967.073**	**27,60%**	*TOTAL*

Penghimpun Dana
Fundraising

b. Penyaluran Dana

Tahun 2019 kredit Bank Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp14.147.217 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp16.060.678 juta pada tahun 2019.

Pertumbuhan kredit Bank Papua dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tergambar pada tabel dibawah ini:

b. Lending

In 2019, Bank Papua's loan experienced a positive growth of 13.53% compared to the previous year, amounting to Rp14,147,217 million in 2018 to Rp16,060,678 million in 2019.

Bank Papua's Loan growth from 2015 to 2019 is shown in the table below:

Pertumbuhan Penyaluran Dana 2015-2019 (RpJuta)
2015-2019 Lending Growth (USD Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Kredit Modal Kerja	4.407.834	4.940.758	3.743.441	3.326.957	3.417.235	90.278	2,71%	*Working Capital Loan*
Kredit Investasi	2.120.633	2.079.797	1.754.950	1.339.116	1.260.899	(78.217)	-5,84%	*Investment Loan*
Kredit Konsumsi	4.968.285	5.764.436	6.397.129	7.494.008	8.451.814	957.807	12,78%	*Consumption Loan*
Kredit Sindikasi	1.313.105	1.079.631	1.040.839	1.520.243	2.352.608	832.365	54,75%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	278.974	303.818	319.095	413.283	491.365	78.082	18,89%	*Employee Loan*
Kredit Program Pemerintah	118.346	41.401	15.456	53.611	86.756	33.145	61,82%	*Government Program Loan*
TOTAL	**13.207.177**	**14.209.840**	**13.270.908**	**14.147.217**	**16.060.678**	**1.913.460**	**13,53%**	*TOTAL*

*) sebelum dikurangi CKPN sebesar Rp568.875 juta.

Penyaluran Dana
Lending

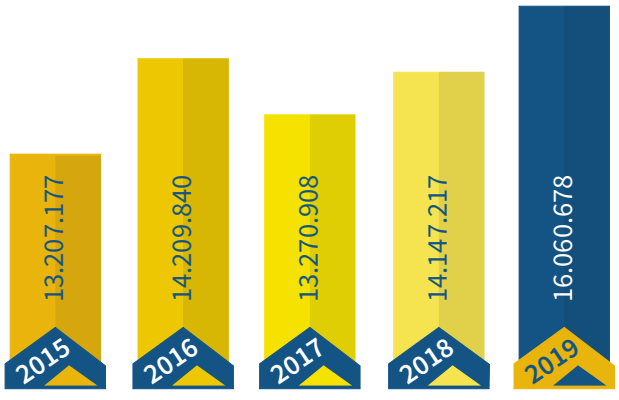

Berbagai upaya telah dilakukan Bank Papua untuk meningkatkan ekspansi kredit di tahun 2019, meskipun letak geografis Provinsi Papua dan Papua Barat yang penuh tantangan, dimana transportasi masih banyak yang menggunakan pesawat terbang menyebabkan supervisi kredit menjadi kurang efektif karena biaya yang terlalu tinggi. Hasil kerja keras tersebut terlihat pada tahun 2019, jumlah penyaluran dana meningkat dari tahun sebelumnya.

Various efforts have been made by the Bank Papua to increase loan expansion in 2019, despite the challenging geography of the Papua and West Papua Province, where more and more airports are using airports, making loan supervision less cost effective. The result of the hard work is that in 2019, the amount of funding will increase from the previous year.

Meskipun demikian, Bank Papua tetap berupaya mengembangkan jaringan kantor diantaranya membuka beberapa kantor di sentra-sentra ekonomi, baik diwilayah Papua maupun di luar Papua, sehingga dapat menyalurkan kredit modal kerja dan investasi pada sektor UMKM sebagai salah satu misi bank dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Despite this, Bank Papua remains committed to expanding its office network including opening several offices in economic centers, both within Papua and beyond Papua, to provide working capital and investment Loan to the SMEM sector as one of the bank's mission in order to drive regional economic growth.

c. Jasa & Layanan

Pendapatan jasa dan layanan pada tahun 2019 dibagi menjadi dua, yaitu :

1) pendapatan jasa dari komisi jasa layanan; dan
2) pendapatan jasa *treasury*.

Kegiatan *treasury* merupakan kegiatan operasional Bank dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Bank, selain yang berasal dari penyaluran kredit.

Pendapatan *fee* dan komisi jasa layanan pada tahun 2019 sebesar Rp24.045 juta lebih besar sebesar 0,33% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp23.060 juta.

Sedangkan pendapatan dari jasa *treasury* pada tahun 2019 sebesar Rp483.248 juta, meningkat sebesar 20,21% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp402.012 juta.

c. Services

Services income in 2019 is divided into two:

1) Service income from commission and fees; and
2) Treasury service income.

Treasury activities are the Bank's operational activities in order to optimize the Bank's income, other than those derived from the loan lines.

Service fees and commissions income in 2019 was Rp24.045 million, an increase of 0.33% from the previous year, at Rp23.060 million.

While income from treasury services in 2019 was Rp483.248 million, an increase of 20.21% from the previous year was Rp402.012 million.

- Pendapatan *fee* dan komisi dari pelayanan jasa

- *Fees and commissions income from service*

(dalam Jutaan Rp)

NO	NAMA PRODUK	FEE BASED INCOME			Growth	
		2017	2018	2019	Nominal	%
1	Provisi Transfer	63	20	14	(6)	-29,29%
2	Prov.Referensi Bank	2.119	1.790	1.507	(283)	-15,83%
3	Prov.Jaminan Bank	3.302	2.832	3.613	781	27,58%
4	Prov.Adm.Giro,Tab.Dpst	59.032	47.533	45.292	(2.241)	-4,71%
5	Provisi Kliring	1.207	1.342	1.592	250	18,67%
6	Provisi Adm. S.D.B	40	42	42	(0)	-0,12%
7	Provisi Administrasi Lainnya	6.485	9.911	11.748	1.837	18,54%
8	Komisi Visa *Card*	1	1	1	(1)	-62,45%
9	Komisi Asuransi	5.202	10.072	11.076	1.004	9,97%
10	Komisi Indosat	45	5	3	(2)	-35,37%
11	Komisi PT.Askrida	394	1.023	1.698	676	66,10%
12	Komisi PDAM	8	6	8	2	23,20%
13	Komisi ATM Bersama	16.057	17.303	17.993	691	3,99%
14	Komisi ATM Prima	1.221	470	1.104	633	134,61%
15	Komisi Fasilitas Kredit Sindikasi	-	2.707	33	(2.674)	-98,78%
16	Pendapatan SMS *Mobile Banking*	144	816	363	(453)	-55,52%
17	Komisi PLN	231	343	433	89	26,02%
18	Komisi Bank Persepsi	999	1.486	1.132	(354)	-23,81%
19	Komisi PDAM	0	0	1	0	45,60%
20	Komisi Garuda	0	0	0	(0)	-33,33%
21	Komisi *Multibiller Finnet*	10	20	32	11	54,68%
22	Pendapatan Administrasi Telkomsel	1.397	1.729	1.695	(35)	-2,00%
23	Komisi Transaksi Pembelanjaan Ritel Kartu Kredit Co- Brand	3	1	0	(1)	-70,65%
24	Komisi Iuran Keanggotaan Kartu Kredit Co- Brand	0	0	0	(0)	-30,99%
25	Komisi Pembayaran Tagihan Kartu Kredit	0	2	1	(0)	-16,86%
26	Komisi GPN ATM Prima	-	538	640	101	18,84%
27	Komisi GPN ATM Bersama	-	41	73	32	79,95%
28	Komisi XL	-	0	1	0	168,27%
29	Komisi Lainnya	97	192	459	266	138,78%
TOTAL		**98.057**	**100.226**	**100.552**	**326**	**0,33%**

- Pendapatan bunga dari penempatan dana oleh Divisi *Treasury*

- *Interest income from placement of funds by Treasury division*

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Bunga Penempatan Pada Bank Indonesia	20.703	13.503	23.418	6.322	6.898	576	9,11%	*Placement interest at Bank Indonesia*
Bunga Penempatan Pada Bank Lain	256.985	164.956	115.812	162.266	197.952	35.686	21,99%	*Placement interest at Other bank*
Hasil Bunga Efek-Efek	241.824	285.853	279.738	233.425	278.398	44.973	19,27%	*Marketable securities interest*
JUMLAH	**519.512**	**464.312**	**418.968**	**402.012**	**483.248**	**81.236**	**20,21%**	*TOTAL*

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Review of Operations per Business Segment

Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana yang dilakukan oleh Bank Papua, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat (Non Bank) dan penghimpunan dana berasal dari bank lain.

1. Dana Pihak Ketiga Non Bank

Dana Pihak Ketiga (DPK) Non Bank yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2019 sebesar Rp22.844.982 juta meningkat sebesar 27,41% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp17.929.809 juta. Peningkatan signifikan terjadi pada pengumpulan dana giro, meningkat sebesar 36,01%. Peningkatan masing-masing jenis dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Fundraising

The Fundraising conducted by the Bank Papua, is divided into 2 sections, namely the non-bank (non-bank) fundraising group and the fund-raising from other banks.

1. Non-Bank of Third Party Funds

Third Party Funds (TPFs) Non-Bank successfully collected in 2019 by Rp22,844,982 million increased by 27.41% compared to 2018 by Rp17,929,809 million. Significant improvement occurred in the fundraising, which increased by 36.01%. An increase in each of these types of funds can be seen in the following table:

Tabel Perkembangan DPK Non Bank Tahun 2015-2019
Table of Non Bank TPF Development 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Giro	7.251.987	7.033.795	7.641.693	8.151.733	11.086.817	2.935.084	36,01%	*Current Account*
Tabungan	5.877.399	6.287.064	6.572.270	7.361.170	8.804.223	1.443.053	19,60%	*Saving*
Deposito	2.657.827	3.157.804	3.157.804	2.416.906	2.953.943	537.037	22,22%	*Time Deposit*
JUMLAH	**15.787.213**	**16.478.663**	**16.563.805**	**17.929.809**	**22.844.982**	**4.915.174**	**27,41%**	*TOTAL*

Perkembangan Penghimpunan Dana(DPK Non Bank)
Fundraising Development (Non-Bank TPF)

1.1 Giro

Giro adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu waktu menggunakan surat berharga berupa cek/ bilyet giro/ surat pembayaran lainnya, serta dapat melakukan pemindahbukuan, dan uang yang terdapat dalam giro dapat berupa mata uang asing.

Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pertumbuhan produk giro ditahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 36,01% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp8.151.733 juta juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp11.086.817 juta pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dana giro swasta yang menjadi nasabah di Bank Papua.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk giro, tergambar pada tabel dibawah ini :

1.1 Current Accounts

Current accounts is a deposit that can be withdrawn at any time using a valuable letter / checkbook / other bill of lading, as well as being able to make transfers, and the money in the account can be in foreign currency.

This product is a deposit of Third Party Funds which can be withdrawn at any time by using checks, crossed checks and other means of payment orders in accordance with established conditions. Growth in current accounts in 2019 experienced a growth of 36.01% compared to the previous year, which amounted to Rp8,151,733 million in 2018 to Rp11,086,817 million in 2019. This was due to an increase in private current accounts that became customers at Bank Papua .

A description of the growth in customer savings of the product of Current accounts, shown in the table below:

Pertumbuhan Giro Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Current Account of Bank Papua in 2015-2019 (Rp million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Giro	7.368.549	7.118.044	7.731.486	8.151.733	11.086.817	2.935.084	36,01%	*Current Account:*
Pihak berelasi	2.614.509	3.010.422	3.295.328	3.194.184	5.104.075	1.909.891	59,79%	*Related Parties*
Pihak ketiga	4.754.039	4.107.622	4.436.158	4.957.549	5.982.742	1.025.193	20,68%	*Third party*

Perkembangan Giro
Current Account Growth

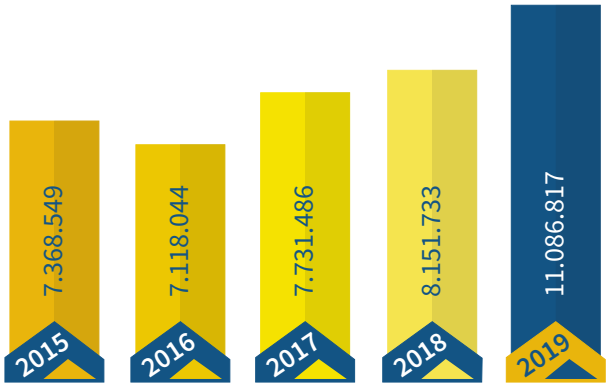

Sedangkan jumlah nasabah Giro pada tahun 2019 sebanyak 64.470 nasabah meningkat 2,18% dibandingkan tahun 2018. Faktor utama peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah nasabah pada Giro Dinas-Dinas.

While the number of Current Account customers in 2019 was 64.470 customers increased by 2,18% compared to 2018. The main factor was due to the increase in the number of customers in the Current Account Departments.

Tabel Jumlah Nasabah dan Dana Giro Bank Papua
Table of Number of Customers and Current Account Fund of Bank Papua

Giro	2018		2019		Perubahan %		*Current Account*
	Nasabah	Dana (Rp.Jt)	Nasabah	Dana (Rp.Jt)	Nasabah	Dana	
Pemerintah Provinsi	305	546.277	328	1.794.473	7,54%	228,49%	*Provincial Government*
Pemerintah Kabupaten/Kota	6.140	2.636.757	6.228	3.309.602	1,43%	25,52%	*Regency / Municipal Government*
Swasta	48.368	4.498.246	49.598	5.307.070	2,54%	17,98%	*Private*
Pemerintah Lainnya	8.216	465.587	8.243	673.397	0,33%	44,63%	*Other Governments*
Lainnya	64	4.866	73	2.275	14,06%	-53,24%	*Others*
Jumlah	**63.093**	**8.151.733**	**64.470**	**11.086.817**	**2,18%**	**36,01%**	**Total**

Jumlah Nasabah Giro Non Bank

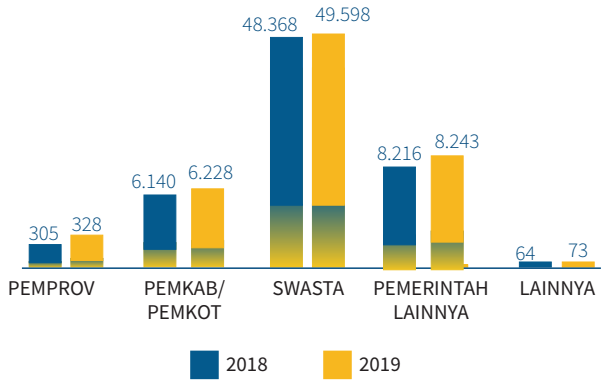

Jumlah Dana Giro Non Bank (Rp. juta)

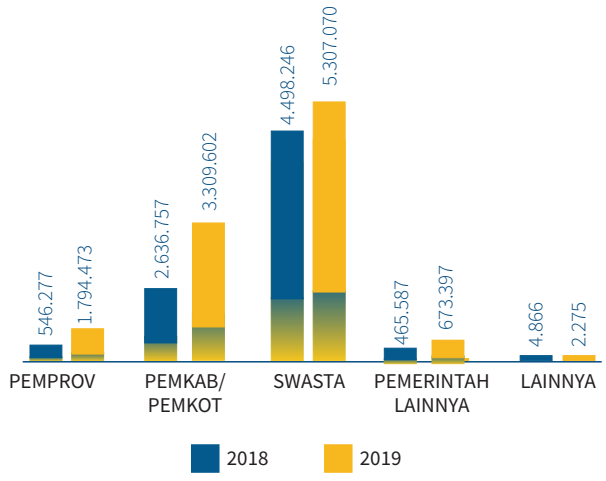

Sebagaimana produk simpanan nasabah, Giro Bank Papua juga memberikan suku bunga yang menarik. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk Giro yang berlaku pada tahun 2019 sebagaimana dibawah ini.

As a consumer savings product, current account Bank Papua also offers attractive interest rates. The interest rates for certain types of current account products are valid in 2019 as below.

Suku Bunga Giro Pemerintah Daerah
Regional Government Current Account Rates

No	Jenis Giro	Saldo	Suku Bunga
1		>Rp100.000.000 - Rp250.000.000	0% - 0,75%
2	Giro Pemerintah Daerah	>Rp250.000.000 - Rp5.000.000.000	0,75% - 1,25%
3		>Rp5.000.000.000	1,25%

Suku Bunga Giro
Current Account Interest

No	Jenis Giro	Saldo	Suku Bunga
1		>Rp100.000.000 - Rp250.000.000	0% - 0,50%
2	Giro Umum	>Rp250.000.000 - Rp5.000.000.000	0,75% - 1,00%
3		>Rp5.000.000.000	1,00% - 1,25%

1.2 Tabungan

Tabungan adalah simpanan dengan denominasi rupiah serta dapat ditarik atau dipindahbukukan sewaktu waktu serta penarikannya tidak dapat menggunakan cek/bilyet giro.

Tabungan merupakan sarana simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Pertumbuhan produk tabungan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,60% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp7.361.170 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp8.804.223 juta ditahun 2019.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk tabungan, tergambar pada tabel dibawah ini :

1.2 Savings

Savings are rupiah-denominated savings and can be withdrawn or overbooking at any time and withdrawals may not use a check / billet bill.

Savings are a means of savings for Third Party Funds that can be withdrawn at any time, with attractive interest rates and easy access to transactions. Growth in savings products in 2019 increased by 19.60% compared to the previous year, from Rp7.361.170 million in 2018 to Rp8.804.223 million in 2019.

A description of the growth in customer savings from savings products, shown in the table below:

Pertumbuhan Tabungan Bank Papua Tahun 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Bank Papua Savings in 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Tabungan	5.877.399	6.287.064	6.572.270	7.361.170	8.804.223	1.443.053	19,60%	*Saving*
Pihak berelasi	8.716	8.206	11.882	24.350	6.160	(18.190)	-74,70%	*Related Parties*
Pihak ketiga	5.870.022	6.283.975	6.562.114	7.336.820	8.798.063	1.461.243	19,92%	*Third party*

Perkembangan Tabungan

Growth of Savings

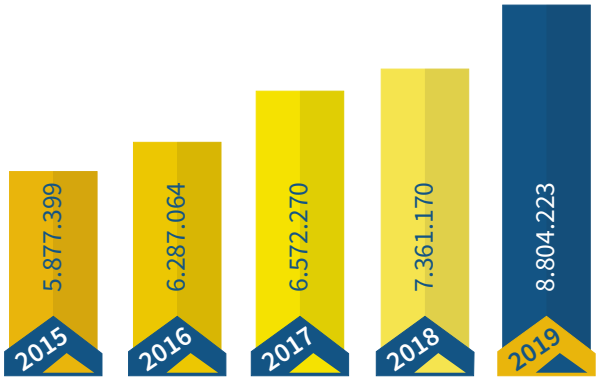

Jumlah dana dan nasabah untuk setiap jenis tabungan adalah sebagai berikut :

The amount of funds and customers for each type of savings are as follows:

Jumlah Nasabah dan Dana Tabungan Non Bank Lain

Number of Customers and Other Non-Bank Savings Funds

Tabungan	2018		2019		Perubahan %		*Saving*
	Nasabah	Dana (Rp.Jt)	Nasabah	Dana (Rp.Jt)	Nasabah	Dana	
Tab. Pemberdayaan Masyarakat	135.447	15.196	163.257	14.971	20,53%	-1,48%	*Community Development Saving*
Tabungan Simanja	2.914.844	319.265	3.479.461	343.060	19,37%	7,45%	*Simanja Saving*
Tabungan Simpeda	2.920.696	293.241	3.057.034	313.887	4,67%	7,04%	*Simpeda Saving*
Tabungan KPE	539.051	73.670	727.491	76.602	34,96%	3,98%	*KPE Saving*
Tabungan Gaji Jakarta	117	171	128	40	9,40%	-76,61%	*Jakarta Salary Saving*
Tabunganku	328.826	201.784	412.652	220.438	25,49%	9,24%	*TabunganKu*
Tabungan BSM SD	2.007	163.338	1.778	159.110	-11,41%	-2,59%	*SD BSM Saving*
Tabungan BSM SMP	926	53.357	825	53.297	-10,91%	-0,11%	*SMP BSM Saving*
Tabungan BSM SMA	362	31.582	345	31.510	-4,70%	-0,23%	*SMA BSM Saving*
Tabungan BSM SMK	161	10.793	163	10.605	1,24%	-1,74%	*SMK BSM Saving*
Tabunganku LPMAK	14.496	159	7.808	144	-46,14%	-9,43%	*TabunganKu LPMAK*
Tabungan Simanja UNIPA	1.268	2.005	1.940	2.132	53,00%	6,33%	*UNIPA Simanja Saving*
Tabungan Dana Desa	417.732	3.301	729.640	4.136	74,67%	25,30%	*Village Fund Saving*
Tabungan SIMPEL	40.046	71.172	48.819	76.608	21,91%	7,64%	*SIMPEL Saving*
Tabungan Simanja BSPS	1.012	7.577	29.795	12.245	2844,17%	61,61%	*Simanja BSPS Saving*
Tabungan Simanja TNP	8	3	8	4	0,00%	33,33%	*Simanja TNP Saving*
Tabungan Simpel PIP PA	2.325	6.488	2.631	7.576	13,16%	16,77%	*SimPel PIP PA Saving*
Tabungan Simanja Pensiun	172	90	447	136	159,88%	51,11%	*Simanja Pension Saving*
Tabungan Simanja DAK BRS	1.753	1.140	10.743	3.330	512,84%	192,11%	*Simanja DAK BRS Saving*
Tabungan Simanja Asmat Pintar	3.662	2.499	7.077	3.123	93,26%	24,97%	*Simanja Asmat Pintar Saving*
Tabungan Simanja Bangga Papua	36.261	16.027	51.600	25.317	42,30%	57,96%	*Simanja Bangga Papua Saving*
Tabungan Simanja Lanny MCS	-	-	70.580	20.788			*Simanja Lanny MCS Savings*
Jumlah	**7.361.170**	**1.272.858**	**8.804.223**	**1.379.059**	**19,60%**	**8,34%**	**Total**

Untuk terus meningkatkan pertumbuhan produk tabungan, Bank Papua memberikan beberapa pilihan simpanan dalam bentuk tabungan antara lain:

a) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
- Menawarkan bunga menarik.
- Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara nasional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

b) Tabungan Simanja (Simpanan Aman dan Sejahtera)
Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
- Menawarkan bunga menarik.
- Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

c) TabunganKu
Keuntungan bagi penabungnya, yaitu :
- Mudah persyaratannya dan ringan setorannya.
- Bebas biaya administrasi.

d) Simpel
- Bebas biaya administrasi .
- Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp5.000,-
- Rekening dan kartu atas nama siswa.

Selain keuntungan dari masing-masing pilihan tabungan tersebut diatas, beberapa tabungan dapat juga memberikan berbagai keuntungan lainnya bagi penabungnya, yaitu:
- Memberikan kemudahan transaksi seperti penarikan tunai, cek saldo dan transfer dana 24 jam dengan menggunakan Kartu ATM Bank Papua.
- Fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan sebagai kartu debit di *merchant*, yang berlogo PRIMA Debit.
- Memberikan kemudahan dalam transaksi penyetoran tunai 24 jam melalui *Cash Deposit Machine* (CDM).
- Fasilitas *SMS Banking*.
- Dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

Jumlah nasabah tabungan pada tahun 2019 meningkat 8,34% dibandingkan tahun 2018. Faktor utama peningkatan ini dikarenakan tepatnya program promosi yang membuat bertambahnya nasabah tabungan. Data nasabah untuk masing-masing produk pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

To further enhance the growth of savings products, Bank Papua offers several savings options in the form of savings:

a) Simpeda Savings (Regional Development Savings)
The benefits to his saviors are:
- *Offer attractive interests.*
- *Offer a nationally recognized prize 2 times in 1 year and regional twice in 1 year.*

b) Simanja Savings (Simpanan Aman dan Sejahtera Savings)
The benefits to his saviors are:
- *Offer attractive interests.*
- *Offer regionally attractive prizes 2 times in 1 year.*

c) TabunganKu
The benefits to his saviors are:
- *The terms are simple and the deposit is light.*
- *Free of administrative costs.*

d) Simpel
- *Free of administrative costs.*
- *First deposit of at least Rp500, -*
- *Accounts and cards on behalf of students.*

In addition to the benefits of each of these savings options, some savings may also provide other benefits to their savings, namely:
- *Provides easy transactions such as cash withdrawals, balance checks and 24 hour funds transfer using Bank Papua ATM Card.*
- *ATM card facility that can be used as a debit card at PRIMA Debit.*
- *Provides easy access to 24-hour cash deposit transactions via Cash Deposit Machine (CDM).*
- *SMS Banking Facility.*
- *Can be used as a Loan guarantee.*

The number of savings customers in 2019 increased by 8.34% compared to 2018. The key factor for this increase was due to the fact that promotional programs are increasing savings to customers. Customer data for each product in 2019 is as follows:

TABUNGAN	2018		2019		Perubahan (%)		SAVING
	Jumlah Dana (Rp .Jt)	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana (Rp .Jt)	Jumlah Nasabah	Dana	Nasabah	
Tabungan Simanja	4.065.823	441.103	5.279.976	506.028	29,86%	14,72%	*Simanja Savings*
Tabungan Simpeda	2.920.696	293.241	3.057.034	313.887	4,67%	7,04%	*Simpeda Savings*
TabunganKu	328.826	201.784	412.652	220.438	25,49%	9,24%	*TabunganKu*
Tabungan Simpel	45.825	336.730	54.561	338.706	19,06%	0,59%	*Simpel Savings*
Total	**7.361.170**	**1.272.858**	**8.804.223**	**1.379.059**	**19,60%**	**8,34%**	**Total**

Jumlah Nasabah Tabungan Non Bank

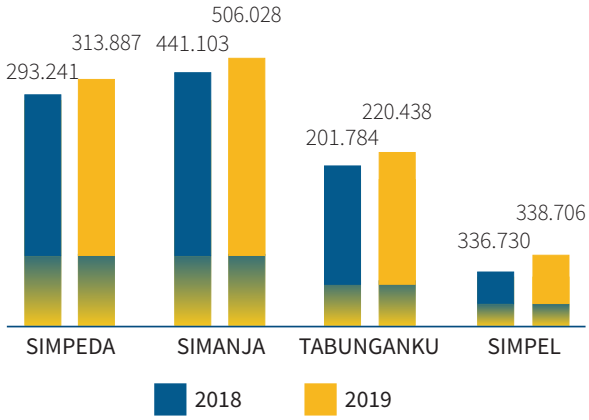

Jumlah Dana Tabungan Non Bank (Rp Juta)

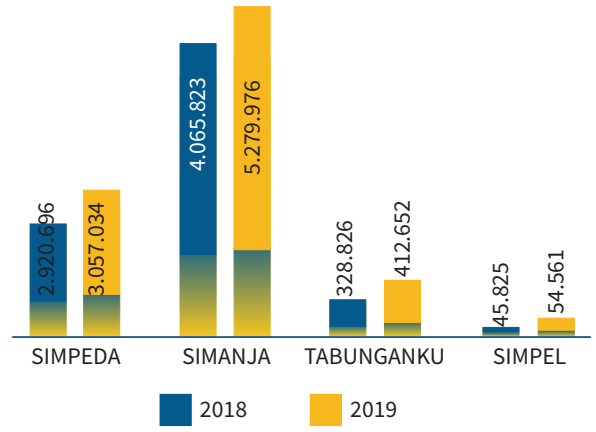

Disamping promosi, Bank Papua memberikan bunga yang menarik untuk masing-masing produk tabungan. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk tabungan yang berlaku pada tahun 2019 sebagaimana dibawah ini.

In addition to the promotion, Bank Papua offers attractive interest rates for each savings product. The interest rates for certain types of savings products are effective in 2019 as below.

Suku Bunga Tabungan Simpeda: *Simpeda Savings Interest Rate:*

Suku Bunga Tabungan *Savings Interest Rate*			
No.	**Jenis Tabungan**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	Simpeda	< Rp100.000	0%
2		>Rp100.000 -Rp100.000.000	1%
3		>Rp100.000.000 - Rp500.000.000	1,50%
4		>Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000	2,50%
5		>Rp1.000.000.000	3,00%

Suku Bunga Tabungan Simanja, dan Tabungan KPE *Simanja Savings, Interest Rates and KPE Savings*

Suku Bunga Tabungan *Savings Interest Rate*			
No.	**Jenis Tabungan**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	Simanja & Tabungan KPE	< Rp100.000	0%
2		>Rp100.000 -Rp100.000.000	1,50%
3		>Rp100.000.000 - Rp500.000.000	2,00%
4		>Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000	3,00%
5		>Rp1.000.000.000	3,50%

Suku Bunga Tabunganku *TabunganKu Interest Rate*

Suku Bunga Tabungan *Savings Interest Rate*			
No.	**Jenis Tabungan**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	Tabunganku	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,25%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

Suku Bunga Simanja Mahasiswa *Simanja Student Interest Rates*

Suku Bunga Tabungan *Savings Interest Rate*			
No.	**Jenis Tabungan**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	Simanja Mahasiswa UNIPA	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,50%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

Suku Bunga Tabungan Pemberdayaan Masyarakat *Savings Interest Rate for Community Empowerment*

Suku Bunga Tabungan *Savings Interest Rate*			
No.	**Jenis Tabungan**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	Tabungan Pemberdayaan Masyarakat	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,50%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

1.3 Deposito

Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Pertumbuhan produk Deposito ditahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 22,22% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp2.416.906 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.953.943 juta pada tahun 2019.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk deposito, tergambar pada tabel dibawah ini :

1.3 Time Deposits

This product is a time deposit of Third Party Funds that withdrawals are based on a certain period that has been agreed upon and is intended for individuals and business entities in the form of legal entities. Growth in time deposits in 2019 experienced a growth of 22.22% compared to the previous year, which amounted to Rp2,416,906 million in 2018 to Rp2,953,943 million in 2019.

A description of the customer's savings growth from tIme deposit products, is shown in the table below:

Pertumbuhan Deposito Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Bank Papua Time Deposits Growth 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Deposito berjangka	2.657.827	3.157.804	2.349.842	2.416.906	2.953.943	537.037	22,22%	*Time Deposit*
Pihak berelasi	1.206.460	1.585.233	1.358.563	1.521.239	1.942.007	420.768	27,66%	*Related Parties*
Pihak ketiga	1.451.367	1.574.021	991.529	895.667	1.011.936	116.269	12,98%	*Third party*

Perkembangan Deposito

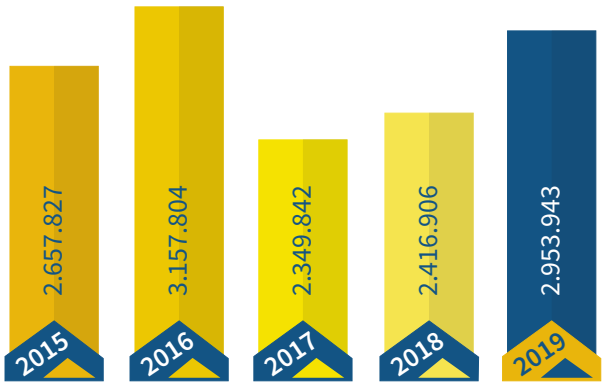

Jumlah nasabah dan dana deposito berjangka pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The number of customers and time deposits in 2019 are as follows:

DEPOSITO	2018		2019		Perubahan (%)		TIME DEPOSIT
	Jumlah Dana (Rp .Jt)	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana (Rp .Jt)	Jumlah Nasabah	Dana	Nasabah	
1 (satu) bulan	942.159	1.927	1.331.147	2.080	41,29%	7,94%	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	1.162.270	806	1.255.033	797	7,98%	-1,12%	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	137.056	515	154.434	493	12,68%	-4,27%	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	121.747	613	158.833	628	30,46%	2,45%	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	53.674	267	54.495	291	1,53%	8,99%	*24 (twenty four) month*
Total	**2.416.906**	**4.128**	**2.953.943**	**4.289**	**22,22%**	**3,90%**	**Total**

Jumlah Nasabah Deposito Non Bank

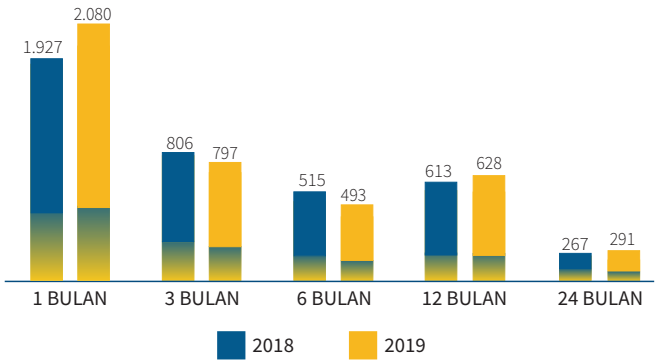

Jumlah Dana Deposito Non Bank (Rp Juta)

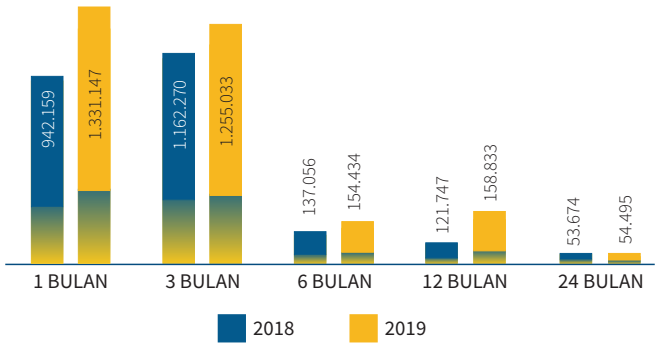

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana simpanan nasabah dari produk deposito, Bank Papua menawarkan beberapa pilihan Deposito sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk Deposito yang berlaku pada tahun 2019 sebagaimana dibawah ini.

To enhance the growth of time deposit customer funds from deposit products, Bank Papua offers several timely Deposit options with competitive interest rates, which can be extended automatically upon initial confirmation. The advantage of Term Deposit can be used as a Loan guarantee. Interest rates for certain types of Deposits products are effective in 2019 as below.

Suku Bunga Deposito Rp5 juta s/d Rp100 juta *Time deposit Interest Rate of Rp5 million to Rp100 million*

Suku Bunga Deposito *Time Deposits Interest Rate*			
No.	**Jangka Waktu**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	1 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,00%
2	3 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,25%
3	6 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,75%
4	12 bulan	5 juta s/d 100 juta	6,00%

Suku Bunga Deposito Rp100 juta s/d Rp250 juta *Time Deposit Interest Rate of Rp100 million to Rp250 million*

Suku Bunga Deposito *Time Deposits Interest Rate*			
No.	**Jangka Waktu**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	1 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,05%
2	3 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,30%
3	6 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,80%
4	12 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	6,05%

Suku Bunga Deposito Rp250 juta s/d Rp500 juta *Time Deposit Interest Rate of Rp250 million to Rp500 million*

Suku Bunga Deposito *Time Deposits Interest Rate*			
No.	**Jangka Waktu**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	1 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,10%
2	3 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,35%
3	6 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,85%
4	12 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	6,10%

Suku Bunga Deposito Rp500 juta s/d Rp1 M *Time Deposit Interest Rate of Rp500 million to Rp1 billion*

Suku Bunga Deposito *Time Deposits Interest Rate*			
No.	**Jangka Waktu**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	1 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,15%
2	3 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,40%
3	6 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,90%
4	12 bulan	> 500 juta s/d 1 M	6,15%

Suku Bunga Deposito > Rp1 Miliar *Time Deposit Interest Rate> Rp1 Billion*

Suku Bunga Deposito *Time Deposits Interest Rate*			
No.	**Jangka Waktu**	**Saldo**	**Suku Bunga**
1	1 bulan	> 1 M	5,25%
2	3 bulan	> 1 M	5,50%
3	6 bulan	> 1 M	6,00%
4	12 bulan	> 1 M	6,25%

2. Dana Pihak Ketiga Bank

Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Bank lain yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2019 sebesar Rp115.906 juta meningkat sebesar 81,08% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp64.007juta. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada pengumpulan dana deposito berjangka, meningkat sebesar 1145,66%. Peningkatan masing-masing jenis dana dapat dilihat pada tabel berikut :

2. Bank Third Party Funds

Third Party Funds (TPFs) from other Banks which were able to raise in 2019 by Rp115.906 million increased by 81.08% compared to 2018 amounting to Rp64.007 million. A very shaRpincrease in the timing of fund-raising deposits increased by 1145.66%. An increase in each of these types of funds can be seen in the following table:

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Giro	116.561	84.250	89.793	54.715	46.754	(7.961)	-14,55%	*Current accounts*
Tabungan	1.339	5.117	1.727	4.242	6.246	2.004	47,24%	*Saving*
Deposito berjangka	1.250	1.450	250	5.050	62.906	57.856	1145,66%	*Time Deposit*
Jumlah	**119.151**	**90.817**	**91.770**	**64.007**	**115.906**	**51.900**	**81,08%**	*Total*

Perkembangan DPK Bank

Growth of TPF Bank

2.1.Giro

Giro dari bank lain yang berhasil dihimpun pada tahun 2019 sebesar Rp46.755 juta menurun 14,55% dibandingkan tahun 2018 yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp54.716 juta. Sedangkan jumlah nasabah menurun sebesar -8,96 %.

2.1. Current Account

Current accounts from other banks successfully raised in 2019 amounted to Rp46,755 million, a decrease of 14.55% compared to 2018 which successfully raised funds amounting to Rp54,716 million. While the number of customers decreased by -8.96%.

GIRO	2018		2019		Perubahan (%)		CURRENT ACCOUNT
	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana	Nasabah	
Bank pemerintah	728	18	7.084	16	873,08%	-11,11%	*Government banks*
Bank BPD	63	14	62	14	-1,59%	0,00%	*BPD banks*
Bank Swasta Lainnya	53.925	35	39.609	31	-26,55%	-11,43%	*Other Private banks*
Total	**54.716**	**67**	**46.755**	**61**	**-14,55%**	**-8,96%**	**Total**

Jumlah Nasabah Gliro Bank Lain

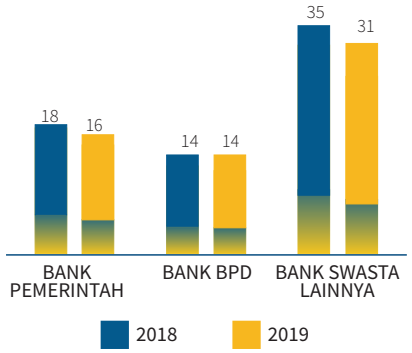

Jumlah Dana Gliro Bank Lain (Rp. Juta)

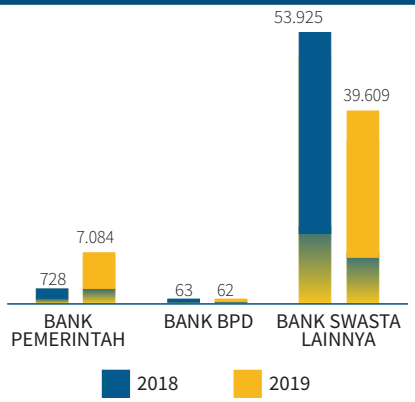

2.2.Tabungan

Tabungan dari bank lain yang berhasil dihimpun pada tahun 2019 sebesar Rp6.246juta meningkat 47,25% dibandingkan tahun 2018 yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp4.242juta. Sedangkan jumlah nasabah menurun sebesar 90,91%.

2.2. Saving

Savings from other banks successfully raised in 2019 amounted to Rp6,246 million, an increase of 47.25% compared to 2018 which managed to raise funds of Rp4,242 million. While the number of customers decreased by 90.91%.

TABUNGAN	2018		2019		Perubahan (%)		SAVING
	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana	Nasabah	
Tabungan bank lainnya	4.242	11	6.246	1	47,25%	-90,91%	*Saving of other banks*
Total	**4.242**	**11**	**6.246**	**1**	**47,25%**	**-90,91%**	**Total**

Jumlah Nasabah Tabungan Bank Lain

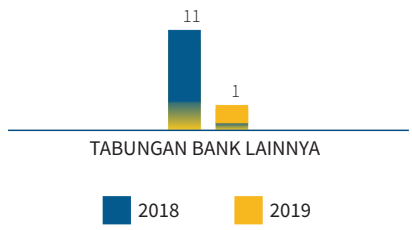

Jumlah Dana Tabungan Bank Lain (Rp. Juta)

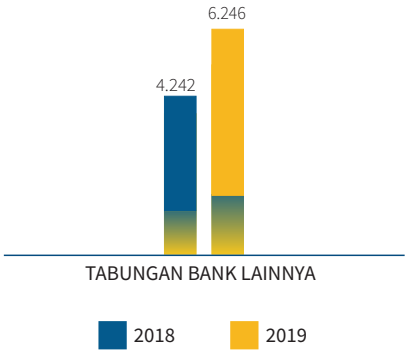

2.3. Deposito

Deposito dari bank lain yang berhasil dihimpun pada tahun 2019 sebesar Rp62.906 juta meningkat 1145,66% dibandingkan tahun 2018 yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp5.050 juta. Sedangkan jumlah nasabah meningkat sebesar 216,67%.

2.3. Time Deposit

Time deposits from other banks successfully collected in 2019 amounting to Rp62,906 million, an increase of 1145.66% compared to 2018 which managed to raise Rp5,050 million. While the number of customers increased by 216.67%.

DEPOSITO	2018		2019		Perubahan (%)		TIME DEPOSIT
	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana (Rp .Jt)	Nasabah	Dana	Nasabah	
1 (satu) bulan	1.600	2	-	-	-	-	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	-	-	62.500	16	-	-	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	200	1	200	1	0,00%	0,00%	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	3.250	3	200	1	-93,85%	-66,67%	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	-	-	6	1			*24 (twenty four) month*
Total	**5.050**	**6**	**62.906**	**19**	**1145,66%**	**216,67%**	**Total**

Jumlah Nasabah Deposito Bank Lain

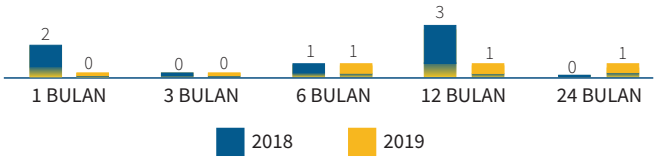

Jumlah Dana Deposito Bank Lain (Rp Juta)

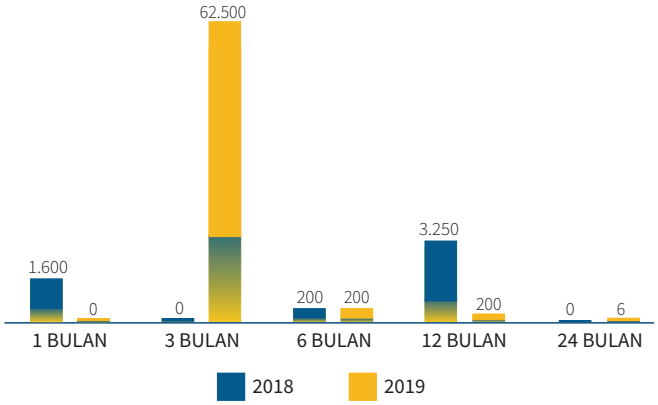

3. Jumlah Giro & Tabungan terhadap Total Simpanan

Jika dilihat dari jenis-jenis DPK maka dapat dibagi menjadi dana murah dan dana mahal. Pengertian dana murah adalah bank memberikan bunga simpanan dalam persentase yang rendah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah giro dan tabungan. Dana mahal adalah bank memberikan bunga simpanan lebih tinggi dibanding dana murah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah deposito. Latar belakang deposito mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan giro dan tabungan karena deposito penarikannya berjangka sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan bank. Kondisi tersebut menjadikan bank dapat mengatur kebutuhan likuiditasnya sehingga kegiatan operasional bank dapat berlangsung dengan optimal. Sedangkan giro dan tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu dan bank wajib menyediakan dana nasabah tabungan atau giro jika dilakukan penarikan. Jika bank tidak mampu menyediakan uang yang ditarik nasabah tabungan dan giro maka bank tersebut mengalami gagal bayar (likuiditas kurang). Salah satu komponen yang terpenting bank dalam menghasilkan laba selain kredit yang berkualitas adalah sumber dana yang memadai. Semakin besar komposisi dana murah (***current account saving account***/CASA) dalam bank, maka semakin besar pula potensial laba yang dapat diperoleh dari penyaluran kredit. CASA Bank Papua ditahun 2019 adalah sebesar 87,07% dimana dana murah yang terhimpun adalah sebesar Rp19.891.040 juta atau naik 28,22% dari tahun 2018 yakni sebesar Rp15,571,861 juta. Ini artinya Bank memiliki dana murah yang besar. Pertumbahan (***current account saving account***/CASA) Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini :

4. *Current Account Saving Account / CASA*

When viewed from the types of TPF, it can be divided into cheap funds and expensive funds. Understanding low-cost funds is the bank provides a low percentage of deposit interest, while those included in this group are current accounts and savings. Expensive funds are banks that provide higher deposit interest compared to cheap funds, while those included in this group are time deposits. Background time deposits get greater interest than current accounts and savings because time time deposits withdrawal in accordance with the time set by the bank. These conditions make banks able to manage their liquidity needs so that bank operations can take place optimally. Where as current accounts and savings can be withdrawn at any time and banks are required to provide savings or current account funds for customers to withdraw. If the bank is unable to provide the money withdrawn by the savings and current account customer, the bank has failed to pay (less liquidity). One of the most important components of banks in generating earnings besides a quality loan is adequate funding sources. The greater the composition of low-cost funds (current account saving accounts / CASA) in banks, the greater the potential earning that can be obtained from lending. Bank Papua CASA in 2019 was 87,07% of which low-cost funds raised were Rp 19,891,040 million, increase of 28.22% from 2018 which was Rp 15,571,861 million. This means that the Bank has large low-cost funds. Bank Papua's current account saving account (CASA) is illustrated in the table below:

Pertumbuhan CASA Bank Papua tahun 2015-2019 (%)
Growth of Bank Papua CASA in 2015-2019 (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	*Description*
Jumlah Giro dan Tabungan terhadap total simpanan	83,28%	80,93%	85,89%	86,52%	87,07%	*Current Account Saving Account (CASA)*

Dengan adanya himbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembatasan maksimum suku bunga simpanan di perbankan menjadikan tantangan dan peluang bersaing yang lebih sehat antar perbankan di Indonesia termasuk Bank Papua untuk dapat meningkatkan penghimpunan dana murah di masyarakat. Tahun 2019 dana murah yang berasal dari Giro dan Tabungan akan menjadi fokus dalam penghimpunan dana sehingga komposisi CASA Bank Papua akan tumbuh sesuai target yang diharapkan. Adapun strategi yang akan digunakan guna untuk mencapai target CASA tersebut antara lain:

The presence of the Financial Services Authority (OJK) over the maximum restriction of banking rates on banking has created more challenging and competitive competition between banks in Indonesia including the Bank Papua to increase the availability of cheap funds in the community. The 2019 Current Account and Savings Fund will be focused on raising funds so Bank Papua's CASA composition will grow to its intended target. The strategies that will be used to achieve these CASA goals include:

1) Produk Peningkatan Volume Dana
   Peningkatan volume DPK akan fokus kepada 3 (tiga) produk Simpanan yaitu Giro, Tabungan SIMPEDA dan Tabungan SIMANJA. Ketiga produk ini merupakan produk unggulan dan memiliki portofolio volume dana yang besar diantara produk DPK lainnya. Dengan Fokus pada 3 (tiga) produk ini maka diharapkan dapat mempercepat peningkatan volume dana.
2) Program Penjualan
   Peluncuran program-program penjualan yang fokus pada produk Tabungan dan Giro yang bertujuan untuk akuisisi nasabah baru (*new acquisition*), mempertahankan dan meningkatkan saldo (*customer retention*) sehingga peningkatan CASA dapat dicapai pada tahun 2019.

   Beberapa program penjualan guna meningkatkan volume dana pada tahun 2019 yaitu:
   - Program *cash back*.
   - Program penjualan produk Tabungan SIMANJA.
   - Program kegiatan *gathering* nasabah prioritas.
   - Program *Sponsorship*.

   Kegiatan *sponsorship* di tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Divisi Pengelolaan Dana Jasa & *E-Banking* sebagai berikut :

1) Fund Raising Product
The increase in TPF volume will focus on 3 (three) Savings products namely Current Account, SIMPEDA Savings and SIMANJA Savings. These three products are superior products and have a large portfolio of fund volumes among other TPF products. With a Focus on 3 (three) of these products it is hoped to accelerate the increase in fund volume.

2) Sales Program
The launch of sales programs focused on Savings and Current Account products aimed at new acquisition, retaining and increasing customer retention so that CASA improvements can be achieved in 2019.

Some of the sales programs to increase fund volume in 2019 are:
- *Cash back program.*
- *SIMANJA Savings product sales program.*
- *Priority customer gathering activity program.*
- *Sponsorship program.*

The sponsorship activities for 2019 have been conducted by the Services & E-Banking Division as follows:

No	KATEGORI SPONSORSHIP	REALISASI				*SPONSORHIP CATEGORY*
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	Seni Budaya	21,000,000		20,000,000	7,500,000	*Art and Culture*
2	Pendidikan	-	18,970,000	66,836,000	37,000,000	*Education*
3	Olahraga	-			60,000,000	*Sports*
4	Umum	-	47,590,000	10,000,000	99,471,000	*General*
5	HUT Provinsi/Kota/Kab. di Tanah Papua	-	-	-	315,376,000	*Provincial / Municipal / Regency Anniversay in the Land of Papua*
6	Persipura Jayapura (Liga 1 Gojek)	5,000,000,000	-	-	1,500,000,000	*Persipura Jayapura (League 1 Gojek)*
7	Persiwa Wamena	-	-	-	-	*Persiwa Wamena*
8	Persidafon Jayapura	-	-	-	-	*Persidafon Jayapura*
9	Perseman Manokwari	-	-	-	-	*Perseman Manokwari*
10	PSBS Biak	-	-	-	150,000,000	*PSBS Biak*
11	Perseru Serui	-	-	-	-	*Perseru Serui*
12	Perseka Kaimana	-	-	-	-	*Perseka Kaimana*
13	Yahukimo FC	-	-	-	-	*Yahukimo FC*
14	Persewon Wondama	-	-	-	-	*Persewon Wondama*
15	Persifa Fak-Fak	-	-	-	-	*Persifa Fak-Fak*
16	Persigubin Pegunungan Bintang	-	-	-	-	*Persigubin Pegunungan Bintang*
17	Persitoli Tolikara	-	-	-	-	*Persitoli Tolikara*
	JUMLAH	**5,021,000,000**	**66,560,000**	**3,596,836,000**	**2,169,347,000**	*TOTAL*

3) Evaluasi dan *Repackage* Produk

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap produk simpanan di Bank Papua serta dalam rangka untuk dapat bersaing dengan produk dana di Bank lain maka akan dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan produk-produk yang dimiliki serta fitur produk di dalamnya bersama divisi terkait.

Evaluasi dan *repackage* produk ini dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan dapat pasar serta dapat meningkatkan CASA Bank Bank Papua sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Product Evaluation and Repackage

In order to meet the needs of the customers of the Bank's saving products in Bank Papua and in order to compete with the funds of the other Bank, there will be a process of evaluation and refinement of the existing products and product features with the respective divisions.

Evaluation and repackage of this product can meet market expectations and can enhance Bank Papua CASA according to its stated goals.

4. Dana Pemda dan Non Pemda

Melanjutkan program Transformasi BPD menjadi bank yang sehat, Bank Papua terus berupaya menekan porsi dana pemerintah daerah dari dana pihak ketiga bank. Komposisi dana Pemda dan Non Pemda dimiliki Bank Papua tergambar pada tabal berikut ini.

5. Government and Non-Government Funds

Continuing the BPD Transformation program into a sound bank, the Bank Papua continues to strive to suppress portions of local government funds from third-party bank funds. The composition of Government and Non-Governmental Funds owned by Bank Papua is shown in the following table.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Dana Pemda	3.978.570	4.682.306	5.033.793	4.898.843	7.382.946	2.484.103	50,71%	*Government Fund*
Dana Non Pemda	11.927.794	11.887.173	11.621.782	13.094.973	15.577.943	2.482.971	18,96%	*Non Government Fund*
Jumlah	**15.906.364**	**16.569.479**	**16.655.575**	**17.993.816**	**22.960.889**	**4.967.073**	**27,60%**	*Total*

Perbandingan Dana Pemda dan Non Pemda

Comparison of Government and Non-Government Funds

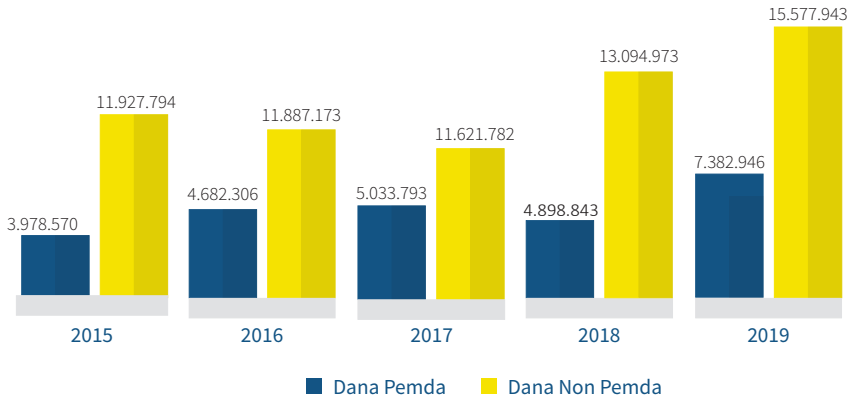

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan Dana Pemda yakni sebesar 50,71% dari Rp4.898.843 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp7.382.946 juta pada tahun 2019. Sedangkan Dana Non Pemda, terjadi pertumbuhan yakni sebesar 18,96% dari Rp13.094.973 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp15.577.943 juta pada tahun 2019.

In 2019, there was an increase in Local Government Funds by 50.71% from Rp4,898,843 million in 2018 to Rp7,382,946 million in 2019. While Non-Local Government Funds, there was a growth of 18.96% from Rp13,094,973 million in 2018 to be Rp.15,577,943 million in 2019.

Dengan porsi dana pemda yang masih dibawah dana non pemda, Bank Papua akan terus meningkatkan pelayanan dan memberikan beragam produk jasa keuangan bagi masyarakat atau nasabahnya guna meningkatkan dana non Pemda pada dana pihak ketiga bank. Dengan semakin tingginya komposisi dana non pemda tersebut, tentunya dapat memberikan ruang gerak lebih luas kepada manajemen untuk mengembangkan Bisnis Bank di masa depan.

With a portion of non-governmental funds still under way, the Bank Papua will continue to improve its services and provide a variety of financial services products to its community or customers to increase non-Government funds to third-party bank funds. The higher the composition of these non-governmental funds, the more likely it is that management will provide more room for management to grow the Bank's Business in the future.

Penyaluran Dana

Lending

Secara umum, penyaluran dana Bank Papua berbentuk kredit yang terbagi ke dalam 6 macam kredit yaitu Kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi, kredit karyawan, dan kredit program pemerintah. Perkembangan jumlah kredit selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

In general, Bank Papua's lending is divided into 6 types of Loan namely Consumption Loan, working capital Loan, investment Loan, syndication Loan, employee Loan, and government program Loan. Loan growth over the last 5 years is as follows:

Tabel Perkembangan Penyaluran Dana Bank Papua Tahun 2015 - 2019
Table of Bank Papua Transfers Development 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Kredit Modal Kerja	4.407.834	4.940.758	3.743.441	3.326.957	3.417.235	90.278	2,71%	*Working Capital Loan*
Kredit Konsumsi	4.968.285	5.764.436	6.397.129	7.494.008	8.451.814	957.806	12,78%	*Consumption Loan*
Kredit Investasi	2.120.633	2.079.797	1.754.950	1.339.116	1.260.899	(78.217)	-5,84%	*Investment Loan*
Kredit Sindikasi	1.313.105	1.079.631	1.040.839	1.520.243	2.352.608	832.365	54,75%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	278.974	303.818	319.095	413.283	491.365	78.082	18,89%	*Employee Loan*
Kredit Program Pemerintah	118.346	41.401	15.456	53.611	86.756	33.145	61,82%	*Government Program Loan*
JUMLAH	**13.207.177**	**14.209.840**	**13.270.908**	**14.147.217**	**16.060.677**	**1.913.460**	**13,53%**	*TOTAL*

Penyaluran Dana
Lending

Kredit yang berhasil disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp16.060.678 juta meningkat 13,53% dari tahun 2018 sebesar Rp14.147.217 juta. Peningkatan jumlah kredit disalurkan sebagai akibat dari meningkatnya penyaluran kredit modal kerja, konsumsi, sindikasi, karyawan, dan program pemerintah. Sedangkan untuk kredit investasi mengalami pertumbuhan negatif.

Jika dilihat komposisi kredit antara produktif dan konsumtif, maka pada tahun 2019, kredit produktif sebesar Rp7.117.498 juta atau sekitar 44,32% dan kredit kosumtif sebesar Rp8.943.180 juta atau sekitar 55,68% dari total Kredit. Sedangkan pada tahun 2018 dimana komposisi kredit produktif sebesar Rp6.239.927 juta atau sekitar 44,11% dan kredit konsumtif Rp7.907.290 juta 55,89% dari total kredit, sehingga pada tahun 2019 secara keseluruhan kredit terjadi peningkatan sebesar Rp1.913.461 juta atau sekitar 13,53% (Yoy).

Loans that were successfully channeled in 2019 amounted to Rp16,060,678 million, an increase of 13.53% from 2018 of Rp14,147,217 million. The increase in the number of loans was channeled as a result of the increased distribution of working capital loans, consumption, syndication, employees, and government programs. Whereas investment loans experienced negative growth.

If we look at the composition of loans between productive and consumptive, then in 2019, productive loans would be Rp7,117,498 million or around 44.32% and consumer loans of Rp8,943,180 million or around 55.68% of total loans. Whereas in 2018 where the composition of productive loans amounted to Rp6,239,927 million or around 44.11% and consumptive loans of Rp7,907,290 million 55.89% of total loans, so that in 2019 overall loans increased by Rp1,913,461 million or around 13.53% (Yoy).

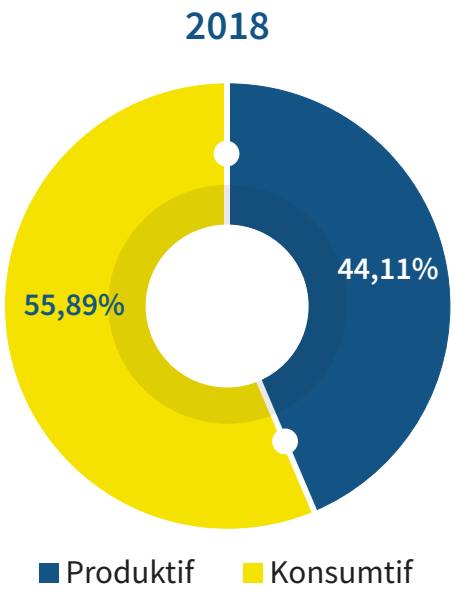

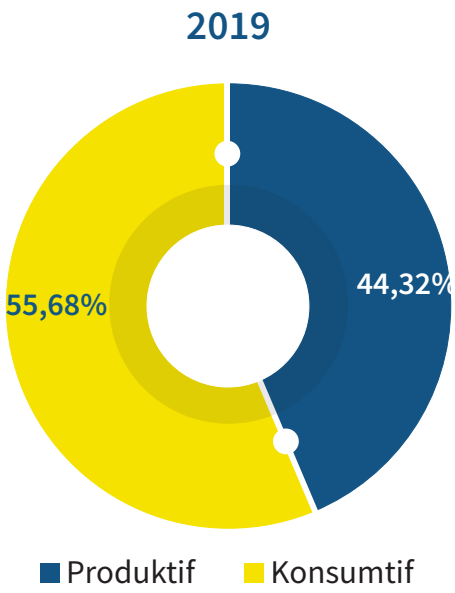

1. Kredit Modal Kerja

Untuk segmen kredit modal kerja, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit modal kerja Bank Papua mengalami pertumbuhan sebesar 2,71% yakni dari Rp3.326.957 juta ditahun 2018 menjadi Rp3.417.235 di tahun 2019. Peningkatan penyaluran kredit modal kerja sesuai dengan rencana bisnis bank guna mendorong pertumbuhan sektor produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan segmen kredit modal kerja tergambar pada tabel dibawah ini.

1. *Working Capital Loan*

For the working capital loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the working capital segment of Bank Papua has seen growth of 2.71% from Rp3.326.957 million in 2018 to Rp3.417.235 in 2019. Increased working capital Loan line in line with bank business plan to drive productive sector growth to create economic growth . The growth of the working capital Loan segment is depicted in the table below.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Kredit Modal Kerja	4.407.834	4.940.758	3.743.441	3.326.957	3.417.235	90.278	2,71%	*Working Capital Loan*

Kredit Modal Kerja

Working** Capital **Loan

Kredit modal kerja yang berhasil disalurkan Bank Papua terdiri atas beberapa skim kredit dengan perincian jumlah dana dan nasabah adalah sebagai berikut :

Working capital loans that have been successfully channeled by Bank Papua consist of several loan schemes with the details of the amount of funds and customers as follows:

Kredit Modal Kerja	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KMK Bank Papua Peduli	-		-	-	-	-	-	-
KMK Kontrakting	415.853	372	367.314	407	383.953	756	4,53%	85,75%
KMK PUM Mama-mama (Pola Grameen)	3.311	968	1.691	501	508	154	-69,96%	-69,26%
KMK Konstruksi KPR	42.907	23	59.256	25	33.086	15	-44,16%	-40,00%
KMK R/C Perdagangan	1.331.664	551	901.543	480	739.819	368	-17,94%	-23,33%
KMK Dana Sendiri	556.808	856	542.697	607	432.074	403	-20,38%	-33,61%
KMK Dana Sendiri PRK	10.843	5	1.058	5	996	1	-5,86%	-80,00%
Kredit Usaha Tani (KUT) / KKP	-	-	-	-	-	-	-	-
KMK Dana Sendiri (Flat)	-	-	-	-	-	-	-	-
KMK Pemerintah Daerah	704.350	7	969.351	8	1.508.984	15	55,67%	87,50%
KMK Peduli Papua (dijamin Pemda Prop.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Mikro LPKP	15	4	8	2	-	-	-	-
KMK Konstruksi dengan Penjaminan	440.092	193	282.007	240	175.619	135	-37,73%	-43,75%
KMK KUMK SUP-005	2.604	32	1.839	29	534	12	-70,96%	-58,62%
KMK R/C Perdagangan SUP-005	1.124	4	808	3	771	3	-4,58%	0,00%

Kredit Modal Kerja	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KMK Kontruksi SUP-005	649	2	149	1	-	-	-	-
KMK Peduli Papua (dijamin Pemda Kota/Kab)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Usaha Mikro (Umum)	6.431	910	4.377	713	2.037	344	-53,46%	-51,75%
KMK-Mikro > 15 Jt s/d 50 Jt	27.705	1.313	20.157	966	13.891	690	-31,09%	-28,57%
KMK-Kecil > 50 Jt s/d 500 Jt	194.184	1.843	161.801	1.577	123.512	1.162	-23,66%	-26,32%
PUM Mama - Mama Papua	132	62	124	48	55	42	-55,65%	-12,50%
KMK Mikro Papua Sejahtera	4.767	298	3.257	196	1.398	89	-57,08%	-54,59%
Jumlah	**3.743.441**	**7.443**	**3.326.957**	**5.808**	**3.417.235**	**4.189**	**2,71%**	**-27,88%**

Berbagai upaya telah dilakukan Bank Papua untuk meningkatkan ekspansi kredit di tahun 2019, meskipun letak geografis Provinsi Papua dan Papua Barat yang penuh tantangan, dimana transportasi masih banyak yang menggunakan pesawat terbang menyebabkan supervisi kredit menjadi kurang efektif karena biaya yang terlalu tinggi.

Various efforts have been made by Bank Papua to increase loan expansion by 2019, despite the challenging geography of the Province of Papua and West Papua, where more and more airports are using airports, making loan supervision less cost effective.

Meskipun demikian, Bank Papua tetap berupaya mengembangkan jaringan kantor diantaranya membuka beberapa kantor di sentra-sentra ekonomi, baik di wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga dapat menyalurkan kredit modal kerja pada sektor UMKM sebagai salah satu misi bank dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

However, the Bank Papua remains committed to expanding its network of offices including opening several offices in economic centers, both in Papua and West Papua, to provide working capital loan to the SMEM sector as one of the bank's mission in order to drive regional economic growth.

2. Kredit Konsumsi

Untuk segmen kredit konsumsi, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit seperti kredit Wira Bhakti, Griya Bhakti, Abdi Bhakti, Purna Bhakti, Kendaraan, Multiguna, dan lain-lain. Pada segmen kredit konsumsi, Bank Papua mengalami pertumbuhan sebesar 12,78% dari Rp7.494.008 juta di tahun 2018 menjadi Rp8.451.814 juta di tahun 2019, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

2. Consumption Loan

For the consumption loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes such as Hero Bhakti, Griya Bhakti, Abdi Bhakti, Purna Bhakti, Vehicle, Multipurpose and more. In the consumption loan segment, Bank Papua has seen growth of 12.78% from Rp7.494.008 million in 2018 to Rp8.451.814 million in 2019, as illustrated in the table below.

Pertumbuhan Kredit Konsumsi Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Bank Papua Consumer Loan in 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Kredit Konsumsi	4.968.285	5.764.436	6.397.129	7.494.008	8.451.814	957.806	12,78%	*Consumption Loan*

Kredit Konsumsi
Consumption Loan

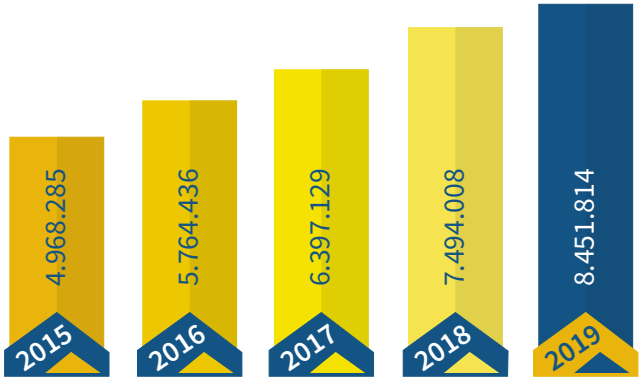

Pertumbuhan positif pada segmen kredit ini dikarenakan adanya kebijakan strategis manajemen untuk menggarap segmen konsumsi yang telah menjadi *core* bisnis seluruh Bank Pembangunan Daerah. Disamping itu, pengelolaan kas daerah serta gaji pegawai yang telah dikelola bank cukup lama, menjadikan segmen ini lebih prospek terhindar dari kredit macet.

The positive growth in the loan segment was due to the strategic management policy of working on the consumption segment that has been the core business of the Regional Development Bank. In addition, the management of regional cash as well as the salaries of bank-managed employees have made the segment more prospective to avoid loss loan.

Hal lain yang juga menunjang pertumbuhan segmen kredit konsumtif adalah program penyaluran KPR Sejahtera-FLPP yang dilaksanakan oleh Bank Papua. Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mendukung program pemerintah untuk menerbitkan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bank Papua terus meningkatkan perannya secara aktif dan nyata dalam mendukung program penyaluran KPR Sejahtera-FLPP.

Another factor that has also contributed to the growth of the consumer loan segment is the Mortgage FLPP Sejahtera-loan program implemented by Bank Papua. In order to improve its services and support government programs to issue one million low-income housing (MBR) homes, as promised by the President, the Bank Papua continues to actively and actively play a role in supporting the Mortgage FLPP Sejahtera-loan program.

Sektor usaha lainnya merupakan kredit konsumtif yang diberikan dalam bentuk Kredit Griya Bhakti, Kredit Purna Bhakti, Kredit Wira Bhakti serta kredit yang tidak dapat diklasifikasikan pada sektor-sektor di atas.

- Kredit Griya Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah.
- Kredit Abdi Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para karyawan Bank Papua berpenghasilan tetap untuk keperluan biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.
- Kredit Wira Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumtif seperti biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

The other business sectors are consumer loan provided in the form of Griya Bhakti loan, Purna Bhakti loan, Wira Bhakti Loan as well as loan which cannot be classified in the above sectors.

- *Griya Bhakti loan is a loan facility provided to State Revenue Officers for housing and renovation needs.*
- *Abdi Bhakti loan is a loan facility provided to Bank Papua employees with fixed income for school expenses, household appliances purchases and etc.*
- *Wira Bhakti loan is a loan facility provided to State Employees with fixed income for consumer purposes such as school fees, household appliances purchases and etc.*

Kredit Konsumsi	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KKs Griya Bhakti (KPR/T)	433.117	1.672	356.972	1.456	331.676	1.385	-7,09%	-4,88%
KKs Wira Bhakti (Peg. Extern)	4.342.186	51.021	5.456.938	51.570	6.582.396	52.693	20,62%	2,18%
KKs Purna Bhakti (Pensiunan)	53.928	1.595	35.027	1.048	39.211	1.029	11,95%	-1,81%
KKs Multi Guna (Peg. Extern)	2.591	39	1.340	31	1.393	16	3,96%	-48,39%
KKs Aset Buy Bank Lampung	136	4	79	3	45	2	-43,04%	-33,33%
KKr Kendaraan Flat	5.043	75	4.294	59	3.491	49	-18,70%	-16,95%
KKs Aset Buy Bank Sumsel Babel	2.408	60	1.663	42	1.006	30	-39,51%	-28,57%
KKs PUMP-KB Jamsostek	105	6	99	6	93	6	-6,06%	0,00%
KKs KPR Sejahtera	980.835	5.952	1.301.611	7.957	1.359.684	8.651	4,46%	8,72%
KKs Pegawai Siaga	8.100	461	4.427	440	2.261	311	-48,93%	-29,32%
KKs PT.Freeport dan Privatisasinya	568.680	3.481	331.559	2.279	130.559	1.259	-60,62%	-44,76%
Jumlah	**6.397.129**	**64.366**	**7.494.008**	**64.891**	**8.451.814**	**65.431**	**12,78%**	**0,83%**

3. Kredit Investasi

Untuk segmen kredit investasi, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit investasi, Bank Papua mengalami penurunan -5,84% sebesar Rp1.339.116 juta pada tahun 2018 menjadi Rp1.260.899 juta pada tahun 2019, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

3. *Investment Loan*

For the investment loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the investment loan segment, Bank Papua saw a decrease of -5.84% from Rp1.339.116 million in 2018 to Rp1.260.899 million in 2019, as shown in the table below:

Pertumbuhan Investasi Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Bank Papua Investment 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Kredit Investasi	2.120.633	2.079.797	1.754.950	1.339.116	1.260.899	(78.217)	-5,84%	*Investment Loan*

Kredit Investasi
Investment Loan

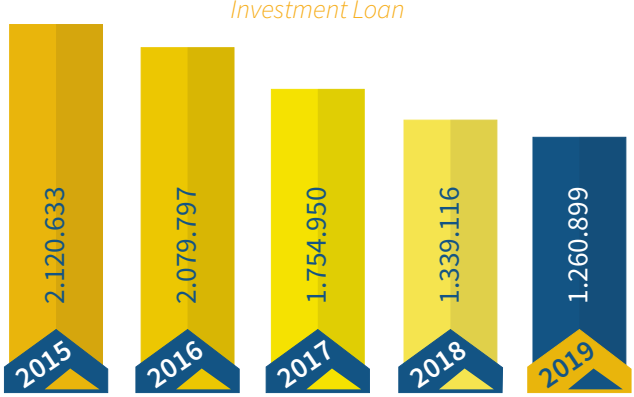

Adapun jumlah nasabah untuk kredit investasi Bank Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

As to the amount of the customer for the Bank Papua's investment loan can be seen in the table below:

Kredit Investasi	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KI Dana Sendiri	1.613.166	547	1.229.315	450	1.186.026	351	-3,52%	-22,00%
KI Dana Sendiri (Flat)	-	-	-	-	-	-	-	-
KI Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
KI Papua Peduli (dijamin Pemda)	-	-	-	-	-	-	-	-
KI Export	-	-	-	-	-	-	-	-
KI KUMK SUP-005	4.440	41	2.551	25	139	15	-94,55%	-40,00%
KI-Mikro > 15 Jt s/d 50 Jt	991	38	683	33	471	24	-31,04%	-27,27%
KI-Kecil > 50 Jt s/d 500 Jt	55.196	404	46.389	364	36.270	278	-21,81%	-23,63%
Kredit Investasi Kendaraan Usaha	79.906	455	59.224	365	36.174	259	-38,92%	-29,04%
KI Mikro Papua Sejahtera	1.251	62	954	47	570	27	-40,25%	-42,55%
KI Peduli Papua (dijamin Pemda Kota/Kab)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1.754.950**	**1.547**	**1.339.116**	**1.284**	**1.260.899**	**954**	**-5,84%**	**-25,70%**

Pertumbuhan negatif pada segmen kredit investasi Bank Papua dikarenakan kebijakan manajemen untuk membatasi penyaluran kredit investasi disektor perusahaan swasta besar akibat dari tingginya NPL dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk bisnis skala industri dan pabrikan.

Negative growth in the Bank Papua's investment Loan segment was due to management's policy of restricting the distribution of large private enterprise disbursement loan lines as a result of the high NPLs and lack of competent Human Resources for industrial-scale businesses and manufacturers.

4. Kredit Sindikasi

Untuk segmen kredit sindikasi, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit sindikasi, Bank Papua mengalami pertumbuhan sebesar 54,75% sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

4. Syndication Loan

For the syndication loan segment, Bank Papua has several products consisting of multiple loan schemes. In the syndication loan segment, Bank Papua saw a growth of 54.75% as illustrated in the table below.

Pertumbuhan Kredit Sindikasi Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Growth of Bank Papua Syndicate Loan in 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						Nominal	%	
Kredit Sindikasi	1.313.105	1.079.631	1.040.839	1.520.243	2.352.608	832.365	54,75%	*Syndication Loan*

Kredit Sindikasi

Adapun jumlah nasabah untuk kredit sindikasi Bank Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

As to the amount of the customer for the Bank Papua's syndication loan can be seen in the table below:

Kredit Sindikasi	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KS Kontrakting	-	-	-	-	-	-	-	-
KS Investasi	1.008.500	12	1.500.430	16	2.342.357	22	56,11%	37,50%
KS Modal Kerja	32.339	2	19.813	1	8.255	1	-58,34%	0,00%
KS KMK RC	-	-	-	-	1.996	1	-	-
Jumlah	**1.040.839**	**14**	**1.520.243**	**17**	**2.352.608**	**24**	**54,75%**	**41,18%**

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndication loan is a loan given to a debtor under a joint financing agreement with other banks.

Keikutsertaan Bank Papua dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.352.607.970.445 dan Rp1.520.243.174.951. Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain adalah sebagai berikut :

Bank Papua's participation in syndication loans with other banks during the year ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp2.352.607.970.445 and Rp1.520.243.174.951. The Bank's participation in syndication loans with other banks is as follows:

	2019	2018	
Porsi Partisipasi	1.86% - 64.81%	1.87% - 64.81%	*Portion of Participation*

5. Kredit Karyawan

Untuk segmen kredit karyawan, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit karyawan, Bank Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 18,89% dari Rp413.283 juta ditahun 2018 menjadi Rp491.365 juta di tahun 2020, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

5. Employee Loan

For the employee loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the loan line of employees, Bank Papua saw a positive growth of 18.89% from Rp413.283 million in 2018 to Rp491.365 million in 2020, as shown in the table below.

Pertumbuhan Kredit Karyawan Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Kredit Karyawan	278.974	303.818	319.095	413.283	491.365	78.082	18,89%	*Employee Loan*

Kredit Karyawan

Employee Loan

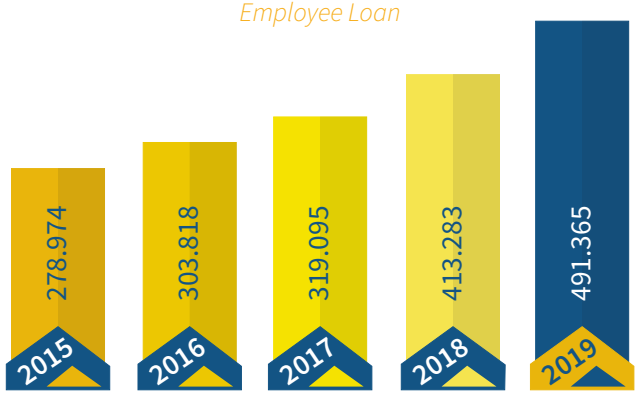

Adapun jumlah nasabah untuk kredit karyawan Bank Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

As for the amount of the customer for Bank Papua employees loan can be seen in the table below:

Kredit Karyawan	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KKr Griya Bhakti (KPR/T)	10.860	58	11.827	66	12.646	72	6,92%	9,09%
KKr Abdi Bhakti (Peg. Internal)	302.762	1.783	394.687	2.187	470.725	2.200	19,27%	0,59%
KKr Kendaraan	1.850	22	2.564	35	3.372	50	31,51%	42,86%
KKr Purna Bhakti Intern	3.623	52	4.204	59	4.622	59	9,94%	0,00%
Jumlah	**319.095**	**1.915**	**413.283**	**2.347**	**491.365**	**2.381**	**18,89%**	**1,45%**

Pertumbuhan positif pada segmen kredit karyawan dikarenakan adanya kebijakan strategis manajemen untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi kesejahteraan karyawan melalui segmen kredit karyawan yang didominasi oleh penyaluran kredit bagi karyawan Bank Papua.

Positive growth in the employee loan segment is due to the strategic management policy to provide convenient facilities for employee well-being through the employee loan segment dominated by the loan distribution for Bank Papua employees.

6. Kredit Program Pemerintah

Untuk segmen kredit program pemerintah, Bank Papua memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit diantaranya kredit kepada Koperasi dan anggotanya, kredit pengusaha kecil dan mikro, kredit ketahanan pangan, dan lainnya. Pada segmen kredit program pemerintah, Bank Papua mengalami pertumbuhan sebesar 61,82% dari total Rp53.611 juta juta ditahun 2018 menjadi Rp86.756 juta di tahun 2019, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

6. Government Program Loan

For the loan program segment of government programs, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes including loan to Cooperatives and its members, micro and micro business loan, food security loan, and more. In the loan segment of the government program, Bank Papua is seeing a growth of 61.82% from a total of Rp533.611 million in 2018 to Rp86.756 million in 2019, as illustrated in the table below.

Pertumbuhan Kredit Program Pemerintah Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)

Growth of Bank Papua Government Program Loan in 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Kredit Program Pemerintah	118.346	41.401	15.456	53.611	86.756	33.145	61,82%	*Government Program Loan*

Kredit Program Pemerintah

Government Program Loan

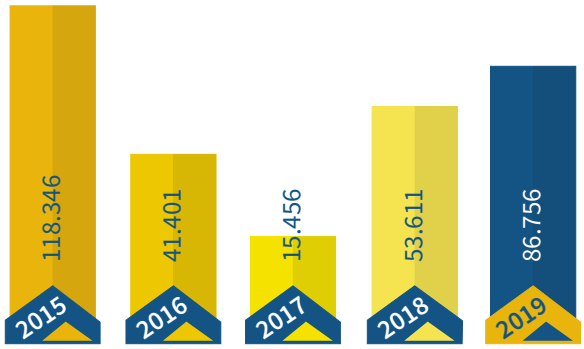

Kredit program pemerintah terdiri dari, kredit kepada Koperasi dan anggotanya, kredit pengusaha kecil dan mikro, kredit ketahanan pangan dan kredit program pemerintah PHBK. Saldo pinjaman yang diberikan dari program yang disalurkan dengan sistem chanelling dapat dirinci sebagai berikut:

Government program loan consists of, loan to the Cooperative and its members, small and micro business loan, food durability loan and government program loan. The loan balance provided from the program provided with the chanelling system can be detailed as follows:

Kredit Program Pemerintah	2017		2018		2019		Growth	
	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Dana (Rp.Jt)	Debitur	Nominal	Debitur
KPP Koperasi dan Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-
KPP Pengusaha Kecil (Mikro)	-	-	-	-	-	-	-	-
KPP KKP-E Pertanian	594	24	148	10	12	1	-91,89%	-90,00%
KPP PHBK	-	-	-	-	-	-	-	-
KPP KMK KUR	1.687	40	146	5	99	4	-32,19%	-20,00%
KPP KI KUR	2.242	54	309	18	-	-	-100,00%	-100,00%
KPP KMK KUR R/C Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-
KMK KUR Mikro	570	26	8.513	551	13.390	1.031	57,29%	87,11%
KI KUR Mikro	-	-	71	4	196	13	176,06%	225,00%
KMK KUR Ritel/Kecil	749	-	35.873	409	58.709	758	63,66%	85,33%
KUR MIKRO MODAL KERJA	6	5	-	-	-	-	-	-
KI KUR Ritel/Kecil	-	-	5.920	30	13.758	72	132,40%	140,00%
KPP KKP-E Peternakan	8.851	162	2.386	93	532	44	-77,70%	-52,69%
KPP KKP-E Perikanan	756	30	246	9	60	4	-75,61%	-55,56%
Jumlah	**15.456**	**341**	**53.611**	**1.129**	**86.756**	**1.927**	**61,82%**	**70,68%**

Tingkat Suku Bunga

Guna memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing produk, maka Bank Papua memberikan tingkat suku bunga untuk beberapa produk kredit yang berlaku pada tahun 2019 sebagaimana dibawah ini :

Interest Rate

To facilitate and improve the competitiveness of the products, the Bank Papua provides interest rates for several credit products effective in 2019 as follows:

Bunga Skim Kredit Bank Papua Tahun 2019
Bank Papua Loan interest in 2019

No.	Skim Kredit	Suku Bunga	*Loan Scheme*
1	KMK Kontrakting	13,00%	*Contracting WCL*
2	KMK PUM Mama-mama (Pola Grameen)	13,75%	*Mama-mama PUM (Grameen Pattern) WCL*
3	KMK Konstruksi KPR	13,00%	*KPR Construction WCL*
4	KMK R/C Perdagangan	13,50%	*Trading (RC) WCL*
5	KMK Dana Sendiri	13,25%	*Own Fund WCL*
6	KMK Dana Sendiri PRK	13,25%	*Own Fund PRK WCL*
7	KMK Pemerintah Daerah	12,75%	*Local Government WCL*
8	Kredit Mikro LPKP	10,00%	*LPKP MIcro Loan*
9	KMK Konstruksi dengan Penjaminan	13,00%	*Construction WCL*
10	KMK KUMK SUP-005	11,67%	*KSME SUP-005 WCL*
11	KMK R/C Perdagangan SUP-005	11,67%	*R / C Trade SUP-005 WCL*
12	KMK Konstruksi SUP-005	11,67%	*Construction SUP-005 WCL*
13	Pinjaman Usaha Mikro (Umum)	11,25%	*Micro (General) Business Loans*
14	KMK-Mikro > 15 Jt s/d 50 Jt	13,25%	*Micro WCL > 15 up to 50 million*
15	KMK-Kecil > 50 Jt s/d 500 Jt	13,50%	*Small WCL > Rp50 up to 500 million*
16	PUM Mama - Mama Papua	9,25%	*Mama-Mama Papua PUM*
17	KMK Mikro Papua Sejahtera	14,75%	*Papua Prosperous Loan*
18	KI Dana Sendiri	13,75%	*Self Fund IL*
19	KI KUMK SUP-005	11,67%	*KSME SUP-005 IL*
20	KI-Mikro > 15 Jt s/d 50 Jt	13,25%	*Micro IL > 15 to 50 million*
21	KI-Kecil > 50 Jt s/d 500 Jt	13,50%	*Small IL > Rp50 up to 500 million*
22	Kredit Investasi Kendaraan Usaha	7,25%	*Business Vehicle Investment Loan*
23	KI Mikro Papua Sejahtera	14,75%	*Papua Prosperous IL*
24	KKs Griya Bhakti (KPR/T)	9,00%	*Griya Bhakti (KPR / T) CLs*
25	KKs Wira Bhakti (Peg. Extern)	9,00%	*Wira Bhakti CLs*
26	KKs Purna Bhakti (Pensiunan)	7,00%	*Purna Bhakti (Retired) CLs*
27	KKs Multi Guna (Peg. Extern)	9,00%	*Multi-purpose CLs*
28	KKs Aset Buy Bank Lampung	9,90%	*Asset Buy Bank Lampung CLs*
29	KKr Kendaraan Flat	7,25%	*Flat Vehicle CLs*
30	KKs Aset Buy Bank Sumsel Babel	9,90%	*Asset Buy Bank Sumsel Babel CLs*
31	KKs PUMP-KB Jamsostek	6,00%	*Jamsostek PUMP-KB CLs*
32	KKs KPR Sejahtera	5,00%	*KPR Sejahtera CLs*
33	KKs Pegawai Siaga	11,63%	*Siaga Employee CLs*
34	KKs PT.Freeport dan Privatisasinya	11,76%	*PT. Freeport and its Pirivate CLs*
35	KS Investasi	13,75%	*Investment SL*
36	KS Modal Kerja	13,25%	*Working Capital SL*
37	KKr Griya Bhakti (KPR/T)	9,00%	*Griya Bhakti (KPR / T) EL*
38	KKr Abdi Bhakti (Peg. Internal)	3,50%	*Abdi Bhakti EL*
39	KKr Kendaraan	7,25%	*Vehicle Loan EL*
40	KKr Purna Bhakti Internal	7,00%	*Internal Purna Bhakti EL*
41	KPP KKP-E Pertanian	5,75%	*KKP-E Agriculture GPL*
42	KPP KMK KUR	7,00%	*KMK KUR GPL*
43	KPP KI KUR	7,00%	*KI KUR GPL*
44	KMK KUR Mikro	7,00%	*Micro KUR WCL*
45	KI KUR Mikro	7,00%	*KUR Micro IL*
46	KMK KUR Ritel	7,00%	*KUR Retail WCL*
47	KUR Mikro Modal Kerja	7,00%	*KUR Micro Work CapitaL*
48	KI KUR Ritel	7,00%	*KI KUR Retail*
49	KPP KKP-E Peternakan	5,75%	*E Livestock GPL*
50	KPP KKP-E Perikanan	5,25%	*E Fisheries GPL*

Jasa & Layanan

1. Fee & Komisi

Jasa dan Layanan dalam negeri Bank Papua terdiri dari provisi dan komisi yang diperoleh dari referensi bank, administrasi dan sewa SDB, VISA card, Indosat, PDAM, ATM Bersama, ATM Prima dan lain-lain.

Fee jasa dan layanan transaksi dalam negeri pada tahun 2019 sebesar 24.045 juta meningkat 3,37% dibandingkan tahun 2018.

Services

1. Fees & Commissions

Bank Papua's domestic services comprise provisions and commissions derived from bank references, SDB bank administration and rentals, VISA cards, Indosat, PDAM, Joint ATMs, Prima ATMs and more.

Domestic services and transaction fees in 2019 for 24.045 million increased by 3.37% compared to 2018.

(dalam Juta/in million) Rp

No	Nama Produk	*Fee Based Income*			Growth	
		2017	2018	2019	Nominal	%
1	Provisi Transfer	63	20	14	(6)	-29,29%
2	Prov.Referensi Bank	2.119	1.790	1.507	(283)	-15,83%
3	Prov.Jaminan Bank	3.302	2.832	3.613	781	27,58%
4	Prov.Adm.Giro,Tab.Dpst	59.032	47.533	45.292	(2.241)	-4,71%
5	Provisi Kliring	1.207	1.342	1.592	250	18,67%
6	Provisi Adm. S.D.B	40	42	42	(0)	-0,12%
7	Provisi Administrasi Lainnya	6.485	9.911	11.748	1.837	18,54%
8	Komisi Visa *Card*	1	1	1	(1)	-62,45%
9	Komisi Asuransi	5.202	10.072	11.076	1.004	9,97%
10	Komisi Indosat	45	5	3	(2)	-35,37%
11	Komisi PT.Askrida	394	1.023	1.698	676	66,10%
12	Komisi PDAM	8	6	8	2	23,20%
13	Komisi ATM Bersama	16.057	17.303	17.993	691	3,99%
14	Komisi ATM Prima	1.221	470	1.104	633	134,61%
15	Komisi Fasilitas Kredit Sindikasi	-	2.707	33	(2.674)	-98,78%
16	Pendapatan SMS *Mobile Banking*	144	816	363	(453)	-55,52%
17	Komisi PLN	231	343	433	89	26,02%
18	Komisi Bank Persepsi	999	1.486	1.132	(354)	-23,81%
19	Komisi PDAM	0	0	1	0	45,60%
20	Komisi Garuda	0	0	0	(0)	-33,33%
21	Komisi *Multibiller Finnet*	10	20	32	11	54,68%
22	Pendapatan Administrasi Telkomsel	1.397	1.729	1.695	(35)	-2,00%
23	Komisi Transaksi Pembelanjaan Ritel Kartu Kredit Co- Brand	3	1	0	(1)	-70,65%
24	Komisi Iuran Keanggotaan Kartu Kredit Co- Brand	0	0	0	(0)	-30,99%
25	Komisi Pembayaran Tagihan Kartu Kredit	0	2	1	(0)	-16,86%
26	Komisi GPN ATM Prima	-	538	640	101	18,84%
27	Komisi GPN ATM Bersama	-	41	73	32	79,95%
28	Komisi XL	-	0	1	0	168,27%
29	Komisi Lainnya	97	192	459	266	138,78%
TOTAL		**98.057**	**100.226**	**100.552**	**326**	**0,326%**

Untuk menunjang peningkatan *Fee Based Income* maka kerjasama aliansi *marketing* dengan *strategic patner* dan pemasaran kartu ATM/Debit Bank Papua terus ditingkatkan.

To support the increase in Fee Based Income, the marketing alliance collaboration with strategic partners and Bank Papua ATM / Debit card marketing continues to be improved.

Realisasi Pemasaran Kartu ATM/Debit Bank Papua

Realization of Bank Papua ATM / Debit Card Marketing

Kartu ATM/Debit yang diterbitkan Bank Papua sebagai instrumen keuangan non tunai yang terdiri dari kartu ATM/ Debit konvensional. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank Papua, Divisi Pengelolaan Dana Jasa & *E-Banking* melalui Departemen *E-Banking* berusaha seoptimal mungkin untuk memproduksi dan mendistribusikan semua permintaan Kartu ATM/Debit dari Kantor Cabang dengan tepat waktu.

ATM / Debit cards issued by Bank Papua as non-cash financial instruments consisting of conventional ATM / Debit cards. To support the growth of Bank Papua's business, the Service Fund Management & E-Banking Division through the E-Banking Department strives to produce and distribute all requests for ATM / Debit Cards in a timely manner.

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah kartu ATM/Debit yang telah diterbitkan Bank Papua tercatat sebesar 484.187 kartu dan mengalami kenaikan sebesar 4,38% atau sebanyak 20,311 kartu jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 463,876 kartu.

Until the end of 2019, the number of ATM / Debit cards issued by Bank Papua was recorded at 484,187 cards and an increase of 4.38% or as many as 20,311 cards when compared to 2018 which amounted to 463,876 cards.

No	Keterangan	Tahun				*Information*
		2018	Yoy	2019	Yoy	
1	Jumlah Nasabah Tabungan	1.275.382	9,65%	1.378.550	8,09%	*Number of Savings Customers*
2	Jumlah Pemegang Kartu ATM/Debit	463.876	11,11%	484.247	4,39%	*Number of ATM / Debit Card Holders*

Pada tahun 2019, Bank Papua secara bertahap telah melakukan proses *cleansing* data kartu-kartu ATM/Debit lama. Dimana *cleansing* data tersebut bertujuan untuk :

1. Menjaga integritas data antara *core banking system* dengan aplikasi CMS, yang berpengaruh terhadap akurasi pelaporan jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
2. Menghindari risiko atas penyalahgunaan kartu-kartu ATM/Debit Bank Papua yang masih memiliki status aktif, tetapi sudah tidak memiliki status rekening aktif/rekening sudah tutup.

In 2019, the Bank Papua will gradually carry out the process of cleansing data for old ATM / Debit cards. Where the cleansing of data aims to:

1. *Maintaining data integrity between the core banking system and the CMS application, which affects the accuracy of reporting the number of Card-Based Payment Instruments (APMK).*
2. *Avoid the risk of misuse of Bank Papua ATM / Debit cards that still have active status, but no longer have active account status / accounts have been closed.*

Bank Papua telah mempersembahkan berbagai pilihan Kartu ATM/Debit Bank Papua dengan desain yang terinspirasi dari ukiran kayu tradisional khas Papua, dipersembahkan untuk kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah.

Segmentasi Bank Papua Debit Card adalah fitur tambahan bagi produk tabungan dan giro perorangan yang dirancang guna memberikan suatu bentuk layanan khusus bagi nasabah dengan maksud mengadakan suatu diversifikasi terhadap layanan Kartu ATM/Debit sesuai dengan segmentasi nasabah.

Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & E-Banking melalui kantor-kantor cabang Bank Papua yang tersebar luas di tanah Papua, telah memasarkan berbagai segmentasi Bank Papua Card dengan rincian sebagai berikut :

Bank Papua has offered a wide selection of Bank Papua ATM / Debit Cards with designs inspired by traditional Papuan wood carvings, presented for the convenience and security of customer transactions.

Bank Papua Debit Card Segmentation is an additional feature for individual savings and checking accounts that is designed to provide a special form of service for customers with the intention of diversifying ATM / Debit Card services according to customer segmentation.

The Funds, Services & E-Banking Division through the Bank Papua branch offices that are widespread in Papua, has marketed various Bank Papua Card segments with the following details:

No	Keterangan	Tahun				*Description*
		2017	2018	2019	Yoy	
1	*Blue Debit Card*	22.319	28.382	30.240	6,55%	*Blue Debit Card*
2	*Gold Debit Card*	13.545	19.668	22.646	15,14%	*Gold Debit Card*
3	*Silver Debit Card*	295.698	333.197	346.946	4,13%	*Silver Debit Card*
4	*Platinum Debit Card*	2.282	2.225	2.118	-4,815	*Platinum Debit Card*
5	*Platinum Crystal External*	1.117	1.248	1.356	8,65%	*Platinum Crystal External*
6	Kartu Tabunganku	37.351	47.008	57.124	21,52%	*Tabunganku Card*
7	Kartu Tabungan Mahasiswa	2.025	2.081	1.840	-11,58%	*Student Saving Card*
8	KPE/Co. Branding Lainnya	40.488	27.059	18.903	-30,14%	*Other KPE/Co. Branding*
9	*Platinum Crystal Internal*	83	163	180	10,43%	*Platinum Crystal Internal*
10	Kartu Persipura	2.595	2.845	2.898	1,72%	*Persipura Card*
	Total	**417.503**	**463.876**	**484.247**	**4,39%**	*Total*

Presentase *Cardholder* Per segmentasi Kartu ATM/Debit Bank Papua

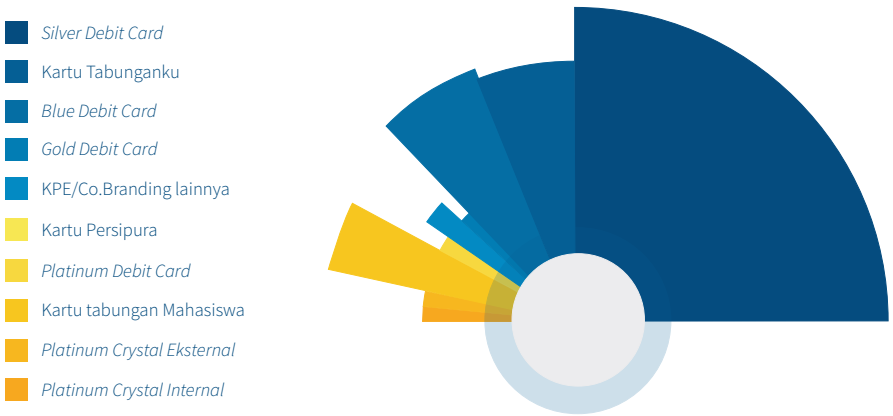

Perkembangan Transaksi Kartu ATM

Sebagai salah satu bagian dari strategi dalam meningkatkan kemampuan transaksi perbankan, Bank Papua secara berkesinambungan meningkatkan layanan *e-Banking* melalui *New* Debit *Card* Bank Papua. Sampai dengan tahun 2019, transaksi perbankan melalui kartu ATM/Debit Bank Papua khusus untuk transaksi penarikan tunai tercatat sebesar Rp8.601 miliar atau naik sebesar 13.49% dibanding tahun 2018. Sementara transaksi transfer interbank dan transfer antarbank tercatat masing-masing sebesar Rp2.142 miliar dan Rp5.371 miliar atau naik sebesar 9,40% dan 15,50% dibanding tahun 2018 dan untuk transaksi belanja dan transaksi *payment* tercatat masing-masing sebesar Rp282 miliar atau naik sebesar 36.35%.

Development of ATM Card Transactions

As one part of the strategy to improve the ability of banking transactions, Bank Papua continuously improves e-banking services through Bank Papua New Debit Card. Up to 2019, banking transactions through Bank Papua ATM / Debit cards specifically for cash withdrawals transactions amounted to Rp8,601 billion, an increase of 13.49% compared to 2018. While interbank transfers and interbank transfers were recorded at Rp2,142 billion respectively and Rp5,371 billion or an increase of 9.40% and 15.50% compared to 2018 and for shopping transactions and payment transactions recorded at Rp282 billion or an increase of 36.35%.

(dalam miliar/in billion) Rp

No	Keterangan	Tahun				*Description*
		2017	2018	2019	Yoy	
1	Transaksi Tunai	7.119	7.579	8.601	13,48%	*Cash Transactions*
2	Transaksi Belanja & *Payment*	192	207	282	36,23%	*Shopping & Payment Transactions*
3	Transfer Interbank (Pemindah bukuan)	1.946	1.958	2.142	9,40%	*Interbank Transfer (Transfer*
4	Transfer Antar Bank	4.192	4.651	5.372	15,50%	*Interbank transfer*

Presentase Nilai Transaksi Melalui Kartu ATM/Debit Bank Papua

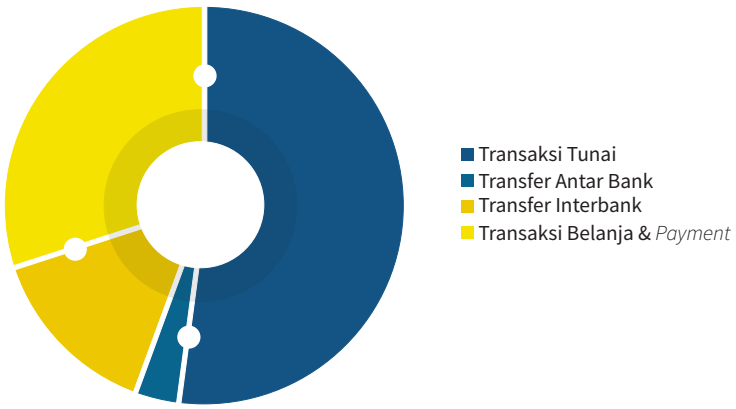

Varian Produk Kartu ATM

1. Kartu *Debit Platinum Crystal External* dan kartu *Debit VISA Platinum Crystal External*
   Dirancang khusus bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Universitas, Rumah Sakit, maupun nasabah serta Kolega Bisnis Bank Papua yang Utama. Memberikan limit penarikan dan pembelanjaan yang lebih tinggi dan beberapa layanan tambahan seperti fasilitas layanan airport *executive lounge* pada beberapa bandar udara domestik di Indonesia.
2. Kartu *Debit Platinum Crystal Internal* dan kartu *Debit VISA Platinum Crystal Internal*
   Diperuntukan khusus untuk lingkungan Bank Papua, diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang, serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan keputusan Direksi. Memberikan limit penarikan dan pembelanjaan yang lebih tinggi dan beberapa layanan tambahan seperti fasilitas layanan airport *executive lounge* pada beberapa bandar udara domestik di Indonesia.
3. Kartu *Debit Platinum* dan Kartu *Debit VISA Platinum*
   Membuka jalan bagi nasabah Bank Papua untuk menikmati berbagai kemudahan dan pengalaman gaya hidup yang memukau. Ditambah lagi limit penarikan dan pembelanjaan yang memanjakan nasabah Bank Papua, layanan *executive lounge* dan serangkaian keuntungan menarik lainnya.
4. Kartu *Debit Gold* dan Kartu *Debit VISA Gold*
   Nikmati kenyamanan lebih dalam hidup dengan limit pembelanjaan yang lebih tinggi dan layanan dana tunai saat nasabah Bank Papua bepergian.
5. Kartu *Debit Silver* dan Kartu *Debit VISA Silver*
   Baik digunakan untuk berlibur, berbelanja ataupun bersantap bersama keluarga ataupun rekan bisnis, diterima di jutaan lokasi di seluruh dunia, sehingga nasabah Bank Papua dapat menggunakannya untuk hampir semua transaksi yang nasabah inginkan.
6. Kartu *Debit Blue*
   Dengan limit transaksi yang sedikit lebih rendah, sangat cocok digunakan untuk nasabah yang ingin membatasi jumlah transaksi hariannya.
7. Kartu Debit TabunganKu
   Kartu TabunganKu diterbitkan kepada nasabah yang memiliki rekening tabunganku. Dimana rekening ini dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Rekening TabunganKu hadir untuk

ATM Card Product Variants

1. *Platinum Crystal External Debit Card and Platinum Crystal External VISA Debit card*
   Specially designed for Local Government Officials, Central Government, Universities, Hospitals, and customers as well as the Main Business Bank Papua Colleagues. Providing higher withdrawal and spending limits and some additional services such as airport executive lounge service facilities at several domestic airports in Indonesia.

2. *Platinum Crystal Internal Debit Card and Platinum Crystal Internal VISA Debit card*
   Specifically intended for the environment of Bank Papua, given to the Board of Commissioners, Board of Director, Division Heads, Branch Manager, and other officials / staff in accordance with the Board of Director' decision. Providing higher withdrawal and spending limits and some additional services such as airport executive lounge service facilities at several domestic airports in Indonesia.

3. *Platinum Debit Card and VISA Platinum Debit Card*
   Paving the way for Bank Papua customers to enjoy a variety of conveniences and a fascinating lifestyle experience. Add to this the withdrawal and spending limits that spoil Bank Papua customers, executive lounge services and a host of other attractive benefits.

4. *Gold Debit Card and VISA Gold Debit Card*
   Enjoy more convenience in life with higher spending limits and cash services when Bank Papua customers travel.

5. *Silver Debit Card and VISA Silver Debit Card*
   Whether used for a vacation, shopping or dining with family or business partners, it is accepted in millions of locations around the world, so Bank Papua customers can use it for almost all transactions that customers want.

6. *Blue Debit Card*
   With a slightly lower transaction limit, it is suitable for customers who want to limit the number of daily transactions.

7. *TabunganKu Debit Card*
   TabunganKu Card is issued to customers who have TabunganKu account. Where this account is devoted to individuals with easy and lightweight requirements.

menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

8. Kartu Debit Pensiun
   Kartu Pensiun *Card* dirancang khusus untuk nasabah e-Dapem di Bank Papua sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kartu Debit Tabungan Mahasiswa
   Kartu Tabungan Mahasiswa diberikan kepada perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Papua. Sehingga Kartu Tabungan Mahasiswa dapat berfungsi sebagai Kartu Anjungan Tunai Mandiri, disamping berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa.
10. Kartu Debit DPRD
    Kartu khusus yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Papua. Kartu ini sama seperti kartu identitas yang dapat berfungsi sebagai Kartu Anjungan Tunai Mandiri disamping berfungsi sebagai kartu identitas pegawai.
11. Kartu Debit KPE/Co. Branding lainnya
    Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang dilegitimasi oleh peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, dapat dipergunakan sebagai kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan. Bank Papua mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan, sehingga KPE juga dapat berfungsi sebagai kartu ATM Bank Papua yang memiliki.
12. Kartu Debit Persipura
    Kartu Persipura didesain secara khusus untuk dipersembahkan kepada nasabah Bank Papua, khususnya kepada Persipuramania. Kartu Persipura diterbitkan sebagai bukti komitmen Bank Papua yang menjadi sponsor klub sepak bola Persipura Jayapura dan untuk memajukan olah raga khususnya sepak bola di Papua.

Selain banyaknya pilihan desain dan segmentasi kartu ATM/ Debit Bank Papua, yang tersedia tesebut di atas. Untuk limitasi transaksi dari masing-masing kartu, dibedakan-bedakan juga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam memilih dan mengatur kebutuhan akan transaksi keuangannya. Dimana jika nasabah ingin lebih berhemat dan tidak ingin untuk bertransaksi dalam jumlah yang besar, maka dapat memilih produk kartu ATM/*Debit Blue*. Selain limit transaksi yang kecil, nasabah juga diuntungkan karena

TabunganKu accounts exist to foster a culture of saving and to improve the welfare of the community and are not subject to monthly administration fees.

8. *Pension Debit Cards*
   Pension Cards are specifically designed for e-Dapem customers at Bank Papua in accordance with applicable regulations.
9. *Student Savings Debit Card*
   Student Savings Cards are given to universities that have collaborated with Bank Papua. So that the Student Savings Card can function as an Automatic Teller Machine Card, besides functioning as a student identity card.
10. *DPRD Debit Card*
    Special cards given to government agencies, which have collaborated with Bank Papua. This card is the same as an identity card that can function as an Automated Teller Machine besides functioning as an employee ID card.
11. *KPE / Co Debit Card. Other Branding*
    The Electronic Civil Servants Card, which is legitimized by the regulation of the Head of BKN Number 7 of 2008, can be used as a civil servant identity card and receipt of civil servant pensions as well as for services in the field of staffing, personnel control data and banking. Bank Papua presents a variety of supporting facilities to maximize the function of the KPE for banking activities, so that the KPE can also function as a Bank Papua ATM card that has.
12. *Persipura Debit Card*
    The Persipura Card is specifically designed to be offered to Bank Papua customers, especially to Persipuramania. The Persipura Card is issued as a proof of the commitment of Bank Papua, which sponsors the Jayapura Persipura football club and to advance sports, especially soccer in Papua.

In addition to the many choices of design and segmentation of Bank Papua ATM / Debit cards, the above are available. For transaction limitations of each card, also differentiated. This aims to make it easier for customers to choose and manage their financial transaction needs. Where if customers want to save more and do not want to trade large amounts, they can choose ATM / Debit Blue card products. In addition to a small transaction limit, customers also benefit because the bank does not charge administrative fees and penalties for

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah di Unit *Call Center* Bank Papua

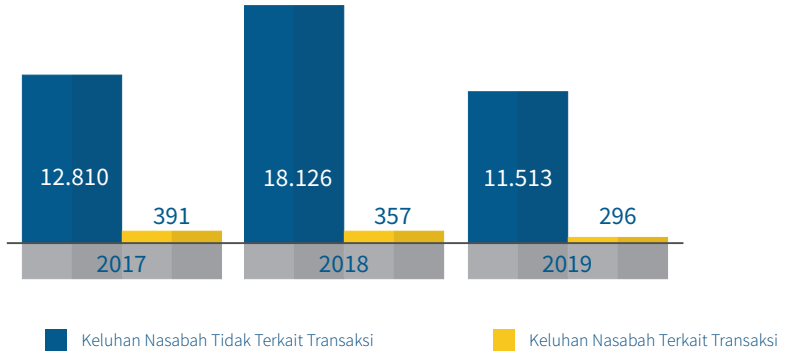

bank tidak mengenakan biaya administrasi dan pinalty untuk segmentasi produk kartu tersebut. Kartu ATM/Debit Bank Papua diterima di jutaan ATM/EDC berlogo PLUS/Visa/Visa Electron baik di Indonesia maupun di luar negeri dan di ATM berlogo ATM BERSAMA, ATM berlogo ATM PRIMA dan EDC berlogo PRIMA DEBET, termasuk di Jaringan ATM dan EDC Bank Papua di seluruh Indonesia.
Bank Papua terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan pengaduan nasabah yang berhubungan dengan transaksi melalui kartu ATM/Debit dan memberikan solusi yang tepat dan dalam waktu yang singkat.

Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & *E-Banking* telah mempunyai unit kerja yang khusus menangani pengaduan nasabah terkait transaksi melalui kartu ATM/Debit Bank Papua, yaitu pada unit *Call Center* yang berada di Departemen Pengembangan Produk & *E-Banking* yang dilengkapi dengan kebijakan dan standard operasional yang komprehensif dan handal untuk memberikan kualitas dan layanan yang terbaik.

Unit *Card* Center pada tahun 2019 tercatat telah menerima sebanyak 11.513 komplain nasabah yang tidak terkait dengan transaksi dan 296 komplain nasabah yang terkait dengan transaksi dalam penggunaan kartu ATM/Debit Bank Papua. Jumlah ini lebih rendah 36.11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana jumlah komplain nasabah tidak terkait transaksi pada tahun 2018 adalah sebanyak 18,126 komplain dan komplain nasabah yang terkait dengan transaksi adalah sebanyak 357 komplain.

segmenting the card product. Bank Papua ATM / Debit Cards are accepted at millions of ATMs / EDCs bearing the PLUS / Visa / Visa Electron logo both in Indonesia and abroad and at ATMs bearing the ATM JOINT logo, ATMs bearing the ATM PRIMA logo and EDC bearing the PRIMA DEBET logo, including the ATM and EDC Bank Papua Networks throughout Indonesia.Bank Papua continues to strive to improve customer service complaints relating to transactions via ATM / Debit cards and provide appropriate solutions and in a short time.

The Fund, Service & E-Banking Management Division has a special work unit that handles customer complaints related to transactions via Bank Papua ATM / Debit cards, namely the Call Center unit located in the Product Development & E-Banking Department which is equipped with operational policies and standards comprehensive and reliable to provide the best quality and service.

Unit Card Center in 2019 was recorded as having received 11,513 customer complaints that were not related to transactions and 296 customer complaints related to transactions in the use of Bank Papua ATM / Debit cards. This number is 36.11% lower compared to the previous year. Where the number of customer complaints not related to transactions in 2018 was 18,126 complaints and customer complaints related to transactions were 357 complaints.

No	KETERANGAN	TAHUN				*INFORMATION*
		2017	2018	2019	Yoy	
1	Penerimaan Keluhan Nasabah Tidak Terkait Transaksi	12,810	18,126	11,513	-36.48%	*Acceptance of Customer Complaints Not Related to Transactions*
2	Penerimaan Keluhan Nasabah Terkait Transaksi	391	357	296	-17.09%	*Acceptance of Customer Complaints Regarding Transaski*
	Total	**13,201**	**18,483**	**11,809**	**-36.11%**	*Total*

Penurunan jumlah keluhan nasabah yang masuk ke layanan *Call Center* Bank Papua, seiring dengan meningkatnya jumlah pemahaman nasabah dalam menggunakan kartu ATM/Debit Bank Papua. Unit pengaduan kartu disamping melayani kebutuhan informasi dan keluhan nasabah pemegang kartu serta berusaha juga untuk memberikan edukasi dini mengenai keamanan dalam menggunakan kartu ATM bagi nasabah Bank Papua. Divisi Pengelolaan Dana, Jasa & *E-Banking* secara aktif telah membuat sejumlah pamlet/ lembar himbauan seperti "Tips Penting dan Kiat Aman Bertransaksi Menggunakan Kartu ATM Bank Papua" untuk ditempel/dipasang pada ruangan terminal ATM yang mudah untuk dilihat nasabah. Yang diharapkan dapat membantu nasabah dalam bertransaksi dengan lebih aman dan terhindar dari penipuan atau tindakan kejahatan.

The decrease in the number of customer complaints coming into Bank Papua Call Center services is in line with the increasing number of customers' understanding in using Bank Papua ATM / Debit cards. The card complaints unit besides serving the information needs and complaints of cardholder customers and also trying to provide early education about the security in using ATM cards for Bank Papua customers. The Fund, Service & E-Banking Management Division has actively made a number of leaflets / appeals such as "Important Tips and Safe Tips for Transactions Using Bank Papua ATM Cards" to be posted / installed in ATM terminal rooms that are easy for customers to see. That is expected to help customers make transactions more safely and avoid fraud or criminal acts.

2. *Treasury*

Selain pendapatan jasa di atas, Bank Papua melalui Divisi *Treasury* telah berhasil memberikan kontribusi pendapatan bank melalui penempatan. Pada tahun 2019, Bank memperoleh bunga penempatan sebesar Rp483.248 juta, atau meningkat 20,21% dibandingkan pendapatan tahun 2018 yakni sebesar Rp483.248 juta.

2. *Treasury*

In addition to the above service income, Bank Papua through the Treasury Division has successfully contributed to bank revenue through placements. In 2019, the Bank obtained a placement interest of Rp483,248 million, an increase of 20.21% compared to revenue in 2018 of Rp483,248 million.

Pendapatan Bunga Penempatan Bank Papua tahun 2015-2019 (RpJuta)
Bank Papua Placement Interest Income for 2015-2019 (RpMillion)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Bunga Penempatan Pada Bank Indonesia	20.703	13.503	23.418	6.322	6.898	576	9,11%	*Placement interest at Bank Indonesia*
Bunga Penempatan Pada Bank Lain	256.985	164.956	115.812	162.265	197.952	35.687	21,99%	*Placement interest at Other banks*
Hasil Bunga Efek-Efek	241.824	285.853	279.738	233.425	278.398	44.973	19,27%	*Marketable Securities Interest*
Total	**519.512**	**464.312**	**418.968**	**402.012**	**483.248**	**81.236**	**20,21%**	*TOTAL*

Kinerja Usaha Terkait Peningkatan/Penurunan Pendapatan Penyaluran Kredit

Pendapatan bunga bank dari hasil penyaluran kredit lebih besar dari pendapatan lainnya. Untuk tahun 2019 ini, bank mencatat pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit adalah sebesar Rp1.506.730 juta, atau bertambah sebesar Rp15.967 juta atau 1,07% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1.490.763 juta. Pendapatan bunga kredit Bank Bank Papua yang terdiri atas pendapatan bunga mengalami penurunan yaitu Kredit Modal Kerja (2,52%), Kredit Investasi (10,41%) Kredit Karyawan (2,47%). Sedangkan untuk Kredit Konsumsi naik tipis (0,18%), dan Kredit Sindikasi (49,36%). Sedangkan pendapatan bunga dari Kredit Program Pemerintah mengalami peningkatan 131,34%. Pendapatan Bunga Kredit bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

Business Performance Related to Increase / Decrease in Lending Income

Bank interest income from lending is greater than other income. For 2019, the bank recorded interest income earned from lending amounting to Rp1,506,730 million, or an increase of Rp15,967 million or 1.07% from 2018 which amounted to Rp1,490,763 million. Bank Papua's loan interest income which consists of interest income has decreased namely Working Capital Loans (2.52%), Investment Loans (10.41%) Employee Loans (2.47%). Whereas for Consumer Credit edged up (0.18%), and Syndicated Loans (49.36%). While interest income from the Government Credit Program experienced an increase of 131.34%. Interest on bank loans is illustrated in the table and graph below:

Tabel Perkembangan Pendapatan Bunga Kredit
Table of Loan Interest Income Development

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Kredit Modal Kerja	496.369	437.440	354.732	296.072	288.608	(7.464)	-2,52%	*Working Capital Loan*
Kredit Investasi	210.245	163.267	153.458	97.549	87.390	(10.158)	-10,41%	*Investment Loan*
Kredit Konsumsi	820.566	874.901	1.051.961	945.637	947.368	1.731	0,18%	*Consumption Loan*
Kredit Sindikasi	156.732	119.866	106.250	100.368	149.912	49.544	49,36%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	21.515	20.028	26.311	25.693	25.059	(634)	-2,47%	*Employee Loan*
Kredit Program Pemerintah	20.932	8.846	3.116	3.628	8.393	4.765	131,35%	*Government Program Loans*
Kredit Urwinding	1.568	-	-	21.816	7.447	(14.369)	-65,86	*Urwinding Loans*
Jumlah	**1.727.927**	**1.624.349**	**1.695.828**	**1.490.763**	**1.514.177**	**23.414**	**1,57%**	*Total*

Perkembangan Pendapatan Bunga Kredit
Loan Interest Income

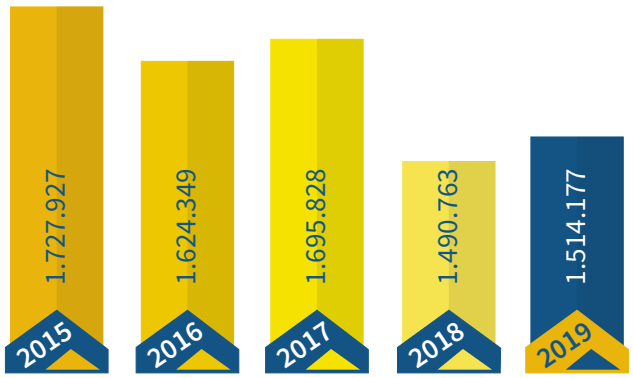

Kinerja Operasional Terkait Pendapatan Usaha

Pendapatan Operasional Bank Bank Papua bersumber dari Pendapatan Bunga, Pendapatan Operasional Lainnya selain bunga serta pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan bunga ini meliputi pendapatan bunga kredit dan bunga penempatan, baik penempatan kepada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan pendapatan bunga efel-efek.

Selain itu Pendapatan Operasional juga bersumber dari pendapatan selain bunga diantaranya pendapatan hapus buku, pendapatan operasional lainya dan keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan, serta pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan Operasional bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

Operating Performance Related to Operating Income

Bank Papua Operational Income is sourced from Interest Income, Other Operating Income in addition to interest and fees and commission income. This interest income includes loan interest income and placement interest, both placements with Bank Indonesia, placements with other banks and interest-securities income.

In addition, Operational Income also comes from non-interest income including write-off income, other operating income and earning (loss) from changes in unrealized fair value and sales of financial instruments, as well as provision and commission income. The bank's operating income is illustrated in the table and graph below:

Tabel Perkembangan Pendapatan Operasional
Table of Operational Income Development

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Pendapatan Bunga Kredit	1.727.926	1.624.348	1.695.828	1.490.763	1.514.177	23.414	1,57%	*Loan Interest Income*
Pendapatan Bunga Penempatan	519.512	464.312	418.967	402.012	483.248	81.236	20,21%	*Placement Interest Income*
Pendapatan provisi dan komisi	94.223	100.356	98.585	100.228	100.552	324	0,32%	*Provision and commission income*
Pendapatan Operasional Lainnya	258.098	31.005	81.556	123.171	144.529	21.358	17,34%	*Other Operating Income*
Jumlah	**2.599.759**	**2.220.021**	**2.294.936**	**2.116.174**	**2.242.506**	**126.332**	**5,97%**	*Total*

Pendapatan Bunga dan Operasional
Interest and Operational Income

Profitabilitas per Segmen

Efektivitas Segmen Operasi Bank Papua dalam mendukung kinerja keuangan dapat dilihat dari perolehan earningabilitas masing-masing segmen. Perolehan yang dicapai dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah strategis untuk pengembangan dan optimalisasi masing-masing segmen operasi tersebut.

Pendapatan dan earningabilitas segmen operasi disajikan dalam tabel berikut.

Profitability per Segment

The effectiveness of Bank Papua's operating segments in supporting financial performance can be seen from the acquisition of profitability of each segment. Achievements achieved can be considered in determining strategic steps for the development and optimization of each operating segment.

Revenue and profitability of operating segments are presented in the following table.

dalam jutaan *(in millions)* Rp

Data Keuangan	2015	2016	2017	2018	2019	*Financial Data*
LABA RUGI KOMPREHENSIF						*COMPREHENSIVE EARNING LOSS*
Pendapatan Bunga	1.985.423	2.088.661	2.114.796	1.892.775	1.997.425	*Interest income*
Beban Bunga	(578.640)	(445.924)	(431.052)	(351.763)	(415.347)	*Interest expense*
Pendapatan Bunga Bersih	**1.406.783**	**1.642.737**	**1.683.744**	**1.541.013**	**1.582.079**	***Net interest income***
Pendapatan Operasional Selain Bunga	361.833	131.361	180.140	223.399	245.081	*Operating Income exclude Interest*
Pendapatan Operasional Lainnya	267.610	31.005	81.556	123.171	144.529	*Other Operating Income*
Pendapatan Provisi dan Komisi	94.223	100.356	98.585	100.228	100.552	*Commissions and Provisions*
Beban Operasional Selain Bunga	(1.304.276)	(1.971.816)	(1.737.551)	(1.618.873)	(1.528.513)	*Operational Expenses esclude nterest*
Beban Provisi dan Komisi	(1.590)	(1.821)	(1.331)	(1.689)	(1.916)	*Commissions and Provisions*
Beban Pembentukan CKPN	(281.306)	(879.997)	(687.937)	(530.692)	(180.623)	*CKPN Allowance Expenses*
Beban Operasional Lainnya	(1.021.380)	(1.089.999)	(1.048.283)	(1.086.493)	(1.345.974)	*Other Operating Expenses*
Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	**(942.443)**	**(1.840.455)**	**(1.557.410)**	**(1.395.474)**	**(1.283.432)**	***Operating Income other than Net Interest***
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**464.340**	**(197.719)**	**126.333**	**145.539**	**298.647**	***OPERATIONAL INCOME (LOSS)***
Pendapatan Bukan Operasional	69.081	59.611	21.204	141.622	50.271	*Non-operating income*
Beban Bukan Operasional	(5.120)	(5.972)	(3.151)	(3.368)	(6.294)	*Non-operational expenses*
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional Bersih	**63.961**	**53.638**	**18.052**	**138.254**	**43.977**	***Net Non-Operating Income (Expenses)***
LABA SEBELUM PAJAK	**528.301**	**(144.080)**	**144.386**	**283.793**	**342.624**	***EARNING BEFORE TAX***
Pajak Kini	(137.718)	(68.632)	(40.762)	(65.226)	(111.333)	*Current tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	(7.240)	(23.992)	9.649	9	18.746	*Deferred Tax Benefits*
Beban Pajak	(144.958)	(92.624)	(31.113)	(65.217)	(92.587)	*Tax Expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**383.343**	**(236.704)**	**113.273**	**218.576**	**250.037**	***NET CURRENT YEAR EARNING***
Pendapatan (Beban) Penghasilan Komprehensif	(52.112)	(147.534)	42.884	144.230	(81.545)	*Comprehensive Income (Expenses)*
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**331.231**	**(384.238)**	**156.157**	**362.806**	**168.492**	***COMPREHENSIVE EARNING CURRENT YEAR***
ASSET	**20.357.639**	**20.611.850**	**20.400.813**	**22.456.759**	**28.183.686**	***ASSETS***

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial reviews described below refer to the Financial Statements for the years ended 31 December 2019 and 2018 presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Hertanto, Grace and Karunawan Public Accountants and received a Fair opinion without exception. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua on December 31, 2019, as well as financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Kinerja Posisi Keuangan
Financial Position Performance Report

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Aset	20.357.639	20.611.850	20.400.813	22.456.759	28.183.686	5.726.927	25,50%	*Asset*
Liabilitas	17.552.307	18.242.595	17.725.809	19.285.891	24.745.539	5.459.648	28,31%	*Liability*
Ekuitas	2.805.332	2.369.255	2.675.004	3.170.867	3.438.147	267.280	8,43%	*Equity*

Posisi Keuangan
Financial Position

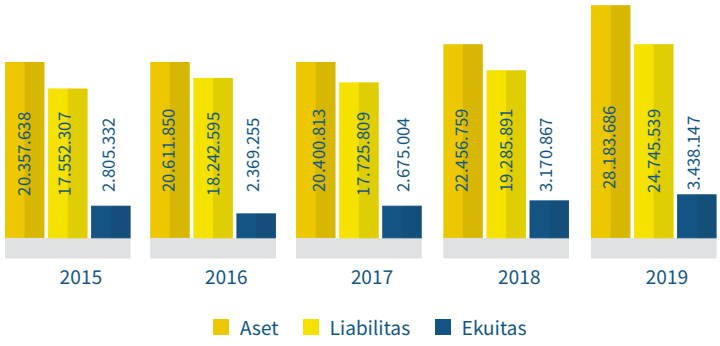

Aset

Selama tahun 2019, jumlah aset tercatat tumbuh 25,50% dari Rp22.456.759 juta pada tahun 2018 menjadi Rp28.183.686 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penambahan aset lancar berupa Kas, Giro pada Bank Indonesia, Penempatan, dan Kredit. Pertumbuhan aset Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini.

Asset

During 2019, total assets recorded grew 25.50% from Rp22,456,759 million in 2018 to Rp28,183,685 million in 2019. This was mainly due to the increase in the addition of current assets in the form of Cash, Current Accounts with Bank Indonesia, Placements and Loan. Bank Papua's asset growth is illustrated in the table below.

dalam Juta (in)million) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Kas	738.378	941.681	831.085	996.585	1.700.444	703.859	70,63%	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.885.404	1.511.313	1.415.941	1.589.283	2.178.386	589.103	37,07%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bersih	7.717	45.126	6.303	7.875	28.726	20.851	264,77%	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	2.309.972	2.776.700	2.949.938	3.639.733	4.166.017	526.284	14,46%	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga & Efek-efek bersih	2.246.827	1.950.749	2.609.245	2.290.212	4.128.639	1.838.427	80,27%	*Marketable securities Net*
Kredit yang diberikan - bersih	12.279.592	12.537.278	11.764.167	13.407.704	15.491.802	2.084.098	15,54%	*Lending- net*
Aset Tetap Bersih	288.133	289.302	285.012	249.758	246.905	(2.853)	-1,14%	*Net Fixed Asset*
Aset lain-lain	601.615	559.701	539.121	275.608	242.766	(32.842)	-11,92%	*Other Assets*
Jumlah Aset	**20.357.638**	**20.611.850**	**20.400.813**	**22.456.758**	**28.183.686**	**5.726.928**	**25,50%**	***Total Assets***

Perkembangan Aset
Development of Asset

1. Aset Lancar

Aset lancar yang terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan, surat berharga serta kredit yang diberikan selama tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 26,28% dari tahun sebelumnya. Besarnya aset lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp27.694.014 juta sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp21.931.393 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh semua pos-pos aset lancar, terutama peningkatan yang sangat tajam di pos Kas dan Giro pada Bank Indonesia.

1. Current Assets

Current assets consisting of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements, securities and loans granted during 2019 increased by 26.28% from the previous year. The amount of current assets in 2019 is Rp 27,694,014 million while in 2018 it is Rp 21,931,393 million. This increase was due to all current assets items, especially the very shaRpincrease in the Cash and Current Accounts at Bank Indonesia.

dalam Juta (in)million) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Kas	738.378	941.681	831.085	996.585	1.700.444	703.859	70,63%	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.885.404	1.511.313	1.415.941	1.589.283	2.178.386	589.103	37,07%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bersih	7.717	45.126	6.303	7.875	28.726	20.851	264,77%	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	2.309.972	2.776.700	2.949.938	3.639.733	4.166.017	526.284	14,46%	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga & Efek-efek bersih	2.246.827	1.950.749	2.609.245	2.290.212	4.128.639	1.838.427	80,27%	*Marketable securities Net*
Kredit yang diberikan - bersih	12.279.592	12.537.278	11.764.167	13.407.704	15.491.802	2.084.098	15,54%	*Lending- net*
Jumlah Aset Lancar	**19.467.890**	**19.762.847**	**19.576.679**	**21.931.392**	**27.694.014**	**5.762.622**	**26,28%**	***Total Assets***

Perkembangan Aset Lancar

Development of Current Assets

Optimalisasi rentabilitas menjadi perhatian penting bank, sehingga kondisi likuiditas antara aset dan kewajiban harus selalu dijaga dengan baik. Bank Papua telah mengoptimalkan pengelolaan *Treasury* untuk menjaga likuiditas dengan melakukan penempatan dana pada beberapa instrument keuangan yang lebih likuid. Bank mengklasifikasikan asset yang sangat likuid yang terdiri dari:

Optimizing profitability is an important concern for banks, so that the liquidity conditions between assets and liabilities must always be maintained properly. Bank Papua has optimized the management of Treasury to maintain liquidity by placing funds in several more liquid financial instruments. The Bank classifies highly liquid assets which consist of:

1.1 Kas

Kas merupakan aset paling likuid dalam suatu kajian keuangan. Di Bank Papua, kas merupakan dana yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui *Teller* atau *Automatic Teller Machine* (ATM). Agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tidak pada posisi idle berbagai upaya manajemen dalam melakukan pengelolaan kas secara efektif dan efisiensi. Posisi kas per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini:

1.1 Cash

Cash is the most liquid asset in a financial study. At Bank Papua, cash is funds provided to support operational activities through a Teller or Automatic Teller Machine (ATM). So that the service can run current and not at the idle position, various management efforts in managing cash effectively and efficiently. The cash position as at 31 December 2019 is illustrated in the table below:

dalam Juta (in)million) Rp

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						Nominal	%	
Kas Besar dan Kas Kecil	640.278	838.481	722.786	830.725	1.404.331	573.606	69,05%	*Big Cash and Small Cash*
Kas pada Mesin (CDM)	1.534	3.259	2.598	2.599	1.581	(1.018)	-39,17%	*Cash on the Machine*
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	96.566	99.941	105.701	163.260	294.531	131.271	80,41%	*Automatic Teller Machine (ATM)*
TOTAL	**738.378**	**941.681**	**831.085**	**996.585**	**1.700.444**	**703.859**	**70,63%**	*Total*

Semua uang kas dalam bentuk uang rupiah.

All cash in rupiah.

dalam Juta (in)million) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						Nominal	%	
Rupiah	738.378	941.681	831.085	996.585	1.700.444	996.585	100,00%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Jumlah	**738.378**	**941.681**	**831.085**	**996.585**	**1.700.444**	**165.500**	**19,91%**	*Total*

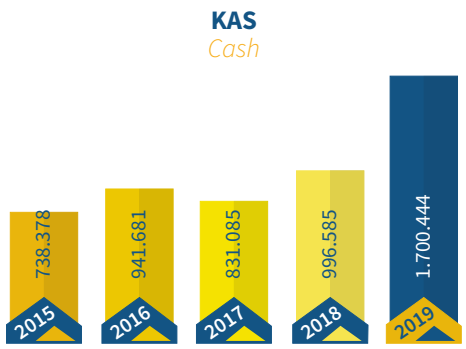

1.2 Giro pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 dan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018.

1.2 Current Accounts with Bank Indonesia

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank's Statutory Reserves (GWM) were in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15 / 15 / PBI / 2013 dated December 24, 2013 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiahs and Foreign Currencies for Banks General Conventional as amended several times with PBI No.17 / 11 / PBI / 2015 dated 25 June 2015, PBI No.17 / 21 / PBI / 2015 dated 26 November 2015, PBI No.18 / 3 / PBI / 2016 dated 10 March 2016, PBI No.18 / 14 / PBI / 2016 dated 18 August 2016, PBI No. 19/6 / PBI / 2017 dated 17 April 2017 and PBI No. 20/3 / PBI / 2018 dated 29 March 2018.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Statutory Reserves Requirement (GWM) required by Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Giro Wajib Minimum:	2018	2019	*Statutory Reserves:*
- GWM Primer	6,55%	6,28%	*Primary Minimum Statutory Reserve -*
Harian	3,50%	3,00%	*Daily*
Rata - rata	3,05%	-	*Average*
- GWM Sekunder	-	-	*Secondary Minimum Statutory Reserve*
- PLM	4,24%	-	*PLM -*
- LFR	-	-	*LFR -*
- RIM	1,37%	2,52%	*RIM -*

*) Mulai Berlaku per 1 Juli 2019
**) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) dan GWM LFR berubah menjadi RIM (Rasio IntermediasiMakroprudensial)

*) *Effective as of 1 July 2019*
**) *As of July 16, 2018, based on PBI No. 20 / 4PBI / 2018 dated 29 March 2018, the term Secondary GWM changed to PLM (Macroprudential Liquidity Buffer) and LFR GWM changed to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio)*

Terhadap perubahan peraturan tersebut, Bank Papua di tahun 2019 telah memenuhi peraturan tersebut dengan mempertahankan cadangan minimum giro pada Bank Indonesia pada posisi Rp2.178.386 juta, terjadi peningkatan 37,07% dibandingkan dari posisi tahun sebelumnya. Posisi giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini :

With regard to the amendment to the regulation, Bank Papua in 2019 has complied with the regulation by maintaining a minimum reserve requirement at Bank Indonesia at Rp2,178,386 million, an increase of 37.07% compared to the previous year. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2019 are illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Giro pada Bank Indonesia Tahun 2015-2019
Table of Current Account Development at Bank Indonesia for 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Rupiah	1.885.404	1.511.313	1.415.941	1.589.283	**2.178.386**	589.103	37,07%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	**-**	-	-	*Forex*
Jumlah	**1.885.404**	**1.511.313**	**1.415.941**	**1.589.283**	**2.178.386**	**589.103**	**37,07%**	*Total*

Giro Pada Bank Indonesia
Current Account with Bank Indonesia

1.3 Giro pada Bank Lain

Dana yang ditempatkan dalam rekening giro pada bank lain bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih mudah dalam melaksanakan transfer dana/ pengiriman uang/penyelesaian transaksi antar bank. Frekuensi transaksi dana yang dilakukan oleh nasabah sangat mempengaruhi fluktuasi giro pada bank lain. Selama tahun 2019, rekening giro pada bank lain mengalami peningkatan 264,77% dari Rp7.875 juta pada tahun 2018 menjadi Rp28.726 juta pada tahun 2019.

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar. Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai. Manajemen Bank Papua berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperlukan.

Posisi giro pada bank lain per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini:

1.3 Current Accounts with Other Banks

Funds placed in checking accounts with other banks aim to provide an easier way of carrying out funds transfers / remittances / settlement of interbank transactions. The frequency of fund transactions carried out by customers greatly influences fluctuations in current accounts at other banks. During 2019, current accounts with other banks increased by 264.77% from Rp7,875 million in 2018 to Rp28,726 million in 2019.

All current accounts with other banks as of December 31, 2019 and 2018 are classified as current. Bank Papua assesses the impairment of current accounts with other banks individually based on objective evidence of impairment. Bank Papua management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks as at 31 December 2019 and 2018 is not required.

Current accounts with other banks as at 31 December 2019 are illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Giro pada Bank Lain Tahun 2015-2019
Table of Current Accounts Development with Other Banks in 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Rupiah	7.717	45.126	6.303	7.875	28.726	20.851	264,77%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyesuaian Kerugian / CKPN	-	-	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses*
Jumlah	**7.717**	**45.126**	**6.303**	**7.875**	**28.726**	**20.851**	**264,77%**	**Total**

Giro pada Bank Lain
Current Account with Other Banks

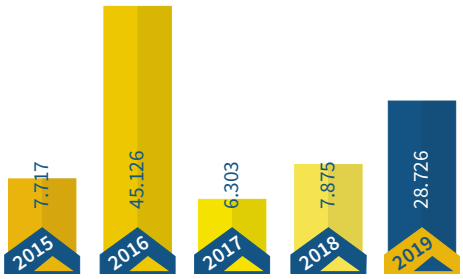

Kisaran tingkat suku bunga pada tahun 2019 sebesar 0,00% - 1,25%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

The range of interest rates in 2019 will be 0.00% - 1.25%. As of December 31, 2019 there were no current accounts with other banks used as collateral.

1.4 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk promes, deposito berjangka, *deposit on call*, dan kliring Bank Indonesia serta Fasilitas Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain mengalami peningkatan dari Rp3.639.733 juta pada tahun 2018 menjadi Rp4.166.017 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini sebagai bagian dari strategi pengelolaan dana dalam meraih pendapatan bunga. Posisi Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini:

1.4 Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placement of funds at Bank Indonesia and other banks constitutes investment of funds in the form of promissory notes, time deposits, deposits on call, and clearing of Bank Indonesia and Bank Indonesia Facilities. Placement with Bank Indonesia and other banks has increased from Rp3,639,733 million in 2018 to Rp4,166,017 million in 2019. This increase is part of the fund management strategy in earning interest income. Position of placement with Bank Indonesia and other banks as at 31 December 2019 is illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain Tahun 2015-2019
Table of Placement Development with Bank Indonesia & Other Banks 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Rupiah	2.309.972	2.776.700	2.949.938	3.639.733	4.166.017	526.284	14,46%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyisihan Kerugian/ CKPN	-	-	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses*
Jumlah	**2.309.972**	**2.776.700**	**2.949.938**	**3.639.733**	**4.166.017**	**526.284**	**14,46%**	**Total**

Penempatan pada BI dan Bank Lain
Placements with BI and Other Banks

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah. Seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga. Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai. Seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar. Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, all placements with Bank Indonesia and other banks are placements in Rupiah. All placements with other banks are placements with third parties. Bank Papua assesses the impairment in placement with other banks and Bank Indonesia individually with objective evidence of impairment. All placements with other banks as of December 31, 2019 and 2018 are classified as current. There were no placements with other banks that were pledged as collateral as of December 31, 2019 and 2018.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain berdasarkan jenis adalah sebagai berikut :

Placements with Bank Indonesia and Other Banks by type are as follows:

dalam Juta (*in million*) Rp

	2018		2019	
Promes	1.880.000		3.455.000	*Promissory notes*
Deposito On Call	100.000		315.000	*Deposit On Call*
Sertifikat Deposito Bank Lain	-		236.036	*Time deposits*
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	1.659.733		159.981	*Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)*
Jumlah	3.639.733		4.166.017	*Total*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-		-	*Allowance for impairment losses*
Neto	3.639.733		4.166.017	*Net*

1.5 Surat Berharga & Efek-Efek

Surat berharga yang dimiliki dari Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Surat Piutang Negara (SPN), dan reksadana serta Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Sampai dengan akhir tahun 2019, penempatan dana dalam bentuk surat berharga dan efek sebesar Rp4.128.639 juta lebih tinggi dari saldo tahun 2018 yakni sebesar Rp2.290.213 juta. Penurunan ini disebabkan manajemen *treasury* Bank Papua lebih banyak mengalokasikan dana pada surat berharga dan efek yang dibeli untuk dijual kembali. Posisi surat berharga dan efek yang dibeli untuk dijual kembali per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini :

1.5 Marketable Securities & Effects

The marketable securities held from Bank Indonesia Certificates, Government Bonds, Corporate Bonds, Government Receivables (SPN), and mutual funds and Bank Indonesia Deposit Certificates (SDBI) traded on the stock exchange.

Until the end of 2019, the placement of funds in the form of marketable securities and stocks amounted to Rp4,128,639 million, higher than the balance in 2018 which was Rp2,290,213 million. This decrease was due to Bank Papua treasury management allocating more funds to securities and securities purchased for resale. The position of marketable securities and stocks purchased for resale as at 31 December 2019 is illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Surat Berharga dan Efek-Efek Tahun 2015-2019
Table of Development of Marketable Securities and Effects for 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Rupiah	2.246.827	1.950.749	2.609.245	2.290.212	4.128.639	1.838.427	80,27%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyisihan Kerugian/ CKPN	-	-	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses*
Jumlah	**2.246.827**	**1.950.749**	**2.609.245**	**2.290.212**	**4.128.639**	**1.838.427**	**80,27%**	**Total**

Surat Berharga & Efek-Efek
Marketable Securities & Stocks

Jenis surat berharga dan efek yang dibeli untuk dijual kembali berdasarkan hubungan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Types of securities and securities purchased for resale based on relationships with related parties as at 31 December 2019 are as follows:

dalam (*in*) Rp

Efek-Efek	2018	2019	*Marketable Securities*
Pihak ketiga			*Third parties*
Obligasi	499.149.470.387	499.149.470.387	*Bonds*
Sertifikat Deposito			*Certificate Deposit of*
Bank Indonesia	-	-	*Bank Indonesia*
Reksadana	476.012.021.400	476.012.021.400	*Mutual funds*
Jumlah	975.161.491.787	975.161.491.787	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Jumlah	**975.161.491.787**	**975.161.491.787**	*Total*

dalam (*in*) Rp

Efek Yang Dibeli dan Jual Kembali	2018	2019	*Marketable Securities Purchased under Agreement to Resell*
Surat utang negara			*Government Bonds*
Bank Indonesia	393.415.830.000	2.250.947.687.619	*Bank Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia	921.635.957.700	912.713.614.314	*Bank Rakyat Indonesia*
	1.315.051.787.700	**3.163.661.301.933**	

1.6 Kredit yang Diberikan

Jumlah kredit yang diberikan (Net) pada tahun 2019 lebih besar 15,54% dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp15.491.802 juta berbanding Rp13.407.704 juta. Kredit yang diberikan terdiri atas kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit investasi kredit sindikasi, kredit karyawan dan kredit program pemerintah.

1.6. Loans

The number of loans (Net) in 2019 was 15.54% higher than in 2018, amounting to Rp15,491,802 million compared to Rp13,407,704 million. Loans consist of working capital loans, consumer loans, syndicated investment investment loans, employee loans and government program loans.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Kredit yang diberikan	13.207.177	14.209.840	13.270.907	14.147.217	16.060.678	1.913.461	13,53%	*Loans*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(927.584)	(1.272.909)	(1.507)	(739.513)	(568.875)	170.638	-23,07%	*Allowance for impairement losses*
Kredit yang diberikan - bersih	12.279.592	12.537.278	11.764.167	13.407.704	15.491.802	2.084.098	15,54%	*Loan- net*

Kredit Yang Diberikan

Loans

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka dan jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank Papua.

Loans are generally guaranteed with collateral tied to mortgages, mortgage or power of attorney to sell, current accounts, savings, time deposits and other guarantees that can be received by Bank Papua.

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar yang terdiri atas aset tetap bersih dan aset lain-lain selama tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -6,79% dari tahun sebelumnya. Besarnya aset tidak lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp489.671 juta sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp525.367 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah aset lain-lain seperti aset pajak tangguhan, aset tidak produktif, dan lainnya.

2. Non-current Assets

Non-current assets consisting of net fixed assets and other assets during 2019 decreased by -6.79% from the previous year. The amount of non-current assets in 2019 is Rp 489,671 million while in 2018 that is Rp 525,367 million. This decrease was caused by a decrease in the number of other assets such as deferred tax assets, non performing assets, and others.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Aset Tetap Bersih	288.133	289.302	285.012	249.758	246.905	(2.853)	-1,14%	*Net Fixed Asset*
Aset lain-lain	601.615	559.701	539.121	275.609	242.766	(32.843)	-11,92%	*Other Assets*
Jumlah Aset	**889.748**	**849.003**	**824.133**	**525.367**	**489.671**	**(35.696)**	**-6,79%**	***Total Assets***

2.1 Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2019, Aset Tetap mengalami penurunan sekitar -1,14% menjadi Rp246.905 juta lebih rendah dari saldo tahun 2018 yakni sebesar Rp249.758 juta. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya nilai penyusutan bangunan kantor, perumahan dinas, dan inventaris lainnya.

2.1 Fixed Assets

Until the end of 2019, Fixed Assets decreased by around -1.14% to Rp246,905 million, lower than the 2018 balance of Rp249,758 million. This decrease was due to the increased value of depreciation of office buildings, official housing, and other inventories.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Harga Perolehan	553.236	586.190	614.250	595.996	601.491	5.495	0,92%	***Acquisition cost***
Tanah	33.146	36.949	36.949	37.454	37.771	317	0,85%	*Land*
Bangunan Kantor	265.842	272.420	280.348	286.978	294.002	7.024	2,45%	*Office building*
Perumahan dinas	17.910	20.171	21.234	21.195	20.982	(213)	-1,00%	*Housing services*
Kendaraan bermotor	14.710	14.978	15.416	11.499	10.003	(1.496)	-13,01%	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	202.589	215.648	224.042	211.751	206.682	(5.069)	-2,39%	*Office inventory*
Inventaris rumah dinas	6.805	6.909	7.921	6.673	6.171	(502)	-7,52%	*Inventory of official housing*
Inventaris lainnya	3.242	6.077	7.145	11.539	9.549	(1.990)	-17,25%	*Other inventory*
Inventaris dalam penyelesaian	1.643	1.946	2.475	8.024	965	(7.059)	-87,97%	*Inventory in progress*
Bangunan dalam penyelesaian	7.345	11.091	18.720	882	15.366	14.484	1642,18%	*Building in progress*
Akumulasi Penyusutan	(265.103)	(296.888)	(329.239)	(346.238)	(354.586)	700.824	-202,41%	***Accumulated Depreciation***
Bangunan Kantor	(77.069)	(90.149)	(100.566)	(126.363)	(137.650)	264.013	-208,93%	*Office building*
Perumahan dinas	(5.853)	(6.664)	(7.677)	(8.523)	(9.421)	17.944	-210,54%	*Housing services*
Kendaraan bermotor	(10.918)	(12.320)	(13.590)	(10.207)	(8.784)	18.991	-186,06%	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	(164.786)	(179.796)	(197.137)	(190.922)	(187.886)	378.808	-198,41%	*Office inventory*
Inventaris rumah dinas	(4.950)	(5.229)	(6.184)	(5.211)	(5.019)	10.230	-196,32%	*Inventory of official housing*
Inventaris lainnya	(1.527)	(2.730)	(4.084)	(5.011)	(5.826)	10.837	-216,26%	*Other inventory*
Nilai Buku	288.133	289.302	285.012	249.758	246.905	(2.853)	-1,14%	***Fiscal value***

Aset Tetap
Fixed assets

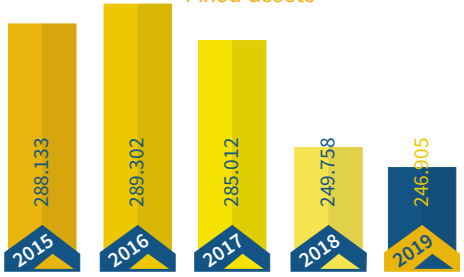

2.2. Aset Lain-lain

Sampai dengan akhir tahun 2019, Aset Lain-Lain mengalami penurunan -11,92% dengan saldo sebesar Rp242.765 juta lebih rendah dari saldo tahun 2018 yakni sebesar Rp275.608 juta. Perkembangan aset lain-lain bank tergambar pada tabel dibawah ini :

2.2. Other Assets

Until the end of 2019, Other Assets decreased by -11.92% with a balance of Rp242,765 million lower than the balance in 2018 of Rp275,608 million. The development of the bank's other assets is illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Aset Lain-lain Tahun 2015-2019
Tables of Other Asset Development for 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Aset pajak tangguhan	63.309	64.123	89.850	41.782	76.554	34.772	83,22%	*Deffered tax asset*
Aset tidak produktif	100.000	85.000	100.520	62.750	59.539	(3.211)	-5,12%	*Assets - non productive*
Taksiran pajak penghasilan badan lebih bayar (PPh 28A)	82.077	73.994	72.786	731	480	(251)	-34,34%	*Estimated claimed tax refund (income tax art.28A)*
Piutang bunga Pinjaman	46.271	46.739	38.427	41.726	37.544	(4.182)	-10,02%	*Interest receivables*
Uang muka lainnya	249.004	48.596	34.689	43.151	26.660	(16.491)	-38,22%	*Other prepayment*
Biaya dibayar di muka	25.471	21.361	17.045	17.918	19.228	1.310	7,31%	*Prepaid expenses*
Beban ditangguhkan lainnya	13.227	8.753	7.888	5.067	4.797	(270)	-5,33%	*Deffered other expenses*
Bunga atas Penempatan pada surat berharga	9.629	8.696	3.954	7.519	4.786	(2.733)	-36,35%	*Placement and marketable securitie accrued interest*
Persediaan lainnya	1.236	2.176	3.465	3.385	4.464	1.079	31,88%	*Other inventory*
Persediaan kantor	2.540	2.253	2.248	2.511	2.191	(320)	-12,74%	*Office supplies*
Uang jaminan	2.218	2.155	2.113	2.107	2.085	(22)	-1,04%	*Security deposit*
Bunga atas penempatan pada bank lain	2.236	1.517	1.501	2.575	2.378	(197)	-7,65%	*Interest on placement at other bank*
Lainnya	1.851	194.273	164.635	44.386	2.059	(42.327)	-95,36%	*Others*
Uang muka pajak	4	4	-	-	-	-	-	*Tax advance*
Premium Surat berharga dibayar dimuka	1.492	62	-	-	-	-	-	*Premium Prepaid securities*
Rekening dalam Penyelesaian	1.051		-	-	-	-	-	*Account in Settlement*
Jumlah	**601.616**	**559.702**	**539.121**	**275.608**	**242.765**	**(32.843)**	**-11,92%**	**Total**

Aset Lain-Lain
Other Assets

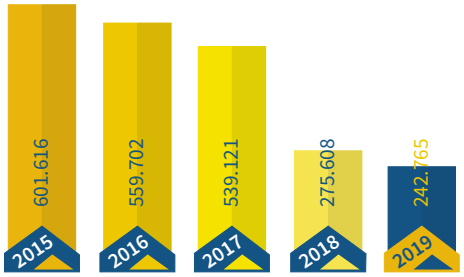

Sedangkan untuk aset tidak produktif di tahun 2019 sebesar Rp59.539 juta, menurun dibandingkan aset tidak produktif bank ditahun 2018 yakni sebesar Rp124.150 juta. Perkembangan aset produktif Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

Whereas for non performing assets in 2019 amounted to Rp59,539 million, decreased compared to banks' non performing assets in 2018 which amounted to Rp124,150 million. The development of Bank Papua's performing assets is illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Aset Tidak Produktif Tahun 2015-2019
Table of Development of Non-Earning Assets for 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Aktiva Non Produktif	113.941	113.941	129.462	124.150	123.541	(609)	-0,49%	*NON PERFORMING ASSET*
Agunan Yang Diambil Alih	113.772	113.772	129.293	123.981	123.372	(609)	-0,49%	*Foreclosed properties*
Properti Terbengkalai	169	169	169	169	169	-	-	*Neglected Property*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:	(13.941)	(28.941)	(28.941)	(61.400)	(64.002)	(2.602)	4,24%	*Allowance for impairment losses:*
Aset Yang Diambil Alih	(13.772)	(28.772)	(28.772)	(61.231)	(63.833)	(2.602)	4,25%	*Forclosed Asset*
Properti Terbengkalai	(169)	(169)	(169)	(169)	(169)	-	-	*Neglected Property*
Netto	**100.000**	**85.000**	**100.521**	**62.750**	**59.539**	**(3.211)**	**-5,12%**	*Net*

Liabilitas/ Kewajiban

Liabilities

Liabilitas atau kewajiban Bank Papua mengalami peningkatan dari Rp19.285.891 juta pada tahun 2018 menjadi Rp24.745.538 juta di tahun 2019. Perkembangan Liabilitas Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

Bank Papua's liabilities have increased from Rp19,285,891 million in 2018 to Rp24,745,538 million in 2019 .. The development of Bank Papua's Liabilities is illustrated in the table below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Liabilitas segera	978.224	566.370	664.354	828.362	1.353.706	525.344	63,42%	*Liabilities Payable on Demand*
Simpanan Nasabah	15.787.212	16.477.114	16.478.662	17.929.061	22.844.935	4.915.874	27,42%	*Deposits from Customer*
Simpanan dari bank lain	119.151	90.817	91.770	64.755	115.954,00	51.199	79,07%	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	235.143	325.000	8.594	198.757	77.564	(121.193)	-60,98%	*Borrowing - Third parties*
Liabilitas lain-lain	432.576	781.746	397.286	264.956	353.379	88.423	33,37%	*Other liabilities*
Jumlah	**17.552.306**	**18.242.594**	**17.725.808**	**19.285.891**	**24.745.538**	**5.459.647**	**28,31%**	**Total**

Liabilitas
Liabilities

1. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek yang terdiri atas liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan bank lain pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 29,18% menjadi sebesar Rp24.314.595 juta dari Rp18.822.178 pada tahun 2018. Semua pos akun mengalami peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

1. Short-term Liabilities

Short-term liabilities consisting of liabilities Payable on Demand, customer deposits and other bank deposits in 2019 increased by 29.18% to Rp24,314,595 million from Rp18,822,178 in 2018. All account posts experienced a significant increase as shown in the table below this :

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Liabilitas Tahun 2015-2019
Table of Liability Development for 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Liabilitas segera	978.224	566.370	664.354	828.362	1.353.706	525.344	63,42%	*Liabilities Payable on Demand*
Simpanan Nasabah	15.787.213	16.478.662	16.563.805	17.929.809	22.844.982	4.915.174	27,41%	*Deposits from Customer*
Simpanan dari bank lain	119.151	90.817	91.770	64.007	115.906	51.900	81,08%	*Deposits from other banks*
Total	**16.884.588**	**17.135.849**	**17.319.929**	**18.822.178**	**24.314.595**	**5.492.417**	**29,18%**	**Total**

Liabilitas Jangka Pendek
Short-term Liabilities

1.1 Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank Papua yang harus segera dibayar, dengan rincian: Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara, Rekening Titipan, Kiriman Uang, Utang Pajak, Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah, Utang Bunga, dan Lainnya. Sampai dengan akhir Desember 2019, terjadi peningkatan liabilitas yakni menjadi sebesar Rp1.353.706 juta yang sebelumnya sebesar Rp828,362 juta pada tahun 2018. Posisi liabilitas segera Bank Papua per 31 Desember 2019 tergambar pada tabel dibawah ini:

1.1 Liabilities Payable on Demand

Liabilities Payable on Demand are obligations of Bank Papua that must be paid immediately, with the following details: Liabilities to the Treasury and State Treasury Office, Safekeeping Accounts, Remittances, Tax Debt, Guarantee Deposits that are due but not yet taken by customers, Debt Interest, and Others. Until the end of December 2019, there was an increase in liabilities to Rp1,353,706 million, which was previously Rp828,362 million in 2018. The liabilities Payable on Demand position of Bank Papua as of December 31, 2019 is illustrated in the table below:

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara	437.790	134.017	112.428	213.399	346.984	133.585	62,60%	*Liabilities to the Treasury and State Treasury Office*
Rekening Titipan Utang Pajak Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo	458.254	415.434	521.300	605.242	996.100	390.858	64,58%	*Account Deposit Guarantee Debt Deposit Guarantee that has matured*
Utang Pajak Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo	41.671	-	13.985	-	-	-	-	*Wasteful Warranty Tax Payable*
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	39.739	15.071	12,01	5.096	5.427	331	6,50%	*Deposit Guarantee that has matured but not yet taken by the customer*
Utang bunga	769	1.848	4.630	4.625	5.195	570	12,32%	*Interest debt*
Jumlah	**978.224**	**566.370**	**664.353**	**828.362**	**1.353.706**	**525.344**	**63,42%**	**Total**

dalam Juta (*in million*) Rp

Liabilitas Segera
Current liabilities

1.2 Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah merupakan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk dana pihak ketiga Bank Papua yang terdiri dari produk giro, tabungan, dan deposito dan simpanan dari bank lain. Sampai dengan akhir Desember 2018, komposisi simpanan nasabah Bank Papua didominasi oleh produk giro dan deposito, dimana terjadi pertumbuhan pada produk tersebut, sehingga total simpanan nasabah mengalami peningkatan yakni dari Rp17.993.816 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp22.960.889 juta pada tahun 2019. Pertumbuhan simpanan nasabah bank tergambar pada grafik dibawah ini:

1.2 Customer Deposits

Customer deposits are third party funds collected from the public through Bank Papua third party fund products consisting of current accounts, savings, and time deposits and deposits from other banks. As of the end of December 2018, the composition of Bank Papua customer deposits was dominated by current accounts and time deposits, where there was growth in these products, so that total customer deposits increased from Rp17,993,816 million in 2018 to Rp22,960,889 million in 2019. The growth of bank customer deposits is illustrated in the graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
DPK NON BANK								*NON BANK TPF*
Giro	7.251.987	7.033.795	7.641.693	8.151.733	11.086.817	2.935.084	36,01%	*Current Account*
Tabungan	5.877.399	6.287.064	6.572.270	7.361.170	8.804.223	1.443.052	19,60%	*Savings*
Deposito	2.657.827	3.157.804	2.349.842	2.416.906	2.953.943	537.737	22,26%	*Time Deposit*
JUMLAH	**15.787.213**	**16.478.663**	**16.563.805**	**17.929.809**	**22.844.982**	**4.915.873**	**27,42%**	**TOTAL**
DPK BANK								*BANK TPF*
Giro	116.561	84.250	89.793	54.715	46.754	(7.961)	-14,55%	*Current Account*
Tabungan	1.339	5.117	1.727	4.242	6.246	2.004	47,24%	*Savings*
Deposito	1.250	1.450	250	5.050	62.906	57.156	985,79%	*Time Deposit*
JUMLAH	**119.151**	**90.817**	**91.770**	**64.007**	**115.906**	**51.199**	**79,07%**	**TOTAL**
TOTAL DPK	**15.791.142**	**16.569.479**	**16.655.575**	**17.993.816**	**22.960.889**	**4.967.072**	**27,60%**	***TOTAL TPF***

Simpanan Nasabah
Total NON BANK TPF

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang yang terdiri atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga serta liabilitas lain-lain pada tahun 2019 adalah sebesar Rp430.943 juta, menurun sebesar -7,07% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp463.713 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pinjaman yang diterima dari pihak ketiga sebesar Rp121.193 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. *Long-term Liability*

Long-term liabilities consisting of loans received from third parties and other liabilities in 2019 amounted to Rp430,943 million, a decrease of -7.07% from 2018, amounting to Rp463,713 million. This decrease was caused by a decrease in loans received from third parties amounting to Rp121,193 million compared to the previous year.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	235.143	325.000	8.595	198.757	77.564	(121.193)	-60,98%	*Borrowing - Third parties*
Cadangan Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-	-	-	-	-			*Reserves Estimated losses on commit¬ments and contin¬gencies*
Liabilitas lain-lain	432.576	781.745	397.286	264.956	353.379	88.423	33,37%	*Other liabilities*
Total	**667.719**	**1.106.745**	**407.898**	**463.713**	**430.943**	**(32.770)**	**-7,07%**	**Total**

Liabilitas Jangka Panjang
Long-term Liabilities

2.1 Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima Bank Papua hingga tahun 2019 terdiri dari dukungan dana dari Bank Indonesia dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Pinjaman Rekening Dana Investasi, dan Pinjaman KUMK SUP-005. Sampai dengan akhir Desember 2019, total Pinjaman yang diterima Bank Papua sebesar Rp77.564 juta sangat jauh menurun dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp198.757 juta, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 2 pos akun pinjaman yaitu pos akun KUMK dan Program Dana FLPP. Pertumbuhan pinjaman yang diterima bank tergambar pada tabel dan grafik dibawah ini.

2.1 Borrowing

Borrowing by Bank Papua until 2019 consist of financial support from Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Liquidity Loan (KLBI), Investment Fund Account Loans, and KSME SUP-005 Loans. Until the end of December 2019, the total borrowing by Bank Papua amounted to Rp77,564 million, which is very much decreased from 2018 which was recorded at Rp198,757 million, where in 2019 there were only 2 loan account posts namely KSME SUP account -)) 5 and the FLPP Fund Program. The growth of borrowing by banks is illustrated in the table and graph below.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
- Bank Indonesia	143	-	-	-	-	-	0,00%	*- Bank Indonesia*
- Interbank Call Money Bank Umum	200.000	300.000	-	150.000	-	(150.000)	-100,00%	*- Interbank Call Money Commercial Banks*
- KUMK SUP-005	35.000	25.000	8.595	5.058	585	(4.473)	-88,44%	*- KUMK SUP-005*
- Program Dana FLPP	-	-	-	43.699	76.979	33.280	76,16%	*- FLPP Fund Program*
Total	**235.143**	**325.000**	**8.595**	**198.757**	**77.564**	**(121.193)**	**-60,98%**	*Total*

Pinjaman yang Diterima
Borrowing

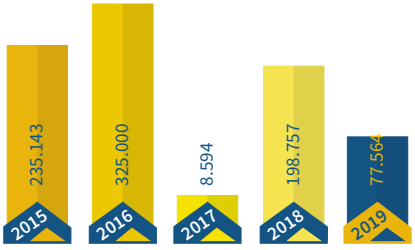

2.2 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.13/658/ DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontijensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

2.2 Estimated Loss on Commitments and Contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No.13 / 658 / DPNP / DPnP dated December 23, 2011, Banks are no longer required to establish allowance for impairment losses on non-performing assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank must still calculate the allowance for impairment losses based on the applicable Financial Accounting Standards.

2.3 Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain terdiri dari Jasa produksi dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, Rekening Titipan, Liabilitas Manfaat Karyawan, Setoran Jaminan, Bunga Deposito, Biaya yang masih harus dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan lainnya. Pada akhir tahun 2019, Liabilitas lain-lain mengalami peningkatan dari Rp264.956 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp353.379 juta di tahun 2019. Peningkatan ini ini dikarenakan meningkatnya saldo pada jasa produksi dan tantiem, liabilitas manfaat karyawan, rekening titipan, bunga depsito dan biaya yang masih harus dibayar secara signifikan. Pertumbuhan Liabilitas lain-lain tergambar pada grafik dibawah ini:

2.3 Other liabilities

Other liabilities consist of production services and bonuses for the Board of Director and Board of Commissioners, Deposit Accounts, Employee Benefit Liabilities, Deposits Guarantee, Interest on Deposits, Accrued Fees, Prepaid Income, and others. At the end of 2019, other liabilities increased from Rp264,956 million in 2018 to Rp353,379 million in 2019. This increase was due to increased balances on production and tantiem services, employee benefit liabilities, employee benefit accounts, deposit accounts, deposit interest and costs accrued significantly. Growth of other liabilities is illustrated in the graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	151.242	67.643	146	63.575	86.648	23.073	36,29%	*Production services and Tantiem of BOD and Supervisory Board*
Rekening Titipan	97.047	429.246	19.322	19.895	22.214	2.319	11,66%	*Safekeeping account*
Liabilitas manfaat karyawan	130.875	258.824	359.451	160.171	219.668	59.497	37,15%	*Employee benefits liability*
Setoran jaminan	37.787	9.333	1.629	4.046	3.804	(242)	-5,98%	*Deposit guarantee*
Bunga deposito	8.611	9.857	6.671	3.006	5.412	2.406	80,04%	*Interest on deposits*
Biaya yang masih harus dibayar	6.366	6.396	9.550	6.068	14.911	8.843	145,73%	*Accrued cost*
Pendapatan diterima dimuka	340	185	29	7.693	57	(7.636)	-99,26%	*Prepaid income*
Lainnya	308	261	487	502	665	163	32,47%	*Others*
Jumlah	**432.576**	**781.745**	**397.286**	**264.956**	**353.379**	**88.423**	**33,37%**	*Total*

Liabilitas Lain-Lain
Other Liabilities

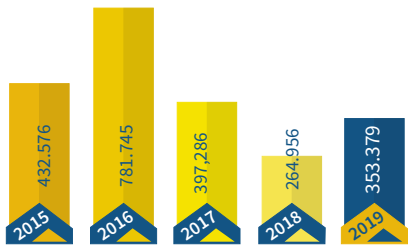

Ekuitas

Pada tahun 2019, jumlah ekuitas Bank Papua naik dari Rp3.170.867 juta ditahun 2018 menjadi sebesar Rp3.438.147 juta pada tahun 2019. Peningkatan ekuitas tersebut lebih banyak diakibat oleh penambahan modal saham, sehingga modal saham Bank Papua sebelumnya sebesar Rp2.030.945 menjadi sebesar Rp2.300.800 juta.

Equity

In 2019, Bank Papua's total equity rose from Rp3,170,867 million in 2018 to Rp3,438,147 million in 2019. The increase in equity was mainly due to additional share capital, so that Bank Papua's share capital previously amounted to Rp2,030,945 to Rp2,030,945 .300,800 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Modal Saham	1.490.605	1.698.825	1.907.850	2.030.945	2.300.800	269.855	13,29%	*Share Capital*
Tambahan Modal Disetor	96.160	58.171	95.307	173.233	269.855	(39.922)	-23,05%	*Additional Paid-in Capital*
Rugi yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setelah pajak	3.340	5.451	38	2.979	75	(2.904)	-97,48%	*Unrealized loss on Marketable Securities, Bonds after tax*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Program Manfaat Pasti	(55.462)	(257.513)	(305.784)	(164.495)	-	164.495	0,00%	*Actuarial Earning (Loss) on the Definite Benefit Program*
Saldo Laba	1.270.689	864.321	977.593	1.128.205	1.003.961	(124.244)	-11,01%	*Retained Earning*
Telah ditentukan penggunaannya	887.346	1.101.025	864.320	909.629	997.060	87.431	9,61%	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	383.343	(236.704)	113.273	218.576	6.901	(211.675)	-96,84%	*Unappropriated*
Jumlah	**2.805.332**	**2.369.255**	**2.675.004**	**3.170.867**	**3.438.147**	**267.280**	**8,43%**	**Total**

1. **Modal Saham**
   Modal Saham adalah Jumlah saham dari masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham. Per 31 Desember 2019 modal saham Bank Papua terjadi pertumbuhan sebesar 13,29% dari tahun sebelumnya atau sekitar Rp2.030.945 juta sehingga modal saham yang telah disahkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.300.800 juta.
2. **Tambahan Modal Disetor**
   Tambahan modal disetor sebesar Rp269.855 juta telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2019.
3. **Keuntungan (Rugi) yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setelah pajak**
   Keuntungan (rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan Bank Papua per 31 Desember 2019 yakni sebesar Rp75 juta.
4. **Saldo Laba**
   Saldo Laba Bank Papua per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.003.961 juta sedangkan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.128.205 juta. Akun ini terdiri dari laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan) dan yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk akun cadangan terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan.

1. ***Share Capital***
   Share Capital is the number of shares of each share that has been issued and paid up by shareholders. As of December 31, 2019, Bank Papua's share capital grew by 13.29% from the previous year or around Rp2,030,945 million, so the share capital that had been approved in 2019 was Rp2,300,800 million.
2. ***Additional Paid-in Capital***
   Additional paid up capital of Rp133,311 million was authorized as share capital based on the Decision of the General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2019.
3. ***Unrealized gain (loss) from marketable securities, bonds after tax***
   Unrealized gains (loss) on securities and government bonds in the group are available for sale after the deferred tax of Bank Papua as of December 31, 2019, amounting to Rp75 million.
4. ***Retained Earnings***
   Bank Papua's Retained Earning as of December 31, 2019 amounted to Rp1,003,961 million while the unappropriated retained earning was Rp1,128,205 million. This account consists of earnings for appropriated (reserves) and for unappropriated. For reserved accounts consist of general reserved and destination reserved.

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Bank Papua menetapkan kebijakan dalam pengelolaan arus kas adalah untuk mengoptimalkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar termasuk arus kas yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity asset* dan *rate sensitivity liability*). Laporan arus kas Bank Papua tahun 2019 disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Uraian mengenai arus kas, tergambar pada tabel dan grafik dibawah ini.

Bank Papua established a policy in managing cash flows to optimize cash inflows with outflows, including cash flows that are sensitive to interest rates (rate sensitivity assets and rate sensitivity liabilities). Bank Papua's cash flow statement for 2019 was prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. A description of cash flow is illustrated in the table and graph below.

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Arus Kas Tahun 2015 - 2019
Table of Cash Flow Progress for 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	184.323	(140.435)	(138.089)	26.988	1.359.802	1.332.814	4938,54%	*Net Cash Flows Provided by Operating Activities*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(26.638)	(39.353)	(36.457)	(9.795)	(23.583)	-13.788	140,77%	*Net Cash Flows Provided by Investment Activities*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	367.404	46.410	(70.244)	323.220	(22.405)	-345.625	-106,93%	*Net Cash Flows Provided from Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	525.089	(133.378)	(244.790)	340.413	1.313.813	973.400	285,95%	*Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	2.106.409	2.631.498	2.498.120	2.253.329	2.593.743	340.414	15,11%	*Cash and Cash Equivalents Early Years*
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**2.631.498**	**2.498.120**	**2.253.330**	**2.593.742**	**3.907.556**	**1.313.814**	**50,65%**	***Cash and Cash Equivalents At End of Year***

Perkembangan Arus Kas
Cashflow Development

Pada tahun 2019, Bank mencatatkan kas dan setara kas akhir tahun yang mencapai Rp3.907.556 juta. Kas dan setara kas akhir tahun tersebut mengalami peningkatan Rp1.313.814 juta atau sebesar 50,65% dari kas dan setara kas awal tahun yang mencapai Rp2.593.742 juta

In 2019, the Bank recorded a year-end cash and cash equivalent of Rp3,907,556 million. The end of year cash and cash equivalents increased by Rp1,313,814 million or by 50.65% of cash and cash equivalents beginning in the year which reached Rp2,593,742 million

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi

Di tahun 2019, Bank mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang mencapai Rp1.359.802 juta mengalami peningkatan dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang sebesar Rp26.988 juta di 2018. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi khususnya diperoleh dari penerimaan dari pendapatan bunga dan komisi serta kenaikan dalam kewajiban operasi terkait simpanan nasabah.

Cash Flow From (For) Operating Activities

In 2019, the Bank recorded a net cash flow obtained from operating activities which reached Rp1,359,802 million, an increase from net cash obtained from operating activities amounting to Rp26,988 million in 2018. Increased net cash flow obtained from operating activities in particular was obtained from receipts from interest income and commissions as well as increases in operating obligations related to customer deposits.

dalam Juta (*in million*) Rp

Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	2018	2019	Growth		Cash Flows From Operating Activities
			+/-	%	
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi	1.895.881	2.105.410	209.529	11,05%	*Recipts From Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi	(353.451)	(417.223)	(63.772)	18,04%	*Payment of Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Kepada Karyawan	(537.115)	(824.750)	(287.635)	53,55%	*Payment of Employee's Benefit*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(443.320)	(313.267)	130.053	-29,34%	*Payment of General and Administrative Expenses*
Penerimaan Kredit Hapus Buku	97.123	105.548	8.425	8,67%	*Recoveries from Loan Debt Written - off*
Penerimaan Operasional Lainnya	117.407	38.981	(78.426)	-66,80%	*Receipts from Operating Income*
Penerimaan bukan Operasional	4.665	44.360	39.695	850,91%	*Receipts from Non Operating Income*
Penerimaan (Pembayaran) Pajak Penghasilan	(61.588)	16.767	78.355	-127,22%	*Operating Assets and Liabilities*
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi	**719.601**	**755.827**	**36.226**	**5,03%**	***Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities***
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:					*Decreasing (increasing) in assets:*
Penempatan pada Bank Lain	(689.795)	(526.284)	163.511	-23,70%	*Placement with Other Bank*
Surat Berharga	628.457	7.004	(621.453)	-98,89%	*Marketable Securities*
Reverse Repo	(307.465)	(1.848.333)	(1.540.868)	501,15%	*Reverse Repo*
Kredit yang Diberikan	(1.993.972)	(2.262.120)	(268.148)	13,45%	*Loans*
Aset Lain-lain	135.064	(131.154)	(266.218)	-197,11%	*Other Assets*
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi	**(2.227.711)**	**(4.760.888)**	**(2.533.177)**	**113,71%**	***Decreasing (Increasing) in Assets***
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:					*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:*
Simpanan	1.338.240	4.967.073	3.628.833	271,16%	*Deposits*
Liabilitas Segera	135.044	525.344	390.300	289,02%	*Liabilities Payable on Demand*
Liabilitas Lain-lain	61.813	(127.553)	(189.366)	-306,35%	*Other Liabilities*
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi	1.535.098	5.364.863	3.829.765	249,48%	*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities*
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**26.988**	**1.359.802**	**1.332.814**	**4938,54%**	***Cash Net Provided from Operating Activities***

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Investasi

Selama tahun 2019, Bank mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yang mencapai kerugian Rp(23.583) juta mengalami penurunan kerugian dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2018 sebesar (Rp9.795) juta. Penuruan kerugian arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tersebut khususnya digunakan untuk pembelian aset tetap berupa inventaris kantor dan inventaris lainnya yang cukup signifikan di 2019.

Cash Flow From (For) Investment Activities

During 2019, the Bank recorded a net cash flow used for investment activities that reached a loss of Rp(23,583) million, decreased losses from net cash used for investment activities in 2018 amounting to (Rp9,795) million. The reduction in net cash flow losses used for these investment activities is specifically used to purchase fixed assets in the form of office inventory and other significant inventory in 2019.

dalam Juta (*in million*) Rp

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	2018	2019	Growth		*Cash Flows From Investing Activities*
			+/-	%	
Pembelian Aset Tetap	(9.803)	(23.820)	(14.017)	142,99%	*Acquisition Of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	8	237	229	2862,50%	*Proceeds From Sale Of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih (Digunakan) Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(9.795)	(23.583)	(13.788)	140,77%	*Net Cash (Used In) Provided From Investing Activities*

Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan

Di tahun 2019, Bank mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang mencapai Rp(22.405) juta atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang sebesar Rp323.220 juta di 2018. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan khususnya berasal dari penambahan modal saham disetor.

Cash Flow From (For) Funding Activities

In 2019, the Bank recorded a net cash flow obtained from funding activities which reached Rp(22,405) million or experienced a significant decrease in net cash obtained from funding activities amounting to Rp323,220 million in 2018. Declining net cash flow obtained from funding activities specifically derived from additional paid-in capital.

dalam Juta (*in million*) Rp

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2018	2019	Growth		*Cash Flows From Financing Activities*
			+/-	%	
Pencairan (Pelunasan) yang Diterima	190.163	(121.193)	(311.356)	-163,73%	*Receiving (Settlement) Of Borrowing*
Penambahan Modal Disetor	201.021	229.933	28.912	14,38%	*Additional Paid Up Capital*
Pembayaran Deviden	(67.964)	(131.146)	(63.182)	92,96%	*Payment Of Dividend*
Arus Kas Bersih (Digunakan) Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	323.220	(22.405)	(345.625)	-106,93%	*Net Cash (Used In) Provided From Financing Activities*

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Besarnya kas dan setara kas akhir tahun 2019 sebesar Rp3.907.556 juta meningkat sebesar 50,65% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.593.743 juta. Hampir semua akun menunjukan peningkatan yang signifikan.

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri atas :

End of Year Cash and Cash Equivalents

The amount of cash and cash equivalents at the end of 2019 was Rp3,907,556 million, an increase of 50.65% from the previous year which amounted to Rp2,593,743 million. Almost all accounts show a significant increase.

End of year cash and cash equivalents consist of:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2018	2019	Growth		*Description*
			+/-	%	
Kas	996.585	1.700.444	703.859	70,63%	*Cash*
Giro Bank Indonesia	1.589.283	2.178.386	589.103	37,07%	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank Lain	7.875	28.726	20.851	264,77%	*Current Accounts with other banks*
Jumlah kas dan setara kas	2.593.743	3.907.556	1.313.813	50,65%	*Total cash and cash equivalents*

Laporan Kinerja Laba Rugi

Income and Loss Performance Statement

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Papua telah berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp168.492 juta, mengalami penurunan dari laba tahun sebelumnya yakni sebesar Rp362.805 juta ditahun 2018. Penurunan ini disebabkan adanya beban komprehensif sebesar Rp81.545 juta. Tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya Pendapatan Operasional terutama pendapatan bunga dan operasional mengalami peningkatan sebesar 5,97% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu meningkat dari Rp2.116.174 juta pada tahun 2018, menjadi Rp2.242.506 juta pada tahun 2019. Laporan Kinerja Laba Rugi bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

As of December 31, 2019, Bank Papua had achieved a net earning of Rp168,492 million, a decrease from the previous year's earning of Rp362,805 million in 2018. This decrease was due to a comprehensive expenses of Rp81,545 million. But if it is seen from the growth of Operational Income, especially interest and operational income, it experienced an increase of 5.97% compared to the previous year, which increased from Rp2,116,174 million in 2018, to Rp2,242,506 million in 2019. Bank's Earning and Loss Report illustrated in the table and graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Tabel Perkembangan Laba Tahun 2015-2019
Table of Earning Development 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Pendapatan Bunga & Operasional	2.347.255	2.220.022	2.294.936	2.116.174	2.242.506	126.332	5,97%	*Interest & Operational Income*
Beban Bunga	(580.229)	(447.745)	(432.383)	(353.451)	(415.346)	(61.895)	17,51%	*Interest Expenses*
Pendapatan Operasional Bersih	1.767.026	1.772.277	1.862.553	1.762.723	1.827.160	64.437	3,66%	*Net Operating Income*
Pembentukkan CKPN	(281.306)	(879.997)	(687.937)	(505.473)	(180.623)	324.850	-64,27%	*CKPN Forming*
Beban Operasional Lainnya	(1.021.379)	(1.089.999)	(1.048.283)	(1.086.493)	(1.347.890)	(261.397)	24,06%	*Other Operating Expenses*
Laba Operasional	464.341	(197.718)	126.333	170.757	298.647	127.890	74,90%	*Operational Earning*
Pendapatan (Beban) Non Operasional	63.960	53.638	18.052	113.035	43.977	(69.058)	-61,09%	*Non-Operational Income (Expense)*
Laba Sebelum Pajak	528.301	(144.081)	144.385	283.792	342.624	58.832	20,73%	*Earning before tax*
Beban Pajak Penghasilan	(144.957)	(92.624)	(31.113)	(65.217)	(92.587)	(27.370)	41,97%	*Income Tax Expense*
Laba Bersih Tahun Berjalan	383.344	(236.704)	113.273	218.575	250.037	31.462	14,39%	*Net Earning of the Current Year*
Pendapatan (Beban) Komprehensif	(52.122)	(147.534)	42.884	144.230	(81.545)	(225.775)	-156,54%	*Comprehensive Income (Expense)*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	331.222	(384.239)	156.156	362.805	168.492	(194.313)	-53,56%	*Comprehensive Earning of the Current Year*

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Bank Papua bersumber dari Pendapatan Bunga, Pendapatan Operasional Lainnya selain bunga serta pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan bunga ini meliputi pendapatan bunga kredit dan bunga penempatan, baik penempatan kepada Bank indonesia, penempatan pada bank lain dan pendapatan bunga efel-efek.

Selain itu Pendapatan Operasional juga bersumber dari pendapatan selain bunga diantaranya pendapatan hapus buku, pendapatan operasional lainya dan keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan, serta pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan Operasional bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

1. Operating Income

Bank Papua Operational Income is sourced from Interest Income, Other Operating Income in addition to interest and fees and commission income. This interest income includes loan interest income and placement interest, both placements with Bank Indonesia, placements with other banks and interest-securities income.

In addition, Operational Income also comes from non-interest income including write-off income, other operating income and earning (loss) from changes in unrealized fair value and sales of financial instruments, as well as provision and commission income. The bank's operating income is illustrated in the table and graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Pendapatan Bunga Kredit	1.727.926	1.624.348	1.695.828	1.490.763	1.514.177	23.414	1,57%	*Loan Interest Income*
Pendapatan Bunga Penempatan	267.009	464.312	418.967	402.012	483.248	81.236	20,21%	*Placement Interest Income*
Pendapatan Operasional lainnya	519.512	31.005	81.556	123.171	144.529	21.358	17,34%	*Other Operating Income*
Pendapatan provisi dan komisi	94.223	100.356	98.585	100.228	100.552	324	0,32%	*Provision and commission income*
Jumlah	**2.347.255**	**2.220.021**	**2.294.936**	**2.116.174**	**2.242.506**	**126.332**	**5,97%**	***Total***

Pendapatan Bunga dan Operasional

Interest and Operational Income

1.1 Pendapatan Bunga Kredit

Pendapatan bunga bank dari hasil penyaluran kredit lebih besar dari pendapatan lainnya. Untuk tahun 2019 ini, bank mencatat pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit adalah sebesar Rp1.514.177 juta, atau meningkat sebesar 1,57% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1.490.763 juta. Pendapatan bunga kredit Bank Papua yang terdiri atas pendapatan bunga yang mengalami penurunan yaitu Kredit Modal Kerja (-2,52%), Kredit Investasi (-10,41%), dan Kredit Karyawan (-2,47%). Sedangkan pendapatan bunga dari Kredit yang mengalami peningkatan adalah Kredit Konsumsi (0,18%), Kredit Sindikasi (49,36%) dan Kredit Program Pemerintah (131,34%). Pendapatan Bunga Kredit bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

1.1 Loan Interest Income

Bank interest income from lending is greater than other income. For 2019, the bank recorded interest income earned from lending amounting to Rp1,514,177 million, an increase of 1.57% from 2018 which was recorded at Rp1,490,763 million. Bank Papua's loan interest income which consists of interest income that has decreased, namely Working Capital Loans (-2.52%), Investment Loans (-10.41%), and Employee Loans (-2.47%). Whereas interest income from loans that experienced an increase were Consumer Loans (0.18%), Syndicated Loans (49.36%) and Government Program Loans (131.34%). Interest on bank loans is illustrated in the table and graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Kredit Modal Kerja	486.752	437.440	354.732	296.072	288.608	(7.464)	-2,52%	*Working Capital Loan*
Kredit Konsumsi	822.461	874.901	1.051.961	945.637	947.368	1.731	0,18%	*Consumer Loan*
Kredit Investasi	206.335	163.267	153.458	97.549	87.390	(10.159)	-10,41%	*Investment Loan*
Kredit Sindikasi	158.152	119.866	106.250	100.368	149.912	49.544	49,36%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	22.217	20.028	26.311	25.693	25.059	(634)	-2,47%	*Employee Loan*
Kredit Program Pemerintah	20.929	8.846	3.116	3.628	8.393	4.765	131,34%	*Government Program Loans*
Kredit Unwinding	1.568	-	-	21.816	7.447	(14,369)	-65.86%	*Unwinding Loan*
Jumlah	**1.718.414**	**1.624.348**	**1.695.828**	**1.490.763**	**1.514.177**	**23.414**	**1,57%**	**Total**

1.2 Pendapatan Bunga Penempatan

Pendapatan Bunga Penempatan Bank Papua ini meliputi Bunga Penempatan Bank Lain, Penempatan Bank Indonesia dan Bunga Efek-efek. Penempatan Bunga Penempatan didominasi dari bunga penempatan efek-efek. Untuk tahun 2019 ini, bank membukukan pendapatan bunga penempatan sebesar Rp483.248 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebesar Rp402.012 juta, maka terjadi peningkatan sebesar 20,21%.

1.2 Placement Interest Income

Interest Income for Bank Papua Placement includes Interest for Placement of Other Banks, Placement of Bank Indonesia and Securities Interest. Placement of Interest Placement is dominated by interest placement of securities. For 2019, the bank posted placement interest income of Rp 483,248 million, compared to 2018 which was Rp 402,012 million, an increase of 20.21%.

dalam Juta (*in million*) Rp

Pendapatan Bunga Penempatan	2018	2019	Growth		*Placement Interest Income*
			+/-	%	
Bunga penempatan bank lain	162.266	197.952	35.686	21,99%	*Placement interest other bank*
Bunga penempatan bank Indonesia	6.322	6.898	576	9,11%	*Placement interest at Bank Indonesia*
Bunga Efek-efek	233.425	278.398	44.973	19,27%	*Marketable securities interest*
Total	**402.012**	**483.248**	**81.236**	**20,21%**	*Total*

1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Operasional lainnya berasal dari Pendapatan hapus buku, Pendapatan operasional lainnya, Keuntungan (kerugian) dari perubahan, serta nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan. Untuk tahun 2019 ini, bank membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp144.529 juta meningkat 17,34% dari tahun 2018 yakni sebesar Rp123.171 juta.

1.3 Other Operating Income

Other Operating Income is derived from write off income, other operating income gains (losses) from changes, as well as unrealized fair value and sale of financial instruments. For 2019, the bank posted another operating income of Rp144,529 million, an increase of 17.34% from 2018 which was Rp123,171 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Pendapatan Operasional lainnya	2018	2019	Growth		*Operational Income*
			+/-	%	
Pendapatan hapus buku	97.123	105.548	8.425	8,67%	*Written off income*
Pendapatan operasional lainnya	58.612	49.837	(8.775)	-14,97%	*Other operational income*
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan	(32.564)	(10.856)	21.708	-66,66%	*Unrealized gain (loss) on changes in fair value and sale of financial instruments*
Jumlah	**123.171**	**144.529**	**21.358**	**17,34%**	*Total*

1.4 Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan Provisi dan Komisi Bank Papua berasal dari provisi lainnya dan hasil komisi. Untuk tahun 2019, bank membukukan pendapatan Provisi dan Komisi sebesar Rp100.552 juta atau meningkat sebesar 0,32% dari tahun 2018 yakni sebesar Rp100.228 juta.

1.4 Provision and Commission Incomes

Bank Papua Provision and Commission income comes from other provisions and commission proceeds. For 2019, the bank posted Provision and Commission income of Rp100,552 million or an increase of 0.32% from 2018 which was Rp100,228 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Pendapatan Provisi dan Komisi	2018	2019	Growth		*Provision and Commisions Income*
			+/-	%	
Provisi lainnya	63.469	63.807	338	0,53%	*Other provision*
Hasil komisi	36.759	36.745	(14)	-0,04%	*Comissions*
Jumlah	**100.228**	**100.552**	**324**	**0,32%**	*Total*

2. Beban Bunga dan Operasional

Beban Operasional Bank Papua bersumber dari Beban Bunga, Beban Provisi dan Komisi, Beban Pembentukkan CKPN dan Beban Operasional Lainnya. Di tahun 2019 Beban Bunga & Operasional sebesar Rp1.943.860 juta mengalami penurunan -1,36% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.970.634 juta. Beban yang mengalami penurunan terbesar yaitu beban Pembentukan CKPN dimana beban tersebut turun sebesar -65,96% yaitu ditahun 2018 sebesar Rp530.692 juta sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp180.623 juta.

2. *Interest and Operational Charges*

Bank Papua operational expenses are sourced from interest expenses, provision fees and commissions, the CKPN forming expenses and other operational expenses. In 2019, Interest & Operational Expenses of Rp1,943,860 million decreased by -1.36% compared to the previous year of Rp1,970,634 million. The expense that experienced the biggest decrease was CKPN forming expenses where the expenses decreased by -65.96%, namely in 2018 amounting to Rp530,692 million while in 2019 amounting to Rp180,623 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Beban Bunga	578.640	445.924	431.052	351.763	415.347	63.584	18,08%	*Interest Expenses*
Beban provisi dan komisi	1.590	1.821	1.331	1.689	1.916	227	13,42%	*Provision and commission expenses*
Pembentukan CKPN	281.306	879.997	687.937	530.692	180.623	(350.069)	-65,96%	*Allowaqnce for Impairment Loss*
Beban Operasional Lainnya	1.021.380	1.089.999	1.048.283	1.086.493	1.345.974	259.481	23,88%	*Other Operating Ex;enses*
Jumlah	**1.882.916**	**2.417.741**	**2.168.603**	**1.970.637**	**1.943.860**	**(26.776)**	**-1,36%**	***Total***

Beban Bunga dan Operasional
Interest and Operational Expenses

2.1 Beban Bunga

Beban bunga pada tahun 2019 sebesar Rp415.346 juta, meningkat 18,08% dibandingan tahun 2018 sebesar Rp351.763 juta. Beban bunga yang mengalami peningkatan adalan beban bunga pada pihak ketiga bukan bank (23,32%), jasa giro pemerintah (11,40%) dan jasa giro swasta (1,79%). Sedangkan beban bunga yang mengalami penurunan adalah bunga pada bank lain (-30,64%) dan jasa giro lainnya (-37,84%).

2.1 Interest Expenses

Interest expenses in 2019 amounted to Rp415,346 million, an increase of 18.08% compared to 2018 of Rp351,763 million. Interest expense that experienced an increase was interest expense on non-bank third parties (23.32%), government current account services (11.40%) and private demand services (1.79%). Whereas the interest expense that decreased was interest on other banks (-30.64%) and other current services (-37.84%).

dalam Juta (*in million*) Rp

Beban bunga dan operasional	2018	2019	Growth		*Interest and operating expenses*
			+/-	%	
Bunga pada pihak ketiga bukan bank	231.212	285.142	53.930	23,32%	*Interest to third parties non bank*
Jasa giro pemerintah	105.313	117.323	12.010	11,40%	*Government current account service*
Jasa giro swasta	7.137	7.265	128	1,79%	*Private current account service*
Bunga pada bank lain	8.064	5.593	(2.471)	-30,64%	*Interest of other bank*
Jasa giro lainnya	37	23	(14)	-37,84%	*Other current account service*
Jumlah beban bunga	**351.763**	**415.346**	**63.583**	**18,08%**	*Total interest expenses*

2.2 Beban Provisi & Komisi

Beban provisi dan komisi pada tahun 2019 sebesar Rp1.916 juta meingkat 13,44% dari tahun 2018 sebesar Rp1.689 juta.

2.2 Provision & Commission Expenses

Fees and commissions in 2019 amounted to Rp1,916 million, an increase of 13.44% from 2018 amounting to Rp1,689 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Beban Provisi dan Komisi	2018	2019	Growth		*Provision and Commisions Expenses*
			+/-	%	
Komisi/Provisi pinjaman	181	128	(53)	-29,28%	*Loan provision /comissions*
Komisi/Provisi lainnya	1.508	1.787	279	18,50%	*Other provision / comissions*
Jumlah Beban	**1.689**	**1.916**	**227**	**13,44%**	*Total expenses*

2.3 Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pembentukan CKPN terdiri atas akun aset produkti dan aset non produktif. Aset produktif terdiri atas pinjaman yang diberikan dan surat-surat berharga. Sedangkan aset non produktif terdiri atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai.

Pembentukan CKPN pada tahun 2019 sebesar Rp180.623 juta, atau menurun -65,96% dari tahun 2018 sebesar Rp530.692 juta.

2.3 Allowance for Impairment Losses (CKPN)

The CKPN forming consists of performing assets and non performing assets accounts. Productive assets consist of loans and marketable securities. While non-performing assets consist of foreclosed assets and abandoned properties.

The CKPN forming in 2019 was Rp180,623 million, or decreased by -65.96% from 2018 of Rp530,692 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas	2018	2019	Growth		*Provision / (recovery) for possible losses for :*
			+/-	%	
Aset Produktif :					***Earning Assets:***
Pinjaman yang diberikan	484.461	178.021	-306.440	-63,25%	*Loans*
Surat-surat berharga	-	-			*Marketable securities*
Jumlah	484.461	178.021	-306.440	-63,25%	*Total*
Aset Non Produktif					***Non Earning Assets***
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	46.231	2.602	-43.629	-94,37%	*Foreclosed collateral*
Properti Terbengkalai	-	-			*Abandonned property*
Jumlah	46.231	2.602	-43.629	-94,37%	*Total*
Jumlah	**530.692**	**180.623**	**-350.069**	**-65,96%**	*Total*

2.4 Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional lainnya terdiri atas penyusutan dan amortasi, beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, dan beban imbalan manfaat karyawan.

Pada tahun 2019, beban operasional lainnya sebesar Rp1.345.975 juta meningkat 23,88% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.086.492 juta.

2.4 Other Operating Expenses

Other Operating Expenses consist of depreciation and amortation, general and administrative expenses, employee expenses, and employee benefit costs.

In 2019, other operating expenses amounted to Rp1,345,975 million, an increase of 23.88% from the previous year of Rp1,086,492 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Penyusutan dan amortisasi	37.935	40.620	38.671	44.469	27.904	(16.565)	-37,25%	*Depreciation and amortization*
Umum dan administrasi	493.086	521.682	446.805	504.908	503.399	(1.509)	-0,30%	*General and administration*
Tenaga kerja	478.787	468.367	479.967	487.234	580.076	92.842	19,05%	*Employee*
Beban imbalan manfaat karyawan	11.570	59.329	82.840	49.881	234.596	184.715	370,31%	*Employee benefit benefits expense*
Jumlah	**1.021.378**	**1.089.998**	**1.048.283**	**1.086.492**	**1.345.975**	**259.483**	**23,88%**	*Total*

3. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Jumlah pendapatan bukan operasional Bank Papua tahun 2019 mencapai Rp43.977 juta atau mengalami penurunan sebesar -68,19% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp138.253 juta.

3. Non-operational Income (expenses)

Total non-operational income of Bank Papua in 2019 reached Rp43,977 million or decreased by -68.19% compared to 2018 which reached Rp138,253 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Pendapatan Non Operasional	63.960	53.638	18.052	138.253	43.977	(94.276)	-68,19%	*Non-Operational Income (Expense)*

Pendapatan Non Operasional
Non Operating Income

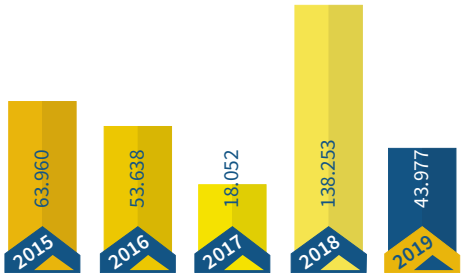

Pendapatan Non Operasional ini meliputi Pendapatan Non Operasional Lainnya, Penerimaan Bunga Excom dan Penerimaan Sewa. Sedangkan beban bukan operasional terdiri atas kerugian lainnya dan kerugian aset rusak/hilang, dengan perincian sebagai berikut :

This Non-Operational Income includes Other Non-Operational Income, Excom Interest Receipts and Lease Receipts. While non-operational expenses consist of other losses and losses of damaged / lost assets, with the following details:

dalam Juta (*in million*) Rp

Pendapatan Bukan Operasional	2018	2019	Growth		*Non Operating Icome*
			+/-	%	
Pendapatan bukan operasional lainnya	137.905	42.599	(95.306)	-69,11%	*Other Non Operating Income*
Excomp interest income	3.523	7.402	3.879	110,11%	*Excomp interest income*
Penerimaan sewa	193	269	76	39,38%	*Rent income*
Jumlah	141.621	50.270	(91.351)	-64,50%	*Total*
Beban Bukan Operasional					*Non Operating Expenses*
Kerugian lainnya	(2.902)	(5.460)	(2.558)	88,15%	*Others losses*
Kerugian aset rusak / hilang	(466)	(833)	(367)	78,76%	*Asset losses*
Jumlah	(3.368)	(6.293)	(2.925)	86,85%	*Total*
Jumlah Pendapatan Bukan Operasional	138.253	43.977	(94.276)	-68,19%	*Total Non Operating Icome*

4. Laba (rugi)

4. Earning (loss)

Laba besih setelah pajak yang berhasil dibukukan oleh Bank Papua pada tahun 2019, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Laba setelah pajak tahun 2019 sebesar Rp250.037 juta atau meningkat 14,39% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp218.576 juta.

Net earning after tax successfully recorded by Bank Papua in 2019, increased when compared to 2018. Earning after tax in 2019 amounted to Rp250,037 million or an increase of 14.39% compared to 2018 which amounted to Rp218,576 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
LABA (RUGI OPERASIONAL)	464.340	(197.719)	126.333	145.539	298.647	153.108	105,20%	*OPERATIONAL EARNING (LOSS)*
Pendapatan Non Operasional	69.081	59.611	21.204	141.622	50.271	(91.351)	-64,50%	*Non-operating income*
Beban Non Operasional	(5.120)	(5.972)	(3.151)	(3.368)	(6.294)	(2.926)	86,88%	*Non-operating expenses*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	528.301	(144.080)	144.386	283.793	342.624	58.831	20,73%	*EARNING (LOSS) BEFORE TAX*
Beban pajak	(144.957)	(92.624)	(31.113)	(65.217)	(92.587)	(27.370)	41,97%	*Tax expense*
Pajak Kini	(137.718)	(68.632)	(40.762)	(65.226)	(111.333)	(46.107)	70,69%	*Current tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	(7.240)	(23.992)	9.649	9	18.746	18.737		*Deferred Tax Benefits*
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	383.343	(236.704)	113.273	218.576	250.037	31.461	14,39%	*NET EARNING (LOSS) AFTER TAX*

Laba Bersih Setelah Pajak
Net Earning After Tax

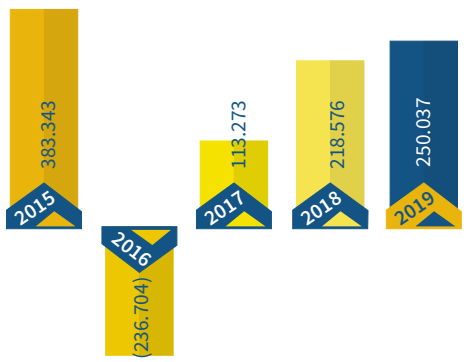

5. Penghasilan (Beban) Komprehensif

Penghasilan (beban) kompreshensif terdiri atas akun pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang akan direklafikasi ke laba rugi.

Untuk pos-pos yang tidak akan direklafikasi ke laba rugi terdiri atas akun pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp(93.700) juta atau menurun sebesar -149,74% dibandingkan tahun 20188 yaitu sebesar Rp188.386 juta. Sedangkan untuk beban pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 sebesar Rp15.058 juta atau meningkat sebesar 131,97% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar (47.096) juta.

Untuk pos-pos yang akan direklafikasi ke laba rugi terdiri atas akun peingkatan (penurunan) nilai surat berharga, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp(3.872) juta atau menurun sebesar -198,78% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.920 juta. Sedangkan untuk akun manfaat (beban) pajak tangguhan atas peningkatan nilai wajar surat berharga mengalami penurunan menjadi Rp968 juta.

5. Comprehensive Income (Expenses)

Comprehensive income (expenses) consist of accounts that will not be reclassified to earning or loss and items that will be reclassified to earning or loss.

Items that will not be reconciled to earning or loss consist of a remeasurement account of employee benefits liabilities, which in 2019 was Rp (93,700) million or decreased by -149.74% compared to 2018 which was Rp188,386 million. As for the deferred tax expense for the re-measurement of employee benefits liabilities in 2019, amounting to Rp15,058 million or an increase of 131.97% compared to 2018, which was (47,096) million.

Items that will be reclassified to earning or loss consist of an increase (decrease) in the value of marketable securities, in 2019 of Rp(3,872) million or a decrease of -198.78% compared to 2018 of Rp3,920 million. As for deferred tax benefit (expense) accounts, the increase in fair value of securities decreased to Rp968 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi								*Items that will not be reclassified to earning or loss*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	64.362	188.386	(93.700)	(282.086)	-149,74%	*Remeasurement of post employment benefit*
Beban pajak Tangguhan atas Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(16.090)	(47.096)	15.058	62.154	131,97%	*Deffered expense tax Remeasurement of post employment benefit*
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi								*Items that will be reclassified to earning or loss*
Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga	3.340	-	(5.400)	3.920	(3.872)	(7.792)	-198,78%	*Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan atas Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga	-	61.032	12	(980)	968	1.948	-198,78%	*Deffered income tax Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	**(116.495)**	**(128.180)**	**42.884**	**144.230**	**(81.546)**	**(225.776)**	**-156,54%**	*Total Other Comprehensive Income*

6. Laba (rugi) Komprehensif

Hingga akhir Desember 2019, Bank Papua telah menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp342.624 juta atau mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp283.793 juta. Hal senada juga tercatat pada laba bersih setelah pajak, dimana Bank mencatat peningkatan 14,39% yakni menjadi Rp250.037 juta pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218.576 juta pada tahun 2018. Untuk Laba (rugi) Komprehensif, Bank mencatat penurunan -53,56% yakni menjadi Rp168.492 juta pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp362.806 juta. Laba (rugi) Komprehensif bank tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini :

6. *Comprehensive Earning (loss)*

Until the end of December 2019, Bank Papua had generated an earning before tax of Rp342,624 million or an increase from 2018 which was only Rp283,793 million. The same thing was also recorded in net earning after tax, where the Bank recorded an increase of 14.39% to Rp250,037 million in 2019 when compared to the previous year which was recorded at Rp218,576 million in 2018. For Comprehensive Income (loss), the Bank recorded a decrease of -53.56% ie to Rp168,492 million in 2019 compared to the previous year which was recorded at Rp362,806 million. The Bank's comprehensive earning (loss) is illustrated in the table and graph below:

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						+/-	%	
Laba (Rugi) Operasional	464,340	(197,719)	126,333	145,538	298,647	153,109	105.20%	*Operating Earning (Loss)*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	528,301	(144,080)	144,385	283,792	342,624	58,832	20.73%	*Earning (Loss) Before Income Tax*
Laba Bersih Tahun Berjalan	383,343	(236,704)	113,272	218,575	250,037	31,462	14.39%	*Net Earning Current Yearr*
Pendapatan (Beban) Komprehensif	(52,112)	(147,534)	42,884	144,230	(81,545)	(225,775)	-156.54%	*Comprehensive income (expenses)*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	331,231	(384,238)	156,156	362,806	168,492	(194,313)	-53.56%	*Comprehensive Earning Current Year*
Laba Persaham *(Dalam Rupiah)								*Retained Earning per share* (In Rupiah)*
Laba operasional	1,463.164	(562.662)	315.335	330.142	613.463	283.321	85.82%	*Operational Earning*
Laba bersih	1,207.939	(673.605)	282.735	495.821	513.611	17.791	3.59%	*Net Earning*

Laba (rugi) Komprehensif
Comprehensive of Earning (loss)

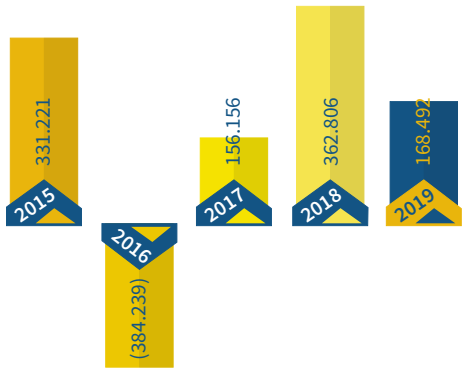

Tingkat Kesehatan Bank

Bank Sound Rating

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 14 /SEOJK.03/2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Papua melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Riskbased Bank Rating*).

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 4 / POJK.03 / 2016 concerning Soundness Rating for Commercial Banks and Financial Services Authority Letter No. 14 / SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of the Soundness of Commercial Banks, Bank Papua evaluates the Soundness of Banks by using a Risk-based Bank Rating approach.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut :

1. Profil Risiko (***Risk Profile***);
2. *Good Corporate Governance* (**GCG**);
3. Rentabilitas (***Earnings***);
4. Permodalan (*Capital*).

Bank Soundness Rating includes an Assessment of the following factors:

1. *Risk Profile;*
2. *Good Corporate Governance (GCG);*
3. *Earnings;*
4. *Capital .*

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap indikator yang ditentukan sebagaimana dalam POJK. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank terbagi dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

Composite Rating The Bank's soundness level is determined based on a comprehensive and structured analysis of the ranking of each indicator determined as in POJK. Composite Rating Bank Soundness is divided into 5 (five) levels, namely:

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan hasil *self Assessment* periode Desember 2019 peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank Papua adalah "PK - 2". Hal ini menunjukkan kondisi kesehatan Bank secara umum adalah "**SEHAT**". Kondisi Kesehatan Bank tercermin dari profil risiko yang memiliki potensi kerugian yang tergolong rendah dan penerapan manajemen risiko yang memadai, penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) secara umum baik dan faktor rentabilitas dinilai masih memadai, serta permodalan yang dijaga dan dikelola dengan baik. Kedepan Bank Papua masih mampu menyerap potensi kerugian dan menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

*Based on the results of the Self-Assessment period December 2019 the composite rating of Bank Papua's Sound Level is "PK-2". This shows that the Bank's general health condition is "**SOUND**". The condition of the Bank's sound is reflected in the risk profile which has a relatively low potential for loss and the application of adequate risk management, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in general is good and the profitability factor is considered to be adequate, and capital is maintained and well managed. In the future, Bank Papua is still able to absorb potential losses and face negative effects from changes in business conditions and other external factors.*

Berikut hasil *self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Papua Periode Desember 2019 :

Following are the results of the Bank Papua Sound Level Self-Assessment for the December 2019 period:

No	Faktor	Peringkat (*Rating*)		*Factor*
		Juni 2019	Desember 2019	
1	*Risk Profile*	2	**2**	*Risk Profile*
2	GCG	2	**2**	*GCG*
3	*Capital*	2	**2**	*Capital*
4	*Earnings*	2	**2**	*Earnings*
NILAI KOMPOSIT				*NILAI KOMPOSIT*

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan pencapaian kinerja ditahun 2019, maka didapatkan rasio-rasio keuangan penting Bank Papua pada akhir tahun sebagaimana tabel di bawah ini.

Financial ratios are tools used to analyse financial conditions and company performance. Based on performance achievements in 2019, Bank Papua's important financial ratios are obtained at the end of the year as shown in the table below.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth %	Description
Rasio Kecukupan Modal (KPPM) risiko Kredit, operasional dan Pasar	22,22%	17,28%	17,99%	22,21%	**21,43%**	-3,51%	*Capital Adequacy Ratio (CAR)*
Non Performing Loan Gross	9,63%	15,03%	14,72%	7,45%	**5,06%**	-32,08%	*Gross NPL*
Non Performing Loan Net	2,94%	3,95%	3,79%	2,44%	**2,00%**	-18,03%	*Net NPL*
Loan to Deposit Ratio	83%	86,23%	80,12%	78,90%	**70,30%**	-10,90%	*LDR*
Return On Asset	2,60%	-0,61%	0,61%	1,24%	**1,35%**	8,87%	*ROA*
Return On Equity	13,66%	-8,06%	4,37%	7,65%	**7,71%**	0,78%	*ROE*
Net Interest Margin	8%	7,01%	7,16%	6,82%	**7,00%**	2,64%	*NIM*
Beban operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)	80%	106,54%	94,35%	87,77%	**85,18%**	-2,95%	*Operating Expenses to Operating Income (OEOI)*

Kemampuan Membayar Hutang

Ability to Pay Debt

Kemampuan Membayar Hutang Jangka Pendek

Kemampuan bank untuk membayar semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang digambarkan dalam perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio Likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya.

Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

Rasio LDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank.

Sampai dengan akhir tahun 2019, LDR Bank Papua tercatat sebesar 70,30%. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018. Rasio LDR Bank Papua yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Ability to Pay Short-Term Debts

The ability of banks to pay all obligations, both short and long term, is illustrated in the calculation of liquidity ratios, solvency and profitability.

Liquidity Ratio

Liquidity Ratio describes the ability of the Bank to meet short-term obligations or liabilities that are past due. Liquidity Ratio is measured through a comparison between the amount of loans and the amount of customer deposits (LDR) to determine the ability of the Bank to repay obligations to customers who have deposited their funds with credit and financing that has been provided to debtors as a source of liquidity.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR ratio is the ratio between the amount of funds channeled to the public (loan) with the amount of public funds and own capital used. This ratio illustrates the ability of banks to repay withdrawals by depositors by relying on loans provided as a source of liquidity. The higher this ratio the lower the bank's liquidity capability.

As of the end of 2019, Bank Papua's LDR was recorded at 70.30%. A decrease compared to 2018. Bank Papua's low LDR ratio shows a liquid bank with excess capacity of funds that are ready to lend.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth %	*Description*
Loan to Deposit Ratio	83%	86,23%	80,12%	78,90%	70,30%	-8,60%	*LDR*

Kemampuan Membayar Hutang Jangka Panjang

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan Modal (CAR), merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank.

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sampai dengan akhir tahun 2019, rasio kecukupan modal Bank Papua adalah sebesar 21,43% turun dari angka sebesar 22,21% di tahun 2018. Berdasarkan Rasio Kecukupan Modal tersebut, Bank Papua telah memenuhi kewajiban regulasi untuk menyediakan kecukupan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sebesar 11%, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2. Kewajiban penyediaan kecukupan modal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank. Rasio Kecukupan Modal yang meningkat ditahun 2019 menunjukkan kemampuan Bank Papua untuk mengatasi risiko khususnya risiko kredit, pasar dan operasional.

Ability to Pay Long-term Debts

Solvency Ratio

The Solvency Ratio describes the ability of the Bank to meet its long-term debt or Capital Adequacy Ratio (CAR), which is one indicator of the sound of the Bank's capital which shows how much the Bank's capital is sufficient to support its needs and as a basis for assessing the prospects of the Bank's business continuity.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

As of the end of 2019, Bank Papua's capital adequacy ratio is 21.43%, down from 22.21% in 2018. Based on the Capital Adequacy Ratio, Bank Papua has fulfilled regulatory obligations to provide the minimum capital adequacy required by Bank Indonesia of 11%, for a Bank with a risk profile of rating 2. The obligation to provide capital adequacy is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 11 /POJK.03/2016 dated February 2, 2016 Regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, the Reserve Provisions can no longer be calculated as Bank Capital component. The Capital Adequacy Ratio that increased in 2019 shows the ability of Bank Papua to overcome risks, especially credit, market and operational risks.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth %	*Description*
Rasio Kecukupan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPPM)	22,22%	17,28%	17,99%	22,21%	21,43%	-3,51%	*Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio Kredit Bermasalah (NPL) dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

- Rasio NPL

  Rasio pinjaman bermasalah Bank Papua baik NPL *Gross* ataupun NPL *Netto* menunjukkan penurunan dari tahun 2018. NPL *Gross* 7,45% pada tahun 2018 menjadi 5,06% di tahun 2019, sedangkan NPL *Netto* dari 2,44% pada tahun 2018 menjadi 2,00% di tahun 2019. Komposisi jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2019 didominasi oleh kredit lancar sebesar 94,94% Hal ini menunjukkan bahwa Bank Papua berhasil dalam menyalurkan produk-produk kreditnya terutama dalam hal seleksi debitur.
- Tingkat Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan

  Kualitas kredit yang diberikan pada posisi tahun 2019 mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Absolut NPL tercatat menurun dari Rp1.054.063 juta ditahun 2018 menjadi Rp320.766 juta di tahun 2019 menurun sebesar -69,57%. Pinjaman dengan kolektibilitas macet didominasi Jenis Kredit Investasi, Modal Kerja dan Konsumsi dengan sektor ekonomi konstruksi, penyedia makanan & minuman, dan perdagangan besar dan eceran.

Non-performing Loans (NPL) Ratio and Receivables Collectibility Level

- *NPL ratio*

  The ratio of non-performing loans of Bank Papua both Gross NPL and Net NPL showed a decline from 2018. Gross NPL was 7.45% in 2018 to 5.06% in 2019, while Net NPL from 2.44% in 2018 to 2.00 % in 2018. The composition of the amount of loans extended in 2019 was dominated by current loans at 94.94% This shows that the Bank Papua succeeded in channeling its credit products, especially in terms of debtor selection.

- *Loan Collectibility Levels*

  The quality of loans extended in 2019 improved compared to 2018. Absolute NPL was recorded to decrease from Rp1,054,063 million in 2018 to 320,766 million in 2019 decreased by -69.57%. Loans with non-performing loans are dominated by types of Investment Loans, Working Capital and Consumption with the economic sector of construction, food & beverage providers, and large and retail trade.

Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas menggambarkan tingkat earningabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank. Rasio Rentabilitas untuk menggambarkan tingkat earningabilitas diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Profitability Ratio

The Profitability Ratio describes the level of profitability and business efficiency achieved by the Bank. The Profitability Ratio to describe the level of profitability is measured through the ratio of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Net Interest Margin (NIM), while to describe the level of business efficiency is measured through the ratio of Operational Expenses to Operating Income (OEOI).

- Rasio Rentabilitas Atas Aktiva (ROA)
  Rasio Rentabilitas Atas Aktiva (ROA) Bank Papua mengalami peningkatan dari 1,24% menjadi 1,35% di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan pencapaian laba sebelum pajak yang maksimal terhadap ketersediaan aset. Pencapaian laba sebelum pajak yang maksimal dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan operasional lainnya dan menurunnya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

- Rasio Rentabilitas Atas Ekuitas (ROE)
  Rasio Rentabilitas atas Ekuitas (ROE) Bank Papua mengalami peningkatan dari 7,65% menjadi 7,71% di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan pencapaian laba setelah pajak yang tumbuh terhadap modal inti Bank Papua. Perusahaan cukup mampu menghasilkan keuntungan besar bagi para pemegang saham melalui pembayaran dividen.

- Rasio Pendapatan Bunga Bersih (NIM)
  Rasio Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Bank Papua mengalami peningkatan dari 6,82% menjadi 7,00% di 2019. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan bunga bersih bila dibandingkan dengan aset produktif dinilai masih sangat tinggi.

- Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)
  Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) Bank Papua mengalami penurunan yang signifikan dari 87,77% menjadi 85,18% di tahun 2019. Rasio BOPO yang rendah mencerminkan kinerja perusahaan semakin efisien.

Dari Rasio Rentabilitas Bank Papua ditahun 2019 tersebut, tergambar bahwa bank masih mampu membayar seluruh kewajibannya melalui earning yang didapat serta memaksimalkan upaya efisiensi oleh bank.

- *Reurn on Assets (ROA) Ratio*
  Bank Papua's Return on Asset Ratio (ROA) has increased from 1.24% to 1.35% in 2019. This increase is due to the achievement of maximum pre-tax earning on asset availability. The achievement of maximum pre-tax earning is influenced by the increase in other operating income and the decrease in the formation of Allowance for Impairment Losses (CKPN).

- *Return On Equity (ROE) Ratio*
  Bank Papua's Return on Equity (ROE) ratio increased from 7.65% to 7.71% in 2019. This increase was due to the achievement of earning after tax that grew against Bank Papua's core capital. The company is quite capable of generating large earnings for shareholders through dividend payments.

- *Net Interest Income (NIM) Ratio*
  The Bank Papua Net Interest Income (NIM) ratio has increased from 6.82% to 7.00% in 2019. This condition illustrates that net interest income when compared to performing assets is still considered very high.

- *Operating Expenses to Operating Revenues (OEOI) Ratio*
  The ratio of Operating Expenses to Operating Income (OEOI) of Bank Papua decreased significantly from 87.77% to 85.18% in 2019. The low OEOI ratio reflects the company's performance is more efficient.

From the Bank Papua Profitability Ratio in 2019, it is illustrated that the bank is still able to pay all its obligations through the earning obtained and maximize the efficiency of the bank's efforts.

Tingkat Kolektibilitas Kredit

Loan Collectability Level

Kolektibilitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL), adalah kredit yang diberikan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Sampai dengan akhir tahun 2019, tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* adalah sebesar Rp813.211 juta atau turun sebesar -22,85% dari tahun 2018 yakni sebesar Rp1.054.063 juta. Penurunan ini adalah bentuk nyata dari tindakan strategi manajemen untuk terus berusaha menurunkan NPL bank. Tabel dibawah ini menguraikan tingkat kolektibilitas kredit di Bank Papua.

Loan collectibility which is categorized as Non-Performing Loans (NPL), is loans that are given in the substandard, doubtful and bad category. Until the end of 2019, the level of credit collectibility which was categorized as Gross Non-Performing Loans (NPL) was Rp813,211 million or decreased by -22.85% from 2018 which was Rp1,054,063 million. This decline is a tangible form of management strategy action to continue trying to reduce bank NPLs. The table below describes the level of credit collectability at Bank Papua.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		Description
						+/-	%	
Lancar	10.565.485	10.730.524	9.906.997	12.189.739	14.445.703	2.255.964	18,51%	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	1.370.333	1.343.989	1.411.046	903.415	801.764	(101.651)	-11,25%	*In Special Attention*
Kurang Lancar	23.894	758.895	70.036	39.825	40.471	646	1,62%	*Substandard*
Diragukan	136.947	36.694	311.824	77.176	44.875	(32.300)	-41,85%	*Doubtful*
Macet	1.110.517	1.339.737	1.571.005	937.062	727.865	(209.198)	-22,32%	*Loss*
JUMLAH	**13.207.176**	**14.209.839**	**13.270.908**	**14.147.217**	**16.060.678**	**1.913.461**	**13,53%**	**TOTAL**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth	
						+/-	%
NPL *Gross*	1.271.358	2.135.326	1.952.865	1.054.063	813.211	(240.853)	-22,85%

NPL *Gross*

NPL gross

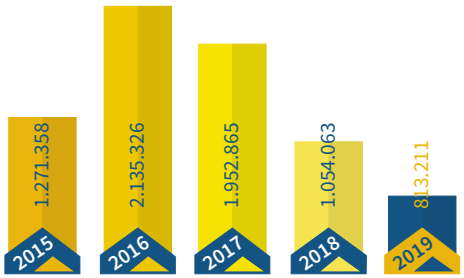

Tingkat *Maturity* Jangka Pendek

Adalah kolektibilitas kredit yang diberikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Untuk tahun 2019, kolektibilitas kredit/ piutang sebesar Rp2.252.136 juta atau menurun sebesar -10,32% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.511.167 juta.

Short-term Maturity Level

It is a loan collectibility granted in a period of less than 1 year. For 2019, the loan / receivable collectibility was Rp2,252,136 million or decreased by -10.32% from 2018 which was Rp2,511,167 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Nilai Pokok	2017	2018	2019	Growth		*Prime Value*
				Nominal	%	
Sampai dengan 1 tahun	2.107.653	2.511.167	2.252.136	(259.031)	-10,32%	*until 1 Year*

Tingkat *Maturity* Jangka Panjang

adalah kolektibilitas kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Untuk tahun 2019, tingkat kolektibilitas kredit/ piutang sebesar Rp13.808.542 juta atau meningkat sebesar 18,67% dari tahun 2018 sebesar Rp11.636.050 juta.

Long-term Maturity Level

is a collectibility of loan extended more than 1 year. For 2019, the level of loan / receivables is Rp13,808,542 million or an increase of 18.67% from 2018 of Rp11,636,050 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Nilai Pokok	2017	2018	2019	Growth		*Prime Value*
				Nominal	%	
1 - 2 tahun	344.826	428.751	303.713	-125.038	-29,16%	*1 - 2 year*
2 - 5 tahun	2.688.919	2.900.054	2.503.594	-396.460	-13,67%	*2 -5 year*
di atas 5 tahun	8.129.509	8.307.245	11.001.235	2.693.990	32,43%	*over 5 year*
Jumlah kredit yang diberikan	**11.163.254**	**11.636.050**	**13.808.542**	**2.172.492**	**18,67%**	**Total Loan**

Perhitungan Rasio yang Relevan Sesuai dengan Jenis Industri Perusahaan

Rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kolektibilitas piutangnya adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini adalah salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Calculation of Relevant Ratios in accordance with the Type of Company Industry

The ratio used by companies to measure the collectibility of receivables is the Non Performing Loan (NPL) ratio. This ratio is one of the keys to assessing the quality of bank performance. This means that NPL is an indication of a problem in the bank which if it does not immediately get a solution it will have a dangerous impact on the bank.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth	Description
						%	
Non Performing Loan Gross	9,63%	15,03%	14,72%	7,45%	5,06%	-2,39%	*Gross NPL*
Non Performing Loan Net	2,99%	3,95%	3,79%	2,44%	2,00%	-0,44%	*Net NPL*

Komitmen dan Kontijensi

Commitments and Contingencies

Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan pembiayaan dari instrumen keuangan yang mengakibatkan pengakuan aset dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontijensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan kredit dan transaksi akseptasi di bank.

Commitment refers to the commitment to provide financing from financial instruments which results in the recognition of assets and / or liabilities for a certain period. Contingencies are the probabilities of assets and / or liabilities that can occur as a result of several events related to credit and acceptance transactions at the bank.

Kolektibilitas atas transaksi komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 digolongkan (lancar). Manajemen bank berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontijensi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak terealisasinya transaksi komitmen dan kontijensi.

Collectibility of commitment and contingency transactions in the bank's business activities that have credit risk as of December 31, 2019 and 2018 are classified (current). The bank's management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are sufficient to cover possible losses on the unrealized commitment and contingency transactions.

Kewajiban Komitmen pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.089.508 juta meningkat 15,98% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp939.397. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik lainnya (*committed*).

Commitment liabilities in 2019 amounted to Rp1,089,508 million, an increase of 15.98% compared to 2018 amounting to Rp939,397. The increase was mainly due to an increase in credit facilities to other undisbursed customers (committed).

Kewajiban Kontijensi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp226.538 juta menurun -21,36% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp288.058 juta. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 tagihan kontijensi berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian mengalami penurunan -7,38% dari tahun sebelumnya sedangkan untuk kewajiban kontijensi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,38% dari tahun sebelumnya.

Contingent liabilities in 2019 amounted to Rp226,538 million, decreased -21.36% compared to 2018 amounting to Rp288,058 million. The decrease was due in 2019 contingent receivables in the form of interest income under settlement decreased -7.38% from the previous year while for contingent liabilities in 2019 increased by 12.38% from the previous year.

dalam Juta (*in million*) Rp

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Growth	
						Nominal	%
TAGIHAN KOMITMEN							
Komitmen	-	-	-	-	169.436	169.436	100,00%
KEWAJIBAN KOMITMEN							
Komitmen kredit yang belum ditarik	641.901	574.576	554.511	939.397	1.258.943	319.546	34,02%
Liabilitas Komitmen - netto	641.901	574.576	554.511	939.397	1.428.379	488.982	52,05%
TAGIHAN Kontijensi							
1. Garansi yang diterima	-	-	-	-	-	-	0,00%
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	-	-	-	-	0,00%
a. Bunga kredit yang diberikan	277.995	447.701	528.194	491.676	455.369	(36.307)	-7,38%
b. Bunga lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
3. Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
KEWAJIBAN Kontijensi							
1. Garansi yang diberikan	389.585	290.882	151.694	203.618	228.830	25.212	12,38%
PJB Jaminan Tender	36.208	8.602	1.676	1.610	2.007	397	24,66%
PJB Jaminan Pelaksanaan	137.645	74.660	43.986	52.321	51.135	(1.186)	-2,27%
PJB Jaminan Pemeliharaan	54.664	67.549	30.574	11.912	16.340	4.428	37,18%
PJB Jaminan Uang Muka	106.684	110.530	36.274	59.511	80.987	21.476	36,09%
PJB Jaminan Lainnya	54.385	29.541	39.183	78.266	78.362	96	0,12%
2. Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
Liabilitas Kontijensi Bersih	667.580	738.583	679.888	695.295	684.199	(11.095)	-1,60%
TOTAL	1.309.481	1.313.159	1.234.399	1.634.692	2.112.578	477.886	29,23%

Kontribusi Kepada Negara

Contributions for the State

Publikasi Pembayaran Pajak

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut secara langsung melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bank Papua dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax Payment Publication

In accordance with the philosophy of the tax law, paying taxes is not only an obligation, but is the right of every citizen to directly participate in implementing state financing and national development for the greatest prosperity of the people.

In its operational activities, Bank Papua has carried out good Corporate governance that is carried out transparently and accountably, especially in managing its tax rights and obligations. Taxation rights and obligations have been carried out in accordance with applicable regulations.

Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Bank Papua untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Setoran pajak Bank Papua pada tahun 2019 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tax Payment

Tax payment is a manifestation of the obligation and participation of Bank Papua to participate and participate in realizing national development goals. Bank Papua tax payments in 2019 can be seen in the following table:

dalam Juta (*in million*) Rp

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Growth	
						Nominal	%
1. Uang Muka Pajak							
PPh Pasal 28A	82.077	73.994	72.467	731	480	(251)	-34,32%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4	4	318	-	-	-	0,00%
Jumlah	**82.081**	**73.998**	**72.786**	**731**	**480**	**(251)**	**-34,32%**
2. Utang Pajak							
PPN Keluaran	1.640	735	6.968	7.258	14.049	6.791	93,57%
PPh Lainnya	3.344	17.131	4.115	16.784	13.600	(3.184)	-18,97%
PPh Pasal 21	3.249	4.875	4.512	4.368	6.324	1.956	44,79%
PPh 29 Badan	41.671	-	13.985	28.964	8.534	(20.430)	-70,53%
Jumlah	**49.903**	**22.740**	**29.580**	**57.373**	**42.507**	**(14.866)**	**-25,91%**
3. Beban Pajak Penghasilan - Bersih							
Pajak kini	137.718	68.632	40.762	65.226	111.333	46.107	70,69%
Pajak tangguhan	-	-	(9.649)	(9)	(18.746)	(18.737)	214833,08%
Jumlah	**137.718**	**68.632**	**31.113**	**65.217**	**92.587**	**27.370**	**41,97%**

Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Pajak

Selama tahun 2019 Bank Papua tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak, baik PPh Karyawan; PPh Badan; PPN Masa dan Rampung serta PBB. Selain itu, tidak terdapat terlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT tahunan maupun bulanan), serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator yang dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2019.

Non-compliance with Tax Payments

During 2019 Bank Papua never delayed payment of tax obligations, either Employee Income Tax; Corporate Income Tax; VAT Period and Complete as well as the PBB. In addition, there was no late submission of tax liability documents (annual or monthly tax return), and there was no late submission of obligation documents to the regulatory agencies conducted by the Company during 2019.

Aset Produktif

Earning Assets

Pengklasifikasian aset produktif Bank Papua berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013. Bank Papua melakukan klasifikasi aset produktif berdasarkan evaluasi atas kinerja debitur, prospek usaha, dan kemampuan membayar kepada bank.

The classification of Bank Papua's performing assets based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7 / 2 / PBI / 2005 dated January 20, 2005 as amended the latest by PBI No. 14/15 / PBI / 2012 dated 24 October 2012 and Bank Indonesia Circular No. 15/28 / DPNP dated July 31, 2013. Bank Papua classifies performing assets based on an evaluation of the debtor's performance, business prospects, and ability to pay to the bank.

Aset produktif Bank Papua tahun 2019 sebesar Rp23.786.459 juta meningkat 21,40% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp19.337.649. Faktor utama peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan surat berharga dan efek-efek.

Bank Papua's performing assets in 2019 amounted to Rp23,786,459 million, an increase of 21.40% compared to 2018 which amounted to Rp19,337,649. The main factor of the increase was due to an increase in securities and securities.

dalam Juta (*in million*) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Penempatan Bank Indonesia	59.973	1.351.700	639.938	1.659.733	159.981	(1.499.752)	-90,36%	*Bank Indonesia Placement*
Penempatan Bank Lain	2.257.717	1.470.126	2.316.303	1.987.875	4.034.762	2.046.887	102,97%	*Other Bank Placement*
Surat Berharga	2.246.827	1.944.474	2.609.245	2.290.213	4.128.639	1.838.426	80,27%	*Marketable Securities*
Kredit yang diberikan	13.207.177	14.209.840	13.270.908	14.147.217	16.060.678	1.913.461	13,53%	*Loan*
TOTAL	**17.771.693**	**18.976.140**	**18.836.394**	**20.085.038**	**24.384.060**	**4.299.022**	**21,40%**	

Struktur Modal
Capital Structure

Bank Papua berupaya meningkatkan nilai Perusahaan diantaranya melalui penetapan struktur modal yang optimal. Hal tersebut juga menjadi bagian dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Bank Papua strives to increase the value of the Company including through the determination of an optimal capital structure. This also becomes part of meeting the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regarding the Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR).

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam kebijakan permodalan Bank Papua selalu disinkronkan dengan rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan earning yang optimal. Bank Papua memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk risiko kredit, bank menggunakan pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*).

Management Policy on Capital Structure

Bank Papua's capital policy is always synchronized with a long-term strategic plan and allocates capital efficiently to business segments that have the potential to provide optimal earnings. Bank Papua ensures that it has sufficient capital to meet credit risk, market risk and operational risk. The Bank refers to Bank Indonesia regulations in calculating capital adequacy for credit risk, market risk and operational risk. For credit risk, the Bank uses the Basel II Standardized Approach.

dalam Juta (*in million*) Rp

URAIAN	2017	2018	2019	Growth		*Description*
				Nominal	%	
Total Modal						***Total Capital***
Modal Inti (Tier 1)	2.195.630	2.899.056	3.193.498	294.442	10,16%	*Core Capital (Tier 1)*
Modal Pelengkap (Tier 2)	119.838	131.561	153.259	21.698	16,49%	*Suplementary Capital (Tier 2)*
Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)	-	-	-	-	0,00%	*Additional Suplementary Capital (Tier 3)*
ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO						***RISK WEIGHTED ASSET***
Tanpa memperhitungkan risiko pasar	9.433.907	10.193.679	12.107.435	1.913.756	18,77%	*Without market risk*
Dengan memperhitungkan risiko pasar	50.897	57.501	69.584	12.083	21,01%	*With market risk*
Dengan memperhitungkan risiko Operasional	3.389.625	3.396.482	3.437.659	41.177	1,21%	*With operational risks*
RASIO KECUKUPAN MODAL						***CAPITAL ADEQUACY RATIO***
Tanpa memperhitungkan risiko pasar & Operasional	24,54%	29,73%	27,64%	-2,09	-7,03%	*Without market risk & operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko pasar	24,41%	29,56%	27,48%	-2,08	-7,04%	*With market risk*
Dengan memperhitungkan risiko operasional	17,99%	22,21%	21,43%	-0,78	-3,51%	*With operational risks*
RASIO KPMM (AKTUAL)						*CAR RATIO (ACTUAL)*
a. Rasio Modal Inti						*a. Core Capital Ratio*
i. Rasio Modal Inti Utama	17,05%	21,24%	20,45%	-0,79	-3,72%	*i. Main Core Capital Ratio*
ii. Rasio Modal Inti Tambahan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	*ii. Additional Core Capital Ratio*
b. Rasio Modal Pelengkap	0,93%	0,96%	0,98%	0,02	2,08%	*b. Suplementary Capital Ratio*
Total BMPK	463.094	606.123	669.351	63.228	10,43%	*Total LLL*
RASIO Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	11%	11%	11%	-	-	*Minimum Capital Adequacy Ratio by Bank Indonesia*

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib menyediakan kecukupan modal sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).

Konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan ini adalah teguran dan denda dari Regulator.

Regulator menganalisa modal dalam dua tingkatan:
1. Modal Tier 1 yang terdiri dari:
   a) Kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan perhitungan pajak tangguhan.
   b) Modal Inti Tambahan (AT-1) terdiri dari instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan setelah dikurangi faktor pengurang.
2. Modal Tier 2 terdiri dari cadangan umum PPA.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier 1 dan Modal Tier 2.

Modal Tier 1 terdiri dari Modal Inti Utama (CET 1) dan Modal Inti Tambahan (AT-1) namun saat ini Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal Inti Tambahan (AT-1) sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Struktur Modal Berdasarkan Bunga

Sampai tanggal 31 Desember 2019, Bank Papua belum menggunakan bunga sebagai dasar dalam pembentukan struktur modal.

Basis for Selection of Management Policies for Capital Structure

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34 / POJK.03 / 2016 dated 22 September 2016 concerning amendments to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11 / POJK.03 / 2016 concerning Minimum Capital Requirements, Banks are required to provide sufficient capital of 9% (nine percent) to less than 10% (ten percent) of RWA, for Banks with a risk profile of rank 2 (two).

The consequences of fraud this regulation are reprimands and fines from the Regulator.

The regulator analyzes capital on two levels:
1. *Tier 1 capital consisting of:*
   a) Impairment losses on earning assets and deferred tax calculation.
   b) Additional Tier 1 Capital (AT-1) consists of instruments that meet the Additional Tier 1 capital requirement after deducting the deduction factor.
2. *Tier 2 capital consists of general PPA reserves.*

The Bank has calculated capital adequacy based on applicable regulations, where the capital owned is classified in 2 Tier, namely Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

Tier 1 Capital consists of Main Core Capital (CET 1) and Additional Core Capital (AT-1) but currently the Bank does not have additional capital that meets the Additional Core Capital (AT-1) criteria in accordance with applicable BI regulations.

The Bank complies with all capital requirements stipulated by regulators throughout the reporting period, specifically with regard to the calculation of the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) and Risk Weighted Assets (ATMR).

Capital Structure Based on Interest

As of December 31, 2019, Bank Papua has not used interest as the basis for establishing capital structure.

Struktur Modal Berdasarkan Ekuitas

Struktur permodalan bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana bank wajib menyediakan modal minumum sesuai dengan profil risikonya. Sesuai dengan Peraturan OJK, modal bank terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap.

Modal Inti

Modal Inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum dan 50% saldo laba setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif. Modal inti Bank Papua pada tahun 2019 adalah sebesar Rp3.193.498 juta sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp2.889.056 juta.

Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum Penghapusan Aset Produktif (PPAP) (Maksimum 1,25% dari ATMR). Modal pelengkap terdiri dari cadangan umum PPA. Pada tahun 2019, modal pelengkap Bank Papua adalah sebesar Rp153.259 juta sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp131.561 juta.

Perubahan Struktur Modal Bersifat Kuantitatif

Berdasarkan penilaian atas Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap 6 bulan (semesteran) pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian TKB Bank Bank Papua periode 31 Desember 2019 berada pada peringkat "**Sehat**" yang berarti bahwa:

a. Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
b. Peringkat faktor-faktor penilaian (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan) secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Equity Based Capital Structure

The bank's capital structure refers to the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 dated 29 January 2016 concerning the Minimum Capital Adequacy for Commercial banks, where banks are required to provide drinking capital according to their risk profile. In accordance with OJK Regulations, Bank capital consists of Core Capital and Suplementary Capital.

Core Capital

Core Capital consists of paid-up capital, additional paid-in capital, general reserves and 50% of retained earnings after deducting the difference between the Allowance for Losses (PPA) and allowance for impairment losses on earning assets. Bank Papua's core capital in 2019 was Rp 3,193,498 million while in 2018 it was Rp 2,889,056 million.

Suplementary Capital

Suplementary capital consists of capital instruments in the form of shares or other forms that have fulfilled the requirements, agio or disagio originating from the issuance of capital instruments and classified as supplementary capital, general reserves for Earning Asset (PPAP) (Maximum 1.25% of RWA). Suplementary capital consists of general PPA reserves. In 2019, the supplementary capital of Bank Papua will be Rp153,259 million while in 2018 it will be Rp141,561 million.

Changes in Quantitative Capital Structure

Based on an assessment of the Bank's Soundness Level reported to the regulator (OJK) every 6 months (semester) in the June and December period. The results of the TKB assessment of Bank Papua for the 31 December 2019 period are ranked "Sound" which means that:

a. The Bank's condition is generally sound, so that it is considered capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors.
b. The rating factors (Risk Profile, GCG, Profitability, and Capital) are generally good. If there are weaknesses, in general these weaknesses are less significant.

Dengan mempertimbangkan risiko operasional, rasio kecukupan modal bank, Bank Papua pada tahun 2019 sebesar 21,43% atau terjadi penurunan -3,51% dari tahun sebelumnya sebesar 22,21%. Ini artinya berdasarkan rasio Kecukupan Modal tersebut, Bank Bank Papua telah memenuhi kewajiban regulasi untuk menyediakan kecukupan modal sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR, untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.

Taking into account operational risks, the bank's capital adequacy ratio, Bank Papua in 2019 was 21.43% or a decrease of -3.51% from the previous year of 22.21%. This means that based on the Capital Adequacy Ratio, Bank Papua has fulfilled regulatory obligations to provide capital adequacy of 9% to less than 10% of RWA, for banks with a risk profile of rank 2.

Peraturan yang Dijadikan Landasan Manajemen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib menyediakan kecukupan modal sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).

Regulations Used as Management Platform

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34 / POJK.03 / 2016 dated 22 September 2016 concerning amendments to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11 / POJK.03 / 2016 concerning Minimum Capital Requirements, Banks are required to provide sufficient capital of 9% (nine percent) to less than 10% (ten percent) of RWA, for Banks with a risk profile of rank 2 (two).

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Agreement for Capital Expenditure Investment

Pada tahun 2019, Bank Papua tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan. Seluruh kegiatan investasi barang modal dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, perlengkapan dan perabotan kantor, serta aset pra-operasional dibiayai oleh Bank dalam mata uang Rupiah.

In 2019, Bank Papua has no material commitments related to capital investment. All capital investment activities in the form of land and buildings, motor vehicles, machinery and equipment, office equipment and furniture, and pre-operational assets are financed by the Bank in Rupiah.

Investasi Barang Modal

Capital Expenditure Investment

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Sumber Pendanaan dan Tujuan Investasi

Sumber pendanaan investasi barang modal berasal dari Pemegang Saham (*Shareholder*). Investasi barang modal bertujuan untuk memperluas jaringan kantor yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat setempat serta dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Papua di masa yang akan datang.

Langkah Perlindungan Risiko

Seluruh transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah sebagai bentuk antisipasi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, sehingga bank tidak memiliki risiko mata uang asing dalam transaksi belanja modal. Selain itu, sebagai langkah perlindungan terhadap barang modal, Bank Papua mengansuransikan seluruh investasi barang modal di PT Askrida dan PT Jasindo.

Nilai Investasi Barang Modal

Nilai investasi berupa penambahan aset tetap pada tahun 2019 adalah sebesar Rp23.820 juta. Setelah memperhitungkan nilai penyusutan, maka diperoleh nilai buku sebesar Rp246.905 juta.

Investment in the form of Capital Expenditure is an activity of spending funds that is used to buy a number of fixed assets or to add value to fixed assets that are expected to provide benefits in the future.

Source of Funding and Investment Objectives

The funding source for capital goods investment comes from Shareholders. Capital expenditure investment aims to expand the office network which is expected to reach a wider community and provide greater benefits to the local community and can provide added value for Bank Papua in the future.

Risk Protection

All transactions are carried out in Rupiah as a form of anticipating risks to fluctuations in currency exchange rates, so that the Bank has no foreign currency risk in capital expenditure transactions. In addition, as a measure of protection against capital goods, the Bank Papua insured all capital goods investments in PT Askrida and PT Jasindo.

Investment Value of Capital Expenditure

The investment value in the form of additional fixed assets in 2019 is Rp23,820 million. After calculating the depreciation value, the fiscal value is Rp.226,905 million.

dalam Juta (*in million*) Rp

Biaya perolehan	**Saldo Awal 1 Januari 2019** *Beginning Balance Jan 1st, 2019*	**Penambahan** *Additions*	**Pengurangan** *Disposals*	**Reklasifikasi dan penyesuaian** *Reclasification and adjustment*	**Saldo Akhir 31 Desember 2019** *Ending Balance December 31,2019*	*Cost*
Tanah	37.454	12	-	304	37.770	*Land*
Bangunan Kantor	286.978	3.834	853	4.044	294.002	*Office building*
Perumahan Dinas	21.195	132	345	-	20.982	*Housing services*
Kendaraan Bermotor	11.499	511	2.007	-	10.003	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	211.751	7.851	12.920	-	206.682	*Office inventory*
Inventaris Rumah Dinas	6.673	377	879	-	6.171	*Inventory of official housing*
Inventaris Lainnya	8.024	2.268	743	-	9.549	*Other inventory*
Inventaris Dalam Penyelesaian	882	965	-	(882)	965	*Inventory in progress*
Bangunan Dalam Penyelesaian	11.539	7.870	-	(4.044)	15.366	*Building in progress*
Total biaya perolehan	595.995	23.820	17.747	(578)	601.490	*Total Cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan Kantor	126.363	12.133	853	6	137.649	*Office building*
Perumahan Dinas	8.523	1.072	345	171	9.421	*Housing services*
Kendaraan Bermotor	10.207	584	2.007	-	8.784	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	190.922	9.612	12.920	273	187.886	*Office inventory*
Inventaris Rumah Dinas	5.211	666	879	20	5.019	*Inventory of official housing*
Inventaris Lainnya	5.011	1.408	743	150	5.826	*Other inventory*
Total akumulasi penyusutan	346.237	25.475	17.747	620	354.585	*Total accumulated depreciation*
Nilai Buku	**249.758**				**246.905**	*Fiscal value*

Perbandingan antara Target RBB 2019 dengan Realisasi RBB dan Proyeksi 2020

Comparison between 2019 BBP Target and Realization with 2020 Projection

Untuk mengetahui kinerja bank dan memastikan bahwa strategi objektif terpenuhi, Bank Papua telah mengidentifikasi beberapa indikator penting dalam pengukuran kinerja bank sebagai perbandingan antara kinerja tahun sebelumnya dengan kinerja yang akan datang yang telah disusun berdasarkan Rencana Bisnis Bank. Tabel dibawah ini menggambarkan kinerja Bank Papua di tahun 2019 dibandingan target dan realisasi sebelumnya 2018 dan proyeksi tahun 2020.

To find out the bank's performance and ensure that the objective strategy is met, Bank Papua has identified several important indicators in measuring Bank performance as a comparison between the previous year's performance and the future performance that has been prepared based on the Bank's Business Plan. The table below illustrates the performance of Bank Papua in 2019 compared to the previous target and realization in 2018 and projections for 2020.

dalam Juta (*in million*) Rp

Indikator Utama	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Pencapaian %	Proyeksi 2020	Growth %	*Key Performance Indikator*
Aset	22.456.759	23.506.512	28.183.685	119,90%	23.638.630	-19,34%	*Assets*
Dana Pihak Ketiga	17.993.816	18.610.618	22.960.889	123,38%	18.647.408	0,56%	*Third Party Fund*
Giro	8.206.448	8.475.125	11.133.571	131,37%	8.465.462	0,56%	*Current Account*
Tabungan	7.365.412	7.618.132	8.810.469	115,65%	7.656.508	0,56%	*Saving*
Deposito	2.421.956	2.517.361	3.016.848	119,84%	2.525.438	0,56%	*Time Deposit*
Aktiva Produktif	21.674.321	22.306.766	26.562.447	119,08%	18.991.639	0,45%	*Earning Asset*
Kredit	14.147.217	15.704.881	16.060.678	102,27%	16.656.855	6,06%	*Loan & Financing*
Penempatan	5.236.891	4.216.192	6.373.129	151,16%	1.117.614	-43,87%	*Placement*
Surat Berharga	2.290.213	2.385.693	4.128.639	173,06%	1.217.170	0,56%	*Marketable Seccurities*
Laba Bersih Tahun Berjalan	218.576	248.758	250.037	100,51%	366.643	47,38%	*Net Earning*
Rasio - Rasio Keuangan							
KPPM	22.21%	19.53%	21.43%	109,73%	21,14%	1,44%	*CAR*
NPL (*Gross*)	7.45%	6.69%	5.06%	75,64%	4,80%	-28,89%	*Non Performing Loan (Gross)*
NPL (*Netto*)	2.44%	2.62%	2.00%	76,34%	2,18%	-38,59%	*Non Performing Loan (Netto)*
Laba Terhadap ***Asset*** (ROA)	1.24%	1.79%	1.35%	75,42%	2,07%	43,75%	*Return on Asset*
Laba Terhadap Modal (ROE)	7.65%	8.93%	7.71%	86,34%	9,26%	28,25%	*Return on Equity*
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	6.82%	6.32%	7.00%	110,76%	6,12%	-7,27%	*Net Interest Margin*
BOPO	87.77%	84.40%	85.18%	100,92%	81,43%	-6,11%	*Operational Expese/Income*
L D R	78.90%	84.69%	70.30%	83,01%	89,33%	5,48%	*Loan to Deposit Ratio*
Pengembangan SDM*	2.462	-	2.421	-	2.430	0,37%	*HR Development*

Target tahun 2019 hampir semua di atas target. Ini mencerminkan kinerja manajemen Bank Papua dalam melaksanakan bisnisnya berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel indikator utama di atas .

1. Perbandingan Target Awal dan Realisasi tahun 2019

1.1. Aset

Pada tahun 2019, aset ditargetkan tumbuh sebesar Rp23.506.512 juta dan terealisasi sebesar Rp28.183.686 juta atau pencapaian sebesar 119,90% dari target.

1.2. Dana Pihak Ketiga

Pada tahun 2019, Dana Pihak Ketiga ditargetkan tumbuh sebesar Rp18.610.618 juta dan terealisasi sebesar Rp22.960.889 juta atau pencapaian sebesar 123,38% dari target. Pencapaian masing-masing produk sebagai berikut:

a. Giro
   Dana Giro Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp8.475.125 juta dan terealisasi sebesar Rp11.133.571 juta atau pencapaian sebesar 131,37% dari target.
b. Tabungan
   Dana Tabungan Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp7.618.132 juta dan terealisasi sebesar Rp8.810.469 juta atau pencapaian sebesar 115,65%dari target.
c. Deposito
   Dana Deposito Bank Papua ditargetkan tumbuh sebesar Rp2.517.361 juta dan terealisasi sebesar Rp3.016.848 juta atau pencapaian sebesar 119,84%dari target.

1.3. Aktiva Produktif

Pada tahun 2019, Aktiva Produktif ditargetkan tumbuh sebesar Rp22.306.766 juta dan terealisasi sebesar Rp26.562.447 juta atau pencapaian sebesar 119,08% dari target. Realisasi Aktiva Produktiv tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit
  Kredit yang disalurkan ditargetkan tumbuh sebesar Rp15.704.881 juta dan terealisasi sebesar Rp16.060.678 juta atau pencapaian sebesar 102,27% dari target.
- Penempatan pada BI dan Bank Lain
  Penempatan pada BI dan Bank Lain ditargetkan tumbuh sebesar Rp4.216.192 juta dan terealisasi sebesar Rp6.373.129 juta atau pencapaian sebesar 151,16% dari target.

The 2019 target is almost all above the target. This reflects the performance of Bank Papua management in carrying out its business effectively and efficiently. This can be seen in the main indicator table above.

1. Comparison of Initial Targets and Realization In 2019

1.1. Asset

In 2019, assets are targeted to grow by Rp23,506,512 million and realized by Rp28,183,685 million or an achievement of 119.90% of the target.

1.2. Third-party funds

In 2019, Third Party Funds are targeted to grow by Rp18,610,618 million and realized by Rp22,960,889 million or an achievement of 123.38% of the target. The achievements of each product are as follows:

a. Current Account
   Bank Papua Current Account Funds are targeted to grow by Rp8,475,125 million and realized by Rp11,133,571 million or an achievement of 131.37% of the target.
b. Savings
   Bank Papua Savings Fund is targeted to grow by Rp7,618,132 million and realized by Rp8,810,469 million or an achievement of 115.65% of the target.
c. Time Deposit
   Bank Papua Time Deposit Funds are targeted to grow by Rp2,517,361 million and realized by Rp3,016,848 million or an achievement of 119.84% of the target.

1.3. Earning Assets

In 2019, Earning Assets are targeted to grow by Rp22,306,766 million and realized Rp26,562,447 million or an achievement of 119.08% of the target. Realization of Productivity Assets in 2019, with the following details:

- *Loans*
  Loans are targeted to grow by Rp15,704,881 million and realized by Rp16,060,678 million or an achievement of 102.27% of the target.
- *Placement with BI and Other Banks*
  Placement in BI and Other Banks is targeted to grow by Rp4,216,192 million and realized by Rp6,373,129 million or an achievement of 151.16% of the target.

- Surat Berharga
  Pada tahun 2019, Surat Berharga ditargetkan tumbuh sebesar Rp2.385.693 juta dan terealisasi sebesar Rp4.128.639 juta atau pencapaian sebesar 173.06% dari target.

1.4. Laba Bersih
Laba ditargetkan tumbuh sebesar Rp248.758 juta dan terealisasi sebesar Rp250.037 juta atau pencapaian sebesar 100.51% dari target.

1.5. Rasio Keuangan
Untuk masing-masing rasionya adalah sebagai berikut :

- KPPM, pada tahun 2019 dicapai rasio sebesar 21,43% atau melampaui batas yang ditargetkan sebesar 19,53%.
- NPL *Gross* sebesar 5,06% dari target maksimal sebesar 6,69% atau sebesar 74,96% dari target. Pencapaian NPL *Gross* dibawah target, mencerminkan pecapaian yang sangat bagus. Semakin kecil NPL, berarti semakin rendah kredit macet yang diterima oleh bank. NPL *Netto* sebesar 2,00% dari target sebesar 2,62%.
- ROA dicapai sebesar 1,35% dari target sebesar 1,79% atau pencapaian sebesar 75,42%.
- ROE yang dicapai sebesar 7,71% dari target sebesar 8,93% atau pencapaian sebesar 86,34%
- NIM yang dicapai sebesar 7,00% dari 6,32% yang ditargetkan atau pencapaian sebesar 110,76%.
- BOPO yang dicapai sebesar 85,18% dari target sebesar 84,40% atau pencapaian 100,92%. Pencapaian nilai BOPO yang lebih rendah dari target, mencerminkan manajemen telah melakukan operasional usahanya sangat efisien.
- LDR yang dicapai sebesar 70,30% dari target sebesar 84,69% atau pencapaian 83,01% dari target. Dengan LDR yang menurun/rendah, mencerminkan Bank Papua memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasional usahanya.

1.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), manajemen telah mempunyai *roadmap* pengembangan SDM. Jumlah pegawai tahun 2019 sebanyak 2.421 orang.

- *Marketable Securities*
  In 2019, marketable securities are targeted to grow by Rp2,385,693 million and realized by Rp4,128,639 million or an achievement of 173.06% of the target.

1.4. Net Earning
Earning is targeted to grow by Rp 248,758 million and realized Rp250,037million or an achievement of 100,51% of the target.

1.5. Financial Ratios
For each ratio is as follows:

- *CAR, in 2019 a ratio of 21.43% was reached or exceeded the targeted limit of 19.53%.*
- *Gross NPL of 5.06% of the maximum target of 6.69% or of 74.96% of the target. The achievement of Gross NPL was below the target, reflecting very good achievement. The smaller the NPL, the lower the bad credit received by the bank. Net NPL of 2.00% of the target of 2.62%.*
- *ROA achieved 1.35% of the target of 1.79% or an achievement of 75.42%.*
- *ROE achieved by 7.71% of the target of 8.93% or achievement of 86.34%*
- *NIM achieved by 7.00% from 6.32% targeted or the achievement of 110.76%.*
- *OEOI reached 85.18% of the target of 84.40% or 100.92% achievement. Achieving an OEOI value that is lower than the target, reflects that management has conducted its business operations very efficiently..*
- *• LDR achieved by 70.30% of the target of 84.69% or 83.01% of the target. With a declining / low LDR, it reflects that Bank Papua has a healthy condition in carrying out its business operations.*

1.6. Human Resource Development (HR)
For the development of human resources (HR), management has a HR development roadmap. The number of employees in 2019 is 2.421 person.

2. Analisa Pencapaian

2.1. Aset

Pencapaian Aset Bank Papua pada tahun 2019 yang melebihi target sebesar 119,90% membuktikan kinerja manajemen Bank Papua sudah melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan oleh para pemegang saham dan sudah sesuai dengan target Rencana Bisnis Bank (RBB). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya dana yang dari setiap pos akun kas meningkat 70,63%, Giro pada bank lain meningkat 264,77%, surat berharga dan efek-efek meningkat 80,72%. Selain itu, manajemen berhasil mempertahankan dana murah yang didapat dari DPK. Hal ini terbukti dari rasio CASA sebesar 87%, sehingga manajemen leluasa untuk memanfaatkan dana tersebut pada pos pemberian kredit, penempatan, atau pembelian surat berharga dan efek-efek.

2.2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2019 sebesar 123,38% dari target. Pencapaian Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Papua tidak terlepas dari strategi pengumpulan dana, diantaranya :

- Optimalisasi penghimpunan DPK masyarakat melalui mengefektifkan *marketing/funding officer* dalam memahami serta mengaplikasikan langkah teknis pelaksanaan pemasaran produk dengan target disamping meningkatkan standar performa tenaga *marketing*.
- Rekrutmen tenaga pemasaran menjadi perpanjangan tangan dalam menjalankan program yang dibentuk oleh Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan *e-Banking* untuk memaksimalkan penghimpunan DPK dari masyarakat.
- Pemberian *Special Rate* sebagai daya tarik nasabah dan optimalisasi penghimpunan DPK serta membantu dalam melakukan ekspansi bisnis.
- Mendukung program Pemerintah sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 910/1866SJ tanggal 17 April 2017 tentang lmplementasi Transaksi Non Tunai Bank Papua untuk Pemerintah Daerah Provinsi.
- Melakukan promosi Program *Canvasing*, *Open Counter* dan *Advertising*.

2. Achievement Analysis

2.1. Asset

The achievement of Bank Papua Assets in 2019 that exceeded the target of 119.90% proves that the performance of Bank Papua management has carried out the tasks as mandated by shareholders and is in accordance with the target of the Bank's Business Plan (BBP). This increase was caused by the increase in funds from each cash account post which increased by 70.63%, Current accounts with other banks increased by 264.77%, securities and securities increased by 80.72%. In addition, management managed to maintain cheap funds obtained from the TPF. This is evident from the CASA ratio of 87%, so that management is free to make use of these funds in credit, placement, or purchase securities and securities.

2.2. Third-party funds

Third Party Funds collected in 2019 amounted to 123.38% of the target. Achievement of Third Party Funds successfully collected by Bank Papua is inseparable from the fund collection strategy, including:

- *Optimizing the collection of public TPF through streamlining marketing / funding officers in understanding and applying technical steps in the implementation of product marketing with targets while increasing the performance standards of marketing staff.*
- *Recruitment of marketing personnel is an extension of the program established by the Fund, Service and e-Banking Management Division to maximize the collection of DPK from the community.*
- *Providing special rates to attract customers and optimize the collection of third party funds and assist business expansion.*
- *Supporting Government programs in accordance with Minister of Home Affairs Circular Letter Number: 910 / 1866SJ dated 17 April 2017 concerning Implementation of Non-Cash Transactions of Bank Papua for Provincial Governments.*
- *Promoting the Canvasing, Open Counter and Advertising Programs.*

- Memberikan kewenangan biaya promosi kepada masing-masing Kantor Cabang guna menyelenggarakan *gathering community* dengan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dalam rangka menjaga hubungan dengan pemilik dana dan dana yang telah disimpan di Bank Papua perlu dikelola dengan baik.
- Menjalin kerjasama dengan mitra kerja untuk menghimpun DPK Bank Papua.
- Menetapkan *Sales/Account Officer* untuk masing-masing segementasi pelayanan.

2.3. Aktiva Produktif

Aktiva produktif pada tahun 2019 sebesar 119,08% dari target. Pencapaian melebihi target ini dikarenakan penerapan strategi manajemen dalam penayaluran dana seperti :

- Penyaluran kredit pada tahun 2019 akan dilakukan penurunan terhadap kredit produktif kepada pihak swasta pada sektor-sektor ekonomi yang pada tahun 2018 memiliki NPL (*Non Performing Loan*) kurang baik. Namun kebijakan pemberian kredit untuk kredit-kredit produktif kontrakting tidak mengalami perubahan penurunan mengingat kredit yang diberikan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
- Pemberian kredit akan berfokus hanya di Tanah Papua.
- Pemberian kredit diprioritaskan kepada sektor-sektor ekonomi yang memiliki Kredit NPL Rendah sedangkan Kredit NPL tinggi lebih selektif.
- Meningkatkan pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi Kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan pelaku ekonomi yang kuat dalam menghadapi berbagai perubahan situasi ekonomi. Kelompok usaha tersebut, saat ini sedang diminati oleh hampir semua Bank termasuk bank-bank berskala nasional. Sehingga untuk mempertahankan segmen pasar ini, strategi Bank Papua adalah meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi dengan membentuk unit khusus yang menangani UMKM khusus untuk masyarakat Papua, melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi.

- *Authorize promotional costs to each Branch Office to hold a gathering community with national, multinational companies and local governments. This approach in order to maintain relations with the owners of funds and funds that have been deposited at Bank Papua needs to be managed properly.*
- *Collaborate with partners to collect Bank Papua TPF.*
- *Assign Sales / Account Officers to each service segmentation.*

2.3. Earning Assets

Earning assets in 2019 amounted to 119.08% of the target. Achievement exceeded this target due to the implementation of management strategies in the distribution of funds such as:

- *Lending in 2019 will be reduced to productive credit to the private sector in economic sectors which in 2018 have a non-performing loan (NPL) that is not good. However, the lending policy for contracting performing loans did not experience a change in decline, given the credit given in order to support infrastructure development.*
- *Lending will focus only on Land of Papua.*
- *Lending is prioritized to economic sectors that have Low NPL while high NPL is more selective.*
- *Increasing the provision of credit for Micro, Small, Medium Enterprises and Corporations Micro, small, medium and cooperative business groups are strong economic actors in facing various changes in the economic situation. The business group is currently in demand by almost all banks, including national banks. So as to maintain this market segment, Bank Papua's strategy is to increase lending to micro, small, medium and corporate businesses by forming a special unit that handles MSMEs specifically for the people of Papua, collaborating with the regency / city governments of Papua and West Papua in financing micro businesses , small, medium and corporation.*

2.4. Laba

Laba tahun berjalan 2019 mencapai 100,51% dari target. Dengan pencapain laba yang melebihi target, mencerminkan bahwa manajemen Bank Papua telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, guna memberikan kontribusi kepada seluruh *stakeholder*.

2.5. Rasio

Mayoritas rasio keuangan pada tahun 2019 telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berjalan sangat efektif dan efisien, dimana manajemen telah melaksanakan strategi guna mendukung operasional sebagai berikut:

- Peningkatan manajemen aset perlu dilakukan secara terus-menerus agar dapat meyakini pengkinian aset yang dikelola memiliki nilai pasar yang tinggi, berkualitas, produktif dan tidak bermasalah.
- Bank perlu meningkatkan pengelolaan terhadap *review monitoring* terhadap debitur-debitur yang saat ini berada pada Kol.2 yang berpotensi menjadi lancar dan/atau mengalami penurunan kualitas.
- Bank harus memastikan pemenuhan ketentuan kepada instansi-instansi maupun lembaga terkait penyediaan dana dan menuangkan pemenuhan ketentuan tersebut dalam MOU dan/atau perjanjian kerjasama.

2.6. Pengembangan SDM

Untuk itu manajemen perlu mengkaji ulang pengurangan jumlah pegawai guna mewujudkan pegawai yang berkompeten dan memiliki kemampuan berkompetisi yang tinggi seiring dengan perubahan dunia bisnis yang cepat serta memiliki nilai-nilai budaya kerja produktif dengan mengedepankan komitmen dan profesionalisme.

Untuk itu manajemen mengembangkan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan pegawai sesuai tuntutan organisasi dan perkembangan jaringan kantor Bank Papua, dengan menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi terhadap jabatan yang akan diberikan.
- Menyempurnakan sistem pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
- Optimalisasi penerapan budaya kerja dan standar layanan Bank Papua.
- Pengukuran tingkat kepuasan pegawai.

2.4. Earning

Earning for the year 2019 reached 100.51% of the target. With the achievement of profit that exceeds the target, it reflects that the management of Bank Papua has carried out its duties effectively and efficiently, in order to contribute to all stakeholders.

2.5. Ratios

The majority of financial ratios by 2019 have reached the specified target. This proves that the company is running very effectively and efficiently, where management has implemented strategies to support operations as follows:

- *Improved asset management needs to be carried out continuously in order to be able to believe that the assets that are managed have a high market value, quality, productive and are not non performing.*
- *Banks need to improve the management of monitoring reviews of debtors currently in Coll. 2 that have the potential to become current and / or experience a deterioration in quality.*
- *Banks must ensure the fulfillment of provisions for agencies and institutions related to the provision of funds and pour the fulfillment of these provisions in the MOU and / or cooperation agreement.*

2.6. Human Resource Development

For this reason, management needs to review the reduction in the number of employees in order to create competent and competent employees in line with the fast changing business world and productive work culture values by prioritizing commitment and professionalism.

For this reason, management develops the Human Resources development strategy as follows:

- *Providing the needs of employees according to the demands of the organization and the development of the Bank Papua office network, by placing employees according to educational background, competency in the position will be given.*
- *Improve employee development systems according to needs.*
- *Optimizing the application of work culture and service standards of Bank Papua.*
- *Measurement of employee satisfaction.*

- Peningkatan kesejahteraan pegawai pensiun.
- Optimalisasi fungsi ARMES.
- Peningkatan disiplin kerja, produktivitas serta perilaku kerja pegawai.
- Melakukan perubahan komposisi struktur gaji untuk tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan.
- Penyesuaian Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan.

3. Proyeksi 1 tahun kedepan

3.1. Aset

Melihat data pertumbuhan aset, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran aset di tahun 2020 adalah sebesar Rp23.638.630 juta atau pertumbuhan 19,34% dari target 2019.

3.2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tumbuh sebesar Rp18.647.408 juta. Proyeksi tahun 2020 berdasarkan pada target tahun 2019. dengan perincian masing-masing produk sebagai berikut:

- Giro
  Giro diproyeksikan tumbuh menjadi Rp8.465.462 juta. Manajemen mentargetkan proyeksi pertumbuhan ini berdasarkan dari target 2019 sebesar Rp8.475.125 juta, yang mana pada sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 hal ini telah tercapai.
- Tabungan
  Tabungan diproyeksikan tumbuh menjadi Rp7.656.508 juta, lebih besar dari target dari tahun 2019 .
- Deposito
  Deposito ditargetkan tumbuh menjadi Rp2.525.438 juta atau meningkat sebesar Rp8.077 juta dari target tahun 2019.

3.3. Aktiva Produktif

Pada tahun 2020, keseluruhan aktiva produktif ditargetkan tumbuh menjadi Rp18.991.639 juta atau meningkat 0,45% dari target tahun 2019. Perincian pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kredit
  Manajemen memproyeksikan pertumbuhan kewajaran kredit di tahun 2020 adalah sebesar Rp16.656.855 juta atau naik sebesar 6,06% dari target tahun 2019.
- Penempatan pada BI dan Bank Lain
  Manajemen memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Penempatan pada BI dan Bank Lain di tahun 2020 adalah sebesar Rp1.117.614 juta.

- *Increased pension employee welfare.*
- *Optimization of the ARMES function.*
- *Increased work discipline, productivity and employee work behavior.*
- *Changes the composition of salary structure for performance and position allowances.*
- *Old Age Insurance (JHT) adjustments for employees.*

3. Projection for the next 1 year

3.1. Asset

Looking at the asset growth data, the Bank projects that the growth of the fairness of assets in 2020 will be Rp23,638,630 million or 19.34% growth from the 2019 target.

3.2. Third-party funds

Third Party Funds are projected to grow by Rp18,647,408 million. Projections for 2020 are based on the 2019 target, with the details of each product as follows:

- *Current Accounts*
  Current accounts are projected to grow to Rp8,465,462 million. Management is targeting this growth projection based on the 2019 target of Rp8,475,125 million, which as of 31 December 2019 this has been achieved.
- *Savings*
  Savings are projected to grow to Rp7,656,508 million, larger than the target of 2019.
- *Time Deposits*
  Time Deposits are targeted to grow to Rp2,525,438 million or increase by Rp8,077 million from the 2019 target.

3.3. Earning Assets

In 2020, the total earning assets are targeted to grow to Rp18,991,639 million or an increase of 0.45% from the 2019 target. The details of the growth are as follows:

- *Loan*
  The management projects that the growth of credit fairness in 2020 will be Rp16,656,855 million or an increase of 6.06% from target loans in 2019.
- *Placement with BI and Other Banks*
  The management projects that the growth of the fairness of Placements with BI and Other Banks in 2020 will be Rp1,117,614 million.

- Surat Berharga
  Manajemen memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Surat Berharga di tahun 2020 adalah sebesar Rp1.217.170 juta.

- *Marketable Securities*
  The management projects that the growth of the fairness of the Securities in 2020 will amount to Rp1,217,170 million.

3.4. Laba
Proyeksi laba bersih pada tahun 2020, ditargetkan sebesar Rp366.643 juta atau meningkat 117,60% dari laba yang ditargetkan pada tahun 2019.

3.4. Earning
The projected net earning in 2020 is targeted at Rp366,643 million or an increase of 117,60% of the earning targeted in 2019.

3.5. Rasio Keuangan
Untuk masing-masing rasio keuangan pada tahun 2020 diproyeksikan sebagai berikut :

- KPPM diproyeksikan sebesar 21,14%.
- NPL *Gross* diproyeksikan sebesar 4,80% dan sedangkan NPL *Netto* sebesar 2,18%.
- ROA diproyeksikan sebesar 2,07%.
- ROE diproyeksikan sebesar 9,26%.
- NIM diproyeksikansebesar 6,12%.
- BOPO diproyeksikan sekitar 81,43%.
- LDR diproyeksikan sebesar 89,33%.

3.5 Financial Ratios
For each financial ratio in 2020 projected as follows:

- *CAR is projected at 21.14%.*
- *Gross NPL is projected at 4.80% and Net NPL at 2.18%.*
- *ROA is projected at 2.07%.*
- *ROE is projected at 9.26%.*
- *NIM is projected to be 6,12%.*
- *OEOI is projected at around 81.43%.*
- *LDR is projected at 89.33%.*

3.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Melihat perkembangan saat ini, maka manajemen memproyeksikan jumlah pegawai Bank Papua pada tahun 2020 sebanyak 2.430 orang.

3.6. Human Resource Development (HR)
Seeing current developments, the management projects that the number of Bank Papua employees in 2020 will be as many as 2.430 person.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Material Facts that Occur after the Accountant Date Statement

Selama tahun 2019, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Bank Papua.

During 2019, no material information and facts occurred after the date of the Bank Papua accountant's report.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Aspek Pemasaran atas Produk & Jasa

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan menjawab tuntutan pasar yang terus berubah, Perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi dan peningkatan layanan sesuai dengan target marketnya. Salah satu aspek penting adalah dengan melakukan *customer targeting* dan *customer engagement* yang lebih baik. Melalui hal tersebut Perusahaan dapat mengetahui lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi nasabah serta memahami kondisi persaingan bisnis terkini, dan kepekaan organisasi bisnis terhadap pasar yang dihadapi. Hal tersebut diatas dilakukan agar strategi pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga memberikan kemampuan bagi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.

- Dari sisi Penghimpunan Dana

  Dari sisi penghimpunan dana, Perusahaan fokus pada akusisi dana murah (CASA) dengan melakukan program-program untuk menghimpun tabungan antara lain promo *event*, *partnership* dengan Pemerintah dan Perusahaan nasional maupun swasta untuk kesempatan *cross selling* dan *point redemption partner*, *debit card usage campaign* serta program inovatif lainnya. Untuk penghimpunan giro, Perusahaan mengedepankan fasilitas *cash management system* yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi finansialnya secara transparan dan akuntabel serta berusaha untuk menjadikan Perusahaan sebagai main *operating account*. Pengumpulan CASA juga dilakukan melalui aktivitas *Value Chain*, *Payroll*, *Channel*, dan EDC.

  Fokus Perusahaan dalam pengumpulan dana murah (CASA) menghasilkan komposisi CASA terhadap total dana pihak ketiga di tahun 2019 terus dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini memberikan kapabilitas bagi Perusahaan untuk bersaing di industri dengan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada nasabahnya. Dengan strategi tersebut Perusahaan yakin mendapatkan nasabah-nasabah yang berkualitas baik sehingga kualitas aset dapat terjaga.

Marketing aspects of products & services

To face increasingly fierce business competition and respond to changing market demands, the Company is required to innovate and improve services in accordance with its target market. One important aspect is to do better customer targeting and customer engagement. Through this the Company can get to know better about the needs and preferences of customers and understand the current conditions of business competition, and the sensitivity of business organizations to the market at hand. The above is done so that the marketing strategy carried out can run effectively and efficiently so as to provide the ability for the Company to develop a sustainable business.

- *In terms of Fund Raising*

  In terms of fund raising, the Company focuses on the acquisition of low-cost funds (CASA) by carrying out programs to collect savings, including promo events, partnerships with the Government and national and private companies for cross selling opportunities and partner redemption points, debit card usage campaigns and programs other innovative. For the current account collection, the Company prioritizes a cash management system that makes it easy for the Regional Government to conduct transparent and accountable financial transactions and seeks to make the Company a main operating account. CASA collection is also carried out through Value Chain, Payroll, Channel and EDC activities.

  The Company's focus in raising low-cost funds (CASA) has resulted in CASA's composition of total third-party funds in 2019 being maintained and improved. This gives the Company the ability to compete in the industry by providing more competitive prices to its customers. With this strategy, the Company is confident of getting good quality customers so that asset quality can be maintained.

Rencana bisnis Pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2019 diharapkan mengalami pertumbuhan 4-5% dari tahun 2018

Business plan The growth of third party funds in 2019 is expected to grow 4-5% from 2018

dalam Juta (*in million*) Rp

Dana Pihak Ketiga	Rencana Bisnis Bank		%	Third Party Fund
	2018	2019		
Giro	8.475.125	8.856.155	4,50%	*Current Account*
Tabungan	7.618.132	7.982.230	4,78%	*Saving*
Deposito	2.517.361	2.632.886	4,59%	*Time Deposit*
Jumlah	18.610.618	19.471.271	4,62%	*Total*

Pada tahun 2019 strategi dalam penghimpunan dana bisnis Ritel Bank Papua adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan *Customer Base*

Tahun 2019 pertumbuhan *customer base* ritel diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sumber pendanaan dari dana Giro Pemerintah Daerah secara bertahap dengan memfokuskan peningkatan pengelolaan segmen *mass*, *mass affluen*t dan *Upper*.

b. Peningkatan Volume Dana

1. Mendukung Program Pemerintah sesuai surat Edaran Mendagri Nomor : 910/1866SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Implementasi *Cash Management System* Kas Daerah untuk membantu PEMDA dalam pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih cepat, akurat dan mudah sehingga menghasilkan laporan yang transparan baik disisi pengeluaran maupun penerimaan;
3. Implementasi CMS diharapkan seluruh rekanan/vendor PEMDA terkait APBD akan diwajibkan pembayaran proyeknya melalui rekening di Bank Papua, selanjutnya dilakukan upaya agar seluruh dana aktivitas transaksinya melalui rekening yang ada di Bank Papua;
4. Penambahan fitur berupa notifikasi;
5. Implementasi e-samsat pada samsat *online* Provinsi Papua dan Papua Barat;
6. Optimalisasi Program Kartu Pegawai Ektronik (KPE);
7. Menjaga dan mengembalikan kepercayaan pemerintah daerah agar pengelolaan kas daerah dan pendapatan asli daerah seluruh provinsi, pemkab dan pemkot se-Tanah Papua hanya di Bank Papua;
8. *Value chain*, debitur atau rekanan PEMDA disarankan untuk memiliki rekening di Bank Papua (baik *supplier* atau pembeli) sehingga memudahkan dalam sistem pembayaran dengan cara pemindahbukuan;

In 2019 the strategy in collecting Bank Papua's Retail Bank business funds is as follows.

a. Increased Customer Base

In 2019 the growth of retail customer base is expected to gradually reduce the dependency of funding sources from the Regional Government Current Account funds by focusing on improving the management of the mass, mass affluent and Upper segments.

b. Increased Fund Volume

1. *Supporting Government Programs in accordance with Minister of Home Affairs Circular Letter Number: 910 / 1866SJ dated 17 April 2017 concerning Implementation of Non-Cash Transactions to Provincial Governments;*
2. *Implementation of the Regional Cash Management System to assist LGs in managing Regional Finances more quickly, accurately and easily so as to produce transparent reports on both the expenditure and revenue sides;*
3. *It is hoped that the implementation of CMS for all LG partners / vendors related to APBD will be obliged to pay for the project through accounts in Bank Papua, then efforts will be made to ensure that all funds for transaction activities will be through accounts in Bank Papua;*
4. *Added features in the form of notifications*
5. *Implementation of e-Samsat in online Samsat Province of Papua and West Papua;*
6. *Optimization of the Employee Card Program (KPE);*
7. *Maintain and restore the confidence of the regional government so that the management of regional cash and regional original revenues throughout the province, the municipal government and the regency government in Land of Papua is only at Bank Papua*
8. *Value chains, debtors or local government partners are advised to have an account at Bank Papua (both suppliers and buyers) so as to facilitate payment systems by book-entry;*

9. Program Undian Tabungan SIMPEDA ;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan segmentasi nasabah dana (*mass, uppermass*, *affulent*, *priority*);
11. Melakukan *selling day*;
12. *Co branding* kerjasama, *partnership* dengan Bank Besar Nasional;
13. Menetapkan sales/*Account Officer* untuk masing-masing segementasi pelayanan.
14. Peningkatan *service excellence*, revitalisasi dan pengembangan kanal distribusi *e-banking*.

c. Peningkatan Kualitas Rekening

Peningkatan kualitas rekening secara langsung akan berdampak positif pada peningkatan saldo rata-rata nasabah termasuk meningkatkan pendapatan Bank dari *fee based income*.

Oleh karena itu pada tahun 2019 akan lebih difokuskan kepada :

1) Peningkatan kelekatan nasabah atas kepemilikan 4 produk dan layanan khusus kewajiban atas penerimaan fasilitas *e-channel*.
2) Melakukan repartriasi nasabah *lower mass* melalui aktivitas rekening pasif melalui tele*marketing* dengan pemberian program khusus.

d. *Funding* Bisnis Proses

Untuk menunjang implementasi dari setiap kebijakan di atas maka harus di dukung dengan bisnis proses yang menunjang baik bagi *supervisor* maupun pada para *marketing*. Pada tahun 2019 dukungan terhadap *funding* bisnis proses dapat dilakukan melalui :

1) Proses *monitoring* atas pencapaian kinerja cabang yang dilakukan secara periodik guna mengarahkan cabang atas strategi yang harus dilakukan kedepannya.
2) Bekerjasama dengan pihak pembinaan cabang dan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan cabang atas produk dan layanan.
3) Mengembangkan produk, layanan dan aplikasi yang dapat membantu cabang dalam aktivitas pemasaran produk guna meningkatkan pertumbuhan DPK, rekening dan transaksi perbankan.

9. *SIMPEDA Savings Lottery Program;*
10. *Improving services to the public based on customer segmentation of funds (mass, uppermass, affulent, Priority);*
11. *Doing selling day;*
12. *Co-branding cooperation, partnership with the National Big Bank;*
13. *Assign sales / Account Officers for each service segmentation.*
14. *Enhancing service excellence, revitalizing and developing e-banking distribution channels.*

c. Account Quality Improvement

Improved account quality will directly have a positive impact on increasing the average balance of customers, including increasing bank income from fee-based income.

Therefore in 2019 the focus will be more on:

1) Increasing customer attachment to the ownership of 4 products and special services on the obligation to receive e-channel facilities.

2) Reparting lower mass customers through passive account activities through telemarketing by providing special programs.

d. Business Funding Process

To support the implementation of each of the above policies, it must be supported by business processes that support both supervisors and marketing. In 2019 support for business process funding can be done through:

1) The process of monitoring the achievement of branch performance is carried out periodically to direct the branch to the strategy that must be carried forward.
2) Collaborate with branch development and human resources in conducting socialization to increase branch knowledge on products and services.

3) Developing products, services and applications that can help branches in product marketing activities in order to increase the growth of deposits, accounts and banking transactions.

4) Optimalisasi Anggaran dan Biaya Promosi secara Efektif dan efisiensi melalui penyusunan rencana anggaran berdasarkan metode *actual base cost*, evaluasi realisasi biaya tahun sebelumnya dan melaksanakan fungsi kontrol atas pelaksanaan program terhadap kondisi keuangan perusahaan.

4) Optimizing Budget and Promotion Costs Effectively and efficiently through the preparation of a budget plan based on the actual base cost method, evaluating the realization of the previous year's costs and carrying out the control function of the implementation of the program on the company's financial condition.

dalam (in) Rp

Rencana dan Realisasi Biaya Promosi Divisi Pengelolaan Dana Jasa & *E-Banking*
Plan and Realization of Promotional Costs in the Management of Funds Services & E-Banking Division

No	Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Periode	Realisasi Anggaran (%)
1	2017	71.525.000.000	15.585.000.000	Triwulan I - IV	21.79%
2	2018	65.220.000.000	18.468.000.000	Triwulan I - IV	28.32%
3	2019	74.235.100.000	24.823.180.000	Triwulan I - IV	33.44%
	TOTAL	**210.980.100.000**	**58.876.180.000**		

- Dari sisi Penyaluran Kredit

Untuk segmen kredit UMK & Konsumer selama tahun 2019 telah dilaksanakan program diantaranya adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Penyaluran Kredit UMK, baik Kredit Program maupun kredit Non Program hingga mencapai minimal 20% dari total kredit Bank Papua dengan tingkat NPL yang terkendali guna mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas penyaluran kredit Konsumtif dalam rangka peningkatan pendapatan operasional Bank Papua.

Selain itu terdapat beberapa program unggulan seperti :

1. Dalam hal pengembangan Usaha Mikro, Kecil melalui kredit program pemerintah yaitu berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dengan adanya Program KUR ini sangat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil untuk menambah modal usaha.
2. KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif & layak namun belum memiliki agunan yang cukup sehingga dapat meningkatkan usaha yang dimiliki agar dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
3. Alokasi KUR Tahun 2019 sebesar Rp75.000.000.000,- realisasi KUR Generasi II Per 17 Desember 2019 pencapaian sebesar Rp74.840.000.000,- atau 99.79%.

- *In terms of lending*

For the MSME & Consumer loan segment during 2019, programs have been implemented including:

1. *Increase the number of MSE Loans, both Program Loans and Non-Program Loans to reach a minimum of 20% of Bank Papua's total loans with a controlled NPL level to encourage the development of popular economy.*
2. *Increasing the number and quality of Consumer Loans in order to increase the operational income of Bank Papua.*

In addition there are several excellent programs such as:

1. *In the case of developing Micro, Small Enterprises through government program credit in the form of distribution of People's Business Loan (KUR), the existence of this KUR Program is very helpful to the community, especially micro, small businesses to increase business capital.*
2. *KUR (People's Business Loan) is a financing for people who have productive & viable businesses but do not yet have sufficient collateral so that they can improve their businesses so they can grow and develop sustainably.*
3. *KUR Allocation for 2019 amounted to Rp75,000,000,000.- The realization of KUR 2nd Generation as of December 17, 2019 reached Rp74,840,000,000, or 99.79%.*

4. Dalam rangka peningkatan pendapatan operasional Bank Papua tetap konsentrasi dalam menyalurkan kredit konsumtif, terutama kredit kepada para pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) serta terus mendukung program pemerintah dalam hal penerbitan satu juta rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 3.500 unit rumah. Pada tahun 2019 Bank Papua realisasikan KPRS FLPP posisi 17 Desember 2019 sebanyak 745 unit rumah dengan nilai FLPP sebesar Rp108.788.087.506.- atau 99.84%.

Program unggulan diatas disamping meningkatkan pendapatan operasional Bank juga bertujuan sebagai berikut:

1 Mendukung program pemerintah dalam membantu para pengusaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan pendanaan modal kerja dengan tingkat suku bunga rendah;
2 Membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memperoleh rumah melalui KPR Sejahtera bersubsidi FLPP yang bunganya sangat rendah yaitu 5% pertahun.
3 Membantu para ASN dalam memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan persyaratan yang sangat mudah.

Untuk segmen kredit konsumer, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mendukung program pemerintah untuk menerbitkan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bank Papua terus meningkatkan perannya secara aktif dan nyata dalam mendukung program penyaluran KPR Sejahtera-FLPP.

Dalam melaksanakan program tersebut Bank Papua telah bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya :

1. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran KPR Bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi MBR;
2. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka perolehan rumah melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Satker Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi MBR;

4. In the context of increasing the operational income of Bank Papua, continue to concentrate on distributing consumer credit, especially credit to civil servants or what is now called the State Civil Apparatus (ASN) and continue to support government programs in the issuance of one million houses, especially for low-income people (MBR) with a target of 3,500 housing units. In 2019 Bank Papua realized KPRS FLPP position on 17 December 2019 as many as 745 housing units with an FLPP value of Rp108,788,087,506.- or 99.84%.

The superior program above besides increasing the Bank's operating income also aims as follows:

1 Supporting government programs in assisting micro and small entrepreneurs (MSEs) in obtaining working capital funding with low interest rates;

2 Assist low-income people (MBR) to obtain housing through the KPR Prosperous KPR subsidized prosperous mortgage, which has a very low interest rate of 5% per year.

3 Assist ASNs in meeting their needs quickly and with very easy requirements.

For the consumer credit segment, in order to improve services and support the government program to issue one million houses for low-income people (MBR), as stated by the President, Bank Papua continues to increase its role actively and visibly in supporting the KPR Sejahtera -FLPP distribution program.

In implementing the program Bank Papua has collaborated with various parties, including:

1. Ministry of Public Works and Public Housing regarding Subsidized KPR Distribution in the context of obtaining houses for MBR;
2. BLU Center for Housing Financing Management Funds (PPDPP) concerning Fund Distribution of Housing Financing Liquidity Facilities (FLPP) in the context of obtaining houses through credit for ownership of prosperous homes for low-income communities
3. The Work unit of the Directorate General of Housing Finance concerning the Distribution of Housing Advances Subsidies (SBUM) in the context of Obtaining Houses for MBR;

4. PT. Sarana Multigriya Financial dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) KPR BPD-SMF.
5. REI Papua dan Papua Barat serta APERNAS Propinsi Papua selaku Asosiasi dari para pengembang yang melakukan pembangunan perumahan.

Atas keseriusan Bank Papua dalam menyalurkan KPR Sejahtera-FLPP tersebut telah mengantarkan Bank Papua menjadi BPD No. 1 di Indonesia dalam pelaksanaan Program Penerbitan Sejuta Rumah.

Sedangkan untuk segmen kredit mikro dan kecil, Bank Papua menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka memberdayakan pengusaha-pengusaha mikro kecil Orang Asli Papua (OAP) melalui pemberian pekerjaan sipil yang pembiayaannya bersumber dari dana infrastruktur tahun anggaran 2019. Untuk layanan kredit kontrakting kepada OAP, Bank Papua telah mempersiapkan fasilitasnya berupa :

1. Jaringan kantor di setiap Kabupaten bahkan beberapa distrik di Provinsi Papua Barat lengkap dengan fasilitas layanan dan SDM yang memadai.
2. SOP untuk layanan dan produk pinjaman serta jasa lainnya.
3. Bahkan khusus untuk mendukung pemberdayaan OAP telah diterbitkan SK Direksi Bank Papua Nomor. 09/DIR-BPD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Kebijakan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua.

- Dari sisi penyaluran Jasa Layanan

Tujuan dari peningkatan jasa layanan Bank Papua adalah untuk meningkatkan *customer base* dan peningkatan volume dana. Selama tahun 2019, Bank Papua telah melakukan inovasi berbagai produk serta menambah pelayanan *electronic banking* seperti :

1. Pengembangan aplikasi *Cash Management System* Kas Daerah untuk membantu PEMDA dalam pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih cepat, akurat dan mudah sehingga menghasilkan laporan yang transparan baik di sisi pengeluaran maupun penerimaan.
2. Implementasi e-samsat pada samsat *online* Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Optimalisasi Program Kartu Pegawai Ektronik (KPE).
4. *Co-branding* kerjasama, *partnership* dengan Bank Besar Nasional.
5. Pengembangan *E-Channel.*

4. *PT. Sarana Multigriya Financial in the context of BPD-SMF KPR Standard Operating Procedure (SOP).*
5. *REI Papua and West Papua and APERNAS Papua Province as the Association of developers who carry out housing construction.*

For the seriousness of the Bank Papua in distributing KPR Sejahtera-FLPP has led Bank Papua to BPD No. 1 in Indonesia in the implementation of the Million Houses Publishing Program.

As for the micro and small credit segment, Bank Papua cooperates with the Regional Government of West Papua Province in order to empower Papuan Native People (OAP) micro micro entrepreneurs through the provision of civil works whose funding comes from infrastructure funds for the 2019 fiscal year budget. For contracting credit services to OAP, Bank Papua has prepared its facilities in the form of:

1. *A network of offices in each regency and even several districts in the province of West Papua complete with adequate service and human resources facilities.*
2. *SOP for loan services and products and other services.*
3. *Even specifically to support the empowerment of OAP, a Decree of the Board of Director of Bank Papua Number has been issued No.09 / DIR-BPD / I / 2018 dated January 25, 2018 concerning the Policy of Empowering Papuan Native Entrepreneurs.*

- *In terms of channeling services*

The purpose of improving Bank Papua's services is to increase customer base and increase funding volume. During 2019, Bank Papua has innovated various products and added electronic banking services such as:

1. *Development of a Regional Cash Management System application to assist the Local Government in managing Regional Finance so that it is faster, more accurate and easy so that it produces transparent reports on both the expenditure and revenue sides.*
2. *Implementation of e-Samsat in online Samsat Province of Papua and West Papua.*
3. *Optimization of the Ektronik Employee Card Program (KPE).*
4. *Co-branding cooperation, partnership with the National Big Bank.*
5. *Development of E-Channel.*

a. Memperluas dan memperbanyak agen-agen atau *merchant* untuk difasilitasi dengan perangkat maupun aplikasi pembayaran non tunai.
b. Menambah fitur-fitur pembayaran dalam menu mesin ATM (Tagihan Telepon, tagihan pihak ketiga lainnya).
c. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk menambah *channel* layanan kepada masyarakat luas.

6. Pengembangan Layanan Publik *Online* :
a. Merealisasikan rencana implementasi *Internet Banking*.
b. Merealisasikan rencana implementasi *Mobile Banking*.
c. Merealisasikan rencana implementasi Laku Pandai.
7. Menambah Perangkat ATM Tunai dan Setoran Tunai
a. Mengimplementasikan mesin ATM baru sesuai kebutuhan yang telah dianggarkan.
b. Mengimplementasikan mesin ATM Setoran tunai sesuai kebutuhan.
c. Memgimplementasikan penambahan mesin ATM kas keliling sesuai kebutuhan.

Sedangkan untuk jasa *Treasury* telah dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga likuiditas serta mengoptimalkan pendapatan maka Divisi *Treasury* akan melakukan transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* baik. Adapun tahapan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia (BI).
b. Transaksi dengan bank lain. Transaksi *Repo*/*Reverse Repo* dengan bank lain diikat dalam perjanjian yang disebut *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) maupun *Master Repurchase Agreement* (MRA).
c. Melakukan pembelian surat berharga Pemerintah dengan jangka waktu pendek untuk dapat di *Repo* dengan bank Lain.
d. *Dealer* diikutkan dalam pelatihan guna meningkatkan transaksi *Repo Reverse Repo*.
2. Transaksi Trading Obligasi Pemerintah/Korporasi, strategi yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan melalui Trading Obligasi adalah sebagai berikut :
a. Penambahan satu orang *Dealer Fixed Income*.
b. Penambahan satu orang *Dealer Money Market*.
c. Pelatihan tentang Investasi Obligasi, *Global Market*, dan *Finansial Market Risk*.
d. Pelatihan perangkat *Bloomberg*.
e. Meningkatkan kerjasama *Counterparty* perbankan, sekuritas, *broker*, dan manajer investasi.

a. Expand and expand agents or merchants to be facilitated with non-cash payment tools and applications.
b. Add payment features in the ATM machine menu (Telephone Bills, other third party bills).
c. Collaboration with third parties to add service channels to the wider community.

6. Online Public Service Development:
a. Realizing the plan for implementing Internet Banking.
b. Implement the Mobile Banking implementation plan.
c. Realize the implementation plan Branchless banking.
7. Adding Cash ATM Devices and Cash Deposits
a. Implement new ATM machines according to budgeted needs.
b. Implement cash deposit ATM machines as needed.
c. Implement additional mobile cash ATM machines as needed.

As for Treasury services, the following steps have been carried out:

1. In order to maintain liquidity and optimize revenue, the Treasury Division will conduct both Repo and Reverse Repo transactions. The stages of the strategy to be carried out are as follows:
a. Transactions conducted with Bank Indonesia (BI).
b. Transactions with other banks. Reverse Repo Transaction transactions with other banks are bound in an agreement called the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) and the Master Repurchase Agreement (MRA).
c. Purchase Government securities with a short period of time to be repoed with other banks.
d. Dealers are included in the training to increase Repo Reverse Repo transactions.
2. Government / Corporate Bond Trading Transactions, the strategies that will be taken to increase revenue through Bond Trading are as follows:
a. Addition of one fixed income dealer.
b. Add one Money Market Dealer.
c. Training on Bond Investment, Global Market, and Market Risk Financial.
d. Bloomberg device training.
e. Increasing the number of compromised cooperatives, marketable securities, brokers, and investment managers.

3. Meningkatkan *Fee Based Income*
   a. Penyesuaian tarif *Fee Based Income*, melakukan revisi SK Direksi tentang tarif dan biaya jasa produk.
   b. Bekerjasama dengan Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Divisi Perencanaan Strategis guna pengembangan Produk dan Layanan.
4. Sub Agen Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
   Obligasi Ritel Indonesia merupakan produk Surat Utang Negara (SUN) yang secara khusus dijual untuk masyarakat Indonesia. Adapun nominal pembelian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan jangka waktu tiga tahun serta pembayaran bunganya setiap bulan. Pemerintah menunjuk bank dan sekuritas untuk menjual ORI di tahun 2019 guna membantu masyarakat berinvestasi dalam surat berharga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjadi sub agent ORI adalah sebagai berikut:
   a. Menyusun *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk penjualan ORI.
   b. Menempatkan dua orang pegawai di bagian *Sales Dealer*.
   c. Melakukan studi banding dan bekerjasama dengan beberapa Sub Agen ORI yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
   d. Memberikan pelatihan ke *Customer Service* atau *Marketing* Dana Jasa.
5. Menerbitkan Obligasi atau *Medium Term Note* (MTN) jika perusahaan dalam *performance* yang baik.
6. Mengelola likuiditas dengan efisien dan efektif serta memperhitungkan risiko, menetapkan kebijakan suku bunga dan memantau Neraca dan Laba Rugi dengan cara:
   a. Memberikan pelatihan kepada Staf Likuiditas dan ALMA dalam rangka meningkatkan daya analisa.
   b. Memberikan pelatihan kepada staf Kantor Cabang dalam mengelola likuiditas Cabang dan strategi pencapaian Neraca-Laba Rugi.
   c. Menetapkan suku bunga yang lebih kompetitif/ bersaing.
7. Melaksanakan penerusan transaksi SKNBI & RTGS dalam rangka meningkatkan *Fee Based* dan kepercayaan nasabah untuk bertransaksi di Bank Papua, maka diperlukan evaluasi sistem secara terus-menerus, sosialisasi kepada Kantor Cabang untuk peningkatan volume transaksi dan pelatihan kepada staf yang menanganinya.

3. *Increase Fee Based Income*
   a. *Adjustment of Fee Based Income rates, revising the Decree of the Board of Director regarding product tariffs and service costs*
   b. *In collaboration with the SME Business and Consumer Division, the Strategic Planning Division to develop Products and Services.*
4. *Indonesian Retail Bond Sub-agent (ORI)*
   Ritel Indonesia Bonds are Government Bond products (SUN) specifically sold to the people of Indonesia. The purchase nominal is Rp 5,000,000 (five million rupiah), with a term of three years and payment of interest every month. The government appoints banks and securities to sell ORI in 2019 to help people invest in securities. The steps that can be taken to become an ORI sub agent are as follows:
   a. *Develop a Standard Operation Procedure (SOP) for ORI sales.*
   b. *Placing two employees in the Sales Dealer.*
   c. *Conduct comparative studies and collaborate with several ORI Sub Agents that have been established by the government.*
   d. *Providing training to Customer Service or Service Fund Marketing.*
5. *Issued Bonds or Medium Term Notes (MTN) if the company is in good performance.*
6. *Managing Liquidity efficiently and effectively and calculating risk, setting interest rate policies and monitoring the Balance Sheet and Income by:*
   a. *Provide training to Liquidity Staff and ALMA in order to increase the power of analysis.*
   b. *Provide training to Branch Office staff in managing Branch liquidity and strategies for achieving a Balance Sheet.*
   c. *Set more competitive / competitive interest rates.*
7. *Carrying out SKNBI & RTGS transactions in order to increase Fee Based and customer confidence to transact at Bank Papua, it is necessary to continuously evaluate the system, disseminate information to Branch Offices to increase transaction volume and training staff who handle it.*

8. Pengelolaan DHIB dan DHN secara tertib dan teratur baik secara sistem maupun manual sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Strategi Pemasaran

Lingkungan bisnis telah mengalami perubahan yang dahsyat, yaitu dengan mulai munculnya Industri 4.0 dimana setiap pelaku bisnis, pemerintah, dunia pendidikan terus dipacu untuk mulai mengembangkan aktivitasnya berbasis teknologi baik yang bersifat *Internet of Things* (IoT) berupa layanan *Teller* menggunakan robot, maupun dalam bidang melayani masyarakat melalui teknologi informasi. Demikian halnya juga Bank Papua telah melakukan program ke arah *digital*isasi perbankan, sehingga perubahan kegiatan operasional tersebut mampu menekan biaya yang dikeluarkan.

Untuk kebutuhan tersebut, langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Papua, melalui:

1. Penyusunan Blue Print IT Bank Papua 2018-2022 yang telah disususn untuk setiap tahun pemenuhan programnya direalisasi sehingga pada akhir tahun 2022 *digital*isasi dapat terwujud.
2. Pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi Informasi baik penambahan SDM yang baru maupun peningkatan kapasitas yang telah ada guna memberikan kesempatan mengikuti pendidikan pada universitas yang memiliki teknologi yang unggul.
3. Pada tahun 2019 Bank Papua telah menambah *Electronic Data Capture* (EDC) yang berbasis 3G sehingga mampu melayani pelanggannya dalam berbelanja maupun dengan menambahkan program GPN (Gerakan Pembayaran Nasional).
4. Meningkatkan fitur *Mobile Banking* yang sudah dirilis pada tahun 2018, seperti bank-bank lainnya.
5. Sedang mengembangkan teknologi Laku Pandai (layanan tanpa kantor) yang diharapkan pada semester II tahun 2019 bisa live.
6. Sedang dikembangkan CMS *Corporate* yang akan mampu melayani Pemerintah Daerah untuk melakukan transaksi pengeluaran maupun pembayaran, sehingga mampu menyukseskan gerakan transaksi non tunai yang saat ini telah dicanangkan baik oleh OJK, Bl, Kemendagri, KPK.
7. Menambah mesin ATM yang berfungsi untuk setor dan sekaligus tarik tunai.

8. *Management of DHIB and DHN in an orderly and orderly manner both systemically and manually in accordance with applicable rules and regulations.*

Marketing Strategy

The business environment has experienced a tremendous change, namely by starting the emergence of Industry 4.0 where every business person, government, education world continues to be encouraged to start developing its technology-based activities both in the form of the Internet of Things (IoT) in the form of Teller services using robots, and in the field of serving society through information technology. Likewise, Bank Papua has conducted a program towards banking digitalization, so that changes in operational activities are able to reduce costs.

For these needs, the steps that have been and will be taken by Bank Papua, through:

1. *Preparation of Bank Papua Blue Print IT 2018-2022 which has been prepared for each year of the fulfillment of its program is realized so that by the end of 2022 digitalization can be realized.*
2. *Fulfillment of human resources who have the ability to develop information technology both by adding new human resources and increasing existing capacity to provide opportunities to attend education at universities that have superior technology.*
3. *In 2019 Bank Papua has added 3G-based Electronic Data Capture (EDC) so that it is able to serve its customers in shopping as well as by adding the National Payment Movement (GPN) program.*
4. *Improve Mobile Banking features that have been released in 2018, like other banks.*
5. *Developing Branchless banking technology (service without an office) which is expected to be live in the second semester of 2019.*
6. *A Corporate CMS is being developed that will be able to serve the Regional Government to conduct expenditure and payment transactions, so as to be able to succeed in the non-cash transaction movement that has been announced by OJK, BI, Ministry of Home Affairs, KPK.*
7. *Add an ATM machine that works to deposit and at the same time withdraw cash.*

8. Melakukan riset atas *Financial Technology* (*Fintech*) dan *e-commerce* UMKM maupun pembayaran/pembelian pada tahun 2019, hal ini untuk mengetahui pasar yang akan dituju dan kesesuaian teknologi yang akan dipilih Bank Papua.

Dengan demikian langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mampu memberikan layanan *digital*, dimana Pemerintah Pusat juga akan merilis Palapa IV-nya sehingga seluruh nusantara mampu mengoperasikan internet. Diharapkan melalui strategi *digital banking* mampu mengurangi pembiayaan ekspansi jaringan kantor (fisik). Namun langkah tersebut tidak boleh mengurangi kesempatan kerja bagi generasi milenial, dengan memperbesar kerja sama sinkronisasi program penciptaan lapangan kerja yang berbasis *digital* seperti *StarUp* , kios *digital*, maupun *marketing digital*.

Adapun Strategi pemasaran yang dilakukan Bank Papua adalah sebagai berikut :

- **Penetrasi Pasar**

  Penetrasi pasar dilakukan antara lain dengan *customer engagement*, pembiayaan dan pendanaan melalui *value chain*, peningkatan layanan kepada nasabah agar *customer experience* meningkat, serta membangun aliansi antar divisi dalam peluncuran produk yang inovatif, serta menjalin kerja sama dengan mitra *merchant* melalui penawaran dan program promosi yang menarik.

  Perusahaan kedepannya akan terus menitikberatkan pengembangan, dan peningkatan Perbankan *digital* baik secara transaksi, fitur dan kapabilitas maupun jumlah pengguna dalam mendukung program gerakan non tunai dari Pemerintah. Beberapa keuntungan yang diyakini Perusahaan dengan mengembangkan perbankan *digital* antara lain adalah kecepatan layanan yang tidak terbatas oleh lokasi dan jam kerja sehingga memudahkan penggunanya, efisiensi biaya, serta *corporate branding* yang dapat menjangkau lebih luas dengan media perbankan *digital*.

8. Conducting research on Financial Technology (Fintech) and e-commerce of SMEM and payment / purchase in 2019, this is to find out the market to be targeted and the suitability of the technology that will be chosen by Bank Papua.

Thus the steps set by the Board of Commissioners and the Board of Directors are able to provide digital services, where the Central Government will also release its Palapa IV so that the entire archipelago is able to operate the internet. It is expected that through the digital banking strategy it can reduce the financing of (physical) office network expansion. However, this step should not reduce employment opportunities for millennial generation, by increasing cooperation in synchronizing digital-based job creation programs such as StarUp, digital kiosks, and digital marketing.

The marketing strategies undertaken by Bank Papua are as follows:

- ***Market penetration***

  Market penetration is carried out among others with customer engagement, financing and funding through the value chain, improving services to customers so that customer experience increases, as well as building alliances between divisions in innovative product launches, and collaborating with merchant partners through attractive offers and promotional programs. .

  In the future, the company will continue to focus on the development and improvement of digital banking both in terms of transactions, features and capabilities as well as the number of users in supporting the Government's non-cash movement program. Some of the benefits that the Company believes in developing digital banking include the speed of services that are not limited by location and working hours so as to facilitate its users, cost efficiency, and corporate branding that can reach more broadly with digital banking media.

- **Pengembangan Produk**

  Perusahaan juga terus berupaya memberikan nilai tambah melalui berbagai inovasi produk dan layanan perbankan untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan senantiasa melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk produk, layanan, serta *bundling* yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dipasar yang terus berubah. Selain itu konsep layanan dikembangkan secara menyeluruh baik itu layanan berbasis konvensional maupun *channel*.

- **Integrasi, Sinergi dan Aliansi**

  Sinergi diantara unit bisnis juga terus dikembangkan untuk menggali peluang yang ada dengan melakukan *customer engagement* dari segmen bisnis yang berbeda diantara basis nasabah yang telah dimiliki, seperti melakukan *cross selling* dan *value chain* antar unit bisnis di dalam Perusahaan dalam rangka penawaran produk dan layanan.

  Kerja sama dan koordinasi *cross business* unit merupakan aspek penting dalam mendorong penjualan produk induk dan memperluas jaringan nasabah. Koordinasi antara unit bisnis seperti yang dilakukan unit Transaction Banking membantu menghubungkan rantai antara principal, distributor, supplier baik itu untuk layanan pembiayaan maupun pendanaan. Sementara itu cross product penetration juga dilakukan untuk produk-produk *retail* .

- ***Service Excellence***

  Inovasi dan layanan yang terus dibangun merupakan komitmen Perusahaan untuk senantiasa menciptakan *customer centric* dan memberikan *customer experience* terbaik. Selain itu juga Perusahaan terus meningkatkan *customer banking experience* secara keseluruhan melalui investasi teknologi yang unggul, serta peningkatan layanan dan fitur dari produk. Semua ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan dan inovasi yang berkelanjutan baik produk dan layanan selama lebih dari 50 tahun di Perbankan Indonesia.

  Layanan cepat, akurat, mudah, aman dan ramah (CAMAR) juga menjadi tema budaya kerja didalam Perusahaan tidak hanya untuk unit sales namun juga untuk unit support dalam melakukan perkerjaan sehari-hari.

- ***Product Development***

  The company also continues to provide added value through various banking product and service innovations to provide the best for customers and to continue to make continuous innovations for products, services, and bundling that are tailored to the needs of consumers in a changing market. Besides that the service concept is developed thoroughly both conventional and channel based services.

- ***Integration, Synergy and Alliance***

  Synergy between business units is also continuously developed to explore opportunities that exist by engaging in customer engagement from different business segments among the existing customer bases, such as cross selling and value chains between business units within the Company in order to offer products and services.

  Cooperation and coordination of cross business units is an important aspect in driving sales of parent products and expanding customer networks. Coordination between business units as done by the Transaction Banking unit helps connect the chains between principals, distributors, suppliers both for financing and funding services. Meanwhile cross product penetration is also carried out for retail products.

- ***Service Excellence***

  Innovation and services that continue to be built are the Company's commitment to continuously create customer centric and provide the best customer experience. In addition, the Company continues to improve the overall customer banking experience through superior technology investments, as well as improved services and features of the product. All of this is done as a form of the Company's commitment to provide services and continuous innovation both products and services for more than 50 years in Indonesian Banking.

  Fast, accurate, easy, safe and friendly service (CAMAR) is also a theme of work culture within the Company not only for sales units but also for support units in doing daily work.

- **Biaya Pemasaran**

  Dari sisi biaya pemasaran, Perusahaan akan terus melakukan upaya untuk melakukan efisiensi biaya dari Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan *smart promotion* dan *advertising*. Efisiensi biaya yang terkait dengan biaya promosi dilakukan dengan cara melakukan Kegiatan promosi berbagai produk secara bersamaan namun memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, dari sisi media komunikasi, beberapa inisiatif penting juga dilakukan termasuk menggunakan media-media *digital* dan sosial secara terintegrasi melalui *official account* sehingga *cost per contac*t bisa ditekan. Sedangkan untuk media tradisional, optimalisasi jumlah dan lokasi billboard juga dilakukan.

  Dengan langkah-langkah tersebut di atas, biaya *advertising* dan *promotion* tercatat turun dari Rp18.468.000.000 di tahun 2018 menjadi Rp15.206.753.000 di tahun 2019 atau turun sebesar 17,66%. Untuk kedepannya Perusahaan akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan kanal *digital* untuk melakukan aktifitas promosi.

- **Promosi**

  Promosi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan strategi komunikasi sehingga nasabah bisa mendapatkan informasi yang relevan mengenai produk dan layanannya. Dalam menjalankan komunikasinya, perusahaan selalu mengemas informasi di dalam sebuah *marketing* komunikasi yang terintegrasi. Kampanye *marketing* komunikasi yang terintegrasi, baik berupa produk maupun layanan, ditayangkan dan disebar secara *above the line* (ATL) yakni melalui media tradisional seperti televisi, radio, dan *out of home media channel*, dan juga media *digital* seperti *corporate website*. *Ground activation* seperti *corporate event* termasuk sales *marketing* dan pembukaan booth di acara-acara tertentu juga menjadi salah satu cara komunikasi *below the line* (BTL). Perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan media milik sendiri seperti ATM *channel*, poster, dan website termasuk 1 (satu) unit bis yang disumbangkan kepada Universitas Cenderawasih. Terlebih lagi, dirasa krusial bagi perusahaan dalam mengedukasi karyawannya sehingga seluruh staf Bank Papua mengerti mengenai produk dan layanan yang sedang dikomunikasikan. Strategi di internal dilakukan menggunakan *whatsapp* group yang disebar ke seluruh cabang di Indonesia.

- *Marketing costs*

  In terms of marketing costs, the Company will continue to make efforts to make cost efficiencies from the Bank's Business Plan that has been set, one of which is by smart promotion and advertising. The cost efficiency associated with promotional costs is done by carrying out various promotional activities at the same time but providing maximum results. In addition, in terms of communication media, several important initiatives were also carried out including using digital and social media in an integrated manner through official accounts so that cost per contact could be reduced. As for traditional media, optimizing the number and location of billboards is also carried out.

  With the above steps, advertising and promotion costs were recorded to have fallen from Rp18,468,000,000 in 2018 to Rp15,206,753,000 in 2019 or decreased by 17.66%. In the future, the Company will continue to improve and optimize the use of digital channels to carry out promotional activities.

- *Promotion*

  Promotion is very important for the company in conducting communication strategies so that customers can get relevant information about their products and services. In carrying out its communication, the company always packages information in an integrated marketing communication. Integrated marketing communication campaigns, both in the form of products and services, are aired and distributed above the line (ATL) through traditional media such as television, radio, and out of home media channels, and also digital media such as corporate websites. Ground activation such as corporate events including sales marketing and booth opening at certain events are also a way of communicating below the line (BTL). The company also optimizes the use of its own media such as ATM channels, posters, and websites including 1 (one) bus unit that is donated to Cenderawasih University. Moreover, it is considered crucial for the company to educate its employees so that all Bank Papua staff understand the products and services that are being communicated. The internal strategy is carried out using a whatsapp group that is distributed to all branches in Indonesia.

Pangsa Pasar
Market Share

1. Pangsa Pasar Bank Papua terhadap perbankan nasional

Analisis pangsa pasar diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank.

1. *Market share of the Bank Papua against national banks*

Market share analysis is classified based on the number of assets owned, the number of third party funds raised, and the number of loans provided by the Bank.

Kinerja	Tahun 2019 (miliar Rp)			Pangsa Pasar Bank Papua terhadap	
	Bank Papua	BUKU 2	BPD	BUKU 2	BPD
Aset	28.183	905.190	717.518	3,11%	3,93%
Kredit	16.061	569.146	469.530	2,82%	3,42%
DPK	22.960	621.089	532.258	3,68%	4,29%
Laba Bersih	250	8.502	12.307	1,98%	1,37%
CAR	21,43	25,44	21,19	-	-
ROA	1,35	1,42	2,15	-	-
NIM	7,00	4,81	5,95	-	-
BOPO	84,18	88,32	79,56	-	-
LDR	70,30	90,38	88,10	-	-
CASA	87,07	46,62	60,76	-	-

- **Pangsa Pasar Berdasarkan Aset**
  Pada tahun 2019, berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Bank Papua terhadap bank katergori BUKU 2 sebesar 3,11. Sedangkan terhadap BPD, pangsa pasarnya adalah 3,93%.
- **Pangsa Pasar Berdasarkan Pinjaman Yang Diberikan**
  Pada tahun 2019, berdasarkan jumlah Pinjaman yang diberikan, pangsa pasar Bank Papua terhadap bank katergori BUKU 2 sebesar 2,82%. Sedangkan terhadap BPD, pangsa pasarnya adalah 3,42%.
- **Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga**
  Pada tahun 2019, berdasarkan jumlah Dana Pihak Ketiga, pangsa pasar Bank Papua terhadap bank kategori BUKU 2 sebesar 3,70%. Sedangkan terhadap BPD, pangsa pasarnya adalah 4,31%.

- ***Market Share Based on Asset***
  In 2019, based on the number of assets owned, Bank Papua's market share of BUKU 2 category banks is 3.11. As for the BPD, its market share is 3.93%.
- ***Market Share Based on Loans***
  In 2019, based on the number of loans granted, Bank Papua's market share of BUKU 2 category banks is 2.82%. As for the BPD, its market share is 3.42%.
- ***Market Share Based on Third Party Funds***
  In 2019, based on the amount of Third Party Funds, Bank Papua's market share of BUKU 2 category banks is 3.70%. As for the BPD, its market share is 4.31%.

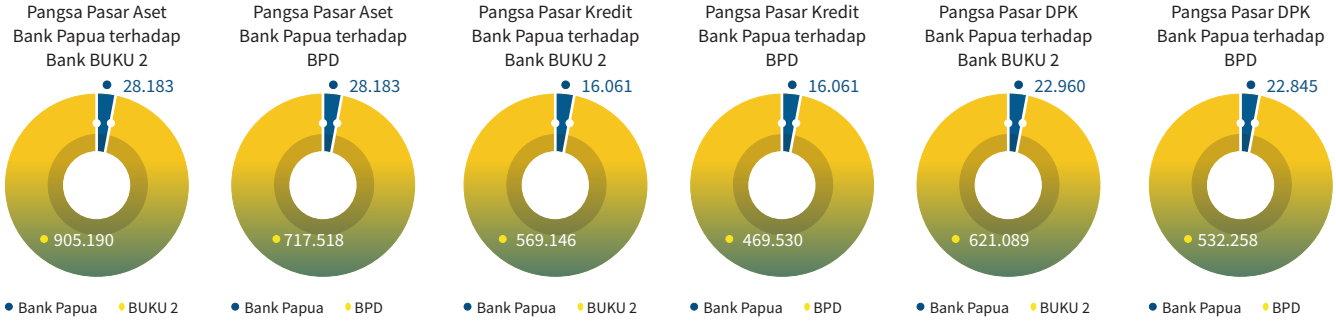

2. Pangsa Pasar Bank Papua terhadap perbankan Daerah

2. Market share of the Bank Papua against regional banks

Tabel Pangsa Pasar Bank Papua terhadap Perbankan Daerah Tahun 2015-2019

Table of Market Share of Bank Papua against Regional Banking in 2015-2019

	2015			2016			2017			2018			2019		
	dalam Rp Juta			dalam Rp Juta			dalam Rp Juta			dalam Rp Juta			dalam Rp Juta		
	Regional	Bank Papua	%	Regional	Bank Papua	%	Regional	Bank Papua	%	Regional	Bank Papua	%	Regional	Bank Papua	%
Giro	638.574.368	7.368.549	1,15%	779.775.032	7.118.045	0,91%	321.826.232	7.731.486	2,40%	349.033.896	8.206.448	2,35%	340.044.833	11.133.571	3,27%
Tabungan	512.586.128	5.878.738	1,15%	742.069.030	6.292.181	0,85%	279.385.948	6.573.996	2,35%	295.146.044	7.365.412	2,50%	280.725.047	8.810.469	3,14%
Deposito	1.306.850.156	2.658.077	0,20%	1.473.720.392	3.159.254	0,21%	676.916.672	2.350.092	0,35%	704.274.823	2.421.956	0,34%	716.945.467	3.016.848	0,42%
DPK	2.458.010.653	15.905.364	0,65%	2.995.564.455	16.569.479	0,55%	1.278.128.852	16.655.575	1,30%	1.348.454.764	17.993.816	1,33%	1.337.715.347	22.960.889	1,72%
Kredit	1.268.853.959	13.207.177	1,04%	2.106.175.625	14.209.840	0,67%	713.188.762	3.270.908	1,86%	778.484.634	14.147.217	1,82%	816.168.315	16.060.678	1,97%

- Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga

  Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan atas perbankan daerah pada tahun 2019 mencapai 1,72% dengan besarnya dana yang dihimpun Rp22.960.889 juta. Besarnya pangsa pasar berdasarkan dana pihak ketiga relatif stabil, dengan perincian pangsa pasar :

  a. Giro sebesar 3,27%
  b. Tabungan sebesar 3,14%
  c. Deposito sebesar 0,42%

- Pangsa Pasar Berdasarkan Kredit yang Diberikan

  Berdasarkan jumlah kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroran atas perbankan daerah adalah sebesar 1,97% dengan besar dana kredit yang disalurkan Rp16.060.678 juta.

- *Market Share Based on Third Party Funds*

  Based on the amount of third party funds raised, the Company's market share in regional banks in 2019 reached 1.72% with the amount of funds raised of Rp22,960,889 million. The size of the market share based on third party funds is relatively stable, with breakdown of market share:

  a. Current Account of 3.27%
  b. Savings of 3.14%
  c. Time Deposits of 0.42%

- *Market Share Based onLoans*

  Based on the amount of credit extended, the market share of the Corporations over regional banks amounted to 1.80% with the amount of credit funds channeled Rp14,707,906 million.

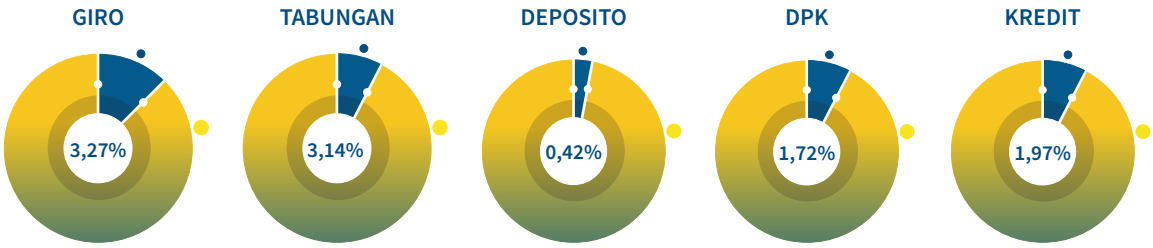

Prospek Usaha
Business Prospect

Prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Di tengah perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,1-5,5%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi, sementara kinerja net ekspor membaik dengan berlanjutnya peningkatan ekspor dan menurunnya pertumbuhan impor.

Indonesia's economic prospects will improve with higher growth and stability that is maintained. In the midst of a sluggish global economic forecast, Indonesia's economic growth in 2020 is expected to continue to increase to around 5.1-5.5%. Improved economic growth was supported by strong domestic demand in both consumption and investment, while net export performance improved with continued export growth and declining import growth.

Inflasi 2020 diperkirakan berada dikisaran sasaran 3,2+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, *volatile food* dan *administered prices*, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar Rupiah. Sedangkan kurs rupiah diperkirakan berada pada Rp14.200 - Rp15.000 per dollar AS, dan BI 7 days Rate berada dikisaran 6%.

Inflation in 2020 is estimated to be in the target range of 3.2 + 1% with sustained price pressures from the demand side, volatile foods and administered prices, inflation expectations, and a stable Rupiah exchange rate. While the rupiah exchange rate is estimated to be between Rp14,200 - Rp15,000 per US dollar, and the BI 7 days rate is in the range of 6%.

Sedangkan untuk perekonomian Papua pada tahun 2019 diperkirakan mengalami penurunan yang diproyeksikan berada pada kisaran (-8,22)% - (-7,82)% (yoy). Penurunan pertumbuhan ekonomi Papua sejalan dengan adanya transisi pertambangan dari tambang terbuka Grasberg ke tambang bawah tanah sehingga terjadi penurunan produksi secara signifikan. Dari sisi lapangan usaha, diperkirakan akan mempengaruhi kontraksi pertambangan dan penggalian yang mencapai -35% (yoy) untuk agregat 2019. Sementara itu, dari sisi permintaan diperkirakan tidak terdapat ekspor luar negeri karena produksi tahun 2019 hanya cukup untuk memenuhi permintaan konsentrat di pasar domestik. Tekanan inflasi Papua untuk keseluruhan tahun 2019 diprakirakan berada pada kondisi yang stabil dengan kisaran sebesar 4,4% - 4,8% (yoy).

As for the economy of Papua in 2019, it is estimated to experience a decline which is projected to be in the range (-8.22)% - (-7.82)% (yoy). The decline in Papua's economic growth is in line with the mining transition from the Grasberg open pit mine to the underground mine so that there is a significant decline in production. From the business side, it is estimated that it will affect mining and quarrying contractions reaching -35% (yoy) for the 2019 aggregate. Meanwhile, from the demand side there is no estimated export overseas because production in 2019 is only sufficient to meet the demand for concentrate in the domestic market. Papua's inflationary pressure for the whole of 2019 is predicted to be in a stable condition with a range of 4.4% - 4.8% (yoy).

Sedangkan dari asumsi mikro, pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 6,06%, Dana Pihak Ketiga sebesar 0,56%, tingkat bunga simpanan - tabungan 2,00%, dan tingkat bunga kredit ritel komersial 10,00%.

Whereas from micro assumptions, bank loan growth is in the range of 6.06%, Third Party Funds at 0.56%, savings-account rates at 2.00%, and commercial retail loan interest rates at 10.00%.

Melihat asumsi makro dan mikro tersebut, manajemen Bank Papua akan melakukan langkah sebagai berikut :

1. Prinsip menjaga kualitas setelah ekspansi kredit dengan program supervisi lebih ketat, dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab antara Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi, Divisi Bisnis UMK dan Konsumer dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus, serta Kantor Cabang.
2. Melakukan penagihan *excom* secara efektif yang akan dikoordinasi oleh Divisi Pengelolaan Aset Khusus serta Kantor Cabang.
3. Menyesuaikan kebijakan perkreditan yang sudah tidak relevan maupun yang baru untuk mengikuti perkembangan bisnis bank, dengan melakukan penyesuaian dan pembaharuan yang akan dilakukan oleh Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi, Divisi Bisnis UMK dan Konsumer dan dibantu oleh Divisi Perencanaan Strategis.
4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan Asuransi/ Lembaga Penjamin Kredit, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilaian Publik dan Notaris, yang akan dikoordinasi oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi, Divisi Pengelolaan Aset Khusus serta Kantor Cabang.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kredit dengan menggunakan sistem ELOS diseluruh kantor-kantor cabang sehingga masyarakat dapat terlayani dengan cepat, akurat, dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian yang akan dikoordinasi oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi serta Divisi Teknologi Informasi.
6. NPL *Gross* 6,75% dengan *Risk Appetite* 6,75% dan *Risk Tolerance* 5,0 % yang akan dimonitor oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus.
7. Rencana Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Papua untuk peduli pada lingkungan sekitarnya, meliputi:
   a. Membuat program pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kemitraan bidang olah raga, pendidikan, kesehatan, lingkungan/bencana alam, keagamaan dan sosial
   b. Melalui kemitraan dengan pengembangan ekonomi rakyat Bank Papua membuat program :
      - Pelatihan UMKM bagi debitur dan non debitur bekerja sama dengan instansi terkait dan pihak swasta.
      - Kampung Binaan sesuai dengan potensi cabang masing-masing bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, instansi dan swasta.

Looking at the macro and micro assumptions, Bank Papua management will take the following steps:

1. *The principle of maintaining quality after credit expansion with a more stringent supervision program, by clarifying the duties and responsibilities between the Commercial and Corporate Business Division, the SME and Consumer Business Division and the Special Asset Management Division, and Branch Offices.*
2. *Conducting effective excom billing which will be coordinated by the Special Asset Management Division and Branch Offices.*
3. *Adjusting credit policies that are already irrelevant or new to follow the development of the bank's business, by making adjustments and updates that will be carried out by the Commercial and Corporate Business Division, the SME Business Division and Consumer and assisted by the Strategic Planning Division.*
4. *Establish and enhance cooperation with Insurance / Credit Guarantee Institutions, Public Accountant Offices, Public Appraisal Services Offices and Notaries, which will be coordinated by the SME and Consumer Business Division, Commercial and Corporate Business Division, Special Asset Management Division and Branch Offices.*
5. *Improving the quality of loan services by using the ELOS system in all Branch Offices so that the community can be served quickly, accurately, and does not abandon the precautionary principle that will be coordinated by the SME and Consumer Business Division, the Commercial and Corporate Business Division and the Information Technology Division .*
6. *Gross NPL 6.75% with Risk Appetite 6.75% and Risk Tolerance 5.0% which will be monitored by the SME and Consumer Business Division, the Commercial and Corporate Business Division and the Special Asset Management Division.*
7. *Corporate Social Responsibility (CSR) Activity Plan is an activity carried out by Bank Papua to care for the surrounding environment, including:*
   a. *Creating a CSR implementation program in the fields of sports, education, health, environment / natural, religious and social disasters*
   b. *In partnership with the economic development of the people of Bank Papua, the program has been made:*
      - *MSMEs training for debtors and non-debtors in collaboration with relevant agencies and the private sector.*
      - *Fostered Villages in accordance with the potential of their respective branches in collaboration with local governments in accordance with the Government and private sector.*

Data yang mendukung prospek usaha : *Data that supports business prospects:*

Tabel Asumsi Makro dan Mikro

Tables of Macro and Micro Assumption

No	Asumsi	Proyeksi						*Asumsi*
		Tahun 2019				Dec - 20	Dec - 21	
		Mar	Jun	Sep	Des			
ASUMSI MAKRO								
1	Pertumbuhan PDB (%)	5%	5,10% - 5,50%	5,10% - 5,50%	5,10% - 5,50%	5,10% - 5,50%	5,10% - 5,50%	*PDB Growth (%)*
2	Inflasi (%)	2.5%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	*Inflation (%)*
3	Lainnya, dirinci per jenis asumsi 2)							*Ohers, detail each assumption 2)*
	a. Kurs IDR/USD	14.24	14,24%	14.24	14.24	14.24	14.24	*a. Exchange rate Rp/USD*
	b. BI 7 *Days Rate*	4,3%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	*b. BI 7 Days Rate*
ASUMSI MIKRO								
1	Pertumbuhan Kredit (%)	-2,82%	-0,87%	5,07%	11,01%	6,06%	3,73%	*Loan Growth(%)*
2	Pertumbuhan Dana pihak Ketiga (%)	5,69%	1,52%	2,47%	3,42%	0,56%	0,68%	*TPF Growth (%)*
3	Tingkat Bunga Simpanan-Tabungan (%)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	*Saving Interest Rate (%)*
4	Tingkat Bunga Kredit Ritel Komersial (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	*Retail Commercial Loan Rate (%)*
5	Lainnya, dirinci per jenis asumsi 3)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*Ohers, detail each assumption 3)*

No	Pos - Pos Neraca	Actual Des - 2018	Actual Mar - 2019	Proyeksi Tahun 2019			Growth Des 18 Des 19	Dec - 20	Dec - 21	*Pos - Pos Neraca*
				Jun	Sep	Dec				
1	Total Aset	22.456.759	22.979.987	23.074.651	23.290.581	23.506.512	4,67%	23.638.630	23.799.858	*Total Asset*
2	Penempatan Pada Bank Lain	1.987.875	2.705.734	3.587.483	2.845.314	1.991.010	0,16%	1.117.614	471.093	*Placement with Other bank*
3	Surat Berharga	975.161	1.098.603	1.188.249	1.199.249	1.210.368	24,12%	1.217.170	1.344.471	*Marketable Securities*
4	Kredit	14.147.217	13.748.253	14.024.663	14.864.772	15.704.881	11,01%	16.656.855	17.277.931	*Loan*
5	Giro	8.151.733	11.298.797	8.263.490	8.340.819	8.418.148	3,27%	8.465.462	8.523.201	*Current Account*
6	Tabungan	7.361.170	4.792.338	7.473.836	7.543.775	7.613.715	3,43%	7.656.508	7.708.729	*Saving*
7	Simpanan Berjangka	2.416.906	2.859.507	2.465.185	2.488.254	2.511.323	3,91%	2.525.438	2.542.663	*Time Deposit*
8	Modal disetor	2.030.945	2.300.800	2.426.495	2.558.344	2.558.344	25,97%	2.690.190	3.217.594	*Paid in Capital*

Penerapan Kebijakan Pembagian Dividen

Dividend Distribution Policy

Penerapan Kebijakan Pembagian *Dividen* Bank Papua sebagai berikut:

1. Membayarkan Dividen tunai minimum 55% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.
2. Keputusan untuk membayar Dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Papua setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Implementation of the Bank Papua Dividend Distribution Policy as follows:

1. *Paying cash dividends of at least 55% of net income each year, the amount of which will be decided through a SGM based on the recommendation of the Board of Director.*
2. *The decision to pay dividends depends on earning, financial conditions and liquidity, compliance with laws and regulations and other factors deemed relevant by the Board of Director of Bank Papua after obtaining approval from the SGM.*

Penggunaan laba tahun 2018 ditetapkan berdasarkan akta notaris Irnawati Nazar, SH No.41 tanggal 29 Maret 2019 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba tahun 2018 dan 2017 ditetapkan sebagai berikut :

The use of earnings for 2018 was determined based on notarial deed No. 41 of Irnawati Nazar, SH dated March 29, 2019 concerning the minutes of the PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . Based on the GMS decision above, the use of earnings in 2018 and 2017 is determined as follows:

Uraian	2018	2017	*Description*
Dividen	55,00%	55,00%	*Dividens*
Cadangan Umum	40,00%	40,00%	*General Reserve*
Tantiem	5,00%	5,00%	*Tantiems*
Jumlah Laba yang dibagikan	100,00%	100,00%	*Total Earning distribution*

Penggunaan Laba tahun 2019 ditentukan pada saat RUPS tahun 2020, dengan Laba sebesar Rp 250.037.261.964.

The use of earning in 2019 was determined at the 2020 AGM, with a profit of Rp 250,037,261,964.

Adapun pembagian dividen selama 4 tahun terakhir yang telah ditetapkan sebagai berikut:

The dividend distribution for the past 4 years has been determined as follows:

dalam (in) Rp

Uraian	2015	2016	2017	2018	*Description*
Laba (Rugi) Bersih	383.343.196.105	(236.704.444.940)	113.272.660.159	218.575.889.824	*Net Income*
Laba (Rugi) per Lembar Saham	1.207.939	(673.606)	282.735	495.822	*Earnings per Share*
Jumlah Dividen	268.340.237.274	0	62.299.963.087	120.216.739.403	*Total Dividends*
Jumlah Lembar Saham Rata-rata	317.353	351.399	400.631	440.836	*Average Number of Dividends*
Dividend Payout Ratio	70%	0%	55%	55%	*Dividend Payout Ratio*
Tanggal Pembayaran	19 Mei 2016	-	27 April 2020	09 April 2019	*Payment Date*
Tanggal Pengumuman	-	16 Juni 2017	-	29 Maret 2019	*Announcement Date*

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Stock Ownership Program by Employees and / or Management that the Company Conducts (ESOP / MSOP)

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Nomor : 07/SK/RUPS-BPD/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Peralihan Status Hukum Saham Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2013 disetujui program kepemilikan saham yang dimiliki oleh karyawan Bank Papua yang tercatat melalui Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari dengan saham seri B sebanyak 8.593 lembar saham atau sebesar Rp42.965.000.000,- dengan komposis 4,38% dari total saham Bank Papua.

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah saham yang dimiliki oleh koperasi sebanyak 10.993 lembar saham (2,39%) dengan nominal sebesar Rp54.965.000.000.

Based on the resolution of the GMS Number: 07 / SK / RUPS-BPD / IV / 2013 dated April 26, 2013 concerning the Transfer of Legal Status of Employee Shares of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2013 approved a program of share ownership owned by Bank Papua employees registered through the Legal Entity Cooperative Multipurpose Cooperative Bank Papua with series B shares totaling 8,593 shares or Rp42,965,000,000, with a composition of 4.38% of the total shares of Bank Papua.

As of December 31, 2019, the number of shares owned by cooperatives was 10,993 shares (2.39%) with a nominal value of Rp54,965,000,000.

Realisasi Perolehan dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Income Realization and Use of Funds Planning from Public Offering

Sampai dengan 31 Desember 2019, Bank Papua tidak pernah menerbitkan surat hutang atau obligasi, sehingga bank tidak memperoleh dan menggunakan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan surat hutang atau obligasi.

As of December 31, 2019, Bank Papua had never issued debt or bonds, so the bank did not obtain and use proceeds from a public offering through the issuance of debt or bonds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Information on Material Transactions that Contain Conflict of Interest

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam menjalankan proses bisnisnya sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank Papua.

Definisi Pihak Berelasi

Orang atau anggota keluarga terdekat dikatakan mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
3. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika :

a. Suatu pihak yang secara langsung, atau tdak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalaian bersama, dengan Bank Papua; (II) memiliki pengaruh signifikan atas Bank Papua; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank Papua.
b. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank Papua;
c. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama dimana Bank Papua sebagai *venturer*;

Material Transactions that Contain Conflict of Interest

During 2019, there were no transactions that contained conflicts of interest, so no information was disclosed.

Transactions with Affiliated or Related Parties

Bank Papua conducts transactions with related parties in carrying out its business processes as defined in PSAK 7 (Revised 2014) "Related Party Disclosures". This revised PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances of related parties, including commitments in financial statements. The adoption of the revised PSAK has an effect on related disclosures in the financial statements of Bank Papua.

Definition of Related Parties

The person or immediate family member is said to have a relationship with the reporting entity if the person:

1. *Having joint control or control over the reporting entity;*
2. *Has a significant influence on the reporting entity; or*
3. *Is a key management personnel of the reporting entity or a parent entity of the reporting entity.*

A party is considered to be related to Bank Papua if:

a. *a party that directly, or indirectly, through one or more intermediaries, a party (i) constrains, or is controlled by, or is under joint control, with Bank Papua; (II) has a significant influence on Bank Papua; or (iii) have joint control over Bank Papua.*
b. *a party that is in the same business group as Bank Papua;*
c. *a party that is a joint venture in which Bank Papua is a venturer;*

d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank Papua;
e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat individu yang diuraikan dalam huruf (a) atau (d);
f. Suatu pihak dalam entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam huruf (a) atau (e);
g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank Papua atau entitas terkait Bank Papua.

d. a party is a member of key management personnel of Bank Papua;
e. a party is an individual close family member described in letters (a) or (d);
f. A party in an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by several entities, directly or indirectly, as described in letters (a) or (e);
g. a party is a post-employment benefit program for employee benefits from Bank Papua or a related entity of Bank Papua.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant financial statements.

Sifat Hubungan Berelasi

Related Party Type

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Pemegang Saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank Papua. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

The Bank conducts business transactions with companies that have the same relationship with the Shareholders and / or management as Bank Papua. With the exception of employee loans for key employees, these transactions are mainly related to borrowing and borrowing of funds in normal business activities and have been substantially carried out under normal conditions such as those carried out by parties that have no special relationship.

No.	Pihak Berelasi *Related Party*	Jenis Hubungan Istimewa	Unsur Transaksi Pihak Berelasi *Types of Special Relationships*	*Elements of Related Party Transactions*
1	Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat	Pemegang Saham Pengendali	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Tabungan	*a. Deposit Current Account* *b. Time Deposit Deposits* *c. Savings*
2	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemegang Saham Pengendali	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Tabungan	*a. Deposit Current Account* *b. Time Deposit Deposits* *c. Savings*
3	Karyawan Kunci	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut	a. Simpanan Giro, b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan. c. Simpanan Deposito Berjangka	*a. Deposit Current Account,* *b. Fund placement in the form of savings.* *c. Time Deposit*

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Purpose of Related Party Transactions

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah demi kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank Papua.

The main purpose of conducting transactions with related parties in general is for the interests and sustainability of Bank Papua's business.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Fairness of Related Party Transactions

The fairness of all transactions conducted with related parties, whether or not carried out with conditions and conditions with third parties, disclosed in financial statements, is in accordance with the standards of PSAK 7 (Revised 2014) "Related Party Disclosures".

dalam (in) Rp

Uraian	2018	2019	Description
Kredit			*Loan*
Karyawan kunci	2.471.054.132	-	*Key employees*
Persentase dari total kredit	0,02%	0,00%	*Percentage to total loans*
Pemegang saham	969.350.863.063	1.508.983.608.968	*Share holders*
Persentase dari total simpanan	7,79%	10,79%	*Percentage to total savings*
Simpanan			*Savings*
Karyawan kunci	40.940.958.955	13.284.764.849	*Key employees*
Persentase dari total simpanan	0,23%	0,06%	*Percentage to total savings*
Pemegang saham	6.499.613.844.786	7.038.957.267.576	*Shareholders*
Persentase dari total simpanan	36,12%	30,66%	*Percentage to total loans*
Pendapatan bunga			*Interest income*
Pendapatan bunga karyawan kunci	-	-	*Interest income key employees*
Persentase dari total pendapatan bunga	0,0%	0,0%	*Percentage to total interest income*
Pendapatan bunga pemegang saham	52.962.424.672	73.169.717.548	*Interest income shareholders*
Persentase dari total pendapatan bunga	2,8%	3,7%	*Percentage to total interest income*
Beban bunga			*Interest expense*
Beban bunga karyawan kunci	12.749.291	27.482.523	*interest expense key employees*
Persentase dari total beban bunga	0,00%	0,01%	*Percentage to total interest expense*
Beban bunga pemegang saham	93.527.736.542	106.906.455.742	*Interest expense shareholders*
Persentase dari total beban bunga	26,59%	25,74%	*Percentage to total interest expense*

Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Review atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi diatas telah diaudit oleh *Auditor*. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Mechanism of Review and Compliance with Related Party Transaction Regulations

Review of transactions with related parties is carried out through an audit process, both conducted by internal auditors and external auditors. In an effort to ensure the fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia, the aforementioned affiliate transaction reports have been audited by the Auditor. One of the objectives of disclosure of related party transactions is the effort to fulfill PSAK 7 (Revised 2014) "Related Party Disclosures".

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Laws and Regulations Changes

Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Bank beserta dampak serta respon Bank terhadap perubahan tersebut selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

The changes in laws and regulations that affect the Bank and its impact and the Bank's response to these changes during 2019 are as follows.

No	Regulasi *Regulation*	Uraian Pokok *Main Description*	Dampak *Impact*
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, tanggal 29 Januari 2019.	1. Kewajiban Bank untuk memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI. 2. Etika profesional SKAI meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas. 3. Penyusunan piagam audit intern, rencana audit tahunan, dan cakupan aktivitas audit intern. Bank harus melakukan penyesuaian atas piagam audit intern yang dimiliki paling lambat tanggal 1 Juni 2019. 4. Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi audit intern. 5. Hubungan dan kerja sama antara SKAI dengan unit kerja pengendalian lainnya dan auditor ekstern. 6. Kewajiban SKAI untuk melakukan komunikasi secara rutin dengan OJK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. 7. Fungsi SKAI dalam kelompok usaha baik untuk bank sebagai perusahan induk maupun bank sebagai perusahaan anak. 8. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern untuk keahlian khusus dan bersifat sementara. 9. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK yaitu: a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI; b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Penjelasan lebih detil untuk periode kaji ulang pertama kali merujuk pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1); dan d. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.	• Penyesuaian dan perubahan piagam audit intern Bank Papua harus selesai sebelum tanggal 1 Juni 2019. • Pengembangan kompetensi bagi pegawai dibawah DAI agar lebih profesional, independen dan mempunyai integgritas yang lebih baik. • Penyaampaian laporan rutin kepada OJK terkait temuan khusus dan kajian dari pihak ekstern sesuai dengan ketentuan baru.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.11 / POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum, tanggal 27 Maret 2019.	• Salah satu alternatif sumber pendanaan bagi Bank adalah dengan melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan atau aset syariah dari Kreditur Awal (Originator) kepada pihak lain. Melalui Sekuritisasi Aset, Bank dapat meningkatkan likuiditas untuk menunjang kegiatan intermediasi. • Keberadaan EBA dan EBAS yang merupakan produk dari aktivitas Sekuritisasi Aset menjadi hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi untuk pendalaman pasar keuangan di Indonesia.	Bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset baik ketika melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (Originator), Penyedia Kredit Pendukung (Credit Enhancement), Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), Penyedia Jasa (Servicer), Investor, dan/atau Bank Kustodian agar kondisi permodalan Bank tetap terjaga. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan adalah ”Basel III: Revisions to the Securitisation Framework”.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.12/ POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 5 April 2019.	POJK berlaku efektif sejak tanggal 5 April 2019. Dalam POJK diatur mengenai tata cara penyampaian Laporan bank umum melalui Sistem Pelaporan OJK, yang saat ini dilakukan pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini antara lain sebagai berikut: 1. Kriteria Bank yang wajib menyampaikan Laporan dan penunjukan pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana pelaporan. 2. Laporan terdiri atas Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, dan Laporan lain. Masing-masing Laporan tersebut memiliki batas waktu pelaporan yang dibagi dalam beberapa periode. 3. Jenis Laporan yang wajib disampaikan diuraikan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 POJK. Pada saat ini, Laporan yang dicantumkan dalam POJK ini adalah Laporan yang telah dikembangkan di APOLO, dimana periode efektif penyampaian pertama kali diatur sebagai berikut:	• Bank harus menyampaikan laporan secara lengkap dan akurat sesuai batas waktu yang ditentukan OJK guna menghindari sanksi. • Bank harus menyesuaikan ketentuan intern dalam pelaporan, sesuai dengan ketentuan POJK tersebut.

No	Regulasi *Regulation*	Uraian Pokok *Main Description*	Dampak *Impact*

Periode Data	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
April 2019	Laporan Aquidity Coverage Ratio	Laporan kewajiban penyedia modal minimum dan asset tertimbang menurut risiko bank secara individu
Juni 2019	• Laporan publikasi bulanan • Laporan publikasi triwulanan • Laporan kualitas aset dan pembentukan pemnyisihan • penghapusan aset bank secara konsolidasi • Laporan suku bunga dasar kredit • Kertas kerja dan laporan net stable funding ratio	• Laporan publikasi bulanan • Laporan publikasi triwulanan • Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset bank secara konsolidasi • Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana bank secara konsolidasi • Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko bank secara konsolidasi
September 2019	Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko	-
Desember 2019	Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat	-
Juni 2019	• Laporan data sumber daya manusia perbankan • Indonesia bulanan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia semesteran	-

4. Bank wajib melakukan koreksi kesalahan informasi dalam Laporan berdasarkan temuan Bank, hasil audit akuntan publik, dan/atau temuan OJK.
5. 4Bank hanya dapat menggunakan Sistem Pelaporan OJK untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data Laporan. Setelahnya, Laporan dan/atau koreksi disampaikan secara luring (offline).
6. OJK akan menginformasikan kepada Bank dalam hal OJK mengalami gangguan teknis. Bank wajib menyampaikan Laporan secara daring (online) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan teknis di OJK teratasi.
7. Bank yang mengalami keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu pelaporan.
8. Sanksi administratif untuk pelanggaran atas POJK ini, serta sanksi keterlambatan penyampaian Laporan dan kesalahan informasi berdasarkan temuan Bank/OJK. Adapun sanksi atas kesalahan isian yang saling berkaitan hanya dikenakan 1 kali.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 18 September 2019

- Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.
- Selain itu, untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan permintaan data dan informasi dari Penyedia Jasa Keuangan, pengaturan perlu disempurnakan untuk lebih mengedepankan adanya percepatan proses penyampaian data dan informasi kepada pihak penegak hukum. Selanjutnya, untuk mitigasi risiko pada kegiatan transfer dana, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan dengan ketentuan yang menegaskan adanya kegiatan verifikasi oleh Bank Penerima, khususnya terhadap identitas yang belum diverifikasi sebelumnya, dan penatausahaan dokumen dalam kegiatan Transfer Dana.

- Bank perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal terkait APU&PPT.
- Bank harus melakukan pengkinian data terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- Dalam melakukan pengkinian data, Bank Papua memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/ POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tanggal 15 Oktober 2019.

POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah ketentuan yang mendukung implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial information/ AEOI) oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian. Adapun peran dari LJK dalam implementasi AEOI adalah menyampaikan laporan informasi nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui OJK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU 9/2017).

1 POJK ini mengatur mengenai:
   a. ketentuan umum.
   b. kewajiban penyampaian laporan sesuai amanat UU 9/2017.
   c. mekanisme penyampaian laporan.
   d. pengenaan sanksi; dan
   e. ketentuan penutup.

- Bank perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal tentang pelaporan informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada mitra atau yurisdiksi mitra seperti :
  1. Informasi keuangan yang dilaporkan mencakup identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK Pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

No	Regulasi *Regulation*	Uraian Pokok *Main Description*	Dampak *Impact*
		2 Laporan informasi nasabah asing disampaikan secara daring melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing (SiPINA) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. 3 LJK Pelapor wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan. Dalam hal diperlukan, pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas pelaksana. 4 Sebelum dapat melakukan pelaporan, LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada SiPINA. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan menyertakan surat permohonan pendaftaran sistem, informasi pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana, dan dokumen atau informasi lain dalam hal diperlukan. 5 Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai berlaku, POJK Nomor 25/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	2. Bank tetap wajib menyampaikan laporan nihil dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender. 3. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan melalui SiPINA, LJK Pelapor dapat melakukan koreksi. Koreksi dilakukan berdasarkan permintaan dari DJP atau inisiatif LJK Pelapor melalui SiPINA. • Bank harus menghindari sanksi dari OJK apabila tidak menyampaikan laporan. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum tanggal 3 Desember 2019.	POJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum mengatur mengenai kewajiban bagi Bank untuk menerapkan strategi anti Fraud serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah. • Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas: a. kecurangan; b. penipuan; c. penggelapan aset; d. pembocoran informasi; e. tindak pidana perbankan; dan f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penerapan strategi anti Fraud paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. • Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; d. pengendalian dan pemantauan.	Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. strategi anti Fraud sesuai format dalam POJK ; dan b. laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud yang terdiri atas: 1) laporan penerapan strategi anti Fraud semesteran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan 2) laporan Fraud berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/ POJK.03/2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi tanggal 18 Desember 2019	• Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otoritas memerlukan informasi yang disampaikan oleh Bank. Otoritas mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi bagi industri maupun Otoritas serta meminimalisir duplikasi pelaporan oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan kepada Otoritas yang efektif dan efisien bagi Bank. • Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Masing-masing Otoritas membangun sarana yang dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang diperlukan setiap saat (timely basis). • Untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan, Bank menyampaikan Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang berperan sebagai pintu gerbang ke situs web pelaporan pada setiap Otoritas. Penggunaan portal pelaporan dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses sistem pelaporan oleh Bank secara terintegrasi kepada Otoritas.	• Bank perlu menyesuaikan sistem pelaporan yang ada selama ini dengan portal pelaporan terintegrasi dengan menggunakan situs web portal https://pelaporan.id . • Sistem Pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan harian bank umum, laporan berkala bank umum, laporan berkala bank umum syariah, laporan kantor pusat bank umum, laporan bulanan bank umum, serta laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/ POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum tanggal 19 Desember 2019	• Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Pihak lawan yang mengalami wanprestasi secara tiba-tiba dapat membahayakan solvabilitas Bank. • Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar. • Sehubungan dengan itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum perlu diubah, antara lain pengaturan mengenai Prime Bank, central counterparty, dan pelaporan.	Bank harus menyesuaikan tentang ketentuan BMPK diantaranya tentang : 1 Penempatan pada Prime Bank. 2 Perhitungan penyediaan dana untuk surat berharga. 3 Penyediaan dana pada Central Counterparty (CCP). 4 Penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah. 5 Penyediaan dana yang dijamin oleh Prime Bank. 6 Penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK.

No	Regulasi *Regulation*	Uraian Pokok *Main Description*	Dampak *Impact*
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum tanggal 19 Desember 2019.	POJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum mengatur mengenai kewajiban bagi Bank untuk menerapkan strategi anti Fraud serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah. 1. Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas: a. kecurangan; b. penipuan; c. penggelapan aset; d. pembocoran informasi; e. tindak pidana perbankan; dan f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerapan strategi anti Fraud paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. strategi anti Fraud sesuai format dalam POJK; dan b. laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud yang terdiri atas: 1) laporan penerapan strategi anti Fraud semesteran psling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan 2) laporan Fraud berdampak signidikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/ POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 19 Desmber 2019.	Untuk memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan melakukan penghitungan PPKA. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi dan kinerja perbankan nasional.	Ketentuan ini akan diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Oleh karena itu, Bank perlu memperhatikan tpoin-poin perubahan Kualitas Aset antara lain: a) perubahan threshold batasan nominal untuk kredit dan penyediaan dana yang dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga; b) perubahan batasan jumlah aset produktif dalam menentukan kategori penilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA; c) tambahan persyaratan terhadap kualitas surat berharga yang untuk ditetapkan lancar, berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di negara lain yang termasuk dalam bursa utama; d) pengaturan tambahan mengenai kualitas aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum; e) pengaturan AYDA mengikuti standar akuntansi keuangan; f) eksekusi pengambilalihan AYDA hanya dapat dilakukan jika kredit telah berkualitas macet; g) penghapusan pengaturan terkait hapus tagih, dengan pertimbangan relevansi dan standar akuntansi keuangan sebagai acuan; h) laporan restrukturisasi yang menjadi dilaporkan melalui APOLO (sebelumnya LBBU) dengan sanksi juga mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 19 Desember 2019	1. POJK akan menggantikan POJK No.6/POJK.03/2015/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya dalam POJK No.32/POJK.03/2016. 2. Penggantian ditatarbelakangi oleh pengungkapan pillar 3 sesuai dokumen Basel Committee of Banking Supervision, harmonisasi dengan ketentuan di sektor Pasar Modal bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, dan penerapan PSAK 71 – Instrumen Keuangan. 3. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan Bank secara umum terdiri atas:	POJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, oleh karena itu bank perlu melakukan penyesuaian laporan bank secara transparan, akurat dan tepat waktu guna menghindari sanksi keterlambatan laporan terdiri atas: a. Secara luring (selama APOLO belum tersedia): 1 juta per hari kerja, dengan maksimal 30 juta. b. Melalui APOLO: dikenakan sanksi sesuai POJK APOLO. c. Melalui SPE: dikenakan sanksi sesuai POJK SPE.

<table>
<tr><th>No</th><th>Regulasi
Regulation</th><th>Uraian Pokok
Main Description</th><th>Dampak
Impact</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Laporan</th><th>1. Keuangan dan Informasi Kinerja</th><th>2. Risiko dan Permodalan</th><th>3. Informasi atau Fakta Material</th><th>4. Suku Bunga Dasar Kredit (SKDK)</th><th>5. Laporan Lain</th></tr>
<tr><td>Periodisasi</td><td>• Bulanan
• (Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November)
• Triwulan (Maret, Juni, September)
• Tahunan (Desember)</td><td>• Triwulan (Maret, Juni, September)
• Tahunan (Desember)</td><td>Insidentil</td><td>• Pelaporan kepada OJK secara bulanan
• Dikinikan dalam situs web setiap saat adanya perubahan</td><td>Tahunan (Desember)</td></tr>
<tr><td>Cakupan</td><td>• Laporan keuangan
• Kinerja keuangan dan/atau Informasi umum
• Informasi tambahan bagi BUS dan UUS
• Informasi tambahan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.</td><td>• Informasi Permodalan
• Informasi Risiko (Kredit, Pasar, Operasional, Likuiditas, Hukum, Reputasi, Statejik dan kepatuhan)
• Tambahan risiko bagi BUS/UUS (Risiko investasi dan imbal hasil)
• Tata Kelola</td><td>Informasi yang akan mempengaruhi keputusan stakeholder</td><td>Suku bunga terendah</td><td>Laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha</td></tr>
<tr><td>Media Pengumuman</td><td>• Situs web
• Operasional : Surat kabar cetak atau elektronik (periode triwulanan)</td><td>Situs web bank</td><td>Situs web bank</td><td>Situs web bank</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Media penyampaian kepada OJK</td><td>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan luring ke Pengawas Bank</td><td>-</td><td>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan luring ke Pengawas Bank</td><td>• APOLO</td><td>• APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan luring ke Pengawas Bank</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan di situs web</td><td>5 tahun</td><td>5 tahun</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi tanggal 30 Agustus 2019</td><td>Laporan Bank Umum Terintegrasi dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas data, efektivitas pelaporan, dan mengurangi beban penyampaian laporan kepada Bank Indonesia. Laporan terintegrasi tersebut berbasis metadata dan menjunjung tinggi prinsip kolaboratif antar-otoritas dan industri, efisiensi, dan konsistensi. Dengan pelaporan terintegrasi, informasi yang disampaikan bank diharapkan memenuhi kriteria lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.</td><td>Bank perlu menyesuaikan sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan PBI agar menghindari sanksi. Prosedur penyampaian laporan dilakukan secara online maupun offline.</td></tr>
<tr><td></td><td>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 27 / PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang “Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/ PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah” tanggal 26 Desember 2019.</td><td>Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat, Bank Indonesia senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan pengaturan Giro wajib Minimum (GWM). Kebijakan pengaturan GWM diarahkan untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam pembiayaan ekonomi oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kebijakan pengaturan GWM tersebut dilakukan dengan menurunkan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) / Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Perubahan kewajiban dimaksud dinyatakan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
1. Penurunan GWM dalam rupiah bagi BUK yangsemula 6,5% menjadi 6%, dengan pemenuhan:
• Porsi GWM harian yang semula 3,5% menjadi 3%.
• Porsi GWM rata-rata tetap 3%.
2 Penyesuaian GWM dalam rupiah bagi BUS/ UUS yang semula 5% menjadi 4,5%, dengan pemenuhan:
• Porsi GWM harian yang semula 2% menjadi 1,5%.
• Porsi GWM rata-rata tetap 3%.</td><td>Bank akan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan dan pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.</td></tr>
</table>

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Accounting Policies Changes

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan dini diperkenankan.

  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

Accounting standards and interpretations that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (PSAK), but not yet effective for the current year's financial statements are disclosed below.

- *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with early adoption permitted.*

  This PSAK regulates the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and the entity's business model; the expected credit loss method for impairment that produces information that is more timely, relevant and understood by users of financial statements; accounting for hedges that reflects the entity's risk management better by introducing more general requirements based on management considerations.

- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 is permitted early.*

  This PSAK is the single standard for revenue recognition which is the result of a successful joint project between the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board, governing the revenue recognition model of the contract with the customer, so that the entity is expected to be able to conduct analysis before recognizing revenue.

- *PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with early application permitted for entities that have also applied PSAK 72: Revenues from Contracts with Customers.*

  This PSAK establishes the principles of recognizing, measuring, presenting and disclosing leases by introducing a single accounting model by requiring recognizing right-of-use assets and rental liabilities. There are 2 optional exceptions to the recognition of leased assets and liabilities, namely for: (i) short-term leases and (ii) leases for low-value underlying assets.

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 lnstrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*deferral approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria "semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang" terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material berlaku efektif 1 Januari 2020

  Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

  Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persayaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

- *Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts about Implementing PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contracts, effective January 1, 2020.*

  This amendment allows those who meet certain criteria to apply a temporary exemption from PSAK 71 (deferral approach) or choose to apply a layered approach (deferral approach) for financial assets specified.

- *Amendments to PSAK 71: Financial Instruments: Advance Payment Features with Negative Compensation*

  This amendment clarifies that financial assets pass the criteria of 'solely payment of principal and interest on the principal amount' irrespective of events or circumstances that cause an initial termination of the contract and regardless of which party pays or receives reasonable compensation for the initial termination of the contract.

- *Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Material definitions take effect January 1, 2020*

  This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and several related PSAKs. In addition, it also provides clear guidance on the definition of material in the context of reducing excessive disclosure due to changes in the threshold of material definition.

Effective on or after January 1, 2021

- *Amendments to PSAK 22: Business Definition, effective January 1, 2021.*

  This amendment was issued to help the entity determine whether the set of activities and assets acquired are business or not. They clarify minimum requirements for businesses, remove assessments of whether market participants are able to replace missing elements, add guidance to help entities assess whether the process obtained is substantive, narrow down business and output definitions, and introduce optional fair value concentration tests. New illustrative examples are given along with amendments.

- Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020
  PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

  Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

  Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kakek kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:
  - Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
  - Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek..

  Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank Papua masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank Papua.

- *Effective on or after January 1, 2020*
  PSAK 74: The insurance contract, adopted from IFRS 17, is effective January 1, 2022, with early application permitted for entities that have also applied PSAK 71 and PSAK 72.

  This is a new comprehensive accounting standard for insurance contracts that includes recognition and measurement, presentation, and disclosure. Once effective, PSAK 74 will replace PSAK 62 Insurance Contract. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts (that is, life, non-life, direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entity that issued it, also regarding guarantees and certain financial instruments with non-binding participation features.

  Some scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurance companies. In contrast to the requirements in PSAK 62, which are largely based on the grandfather of previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, which covers all relevant accounting aspects. The essence of IFRS 17 is a general model, equipped with:
  - *Specific adaptations for contracts with the direct participation feature (variable cost approach).*
  - *Simplified approach (premium allocation approach) especially for short-term contracts.*

  At the time of the issuance of the financial statements, Bank Papua was still studying the impact that might arise from the adoption of the new and revised standards and their effects on the financial statements of Bank Papua.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Bank Papua berupaya menjaga kelangsungan usaha dengan memperhitungkan segala kondisi yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang. Bank menyusun rencana pengembangan usaha dan mencatat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan, kemudian menentukan langkah strategis dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun 2019 maupun tahun-tahun selanjutnya. Perusahaan meyakini hal ini berdasarkan:

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp250.037.261.964 pada tahun 2019. Sedangkan laba komprehensif sebesar Rp168.491.968.831..
3. Rasio keuangan perusahaan tahun 2019 menunjukkan hasil positif sebagaimana dijelaskan pada subbab Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya.
4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan.

Penilaian (*Assessment*) Kelangsungan Usaha dan Strategi Kedepan

Bank Papua melakukan penilaian dan melakukan analisis posisi Bank untuk menganalisa mengenai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank Papua untuk memitigasi hal tersebut. Penilaian dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan.

Bank Papua seeks to maintain business continuity by taking into account all conditions faced now and in the future. The Bank prepares business development plans and records factors that can affect the Company's operations, then determines strategic steps in achieving sustainable growth.

There are no matters that have the potential to significantly influence the Company's business continuity in 2019 or subsequent years. The company believes this is based on:

1. *Financial reports published by Hertanto, Grace, Karunawan state that the Company's financial statements have been presented fairly in all material respects.*
2. *The company successfully booked current year earning of Rp250,037,261,964 in 2019. Meanwhile, comprehensive income of Rp168,491,968,831 ..*
3. *The Company's financial ratios in 2019 show positive results as explained in the Analysis of Debt Ability Capability, Accounts Receivable Rate, and Other Financial Ratios.*
4. *There is no law suit that requires bankruptcy against the Company.*

Business Continuity Assessment and Future Strategies

Bank Papua conducts an assessment and analyzes the position of the Bank to analyze matters that have the potential to significantly influence business continuity and the strengths and weaknesses of Bank Papua to mitigate this. The assessment is carried out through a review of the company's internal conditions, as well as an analysis of the opportunities and threats faced by the company which are carried out through a review of the company's external conditions.

Assessment terhadap Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Berdasarkan catatan laporan keuangan audited tahun buku 2019 oleh auditor independen Hertanto, Grace, Karunawan, Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan laporan keuangan perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Assessment of Potentially Significant Effects on Business Continuity

Based on audited financial statements for the fiscal year 2019 by independent auditors Hertanto, Grace, Karunawan, the Bank's Management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue in the future. In addition, management is not aware of any material uncertainties that could raise significant doubts about the Bank's ability to continue its business. Therefore, the financial statements of the Company's financial statements have been presented fairly in all material respects.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Manajemen menggunakan asumsi-asumsi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal diantaranya adalah indikator-indikator ekonomi seperti PDB (Produk Domestik Bruto), tingkat inflasi, nilai tukar serta data kinerja internal seperti laporan kinerja keuangan dan indikator pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

Management uses assumptions from various sources, both internal and external, which include economic indicators such as GDP (Gross Domestic Product), inflation rates, exchange rates and internal performance data such as financial performance reports and indicators of corporate governance.

Asumsi Makro dan Mikro
Macro and Micro Assumptions

Asumsi	Proyeksi			*Assumption*
	2019	2020	2021	
Asumsi Makro	5,1% - 5,5%	5,1% - 5,5%	5,1% - 5,5%	*Macro Assumptions*
1. Pertumbuhan PDB (%)	3,2%	3,2%	3,2%	*1. GDP growth (%)*
2. Lainnya				*2. Others*
A. Kurs IDR/USD	14.240	14.240	14.240	*A. Rp / USD exchange rate*
B. BI 7 *Days Rate*	6%	6%	6%	*B. BI 7 Days Rate*
Asumsi Mikro				*Micro Assumption*
1. Pertumbuhan Kredit	11,01%	6,06%	3,73%	*1. Loan Growth*
2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)	3,42%	0,56%	0,68%	*2. Third Party Fund Growth (%)*
3. Tingkat Bunga Simpanan - Tabungan (%)	2,00%	2,00%	2,00%	*3. Saving Interest Rate - Savings (%)*
4. Tingkat Bunga Kredit Ritel Komersial (%)	10,00%	10,00%	10,00%	*4. Commercial Retail Loan Interest Rate (%)*
5. Lainnya, dirinci sesuai jenis asumsi	0,00%	0,00%	0,00%	*5. Others, detai according to the assumption type*

Posisi Bank Papua

Dalam menghadapi persaingan antar Bank yang semakin ketat baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional, maka perlu adanya strategi bisnis yang jelas dan terarah. Pendekatan strategi bisnis yang ditempuh Bank Papua dalam menghadapi persaingan tersebut adalah melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dikenal dengan strategi SWOT seperti yang telah dijelaskan dalam Rencana Bisnis Bank.

Bank Papua Position

In the face of increasingly fierce competition between banks both at the regional and national levels, a clear and focused business strategy is needed. The business strategy approach taken by Bank Papua in dealing with such competition is to identify the strengths and weaknesses and opportunities and threats known as the SWOT strategy as described in the Bank's Business Plan.

Strategi Bank Papua Tahun 2020

Strategi Bank merupakan penjabaran dari misi-misi sebagai langkah untuk mewujudkan visi Bank Papua. Strategi disusun dengan memperhatikan formulasi yang sesuai antara kecukupan *resources* yang dimiliki bank dengan tantangan yang dihadapi serta target yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berdasarkan strategi Bank untuk tahun 2016-2020 yang tercantum dalam *Corporate Plan* Bank Papua 2016-2020, sedangkan untuk strategi pengembangan bisnis merupakan strategi Bank untuk tahun 2019, telah diuraikan sebelumnya.

Adapun target jangka menengah dimana Bank Papua memasuki Fase II yaitu *Competece Enhanceet* & *Captive Market Marketing* yaitu :

1. *Human Capital Management* : Penguatan penerapan kebijakan bidang *Human Capital* berbasis *corporate* clture dan praktek terbaik GCG HC
2. *Corporate Culture* : Pengembangan dan penerapan *corporate culture* berbasis kierja.
3. *Risk Management* And Assset Recopvery :
   a. Penyempumaan kebijakan dan proses pelaksanaan bisnis dan operasional bank, serta penguatan penerapan *Risk Management* pada seluruh bidang terkait potensi risiko (termasuk d.h.i *human capital*)
   b. Penguatan kapabilitas *asset recovery* secara temporer, serta peningkatan intensitas *credit recovery*. Opsi pemanfaatan *pro hire/specialist* terkait *asset recovery*/ disposal.
4. Proses dan Organisasi Bisnis :
   a. Ekspansi terbatas, evaluasi dan penyesuan.
   b. Ekspansi kapasitas penuh.
5. Kanal Distribusi & Produk :
   a. Peningkatam utilisasi kanal distribusi, prioritas pada bisnis perkreditan dan, dukungan service excellence captive market
   b. Pengembangan produk *e-channel/digital banking* terbatas, prioritas pada mempertahankan *captive market* (Pemda, dan turunannya, ASN).
6. Teknologi Pendukung
   a. Pengembangan kapabilitas IT untuk dukungan pengembangan CMS.
   b. Peningkatan utilisasi dan reliabilitas dan mempertahankan peningkatan kapabilitas platform IT untuk dukungan model dan proses bisnis kantor cabang dan kantor pusat dan pengembangan a-*channel* terbatas.

Bank Papua Strategy for 2020

The Bank's strategy is a translation of the missions as a step to realize the vision of Bank Papua. The strategy is prepared by considering the appropriate formulation between the adequacy of resources owned by the bank with the challenges faced and the targets to be achieved in the future. Based on the Bank's strategy for 2016-2020 listed in the Bank Papua Corporate Plan 2016-2020, while the business development strategy is the Bank's strategy for 2019, previously described.

The medium term targets where Bank Papua enters Phase II, namely Competence Enhance & Captive Market Marketing, namely:

1. *Human Capital Management: Strengthening the application of Human Capital field-based corporate governance policies and HC GCG best practices*
2. *Corporate Culture: Development and application of a work-based corporate culture.*
3. *Risk Management And Assset Recopvery:*
   a. *Completion of policies and processes for conducting business and bank operations, as well as strengthening the implementation of Risk Management in all fields related to potential risks (including d.h.i human capital)*
   b. *Strengthening the capability of temporary asset recovery, as well as increasing the intensity of credit recovery. Option to use pro hire / specialist related to asset recovery / disposal.*
4. *Business Process and Organization:*
   a. *Limited expansion, evalaso and apology.*
   b. *Full capacity expansion.*
5. *Distribution Channels & Pruducts:*
   a. *Enhancing distribution channel utilization, priorities in the loan business and, support for service excellence captive market*
   b. *Development of e-channel / digital banking products is limited, priority is on maintaining the captive market (LG, and its derivatives, ASN).*
6. *Supporting Technology*
   a. *Development of IT capabilities to support the development of CMS.*
   b. *Increased utilization and reliability and maintains increased IT platform capabilities to support branch and head office business models and business processes and limited a-channel development.*

- 05 -

Tinjauan Pendukung

Supporting Review

Sumber daya manusia dan Teknologi Informasi merupakan aspek pendukung kinerja yang menjadi pilar penting dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja perusahaan secara efektif dan efisien.

Human resources and Information Technology are aspects that support performance which is an important pillar in supporting the improvement of the quality of company performance effectively and efficiently.

Tinjauan Sumber Daya Manusia

Human Resources Overview

Divisi Manajemen Modal Manusia berkomitmen sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menyadari bahwa perusahaan yang sukses mengelola *Human Capital* tidak hanya memberikan gaji yang layak bagi pekerja, namun paham bahwa kebutuhan pekerja tidak hanya berhubungan dengan masalah uang. Perusahaan juga harus memberikan rasa aman, memberikan penghargaan akan jati diri, pengakuan sosial, dan pemberian peluang aktualisasi diri bagi pekerja. Hasilnya sungguh luar biasa, dimana pekerja bekerja dengan mentalitas berkelimpahan. Mentalitas yang pantang menyerah dan penuh energi yang berlimpah ruah. Para pekerja tidak hanya menjalankan tugas yang harus dikerjakan tetapi berlomba-lomba memberikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, Manajemen Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsi-prinsip ini dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan.

The Human Capital Management Division is committed as a company that upholds human values to realize that companies that successfully manage Human Capital not only provide decent salaries for workers, but understand that the needs of workers are not only related to money matters. The company must also provide a sense of security, give appreciation for identity, social recognition, and provide opportunities for self-actualization for workers. The results are truly extraordinary, where workers work with an abundance mentality. An unyielding mentality and full of abundant energy. The workers not only carry out the tasks that must be done but competing to give all their abilities for the progress of the company. To that end, Bank Papua Management is committed to implementing these principles in managing its Human Resources in accordance with the company's objectives.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Manajemen Modal Manusia

Pentingnya Tenaga kerja yang handal dan profesional, strategi pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2019, dilakukan dengan strategi yang dikembangkan di unit - unit sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan pegawai sesuai tuntutan organisasi dan perkembangan jaringan kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi terhadap jabatan yang akan diberikan.
2. Menyempurnakan sistem pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
3. Optimalisasi penerapan budaya kerja dan standar layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
4. Pengukuran tingkat kepuasan pegawai.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pensiun.
6. Optimalisasi fungsi ARMES.
7. Peningkatan disiplin kerja, produktifitas serta perilaku kerja pegawai.
8. Melakukan perubahan komposisi struktur gaji:
   a. Tunjangan Kinerja.
   b. Tunjangan Jabatan.
9. Penyesuaian Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan.

Menyempurnakan dan menerapkan sistem pengembangan pegawai dilakukan dengan:

1. *Assessment* Perilaku Kerja; dilakukan untuk mengetahui perilaku seseorang apakah cocok dalam bidang tugas yang diemban saat ini.
2. *Career Path*; merupakan bagian dari sistem MSDM berbasis kompetensi yang harus dimiliki oleh perusahaan agar menjadi arah/acuan bagi perkembangan karir setiap pegawai. Sebelum dilakukan *Career Path* ini harus sudah mempunyai *Job Analysis, Job Description, Job Profiling, Personel Profiling* dan *Competency Profiling.*
3. *Career Path Policy* merupakan pengembangan Karir sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja.

   Standarisasi penilaian pada setiap jabatan.
   - Memperbaiki sistem penilaian kinerja yang dilakukan dengan melakukan standarisasi penilaian KPI (kamus KPI) bagi setiap jabatan.

Human Capital Management Development Policy and Strategy

The importance of a reliable and professional workforce, the Human Resources development strategy in 2019, is carried out with the strategies developed in the following units:

1. *Providing employee needs according to organizational demands and the development of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , by placing employees according to their educational background, competence for the position to be given.*
2. *Improve employee development systems in accordance with needs.*
3. *Optimizing the application of work culture and service standards of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*
4. *Measurement of employee satisfaction.*
5. *Increasing employee welfare and pensions.*
6. *Optimizing the ARMES function.*
7. *Increased work discipline, productivity and work behavior of employees.*
8. *Changing the composition of salary structure:*
   a. Performance Allowance.
   b. Positional allowance.
9. *Adjustment for Old Age Insurance (JHT) for employees.*

Refining and implementing employee development systems is done by:

1. *Work Behavior Assessment; conducted to determine whether a person's behavior is suitable in the current field of duty.*
2. *Career Path; is part of the competency-based HRM system that must be owned by the company in order to be a direction / reference for the career development of each employee. Before this Career Path is carried out, it must already have a Job Analysis, Job Description, Job Profiling, Personnel Profiling and Competency Profiling.*
3. *Career Path Policy is the development of Career as all the employee's personal efforts aimed at implementing his career plan through education, training, job search and acquisition, and work experience.*

   Standardization of assessment in each position.
   - *Improve the performance appraisal system carried out by standardizing KPI assessments (KPI dictionaries) for each position.*

4. Melakukan Pembobotan Jabatan (*Job Valuation*)
   Tujuan untuk mengetahui berat ringannya dan menetapkan level (*grade*) dari suatu jabatan. Dengan menggunakan faktor-faktor tertentu seperti pengetahuan, masalah yang dihadapi atau dampak dari pekerjaan tersebut/kompetensi apa saja yang dibutuhkan sehingga bank dapat menyusun dan menetapkan level (*grade*) dari jabatan tersebut.
5. Optimalisasi Penerapan Budaya Kerja Bank Papua
   a. Sosialisasi internalisasi budaya kerja Bank Papua. Melakukan sosialisasi/internalisasi budaya kerja ke seluruh insan Bank Papua dengan cara yang kreatif dan menarik dengan melibatkan semua pegawai secara aktif.
   b. Melakukan *monitoring* penerapan budaya kerja (minimal 1 nilai budaya kerja) termasuk optimalisasi peran *Change Agent*.
   c. Penyusunan *Rewarding System* (Sistem Pemberian Penghargaan) penerapan budaya kerja dan standar layanan Bank Papua.
   d. Mengevaluasi pelaksanaan Budaya Kerja.
   e. Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pegawai dengan cara:
      I. Melakukan survei Kepuasan Pegawai dengan melakukan uji coba kuesioner, menyebarkan kuesioner di semua unit kerja (Kantor Pusat dan Kantor Cabang) dengan *metode sampling*.
      II. Melakukan evaluasi tingkat Kepuasan Pegawai.
      III. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
   f. Bidang Administrasi SDM; strategi yang dilakukan melalui optimalisasi fungsi aplikasi SDM :
      I. Memastikan fungsi Aplikasi SDM dengan mengembangkan modul-modul yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional SDM.
      II. Pengkinian data pegawai dengan melakukan penginputan dan melengkapi data base pegawai dengan benar dan konsisten, *monitoring* pengkinian data dari semua Kantor Cabang.
   g. Peningkatan disiplin kerja, produktifitas serta perilaku kerja pegawai melalui pembinaan pegawai dengan memberikan *coaching* dan *counseling* disetiap unit kerja, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *coaching* dan *counseling* yang telah dilaksanakan serta tetap melakukan pemantauan/*monitoring* disiplin dan perilaku kerja pegawai.

4. *Doing Job Valuation*
   The aim is to determine the severity and determine the level (grade) of a position. By using certain factors such as knowledge, problems encountered or the impact of the job / what competencies are needed so that the bank can arrange and determine the level (grade) of the position.

5. *Optimizing the Application of Bank Papua Work Culture*
   a. Promulgation of the internalization of the work culture of Bank Papua. Promoting / internalizing the work culture to all Bank Papua employees in creative and interesting ways by actively involving all employees.
   b. Monitoring the implementation of work culture (at least 1 work culture value), including optimizing the role of the Change Agent.
   c. Development of a Rewarding System for the implementation of work culture and Bank Papua service standards.
   d. Evaluating the implementation of Work Culture.
   e. Evaluate employee satisfaction by:
      I. Conducting employee satisfaction surveys by testing the questionnaire, distributing questionnaires in all work units (Head Office and Branch Offices) using the sampling method.
      II. Evaluate employee satisfaction levels.
      III. Deliver the evaluation results to the Board of Director as consideration for decision making.
   f. HR Administration Division; strategies carried out through optimization of HR application functions:
      I. Ensuring the HR Application function by developing modules available to support HR operational activities.
      II. Updating employee data by inputting and completing employee data bases correctly and consistently, monitoring data updates from all Branch Offices.
   g. Increased work discipline, productivity and work behavior of employees through employee coaching by providing coaching and counseling in each work unit, evaluating the implementation of coaching and counseling that have been carried out and continuing to monitor / monitor employee discipline and work behavior.

6. Pengenalan pegawai dengan membentuk pedoman strategi pengenalan dan pemantauan terhadap pegawai serta pengawasan terhadap pegawai dan penerapan kebijakan SDM:
   a. Sosialisasi kebijakan dan prosedur tentang mekanisme *Know Your Employee* (KYE).
   b. Melakukan evaluasi pegawai di semua unit kerja.
7. Peningkatan kualitas SDM dengan cara mengadakan diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai:
   a. *Officer Development Program* (ODP).
   b. Pendidikan *Dealer Treasury*.
8. Pengembangan *e-Learning* dengan melakukan riset dan *development*.
9. Pembuatan matriks kompetensi diklat.
10. Peningkatan penyelenggaraan diklat termasuk tertib administrasi diklat.
11. Melakukan proses penjaringan SDM berkualitas melalui program ikatan dinas untuk Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja sama dengan Universitas Negeri maupun Swasta yang ada di Papua dan Papua Barat.
12. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan kompetensi dasar, kepemimpinan karir, teknis dan penyegaran.
13. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang perkreditan dan pendanaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
    a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program diklat di bidang perkreditan dan pendanaan yang melibatkan para *Credit Analyst* (CA), *Relationship Manager* (RM), Admin Kredit dan *Funding Officer* (FO), baik pelatihan secara internal maupun eksternal (program diklat terlampir).
    b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal, yaitu program beasiswa S2 kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan fokus Program Studi *Marketing*.
    c. Melakukan rekrutmen tenaga *Credit Analyst* (CA), *Relationship Manager* (RM) dan *Funding Officer* (FO) yang berkualitas.
    d. *Review* kembali *Credit Analyst* (CA), *Relationship Manager* (RM) dan *Funding Officer* (FO) melalui *Assessment*.

6. *Recognition of employees by establishing guidelines for introducing and monitoring employees and supervising employees and implementing HR policies:*
   a. *Policy and procedure socialization regarding Know Your Employee (KYE) mechanism.*
   b. *Evaluating employees in all work units.*
7. *Improving the quality of human resources by conducting training in accordance with the competency needs of each employee:*
   a. *Officer Development Program (ODP).*
   b. *Treasury Dealer Education.*
8. *Development of e-Learning by conducting research and development.*
9. *Making a competency training matrix.*
10. *Improvement of education and training activities including an orderly administration of education and training.*
11. *Conduct a process of selecting qualified human resources through the official bond program for Papuan Native People (OAP) in collaboration with State and Private Universities in Papua and West Papua.*
12. *Enhance HR competencies through basic competency education, career leadership, technical and refresher.*
13. *Improving the competence and quality of human resources, especially in the areas of credit and funding in accordance with the precautionary principle.*
    a. *Improvement of Human Resources competency through training programs in the areas of credit and funding involving Credit Analysts (CA), Relationship Managers (RM), Credit Admins and Funding Officers (FO), both internal and external training (training programs are attached).*
    b. *Improving the quality of Human Resources through formal education, namely S2 scholarship programs in collaboration with Yogyakarta Gadjah Mada University, with a focus on the Marketing Study Program.*
    c. *Recruit Credit Analyst (CA), Relationship Manager (RM) and qualified Funding Officer (FO) staff.*
    d. *Review the Credit Analyst (CA), Relationship Manager (RM) and Funding Officer (FO) through Assessment.*

Kebijakan Remunerasi (Remuneration Policies)

Pentingnya Tenaga kerja yang handal dan professional, strategi pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2019, dilakukan dengan strategi yang dikembangkan di unit-unit terkait diantaranya:

1. Menyediakan kebutuhan pegawai sesuai tuntutan organisasi dan perkembangan jaringan kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi terhadap jabatan yang akan diberikan.
2. Menyempurnakan dan menerapkan *system* pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
3. Optimalisasi Penerapan Budaya Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
4. Pengukuran tingkat Kepuasan Pegawai.
5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun
6. Optimalisasi Fungsi Aplikasi Divisi Sumber Daya Manusia (HC)
7. Peningkatan Disiplin Kerja, Produktifitas serta Perilaku Kerja Pegawai.
8. Melakukan perubahan Komposisi Struktur Gaji
   - Tunjangan Kinerja.
   - Tunjangan Jabatan.
   - Tunjangan Operasional untuk Analis Kredit, *Teller* dan *Dealer Treasury*.
9. Penyesuaian Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Karyawan.

Remuneration Policies

The importance of a reliable and professional workforce, the strategy of developing Human Resources in 2019, is carried out with a strategy developed in related units including:

1. *Providing employee needs according to organizational demands and the development of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, by placing employees according to their educational background, competence for the position to be given.*
2. *Perfecting and implementing employee development systems in accordance with needs.*
3. *Optimizing the implementation of Work Culture of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*
4. *Measurement of Employee Satisfaction.*
5. *Increasing Employee Welfare and Pension*
6. *Optimizing the Application Function of the Human Resources (HC) Division.*
7. *Increased Work Discipline, Productivity and Employee Work Behavior.*
8. *Changing Salary Structure Composition*
   - *Performance allowances.*
   - *Positional allowance.*
   - *Operational Allowances for Credit Analysts, Tellers and Treasury Dealers.*
9. *Old Age Insurance (JHT) Adjustments for Employees.*

Struktur Pengelolaan Manajemen Modal Manusia

Struktur organiasi yang menjalankan fungsi Manajemen Modal Manusia di Bank Papua adalah sebagai berikut :

Management Structure for Human Capital Management

The organizational structure that carries out the Human Capital Management function at Bank Papua is as follows:

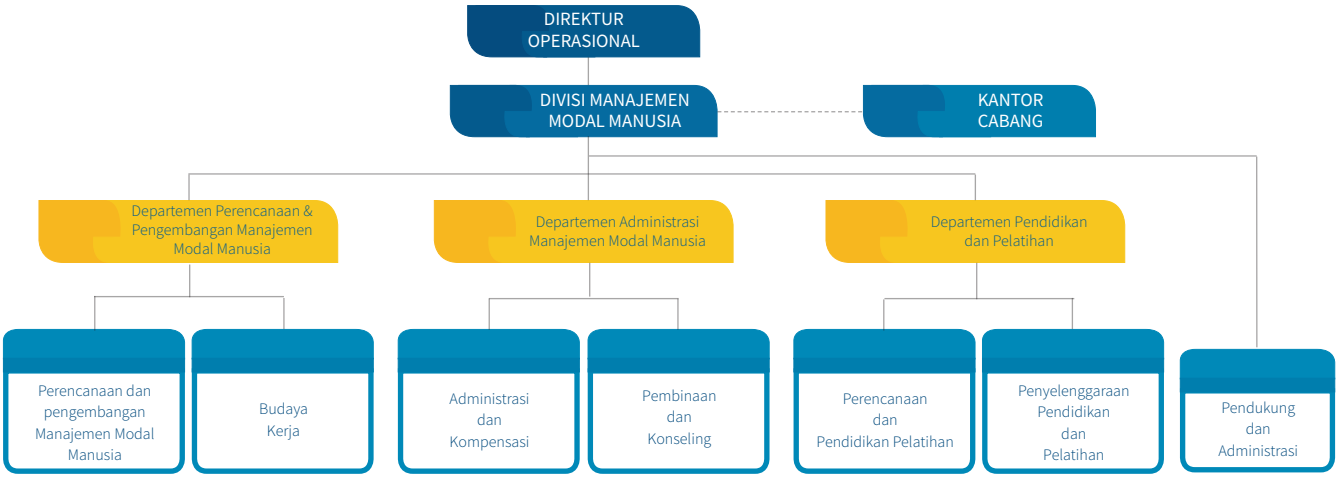

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Leader of the Human Capital Management Division's Profile

Yuliana D Yembise, SH. MH

Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

Human Capital Management Division Leader

Periode Jabatan *Term of Office*	7 Januari 2019 - sekarang	*January 7, 2019 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Biak pada tanggal 20 Desember 1965.	*54 years old. Born in Biak on December 20, 1965.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1990. Gelar Magister Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2012.	*Obtained a Bachelor of Laws degree at the Cenderawasih University in Jayapura in 1990. A Master's degree in Law at the University of Gajah Mada Yogyakarta in 2012.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 22 Februari 2019, Pelatihan Persiapan Pra Purnabakti *Batch* 1 2019. • 23 Februari 2019, Peran BPD SI Dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah. • 09 Maret 2019, Ujian Sertifikasi *Treasury Dealer Level Basic*. • 22 Maret 2019, *Workshop Human Capital Management With Big Data*. • 27 Juni 2019, Manajemen umum dana pensiun (MUDP) • 31 Agustus 2019, pembekalan dan sertifikasi *Dealer* level intermediate dan level *advanced* • 18 Oktober 2019, public *training* building *Corporate culture*	• *22 February 2019, Pre-Retirement Preparation Training for Batch 1 2019.* • *23 February 2019, Role of BPD SI in Supporting the Regional Revenue Optimization Program.* • *March 9, 2019, Basic Level Treasury Dealer Certification Exam.* • *March 22, 2019, Workshop on Human Capital Management With Big Data.* • *June 27, 2019, General management of pension funds (MUDP)* • *August 31, 2019, Intermediate level and advanced level Dealer briefing and certification* • *18 October 2019, public training building on Corporate culture*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum Bank Papua sesuai SK No. 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously she served as Head of the General Affair Division of Bank Papua in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 penyelenggara BSMR pada tanggal 23 Februari 2013.	*4th Level Risk Management organizers of BSMR on February 23, 2013.*

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Modal Manusia

Duties and Responsibilities of the Human Capital Management Division

Adapun tugas dan fungsi masing-masing departemen adalah sebagai berikut :

The tasks and functions of each department are as follows:

Departemen	Unit	Fungsi	*Function*	*Unit*	*Department*
Perencanaan & Pengembangan Manajemen Modal Manusia	Perencanaan & Pengembangan Manajemen Modal Manusia	Perencanaan dan Rekrutmen Pengembangan Karir dan KPI Adm. *Outsourcing*	*Planning and Recruitment Career Development and KPI Adm. Outsourcing*	*Human Capital Management Planning & Development*	*Human Capital Management Planning & Development*
	Know Your Employee	Pengelolaan *Know Your Employee*	*Management of Know Your Employee*	*Know Your Employee*	
	Budaya Kerja	Pemantauan dan Pengembangan Budaya Kerja	*Work Culture Monitoring and Development*	*Work Culture*	
Administrasi Manajemen Modal Manusia	Administrasi dan Kompensasi	SIM Manajemen Modal Manusia *(agendaris) Payroll*	*SIM Human Capital Management (agendaris) Payroll*	*Administration and Compensation*	*Administration of Human Capital Management*
	Pembinaan & Konseling	Pembinaan & Konseling	*Coaching & Counseling*	*Coaching & Counseling*	
Pendidikan & Pelatihan	Perencanaan Pendidikan & Pelatihan	Perencanaan Pengembangan Diklat	*Training and Development Planning*	*Education & Training Planning*	*Education & Training*
	Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggaraan dan Administrasi Diklat	*Organization and Administration of Training*	*Organizing Education & Training*	
Pendukung & Administrasi		Administrasi pelaporan (agendaris)	*Administration reporting (agenda)*		*Support & Administration*

Komposisi Manajemen Modal Manusia

Human Capital Management Composition

Sampai dengan tahun 2019 jumlah pegawai Bank Papua sebanyak 2.462 orang menurun 4% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 2565 orang. Terkait rincian komposisi pegawai telah diuraikan pada bagian Profil perusahaan.

Until 2019, the number of Bank Papua employees was 2,462 person, decrease by 4% compared to 2565 in 2018. Related details of the composition of employees have been described in the company profile section.

Perencanaan Manajemen Modal Manusia

Human Capital Management Planning

Bank Papua menyusun perencanaan *Human Capital* jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar. Perencanaan *Human Capital* dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

Bank Papua formulates a long-term Human Capital plan to support business development plans in line with regional development demands and market demands. Human Capital Planning is made by taking into account several factors namely the estimated workload, employee retirement plans, and budget plans that are reviewed periodically.

Perencanaan *Human Capital* Bank Papua dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Manajemen Modal Manusia. Perencanaan *Human Capital* meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan pegawai, dan analisis pemenuhan kebutuhan *Human Capital*.

Rekrutmen

Dengan meningkatnya pengembangan jaringan bisnis Bank Papua yang seiring dengan perubahan struktur organisasi. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas mengikuti perkembangan bisnis, maka dilakukan sistem rekrutmen melalui jalur penerimaan Program Perekrutan yang dilakukan oleh pihak independen:

1) Penerimaan pegawai melalui program ODP
   Untuk kebutuhan: *Loan Analist*, *Relationship Manager*, *Dealer*, jurist, *planner* dan *marketer*, dengan total hasil seleksi sebanyak 73 Orang
   - Rekrutment ODP eksternal untuk tenaga *fresh graduate* sebanyak 35 orang.
   - Rekrutment ODP Internal sebanyak 38 orang.
   - Orang Asli Papua (OAP) 18 orang (25%) dan Non Orang Asli Papua (OAP) 55 Orang (75%)
2) Rekrutment Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 69 orang. 60 (87%) Orang Asli Papua (OAP) dan 9 (13%) Non Orang Asli Papua (OAP).

Program Pemagangan Abdi Bank Papua

Sebagai bentuk kepedulian Bank Papua kepada lingkungan dan komunitas dengan membantu pemerintah khususnya Pemerintah Daerah guna meningkatkan keterampilan, keahlian dan pengalaman khususnya putra putri Papua dalam menyiapkan tenaga lokal siap pakai dan mampu bersaing di dunia kerja khususnya Perbankan, maka tahun 2019 Bank Papua menyelenggarakan Program Pemagangan bagi lulusan SLTA dan S1 sebanyak 311 Orang.

- Tenaga *Teller* Kantor Cabang Wilayah Papua dan Papua Barat sebanyak 267 orang.
- Tenaga Administrasi dan Pendukung di Kantor Pusat sebanyak 44 orang.
- Tenaga ABDI Bank Papua efektif Desember 2019 sebanyak 278 Orang.

Bank Papua's Human Capital Planning was made before the current year as one of the work programs of the Human Capital Management Division. Human Capital Planning includes planning the number and qualifications of employees needed in the current year, analysis of employee availability, and analysis of meeting Human Capital needs.

Recruitment

With the increasing development of Bank Papua's business network in line with changes in organizational structure. To support this, quality Human Resources (HR) is needed to keep up with business developments, then a recruitment system is carried out through the recruitment program recruitment conducted by an independent party:

1) Recruitment of employees through the ODP program
   For needs: Credit Analyst, Relationship Manager, Dealer, jurist, planner and marketer, with a total selection of 73 person

   - *Recruitment of external ODP for 35 fresh graduates.*
   - *Internal ODP Recruitment of 38 person.*
   - *Papuan Native People (OAP) 18 person (25%) and non Papuan Native People (Non OAP) 55 person (75%)*

2) Recruitment of Specific Time Contract Employees (PKWT) of 69 person. 60 (87%) Papuan Native People (OAP) and 9 (13%) Non Papuan Native People (Non OAP).

Training Program For Abdi Bank Papua

As a form of Bank Papua's concern for the environment and community by assisting the government, especially the Regional Government, to improve the skills, expertise and experience, especially the sons and daughters of Papua in preparing local workers ready to use and able to compete in the world of work, especially Banking, in 2019 Bank Papua held an Apprenticeship Program for high school and S1 graduates as many as 311 person.

- *267 person in the Teller Office of the Papua and West Papua Regions.*
- *44 Administrative and Support Personnel at the Head Office.*

- *ABDI Bank Papua employee, effectively in December as many as 278 person.*

Pengembangan Kompetisi Manajemen Modal Manusia

Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, pegawai (SDM) Bank Papua selalu dilibatkan dalam pendidikan atau pelatihan internal maupun ekstern. Program pendidikan maupun pelatihan ini disesuaikan dengan memperhatikan gap pada kompetensi pegawai per jabatan serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada pegawai meliputi:

1) Pendidikan kompetensi dasar, kepemimpinan karir, teknis dan penyegaran fokus pada bidang :
   a. Perkreditan untuk *Credit Analyst* (CA), *Relationship Manager* (RM), Admin Kredit.
   b. Bidang Pendanaan, pemasaran produk dana dan jasa untuk tenaga *Funding Officer* (FO).
   c. Bidang *Dealer* yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut penempatan dana di pasar uang dan modal.
   d. Bidang Teknologi Informasi untuk programer, analis teknologi informasi dan *networking*.
   e. Bidang *Auditor*, *Anti Fraud* (Investigasi), Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum.
   f. Bidang layanan untuk *Teller* dan *Customer Service* untuk meningkatkan layanan, *service excellent*.
   g. Bidang akuntansi, perencanaan keuangan, perpajakan dan pengadaan, *marketer* dan *planner*.
   h. Pemenuhan Pendidikan dan Sertifikasi sesuai kebutuhan kompetensi Jabatan yaitu :
      - Sertifikasi Manajemen Risiko.
      - Sertifikasi *Brevet* Kredit.
      - Sertifikasi General Banking.
      - Sertifikasi Kepatuhan.
      - Sertifikasi *Dealer Treasury.*
      - Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
      - Sertifikasi *Auditor* dan *Anti Fraud*.
      - Sertifikasi Genset.
2) Agar tercipta tenaga-tenaga Sumber Daya Manusia yang handal dan kompeten dalam mempertahankan dan mengembangkan Bank Papua program Diklat tidak hanya mengupayakan peningkatan kompetensi, namun juga mendorong program karir pegawai melalui jalur pendidikan berjenjang yang dilakukan setiap tahun. Pelatihan *Leadership*, strategi untuk calon Manajer yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional bisnis, yaitu :

Development of the Human Capital Management Competition

In an effort to improve competence, Bank Papua employees are always involved in internal or external education or training. This education and training program is adjusted by taking into account gaps in employee competencies per position and in accordance with company needs. Education and training programs provided to employees include:

1) *Basic competency education, career leadership, technical and refresher focus on the fields of:*
   a. *Credit for Credit Analyst (CA), Relationship Manager (RM), Credit Admin.*
   b. *Funding, marketing of fund products and services for Funding Officer (FO) personnel.*
   c. *The Dealer field is to provide special education concerning the placement of funds in the money and capital markets.*
   d. *Information Technology for programmers, information technology analysts and networking.*
   e. *Auditor, Anti Fraud (Investigation), Risk Management, Compliance, Law.*
   f. *Service sector for tellers and customer service to improve service, excellent service.*
   g. *Accounting, financial planning, taxation and procurement, marketers and planners.*
   h. *Fulfillment of Education and Certification in accordance with the position competency requirements, namely:*
      - *Risk Management Certification.*
      - *Brevet Credit Certification.*
      - *General Banking Certification.*
      - *Compliance Certification.*
      - *Treasury Dealer Certification.*
      - *Goods and Services Procurement Certification.*
      - *Auditor and Anti Fraud Certification.*
      - *Genset Certification.*
2) *In order to create reliable and competent Human Resources personnel in maintaining and developing Bank Papua the Education and Training program not only seeks to improve competency, but also encourages employee career programs through a tiered education channel which is carried out annually. Leadership Training, strategies for prospective managers that are tailored to the needs of business operations, namely:*

a. Pendidikan *Officer Development Program* (ODP)
Sebanyak 73 Orang peserta untuk menduduki Jabatan: *Credit Analyst* (CA), *Relationship Manager* (*RM, Jurist, Planner* dan *Auditor)*
b. Pendidikan Pemimpin Cabang (PINCAB)
Sebanyak 30 orang peserta level Manager dan AVP dengan mengikutkan Pegawai pada Jabatan Pemimpin Cabang dan Pemimpin Departemen Kantor Pusat
c. Pendidikan SESPIBANK
Sebanyak 3 orang pegawai Tingkat Jabatan VP dengan mengikutkan pemimpin-pemimpin Divisi.

3) Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal, dilakukan program beasiswa S2 kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dengan mengirimkan 3 (tiga) orang pegawai.

a. Educational Officer Development Program (ODP)
As many as 73 participants to hold positions: Credit Analyst (CA), Relationship Manager (RM, Jurist, Planner and Auditor)
b. Branch Manager Education (PINCAB)
A total of 30 Manager and AVP level participants included Employees in the Branch Leader and Head Office Department Offices
c. SESPIBANK Education
A total of 3 VP Position Level employees by including the Division leaders.

3) To improve the quality of Human Resources through formal education, a master's scholarship program is carried out in collaboration with Gajah Mada University by sending 3 (three) employees.

Program Diklat tahun 2019 Bidang Perkreditan dan Pendanaan

1. Diklat *Internal*

Education and Training Program in Credit and Funding in 2019

1. In House Training (IHT)

Realisasi Diklat Internal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of Internal Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal	Nama Pelatihan	Penyelenggara Tempat	Jumlah Peserta
1	14-26 JAN	IHT-KLASIKAL *BREVET* KREDIT KOMERSIAL KORPORASI *BATCH* 2	BNI UNIVERSITY DIKLAT SOSIAL	29
2	14-17 JAN	IHT-SOSIALISASI APLIKASI LED DAN PRC KLUSTER 4	DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK RUANG RAPAT KANTOR CABANG MERAUKE	11
3	21-24 JAN	IHT-SOSIALISASI APLIKASI LED DAN PRC KLUSTER 5	DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK RUANG RAPAT KANTOR CABANG BIAK	12
4	06-07 FEB	IHT- APPRAISAL INTERNAL *BATCH* 1	DIVISI RISIKO BISNIS AMARIS HOTEL BINTARO SURABAYA	13
5	06-07 FEB	IHT- SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 1	PT. *TALENT*S INDONESIA HOTEL SAHID	99
6	08 FEB	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 1	BSMR JAKARTA HOTEL SAHID	99
7	09 FEB	IHT-SOSIALISASI APLIKASI *NEW* E-DAPEM	PT. TASPEN, DIVISI PENGELOLAAN DANA, JASA & *E-BANKING*, DIVISI TEKNOLOGI & INFORMASI, DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS , DIVISI UMK & KONSUMER *BANKING HALL* KCU JAYAPURA	55
8	11 FEB	IHT-SOSIALISASI APLIKASI *NEW* E-DAPEM	PT. TASPEN, DIVISI PENGELOLAAN DANA, JASA & *E-BANKING*, DIVISI TEKNOLOGI & INFORMASI, DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS , DIVISI UMK & KONSUMER *BANKING HALL* KCU MANOKWARI	21
9	15-16 FEB	IHT-APPRAISAL INTERNAL BANK PAPUA *BATCH* 2	DIVISI RISIKO BISNIS LANTAI 6 BANK PAPUA	34
10	22-23 FEB	IHT-APPRAISAL INTERNAL BANK PAPUA *BATCH* 3	DIVISI RISIKO BISNIS LANTAI 6 BANK PAPUA	35
11	20-21 FEB	IHT-APU PPT *BATCH* 1	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
12	22-23 FEB	IHT-APU PPT *BATCH* 2	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
13	25-26 FEB	IHT-APU PPT *BATCH* 3	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
14	27-28 FEB	IHT-APU PPT *BATCH* 4	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30

Realisasi Diklat Internal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of Internal Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal	Nama Pelatihan	Penyelenggara Tempat	Jumlah Peserta
15	25-27 FEB	IHT-*SERVICE EXCELENCE FOR BRANCH MANAGER* DAN SOSIALISASI STANDAR LAYANAN BANK PAPUA *BATCH* 1	PT. TANDIKA DAN DIVISI JAL HOTEL HORISON JAYAPURA	29
16	28 FEB-02 MRT	IHT-*SERVICE EXCELENCE FOR BRANCH MANAGER* DAN SOSIALISASI STANDAR LAYANAN BANK PAPUA *BATCH* 2	PT. TANDIKA DAN DIVISI JAL HOTEL VEGA SORONG	17
17	01-02 MRT	IHT-APPRAISAL INTERNAL BANK PAPUA *BATCH* 4	DIVISI RISIKO BISNIS LANTAI 6 BANK PAPUA	35
18	01-02 MRT	IHT-APU PPT *BATCH* 5	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
19	04-05 MRT	IHT-APU PPT *BATCH* 6	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
20	05-06 MRT	IHT-*BASIC TREASURY*	SYNERGI MULIA PRATAMA HOTEL ASTON JAYAPURA	30
21	04-05 MRT	IHT- SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 2	PT. *TALENT*S INDONESIA HOTEL HORISON JAYAPURA	100
21	06 MRT	IHT-UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 2	BSMR JAKARTAHOTEL HORISON JAYAPURA	100
22	08-09 MRT	IHT-APU PPT *BATCH* 7	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
20	11-12 MRT	IHT-APU PPT *BATCH* 8	PT. COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	30
22	18-31 MRT	KLASIKAL *BREVET* KREDIT *BATCH* 3	BNI UNIVERSITY DIKSOS TANAH HITAM JAYAPURA	28
23	18-19 MRT	IHT - *GRAPHONOMY FOR THE FRONTLINER BATCH* 1	*THE PRESIDENT* KANTOR CABANG ABEPURA LANTAI 3, JL. RAYA ABEPURA	30
24	20-21 MRT	IHT - *GRAPHONOMY FOR THE FRONTLINER BATCH* 2	*THE PRESIDENT* KANTOR CABANG ABEPURA LANTAI 3, JL. RAYA ABEPURA	30
25	22-23 MRT	IHT - *GRAPHONOMY FOR THE FRONTLINER BATCH* 3	*THE PRESIDENT* KANTOR CABANG ABEPURA LANTAI 3, JL. RAYA ABEPURA	30
26	20-22 MRT	IHT - PENYELESAIAN KREDIT VIA LELANG *BATCH* 1	KEJAKSAAN, BPN, DIVISI PAK HOTEL JASMINE, JL. PERCETAKAN JAYAPURA	33
27	08-09 APR	IHT-PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 3	PT. *TALENT*S INDONESIA HOTEL HORISON JAYAPURA	58
28	10 APR	IHT-UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 *BATCH* 3	LSPP (LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN HOTEL HORISON JAYAPURA	58
29	23-26 APR	IHT - *OVER VIEW* MANAJEMEN PERKREDITAN DAN OPERASIONAL	BNI KANWIL JPR, KPUPR, DIVISI BKK, DIVISI BUMK, DIV PAK, DIV JAL, DIV AUDIT INTERNAL HOTEL GRAND ALLISON SENTANI	85
30	25-27 APR	IHT - PENDETEKSIAN KONDISI PENERAPAN PSAK 55 MELALUI LAPORAN LBU DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI	*AWESOME CONSULTING* BANK PAPUA KP LT. 4 JAYAPURA	22
31	29-30 APR	IHT - *PRODUCT KNOWLEDGE, SERVICE EXCELLENT, REWARD & PUNISHMENT*	DIVISI PENGELOLAAN DANA JASA DAN *E-BANKING*, DIVISI PENGELOLAAN JARINGAN & LAYANAN GEDUNG BANK PAPUA CABANG ABEPURA LT. 3 ABEPURA	30

Realisasi Diklat Internal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of Internal Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal	Nama Pelatihan	Penyelenggara Tempat	Jumlah Peserta
32	22 MEI	IHT - MEMAHAMI ISU-ISU STRATEGIS PENERAPAN PSAK 73 TENTANG SEWA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	KAP HERTANTO GRACE KARUNAWAN BANK PAPUA KP LT. 4 JAYAPURA	22
33	22-24 MEI	IHT - PENYELESAIAN KREDIT VIA LELANG *BATCH* 2	DIVISI PAK, BPN KOTA JAYAPURA, KPKNL HOTEL ASTON, JL. PERCETAKAN JAYAPURA	45
34	19 JUNI	IHT - PROGRAM PENYALURAN BSPS WILAYAH PAPUA BARAT	DIVISI PENGELOLAAN DANA JASA DAN *E-BANKING* BANK PAPUA CABANG SORONG	37
35	21-22 JUNI	IHT - *PRODUCT KNOWLEDGE,SERVICE EXCELENT, REWARD & PUNISMENT BATCH* 2	DIVISI PENGELOLAAN DANA JASA DAN *E-BANKING*, DIVISI PENGELOLA JARINGAN & LAYANAN LANTAI 3 BANK PAPUA KC ABEPURA	32
36	29 JUNI	IHT - PROGRAM PENYALURAN BSPS WILAYAH PAPUA *BATCH* 1	DIVISI PENGELOLAAN DANA JASA DAN *E-BANKING* LANTAI 3 BANK PAPUA KC ABEPURA	33
37	04 JULI	IHT - PROGRAM PENYALURAN BSPS WILAYAH PAPUA *BATCH* 2	DIVISI PENGELOLAAN DANA JASA DAN *E-BANKING* LANTAI 3 BANK PAPUA KC ABEPURA	26
38	19 AGST - 24 OKT	PELATIHAN ODP (*OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM*)	BNI *CORPORATE* UNIVERSITY BNI *CORPORATE* UNIVERSITY JAKARTA	73
39	23-27 SEPT	ORIENTASI KLASIKAL PKWT TAHUN 2019	DIVISI-DIVISI TERKAIT BALAI DIKLAT SOSIAL TANAH HITAM	73
40	12 OKT	HALF DAY SEMINAR : RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) DI INDONESIA	LPPI RUANG CENDERAWASIH II, SWISSBEL HOTEL	50
41	01 - 29 NOV	IHT ANALISA KEUANGAN UMK	PT. BRILIAN INDAH GEMILANG HOTEL HORISSON JAYAPURA ABRAHAM KREY EDY TAMTOMO DORA MORIN CHRISTIN WORUMBONI ROY PONGTIKU	330
42	29 - 30 NOV	IHT - *SERVICE EXCELLENCE AWARD CLUSTER* 1 - 4 (24 CABANG)	DIVISI JAL & DIVISI HCT HOTEL FAME JAYAPURA DAN *BANKING HALL* KCU JAYAPURA	72
43	06 - 07 DES	IHT - *SERVICE EXCELLENCE AWARD CLUSTER* 5 (6 CABANG)	DIVISI JAL & DIVISI HCT HOTEL KYRIAD SORONG DAN *BANKING HALL* KC SORONG	18
44	06 - 07 DES	IHT - *SERVICE EXCELLENCE AWARD CLUSTER* 6 (6 CABANG)	DIVISI JAL & DIVISI HCT HOTEL MAHAVIRA 2 NABIRE DAN *BANKING HALL* KC NABIRE	18
45	13 DES	IHT - *REFRESHMENT* MANAJEMEN RISIKO	LSPP (LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN) HOTEL HORISON JAYAPURA	41
		TOTAL PESERTA DIKLAT INTERNAL TAHUN 2019		**2.233**

2. Diklat Ekstern

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
REALISASI DIKLAT EKSTERN TRW 1 2019				
1	17-18 JAN	PERSIAPAN *KICK OFF SUBJECT MATTER EXPERT* (SME)	HOTEL NOVOTEL SOLO	2
2	18-19 JAN	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER*	HOTEL ALILA SEMINYAK - JL. TAMAN GANESHA NO.9 PETITENGET SEMINYAK - BALI	2
3	22-24 JAN	PEMBEKALALAN SERTIFIKASI DEALER TREASURY LEVEL BASIC	RUANGAN *TRAINING* ASBANDA, MENARA MTH LT.8 JL.MT. HARYONO KAV 23 JAKARTA SELATAN	1
4	26 JAN	UJIAN SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL BASIC*	KAMPUS STIA LAN JAKARTA, JL.ADMINISTRASI II NO.24 PEJOMPONGAN JAKARATA	2
5	24-25 JAN	*WORKSHOP* PELAYANAN LELANG TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET	OASIS AMIR HOTEL , JL. SENEN RAYA KAV.135-137 JAKARTA PUSAT	4
6	28-31 JAN	*SOFTWARE TESTING & QUALITY ASSURANCE*	*TRAINING CENTER*, *INFORMIT* JL.PURNAWARMAN 9C BANDUNG	2
7	06-07 FEB	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN *LEVEL* 1	GRIYA PERBANAS LT.3 JL.PERBANAS KARET KUNINGAN SETIABUDI - JAKARTA SELATAN	4
8	06-08 FEB	MANAJEMEN *OUTSOURCHING*: STRATEGI, ASPEK HUKUM & IMPLEMENTASINYA	HOTEL HORISON ULTIMA RISS YOGYAKARTA	3
9	06-08 FEB	*STRATEGIC MANAGEMENT : COMPANY STRATEGIC PLANNING*	PPM MANAJEMEN , JL. MENTENG RAYA NO.9-19 JAKARTA PUSAT	3
10	07-08 FEB	*SERVICE EXCELLENCE AWARD CLUSTER* PELAYANAN LELANG PENYELESAIAN KREDIT MACET *BATCH* II	OASIS AMIR HOTEL, JL.SENEN RAYA KAV.135-137 JAKARTA PUSAT	4
11	07-08 FEB	*WORKSHOP* TEKNIK PENDETEKSIAN DAN PENANGAN KEBOHONGAN BAGI INTERNAL AUDIT	HOTEL ORIA, JL. KH WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	3
12	'07-08 FEB	*IMPLEMENTATION OF GREEN BANKING* : "INTEGRASI KONSEP LINGKUNGAN, SOSIAL & TATA KELOLA (LST) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) SESUAI POJK 51/POJK.03/2017"	HOTEL ASTON RASUNA-KUNINGAN, JAKARTA	2
13	09 FEB	UJIAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	KAMPUS STIA LAN JL.ADMINISTRASI II, PEJOMPONGAN - JAKARTA	4
14	12-15 FEB	*FRAUD AUDITING* 1 (FA 1)	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	2
15	12-15 FEB	*FRAUD AUDITING* 1 (FA 1)	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	1
16	12-14 FEB	*MARKETING COMUNICATION AND PROMOTION*	HOTEL PRIME PLAZA, YOGYAKARTA	2
17	13-16 FEB	SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS KOMPUTER	HOTEL FAVE JAYAPURA	6
18	14-15 FEB	*TRAINING* BIMBINGAN TEKNIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI (OP) MELALUI *E-FILLING* DAN PENYAMPAIAN LHKPN MELALUI E-LHKPN	HOTEL HARIS BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	3
19	16 FEB	PEMEBEKALAN SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL ADVANCE*	HOTEL PULLMAN, JL.M.H. THAMRIN JAKARTA	2
20	16-17 FEB	PEMEBEKALAN SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL INTERMEDIATE*	HOTEL ALILA JAKARTA	1
21	18-22 FEB	PELATIHAN PERSIAPAN PRA-PURNABHAKTI	HOTEL KUTABEX BALI	15
22	19-22 FEB	*FRAUD AUDITING* 2 (FA 2)	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	2
23	19-21 FEB	STRATEGI MENINGKATKAN DANA PIHAK KETIGA	HOTEL PRIME PLAZA YOGYAKARTA	2
24	22 FEB	SEMINAR NASIONAL BPD SI DAN PENARIKAN UNDIAN NASIONAL TABUNGAN SIMPEDA DI SOLO - JAWA TENGAH	SOLO - JAWA TENGAH	5
25	23 FEB	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL ADVANCE*	KAMPUS STIA LAN JAKARTA, JL. ADMINISTRASI II NO.24 PEJOMPONGAN JAKARTA	2
26	23 FEB	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL INTERMEDIATE*	KAMPUS STIA LAN JAKARTA, JL. ADMINISTRASI II NO.24 PEJOMPONGAN JAKARTA	1

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
27	20-23 FEB	*WORKSHOP EXPAND LEADERSHIP PROGRAM FOR BOD/BOC*	HOTEL SHERATON BALI	2
28	21-27 FEB	TABLEAU *TRAINING & WORKSHOP*	RAFFLES COLLEGE, JL. ARJUNA UTARA NO. 35 KEBON JERUK JAKARTA	4
29	26-27 FEB	*ROADMAP* BANK 4.0 DAN ERA *FINTECH* STRATEGI DAN *LEADERSHIP* MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI	THE GROVE SUITES HOTEL, JAKARTA	2
30	26-28 FEB	*BUSINESS CONTRACT DRAFTING & REVIEWING*	HOTEL PRIMA PLAZA, YOGYAKARTA	2
31	04-06 MRT	*STRESS TEST* RISIKO PASAR, LIKUIDITAS DAN KREDIT	HOTEL PRIME PLAZA, YOGYAKARTA	3
32	05 MARET	PEMBEKALAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL ADVANCE*	PLAZA MANDIRI LANTAI 8, JL. GATOT SUBROTO KAV 36-38 JAKARTA	1
33	9 MARET	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL BASIC*	KAMPUS STIA LAN, JL. ADMINISTRASI PEJOMPONGAN JAKARTA	6
34	12-15 MRT	*FRAUD AUDITING* 1 (FA 1)	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	1
35	16 MRT	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL ADVANCE*	MENARA IBI, JL. FATMAWATI RAYA NO. 2-4 CILANDAK, JAKARTA SELATAN	1
36	11-22 MARET	AUDIT DASAR 2	L'AVENUE OFFICE TOWER, JL. RAYA PASAR MINGGU KAV 16 JAKARTA	1
37	11-22 MARET	AUDIT LANJUTAN 2	L'AVENUE OFFICE TOWER, JL. RAYA PASAR MINGGU KAV 16 JAKARTA	2
38	11-13 MARET	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN & PENENTUAN LIMIT *COUNTERPARTY*	KAMPUS BUMI LPPI, JL. KEMANG RAYA NO. 35 JAKARTA	4
39	12-14 MRT	PELATIHAN DAN UJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	HOTEL IBIS SENEN & GEDUNG LKPP LANTAI 2 JAKARTA SELATAN	2
40	15 MRT - 03 MEI	SESPIBANK ANGKATAN 70	KAMPUS BUMI LPPI, JL. KEMANG RAYA NO. 35 JAKARTA	2
41	18-27 MARET	QIA TINGKAT MANAJERIAL	L'AVENUE OFFICE TOWER, JL. RAYA PASAR MINGGU KAV 16 JAKARTA	2
42	19 MARET	*FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) POJK TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL PADA BANK UMUM	GEDUNG BI, RUANG SERBA GUNA LANTAI 25 MENARA RADIUS PRAWIRO, JL. MH. THAMRIN NO. 2 JAKARTA	1
43	21-22 MARET	*WORKSHOP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT WITH BIG DATA*	CROWNE PLAZA HOTEL BANDUNG	2
44	21-22 MARET	*KONSINYERING CHANGE MANAGEMENT OFFICE* (CMO) BPD SI	HOTEL CROWNE PLAZA, BANDUNG	2
45	23-24 MARET	PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL BASIC*	HOTEL AYANA MIDPLAZA JAKARTA, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA PUSAT	5
46	23-24 MARET	PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL INTERMEDIATE*	HOTEL AYANA MIDPLAZA JAKARTA, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 10-11 JAKARTA PUSAT	4
47	27-28 MARET	PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	GRIYA PERBANAS LT. 3, JL. PERBANAS KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN	3
48	27 MRT - 13 APR	PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)	BADAN DIKLAT PENGEMBANGAN SDM PROVINSI Papua, JL. PERKUTUT KOTARAJA DALAM	8
49	30 MARET	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL BASIC*	KAMPUS STIA LAN, JL. ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	5
50	30 MARET	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL INTERMEDIATE*	KAMPUS STIA LAN, JL. ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	3
51	30 MARET	UJIAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	KAMPUS STIA LAN, JL. ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	3
52	5 APRIL	*WORKSHOP FINTECH* PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA DIGITAL	HOTEL VERANDA, JL. KYAI MAJA NO. 63 JAKARTA SELATAN	1
53	6 APRIL	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY DEALER LEVEL INTERMEDIATE*	KAMPUS STIA LAN, JL. ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	1
54	8-11 APRIL	PELATIHAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)	PUSDIKLAT APU-PPT, JL. TAPOS RAYA NO. 82 CIMPAEUN, TAPOS, DEPOK, JAWA BARAT	1
55	11-12 APRIL	*WORKSHOP* KUPAS TUNTAS PENGUJIAN MODEL BISNIS, SPPI TEST DAN *FORWARD LOOKING*	HOTEL MILLENIUM TANAH ABANG JAKARTA	4

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
56	12 APRIL	SOSIALISASI DARI BI TTG PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 21/5/PADG/2019 TGL 29 MARET 2019	KOMPLEKS PERKANTORAN BANK INDONESIA, JL. M.H. THAMRIN NO. 2 JAKARTA	2
57	15 APRIL	*WORKSHOP* PENYUSUNAN PROSEDUR INTERNAL PERBANKAN DALAM *IMPLEMENTASI MARKET CODE OF CONDUCT* (MCoC)	KOMPLEKS PERKANTORAN BANK INDONESIA, JL. M.H. THAMRIN NO. 2 JAKARTA	1
58	23-26 APRIL	PELATIHAN *FRAUD AUDITING* 2	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO. 85 JAKARTA PUSAT	2
59	9-12 APRIL	PELATIHAN *FRAUD AUDITING* 1	HOTEL ORIA, JL. KH. WAHID HASYIM NO. 85 JAKARTA PUSAT	1
60	10-11 APRIL	*WORKSHOP EFFECTIVE PROMOTION AND ADVERTISEMENT STRATEGIES*	HOTEL FOX HARIS CITY CENTER BANDUNG	2
61	23-24 APRIL	*TRAINING CORPORATE FINANCE* IN DIGITAL ERA	HOTEL ARYA DUTA TUGU TANI JAKARTA	2
62	24-25 APRIL	*WORKSHOP* PERPAJAKAN	HOTEL AMARIS TEBET JAKARTA	3
63	24-25 APRIL	SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT 2019	WYDHAM OPI HOTEL PALEMBANG	3
64	24-25 APRIL	*WORKSHOP ANNUAL REPORT* BERBASIS KRITERIA AWARD 2018	JAKARTA	4
65	24-26 APRIL	*WORKSHOP* STRATEGI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI MENGELOLA PHK TANPA GEJOLAK ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN SESUAI DENGAN REGULASI KETENAGAKERJAAN TERBARU ANGKATAN III	HOTEL NEW SAPHIR, JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 38 YOGYAKARTA	4
66	25 APRIL	*WORKSHOP* SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (SPAMS) DAN *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT* (IPDMIP)	HOTEL BIDAKARA, JL. GATOT SUBROTO JAKARTA SELATAN	1
67	25-26 APRIL	PELATIHAN *HANDLING PEOPLE & LEAD MILLENIALS*	HARIS HOTEL TEBET	2
68	25-26 APRIL	*WORKSHOP* HARMONISASI FUNGSI MANAJEMEN RISIKO, KOMITE AUDIT, INTERNAL AUDIT DAN KEPATUHAN	THE WESTIN HOTEL JAKARTA	2
69	29-30 APRIL	PELATIHAN *DESIGNING OPERATING PROCEDURE* (SOP)	KANTOR PPM, JL. MENTENG RAYA NO. 9 JAKARTA PUSAT	4
70	08-09 MEI	PELATIHAN PEMBUATAN STUDY KELAYAKAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR	HOTEL PURI DENPASAR, JAKARTA	4
71	15-16 MEI	PELATIHAN *COMPREHENSIVE TAX UPDATE & TAX AWARENESS*	CIBIS BUSINESS PARK, JAKARTA SELATAN	4
72	16-17 MEI	PELATIHAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SERTA KAITANNYA DENGAN *BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT* (BCM)	HOTEL GRAND ZURI, JL. MANGKUBUMI NO. 18 MALIOBORO, YOGYAKARTA	3
73	20-21 MEI	PELATIHAN LEGAL *DRAFTING*	*TRAINING* ROOM JSLG GEDUNG SARINAH LT. 09 JL. MH THAMRIN NO.11 JAKARTA	3
74	23-24 MEI	PELATIHAN *FUNDAMENTAL OF TALENT* MANAGEMENT *AND PEOPLE DEVELOPMENT*	HOTEL AMBHARA JAKARTA	2
75	12 - 14 JUNI	*SOFTWARE QUALITY ASSURANCE*	NATIVE ENTERPRISE *TRAINING* CENTER, JL. SETRASARI KULON V, BANDUNG	4
76	18-19 JUN	*WORKSHOP RISK BASED AUDITING*	AONE HOTEL JAKARTA	3
77	18 - 27 JUN	*TRANING ANDROID STUDIO ULTIMATE*	JOGJA MULTIMEDIA, JL. MAGELANG KM 7,5 SLEMAN, YOGYAKARTA	2
78	27 JUN	SEMINAR FKDKP DAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) TAHUN 2019	BALLROOM GRAND THAMRIN 1 DAN 2 HOTEL PULLMAN THAMRIN, JL. MH THAMRIN NO.57 JAKARTA	2
79	24-27 JUN	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)	MENARA TASPEN LT.16 JL. JEND. SUDIRMAN KAV.2 JAKARTA	3
80	24-25 JUN	PELATIHAN MANAJEMEN KEPROTOKOLAN DAN PEMBAWA ACARA/MC	HOTEL GINO FERUCI, JL. BRAGA NO.63 BANDUNG	2
81	24-28 JUN	PELATIHAN PERSIAPAN PRA-PURNABHAKTI	HOTEL KUTABEX BALI	15
82	25-27 JUN	PELATIHAN SUPERVISI PROYEK BANGUNAN GEDUNG	HOTEL FORRIZ, JL. HOS COKROAMINOTO NO.60 YOGYAKARTA	4
83	25-27 JUNI	PEMBINAAN DAN SERTIFIKSI K3 OPERATOR GONDOLA VERSI KEMENAKER RI	HOTEL YASMIN JAYAPURA	3

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
84	27-28 JUN	SOSIALISASI IMPLEMENTASI, BEDAH PASAL PERPRES 17 TAHUN 2019	HOTEL OASIS AMIR JAKARTA	3
85	04-05 JULI	PELATIHAN *PUBLIC RELATIONS FOR SECRETARY*	HOTEL GINO FERUCI, JALAN BRAGA NO.63 BANDUNG	3
86	08-19 JULI	SERTIFIKASI *QUALIFIED INTERNAL AUDITOR* TINGKAT LANJUTAN II	HOTEL ORIA, JL. KH WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	1
87	08-19 JULI	SERTIFIKASI *QUALIFIED INTERNAL AUDITOR* TINGKAT DASAR II	HOTEL ORIA, JL. KH WAHID HASYIM NO.85, JAKARTA PUSAT	1
88	1-3 JULI	PELATIHAN *TRAIN THE TRAINER*	KAMPUS BUMI LPPI JAKARTA	10
89	11-12 JULI	PERTEMUAN DIREKTUR PEMASARAN YANG MENANGANI KREDIT DAN PEMIMPIN DIVISI KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SE INDONESIA	JL.RAYA JEMBER KM 7 PAKISTAJI, BANYUWANGI, JAWA TIMUR	2
90	17-18 JULI	SEMINAR *THE 7TH CORPORATE COMMUNICATION SUMMIT*	HOTEL ARYADUTA TUGU TANI JAKARTA	2
91	15-27 JULI	AUDIT TINGKAT DASAR (A)	L'AVENUE OFFICE TOWER JL. RAYA PASAR MINGGU KAV.16 JAKARTA	2
92	22-24 JULI	*WORKSHOP* ANALISIS KREDIT KOMERSIAL	HOTEL AMARIS PANCORAN JL. RAYA PASAR MINGGU NO.15 A	3
93	22-26 JULI	PELATIHAN KEARSIPAN	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN, BOGOR	2
94	23-25 JULI	PELATIHAN STRATEGI MERUMUSKAN HPS, KAK DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH	HOTEL KJ YOGYAKARTA	3
95	24-25 JULI	PELATIHAN *CAPACITY BUILDING* PELAYANAN JASA SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI (KLIRING)	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA BALI	1
96	24-25 JULI	PEMAHAMAN TEKNIS PENILAIAN JAMINAN	HOTEL IBIS ARCADIA, JAKARTA	3
97	25-26 JULI	*TRAINING* MEDIA *EXPOSE* : 'MENJADI HUMAS, SEKRETARIS DAN PROTOKOLER YANG EFEKTIF DAN EFISIEN'	HOTEL GRAND INNA KUTA BEACH BALI	2
98	25-26 JULI	PELATIHAN IMPLEMENTASI TEKNIK PERHITUNGAN AKTUARIA DAN MANFAATNYA BESERTA ASPEK2 RISIKONYA BERDASARKAN PSAK 24 (REVISI 2014) TENTANG IMBALAN KERJA	HOTEL AMARIS MALIOBORO YOGYAKARTA, JL. PAJEKSAN NO.10 KOTA YOGYAKARTA	2
99	29 JULI - 10 AGS	AUDIT TINGKAT DASAR (B)	L'AVENUE OFFICE TOWER JL. RAYA PASAR MINGGU KAV.16 JAKARTA	1
100	29-30 JUL	*TRAINING* DAN *WORKSHOP* KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN UKM-MIKRO KHUSUS BPD	HOTEL SULTAN JAKARTA	3
101	30-31 JUL	PERANCANGAN KERTAS KERJA *STRESS TESTING* RISIKO OPERASIONAL	ASHLEY HOTEL, JAKARTA	3
102	31 JULI - 09 AGS	PELATIHAN & *WORKSHOP* KOMPETENSI : *ENHANCEMENT ADVANCED MESSAGING*	GLOBALX *WORKSHOP*, GREEN OFFICE PARK 9, WING A FLOOR 3 ZONE 5C JL. BSD GRAND BOULEVARD, TANGERANG	3
103	31 JULI - 01 AGS	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 2	GRIYA PERBANAS LT.3 JL. PERBANAS KARET KUNINGAN, SRETIABUDI, JAKARTA SELATAN	1
104	31 JULI - 01 AGS	PELATIHAN OPERASIONAL SISTEM BANK INDONESIA -*SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM* (BI-SSSS)	RUANG PELATIHAN DPSP, GEDUNG D LANTAI 4, BANK INDONESIA	2
105	30 JULI - 01 AGS	SOSIALISASI, PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	HOTEL IBIS SENEN, LT 2 JL. KRAMAT JAYA NO.100, JAKARTA	2
106	30 JULI - 06 AGST	*REFRESHMENT* PROGRAM MANAJEMEN RISIKO	MOSKOW	3
107	01-02 AGST	PROFESIONAL *CORPORATE SECRETARY*	PRIMA PLAZA HOTEL	3
108	02-03 AGST	*WORKSHOP* KERJASAMA BANK DAN *FINTECH* DI ERA DIGITALISASI EKONOMI	BALLROOM HOTEL FOUR POINTS, MANADO, JL. PIERE TENDEAN, BOULEVARD, MANADO	2
109	03 AGS	SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 2	KAMPUS LAN JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	1
110	05 - 15 AGS	*LINUX ADVANCE & MYSQL ADVANCE*	JL. KENARI 69, YOGYAKARTA	2
111	05-09 AGS	*LINUX ADVANCE*	JL. KENARI 69, YOGYAKARTA	3
112	05 AGS - 20 SEPT	SEKOLAH STAF DAN PEMIMPIN CABANG (SESPIBANK) ANGKATAN -71	KAMPUS LPPI & BENCHMARK	3

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember) *Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)*				
No	**Tanggal Kegiatan**	**Nama Kegiatan**	**Tempat**	**Jumlah Peserta**
113	07-09 AGS	SOSIALISASI, PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	HOTEL IBIS SENEN, LT 2 JL. KRAMAT JAYA NO.100, JAKARTA	2
114	12 - 15 AGS	MY SQL *ADVANCE*	JL. KENARI 69, YOGYAKARTA	3
115	13-15 AGS	RISIKO HUKUM ATAS KERINGANAN BUNGA DAN HAPUS BUKU KREDIT	HOTEL FOX HARRIS CITY CENTER BANDUNG	2
116	15-16 AGS	PENERAPAN TINGKAT KESEHATAN BANK (TKB) SESUAI PERATURAN POJK NO.4/POJK.03/2016 & SEOJK NO.14/ SEOJK.03/2017	HOTEL AMBHARA, JAKARTA	2
117	15-16 AGS	*WORKSHOP* KERJASAMA KPR DENGAN *DEVELOPER*	HOTEL HARRIS KELAPA GADING, JAKARTA	4
118	19-22 AGST	SERTIFIKASI OPERATOR GENSET *BATCH* 1	*TRAINING* CENTER PT.UPAYA RIKSA PATRA JL.PONDASI NO.50E KAMPUNG AMBON-JAKARTA TIMUR	2
119	19-31 AGST	SERTIFIKASI *QUALIFIED INTERNAL AUDITOR* (QIA) TINGKAT LANJUTAN	L'AVENUE OFFICE TOWER JL. RAYA PASAR MINGGU KAV.16 JAKARTA	4
120	19-21 AGST 2019	*WORKSHOP* MEKANISME PENANGANAN PERKARA HUKUM PERUSAHAAN	HOTEL PRIME PLAZA JL.AFFANDI GEJAYAN YOGYAKARTA	4
121	20-21 AGST	KEPAILITAN DAN AYDA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BANK	HOTEL HARRIS KELAPA GADING JAKARTA	4
122	21-22 AGST	IMPLEMENTASI *IT RISK MANAGEMENT*	JIMLY SCHOOL LAW AND GOVERNMENT	2
123	21-23 AGST	*SETTLEMENT PAYMENT SYSTEM*	HOTEL IBIS KUTA BALI	3
124	22-23 AGST	SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KONSTRUKSI NO.2 TAHUN 2017 BERIKUT PERATURAN MENTERI PUPR NO.07 TAHUN 2019 TERMASUK PEMBAHAWAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA / PEKERJAAN KONSTRUKSI	HOTEL RIVOLI JAKARTA, JL.KREAMT RAYA NO.41 JAKARTA PUSAT	4
125	22-23 AGST	PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) & PENERAPAN ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA DALAM BISNIS PERBANKAN	HOTEL ASHLEY WAHID HASYIM JAKARTA	3
126	23 AGST	SEMINAR NASIONAL BPD SI DAN PENARIKAN UNDIAN NASIONAL TABUNGAN SIMPEDA DI BALI	BALI	5
127	24-31 AGST	PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI *DEALER LEVEL INTERMEDIETE* DAN *LEVEL ADVANCE*	JAKARTA	3
128	26-27 AGST	*PERFORMANCE APPRAISAL WITH KEY PERFORMANCE INDICATOR* (KPI)	JAKARTA	4
129	26-28 AGST	TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) YANG WAJAR DAN AKUNTABLE DALAM PELAKSANAAN PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN	HOTEL NEW SAPHIR, JL.LAKSADA ADISUCIPTO NO.38 YOGYAKARTA	3
130	26-27 AGST	*TALENT MANAGEMENT & CAREER SYSTEM*	JAKARTA	3
131	27-28 AGST	*WORKSHOP* MEDIA *RELATIONS & PUBLIC RELATION WRITING* BAGI HUMAS DAN SEKRETARIS	HOTEL DELAXTON YOGYAKARTA	3
132	28-29 AGST	*JOB ANALYSIS JOB DESC BASED ON* KPI	JAKARTA	2
133	28-29 AGST	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	GRIYA PERBANAS LT.3 JL. PERBANAS KARET KUNINGAN, SRETIABUDI, JAKARTA SELATAN	3
134	28-30 AGST	PENDIDIKAN KHUSUS PENILAIAN SPI 202 DAN 205	MEDAN, SUMATRA UTARA	1
135	29-30 AGST	SEMINAR PSAK 71 *FOR BOARD OF COMMISSIONER*	HOTEL ALOFT JAKARTA	3
136	31 AGST	SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	KAMPUS LAN JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	3
137	31 AGST	PERTEMUAN PENYELENGGARAAN KLIRING TAHUN 2019	DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL, BALI	1
138	09-13 SEPT	*ASSESSMENT CENTER ASSESSOR CERTIFICATION*	KAMPUS PPM MANAJEMEN	2
139	10-12 SEPT	PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	HOTEL IBIS SENEN JAKARTA (PELATIHAN)	3

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
140	10-12 SEPT	*SETTLEMENT PAYMENT SYSTEM*	HOTEL IBIS KUTA BALI	3
141	10-12 SEPT	*COST AND PROFIT*	HOTEL PRIME PLAZA YOGYAKARTA	3
142	12-13 SEPT	*INTERNAL CAPITAL ADEQUACY* ASSESSMENT *PROCESS* (ICAAP)	MARRIOTT HOTEL, BANDUNG	1
143	12 - 15 SEPT	SOSIALISASI KEBIJAKAN OPERASIONAL SKNBI DAN KETENTUAN ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (ASPI)	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA YOGYAKARTA	1
144	16-18 SEPT	*LEGAL DRAFTING TRAINING*	*TRAINING* ROOM JSLG, GEDUNG SARINAH LT.9 JAKARTA BARAT	2
145	17-18 SEPT	*RISK PROFILING AND REPORTING TRAINING*	HOTEL AMBHARA, JAKARTA	3
146	17-19 SEPT	*NEGOTIATION SKIL FOR SALES AND MARKETING PEOPLE*	HOTEL PRIME PLAZA YOGYAKARTA	3
147	18-20 SEPT	*DOCUMENT CONTROL AND FILLING SYSTEM*	HOTEL PRIME PLAZA YOGYAKARTA	3
148	19-20 SEPT	*WORKSHOP* APU PPT: *RISK ASSESMENT, RISK BASED APPROACH* DAN SIMULASI	JW MARRIOT HOTEL - JAKARTA	2
149	21-22 SEPT	PEMBEKALAN SERTIFIKASI *BASIC TREASURY*	HOTEL GRAND MERCURE HARMONI JAKARTA	2
150	23-24 SEPT	*WORKSHOP & DISCUSSION ADVANCE BEST SERVICE QUALITY*	HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA	3
151	24-25 SEPT	LELANG JAMINAN KREDIT	HOTEL HARRIS KELAPA GADING JAKARTA	3
152	23-26 SEPT	PELATIHAN PERSIAPAN MENGHADAPI SERTIFIKASI PEMASARAN BIDANG *BRAND* (MEREK)	KOMPLEK PERTOKOAN TRI TUNGAL B9, JOTAWANG, BANTUL, YOGYAKARTA	2
153	24-26 SEPT	OPTIMALISASI FITUR PERBANKAN REGULASI DAN STUDY KASUSNYA	HOTEL GRAND ZURI, YOGYAKARTA	2
154	25-26 SEPT	BIMBINGAN TEKNIS STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN EVALUASI PEMILIHAN PENYEDIA	HOTEL EDEN KUTA BALI	3
155	25-26 SEPT	PELATIHAN *TECHNICAL SKILL FOR CREDIT ANALYST*		4
156	26 SEPT - 05 OKT	OPTIMALISASI FITUR ELEKTRONIK PERBANKAN	YOGYAKARTA	3
157	26 SEPT	SEMINAR FKDKP UNTUK LEVEL KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT BANK LEVEL EKSEKUTIF DENGAN TOPIK PEMAHAMAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71 & 73 YANG AKAN DITERAPKAN PADA TAHUN BESERTA DAMPAKNYA SERTA DISKUSI MENGENAI PENDALAMAN DALAM PENYUSUNAN POJK 51	HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON JAKARTA-DIPONEGORO	2
158	26-27 SEPT	*REFRESHMENT* SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI	BLUESKY JAKARTA	1
159	02 OKT	*WORKSHOP* PERSIAPAN *IMPLEMENTASI APLIKASI OBOX*	MANADO, SULAWESI UTARA	2
160	04-06 OKT	SOSIALISASI CEK/BG, DAFTAR HITAM NASIONAL DAN ASPI	HOTEL SAVOY HOMAN, JLN ASIA AFRIKA NO.112, BANDUNG	1
161	08-11 OKT	*WORKSHOP* PSAK TERKINI SESUAI KONVERGENSI IFRS	KUTA BEACH HERITAGE HOTEL BALI	3
162	12 OKT	PEMBEKALAN SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL ADVANCE*	AYANA MID PLAZA, JAKARTA	1
163	07-26 OKT	DIKLAT PINCAB KHUSUS BANK PAPUA	KAMPUS BUMI LPPI JL.KEMANG RAYA NO.35, JAKARTA SELATAN	30
164	07 OKT	*WORKSHOP* DAMPAK KREDIT MACET DAN DEBITUR PAILIT DI BPD DALAM PERSPEKTIF HUKUM SERTA PERPAJAKAN	EBONY BALLROOM, HOTEL ARYADUTA, LIPPO KARAWACI - JAKARTA	7
165	14-15 OKT	PELATIHAN ANALISA KREDIT MODAL KERJA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROPERTI	JL RAYA SERPONG NO.89, CILENGGANG, SERPONG-TANGERANG, JAKARTA	5
166	15 - 16 OKT	*WORKSHOP* TEKNIK ANALISA LAPORAN KEUANGAN	PURI DENPASAR HOTEL JAKARTA	7
167	15-17 OKT	*WORKSHOP* PRESENTASI DAN DEMO IMPLEMENTASI SISTEM PINPAD	MEETING ROOM LT.1 PT NYRA, KAWASAN MEGA KUNINGAN JAKARTA	2
168	15 OKT	SOSIALISASI DALAM RANGKA *REFRESHMENT* TENTANG *MARKET CONDUCT* DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2013	HOTEL BOROBUDUR JAKARTA	1
169	16-17 OKT	DIKLAT *EXTERN* - STRATEGI MENYUSUN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BUMD	HOTEL RIVOLI JAKARTA	2
170	17-18 OKT	*PUBLIC TRAINING BUILDING CORPORATE CULTURE*	DE PAVILJOEN, BANDUNG	2

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember) *Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)*				
No	**Tanggal Kegiatan**	**Nama Kegiatan**	**Tempat**	**Jumlah Peserta**
171	17-18 OKT	PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT INDUK (STANDBY LOAN) PERJANJIAN TURUNANNYA DAN RISIKO HUKUM PERJANJIAN	HOTEL IBI S KUTA BALI	3
172	21-25 OKT	*QUERYING MICROSOFT SQL SERVER* (MOC 20461 D + SERTIFIKASI	GEDUNG KOMPAS GRAMEDIALT. 5, SURABAYA	3
173	21-22 OKT	ANALISA KPR TINGKAT 1	(TENTATIVE) JAKARTA	5
174	22-24 OKT	PEMBUATAN SOP RESTRUKTURASI KREDIT	HOTEL NEO MALIOBORO YOGYAKARTA	3
175	22-24 OKT	*TRAINING EFFECTIVE LOBBYING AND NEGOTIATION SKILLS*	HOTEL NEO MALIOBORO YOGYAKARTA	7
176	23-24 OKT	*UNDERSTANDING & APPLIYING EMOTIONAL INTELLEGENCE FOR WINNING SALES TARGET*	HARRIS HOTEL, TEBET-JAKARTA	2
177	23-24 OKT	*10TH THE REAL* CSR SEMINAR TENTANG PERAN CSR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT INDONESIA	HOTEL ARYADUTA (TUGU TANI), JAKARTA	3
178	23-24 OKT	PELATIHAN *BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT* (BCM) KONDISI NORMAL, KONDISI BENCANA, PASCA BENCANA		
179	24-25 OKT	*TRAINING E-DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM*	HOTEL GOLDEN FLOWER, BANDUNG	3
180	25-26 OKT	*EXT-WORKSHOP & DISCUSSION METODE STRESS TESTING* UNTUK MENGUKUR RISIKO PASAR, LIKUIDITAS DAN KREDIT	LE MERIDIEN JAKARTA, JALAN JENDERAL SUDIRMAN JAKARTA	3
181	25-27 OKT	PEMBAHASAN ISU-ISU STARTEGIS DIBIDANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH & SOSIALISASI IMPLEMENTASI *CORE BANKING* SYSTEM	GOLDEN PALACE HOTEL - LOMBOK	1
182	26-27 OKT	PEMBEKALAN SERTIFIKASI *TREASURY LEVEL INTERMEDIATE*	HOTEL GRAND MERCURE-HARMONI JAKARTA	1
183	26-27 OKT	PEMBEKALAN SERTIFIKASI *TREASURY LEVEL BASIC*	HOTEL GRAND MERCURE-HARMONI JAKARTA	1
184	28-29 OKT	ANALIS KREDIT KORPORASI STRATEGIS	HOTEL HARRIS, TEBET - JAKARTA SELATAN	3
185	29-31 OKT	PELATIHAN & UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	HOTEL IBIIS SENEN & GEDUNG LKPP, JAKARTA	9
186	29-31 OKT	PELATIHAN *E-BANKING* PERLINDUNGAN KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN	HOTEL NEO MALIOBORO YOGYAKARTA	3
187	02 NOV	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY LEVEL INTERMEDIATE*	KAMPUS STIA LAN, JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	1
188	02 NOV	UJIAN SERTIFIKASI *TREASURY LEVEL BASIC*	KAMPUS STIA LAN, JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	4
189	02 NOV	UJIAN SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL ADVANCE (FAST TRACK)*	KANTOR BANK INDONESIA JAKARTA	1
190	01-03 NOV	*REFRESHMENT* KETENTUAN SETBAY DAN LAYANAN KAS SERTA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG MATA UANG KEPADA KASIR/ TELLER PERBANKAN DIY	DENPASAR, BALI	2
191	05 - 08 NOV	PELATIHAN TABLEAU (LANJUTAN)	GEDUNG TRIO PT. CYBERTREND INTRABUANA, JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA, JAKARTA	3
192	07-08 NOV	*FOCUS DISCUSSION* (FGD) BUKU PANDUAN/ *MANUAL BOOK* DIREKSI DAN KOMISARIS BANK SERTA *CODE OF CONDUCT*	HOTEL COURTYARD BY MARRIOT BANDUNG	4
193	07-08 NOV	PELATIHAN INTEGRASI PELAPORAN PERBANKAN BERBASIS METADATA	HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA	1
194	11-12 NOV	PELATIHAN EKSTERN - ANALISA KPR TINGKAT 2	JAKARTA	5
195	11-13 NOV	*WORKSHOP* "MANAJEMEN KERUMAHTANGGAAN PERUSAHAAN YANG EFEKTIF DAN PROFESIONAL MELALUI PENINGKATAN KETRAMPILAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KANTOR SECARA *MODERN*".	HOTEL GRAGE RAMAYANA, YOGYAKARTA	6
196	11 - 14 NOV	SERTIFIKASI OPERATOR GENSET	HOTEL PATRA COMFORT JAKARTA	3
197	12 NOV	SEMINAR INDONESIA *RISK MANAGEMENT OUTLOOK* 2020	HOTEL LE MERIDIEN JIMBARAN, BALI	5
198	12-14 NOV	*TRAINING MASTER EXCEL FOR DATA ANALYST*	CAVINTON HOTEL YOGYAKARTA	4

Realisasi Diklat Eksternal Tahun 2019 (Januari - Desember)
Realization of External Education and Training Year 2019 (January - December)

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Jumlah Peserta
199	12-14 NOV	TEKNIK PENYUSUNAN *E-LEARNING*	HOTEL IBIS KEMAYORAN JAKARTA	3
200	13-15 NOV	*RETURN ON TRAINING INVESTMENT*	EKOLOGI DESK & COFFEE, YOGYAKARTA	2
201	14-15 NOV	*RECORDS MANAGEMENT & E-FILLING SYSTEM*	PURI DENPASAR HOTEL JAKARTA	2
202	14-15 NOV	*WORKSHOP* "TEKNIK ANALISA LAPORAN KEUANGAN"	PURI DENPASAR HOTEL JAKARTA	4
203	14-15 NOV	*BEST PRACTICE IN RESEARCH METHODS FOR BUSINESS SOLUTION*	HOTEL IBIS MALIOBORO YOGYAKARTA	3
204	14-15 NOV	PELATIHAN *ANTI MONEY LOUNDERING*	HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA	2
205	14-15 NOV	PELATIHAN *CORPORATE CULTURE*	HOTEL FOX HARRIS CITY CENTER BANDUNG	2
206	18-19 NOV	PELATIHAN *WITHOLDING* TAX-PPN	CIBIS EIGHT JAKARTA	2
207	21-22 NOV	*WORKSHOP "PROJECT FINANCE FOR INFRASTRUCTURE"*	EL HOTEL ROYALE , BANYUWANGI	2
208	21-23 NOV	SEMINAR "PENGUATAN PERMODALAN BPD DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN FUNGSI *AGENT OF DEVELOPMENT*"	LOMBOK RAYA HOTEL KOTA MATARAM NTB	9
209	23-25 NOV	PELATIHAN PENGELOLAAN *REPORT E-CHANNEL* DALAM *DATABASE SERVER*	SURABAYA	3
210	27 NOV	*SEMINAR CEO MENTORING*	HOTEL RITZ CARLTON - JAKARTA	1
211	27 NOV	SEMINAR NASIONAL *THE 3rd CONSUMER BANKING FORUM : THE TRUTH OF ECONOMIC TURMOIL & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES*	HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA	2
212	28 NOV	*WORKSHOP* PENYEDIAAN LIKUIDITAS AKHIR TAHUN PADA BPD SI	SWISS-BELRESORT TANJUNG BINGA, BELITUNG	2
213	02 - 03 DES	SOSIALISASI KETENTUAN BANK UMUM	HOTEL SHERATON GRAND JAKARTA	3
		SOSIALISASI KETENTUAN BANK UMUM		
214	5 - 6 DES	*WORKSHOP* PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN DAN PSAK 73:SEWA	HOTEL GRAND SAHID JAYA JAKARTA	3
215	6 - 7 DES	UNDANGAN ANUGRAH PERBANKAN INDONESIA - VIII-2019	HOTEL SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA	2
216	14 DES	*REFRESHMENT* SERTIFIKASI *DEALER TREASURY LEVEL BASIC*	HOTEL PULMAN THAMRIN JAKARTA	1
		TOTAL PESERTA DIKLAT EKSTERN TAHUN 2019		**641**

Kesempatan & Peluang yang Sama

Untuk pengembangan kompetensi karyawan, Bank Papua selalu berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya agar bisa mengembangkan potensi dirinya guna menunjang karir diperusahaan. Bank membuat kebijakan design ketentuan promosi, dimana sistem atau metode yang memformulasikan indikator-indikator dari *parameter* yang terukur dalam rangka pemilihan kandidat pegawai yang memiliki *high performance* dan *high qualificatio*n untuk dipromosi seperti tergambar pada skema dibawah ini.

Equal Opportunities

To develop employee competency, Bank Papua is always committed to provide equal opportunities to all employees in order to develop their potential to support their careers in the company. The Bank makes a design policy for promotion provisions, where the system or method that formulates indicators of the measured parameters in the selection of employee candidates who have high performance and high qualification to be promoted as illustrated in the scheme below.

Design Ketentuan Promosi
Design of Promotion Terms

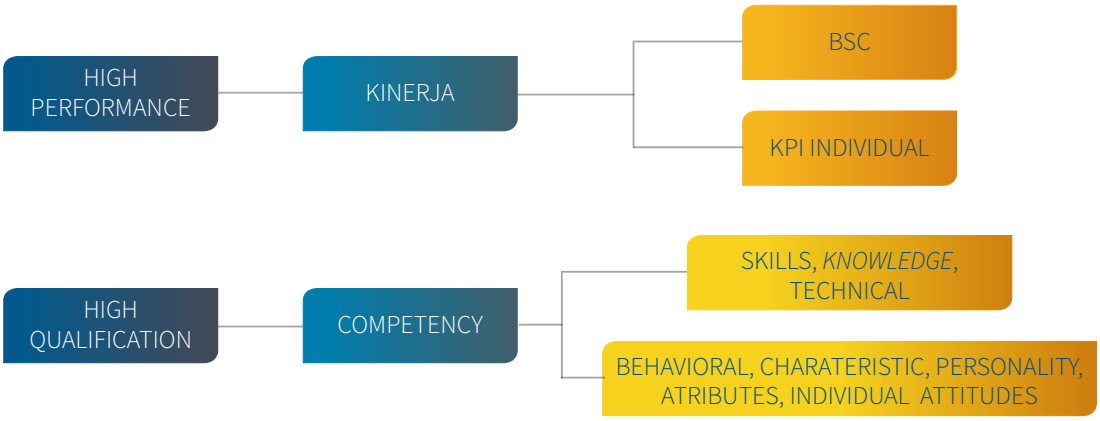

Kesempatan & Keselamatan Kerja

Bank Papua merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kinerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun Bank Papua berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman.

Bank Papua berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja sebagaimana tahun sebelumnya.

Job Opportunities & Safety

Bank Papua is a company engaged in a performance environment that does not trigger many risks of work accidents, but Bank Papua strives to provide protection at work, so that all parties can carry out activities comfortably.

Bank Papua strives to meet occupational health and safety standards and achieve zero accidents in each work unit. Minimized risks include fire hazards, theft hazards, and health facilities. A more complete explanation related to occupational health and safety is in the Corporate Social Responsibility (CSR) section. In 2019 there were no work accidents as in the previous year.

Penilaian Kinerja Pegawai

Saah satu program dalam transformasi dibidang Sumber Daya Manusia yaitu perubahan/evaluasi Penilain Kinerja Pegawai. Penilaian Kinerja tahun 2019 menggunakan pendekatan *Balance Scored Card*, terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu :

a. Perspektif Finansial.
b. Perspektif Proses Internal.
c. Perspektif Pelanggan.
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Pembagian pembobotan dibagi atas finansial dan non finansial :

a. Unit Bisnis: finansial 65% dan non finansial 35%.
b. Unit Pendukung: finansial 35% dan non finansial 65%.

Penilaian Kinerja tahun 2019 dilakukan berdasarkan nilai pada kamus KPI Penilaian dalam kamus KPI menggunakan sistem rating nilai dengan skala 1-5.

- Rating 1 (Buruk/Kurang) .
- Rating 2 (Cukup).
- Rating 3 (Baik).
- Rating 4 (Memuaskan).
- Rating 5 (Sangat Memuaskan).

Disamping itu juga terdapat faktor pengurang penilaian yaitu :

a. Faktor pengurang kehadiran (Absensi).
b. Faktor pengurang indeks kepatuhan.

Predikat Penilaian Kinerja diberikan berdasarkan total hasil penilaian yang ditetapkan sebagai berikut:

Employee Performance Assessment

One of the programs in the transformation in the field of Human Resources is employee evaluation / evaluation. The 2019 Performance Assessment uses the Balance Scored Card approach, consisting of 4 (four) perspectives, namely:

a. Financial Perspective.
b. Internal Process Perspective.
c. Customer Perspective.
d. Learning and Growth Perspective.

The weighting division is divided into financial and non financial:

a. Business Unit: financial 65% and non financial 35%.
b. Supporting Unit: financial 35% and non financial 65%.

Performance assessment in 2019 is based on the value in the KPI dictionary The assessment in the KPI dictionary uses a rating rating system on a scale of 1-5.

- *Rating 1 (Poor / Poor).*
- *Rating 2 (Enough).*
- *Rating 3 (Good).*
- *Rating 4 (Satisfactory).*
- *Rating 5 (Very Satisfying).*

Besides that there are also deduction factors for rating, namely:

a. Absence factor (attendance).
b. Reduction index of compliance index.

The Performance assessment predicate is based on the total assessment results set as follows:

Range Skor (Total Hasil Penilaian KPI)	Predikat	Yudisium
450 - 500	P5	Sangat Memuaskan
380 - 449	P4	Memuaskan
261 - 379	P3	Baik
191 - 260	P2	Cukup
< 191	P1	Kurang

Reward & Punishment

Sistem *reward & punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Bank Papua. Sistem *reward & punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem *reward & punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target bank dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward & punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *Reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Pemberian *reward and punishment system* di Bank Papua didasarkan pada penilaian kinerja karyawan (*merit-based system*). Bank menetapkan cara yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan-karyawannya, salah satunya penggunaan *key performance indicators.* Hasil penilaian kinerja berupa angka lebih memudahkan perusahaan untuk memberikan *Reward and punishment system* kepada karyawan. Sedangkan untuk kesalahan bersifat pelanggaran hukum, maka manajemen memberikan tindakan tegas.

Reward & Punishment

A reward & punishment system from management is important to be implemented by Bank Papua. reward & punishment system helps management in realizing the company's vision, mission, strategy and goals. In addition, the reward & Punishment system from management becomes a management tool to be able to influence employees to act positively to achieve company goals. Employees will be cooperative if management can develop and manage employees appropriately, so that the bank's target can run according to management's expectations.

The reward & punishment system from management is also designed to motivate employees to achieve the company's goals. Reward is one of the important control tools used by companies to motivate personnel to achieve company goals with behavior that is expected by the company. While punishment is something that is not liked / liked by employees to produce a deterrent effect so that it will not commit the same deeds and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a salary increase, being removed from the list of employees to be promoted, failure to get rewards, dismissal threats, and so forth.

The granting of reward and punishment systems at Bank Papua is based on employee performance appraisal (merit-based system). The Bank determines the methods used to assess the performance of its employees, one of which is the use of key performance indicators. The results of the performance appraisal in the form of numbers make it easier for companies to provide reward and punishment systems to employees. As for errors that are in violation of the law, management provides decisive action.

Dalam aktivitas dan operasional bank selama tahun 2019, Bank telah memberikan *reward & punishment* sebagai berikut:

a. *Reward*

In the activities and operations of banks during 2019, the Bank has provided rewards & punishment as follows:

a. *Reward*

No	Keterangan	Jumlah	Nominal (Rp)	*Information*
1	Penghargaan 15 Tahun			*15 Year Award*
2	Penghargaan 20 Tahun	21	690.010.480	*20 Years Award*
3	Penghargaan 25 Tahun	24	1.357.217.595	*25 Years Award*
3	Penghargaan 30 Tahun	3	274.810.412	*30 Years Award*
	Sub Total		**2.322.038.487**	*Sub-Total*
1	Bonus	2487	30.236.957.392	*Bonus*
2	Bonus Variabel	2531	17.277.412.908	*Variable Bonus*
	Sub Total		**47.514.370.300**	*Sub-Total*
	Total		**49.836.408.787**	*Total*

b. *Punishment*

Disamping pemberian *reward* kepada Pegawai, maka penegakan Disiplin secara konsisten perlu dilakukan kepada pegawai yang melanggar ketentuan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran oleh pegawai lainnya dan sebagai efek jera dari pelaku pelanggaran. Selama tahun 2019 telah diberikan sanksi baik di Kantor maupun Kantor Cabang dengan rincian sebagaimana terlampir.

b. Punishment

In addition to rewarding employees, consistent Discipline enforcement needs to be done to employees who violate the provisions, this is intended to prevent violations by other employees and as a deterrent effect from violators. During 2019 sanctions have been given both at the Office and Branch Offices with details as attached.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat penurunan Sanksi dibandingkan tahun 2019, dengan data sebagai berikut :

Based on the evaluation results there is a decrease in sanctions compared to 2019, with the following data:

No	Keterangan Sanksi	Jumlah Sanksi	*Sanction Statement*
1	Teguran Lisan	65	*Oral Reprimands*
2	Teguran Tertulis	61	*Written Reprimand*
3	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I	33	*Written Reprimand in the form of a Warning Letter I*
4	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II	28	*Written Reprimand in the Form of a Warning Letter II*
5	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III	28	*Written Reprimand in the form of a Warning Letter III*
6	Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun	5	*Periodic Salary Postponement for a maximum of 1 year*
7	Penundaan Kenaikan Peringkat Paling Lama 1 Tahun	3	*Postponement of the Rank Increase at the Longest 1 Year*
8	Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Dari *Grade* Semula	15	*A Grade Lower Than the Original Grade*
9	Penurunan *Grade* 2 Tingkat Lebih Rendah Dari *Grade* Semula	2	*2 Grade Lower Than the Original Grade*
10	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	24	*Termination of Employment (FLE)*
		264	

Rekapitulasi Sanksi Pegawai Periode Tahun 2019 *Recapitulation of Employee Sanctions in 2019*								
Keterangan Sanksi	2018			2019			% Jumlah	*Sanction Information*
	Staf	Pejabat	Jumlah	Staf	Pejabat	Jumlah		
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	46	4	50	24	-	24	-52%	*Termination of Employment (FLE)*
Penurunan *Grade* 2 Tingkat Lebih Rendah Dari *Grade* Semula	2	2	4	2	-	2	-50%	*2 Grade Decreases Lower Than the Original Grade*
Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Kerja	18	5	23	15	-	15	-35%	*A Grade Lower Than the Original Grade*
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	8	6	14	5	-	5	-64%	*Postponement of Periodic Salary Increase*
Penundaan Kenaikan Peringkat	8	6	14	-	3	3	-79%	*Postponement of Rank Increase*
Surat Peringatan I	71	9	80	54	7	61	-24%	*Warning Letter I*
Surat Peringatan II	44	3	47	32	1	33	-30%	*Warning Letter II*
Surat Peringatan III	48	6	54	27	1	28	-48%	*Warning Letter III*
Teguran Tertulis	105	14	119	28	-	28	-76%	*Written Reprimand*
Teguran Lisan	20	2	22	59	6	65	195%	*Oral Reprimands*
Jumlah	**370**	**57**	**427**	**246**	**18**	**264**	**-262%**	**Total**

Kesejahteraan Pegawai

Realisasi Biaya Tenaga Kerja per 31 Desember 2019 sebesar Rp774.846.738.820,- , beberapa kebijakan yang mengakibatkan peningkatan Biaya Tenaga Kerja Tahun 2019 antara lain :

1) Kebijakan Penyempurnaan Struktur Penghasilan Pegawai
   Komponen Penghasilan dan Tunjangan Pegawai menggunakan pendekatan *Job Grade*, Jabatan dan beban kerja. Perbaikan komponen penghasilan terdiri dari :
   a. Upah Pokok.
   b. Tunjangan Tetap/Tunjangan *Grade.*
   c. Tunjangan Jabatan Struktural.
   d. Tunjangan Perumahan.
   e. Tunjangan Beban Kerja.
   f. Tunjangan Komunikasi.

   Seluruh Komponen Penghasilan dan Tunjangan diperhitungkan dan terintegrasi kedalam sistem *Payroll* (Aplikasi ARMES).

2) Pemenuhan Kewajiban Imbalan Pasca PSAK 24
   Bank Papua telah melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 (Asuransi) untuk Pengelolaan Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Pegawai melalui kerjasama dengan Asuransi Manulife dengan penempatan dana awal sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah).

Employee Welfare

Realization of Labor Costs as of December 31, 2019 amounting to Rp774,846,738,820, -, several policies that resulted in an increase in Labor Costs in 2019 include:

1) Policy on Improvement of Employee Income Structure
   Income and Employee Benefits Components use the Job Grade, Job Position and Workload approach. Revised components of income consist of:
   a. Basic Wage.
   b. Fixed Allowances / Grade Allowances.
   c. Structural Position Allowances.
   d. Housing Allowances.
   e. Workload Allowances.
   f. Communication Allowance.

   All components of income and benefits are calculated and integrated into the Payroll system (ARMES application).

2) Fulfillment of Post PSAK Reward 24
   Bank Papua has collaborated with a 3rd party (Insurance) for the Management of the End of Employee Service Award through collaboration with Manulife Insurance by placing an initial fund of Rp155,000,000,000 (one hundred fifty-five billion rupiah).

3) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan mengikutkan Pegawai yang diangkat terhitung mulai Tahun 2018 melalui kerjasama pengelolaan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI.

Hubungan Industrial

Bank Papua berupaya memenuhi hak pegawai dengan memberikan kebebasan bagi setiap pegawai untuk bergabung dalam serikat pekerja. Hal ini merefleksikan kepatuhan Bank Papua dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang menjamin kebebasan semua pegawai untuk masuk dalam organisasi pegawai yang dikelola profesional sebagai sarana penghubung antara pegawai dan Perusahaan.

Serikat pekerja Bank Papua juga telah menghasilkan produk berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban pegawai kepada Perseroan dan sebaliknya. Dokumen PKB mengikat pihak Manajemen Perseroan dan Serikat Pegawai Bank Papua.

Rencana Pengembangan Manajemen Modal Manusia Tahun 2020

Kesiapan *Human Capital* yang matang dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai yang akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja usaha Bank Papua.

Dengan meningkatkan pengembangan jaringan bisnis Bank Papua, maka kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) baik dari sisi kuantitas tanpa mengabaikan kualitasnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut dilakukan sistem rekrutmen terhadap *Human Capital* Bank, dengan menetapkan standar perekrutan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Program Perekrutan yang dilakukan meliputi :

a. Rekrutmen Program *Officer Development Program* (ODP) dan Program penerimaan Biasa/Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).

Kebutuhan terkait pemenuhan pegawai baru Bank Papua akan disesuaikan dengan jumlah permintaan oleh seluruh unit kerja maupun penambahan jaringan kantor.

3) *Defined Contribution Pension Program (PPIP) by involving the appointed Employees starting in 2018 through collaborative management with the BNI Financial Institution Pension Fund (DPLK).*

Industrial Relations

Bank Papua seeks to fulfill the rights of employees by giving every employee the freedom to join a trade union. This reflects Bank Papua's compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions, which guarantees the freedom of all employees to enter professionally managed employee organizations as a means of liaising between employees and the Company.

The Bank Papua trade union has also produced a product in the form of a Collective Labor Agreement (CLA) which regulates employee rights and obligations to the Company and vice versa. The PKB document is binding on the Management of the Company and the Bank Papua Employees Union.

Human Capital Management Development Plan for 2020

A mature Human Capital readiness with a better educational background will have an impact on improving employee performance which will have a positive impact on improving the business performance of Bank Papua.

By increasing the development of Bank Papua's business network, the need for Human Resources (Human Capital) both in terms of quantity without ignoring quality is very much needed. Therefore, to support this, a recruitment system for the Bank Human Capital is carried out, by setting recruitment standards in accordance with applicable regulations.

1. Recruitment programs include:

a. The Officer Development Program (ODP) Recruitment Program and the Regular Time / Employee Contract Program (PKWT) recruitment program.

Needs related to the fulfillment of Bank Papua's new employees will be adjusted to the number of requests by all work units as well as the addition of office networks.

b. Program Ikatan Dinas
Untuk memperoleh *Human Capital* berkualitas, maka dilakukan program Rekrutment Ikatan Dinas sekaligus menjalin hubungan kemitraan antara Bank dengan masyarakat dan Lembaga Masyarakat (seperti perguruan tinggi) dalam rangka peningkatan pelayanan, serta dapat memacu masyarakat untuk lebih berprestasi disemua bidang ilmu pendidikan, ikatan Dinas difokuskan pada mahasiswa berprestasi melalui kerjasama dengan Universitas Negeri maupun Swasta baik di wilayah Papua maupun di luar Papua dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dengan prestasi akademik yang baik, sehat secara fisik dan miliki keinginan untuk mengembangkan diri.

c. Pemberian Beasiswa kepada pegawai potensial dan memenuhi kualifikasi.

2. Program Implementasi Budaya Kerja

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bank Papua telah memiliki 7 (tujuh) nilai-nilai dasar yang menjadi nilai inti dari Budaya Kerja Bank Papua, yaitu :Melayani, Efisiensi, Responsif, Kewirausahaan, Asas Manfaat, Risiko Yang Diperhitungkan dan Kerjasama, serta VISI Layanan Bank Papua yaitu : "memberikan Layanan yang Cepat, Akurat, Mudah, Aman dan Ramah agar menjadi Bank Pilihan Masyarakat".

Maka secara berkala dan berkesinambungan akan dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Standar layanan secara menyeluruh di seluruh cabang untuk mendukung program Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk implementasi Budaya Kerja, maka dalam penerapannya serta untuk mengefektifkan transformasi Budaya Kerja, maka dianggap perlu untuk pengembangan dan pemberdayaan *Change Agent* (Agen Perubahan) sehingga perlu dibuat pedoman pengelolaan/peraturan mengenai *Change Agent* dan standar layanan. Dengan demikian secara berkala akan dilakukan forum diskusi untuk evaluasi program masing-masing.

3. Program Pendidikan & Pelatihan

Sedangkan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, pegawai (*Human Resources*) Bank Papua selalu dilibatkan dalam pendidikan atau pelatihan Internal maupun Ekstern yang diprogramkan secara tahunan maupun triwulanan. Program pendidikan maupun pelatihan ini disesuaikan dengan memperhatikan Gap pada matriks kompetensi pegawai per jabatan serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada pegawai meliputi :

b. Service Ties Program
To obtain quality Human Capital, a Service Association Recruitment program is carried out while establishing a partnership relationship between the Bank and the community and Community Institutions (such as tertiary institutions) in order to improve services, and be able to spur the public to excel in all fields of education, Office ties are focused on students achievers through collaboration with State and Private Universities both in Papua and outside Papua by prioritizing Papuan Native People (OAP) with good academic achievement, physically fit and have the desire to develop themselves.

c. Giving Scholarships to potential employees and meeting qualifications.

2. Work Culture Implementation Program

In order to achieve its vision and mission, Bank Papua has 7 (seven) basic values which are the core values of Bank Papua Work Culture, namely: Serve, Efficiency, Responsiveness, Entrepreneurship, Benefit Principle, Calculated Risks and Cooperation, and VISION Bank Papua services, namely: "provide services that are fast, accurate, easy, safe and friendly in order to become the Community's Choice Bank".

Then periodically and continuously monitoring and evaluation of the implementation of service standards in all branches will be carried out to support the Human Resources Management program. For the implementation of Work Culture, in its application and to make the transformation of Work Culture effective, it is deemed necessary to develop and empower Change Agent so that management guidelines / regulations regarding Change Agent and service standards need to be made. Thus a discussion forum will be held regularly for the evaluation of each program.

3. Education &** Training **Programs

Whereas in an effort to improve competence, employees (Human Resources) of Bank Papua are always involved in internal or external education or training, which are programmed on an annual or quarterly basis. The education and training program is adjusted by taking into account gaps in the employee competency matrix per position and in accordance with company needs. Education and training programs provided to employees include:

1. Pendidikan Manajemen berbasis kompetensi, yang harus dimiliki semua level pegawai dan dikembangkan terus menerus.
2. Diklat kepemimpinan karir, yang harus dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan pekerjaan posisi/jabatan.
3. Diklat teknis, yang harus dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan pekerjaan/fungsional.
4. Diklat penyegaran, merupakan kompetensi umum yang harus dimiliki posisi/jabatan tertentu.

Beberapa langkah strategis terkait pendidikan dan latihan bagi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua :

a. *e-Learning*
   Dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki melalui Internet Bank Papua, Divisi Manajemen Modal Manusia bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi dengan mengoptimalkan pembelajaran menggunakan fasilitas *e-Learning*.
b. Melakukan *Assessment* pegawai untuk mengetahui level kompetensi masing-masing pegawai. Hasil *Assessment* pegawai akan digunakan untuk menyusun analisa kebutuhan pendidikan pegawai atau *Training Need Analysis* (TNA) secara tepat sehingga tujuan peningkatan kompetensi pegawai dapat tercapai secara efektif.
c. Melakukan proses standarisasi mutu diklat Bank Papua sesuai standar ISO. Dengan adanya standarisasi mutu diklat maka diharapkan sistem pelaksanaan diklat Bank Papua kedepan semakin baik, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi diklat.

Agar terciptanya tenaga-tenaga *Human Resources* yang handal dan kompeten dalam mempertahankan dan mengembangkan Bank Papua. Bank Papua dalam melaksanakan program diklat tidak hanya mengupayakan peningkatan kompetensi, namun juga mendorong program karir pegawai melalui jalur pendidikan berjenjang melalui program *Staff Development Program* (SDP) dan *Management Development Program* (MDP) yang akan dilakukan setiap tahun.

Tahun 2019 pemanfaatan tenaga kerja asing belum diperlukan, karena Bank Papua masih membutuhkan tenaga kerja Indonesia dan masih memerlukan penyempurnaan sumber daya manusia (*Human Resources*) dengan sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia, Mengukur Kompetensi Pegawai dan Analisa & Evaluasi Jabatan berdasarkan beban kerja.

1. Competency-based Management Education, which must be possessed by all levels of employees and is continuously developed.
2. Career leadership training, which must be owned by employees adjusted to the job position / position.
3. Technical training, which must be owned by employees tailored to the job / functional.
4. Refresher training, is a general competency that must be owned by certain positions / positions.

Some strategic steps related to education and training for PT. Bank Pembangunan Daerah Papua :

a. e-Learning
   By utilizing technology owned through the Bank Papua Internet, the Human Capital Management Division collaborates with the Information Technology Division by optimizing learning using e-Learning facilities.
b. Conduct employee assessments to determine the level of competence of each employee. Employee Assessment results will be used to compile an analysis of employee education needs or Training Need Analysis (TNA) appropriately so that the goal of increasing employee competency can be effectively achieved.
c. Carry out a standardization process for the training of Bank Papua in accordance with ISO standards. With the standardization of education and training quality, it is expected that the implementation system of Bank Papua training will be better in the future, starting from the planning up to the training evaluation.

In order to create reliable and competent Human Resources personnel in maintaining and developing Bank Papua. Bank Papua in implementing the education and training program not only strives to increase competency, but also encourages employee career programs through the level of education through the Staff Development Program (SDP) and Management Development Program (MDP) programs that will be conducted every year.

In 2019, the use of foreign workers is not yet needed, because the Bank Papua still needs Indonesian workers and still needs improvement of human resources with the system of Human Resource Planning, Measuring Employee Competency and Position Analysis & Evaluation based on workload.

Teknologi Informasi

Information Technology

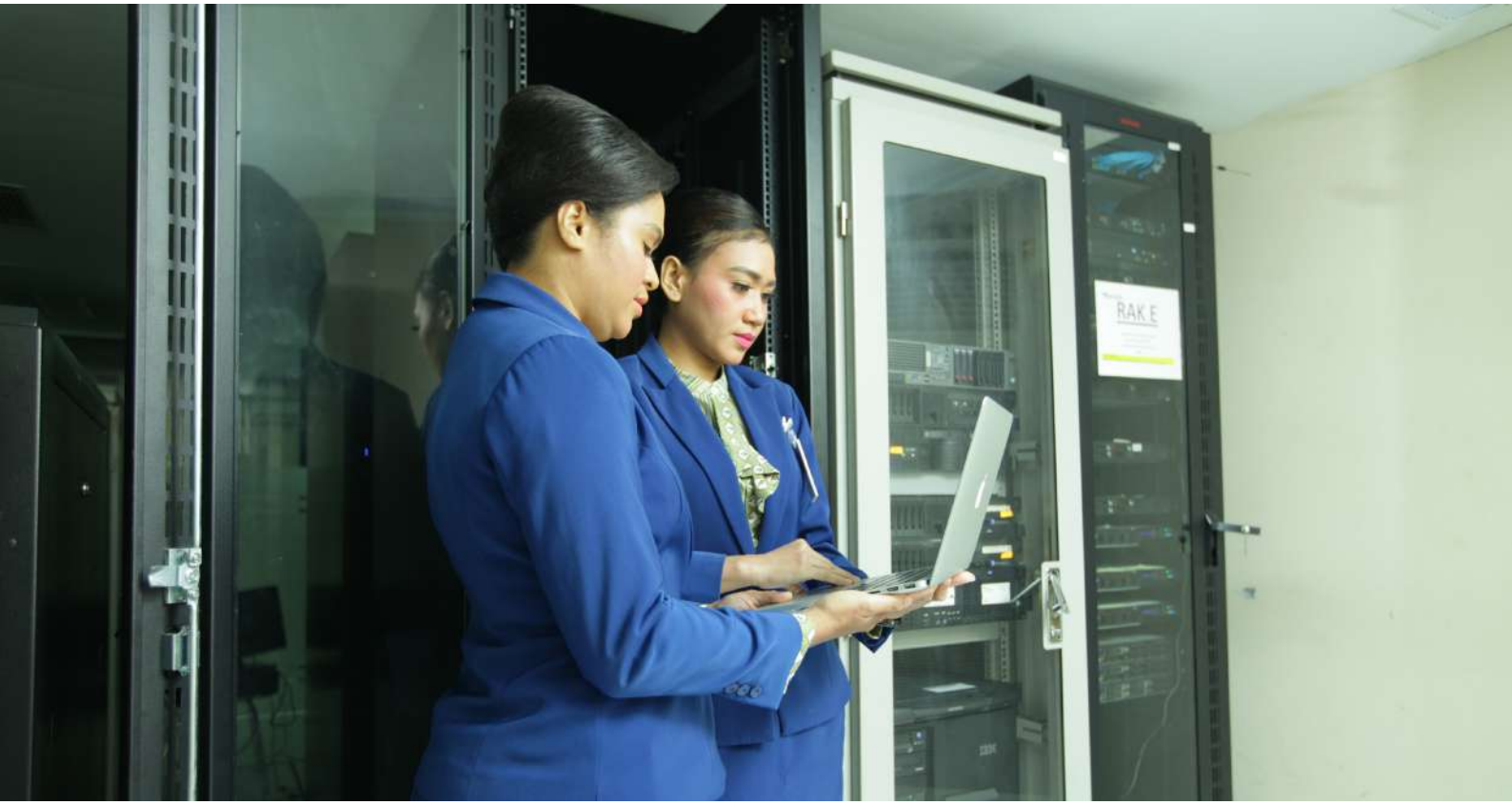

Dalam era yang sangat pesat akan perkembangan teknologi, Bank Papua senantiasa memaksimalkan kapasitas Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap Bank Papua dalam rangka melayani nasabah. Tingkat keandalan Teknologi Informasi (TI) menjadi faktor penting karena bersangkutan erat pada tingkat kemudahan nasabah dalam mengakses produk dan layanan Bank Papua. Oleh karena itu, Bank Papua telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan keandalan sistem Teknologi Informasi (TI) internal yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang handal, akan memberikan dukungan kelancaran operasional sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan dan *loyalitas* nasabah.

In the era of very rapid technological developments, Bank Papua always maximizes the capacity of Information Technology (IT) to provide maximum support to Bank Papua in order to serve customers. The level of reliability of Information Technology (IT) is an important factor because it is closely related to the level of customer convenience in accessing Bank Papua products and services. Therefore, Bank Papua has implemented various programs to improve the reliability of the internal Information Technology (IT) system that is supported by competent Human Resources. With a reliable management of Information Technology (IT), it will provide operational support so as to improve service quality that can create customer satisfaction and loyalty.

Kebijakan Teknologi Informasi & *Management Information System*

Peranan Teknologi dan Informasi ini sangat penting dalam rangka pengembangan operasional Bank, karena itu dalam melayani kebutuhan nasabah/debiturnya harus disesuaikan dengan prilaku nasabah/debitur saat ini, karena itu dalam mengklasifikasikan nasabahnya perlu dilakukan pemetaan yang signifikan antara kebutuhan yang diminta dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh Bank Papua, yang meliputi :

- Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah seperti Pengembangan dan memperluas cakupan *Biller* Lokal/Daerah (*payment point*) baik pada Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Menyempurnakan aplikasi *payment point*.
- Penggantian *Core Banking* dan Pembentukan/Pembangunan Data Center.
- Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan perusahaan korporasi, menengah dan kecil.
- Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan nasabah/debitur umum yang meliputi nasabah/debitur kelas atas, menengah dan bawah.
- Pemenuhan untuk kebutuhan internal Bank Papua yang akan dipergunakan untuk MIS yang mampu menelaah perkembangan pencapaian kinerja, pengukuran risiko, serta audit yang berbasis resiko yaitu dalam bentuk *Warehouse* database.
- Mengoptimalisasi *helpdesk* dengan memberikan informasi dengan cepat atas keluhan nasabah
- Fokus terhadap pengembangan Laku Pandai.
- Pemenuhan teknologi informasi guna ikut serta dalam program pemerintah terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) dibawah koordinasi Direktur Operasional dengan Pemimpin Divisi TI sebagai pelaksana harian yang dibantu oleh 5 Pemimpin Departemen terdiri dari Departemen *Core Application*, *Departemen Non Core Application* dan *Switching*, Departemen *Technical Support & Infastructure*, Departemen Operasional, Departemen *Quality Assurance*.

Information Technology Policy & Management Information System

The role of Information and Technology is very important in the context of developing the Bank's operations, therefore in serving the needs of customers / debtors must be adjusted to the behavior of customers / debtors at this time, therefore in classifying customers it needs to do a significant mapping between the requirements requested and the information technology they have by the Bank Papua, which includes:

- *Fulfillment of information technology for the needs of the Regional Government such as the development and expanding the coverage of Local / Regional Billers (payment points) both in the Province, Regency / Municipal.*
- *Perfect the payment point application.*
- *Replacement of Core Banking and Establishment/ Development of Data Centers.*
- *Fulfillment of information technology for the needs of corporate, medium and small companies.*
- *Fulfillment of information technology for the needs of general customers / debtors including upper, middle and lower class customers / debtors.*
- *Fulfillment for Bank Papua internal needs that will be used for MIS that is able to review the development of performance achievements, risk measurement, and risk-based audits in the form of a Warehouse database.*
- *Optimizing helpdesk by providing information quickly on customer complaints*
- *Focus on developing Branchless banking.*
- *Fulfillment of information technology to participate in government programs related to the National Non-Cash Movement (GNNT).*

Information Technology Management Structure

Information Technology (IT) Management under the coordination of the Banking Operation Director with the Head of the IT Division as a daily implementer assisted by 5 Department Leaders consisting of the Core Application Department, the Non Core Application and Switching Department, the Technical Support & Infrastructure Department, the Operations Department, the Quality Assurance Department.

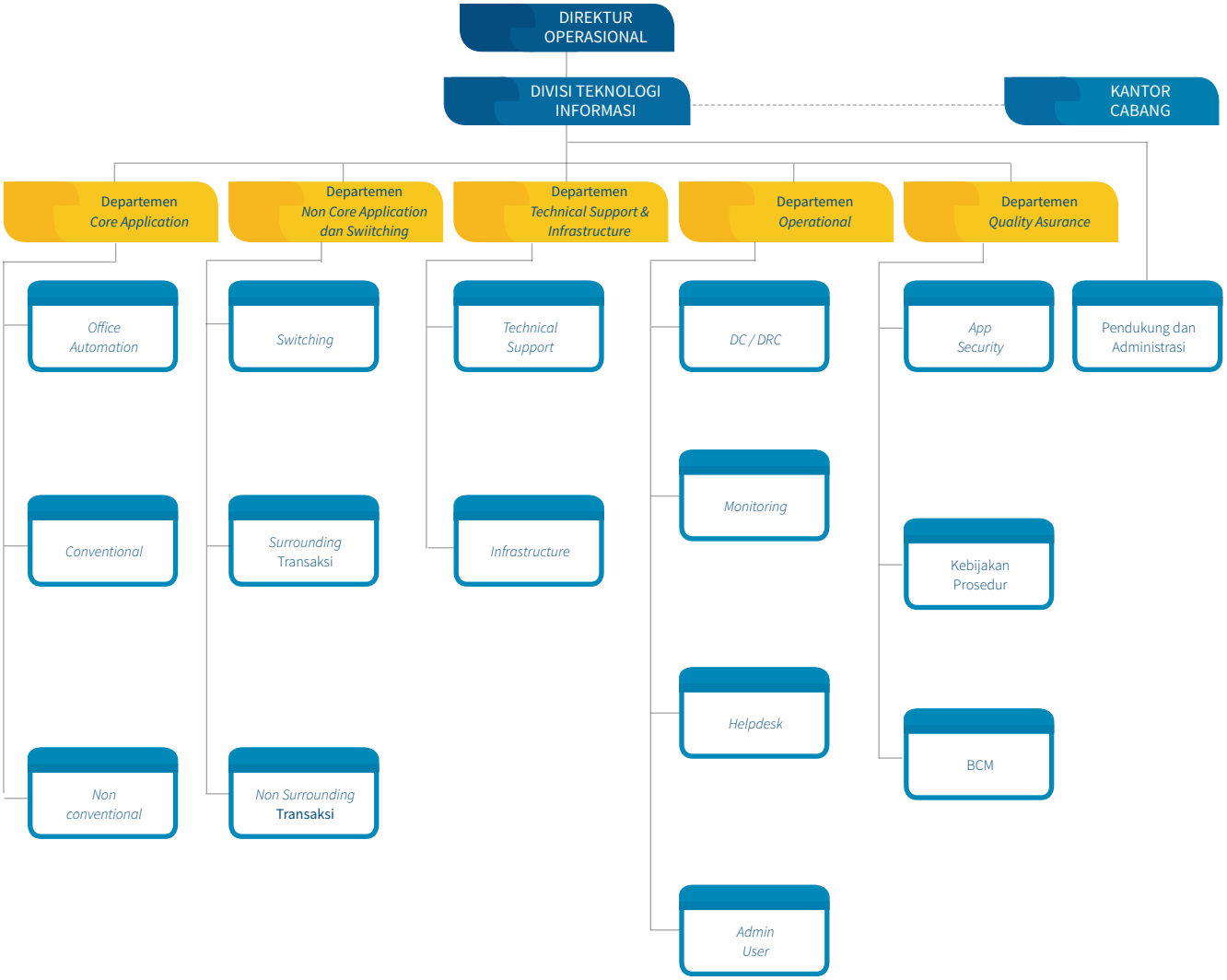

Keterangan :
——— : Garis Komando
- - - - - - : Garis Koordinasi

Profil Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Profile of Information Technology Division Leader

Andreas Didik Wijayanta, SE

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Information Technology Division Leader

Periode Jabatan *Periode Jabatan*	20 Januari 2017 - sekarang	*January 20, 2017 - now*
Usia *Age*	47 tahun. Lahir di Sleman pada tanggal 24 September 1972.	*47 years old. Born in Sleman on September 24, 1972.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*
Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Manokwari tahun 2001.	*Obtained a Bachelor of Economics degree at Manokwari State University in 2001.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 27 Februari 2019, Roadmap Bank 4.0 dan Era *Fintech* Strategi dan *Leadership* Menghadapi Revolusi. • 03 Agustus 2019, *workshop* kerjasama bank & *fintech* di era *digital*isasi ekonomi. • 20 September 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Cabang (SESPIBANK) Angkatan 71.	• *February 27, 2019, Bank 4.0 Roadmap and Era of Fintech Strategy and Leadership to Face the Revolution.* • *August 3, 2019, a workshop on bank & fintech cooperation in the era of economic digitalization.* • *September 20, 2019, School of Staff and Branch Leaders (SESPIBANK) Batch 71.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kaimana Bank Papua sesuai SK No. 73/ KEPEG/III/2016 tanggal 01 Maret 2016.	*Previously he served as the Kaimana Bank Papua Branch Manager in accordance with Decree No. 73 / KEPEG / III / 2016 dated March 1, 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 22 Februari 2014.	*4th Level Risk Management of BSMR Providers on February 22, 2014.*

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Teknologi Informasi oleh Bank Umum dapat diuraikan beberapa aturan terkait Penerapan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. Pasal 7, yakni (1) Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). (2) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
   - Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
   - Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
   - Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
   - Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
   - Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
   - Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
   - Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
   - Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; serta
   - Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

2. Pasal 8 yakni (1) Bank wajib memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi secara konsisten dan berkesinambungan. (2) Kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling sedikit meliputi aspek;

Duties and Responsibilities of the Information Technology Division

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 38 / POJK.03 / 2016 concerning the Application of Risk Management in Information Technology by Commercial Banks a number of rules relating to the Application of Information Technology can be described as follows:

1. *Article 7, namely (1) Banks are required to have an Information Technology Steering Committee. (2) The Information Technology Steering Committee as referred to in paragraph (1) is responsible for providing recommendations to the Board of Director at least in relation to:*
   - *Information Technology Strategic Plan that is in line with the Bank's strategic business plan;*
   - *Formulation of the main Information Technology policies, standards and procedures;*
   - *Conformity between the approved Information Technology project and the Information Technology Strategic Plan;*
   - *Conformity between the implementation of Information Technology projects with agreed project plans (project charter);*
   - *Conformity between Information Technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities;*
   - *Effectiveness of steps in minimizing the risk of bank investment in the Information Technology sector so that the Bank's investment in the Information Technology sector contributes to the achievement of the Bank's business goals;*
   - *Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance;*
   - *Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the work units of users and providers of Information Technology effectively, efficiently and on time; and*
   - *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.*
2. *Article 8, namely (1) Banks are required to have policies, standards and procedures for the use of Information Technology as referred to in Article 2 paragraph (2) letter b and are required to consistently and continuously implement policies, standards and procedures for using Information Technology. (2) Policies, standards and procedures for using Information Technology at least include aspects;*

- Manajemen;
- Pengembangan dan Pengadaan;
- Operasional Teknologi Informasi;
- Jaringan Komunikasi;
- Pengamanan Informasi;
- Rencana Pemulihan Bencana;
- Layanan Perbankan Elektronik;
- Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi; serta
- Penyediaan Jasa Teknologi Informasi oleh Bank.

- *Management;*
- *Development and Procurement;*
- *Information Technology Operations;*
- *Communication network;*
- *Information Security;*
- *Disaster Recovery Plan;*
- *Electronic Banking Services;*
- *Use of Information Technology Service Providers; and*
- *Provision of Information Technology Services by Banks.*

Secara departemen tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : *The department's duties and functions are as follows:*

Departemen	Unit	Fungsi	*Function*	*Unit*	*Department*
Core Application	Office Automation	Aplikasi automation Programmer Implemen/Dokumen	*Automation application* *Programmer* *Implications / Documents*	*Office Automation*	*Core Application*
	Conventional	Aplikasi Conventional Database Adminstrator *Programer* Implemen/Dokumen	*Conventional Application* *Database administrator* *Programmer* *Implications / Documents*	*Conventional*	
	Non Conventional	Aplikai Non Conventional Programmer Implemen/Dokumen	*Non Conventional Application* *Programmer* *Implications / Documents*	*Non Conventional*	
Non *Core* Application dan Switching	Switching	Aplikasi Automation *Programer* Implemen/Dokumen	*Application Automation* *Programmer* *Implications / Documents*	*Switching*	*Non Core Application and Switching*
	Souranding Transaksi	Aplikasi Conventional Database Administrator *Programer* Implemen/Dokumen	*Conventional Application* *Database Administrator* *Programmer* *Implications / Documents*	*Souranding Transaction*	
	Non Souranding Transaksi	*Programer* Aplikasi Automation Implemen/Dokumen	*Programmer* *Application Automation* *Implications / Documents*	*Non Souranding Transaction*	
Technical Support & Infrastruktur	Technical Support	Technical Support Hardwar Support Software Support Provide Support Support IT Cabang	*Technical Support* *Hardwar Support* *Software Support* *Provide Support* *Support IT Branch*	*Technical Support*	*Technical Support & Infrastructure*
	Infrastruktur	Analis Infrastruktur Adm. *Network* Adm. Monitor Adm. IT *Security*	*Infrastructure Analyst* *Adm. Network* *Adm. Monitor* *Adm. IT Security*	*Infrastructure*	
Operasional	DC/DRC	DC/DRC	*DC / DRC*	*DC / DRC*	*Operations*
	Monitoring	Mon. e *Channel* Mon. Server/DB Handling Complaint	*Mon. e Channel* *Mon. Server / DB* *Handling Complaint*	*Monitoring*	
	Helpdesk	Problem Problem Solver Distribution Problem	*Problem* *Problem Solver* *Distribution Problem*	*Helpdesk*	
	Adm. User			*Adm. User*	
Quality Assurance	App. *Security*	App. *Core* App. Surrounding Jarkom Pelaporan	*App. Core* *App. Surrounding* *Jarkom* *Reporting*	*App. Security*	*Quality Assurance*
	Kebijakan Prosedur	Kebijakan Internal Kebijakan Eksternal	*Internal Policy* *External Policy*	*Procedure Policy*	
	BCM	Kebijakan dan Prosedur Recovery *Management*	*Policies and Procedures* *Recovery Management*	*BCM*	
Pendukung & Administrasi		Administrasi pelaporan (agendaris) Pendukung internal & eksternal	*Administration reporting (agenda)* *Internal & external support*		*Support & Administration*

Program Kerja Divisi Teknologi Informasi (TI) tahun 2019

Pengembangan *delivery channel* terus dikembangkan sampai dengan akhir tahun 2019 berupa fitur-fitur *delivery channel* sebagai berikut :

1. Layanan CMS Kasda Kabupaten Nabire.
2. Layanan CMS Kasda Kabupaten Waropen.
3. Layanan CMS Kasda Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. Layanan CMS Kasda Kabupaten Supiori.
5. Layanan CMS Kasda Kabupaten Biak.
6. Layanan CMS Kasda Kabupaten Boven Digoel.
7. Layanan CMS Kasda Kabupaten Paniai.
8. Layanan CMS Up*grade* Provinsi Papua versi 4.
9. Layanan CMS Up*grade* Provinsi Jayapura versi 3.
10. Layanan CMS Up*grade* Provinsi Asmat versi 3.
11. PBB *Online* Pemda Kabupaten Nabire.
12. PBB *Online* Pemda Kabupaten Biak.
13. PBB *Online* Manokwari.
14. Layanan CMS Kasda Kabupaten Jayapura.
15. CMS Kasda Pendapatan Provinsi Papua.
16. CMS Kasda Sarmi, CMS Kasda Merauke
17. Penambahan perangkat dan fitur ATM dan CDM.
18. Up*grade SMS Banking* versi Aplikasi (Android).
19. Up*grade* ATM ke standard NSICCS.
20. Pengembangan *Mobile Banking*.
21. NPG (*National Payment Gateway*) sebagai *Issuer*.
22. SPAN.
23. FLPP *Host to Host.*
24. Kredit Pegawai Afiliasi Tabungan.
25. *Implementasi Up*grade 102 Mesin ATM NSICCS.
26. Implementasi Mesin EDC Berbasis NSICCS.
27. Implementasi *New E-Dapem*.
28. Restribusi Pasar Hamadi.
29. SPAN BO II.
30. *Up*grade Aplikasi PBB Kota untuk Tahun 1980 s/d 2009.
31. *Payment* RSUD Abepura.
32. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman, serta Bank Papua dapat memenuhi perkembangan kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan ini tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis Bank Papua, sehingga akan memberikan suatu keunggulan (*competitive*) dalam bentuk penyediaan informasi dan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
33. Selanjutnya, untuk memanfaatkan keragaman data nasabah, Bank Papua terus mengimplementasikan alat-alat bantu (tools) untuk memungkinkan dilakukannya analisa atas data yang diambil dari data *Warehouse* kami melalui *Management Information System* (MIS). Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk *cross-selling* serta kustomisasi produk dan layanan.

Information Technology (IT) Division Work Program in 2019

Delivery channel development continues to be developed until the end of 2019 in the form of delivery channel features as follows:

1. *CMS Kasda Service of Nabire Regency.*
2. *CMS Kasda Service of Waropen Regency.*
3. *CMS Kasda Service of Yapen Island Regency.*
4. *CMS Kasda Service of Supiori Regency.*
5. *CMS Kasda Service of Biak Regency.*
6. *CMS Kasda Service of Boven Digoel Regency.*
7. *CMS Kasda Service of Paniai Regency.*
8. *Upgrade CMS Service of Papua Province version 4.*
9. *Upgrade CMS Service of Jayapura Province version 3.*
10. *Upgrade CMS Service of Asmat Province version 3.*
11. *PBB Online of Nabire Regency Government.*
12. *PBB Online of Biak Regency Government.*
13. *PBB Online of Manokwari.*
14. *CMS Kasda services of Jayapura Regency.*
15. *CMS Kasda Revenue of the Province of Papua.*
16. *CMS Kasda Sarmi, CMS Kasda Merauke.*
17. *Adding ATM and CDM features and devices.*
18. *Upgrade SMS Banking Application Version (Android).*
19. *Upgrade ATM to NSICCS standard.*
20. *Development of Mobile Banking.*
21. *NPG (National Payment Gateway) as Issuer.*
22. *SPAN.*
23. *FLPP Host to Host.*
24. *Savings Affiliation Employee Loans.*
25. *Implementation of Upgrading 102 NSICCS ATM Machines.*
26. *Implementation of NSICCS-Based EDC Machines.*
27. *Implementation of New E-Dapem.*
28. *Hamadi Market Restribution.*
29. *SPAN BO II.*
30. *Upgrading PBB city Applications for 1980 to 2009.*
31. *Payment of Abepura Hospital.*
32. *This is to meet the needs of customers that continue to grow along with the times, and Bank Papua can meet the development needs of customers. Meeting these needs is inseparable from the use of appropriate Information Technology that can drive the growth of the Bank Papua business, so that it will provide a competitive advantage in the form of providing information and services that are fast, accurate and accurate..*
33. *Furthermore, to utilize the diversity of customer data, Bank Papua continues to implement tools to enable analysis of data taken from our Data Warehouse through the Management Information System (MIS). This information can be used for various purposes, including cross-selling as well as product and service customization.*

Pengembangan Teknologi Informasi Bank di Tahun 2019

Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Bank Papua yang telah diterapkan tahun 2019, antara lain:

1. Implementasi VICON untuk koordinasi Kantor Pusat dengan seluruh Kantor Cabang Bank Papua.
2. *Implementasi Cloud Server* untuk dukungan layanan PDAM Merauke.
3. *Implementasi Cloud Server* untuk dukungan layanan *Development* Pengembangan Aplikasi Non *Core*.
4. Instalasi *Host to Host* (Kantor Gubernur Provinsi Papua to DC Jayapura Kantor Pusat Bank Papua untuk Layanan CMS Biro Keuangan Provinsi Papua)
5. Instalasi *Host to Host* (DC ASKRINDO) to DC Bank Papua Sentul untuk Layanan FLPP.

Manfaat Pengembangan bagi Teknologi Informasi (TI)

Untuk memperluas jaringan usaha bisnis Bank Papua sampai ke pelosok-pelosok pedalaman Papua dan di luar Papua yang didukung dengan infrastruktur sistem Teknologi Informasi (TI) yang handal untuk mempercepat dan merangsang pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah di Papua.

Pengembangan SDM di Bidang Teknologi Informasi (TI)

Bank Papua meyakini bahwa sistem Teknologi Informasi (TI) yang berjalan optimal hanya dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu, Bank Papua melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pelaksanaan sistem Teknologi Informasi (TI) demi kelancaran proses bisnis internal diantaranya:

a. Mengisi personil sesuai susunan struktur organisasi Divisi Teknologi yang baru
b. Memperkuat kemampuan internal untuk kecepatan mengakomodir kebutuhan pelayanan
c. Menyiapkan personil yang cukup dan berkompeten untuk persiapan kemandirian
d. Melakukan sertifikasi dan *training* personil TI, untuk pengembangan kompetensi pegawai

Development of Bank Information Technology in 2019

Development of Bank Papua's Information Technology infrastructure that has been implemented in 2019 includes:

1. *Implementation of VICON to coordinate Head Office with all Bank Papua Branch Offices.*
2. *Implementation of Cloud Server to support PDAM Merauke services.*
3. *Implementation of Cloud Server to support Non-Core Application Development Development services.*
4. *Host to Host Installation (Governor of Papua Province to DC Jayapura Office Central Bank Papua Office for CMS Services of the Papua Province Finance Bureau.*
5. *Host to Host (DC ASKRINDO) to DC Bank Papua Sentul Installation for FLPP Services.*

Benefits of Development for Information Technology (IT)

To expand the business network of the Bank Papua to remote areas of Papua and outside Papua, supported by a reliable Information Technology (IT) infrastructure system to accelerate and stimulate the economic growth of small and medium enterprises in Papua.

HR Development in Information Technology (IT)

Bank Papua believes that Information Technology (IT) systems that are running optimally can only be managed by reliable and professional human resources. Therefore, the Bank Papua develops human resources in the field of Information Technology (IT) to support the implementation of Information Technology (IT) systems for smooth internal business processes including:

a. Filling personnel in accordance with the new organizational structure of the Technology Division
b. Strengthen internal capabilities to speed up service needs
c. Prepare sufficient and competent personnel to prepare for independence
d. Conduct certification and training of IT personnel, to develop employee competencies

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Bank di Tahun 2020

Rencana program Pengembangan Teknologi Informasi Bank di Tahun 2020

- Pengadaan Aplikasi *Internet Banking* (Pemda/ *Corporate*).
- Pengembangan Fitur Aplikasi *Mobile Banking.*
- Pengembangan *Virtual Account.*
- Pengembangan Aplikasi SMS Notifikasi dalam pengajuan kredit PNS.
- Pengembangan Fitur ATM & CDM.
- EDC GPN *Acquirer.*
- Kerjasama dengan *Fintech.*
- Pengembangan Fitur SMS.
- Pengembangan Laku Pandai.
- PSAK 71.
- PSAK 73.
- Sertifikasi Mesin ATM & CDM ke NSICCS.
- CMS Kasda *Online* SP2D.
- Pengembangan/ up*grade* CBS Olibs 724 Versi 6 .
- *Renewal Fortitage* (*Firewall*) Bank Papua.
- Pengembangan & Pengadaan Data *Recovery Center* Jayapura.
- Implementasi Aplikasi *Project Management.*
- Pembaharuan & Optimalisasi Perangkat Keras (Router, Modem & Perangkat Utilitas lainnya).
- Peremajaan Pengkabelan LAN Gedung Kantor Pusat.
- Penambahan Fitur Simulasi Kredit pada *Mobile* & atau Internet (web).
- *Management Project* Aplikasi *Software Quality Assurance* (SQA).

Selain itu dikembangkan pula, Program pengembangan Teknologi Informasi (TI) Tahun 2020 yaitu :

1) *Control* dan *Capability Improvement*
   Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian Internal dan Kapabilitas Sumber Daya Teknologi Informasi yang berguna untuk memperkuat fondasi sebagai berikut:
   a. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi (baik yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang).
   b. Pelaksanaan *meeting* rutin (IT SC)
   c. Pelaksanaan Teknologi Informasi Audit (tiga tahunan) dan Penetration *Test* Jaringan DC/DRC.
   d. Pembaharuan infrastruktur Teknologi Informasi di kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
   e. Pengadaan Aplikasi *Internet Banking* (PEMDA)/ *Corporate*.
   f. Pengembangan dan pengadaan Data *Warehouse* dan *Business Intelligence*.
   g. Pelaksanaan program *awareness* terkait *IT Security*.

Bank's Information Technology (IT) Development Plan for 2020

The Bank's Information Technology Development program plan for 2020

- *Procurement of Internet Banking Applications (Pemda/ Corporate).*
- *Development of Mobile Banking Application Features.*
- *Virtual Account Development..*
- *Development of SMS Notification Application in applying for PNS Loan.*
- *Development of ATM & CDM Features.*
- *EDC GPN Acquirer.*
- *Collaboration with Fintech.*
- *SMS Feature Development.*
- *Development of Branchless banking.*
- *PSAK 71.*
- *PSAK 73.*
- *ATM & CDM Machine Certification to NSICCS.*
- *Kasda Online SP2D CMS.*
- *Development / upgrade CBS Olibs 724 Version 6.*
- *Bank Papua Renewal Fortitage (Firewall).*
- *Development & Procurement of Jayapura Data Recovery Center.*
- *Implementation of Project Management Applications.*
- *Hardware Updates & Optimization (Routers, Modems & Other Utility Devices).*
- *Improvement of LAN Cabling for Head Office Building.*
- *Added Credit Simulation Features on Mobile & or Internet (web)*
- *Project Management Software Application Quality Assurance (SQA).*

In addition, the 2020 Information Technology (IT) development program was also developed, namely:

1) *Control and Capability Improvement*
   Improved Governance, Internal Control and Capability of Information Technology Resources that are useful for strengthening the foundations as follows:
   a. *Human Resources Training and Development in the field of Information Technology (both those in the Head Office and Branch Offices).*
   b. *Carrying out routine meetings (IT SC)*
   c. *Implementation of Audit Information Technology (quarterly) and Penetration Test for DC / DRC Networks.*
   d. *Information Technology infrastructure renewal at Head Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices and Cash Offices.*
   e. *Procurement of Internet Banking Application (PEMDA) / Corporate.*
   f. *Development and procurement of Data Warehouse and Business Intelligence.*
   g. *Implementation of awareness programs related to IT*

h. Pengembangan Sistem Informasi RBB.
i. Pengadaan *license* dan instalasi Antivirus untuk Kantor Pusat dan Unit Operasional Bank.
j. Implementasi *Framework* IT-IL.
k. Implementasi aplikasi *Project management*.
l. Pengembangan aplikasi E-Papper.

2) *E-Channel Acceleration*
Proaktif dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan nasabah umum melalui pengembangan *channel* untuk kemudahan dalam bertransaksi, sehingga nasabah dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.
a. Pengembangan Aplikasi Laku Pandai.
b. Penambahan perangkat dan fitur ATM dan CDM.
c. Pengembangan *Virtual Account*.
d. *Implementasi Aplikasi E-Form.*
e. Aplikasi SMS Notifikasi untuk memberikan informasi *pre-approved* dalam pengajuan kredit PNS.
f. Pengembangan Aplikasi E-Tax.
g. Pengembangn Aplikasi e-Restribusi.
h. Penambahan fitur simulasi kredit pada *Mobile Banking* .
i. Pengembangan fitur dan penambahan mesin EDC.
j. Pengembangan Fitur *Cardless.*
k. Implementasi/Pengembangan Aplikasi Pemantauan Likuiditas.
l. Implementasi/ Pengembangan Layanan *E-Statement*
m. Pengembangan otorisasi melalui Pinpad.
n. Penyesuaian aplikasi CBS untuk pemenuhan pengembangan produk bisnis.
o. Sistem personalisasi *inhouse* kartu.
p. Pengadaan layanan *E-Money* dan *E-Wallet (Issuer)*.
q. Monitoring sistem di talavera (DC Pengembangan) *(network, hardware, call remote, aplikasi).*
r. Pengembangan *Mail Server*.
s. Pengadaan aplikasi *Customer Relation Management* (CRM).

3) *Supply Chain Utilization*
Pemanfaatan seluruh infrastruktur Teknologi Informasi yang dimiliki untuk membangun kemitraan dengan seluruh *stakeholder*s yang ada di dalam ekosistem sehingga terjadi timbal balik yang mengutungkan dan saling mendukung secara sinergis melalui Pengadaan aplikasi *Customer Relation Management* (CRM).

4) *Corporate Affirmation* dan *Healthy Growth*
Proaktif dalam menciptakan kemudahan layanan bagi segmen UMKM dan *Corporate* serta menjaga tingkat kesehatan Bank.

Security.
h. Development of the BBP Information System.
i. Antivirus license and installation procurement for the Head Office and Bank Operational Units.
j. Implementation of IT-IL Framework.
k. Implementation of Project management applications.
l. E-Papper application development.

2) E-Channel Acceleration
Proactive in meeting the needs of local governments and general customers through the development of channels for ease of transaction, so that customers can transact anywhere and anytime.
a. Branchless banking Application Development.
b. Addition of ATM and CDM devices and features.
c. Virtual Account Development.
d. Implementation of E-Form Applications.
e. SMS Notification Application to provide pre-approved information on civil servant credit applications.
f. Development of E-Tax Applications.
g. e-Restribution Application Development.
h. Add credit simulation feature to Mobile Banking.
i . Feature development and addition of EDC machines.
j. Cardless Feature Development.
k. Implementation / Development of Liquidity Monitoring Applications.
l. Implementation / Development of E-Statement Services
m. Development of authorizations through Pinpad.
n. Adapt CBS applications to meet business product development.
o. Inhouse card personalization system.
p. Procurement of E-Money and E-Wallet (Issuer) services.
q. Monitoring of systems in talavera (DC Development) (network, hardware, remote calls, applications).
r. Mail Server Development.
s. Procurement of Customer Relationship Management (CRM) application.

3) Supply Chain Utilization
Utilization of the entire Information Technology infrastructure that is owned to build partnerships with all stakeholders in the ecosystem so that reciprocity occurs that fosters and synergically supports each other through the Procurement of Customer Relationship Management (CRM) application.

4) Corporate Affirmation and Healthy Growth
Proactive in creating ease of service for the MSME and Corporate segments as well as maintaining the soundness of the Bank.

- 06 -

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation Report

Fokus dan bersinergi dalam berkarya serta selalu bersemangat dalam memberdayakan potensi bisnis guna menggulirkan roda perekonomian di tanah Papua.

Focus and synergize in the work and always be enthusiastic in empowering business potential in order to roll the wheels of the economy in Papua.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Report

Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua sebagai dasar peningkatan kinerja Bank dengan melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, prosedur operasi, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan.

Bank Papua is committed to implementing GCG principles as the basis for improving the Bank's performance by updating various guidelines, operating procedures, manuals in accordance with changes in applicable laws, transformation programs and the Company's development.

Pernyataan Komitmen Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Bank Papua GCG Commitment Statement

Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yakni Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, *standard operational procedure* (SOP), manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkembangan Perusahaan.

Bank Papua is committed to implementing the principles of Corporate Governance namely Openness, Accountability, Accountability, Independence and Fairness as the basis for improving the performance of the Company by continuously updating various guidelines, standard operational procedures (SOPs), manuals in accordance with changes in legislation applicable, and the development of the Company.

Bank Papua secara berkelanjutan dalam praktek Tata Kelola Perusahaan berupaya untuk melakukan pembenahan pada segala aspek termasuk penyediaan Pedoman Pelaksanaan yang diterapkan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, Bank Papua telah memiliki pedoman pelaksanaan berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate* Governance yang diatur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 101.A/DIR- BPD/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Bank Papua in a sustainable manner in Corporate Governance practices strives to improve all aspects including the provision of Implementation Guidelines that are applied at all levels of the organization. In implementing Good Corporate Governance, Bank Papua has implemented guidelines in the form of Good Corporate Governance (BPP) Corporate Guidelines which are regulated by Board of Director Decree Number: 101.A / DIR-BPD / XI / 2013 dated 29 November 2013.

Untuk mewujudkan dan memperkuat kondisi Bank Papua, Manajemen dari waktu ke waktu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang baik dan benar dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk menjadikan Bank Papua menjadi Bank yang sehat, kuat, unggul dan terpercaya baik ditingkat Lokal, Regional dan Nasional sebagaimana yang terkandung dalam Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

To realize and strengthen the condition of Bank Papua, Management from time to time is committed to continuing to improve the quality of the implementation of Good and Correct Bank Papua Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of organization to make Bank Papua a healthy, strong, superior and reliable both at the Local, Regional and National levels as contained in the Vision and Mission of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

Road Map Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Road Map Tata Kelola Perusahaan Bank Papua merupakan *grand strategy* dan *milstone* implementasi Tata Kelola Perusahaan sampai tahun 2019 menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan

Tahapan *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua adalah sebagai berikut :

GCG Road Map

Bank Papua GCG Road Map is a grand strategy and millstone of GCG implementation until 2019 towards sustainable corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management and corporate social responsibility

Bank Papua GCG Road Map stages are as follows:

Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Bank Papua menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan *sustainable value*, sehingga Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan sehingga Bank Papua mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karenanya, Bank Papua terus berupaya optimal untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai guna mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan dan *prudential banking.*

Disadari bahwa upaya implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua perlu dilakukan secara terarah dan terencana sesuai *standar best practice* atau standar terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Aktualisasi Tata Kelola Perusahaan di Bank Papua dilakukan sejalan dengan ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Papua berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/

Stages of GCG Implementation

The Bank Papua realizes that the application of GCG is a long-term process that will produce sustainable value, so the Bank absolutely needs it to face business competition, increase effectiveness and efficiency in managing resources, maximize corporate value so that the Bank Papua is able to operate and grow sustainably. Therefore, the Bank Papua continues to make optimal efforts to internalize GCG principles into systems and procedures as well as the formation of appropriate behavior to encourage the creation of a culture that upholds professionalism, integrity, service quality and prudential banking.

It is realized that efforts to implement Bank Papua's Corporate Governance need to be directed and planned according to best practice standards or best standards in supporting the achievement of the Company's goals. Actualization of Corporate Governance at Bank Papua is carried out in line with the provisions and requirements related to the implementation of Corporate Governance for Commercial Banks at all levels and levels of the organization. The implementation of Corporate Governance at Bank Papua is guided by the Financial Services

POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua diawali dengan Strategi Implementasi, selanjutnya diikuti tahapan secara berkelanjutan meliputi *Awareness* Tata Kelola Perusahaan, Implementasi Tata Kelola Perusahaan, *Monitoring*, *Assessment* Tata Kelola Perusahaan, serta Pelaporan dan *Disclosure*. Tahapan implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dapat digambarkan sebagai berikut:

Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and with the enactment of this Financial Services Authority Regulation, Bank Indonesia Regulation Number 8/4 / PBI / 2006 dated January 30, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/14 / PBI / 2006 dated October 5, 2006 concerning Implementation of Good Corporate Governance For Commercial Banks is revoked and declared invalid.

Stages of the Implementation of Corporate Governance Bank Papua begins with an Implementation Strategy, followed by ongoing stages including Awareness of Corporate Governance, Implementation of Corporate Governance, Monitoring, Corporate Governance Assessment, and Reporting and Disclosure. The stages of Bank Papua's Corporate Governance implementation can be described as follows:

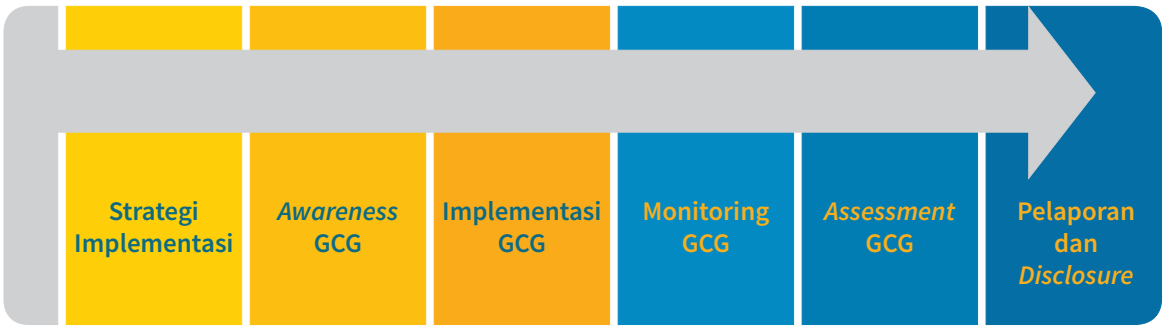

Gambar Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua
Stages of Implementation of GCG in Bank Papua

Strategi Implementasi

Bank Papua menyusun strategi implementasi Tata Kelola Perusahaan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan serta sasaran pengelolaan bank dalam *Business Plan* maupun *Strategic Plan*. Strategi implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua selama tahun 2019 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap hak pemegang saham.
- Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite.
- Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Efektivitas penanganan pengaduan nasabah.
- Peningkatan fungsi kepatuhan.

Implementation Strategy

Bank Papua has developed a strategy for implementing GCG that is consistent and in accordance with the goals and objectives of bank management in both business plans and strategic plans. The Bank GCG implementation strategy in 2019 was implemented with the following initiatives:

- *Protection of shareholder rights.*
- *Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Board of Director and Committees.*
- *Enhancing risk management and internal control functions.-*
- *Effectiveness of handling customer complaints.*
- *Improved compliance function.*

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang tercermin di setiap kegiatan usaha merupakan perwujudan visi Bank Papua untuk menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi Bank Papua untuk menjadi acuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank Papua meyakini bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya Bank Papua dalam mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip TARIF :

- Keterbukaan (*Transparency*).
- Akuntabilitas (*Accountability*) .
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*).
- Kemandirian (*Independency*).
- Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*).

Good Corporate Governance Principles

The implementation of the Good Corporate Governance principles reflected in every business activity is a manifestation of Bank Papua's vision to be the bank of choice for people who excel in service and performance, and the mission of Bank Papua to become a reference for Good Corporate Governance. Bank Papua believes that the implementation of good corporate governance at all levels of the organization will strongly support the efforts of Bank Papua in realizing business goals and providing benefits for all stakeholders in the long run.

To realize sustainable growth requires a strong foundation for a company. For this reason, the application of good corporate governance as the main framework for corporate growth must be applied consistently and continuously based on the TARIF principle:

- *Transparency.*
- *Accountability.*
- *Responsibility.*
- *Independency.*
- *Fairness.*

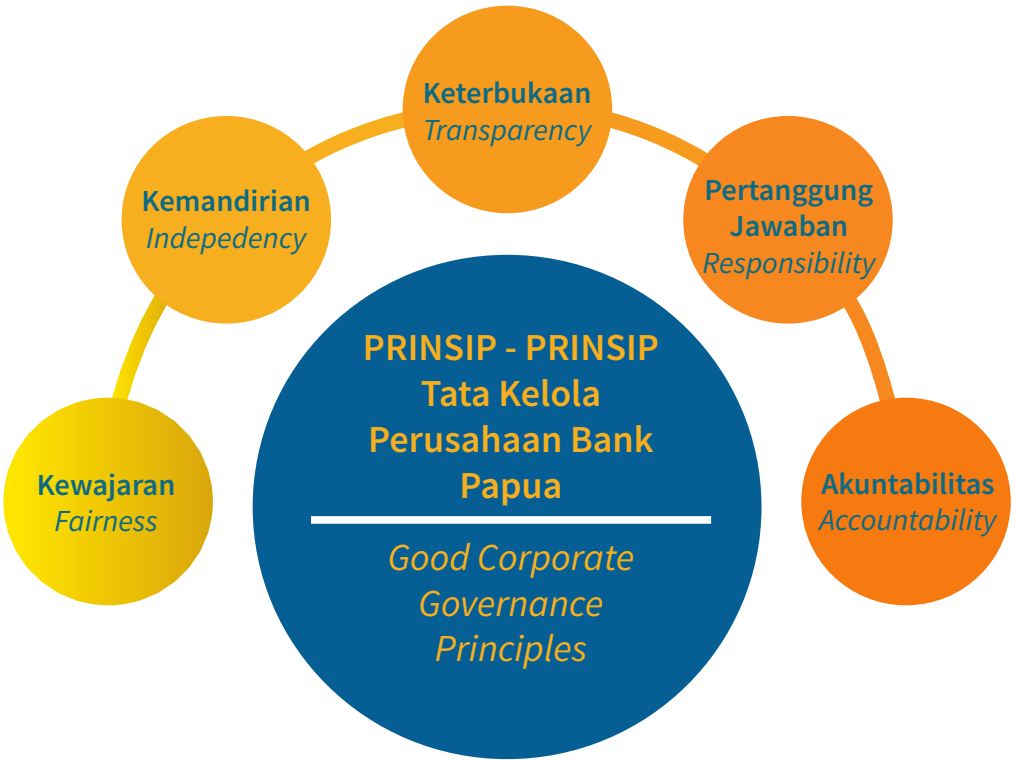

Keterbukaan

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Papua antara lain melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki *website* resmi perusahaan yang selalu diperbaharui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Transparency

Banks are required to have initiatives in the disclosure of material and relevant information both required by statutory provisions and other important information that can influence decision making by shareholders, creditors and other stakeholders. The information is conveyed quickly, accurately, and easily accessed by anyone. Commitments in realizing the principle of transparency are demonstrated by Bank Papua, among others through:

1. *Have a Corporate Secretary Division that has the obligation to ensure that relevant company information has been conveyed to stakeholders, including shareholders and the public.*
2. *Has a company official website that is always updated in presenting information in accordance with the transparency and publication standards set by the Regulator.*
3. *Always prioritize openness in managing the company and disclosure of financial and non-financial conditions in a timely manner to stakeholders.*
4. *Disclose information which includes but is not limited to the vision, mission, business goals, corporate strategy, financial condition, composition and compensation of management, controlling shareholders, share ownership by members of the Board of Director and members of the Board of Commissioners and their family members in the company and other companies, risk management systems, systems of supervision and internal control, systems and implementation of good corporate governance and the level of compliance, and important events that can affect the condition of the company.*
5. *Always present and submit reports to the competent authorities and to other parties in accordance with applicable legal provisions in a timely manner.*

Akuntabilitas

Pengelolaan Bank Papua harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Papua tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Accountability

The management of Bank Papua must be carried out correctly, measured and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. The embodiment of the Accountability principle at Bank Papua is reflected, among others, through the following matters:

1. *Have guidelines or policies that become a guideline for every organ of the company and all employees in carrying out their duties and responsibilities.*

2. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Memiliki unit kerja yang mengelola anti *fraud*.
6. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya.
7. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*Reward and punishment system*).

2. Define the details of the duties and responsibilities of each company organ and all employees clearly and in line with the vision, mission, company values, and corporate strategy.

3. Believe that all company organs and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in implementing good corporate governance.

4. Having an effective internal control system in managing the company.
5. Have a work unit that manages anti-fraud.
6. Prepare the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Annual Budget as well as other work plans.

7. Have performance measures for all levels of the company that are consistent with the company's business goals, as well as having a reward and punishment system.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Papua mewujudkannya prinsip Pertanggungjawaban antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
3. Memiliki Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai *second line of defense* (*ex ante*) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*.

Responsibility

Bank business management must be ensured in accordance with applicable laws and regulations, the principles of sound Bank management. In addition, Bank Responsibility also takes the form of caring for the environment and surrounding communities. In this case Bank Papua embodies the principle of Responsibility, among others, through the following matters:

1. Always act with the precautionary principle and uphold the applicable law.
2. Has the Bank's internal policy as a guide and guide for employees in carrying out bank operational activities.

3. Has an Internal Audit Division, Compliance Unit that functions as the second line of defense (ex ante), which is always ensuring that the policies, regulations, systems, and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the applicable laws and regulations, as well as ensuring the Bank's compliance with the Commitments made by the Bank to Bank Indonesia and / or other authorized supervisory authorities.
4. Always make a positive contribution to the community and care for environmental sustainability through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

Kemandirian

Dalam mewujudkan prinsip Kemandirian, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Papua dalam hal :

1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
3. Bank telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Bank Papua sejak tahun 2004.

Kewajaran Dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Papua yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank Papua antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Independence

In realizing the principle of Independence, management and all individuals in the Bank are competent, able to act objectively, and free from influence / pressure from any party (independent) and have a high commitment to develop the bank. This principle is adhered to by Bank Papua in terms of:

1. *The composition of the Board of Director and Board of Commissioners do not have family relations to the second degree.*
2. *The majority of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The President Director and other Board of Director are independent from the controlling shareholder, because they do not have financial, management, share ownership and / or family relations with the controlling shareholder.*
3. *The Bank has had rules regarding Conflicts of Interest regulated in the Bank Papua Code of Conduct since 2004.*

Fairness and Equality

The Principle of Fairness and Equality is upheld by the Bank Papua which is realized in every decision taken that always considers the interests of the majority shareholders and provides protection to minority shareholders and other stakeholders from engineering and transactions that conflict with applicable laws and regulations. As a whole, the embodiment of the principle of Fairness and Equality at Bank Papua includes the following matters:

1. *Paying attention to the interests of all stakeholders based on the principle of equality and fairness (equal treatment).*
2. *Providing opportunities for all stakeholders to provide input and express opinions for the interests of the Bank and open access to information in accordance with the principle of openness.*

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai dasar acuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Papua berpedoman pada berbagai peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan;
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran OJK tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
10. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
11. Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite- Komite Dewan Komisaris;
13. ASEAN *Good Corporate Governance Scorecard;*
14. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Tata Kelola Perusahaan Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)
15. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Dalam praktiknya, Bank Papua juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang berlaku, serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

Basis for Implementing Good Corporate Governance

As a basis for reference to the implementation of good corporate governance, Bank Papua is guided by various laws and regulations, including the following:

1. *Republic of Indonesia Law on Banking;*
2. *Law on Limited Liability Companies;*
3. *Financial Services Authority Regulation regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
4. *Financial Services Authority Regulation concerning Rating of Soundness of Commercial Banks;*
5. *Financial Services Authority Regulations concerning Bank Business Plans;*
6. *Financial Services Authority Regulation regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
7. *Financial Services Authority Regulation regarding Capability and Compliance Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions;*
8. *OJK Circular concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;*
9. *OJK Circular concerning Commercial Bank Business Activities Based on Core Capital;*
10. *OJK Circular on the Implementation of Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks;*
11. *OJK Circular on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;*
12. *Financial Services Authority Regulations governing GMS, Board of Director and Board of Commissioners, and Committees of the Board of Commissioners;*
13. *ASEAN Good Corporate Governance Scorecard;*
14. *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance and Corporate Banking Corporate Governance by the National Committee on Governance Policy (KNKG)*
15. *Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*

In practice, Bank Papua also continues to keep abreast of the latest developments and best practices of applicable Corporate Governance, and takes into account ethics and best business practices.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Perseroan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan turn around, yang diharapkan dapat menciptakan Bank Papua sebagai sebuah perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*). Untuk itu, dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank Papua bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kinerja, Layanan Bank serta efisiensi yang dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* yakni: Pemegang saham, Pemerintah, Nasabah dan Masyarakat lainnya.
2. Meningkatkan reputasi Bank dan Kepercayaan Masyarakat
3. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan penerapan prinsip TARIF:
   - Keterbukaan (*Transparency*).
   - Akuntabilitas (*Accountability*).
   - Pertanggungjawaban (*Responsibility*).
   - Kemandirian (*Independency*).
   - Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*).
   - serta kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
4. Meningkatkan Kepatuhan Bank terhadap Hukum serta Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sehingga Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

Kebijakan Dan Pedoman Pendukung Tata Kelola Perusahaan

Bank Papua telah memiliki kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung berjalannya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan dan pedoman tersebut diantaranya :

1. Pedoman *Code of Corporate Governance* (CoCG),
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*),
3. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Manual Board*),
4. Piagam Komite Audit (*Commitee Audit Charter*),
5. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
6. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*),

The Purpose of Implementing Bank Papua Corporate Governance

The Company implements Corporate Governance as a fundamental strategy in transforming and turning around, which is expected to create Bank Papua as a sustainable company. To that end, by implementing GCG, Bank Papua aims to:

1. *Improve Performance, Bank Services and efficiency that can provide added value to stakeholders, namely: Shareholders, Government, Customers and other Communities.*
2. *Improve the reputation of the Bank and Public Trust*
3. *Increase the seriousness of management in applying the principles of good and correct corporate governance by applying the TARIF principle:*
   - *Transparency.*
   - *Accountability.*
   - *Responsibility.*
   - *Independency.*
   - *Fairness.*
   - *and prudence in managing the Bank.*
4. *Improve the Bank's Compliance with applicable Laws and Regulations and Regulations so that the Bank can be protected from external interventions and lawsuits.*

Policies and Supporting Guidelines for Corporate Governance

Bank Papua already has policies and guidelines for implementing activities in order to support the implementation of Good Corporate Governance practices. The policies and guidelines include:

1. *Code of Corporate Governance (CoCG) Guidelines,*
2. *Code of Business Ethics and Code of Conduct,*
3. *The Board of Commissioners and Board of Director Manual (Manual Board),*
4. *Charter of the Audit Committee (Commitee Audit Charter),*
5. *Guidelines for Reporting the State's Official Assets (LHKPN),*
6. *Conflict of Interest (CoI) Guidelines,*

7. Pedoman Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Gratifikasi),
8. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*),
9. Pedoman Manajemen Risiko,
10. Pedoman Remunerasi dan Nominasi,
11. Pedoman *Corporate Social Responsibility*,
12. Pedoman Hubungan Korespenden,
13. Pedoman Strategi *Anti Fraud*,
14. Pedoman Perkreditan,
15. Pedoman Layanan Produk,
16. Pedoman Kepatuhan,
17. Pedoman Logistik dan Material,
18. Pedoman Sumber Daya Manusia.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Pada tahun 2018, Direksi Bank Papua telah mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor : 15.1/DIR-BPD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Pengelola LHKPN di Bank Papua adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Modal Manusia.

7. *Guidelines for Acceptance of Gifts / Souvenirs and Entertainment (Gratification),*
8. *Internal Audit Charter,*
9. *Risk Management Guidelines,*
10. *Remuneration and Nomination Guidelines,*
11. *Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR),*
12. *Guidelines for Correspondent Relations,*
13. *Anti Fraud Strategy Guidelines,*
14. *Credit Guidelines,*
15. *Product Service Guidelines,*
16. *Compliance Guidelines,*
17. *Logistics and Material Guidelines,*
18. *Human Resources Guidelines.*

Submission of State Official Asset Report (LHKPN)

The Report of State Official Assets (LHKPN) is a list of all the assets of the State Administrators as set forth in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK). LHKPN does not only cover the assets of a state administrator, but also a nuclear family such as spouse and children who are still dependents LHKPN has a legal basis so state administrators are required to report their LHKPN. First is Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are clean and free of corruption, collusion and nepotism. Other legal basis is Law Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission and Corruption Eradication Commission Decision (KPK) Number: KEP.07 / KPK / 02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of Official Asset Wealth.

Based on this law, each State Official is obliged to be willing to examine his wealth, both before taking office, during office or even after taking office. The state administrator is also required to report his assets at the first time in office, transfer, promotion, retirement and also must inform the assets.

In 2018, the Board of Director of Bank Papua issued the Decree of the Board of Director Number: 15.1 / DIR-BPD / II / 2018 dated February 28, 2018 concerning the State Assets Asset Report in the Environment of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . The LHKPN Manager at Bank Papua is the Head of the Compliance Division and the Human Capital Management Division.

Program Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan Pengendalian Gratifikasi Bank Papua diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Surat Keputusan Direksi Nomor 69/DIR-BPD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Papua dan SK Direksi Nomor - 83/DIR-BPD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Papua.

Salah satu bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terkait gratifikasi yaitu dengan adanya pengumuman di media website Bank Papua pada tanggal 27 Mei 2019, tentang larangan penerimaan hadiah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.

Gratification Control Program

Gratification can be interpreted as a gift in the broadest sense, which includes the provision of money, goods, discounts (commissions), commissions, loans without interest, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment and other facilities, both accepted domestically and in abroad and carried out using electronic means or without electronic means.

Provisions on the Gratification Control of Bank Papua are stipulated in the Decree of the Board of Director Decree of the Board of Director Number 69 / DIR-BPD / X / 2018 dated October 17, 2018 concerning Guidelines for Controlling Gratification in the Bank Papua environment and Board of Director Decree Number - 83 / DIR-BPD / XII / 2018 dated 12 December 2018 concerning the Establishment of the Gratification Control Unit within the Bank Papua Environment.

One form of the application of Good Corporate Governance related to gratification is the announcement on the media website of Bank Papua on May 27, 2019, regarding the prohibition of receiving gifts in the context of Eid al-Fitr.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementation of Good Corporate Governance Assessment

Penilaian faktor Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Secara berkala, Perseroan melakukan pengukuran implementasi Tata Kelola Perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, Perseroan bertujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan Tata Kelola Perusahaan dan membandingkan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan Tata Kelola Perusahaan, beserta rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan organisasi Perseroan, untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
- Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Bank Papua melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkala sesuai dengan periode laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu 2 (dua) kali dalam setahun serta melakukan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

Corporate Governance factor assessment is an assessment of the quality of the Bank's management on the implementation of the principles of Corporate Governance, taking into account the significance or materiality of a problem with the implementation of Corporate Governance at the Bank according to the scale, characteristics and complexity of the Bank's business.

Periodically, the Company measures the implementation of Corporate Governance. Through the measurement process, the Company aims to:

- *Test and assess the implementation of Corporate Governance through elaboration of the conditions of the implementation of Corporate Governance and comparison with predetermined test parameters and parameters.*
- *Provide an overview of the results of measurements through giving a value on the implementation of Corporate Governance, along with recommendations for proposed improvements, in order to reduce the gap between the level of practice with indicators and testing parameters.*
- *Monitor the consistency of the implementation of Corporate Governance in the Company's organizational environment, and to obtain input for the improvement and development of Corporate Governance policies.*
- *Encourage the management of the Company that is increasingly professional, transparent and efficient, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's Organs.*

Bank Papua evaluates the implementation of Corporate Governance periodically in accordance with the period of the Bank's Sound Rating report, which is 2 (two) times a year and evaluates the implementation of Corporate Governance in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 and Financial Services Authority Circular Letter No.13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Implementasi Prinsip GCG Bank Papua

a) *Awareness* GCG

Awareness Tata Kelola Perusahaan Bank Papua bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua bagi insan Bank Papua sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam penerapan tata kelola bank yang berkelanjutan. Kegiatan *awareness* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dilakukan mulai dari karyawan baru melalui Pendidikan Dasar Perbankan sampai dengan dilaksanakannya Tata Kelola Perusahaan Bank Papua *refreshment* bagi karyawan. Pelaksanaan *awareness* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan *assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua maupun penyusunan Laporan Tahunan.

b) Implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Kegiatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, restrukturisasi organisasi serta tindak lanjut rekomendasi atas hasil *Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Kegiatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tersebut diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain:

- Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan bank, mencakup bidang dana, bidang kredit dan pengendalian internal
- Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktek terbaik dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja bank dengan: membentuk satu unit setingkat Sub Divisi yaitu Tim *Anti Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tujuan penguatan sistem pengendalian internal Bank yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, dan melakukan pemisahan antara fungsi kesekretariatan dan humas pada Divisi Sekretaris Perusahaan menjadi Departemen Sekretariat & Protokoler dan Tim Humas. Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, seperti menyusun dan meng-*update* secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Disamping itu Bank Papua telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

Implementation of Bank Papua GCG Principles

a) GCG Awareness

Bank Papua GCG Awareness aims to introduce and provide an initial understanding of the importance of GCG implementation for Bank Papua people so as to foster a shared awareness in the application of sustainable bank governance. GCG awareness activities are carried out starting from new employees through the Basic Banking Education up to the implementation of GCG refreshment for employees. The implementation of GCG awareness is documented in the form of formal reports as evidence needed in GCG Assessment activities and the preparation of Annual Report.

b) GCG Implementation

GCG implementation activities are formulated in the form of business process revitalization, organizational restructuring and follow-up recommendations on the results of the GCG Assessment. The Papua GCG Bank implementation activities are manifested in several activities, including:

- *Compiling and perfecting various bank management policies and procedures, including the funds, credit and internal control sectors*
- *Organizing the organizational structure that is in line with best practices in corporate governance to improve bank performance by: forming a unit at the level of Sub-Divisions, namely the Anti Fraud Team that reports directly to the President Director with the aim of strengthening the Bank's internal control system which in its application is in the form of a Fraud control system , and separating the secretarial and public relations functions of the Corporate Secretary into Sub. Secretariat & Protocol Division and Public Relations Team. Creating and building an ethical and responsible work culture climate, such as compiling and regularly updating the Independence Statement of Board of Director and Board of Commissioners, and coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct. In addition, the Bank Papua has designed a fraud control system policy, including a system for protecting against reporting violations.*

- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi *Self-Assessment* sebelumnya.

Guna mengoptimalkan berbagai hal tersebut di atas serta untuk lebih membumikan Budaya Patuh atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua pada seluruh insan dan *stakeholder* Bank maka perlu dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Bentuk sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dapat dilakukan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Pelaksanaan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan *Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua maupun penyusunan Laporan Tahunan.

c) Monitoring Implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan aktif atas efektivitas implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang dilaksanakan oleh Direksi. Demikian juga Direksi secara terus-menerus memastikan dan memonitor implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan, mulai dari tahapan *awareness* sampai dengan pelaporan.

Proses *monitoring* atas implementasi tersebut dilakukan guna memastikan keberhasilan pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan *monitoring* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua ini didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan *Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua maupun penyusunan Laporan Tahunan.

- *Carry out follow-up to GCG Self-Assessment recommendations and evaluate follow-up to previous Self-Assessment recommendations.*

In order to optimize the aforementioned matters as well as to further ground the Compliant Culture of GCG implementation in all Bank personnel and stakeholders, it is necessary to conduct socialization aimed at providing an understanding of the importance of GCG implementation, communicating and internalizing various policies, programs and implementation of GCG related activities. Forms of GCG socialization can be done through various media both print and electronic in coordination with parties who have an interest in GCG socialization activities. The implementation of the GCG outreach was documented in the form of formal reports as evidence that would later be needed in the GCG Assessment activities and the preparation of the Annual Report.

c) Monitoring GCG Implementation

Through the Audit Committee, the Board of Commissioners has conducted active oversight of the effectiveness of GCG implementation carried out by the Board of Director. Likewise, the Board of Director continuously ensures and monitors the implementation of GCG in accordance with established strategies, starting from the awareness stage through to reporting.

The monitoring process of the implementation is carried out to ensure the success of its implementation by coordinating with the parties concerned. Furthermore, the implementation of GCG monitoring is documented in the form of formal reports as evidence that will later be needed in the GCG Assessment activities and the preparation of the Annual Report.

d) *Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

1. Pihak Eksternal (*Third party Assessment*)
   Sampai dengan tahun 2019, Bank Papua belum menggunakan pihak eksternal untuk menilai tentang penerapan Tata Kelola yang Baik di perusahaan.
2. *Self Assesment*
   Peringkat Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua tahun 2019 adalah 2 (dua), yang artinya mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2019.

Bank Papua secara berkala melakukan penilaian penerapan Tata Kelola melalui *Self-Assessment* penerapan Tata Kelola untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik di Bank Papua . Evaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *governance structure, governance process dan Governance outcome*. Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi indikator/ kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan.
2. Melakukan *self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian komposit.
3. Melakukan evaluasi atas hasil *self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola dan menyusun laporan kesimpulan umum *self Assessment.*
4. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi Tata Kelola.

d) GCG Assessment

1. *External Party (Third party Assessment)*
   Until 2019, Bank Papua has not used external parties to assess the implementation of Good Governance in the company.
2. *Self Assessment*
   The rating of the GCG Self Assessment in 2019 is 2 (two), which means that it reflects that the bank's management has implemented Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of commercial bank governance principles, in general these weaknesses do not have a significant impact but require sufficient attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank's Business Plan for the second semester of 2019.

The Bank Papua regularly evaluates the implementation of Governance through the Self-Assessment of the application of Governance to measure and evaluate the implementation of Good Governance in the Bank Papua. Evaluation of the implementation of Good Governance is integrated into 3 (three) aspects, namely governance structure, governance process and Governance outcome. The mechanism for implementing Good Governance is carried out in several steps, as follows:

1. *Identify assessment indicators / criteria that will affect the implementation of the overall implementation of Governance.*
2. *Conduct Self-Assessment of the implementation of Governance including the calculation of composite assessments.*
3. *Evaluate the results of the Self-Assessment of the implementation of governance and prepare a general conclusion report on Self-Assessment.*
4. *Prepare reports on the implementation of Governance.*

Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Papua menggunakan kriteria dan metodologi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, yang terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
- Penanganan benturan kepentingan,
- Penerapan fungsi kepatuhan,
- Penerapan fungsi audit intern,
- Penerapan fungsi audit ekstern,
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*),
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal,
- Rencana strategis Bank.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 dilakukan secara *self Assessment* oleh Divisi Kepatuhan berdasarkan *Assessment* dan data pendukung masing-masing unit kerja terkait dan hasilnya disampaikan kepada Divisi Sekretaris Perusahaan untuk dipublikasikan melalui *website* Bank Papua (**www.bankpapua.co.id**).

Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Berikut adalah Tabel Skor Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan oleh Bank Papua secara *Self Assessment* dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Criteria Used in Assessment

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance at Bank Papua uses the criteria and methodology set forth in the Financial Services Authority Circular Letter No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, which consists of 11 (eleven) criteria for evaluating the implementation of Corporate Governance, namely:

- *Performing the duties and responsibilities of the BOD,*
- *Performing the duties and responsibilities of the BOC,*
- *Completeness and implementation of the Committee's duties,*
- *Handling conflicts of interest,*
- *Implementation of the compliance function,*
- *Implementation of the internal audit function,*
- *Application of external audit functions,*
- *Application of risk management including internal control systems,*
- *Provision of funds to related parties and large exposures,*
- *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of Corporate Governance and internal reporting,*
- *The Bank's strategic plan.*

The party conducting the assessment

*The assessment of the implementation of Corporate Governance in 2018 was carried out in a Self-Assessment by the Compliance Division based on the Assessment and supporting data of each related work unit and the results were submitted to the Corporate Secretary Division to be published on the Bank Papua website (**www.bankpapua.co.id**).*

Corporate Governance Assessment Results

The following is a Table of Corporate Governance Scores conducted by Bank Papua in Self Assessment within the last 5 (five) years.

Tahun	Skor *Assesment*	Peringkat	Definisi Peringkat	*Definition of Ranking*
2015	2 .000	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	*Reflecting that the Bank Management has implemented good Corporate governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.*
2016	2.52	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifkan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena Kelemahan-kelemahan signifikan tersebut akan berdampak terhadap RBB Tahun 2016.	*Reflecting that the Bank Management has implemented Good Corporate Governance which is generally quite good. This is reflected in the fulfillment of quite adequate principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the management of the Bank. Because these significant weaknesses will have an impact on the 2016 Bank Business Plan.*
2017	2,55	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.	*Reflecting the Management of the Bank has carried out the implementation of Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of the principles of Commercial Bank Governance, then in general these weaknesses have no significant impact but require sufficient attention from the bank's management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank Business Plan for the second semester of 2017.*
2018	1,55	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prisip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank Umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2018.	*Reflecting the Management of the Bank has carried out the implementation of Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of the principles of Commercial Bank Governance, then in general these weaknesses have no significant impact but require sufficient attention from the bank's management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank Business Plan for the second semester of 2018.*
2019	1,50	2	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2019.	*Reflecting that bank management has implemented Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of commercial bank governance principles, in general these weaknesses do not have a significant impact but require sufficient attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank's Business Plan for the second semester of 2019.*

Perincian ringkasan *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Semester II untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The breakdown details of the GCG Implementation Self Assessment for 2018 are as follows:

No	Aspek Yang Dinilai	2018			2019			*Rated Aspect*
		Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	Nilai	Bobot	Perolehan Nilai	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	1	20 %	0,20	1	20 %	0,20	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Director*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	10 %	0,10	1	10 %	0,10	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10 %	0,20	1	10 %	0,10	*Completeness and Implementation of Committee Duties*
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10 %	0,10	1	10 %	0,10	*Handling Conflict of Interest*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5 %	0,10	2	5 %	0,10	*Implementation of the Bank's Compliance Function*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5 %	0,10	2	5 %	0,09	*Implementation of the Internal Audit Function*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10	2	5 %	0,11	*Implementation of External Audit Functions*
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	7.5 %	0,15	2	7.5 %	0,15	*Implementation of the Risk Management Function including the Internal Control System*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5 %	0,15	2	7.5 %	0,15	*Prudential Principle in Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15 %	0,30	2	15 %	0,30	*Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Report on Implementation of GCG and Internal Reporting*
11	Rencana Strategis Bank	1	5 %	0,05	2	5 %	0,10	*Bank Strategic Plan*
Nilai Komposit | Predikat			**100 %**	**1,55**		**100%**	**1,50 | 2**	

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tahun Sebelumnya

Tahun 2019 tidak ada rekomendasi.

Recommendations and Follow Up on Previous Year Assessment Results

In 2019 there were no recommendations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

- Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masing-masing komite Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi terutama Direktur Kepatuhan dibantu oleh jajaran manajemen bank yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Divisi Sekretaris Perusahaan, dan Divisi-divisi yang bersentuhan dengan Tata Kelola Perusahaan Bank.

In accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I Regarding General Provisions Article 1, the Company's Organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Director.

- *General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as RUPS, is a Company organ that has authority not granted to the Board of Director or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and / or Articles of Association.*
- *Board of Commissioners is a Company organ that is responsible for conducting general and / or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Director.*
- *Board of Director are Company Organs that are authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*

The Board of Commissioners has formed committees to assist and improve the oversight function carried out by the Board of Commissioners. In carrying out their duties and obligations, each committee of the Board of Commissioners works in accordance with the scope of duties of the relevant committee determined by the Decree of the Board of Commissioners. Whereas the Board of Director, especially the Compliance Director, is assisted by bank management who are tasked with managing, controlling, overseeing, and responsible for implementing the implementation of Bank Corporate Governance which is assisted by Committees under the Board of Commissioners, Committees under the Board of Director, Corporate Secretary Division, and Divisions. division that is in contact with the Bank's Corporate Governance.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Bank Papua's Corporate Governance Structure can be seen in the figure as follows:

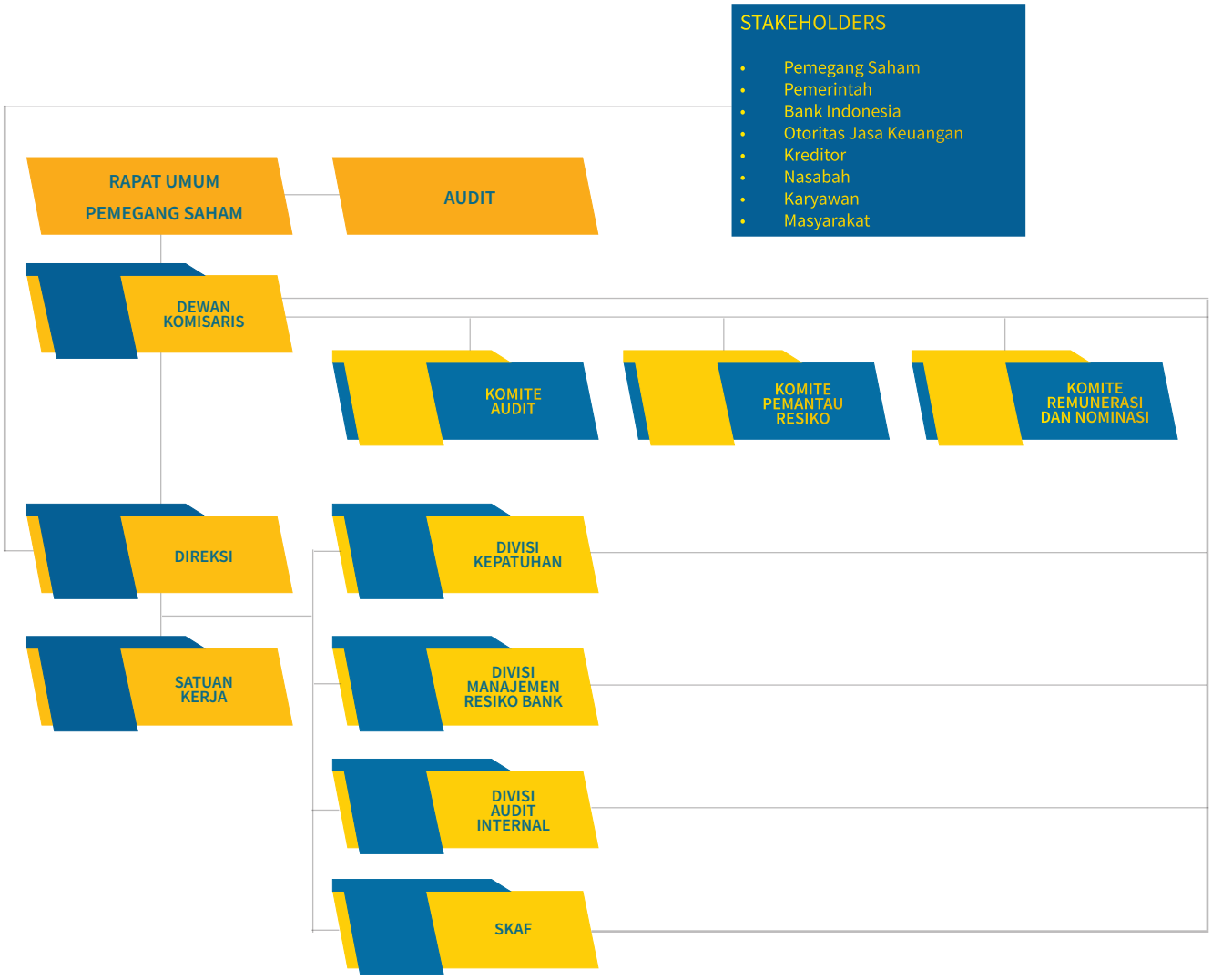

Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information Regarding Major and Controlling Shareholders

Struktur Pemegang Saham

Komposisi pemegang saham Bank Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Akta IrnawatiNazar, SH No.41 tanggal 29 Maret 2019 di Jayapura adalah sebagai berikut:

Shareholder Structure

The composition of the shareholders of Bank Papua is as stated in the Deed IrnawatiNazar, SH No.41 dated 29 March 2019 in Jayapura is as follows:

Pemegang Saham

Shareholder

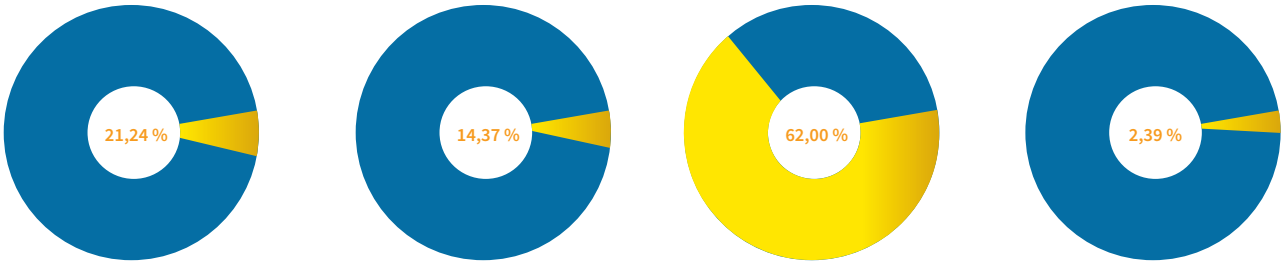

Pemda Provinsi Papua | Pemda Provinsi Papua Barat | Pemda Kota/Kabupaten Setanah Papua | KSU Bank Papua Berdikari

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sebanyak 460.160 lembar saham, yang terdiri atas Saham Seri A sebanyak 449.167 lembar, dan saham seri B sebanyak 10.993 lembar dengan nilai Nominal keseluruhan Rp2.300.800.000.000.-

Of the authorized capital, 460,160 shares have been issued and fully paid in cash through the company's cash, consisting of 449,167 Series A Shares, and 10,993 Series B shares with a total Nominal Value of Rp 2,300,800,000,000.

Jenis Saham *Stock Type*	Pemegang Saham *Shareholders*	Jumlah Lembar *Number of sheets*	Nilai saham *Share value*	Persentase *Percentage*
PEMEGANG SAHAM SERI A	Pemerintah Provinsi Papua	97.721	488.605.000.000	21,24 %
	Pemerintah Provinsi Papua Barat	66.128	330.640.000.000	14,37 %
	Pemerintah kota/Kab se Tanah Papua	285.318	1.426.590.000.000	62,00 %
PEMEGANG SAHAM SERI B	KSU Bank Papua Berdikari	10.993	54.965.000.000	2,39 %
TOTAL		**460.160**	**2.300.800.000.000**	**100 %**

Informasi lebih rinci telah dijelaskan di Bab Profil Perusahaan Bagian Struktur dan Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

More detailed information has been explained in the Company Profile Chapter Structure and Composition of Shareholders in this Annual Report.

Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Papua, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang saham seri A:
- Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- Dapat menukarkan sahamnya dengan saham seri B,
- Menerima Dividen,
- Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari pemegang saham seri B.

Pemegang saham seri B:
- Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Menerima Dividen,
- Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Authority, Rights and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of Bank Papua's Articles of Association, the following are the authority, rights and responsibilities of Shareholders:

Series A shareholders:
- *Issue a vote at the General Meeting of Shareholders (GMS),*
- *Have special rights in submitting proposals for nominating members of the Board of Director and Board of Commissioners,*
- *Can exchange shares with series B shares,*
- *Receive Dividends,*
- *Receiving remaining assets resulting from liquidation that takes precedence from Series B shareholders.*

Series B shareholders:
- *Issue a vote in the General Meeting of Shareholders (GMS),*
- *Receive Dividends,*
- *Receiving the remaining assets resulting from liquidation.*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholder (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku.

General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ that holds the highest authority in the Bank and holds all authority that is not left to the Board of Director and Commissioners within the limits specified in the Law on Limited Liability Companies and the Bank's Articles of Association in force.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company organ that has authority not given to the Board of Director or the Board of Commissioners within the limits specified in this law and / or articles of association.

RUPS merupakan penyalur aspirasi pemegang saham dan juga tempat pemegang saham memperjuangkan kepentingannya. Kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam UU PT antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

GMS is a channel for the aspirations of shareholders and also where shareholders fight for their interests. The authority of the GMS as stipulated in the PT Law includes, among others, the following matters:

1. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris (Pasal 94 dan 111 UU PT tahun 2007).
2. Kewenangan untuk menerima segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris (Pasal 75 UU PT tahun 2007).
3. Menyetujui Anggaran Dasar Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris (Pasal 63 UU PT tahun 2007)
4. Kewenangan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 88 UU PT tahun 2007). Kewenangan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
5. Kewenangan untuk melakukan pengaturan pembagian tugas diantara anggota direksi dan juga pengaturan tentang besar dan jenis penghasilan/ remunerasi direksi dan komisaris. Kewenangan untuk melakukan ini dapat didelegasikan kepada komisaris (Pasal 92 UU PT tahun 2007).
6. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permintaan direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (Pasal 102 UU PT tahun 2007).

1. *Authority to appoint and dismiss directors and commissioners (Articles 94 and 111 of the 2007 PT Law).*
2. *Authority to receive all information relating to the company's interests from directors and commissioners (Article 75 of the 2007 PT Law).*
3. *Approve the Company's Articles of Association which have been reviewed by the Board of Commissioners (Article 63 of the 2007 PT Law)*
4. *Authority to make changes to the company's articles of association (Article 88 of the 2007 PT Law). The authority to obtain information relating to the Company from the Board of Director and / or Board of Commissioners, as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company.*
5. *Authority to regulate the division of tasks among members of the board of directors and also regulates the amount and type of income / remuneration of directors and commissioners. The authority to do this can be delegated to the commissioners (Article 92 of the 2007 PT Law).*
6. *The authority to give approval at the request of the directors to transfer or guarantee the debt in whole or a large part of the company's assets (Article 102 of the 2007 PT Law).*

7. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permohonan direksi ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit (Pasal 89 UUPT tahun 2007).
8. Kewenangan dalam memberikan persetujuan ataupun penolakan atas rencana penggabungan atau peleburan perseroan (Pasal 89 UU PT tahun 2007).
9. Kewenangan dalam memberikan persetujuan ataupun penolakan atas rencana pengambilalihan sebagian atau keseluruhan saham peseroan (Pasal 89 UU PT tahun 2007).
10. Kewenangan untuk menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 89 UUPT tahun 2007).

Kepengurusan organisasi Bank Papua menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank. Hubungan kerja antara keduanya adalah hubungan *check and balances* secara independen dengan prinsip bahwa kedua badan tersebut mempunyai kedudukan yang setara.

Jenis Penyelenggaran RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Papua terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
   RUPS ini diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai :
   a. Laporan Tahunan,
   b. Usulan penggunaan Laba Bersih,
   c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)
   RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseoran atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

   Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perseroan secara fisik, dikenal juga RUPS dimana pelaksanaannya tidak memerlukan kehadiran seluruh organ secara fisik. RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

7. The authority to approve requests from directors to the District Court for the company to be declared bankrupt (Article 89 of the Company Law 2007).
8. Authority in giving approval or rejection of the company's merger or merger plan (Article 89 of the 2007 PT Law).
9. Authority in giving approval or rejection of the plan to acquire part or all of the company's shares (Article 89 of the 2007 PT Law).
10. Authority to approve the dissolution of the company (Article 89 of Company Law 2007).

The management of the Bank Papua organization adheres to a 2 (two) body system, namely the Board of Commissioners and Board of Director with clear authority and responsibilities in accordance with their functions as mandated in the laws and regulations and the articles of association of the Bank. The working relationship between the two is an independent checks and balances relationship with the principle that the two bodies have an equal position.

Type of GMS Arrangement

The General Meeting of Shareholders at Bank Papua consists of:

1. Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)
   The GMS is held once a year after the close of the audited fiscal year by the Public Accountant, with discussions including:

   a. Annual report,
   b. Proposed use of Net Earning,
   c. Other matters that require the approval of the Annual GMS

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
   EGMS can be held at any time based on the need for the interests of the Company at the request of the Board of Commissioners and / or Shareholders. The Board of Director is required to hold an EGMS in accordance with a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

   In addition to the GMS conducted in the presence of all the Company's Organs physically, there is also a GMS where the implementation does not require the presence of all organs of the physical body. The GMS has the same legal force.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat Bank melakukan kegiatan usaha atau dapat juga diadakan di tempat lain asal saja masih dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang memakai tanda penerimaan, yang dikirimkan pada alamat yang terakhir tercatat pada buku Daftar Pemegang Saham dan disamping surat tercatat dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian, yang harus dikirim dan/atau diumumkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan.
3. Didalam pemanggilan RUPS harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan. Panggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Panggilan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Apabila semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti yang dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan di dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat

Tata Tertib Penyelenggaraan RUPS

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atas kuasa dari pemegang saham. Jika RUPS harus dipimpin oleh Direktur Utama, namun Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Jika RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama, namun

Procedure for holding a GMS

Meeting Place and GMS Summons

1. *All GMS are held at the domicile of the Bank or at the place where the Bank conducts business activities or may also be held at other places as long as it is still within the territory of the Republic of Indonesia.*
2. *The invitation to the GMS is carried out with a registered letter using a receipt, which is sent at the last address recorded in the Register of Shareholders and in addition to the registered letter can also be done through 2 (two) daily newspapers, which must be sent and / or announced no later than 14 (fourteen) days before the Meeting is held.*
3. *In the notice of the GMS, the day, date, time and place of the meeting must be notified and a brief list of things to be discussed, accompanied by a notification that the material to be discussed at the meeting is available at the Company's office from the day the meeting is called until the date the meeting is held. . Summons for the Annual GMS must also state that the annual report is available at the Company's office.*
4. *The invitation to the GMS (General Meeting of Shareholders) is conducted by the Board of Director and / or Board of Commissioners.*
5. *If all shareholders are present or represented at the meeting, then the first summons as referred to above is not a requirement and in the meeting a valid decision can be made regarding the matters discussed at the meeting*

Code of Conduct for GMS

- *The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by the President Director or the President Commissioner on the power of attorney of the shareholders. If the GMS must be chaired by the President Director, but the President Director is absent or unable to attend due to any reason that does not need to be proven to a third party, then the GMS is chaired by one of the Board of Director appointed by the President Director. If all Board of Director are absent or absent for any reason that does not need to be proven to a third party, then the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners. If the GMS must be chaired by the President Commissioner, but the President*

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Jika semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

- Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat notulen atau Risalah Rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
- Penandatanganan ini tidak perlu, jika notulen atau risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.
- Dalam hal kuorum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
  2. Apabila belum mencapai kuorum, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
  3. Pemanggilan rapat kedua tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
  5. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank dengan hak suara yang sah.

Commissioner is absent or absent for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by one of the Commissioners appointed by the President Commissioner. If all members The Board of Commissioners is absent or unable to attend due to any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by a member of the Board of Director. If all members of the Board of Director and members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend due to any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by a person chosen by and among those present at the meeting.

- *Of all matters discussed and decided at the GMS, minutes are made or minutes of the meeting and signed by the Chairperson of the Meeting and by one of the meeting participants appointed by the meeting of those present and the contents become valid evidence against all Shareholders and third parties .*
- *The signing is not necessary, if the minutes or minutes are made with the Minutes of Notary.*
- *In the case of a quorum, the following matters must be considered:*
  1. *General Meeting of Shareholders can be held if attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Bank with valid voting rights unless otherwise stipulated in the Articles of Association.*
  2. *If the quorum has not yet been reached, a second meeting may be called.*
  3. *The summons for the second meeting must be made no later than 7 (seven) days before the meeting is held excluding the date of the summons and the date of the meeting.*
  4. *The second meeting shall be held no sooner than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days from the first meeting.*
  5. *The second meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended by Shareholders who represent at least 1/3 (one third) of the total number of shares issued by the Bank with valid voting rights.*

6. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Bank, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

- Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan
- Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Bank boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.
- Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju atau tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

Penyelenggaraan RUPS

Pada tahun 2019 Bank Papua menyelenggarakan (RUPS) Tahunan sebanyak 1 kali, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019. Berikut adalah tabel penyelenggaraan RUPS selama tahun 2019.

6. In the event that the quorum of the second meeting is not reached, then at the request of the Bank, the quorum shall be determined by the Chair of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

- *Shareholders can be represented by other shareholders or other people with power of attorney.*
- *The Chairperson of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent the Shareholders be shown to him at the time the meeting is held*
- *In a meeting, each share gives the owner the right to issue 1 (one) vote.*
- *Members of the Board of Director, Commissioners and employees of the Bank may act as attorneys in meetings, but the votes they cast as attorneys in meetings are not counted in the vote.*
- *Voting about people is done with a closed letter that is not signed and about other things verbally, unless the Chairperson determines otherwise without objection from the Shareholders present at the meeting.*
- *Blank or invalid votes are considered absent and are not counted in determining the number of votes cast at a meeting.*
- *All decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the most votes from the number of votes issued legally at a meeting, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. If the number of votes that agree or disagree is the same, then the proposal in question is considered rejected.*

Implementation of the GMS

In 2019 Bank Papua held 1 Annual GMS, which was held on March 29, 2019. The following is a table of the holding of the GMS during 2019.

Jenis RUPS *Type of GMS*	**Waktu Pelaksanaan** *Execution time*	**Agenda** *Agenda*	**Keputusan**	*Decision*
RUPS Tahunan	29 Maret 2019	Mengenai pembahasan rancangan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. *Regarding the discussion of the draft procedure for the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*	Menyetujui rancangan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Approved the draft Standing Orders of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
		Mengenai Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2018. *Regarding PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2018.*	Menyetujui dan mengesahkan laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan. Dan menetapkan laba bersih Perseroan sebesar Rp218.575.889.824,- (dua ratus delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).	*Approved and ratified the Annual Calculation report consisting of the Company's Balance Sheet, Income Statement for Fiscal Year 2018 that had been audited by the Hertanto, Grace and Karunawan Public Accountants and gave full discharge of responsibility to the Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for their Management and Supervision actions during the fiscal year ending on December 31, 2018, provided that their actions comply with applicable regulations and are reflected in the company's books.* *And determine the Company's net earning of Rp218,575,889,824 (two hundred eighteen billion five hundred seventy five thousand eight hundred eighty nine thousand eight hundred twenty four rupiah).*
		Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018. *Tantiem Payment for Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2018.*	Menyetujui Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang bersumber dari Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 adalah sebesar 5 % dari laba setelah pajak atau sebesar Rp10.928.794.491,- dan teknis perhitungannya dilakukan secara bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempedomani ketentuan tentang Remunerasi yang berlaku.	*Approve the payment of tantiem for the Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sourced from the use of the Company's Net Earning for Fiscal Year 2018 is 5% of earning after tax or amounting to Rp10,928,794,491, and the technical calculations are carried out jointly by the Board of Director and the Board of Commissioners, referring to the applicable provisions concerning Remuneration.*
		Mengenai Pengesahan setoran modal yang belum didukung Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp269.855.000.000,- *Regarding Ratification of capital contributions which have not been supported by the General Meeting of Shareholders (GMS) amounting to Rp269,855,000,000*	Menyetujui dan mengesahkan setoran modal sebesar Rp269.855.000.000,- atau sebanyak 53.971 lembar saham, sehingga dengan pengesahan ini maka jumlah saham yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp2.300.800.000.000,- atau 460.160 lembar saham.	*Approved and authorized the capital deposit of Rp269,855,000,000 or 53,971 shares, so that with this ratification the number of shares paid up by the shareholders would become Rp2,300,800,000,000 or 460,160 shares.*

Jenis RUPS *Type of GMS*	Waktu Pelaksanaan *Execution time*	Agenda *Agenda*	Keputusan	*Decision*
		Mengenai Rencana Setoran Modal Tahun 2020. *Regarding the 2020 Capital Deposit Plan.*	Menyetujui rencana setoran modal Tahun 2020 sebesar Rp306.000.000.000,- yang akan disetor oleh masing-masing Pemegang Saham. Realisasi rencana setoran modal dimaksud akan dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah disahkannya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing para pemegang saham.	*Approved the plan for capital injection in 2020 amounting to Rp306,000,000,000, which will be paid by each Shareholder. The realization of the planned capital payment will be carried out at the first opportunity after the approval of the shareholders' Regional Budget (APBD).*
		Mengenai Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019. *Regarding the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will carry out an audit of the financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019.*	Menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019	*Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that would conduct an Audit of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019*
		Perubahan ke III Surat keputusan rapat umum pemegang saham Nomor :12/ SK/RUPS-BPD/V/2014 tanggal 14Mei 2014 tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2019. *Amendment III Decree of the General Meeting of Shareholders Number: 12 / SK / RUPS-BPD / V / 2014 dated May 14 2014 concerning the remuneration of the Board of Director and Board of Commissioners and the Increase in Pension Benefits for Retired Employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2019.*	Menyetujui perubahan persentase penghasilan Dewan Komisaris yaitu : • Penghasilan Komisaris Utama adalah sebesar 60% dari penghasilan Direktur Utama • Honorarium Anggota Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama	*To approve changes in the percentage of the Board of Commissioners' earnings, namely:* • *The income of the President Commissioner is 60% of the income of the President Director* • *Honorarium for the Commissioners of 90% of the Honorarium of the President Commissioner*

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2019 tergambar di dalam uraian di bawah ini.

Implementation of Annual GMS (2019) and its realization

The stages of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019 are illustrated in the description below.

Pengumumam *Announcement*	**Undangan** *Invitation*	**Pelaksanaan** *Implementation*	**Hasil RUPS** *GMS Result*
Diumumkan melalui iklan disurat kabar Cendrawasih Pos : - RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 diterbitkan di harian Cenderawasih Pos, tanggal terbit 15 Maret 2019.	Disampaikan melalui surat tercatat kepada seluruh pemegang saham. Tanggal undangan : - Pada tanggal 14 Maret 2019, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 29 Maret 2019.	RUPS tahunan dilaksanakan sebanyak 1 kali : - Pada tanggal 29 Maret 2019, bertempat di Gedung Pari Waisai.	Dimuat di dalam - Akta Notaris No. 41, Tanggal 29 Maret 2019, notaris yang digunakan adalah Irnawati Nazar, SH
Announced in an ad in the Cendrawasih Pos newspaper: *- The Annual General Meeting of Shareholders held on 29 March 2019 was published in the Cenderawasih Pos daily, 15 March 2019.*	*Delivered by registered mail to all shareholders.* *Invitation date:* *- On March 14, 2019, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the RUPS on March 29, 2019.*	*Annual GMS held as many as 1 time :* *- On March 29, 2019, at the Pari Waisai Building.*	*stated in :* *- Notarial Deed No. 41, dated March 29, 2019, the notary used was Irnawati Nazar, SH*

Pelaksanaan RUPS Tahunan Sebelumnya (2018) dan Realisasinya

Pada tahun 2018 Bank Papua menyelenggarakan (RUPS) Tahunan sebanyak 1 kali, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018. Berikut adalah tabel penyelenggaraan RUPS selama tahun 2018.

Previous Annual GMS (2018) and its realization

In 2018 Bank Papua held 1 Annual GMS, which was held on 27 April 2018. The following is a table of the holding of the GMS during 2018.

Jenis RUPS *Type of GMS*	**Waktu Pelaksanaan** *Execution time*	**Agenda** *Agenda*	**Keputusan**	*Decision*
RUPS Tahunan	27 April 2018	Mengenai pembahasan rancangan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. *Regarding the discussion of the draft procedure for the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*	Menyetujui rancangan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Approved the draft Standing Orders of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*

Jenis RUPS *Type of GMS*	Waktu Pelaksanaan *Execution time*	Agenda *Agenda*	Keputusan	*Decision*
		Mengenai Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2017. *Regarding PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the 2017 Financial Year.*	Menyetujui dan mengesahkan laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan. Dan menetapkan laba bersih Perseroan sebesar Rp113.272.660.159,- (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).	*Approve and ratify the Annual Calculation report which consists of the Company's Balance Sheet, Income Statement for the 2017 Fiscal Year which has been audited by the Hertanto Public Accountant Office, Grace and Karunawan and to give full discharge of responsibility to the Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for their Management and Supervision actions in the fiscal year ending December 31, 2017 as long as their actions are in accordance with applicable regulations and are reflected in the company's books.* *And determine the Company's net earning of Rp113,272,660,159 (one hundred thirteen billion two hundred seventy two million six hundred sixty thousand one hundred fifty nine rupiah).*
		Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018. *Tantiem Payment for Board of Director and Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2018.*	Menyetujui Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang bersumber dari Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 adalah sebesar 5 % dari laba setelah pajak atau sebesar Rp5.663.633.008,- dan teknis perhitungannya dilakukan secara bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempedomani ketentuan tentang Remunerasi yang berlaku.	*Approve the payment of the Board of Director and Board of Commissioners Tantiem for PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sourced from the Use of the Company's Net Earning for Fiscal Year 2017 is 5% of earning after tax or as much as Rp5,663,633,008, - and the technical calculation is carried out jointly by the Board of Director and the Board of Commissioners to refer to the applicable Remuneration provisions.*
		Mengenai Pengesahan setoran modal yang belum didukung Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp123.095.000.000,- *Regarding Ratification of capital contributions which have not been supported by the General Meeting of Shareholders (GMS) amounting to Rp123,095,000,000*	Menyetujui dan mengesahkan setoran modal sebesar Rp123.095.000.000,- atau sebanyak 24.619 lembar saham, sehingga dengan pengesahan ini maka jumlah saham yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp2.300.800.000.000,- atau 460.160 lembar saham.	*Approved and approved the capital deposit of Rp123,095,000,000 or 24,619 shares, so that with this ratification the number of shares paid up by the shareholders would become Rp2,300,800,000,000 or 460,160 shares.*

Jenis RUPS *Type of GMS*	Waktu Pelaksanaan *Execution time*	Agenda *Agenda*	Keputusan	*Decision*
		Mengenai Rencana Setoran Modal Tahun 2019. *Regarding the 2019 Capital Deposit Plan.*	Menyetujui rencana setoran modal Tahun 2019 sebesar Rp351.600.000.000,- yang akan disetor oleh masing-masing Pemegang Saham. Realisasi rencana setoran modal dimaksud akan dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah disahkannya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing para pemegang saham.	*Approved the plan for capital injection in 2019 in the amount of Rp351,600,000,000, - which will be paid by each Shareholder. The realization of the planned capital payment will be carried out at the first opportunity after the approval of the shareholders' Regional Budget (APBD).*
		Mengenai Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2018. *Regarding the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will carry out an audit of the financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2018.*	Menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2018	*Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that would conduct an Audit of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for Fiscal Year 2018*

Pelaksanaan RUPS Tahunan (2018) dan Realisasinya

Annual GMS (2018) and its Realization

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2018 tergambar di dalam uraian di bawah ini.

The stages of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2018 are illustrated in the description below.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018

Pengumumam *Announcement*	Undangan *Invitation*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil RUPS *GMS Result*
Diumumkan melalui iklan disurat kabar Cendrawasih Pos : • RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 diterbitkan di harian Cenderawasih Pos, tanggal terbit 13 April 2018.	Disampaikan melalui surat tercatat kepada seluruh pemegang saham. Tanggal undangan : • Pada tanggal 13 April 2018, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 27 April 2018.	RUPS tahunan dilaksanakan sebanyak 1 kali : • Pada tanggal 27 April 2018, bertempat di Gedung Negara Jl. Trikora Dok V Atas Jayapura.	Dimuat di dalam • Akta Notaris No. 54, Tanggal 27 April 2018, notaris yang digunakan adalah Maryatie Simanjuntak, SH
Announced in an ad in the Cendrawasih Pos newspaper: *The Annual GMS was held on April 27, 2018 and was published in the Cenderawasih Pos daily, dated April 13, 2018.*	*Delivered by registered mail to all shareholders.* *Invitation date:* *On April 13, 2018, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the RUPS on April 27, 2018.*	*Annual GMS held as many as 1 time :* *On April 27, 2018, located at the State Building Jl. Trikora Dok V Upper Jayapura.*	*Stated in :* *Notarial Deed No. 54, April 27, 2018, the notary used was Maryatie Simanjuntak, SH*

Penggunaan laba tahun 2018 ditetapkan berdasarkan akta notaris Irnawati Nazar, SH No. 41 tanggal 29 Maret 2019 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba selama 3 tahun terakhir yang telah ditetapkan sebagai berikut :

The use of earnings in 2018 is determined based on notarial deed No. 1 of Irnawati Nazar, SH No. 41 dated 29 March 2019 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . Based on the GMS decision above, the use of earnings for the past 3 years has been determined as follows:

Komposisi Pembagian Laba Selama 3 Tahun Terakhir
Composition of Earning Sharing for the Last 3 Years

Uraian	2018	2017	2016	*Description*
Dividen	55%	55%	0,00%	*Dividend*
Cadangan umum	40%	40%	100%	*General Reserve*
CSR	0,00%	0,00%	0,00%	*CSR*
Tantiem	5%	5%	0,00%	*Tantiem*
Jumlah Laba yang dibagikan	**100%**	**100%**	**100%**	*Amount of Profit shared*

Tindakan Pengurus Yang Memerlukan Persetujuan RUPS

Tindakan-tindakan Direksi dibawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, adalah sebagai berikut:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan

Selain hal diatas beberapa tindakan dibawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, yakni :

1. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
2. Mendirikan anak perusahaan;
3. Melepas penyertaan modal pada anak perusahaan;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan;
5. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
6. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
7. Pengusulan dan penetapan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Management Actions that Require GMS Approval

The actions of the Board of Director below require the approval of a GMS whose transaction value is more than 50% (fifty percent) of the total assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, are as follows:

1. *Transfer the Company's assets; or*
2. *Being a guarantee of the Company's debt security*

In addition to the above, some of the actions below require the approval of the GMS after getting a written response from the Board of Commissioners, namely:

1. *Conducting equity participation in other companies;*
2. *Establish a subsidiary;*
3. *Releasing equity participation in a subsidiary;*
4. *Merge, merge, take over, separate and dissolve subsidiary;*
5. *Establish and change the Company's logo;*
6. *Forming foundations, organizations and or associations that are directly or indirectly related to the company that have an impact on the Company;*
7. *Proposal and determination to become candidates for members of the Board of Director and Board of Commissioners;*

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Kedudukan hukum Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Bahkan untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris (Pasal 108 UUPT). Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yang mengelola dana publik.

The legal position of the Board of Commissioner (BOC) is stated in Article 1 number 6 and Article 108 of the Company Law as an organ of the company whose duty is to supervise in general and / or specifically to the policies of the board of directors in running the company and provide advice to directors. Even for companies whose business fields mobilize public funds, those issuing debt securities, or public companies must have at least 1 member of the BOC (Article 108 of the Company Law). This shows the importance of supervision in the implementation of company activities that manage public funds.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank Papua melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris Bank Papua terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris, dimana Komisaris Utama mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

The BOC is a Corporate organ that is collectively responsible for supervising and providing advice to the BOD and ensuring that Bank Papua implements GCG at all levels or levels of the organization. The position of each member of the BOC including the President Commissioner is equal. The BOC of Bank Papua consists of the President Commissioner and members of the BOC, where the President Commissioner coordinates the activities of the BOC. In carrying out its duties, the BOC is assisted by: Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Persyaratan Dewan Komisaris

Terdapat 3 (tiga) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Komisaris Bank Papua. Persyaratan tersebut adalah Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, dan Persyaratan lainnya.

a. Persyaratan Umum:

Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6. Tidak dicabut hak miliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

BOC's Requirements

There are 3 (three) types of requirements that must be met by prospective members of the Bank Papua Commissioner. These requirements are General Conditions, Special Requirements, and other Requirements.

a. General Requirements:

The BOC is an Indonesian citizen who:

1. *Faith in God Almighty.*
2. *Faithful and obedient to the State and Government.*
3. *Not involved directly or indirectly in the activities of treason to the State.*
4. *Physically and mentally healthy.*
5. *Never carry out activities that are detrimental to the State or disgraceful actions in the banking sector.*
6. *His property rights are not revoked based on a court decision.*

b. Persyaratan Khusus

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
   - Dinyatakan pailit;
   - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
   - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

c. Persyaratan Lainnya

1. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan / atau anggota direksi.
2. Persyaratan lainnya secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Pemberhentian dapat dilakukan apabila:

1. Masa jabatan berakhir.
2. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena :
   - Mengundurkan diri.
   - Meninggal dunia.
   - Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar ini.

b. Special Requirements

1. *An individual who is capable of carrying out legal actions, except within 5 (five) years prior to his appointment:*
   - *Declared bankrupt;*
   - *Become a member of the Board of Director (BOD) or a member of the BOC found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or*
   - *Convicted of committing a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.*
2. *Pass the Fit and Proper Test in accordance with Bank Indonesia regulations concerning the Fit and Proper Test.*

According to Bank Indonesia, the concerned person has good competence and integrity, as stipulated in the applicable Bank Indonesia provisions concerning Fit and Proper Test.

c. Other Requirements

1. *The majority of members of the BOC are prohibited from having family relations with each other up to the second degree with fellow members of the board of commissioners and / or members of the board of directors.*
2. *Other requirements in detail will be stated in a GMS decision.*

Appointment and Dismissal of the BOC

The appointment of the BOC has gone through the fit and proper test according to the applicable laws and regulations and the provisions of Good Corporate Governance. All members of the BOC have integrity, competence and a good reputation.

Termination can be done if:

1. *Term of office ends.*
2. *Stopping before the term ends because:*
   - *Resign.*
   - *Die.*
   - *Dismissed because they no longer meet the requirements or for certain reasons based on the applicable laws and / or this Articles of Association.*

Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Papua telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Papua telah lulus uji kemampuan dan kepatutan tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut :

BOC Fit and Proper Test

The members of the BOC of Bank Papua have met the requirements for fit and proper in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 27 / POJK.03 / 2016 dated July 22, 2016 concerning Capability and Compliance Assessment for the Main Parties of Financial Service Institutions and Financial Services Authority Circular No. 32 / SEOJK.04 / 2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance.

All members of the BOC of Bank Papua have passed the fit and proper test without records and have received approval from Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK), indicating that each member of the BOC has integrity, competence and is relevant to his position to carry out his duties and responsibilities. The results of the BOC' ability and appropriateness can be seen in the following table:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kompetensi *Competency*	Hasil *Result*	Surat Persetujuan *Approval Letter*	Penyelenggara *Organizer*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Manajemen Risiko	Lulus	Surat OJK No. SR-247/PB.12/2018 tanggal 12 November 2018	OJK
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Manajemen Risiko	Lulus	Surat OJK No. : SR-213/PB.12/2018 tanggal 8 Oktober 2018	OJK
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Manajemen Risiko	Lulus	Surat OJK No. SR-31/PB.12/2018 tanggal 26Februari 2018	OJK
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Manajemen Risiko	Lulus	Surat OJK No. SR-31/PB.12/2018 tanggal 26 Februari 2018.	OJK

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris. Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 orang dengan komposisi sebagaimana tabel berikut:

Number and Composition of the BOC

In 2019 there was no change in the number and composition of the Board of Commissioners. The number of the Board of Commissioners is 4 people with the composition as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Domisili *Domcile*	Masa Efektif *Effective Period*	Masa Jabatan *Term of Office*
T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Jayapura	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No : 03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tanggal 29 November 2018	Periode 1
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris Non Independen	Jayapura	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No : 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tanggal 29 November 2018	Periode 1
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Jayapura	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No : 01/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018	Periode 1
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Jayapura	Tahun 2018-2021 sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No : 02/SK/SIRKULER-BPD/IV/2018	Periode 1

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Bank Papua sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Bank.

Determination of the composition and number of members of the BOC is done by taking into account the vision and mission and strategic plans of the Bank Papua so that decision making can be carried out effectively, precisely and quickly, and uphold independence and solely for the interests of the Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Papua dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar. Mengingat Pedoman Dewan Komisaris merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan secara rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Dewan Komisaris ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan *fiduciaryduties, skill and care* yang inheren dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

Adapun isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan.
2. Fungsi.
3. Persyaratan & Komposisi Dewan Komisaris.
4. Etika Jabatan.
5. Tugas & Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Hak & Wewenang Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris.

BOC Guidelines and Work Rules

The BOC' guidelines contain compilations of the principles of Corporate law, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association governing the working procedures of the BOC and BOD and their complete organs. The work guidelines & rules of the BOC are codified results of various regulations that apply to Bank Papua and best practices of Bank good corporate governance.

The purpose of the BOC' Guidelines is to facilitate the BOC in understanding the regulations relating to the work procedures of the BOC and their complementary organs. For this reason, the development must always be carried out according to the needs of the Company. Changes made must be based on applicable regulations and do not violate the provisions in the Articles of Association. Considering that the BOC Guidelines is a compilation of the principles of Corporate law, then in its implementation it must still refer to the applicable laws and regulations. The various detailed provisions contained in the Articles of Association, the Directives of Shareholders stipulated in the SGM, and various other legal provisions remain binding even though they are not specifically described in this BOC Guidelines. The principle of good faith, full responsibility and fiduciary duties, skill and care that is inherent with the position of the BOC is a general principle that must be respected by the Company's organs in charge of overseeing and managing the Company.

The contents of the Guidelines for Working Procedures of the BOC and the BOD include the following:

1. *Vision, Mission, Objectives.*
2. *Function.*
3. *Requirements & Composition of the BOC.*
4. *Position Ethics.*
5. *Duties & Obligations of the BOC.*
6. *Rights & Authorities of the BOC.*
7. *BOC Meeting.*

8. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
10. Komite-Komite Dewan Komisaris.
11. Sekretariat Dewan Komisaris.

8. *Employment Relationship between the BOC and BOD.*
9. *Evaluation of the BOC' Performance.*
10. *BOC Committees.*
11. *BOC Secretariat.*

Beberapa Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang dimuat di dalam *Manual Board*
Several Board of Commissioners Work Guidelines are contained in the Manual Board

	Hak dan Wewenang Dewan Komisaris	Kewajiban Dewan Komisaris	*Rights and Authorities of the Board of Commissioners*	*Obligations of the Board of Commissioners*
1	Berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mecocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi	Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan visi dan misi Bank	*Authorities check books, proof documents, inventory, check and match the conditions of cash (for verification purposes) and other securities and know all actions taken by the Board of Director*	*Provide opinions and approvals of the Bank's Long Term Plan, Bank Business Plan (BBP) and Annual Corporate Work Plan (RKAP), as well as other plans, prepared by the Board of Director, in accordance with the Bank's vision and mission*
2	Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar	*Enter buildings and courtyards or other places that are used or controlled by the Bank*	*Under certain conditions, the Board of Commissioners must hold an annual SGM and other SGM in accordance with their authorities as stipulated in the legislation and Articles of Association*
3	Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan	Melaporkan kepada RUPS mengenai kinerja Bank disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh	*Request information and / or explanation from the Board of Director and / or Bank officials under the Board of Director regarding all matters relating to the management of the Company*	*Report to the SGM regarding the performance of the Bank accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken*
4	Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.	Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank	*Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Director.*	*Propose to the SGM the appointment of a Public Accountant who will conduct an examination of the Bank's books*
5	Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris	Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank	*Requests the Board of Director to attend the Board of Commissioners' Meeting*	*Research and review and provide responses to periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Director and sign the Bank's Annual Report*
6	Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta	*Request information and / or explanation from Officials under the Board of Director regarding all matters concerning the management of the Bank, both in the context of implementing the duties and authorities of the Board of Commissioners, without first having to be informed by the Board of Director*	*Provide explanations, opinions and suggestions to the SGM regarding the Annual Report, if requested*

Beberapa Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang dimuat di dalam *Manual Board* *Several Board of Commissioners Work Guidelines are contained in the Manual Board*				
	Hak dan Wewenang Dewan Komisaris	**Kewajiban Dewan Komisaris**	*Rights and Authorities of the Board of Commissioners*	*Obligations of the Board of Commissioners*
7	Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Bank	Memberikan laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS	*Establish an Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Oversight Committee and other committees if deemed necessary by taking into account the needs of the Bank*	*Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the financial year to the SGM*
8	Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS	*Use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Bank, if deemed necessary and by observing the applicable provisions*	*Carry out other obligations in the framework of the task of supervision and giving advice, insofar as it does not conflict with the provisions of statutes and statutes of the SGM*
9	Melakukan tindakan Pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentutan Anggaran Dasar Bank	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal Perseroan	*Perform Bank Management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association*	*Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Director, including the Company's internal audit report*
10	Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, audit ekternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan	*Attending Board of Director meetings and providing views on matters discussed*	*Ensure that the Board of Director has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external audit, results of supervision by Bank Indonesia / the Financial Services Authority*
11	Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS	Memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang perundangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	*Carry out other supervisory authorities insofar as they do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and / or SGM decisions*	*Notify Bank Indonesia / Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days since the discovery of violations of laws and regulations in the financial and banking sector and the circumstances or estimates of circumstances that could endanger the business continuity of the Bank.*

Etika Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan . Etika jabatan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. **Etika berkaitan dengan Keteladanan**
   Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pegawai Perseroan.
2. **Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
   Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
3. **Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**
   Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.
4. **Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan**
   Selama menjabat, Komisaris tidak diperkenankan untuk:
   a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri.
   b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
5. **Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan**
   Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan Anggota Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa:
   a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
   b. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain.

BOC Work Ethics

In carrying out its duties and functions the Commissioner must always base himself on position ethics. The ethics of the position of Commissioners are as follows:

1. ***Ethics is related to exemplary***
   Commissioners must encourage ethical behavior and uphold the highest ethical standards in the Company, one of the ways is by making themselves good role models for the Company's BOD and Employees.
2. ***Ethics relating to Compliance with Legislation***
   Commissioners must comply with applicable laws and regulations, Articles of Association, and Guidelines for Good Corporate Governance and Company policies that have been set.
3. ***Ethics relating to Openness and Confidentiality of Information***
   The Commissioner must disclose information in accordance with the provisions of the applicable legislation and always maintain the confidentiality of the information entrusted to him including bank secrets and customer secrets in accordance with applicable laws and Company policies.
4. ***Ethics relating to the Company's Opportunities***
   During his tenure, the Commissioner is not permitted to:
   a. Taking the Company's business opportunities for himself.
   b. Use the Company's assets, Company information or its position as a Member of the Commissioner for personal interests that conflict with the provisions of the laws and regulations and applicable Company policies.
5. ***Ethics relating to Conflict of Interest***
   The definition of conflict of interest is a certain condition in which the interests of the Members of the BOC conflict with the interests of the Company to gain earnings, increase value, achieve the vision and carry out the mission as well as the direction of the General Meeting of Shareholders , which will ultimately harm the Company. For this matter, the Commissioners must always:
   a. Avoid conflicts of interest.
   b. Fill out the Special List containing share ownership and or his family in the Company and other companies.

c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
f. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

6. Etika berkaitan dengan Penyuapan

Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

a. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
b. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan[1].
c. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
e. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan.
f. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.

c. Guided not to use positions for personal interests or for the benefit of other people or parties involved that are contrary to the interests of the Company.

d. Avoid any activity that can affect its independence in carrying out its duties.
f. Disclosing in the event of a conflict of interest, and the member of the BOC concerned may not involve themselves in the Company's decision-making process relating to this matter.

6. Ethics relating to Bribery

The Commissioner always prevents and avoids bribery in any way and form for any interest that is believed and can be considered to be detrimental to the Company.

Duties and Responsibilities of the BOC

1. In relation to the implementation of the supervisory and advisory functions to the BOD, the Commissioners have the duty and / or obligation to:

a. Subject to the provisions of applicable legislation, the Company's Articles of Association and the GMS decision.

b. Have good intentions, be careful and responsible in carrying out their duties in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company[1].
c. Carry out oversight duties on the policies of the BOD in carrying out the management of the Company including the implementation of the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, Business Plans and the provisions of the Articles of Association and the applicable General Meeting of Shareholders .
d. Research and review the annual reports prepared by the BOD and sign the report.
e. Supervise the BOD to ensure that the BOD adheres to the order of the Company's internal regulations.

f. Providing advice, opinions and suggestions to the BOD regarding the management of the Company.

[1] Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 114

g. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
h. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan BI.
i. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
j. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Komisaris.
k. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
l. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
m. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan.
n. Menyusun rencana kerja Komisaris untuk periode tahun berjalan.
o. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
p. Memantau efektivitas praktik Tata Kelola Perusahaan Bank Papua antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Tata Kelola Perusahaan Bank Papua.

2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan RUPS, Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja Komisaris kepada RUPS.
b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS.

g. Give opinions and suggestions to the BOD regarding the preparation of the Company's Vision, Mission and other strategic plans as stipulated in the Articles of Association.

h. Provide opinions and suggestions as well as ratification regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the BOD. Ratification of the Company's Long Term Plan no later than 1 (one) calendar month from the submission of the draft by the BOD and 30 (thirty) days from the year the new book begins to ratify the Company's Work Plan and Budget or in accordance with BI regulations.

i. Conduct research and review of reports from the BOD and all staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together.

j. Research and review reports from the Committees under the Commissioner.
k. Following the development of PT. Bank Papua both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media as well as from other sources.

l. Attend work meetings / coordination with the BOD and all staff.
m. Make efforts to ensure that the BOD and its staff have complied with statutory provisions and other regulations in managing the Company.

n. Prepare the Commissioners work plan for the current year period.
o. Follow up on the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, articles of association, and prudential banking practices.
p. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices, among others, by holding regular meetings between Commissioners and BOD to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

2. Related to the General Meeting of Shareholders

In relation to the GMS, the Commissioner is in charge and obliged to:

a. Report and account for the activities and performance of the Commissioners to the GMS.
b. Report the performance of the BOD to the GMS.

c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil Penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
d. Memberikan pendapat dan saran bagi Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
g. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya.
h. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS.
i. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua[2]

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud butir c diatas Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
e. Dalam melakukan pengawasan tersebut Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan

c. Oversee the implementation of the Company's work plan and budget and submit the results of the Assessment and their opinions to the GMS.
d. Provide opinions and suggestions for the General Meeting of Shareholders regarding the appointment and dismissal of BOD.
e. Following the development of the Company's activities, and in the event that the Company exhibits significant symptoms of setbacks, immediately report to the GMS accompanied by suggestions regarding the corrective steps that must be taken.
f. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company.
g. Provide responses to the BOD' periodic reports (quarterly, annually) and at any time needed regarding the development of the Company and report the results of the implementation of their duties to the Shareholders on time.
h. Propose the appointment of a Public Accountant to the GMS.
i. Perform other supervisory duties determined by the GMS.

3. Related to the Implementation of Good Corporate Governance[2]

a. The BOC must carry out its duties and responsibilities independently.
b. The BOC must ensure the implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.
c. The BOC must supervise the implementation of the duties and responsibilities of the BOD, as well as provide advice to the BOD.
d. In conducting supervision as referred to in point c above, the BOC must direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
e. In carrying out such supervision the BOC is prohibited from being involved in making decisions on the Bank's operational activities, except:
   - *Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia provisions concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks; and*

[2] POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum

- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
   - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
   - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

i. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris dan mematuhinya secara konsisten.

j. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
   - Kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
   - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

k. Anggota dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

l. Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

m. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- *Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.*

f. The decision taken by the BOC did not negate the responsibility of the BOD for the implementation of Bank management.

g. The BOC must ensure that the BOD has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditor, Bank Indonesia supervision results and / or the results of supervision by other authorities.

h. The BOC must notify Bank Indonesia no later than 7 (seven) working days from the discovery of:
   - *Violation of laws and regulations in the field of finance and banking; and*
   - *Circumstances or estimates of circumstances that could endanger the business continuity of the Bank.*

i. The BOC must have binding work guidelines and rules for each member of the BOC and adhere to them consistently.

j. Members of the BOC must disclose:
   - *Ownership of shares, both at the bank concerned and at banks and other companies, which are domiciled at home and abroad;*
   - *Financial relations and family relations with other members of the BOC, members of the BOD and / or Bank shareholders, in the report on the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in the Bank Indonesia Regulation.*

k. Members of the BOC are prohibited from utilizing the Bank for personal, family and / or other parties' interests that can harm or reduce the Bank's earnings.

l. Members of the BOC are prohibited from taking and / or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders .

m. Members of the BOC must disclose the remuneration and facilities in the Good Corporate Governance implementation report as stipulated in this Bank Indonesia Regulation.

4. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS yang antara lain berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Komisaris dan Direksi

Komisaris berkewajiban untuk:

- Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
- Mengusulkan sistem evaluasi kinerja dewan dan individu Komisaris dan Direksi kepada RUPS. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Terkait dengan Modal Minimum Bank[3]

- Dewan Komisaris wajib mengawasi bahwa Bank telah beroperasi dengan modal diatas modal minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- Dalam hal terjadi keadaan dimana modal Bank dibawah modal minimum sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, maka Dewan Komisaris mengawasi pembuatan dan pelaksanaan *action plan* pemenuhan modal minimum oleh Direksi.

7. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko[4]

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya. Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Komisaris juga mempunyai kewajiban untuk :

4. Related to Nomination and Selection of Commissioners and BOD

a. The BOC is obliged to propose a system and procedure for the selection and / or replacement of members of the BOC and BOD, and submit it to the SGM for approval. In carrying out this obligation, the Commissioners are assisted by the Remuneration and Nomination Committee.

b. Propose candidates for members of the BOC and BOD to the SGM, among others, based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

5. Related to the Remuneration and Performance Evaluation of Commissioners and BOD

The Commissioner is obliged to:

- *Propose a remuneration system that is appropriate for Members of the BOC and BOD to the SGM.*
- *Propose a system for evaluating the performance of the Board and individual Commissioners and BOD to the SGM. In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Remuneration and Nomination Committee.*

6. Related to the Bank's Minimum Capital[3]

- *The BOC must monitor that the Bank has operated with capital above the minimum capital as determined by Bank Indonesia.*
- *In the event of a situation where the Bank's capital is below the minimum capital as stipulated by Bank Indonesia, the BOC oversees the preparation and implementation of the action plan for the fulfillment of minimum capital by the BOD.*

7. Related to Risk Management

The BOC has an obligation to conduct periodic Assessments and provide recommendations on risks and the application of Risk Management at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Committee under it. Commissioners carry out an active role in monitoring the implementation of Risk Management carried out by the BOD. In addition, the Commissioners also have the obligation to:

[3] POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

[4] POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

8. Terkait dengan Tingkat Kesehatan Bank[5]

Dewan Komisaris wajib memantau pelaksanaan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan langkah-langkah yang diperlukan yang dilakukan Direksi dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

9. Terkait dengan Rencana Strategis Bank[6]

Dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan Rencana Bisnis, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sekurang-kurangnya meliputi :

a. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
b. Memberikan pernyataan pendapat tentang pelaksanaan rencana bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi rencana bisnis.
c. Memberikan laporan hasil penilaian tentang faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan (RBBR).
d. Memberikan pernyataan pendapat mengenai upaya perbaikan apabila menurut penilaian komisaris kinerja bank dari hasil RBBR terjadi penurunan kinerja.
e. Menyampaikan laporan semesteran pada bulan Juni dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang hasil pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
f. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi.
g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

a. Approve and evaluate Risk Management policies;
b. Evaluate the BOD' accountability for the implementation of the Risk Management Policy as referred to in letter a;
c. Evaluate and decide on the request of the BOD relating to transactions that require the approval of the BOC.

8. Related to Bank Soundness[5]

The BOC must monitor the implementation of the Bank's business activities based on the prudential principle and the necessary steps taken by the BOD in order to maintain or improve the Bank's Soundness.

9. Related to the Bank's Strategic Plan[6]

In supervising the making and implementation of the Business Plan, the duties and obligations of the BOC at least include:

a. Provide opinions and suggestions as well as ratification regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the BOD. Ratification of the Company's Long Term Plan no later than 60 (sixty) days from the submission of the draft by the BOD and 30 (thirty) days from the year the new book begins to ratify the Company's Work Plan and Budget or in accordance with Bank Indonesia regulations.
b. Provide an opinion statement on the implementation of the business plan in the form of evaluating quantitative and qualitative aspects of the realization of the business plan.
c. Provide reports on the results of Assessments of risk profile factors, GCG, profitability, and capital (BBPR).
d. Provide a statement of opinion regarding improvement efforts if according to the BOC evaluation the bank's performance from the BBPR results in a performance decline.
e. Submitted a semester report in June and December to Bank Indonesia regarding the results of monitoring the implementation of the Bank's Business Plan.
f. Give approval for the Bank Business Plan prepared by the BOD.
g. Supervise the implementation of the Bank's Business Plan.

[5] POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

[6] POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

10. Terkait dengan Penilaian Kualitas Aktiva Bank[7]

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.
b. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksud.

11. Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)[8]

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

a. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
b. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
c. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
d. Melakukan pengawasan agar Bank tidak membuat suatu pengikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
e. Mengungkapkan dan melaporkan anggota keluarga dan perusahaan yang dimilikinya yang dikategorikan sebagai pihak terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan.

12. Terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank[9]

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pemenuhan ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, antara lain :

a. Pembuatan dan penyajian :
   1). Laporan Tahunan;
   2). Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
   3). Laporan Keuangan Konsolidasi.
   4). Laporan kepada Bank Indonesia
   meliputi seluruh aspek yang wajib diungkapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
b. Pelaksanaan audit oleh *Auditor* Eksternal, berikut identifikasi dan tindak lanjut temuan hasil audit.

10. Related to Bank Asset Quality Assessment[7]

The BOC is obliged to:

a. Give approval on policies regarding the quality of Loan assets, securities, placements and policies regarding Loan restructuring, write off, and collect off.

b. Actively supervise the implementation of the Policy in question.

11. Related to the Legal Lending Limit (LLL)[8]

The BOC is obliged to:

a. Give approval on Policy guidelines regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).
b. Give approval for the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).
c. Actively supervise the Policy in question.

d. Supervise so that the Bank does not make an agreement or agreement or establish requirements that require the Bank to provide funds that will lead to violations of the LLL and provide funds that result in violations of the LLL.

e. Disclose and report on family members and companies they have that are categorized as related parties to Bank Indonesia.

12. Related to Transparency of Bank Financial Conditions[9]

The BOC supervises the BOD on the fulfillment of the provisions concerning Transparency of Bank Financial Conditions, including:

a. Making and presenting:
   1). Annual report;
   2). Quarterly Published Financial Report;
   3). Consolidated Financial Statements.
   4). Report to Bank Indonesia
   covering all aspects that must be disclosed and conveyed to related parties in a complete, accurate and timely manner.
b. The audit is carried out by the External Auditor, along with identification and follow-up of audit findings.

---

7 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

8 POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyedia Dana Besar Bagi Bank Umum.

9 POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

13. Terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal Sementara[10]

Dalam penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, tugas dan kewajiban komisaris adalah :

a. Mengusulkan rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
b. Mengawasi pelaksanaan Penyertaan Modal dan penyertaan modal sementara yang telah disetujui oleh RUPS.
c. Meneliti hasil *monitoring* dan mengevaluasi perkembangan usaha Bank atau perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki Bank
d. Memonitor penerapan penyertaan modal.
e. Mempertimbangkan usul tindakan pengamanan oleh Direksi apabila perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki Bank mengalami kemunduran usaha.

13. Related with the Application of the Prudential Principle in Provisional Equity Participation Activities[10]

In applying the Prudential Principle in capital participation activities, the duties and obligations of commissioners are:

a. Propose the BOD' plan for capital participation in other companies to the SGM for approval.
b. Supervise the implementation of Equity Participation and temporary capital participation approved by the SGM.
c. Research the results of monitoring and evaluate the development of the business of the Bank or other companies whose shares are partially owned by the Bank
d. Monitor the implementation of equity participation.
e. Consider the proposal of security measures by the BOD if another company whose shares are partially owned by the Bank experiences a business setback.

14. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Anggota Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Related to Business Ethics and Anti-Corruption

Members of the BOC are prohibited from accepting, giving or offering either directly or indirectly SDMething of value to government officials and / or other parties that can influence or as a Reward for what they have done and other actions in accordance with the applicable laws and regulations.

15. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern[11]

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut.
b. Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan;
c. Memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut;
d. Mengesahkan struktur organisasi;
e. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

15. Related with the Internal Control System[11]

The BOC has the following responsibilities:

a. Supervise the implementation of internal controls in general, including the policies of the BOD that establish these internal controls.
b. Ratify and periodically review the Bank's overall business policies and strategies;
c. Understand the main risks faced by the Bank, determine the level of risk that can be tolerated (risk tolerance), and ensure that the BOD has taken the steps needed to identify, measure, monitor, and control these risks;
d. Ratify the organizational structure;
e. Ensure that the BOD has monitored the effectiveness of the implementation of the Internal Control System.

[10] POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

[11] SE OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Internal bagi Bank Umum.

16. Terkait dengan Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Penerapan Fungsi Audit internal Bank Umum (SPFAIB)[12]

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk :

a. Dalam kerangka pengendalian umum tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal (DAI). Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan DAI.
b. Menyetujui *Internal audit Charter*.
c. Menanggapi rencana audit internal dan masalah-masalah yang ditemukan oleh auditor intern.
d. Menentukan pemeriksaan khusus oleh DAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindak lanjuti laporan kepala DAI.
f. Memastikan :
   - Bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
   - Bahwa bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
g. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prisip pengelolaan Bank secara sehat.
h. Menilai efektifitas pelaksanaan fungsi DAI.
i. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan DAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
j. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) yang diusulkan Direktur Utama.

17. Terkait dengan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha Bank[13]

Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank tersebut antara lain adalah hal-hal yang dapat menyebabkan Bank dinyatakan dalam Status Pengawasan

16. Related to the Assignment of Compliance Director and Standard Application of Commercial Bank Internal Audit Function (SPFAIB) [12]

The BOC has an obligation to:

a. In the general control framework the final responsibility for supervision is carried out by the BOC, among others, by evaluating the findings of the audit by the Internal Audit Unit (DAI). In this connection, the BOC is authorized to ask the BOD to follow up on the findings of the Internal Audit Unit.
b. Approved the Charter Internal Audit.
c. Respond to internal audit plans and problems found by internal auditors.
d. Determine a special inspection by the Internal Audit Unit if there are allegations of fraud, irregularities, and applicable laws and regulations.
e. Taking the necessary steps in the case of the Auditee does not follow up on the DAI Leader report.
f. Ensure:
   - *Whereas the reports submitted to Bank Indonesia and other agencies have been carried out correctly and in a timely manner.*
   - *That the bank complies with the applicable laws and regulations.*
g. Ensure that management has carried out its business in accordance with the principles of managing the Bank in a sound manner.
h. Assess the effectiveness of the implementation of the DAI function.
i. Evaluate and examine follow-up of IAU Reports, Compliance Director Reports, Public Accountants Reports, Bank Indonesia Reports and BPK Reports.
j. Consider the appointment and dismissal of the Leader of the internal audit work unit (DAI) proposed by the President Director.

17. Related to Conditions that can Harm the Bank's Business Continuity[13]

The BOC must notify Bank Indonesia no later than 7 (seven) working days from the discovery of the circumstances or the estimated conditions that could endanger the business continuity of the Bank.

Matters that could endanger the business continuity of the Bank include matters that could cause the Bank to be stated in Intensive Supervision and / or Special Surveillance Status,

[12] POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Intensif (*Intensive Supervision*) dan/atau Status Pengawasan Khusus *(Special Surveillance*), yaitu memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
b. Memiliki permasalahan aktual dan/atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
c. Terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
d. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
e. Dinilai memiliki permasalahan earningabilitas yang mendasar;
f. Memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
g. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus)
h. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah likuiditas yang mendasar.

18. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Komisaris mengawasi agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
b. Komisaris bertanggung jawab kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk menjaga kerahasiaan Perseroan.
c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Komisaris memastikan agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan.

which is fulfilling one of the following criteria:

a. has a predicate of being less sound or unsound in assessing the soundness of the Bank
b. have actual and/or potential problems based on an Assessment of the overall risk (composite risk);
c. there is an excess and / or violation of the Legal Lending Limit and according to Bank Indonesia, the Bank's proposed resolution measures are considered unacceptable or impossible to achieve
d. having a minimum statutory reserve ratio in rupiah equal to or greater than the ratio set for the bank's statutory reserve account, but the bank is considered to experience fundamental liquidity problems;
e. considered to have fundamental profitability problems;
f. have a non-performing loan in net more than 5% (five percent) of total Loan.
g. Minimum Capital Requirement Ratio is less than 8% (eight percent)
h. the ratio of Statutory Reserves in rupiahs is less than the ratio set for the Bank's Statutory Reserves, with deteriorating developments in a short period of time or based on the Assessment of Bank Indonesia experiencing fundamental liquidity problems.

18. Related to the Disclosure and Confidentiality of Information

a. The Commissioner oversees that PT. Bank Pembangunan Daerah Papua discloses important information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with laws and regulations that apply in a timely, accurate, clear and objective manner.
b. The Commissioner is responsible to PT. Bank Pembangunan Daerah Papua to maintain the confidentiality of the Company.
c. Confidential information obtained while serving as a member of the BOC must be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.
d. The Commissioner ensures that PT. Bank Pembangunan Daerah Papua discloses the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Annual Report.

[13] POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

19. Terkait Pelaksanaan Pengawasan/Pemberian Nasehat oleh Komisaris

Pelaksanaan pengawasan/pemberian nasehat oleh Komisaris antara lain dilakukan melalui :

a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi.
b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Komisaris.
c. Kunjungan ke Unit Kerja/cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perseroan seperti pemasaran, Sumber Daya Manusia, keuangan dan lainnya berjalan secara efektif.

Dalam hal Komisaris akan melakukan kunjungan ke Unit Kerja/cabang, prosedur yang ada sebagai berikut :

- Komisaris menyampaikan rencana kunjungan secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan yang akan dilakukan.
- Direksi mempersiapkan kunjungan tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Komisaris.
- Dalam hal kunjungan dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut diatas tidak diperlukan.
- Dalam hal Komisaris akan memberikan pendapat dan sarannya sehubungan dengan hasil temuannya di unit kerja yang bersangkutan maka pendapat dan saran tersebut disampaikan kepada/melalui Direksi.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala.

20. Terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah[14]

Tugas Komisaris yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Menyetujui kebijakan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
b. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

19. Related to the Implementation of Supervision / Giving Advice by the Commissioner

The implementation of supervision / advisory by the Commissioners is carried out through:

a. Request written information from the BOD about a problem that has occurred.
b. Provide opinions or direction in Commissioners' meetings with the BOD or other meetings attended by Commissioners.
c. Visits to certain Work Units / branches in order to ensure the implementation of the Company's operations such as marketing, Human Resources, finance and others are running effectively.

In the event that the Commissioner will make a visit to the Work Unit / branch, the procedure is as follows:

- *The Commissioner submits a written visit plan to the BOD by stating the intent and purpose, location and time of the visit to be carried out.*
- *The BOD prepares for the visit, including providing the necessary facilities according to the provisions regarding official travel of the Commissioner.*
- *In the event that the visit is carried out together with the BOD, the above procedure is not required.*
- *In the event that the Commissioner will give his opinion and suggestions regarding the findings in the relevant work unit, the opinions and suggestions are submitted to / through the BOD.*
- *Provide responses to periodic reports.*

20. Related to the Know Your Customer Principle[14]

The duties of the Commissioners relating to the Know Your Customer Principles include at least the following:

a. Approved the Policy on the application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT).
b. Supervise the implementation of Know Your Customer Principles Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT).

21. Terkait dengan Perkreditan[15]

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dibidang perkreditan adalah :

a. Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tersebut.
c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
d. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) yang minimal telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).
e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKP.
f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu dan hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB.

21. Related to Loan[15]

The duties and authorities of the BOC in the field of Loan are:

a. Approved the annual Loan plan including the plan for lending to parties related to the Bank and Loan to certain large debtors that will be contained in the Bank's work plan submitted to Bank Indonesia.
b. Supervise the implementation of the Loan plan.
c. Request an explanation and or accountability of the BOD and ask for corrective steps if the implementation of the Loan provision deviates from the Loan plan that has been made.
d. Approved the Loan Policy Guideline (PKP) which has at least included all aspects listed in the Guidelines for Preparing Bank Loan Policies (PPKPB).
e. Request an explanation and or accountability of the BOD if there are irregularities in the implementation of the PFM.
f. Request an explanation and or accountability of the BOD regarding the development and quality of the Loan portfolio as a whole, including loans given to parties related to the Bank and certain large debtors and other matters as stipulated in the PPKPB.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Direksi dilakukan secara independen. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Bank Papua adalah sebagai berikut:

Division of Duties of the BoC's Member

The implementation of the duties and responsibilities of the BOC in ensuring the implementation of Corporate Governance by the BOD is carried out independently. The BOC is not involved in decision making related to operational activities except in terms of providing funds to related parties and other matters stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The decision of the BOC is part of the supervisory duties of the BOC, so that it does not negate the responsibility of the BOD for the implementation of management.

The division of duties and responsibilities of the members of the BOC of Bank Papua are as follows:

---

14 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendaaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

15 POJK nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Fokus Pengawasan *Focus of Supervision*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Pelaksanaan program kerja dan tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris Non Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank Papua. Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait penyusunan Visi, Misi serta rencana strategis yang diatur dalam anggaran dasar.

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan nasihat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga harus memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, dengan fokus pada Pengawasan Stratejik, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bank.

- Pengawasan stratejik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
- Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan stratejik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan Perundangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan Modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di Industri Perbankan.

Implementation of the BOC' Oversight Function

The BOC carries out the supervisory function both in general and specifically in accordance with the Articles of Association. The BOC carries out oversight duties on the policies made by the BOD in carrying out the management of Bank Papua. The BOC can provide advice, opinions and suggestions to the BOD regarding the preparation of the Vision, Mission and strategic plans stipulated in the articles of association.

The Supervision function of the BOC is manifested in a supervisory function where the BOC provides direction and instructions to the BOD and provides advice to the General Meeting of Shareholders (SGM). The BOC must also ensure that the advice given to the BOD is carried out in accordance with applicable laws.

The BOC in carrying out the supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the BOD periodically and at any time and providing input to the BOD, with a focus on Strategic Supervision, Risk Monitoring, Supervision of Capital Use and Supervision of Bank Management Implementation

- *Strategic supervision by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.*
- *Risk Management oversight by conducting supervision to ensure that the risk appetite and risk tolerance and Risk Management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia Regulations and other legislation.*
- *Supervision of Bank Capital use by ensuring that the capital adequacy provisions are implemented by the BOD in accordance with Bank Indonesia Regulations and Business practices in the Banking Industry.*

- Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan bank dalam setiap kegiatan usaha Bank Papua pada seluruh tingkatan organisasi Bank Papua.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank Papua. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait penyusunan Visi, Misi serta rencana strategis yang diatur dalam anggaran dasar.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait, kebijakan yang akan dibuat oleh Direksi, antara lain dalam hal permasalahan sebagai berikut:

- Kinerja Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2018 .
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019
- Pembahasan Perkembangan Kinerja Bank Papua.
- Penyelesaian Kasus *Fraud Review* Materi *Corporate Plan* Pembahasan laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2019.
- Evaluasi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank.

Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat di Perseroan.

- *Supervision of the implementation of bank governance is an effort to ensure the implementation of bank governance principles in every business activity of Bank Papua at all levels of Bank Papua organization.*

Supervision of the BOC regarding the BOD's Policy

As part of the implementation of its duties and responsibilities, the BOC carries out oversight duties on the policies made by the BOD in carrying out the management of Bank Papua. During 2018, the BOC has provided advice, opinions and suggestions to the BOD regarding the preparation of the Vision, Mission and strategic plans stipulated in the articles of association.

During 2019, the BOC has provided advice, opinions and suggestions to the relevant BOD, policies to be made by the BOD, among others in the following matters:

- *Bank Papua Financial Fiscal Year 2018.*
- *Preparation of General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019.*
- *Discussion on the Development of Bank Papua's Performance.*
- *Resolution of the Fraud Case Review Corporate Plan Material Discussion on the Bank's Sound Level report for the June 2019 period.*
- *Evaluation of Bank Soundness.*

New BOC Orientation Program

With the background of the Commissioners who come from various parties who represent the Shareholders, the existence of the Orientation Program is very important to be carried out. This is because between Commissioners do not know each other and / or have never worked in a team before. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities. Orientation programs can also be other programs that are tailored to your needs.

The Orientation Program procedure includes the following:

1. *Orientation Program regarding PT. Bank Pembangunan Daerah Papua must be given to members of the BOC who have first occupied in the Company.*

2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
   - Gambaran mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
   - Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
   - Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
   - Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
   - *Team building.* Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

2. The responsibility for implementing the Orientation Program is with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation program is with the President Director.
3. The material provided in the Orientation Program includes the following:
   - *An overview of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua deals with objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and various other strategic issues.*
   - *Implementation of the principles of Good Corporate Governance by PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .*
   - *Legal responsibility of members of the BOC.*
   - *Descriptions relating to delegated authority, internal and external audits, systems and internal control policies and the duties and roles of the Audit Committee and other Committees established by the BOC.*
   - *A description of the duties and responsibilities of the BOC and BOD.*
   - *Team building. In this activity included all members of the BOC, both new and previously held with the aim of realizing cohesiveness and teamwork as Commissioners.*

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to Division Managers, Groups, Units and Employees in the Company and other programs.

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan Susunan Dewan Komisaris, dengan susunan masih tetap sama seperti tahun buku sebelumnya yaitu sebagai berikut:

In 2019, there was no change in the composition of the Board of Commissioners, with the composition still the same as the previous fiscal year, as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Program Orientasi *Orientation Program*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Pelaksanaan program kerja dan tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris Non Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris

Program Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Dewan Komisaris juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Program pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada bab profil perusahaan sub bab program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara periodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
2. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk penilaian sendiri (*self Assessment*) Kinerja Dewan Komisaris Bank secara independen dilakukan oleh Divisi Kepatuhan guna melengkapi laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik (GCG) sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

BOC Competency Training or Development Program

Along with the development of the Bank's business, the BOC is also committed to continuously improving competencies and skills through training and development programs which are carried out at least once a year. This training program is also intended to meet the requirements for sustainability requirements in evaluating the ability and appropriateness of members of the BOC.

The competency training and development program that has been followed by the BOC during 2019 can be seen in the company profile chapter of the education and training program sub-chapter that was attended by the BOC.

BOC Performance Assessment

As part of the implementation of good corporate governance, the BOC' performance appraisal is always conducted periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Assessment of Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Performance assessment through a performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance assessment through a performance audit by the Supreme Audit Agency (BPK);*
4. *Performance appraisal through a performance audit by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).*

For Self-Assessment, the performance of the Bank's BOC is independently carried out by the Compliance Division in order to complete the Self-Assessment Report of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the period of assessment of the Bank's Soundness in the last 1 (one) year. refer to the Financial Services Authority Circular Letter Number 13 /SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Bank menilai pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

The Bank assesses the implementation of the Duties and Responsibilities of the BOC as follows:

No	Komponen GCG	Nilai	Bobot	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	10%	1

Dengan peringkat 1 artinya :

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

A rating of 1 means:

- *The BOC has carried out its duty to ensure the implementation of the principles of good governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
- *The BOC has supervised the implementation of the duties and responsibilities of the BOD periodically and at any time as well as providing advice to the BOD.*
- *The BOC is not involved in making decisions on the Bank's operational activities, except in the case of: provision of funds to related parties, and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and / or legislation in order to carry out the supervisory function.*
- *The BOC has ensured that the BOD has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit (SKAI), external auditors, the results of the supervision of the Financial Services Authority and / or other supervisory authorities.*
- *The BOC has carried out its duties and responsibilities independently.*
- *The BOC has ensured that the Committees formed have carried out their duties effectively.*
- *Members of the BOC do not use the Bank for personal, family and / or other parties' interests that harm or reduce bank earnings.*

Pengungkapan kebijakan *self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Disclosure of the self assessment policy on the performance of the BOC is done not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence especially to shareholders or investors of the efforts that need to be done in improving the performance of the BOC.

Penilaian atas Kinerja Masing-masing Komite yang Berada Dibawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Komite pendukung Dewan Komisaris Bank Papua terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan bank.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Performance Assessment of Each Committee Under the BOC and the Basis of Assessment

The supporting committee of the Bank Papua BOC consists of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Performance assessment of the BOC' Committees is determined based on the duties stated in the Committee Charter, the Committee's Work Program and the results of the bank's Corporate Governance Self Assessment.

The results of the performance assessment of each Committee Member is one of the basic considerations for the BOC for the dismissal and / or reappointment of the Committee members concerned. The results of the performance assessment are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.

Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris

Independent Commissioner and Independence of the Board of Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, sedangkan Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

The Independent Commissioner is a member of the BOC who does not have a financial relationship. Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it is explained that Independent Commissioners are members of the BOC who do not have financial relations , management, share ownership and / or family relations with members of the BOD, other members of the BOC and / or controlling shareholders, or relationships with Banks that can affect the ability of the concerned person to act independently, while the Independent Party is a party that does not have financial, management, share ownership and / or family relations relationships with members of the BOD, members of the BOC and / or controlling shareholders, or relationships with Banks that can affect the ability of the concerned person to act independently.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap bank dan kelompok usaha bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank. Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The existence of an Independent BOC is intended to encourage the creation of a more objective climate and work environment and place fairness and equality among various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. As an Independent Commissioner must be able to be released from conflict of interest. In order to support the implementation of good Bank governance, shareholders in the SGM determine the Independent Commissioner with the number and requirements as stipulated in the legislation to carry out the supervisory duties of banks and business groups of banks that do not conduct bank business activities. In addition, in the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks it is stated that Independent Commissioners are members of the BOC who do not have financial, management, share ownership and / or family relationships with other Commissioners, BOD and or controlling shareholders or other relationships that can affect their ability to act independently.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen antara lain adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud diatas wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :

Determination Criteria for Independent Commissioners

Criteria for members of the BOC who are also Independent Commissioners are as follows:

1. *Independent Commissioners number at least 50% (fifty percent) of the total members of the BOC*
2. *Members of the BOC who do not have a financial relationship, management relationship, share ownership relationship, family relationship with other members of the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders or relations with the Bank, which may affect their ability to act independently;*
3. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;*
4. *Do not have shares directly or indirectly with the Issuer or Public Company;*
5. *Has no Affiliation with the Issuer or Public Company, members of the BOC, members of the BOD, or the major shareholders of the Issuer or Public Company;*
6. *Meet the requirements of the Independent Commissioner as stipulated in the applicable regulations;*
7. *Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company.*
8. *Non-Independent Commissioners can switch to become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.*
9. *Non-Independent Commissioners who will switch to Independent Commissioners as referred to above must undergo a cooling off period of at least 6 (six) months.*
10. *Transitions from Non-Independent Commissioners to Independent Commissioners must obtain the approval of the Financial Services Authority*
11. *Independent Commissioners who have occupied for 2 (two) consecutive terms of office can be reappointed in the following period as Independent Commissioners in terms of:*

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

12. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud diatas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa salah satu Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubunga keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independennya dan bersedia untuk diganti, dan selanjutnya pernyataan ini disampaikan kepada OJK.

Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank Papua sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berjumlah 2 orang atau 50% dari jumlah Dewan Komisaris yaitu 4 orang. Komisaris Independen Bank Papua dijabat oleh Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM dan Dortheis Sesa, SE.

- *Meetings of members of the BOC assess that Independent Commissioners can still act independently; and*
- *The Independent Commissioner stated at the SGM about the independence concerned.*

12. *Independence statement of the Independent Commissioner as referred to above must be disclosed in the report on the implementation of governance*

Statement of Independent Commissioner

Each member of the Independent Commissioner has made an Independent Statement which states that each member of the Independent Commissioner does not have financial, management relations, share ownership and / or family relations with other members of the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders or relationships with the Bank, which can affect its ability to act independently as stipulated in the provisions of Governance Implementation for Commercial Banks.

If in the future, it is found that one of the Independent Commissioners has a financial relationship, management relationship, share ownership and / or family relationship with other members of the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders or a relationship with the Bank, which may affect their ability to act independently. then the person concerned is willing to give up the position of his Independent Commissioner and is willing to be replaced, and then this statement is submitted to the OJK.

Independent Commissioner Member

Bank Papua Independent Commissioners up to December 31, 2019 are 2 person or 50% of the total BOC, namely 4 person. The Independent Commissioner of Bank Papua is held by Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM and Dortheis Sesa, SE.

Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang menyatakan bahwa Komisaris yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berikut adalah Surat Pernyataan Independen yang dimaksud:

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Papua telah memenuhi kondisi-kondisi yang menunjukkan independensi mereka yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Papua maupun kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Papua selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh pemegang saham utama perusahaan.
4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun uraian penjelasannya adalah sebagai berikut:

Independence Statement of Independent Commissioner Members

The Independent Commissioner has made an Independent Statement stating that the Commissioner concerned does not have financial, management, share ownership, and / or family relations with other members of the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders or relationships that can affect his ability to act independently. The following is the Independent Statement referred to:

Each member of the BOC of Bank Papua has fulfilled conditions that indicate their independence, namely:

1. *Members of the BOC have disclosed share ownership that reaches 5% (five percent) or more at Bank Papua and shares ownership in other companies both at home and abroad.*
2. *Members of the BOC do not take and / or receive personal benefits from Bank Papua other than the remuneration and other facilities determined by the SGM.*
3. *Members of the BOC are capable of carrying out their duties, expressing their opinions or reporting on performance as determined by the BOC independently without being controlled by the company's main shareholders.*
4. *Members of the BOC have expressed their independence, namely not having financial, management, share ownership, and / or family relations with other members of the BOC, BOD and or controlling shareholders or relations with the Bank that can affect their ability to act independently. The description of the explanation is as follows:*

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Dortheis Sesa, SE.	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Direksi
Board of Director

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan audit internal serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Direksi Bank Papua terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite dibawah direksi :
- Komite Kredit.
- Komite Kebijakan Perkreditan.
- Komite ALCO.
- Komite Manajemen Risiko.
- Komite Teknologi Informasi.
- Komite Pertimbangan Pegawai.
- Komite Pertimbangan Kasus Pegawai.

The Board of Director (BOD) is a Corporate organ that is directly responsible for the management of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association. The BOD is responsible for the Company's internal control structure, implementation of Risk Management and accounting practices and accounting of the Company in accordance with applicable regulations, overseeing the implementation of internal audits and carrying out necessary follow-ups in accordance with the direction of the BOC. The BOD is responsible to the GMS which is the realization of the accountability of the management of the company in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The BOD of Bank Papua consists of the President Director and Members of the BOD. In carrying out its duties, the BOD is assisted by 7 Committees under the directors:
- *Credit Committee.*
- *Credit Policy Committee.*
- *ALCO Committee.*
- *Risk Management Committee.*
- *IT Steering Committee.*
- *Employee Advisory Committee.*
- *Employee Case Advisory Committee.*

Persyaratan Direksi

Terdapat 3 (tiga) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Bank. Persyaratan tersebut adalah Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, dan Persyaratan lainnya.

a. Persyaratan Umum:

Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6. Tidak dicabut hak miliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

Requirements for BOD

There are 3 (three) types of requirements that must be met by prospective members of the Bank's BOD. These requirements are General Conditions, Special Requirements, and other Requirements.

a. General requirements:

BOD are Indonesian citizens who:
1. *Faith in God Almighty.*
2. *Faithful and obedient to the State and Government.*
3. *Not involved directly or indirectly in the activities of treason to the State.*
4. *Physically and mentally healthy.*
5. *Never carry out activities that are detrimental to the State or disgraceful actions in the banking sector.*
6. *His property rights are not revoked based on a court decision.*

b. Persyaratan Khusus

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
   Menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

c. Persyaratan Lainnya

1. Antara sesama anggota Direksi (mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris – klausula Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006);
2. Antara anggota Direksi dengan anggota dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat 3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
3. Rincian dari persyaratan lainnya tersebut akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan diatur bahwa :

b. Special Requirements

1. *An individual who is capable of carrying out legal actions, except within 5 (five) years prior to his appointment:*
   a. Declared bankrupt;
   b. Become a member of the BOD or a member of the BOC found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or
   c. Convicted of committing a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.
2. *Pass the Fit and Proper Test in accordance with Bank Indonesia regulations concerning the Fit and Proper Test. According to Bank Indonesia, the concerned person has good competence and integrity, as stipulated in the applicable Bank Indonesia provisions concerning Fit and Proper Test.*

c. Other Requirements

1. *Between fellow members of the BOD (the majority of members of the BOD are prohibited from having family ties to the second degree with fellow members of the BOD and / or members of the BOC - clause of Bank Indonesia Regulation No. 8/4 / PBI / 2006 and PBI No. 8 / 14 / PBI / 2006);*
2. *Between members of the BOD and members of the BOC there must be no family relationship up to the 3 (third) degree, either in a straight line or side line including son-in-law and brother-in-law.*
3. *Details of the other requirements will be stated in a GMS decision.*

BOD Fit and Proper Test

In the Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test and the Financial Services Authority Regulation Number 27 / POJK.03 / 2016 concerning the Capability and Compliance Assessment for Main Parties, Financial Service Institutions are regulated that :

1. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi yaitu bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
2. Calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS;
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direksi Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
5. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direksi Bank apabila calon tersebut menjalani :
   - Proses hukum;
   - Proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
   - Proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
   - Penghentian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Bank.
6. Calon Direksi yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud angka 5 diatas.
7. Pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dalam bentuk penetapan disetujui atau tidak disetujui.
8. Berdasarkan hal tersebut seluruh anggota Direksi Bank Papua telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

1. *Prospective members of the BOD must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the BOD, namely acting on behalf of the Bank in making decisions that legally bind the Bank and / or make important decisions that affect the Bank's financial condition;*
2. *Prospective members of the BOD who have not obtained the approval of the Financial Services Authority, are prohibited from carrying out actions, duties and functions as members of the BOD, even though they have been approved and appointed by the GMS;*
3. *Requests to obtain approval from the Financial Services Authority are submitted by the Bank to the Financial Services Authority accompanied by the required documents in accordance with applicable Bank Indonesia regulations and / or the Financial Services Authority;*
4. *The Assessment of the capability and appropriateness of prospective Bank BOD is carried out by the Financial Services Authority in accordance with applicable provisions of Bank Indonesia and / or the Financial Services Authority;*
5. *The Financial Services Authority stops assessing the ability and suitability of prospective Bank BOD if the candidate underwent:*
   - *Legal proceedings;*
   - *The process of appraisal of fit and proper, and / or*
   - *The revaluation process because there are indications of problems of integrity, financial feasibility, financial reputation, and / or competence.*
   - *The termination is notified in writing to the Bank.*
6. *Candidates for the BOD who are terminated by their Assessment of their ability and appropriateness by the Financial Services Authority, can be re-nominated to the Financial Services Authority to become a BOD if the relevant person has completed the process as referred to in number 5 above.*
7. *Notification by the Financial Services Authority of the written results of the ability and propriety test in the form of approval is approved or not approved.*
8. *Based on this, all members of the BOD of Bank Papua have passed the fit and proper test without records and have received approval from the Financial Services Authority, which indicates that each member of the BOD has adequate integrity, competence and financial reputation.*

Tabel Status Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi
Table of the Board of Director' Fit and Proper Test

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kompetensi *Competency*	Hasil *Result*	Surat Persetujuan *Approval Letter*	Penyelenggara *Organizer*
F. Zendrato	Direktur Utama	Keuangan Perbankan	Lulus	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	OJK
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Keuangan Perbankan	Lulus	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	OJK
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Keuangan Perbankan	Lulus	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	OJK
Isak S.Wopari	Direktur Operasional	Keuangan Perbankan	Lulus	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	OJK
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Keuangan Perbankan	Lulus	Surat OJK No. SR-131/PB.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.	OJK

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Papua setelah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia atau OJK dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang membuktikan anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan melalui RUPS.

Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
1. Masa jabatan berakhir.
2. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena :
   - Mengundurkan diri.
   - Meninggal dunia.
   - Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar ini.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, diatur bahwa Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.

Untuk periode Desember 2019 Direksi Bank Papua berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Jayapura.

Appointment and Dismissal of BOD

Appointment of the BOD of the Bank Papua after fulfilling the requirements of the fit and proper test from Bank Indonesia or OJK and the provisions of GCG that prove members of the BOD have good integrity, competence and reputation. Appointment and dismissal of the BOD is conducted through the GMS.

The position of members of the BOD ends, if:
1. *Term of office ends.*
2. *Stopping before the term ends because:*
   - *Resign.*
   - *Die.*
   - *Dismissed because they no longer meet the requirements or for certain reasons based on the applicable laws and / or this Articles of Association.*

Total and Composition of BOD

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that Banks must have members of the BOD of at least 3 (three) person. All members of the BOD must domicile in Indonesia and must be led by the President Director or President Director.

For the period of December 2019 the BOD of Bank Papua consists of 5 (five) person consisting of 1 (one) President Director and 4 (four) BOD. All members of the BOD reside inJayapura.

Tabel Jumlah dan Komposisi Direksi
Table of Number and Composition of Board of Director

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Domisili *Domicile*	Tanggal Pengangkatan *Appointment Date*	Periode *Period*
F. Zendrato	Direktur Utama	Jayapura	06 Maret 2017	Periode 1
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Jayapura	06 Maret 2017	Periode 1
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Jayapura	06 Maret 2017	Periode 1
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Jayapura	06 Maret 2017	Periode 1
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Jayapura	06 Maret 2017	Periode 1

Jumlah dan komposisi anggota Direksi tersebut diatas telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Setiap anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
5. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain termasuk sebagai Komisaris pada anak perusahaan Bank Papua;
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan;
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite atas dasar keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat kuasa kepada Pemimpin Divisi dan/atau Pemimpin Cabang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional Bank Papua, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

The number and composition of the members of the BOD above have complied with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, including:

1. *The number of members of the BOD is more than 3 (three);*
2. *All members of the BOD reside in Indonesia;*
3. *Each proposal to replace and / or appoint members of the BOD by the BOC to the SGM by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;*
4. *Each member of the BOD does not have family relations with each other up to the second degree of fellow members of the BOD and / or members of the BOC and comes from parties independent of the Controlling Shareholders;*
5. *All members of the BOD have more than 5 (five) years of experience in the field of banking operations and financial institutions as Executive Officers and do not have concurrent positions as Commissioners, BOD or Executive Officers at other Banks or companies including as Commissioners in Bank Papua subsidiaries;*
6. *Members of the BOD either individually or jointly do not have shares in excess of 25% of the paid up capital of other companies as evidenced by the signing of the statement letter;*
7. *The BOD has appointed Committee members on the basis of decisions of the BOC meeting;*
8. *The BOD does not give general power to other parties which results in the transfer of duties and functions of the BOD. The power of attorney to the Division Leader and / or Branch Leader aims to facilitate and facilitate the operational tasks of Bank Papua, but does not result in the transfer of duties and functions of the BOD.*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Manual Board* yang mengatur tentang Panduan dan Pedoman kerja & tata tertib Direksi berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Papua dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

Pedoman kerja & tata tertib Direksi bertujuan untuk mempermudah Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan Direksi. Pengkinian *Manual Board* haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi. Mengingat pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai ketentuan secara rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Direksi ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang inheren dengan pemegang jabatan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

Adapun isi dari *Manual Board* Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

I. Visi dan misi;
II. Fungsi;
III. Komposisi & persyaratan Direksi;
IV. Independensi (kemandirian) Direksi;
V. Etika jabatan;
VI. Tugas & kewajiban Direksi;
VII. Hak & wewenang;
VIII. Penetapan kebijakan pengurusan perseroan Direksi;
IX. Pendelegasian wewenang di antara Direktur Perseroan;
X. Pembagian tugas Direksi;
XI. Rapat Direksi;
XII. Komite-komite Direksi;
XIII. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris & Direksi;
XIV. Penggunaan saran profesional.

BOD' Charter and Code of Conduct

In more detail, the BOD Guidelines and work rules are regulated in the Board Manual governing Guidelines and the BOD' work guidelines & rules contain compilation of the principles of Corporate law, applicable legislation, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association governing the working procedures of the Commissioners and BOD along with their complete organs. The work guidelines & rules of the BOD are the codification of various regulations that apply to Bank Papua and best practices of good Bank governance.

The work guidelines & rules of the BOD aim to facilitate the BOD in understanding the regulations related to the BOD. Manual Board updating must always be carried out according to the needs of the Company. Changes made must be based on applicable regulations and do not violate the provisions in the Articles of Association and based on the agreement of the BOC with the BOD. Considering that the BOD guidelines are a compilation of the principles of Corporate law, the implementation must always refer to the applicable laws and regulations.

The various detailed provisions contained in the Articles of Association, the direction of the Shareholders stipulated in the SGM, and various other legal provisions remain binding even though they are not specifically described in this BOD Guidelines. The principle of good faith, full responsibility and fiduciary duties, skill and care that are inherent with the position of BOD is a general principle that must be respected by the Company's organs in charge of overseeing and managing the Company.

The contents of the Manual Board of the BOD, among others, regulate the following matters:
I. Vision and mission;
II. Function;
III. Composition & requirements of the BOD;
IV. Independence (independence) of the BOD;
V. Position ethics;
VI. Duties & obligations of the BOD;
VII. Rights & authority;
VIII. Determination of policies for managing the company's BOD;
IX. Delegation of authority between the BOD of the Company;
X. Division of duties of the BOD;
XI. BOD Meeting;
XII. BOD' Committees;
XIII. Work relations between the BOC & BOD;
XIV. Use of professional advice.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Kebijakan Umum

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

- Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
- Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- Mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan.
- Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
- Menetapkan susunan organisasi Perseroan di tingkat pusat maupun cabang dan tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan.
- Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu.
- Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua secara konsisten.
- Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- Bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perseroan.

BOD Duties and Responsibilities

1. General Policy

The BOD is fully responsible for carrying out its duties in the interests of the Company in achieving its aims and objectives.

BOD in carrying out their duties and obligations must always:

- *In good faith and responsibly carry out duties for the interests and business of the Company.*
- *Subject to the prevailing laws and regulations, Articles of Association and SGM decisions and ensure that all activities of the Company are in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, Articles of Association and resolutions of the SGM.*
- *Comply with the order of the Company's internal regulations.*
- *Carry out management of the Company for the interests and objectives of the Company.*
- *Establish the composition of the Company's organization at the central and branch level and the work procedures of the company with the approval of the BOC.*
- *Acting as the leader in managing the Company.*
- *Maintain and manage the Company's assets.*
- *Full responsibility in carrying out its duties in the interests of the Company in achieving its aims and objectives.*
- *Representing the Company both inside and outside the court.*
- *Noting the inputs given by the BOC.*
- *Carry out all actions and actions, both regarding the management and ownership of the Company's assets as well as binding the Company to other parties and or other parties with the Company, with certain restrictions.*
- *Applying Good Corporate Governance consistently.*
- *It is obligatory to hold and store a Special List containing information on share ownership of members of the BOD and the BOC and their families in the Company and / or other companies as well as the date the shares were obtained.*
- *Personally responsible for his negligence which is detrimental to the interests of the Company.*

2. Tugas Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :

- Tugas pokok Direksi adalah :
  a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
  b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

3. Tugas Direksi lainnya berdasarkan *best practices* adalah sebagai berikut:

- Membuat dan memelihara risalah umum pemegang saham dan risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan.
- Membuat, melaksanakan, memonitor, dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis Perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk oleh/dalam RUPS.
- Mengajukan kepada Dewan Komisaris usul penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

2. BOD duties based on the Company's Articles of Association are as follows:

- *The main duties of the BOD are:*
  a. Carry out management of the Company for the interests and objectives of the Company and act as the leader in the management;
  b. Maintain and manage the Company's assets;
- *The BOD are fully responsible for carrying out their duties in the interests of the company in achieving the Company's goals and objectives.*
- *Each member of the BOD must in good faith and fully carry out his duties by heeding the applicable laws and regulations.*
- *Each member of the BOD is fully responsible personally if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.*

3. Other BOD' duties based on best practices are as follows:

- *Make and maintain the general shareholders 'minutes and minutes of the BOD' meetings and carry out the Company's books and administration in accordance with the prevailing norms for the Company.*
- *Create, implement, monitor, and control the Company's budget and strategic plans including annual plans, mid-term plans, and the Company's Long Term Plan (RJPP).*
- *Develop an accounting system that meets the principles of internal control, especially the separation of functions of management, recording, storage and supervision.*
- *Provide accountability and all information about the condition and running of the Company in the form of reports on the Company's activities, including financial reports, both in annual reports and other periodic reports according to the procedures and times specified in the Articles of Association and whenever requested by the General Meeting of Shareholders .*
- *Carry out other obligations in accordance with the Company's Articles of Association or based on instructions by / in the SGM.*
- *Submitting to the BOC the proposal to appoint a Public Accountant to examine the financial condition of the Company for the next financial year.*

4. Tugas Direksi Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

- Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Direktur tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
- Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/ atau RUPS Luar Biasa.
- Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.
- Menyediakan bahan RUPS kepada pemegang saham dan bahan tersebut diatas diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham jika diminta.
- Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang Saham.
- Meminta persetujuan RUPS jika PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya.
- Meminta persetujuan RUPS jika PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perseroan.
- Mengajukan semua dokumen Perseroan yang diperlukan dalam RUPS Tahunan.
- Membuat dan memelihara Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

5. Tugas Direksi Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BOD Duties Related to the General Meeting of Shareholders

- *The BOD must hold and keep a Register of Shareholders and documents related to the SGM in accordance with the provisions of the legislation.*
- *Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the applicable provisions and other reports whenever requested by the Shareholders.*
- *Provide accountability and all information regarding the condition and running of the Company, especially financial statements in the form of annual reports and in the form of other periodic reports in the manner and time specified in the Articles of Association and whenever requested by the SGM. Sign the Annual Report, in the event that the Director does not sign the Annual Report, the reason must be stated.*
- *Call and hold an Annual SGM and or Extraordinary SGM.*
- *Announce in 2 (two) Indonesian language newspapers published at the Company's place of residence as determined by the BOD.*
- *Providing SGM materials to shareholders and the materials mentioned above are provided free of charge to shareholders if requested.*
- *Giving Minutes of SGM to Shareholders if requested by the Shareholders.*
- *Request approval from the SGM if PT. Bank Pembangunan Daerah Papua wants to buy back shares that have been issued, including the transfer.*
- *Request approval from the SGM if PT. Bank Pembangunan Daerah Papua wants to increase or decrease the amount of the Company's capital.*
- *Submitting all Company documents required at the Annual SGM.*
- *Make and maintain the Minutes of SGM and Minutes of BOD' Meetings.*

5. BOD Duties Related to the Implementation of Good Corporate Governance

- *The BOD are fully responsible for the implementation of the Bank's management.*
- *The BOD must manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations.*

- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank Papua Direksi paling kurang wajib membentuk:
  a. Satuan Kerja Audit Intern;
  b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
  c. Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  a. Proyek bersifat khusus;
  b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
  c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Pedoman dan tata tertib kerja dimaksud paling kurang wajib mencantumkan:
  a. Pengaturan etika kerja: merupakan prosedur yang mengatur etika kerja Direksi
  b. Waktu kerja: merupakan prosedur yang mengatur waktu kerja Direksi
  c. Pengaturan rapat: merupakan prosedur yang mengatur pengelolaan rapat (dari proses perencanaan sampai dengan *monitoring* tindak lanjut rapat)
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

- *BOD must implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
- *The BOD must follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditor, Bank Indonesia supervision results and / or the results of supervision by other authorities.*
- *In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the BOD must at least form:*
  a. Internal Audit Work Unit;
  b. Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
  c. Compliance Unit.
- *The BOD must be responsible for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders .*
- *The BOD must disclose to employees the Bank's strategic policies in the field of employment.*
- *BOD are prohibited from using individual advisors and / or professional services as consultants unless they fulfill the following requirements:*
  a. Projects are specific;
  b. Based on a clear contract, which at least covers the scope of work, responsibilities and the period of work and costs;
  c. The Consultant is an Independent Party and has the qualifications to work on a specific project.
- *The BOD must provide accurate, relevant and timely data and information to the BOC.*
- *The BOD must have binding guidelines and work rules for each member of the BOD.*
- *The work guideline and code of conduct must at least include:*
  a. Work ethic regulation: is a procedure that regulates the work ethics of the BOD
  b. Working time: is a procedure that regulates the work time of the BOD
  c. Meeting arrangements: is a procedure that regulates the management of meetings (from the planning process to monitoring follow-up meetings)
- *All decisions of the BOD taken in accordance with work guidelines and rules are binding and are the responsibility of all members of the BOD.*

6. Tugas Direksi Terkait dengan Modal Minimum Bank

- Direksi wajib memastikan bahwa Bank telah beroperasi dengan modal diatas modal minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- Dalam hal terjadi keadaan dimana modal Bank dibawah modal minimum sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, maka Direksi wajib membuat dan melaksanakan *action plan* pemenuhan modal minimum secara konsisten.

7. Tugas Direksi Terkait dengan Manajemen Risiko

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan *limit* risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perseroan. *Review* kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan.
- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

6. BOD Duties Related to the Bank's Adequacy Capital

- *The BOD must ensure that the Bank has operated with capital above the minimum capital as determined by Bank Indonesia.*
- *In the event of a situation where the Bank's capital is below the minimum capital as stipulated by Bank Indonesia, the BOD must make and implement an action plan to fulfill the minimum capital consistently.*

7. BOD Duties Related to Risk Management

- *Formulate written and comprehensive Risk Management policies and strategies including the establishment and approval of overall risk limits, per type of risk and per functional activity (business activity) of the Company. Review of Risk Management policies and strategies is carried out at least once a year or in a higher frequency in the event that there are significant changes in factors that affect the Company's business activities.*
- *Prepare Risk Management policies and strategies in writing and comprehensively;*
- *Responsible for the implementation of Risk Management policies and risk exposures taken by the Company as a whole, including evaluating and providing directions for Risk Management strategies based on reports submitted by the Risk Management Unit and submitting accountability reports to the BOC quarterly;*
- *Evaluate and decide on transactions that require BOD approval;*
- *Develop a Risk Management culture at all levels of the organization;*
- *Ensuring increased competency of Human Resources related to Risk Management;*
- *Ensuring that the Risk Management function operates independently which is reflected in, among other things, the separation of functions between the Risk Management Work Unit that identifies, measures, monitors and controls risks with the work unit that conducts and completes the transaction;*

- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
  a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* Risiko.
- Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya tersebut Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

8. Tugas Direksi Terkait dengan Tingkat Kesehatan Bank

Direksi wajib melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

9. Tugas Direksi Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

- Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perseroan.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat pada waktunya.
- Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP), untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- Menyusun Rencana Bisnis untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan.
- Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

- *Carry out periodic reviews to ensure:*
  a. Accuracy of the Risk Assessment methodology;
  b. Adequacy of implementation of management information systems; and
  c. Accuracy of Risk policies, procedures and limits.
- *In order to carry out its responsibilities, the BOD must have an adequate understanding of the risks inherent in all of the Bank's functional activities and be able to take necessary actions in accordance with the Bank's Risk profile.*

8. BOD Duties Related to the Bank Soundness

The BOD must carry out the Bank's business activities based on prudential principles and carry out the steps necessary to maintain or improve the Bank's Soundness.

9. BOD Duties Related to Strategies and Work Plans

- *Prepare the Company's vision, mission, goals, strategies and culture.*
- *Strive and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities.*
- *Prepare the Company's development plan on time.*
- *Strive to achieve long-term goals listed in the Company's Long Term Plan (RJPP).*
- *Preparing on time the Company's Work Plan and Budget (which is the annual translation of the RJPP), then submitted to the Commissioner for approval.*
- *Prepare a Business Plan for further submission to the BOC for approval. The BOD are obliged to carry out business plans effectively in the management of the Company.*
- *Strive to achieve the short-term targets listed in the Annual Work Plan and Budget (RKAT).*

10. Tugas Direksi Terkait dengan Kualitas Aktiva Bank

- Membuat dan mengajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan kebijakan mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.
- Memberikan persetujuan atas prosedur mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.
- Melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten.

10. BOD Duties Related to Quality of Bank Assets

- *Make and submit to the BOC to obtain Policy approval regarding the quality of Loan assets, securities, placements and policies regarding Loan restructuring, write off, and collect off.*
- *Give approval on procedures regarding the quality of Loan assets, securities, placements and policies regarding Loan restructuring, write off, and collect off.*
- *Carry out these policies and procedures consistently.*

11. Tugas Direksi Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- Membuat dan mengajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Memberikan persetujuan atas prosedur mengenai mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut secara konsekuen.
- Meminta persetujuan Dewan Komisaris dalam penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan bahwa Bank tidak membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
- Mengungkapkan dan melaporkan anggota keluarga dan perusahaan yang dimilikinya yang dikategorikan sebagai pihak terkait kepada Bank Indonesia.

11. BOD Duties Related to the Legal Lending Limit (LLL)

- *Make and submit to the BOC to obtain approval for policies regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).*
- *Give approval on procedures regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).*
- *Implement these policies and procedures consequently.*
- *Request approval from the BOC in providing funds to related parties.*
- *Ensure that the Bank does not make an agreement or agreement or establish requirements that require the Bank to provide funds that will result in violation of the LLL.*
- *Disclose and report on family members and companies they have that are categorized as related parties to Bank Indonesia.*

12. Tugas Direksi Terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Direksi wajib melakukan pemenuhan ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, antara lain:

- Pembuatan dan penyajian :
  a. Laporan Tahunan;
  b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
  c. Laporan Keuangan Konsolidasi.
  d. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
  meliputi seluruh aspek yang wajib diungkapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- Melakukan tindaklanjut atas temuan hasil audit.

12. BOD Duties Related to Transparency of Bank Financial Conditions

The BOD must carry out compliance with the provisions concerning Transparency of Bank Financial Conditions, including:

- *Making and presenting:*
  a. Annual report;
  b. Quarterly Published Financial Report;
  c. Consolidated Financial Statements.
  d. Report to Bank Indonesia
  covering all aspects that must be disclosed and conveyed to related parties in a complete, accurate and timely manner.
- *Follow up on audit findings.*

13. Tugas Direksi Terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal Sementara

- Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan risiko hukum dan risiko likuiditas.
- Membuat kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- Terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dimaksud dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- Meminta persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan tersebut diatas.
- Memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha bank atau perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Bank dan melaporkan hasil *monitoring* maupun evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- Mengusulkan tindakan pengamanan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris apabila bank atau perusahaan lain dimaksud mengalami penurunan usaha.
- Melakukan tindakan pengamanan apabila bank atau perusahaan lain tempat penyertaan modal mengalami penurunan usaha.

13. BOD Duties Related the Implementation of the Prudential Principle in Provisional Temporary Equity Activities

- *Conduct capital participation in banks or other companies in the financial sector after obtaining the approval of the SGM based on the applicable legislation.*
- *Pay attention to the prevailing regulations / laws and regulations taking into account legal risks and liquidity risks.*
- *Make policies on Equity Participation and Temporary Equity Participation.*
- *Directly involved in the formulation of policies for the intended Equity Participation and Equity Participation activities and is responsible for their implementation.*
- *Request approval from the BOC for the above Policy.*
- *Monitor and evaluate the business development of banks or other companies whose shares are partially owned by the Bank and report the results of monitoring and evaluation to the BOC.*
- *Propose further security measures to the BOC if the said bank or other company has experienced a decline in business.*
- *Take security measures if the bank or other company where the capital is involved has decreased business.*

14. Tugas Direksi Terkait Penyertaan Modal Sementara untuk Mengatasi Akibat Kegagalan Kredit

- Melakukan Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Memperhatikan hal-hal berikut dalam penyertaan Modal Sementara :
  a. Sifatnya hanya untuk mengatasi kegagalan kredit debitur kurang lancar, diragukan atau macet.
  b. Diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  c. Dimaksudkan untuk mengembalikan kewajiban debitur.
  d. Harus menarik kembali penyertaannya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun atau sebelum 5 (lima) tahun apabila perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba komulatif.
  e. Dihapusbukukan setelah 5 (lima) tahun dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila pengembalian kredit belum terselesaikan.

14. BOD Duties Related the Provisional Temporary Equity to Overcome the Effects of Loan Failure

- *Conduct Provisional Temporary Equity to overcome the consequences of Loan failure after obtaining approval from the BOC.*
- *Pay attention to the following in the investment of Temporary Capital:*
  a. Its nature is only to overcome the failure of debtors' Loan that is substandard, doubtful or loss.
  b. Processed in accordance with applicable laws and regulations.
  c. Intended to return the debtor's liability.
  d. Must withdraw the investment after a period of 5 (five) years or before 5 (five) years if the debtor company where the Temporary Equity Participation has obtained cumulative earnings.
  e. Written off after 5 (five) years with the approval of the BOC if the Loan return has not been resolved.

- Memonitor penyelesaian kredit debitur tempat Penyertaan Modal Sementara.
- Melaporkan hasil *monitoring* perkembangan Penyertaan Modal Sementara dimaksud kepada Dewan Komisaris.
- Memperhatikan risiko hukum dan risiko likuiditas.

15. Tugas Direksi Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

- Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua.
- Direksi dilarang untuk memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Tugas Direksi Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern

- Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian internal yang ditetapkan Bank.
- Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati -hatian.
- Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank;
- Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
- Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten;
- Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern; dan
- Memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

- *Monitor the settlement of debtor Loan where the Temporary Equity Participation.*
- *Report the results of monitoring the progress of the intended Temporary Equity Participation to the BOC.*
- *Paying attention to legal risk and liquidity risk.*

15. BOD Duties Related to Business Ethics and Anti-Corruption

- *The BOD is obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance.*
- *The BOD is prohibited from giving, offering or receiving either directly or indirectly SDMething of value to government officials and other parties that influence or as a Reward for what they have done and other actions in accordance with applicable laws and regulations.*

16. BOD Duties Related to the Internal Control System

- *The BOD of the Bank has the responsibility of creating and maintaining an effective Internal Control System and ensuring that the system runs safely and healthily in accordance with the internal control objectives set by the Bank.*
- *Meanwhile the Compliance Director must play an active role in preventing irregularities committed by management in establishing policies relating to the principle of caution.*
- *Implement policies and strategies that have been approved by the BOC;*
- *Develop procedures to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank;*
- *Maintain an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships;*
- *Ensure that delegation of authority runs effectively that is supported by the application of consistent accountability;*
- *Establish policies and strategies as well as internal control procedures; and*
- *Monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system.*

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan langkah-langkah, antara lain :

- Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian internal terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi;
- Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi bank;
- Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian internal telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai;
- Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor internal dan/atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

17. Tugas Direksi Terkait Penugasan Direktur Kepatuhan

- Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
- Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh RUPS dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
  a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
  b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  C. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.

In order to carry out these responsibilities, the BOD must take steps, including:

- *Assign managers / officials and staff responsible for certain activities or functions to develop internal control policies and procedures for operational activities and organizational adequacy;*
- *Carry out effective controls to ensure that managers / officials and employees have developed and implemented established policies and procedures;*
- *Documenting and socializing the organizational structure that clearly illustrates the lines of authority and responsibility for reporting and organizes an effective communication system for all levels of the bank's organization;*
- *Take appropriate steps to ensure that the activities of the internal control function have been carried out by managers / officials and employees who have adequate experience and capabilities;*
- *Effectively implement corrective steps or recommendations from internal auditors and / or external auditors, among others by assigning employees who are responsible for carrying out them.*

17. BOD Duties Related to Assignment of Compliance Director

- *The Bank is required to assign one member of the BOD as the Compliance Director.*
- *The appointment and dismissal of the Compliance Director is carried out by the SGM with prior approval from Bank Indonesia.*
- *The Compliance Director has the duty and responsibility of at least:*
  a. Determine the steps needed to ensure that the bank has complied with all applicable Bank Indonesia regulations and other laws and regulations in the context of implementing the prudential principle;
  b. Monitor and maintain that the bank's business activities do not deviate from the applicable provisions;
  C. Monitor and maintain the bank's compliance with all agreements and commitments made by the bank to Bank Indonesia.

- Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- *In carrying out the tasks referred to the Compliance Director must prevent the BOD from taking policies and / or establishing decisions that deviate from Bank Indonesia regulations and other applicable laws and regulations.*
- *The Compliance Director must report on the implementation of his duties and responsibilities periodically to the President Director with copies to the BOC.*

18. Tugas Direksi Terkait Pelaksanaan Fungsi Audit internal Bank (SPFAIB)

- Menciptakan struktur pengendalian intern.
- Menjamin terselenggaranya fungsi Audit internal dalam setiap tingkatan manajemen.
- Menindaklanjuti temuan Audit internal sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

18. BOD Duties Related to the Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB)

- *Creating an internal control structure.*
- *Ensure the implementation of the Internal Audit function at each level of management.*
- *Following up on Internal Audit findings in accordance with the policies or directives given by the BOC.*

19. Tugas Direksi Terkait dengan Laporan-laporan Perseroan

Praktek Tata Kelola Perusahaan Bank Papua mensyaratkan dilakukannya pengungkapan secara akurat dan tepat waktu terhadap semua aspek yang berhubungan dengan Perseroan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan Perseroan.

Laporan- laporan yang dibawah pengawasan oleh direksi adalah sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan mencakup materi sebagai berikut :

- Laporan keuangan dan kegiatan operasional Perseroan.
- Tujuan Perseroan.
- Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara dari pemegang saham.
- Latar belakang Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Faktor-faktor risiko utama yang dapat diprediksikan
- Isu-isu utama mengenai tenaga kerja dan *stakeholders* lain.
- Struktur dan kebijakan pengelolaan Perseroan.
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang diadakan, dan tingkat kehadiran setiap anggotanya dalam rapat tersebut.
- *Review* pelaksanaan total paket kompensasi Direktur dan Dewan Komisaris.
- Laporan kegiatan Komite Audit.

19. BOD Duties Related to the Company's Reports

Good Corporate Governance practices require the accurate and timely disclosure of all aspects related to the Company, including the financial condition, performance, ownership and management of the Company.

Reports under the supervision of directors are as follows:

a. Annual Report

Disclosure of information in the annual report includes the following material:

- *Financial statements and operational activities of the Company*
- *The purpose of the Company*
- *Majority shareholding and voting rights from shareholders*
- *Background of Members of the BOC and BOD.*
- *Predictable main risk factors.*
- *The main issues regarding labor and other stakeholders.*
- *Management structure and policies of the Company.*
- *The frequency of BOC and BOD meetings held, and the attendance of each member at the meeting.*
- *Review of the implementation of the total BOD and BOC compensation packages.*
- *Audit Committee activity report.*

b. Laporan Keuangan Perseroan
   Laporan Keuangan Perseroan terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Triwulanan
c. Laporan-Laporan Bank Umum

20. Tugas Direksi Terkait dengan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha Bank

Direksi wajib mengelola Bank secara sehat dan menghindarkan Bank dari keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank tersebut antara lain adalah adalah hal-hal yang dapat menyebabkan Bank dinyatakan dalam Status Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) dan/atau Status Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*), yaitu memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- Memiliki permasalahan aktual dan/atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
- Terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
- Dinilai memiliki permasalahan earningabilitas yang mendasar;
- Memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus)
- Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah likuiditas yang mendasar.

b. Company Financial Report
The Company's Financial Statements consist of Annual Financial Reports, Mid-Term Financial Reports, and Quarterly Reports
c. Commercial Bank Reports

20. BOD Duties Related to Conditions That Can Harm the Bank's Business Continuity

The BOD must manage the Bank in a sound manner and avoid the Bank from circumstances or estimates of conditions that could endanger the business continuity of the Bank.

Matters that could endanger the business continuity of the Bank include matters that could cause the Bank to be stated in Intensive Supervision and / or Special Surveillance Status, which is fulfilling one of the following criteria:

- *Have a predicate of being less sound or unsound in assessing the soundness of the Bank;*
- *Having actual and or potential problems based on an Assessment of the overall risk (composite risk);*
- *There is an excess and / or violation of the Legal Lending Limit and according to Bank Indonesia, the Bank's proposed resolution measures are considered unacceptable or impossible to achieve;*
- *Having a Minimum Mandatory Current Account ratio in rupiah equal to or greater than the ratio set for the Bank's Statutory Reserves, but the Bank is considered to experience fundamental liquidity problems;*
- *Judged to have fundamental profitability problems;*
- *Having a non-performing loan in net more than 5% (five percent) of total loans.*
- *Minimum Capital Requirement Ratio is less than 8% (eight percent)*
- *Minimum Statutory Reserves ratio in rupiah is less than the ratio set for the Bank's Minimum Required Current Account, with deteriorating developments in a short period of time or based on the Assessment of Bank Indonesia experiencing fundamental liquidity problems.*

21. Tugas Direksi Terkait Hubungan dengan *Stakeholders*

- Memastikan terjaminnya hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pekerja, Pengguna Jasa, Pemasok, Nasabah dan *stakeholders* lainnya
- Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya
- Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan
- Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
- Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Pekerja, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan
- Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/*harrasment*).

21. BOD Duties Related to Relations with Stakeholders

- *Ensure the guarantee of the rights of stakeholders that arise based on the applicable laws and / or agreements made by the Company with Workers, Service Users, Suppliers, Customers and other stakeholders.*
- *Ensure the Company carries out its social responsibility*
- *Ensure the Company pays attention to the interests of various interested parties*
- *Ensure that business assets and location and other Company facilities comply with applicable laws and regulations relating to environmental preservation, health and safety*
- *In hiring, determining the amount of salary, providing training, setting Career Paths, and determining other employment requirements for workers, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, disability that SDMeone has or other special circumstances protected by legislation*
- *BOD must provide a work environment that is free from all forms of pressure (harassment / harrment).*

22. Tugas Direksi Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

- Menyusun sistem akuntansi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan
- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.

22. BOD Duties Related to Accounting and Bookkeeping Systems

- *Arrange the appropriate accounting system based on the principles of internal control, especially the separation of functions of management, recording, storage, and supervision*
- *Establish and maintain the books and administration of the Company to produce orderly bookkeeping, adequacy of working capital with efficient capital costs, good and solid balance structure, timely and accurate presentation of financial reports and analysis and other principles in accordance with the norms applicable to a company.*

23. Tugas Direksi Terkait dengan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

- Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit terkait secara konsisten.

23. BOD Duties Related to the Implementation of Know Your Customer Principles

- *Establish the Know Your Customer Principles Policy.*
- *Ensure that the Know Your Customer Principles policies and procedures have been consistently implemented and implemented by the relevant units.*

- Menerapkan kriteria *high risk country*, *high risk business*, dan *high risk customer.*
- Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan.
- Memastikan bahwa pejabat dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Terhadap hal-hal yang disebutkan sebelumnya Direksi dapat memberikan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Tugas Direksi Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Direksi memimpin segenap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan. Upaya peningkatan kewaspadaan dilakukan dengan cara :

- Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan.
- Identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu.
- Pelaporan transaksi keuangan.
- Menatausahakan dokumen.
- Pelatihan karyawan.
- Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada.
- Memastikan bahwa internal audit dan unit kerja *Compliance* (kepatuhan) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan internal Perseroan.
- Direksi dilarang memberitahukan kepada nasabahnya atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*Anti Tipping Off*).

25. Terkait dengan Perkreditan

- Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.

- *Implement high risk country criteria, high risk business, and high risk customers.*
- *Establish authority to make final decisions on suspicious transactions.*
- *Ensure that the Company's officials and employees have the knowledge and expertise needed in applying the Know Your Customer Principles.*
- *With regard to the matters previously stated, the BOD can provide delegation of authority in accordance with applicable regulations.*

24. BOD Duties Related to the Eradication of Suspicious Crime of Money Laundering / Financial Transactions

BOD lead all efforts to eradicate money laundering. One way is to increase awareness. Efforts to increase alertness are carried out by:

- *Identification and verification of customers / users of financial services.*
- *Suspicious financial transaction identification and cash transactions in a certain amount.*
- *Financial transaction reporting.*
- *Administering documents.*
- *Employee training.*
- *Coordinate closely with PPATK for matters relating to systems and policies to be vigilant.*

- *Ensure that internal audit and Compliance work units (compliance) monitor the implementation and operation of the Company's internal systems and policies.*

- *BOD are prohibited from notifying clients or other person directly or indirectly in any way about reports of suspicious financial transactions that are being compiled or have been submitted to the PPATK (Anti Tipping Off).*

25. Related to Loan

- *Prepare or be responsible for the preparation of Loan plans that will be set forth in the bank work plan that will be submitted to Bank Indonesia and ensure that the implementation is in accordance with the plan.*

- Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang memuat semua aspek yang tercantum di dalam PPKPB dan sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- Memastikan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal.
- Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
- Menetapkan anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).
- Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai :
  a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
  b. Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur tertentu.
  c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
  d. Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
  e. Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh Divisi Audit Internal.
  f. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  g. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

- *Arrange or be responsible for the preparation of Bank Loan Policies (KPB) that contain all aspects listed in the PPKPB and at least include input submitted by the Credit Policy Committee (KKP).*
- *Ensure that CDE has been applied and implemented consistently and consistently.*
- *Responsible for the implementation of steps to improve the results of the evaluation and suggestions submitted by the CTF.*
- *Ensure the implementation of corrective measures for various Loan irregularities found by the Internal Audit Division.*
- *Ensuring compliance with the bank's statutory provisions and regulations that apply in the field of Loan.*
- *Establish KKP members and Credit Committee (KK).*
- *Report periodically and in writing to the BOC with corrective steps that have been, are being, and will be carried out at least regarding:*
  a. Development and quality of the overall Loan portfolio.
  b. Loan quality development given to parties related to the Bank and certain debtors.
  c. Loan in special supervision and non-performing loans.
  d. Deviations in the implementation of CDE.
  e. Important findings in Loan reported by the Internal Audit Division.
  f. The implementation of the Loan plan as stated in the Bank's work plan submitted to the Financial Services Authority.
  g. Deviation / violation of provisions in the Loan sector.

26. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Related to Other Duties and Obligations

Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and stipulated by the General Meeting of Shareholders based on applicable laws and regulations.

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Division of BOD Duties Members

Sesuai dengan SK Direksi No.11.1/DIR-BPD/III/2017, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

In accordance with BOD Decree No.11.1 / DIR-BPD / III / 2017, the distribution of duties and responsibilities of each BOD is as follows:

Tabel Pembagian Tugas Anggota Direksi
Table of Division of BOD Duties Members

Direksi *Board of Director*	Tugas dan Tanggung Jawab	*Duties and Responsibilities*
Direktur Utama *President Director*	Memimpin koordinasi keseluruhan aspek pengelolaan Bank dan melakukan supervisi kepada Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Audit Internal	*Lead the coordination of all aspects of Bank management and supervise the Strategic Planning Division, Corporate Secretary Division and Internal Audit Work Unit.*
Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank pada Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum, dan Departemen *Anti Fraud*.	*Helping the President Director to lead coordination in supervising the bank's operations in the Risk Management Division, Compliance Division, Legal Division and Fraud Queuing Work Unit.*
Direktur Bisnis *Business Director*	Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi serta melakukan supervisi kepada Divisi Bisnis UMK & Konsumer, Divisi Bisnis, Komersial dan Korporasi, Divisi Pengelolaan Dana, Jasa, & *E-Banking*, dan Divisi *Treasury*.	*Assist the President Director in leading coordination and supervising the MSE & Consumer Business Division, the Commercial and Corporate Division, the Fund Management, Services & E-Banking Division, and Treasury Division.*
Direktur Operasional *Banking Operation Director*	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank serta melakukan supervisi kepada Divisi Teknologi Informasi, Divisi Manajemen Modal Manusia, dan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	*Assist the President Director in managing and managing the Bank in order to realize the Bank's Vision and mission to guarantee and maintain the continuity of the Bank's business and supervise the Information Technology Division, Human Capital Management Division and Branch Supervision Division*
Direktur Keuangan *Finance Director*	Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi serta melakukan supervisi kepada Divisi Akuntansi, Divisi Pengelolaan Aset Khusus, Divisi Umum dan Divisi Risiko Bisnis	*Assist the President Director in leading coordination and supervising the Accounting Division, Special Asset Management Division, General Division and Business Risk Division*

Pelaksanaan Kegiatan Direksi

Implementation of BOD Activities

Selama tahun 2019, Direksi melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah :

- Memberikan arahan/breafing senin pagi, kepada seluruh pegawai di lingkup unit, bertempat di *banking hall* lt.1 Gedung kantor Bank Papua.
- Audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Biak
- Audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya
- Kunjungan dalam rangka natal bersama BMPD Jayapura.
- Pertemuan dengan asisten 1, pemerintah provinsi Papua.
- Penandatanganan MOU antara Bank Papua dengan Persipura Jayapura.
- Melaksanakan *business meeting* Bank Papua (tema: *transformation growth and sustainable*).
- Penandatangan perjanjian kredit antara Bank Papua dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
- Penandatanganan PKS antara Bank Papua dengan Pemerintah Daerah kota Jayapura tentang penerimaan penyetoran retribusi non tunai pasar sentral Hamadi.
- Melakukan kunjungan ke nasabah-nasabah prima Bank Papua dalam rangka silahturahmi memperingati tahun baru Cina (imlek).

During 2019, the BOD carried out various activities including:

- *Providing directives / breafing Monday morning, to all employees in the scope of the unit, located in the banking hall 1st floor Bank Papua office building.*
- *Hearings with the local government of Biak Regency*
- *Hearings with the local government of Puncak Jaya Regency*
- *Visit in the context of Christmas with Jayapura BMPD.*
- *Meeting with assistant 1, Papua provincial government.*
- *Signing of the MOU between Bank Papua and Persipura Jayapura.*
- *Conducting Bank Papua business meetings (theme: transformation growth and sustainable).*
- *Signing of a credit agreement between Bank Papua and the Tambrauw Regency Government.*
- *The signing of the MOU between Bank Papua and the Jayapura Regional Government regarding the receipt of the non-cash central market retribution payment for Hamadi.*
- *Visiting prime customers of Bank Papua in the context of a friendly visit to commemorate the Chinese New Year.*

- Penandatanganan perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif antara Bank Papua dengan PT. Asuransi Jasindo
- Pertemuan dengan Kementerian PUPR Prov. Papua terkait perumahan yang terkena dampak dari banjir bandang di Sentani.
- Penandatanganan perjanjian kredit antara Bank Papua PT. Jasa marga Solo Ngawi.
- Melakukan briefing bersama pemimpin cabang dan seluruh staff KC. Timika.
- Pertemuan dengan BPK RI.
- Penandatangan PKS antara Bank Papua dengan PT. Taspen (persero) terkait pembayaran tabungan hari tua , pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening bank.
- Pertemuan dengan asuransi PT. Purna Artanugrah.
- Penandatanganan penggunaan aplikasi kas daerah (*cash management system*) dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Penandatanganan perjanjian kerjasama Bank Papua dengan Bank BRI (persero) Tbk. tentang penerbitan *corporate card* (kartu kredit).
- *Prudential meeting* antara Bank Papua dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Prov. Papua dan Papua Barat.
- Penandatangan perjanjian kerja sama antara Bank Papua dengan pemerintah Prov. Papua Barat terkait *payroll* gaji.
- Audiensi dengan pemerintah daerah kabupaten nduga.
- Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank Papua dengan Jamkrida.
- Menghadiri malam penganugerahan *annual report award* dan pengumuman PT. Bank pembangunan Daerah Papua sebagai Juara 2 *Annual Report Award*, kategori BUMD non listed.
- Penandatanganan perjanjian kredit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (Bank Indonesia *award*).
- Memberikan materi terkait transformasi Bank Papua kepada peserta ODP di jakarta.
- Perjanjian kerja sama dengan Bank DKI untuk kerjasama *payment* Jak-one.

Program Pengenalan Direksi Baru

Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, diberikan orientasi atas kondisi Bank secara umum. Program orientasi meliputi antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik dan Business Ethics di Perseroan, gambaran mengenai Bank berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang

- *Signing of a consumptive loan insurance cooperation agreement between Bank Papua and PT. Jasindo Insurance*
- *Meeting with the Ministry of PUPR Papua Province is related to housing affected by flash floods in Sentani.*
- *Signing of a loan agreement between Bank Papua PT. Jasa marga Solo Ngawi.*
- *Conduct briefings with branch manager and all staff ofTimika Branch.*
- *Meeting with BPK RI.*
- *MOU Signing between Bank Papua and PT. Taspen (Persero) related to payment of old age savings, pensions, work accident insurance and life insurance through bank accounts.*
- *Meeting with PT. Purna Artanugrah.*
- *The signing of the use of the regional cash application (cash management system) in the financial management of the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency.*
- *Signing of a cooperation agreement between Bank Papua and Bank BRI (Persero) Tbk. about issuing corporate cards (credit cards).*
- *Prudential meeting between Bank Papua and the Financial Services Authority (OJK) representative of Papua and West Papua Province.*
- *Signed the cooperation agreement between the Bank Papua and the provincial government of West Papua related payroll payroll.*
- *Hearings with the local district government.*
- *Signing a cooperation agreement between Bank Papua and Jamkrida.*
- *Attending the annual report award award night and pt announcements. The Bank Pembangunan Daerah Papua is the 2nd winner Annual Report Award, category of non-listed BUMD.*
- *Signing a credit agreement with the Regional Government of South Manokwari Regency.*
- *Attending the annual meeting of Bank Indonesia Award.*
- *Providing material related to the transformation of Bank Papua to ODP participants in Jakarta.*
- *Cooperation agreement with Bank DKI for payment cooperation Jak-one.*

New BOD Orientation Program

For newly appointed members of the BOD, orientation is given to the condition of the Bank in general. The orientation program includes the implementation of good Bank governance principles and Business Ethics in the Company, a description of the Bank relating to the objectives, nature and scope of activities, financial performance, strategies, short-term and long-term plans of the

Bank, Competitive advantage, risiko pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya yang dinilai perlu, penjelasan atas kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Divisi, ke fasilitas Bank, pengkajian dokumen Bank atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Bank, Competitive advantage, risk internal control and other strategic issues that are considered necessary, an explanation of the obligations, duties, responsibilities and rights of the BOD. The orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Branch Offices / Regional Offices / Divisions, to Bank facilities, Assessment of Bank documents or other programs that are deemed appropriate.

Pada tahun 2019, tidak terdapat penambahan jumlah direksi sehingga tidak ada program pengenalan bagi calon Direksi baru.

In 2019, there was no increase in the number of directors so there was no introduction program for new prospective BOD.

Program Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi Direksi

BOD' Competency Development or Training Program

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

The BOD is committed to continually improving competence and skills through training and development programs that are carried out at least once a year.

Program pendidikan dan pelatihan bagi Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan sub bab pendidikan dan pelatihan bagi direksi dalam laporan tahunan ini.

The education and training program for BOD can be seen in the Company Profile chapter for education and training sub-directors for directors in this annual report.

Penilaian Kinerja Direksi

BOD Performance Assessment

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan dan kebijakan umum Direksi. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, Tata Kelola Perusahaan, rentabilitas dan permodalan Bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi antara lain adalah Dewan Komisaris, RUPS, OJK dan beberapa lembaga independen.

Measuring the success of the BOD 'performance is the collegial work of all members of the BOD which is reflected in a single unit on the achievement / realization of the Bank's Business Plan (BBP) on an annual basis and the BOD' general policies. In addition, the success of the BOD' performance can be measured through the results of the assessment of the Bank's Sound Level which includes aspects of risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital. The parties evaluating the performance of the BOD include the BOC, the GMS, the OJK and several independent institutions.

Penilaian kinerja Direksi Bank Papua dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self Assessment*) Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum. Penilaian sendiri (*self Assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek governance yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

The performance assessment of the BOD of Bank Papua is carried out through a Self-Assessment report on Governance which is periodically submitted to the OJK by referring to the Financial Services Authority Circular Letter Number 13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks . The Self-Assessment is carried out in a comprehensive and structured manner which is integrated into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process.

Penilaian sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Papua. Selain melalui penilaian sendiri (*self Assessment*), penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor 41 dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0222628 tanggal 27 April 2019 tanggal 29 Maret 2019 dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor 41 dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham nomor AHU-AH.01.03-0222628 tanggal 27 April 2019, dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan tahun buku 2018, yaitu laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.

Self Assessment the Implementation of Corporate Governance is carried out using a Self Assessment Working Paper on the Implementation of Corporate Governance in accordance with the Circular of the Financial Services Authority regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The performance assessment parameters of the BOD include the principles of TARIF in Good Corporate Governance related to the overall function in managing Bank Papua. In addition to self assessment, the BOD' performance appraisal is also carried out through annual report accountability at the General Meeting of Shareholders (RUPS), this can be seen during the annual RUPS held on March 29, 2019 and has been poured into Notarial Deed No. 41 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03-0222628 on April 27, 2019 on March 29, 2019 and has been poured into Notarial Deed Number 41 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03-0222628 on 27 April 2019, where the shareholders (GMS) approved the 2018 fiscal year report, namely the BOC 'supervisory report, the BOD' accountability report and the company's financial year 2018 report by giving full redemption and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the BOC and BOD for the management and supervision actions that have been carried out during the financial year 2018.

Sampai dengan akhir Desember 2019, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham.

As of the end of December 2019, all members of the BOD were not sanctioned or evaluated poorly by the three institutions, and also by the Shareholders.

Penilaian atas Kinerja Masing-masing Komite yang Berada Dibawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of Each Committee Under the BOD and the Basis of Assessment

Komite pendukung Direksi Bank Papua terdiri dari Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Pegawai, Komite Pertimbangan Kasus Pegawai.

The BOD supporting committee of the Bank Papua consists of the Credit Committee, the Credit Policy Committee, the Risk Management Committee, the ALCO Committee, the Information Technology Committee, the Employee Advisory Committee, the Employee Case Advisory Committee.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua.

Performance assessment of the BOD' Committees is determined based on the duties stated in the Committee Charter, the Committee's Work Program and the results of the GCG Self Assessment.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Direksi untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

The results of the performance assessment of each Committee Member is one basis for consideration for the BOD to dismiss and / or reappoint the relevant Committee member. The results of the performance assessment are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Director Composition Diversity Policy

Penetapan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Papua dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank serta perundang-undangan yang berlaku. Komposisi tersebut didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank Papua memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji serta dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, maupun sumber rekomendasi awal.

The determination of the composition of the members of the BOC of Bank Papua is carried out by taking into account the needs and complexity of the Bank and the applicable laws. The composition is based on banking knowledge, expertise, professional experience and background to support the effectiveness of the BOC' duties. Bank Papua provides equal opportunities for all people and therefore nominations of candidates for members of the BOC are reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race or initial recommendations.

Kriteria Dewan Komisaris seluruh pengangkatan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK.

Criteria for the BOC all appointments and / or replacements of members of the BOC are approved by the GMS taking into account adequate integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia / OJK.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

In addition, all members of the BOC of the Bank have fulfilled the requirements as members of the BOC in accordance with Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007, Bank Indonesia Regulations on Commercial Banks, and OJK Provisions regarding Capability and Compliance Assessment for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members BOD, and Prospective Members of the BOC of the Bank.

Sedangkan untuk komposisi Direksi Bank Papua merupakan kombinasi karakteristik, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Direksi. Komposisi Direksi Bank Papua juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan.

Whereas the composition of the BOD of Bank Papua is a combination of characteristics, both in terms of the organs of the BOD and individual members of the BOD, in accordance with the needs of the company. These characteristics are reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience needed in the implementation of the BOD. The composition of the BOD of Bank Papua also pays attention to the needs of the Company.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan pada tabel dibawah ini :

The diversity of the composition of the BOC and BOD is illustrated in the table below:

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Table of Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work Experience*	Jenis Kelamin *Gender*	Usia *Age*	Keahlian *Expertise*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Pasca Sarjana di Universitas Negeri Cenderawasih	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Pria	52 tahun	Manajemen
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Pasca Sarjana Bidang Kebijakan Publik MAP Universitas Gadjah Mada	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Prian	57 tahun	Manajemen
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Pasca Sarjana (Magister Manajemen Keuangan) STIE IPWI Jakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA	Komisaris Independen di PT. Bank KEB Hana Indonesia	Wanita	66 tahun	Manajemen Risiko
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih	Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan	Pria	58 tahun	Manajemen Risiko
F. Zendrato	Direktur Utama	Pasca Sarjana (Magister Manajemen) STIE IPWI Jakarta	CEO Region/ Pemimpin Wilayah Jakarta Kota, di Bank BNI dari 19 September 2013 s/d 30 November 2014.	Pria	61 tahun	Keuangan Perbankan
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Pasca Sarjana (Magister Manajemen) Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta	Kepala Biro *Corporate* Loan *Risk Management*, di Bank BCA sejak 01-Des-10	Pria	57 tahun	Keuangan Perbankan
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana	Koordinator Wilayah/ Kakanwil Jakarta, di PT. Bank JTRUST IND sejak bulan Juli 2016	Pria	62 tahun	Keuangan Perbankan
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Pasca Sarjana (Magister Manajemen) Universitas Cenderawasih	Ketua Departemen *Anti Fraud* (SKAF) Bank Papua sejak tahun 2016	Pria	45 tahun	Keuangan Perbankan
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Sarjana Ekonomi Pertanian, Universitas Cenderawasih	Kepala Kantor Bank Papua Cabang Timika sejak Mar-16	Pria	56 tahun	Keuangan Perbankan

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Director Remuneration Policy

Acuan Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Bank Papua, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Bank Papua. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

Pelaksanaan dan Pembagian Remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris yang diatur di dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris Bank Papua meliputi kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah Gaji, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura dan Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah seluruh kebijakan remunerasi, dan fasilitas lainnya.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolak ukur *Stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja Bank yang dikelola Komisaris dan Direksi Bank. Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk saat ini Bank memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing. Besaran remunerasi ditetapkan

Reference to Remuneration Policy for BOC and BOD

Determination of the amount of remuneration for members of the BOC is based on the performance of each member by considering the duties and responsibilities of the BOC. The remuneration formulation refers to Bank Papua's internal policies, applicable external regulations, industry comparison and considers the performance of Bank Papua. The Remuneration Committee provides recommendations to the BOC and is submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

The implementation and distribution of remuneration is carried out by the President Commissioner.

Remuneration policies and other facilities for the BOC regulated in Bank Papua's BOC remuneration Policy include remuneration policies and other facilities for members of the BOC stipulated General Meeting of Shareholders of the Bank is Salary, Routine Allowances, Tantiem and other facilities in non-natural forms and Types of remuneration and other facilities for all members of the BOC, which include the number of members of the BOC, the total number of remuneration policies, and other facilities.

The disclosure of the remuneration package / Policy is a benchmark for stakeholders in assessing the suitability of remuneration with the Bank's performance results managed by the Bank's Commissioners and BOD. Other facilities are defined as facilities received not in financial form, including housing facilities, transportation facilities and health insurance facilities.

Procedure for Determining the Remuneration of the BOC and BOD

For the time being, the Bank provides remuneration to members of the BOC by paying attention to their respective responsibilities and work achievements. The amount of remuneration is set to keep

untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara kedua organ perseroan tersebut agar tetap terjaga. Prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris Bank Papua sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi dan nominasi untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

Mekanisme penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris tergambar pada bagan di bawah ini :

the check and balance mechanism between the two organs of the company to be maintained. The procedure for determining the remuneration of Bank Papua BOC members is as follows:

1. *The BOC requests the Remuneration and Nomination Committee to review the remuneration and nominations to conduct remuneration studies for members of the BOC.*
2. *The Remuneration and Nomination Committee prepares remuneration recommendations for members of the BOC.*
3. *The Remuneration and Nomination Committee proposes to the BOC, remuneration for members of the BOC.*
4. *The BOC discusses the proposed Remuneration and Nomination Committee.*
5. *The BOC proposes remuneration for members of the BOC to the SGM.*
6. *The SGM establishes remuneration for members of the BOC.*

The mechanism for determining remuneration for BOC members is illustrated in the chart below:

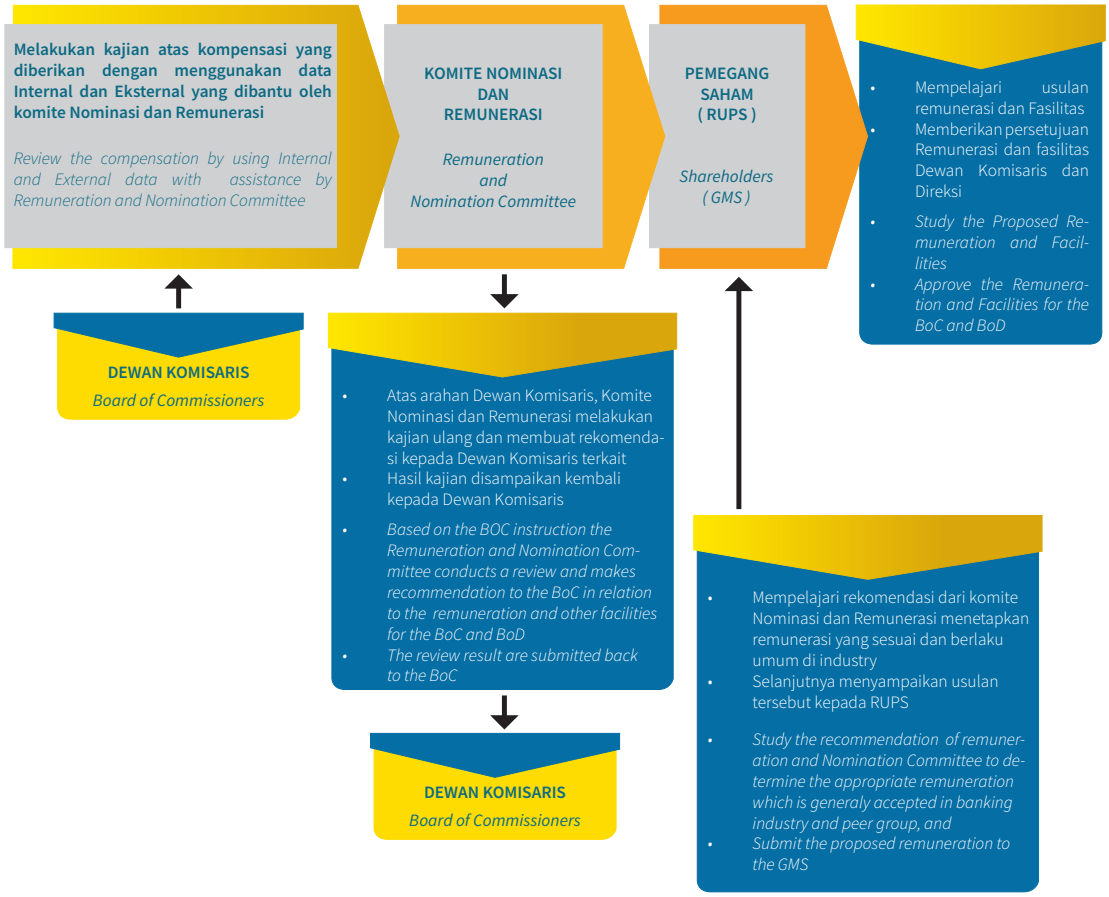

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggungjawab, dan *level* jabatan, serta bertujuan untuk memotivasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan.

Indicators for Determining the Remuneration of the BOC and BOD

The remuneration system is formulated by considering performance, responsibility and level of office, and aims to motivate the BOC, BOD and employees to achieve company goals. The remuneration system built must be fair and transparent.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi yang dibayarkan berkala, terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti dan Tantiem. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Papua adalah: Gaji, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura;

   Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2019 jumlah gaji dan tunjangan lainnya meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Komisaris adalah sebesar Rp6.868.591.082.- dan Direksi adalah sebesar Rp19.138.988.475.-
2. Rincian remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

BOC and BOD Remuneration Structure

All Commissioners and BOD receive periodically paid remuneration packages, consisting of Salaries, Housing Allowances and Vehicle Allowances, Holidays Allowances, Leave Benefits and Tantiem. Remuneration policies and other facilities for Commissioners and BOD are as follows:

1. *Remuneration policies and other facilities for members of the BOC and BOD established by the General Meeting of Shareholders of Bank Papua are: Salaries, Routine Allowances, Tantiem and other facilities in the form of non-nature;*

   Types of remuneration and other facilities for all members of the BOC and BOD. Throughout 2019 the total salaries and other benefits including remuneration in kind and non-nature provided to the Commissioners amounted to Rp6.868.591.082.- and the BOD were Rp19.138.988.475.-

2. *Details of remuneration and other facilities received by BOC and BOD in 2019 are as follows:*

Jenis Penerimaan	Komisaris *BOC*		Direksi *BOD*		*Acceptance type*
	Jumlah (org)	Nominal (Rp)	Jumlah (Org)	Nominal (Rp)	
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk *non-natura*)	4	6.318.036.882	5	18.116.639.727	1. *Remuneration (salary, bonuses, routine allowances, bonuses, other fixed income and other facilities in the form of non-in kind)*
2. Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, kesehatan dan lain-lain : a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	4	550.554.200	5	1.022.348.748	2. *Other facilities such as housing, transportation, health and others:* *a. Which can be had* *b. Which cannot be owned*
JUMLAH		**6.868.591.082**		**19.138.988.475**	**TOTAL**

Tabel Rincian Remunerasi Komisaris dan Direksi Tahun 2019
Table of Details on the Remuneration of Commissioners and Board of Director in 2019

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp)		*Acceptance type*
		Komisaris *BOC*	Direksi *BOD*	
1	Honor	3.830.500.000	8.280.000.000	*Salary*
2	Uang Makan	-	74.000.000	*Meal allowance*
3	Cuti	333.000.000	690.000.000	*Paid leave*
4	Tantiem	1.488.536.882	7.692.639.727	*Tantiem*
5	Tunjangan Hari Raya	666.000.000	1.380.000.000	*Holiday allowance*
6	Pakaian Dinas	60.000.000	75.000.000	*Office Wear*
7	BBM	240.000.000	300.000.000	*Oil & gas*
8	Tunjangan Telepon	240.000.000	300.000.000	*Telephone Allowances*
9	Tunjangan Kesehatan	10.554.200	347.348.748	*Health Allowances*
Jumlah		**6.868.591.082**	**19.138.988.475**	**Total**

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2019 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah ini :

The number of members of the Board of Director who receive remuneration packages during 2019 which are grouped in the range of income levels, can be seen in the table below:

Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris *BOC*	Jumlah Direksi *BOD*	*Total Remuneration in 1 year*
Diatas Rp2 miliar	0	5	*Above Rp2 billion*
Diatas Rp1 miliar s.d 2 miliar	2	-	*Above Rp1 billion to 2 billion*
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	2	-	*Above Rp500 million to Rp1 billion*
Rp500 juta ke bawah	-	-	*Rp.500 million and below*
Jumlah	**4**	**5**	**Total**

Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Work Relationships between the Board of Commissioners and Board of Director

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah kejelasan konsistensi dan koordinasi dari fungsi-fungsi Organ Utama yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sebagai *leader* untuk Organ-organ Pendukung. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi membutuhkan sistem dan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

One of the key success factors in implementing good Corporate Governance is the clarity of consistency and coordination of the Main Organ functions, namely the BOC and BOD as leaders for Supporting Organs. The implementation of these two functions as stated in the working relationship pattern between the BOC and the BOD requires an integrated, sustainable and accountable system and Policy.

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pencapaian kinerja Perusahaan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang di atur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG).

In order to create an integrated, sustainable and accountable working relationship between the BOC and BOD to support the achievement of the Company's performance, there is a need for equal perception and communication between the BOC and the BOD. Therefore, the BOC and BOD determine and agree on the basic principles in the working relationship of the BOC and BOD which are regulated in the Corporate Manual (BPP) of Good Corporate Governance (GCG).

Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain:

- Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris/Direksi,
- Hak dan Wewenang Dewan Komisaris/Direksi,
- *Fiduciary Duty, Piercing Corporate Veil* dan *Business Judgement Rules,*
- Tugas dan Tanggung Jawab serta Hak dan Wewenang lain dari anggota Dewan Komisaris/ Direksi,
- Keanggotaan,
- Prosedur Kerja,
- Waktu kerja, etika kerja dan remunerasi,
- Rapat Dewan Komisaris/Direksi,
- Laporan,
- Penilaian dan pertanggungjawaban kinerja.

This guideline binds every member of the BOC and BOD and includes, among others:

- *Duties and Obligations of the BOC / BOD,*
- *Rights and Authorities of the BOC / BOD,*
- *Fiduciary Duty, Piercing Corporate Veil and Business Judgment Rules,*
- *Duties and Responsibilities and other Rights and Authorities of members of the BOC / BOD,*
- *Membership,*
- *Work procedures,*
- *Work time, work ethics and remuneration,*
- *BOC / BOD Meeting,*
- *Report,*
- *Performance Assessment and accountability.*

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

To unite the views and decide on an important issue concerning the continuity of the business and operations of the Company, the BOC and the BOD conduct regular meetings in forums of the BOC-BOD Meeting. The organizers of this periodic meeting are the BOC to discuss various agendas regarding work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the BOC. This meeting is a form of coordination in order to discuss the BOD' periodic reports and provide responses, notes and advice as outlined in the Minutes of Meeting.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah Rapat.

Decisions of meetings are made based on the principle of deliberation to reach consensus or be taken based on the majority of votes and binding to the implementation of the follow-up. In the voting process, if a member of the BOC has a conflict of interest, he may not vote and the statement regarding this matter shall be recorded in the Minutes of Meeting.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and Board of Director at the Meeting

Salah satu bentuk hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah melalui mekanisme rapat. Penyelenggaraan rapat terutama ditujukan untuk proses pengambilan keputusan yang tepat terkait kelangsungan usaha Bank Papua .

One form of formal working relationship between the BOC and the BOD is through a meeting mechanism. The meeting was primarily aimed at the right decision-making process related to the business continuity of Bank Papua.

Kebijakan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Direksi. Dimana rapat Dewan Komisaris ada yang bersifat internal dan gabungan yaitu Dewan Komisaris bersama Direksi atau Komite. Rapat internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 tahun.

Adapun rapat Direksi dilakukan sebulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi. Rapat Direksi dilakukan secara berkala guna memantau kinerja operasional dan pengelolaan finansial Perusahaan.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak.

Dewan Komisaris maupun Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud dan memberikan persetujuan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal.

Meeting Policy

Meetings of the BOC and BOD refer to the Company's Articles of Association and the BOD' Guidelines. Where there are internal and joint BOC meetings, namely the BOC with the BOD or Committee. Internal meetings are held at least 4 times in 1 year.

The BOD meeting is held once a month which is attended by all BOD and executive officers one level below the BOD. BOD meetings are held regularly to monitor the operational performance and financial management of the Company.

Decisions of Meetings of the BOC and BOD are taken based on deliberations to reach consensus. In the event that a consensus agreement is not reached then the decision taken based on voting agrees the most.

The BOC and the BOD can also make legitimate and binding decisions without holding a meeting, provided that all members of the BOD have known the proposed decision and given written approval and signed the agreement. Decisions taken have the same strength as decisions through formal meetings.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan rincian sebagai berikut:
- Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Dewan komisaris dengan Komite Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali

Meeting Frequency

During 2019, the Board of Commissioners held 17 (seventeen) meetings with details as follows:
- *The Board of Commissioners Internal Meeting is 3 (Three) time*
- *Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Director 4 (four) times*
- *Board of Commissioners meetings with the Board of Commissioners Committee 10 (ten) times*

Rapat Internal Dewan Komisaris

Selain menyelenggarakan rapat internal sebanyak 3 (tiga) kali, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat bersama Komite Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta rapat gabungan sebanyak 4 kali.

Internal Meeting of the Board of Commissioners

In addition to holding 3 (Three) time internal meetings, the Board of Commissioners also held 10 meetings with the Board of Commissioners Committee, and 10 (ten) times joint meetings.

Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal
Table of the Board of Commissioners in Internal Meetings Attendance

Komisaris *BOD*	Jabatan *Position*	Periode Masa Jabatan *Term of Office*	Rapat Internal Dewan Komisaris *Internal Meeting of the BOC*		
			Jumlah Rapat *Meetings*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
DR. T.E.A Hery Dosinaen, S.Ip, M.Kp, M.Si	Komisaris Utama	Periode 1	3	2	75%
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Periode 1	3	2	75%
Betty Juliaantje Parinusa Bsc, SE,MM	Komisaris Independen	Periode 1	3	3	100%
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	Periode 1	3	3	100%

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda, Date and Participants of the Board of Commissioners Internal Meeting

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Internal Meeting

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
1	12 Februari 2019	a. Tindaklanjut temuan audit b. *Review* kebijakan SDM c. Evaluasi laporan keuangan	T.E.A. Heri Dosinaen Nataniel Mandacan Betty J. Parinussa Dortheis Sesa
2	03 Juli 2019	a. Rencana Rapat Gabungan b. Tindaklanjut Keputusan RUPS	Nataniel Mandacan Betty J. Parinussa Dortheis Sesa
3	13 Agustus 2019	Penunjukan AP dan/atau KAP Drs. Hertanto, M.S.A.,CPA., CPMA, CA, Grace, Karunawan	T.E.A. Heri Dosinaen Betty J. Parinussa Dortheis Sesa

Tanggal Pelaksanaan, Agenda Rapat dan Peserta Rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris

Date of Implementation, Meeting Agenda and Participants of the Meeting held by the Board of Commissioners with the BOC Committee

Rapat Komite Dewan Komisaris *Board of Commissioners' Committee Meeting*				
Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Jumlah Rapat** *Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Attendance*	**%**
T.E.A Hery Dosinaen, S.Ip, M.Kp	Komisaris Utama	10	4	40%
DRS. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	10	4	40%
Betty Juliaantje Parinusa Bsc, SE,MM	Komisaris Independen	10	10	100%
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	10	10	100%

No.	No. Resume	Jenis Rapat *Meeting Types*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Pemimpin Rapat *Meeting Leader*
1	001/RKA-DK/2019	Rapat Komite Audit	12 Februari 2019	Tindak Lanjut Temuan PPATK & KAP	Dorhteis Sesa (Ketua)
2	002/RKA-DK/2019	Rapat Komite Audit	19 Maret 2019	a. Laporan progres audit 2019 b. Bahas POJK No. 1/POJK.03/2019 c. Laporan progres penjualan jaminan d. Tindak lanjut kredit sindikasi	Dorhteis Sesa (Ketua)
3	003/RKA-DK/2019	Rapat Komite Audit	16 juli 2019	Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan audit internal dan eksternal th. 2017-2019	Dortheis Sesa
4	004/RKA-DK/2019	Rapat Komite Audit	22 Juli 2019	Evaluasi perkembangan kasus fraud & tindak lanjut penyelesaiannya	Dortheis Sesa
5	005/RKA-DK/2019	Rapat Komite Audit	16 Desember 2019	a. Perkembangan audit internal dan eksternal 2019 b. Progres tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal th. 2017-2019 c. Progres tindak lanjut temuan fraud tahun 2017-2019 d. lain-lain	Dortheis Sesa
6	001/KPR-DK/2019	Rapat Komite Pemantau Resiko	12 Februari 2019	a. Monitoring penyelesaian NPL *gross* & nett b. Perkembangan rasio-rasio keuangan	Betty J. Parinussa
7	002/KPR-DK/2019	Rapat Komite Pemantau Resiko	16 April 2019	Pemantauan risiko kredit NPL Bank Papua	Betty J. Parinussa
8	001/KRN-DK/2019	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	12 Februari 2019	*Review* kebijakan SDM al. Kenaikan gaji, job grading, dll	Betty J. Parinussa
9	002/KRN-DK/2019	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	10 Mei 2019	Pengangkatan pemimpin Divisi Audit Internal	Betty J. Parinussa
10	003/KRN-DK/2019	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	17 Desember 2019	Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2019	Betty J. Parinussa

Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi menyelenggarakan rapat internal sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

Board of Director Meeting

During 2019, the Board of Director held 30 (thirty) times internal meetings.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal

The Presence of Board of Director in Internal Meetings

Tabel Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal
Table of Board of Director's Attendance in Internal Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
F. Zendrato	Direktur Utama	30	28	93,33
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	30	26	86,67
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	30	25	83,33
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	30	25	83,33
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	30	28	93,33

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Direksi

Agenda, Date and Participants of the Board of Director's Internal Meetings

No	Nomor Radisi	Bulan	Semester	Tanggal Radisi	Agenda	Dirut	Dirbis	Dirkeu	Dirops	Dirpat
1	01/RD-BPD/I/2019	Januari	I	09 Januari 2019	1. Antisipasi Turbulensi Ekonomi Nasional dan Global & Strategi Bank Papua untuk terus bertahan dan tumbuh sesuai RBB 2019. 2. Draft SK Direksi tentang Biaya Kesehatan dan Kedukaan bagi pegawai Bank Papua, Perkawinan/Hubungan pertalian Darah antar Pegawai Bank Papua & lain-lain	√	√		√	√
2	02/RD-BPD/I/2019	Januari	I	14 Januari 2019	1. Revisi Draft SK *Sponsorship* Bola 2. Program Kartu Member Saga yang digabung dengan ATM	√	√	√	√	√
3	03/RD-BPD/I/2019	Januari	I	15 Januari 2019	1. Pembahasan perubahan SK Manajemen Karir	√	√	√	√	√
4	04/RD-BPD/I/2019	Januari	I	22 Januari 2019	1. Pembahasan Draf Penetapan Risk Apptile, Risk Limit dan Risk Tolerance PT. Bank Papua Tahun 2019	√	√	√	√	√
5	05/RD-BPD/II/2019	Februari	I	15 Februari 2019	1. Penetapan Bonus Kinerja 2. Penyesuaian Job Grading 3. Tata kelola Gaji Pegawai 4. Lain-lain	√	√	√	√	√
6	06/RD-BPD/II/2019	Februari	I	25 Februari 2019	1. Pembahasan NPL		√			
7	07/RD-BPD/III/2019	Maret	I	01 Maret 2019	1. Presentasi dan Pembahasan Materi Penerapan Keuangan Berkelanjutan (MRB) 2. Presentasi Stering IT, Pengembangan DC/ DRC & Q-POP dll	√	√	√	√	√
8	08/RD-BPD/III/2019	Maret	I	08 Maret 2019	1. Penanganan NPL 2. Rencana Penggabungan Divisi DAI dan Skaf lain-lain	√	√	√	√	√

No	Nomor Radisi	Bulan	Semester	Tanggal Radisi	Agenda	Dirut	Dirbis	Dirkeu	Dirops	Dirpat
9	09/RD-BPD/III/2019	Maret	I	15 Maret 2019	1. Penyesuaian Skala Penghasilan	√	√	√	√	√
10	10/RD-BPD/III/2019	Maret	I	21 Maret 2019	1. Penetapan SK Direksi Komponen, Standar Penghasilan dan Tunjangan Pegawai	√	√	√		√
11	11/RD-BPD/IV/2019	April	I	11 April 2019	1. Hasil Rakor KPK Pemda Papua Barat & Bank Papua	√	√	√	√	√
12	12/RD-BPD/IV/2019	April	I	23 April 2019	1. Pengadaan Kalender 2020	√			√	√
13	13/RD-BPD/V/2019	Mei	I	17 Mei 2019	1. Evaluasi Hasil Rapat Triwulan I periode Januari 2019 s/d Maret 2019 2. Peningkatan NPL dan Action Plan Penyelesaiannya serta Penyelesaian Kredit Hapus Buku 3. Evaluasi Laba April 2019 yang sangat kecil dan solusi perbaikan termasuk efisiensi 4. Kondisi Bisnis Bank Papua per 30 April 2019 dan Proposal /Proyeksi 30 Juni 2019 5. Progres Pengelolaan DPLK pegawai tetap 2018 dan Pengelolaan Penghargaan Akhir Masa Kerja Pegawai 6. Progres Penerimaan ODP, Rencana Penerimaan Teller Magang dan PKWT untuk memanuhi kekuarangan pegawai cabang 7. Penetapan THR 2019 8. Tarif dan biaya transaksi produk dan jasa PT.Bank Papua 9. Perubahan atas SK Dir.Nomor 17/DIR-BPD ttg Kewenangan transaksi tunai, pemindah bukuan dan otorisasi sesuai tingkatan User pada *system Core* Banking PT.Bank Papua.	√	√	√	√	√
14	14/RD-BPD/V/2019	Mei	I	28 Mei 2019	1. Pembahasan Draft SK Direksi tentang Prosedur Pembayaran Jasa Produksi dan Bonus bagi pegawai Bank Papua	√	√	√	√	√
15	15/RD-BPD/VI/2019	Juni	I	13 Juni 2019	1. Pembahasan penerimaan ODP Bank Papua Tahun 2019	√	√	√	√	√
16	16/RD-BPD/VI/2019	Juni	I	14 Juni 2019	1. Pembahasan Biaya Dana giro Escrow yang bersumber dari Dana FLPP yang terbuku pada cabang Jakarta 2. *Sponsorship* Club Sepakbola dari Kabupaten Waropen An. Klub Persewar	√	√	√	√	√
17	16.1/RD-BPD/VI/2019	Juni	I	24 Juni 2019	1.	√	√	√	√	√
18	16.2/RD-BPD/VI/2019	Juni	I	26 Juni 2019	1. Pembahasan Penilaian Kinerja Tahun 2019		√	√	√	
19	17/RD-BPD/VII/2019	Juli		02 Juli 2019	1. Penerapan Pasal Risiko untuk PKS dengan PT. Pactindo (Vendor Bangking) 2. E-*Money* Bank Papua 3. Penawaran PT. Finnet Indonesia 4. Pertanggung jawaban Biaya RUPS Tahuun 2019 5. ID *Card* Khusus Pegawai Bank Papua 6. Lain-lain	√	√			√

No	Nomor Radisi	Bulan	Semester	Tanggal Radisi	Agenda	Dirut	Dirbis	Dirkeu	Dirops	Dirpat
20	18/RD-BPD/VII/2019	Juli	II	15 Juli 2019	1. Pembahasan Peresmian Kantor KCP Tiom	√	√	√		√
21	19/RD-BPD/VII/2019	Juli	II	16 Juli 2019	1. KPI Tahun 2019 untuk Divisi dan Cabang	√	√	√		√
22	20/RD-BPD/VIII/2019	Agustus	II	06 Agustus 2019	1. Pembahasan mengenai isian Survey Orientasi Bisnis Perbankan OJK TW III Tahun 2019	√			√	√
23	21/RD-BPD/IX/2019	September	II	02 September 2019	1. Evaluasi Dampak Demo & Kerusuhan di Papua terhadap Bisnis Aset Bank Papua	√	√		√	√
24	22/RD-BPD/IX/2019	September	II	10 September 2019	1. Penutupan Asuransi terhadap Asset Bank Papua	√	√			
25	23/RD-BPD/IX/2019	September	II	17 September 2019	1. Presentasi Program Penghargaan Akhir Masa Pensiun Pegawai oleh PT. Bravo Pandu Abadi	√		√	√	√
26	24/RD-BPD/IX/2019	September	II	19 September 2019	1. Penentuan Finalisasi Gambar Desain Kalender Bank Papua 2020			√	√	√
27	25/RD-BPD/X/2019	Oktober	II	04 Oktober 2019	1. Penetapan Provinder Pengelolahaan Program Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Pegawai	√	√	√	√	√
28	26/RD-BPD/X/2019	Oktober	II	14 Oktober 2019	1. Laporan Keikutsertaan Bank Papua dalam ARA 2018 2. Penjualan Aset Gedung Kantor Bank Papua yang terletak di Boven Digoel 3. Penawaran Kerjasama BPJS	√	√	√	√	√
29	27/RD-BPD/X/2019	Oktober	II	21 Oktober 2019	1. Rencana Bisnis Bank Papua Tahun 2020 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Papua Tahun 2018-2024 (Divisi Perencanaan Strategis) 3. Lain-lain		√	√	√	
30	28/RD-BPD/XI/2019	November	II	12 November 2019	1. Service Excelent Award Bank Papua 2019	√		√		√
31	29/RD-BPD/XII/2019	Desember	II	13 Desember 2019	1. Pembahasan Pembebanan Biaya RAK atas Dana FLPP pada Rekening Giro ESCROW pada Cabang Jakarata 2. Mekanisme Pelaksanaan Balik Dana Kredit Cabang	√		√	√	√
32	30/RD-BPD/XII/2019	Desember	II	23 Desember 2019	1. Pembahasan Peraturan Perusahaan	√	√	√	√	√
JUMLAH						**28**	**26**	**25**	**25**	**28**

Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

Joint Meeting of Board of Director and Board of Commissioners

Selama tahun 2019, rapat gabungan direksi bersama Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 4 kali.

During 2019, joint meetings of directors and the Board of Commissioners were held 4 times.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Periode *Period*	Jumlah Rapat *Meeting*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
T.E.A Hery Dosinaen, S.Ip, M.Kp	Komisaris Utama	Periode 1	4	3	75%
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Periode 1	4	3	75%
Betty Juliaantje Parinussa Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Periode 1	4	4	100%
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	Periode 1	4	4	100%
F. Zendrato	Direktur Utama	Periode 1	4	2	50%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Periode 1	4	2	50%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Periode 1	4	3	75%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Periode 1	4	3	75%
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Periode 1	4	4	100%

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan

Agenda, Date and Participants of the Joint Meeting

No	Nomor Notulen *Minutes Number*	Tanggal *Date*	Agenda	Peserta *Participant*
1	001/RG-DK/2019	12 Februari 2019	a. Tindaklanjut temuan audit eksternal yaitu PPATK dan KAP b. *Review* kebijakan SDM c. Kinerja keuangan Bank Papua tahun 2018 d. Persiapan RUPS e. Lain-lain *a. Follow up on external audit findings, namely PPATK and KAP* *b. HR policy review* *c. Bank Papua financial performance in 2018* *d. Preparation of AGM* *e. Etc*	**DEWAN KOMISARIS** T.E.A Hery Dosinaen, S.IP, M.KP Drs. Nataniel Dominggus mandacan, M.Si Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE **DIREKSI** F. Zendrato Sadar Sebayang Rudhy Dharma Isak S. Wopari Jefri Sani P. S
2	002/RG-DK/2019	16 September 2019		**DEWAN KOMISARIS** T.E.A Hery Dosinaen, S.IP, M.KP Drs. Nataniel Dominggus mandacan, M.Si Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE **DIREKSI** Rudhy Dharma Isak S. Wopari Jefri Sani P. S
3	003/RG-DK/2019	23 Oktober 2019	a. Evaluasi Keiukutsertaan Bank Papua di ARA Tahun 2018 dan rencana ARA tahun 2019 b. Tindaklanjut penyelesaian APU-PPT c. dan lain-lain. *a. Evaluation of Bank Papua Participation in ARA 2018 and ARA plan 2019* *b. Follow up on APU-PPT settlement* *c. Etc*	**DEWAN KOMISARIS** Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE **DIREKSI** F. Zendrato Rudhy Dharma Jefri Sani. P. S
4	004/RG-DK/2019	17 Desember 2019		**DEWAN KOMISARIS** T.E.A Hery Dosinaen, S.IP, M.KP Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM Dortheis Sesa, SE **DIREKSI** Sadar Sebayang Isak S. Wopari Jefri Sani P. S

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Bank Papua, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank Papua, dan mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 pada prinsipnya sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dan beberapa keputusan masih dalam proses penyelesaian, sehingga salah satu fokus Dewan Komisaris selanjutnya adalah memastikan bahwa keputusan-keputusan yang masih dalam proses tersebut tetap berjalan dan dapat dipercepat penyelesaiannya. Jika ada perkembangan baru yang menghambat ataupun menyebabkan suatu keputusan tidak dapat diteruskan penyelesaiannya, maka ditinjau dan dibahas kembali dengan Direksi.

Follow-up Monitoring and Evaluation of Decisions of BoC and BoD Meetings

In conducting supervision and giving advice to the BOD in the management of Bank Papua, the BOC together with the BOD discusses the problems faced by Bank Papua, and seeks out the best mutually agreed solutions that need to be followed up by the BOD.

The results of monitoring and evaluation of the BOC in 2019 in principle have been largely followed up and SDMe decisions are still in the process of completion, so that one of the BOC' next focuses is to ensure that the decisions that are still in progress and can be accelerated. If there are new developments that hinder or cause a decision that cannot be resolved, then it is reviewed and re-discussed with the BOD.

Rencana Rapat Tahun 2020

Sejalan dengan rencana rapat Dewan Komisaris tahun 2020 akan dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris minimal 4 kali dalam setahun yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Komite-komite dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Untuk agenda rapat tahunan adalah mengikuti Rapat Kerja Dewan Komisaris dalam Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Plan for Meetings in 2020

In line with the 2020 BOC' meeting, a BOC Meeting will be held at least 4 times a year consisting of Internal Meetings of the BOC, Internal Meetings of the BOC with Committees and BOC and BOD Meetings. The annual meeting agenda is to attend the BOC' Working Meeting in the Communication Forum of the BOC / Supervisors of the Regional Development Banks throughout Indonesia.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama

Affiliation between Members of the Board of Director, Board of Commissioners, and Major Shareholders

Hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Bank Papua dapat dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Perusahaan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan.

The affiliate relationship between the Board of Director, the Board of Commissioners and the Shareholders of Bank Papua can be seen from the nature of family relations, finance, share ownership and management in other companies (multiple positions) which creates a conflict of interest.

Hubungan Afiliasi antara Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Affiliation between the Board of Director and Members of the Other Board of Director, Members of the Board of Commissioners, and Shareholders

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of Board of Director's Affiliate Relations

Nama *Name*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*			Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with*			Hubungan Kepemilikan/ Kepengurusan Saham sebagai *Share Ownership / Management Relationship as*		
	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*
F. Zendrato	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Sadar Sebayang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Rudhy Dharma	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Isak S. Wopari	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Jefri Sani P. S	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2019, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

During 2019, there were no affiliations between the Members of the BOD and other Members of the BOD, Members of the BOC, and Major / Controlling Shareholders.

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham

Affiliate Relations between the BOC and other Members of the BOC, Members of the BODr, and Shareholders

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of Affiliation of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*			Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with*			Hubungan Kepemilikan/ Kepengurusan Saham sebagai *Share Ownership / Management Relationship as*		
	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*	Direksi *BOD*	Dekom *BOC*	Pemegang Saham *Shareholder*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Dortheis Sesa, SE.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2019, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

During 2019, there were no affiliations between the Members of the Board of Commissioners and other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Director, and Major / Controlling Shareholders

Kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan Lain

Board of Commissioners and Board of Director's Position of in Other Companies

Sampai tanggal 31 Desember 2019, jabatan rangkap Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

As of December 31, 2019, concurrent positions of Board of Director and Board of Commissioners can be seen in the table as follows:

Tabel Jabatan Rangkap Direksi dan Dewan Komisaris
Table of the Board of Director and Board of Commissioners' Concurrent Position

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jabatan pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi *Position in Other Companies and Name of Institution*
DR. T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Komisaris	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Tidak
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Tidak
F. Zendrato	Direktur Utama	Tidak
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	Tidak
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	Tidak
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	Tidak
Jefri Sani P. S	Direktur Kepatuhan	Tidak

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Organ pendukung Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Sampai dengan tahun 2019, Bank Papua telah memiliki Organ dan Komite dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari:

- Komite Audit.
- Komite Pemantau Risiko.
- Komite Remunerasi dan Nominasi.

The supporting organs of the Board of Commissioners are the organs that are responsible and collectively responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out the supervisory and advisory functions to the Board of Director.

As of 2019, Bank Papua has an Organ and Committee under the Board of Commissioners consisting of:

- *Audit Committee.*
- *Risk Oversight Committee.*
- *Remuneration and Nomination Committee.*

Komite Audit
Audit Committee

Berdasarkan pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite audit beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota Anggota komite audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Komite Audit Bank Papua adalah komite yang membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun anggota Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit. Sesuai ketentuan bahwa minimal anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap sebagai anggota, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Audit Bank Papua berjumlah 6 (enam) orang, 2 (dua) orang anggota komisaris non independen, 2 (dua) orang komisaris independen, dan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

Based on Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it was explained that the Audit Committee consists of at least one Independent Commissioner, one person from an Independent Party who has expertise in finance or accounting and one person from an Independent Party who has expertise in the field of law or banking. The audit committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member. The audit committee member must have good integrity, character and morals.

The Audit Committee of Bank Papua is a committee that assists the Commissioner in overseeing matters related to financial information, internal control systems and the effectiveness of audits by external and internal auditors. The Audit Committee members are appointed by the Board of Director based on the decision of the Board of Commissioners meeting. The general criteria for being appointed as an Audit Committee is to have good integrity, character and morals. There are no members of the Bank's Board of Director or other bank members who are members of the Audit Committee. In accordance with the provisions that a minimum member of the Audit Committee consists of an Independent Commissioner as Chairperson concurrently as a member, an Independent Party who has expertise in finance or accounting and an Independent Party who has expertise in law or banking.

During 2019, the members of the Bank Papua Audit Committee were 6 (six) person, 2 (two) non-independent commissioners, 2 (two) independent commissioners, and 2 (two) independent parties who had expertise in finance and accounting . The Audit Committee is chaired by the President Commissioner and all members of the Audit Committee have fulfilled article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Persyaratan Komite Audit

Secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Bank adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bersifat independen dan profesional, baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in act*);
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan atau perbankan;
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan/atau jasa konsultansi lain kepada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain;

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan diangkat secara formal oleh Direksi dalam Surat Keputusan Direksi dan dibuat kontrak kerja.

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk masa jabatan 2018-2021.

Audit Committee Requirements

In general, the requirements for membership of the Bank Audit Committee are as follows:

1. *Having high integrity, morality, ability, knowledge and adequate experience in accordance with his educational background, and being able to communicate well;*
2. *Independent and professional, both in appearance and in reality (in act);*
3. *One of the members of the Audit Committee has an accounting or financial or banking education background;*
4. *Have sufficient knowledge to read and understand financial statements;*
5. *Having adequate knowledge of the laws and regulations in the capital market sector and other relevant laws and regulations;*
6. *Not a person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, or other party that provides audit services, non-audit services, and / or other consulting services to the Bank within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioner;*
7. *Do not have shares, either directly or indirectly with the Company. In the event that a member of the Committee obtains shares due to a legal event, the maximum period of time is 6 (six) months after the acquisition of the shares must be transferred to another party;*

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the decisions of the Board of Commissioners meeting and formally appointed by the Board of Director in the Board of Director' Decree and made a work contract.

The appointment of members of the Audit Committee is decided by a Board of Director Decree Number 48 / DIR-BPD / VII / 2018 dated 30 July 2018 concerning the Appointment of Chairpersons and Members of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for a term of 2018-2021.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Number and Composition of the Audit Committee

Jumlah Komite Audit Bank Papua sampai dengan Desember 2019 sebanyak 6 orang dengan komposisi sebagai berikut :

The number of Bank Papua Audit Committees as of December 2019 is 6 person with the composition as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*	Masa Jabatan *Term of Office*
Dortheis Sesa, SE	Ketua	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Jonathan Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Marthin Y. Warikar, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1

Profil Anggota Komite Audit

Audit Committee Members Profile

Nama *Name*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja	*Work Experience*
Dortheis Sesa, SE	S1 Universitas Cendrawasih	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.	*Previously he served as Regional Secretary of South Sorong Regency.*
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	S2 Universitas Cendrawasih	Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Tahun 2014 s.d. sekarang. Sebelumnya pada tahun 2013 pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi tahun 2013.	*Currently serving as the Papua Regional Secretary in 2014 until now. Previously in 2013, he served as Assistant for Government and Provincial Welfare in 2013.*
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	S2 Universitas Gadjah Mada	Pada tahun 2014-2017 pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Barat. Sebelumnya pada tahun 2011-2014 sebagai Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.	*In 2014-2017 he served as Regional Secretary of West Papua. Before in 2011-2014 as Assistant for Economic Development and Social Welfare.*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	S2 STIE IPWIJA	Pensiun dari Bank Indonesia (BI), Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) pada 1 Desember 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Grup Pengaturan Bank-2/DPNP. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Bank KEB Hana Indonesia sejak 15 Juni 2015	*Pension from Bank Indonesia (BI), Directorate of Banking Research and Regulation (DPNP) on 1 December 2009 with the last position as Executive Researcher / Chairperson of the Focus of Bank-2 Regulatory Group / DPNP. Previously he also served as an Independent Commissioner at PT. KEB Hana Bank Indonesia since June 15, 2015*
Jonathan Sesa, SE	S1 Ekonomi	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite audit, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank Papua	*Before being appointed as a member of the Audit Committee, he was a Retired Employee of Bank Papua*
Marthin Y. Warikar, SE	S1 Ekonomi	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite audit, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank BNI.	*Before being appointed as a member of the Audit Committee, the person concerned is a Retired Employee of BNI Bank.*

Pedoman Kerja Komite Audit

Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan Bank Papua, Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit, yang mengatur beberapa hal terkait :

a. Visi dan Misi.
b. Tujuan.
c. Dasar Hukum.
d. Organisasi.
e. Pelaporan.
f. Kewenangan.
g. Tugas dan Tanggungjawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, diatur bahwa Komite Audit Bank wajib untuk membantu Komisaris untuk/dalam :

1. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap struktur dan sistem pengendalian Internal serta kepatuhan Bank terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua.
2. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Divisi Audit Internal (DAI) dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Internal.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap *Auditor* eksternal dan pelaksanaan tugas fungsi Audit eksternal.
4. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Profil Risiko dan *Compliance* Bank serta prinsip kehati-hatian lainnya melalui hasil kaji ulang Divisi Audit Internal (DAI).

Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham di Bank Papua dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Audit Committee Work Guidelines

The Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities refers to the Corporate Manual (BPP) of GCG, Book IV of the Audit Committee's Work Guidelines, which regulates several matters:

a. Vision and mission.
b. Aim.
c. Legal basis.
d. Organization.
e. Reporting.
f. Authority.
g. Duties and responsibilities.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the Bank Audit Committee is obliged to assist the Commissioners in / in:

1. *Monitoring and evaluating the structure and system of internal control and the Bank's compliance with GCG policies.*
2. *Monitor and evaluate the performance of the Internal Audit Unit and carry out the duties of the Internal Audit function.*
3. *Monitoring and evaluating the External Auditor and carrying out the duties of the External Audit function.*
4. *Monitoring and assessing the Bank's Risk Profile and Compliance and other prudential principles through the results of the IAU review.*

Independence of Audit Committee Members

The Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties. The independence of the members of the Audit Committee is reflected in family relationships, financial, management and share ownership in Bank Papua and other companies as follows:

Tabel Independensi Anggota Keanggotaan Komite Audit
Table of Independence of the Audit Committee Member

	Dortheis Sesa	T.E.A Hery Dosinaen	Nataniel Dominggus Mandacan	Betty Juliaantje Parinussa	Jonathan Sesa	Marthin Yanis Warikar
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank Papua maupun perusahaan afiliasi.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank Papua .	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Sedangkan berikut adalah jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Audit :

While the following are positions held by members of the Audit Committee:

Nama *Name*	Jabatan Lain di Bank Papua *Other Position in Bank Papua*	Jabatan di Perusahaan Lainnya *Position in Other Company*
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	
T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Sekretaris Daerah Propinsi Papua
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Komisaris	
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	-
Jonathan Sesa, SE	Pihak Independen	-
Marthin Y. Warikar, SE	Pihak Independen	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Frequency and Level of Attendance of the Audit Committee at the Meeting

Selama tahun 2019 Komite Audit telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat, dengan daftar Kehadiran dan agenda sebagai berikut:

During 2019 the Audit Committee has held 5 (five) Times meetings, with a list of Attendance and agenda as follows:

No	Tanggal Pelaksanaan *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	12 Februari 2019	- Tindaklanjut temuan PPATK & KAP	Dortheis Sesa & Betty J. Parinussa ; Jonathan Sesa & Marthin Y. Warikar
2	19 Maret 2019	- Laporan Progress audit tahun 2019 - Pembahasan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 - Laporan Progress Penjualan/Lelang Jaminan - Tindaklanjut Kredit sindikasi	Dortheis Sesa & Betty J. Parinussa ; Jonathan Sesa & Marthin Y. Warikar
3	16 Juli 2019	- Evaluasi tindaklanjut pemeriksaan Audit Internal & Eksternal tahun 2017-2019	DR. T.E.A Hery Dosinaen, Nataniel D. Mandacan, Betty J. Parinussa & Dortheis Sesa ; Jonathan Sesa & Marthin Y. Warikar
4	22 Juli 2019	- Evaluasi perkembangan kasus fraud dan tindaklanjut penyelesaiannya	Dortheis Sesa & Betty J. Parinussa ; Jonathan Sesa & Marthin Y. Warikar
5	16 Desember 2019	- Perkembangan audit internal dan eksternal tahun 2019 - Progress tindaklanjut pemeriksaan Audit Internal & Eksternal tahun 2017-2019 - Progress tindaklanjut temuan fraud tahun 2017-2019 - lain-lain	Dortheis Sesa & Betty J. Parinussa ; Jonathan Sesa & Marthin Y. Warikar

Tabel Tingkat Kehadiran Komite Audit
Table of Audit Committee Attendance

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
Dortheis Sesa, SE	Ketua	5	5	100%
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	5	1	20%
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	5	1	20%
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Anggota	5	5	100%
Jonathan Sesa, SE	Anggota	5	5	100%
Marthin Yanis Warikar, SE	Anggota	5	5	100%

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit, dan keikutsertaan dalam rapat diadministrasikan melalui Daftar Hadir. Bila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Rencana Rapat Komite Audit Tahun 2020

Di tahun 2020, diprogramkan untuk dilaksanakan Rapat internal Komite Audit maupun Komite Audit dengan satuan kerja lain di Bank Papua, minimal 1 kali dalam sebulan.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Bentuk pengembangan yang telah dilakukan oleh Anggota Komite Audit di luar anggota dari Dewan Komisaris adalah:

- Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Sertifikasi Komite Audit;
- Seminar IKAI: Tantangan Penerapan Prinsip Independensi dalam Profesi Komite Audit.

Decisions taken in the Audit Committee meetings have been recorded and documented properly in the minutes of the Audit Committee meeting, and participation in meetings is administered through the Attendance List. If there is a dissenting opinion in the meeting, it is always clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion.

Plan for Audit Committee Meetings in 2020

In 2020, it is programmed to carry out internal meetings of the Audit Committee and the Audit Committee with other work units at Bank Papua, at least once a month.

Audit Committee Competence Development

The forms of development that have been carried out by Audit Committee Members outside the members of the BOC are:

- *Risk Management Certification;*
- *Audit Committee Certification;*
- *IKAI Seminar: Challenges for the Implementation of the Principles of Independence in the Audit Committee Profession.*

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap:

1. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal;
2. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan standar Audit yang berlaku;
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Berdasarkan *self assesment,* nilai komposit kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah 1 (satu), dengan predikat komposit sangat baik.

Report of the Audit Committee Activities

Throughout 2019 the Audit Committee has conducted a *review* of:

1. *Implementation of Intrnal Audit Division tasks;*
2. *Suitability of Audit Implementation by KAP with the applicable Audit standards;*
3. *Compliance of financial statements with financial accounting standards; and*
4. *Implementation of follow-up by the Board of Director on the findings of the Internal Audit Division, Public Accountants and the supervision results of the Financial Services Authority.*

In addition, the Audit Committee has recommended the appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm (KAP) in accordance with the applicable provisions to the GMS through the Board of Commissioners.

Audit Committee Performance Assessment

The Audit Committee's performance assessment has been carried out based on the results of Bank Papua's Corporate Governance Self-Assessment report to OJK on a regular basis. The assessment refers to POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 and SE OJK No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Based on self-assessment, the composite score for completeness and implementation of committee duties is 1 (one), with a very good composite predicate.

Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite pemantau risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota komite pemantau risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional. Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko

1. Persyaratan Integritas dan Kompetensi
   - Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   - Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
2. Persyaratan Independen
   - Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independent yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris.
   - Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
   - Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Direksi menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko.
   - Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Direksi sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Based on Article 42 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it was explained that the Risk Oversight Committee has at least one Independent Commissioner, one Independent Party who has expertise in finance and one Independent Party who has expertise in the field of Risk Management. The risk monitoring committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member. The members of the risk monitoring committee must have good integrity, character and morals.

The Risk Oversight Committee was established to ensure that the framework prepared in the Risk Management work unit has provided adequate protection against the Bank's risk exposure, both operational and non-operational. The Risk Oversight Committee was formed aimed at evaluating the suitability of Risk Management policies with the implementation of the Policy and monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit, to provide recommendations and suggestions on various company activities so that the Board of Commissioners should be concerned in carrying out their duties and the supervisory function of the Board of Director.

Appointment and Dismissal of the Risk Oversight Committee

1. *Integrity and Competence Requirements*
   - *Have good integrity, morality and morality.*
   - *Having knowledge, expertise and experience in the field of finance and in the field of Risk Management in general.*

2. *Independent Requirements*
   - *The members of the Risk Oversight Committee are independent parties that have no business relations, as well as affiliate relationships with the Bank, the Board of Director and the Board of Commissioners.*
   - *Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Bank's business activities.*
   - *Not a key employee within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Director to become a Member of the Risk Oversight Committee.*
   - *Not a person in an Accountant Office or a consultant who provides audit services and / or non-audit consultations to the Bank within the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Director as a Member of the Risk Oversight Committee.*

Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan (1) Mengundurkan diri, (2) Meninggal dunia, (3) Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Bank, (4) Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

The Risk Oversight Committee member can stop or be dismissed even though his position has not ended, if the person concerned (1) resigns, (2) dies, (3) does SDMething that is detrimental to the Bank, (4) violates or does not fulfill the requirements as a member of the Monitoring Committee Risk as regulated in the Financial Services Authority Regulation.

Jumlah dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Number and Composition of the Risk Oversight Committee

Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Papua diubah menjadi sebagai berikut, berdasarkan SK Direksi Nomor 18.3/DIR-BPD/III/2019:

As of March 25, 2019, the membership structure of the Bank Papua Risk Oversight Committee is amended to be as follows, based on Board of Director' Decree Number 18.3 / DIR-BPD / III / 2019:

Nama *Name*	Jabatan/Asal *Position / Origin*	Dasar Pengangkatan *Basics Appointment*	Masa Jabatan *Term of Office*
Betty Juliaantje Parinussa, BSC, SE, MM	Ketua/Komisaris Independen	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota / Komisaris Utama	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota / Komisaris	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Dortheis Sesa, SE	Anggota /Komisaris Independen	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Jonathan Sesa, SE	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Ivant B. Simamora, S.Sos	Anggota	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee Profile Members

Nama *Name*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja	*Work experience*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	S2 STIE IPWIJA	Pensiun dari Bank Indonesia (BI), Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) pada 1 Desember 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Grup Pengaturan Bank-2/DPNP. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Bank KEB Hana Indonesia sejak 15 Juni 2015	*Pension from Bank Indonesia (BI), Directorate of Banking Research and Regulation (DPNP) on 1 December 2009 with the last position as Executive Researcher / Chairperson of the Focus of Bank-2 Regulatory Group / DPNP. Previously he also served as an Independent Commissioner at PT. KEB Hana Bank Indonesia since June 15, 2015*
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	S2 Universitas Cendrawasih	Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 s.d. sekarang. Sebelumnya pada tahun 2013 pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi tahun 2013.	*Currently serving as the Papua Province Regional Secretary in 2014 until now. Previously in 2013, he served as Assistant for Government and Provincial Welfare in 2013.*
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	S2 Universitas Gajah Mada	Pada tahun 2014-2017 pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Barat. Sebelumnya pada tahun 2011-2014 menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.	*In 2014-2017 he served as Regional Secretary of West Papua. Before in 2011-2014 as Assistant for Economic Development and Social Welfare.*
Dortheis Sesa, SE	S1 Universitas Cendrawasih	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.	*Previously he served as Regional Secretary of South Sorong Regency.*
Jonathan Sesa, SE	S1 Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite audit, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank Papua	*Before being appointed as a member of the Audit Committee, he was a Retired Employee of Bank Papua*
Ivant B. Simamora, S. Sos	S1	Pernah menjabat sebagai *brand manager* di Bank Victoria Internasional Tbk Tahun 2011 dan sebagai *National Sales Manager* di PT. Inerco Global Internasional tahun 2015	*Has served as a brand manager at BAnk Victoria International Tbk in 2011 and as National Sales MAnger at PT. Inerco Global International in 2015*

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada BPP Tata Kelola Perusahaan Bank Papua Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG) dan Buku Pedoman Perusahaan tersebut sedang dilakukan penyempurnaan, disesuaikan dengan Peraturan Regulasi Perbankan terkini dengan pengaturan yang lebih terperinci tentang Tata Tertib Kerja, Pengaturan Etika Kerja, waktu dan rapat kerja yang belum diatur terperinci dalam BPP Buku II GCG Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, diatur bahwa Komite Pemantau Risiko Bank wajib untuk :

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas fungsi Manajemen Risiko.
2. Melaukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta perkembangan profil risiko Bank yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank secara berkala.
5. Me*review* dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi Komite Manajemen Risiko (KMR) kepada Direktur Utama.
6. Berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal (DAI), melakukan *review* dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Manajemen Risiko Bank.
7. Me*review* dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal (DAI) dalam penerapan manajemen risiko Bank.
8. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan Bank melalui hasil kaji ulang dari Divisi Audit Internal (DAI) untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.

Risk Oversight Committee Work Guidelines

The Risk Oversight Committee Work Guidelines in carrying out their duties and responsibilities refer to the BPP of Good Corporate Governance (GCG) Work Guidelines for the Risk Oversight Committee based on Board of Director Decree No. 101.A / DIR-BPD / XI / 2013 concerning the Corporate Manual (BPP) of Good Corporate Governance (GCG) and the Company's Guidelines are being carried out for improvement, adapted to the latest Banking Regulations with more detailed arrangements regarding Work Rules, Regulations Work Ethics, time and work meetings that have not been arranged in detail in the BPP Book II GCG Commissioner.

Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the Bank Risk Oversight Committee must:

1. *Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management function.*
2. *Carry out monitoring and evaluation of the implementation of the duties of the Risk Management committee and Risk Management work unit.*
3. *Monitor and evaluate policies and implementation of Risk Management prepared by the Board of Director.*
4. *Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee as well as the development of the Bank's risk profile submitted by the Bank's Risk Management Division on a regular basis.*
5. *Review and evaluate the recommendations of the Risk Management Committee (KMR) to the President Director.*
6. *Coordinate with DAI, conduct reviews and evaluations of the implementation of duties and responsibilities of the Bank's Risk Management Division.*
7. *Reviewing and evaluating the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit in implementing Bank Risk Management.*
8. *Evaluate the quarterly risk profile report of the Bank through the results of a review from the DAI to subsequently provide input to the Board of Commissioners on the risk conditions faced by the Bank and propose steps to mitigate those risks so that the Board of Commissioners can provide input for steps to improve the Board of Director if needed.*

9. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko kesegenap jajaran dengan melalui pelatihan / sertifikasi.
11. Memantau dan mengevaluasi kompetensi Sumber Daya Manusia melalui penetapan tenaga yang sesuai (terhadap persyaratan).
12. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik dengan adanya pemisahan fungsi *excenting* dan *reporting*.
13. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
14. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistim Informasi Tehnologi.
15. Memantau dan mengevaluasi kecukupan *limit* produk & transaksi.
16. Memantau dan mengevaluasi penetapan parameter peringkat Risiko.
17. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan.
18. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.

9. Monitor and evaluate employee risk setting parameters.

10. Monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Culture throughout the ranks through training / certification.

11. Monitor and evaluate the competence of Human Resources through the determination of appropriate personnel (on requirements).

12. Monitoring and evaluating the Risk Management function has functioned well with the separation of excenting functions and reporting.

13. Monitor and reevaluate risk measurement methodologies.

14. Monitor and evaluate the adequacy of the Technology Information System.

15. Monitor and evaluate the adequacy of product limits & transactions.

16. Monitor and evaluate the determination of Risk ranking parameters.

17. Monitor and evaluate emergency plans implemented.

18. Monitor and evaluate the Bank's compliance with the implementation of Risk Management for all agreements and commitments made by the Board of Director to Bank Indonesia and other relevant parties.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dituntut untuk bersifat dan bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham di Bank Papua dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Independence of Risk Oversight Committee Members

The Risk Oversight Committee is required to be independent and objective, and be professional in carrying out their duties and responsibilities. The independence of the members of the Risk Oversight Committee is reflected in family relations, financial, management and share ownership in Bank Papua and other companies as follows:

Tabel Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Table of Independence of Risk Oversight Committee Members

	Betty Juliaantje Parinussa	T.E.A Hery Dosinaen	Nataniel Dominggus Mandacan	Dortheis Sesa	Jonathan Sesa	Ivant B. Simamora
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank Papua maupun perusahaan afiliasi.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank Papua .	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Sedangkan berikut adalah jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Pemantau Risiko:

While the following are positions held by members of the Risk Oversight Committee:

Nama *Name*	Jabatan Lain di Bank Papua *Other Position in Bank Papua*	Jabatan di Perusahaan Lainnya *Position in Other Company*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	-
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Sekretaris Daerah Propinsi Papua
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Komisaris	
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	-
Jonathan Sesa	-	-
Ivant B. Simamora, S.Sos	-	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat

Frequency and Attendance of the Risk Oversight Committee at the Meeting

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut :

The Risk Oversight Committee holds meetings in accordance with the needs led by the Chair of the Committee. The decision of the Risk Oversight Committee Meeting is taken based on consensus agreement. During 2019, the Risk Oversight Committee held 2 meetings with the frequency and attendance of committee members in the meeting as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM, MM	Ketua	2	2	100%
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	2	1	50%
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	2	1	50%
Dortheis Sesa, SE	Anggota	2	2	100%
Jonathan Sesa, SE	Anggota	2	2	100%
Ivant B. Simamora, S.Sos	Anggota	2	2	100%

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, dan keikutsertaan dalam rapat diadministrasikan melalui Daftar Hadir. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Decisions taken in the Risk Oversight Committee meetings have been recorded and documented properly in the minutes of the Risk Oversight Committee meeting, and participation in meetings is administered through the Attendance List. Dissenting opinions that occur in a meeting are always clearly stated in the minutes of the meeting along with reasons for the dissenting opinions.

Rencana Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Di tahun 2020, diprogramkan akan dilaksanakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 22 kali dengan agenda rapat dengan Unit Terkait sebanyak empat kali, rapat dengan Ketua Komite sebanyak 12 kali, rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 6 kali

Plan for the Meetings of the Risk Oversight Committee in 2020

In 2020, 22 Risk Oversight Committee Meetings will be programmed with the agenda of meetings with the Related Units four times, meetings with the Committee Chair 12 times, meetings with the Board of Commissioners 6 times

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Bentuk pengembangan yang telah dilakukan oleh Anggota Komite Pemantau Risiko di luar anggota dari Dewan Komisaris adalah:

- Pelatihan Manajemen Risiko;
- Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Sosialisasi KPK.

Risk Oversight Committee Competency Development

The forms of development that have been carried out by the Risk Oversight Committee Members outside the members of the Board of Commissioners are:

- *Risk Management Training;*
- *Risk Management Certification;*
- *KPK socialization.*

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko bank dan memonitor pelaksanaannya;
2. Melakukan pemantauan atas seluruh risiko akibat perubahan-perubahan indikator dalam pasar (suku bunga, kurs dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank Papua;
3. Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank Papua;
4. Bersama dengan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan pembahasan Laporan Profil Risiko Bank.

Risk Oversight Committee Activities Report

Throughout 2019 the Risk Oversight Committee has carried out various activities in order to carry out the following tasks and responsibilities:

1. *Evaluate bank Risk Management policies and monitor their implementation;*
2. *Monitor all risks due to changes in indicators in the market (interest rates, exchange rates, etc.) to ensure that these changes do not disturb the stability of the Bank Papua;*
3. *Monitor all risks of Bank Papua;*
4. *Together with the Risk Management Division, the Bank conducts a discussion on the Bank's Risk Profile Report.*

Rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2019

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut :

Risk Oversight Committee Meeting in 2019

The Risk Oversight Committee organizes meetings according to the needs of the Chair of the Committee. Decisions of the Risk Oversight Committee Meeting are based on consensus agreement. During 2019, the Risk Oversight Committee held 2 (two) meetings with the frequency and level of attendance of committee members at the meeting as follows:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Table of the Risk Oversight Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
12 Februari 2019	a. Monitoring penyelesaian NPL *gross* & nett b. Perkembangan rasio-rasio keuangan *a. Monitoring gross & nett NPL settlement* *b. Development of financial ratios*	1. T.E.A Hery Dosinaen 2. Nataniel D. Mandacan 3. Betty J. Parinussa 4. Dortheis Sesa 5. Jonathan Sesa 6. Ivant B. Simamora
16 April 2019	Pemantauan risiko kredit NPL Bank Papua *Bank Papua NPL credit risk monitoring*	1. Betty J. Parinussa 2. Dortheis Sesa 3. Jonathan Sesa 4. Ivant B. Simamora

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan hasil laporan *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Berdasarkan *self assesment*, nilai komposit kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah 1 (satu), dengan predikat komposit sangat baik.

Risk Oversight Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Risk Oversight Committee is based on the results of the Bank Papua Corporate Governance Self-Assessment report to OJK on a regular basis. The assessment refers to POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 and SE OJK No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Based on self-assessment, the composite score for completeness and implementation of committee duties is 1 (one), with a very good composite predicate.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Berdasarkan pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite remunerasi dan nominasi beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Komisaris, dan satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau satu orang perwakilan pegawai. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Papua diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris dan Direksi. Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas remunerasi Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan. Untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Persyaratan Integritas dan Kompetensi :
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang perbankan serta memiliki pengetahuan tentang ketentuan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Based on Article 43 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, it is explained that the Remuneration and Nomination Committee has at least one Independent Commissioner, one Commissioner, and one Executive Officer which oversees the function of Human Resources or an employee representative. The remuneration and nomination committee is chaired by an Independent Commissioner concurrently as a member. In the event that members of the remuneration committee and nominations are determined to be more than 3 (three) person, the members of the Independent Commissioner shall be at least 2 (two) person.

Members of the Bank Papua Remuneration and Nomination Committee are appointed by the BOD based on the decision of the BOC meeting. The establishment of the Remuneration and Nomination Committee was conducted to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

The Nomination and Remuneration Committee was formed to assist the Commissioner in carrying out the supervisory function on matters relating to the qualifications and processes of nomination and remuneration of Commissioners and BOD. This committee also evaluates and provides recommendations to the BOC for the remuneration of the BOD to be submitted to the SGM for approval. To be appointed as the Remuneration and Nomination Committee is to have good integrity, character and morals. There are no bank BOD or BOD of other banks who are members of the Remuneration and Nomination Committee.

Appointment and Dismissal of the Remuneration and Nomination Committee

1. *Requirements for Integrity and Competence:*
   a. *Have good integrity, character and morals.*
   b. *Have knowledge, expertise, and experience in the field of banking and have knowledge of the rules and regulations that apply.*

2. Persyaratan Independen :
   a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank
   c. Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
   d. Bukan merupakan anggota dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/ atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Independent Requirements:
   a. Members of the Remuneration and Nomination Committee are independent parties who do not have business relations, as well as affiliate relationships with the Bank, the BOD and the BOC.
   b. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Bank's business activities
   c. Not a key employee within the last 1 (one) year before being appointed by the BOC to become a Member of the Remuneration and Nomination Committee.
   d. Not a member of an Accountant Office or a consultant who provides audit services and / or non-audit consultations to the Bank within the last 1 (one) year before being appointed by the BOC as a Member of the Remuneration and Nomination Committee.

Jumlah dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak terpisah melainkan menjadi satu kesatuan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai *system* remunerasi, sistem nominasi dan *succession plan* Bank Papua.

Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Papua sampai akhir tahun 2019 berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang sebagai anggota dengan komposisi sebagai berikut :

Number and Composition of the Remuneration and Nomination Committee

The membership of all members of the Remuneration and Nomination Committee is not separate but becomes a whole. Members of the Remuneration and Nomination Committee have the competence and knowledge of the remuneration system, the nomination system and Bank Papua's succession plan.

The number of Bank Papua Remuneration and Nomination Committees until the end of 2019 is 5 person consisting of 1 chairman and 4 person as members with the following composition:

Nama *Name*	Jabatan/Asal *Position / Origin*	Dasar Pengangkatan *Basics Appointment*	Masa Jabatan *Term of Office*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Ketua / Komisaris Independen	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota / Komisaris Utama	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota / Komisaris	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Dortheis Sesa, SE	Anggota / Komisaris Independen	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1
Yuliana D. Yembise, SH.MH	Anggota / Pihak Independen	SK Direksi Nomor : 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019	Periode 1

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Profile Members

Nama *Name*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja	*Work Experience*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	S2 STIE IPWIJA	Pensiun dari Bank Indonesia (BI), Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) pada 1 Desember 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Grup Pengaturan Bank-2/DPNP. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Bank KEB Hana Indonesia sejak 15 Juni 2015	*Pension from Bank Indonesia (BI), Directorate of Banking Research and Regulation (DPNP) on 1 December 2009 with the last position as Executive Researcher / Chairperson of the Focus of Bank-2 Regulatory Group / DPNP. Previously he also served as an Independent Commissioner at PT. KEB Hana Bank Indonesia since June 15, 2015*
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	S2 Universitas Cendrawasih	Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 s.d. sekarang. Sebelumnya pada tahun 2013 pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi tahun 2013.	*Currently serving as the Papua province Regional Secretary in 2014 until now. Previously in 2013, he served as Assistant for Government and Provincial Welfare in 2013.*
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	S2 Universitas Gajah Mada	Pada tahun 2014-2017 pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Barat. Sebelumnya pada tahun 2011-2014 menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.	*In 2014-2017 he served as Regional Secretary of West Papua. Before in 2011-2014 as Assistant for Economic Development and Social Welfare.*
Dortheis Sesa, SE	S1 Universitas Cendrawasih	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.	*Previously he served as Regional Secretary of South Sorong Regency.*
Yuliana D. Yembise, SH.MH	S2 Universitas Gadjah Mada	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum Bank Papua sesuai SK No. 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously she served as Head of the General Division of Bank Papua in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG) Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam SK.DIR 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, mengatur beberapa hal terkait dengan: (a) Visi dan Misi, (b) Tujuan, (c) Dasar Hukum, (d) Organisasi, (e) Pelaporan. (f) Kewenangan, dan (g) Tugas dan Tanggung Jawab.

Work Guidelines for the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee in carrying out its duties and responsibilities refers to the Work Guidelines of the Remuneration and Nomination Committee stipulated in the Corporate Manual (BPP) Good Corporate Governance (GCG) Work Guidelines for the Remuneration and Nomination Committee stipulated in SK.DIR 101.A / DIR-BPD / XI / 2013 dated 29 November 2013.

The Work Guidelines for the Remuneration and Nomination Committee, governs several matters related to: (a) Vision and Mission, (b) Objectives, (c) Legal Basis, (d) Organizations, (e) Reporting. (f) Authority, and (g) Duties and Responsibilities.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, diatur bahwa tugas utama Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khusus tentang penetapan

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the main task of the Remuneration and Nomination Committee is to assist the implementation of the duties of the BOC

Remunerasi dan Nominasi di Bank. Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah :

1. Terkait Fungsi Nominasi

- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat Eksekutif untuk pemimpin Group Audit dan pemimpin Group Pemantau Risiko.
- Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan evaluasi dan advis terhadap kebijakan dan sistem jenjang karir (*carrier path Policy*) bagi karyawan, pejabat dan/atau Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan evaluasi dan advis terhadap kebijakan dan sistem prototype model untuk kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas yang akan dibuka khususnya dalam nominasi karyawan dan pejabatnya yang akan direkrut.
- Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan evaluasi dan advis terhadap peningkatan jumlah perputaran karyawan/pejabat yang keluar-masuk (*turn over ratio*) sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan nominasi yang dijalankan.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun *system* penilaian kinerja Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan memberikan advis tentang *system* penerimaan non karyawan di Bank, satu *level* dibawah Direksi.

specifically regarding the determination of Remuneration and Nominations in Banks Among the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee include:

1. Related to the Nomination Function

- *Assist the BOC in preparing the system and procedures for selecting and / or replacing members of the BOC and BOD to be submitted to the SGM.*
- *Assist the BOC in providing recommendations to prospective members of the BOC and / or BOD to be submitted to the SGM.*
- *Assist the BOC in giving recommendations to Independent Parties who can become members of the Committee.*
- *Assist the BOC in compiling, implementing and analyzing nomination criteria and procedures for prospective Commissioners and BOD.*
- *Assist the BOC in compiling, implementing and analyzing the criteria and procedures for dismissal of the BOC and BOD.*
- *Assist the BOC in monitoring implementation and analyzing selection criteria and procedures for prospective Executive officials for Group Audit leaders and Risk Monitoring Group leaders.*
- *Assist the BOC to provide evaluation and advice on carrier path policies and systems for employees, officials and / or BOD.*
- *Assist the BOC to provide evaluation and advice on Policy and model prototype systems for branch offices / auxiliary branches / cash offices to be opened especially in the nomination of employees and officials to be recruited.*
- *Assist the BOC to provide evaluations and advice on increasing turnover ratios (turn over ratios) as consideration for evaluating the nomination policies that are implemented.*
- *Assist the BOC in preparing a performance assessment system for Commissioners and BOD.*
- *Assist the BOC to provide recommendations on the number of members of the BOC and BOD.*
- *Assist the BOC in evaluating and providing advice on the acceptance system of non employees at the Bank, one level below the BOD.*

2. Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap penyusunan dan/atau hasil evaluasi atas kebijakan remunerasi Bank dan perubahannya (apabila ada) bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hasil pertimbangan dan evaluasi atas kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank (terkait dengan kebijakan remunerasi Bank).
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan sistem pengupahan, pemberian tunjangan, bonus dan fasilitas karyawan.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, antara lain opsi saham.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan sistem pensiun bagi karyawan.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan karyawan.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dituntut untuk besifat dan bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham di Bank Papua dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

2. Related to the Remuneration Function

- *Provide recommendations to the BOC on the preparation and / or evaluation of the Bank's remuneration policies and changes (if any) for the BOC, BOD and Executive Officers*
- *Provide recommendations to the BOC on the results of consideration and evaluation of financial performance, individual work performance, fairness with the peer group, and the Bank's long-term goals and strategies (related to the Bank's remuneration Policy).*
- *Assist the BOC in compiling and evaluating payroll policies and systems, providing benefits and facilities for the BOC and BOD.*
- *Assist the BOC in providing recommendations on wage policies and systems, providing benefits, bonuses and employee facilities.*
- *Assist the BOC in providing recommendations on options to the BOC, BOD and Employees, including stock options.*
- *Assist the BOC in providing recommendations on pension policies and systems for employees.*
- *Assist the BOC in providing recommendations on compensation policies and systems and other benefits in reducing employees.*

Independence of the Remuneration and Nomination Committee Members

The Remuneration and Nomination Committee is required to be independent and objective, and professional in carrying out their duties and responsibilities. The independence of the the Remuneration and Nomination Committee members is reflected in family relations, financial, management and share ownership in Bank Papua and other companies as follows:

Tabel Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Independence of Remuneration and Nomination Committee Members

	Betty Juliaantje Parinussa	T.E.A Hery Dosinaen	Nataniel Dominggus Mandacan	Dortheis Sesa	Yuliana D. Yembise
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank Papua maupun perusahaan afiliasi.	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank Papua .	✔	✔	✔	✔	✔
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.	✔	✔	✔	✔	✔

Sedangkan berikut adalah jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Whereas the following are positions held by Members of the Remuneration and Nomination Committee

Nama *Name*	Jabatan Lain di Bank Papua *Other Position in Bank Papua*	Jabatan di Perusahaan Lainnya *Position in Other Company*
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Komisaris Utama	Sekretaris Daerah Propinsi Papua
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Komisaris	
Dortheis Sesa, SE	Komisaris Independen	-
Yuliana D. Yembise, SH.MH	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	-

Frekuensi dan Jumlah Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Frequency and Amount of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Jumlah Kehadiran *Attendance*	%
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM, MM	Ketua	3	3	100%
Dr. T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si	Anggota	3	2	66%
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M. Si	Anggota	3	2	66%
Dortheis Sesa, SE	Anggota	3	3	100%
Yuliana D Yembise	Anggota	3	3	100%

No	Tanggal Pelaksanaan *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	12 Februari 2019	*Review* kebijakan SDM antara lain Kenaikan gaji, *job grading*, dll	T.E.A Hery Dosinaen, Nataniel D. Mandacan, Betty J. Parinussa, Dortheis Sesa & Yuliana D. Yembise
2	10 Mei 2019	Pengangkatan pemimpin Divisi Audit Internal	Betty J. Parinussa, Dortheis Sesa & Yuliana D. Yembise
3	17 Desember 2019	Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2019	T.E.A Hery Dosinaen, Nataniel D. Mandacan, Betty J. Parinussa, Dortheis Sesa & Yuliana D. Yembise

Rencana Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Di tahun 2020, diprogramkan untuk pelaksanaan Rapat internal Komite Remunerasi dan Nominasi maupun Komite Remunerasi dan Nominasi dengan satuan kerja lain di Bank Papua , minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Plan for Remuneration and Nomination Committee Meetings in 2020

In 2020, it is programmed to carry out an internal meeting of the Remuneration and Nomination Committee and the Remuneration and Nomination Committee with other work units at Bank Papua, at least once a month.

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bentuk pengembangan yang telah dilakukan oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar anggota dari Dewan Komisaris adalah:

1. *Workshop* Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Refreshment* BSMR),
2. *Workshop* Kebijakan Remunerasi Berdasarkan POJK No. 45/ POJK.03/2015 dan SE OJK No. 040/ SEOJK.03/2016,
3. Pelatihan dan Sertifikasi *(Certificate Professional Human Resources)*

Remuneration and Nomination Committee Competency Development

The forms of development that have been carried out by the Remuneration and Nomination Committee Members outside the members of the BOC are:

1. *Bank Sound Rating (Refreshment BSMR) Workshop,*
2. *Remuneration Policy Workshop Based on POJK No. 45 / POJK.03 / 2015 and SE OJK No. 040 / SEOJK.03 / 2016,*
3. *Training and Certification (Certificate Professional Human Resources)*

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Dewan pengawas.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance buku 6 Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Memberikan rekomendasi calon Pengurus Bank dikarenakan pemilihan calon pengurus Bank dilakukan oleh Pemegang Saham untuk memilih calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi namun tetap memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang.
4. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite dan Anggota Komisaris. Disebabkan calon Pihak Independen pengusulan berasal dari Pemegang Saham namun tetap harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang, Bank Papua telah memiliki kebijakan Suksesi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam BPP *Good Corporate Governance* (GCG) Bab VI Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan Bank Papua kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Berdasarkan *self assesment*, nilai komposit kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah 1 (satu), dengan predikat komposit sangat baik.

Report on the Remuneration and Nomination Committee Activities

Throughout 2019 the Remuneration and Nomination Committee has carried out various activities in the framework of carrying out the following duties and responsibilities:

1. *Evaluate the remuneration policy for the BOC and BOD including the remuneration policy for Executive officials in an effort to provide recommendations to the supervisory Board.*
2. *With regard to the nomination policy for providing recommendations to the BOC, a system and procedures for the selection and / or replacement of members of the BOC and BOD have been formulated to be submitted to the GMS. in accordance with the Corporate Guidebook Good Corporate Governance book 6 Remuneration and Nomination Committee.*
3. *Provide recommendations for prospective Bank Managers because the selection of candidates for Bank management is carried out by the Shareholders to elect prospective members of the BOC and / or BOD but still meet the requirements of suitability and propriety by the authorized regulator.*
4. *Provide recommendations to the BOC for Independent Party candidates who can become Committee Members and Commissioners. Because the nominees for the Independent Party nomination come from the Shareholders, they still have to meet the requirements of competency and propriety by the authorized regulator.*

Succession Policy for the BoD and BoC

In order to maintain the continuity of leadership in the future, Bank Papua has a Succession policy for BOD and BOC as stipulated in BPP Good Corporate Governance (GCG) Chapter VI Working Guidelines for Remuneration and Nomination Committee.

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee has been conducted based on the results of the Bank Papua Corporate Governance Self-Assessment report to OJK on a regular basis. The assessment refers to POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 and SE OJK No. 13 / SEOJK.03 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Based on self-assessment, the composite score for completeness and implementation of committee duties is 1 (one), with a very good composite predicate.

Komite di Bawah Direksi

Committees under Board of Director

Direksi Bank Papua dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang semuanya bertugas mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan. Anggota Komite Eksekutif ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawabnya.

Berikut adalah 7 (tujuh) Komite di bawah Direksi:

1. Komite Kredit.
2. Komite Kebijakan Perkreditan.
3. Komite Manajemen Risiko.
4. Komite ALCO.
5. Komite Teknologi Informasi.
6. Komite Pertimbangan Pegawai.
7. Komite Pertimbangan Kasus Pegawai.

The BOD of Bank Papua is assisted by 7 Executive Committees all of whom are tasked with supporting the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the BOD through recommendations and recommendations that can be used as references by the BOD in making decisions. Members of the Executive Committee are appointed by the BOD. The Executive Committee contributes in accordance with the areas of work and responsibilities.

Following are 7 (seven) Committees under the Board of Director:

1. *Credit Committee.*
2. *Credit Policy Committee.*
3. *Risk Management Committee.*
4. *ALCO Committee.*
5. *Information Technology Committee.*
6. *Employee Advisory Committee.*
7. *Employee Case Advisory Committee.*

Komite Kredit
Credit Committee

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya *loan risk premium* per produk dan sektoral serta menetapkan batas tertinggi tarif bunga kredit, menetapkan *portfolio/exposure/sectoral limit* untuk masing-masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasannya. Komite kredit ditetapkan berdasarkan SK Direksi nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

It is a committee that assists the Board of Directors in setting policy proposals, management systems and credit procedures, determining the amount of loan risk premium per product and sectoral and setting the highest credit interest rates, setting portfolio / exposure / sectoral limits for each industry and setting measurement tools and controlling credit risk and its limits. The credit committee is determined based on Directors' Decree number 40 / DIR-BPD / VII / 2017 dated July 19, 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit dijabat oleh :		
2 Direksi	:	Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan
3 Direksi	:	Direktur Bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur Operasional
Direksi Lengkap	:	Direktur Utama, Direktur bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur Operasional
Pejabat Pemutus	:	1. Direktur Utama
		2. Direktur Bisnis
		3. Direktur Keuangan
		4. Direktur Operasional
Non Voting Member	:	Direktur Kepatuhan
Ketua	:	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	:	Pemimpin Departemen Kredit Korporasi & Sindikasi
Anggota	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
	:	Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer
	:	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
	:	Pemimpin Departemen Kredit komersial
	:	Pemimpin Departemen Risiko Bisnis Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi
	:	Analis Risiko Bisnis
	:	*Relationship Manager* (RM)
Non voting member	:	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
	:	Pemimpin Divisi Hukum

Structure and Membership of the Credit Committee

The Credit Committee is held by:		
2 Board of Director	:	*Business Director and Finance Director*
3 Board of Director	:	*Business Director, Finance Director and Banking Banking Operation Director*
Complete Board of Director	:	*President Director, Business Director, Finance Director and Banking Operation Director*
Decision Officer	:	*1. President Director*
		2. Business Director
		3. Finance Director
		4. Banking Operation Director
Non Voting Member	:	*Compliance Director*
Chairman	:	*Compliance Director*
Secretary	:	*Leader of Department of Corporate Loan & Syndication*
Member	:	*Leader of the Bank's Risk Management Division*
	:	*Leader of SME, Business and Consumer Division*
	:	*Leader of the Special Asset Management Division*
	:	*Leader of the Commercial Loan Department*
	:	*Leader of the Department of Risk for Commercial, Corporate and Syndicated Loan Business*
	:	*Business Risk Analyst*
	:	*Relationship Manager (RM)*
Non voting member	:	*Leader of the Compliance Division*
	:	*Leader of the Risk Management Division*
	:	*Leader of Legal Division*

Pedoman Kerja Komite Kredit

Komite kredit melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Surat Keputusan Direksi Nomor 40/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Komite dan Keputusan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG) dan Buku Pedoman Perusahaan tersebut sedang dilakukan penyempurnaan, disesuaikan dengan Peraturan Regulasi Perbankan terkini dengan pengaturan yang lebih terperinci tentang Tata Tertib Kerja, Pengaturan Etika Kerja, waktu dan rapat kerja yang belum diatur terperinci dalam BPP Buku III GCG Direksi

Credit Committee Working Guidelines

The Credit Committee carries out its duties in accordance with the Work Guidelines stipulated in the Loan Policy and Procedure Guidelines based on Board of Director Decree No. Board of Director Decree Number 40 / DIR-BPD / VII / 2017 dated July 19, 2017 concerning the Committee and Loan Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua concerning the Corporate Manual (BPP) of Good Corporate Governance (GCG) and the Company's Guidebook are being refined, adjusted to the latest Banking Regulations with more detailed arrangements regarding Work Rules, Work Ethics Arrangements, time and work meetings which has not been regulated in detail in the BPP Book III GCG Board of Director

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas pengusulan permohonan kredit, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh komite kredit
2. Memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank dan Pedoman pelaksanaan kredit dan asas-asas perkreditan yang sehat serta selalu mempertimbangkan kondisi/aspek likuiditas bank
3. Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian rekomendasi persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten
4. Berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas

Duties and Responsibilities of the Credit Committee

1. *Provide recommendations for approval or rejection of proposals for Loan applications, extensions, restructuring, granting relief, writeoff of Loan in accordance with the authority / type of Loan set by the Loan committee*
2. *Ensure that loans provided are in accordance with the Bank's Loan policies and guidelines for implementing Loan and sound Loan principles and always consider the conditions / aspects of bank liquidity*
3. *Carry out tasks especially in relation to providing Loan approval recommendations based on their professional skills in an honest, objective, meticulous, consistent and consistent manner*
4. *It is in the interest of Loan applicants to give Loan approval that is only a formality*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite Kredit

Frequency and Level of Attendance of Directors at Credit Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama	144	18	12,6%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	144	128	89%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	144	110	76,4%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	144	69	48%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	144	5	3,5%

Rencana Rapat Komite Kredit Tahun 2020

Komite Kredit telah merencanakan rapat minimal 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan dan disepakati oleh seluruh anggota Komite Kredit.

Credit Committee Meeting Plans for 2020

The Credit Committee has planned a meeting at least 6 (six) months once or twice a year. This amount can change as needed and agreed upon by all members of the Credit Committee.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kredit

Report on the Implementation of the Credit Committee Activities

No	No Komite	Tanggal Komite *Date*	Jenis Kredit dan Plafon *Type of Credit and Limit*
1	001/KEP-KOM/DIR-BPD/I/2019	14 JANUARI 2019	KMK SCHEDULE SUKU BUNGA
2	002/KEP-KOM/DIR-BPD/I/2019	14 JANUARI 2019	RESTRUKTURISASI
3	003/KEP-KOM/DIR-BPD/I/2019	14 JANUARI 2019	PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KKPR
4	004/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	1 FEBERUARI 2019	INVESTASI
5	005/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	1 FEBERUARI 2019	INVESTASI
6	006/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	1 FEBERUARI 2019	RC
7	007/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	7 FEBRUARI 2019	KMK KONSTRUKSI
8	008/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	7 FEBRUARI 2019	KMK KONSTRUKSI
9	009/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	13 FEBRUARI 2019	RESTRUKTURISASI
10	010/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	18 FEBRUARI 2019	KMK R/C
11	011/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	18 FEBRUARI 2019	KMK R/C
12	012/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	26 FEBRUARI 2019	KI
13	013/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	25 FEBRUARI 2019	ADD JW KMK RC/ Rp7 M RATE 12 %
14	014/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	26 FEBRUARI 2019	KKPR Rp7,988,000,000 rate 13 %
15	015/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	28 FEBRUARI 2019	KMK SCEDULE
16	016/KEP-KOM/DIR-BPD/II/2019	28 FEBRUARI 2019	PENARIKAN AGUNAN
17	017/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	11 MARET 2019	KMK KONTRAKTING 5,8 M RATE 12 %
18	018/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	11 MARET 2019	SINDIKASI 200 M
19	019/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	21 MARET 2019	KMK-RC 1 M
20	20/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	KKPR /1,986,892,398
21	21/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	RC/20 M
22	22/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	KMK KONTRAKTING 14,680,000,000
23	23/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	KMK KONTRAKTING/ 26 M
24	24/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	KMK RC 1,280,000,000
25	25/KEP-KOM/DIR-BPD/III/2019	26 MARET 2019	KMK RC/490,000,000
26	26/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	05 April 2019	KMK PLAFOND KONTRAKTING 20 M, KI 5 M
27	27/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	08 April 2019	KMK RC/5 M SPECIAL RATE
28	28/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	10 April 2019	KMK RC/ADD JW
29	29/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	08 April 2019	KMK RC/ADD JW
30	30/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	26 April 2019	RC

No	No Komite	Tanggal Komite *Date*	Jenis Kredit dan Plafon *Type of Credit and Limit*
31	31/KEP-KOM/DIR-BPD/IV/2019	30 April 2019	RESTRUKTURISASI KMK RC
32	32/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	09 MEI 2019	RC DAN SCHEDULE
33	33/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	13 MEI 2019	KMK RC PLAFOND 15 M
34	34/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	13 MEI 2019	PLAFOND KMK KONTRAKTING PLAFOND 30 M
35	35/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	15 MEI 2019	PLAFOND KMK KONTRAKTING PLAFOND 40 M
36	36/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	15 MEI 2019	PLAFOND KRD 10 M
37	37/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	20 MEI 2019	KMK RC
38	38/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	28 MEI 2019	RESTRUKTURISASI KREDIT
39	39/KEP-KOM/DIR-BPD/V/2019	28 MEI 2019	RESTRUKTURISASI
40	40/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	12 JUNI 2019	KREDIT INVESTASI
41	41/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	14 JUNI 2019	KM RC PERDANGANGAN (ADD) 5.5 M
42	42/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	14 JUNI 2019	KI 1,275 M
43	43/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	14 JUNI 2019	TARIK AGUNAN KMK RC
44	44/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	14 JUNI 2019	KMK KONTRAKTING
45	45/KEP-KOM/DIR-BPD/VI/2019	27 JUNI 2019	KMK RC
46	46/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	01 JULI 2019	KMK RC (JAMINAN DANA GIRO BLOKIR)
47	47/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	01 JULI 2019	KONTRAKTING 6,2 M
48	48/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	01 JULI 2019	KMK RC 10 M
49	49/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	05 JULI 2019	KMK RC 12 M
50	50/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	05 JULI 2019	KMK RC BACK TO BACK 26 M
51	51/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	05 JULI 2019	KI SINDIKASI 570 M
52	52/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	09 JULI 2019	KI SINSIKASI 100 M
53	53/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	15 JULI 2019	KI 2 M
54	54/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	15 JULI 2019	KMK KONTRAKTING 3M
55	55/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	19 JULI 2019	ADD KMK RC 40 M
56	56/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	19 JULI 2019	ADD KMK RC 4 M
57	57/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	19 JULI 2019	RESTRUKTURISASI ADD JW 74,3 M
58	58/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	23 JULI 2019	ADD KMK RC (SPECIAL RATE) 7 M
59	59/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	26 JULI 2019	ADD KMK RC 10 M
60	60/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	26 JULI 2019	PPJG RC 17 M/ADD RC 19 M
61	61/KEP-KOM/DIR-BPD/VII/2019	30 JULI 2019	INVESTASI SINDIKASI 300 M
62	62/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	01 AGUSTUS 2019	KMK KONTRAKTING 5 M
63	63/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	01 AGUSTUS 2019	KMK 1,4 M
64	63.1/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	01 AGUSTUS 2019	KMK RC SCEDULLE RESTRUK KERINGANAN BUNGA
65	64/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	05 AGUSTUS 2019	KMK KONTRAKTING 2,5 M
66	64.1/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	06 AGUSTUS 2019	KMK PLAFON KONTRAKTING 19,750 M
67	65/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	07 AGUSTUS 2019	KMK RC 5 M
68	66/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	07 AGUSTUS 2019	15 M KMK KONS
69	67/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	07 AGUSTUS 2019	KI 10 M

No	No Komite	Tanggal Komite *Date*	Jenis Kredit dan Plafon *Type of Credit and Limit*
70	68/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	07 AGUSTUS 2019	KI (PROYEK FINANCING) 30 M
71	69/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	21 AGUSTUS 2019	ADD JW PENARIKAN SEBAGIAN JAMINAN KKPR 6,625,378,946
72	70/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	21 AGUSTUS 2019	KI 4,750,000,000
73	71/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	21 AGUSTUS 2019	KMK RC 2 M
74	72/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	21 AGUSTUS 2019	KMK RC 3 M
75	73/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	26 AGUSTUS 2019	KMK RC 5,3 M
76	74/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	27 AGUSTUS 2019	KMK PLAFOND KONTRAKTING
77	75/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	27 AGUSTUS 2019	PINJAMAN DAERAH 60 M
78	76/KEP-KOM/DIR-BPD/VIII/2019	27 AGUSTUS 2019	CASH COLATERAL 1,5 M
79	77/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	02 September 2019	KMK RC (RESTRUKTURISASI) 1,082,000,000
80	78/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	02 September 2019	KMK PLAFOND KONTRAKTING 10,000,000
81	79/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	02 September 2019	KI REFINANCING 30 M
82	80/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	03 September 2019	PENGANTIAN JAMINAN KREDIT PLAFOND KONTRAKTING
83	81/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	03 September 2019	RESTRUKTURISASI PERUBAHAN JADWAL ANGSUR KMK SCHEDULE AN. PT. DOLAROSA
84	82/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	03 September 2019	PENARIKAN SEBAGIAN AGUNAN PT IRWAN SEJAHTERA
85	83/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	18 September 2019	KI SINDIKASI
86	84/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	18 September 2019	KMK RC & KMK
87	85/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	19 September 2019	
88	86/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	19 September 2019	KMK SCEHEDULE PEMDA
89	87/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	19 September 2019	KMK R/C KERINGANAN BUNGA
90	88/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	24 September 2019	KMK SCHEDULE Rp20 M
91	89/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	24 September 2019	KI 4,7 M BUNGA 11%
92	90/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	24 September 2019	KONTRAKTING 4.950.000,000 BUNGA 11,5 %
93	91/KEP-KOM/DIR-BPD/IX/2019	30 September 2019	KMK EXECUTIVE 9,5 M (TAMBAHAN)
94	92/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	08 OKTOBER 2019	KMK RC 7 M
95	93/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	08 OKTOBER 2019	KMK R/C 1,5 M
96	94/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	08 OKTOBER 2019	KI INVENTASI
97	95/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	15 OKTOBER 2019	KMK SCHEDULE
98	96/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	15 OKTOBER 2019	KONTRAKTING
99	97/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	15 OKTOBER 2019	KMK RC 1,5 M
100	98/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	15 OKTOBER 2019	KMK PEMDA
101	99/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	16 OKTOBER 2019	KMK PEMDA
102	100/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	17 OKTOBER 2019	KMK REVOLVING 40 M PJW
103	101/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	18 OKTOBER 2019	PLAFOND KMK KONTRAKTING 21 M
104	102/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	31 OKTOBER 2019	KREDIT INVESTASI
105	102.A/KEP-KOM/DIR-BPD/X/2019	31 OKTOBER 2019	KI 25 M
106	103/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	05 November 2019	KMK PEMDA 180 M
107	104/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	05 November 2019	KMK PEMDA 175 M
108	105/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	07 November 2019	KI INDIKASI 300 M
109	106/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	19 November 2019	KMK R/C ADD JW 50 M
110	107/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	19 November 2019	KMK SHEDULE 80 M PEMBUKAAN BLOKIR REK 2 M

No	No Komite	Tanggal Komite *Date*	Jenis Kredit dan Plafon *Type of Credit and Limit*
111	108/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	19 November 2019	KMK PINJAMAN DAERAH 45 M
112	109/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	26 November 2019	PINJAMAN PEMDA 50 M
113	110/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	26 November 2019	KMK SCHEDULE KREDIT UP*Grade* 5 M
114	116/KEP-KOM/DIR-BPD/XI/2019	26 November 2019	NEGOSIASI SUKU BUNGA KREDIT
115	117/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	02 Desember 2019	KMK SHEDULE (SINDIVASI) 150M
116	118/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	05 Desember 2019	KMK PEMDA
117	119/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	03 Desember 2019	KMK R/C 12M (ADD JW)
118	120/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	06 Desember 2019	KMK PEMDA 100M
119	121/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	11 Desember 2019	KREDIT SINDIKASI 800M
120	122/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	11 Desember 2019	KREDIT SINDIKASI 150M
121	123/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK SHEDULE 3 M
122	124/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK SHEDULE 3 M
123	125/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK RC 12 M
124	126/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK PEMDA 98 M
125	127/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK RC 10 M
126	128/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK RC 2 M
127	129/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	19 Desember 2019	KMK ERC 800 JT
128	130/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	20 Desember 2019	KMK DIP PEMDA 30 M
129	131/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	23 DESEMBER 2019	RUTRUK 214.496.976.679
130	132/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA KOTA SORONG PPJG JW 12 BULAN 200 M
131	133/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA PPJG JW 12 BULAN 100 M
132	134/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA PPJG JW 12 BULAN 180 M
133	135/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	PERPANJANGAN JW 12 BULAN 50 M
134	136/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	PERPANJANGAN JW 12 BULAN 98 M
135	137/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	PERPANJANGAN JW 12 BULAN 175 M
136	138/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA PERPANJANGAN JW 12 BULAN 60 M
137	139/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA ADD JW 12 BULAN 45 M
138	140/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA ADD JW 12 BULAN 60 M
139	141/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA ADD JW 12 BULAN 30 M
140	142/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	30 DESEMBER 2019	KMK PEMDA 125 M JW 1 BULAN
141	143/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	31 DESEMBER 2019	KMK R/C
142	144/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	31 DESEMBER 2019	KMK R/C
143	145/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	31 DESEMBER 2019	KMK PEMDA PERPANJANGAN JW 12 BULAN
144	146/KEP-KOM/DIR-BPD/XII/2019	31 DESEMBER 2019	KMK PEMDA PERPANJANGAN JW 12 BULAN

Komite Kebijakan Perkreditan

Credit Policy Committee

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan komite yang membantu Direksi Bank dalam merumuskan suatu kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mangawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

The Credit Policy Committee is a committee that assists the Bank's BOD in formulating a Policy, especially in relation to the formulation of prudential principles in Loan, monitoring the implementation of the Policy, monitoring the progress and quality of the Loan portfolio as a whole and providing suggestions for improvement steps.

Dasar Pembentukan

Sesuai SK Direksi nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 25/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 31 Juli 2017.

Formation Basis

In accordance with BOD Decree number 43 / DIR-BPD / VII / 2017 concerning Amendment to BOD Decree No. 25 / DIR-BPD / III / 2012 concerning Loan Loan Implementation Handbook (BPP) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua July 31, 2017.

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
b. Mengawasi agar KPB dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan masalah apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
c. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau penambahan KPB.
d. Memantau dan mengevaluasi;
    1. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
    2. Pelaksanaan kewenangan memutus kredit
    3. Proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
    4. Pelaksanaan ketentuan BMPK.
    5. Ketaatan terhadap ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
    6. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
    7. Upaya Bank dalam mematuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

The Function of the Credit Policy Committee (KKP)

a. Providing input to the BOD in the framework of the preparation of KPB, especially those relating to the formulation of the prudential principle in Loan.
b. Oversee that KPB is carried out consequently and consistently and formulates problem solving if there are obstacles / obstacles in the implementation of CDE.
c. Conduct periodic studies of KPB and provide advice to the BOD if changes or additions to the KPB are needed.
d. Monitor and evaluate;
    1. Development and quality of the overall Loan portfolio.
    2. Implementation of the authority to decide on Loan
    3. The process of granting, developing and quality of Loan given to parties related to the Bank and certain large debtors.
    4. Implementation of LLL provisions.
    5. Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending.
    6. Settlement of non-performing loans in accordance with what is stipulated in the CDE.
    7. The Bank's efforts to comply with the adequacy of the amount of Loan allowance.

Tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :

a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB
b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud pada butir 2.b di atas.
c. Memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.

Responsibilities of the Credit Policy Committee (KKP)

Submit a written report periodically to the BOD with a copy to the Board of Commissioners, regarding:

a. Results of supervision on the implementation and implementation of CDE
b. The results of monitoring and evaluation regarding the matters referred to in item 2.b above.
c. Provide recommendations and corrective steps to the BOD with a copy to the Board of Commissioners regarding the results of supervision of the implementation and implementation of CDE.

Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

Direktur Utama	Ketua	*President Director*	*Chairman*
Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Sekretaris	*Head of Commercial and Corporate Divisions*	*Secretary*
Direktur Kepatuhan	Anggota	*Compliance Director*	*Member*
Direktur Bisnis	Anggota	*Business Director*	*Member*
Direktur Keuangan	Anggota	*Director of Finance*	*Member*
Direktur Operasional	Anggota	*director of Operations*	*Member*
Pemimpin Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	Anggota	*Head of PER Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Anggota	*Head of Special Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota	*Head of Business Risk Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan	Anggota	*Head of Branch Development Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota	*Head of Legal Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota	*Head of Compliance Division*	*Member*
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank	Anggota	*Head of Risk Management Division*	*Member*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite Kebijakan Kredit

Frequency and Level of Attendance at the BOD in Credit Policy Committee Meeting

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama	2	0	-
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	2	2	100%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	2	1	50%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	2	1	50%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	2	0	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Sepanjang tahun 2019, Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Report on the Implementation of Credit Committee Activities

Throughout 2019, the Credit Policy Committee has held 2 (two) meetings with the discussion agenda as follows:

No	Hari/Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	Senin, 04 Januari 2019	Rapat Komite Kredit Sindikasi	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Divisi
2	Kamis, 21 Maret 2019	Tata Kelola Plafond KMK Kontrakting	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Divisi

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dalam berbagai macam kegiatan perbankan yang mengandung tingkat risiko termasuk untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis Perseroan, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko menetapkan kebijakan pengendalian risiko, dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala.

Is a committee that assists the Board of Director in establishing policies relating to asset and liability management in various types of banking activities that contain risk levels including identifying all risks originating from all business activities of the Company's business units, establishing Risk Management policies and strategies establishing control policies risk, and periodically monitor the impact of the implementation of policies and strategies on certain risk parameters.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komposisi Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No: 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dijabat Oleh :

Ketua	:	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
Wakil Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Kepatuhan
Anggota Tetap	:	Direktur Bisnis
Anggota Tetap	:	Direktur Kepatuhan
Anggota Tetap	:	Direktur Operasional
Anggota Tetap	:	Pemimpin Divisi Hukum
Anggota Tetap	:	Pemimpin Divisi Audit Internal
Anggota Tidak Tetap Bidang Risiko Kredit	:	Pemimpin Divisi Bisnis, Komersial dan Korporasi
	:	Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer
	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
	:	Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
Anggota Tidak Tetap Bidang Risiko Pasar & Likuiditas	:	Pemimpin Divisi *Treasury*
	:	Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa, & *E-Banking*
	:	Pemimpin Divisi Akuntansi
Anggota Tidak Tetap Bidang risiko Operasional dan Risiko Lainnya	:	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
	:	Pemimpin Divisi Umum
	:	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan
	:	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
	:	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Structure and Membership of the Risk Management Committee

The composition of the Risk Management Committee is based on the BOD No: 25 / DIR-BPD / V / 2017 dated 22 May 2017

Table of Comment Structure and Membership Served By:

Chairman	:	*President Director*
Deputy Chairman and Permanent Member	:	*Compliance Director*
Secretary	:	*Leader of the Risk Management Division*
Vice Secretary	:	*Leader of the Compliance Division*
Permanent member	:	*Business Director*
Permanent member	:	*Compliance Director*
Permanent member	:	*Banking Operation Director*
Permanent member	:	*Legal Division Leader*
Permanent member	:	*Leader of Internal Audit Work Unit*
Non-Permanent Members in Loan Risk	:	*Leader of the Business, Commercial and Corporate Division*
	:	*Leader of SME & Consumer Business Division*
	:	*Leader of the Bank's Risk Management Division*
	:	*Leader of the Special Asset Management Division*
Non-Permanent Members in Market Risk & Liquidity	:	*Leader of the Treasury Division*
	:	*Leader of Fund Management, Services & E-Banking Division*
	:	*Leader of Accounting Division*
Non-Permanent Members in Operational Risk and Other Risks	:	*Leader of Information Technology Division*
	:	*General Division Leader*
	:	*Network & Service Management Division Leader*
	:	*Leader of Corporate Secretary Division*
	:	*Leader of the Strategic Planning Division*

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. Nomor: 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Mengadakan pertemuan secara berkala.
2. Memantau besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara sesuai dengan toleransi risiko Bank yang telah ditetapkan.
3. Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan profil risiko secara triwulan dan laporan tingkat kesehatan bank secara per semester dari Divisi Manajemen Risiko Bank.
4. Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan pelampauan *limit* yang dibuat dan diserahkan oleh *risk taking unit* melalui Divisi Manajemen Risiko Bank.
5. Merekomendasikan penetapan metode dan / parameter pengukuran risiko Bank.
6. Memberikan rekomendasi laporan kepada Direktur utama mengenai analisis eksposur risiko Bank & dampaknya.
7. Menentukan parameter risiko, dan menetapkan *capital at risk.*
8. Mengkaji penerapan manajemen risiko.
9. Memastikan bahwa strategi usaha jangka panjang disesuaikan dengan berbagai kebijakan risiko.
10. Mengkaji konsentrasi risiko bank secara keseluruhan dan melaporkan ke Direktur utama.
11. Mengkaji kelayakan kredit dari *counterparties* bank secara keseluruhan.
12. Membahas penetapan *limit* dan alokasi modal serta pelanggaran/pengawasan terhadap kepatuhan.
13. Mengkaji berbagai kebijakan risiko, metodologi untuk pengukuran risiko.
14. Mengkaji hasil *stress testing* untuk risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional.
15. Mendokumentasikan keseluruhan keputusan komite.

Risk Management Committee Work Guidelines

Risk Management Committee in carrying out its duties and responsibilities refers to the Board of Director Decree No. Number: 25 / DIR-BPD / V / 2017 dated May 22, 2017.

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

1. *Hold regular meetings.*
2. *Monitor the amount or maximum risk exposure that must be maintained in accordance with the Bank's established risk tolerance.*
3. *Review and take necessary actions on risk profile reports on a quarterly basis and report on bank soundness in a semester from the Risk Management Division.*
4. *Review and take necessary actions for limit exceedances made and submitted by the risk taking unit through the Risk Management Division.*
5. *Recommend the determination of risk Bank measurement methods and / or parameters.*
6. *Recommend reports to the main Director regarding the analysis of Bank risk exposures & their impacts.*
7. *Determine risk parameters, and establish capital at risk.*
8. *Review the application of Risk Management.*
9. *Ensure that long-term business strategies are tailored to various risk policies.*
10. *Review the overall risk concentration of the bank and report to the President Director.*
11. *Assess the Loanworthiness of the bank's counterparties as a whole.*
12. *Discuss limit setting and capital allocation and violations / supervision of compliance.*
13. *Review various risk policies, methodologies for measuring risk.*
14. *Review the results of stress testing for liquidity risk, market risk, Loan risk and operational risk.*
15. *Document all committee decisions.*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Frequency and Attendance Level of at the Meeting

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama	4	2	50%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	4	4	100%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	4	3	75%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	4	2	50%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	4	4	100%

Rencana Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Risk Management Committee Meeting Plans for 2020

Tahun 2020 Komite Manajemen Risiko telah merencanakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan (setiap triwulan) atau sesuai kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.

In 2020 the Risk Management Committee has planned meetings at least 1 time in 3 months (every quarter) or according to the needs at a certain place, time and date that has been set so that all members can arrange time for their attendance.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Report on Activities Risk Management Committee

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

During 2019, the Risk Management Committee held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

No	Hari/Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	Rabu, 23 Januari 2019	Komite Manajemen Risiko Laporan Tingkat Kesehatan Bank Papua periode Desember 2018	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - 17 Divisi
2	Selasa, 16 April 2019	Komite Manajemen Risiko Laporan Tingkat Kesehatan Bank Papua periode Maret 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - 17 Divisi
3	Kamis, 18 Juli 2019	Komite Manajemen Risiko Laporan Tingkat Kesehatan Bank Papua Semester I Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - 17 Divisi
4	Kamis, 17 Oktober 2019	Komite Manajemen Risiko Laporan Profil Risiko Bank Papua Periode September 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - 17 Divisi

Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO)

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan petunjuk pengelolaan aktiva dan kewajiban Perseroan dengan memperhitungkan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi dan risiko likuiditas, serta mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan fungsi *Asset and Liabilities Management* (ALMA) yang dapat meliputi *liquidity management*, *gap management*, *forex management*, *earning and investment management* dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan dampaknya kepada posisi Bank Papua; menghitung *cost of funds*, menetapkan dan bunga giro, tabungan dan deposito; dan menetapkan *internal funds transfer price*.

It is a committee that assists the Board of Director in providing guidance on managing assets and liabilities of the Company by calculating interest rate risk, exchange rate risk, position risk and liquidity risk, as well as complying with Bank Indonesia and the Financial Services Authority regulations, which carry out the function of Asset and Liabilities covering liquidity management, gap management, forex management, earnings and investment management by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of Bank Papua; calculate the cost of funds, set the base lending rate and interest on current accounts, savings and time deposits; and sets the internal funds transfer price.

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Susunan Komite ALCO adalah sebagai berikut :

Komite ALCO Dijabat Oleh :

Ketua I	:	Direktur Utama
Ketua II	:	Direktur Bisnis
Ketua III	:	Direktur Keuangan
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi *Treasury*
Anggota	:	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	:	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi
		Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus
		Pemimpin Divisi Risiko Bisnis
		Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
		Pemimpin Divisi Bisnis UMK & Konsumer
		Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
		Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa, & *E-Banking*
		Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan
		Pemimpin Divisi Akuntansi
		Pemimpin Divisi Kepatuhan
		Pemimpin Cabang Utama Jayapura

Structure and Membership of the ALCO Committee

The composition of the ALCO Committee is as follows:

ALCO Committee Served By:

Chairman I	:	*President Director*
Chairman II	:	*Business Director*
Chairman III	:	*Financial Director*
Secretary	:	*Leader of Treasury Division*
Member	:	*Leader of the Strategic Planning Division*
	:	*Leader of the Business, Commercial and Corporate Division*
		Leader of the Special Asset Management Division
		Leader of the Business Risk Division
		Leader of Information Technology Division
		Leader of SME & Consumer Business Division
		Leader of the Bank's Risk Management Division
		Leader of Fund Management, Services & E-Banking Division
		Network & Service Management Division Leader
		Leader of Accounting Division
		Leader of the Compliance Division
		Jayapura Main Branch Manager

Pedoman Kerja Komite ALCO

Komite ALCO dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Asset* Liability *Management* dan Likuiditas Buku Asset *and Liability Committee* (ALCO) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 30/ DIR-BPD/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 63/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang *Asset and Liability Committee* (ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Buku Pedoman Perusahaan tersebut sedang dilakukan penyempurnaan, disesuaikan dengan Peraturan Regulasi Perbankan terkini dengan pengaturan yang lebih terperinci tentang Tata Tertib Kerja, Pengaturan Etika Kerja, waktu dan rapat kerja yang belum diatur terperinci dalam BPP Buku III GCG Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA).
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan.
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur *Asset/Liability Management*.
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi,suku bunga dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
   a) Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
   b) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
   c) Risiko Portofolio (*Earning & Investment Management*)
6. Me*review* dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana.
7. Menetapkan batas (*limit*) *Primary Reserves* (GWM, Nostro, dan Kas).
8. Menetapkan batas (*limit*) *Secondary reserve* serta instrumentnya.
9. Menetapkan batas (*limit*) Gap serta instrumentnya.
10. Menetapkan batas (*limit*) Kredit serta penyebarannya
11. Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pasar (Risiko suku bunga dan risiko nilai tukar).

ALCO Committee Work Guidelines

The ALCO Committee in carrying out its duties and responsibilities refers to the Company Manual (BPP) Asset Liability Management and Liquidity Asset and Liability Committee (ALCO) as stipulated in the Board of Director Decree No. 30 / DIR-BPD / IV / 2018 dated 30 April 2018 concerning Amendments to the Board of Director Decree Number: 63 / DIR-BPD / XII / 2017 dated 4 December 2017 concerning Asset and Liability Committee (ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and the Corporate Manual are being refined, adjusted to the latest Banking Regulations with more detailed arrangements regarding Work Rules, Work Ethics Arrangements, time and work meetings that have not been regulated in detail in the BPP Book III GCG Board of Director.

Duties and Responsibilities of the ALCO Committee

1. *Establishing the Bank's global goals, establishing strategies and policies to control the Bank's wealth and financial liabilities (ALMA).*
2. *Reviewing and reviewing whether bank guidelines and policies have been compiled continuously in ALMA in accordance with the Bank's objectives and banking developments.*
3. *Review the balance sheet structure and review Asset / Liability Management risks and exposures.*
4. *See forecasts and projections of economic conditions, interest rates and exchange rates to direct the policies set.*
5. *Establish boundaries and Risk Management and control instructions that have an impact on:*
   a) Liquidity Risk (Liquidity Management)
   b) Interest Rate Risk (Gap Management)
   c) Portfolio & Investment Management Risk
6. *Reviewing and establishing loan interest rates and fund interest rates.*
7. *Establish the limit (Primary) of Reserves (GWM, Nostro, and Cash).*
8. *Establish the limits of the Secondary reserve and its instruments.*
9. *Setting Gap limits and instruments.*
10. *Establish Loan limits and their spread*
11. *Establish CAR limits for market risk (Interest rate risk and exchange rate risk).*

12. Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal fund transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
13. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
14. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank.

12. Determine the price of internal funds transfer (Internal fund transfer rate) or the price of inter-office accounts in spurring the efficiency of managing bank branches.
13. Review the performance and position of the assets and financial obligations of the bank in order to assess the impact of ALCO's decisions on the Bank's objectives and on the compliance of the bank's internal regulations and compliance with regulations.
14. Hold adjustments to strategies, restrictions and implementation instructions and policies in order to achieve the objectives of ALCO and bank objectives.

Sedangkan tanggung jawab Komite ALCO adalah menetapkan tujuan ALMA, membuat keputusan ALMA, memantau kegiatan dan menelaah hasil pelaksanaan kebijakan ALMA.

Whereas the responsibility of the ALCO Committee is to set the objectives of the ALMA, make ALMA decisions, monitor activities and review the results of ALMA Policy implementation.

Tabel Pembagian Tugas Anggota Komite ALCO
Table of Assignments Division for Members of the ALCO Committee

Pihak *Party*	**Tugas dan Tanggung Jawab**	*Duties and Responsibilities*
ALCO	Mendiskusikan/menetapkan/ meninjau kembali kebijakan.	*Discuss / establish / review policies.*
Sekretaris ALCO	Menganalisa/melaporkan/ mengusulkan langkah kebijakan.	*Analyze / report / propose policy steps.*
SSG-ALCO	Menganalisa/mengumpulkan informasi	*Analyze / gather information*
Cabang/Divisi Terkait	Melaksanakan kebijakan.	*Carry out the policy.*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite ALCO

Frequency and Attendance Level of BOD in ALCO Committee Meetings

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Jumlah Rapat** *Meeting*	**Kehadiran** *Attendance*	
			Total	**%**
F. Zendrato	Direktur Utama	12	6	50%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	12	9	75%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	12	10	83%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	12	9	75%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	12	9	75%

Rencana Rapat Komite ALCO Tahun 2020

Komite ALCO Bank Papua merencanakan rapat untuk tahun 2020 dengan agenda yang akan dibahas adalah:

1. Agenda Rutin, seperti: Keputusan ALCO Sebelumnya, *Operational Overview, Loan /Financing Performance*, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Treasury* Performance, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Economic & Financial Outlook*, IRR *Gap Management*, *Liquidity Management* dan *Forex Management*.
2. Agenda Non Rutin, seperti: *Review* bunga dan biaya produk (giro, tabungan, deposito dan kredit), *Review* Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Bunga Antar Kantor, dan sebagainya.

Plan for the ALCO Committee Meeting in 2020

The ALCO Bank Papua Committee plans a meeting for 2020 with the agenda to be discussed are:

1. *Routine Agenda, such as: Previous ALCO Decisions, Operational Overview, Loan / Financing Performance, Basic Loan Interest (SBDK), Treasury Performance, Third Party Funds (TPF), Economic & Financial Outlook, IRR Gap Management, Liquidity Management and Forex Managemet.*

2. *Non-routine Agenda, such as: Review of interest and product costs (current accounts, savings, time deposits and Loans), Review of Basic Loan Interest Rates (SBDK), Inter-Office Interests, and so onn.*

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite ALCO

Report on the ALCO Committee Activities

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta yang hadir *Attendees*
1	Rabu, 30 Januari 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Januari 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW I Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 8 Divisi
2	Rabu, 27 Februari 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Februari 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW I Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 12 Divisi
3	Selasa, 26 Maret 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Maret 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW II Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 8 Divisi
4	Selasa, 30 April 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan April 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW II Tahun 2019	- Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 11 Divisi

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta yang hadir *Attendees*
5	Senin, 27 Mei 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Mei 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW II Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 12 Divisi
6	Rabu, 26 Juni 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Juni 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW III Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - 10 Divisi
7	Senin, 29 Juli 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Juli 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW III Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 9 Divisi
8	Rabu, 28 Agustus 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Agustus 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW III Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 10 Divisi
9	Kamis, 26 September 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan September 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW IV Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - 10 Divisi
10	Selasa, 29 Oktober 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Oktober 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW IV Tahun 2019	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 10 Divisi
11	Selasa, 26 November 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan November 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW IV Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 11 Divisi
12	Rabu, 18 Desember 2019	1. Portofolio *Asset dan Liability* 2. Evaluasi Suku Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) dan Kredit 3.Penetapan *Funds Transfer Price* (Bunga Rak), Giro Wajib Minimum (GWM) dan CKPN Pinjaman Bulan Desember 2019 4. Strategi pendanaan dan pelayanan Kredit TW IV Tahun 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - 12 Divisi

Komite Teknologi Informasi

IT Steering Commitee

Merupakan komite yang berfungsi untuk mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi (risiko teknologi) melalui perumusan dan penetapan kebijakan/strategi pengembangan serta pengelolaan sistem teknologi informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit-unit dan menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan nasabah dan pasar.

It is a committee that functions to manage operational risk related to technology (technology risk) through the formulation and determination of development policies / strategies as well as management of information technology systems in order to meet the needs of units and adjust to the demands of customer and market satisfaction.

Struktur dan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi dijabat oleh :

Ketua	:	Direktur Operasional
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota	:	Direktur Kepatuhan
	:	Direktur Keuangan
	:	Divisi Akuntansi
	:	Divisi Bisnis, Komersial dan Korporasi
	:	Divisi Perencanaan Strategis
	:	Divisi *Treasury*
	:	Divisi Umum
	:	Divisi Bisnis UMK & Konsumer
	:	Divisi Manajemen Risiko Bank
	:	Divisi Pengelolaan Dana, Jasa, & *E-Banking*
	:	Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan

Information Technology Committee Structure and Membership

Committee the TSI Committee is held by:

Chairman	:	*Banking Operation Director*
Secretary	:	*Leader of Information Technology Division*
Member	:	*Compliance Director*
	:	*Finance Director*
	:	*Accounting Division*
	:	*Loan Division*
	:	*Strategic Planning Division*
	:	*Treasury Division*
	:	*General Division*
	:	*SME & Consumer Business Division*
	:	*Bank Risk Management Division*
	:	*Fund Management, Services & E-Banking Division*
	:	*Network & Service Management Division*

Pedoman Kerja Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada BPP Komite Teknologi Informasi. Pedoman tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan: (a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite, Kewenangan Komite, (b) Rapat Komite, dan (c) Organisasi Komite. BPP Komite Teknologi Informasi di-*review* minimal 2 (dua) tahun sekali untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, Peraturan Bank Indonesia dan/atau regulasi terkait lain yang berlaku. BPP Komite Teknologi Informasi tersebut telah dikaji ulang dan telah mengalami perubahan sehingga relevan dengan kondisi Bank Papua saat ini.

Information Technology Committee Work Guidelines

The Information Technology Steering Committee in carrying out its duties and responsibilities refers to the BPP Information Technology Steering Committee. The guideline regulates a number of matters relating to: (a) Duties and Responsibilities of the Committee, Committee Authority, (b) Committee Meetings, and (c) Committee Organizations. BPP The Information Technology Steering Committee is reviewed at least once every two years to ensure that the coverage of the guidelines is always in line with needs, Bank Indonesia Regulations and / or other relevant regulations that apply. The BPP Information Technology Steering Committee has been reviewed and has changed so that it is relevant to the current conditions of Bank Papua.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi

1. Rencana strategis teknologi Informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank

Duties and Responsibilities of the Information Technology Committee

1. *The Information Technology strategic plan is in line with the Bank's strategic business plan*

2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur teknologi informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Keseusaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project Charter*).
5. Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha bank.
6. Efektifitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor teknologi informasi agar investasi bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, dan
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

2. Formulation of the main information technology policies, standards and procedures.
3. Conformity between approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan.
4. Completeness between the implementation of information technology projects with agreed project plans (Charter projects).
5. Conformity between information technology and the needs of management information systems and the needs of bank business activities.
6. Effectiveness of steps in minimizing the risk of bank investment in the information technology sector so that bank investment in the information technology sector contributes to the achievement of business objectives.
7. Monitoring the performance of information technology and efforts to improve information technology performance, and
8. Adequacy and allocation of resources owned by the bank.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Teknologi Informasi dalam Rapat

Frequency and Attendance Levelin Information Technology Committee Meeting

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama	2	2	100%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	2	1	50%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	2	2	100%
Isak S. Wopari	Direktur Operasional	2	2	100%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	2	2	100%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Teknologi Informasi

Information Technology Committee Activities Report

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	Jumat,01 Maret 2019	1. Pengembangan Data Center /DRC Lantai 2 Jayapura 2. Pengadaan Jasa Konsultan DC/DRC 3. Pengembangan JAD Qpap untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas 4. dan lain-lain	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 14 Divisi
2	Rabu, 28 Agustus 2019	Pembahasan kegiatan Live DRC Jatiluhur Bank Papua Tahun 2019 pada tanggal 13 s/d 21 September 2019 di Jatiluhur Jawa Barat	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - 14 Divisi

Rencana Rapat Komite Teknologi Informasi Tahun 2020

Komite Teknologi Informasi telah merencanakan rapat secara berkala untuk tahun 2020. Jumlahnya dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota Komite Teknologi Informasi.

Information Technology Committee Meeting Plans for 2020

The Information Technology Committee has planned regular meetings for 2020. The amount can change as needed if agreed upon by all members of the Information Technology Steering Committee.

Komite Pertimbangan Pegawai

Employee Advisory Committee

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku, usulan nominasi pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan, pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya dan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai.

Is a committee that assists the Board of Director in providing advice and consideration to the Board of Director regarding follow-up on sanctions imposed on employees who are proven negligent or violate applicable provisions, proposed employee nominations to be promoted or transferred based on terms and job competencies, consideration to the Board of Director regarding objections and / or reviews returns submitted by employees for sanctions imposed on him and consideration to the Board of Director regarding sanctions rehabilitation for employees.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	:	Direktur Operasional
Wakil Ketua	:	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
Sekretaris	:	Pemimpin Departemen Administrasi Manajemen Modal Manusia
	:	Pemimpin Departemen Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Modal Manusia
Anggota	:	1. Pemimpin Divisi Audit Internal 2. Pemimpin Divisi Hukum 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Departemen *Anti Fraud*

Structure and Membership

Chairman	:	*Banking Operation Director*
Vice Chairman	:	*Leader of the Division of Human Capital Management*
Secretary	:	*Leader of the Human Resources Administration Department*
	:	*Leader of Department of Planning and Human Resource Development*
Member	:	*1. Leader of the Internal Audit Work Unit* *2. Leader of the Legal Division* *3. Leader of the Compliance Division* *4. Leader of the Anti-Fraud Department*

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas Komite Pertimbangan Pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan auditor baik internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut dalam penetapan sanksi.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku
3. Menyampaikan pertimbangan kepada Direksi berupa usulan nominasi pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
4. Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya.
5. Memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai.

Description of Duties and Responsibilities

The duties of the Employee Advisory Committee are as follows:

1. *Carry out research on the findings of both internal and external auditors who need follow-up in the determination of sanctions.*
2. *Provide advice and consideration to the Board of Director regarding the follow-up to the stipulation of sanctions on employees who have been proven negligent or violate applicable regulations*
3. *Delivering consideration to the Board of Director in the form of proposals for employee nominations to be promoted or transferred based on terms and job competencies*
4. *Check and give consideration to the Board of Director regarding objections and / or reviews submitted by employees for sanctions imposed on them.*
5. *Give consideration to the Board of Director regarding sanction rehabilitation for employees.*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite Pertimbangan Pegawai

Berdasarkan struktur orgnisasi Komite Pertimbangan Pegawai, untuk pelaksanaan Rapat Komite Pertimbangan Pegawai hanya dihadiri oleh Direktur Operasional selaku ketua dan Divisi terkait.

Frequency and Attendance Level of Directors in the Employee Advisory Committee Meeting

Based on the organizational structure of the Employee Advisory Committee, for the implementation of the Employee Advisory Committee Meeting only attended by the Banking Operation Director as the chair and related divisions.

Rencana Rapat Komite Pertimbangan Pegawai Tahun 2020

Komite Pertimbangan Pegawai telah merencanakan rapat secara berkala untuk tahun 2020. Jumlahnya dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota Komite Pertimbangan Pegawai.

Plans for Employee Advisory Committee Meetings in 2020

The Employee Advisory Committee has planned meetings regularly for 2020. The amount can change as needed if agreed upon by all members of the Employee Advisory Committee.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pertimbangan Pegawai

Report on the Employee Advisory Committee Activities

Daftar Rapat Komite Pertimbangan Pegawai Tahun 2019
List of 2019 Employee Advisory Committee Meetings

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	Kamis, 04 April 2019	Membahas mengenai Mutasi, Rotasi & Promosi	- Direktur Operasional - Divisi Manajemen Modal Manusia
2	Selasa, 05 November 2019	Membahas mengenai Mutasi, Rotasi & Promosi	- Direktur Operasional - Divisi Manajemen Modal Manusia
3	Kamis, 19 Desember 2019	Membahas mengenai Mutasi, Rotasi & Promosi	- Direktur Operasional - Divisi Manajemen Modal Manusia

Komite Pertimbangan Kasus Pegawai

Employee Case Advisory Committee

Komite Pertimbangan Kasus Pegawai dibentuk untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas Direksi terkait penyelesaian kasus kepegawaian yang sangat kompleks.

The Employee Case Advisory Committee was formed to assist the effectiveness of the implementation of the Board of Director' duties related to the settlement of very complex staffing cases.

Dasar Pembentukan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 65/DIR-BPD/XII/2017 tentang Komite Pertimbangan Kasus Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 04 Desember 2019.

Basic Formation

In accordance with the Decree of the Board of Director No. 65 / DIR-BPD / XII / 2017 concerning the Employee Case Advisory Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua on December 4, 2019.

Struktur Keanggotaan

Membership Structure

Nama *Name*	Jabatan *Position*
Pemimpin Departemen *Anti Fraud*	Anggota
Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
Pemimpin Divisi Hukum	Anggota
Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	Anggota
Tim Investigasi	Anggota
Pemimpin Departemen Administrasi Manajemen Modal Manusia	Anggota

Tugas dan Tanggungjawab

- Melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan auditor baik internal maupun eksternal yang memerlukan tindak lanjut dalam penetapan sanksi
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan pertimbangan kepada Direksi berupa usulan nominasi Pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh Pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai.

Duties and Responsibilities

- *Carry out research on the findings of auditors both internally and externally who need follow-up in the determination of sanctions*
- *Providing advice and consideration to the Board of Director regarding the follow-up to the stipulation of sanctions on employees who have been proven negligent or violate applicable regulations.*
- *Deliver considerations to the Board of Director in the form of employee nomination proposals that will be promoted or mutated based on terms and job competencies.*
- *Check and give consideration to the Board of Director regarding objections and / or reviews submitted by the Employee for sanctions imposed on him.*
- *Give consideration to the Board of Director regarding sanctions rehabilitation for employees.*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite Pertimbangan Kasus Pegawai

Berdasarkan struktur organisasi Komite Pertimbangan Pegawai, untuk pelaksanaan Rapat Komite Pertimbangan Pegawai hanya dihadiri oleh Direktur Operasional selaku ketua dan Divisi terkait.

Frequency and Attendance Level of BOD in Employee Case Advisory Committee Meeting

Based on the organizational structure of the Employee Advisory Committee, for the implementation of the Employee Advisory Committee Meeting only attended by the Banking Operation Director as chairman and the relevant Division.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pertimbangan Pegawai

Sepanjang tahun 2019, Komite Pertimbangan Pegawai telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Report on the Employee Advisory Committee Activities

Throughout 2019, the Employee Advisory Committee has held 5 (five) meetings with the following discussion agenda:

No	Hari/Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendance*
1	Rabu, 16 Januari 2019	Penetapan Sanksi Kasus Pelanggaran SOP dan Fraud KC Timika, KCP Sugapa dan KC Waisai	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Divisi Manajemen Modal Manusia - SKAF & Tim Investigasi
2	Selasa, 09 April 2019	Pembahasan Pelanggaran Tindakan Indisipliner, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Berdasarkan Hasil Rapat Komite Pertimbangan Kasus Pegawai Hari senin tanggal 08 April 2019	- Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Divisi Manajemen Modal Manusia & Departemen Administrasi Divisi Manajemen Modal Manusia
3	Jumat, 10 Mei 2019	Penatapan Sanksi Kasus Fraud dan Pelanggaran SOP	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Divisi Manajemen Modal Manusia - Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan - Departemen Anti Fraud
4	Kamis, 03 Oktober 2019	Penetapan Sanksi Kasus Fraud dan Pelanggaran SOP dengan 8 (Delapan) Kasus melibatkan 40 (Empat Puluh) Pegawai Internal Bank Papua	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Divisi Manajemen Modal Manusia - Divisi Audit Internal - Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan - Departemen Anti Fraud
5	04 Oktober 2019	12 Kasus Indisipliner dan 2 Pelanggaran Kode Etik Pegawai	- F. Zendrato (Direktur Utama) - Sadar Sebayang (Direktur Bisnis) - Rudhy Dharma (Direktur Keuangan) - Isak S. Wopari (Direktur Operasional) - Jefri Sani P. S (Direktur Kepatuhan) - Divisi Manajemen Modal Manusia - Divisi Audit Internal - Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan - Departemen Anti Fraud

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan dibentuk dan diberhentikan oleh Direksi, sehingga Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam mendukung terciptanya citra positif perusahaan yang konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi bank dan memberikan akses terhadap informasi berkaitan dengan bank yang relevan. Disamping itu, keberadaan Sekretaris Perusahaan juga untuk mengingatkan Direksi tentang tanggungjawabnya untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

The Corporate Secretary is formed and dismissed by the Board of Director, so that the Corporate Secretary has an important role in supporting the creation of a consistent and sustainable company positive image through managing effective communication programs for all stakeholders.

The smooth communication between banks and stakeholders is a very important factor in implementing good bank governance. The communication function is one of the important functions of the Corporate Secretary. The main function of the Corporate Secretary is to provide services to stakeholders for any information needed related to the condition of the bank and provide access to information relating to the relevant bank. In addition, the presence of the Corporate Secretary is also to remind the Board of Director of their responsibility to implement good Bank governance.

Struktur dan Profil Sekretaris Perusahaan

Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan akuntabilitas dan tanggungjawab Direksi yang terkait dengan Kesekretariatan, Kehumasan dan Protokoler di Bank Papua atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perbankan dan kegiatan sosial Perusahaan dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan SK Direksi Nomor 54/DIR-BPD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (*Job Profile*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dijabarkan pula struktur organisasi di unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut :

Structure and Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary Division is under the President Director and is responsible for carrying out the accountability and responsibilities of the Board of Director related to the Secretariat, Public Relations and Protocol at Bank Papua on the provisions of applicable laws and regulations specifically the Company's banking regulations and social activities and reports to the Board Commissioner.

Based on Board of Director Decree Nomor 54/DIR-BPD/XI/2019 date 26 November 2019 concerning Organizational Structure and Job Profile (Job Profile) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , also described the organizational structure in the Corporate Secretary Division work unit, as follows:

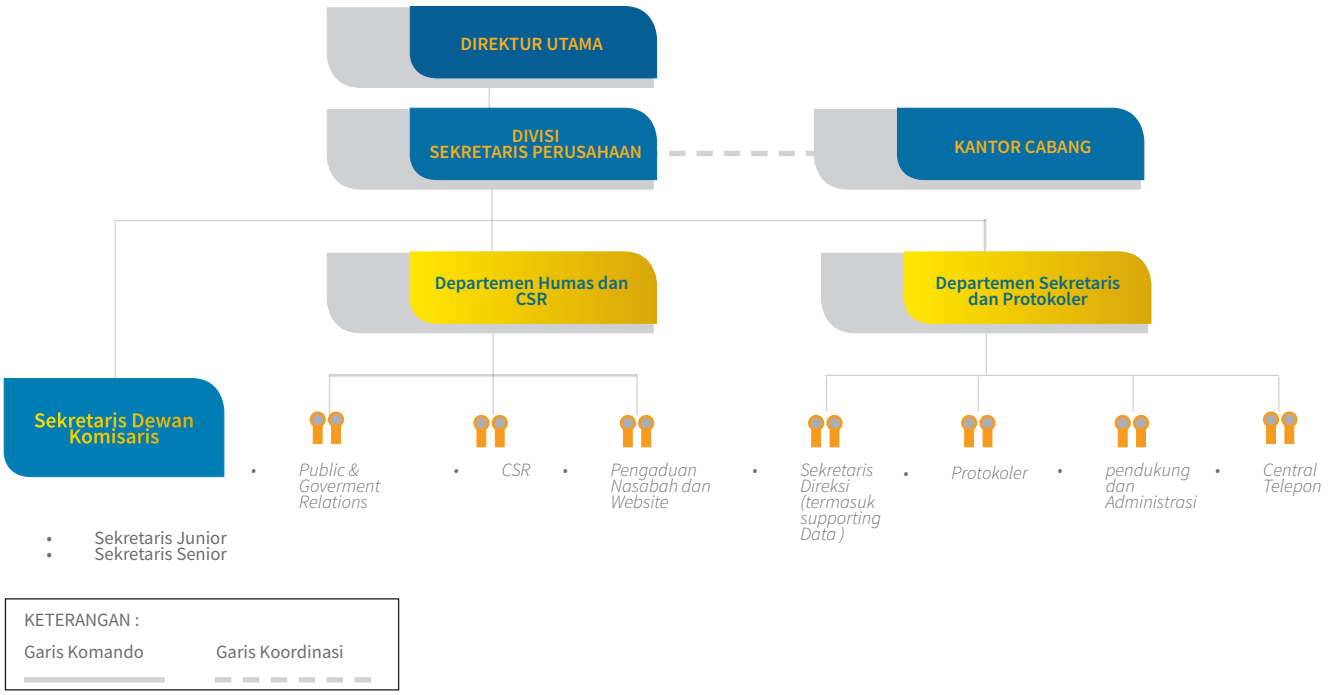

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan membawahi dua Departemen yaitu Departemen Humas & CSR dan Departemen Sekretaris dan Protokoler. Departemen Humas dan CSR membawahi fungsi dari *Public & Goverment Relation, Corporate Social Responsibility (*CSR*),* dan Pengaduan Nasabah & *Website*, sedangkan Departemen Sekretaris dan Protokoler membawahi fungsi Sekretaris Direksi (termasuk *supporting* data), Protokoler, Pendukung dan Administrasi serta *Central Telephone*.

The Leader of the Corporate Secretary Division oversees two Departments namely the Public Relations & CSR Department and the Secretary and Protocol Departments. The Department of Public Relations and CSR oversees the functions of Public Relations, Government Relations, CSR, Customer Complaints and Websites, while the Secretary and Protocol Departments oversee the functions of the Secretary of the Board of Director (including supporting data), Protocols, Supporters and Administration and Central Telephone.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Dra. Ellen B.F. Marande

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Division Leader

Periode Jabatan *Periode Jabatan*	20 Januari 2017-sekarang	*January 20, 2017 - now*
Usia *Age*	54 tahun. Lahir di Limboto pada tanggal 09 Februari 1965	*54 years old. Born in Limboto on February 9, 1965*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*
Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1989.	*She obtained a Bachelor of State Administration degree at Sam Ratulangi University in Manado in 1989.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 25 April 2019, *Workshop Annual Report* Berbasis Kriteria *Award* 2018 • 18 Juli 2019, Seminar *the 7th Corporate Communication Summit* • 24 Oktober 2019, *10th The Real CSR* Seminar tentang Peran CSR dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia	• *25 April 2019, Criteria-Based Annual Report Workshop 2018 Award* • *July 18, 2019, the 7th Corporate Communication Summit Seminar* • *October 24, 2019, 10th The Real CSR Seminar on the Role of CSR in improving the standard of living of the people of Indonesia*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pembinaan & Supervisi Kredit Bank Papua sesuai SK Direksi nomor: 117/KEPEG/IV/2016 tanggal 29 April 2016.	*Previously she occupied as Leader of the Bank Papua Loan Supervision & Supervision Department according to the Board of Director' Decree number: 117 / KEPEG / IV / 2016 dated 29 April 2016.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR tanggal 28 September 2015.	*4th Level Risk Management organized by BSMR on 28 September 2015.*

Riwayat Jabatan Singkat Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya, Bank Papua sebagai perusahaan milik pemerintah daerah telah membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, Pemerintah Daerah, regulator dan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Bank Papua saat ini dijabat oleh Dra. Ellen B.F. Marande dengan riwayat jabatan singkat sebagai berikut :

Position Brief History of the Corporate Secretary

To improve service to the community and other stakeholders, Bank Papua as a local government-owned company has formed a Corporate Secretary Division which acts as a liaison of the Bank with investors, Regional Governments, regulators and the public.

The Corporate Secretary of Bank Papua is currently held by Dra. Ellen B.F. Marande with a brief history of position as follows:

No	Nama Jabatan	Tahun *Year*	*Position Name*
1	Kepala Departemen Pengembangan	2014	*Head of Development Department*
2	Senior Spesialis Humas dan CSR	2015	*Senior Public Relations Specialist and CSR*
3	Kepala Cabang Teminabuan	2015	*Teminabuan Branch Manager*
4	Kadep Pembinaan & Supervisi Kredit	2016	*Head of Coaching & Loan Supervision Department*
5	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	2017-2019	*Leader of Corporate Secretary Division*

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemegang Saham/*Goverment Relation*
   - Meng*update* Daftar Pemegang Saham dan kepemilikan sahamnya di Bank Papua;
   - Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   - Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan acara RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik;
   - Menetapkan agenda dan materi terkait penyelenggaraan RUPS untuk memastikan kesesuaian materi dengan peraturan yang berlaku.
2. Membangun Citra dan Reputasi Perusahaan
   - Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi program *Corporate Communication* untuk publik/umum dan media massa agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik dimata pemengku kepentingan.
3. Membangun Komunikasi Eksternal
   - Sebagai mediator atau perwakilan antara Bank dengan lembaga atau institusi eksternal;
   - Menetapkan strategi dan implementasi publikasi untuk publik, investor dan masyarakat agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;
   - Menetapkan strategi dan implementasi iklan di media massa agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary, including the following:

1. *Shareholder Relations / Government Relations*
   - *Updating the List of Shareholders and their share ownership in Bank Papua;*
   - *Carry out the General Meeting of Shareholders ;*
   - *Directing all aspects of organizing the SGM so that the SGM event can run well;*
   - *Establish agendas and materials related to the organization of the SGM to ensure the conformity of the material with the applicable regulations.*
2. *Building the Image and Reputation of the Company*
   - *Establish and implement strategies for implementing Corporate Communication programs for the public / public and mass media so that the company's reputation can be well maintained in the eyes of stakeholders.*
3. *Building External Communication*
   - *As a mediator or representative between the Bank and external institutions or institutions;*
   - *Establish strategies and implementation of publications for the public, investors and the public so that the company's reputation can be maintained properly;*
   - *Establish strategies and implementation of advertisements in mass media so that the company's reputation can be maintained properly;*

- Mengelola isi situs *website* Bank Papua untuk memastikan ketersediaan data secara lengkap serta kemudahan akses bagi publik, investor dan masyarakat.

4. Membangun Komunikasi Internal
   - Sebagai mediator antara manajemen kepada pegawai, dan Direksi kepada komisaris;
   - Mengelola media komunikasi internal (majalah dan internet/portal) untuk berkontribusi dalam penciptaan iklim kerja yang baik;
   - Mengarahkan *event* internal perusahaan untuk terlaksananya *event* dengan baik;
   - Mengarahkan dokumentasi perusahaan untuk memastikan ketersediaan *database* dokumentasi perusahaan.
5. Pengelolaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*).
6. Administrasi Kesekretariatan Perusahaan
   - Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Dewan Komisaris;
   - Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Direksi;
   - Mengarahkan administrasi kesekretariatan perusahaan untuk memastikan ketersediaan dokumen secara lengkap termasuk penyampaian materi rapat Direksi maupun Dewan Komisaris;
7. Protokoler
   - Penanggungjawab atas kegiatan Protokoler berkaitan dengan jadwal kegiatan Direksi, mengkoordinir acara-acara yang berhubungan dengan Direksi dan pihak internal/eksternal/ *stakeholder*.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Sekretaris Perusahaan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Mendokumentasikan Ketentuan/SK Direksi, SE Direksi, *Resume* Rapat Direksi, Arahan *Briefing* Direksi dan Surat Keluar Direksi ke dalam buku/cd (*Hard Copy & Soft Copy*).
- *Upload Soft copy* ketentuan-ketentuan (Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain), arahan *briefing* direksi dan kegiatan Direksi ke dalam sistem yang bisa diakses seluruh cabang (Portal & *Website*).
- Mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ Luar Biasa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- Mempersiapkan *Business Meeting* sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.
- Mempersiapkan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

- *Manage the contents of Bank Papua website to ensure complete data availability and ease of access for the public, investors and the public.*

4. *Building Internal Communication*
   - *As a mediator between management to employees, and Board of Director to commissioners;*
   - *Manage internal communication media (magazines and internets / portals) to contribute to the creation of a good work climate;*
   - *Directing internal company events to implement events well;*
   - *Directing company documentation to ensure the availability of company documentation databases.*
5. *Management of Corporate Social Responsibility (CSR) Programs.*
6. *Corporate Secretariat Administration*
   - *Responsible for secretarial management activities in the Board of Commissioners;*
   - *Responsible for secretarial management activities at the Board of Director;*
   - *Directing the company's secretarial administration to ensure the availability of complete documents including the submission of material for meetings of the Board of Director and the Board of Commissioners;*
7. *Protocol*
   - *The person in charge of the Protocol activities is related to the Board of Director' activity schedule, coordinating events related to the Board of Director and internal / external / stakeholder parties.*

Corporate Secretary Division Activity Implementation Report

Some of the activities carried out by the Corporate Secretary Division throughout 2019 are as follows:

- *Documenting the Provisions / Decree of the Board of Director, the Board of Director 'SE, Board of Director' Resume Meeting, Board of Director Briefing Direction and Board of Director Exit Letter into the book / cd (Hard Copy & Soft Copy).*
- *Upload a soft copy of the provisions (Board of Director 'Decree, Board of Director' Circular, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Regulations, Government Regulations, Regional Regulations, etc.), directives from directors 'briefings and Board of Director' activities into a system that can be accessed by all branch (Portal & Website).*
- *Prepare an Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders at least 2 (two) times a year.*
- *Prepare Business Meetings 4 (four) times a year.*
- *Prepare a Joint Meeting of the Board of Director and Board of Commissioners a minimum of 4 (four) times a year.*

- Mempersiapkan Rapat Direksi (RADISI), minimal sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun.
- Melaksanakan Upacara HUT Bank Papua dan HUT Kemerdekaan RI.
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pensiunan/Purnabakti Bank Papua sebagai rangkaian acara dari Kegiatan HUT Bank Papua setiap tahunnya.
- Mengkoordinir dan memastikan pelaksanaan Morning Briefing (Arahan Direksi dan Doa Pagi bersama Direksi & Insan Bank Papua) setiap awal minggu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berjalan dengan maksimal.
- Mempersiapkan acara *Family Gathering*.
- Menyusun jadwal pertemuan/perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik, minimal sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- Mengkoordinir dan membuat laporan pelaksanaan seluruh program kegiatan Bank Papua Club (BPC)
- Merencanakan dan memastikan pelaksanaan Media Gathering antara Manajemen dengan Awak Media.
- Menanggapi seluruh Pengaduan atau Pemberitaan baik positif maupun negatif di koran maupun website.
- *Press Release/Advertorial/Press Conference*.
- Membuat program pelaksanaan
  - Kemitraan 60% (dikelola oleh Divisi Bisnis UMK & Konsumer)
  - Bina Lingkungan 40% (Divisi Sekretrais Perusahaan)
  - Olahraga 10%
  - Pendidikan 5%
  - Keagamaan 10%
  - Sosial 5%
- Mengecek dan memastikan seluruh content portal & website Bank Papua (SBDK, ALCO, Berita Bank Papua, Berita Ekonomi & Bisnis, Suku Bunga BI, Company Profile, GCG, dan lain-lain) selalu terupdate..
- Mengelola Majalah info Bank Papua.
- Memuat publikasi seluruh kegiatan perusahaan, Direksi, dan ucapan Iklan kemitraan di media.
- Membuat Plakat *Corporate* dan *souvenir* untuk tamu Direksi.
- Memberikan ucapan selamat dalam rangka pelantikan/HUT/ pernikahan *stakeholder* maupun *shareholder*.
- Mengadakan kunjungan kerja Dewan Komisaris/ Direksi ke Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota di Papua dan Papua Barat & mitra minimal sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun.
- Merencanakan dan Memastikan pelaksanaan *Goverment Gathering* setiap tahun berjalan maksimal.
- Melakukan persiapan dan mengkoordinir pelaksanaan *Call Center* Bank Papua.
- Memonitor seluruh nomor telepon yang digunakan Bank Papua dan membuat laporan aktivitas telepon dalam rangka pelayanan.
- Melakukan update terkait nomor *extension* setiap unit kerja yang ada di Bank Papua.

- *Prepare Board of Director' Meetings (RADISI), a minimum of 24 (twenty four) times a year.*
- *Carrying out the Papua Papuan Anniversary Ceremony and the Republic of Indonesia's Independence Day.*
- *Carry out activities in order to give appreciation to Retired / Retired Bank Papua as a series of events from the Anniversary of Bank Papua every year.*
- *Coordinating and ensuring the implementation of the Morning Briefing (Directive of the Board of Director and Morning Prayers with the Board of Director & Personnel of Bank Papua) every week as many as 35 (thirty-five) times runs to the maximum.*
- *Prepare for a Family Gathering event.*
- *Arrange periodic meetings / official trips for the Board of Commissioners and Board of Director, at least 12 (twelve) times a year.*
- *Coordinate and make reports on the implementation of all Bank Papua Club (BPC) activity programs*
- *Plan and ensure the implementation of a Media Gathering between Management and the Media Crew.*
- *Respond to all Complaints or News both positive and negative in newspapers and websites.*
- *Press Release / Advertorial / Press Conference.*
- *Creating an implementation program*
  - *60% partnership (managed by the SME & Consumer Business Division)*
  - *Community Development 40% (Corporate Secretariat Division)*
  - *Sports 10%*
  - *education 5%*
  - *Religious 10%*
  - *Social 5%*
- *Checking and ensuring all Bank Papua portal & website content (SBDK, ALCO, Bank Papua News, Economic & Business News, BI Interest Rates, Company Profile, GCG, etc.) are always updated.*
- *Manage Info Bank Papua Magazine.*
- *Contains publication of all company activities, Board of Director, and Partnership adverts in the media.*
- *Make Corporate Plaques and souvenirs for Board of Director.*
- *Giving congratulations in the context of the inauguration / anniversary / marriage of stakeholders and shareholders.*
- *Conduct working visits of the Board of Commissioners in Regencies / Cities in Papua and West Papua & partners at least 6 (six) times within reach.*
- *Plan and ensure the implementation of the Government Gathering every year runs optimally.*
- *Prepare and coordinate the implementation of Bank Papua Call Centers.*
- *Monitor all telephone numbers used by Bank Papua and make reports on telephone activities in the course of service.*
- *Update the extension number of each work unit in Bank Papua.*

Audit Internal

Internal Audit

Audit Internal merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal Bank. Audit Internal secara independen dan obyektif berperan memberikan *assurance* dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank. Audit Internal harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Audit Internal merupakan mitra manajemen dalam mewujudkan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan Bank agar mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Internal Audit is an important component in the Bank's internal control system. Internal audit and objectively have the role of providing assurance in order to maintain and secure the Bank's business activities. Internal Audit must strive to be able to play a role as a consultant, especially concerning the scope of its duties. Internal Audit is a management partner in realizing the implementation of Good Corporate Governance within the Bank in order to be able to provide added value to the Company.

Dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian mengelola, menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank serta menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik yaitu prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit internal bank yang efektif. Pelaksanaan fungsi audit internal bank diwujudkan dengan dibentuknya Divisi Audit Internal (DAI) Bank Papua yang mengacu kepada Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit internal Bank Umum.

In order to uphold the prudential principle in managing, safeguarding and securing bank business activities as well as carrying out the principles of good Bank governance, namely the principles of transparency, accountability, independence and fairness, it is necessary to implement an effective bank internal audit function. The implementation of the bank's internal audit function is realized by the establishment of the Bank Papua Internal Audit Division (DAI) which refers to Chapter III Article 9 of Bank Indonesia Regulation Number 1/6 / PBI / 1999 dated 20 September 1999 concerning the Assignment of Compliance Director and Implementation of Standards Implementation of Commercial Bank Internal Audit Function.

Divisi Audit Internal (DAI) Bank Papua berfungsi untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran serta informasi berkenaan dengan kondisi pengendalian serta hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha bank. Divisi Audit Internal (DAI) merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank.

Bank Papua's Internal Audit Division (DAI) serves to assist all levels of management in carrying out their responsibilities effectively by providing analysis, valuation, recommendations, advice and information regarding control conditions and matters relating to the bank's business activities. The Internal Audit Unit is part of the internal control structure and is all forms of activities related to the audit and reporting of audit results regarding the implementation of a coordinated control structure at each level of Bank management.

Peranan Divisi Audit Internal (DAI) adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam pelaksanaannya, *Auditor* mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Teknologi Informasi, Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi

The role of Internal Audit Division is to assist the President Director and the Board of Commissioners by describing operational, planning, implementation and monitoring of audit results. In its implementation, the Auditor represents the views and interests of his profession by making analysis and research in the fields of finance, accounting, operations, Information Technology, good Bank governance, and other activities through on-site inspection and off-site monitoring, as well as providing advice improvements and objective information about activities reviewed to all levels

yang objektif tentang kegiatan yang di-*review* kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, Divisi Audit Internal berfungsi mengidentifikasi segala kemungkinan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Divisi Audit Internal juga berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dan mendorong terwujudnya bank yang sehat. Keterlibatan Divisi Audit Internal sebagai konsultan tidak berarti bahwa objek yang telah dikonsultasikan akan dikecualikan sebagai objek audit.

Struktur dan Profil Divisi Audit Internal (DAI)

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Internal (DAI) diatur dan ditetapkan berdasarkan SK. Direksi Nomor: 54/DIR-BPD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (*Job Profile*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Divisi Audit Internal (DAI) dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi Audit Internal, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK. Struktur organisasi Divisi Audit Internal (DAI) sebagai berikut:

of management. In addition, the Internal Audit Unit functions to identify all possibilities to improve and improve the efficiency of the use of resources and funds. Internal Audit Division also acts as a consultant for the internal parties of the bank in need, especially those concerning the scope of their duties and encouraging the realization of sound banks. The involvement of Internal Audit Division as a consultant does not mean that the object that has been consulted will be excluded as an audit object.

Internal Audit Division (DAI) Structure and Profile

The structure and position of the Internal Audit Division (DAI) are regulated and stipulated based on BOD Decree No. 54/DIR-BPD/XI/2019 date 26 November 2019 concerning Organizational Structure and Job Profile (Job Profile) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

The Internal Audit Division (DAI) is chaired by a Division Chair who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners with the approval of the Board of Commissioners and approved by the OJK, with the following organizational structure.

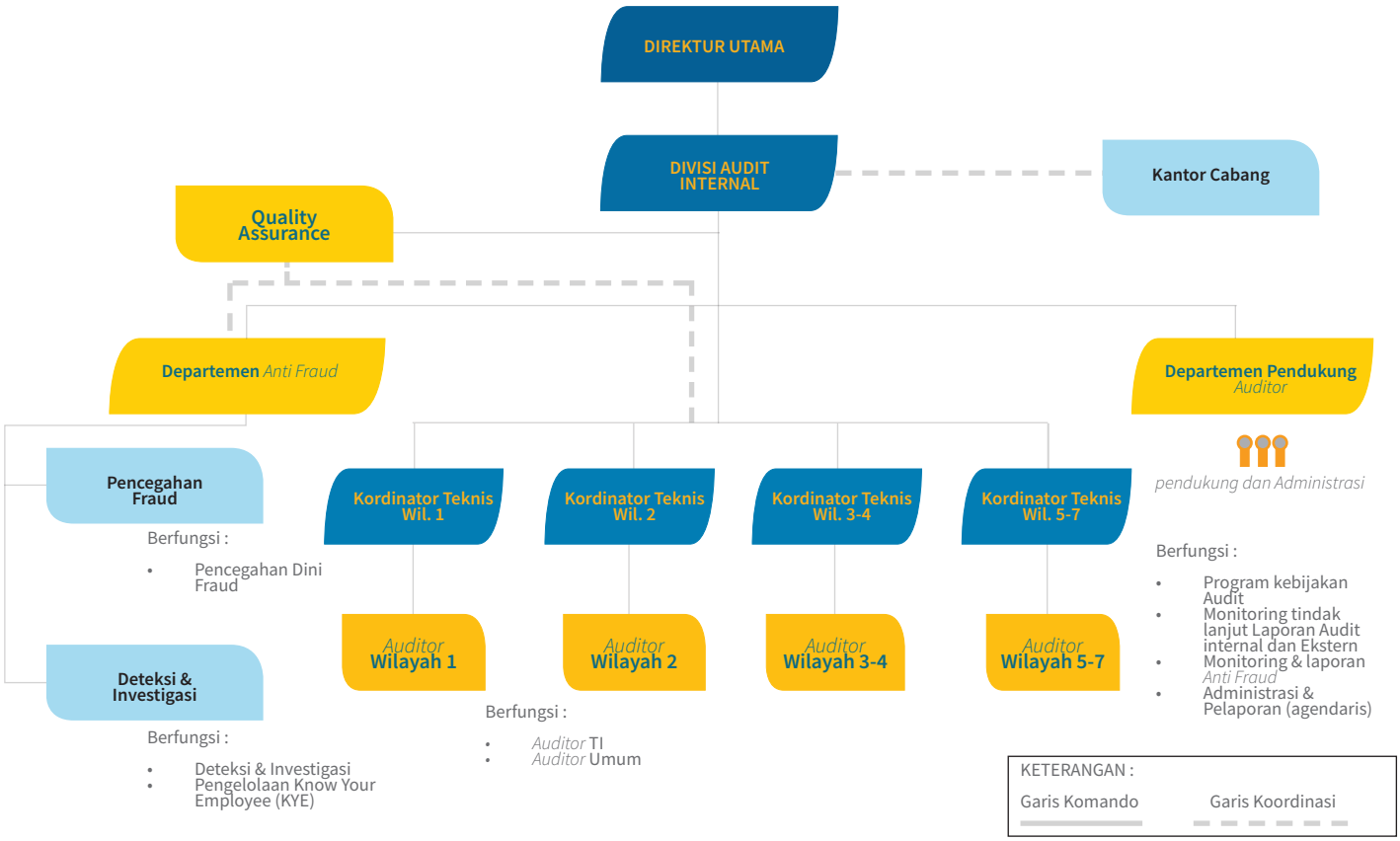

Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Divisi Audit Internal memiliki *Quality Assurance* dan 2 (dua) departemen dalam mendukung kegiatan operasional Pemimpin Divisi Audit Internal yaitu Departemen *Anti Fraud* dan Departemen Pendukung *Auditor*, serta Koordinator Teknis yang terbagi atas 7 (tujuh) wilayah dimana kedudukan koordinator teknis ini setara dengan Departemen.

Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Internal (DAI) dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. kedudukan, mekanisme, tugas, wewenang dan tanggungjawab Divisi Audit Internal (DAI) termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank, sehingga kebijakan audit internal yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditandatangani oleh Direksi Bank Papua dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 03 Oktober 2018, yang disusun berdasarkan Pedoman Kerja Divisi Audit Internal (DAI) disusun berlandaskan pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tetang Penerapan Audit Intern pada Bank Umum, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan Pemimpin Divisi Audit Internal telah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kemampuan dan keahlian yang cukup di bidang tugas audit.

Position of Internal Audit Division in Company Structure

The Internal Audit Division has Quality Assurance and 2 (two) departments in supporting the operational activities of the Head of the Internal Audit Division, namely the Anti Fraud Department and the Auditor Support Department, and the Technical Coordinator, which is divided into 7 (seven) areas where the position of the technical coordinator is equivalent to the Department.

The Head of the Internal Audit Division (DAI) reports directly to the President Director. To support independence and ensure smooth audit and authority in monitoring follow-up, the Internal Audit Division (DAI) can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters relating to the audit. the position, mechanism, duties, authority and responsibilities of the Internal Audit Division (DAI) including transparency and clarity are significant matters in the management of the Bank, so that the internal audit policy relating to the duties, authorities and responsibilities as well as the level of independence has been stated in the Internal Audit Charter (Internal Audit Charter) which was signed by the Board of Directors of Bank Papua and was approved by the Board of Commissioners on October 3, 2018, which was compiled based on the Internal Audit Division's Work Guidelines (DAI) compiled based on POJK Number 1 / POJK.03 / 2019 dated January 28, 2019 about Application Internal Audit at Commercial Banks, and POJK Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Application of Governance for Commercial Banks.

Appointment and Dismissal of Internal Audit Leaders

The Internal Audit Division leader is appointed and dismissed by the Board of Director with the approval of the Board of Commissioners and subsequently reported to the Financial Services Authority. The appointment of the Leader of the Internal Audit Division has been based on educational background, ability and sufficient expertise in the field of audit assignments.

Profil Divisi Audit Internal

Internal Audit Division Profile

Kusyanto, SE

Pemimpin Divisi Audit Internal

Internal Audit Division Leader

Periode Jabatan *Periode Jabatan*	9 April 2019 - Sekarang	*April 9, 2019 - now*
Usia *Age*	51 tahun. Lahir di Merauke pada tanggal 07 Mei 1968.	*51 years old. Born in Merauke on May 7, 1968.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 1992.	*Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih Manokwari University in 1992.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 15 Februari 2019, *Fraud Auditing* 1. • 26 April 2019, *Fraud Auditing* 2. • 19 Juli 2019, Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* tingkat lanjutan II. • 20 September 2019, Sekolah Staf dan Pemimpin Cabang (SESPIBANK) Angkatan 71.	• *February 15, 2019, Auditing Fraud 1.* • *April 26, 2019, Auditing Fraud 2.* • *July 19, 2019, Advanced level Qualified Internal Auditor Certification II.* • *September 20, 2019, School of Staff and Branch Leaders (SESPIBANK) Batch 71.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Departemen *Anti Fraud* berdasarkan SK Direksi nomor : 03/KEPEG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.	*Previously he served as the Leader of the Anti Fraud Work Unit based on Board of Director' Decree number: 03 / KEPEG / I / 2019 dated January 7, 2019.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2013.	*4th Level Risk Management Organizers of BSMR on October 26, 2013.*

Jumlah dan Kualitas *Auditor* Internal

Divisi Audit Internal terus berupaya untuk memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Pemenuhan sumber daya yang berkompeten dilakukan dengan menetapkan kualifikasi/ kompetensi yang diperlukan dalam proses rekrutmen *Auditor* dan Pegawai Divisi Audit Internal secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan & program sertifikasi, mengikutsertakan dalam seminar – seminar terkait audit dan *fraud* sehingga dapat meningkatkan kompetensi para auditor yang mencakup *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), dan *attitude* (sikap kerja).

Sepanjang tahun 2019 Divisi Audit Internal didukung dengan total pegawai sebanyak 41 anggota termasuk Pemimpin Divisi Audit Internal, dengan jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan, usia dan kualifikasi/ sertifikasi yang beragam.

Komposisi Pegawai

Number and Quality of Internal Auditors

The Internal Audit Division continues to strive to fulfill and provide auditors who have competence and integrity in accordance with the needs and level of risk both at the Head Office and at Branch Offices. The fulfillment of competent resources is carried out by determining the qualifications / competencies needed in the Internal Audit Division employee recruitment process on a regular basis. To improve the quality of Human Resources is carried out through education, training & certification programs, including in seminars related to auditing and fraud so as to improve the competence of auditors which includes knowledge (knowledge), skills (skills), and attitude (work attitude).

Throughout 2019 the Internal Audit Division was supported by a total of 41 members including the Internal Audit Division Leader, with varying levels of position, experience, education, age and qualifications / certifications.

Employee Composition

No	Jabatan / *Position*	Jumlah
1.	Pemimpin Divisi	1
2.	*Quality Assurance*	2
3.	Koordinator Teknis	4
4.	Pemimpin Departemen *Anti Fraud*	1
5.	Pemimpin Departemen Pendukung	1
6.	*Auditor*	15
7.	Asisten *Auditor*	7
8	Investigator	4
9.	Asisten Investigator	1
10	Staf Pendukung	3
11	Pegawai Magang	2
	Jumlah	**41**

Rincian Komposisi dan Kualifikasi Pegawai Divisi Audit Internal (DAI) Tahun 2019

Details of Employee Composition and Qualification of Internal Audit Division (DAI) in 2019

No	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Sertifikasi Audit *Audit Certification*
1.	Pemimpin Divisi	51	Tingkat Lanjutan
2.	*Quality Assurance*	52	Tingkat Dasar
3.	*Quality Assurance*	55	Tingkat Dasar I
4.	Koordinator Teknis	49	Tingkat Dasar
5	Koordinator Teknis	50	Tingkat Dasar II
6.	Koordinator Teknis	47	Sertfikasi QIA
7.	Pemimpin Departemen Pendukung	49	-
8.	Pemimpin Departemen *Anti Fraud*	49	-
9.	*Auditor* Muda Wilayah I	51	Tingkat Lanjutan
10.	*Auditor* Muda Wilayah I	45	Tingkat Dasar II
11.	*Auditor* Muda Wilayah I	46	-
12.	*Auditor* Muda Wilayah I	38	-
13.	Asisten *Auditor* Wilayah I	37	Tingkat Lanjutan
14.	*Auditor* Muda Wilayah II	54	Tingkat Dasar
15.	*Auditor* Muda Wilayah II	37	Tingkat Dasar II
16	Asisten *Auditor* Wilayah II	40	Tingkat Dasar
17.	Asisten *Auditor* Wilayah II	32	Tingkat Lanjutan
18.	Asisten *Auditor* Wilayah II	32	Tingkat Lanjutan
19.	*Auditor* Muda Wilayah III	47	Tingkat Lanjutan
20.	*Auditor* Wlayah III	51	-
21	*Auditor* Wlayah III	34	Tingkat Dasar II
22.	*Auditor* Wlayah III	36	-
23.	*Auditor* Wlayah III	39	Tingkat Dasar II
24.	Asisten *Auditor* Wilayah III	33	Tingkat Dasar II
25.	Asisten *Auditor* Wilayah III	29	Tingkat Dasar II
26.	*Auditor* Muda Wilayah IV	39	Tingkat Dasar
27.	*Auditor* Wilayah IV	36	Tingkat Dasar II
28.	Asisten *Auditor* Wilayah IV	28	Tingkat Dasar II
29.	Investigator deteksi dan Investigasi	52	Fraud Audting II
30.	Manager Pencegahan Fraud	50	Fraud Audting II
31.	Asisten Pencegahan Fraud	33	-
32.	Investigator Deteksi dan Investigasi	35	Fraud Audting II
33.	Investigator Muda Deteksi dan Investigasi	43	-
35.	Asisten Pendukung dan Pelaporan	35	Tingkat Lanjutan
36.	Asisten Pendukung dan Pelaporan	32	-
36	Asisten Pendukung dan Pelaporan	34	-

Pengembangan Potensi & Kompetensi

Potential & Competency Development

Telah menjadi kebutuhan organisasi untuk mengembangkan potensi dan kompetensi jajarannya. Untuk Divisi Audit Internal, selama tahun 2019 Bank Papua telah memberikan kesempatan kepada anggota Divisi Audit Internal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan *Auditor*, diantaranya :

It has become an organization's need to develop the potential and competence of its staff. For the Internal Audit Division, during 2019 Bank Papua has provided opportunities for members of the Internal Audit Division to attend the education and training of Auditors, including:

No	*Training Workshop*	
1	*Workshop* teknik pendeteksian dan penangan kebohongan bagi internal audit oleh Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA)	*Workshop on the technique of detecting and handling lies for internal audits by the Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
2	Sertifikasi *fraud auditing* 1 (FA 1) oleh Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA)	*Fraud Auditing 1 (FA 1) certification by the Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
3	Sertifikasi *fraud auditing* 2 (FA 2) oleh Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA)	*Fraud Auditing 2 (FA 2) certification by the Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
4	Tableau *training & workshop* oleh data media semesta	*Tableau training & workshops by universal media data*
5	Sertifikasi QIA tingkat manajerial olehYayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	*Managerial level QIA certification by the Internal Audit Education Foundation (YPIA)*
6	Sertifikasi audit tingkat dasar 2 oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	*Basic level 2 audit certification by the Internal Audit Education Foundation (YPIA)*
7	Sertifikasi audit tingkat lanjutan 2 oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit *(YPIA)*	*Advanced level audit certification 2 by the Internal Audit Education Foundation (YPIA)*
8	*Focus Group Discussion* (FGD) POJK tentang penerapan fungsi audit internal pada bank umum oleh OJK	*OJK's Focus Group Discussion (FGD) on the implementation of the internal audit function at commercial banks*
9	Seminar nasional internal audit 2019 oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	*2019 National Internal Audit Seminar by the Internal Audit Education Foundation (YPIA)*
10	*Workshop* harmonisasi fungsi manajemen risiko, komite audit, internal audit dan kepatuhan oleh *Risk Management Guard* (RMG)	*Workshop on harmonization of risk management functions, audit committee, internal audit and compliance by Risk Management Guard (RMG)*
11	Audit Tingkat Dasar (A) oleh YPIA	*Basic Level Audit (A) by YPIA*
12	Audit Tingkat Dasar (B) oleh YPIA	*Basic Level Audit (B) by YPIA*

Pedoman Kerja Audit Internal

Internal Audit Work Guidelines

Pedoman Kerja Divisi Audit Internal (DAI) disusun berlandaskan pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tetang Penerapan Audit Intern pada Bank Umum, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari Piagam Audit internal (Internal Audit Charter) dan Surat Keputusan Direksi Nomor 43/DIR-BPD/IX/2019 tanggal 23 September 2019, akan terus dimutakhirkan dengan memperhatikan perkembangan praktik perbankan umumnya dan Bank Papua khususnya.

Di samping itu, untuk melengkapi pedoman ini, Divisi Audit Internal dan para auditornya harus pula memperhatikan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, dan *Standards For The Professional Practice of Internal Auditing dari The Institute of Internal Auditor*.

The Internal Audit Division's Work Guidelines (DAI) are prepared based on POJK Number 1 / POJK.03 / 2019 dated January 28, 2019 concerning Application of Internal Audit at Commercial Banks, and POJK Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for commercial banks. This guideline is an elaboration of the Internal Audit Charter and Board of Director Decree Number 43 / DIR-BPD / IX / 2019 dated September 23, 2019, will continue to be updated with due regard to the development of banking practices in general and the Papua Bank in particular.

In addition, to complement this guideline, the Internal Audit Division and its auditors must also pay attention to the Internal Audit Professional Standards (SPAI) issued by the Internal Audit Professional Organization Consortium, and Standards for the Professional Practice of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors.

Internal Audit Charter

Standar Profesional Internal Audit Nomor 1000 menyatakan bahwa tujuan, wewenang, tugas dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* dan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Piagam Audit Divisi Audit Internal (DAI) Bank Papua ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 43/DIR-BPD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 65.1/DIR-BPD/X/2018 Tentang Penetapan Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang telah disetujui oeh Dewan Komisaris Bank Papua.

Di dalam *Internal Audit Charter* Bank Papua dimuat antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab Divisi Audit Internal membantu anggota *Manager* dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab secara efektif;
3. Uraian dan penjelasan mengenai visi dan misi Divisi Audit Internal untuk menjadi mitra profesional yang memberikan nilai tambah dalam mencapai visi dan misi perusahaan;
4. Uraian dan penjelasan mengenai visi dan misi Divisi Audit Internal untuk menjaga dan memenuhi kepentingan bank dan masyarakat pemilik dana dengan baik dan aman;
5. Uraian dan penjelasan mengenai ruang lingkup audit dalam melakukan *review* atas manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta proses Tata Kelola Perusahaan yang baik dan *system* informasi;
6. Uraian dan penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan *review* aktivitas perusahaan dalam interval waktu tertentu guna memastikan bahwa fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen serta selaras, baik dengan tujuan perusahaan maupun dengan standar praktik pengelolaan perusahaan yang baik;
7. Uraian dan penjelasan mengenai wewenang penuh untuk mengaudit semua fungsi dalam unit kerja serta memiliki akses untuk memeriksa semua catatan, karyawan dan fisik aset-aset yang terkait dengan pelaksanaan auditnya.

Internal Audit Charter

Internal Audit Professional Standard No. 1000 states that the purpose, authority, duties and responsibilities of the internal audit function must be formally stated in the Internal Audit Charter and must obtain approval from the Chairperson and Organization Supervisory Board. Audit Charter of Bank Papua's Internal Audit Division (DAI) is determined based on Board of Director' Decree Number 43 / DIR-BPD / IX / 2019 dated September 23, 2019 concerning amendments to Board of Director Decree Number 65.1 / DIR-BPD / X / 2018 Concerning the Establishment of Internal Audit Charter (Internal Audit Charter) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , which has been approved by the Board of Commissioners of the Bank Papua.

In the Bank Papua Internal Audit Charter, the following are included:

1. *Provisions regarding the appointment and dismissal of the Internal Audit Division Leader by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority;*
2. *Provisions regarding the duties and responsibilities of the Internal Audit Division assist members of the Manager and Board of Commissioners in carrying out their responsibilities effectively;*
3. *Description and explanation of the vision of the Internal Audit Division to become a professional partner that provides added value in achieving the company's vision;*
4. *Description and explanation of the mission of the Internal Audit Division to safeguard and fulfill the interests of banks and the community of fund owners;*
5. *Description and explanation of the scope of the audit in conducting reviews of Risk Management, internal control systems, as well as the processes of good Corporate governance and information systems;*
6. *Description and explanation of duties and responsibilities in reviewing company activities in certain time intervals to ensure that the functions of planning, organizing, directing and controlling have been carried out in accordance with the instructions, policies and procedures established by management and aligned, both with company objectives and with good Corporate management practice standards;*
7. *Description and explanation of full authority to audit all functions in the work unit and have access to examine all records, employees and physical assets related to the conduct of the audit.*

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Divisi Audit Internal (DAI)

Pemimpin Divisi Audit Internal bersama dengan seluruh pegawainya bertanggungjawab:

1. Melakukan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang Berbasis Risiko.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak terhadap tidak tercapainya Program Kerja Audit Tahunan atau Audit lainnya.
3. Melakukan kajian dan menyesuaikan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) jika terdapat perubahan Bisnis, Risiko, Operasional, Program, Sistem, dan Kontrol serta mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit jika terdapat perubahan signifikan atas PKAT.
   a. Memastikan setiap penugasan dalam pelaksanaan audit tahunan maupun audit lainnya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan audit melalui dokumentasi program kerja dan laporan hasil audit, serta kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang tepat.
   b. Meyakinkan bahwa perkembangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Bank telah dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara tepat.
   c. Mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
   d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan mengenai:
      - Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup penilaian atas Tata Kelola Perusahaan risiko dan pengendalian internal, kelemahan kontrol, dan rekomendasi serta saran perbaikan.
      - Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Audit Internal.
      - Rencana audit tahunan dan pencapaiannya.
      - Kebutuhan sumber daya.

Duties, Responsibilities and Authority of the Internal Audit Division (DAI)

The Internal Audit Division leader and all its members are responsible:

1. *Obtain a study and approval from the President Director and the Board of Commissioners on the Risk-Based Annual Audit Program (PKAT).*
2. *Communicate to the President Director and the Board of Commissioners if there are limited resources that have an impact on not achieving the Annual Audit Work Program or other Audit.*
3. *Review and adjust the Annual Audit Work Program (PKAT) if there are changes in Business, Risk, Operations, Programs, Systems, and Controls and communicate to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee if there are significant changes to PKAT.*
   a. *Ensure that each assignment in the annual audit and other audits has been carried out in an effective and efficient in accordance with the objectives of the audit through work program documentation and audit reports, as well as conclusions and recommendations to the appropriate parties.*
   b. *Ensure that developments and problems that can affect the sustainability of the Bank have been considered and communicated to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee appropriately.*
   c. *Identify all possibilities to improve and improve the efficiency of the use of existing resources.*
   d. *Submit reports periodically to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director regarding:*
      - *Audit Results Report (LHA) which includes an Assessment of risk governance and internal control, weaknesses in control, and recommendations and suggestions for improvement.*
      - *The objectives, authorities and responsibilities of Internal Audit.*
      - *Annual audit plan and achievements.*
      - *Resource requirements.*

- Independensi Divisi Audit Internal paling sedikit setahun sekali, hal-hal yang mempengaruhi independensi, serta implikasinya terhadap penentuan cakupan, pelaksanaan audit serta penyampaian hasil audit.
- Hasil pelaksanaan program *Assurance* dan peningkatan kualitas Internal Audit, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal, yang mencakup antara lain kesesuaian praktik Audit Internal terhadap kode etik dan standar dari SPFAIB dan IIA serta tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang signifikan terkait masalah kesesuaian dengan standar.

e. Menyampaikan laporan kepada OJK terkait:
   - Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
   - Laporan langsung atas hasil temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
f. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit secara periodik/berkala.
g. Melakukan investigasi apabila diperlukan.
h. Bekerja sama dengan auditor eksternal agar dicapainya hasil audit yang lebih berkualitas dan komprehensif.
i. Menetapkan kebijakan dan prosedur audit internal
j. Memastikan kepatuhan Internal Audit terhadap:
   - Kebijakan dan prosedur Internal Audit.
   - Kebijakan dan prosedur Bank yang relevan, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Internal. Setiap konflik tersebut akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
   - Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan panduan yang diwajibkan oleh *The Institute of Internal Auditors International Profesional Practices Framework*.
k. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan dijunjung tinggi.
l. Memastikan Divisi Audit Internal secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Piagam Internal Audit.

- *The independence of the Internal Audit Division is at least once a year, matters that affect independence, as well as their implications for determining coverage, conducting audits and delivering audit results.*
- *The results of the implementation of the Assurance program and the improvement of the quality of Internal Audit, both internally and externally, which includes, among others, conformity of Internal Audit practices to the Code of Conducts and standards of SPFAIB and IIA and follow-up to address significant issues related to compliance with standards .*

e. Submit a report to the relevant OJK:
   - *Implementation report and audit results signed by the President Director and President Commissioner.*
   - *Direct reports on audit findings that are expected to disrupt the Bank's business continuity.*

f. Monitor and report on developments in the periodic implementation of audit results.
g. Investigate if necessary.
h. Cooperate with external auditors to achieve more quality and comprehensive audit results.
i. Establish internal audit policies and procedures
j. Ensuring Internal Audit compliance with:
   - *Internal Audit policies and procedures.*
   - *The relevant Bank policies and procedures, except if they are contrary to the Internal Audit Charter. Each conflict will be resolved or communicated to the President Director and the Audit Committee.*
   - *Standards for the Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB) and guidelines required by The Institute of Internal Auditors International Professional Practices Framework.*

k. Ensuring the principles of integrity, objectivity, confidentiality and competence are applied and upheld.
l. Ensure that the Internal Audit Division collectively possesses or obtains knowledge, skills and other competencies needed to fulfill the requirements of the Internal Audit Charter.

Audit Internal mempunyai kewenangan untuk:

1. Memiliki akses penuh, bebas, dan tidak terbatas pada seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, properti, karyawan, serta aset Bank lainnya untuk melakukan penugasan dan bertanggung jawab atas kerahasiaan dan pengamanan catatan dan informasi.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, teknik, subyek audit, dan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menerbitkan laporan hasil audit
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan internal maupun eksternal.
5. Melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen untuk kepastian pelaksanaan tugas audit

Internal Audit has the authority to:

1. *Have full, free, and unlimited access to all functions in the organization, records, property, employees, and other assets of Bank to assign and be responsible for the confidentiality and security of records and information.*
2. *Allocate resources, determine the frequency, technique, subject of the audit, and scope of audit activities needed to achieve the audit objectives and publish audit report*
3. *Implement audit methods in accordance with professional standards and generally accepted audit standards and be able to adapt to conditions in the field.*
4. *Get needed assistance from audited unit personnel and experts from both internal and external environments.*
5. *Communicate and interact directly with the Board of Director and the Board of Commissioners including personal meetings without the presence of Management to ensure the implementation of audit tasks*

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Internal Audit Activities Report

Standar Pelaksanaan

Kegiatan Divisi Audit Internal Bank Papua berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 September 2019. Efektivitas pelaksanaan fungsi DAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Implementation Standards

The activities of the Bank Papua Internal Audit Unit are guided by the Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on 23 September 2019. The effectiveness of the DAI function and compliance with the SPFAIB is reviewed by an independent external party at least once in 3 (three years.

Ruang Lingkup Pelaksanaan

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas operasional perbankan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank Papua dan masyarakat meliputi risiko kredit, operasional, strategi, reputasi, hukum dan risiko lainnya. Meliputi kegiatan operasional segenap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment point*, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja lain di Kantor Pusat. Audit dititik beratkan pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk efisiensi sumber daya, efektivitas pencapaian target dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas audit internal (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi.

Scope of Implementation

The scope of the audit includes all banking operational activities that directly or indirectly have the potential to pose risks that are expected to affect the level of good implementation of the interests of Bank Papua and the community including Loan, operational, strategic, reputation, legal and other risks. Includes operational activities of all Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, Payment points, Corporate Secretary Division and other Work Units at the Leader Office. Audit is focused on the resources used to achieve the targets set, including resource efficiency, effectiveness of achieving targets and increasing compliance with applicable regulations both internally and externally. Internal Audit helps the organization achieve its objectives through internal audit activities (assurance and consulting) and investigative activities.

1. *Assurance*
   Melakukan pengujian secara obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *Risk Management*, dan proses *governance* dalam organisasi.
2. *Consulting*
   Memberikan jasa *advisory* yang terkait dengan aktivitas auditee/unit kerja, dimana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan auditee/unit kerja dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki *internal control*, penerapan *Risk Management*, dan proses *governance*, tanpa mengambil alih tanggungjawab operasional.
3. Investigasi
   Aktivitas pengumpulan bukti-bukti dengan menggunakan teknik Investigasi atas hasil analisa awal terhadap indikasi dan/atau *fraud* yang terjadi. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Investigasi mencakup perolehan bukti dan pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan serta *monitoring* tindak lanjut yang diperlukan.

Metode Audit

Divisi Audit Internal menerapkan metode audit dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), termasuk pemahaman yang lebih baik akan kuantitas manajemen, karakteristik bisnis dan risiko yang dihadapi bank, serta memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi secara benar. Metode ini berfokus pada proses bisnis (*business process-focused*), dan dalam penilaian risiko dan pelaksanaan auditnya diarahkan pada area-area yang sangat menentukan kesuksesan bisnis obyek audit. Penerapan audit berbasis risiko bertujuan :

1. Meningkatkan nilai (*value*) yang diberikan kepada obyek audit, karena metodologi ini mencakup risiko bisnis utama;
2. Menghemat waktu pelaksanaan audit pada area-area yang berisiko rendah yang berdampak pada efisiensi bisnis utama;
3. Melakukan penilaian serta penelaahan terhadap risiko yang ada secara lebih menyeluruh dalam menjaga serta mengurangi risiko bank;
4. Menilai apakah temuan serta rekomendasi akan sejalan dengan tujuan utama bank (*Corporate objectives*);
5. Memberikan kesempatan lebih besar dalam melakukan kaji banding (*benchmarking*) dan menggunakan praktik terbaik (*best practices*);

1. *Assurance*
   Test objectively for evidence in order to provide an independent Assessment of internal control, application of Risk Management, and governance processes within the organization.
2. *Consulting*
   Providing advisory services related to auditee / work unit activities, where the nature and scope are agreed with the auditee / work unit and aims to provide added value and improve internal control, application of Risk Management, and governance processes, without taking operational responsibility.
3. *Investigation*
   Activities to gather evidence using Investigation techniques on the results of the initial analysis of the indications and / or fraud that occurred. Investigation aims to reveal the modus operandi, causes, potential losses, actors and other parties involved. Investigation includes obtaining evidence and statements, writing reports, giving testimony of findings and monitoring follow-up as needed.

Audit Method

Internal Audit Division applies the audit method by using a risk based audit approach, including a better understanding of the quantity of management, business characteristics and risks faced by banks, and ensuring that risks are correctly identified. This method focuses on business processes (business process-focused), and in risk Assessment and implementation of the audit is directed at areas that greatly determine the business success of the audit object. The application of risk-based auditing aims:

1. *Increase the value given to the audit object, because this methodology covers key business risks;*
2. *Save time on auditing in low risk areas that have an impact on key business efficiency;*
3. *Assessing and reviewing existing risks more thoroughly in safeguarding and reducing bank risk;*
4. *Assess whether the findings and recommendations will be in line with the main objectives of the bank (Corporate objectives);*
5. *Providing greater opportunities in conducting benchmarking and using best practices;*

6. Memposisikan Divisi Audit Internal sebagai agen perubahan bagi bank (*Corporate Change Agent*);
7. Menjadikan Divisi Audit Internal sebagai tempat pelatihan terbaik bagi pejabat Bank;
8. Menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan/*overlap* antara *Auditor* internal *Auditor* eksternal yang disebabkan kurangnya koordinasi dan berbedanya metodologi audit yang digunakan antara keduanya.

6. Positioning Internal Audit Division as an agent of change for banks (Corporate Change Agent);
7. Making Internal Audit Division the best training place for Bank officials;
8. Avoid the occurrence of duplication of work / overlap between the external Auditor's internal Auditor due to the lack of coordination and the different audit methodologies used between the two.

Pelaksanaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh Divisi Audit Internal (DAI) mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Perseroan. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan *risk-based audit* dengan melihat risiko yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan regulasi lainnya berkaitan dengan: Risiko Kredit. Risiko Pasar, Risiko Iikuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim *Auditor* dari Kantor Pusat yang ditugaskan ke kantor-kantor cabang beserta *Auditor* Cabang yang berada di Kantor Cabang. Pelaksanaan Audit dibedakan menjadi *general audit*.

Cakupan Audit sepanjang tahun 2019 yang telah dilakukan meliputi kegiatan audit seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Audit Implementation

The scope of audit work by the Internal Audit Division (DAI) covers all aspects and elements of the Company's organizational activities. The audit work is carried out through a risk-based audit approach by looking at risks that refer to Bank Indonesia Regulations (PBI), Financial Services Authority Regulations (POJK) and other regulations relating to: Credit Risk. Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. The audit is carried out by a team of Auditors from the Head Office assigned to branch offices along with Branch Auditors who are at the Branch Office. Audit implementation can be divided into general audit.

Audit coverage throughout 2019 has included audit activities as listed in the table below:

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Divisi Audit Internal Tahun 2019 *Annual Audit Work Program (PKAT) Internal Audit Division 2019*			
No	**Auditee**	**Waktu Pelaksanaan**	**Keterangan**
1	KC Sarmi	Semester I	Terlaksana
2	KC Arso	Semester I	Terlaksana
3	KC Karubaga	Semester I	Terlaksana
4	KC Oksibil	Semester I	Terlaksana
5	KC Kaimana	Semester I	Terlaksana
6	KC Serui	Semester I	Terlaksana
7	KC Wasior	Semester I	Terlaksana
8	KC Teminabuan	Semester I	Terlaksana
9	KC Merauke	Semester I	Terlaksana
10	KC Kasonaweja	Semester I	Terlaksana
11	KCU Manokwari	Semester I	Terlaksana
12	KCU Jayapura	Semester II	Terlaksana
13	KC Abepura	Semester II	Terlaksana
14	Divisi Manajemen Modal Manusia	Semester II	Terlaksana
15	Divisi Perencanaan Strategis	Semester II	Terlaksana
16	Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	Semester II	Terlaksana
17	Divsi Risiko Bisnis	Semester II	Terlaksana
18	Divisi Bisnis UMK dan Konsumer	Semester II	Terlaksana
19	Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan *E-Banking*	Semester II	Terlaksana
20	Divisi Teknologi Informasi	Semester II	Terlaksana
21	Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Semester II	Terlaksana
22	Divisi Umum	Semester II	Terlaksana
23	Divisi *Treasury*	Semester II	Terlaksana

A. REKAPITULASI PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT UMUM DAI PADA KANTOR CABANG TAHUN 2019 & TL 2019
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Per 31 Desember 2019

NO	KANTOR CABANG	JUMLAH TEMUAN TAHUN 2019	PROGRES TINDAK LANJUT TAHUN 2019							
			STL		DTL		BTL		TDTL	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	KC SARMI	61	54	89%	7	11%	0	0%	0	0%
2	KC ARSO	41	33	80%	8	20%	0	0%	0	0%
3	KC KARUBAGA	42	21	50%	21	50%	0	0%	0	0%
4	KC OKSIBIL	52	19	37%	33	63%	0	0%	0	0%
5	KC KAIMANA	52	43	83%	9	17%	0	0%	0	0%
6	KC SERUI	82	53	65%	29	35%	0	0%	0	0%
7	KC WASIOR	44	23	52%	21	48%	0	0%	0	0%
8	KC TEMINABUAN	97	26	27%	71	73%	0	0%	0	0%
9	KC MERAUKE	70	70	100%	0	0%	0	0%	0	0%
10	KC KASONAWEJA	37	31	84%	6	16%	0	0%	0	0%
11	KCU MANOKWARI	55	48	87%	7	13%	0	0%	0	0%
12	KCU JAYAPURA	38	29	76%	9	24%	0	0%	0	0%
13	KC ABEPURA	86	65	76%	21	24%	0	0%	0	0%
TOTAL TEMUAN		**757**	**515**	**68%**	**242**	**32%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

B. REKAPITULASI PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT UMUM DAI PADA KANTOR PUSAT (DIVISI) TAHUN 2019 & TL 2019

NO	DIVISI	JUMLAH TEMUAN TAHUN 2019	PROGRES TINDAK LANJUT TAHUN 2019							
			STL		DTL		BTL		TDTL	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	MANAJEMEN MODAL MANUSIA	11	8	73%	3	27%	0	0%	0	0%
2	PERENCANAAN STRATEGIS	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	BKK DAN RB	16	2	13%	14	88%	0	0%	0	0%
4	PENGELOLAAN DANA, JASA & E-BANKING	12	12	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	UMUM	6	1	17%	5	83%	0	0%	0	0%
6	TEKNOLOGI DAN INFORMASI	4	1	25%	3	75%	0	0%	0	0%
7	PENGELOLAAN ASET KHUSUS	3	2	67%	1	33%	0	0%	0	0%
8	BISNIS UMK DAN KONSUMER	5	0	0%	5	100%	0	0%	0	0%
9	TREASURY	10	0	0%	10	100%	0	0%	0	0%
TOTAL TEMUAN		**72**	**31**	**43%**	**41**	**57%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

C. REKAPITULASI PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT UMUM DAI PADA KANTOR CABANG (KC) DAN KANTOR PUSAT TAHUN 2019										
NO	AUDIT TAHUN 2019	JUMLAH TEMUAN TAHUN 2019	PROGRES TINDAK LANJUT SECARA KESELURUHAN TAHUN 2019							
			STL		DTL		BTL		TDTL	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	GENERAL AUDIT CABANG	757	515	68%	242	32%	0	0%	0	0%
2	GENERAL AUDIT DIVISI	72	31	43%	41	57%	0	0%	0	0%
TOTAL TEMUAN KESELURUHAN		**829**	**546**	**66%**	**283**	**34%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

A.

TEMUAN CABANG & DIVISI	TAHUN				JUMLAH
	2016	2017	2018	2019	
TOTAL TEMUAN	795	1005	1194	829	3823
STL	795	962	1012	546	3315
PERSENTASE (%)					87%
DTL	0	43	182	283	508
PERSENTASE (%)					13%

B.

TEMUAN CABANG	TAHUN				JUMLAH
	2016	2017	2018	2019	
TOTAL TEMUAN	722	897	1110	757	3486
STL	722	854	939	515	3030
PERSENTASE (%)					87%
DTL	0	43	171	242	456
PERSENTASE (%)					13%

Keterangan :	
STL :	Sudah Ditindaklanjuti
DTL :	Dalam Proses Tindak Lanjut
BTL :	Belum Ditindaklanjuti
TDTL :	Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Sasaran Divisi Internal Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, Divisi Audit Internal telah menyusun beberapa target/sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Memastikan tercapainya tingkat kesehatan bank sesuai dengan target perusahaan menggunakan aplikasi tingkat kesehatan bank.
2. Memastikan tingkat ketaatan dan kepatuhan seluruh unit kerja terhadap SOP dan ketentuan perbankan lainnya melalui penyusunan rencana audit tahunan dan Audit khusus (*fraud* dan *non fraud*).
3. Memastikan bahwa seluruh unit kerja sudah melakukan tugasnya secara efektif, efisien dan ekonomis (Budaya Kerja Berfikir dan Bertindak Secara Bisnis untuk Kemajuan Bank Papua).
4. Peningkatan kualitas dan metodologi audit melalui kaji ulang dan pengkinian metodologi audit serta melakukan penguatan kinerja personil atas pelaksanaan Audit Divisi Audit Internal (DAI).
5. Peningkatan kompetensi *Auditor*, manajemen karir, serta Sumber Daya Manusia pendukung audit.
6. Melakukan audit pasif dan konsultasi.
7. Mendokumentasikan data Divisi Audit Internal (DAI) ke Sistem *Risk Based Audit* (RBA) serta melakukan perbaikan dan pembenahan administrasi.
8. Terpenuhinya laporan dan tindak lanjut temuan dengan menggunakan Sistem Aplikasi *Risk Based Audit* RBA dan membuat laporan tepat waktu.
9. Meningkatkan kualitas temuan dengan memaksimalkan fungsi *Quality Assurance*.

Internal Audit Division Targets for 2020

For 2020, the Internal Audit Division has set several targets / targets to be achieved, namely:

1. *Ensuring the achievement of bank soundness in accordance with company targets using the bank soundness application.*
2. *Ensuring the level of compliance and compliance of all work units with SOP and other banking regulations through the preparation of annual audit plans and special audits (fraud and non-fraud).*
3. *Ensuring that all work units have carried out their duties effectively, efficiently and economically (Work Culture Thinking and Acting in Business for the Progress of Bank Papua).*
4. *Improving the quality and methodology of the audit through the review and updating of the audit methodology as well as strengthening the performance of personnel on the implementation of the Internal Audit Division (DAI).*
5. *Increasing the competence of auditors, career management, and supporting human resources in audits.*
6. *Conduct passive audits and consultations.*
7. *Documenting Internal Audit Division (DAI) data to the Risk Based Audit (RBA) System and making improvements and improving administration.*
8. *Fulfillment of reports and follow-up findings by using the Risk Based Audit RBA Application System and making reports on time.*
9. *Improve the quality of findings by maximizing the Quality Assurance function.*

Akuntan Publik
Public Accountants

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RUPS tahun 2018 memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Papua tahun 2018;
2. Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2018 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit;
3. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, *Auditor* Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

To ensure the effectiveness of the external audit function, the Bank has complied with the provisions concerning the relationship between the Bank, the Public Accounting Firm and the Financial Services Authority as stipulated in the Bank Indonesia provisions concerning Transparency of the Bank's Financial Conditions by doing the following:

1. *The 2018 SGM gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint a Public Accountant Office as an independent external auditor to examine the financial statements of Bank Papua in 2018;*
2. *The Bank has assigned audit assignments to the Annual Financial Report for the period January to December 2018 to the Public Accountant Office approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee;*
3. *The selection process is carried out in accordance with the mechanism for the procurement of goods and services in force. To guarantee the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Bank.*

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Keuangan Bank Papua untuk tahun buku 2019 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Papua selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Bank Papua untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Appointment of Public Accountants

The appointment of a Public Accountant Office to conduct a Financial Audit of Bank Papua for the 2019 financial year has been carried out by independent, competent, professional and objective public accountants in accordance with the Professional Standards of Public Accountants, as well as the work agreements and scope of audits that have been set. In order for the audit process to be in accordance with the Professional Standards of Accountants and work agreements and the scope of the audits that have been determined and completed in accordance with the predetermined time targets, meetings are routinely conducted which discuss several significant important issues. Bank Papua always strives to improve communication between the Public Accountant, Audit Committee and Management of Bank Papua in order to minimize the obstacles that occur during the audit process.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :

1. Kapasitas KAP;
2. Legalitas perjanjian kerja;
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar Profesional Akuntan Publik; dan
5. Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank Papua untuk periode 31 Desember 2019. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank Papua dengan Kantor Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Pedoman dan Standar Audit Akuntan Publik

Auditor eksternal yang telah dipilih oleh Bank Papua dalam melakukan audit telah berpedoman pada standar audit yaitu:

1. **Standar Umum**, dimana audit harus dilakukan oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai, memiliki sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit, bersikap profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. **Standar Pekerjaan Lapangan**, *Auditor* dapat merencanakan dan mengawasi jalannya pekerjaan secara memadai, memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya termasuk pengendalian internal, memperoleh cukup bukti atau dokumen sebagai dasar yang tepat menyangkut laporan yang diaudit.
3. **Standar Pelaporan**, *Auditor* menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Assignment of audits to Public Accountants has fulfilled aspects:

1. *KAP capacity;*
2. *Legality of work agreement;*
3. *The scope of the audit;*
4. *Professional Accountant Professional Standards; and*
5. *Communication between KAP and related parties.*

Based on these criteria, the Board of Commissioners has appointed Hertanto, Grace and Karunawan Public Accounting Firms that have obtained permission from the Ministry of Finance and are registered with the Bank Supervisory Authority as an external auditor to carry out audits of Bank Papua financial statements for the period of December 31, 2019. The appointment for auditing the Bank's Financial Statements is realized through a work agreement in accordance with the provisions between the Bank Papua and the Public Accountant Office.

The appointed Public Accountant Office has submitted the audit results and the management letter to the Bank on time, is able to work independently, meet the professional standards of the Public accountant and work agreements and the scope of the audit that has been set.

Public Accountants Auditing Guidelines and Standards

The external auditor who has been chosen by Bank Papua in conducting the audit has guided the audit standards, namely:

1. ***General Standards,*** *where audits must be carried out by auditors who have attended training and have adequate technical skills, have an independent mental attitude in all matters relating to auditing, are professional in carrying out audits and compile reports.*
2. ***Field Work Standards,*** *the Auditor can plan and supervise the work properly, has sufficient understanding of the entity and its environment including internal controls, obtains sufficient evidence or documents as an appropriate basis regarding the audited report.*
3. ***Reporting Standards,*** *the Auditor prepares reports on the overall financial statements, including informative disclosures, presented in accordance with generally accepted accounting principles.*

Dalam penggunaan *Auditor* Eksternal, Bank Papua telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 khususnya pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

In the use of the External Auditor, Bank Papua has implemented in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 17 / PMK.01 / 2008 dated February 5, 2008 specifically article 3 paragraph 1 stated that the provision of general audit services for financial statements of an entity is carried out by the Public Accounting Firm for a maximum of 6 consecutive years and by a Public Accountant for a maximum of 3 years book in a row.

Informasi Akuntan Publik

Berikut disampaikan nama Akuntan Publik yang telah ditunjuk Bank Papua secara independen sebagai auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan Bank Papua di 5 (lima) tahun terakhir :

Public Accountant Information

The following is the name of the Public Accountant who has been appointed by Bank Papua independently as an external auditor to examine the financial statements of Bank Papua in the last 5 years:

Kantor Akuntan Publik Periode 5 (lima) Tahun Terakhir
Public Accountant Officer For Last 5 (five) Years

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Opini		Fee audit
2019	Hertanto, Grace dan Karunawan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*	Rp838.622.950
2018	Hertanto, Grace dan Karunawan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*	Rp1.034.890.000
2017	Hertanto, Grace dan Karunawan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*	Rp699.999.850
2016	Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*	Rp660.000.000
2015	Prof. Dr. H. TB Hasanuddin M.Sc & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*	Rp654.500.000

Jasa yang Diberikan

Kantor auditor yang ditunjuk Bank Papua tidak memberikan jasa lain kecuali jasa audit atas Laporan Keuangan Bank Papua.

The Services

The office of the auditor appointed by Bank Papua does not provide other services except audit services for the Bank Papua Financial Report.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Bank

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka diperlukan hasil audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK.

Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2019 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Effectiveness of External Audit and Bank Compliance

In an effort to fulfill the transparency and accountability principles and fulfill the provisions of the Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ., it is necessary to have an audit of the financial statements carried out by an independent party, namely the Public Accounting Office. The results of the audit of the financial statements for the financial year ended 31 December 2019 will then be submitted to the OJK.

The basis for the implementation of the transparency of financial statements for fiscal year 2019 based on the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority is as follows:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 6 / POJK.03 / 2015 dated March 31, 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.*

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

2. Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.03 / 2016 dated August 8, 2016 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 6 / POJK.03 / 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
3. Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Tindak Lanjut Temuan *Auditor* dan Pemeriksa Eksternal

Follow Up of Auditor and External Audit Findings

Secara periodik Bank Papua diawasi dan diperiksa oleh institusi eksternal baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang secara independen memberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Institusi yang melakukan pemeriksaan berkala di Bank Papua adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk secara independen. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pihak eksternal pada tahun 2019 tersebut dimonitor oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan, yang kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk disampaikan kepada pihak pemeriksa sebagai progress perbaikan yang sudah dilakukan sesuai rekomendasi dan komitmen yang disepakati.

Bank Papua is periodically monitored and inspected by external institutions, both government and non-government, which independently provide recommendations for improvements to be followed up. Institutions that carry out periodic checks at Bank Papua are the Financial Services Authority (OJK), the Supreme Audit Agency (BPK), and an independent Public Accountant Office. The follow-up of the results of the external party's audit in 2019 was monitored by the DAI and the Compliance Division, which was then reported to the Board of Director to be submitted to the examiner as the progress of the improvements made according to agreed recommendations and commitments.

Sampai dengan akhir Desember 2019, terdapat beberapa temuan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut :

As of the end of December 2019, there are several findings with the following completion rates:

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2019
PERIODE MONITORING 31 DESEMBER 2019

No	Auditee	Jumlah Temuan	Status Tindak Lanjut			% Penyelesaian
			STL	DTL	BTL	
1	KC Wamena	34	34	-	-	100%
2	KC Sentani	23	23	-	-	100%
3	KC Tanah Merah	23	23	-	-	100%
4	KC Jakarta	15	15	-	-	100%
5	KC Yogyakarta	23	23	-	-	100%
6	KC Surabaya	13	13	-	-	100%
7	KC Makassar	17	17	-	-	100%
8	KC Waisai	41	28	3	10	68%
9	KCU Jayapura	13	13	-	-	100%
10	Kantor Pusat	27	23	1	3	85%
Jumlah		**229**	**212**	**4**	**13**	**93%**

2019	**KANTOR CABANG**	**202**	**189**	**3**	**10**	**94%**
	KANTOR PUSAT	**27**	**23**	**1**	**3**	**85%**

KAP Hertanto, Grace dan Karunawan

Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) yang merupakan anggota perusahaan PT. *International Accounting Group* (TIAG).

Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) which is a member of the company PT. International Accounting Group (TIAG).

Perusahaan telah mendedikasikan layanan profesional untuk lebih dari 30 tahun. Sejarah panjang telah memberi KAP HGK banyak pengalaman dan pembelajaran. Perjalanan di bisnis telah membuat KAP HGK kuat dan tangguh dengan tantangan yang luar biasa untuk menangani dan melayani klien kami dan juga masyarakat untuk mendukung mereka dengan kualitas tinggi dalam manajemen perusahaan.

The company has dedicated professional services for more than 30 years. A long history has given KAP HGK a lot of experience and learning. The journey in business has made KAP HGK strong and resilient with tremendous challenges to handle and serve our clients and also the community to support them with high quality in company management.

Itu adalah bagian dari layanan kami kepada klien kami, disamping banyak layanan lainnya seperti pajak kepatuhan, audit informasi manajemen sistem, meninjau fungsi internal audit perusahaan, perekrutan profesional, pelatihan auditing dan Akuntansi IFRS, kami juga melayani investor asing untuk menyelesaikan skema investasi administrasi dan urusan hukum yang harus dipenuhi sesuai peraturan Indonesia. Kami melakukan semuanya dengan semangat, disiplin dan bakat.

It is part of our service to our clients, besides many other services such as tax compliance, system management information audits, reviewing internal Corporate audit functions, professional recruitment, auditing and IFRS accounting training, we also serve foreign investors to complete administrative investment schemes and matters laws that must be fulfilled in accordance with Indonesian regulations. We do everything with enthusiasm, discipline and talent.

Bidang usaha klien HGK mulai dari masyarakat umum seperti rumah sakit, hotel, kontraktor / EPC, perbankan meliputi Bank Sentral, asuransi, bengkel otomotif dan sebagainya, hingga manufaktur dari beberapa produk, perkebunan, minyak & gas industri, lembaga dana pensiun, pertambangan batubara, industri air tawar, bisnis pertanian, bandara manajemen, kantor berita nasional, investasi swasta dan juga perusahaan pemerintah.

The business sectors of HGK clients range from the general public such as hospitals, hotels, contractors / EPCs, banks including the Central Bank, insurance, automotive workshops and so on, to manufacturing from several products, plantations, oil & gas industries, pension funds, coal mining, freshwater industry, agricultural business, airport management, national news agencies, private investment and also government companies.

Menghadapi pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia kami akan terus mengembangkan layanan kami dengan memperbaiki organisasi dan manajemen HGK, merekrut profesional yang sangat baik yang relevan dan juga mendedikasikan untuk meningkatkan pendidikan untuk dicapai oleh orang-orang KAP HGK sehingga dapat memberikan kinerja terbaik dalam bisnis. Kami juga akan mengembangkan pusat pelatihan untuk bisnis keuangan, teknologi informasi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia dan layanan perbankan.

Facing Indonesia's future economic growth we will continue to develop our services by improving the organization and management of HGK, recruiting very good professionals who are relevant and also dedicating to improve education to be achieved by KAP HGK employees so they can provide the best performance in the business. We will also develop training centers for financial business, information technology, marketing, human resource management and banking services.

Manajemen Risiko

Risk Management

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Perusahaan

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *Risk Management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko di Bank Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 serta penerapan sistem Manajemen Risiko Bank saat ini mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta secara konsisten menyelaraskan program kerja bank sejalan dengan program-program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia/OJK dalam upaya terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Tuntutan perbankan internasional melalui *Bank for International Settlement* (*BIS*) untuk menerapkan "25 *base core principles*" secara tidak langsung mendorong bank-bank untuk segera menerapkan konsep manajemen risiko dalam menjalankan usahanya. Semakin kompleksnya produk dan aktifitas bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Sehingga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko bank akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.

Selama tahun 2019 Bank Papua telah menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*) untuk mengendalikan risiko yang menyertai kegiatan bisnis, melalui penerapan kerangka pengelolaan risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang

Risk Management System Implemented by the Company

Risk Management or risk management is an activity to control risk by going through a process for identification, measurement, monitoring and control of the portfolio to estimate potential losses that might occur. So with Risk Management, losses that might occur are expected to be properly mitigated and minimized.

Risk management policies at Bank Papua based on Board of Director Decree Number: 74 / DIR-BPD / XII / 2017 date 29 Desember 2017 and the application of the Bank's Risk Management system currently refers to OJK Regulation Number 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter Number 34 / SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, and consistently aligning the work programs of banks in line with the Indonesian Banking Architecture (API) programs initiated by the Bank Indonesia / OJK in an effort to realize a healthy, strong and efficient banking system. International banking demands through the Bank for International Settlements (BIS) to absorb "25 base core principles" indirectly encourage banks to immediately apply the concept of risk management in running their business. The more complex the bank's products and activities, the risk faced by the bank will increase. The increase in risk needs to be balanced with the quality of the application of adequate risk management. So that improving the quality of the application of bank risk management will support the effectiveness of the risk-based bank supervision framework.

During 2019 Bank Papua has implemented an integrated Risk Management (enterprise Risk Management) to control risks that accompany business activities, through the application of a risk management framework which includes the application of four pillars of risk management in accordance with POJK No.18 / POJK.03 / 2016 concerning Management Implementation Risks for

terdiri dari :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Commercial Banks consisting of:

1. *Active supervision by the BOC and BOD*
2. *Adequacy of Risk Management policies and procedures and determination of Risk limits.*
3. *Adequacy of the Risk Identification, measurement, monitoring and control process, and Risk Management information system.*
4. *A comprehensive internal control system.*

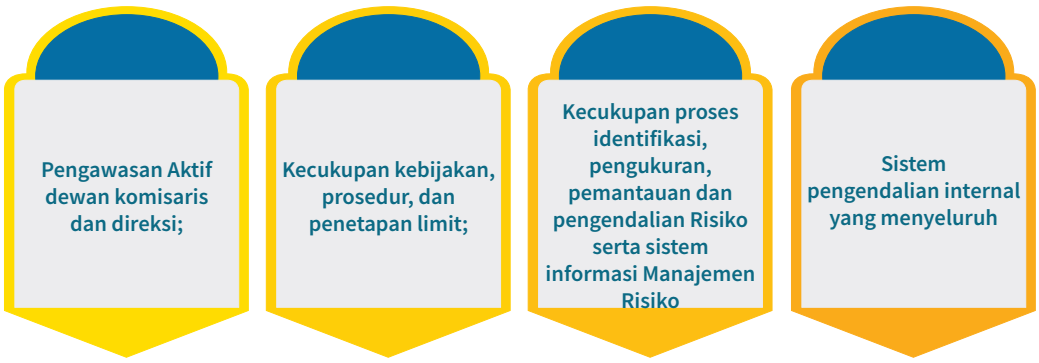

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Active Supervision of the BOD and BOC

Upaya pengelolaan risiko di lingkungan Bank mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko. Dalam Kerangka Manajemen Risiko itu, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko secara menyeluruh, memberikan persetujuan atas kebijakan, memberikan batasan risiko (*risk limit*) sebagai acuan pengambilan risiko oleh Bank serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya di dalam Bank. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap eksposur risiko di Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh komite Pemantau Risiko seperti yang diatur oleh regulator melalui peraturan mengenai Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum.

Risk management efforts within the Bank refer to the Risk Management Framework. In the Risk Management Framework, the BOC is tasked with supervising overall risk management, approving policies, providing risk limits as a reference for taking risk by the Bank and supervising its implementation within the Bank. In carrying out supervision of risk exposures at the Bank, the BOC is assisted by a Risk Monitoring committee as regulated by the regulator through regulations on Corporate Governance for Commercial Banks.

- **Wewenang dan Tanggungjawab Direksi**

  Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Direksi adalah sekurang-kurangnya :

  1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
  3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi ;

- ***Authority and Responsibility of the BOD***

  Based on article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 /POJK.03/2016 Regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility for the BOD are at least:

  1. *Arranging written and comprehensive Risk Management policies and strategies;*
  2. *Responsible for the implementation of Risk Management policies and Risk exposures taken by the Bank as a whole;*
  3. *Evaluate and decide on transactions that require the approval of the BOD;*

4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
5. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
   - Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : Keakuratan metodologi penilaian risiko;
   - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
   - Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
7. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.
8. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank

- **Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris**
  Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya:
  1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
  2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
  3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Seluruh aktivitas Bank dan setiap produk/jasa Bank dilakukan sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan, pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank dan diTata Kelola Perusahaan oleh Bagian sistem dan Prosedur.

Penetapan limit Bank yang dibuat dan diusulkan oleh unit kerja operasional, disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko Bank/Terintegrasi untuk dievaluasi dan diajukan kepada Komite

4. *Developing a Risk Management culture at all levels of the organization;*
5. *Ensuring the improvement of Human Resources competencies related to Risk Management;*
6. *Ensuring that the Risk Management function operates independently; and*
   - *Carry out periodic reviews to ensure: The accuracy of the risk assessment methodology;*
   - *Adequacy of risk management information system implementation; and*
   - *The accuracy of risk management policies and procedures and the determination of risk limits.*
7. *Have an adequate understanding of the risks inherent in all functional activities of the Bank and be able to take necessary actions in accordance with the Bank's Risk profile.*
8. *Have an adequate understanding of the risks inherent in all functional activities of the Bank and be able to take the necessary actions in accordance with the Bank's Risk profile*

- ***Authority and Responsibility of the BOC***
  Based on article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 /POJK.03/2016 Regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility for the BOC is at least:

  1. *Approve and evaluate Risk Management policies;*
  2. *Evaluate the accountability of the BOD for the implementation of Risk Management policies*
  3. *Evaluate and decide upon BOD' requests related to transactions that require the approval of the BOC.*

Adequacy of Policies, Procedures, and Limiting

All activities of the Bank and each product / service of the Bank are carried out in accordance with clearly defined guidelines and procedures and the scope is in line with the Bank's vision, mission and business strategy. Policies, guidelines and procedures issued by the Bank and managed by the Company by the System and Procedures Section.
Determination of Bank limits made and proposed by operational work units, submitted to the Bank / Integrated Risk Management Division to be evaluated and submitted to the Risk Management

Manajemen Risiko guna direkomendasikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan dengan sepengetahuan Komisaris. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko telah memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

Committee to be recommended to the President Director for approval with the knowledge of the Commissioners. In the context of effective risk control, policies and procedures are based on risk management strategies and are equipped with risk tolerance and risk limits. Determination of risk tolerance and risk limits has taken into account the level of risk to be taken and the overall strategy of the Bank.

Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko, yang dilakukan oleh Bank. Bank menerapkan proses pengelolaan risiko melalui tahapan:

1. Identifikasi
   Identifikasi dimaksud untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang terkandung dalam produk dan kegiatan Bank sudah tercakup dalam proses manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya
2. Pengukuran
   Pengukuran risiko dimaksudkan agar mampu menghitung ekposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung usaha Bank. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas usaha, bersifat kuantitatif atau kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya
3. Pemantauan
   Dilakukan dengan mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko, misalnya mengevaluasi limit, indikator Risiko dan sebagainya.
4. Pengendalian
   Dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat material dan yang melebihi limit risiko, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan pelaksanaan audit internal secara berkala.

The Risk Management Process and Risk Management Information System

The process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk is a major part of the process of implementing risk management, which is carried out by the Bank. The Bank implements a risk management process through stages:

1. *Identification*
   This identification is intended to ensure that the risks contained in the Bank's products and activities are included in the risk management process. Risk identification is proactive, covers all business activities and is carried out in order to analyze the sources and possible risks and their impacts

2. *Measurement*
   Risk measurement is intended to be able to calculate the risk exposure inherent in its business activities so that it can estimate its impact on capital that should be maintained in order to support the Bank's business. Risk measurement is carried out regularly for products and portfolios as well as all business activities, which are quantitative or qualitative, or a combination of both

3. *Monitoring*
   Done by evaluating the risk exposure contained in the entire product portfolio and business activities as well as the effectiveness of the risk management process, for example evaluating limits, risk indicators and so on.
4. *Control*
   Performed, among others, by providing follow-up on risks that are material and that exceeds the risk limit, increased control (embedded supervision), additional capital to absorb potential losses, and regular internal audits.

Sistem informasi manajemen risiko diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan kepada pihak Otoritas dan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Divisi Manajemen Risiko Bank/Terintegrasi menyusun laporan profil risiko secara berkala kepada Otoritas, Direksi dan Komite Manajemen Risiko, serta komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.

The risk management information system is implemented to support the implementation of reporting to authorities and management as a basis for decision making. The Bank / Integrated Risk Management Division compiles risk profile reports regularly to the Authority, BOD and Risk Management Committee, and Risk Monitoring committees periodically in order to mitigate risks and actions needed. the adequacy of the scope of information generated from the risk management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage is adequate according to the development of the level of complexity of business activities.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Comprehensive Internal Control System

Sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta Divisi Audit Internal. Fungsi yang menjalankan pengawasan dalam pengendalian internal diantaranya :

1. Pengawasan melekat oleh internal kontrol untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal Bank.
2. Pengawasan melekat oleh Bagian kepatuhan untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan eksternal Bank.
3. Divisi Manajemen Risiko Bank /Terintegrasi melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kepada kebutuhan Bank untuk memastikan :
   - Kecukupan kerangka manajemen risiko.
   - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
4. Divisi Audit Internal melakukan:
   - Kaji ulang penerapan manajemen risiko secara berkala paling sedikit sekali setiap tahun.
   - Pemeriksaan sampling secara periodik dan berdasarkan basis risiko.

A reliable and effective Bank internal control system is the responsibility of all operational work units and supporting work units as well as the Internal Audit Division. Functions that carry out supervision in internal control include:

1. *Oversight is attached by internal controls to supervise the Bank's compliance with the Bank's internal regulations.*
2. *Inherent supervision by the Compliance Section for overseeing Bank compliance with external provisions of the Bank*
3. *The Bank / Integrated Risk Management Division carries out regular reviews with a frequency that is adjusted to the needs of the Bank to ensure:*
   - *Adequacy of the risk management framework.*
   - *The accuracy of the risk assessment methodology.*
   - *Adequacy of risk management information systems*
4. *The Internal Audit Division carries out:*
   - *Review the application of risk management regularly at least once every year.*
   - *Periodic sampling checks and based on risk basis.*

Untuk mewujudkan keempat pilar penerapan manajemen risiko tersebut, Bank mengimplementasikannya melalui Tata Kelola Perusahaan risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan pengendalian risiko dalam rangka mendukung terlaksananya Manajemen Risiko yang efektif.

To realize the four pillars of the implementation of risk management, the Bank implements them through Risk Corporate Governance, risk management framework, risk management processes, Human Resources, Management Information Systems (MIS) and risk control in order to support the implementation of effective Risk Management.

Hasil *Review* yang Dilakukan atas Sistem Manajemen Risiko pada Tahun 2019

Bank Papua senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil *review* atas sistem manajemen risiko ditampilkan dalam laporan eksposur, profil risiko, laporan produk & aktivitas baru, serta laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko.

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko dilakukan secara berkala oleh Komite Pemantau Risiko meliputi aktivitas:
1. *Review* dan *monitoring* implementasi manajemen risiko;
2. Penyusunan Laporan Analisa Risiko dan Kepatuhan secara berkala;
3. Rapat pembahasan terkait risiko di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris;
4. Melakukan pengukuran implementasi budaya risiko melalui *survey* kepada sejumlah responden.

Sedangkan Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko sebagai berikut :
1. Dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan Bank harus mempertimbangkan risiko usaha, maka setiap kebijakan dan aktivitas harus dilakukan kajian manajemen risiko;
2. Secara rutin melakukan kajian terhadap *draft* kebijakan, revisi kebijakan dan produk/aktivitas baru dari satuan kerja operasional;
3. Melakukan sosialisasi *Risk Awareness* dan *Risk Culture* sebagai upaya dalam membangun budaya risiko pada setiap aktivitas;
4. Melakukan pemantauan terhadap posisi Risiko Likuiditas Bank;
5. Melakukan pemantauan terhadap eksposur Risiko Bank;
6. Menilai pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tata Kelola Perusahaan Bank;

Results of the Review conducted on the Risk Management System in 2019

Bank Papua always evaluates the effectiveness of the risk management system. The evaluation includes adjusting the strategy and risk framework as part of the risk management policy, the adequacy of the risk management information system and the adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks. The review results on the risk management system are displayed in the exposure report, risk profile, new product & activity reports, and other reports related to the application of risk management.

An evaluation of the effectiveness of the Risk Management System is carried out periodically by the Risk Oversight Committee including the activities of:
1. *Review and monitor the implementation of risk management;*
2. *Periodic Compilation of Risk and Compliance Analysis Reports;*
3. *Discussion on risk related at the BOD and BOC level;*
4. *Measuring the implementation of risk culture through a survey of a number of respondents.*

Whereas the Bank's Risk Management Division as the Risk Management Work Unit evaluates the effectiveness of the risk management system as follows:
1. *In every decision-making / action the Bank must consider business risks, each policy and activity must be reviewed in risk management;*
2. *Regularly reviewing draft policies, revising policies and new products / activities from operational work units;*
3. *Conducting Risk Awareness and Risk Culture socialization as an effort to build a risk culture in every activity;*
4. *Monitor the position of the Bank's Liquidity Risk;*
5. *Monitored the Bank's risk exposure;*
6. *Assess the implementation of the effectiveness of the risk management system with risk profile reports covering risk management for credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk as stipulated in OJK Regulation Number 18 / POJK. 03/2016 dated 16 March 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
7. *Develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of the implementation of the Bank's Corporate Governance program;*

8. Melaporkan Laporan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum);
9. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko cabang pada seluruh unit operasional Bank yang mana bertanggungjawab menyusun laporan profil risiko cabang dan membuat kajian manajemen risiko yang masih dalam lingkup wewenang cabang;
10. Memberi penugasan kepada masing-masing satuan kerja dan Divisi untuk melakukan penilaian profil risiko Bank dan selanjutnya akan di *review* oleh Divisi Manajemen Risiko Bank.

Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan me*review* hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Papua selama tahun 2019 telah memadai.

Risiko-risiko yang Dihadapi Perusahaan

Terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi Bank dan harus dikelola dengan baik. Kedelapan jenis risiko tersebut diantaranya inherent risk yang meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi.

Berikut penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut dan upaya pengelolaannya.

1. **Risiko Kredit**
   Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi terekspos nya Risiko Kredit, Bank menerapkan kebijakan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian internal dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit
2. **Risiko Pasar**
   Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan metode standar untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia/OJK.

8. Reporting the KPMM (Minimum Capital Requirement) Report;

9. Establish a branch Risk Management work unit in all Bank operational units which is responsible for compiling branch risk profile reports and making risk management studies that are still within the scope of branch authority;

10. Giving assignments to each work unit and Division to conduct an assessment of the Bank's risk profile and subsequently will be reviewed by the Bank's Risk Management Division.

The BOC plays an active role in the implementation of risk management system evaluations by reviewing the results of evaluations conducted by the BOD as the organ responsible for the effectiveness of the implementation of the risk management system. The results of the annual evaluation indicate that risk management at Bank Papua during 2019 was adequate.

Risks Faced by the Company

There are 8 (eight) types of risks faced by the Bank and must be managed properly. The eight types of risk include inherent risk which includes: credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, strategic risk, compliance risk, legal risk and reputation risk.

The following is an explanation of these risks and their management efforts.

1. ***Credit Risk***
   Credit Risk is the risk that occurs due to the failure of the debtor and / or other parties in meeting obligations to the Bank. To anticipate the exposure of Credit Risk, the Bank implements a four eyes principle (separation of functions) policy to improve the reliability of the internal control system in the Implementation of Bank Risk Management, specifically for Credit Risk
2. ***Market Risk***
   Market Risk is the risk in balance sheet and administrative account positions including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices. In measuring market risk, the Bank uses the Standard Method calculation to calculate the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Market Risk. Exchange rate risk arising from exchange rate fluctuations is managed by maintaining a Net Open Position in accordance with Bank Indonesia / OJK regulations.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum untuk Risiko Operasional, Bank menerapkan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar yang merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Bank. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank bersama-sama dengan Divisi Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

3. Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and / or high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain cash flow funding sources that cause Liquidity Risk can be caused by, inter alia:

1. *Inability to generate cash flow from performing assets or from sales of assets including liquid assets; and / or*
2. *Inability to generate cash flow from fund raising, interbank transactions, and loans received.*

4. Operational Risk

Operational Risk is the risk due to inadequate and / or malfunctioning of internal processes, human error, system failures, and / or external events that affect the Bank's operations in order to calculate minimum capital requirements for Operational Risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach (Basic Indicator Approach) Indicator Approach), in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 24 /SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach which is a change in Bank Indonesia Circular Letter Number 11/3 / DPNP dated January 27, 2009 concerning Calculation of Risk Weighted Assets (ATMR) for Operational Risk Calculated using the Basic Indicator Approach (PID).

5. Legal Risks

Legal Risk is a risk due to claims and / or weaknesses in juridical aspects where Legal Risk can be sourced from an agreement made by the Bank. The Bank carries out Legal Risk identification based on risk factors which include lawsuits and the presence of weaknesses in the juridical aspects. Legal Risk Measurement is carried out by the Bank's Risk Management Division together with the Legal Division based on the evaluation report on the analysis of individual legal cases for contingent liabilities arising from lawsuits that occur.

6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *Treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

7. Risiko Kepatuhan

Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia/OJK dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk me-*review* ketentuan Bank dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank Papua sepenuhnya mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenal nasabah (*know your customer Policy*) yang berlaku di Indonesia.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misal pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada Tata Kelola Perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank. Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is the risk due to inaccuracy of the Bank in making and / or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk identification is carried out based on strategic risk factors in certain functional activities, such as credit, Treasury and investment activities as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategic Planning Division as a translation of the BOD General Policy (KUD).

7. Compliance Risk

In identifying compliance risks, the Compliance Division makes a list of regulations and laws that apply to all work units that are adjusted to the provisions of Bank Indonesia / OJK and other applicable external parties. Compliance risk measurement is carried out to measure potential losses caused by non-compliance and the Bank's inability to meet applicable regulations. The magnitude of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to meet all regulations in the past and in the future. These activities include reviewing the Bank's requirements and customer complaints received by the Bank. The Compliance Director is assisted by the Compliance Division to regularly review aspects of the Bank's compliance, and specifically suspicious or improper transactions. Bank Papua fully complies with the anti money laundering law and the know your customer policy in Indonesia.

8. Reputation Risk

Reputational risk is the risk caused by a decrease in the level of stakeholder trust that originates from various activities including events that harm the Bank's reputation (eg negative reporting in the mass media, violations of business ethics and customer complaints) as well as other things that can cause reputation risk, for example weaknesses in Corporate Governance, corporate culture and business practices of the Bank. One of the efforts to control reputation risk is to always maintain customer satisfaction by conducting periodic assessments of service levels conducted by frontliners at each branch office.

Upaya untuk Mengelola Risiko yang Dihadapi Perusahaan

1. Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagai perubahan atas SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit.

2. Pengelolaan Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar pada Bank secara umum ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Sesuai dengan regulasi dan mengingat bank tidak memiliki konsolidasi dengan anak perusahaan, maka pengelolaan risiko pasar hanya mencakup pengelolaan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko suku bunga yang dikelola oleh Bank sebagian besar berasal dari posisi *banking book* dan sebagian kecil berasal dari posisi *trading book*. Sedangkan risiko nilai tukar yang dikelola oleh bank hampir secara keseluruhan berasal dari posisi *banking book*.

Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Bank telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban *Asset and Liability Commitee* (ALCO). Dalam hal ini, ALCO secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Divisi Manajemen Risiko Bank. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Bank melakukan pengukuran risiko pasar dengan

Efforts to Manage the Risks Faced by the Company

1. Credit Risk Management

As a follow up to the application of Pillar 1 Basel II, the Bank has implemented credit risk measurement using the Standardized Approach as stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 42/SEOJK.03/2016 dated 28 September 2016 concerning Guidelines for Calculation of Weighted Assets According to Risk for Credit Risk Using the Standard Approach as a change to SE BI No. 13/6/DPNP dated 18 February 2011 concerning Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (ATMR) for Credit Risk using the Standard Approach. The Bank regularly reviews and updates Risk Management Policy Guidelines and Credit and Financing Policy Guidelines for Bank credit and financing as part of the risk assessment process. Credit risk exposures are monitored from the credit granting process to the credit maturity. Credit risk monitoring includes evaluating credit risk exposure to credit risk limits.

2. Market Risk Management

Market risk management at the Bank in general is aimed at minimizing the negative impact of changes in market conditions on the Bank's assets and capital. In accordance with regulations and bearing in mind that banks do not have consolidation with subsidiaries, market risk management only covers interest rate and exchange rate risk management. Interest rate risk managed by the Bank mostly comes from banking book positions and a small portion comes from trading book positions. While the exchange rate risk managed by banks almost entirely originates from the banking book position.

Related to market risk management, the Bank has an Asset and Liability Committee (ALCO) Asset and Liability Management Committee. In this regard, ALCO periodically discusses, among others, interest rates and market risk management at the Bank, especially those originating from the banking book position. As part of market risk management, the Bank identifies, measures, monitors and controls market risk, which is carried out by the business unit and / or the Bank's Risk Management Division. One of the market risk identification is done for each product or activity that is included in the category of new products or activities. The Bank measures market risk using the standard method as regulated by the regulator

menggunakan metode standar sebagaimana yang diatur oleh regulator dan analisis sensitivitas. Pengukuran risiko pasar dengan metode standar ditujukan untuk menghitung Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari *portofolio trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Dalam rangka mengukur risiko suku bunga, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank, dengan asumsi bahwa suku bunga pada kurva imbal hasil mengalami perubahan paralel. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Bank. Guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Bank melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank.

and sensitivity analysis. Market risk measurement using the standard method is intended to calculate the Market Risk Minimum Capital Requirement (KPMM). Portfolios taken into account in determining the market risk CAR are comprised of a trading book portfolio for interest rate risk and a trading book portfolio and a banking book for exchange rate risk. In order to measure interest rate risk, the sensitivity analysis conducted by the Bank is aimed at measuring the impact of changes in market interest rates on bank earnings (losses) and equity, assuming that interest rates on the yield curve experience parallel changes. Whereas in order to measure exchange rate risk, a sensitivity analysis is conducted by the Bank to measure the impact of exchange rate changes on the Bank's earning (loss). To complement market risk measurement with standard methods and sensitivity analysis, the Bank conducts stress testing to assess the Bank's resilience in the face of extreme changes in interest rates and exchange rates, with scenarios that refer to regulatory provisions and bank internal scenarios.

Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko pasar, Bank melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

In order to control or limit market risk exposure, the Bank monitors policies, procedures, and limits, a comprehensive and effective management information system to maintain a healthy internal condition of the Bank.

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai bagian pengelolaan risiko likuiditas, Bank memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban *Asset and Liability Commitee* (ALCO), melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Bank. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Bank memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam rangka mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala, yang dilakukan

3. Liquidity Risk Management

As part of liquidity risk management, the Bank has an Asset and Liability Committee (ALCO) Asset and Liability Management Committee, manages liquidity management and periodically discusses liquidity risk management at the Bank. As a guideline in managing liquidity risk, the Bank has a Liquidity Risk Management Policy Manual, which is part of the Bank's Risk Management Policy Guidelines. The Liquidity Risk Management Policy Guidelines regulate, among others, active supervision of the BOC and BOD in the application of liquidity risk management, liquidity risk management processes, and policies, procedures and determination of liquidity risk limits. The Bank identifies, measures, monitors and controls liquidity risk. Liquidity risk identification is basically intended to find out the amount and trend of liquidity needs as well as funding sources available to meet the needs. In order to manage liquidity risk, the Bank regularly monitors liquidity risk, which is carried out by the Treasury Division. Bank Papua has optimized

oleh Divisi *Treasury*. Bank Papua telah mengoptimalkan pengelolaan *Treasury* untuk menjaga likuiditas dengan melakukan penempatan dana pada beberapa instrument keuangan yang lebih likuid.

4. **Pengelolaan Risiko Operasional**

   Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Bank. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. Divisi Manajemen Risiko Bank memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank Papua memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko operasional. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional, Bank secara berkala melakukan *review* terhadap *Business Contiunity Plan* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum sebagai perubahan atas SE BI Nomor : 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank umum.

5. **Pengelolaan Risiko Hukum**

   Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain guna memeriksa kembali objektifitas dan validitas hubungan dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

6. **Pengelolaan Risiko Stratejik**

   Identifikasi Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *Treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan.

the management of Treasury to maintain liquidity by placing funds in several more liquid financial instruments.

4. ***Operational Risk Management***

   Mitigation of Operational Risk is carried out by all Bank working units. Compliance with policies and procedures is one form of Operational Risk mitigation. The Bank's Risk Management Division ensures that the Bank has adequate risk management policies and procedures in carrying out transactions and activities in an accurate, efficient and timely manner. Bank Papua ensures that it has sufficient capital to meet operational risks. Banks refer to Bank Indonesia and OJK regulations in calculating capital adequacy for operational risks. In order to improve the Quality of Implementation of Operational Risk Management, the Bank periodically reviews the Business Contiunity Plan in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 38 / POJK.03 / 2016 dated 1 December 2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks as a change to SE BI Number: 9/30/DPNP dated December 12, 2007 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by commercial banks.

5. ***Legal Risk Management***

   Legal Risk Monitoring is carried out by evaluating the effectiveness of the implementation of policies, procedures and compliance with policies, legal regulations and Bank limit provisions. Monitoring is carried out regularly for all Legal Risk positions. In implementing Legal Risk control, the Legal Division provides legal input and recommendations to each division and work unit and conducts periodic reviews of contracts and agreements between the Bank and other parties to re-examine the objectivity and validity of the relationships in the contracts and agreements.

6. ***Strategic Risk Management***

   Strategic Risk identification is carried out based on Strategic Risk factors in certain functional activities, such as credit, Treasury and investment activities as well as operations and services through a business plan prepared as an elaboration of the BOD General Policy (KUD). Strategic Risk Measurement is carried out based on the achievement of the Bank's performance by comparing actual results with predetermined targets.

7. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk me-*review* semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, Unit kerja Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan

8. Pengelolaan Risiko Reputasi

Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*Disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Bank dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *Assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank.

7. Compliance Risk Management

Compliance Risk measurement is carried out on potential losses caused by non-compliance and the Bank's inability to meet the applicable external provisions. The magnitude of Compliance Risk is estimated based on the Bank's ability to meet all regulations in the past and in the future. These activities include reviewing all penalties, litigation, and customer complaints that have been received by the Bank. In controlling Compliance Risk, the Risk Management Unit and the Compliance Division are tasked with evaluating the effectiveness of the implementation of Compliance Risk management by regularly monitoring all types of activities that have the potential to cause Compliance Risk

8. Reputation Risk Management

Reputation Risk identification is carried out on risk factors inherent in functional activities which include disclosure of material information (Disclosure requirements), customer complaints about Bank services, the behavior of Bank employees in serving customers, and the Bank's communication system and fulfills all applicable regulations. Reputation Risk measurement is carried out based on the results of the Assessment of factors that affect the Bank's reputation.

Selain berupaya mengelola risiko, dilaksanakan pula mitigasi risiko Bank Papua di tahun 2019 sebagai berikut :

In addition to trying to manage risk, Bank Papua risk mitigation is also carried out in 2019 as follows:

No	Bidang Kegiatan *Field of Activities*	Tindakan Mitigasi Risiko	*Risk Mitigation Measures*
I	Bidang Perkreditan *Loan Field*	• Bank akan berfokus pada kredit berisiko rendah berupa kredit konsumtif, terutama kepada instansi yang *payrol* gajinya dibayarkan melalui bank Papua, sedangkan pemberian kredit produktif/ komersial akan dibatasi dengan sangat hati-hati dengan Komposisi kredit konsumtif yang akan lebih besar daripada komposisi kredit produktif sebesar dari total portofilio kredit.	• *The bank will focus on low risk Loan in the form of consumer loans, especially to payroll institutions whose salaries are paid through Bank Papua, while the provision of productive / commercial loans will be very carefully limited with the composition of consumer loans which will be greater than the composition of performing loans of total Loan portfolio.*
		• Bank akan lebih fokus untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penyelesaian kredit-kredit yang telah dilakukan hapus buku.	• *The bank will be more focused on rescue and settlement of non-performing loans and settlement of loans that have been deleted.*
		• Bank wajib menghindari risiko konsentrasi kredit	• *Banks must avoid Loan concentration risks*
II	Bidang Penghimpunan Dana *Fundraising Field*	• Kegiatan penghimpunan dana akan lebih difokuskan pada dana yang bersumber dari masyarakat (Giro, Tabungan dan Deposito) yang memiliki *maturity* yang lebih panjang dan tetap mempertahankan dana Pemda.	• *Fund raising activities will focus more on community-funded funds (Demand Deposits, Savings and Deposits) that have a longer maturity and retain local government funds.*
		• Komposisi sumber pendanaan bank diharapkan akan lebih didominasi oleh dana masyarakat yang memiliki *maturity* yang lebih panjang jika dibandingkan dengan Dana Pemda dalam rangka meminimalisir *mismatch* sumber dan penggunaan dana untuk peningkatan keamanan likuiditas bank.	• *The composition of bank funding sources is expected to be dominated by public funds that have a longer maturity compared to the Regional Government Funds in order to minimize the mismatch of sources and uses of funds to increase bank liquidity security.*
		• Komposisi sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat diharapkan mencapai target 60% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).	• *The composition of bank funding sources collected from the public is expected to reach the target of 60% of Third Party Funds (TPF).*

No	Bidang Kegiatan *Field of Activities*	Tindakan Mitigasi Risiko	*Risk Mitigation Measures*
III	Bidang *Treasury* *Treasury Field*	• Karena kondisi Bank Papua yang masih lebih fokus sebagai bank konvensional, sehingga kegiatan pengelolaan dana berupa pembelian Surat berharga pemerintah. • Penempatan dana di pasar uang pada Bank yang memiliki kualitas rating dan tingkat kesehatan yang baik. • Menjaga likuiditas yang cukup	• *Because the condition of Bank Papua is still more focused as a conventional bank, so that fund management activities are in the form of purchasing government securities.* • *Placement of funds on the money market at banks that have good quality rating and good health.* • *Maintain sufficient liquidity*
IV	Bidang Pengembangan Produk *Product Development Field*	• Pembatasan produk dan aktivitas baru. • Pembatasan Pembukaan Jaringan Kantor, kecuali yang direkomendasikan Pemerintah Daerah. • Melakukan kaji ulang terhadap jaringan kantor diluar Papua dan Papua Barat. • Untuk sementara waktu hanya dapat melakukan peningkatan kualitas terhadap produk yang sudah ada (*existing*). • Pembatasan kegiatan dimaksud akan disesuaikan dengan status pengawasan Bank.	• *Restrictions on new products and activities.* • *Restrictions on Office Network Opening, except those recommended by the Regional Government.* • *Conduct a review of office networks outside Papua and West Papua.* • *For the time being, you can only improve the quality of existing products.* • *Restrictions on said activities will be adjusted to the supervision status of the Bank.*
V	Bidang Teknologi Informasi *Information Technology Field*	• Pengembangan Bisnis Berbasis teknologi. • Peningkatan Layanan Bank dengan memaksimalkan *core banking system* olibs 724. • Mempersiapkan *system* teknologi baru untuk jangka panjang (*core banking*) yang berdaya saing tinggi. • Menyelesaikan aplikasi untuk ketersedian Data *Warehouse* untuk kebutuhan analisis dalam rangka pengembangan produk. • Melakukan uji coba Rencana pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*).	• *Technology-Based Business Development.* • *Improving Bank Services by maximizing the 724 core banking system.* • *Preparing a new competitive system for new long-term technology (core banking).* • *Complete the application for the availability of DWH for analysis needs in the context of product development.* • *Test the Disaster Recovery Plan.*
VI	Bidang Investasi *Investment Field*	Kegiatan investasi akan dilakukan pembatasan dalam rangka pemulihan Bank sesuai dengan saran dari Regulator sebagai berikut: • Melakukan pembatasan terhadap investasi dengan nilai diatas Rp1 Milyar. • Khusus terhadap investasi pembangunan kantor Cabang Bintuni akan dikoordinasikan. • Tidak Melakukan Pembukaan Jaringan Kantor Baru, kecuali rekomendasi Pemerintah Daerah. • Melakukan *review* terhadap kontrak dengan pihak ketiga, terutama sewa mobil untuk pejabat dan operasional.	*Investment activities will be restricted in the context of bank recovery in accordance with the advice of the Regulator as follows:* • *Do restrictions on investments with a value above Rp1 billion.* • *Particularly for investment in development of the Bintuni Branch office, it will be coordinated.* • *Not Opening New Office Networks, except the recommendation of the Regional Government.* • *Reviewing contracts with third parties, especially car rentals for officials and operations.*
VII	Bidang Pengendalian *Control Field*	• Melakukan *Review* kebijakan dan prosedur bank agar sesuai dengan ketentuan. • Menindaklanjuti temuan auditor internal dan eksteren. • Meningkatkan permodalan Bank sesuai peraturan otoritas. • Penyempurnaan Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank. • Menyelesaikan kasus-kasus Fraud. • Menyelesaikan kasus kasus hukum. • *Zero Tolerance For Fraud*.	• *Review bank policies and procedures to comply with the provisions.* • *Following up on the findings of internal and external auditors.* • *Increase Bank capital in accordance with regulatory authorities.* • *Improvement of risk profile and bank soundness.* • *Complete Fraud cases.* • *Complete a legal case.* • *Zero Tolerance For Fraud.*

Pengelola Sistem Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Papua dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Divisi Manajemen Risiko Bank yang bertanggungjawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

Risk Management System Organizer

The organization in managing risk management at Bank Papua is led by a Director who is responsible for risk management, namely the Compliance Director. To assist the Compliance Director, the Bank has formed the Bank's Risk Management Division, which reports to the Board of Director, to carry out an independent risk management evaluation function.

Direktorat Direktur Kepatuhan

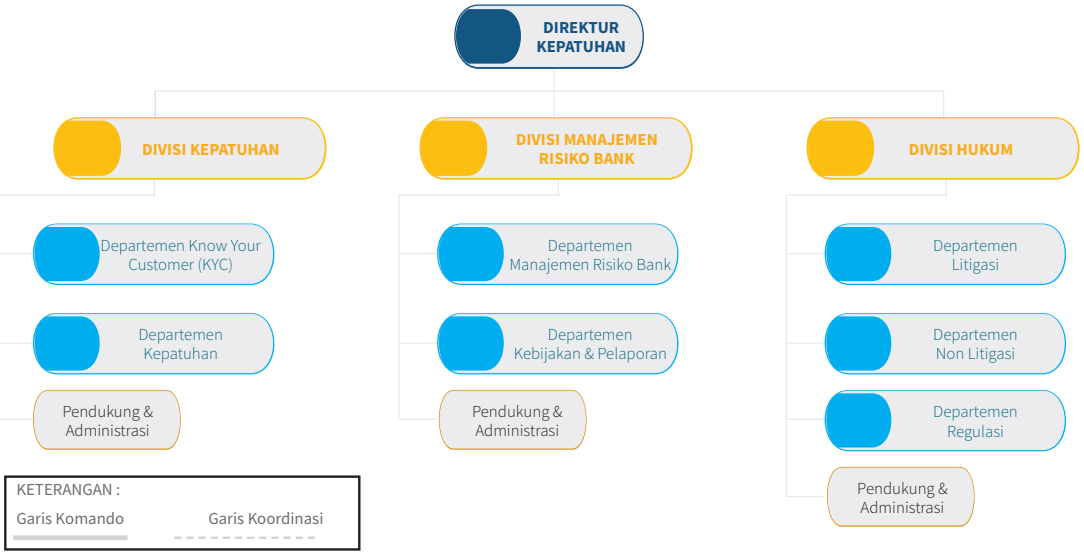

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank (MRB)

Organizational Structure of the Bank's Risk Management Division (MRB)

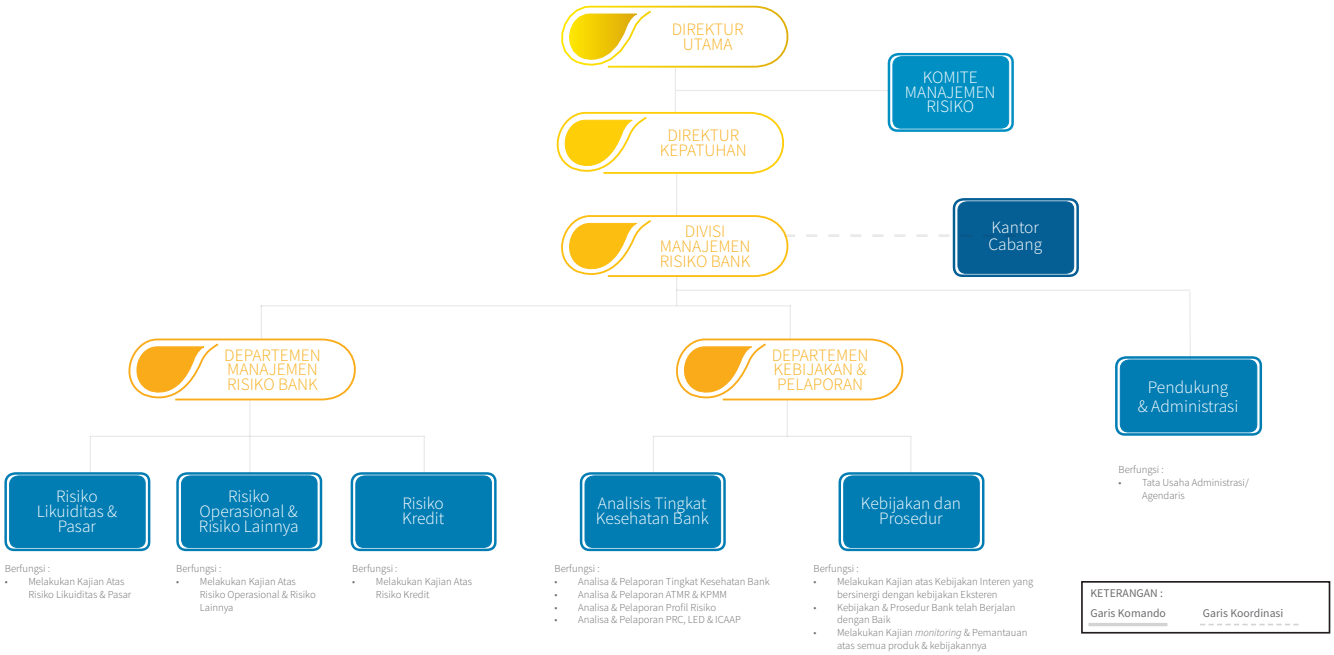

Divisi Manajemen Risiko Bank terdiri atas :

1. Departemen Manejemen Risiko Bank yang membawahi bagian Risiko Likuiditas & pasar, Risiko Operasional dan Risiko lainnya, serta Risiko Kredit.
2. Departemen Pendukung & Pelaporan yang terdiri atas bagian Analisis Tingkat Kesehatan Bank, Pendukung & Administrasi serta Kebijakan & Prosedur

The Bank's Risk Management Division consists of:

1. *The Bank's Risk Management Department which oversees Liquidity & market Risks, Operational Risks and other Risks, and Credit Risks.*
2. *Supporting & Reporting Department which consists of the Bank Soundness, Supporting & Administrative Analysis and Policies & Procedures*

Struktur organisasi yang disusun disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal Divisi Audit Internal (DAI) dan Divisi Manajemen Risiko Bank independen terhadap satuan kerja bisnis Bank. Bank memiliki Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Bank yang independen.

The organizational structure compiled is accompanied by clarity of duties and responsibilities in general as well as related to the application of Risk Management in all work units adjusted to business objectives and policies as well as the size and complexity of the Bank's business activities. The organizational structure is designed to ensure that the work units that carry out the internal control function (SKAI) and the Risk Management Division are independent of the Bank's business units. The Bank has an independent Risk Management Committee and Risk Management Division.

Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat Risiko yang akan diambil Bank serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

The adequacy of the authority delegation framework is adjusted to the characteristics and complexity of the product, the level of risk to be taken by the Bank and the experience and expertise of the personnel concerned. Delegated authority must be regularly reviewed to ensure that the authority is in accordance with the current conditions and the level of performance of the relevant officials.

Tugas dan wewenang :

Duties and authorities:

Dewan Komisaris	a. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	*a. Evaluate and decide on Board of Director' requests related to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.*
	b. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;	*b. Approve risk management policies including risk management strategies and frameworks determined in accordance with the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) of the Bank;*
	c. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;	*c. Evaluate risk management policies and strategies at least 1 (one) time in 1 (one) year or in a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly affect the Bank's business activities;*
	d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif;	*d. Evaluate the accountability of the Board of Director and provide guidance on improvements to the implementation of risk management policies on a regular basis. Evaluations are carried out in order to ensure that the Board of Director manage the Bank's activities and risks effectively;*
	e. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.	*e. Ensure that risk management policies and processes are carried out effectively and integrated in the overall risk management process.*

Direksi	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank termasuk laporan mengenai profil risiko;	*a. Responsible for implementing policies, strategies and risk management frameworks that have been approved by the Board of Commissioners and evaluating and providing direction based on reports submitted by the Risk Management Division including reports on risk profiles;*
	b. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif dan strategi manajemen risiko;	*b. Develop a risk management culture including risk awareness at all levels of the organization, including among others adequate communication to all levels of the organization about the importance of effective internal control and risk management strategies;*
	c. Memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Divisi Manajemen Risiko Bank yang melakukan identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	*c. Ensuring that the risk management function has been implemented independently as reflected by, among others, the separation of functions between the Risk Management Division which identifies risk measurement, monitoring and control and the work units that carry out and complete transactions.*
	d. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian risiko; 2. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; 3. Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.	*d. Conduct periodic reviews to ensure:* *1. The accuracy of the risk assessment methodology;* *2. Adequacy of risk management information system implementation;* *3. Appropriateness of risk management policies and procedures as well as setting risk limits.*
	e. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;	*e. Develop written and comprehensive policies, strategies and risk management frameworks, including overall risk limits and per type of risk, taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance in accordance with the Bank's condition and calculates the impact of risk to capital adequacy. After obtaining approval from the Board of Commissioners, the Board of Director sets the policy, strategy and risk management framework;*
	f. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;	*f. Develop, establish and update procedures and tools to identify, measure, monitor and control risks;*
	g. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/ atau profil risiko secara signifikan;	*g. Evaluate and / or update policies, strategies, and risk management framework at least 1 (one) time in 1 (one) year or in a more frequent frequency in the event of changes in factors affecting the Bank's business activities, risk exposure, and / or profile significant risk;*
	h. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;	*h. Establish organizational structure, including clear authority and responsibilities at each level of position related to the application of risk management;*
	i. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;	*i. Ensure that all material risks and impacts arising from the said risks have been followed up and periodically submit accountability reports to the Board of Commissioners, including including reports on developments and issues related to material risks accompanied by corrective measures that have been, are being and will be carried out;*
	j. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal (DAI);	*j. Ensuring the implementation of corrective measures for problems or irregularities in the Bank's business activities that are discovered by the Internal Audit Division (DAI);*
	k. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya (termasuk kompetensinya) untuk mengelola dan mengendalikan risiko.	*k. Ensuring adequate support of resources (including competence) to manage and control risk.*
Komite Manajemen Risiko	a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko;	*a. Develop policies, strategies and guidelines for implementing risk management;*
	b. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;	*b. Improve or improve the implementation of risk management based on the results of evaluating the implementation of risk management;*
	c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur norma	*c.. Establish matters related to business decisions that deviate from the norm procedure*

Penjelasan lebih lengkap tentang tugas dan wewenang Divisi Manajemen Risiko Bank beserta komite-komite dijelaskan pada bagian tatakelola manajemen risiko.

A more complete description of the duties and authority of the Risk Management Division Bank and committees is explained in the section on risk management.

Profil Divisi Manajemen Risiko Bank

Bank's Risk Management Division Profile

Usman Badiaraja Saragih, S.AP

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank

Bank Risk Management Division Leader

Periode Jabatan *Periode Jabatan*	30 April 2018.- sekarang	*April 30, 2018.- now*
Usia *Age*	50 tahun. Lahir di Sibuntuon, pada tanggal 10 Juni 1969.	*50 years. Born in Sibuntuon, on June 10, 1969.*
Domisili *Domicile*	Jayapura, Indonesia	*Jayapura, Indonesia*

Pendidikan *Education*	Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di STIA LAN Jakarta pada tahun 2009.	*Obtained his Bachelor of Public Administration degree at STIA LAN Jakarta in 2009.*
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Tahun 2019 *Training and Educaton had followed in 2019*	• 08 Februari 2019, Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • 30 Agustus 2019, Persiapan Implementasi PSAK 71 • 26 Oktober, *Ext-Workshop & Discussion* metode *stress testing* untuk mengukur risiko pasar, likuiditas dan kredit.	• *February 8, 2019, Preparation of a Sustainable Financial Action Plan.* • *August 30, 2019, Preparation for the Implementation of PSAK 71* • *October 26th, Ext-Workshop & Discussion stress testing methods to measure market risk, liquidity and Loan.*
Pengalaman dan Jabatan di Perusahaan Lain *Experience and Position in Other Companies*	Tidak memiliki Pengalaman dan Jabatan di perusahaan lain.	*Does not have experience and position in other companies.*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komersial & Korporasi sesuai SK No. 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.	*Previously he served as Head of the Commercial & Corporate Division in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*
Sertifikat Manajemen Risiko *Risk Management Certificate*	Manajemen Risiko Tingkat 4 Penyelenggara BSMR pada November 2019.	*4th Level Risk Management Organizers of BSMR in November 2019.*

Adapun pendidikan/pelatihan yang diikuti selama tahun 2019 adalah :

The education / training has followed during 2019 is:

No	Nama Pendidikan *Training Type*	Penyelenggara *Organizer*	Pelaksanaan *Implementation*
1	Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Dhaksara *Institute*	Jakarta, 08 Februari 2019
2	Seminar PSAK 71	PT. *Risk Management* Guard (RMG)	Jakarta 06 Agsustus 2019
3	EXT-*Workshop & Discussion* Metode *Stress Testing* untuk mengukur Risiko Pasar, Likuditas dan Kredit	Infobank *Institute*	Jakarta, 26 Oktober
4	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	BI & OJK	Jakarta, 03 Desember 2019

Tatakelola Manajemen Risiko

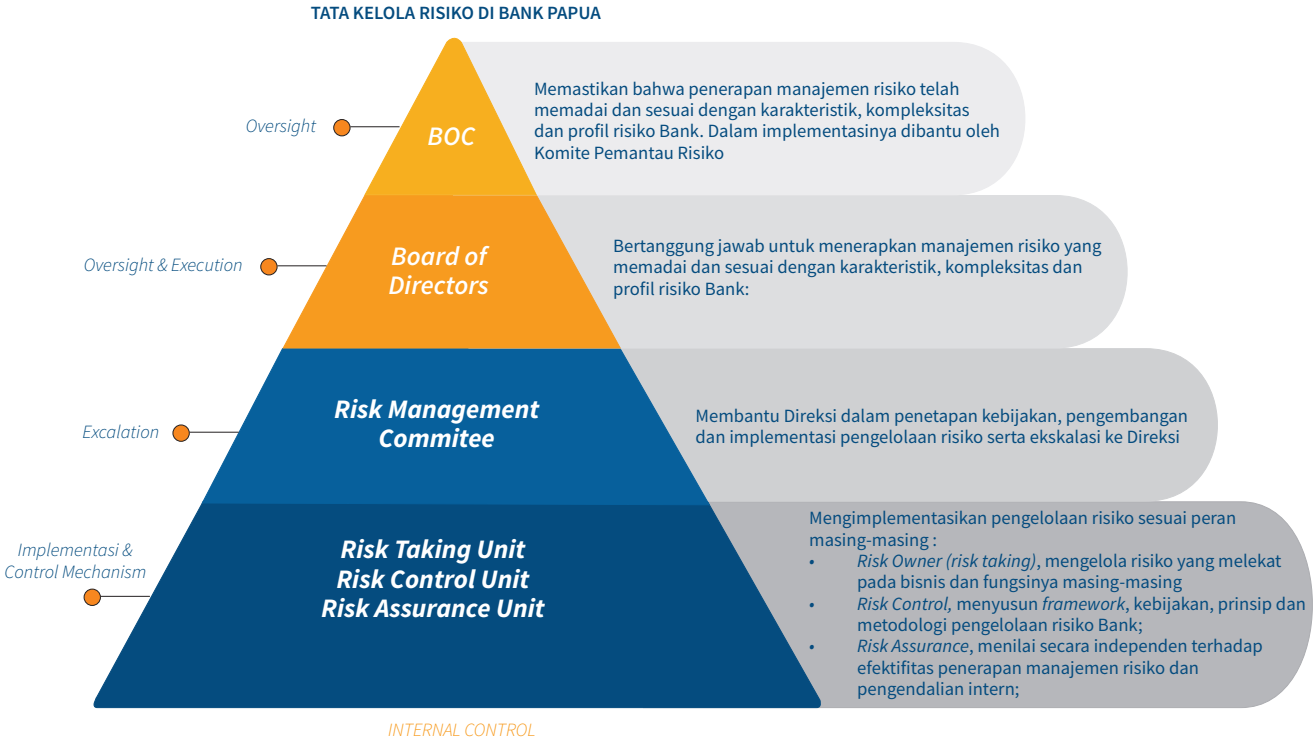

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan dan mengawasi tata kelola manajemen risiko di Bank sesuai dengan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang Bank, anggaran dasar maupun peraturan lain yang berlaku.

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dapat dibantu oleh komite-komite risiko yang dibentuk berdasarkan kebutuhan, untuk menjamin objektifitas dan mutu dalam pengambilan keputusan.

Komite risiko yang paling tinggi adalah Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Secara operasional, pengelolaan risiko dilakukan bersama-sama oleh seluruh pegawai dalam Bank dalam bentuk *Three Lines of Defense in Risk Management* yang terdiri dari:

a. *Risk Taking Unit.*
b. Divisi Manajemen Risiko Bank.
c. Divisi Audit Internal (DAI).

The Board of Commissioners and Board of Director are responsible for planning, determining, implementing and overseeing risk management in the Bank in accordance with the authority stipulated in the Bank's laws, articles of association and other applicable regulations.

Related to the application of risk management, the Board of Commissioners and the Board of Director can be assisted by risk committees formed based on needs, to ensure objectivity and quality in decision making.

The highest risk committee is the Risk Management Committee which consists of a majority of Board of Director and related executive officers. Operationally, risk management is carried out jointly by all employees in the Bank in the form of Three Lines of Defense in Risk Management consisting of:

a. Risk Taking Unit.
b. Bank's Risk Management Division.
c. Internal Audit Division (DAI).

Tugas dan Tanggung Jawab

a. *Risk Taking Unit*

Risk Taking Unit adalah unit Perusahaan yang menginisiasi dan mengeksekusi transaksi, baik yang berkaitan dengan produk layanan Nasabah maupun aktivitas Bank yang mengandung risiko antara lain sebagai berikut;

1. Aktivitas *front office* seperti:
   i. Mengakuisisi Nasabah.
   ii. Menawarkan, menegosiasikan, mengemas produk, menjual dan merealisasikan transaksi.
2. Aktivitas *back office* seperti:
   i. Memproses transaksi termasuk menerima dan melakukan pembayaran, mencatat, membukukan, menagih, mengadministrasikan, menyelesaikan, mengkonsolidasikan dan melaporkan transaksi.
   ii. Aktivitas penunjang seperti: perencanaan, pengembangan produk, perancangan program, pengembangan sistem teknologi, rekrutmen dan pelatihan pegawai, komunikasi serta pembangunan cabang/jaringan.

Tugas utama *Risk Taking Unit* adalah mengembangkan dan melaksanakan rencana usaha sesuai dengan strategi dan tujuan Bank, serta memastikan bahwa manajemen dan kontrol risiko di dalam lingkup unit usaha telah memadai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab *Risk Taking Unit*:

1. Bertanggung jawab mencapai target usaha sesuai fungsinya dengan memperhatikan prinsip *risk and return*, termasuk mengelola kualitas aset, melakukan pencadangan kerugian, penetapan harga, pengelolaan biaya, pendapatan, efisiensi proses dan sebagainya.
2. Mematuhi kebijakan, prosedur dan limit.
3. Melaporkan eksposur risiko kepada Divisi Manajemen Risiko Bank.
4. Memberi masukan ke Divisi Manajemen Risiko Bank untuk pengembangan infrastruktur manajemen risiko,
5. Organisasi dan Divisi Divisi Manajemen Modal Manusia, kebijakan, metodologi, sistem dan data serta pelaporan.
6. Melakukan identifikasi risiko terhadap aktivitas usaha maupun perkembangan suatu produk serta melaporkannya kepada manajemen dan Divisi Manajemen Risiko Bank.

Duties and Responsibilities

a. *Risk Taking Unit*

Risk Taking Unit is a unit of the Company that initiates and executes transactions, both relating to customer service products and activities of the Bank that contain risks, among others, as follows;

1. *Front office activities such as:*
   i. *Acquiring a Customer.*
   ii. *Offer, negotiate, package products, sell and realize transactions.*
2. *Back office activities such as:*
   i. *Process transactions including receiving and making payments, recording, recording, billing, administering, completing, consolidating and reporting transactions.*
   ii. *Supporting activities such as: planning, product development, program design, technology system development, employee recruitment and training, communication and branch / network development.*

The main task of the Risk Taking Unit is to develop and implement a business plan in accordance with the strategy and objectives of the Bank, and ensure that risk management and control within the scope of the business unit is adequate and meets the applicable regulations.

Authority and Responsibilities of Risk Taking Unit:

1. *Responsible for achieving business targets according to their function by taking into account the principle of risk and return, including managing asset quality, carrying out losses, pricing, managing costs, revenue, process efficiency and so on.*
2. *Comply with policies, procedures and limits.*
3. *Reporting risk exposures to the Risk Management Division.*
4. *Provide input to the Risk Management Division for the development of risk management infrastructure*
5. *HR organizations and divisions, policies, methodologies, systems and data and reporting.*
6. *Identifying risks to business activities and product developments and reporting them to management and the Bank Risk Management Division.*

b. Divisi Manajemen Risiko Bank

Divisi Manajemen Risiko adalah suatu unit kerja bersifat independen yang bertanggungjawab untuk pengembangan dan penerapan manajemen risiko, termasuk menilai kecukupan infrastruktur manajemen risiko yang dibutuhkan.

Ruang lingkup kerja unit ini meliputi sebagai berikut:

1. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka, falsafah dan strategi serta program manajemen risiko.
2. Mengkaji dan mengembangkan metode identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko.
3. Memantau dan mengukur eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional serta dampaknya terhadap permodalan Bank.

Di samping hal-hal di atas, Divisi Manajemen Risiko Bank juga turut memantau dan mengkaji ulang pencapaian target usaha dari segi risiko serta mendukung unit usaha dalam bentuk memberi masukan atas risiko yang dihadapi.

Agar program kerja dan output Divisi Manajemen Risiko Bank selaras dengan tujuan Bank, maka Divisi Manajemen Risiko Bank harus memiliki Visi, Misi dan Tujuan.

1. Visi Manajemen Risiko Bank
   Membantu Manajemen Bank dalam penerapan manajemen risiko yang optimal yang mendukung pencapaian kinerja dan strategi Bank yang berkelanjutan.
2. Misi Manajemen Risiko Bank
   i. Mendukung aktivitas pengambilan risiko sesuai prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan *risk and return* melalui alokasi modal yang ekonomis dan tepat.
   ii. Mendorong terciptanya budaya risiko kepada seluruh jajaran organisasi guna meningkatkan *risk awareness*.
   iii. Selalu melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko dengan melakukan *benchmarking* dengan *best practices*.
3. Tujuan Divisi Manajemen Risiko Bank
   Tujuan dari Divisi Manajemen Risiko Bank adalah mengelola risiko serta meyakinkan bahwa proses manajemen risiko berjalan dengan baik melalui penyediaan hal-hal sebagai berikut:
   i. Infrastruktur manajemen risiko
   ii. *Tools*/model/metode
   iii. Analisa risiko
   iv. Laporan-laporan
   v. Alternatif mitigasi risiko

b. Bank Risk Management Division

The Risk Management Division is an independent work unit that is responsible for developing and implementing risk management, including assessing the adequacy of the required risk management infrastructure.

The scope of work of this unit includes the following:

1. *Review and recommend a framework, philosophy and strategy and risk management program.*
2. *Review and develop methods of identification, measurement, and risk control.*
3. *Monitor and measure overall risk exposure, per risk type and per functional activity and their impact on the Bank's capital.*

In addition to the above matters, the Risk Management Division also monitors and reviews the achievement of business targets in terms of risk and supports business units in the form of providing input on the risks faced.

In order for the work program and output of the Risk Management Division to be in line with the objectives of the Bank, the Risk Management Division must have a Vision, Mission and Objectives.

1. *Vision of the Bank Risk Management Division*
   Assist the Bank's Management in implementing optimal risk management that supports the achievement of the Bank's performance and sustainable strategies.
2. *Mission of the Bank Risk Management Division*
   i. Supporting risk-taking activities according to prudential principles by paying attention to risk and return through an economical and appropriate capital allocation.
   ii. Encourage the creation of a risk culture for all levels of the organization in order to increase risk awareness.
   iii. Always make improvements to the risk management process by benchmarking with best practices.
3. *Objectives of the Risk Management Division*
   The purpose of the Risk Management Division is to manage risk and ensure that the risk management process runs well through the provision of the following:
   i. Risk management infrastructure
   ii. Tools / models / methods
   iii. Risk analysis
   iv. Reports
   v. Alternative risk mitigation

Tugas utama Divisi Manajemen Risiko Bank adalah sebagai penggerak dalam penerapan manajemen risiko secaramenyeluruh dan efektif melalui penyediaan infrastruktur termasuk kebijakan, metodologi dan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

4. Wewenang dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko Bank :
   a. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
   b. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan internal (internal model);
   c. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
   d. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan dan Komite
   e. Manajemen Risiko secara berkala.
   f. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
   g. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
   h. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
   i. Memantau implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
   j. Melakukan pemantauan posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko dan per jenis kegiatan fungsional.
   k. Melakukan stress testing guna mengetahui dampak perubahan kondisi eksternal yang cukup signifikan terhadap kinerja dan permodalan Bank.
   m. Melakukan pengkajian terhadap usulan aktifitas dan/ atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk melakukan aktifitas dan/ atau produk baru, termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan.
   n. Memberikan rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dimiliki Bank

The main task of the Risk Management Division is to act as a mover in the implementation of overall and effective risk management through the provision of infrastructure, including policies, methodologies and adequate resources to identify, measure, monitor and control risk.

4. *Authority and responsibilities of the Risk Management Division:*
   a. *Conducting periodic reviews of the risk management process;*
   b. *Evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure risk, for Banks that use the model for internal purposes (internal models);*
   c. *Provide recommendations to the operational work units (risk-taking unit) and / or to the Risk Management Committee, in accordance with their authority;*
   d. *Prepare and submit a risk profile report to the President Director or Compliance Director and the Committee*
   e. *Periodic Risk Management.*
   f. *Provide input to the Board of Director in the preparation of policies, strategies and risk management frameworks;*
   g. *Develop procedures and tools for identification, measurement, monitoring and risk control;*
   h. *Design and implement the tools needed in the application of risk management;*
   i. *Monitor the implementation of risk management strategies recommended by the Risk Management Committee and those approved by the Board of Director.*
   j. *Monitor the position or overall risk exposure (composite), per type of risk and per type of functional activity.*
   k. *Conduct stress testing to determine the impact of changes in external conditions that are quite significant to Bank performance and capital.*
   m. *Reviewing proposed activities and / or new products proposed or developed by a particular unit in the Bank. The assessment is focused primarily on aspects of the Bank's ability to carry out new activities and or products, including the systems and procedures used and their impact on overall risk exposure.*
   n. *Provide recommendations regarding the amount or maximum risk exposure the Bank can have to RTU and to the Risk Management Committee, which the Bank can*

kepada RTU dan kepada Komite Manajemen Risiko, yang dapat dimiliki Bank kepada *Risk Taking Unit* dan kepada Komite Manajemen Risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

o. Mengevaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko dalam hal Bank menggunakan model untuk keperluan internal.

p. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat maka frekuensi laporan harus ditingkatkan.

q. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka, falsafah dan strategi serta program manajemen risiko.

r. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
   - kecukupan kerangka manajemen risiko;
   - keakuratan metodologi penilaian risiko;
   - kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

c. Divisi Audit Internal (DAI)

Divisi Audit Internal (DAI) adalah Unit independen non-eksekutif yang fungsi utamanya melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk verifikasi kecukupan infrastruktur, validasi model dan proses manajemen risiko. Manajemen harus menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal dan selanjutnya melakukan serangkaian tindakan korektif.

Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan kepada Direksi. Bila temuan tersebut signifikan, Direksi menetapkan jangka waktu perbaikan dan menugaskan Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau perkembangan efektivitas pelaksanaan tindakan korektif yang diambil.

Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal (DAI): Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam kebijakan dan proses manajemen risiko secara menyeluruh.

a. Memastikan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik diseluruh aktivitas Bank.

b. Melakukan validasi dan *review* berkala terhadap metodologi pengukuran risiko seperti *Internal Loan Rating*,

c. *Value at Risk* dan lain-lain.

have to the Risk Taking Unit and to the Risk Management Committee in accordance with its authority.

o. Evaluate the accuracy and validity of the data used by the Bank to measure risk in the event that the Bank uses a model for internal purposes.

p. Prepare and submit risk profile reports to the Board of Director and Risk Management Committee on a regular basis or at least quarterly. If market conditions change rapidly, the frequency of reports must be increased.

q. Review and recommend frameworks, philosophies and strategies and risk management programs.

r. Carry out periodic reviews with a frequency that is adjusted to the needs of the Bank, to ensure:
   - *the adequacy of the risk management framework;*
   - *the accuracy of the risk assessment methodology;*
   - *the adequacy of the risk management information system.*

c. Internal Audit Division (DAI)

Internal Audit Division (DAI) is an independent non-executive unit whose main function is to evaluate the implementation of risk management and internal control systems, including verification of infrastructure adequacy, model validation and risk management processes. Management must follow up on internal and external audit findings and then take a series of corrective actions.

Audit findings that have not been followed up must be informed to the Board of Director. If the findings are significant, the Board of Director determines the time period for improvement and assigns the Internal Audit Division (DAI) to monitor the progress of the effectiveness of the corrective actions taken.

Authority and Responsibilities of the Internal Audit Division (DAI): Identify things that need improvement in overall risk management policies and processes.

a. Ensuring that the risk management process has been running well throughout all Bank activities.

b. Conduct validation and periodic reviews of risk measurement methodologies such as Internal Loan Rating,

c. Value at Risk and others.

Prosedur Sistem Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko pada setiap aktivitas fungsional dan operasional yang berpotensi merugikan Bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

a. Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif;
b. Mencakup seluruh aktivitas fungsional dan kegiatan operasional;
c. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari berbagai sumber informasi yang tersedia;
d. Menganalisa kemungkinan/probabilitas timbulnya risiko serta dampaknya.

Identifikasi risiko merupakan tahapan yang kritikal karena harus mendefinisikan risiko yang dihadapi baik dalam lingkup, jenis, bentuk, sifat, besaran, dan sebagainya, sehingga membantu proses selanjutnya secara lebih terarah termasuk penggunaan metodologi yang sesuai, untuk pengukuran maupun menentukan strategi pengendalian risiko.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

a. Karakteristik risiko yang melekat pada Bank;
b. Risiko dari produk dan aktivitas usaha Bank.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko, terhadap suatu produk atau aktifitas, serta dampaknya terhadap earningabilitas dan permodalan Bank.

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Risk Management System Procedures

1. Risk Identification

Risk identification is proactive, covers all business activities of the Bank and is carried out in order to analyze the sources and possible risks and impacts. Risk identification aims to identify all types of risks in each functional and operational activity that has the potential to harm the Bank.

Things that need to be considered in applying risk identification include:

a. be proactive (anticipative) and not reactive;
b. covers all functional activities and operational activities;
c. combining and analyzing risk information from various available information sources;
d. analyze the likelihood / probability of a risk arising and its impact.

Risk identification is a critical stage because it must define the risks faced in terms of scope, type, shape, nature, magnitude, etc., so as to help the next process in a more targeted manner including the use of an appropriate methodology, for measuring and determining risk control strategies.

The process of risk identification is carried out at least by analyzing:

a. Risk characteristics inherent in the Bank;
b. Risks of products and business activities of the Bank.

2. Risk Measurement

Risk measurement aims to measure the Bank's risk profile in order to obtain a picture of the effectiveness of the implementation of risk management by knowing the magnitude of risk, to a product or activity, as well as its impact on the profitability and capital of the Bank.

The risk measurement system is used to measure the Bank's risk exposure as a reference for controlling. Risk measurement is carried out regularly for products and portfolios as well as all business activities of the Bank. The risk measurement system must be evaluated and refined periodically or at any time as needed to ensure the suitability of the assumptions, accuracy, fairness and integrity of the data, as well as the procedures used to measure risk.

Stress testing dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktorb risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
Pengukuran kerugian ini sangat penting untuk keperluan pencadangan dan pemenuhan permodalan yang sehat. Tahap ini bisa menjadi tindakan antisipasi manajemen dalam menghadapi turunnya rasio permodalan.

Untuk pengukuran risiko diperlukan alat berupa metodologi, model, formula, dan sebagainya, seperti :
a. *Value at Risk (VaR), Historical Statistical Model, Early Warning Indicators* untuk risiko pasar dan likuiditas,
b. *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicators* (KRI), dan *Loss event Management* (LEM) untuk risiko operasional;
c. *Loan Scoring, Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk risiko kredit
d. dan sebagainya, yang disesuaikan dengan jenis risiko Bank dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, serta berdasarkan referensi dan pendekatan *best practice* di industri keuangan dan perbankan.

Pendekatan tersebut sekurang-kurangnya harus dapat mengukur:
a. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
c. Faktor risiko (risk factors) secara individual;
d. Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan risk correlation;
e. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:
a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.

Stress testing is carried out to complete the risk measurement system by estimating the potential loss of the Bank in abnormal market conditions by using certain scenarios to see the sensitivity of the Bank's performance to changes in risk factors and identify the effects that have a significant impact on the Bank's portfolio.

This loss measurement is very important for the purposes of reserve and fulfillment of healthy capital. This stage can be an anticipatory action management in dealing with capital ratio decline.

For risk measurement tools such as methodology, models, formulas, etc., are needed, such as:
a. Value at Risk (VaR), Historical Statistical Model, Early Warning Indicators for market risk and liquidity,
b. Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI), and Loss event Management (LEM) for operational risk;
c. Loan Scoring, Risk Acceptance Criteria (RAC) for credit risk

d. and so on, which is adjusted to the type of Bank risk with qualitative and quantitative approaches, and based on references and best practice approaches in the financial and banking industry.

The approach must at least be able to measure:

a. product / activity sensitivity to changes in the factors that influence it, both under normal and abnormal conditions;
b. Tendency to change the factors referred to based on fluctuations in changes that occurred in the past and their correlation;
c Individual risk factors;
d. Overall risk exposure (aggregate), taking into account risk correlation;
e. All risks inherent in all transactions and banking products and can be integrated in the bank's management information system.

In order to carry out risk measurement, the Bank must at least carry out:
a. Periodic evaluation of the appropriateness of assumptions, data sources and procedures used to measure risk;

b. Improvements to the risk measurement system if there are changes in the Bank's business activities, products, transactions and risk factors, which are material.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan bila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

Prosedur pemantauan risiko antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisa strategi pengelolaan risiko selanjutnya.

Setiap peristiwa atau aktifitas berisiko harus dipantau secara baik. Pemantauan diperlukan agar tindakan pemulihan yang diperlukan dapat dengan cepat dilakukan jika suatu masalah terjadi.
Pemantauan risiko juga diperlukan untuk mengetahui perubahanperubahan yang bersifat material pada variabel dan/atau asumsi yang terkait dengan produk dan aktivitas tertentu Bank. Dalam proses pemantauan risiko diperlukan sarana pendukung antara lain sistem pelaporan dan/atau sistem informasi yang memadai.

4. Pengendalian Risiko (Risk Control)

Pengendalian risiko adalah suatu kegiatan mitigasi yang ditujukan untuk menekan potensi kerugian dengan cara menghindari, mengurangi, mengalihkan dan/atau menerima risiko. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *Loan derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

Untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan melindungi kepentingan Bank, maka harus dibuat perangkat pencegahannya seperti; kebijakan dan prosedur serta sistem yang mendukung. Dengan perangkat pengendalian yang ada, Manajemen Bank dapat mengarahkan jalannya aktivitas Bank pada koridor yang aman dan terkendali. Perangkat pengendalian yang melekat pada suatu aktivitas juga diperlukan untuk melakukan pengendalian risiko sedini mungkin.

3. Risk Oversight

Risk monitoring aims to evaluate risk exposures on an ongoing basis and improve the reporting process if there are changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems that are material.

Risk monitoring procedures include monitoring risk to the magnitude of risk exposure, risk tolerance, compliance with internal limits, and the results of stress testing as well as the consistency of implementation with established policies and procedures. The results of risk monitoring can be used as material to analyze further risk management strategies.

Every risky event or activity must be monitored properly. Monitoring is needed so that the necessary remedial actions can be quickly carried out if a problem occurs.

Risk monitoring is also needed to find out material changes in variables and or assumptions related to certain Bank products and activities. In the process of risk monitoring required supporting facilities such as adequate reporting systems and or information systems.

4. Risk Control

Risk control is a mitigation activity aimed at reducing potential losses by avoiding, reducing, transferring and or accepting risk. The process of risk control implemented by the Bank must be adjusted to the risk exposure and the level of risk to be taken and risk tolerance. Risk control can be carried out by the Bank, among others by means of hedging mechanisms, and other risk mitigation methods such as issuance of guarantees, securitization of assets, and Loan derivatives, as well as additional Bank capital to absorb potential losses.

To anticipate the occurrence of risks and protect the interests of the Bank, prevention measures must be made such as; supportive policies and procedures and systems. With the existing control devices, Bank Management can direct the activities of the Bank in a safe and controlled corridor. Control devices attached to an activity are also needed to carry out risk control as early as possible.

Pengendalian risiko yang melekat dibantu oleh Divisi Audit Internal (DAI) yang memastikan kepatuhan unit kerja dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Divisi Audit Internal (DAI)menilai efektifitas pengendalian yang berlaku di Unit Kerja (*Risk Taking Unit*) dan menginformasikannya ke Divisi Manajemen Risiko Bank.

The inherent risk control is assisted by an Internal Audit Work Unit (SKAI) which ensures work unit compliance with applicable policies and procedures. The Internal Audit Work Unit assesses the effectiveness of controls in force in the Work Unit (Risk Taking Unit) and informs them to the Risk Management Division.

Strategi pengendalian risiko termasuk antara lain melalui kebijakan dan prosedur, penetapan limit, melakukan *stress test*, *hedging*, asuransi, dan lain-lain, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *risk and return* yang memadai.

Risk control strategies include, among others, through policies and procedures, setting limits, conducting stress tests, hedging, insurance, and others, taking into account the principles of adequate risk and return.

Disamping upaya antisipasi, Bank juga wajib memiliki rencana darurat (*contingency plan*) untuk memastikan kegiatan operasional tetap dapat berjalan dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*). Hal ini diatur dalam Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang terpisah dari kebijakan ini.

In addition to anticipating efforts, banks are also required to have contingency plans to ensure operational activities can continue to run in the worst case scenario. This is regulated in a Business Continuity Management (BCM) Policy that is separate from this policy.

5. Tingkat Risiko yang akan Diambil *(Risk Appetite)* dan Toleransi Risiko *(Risk Tolerance)*

Tingkat yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.

5. Level of Risk to be Taken (Risk Appetite) and Risk Tolerance

The level to be taken is the level and type of risk that the Bank is willing to take in order to achieve the Bank's goals. The level of risk to be taken is reflected in the Bank's business strategy and objectives. Risk tolerance is the level and type of risk that is maximally determined by the Bank. Risk tolerance is the translation of the level of risk to be taken.

Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Bank. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit.

In formulating risk management policies, the Board of Director must provide clear direction regarding the level of risk to be taken and the Bank's risk tolerance. The level of risk to be taken and the risk tolerance must be considered in the preparation of risk management policies, including in setting limits.

Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*). *Risk appetite* yang diambil harus tercermin dalam setiap kebijakan dan prosedur yang melingkupi seluruh aktifitas dan produk Bank dan dibuat dengan memperhatikan kemampuan permodalan Bank. *Risk appetite* harus mengacu kepada ekspektasi pemegang saham.

In setting risk tolerance, the Bank needs to consider the Bank's business strategy and objectives and the Bank's ability to take risk (risk bearing capacity). Risk appetite taken must be reflected in every policy and procedure that covers all Bank activities and products and is made with due regard to the Bank's capital capability. Risk appetite must refer to the expectations of shareholders.

Penyusunan *risk appetite* ditindaklanjuti dengan proses pengalokasian modal. Divisi Manajemen Risiko Bank akan membuat metodologi perhitungan tingkat risiko dan dibandingkan dengan modal yang dibutuhkan. *Risk appetite* ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk limit dan batasan lainnya yang bertujuan agar maksimum kerugian berada dalam batas kemampuan permodalan Bank.

The preparation of risk appetite is followed up with the process of capital allocation. The Risk Management Division will make a methodology for calculating the level of risk and compared with the capital needed. This risk appetite is then set forth in the form of limits and other limits aimed at the maximum loss being within the Bank's capital capability.

6. Limit Risiko

Bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan ndengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Prosedur dan penetapan limit risiko paling sedikit mencakup:

a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank;
d. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bisnis Bankn yang memiliki eksposur risiko.

Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan Manajemen. Bank harus memiliki mekanisme persetujuan bila terjadi pelampauan limit. Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Divisi Manajemen Risiko Bank untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Bank.

Limit tersebut harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan/atau Divisi Manajemen Risiko Bank untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penetapan sebuah limit diantaranya adalah:

a. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka sekurang-kurangnya harus:
    1. Tersedia limit secara keseluruhan, per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposure risiko.
    2. Mempertimbangkan *risk appetite* dan kemampuan modal Bank menyerap eksposur risiko atau kerugian serta tinggi rendahnya eksposur Bank.

6. Risk Limit

Banks must have risk limits that are appropriate to the level of risk to be taken, risk tolerance, and the overall strategy of the Bank by taking into account the ability of the Bank's capital to be able to absorb risk exposures or losses arising, experience loss in the past, HR capabilities, and compliance with regulations external force.

Procedures and determination of risk limits include at least:

a. Accountability and clear level of delegation of authority;
b. Adequate documentation of procedures and determination of limits to facilitate the implementation of the review and audit trail;
c. Implementation of procedures and setting limits on a regular basis at least 1 (one) time in 1 (one) year or more frequently, according to the type of risk, needs, and development of the Bank;
d. The determination of limits is carried out comprehensively for all aspects related to risk, which includes the overall limit, limit per risk, and limits per business activity of banks that have risk exposures.

Limits must be understood by all parties involved and communicated properly including when changes occur. In the context of risk control, limits are used as a threshold to determine the level of intensity of risk mitigation that Management will carry out. Banks must have an approval mechanism in case of exceedances. The amount of the limit is proposed by the relevant operational work unit (risk-taking unit), which is then recommended to the Risk Management Division to obtain approval from the Board of Director or the Board of Commissioners through the Risk Management Committee or Board of Director in accordance with their respective authorities as stipulated in the Bank's internal policies.

These limits must be periodically reviewed by the Board of Director and / or Risk Management Division to adjust to changes in conditions that occur. Some principles that need to be considered in setting a limit include:

a. As part of implementing risk monitoring, it must at least:
    1. There are overall limits, per risk type and limits per specific functional activity that has risk exposure.
    2. Considering the Bank's risk appetite and capital ability to absorb risk or loss exposures as well as the level of the Bank's exposure.

3. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.
4. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Divisi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Bank dan Direksi.

b. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi lain yang berlaku antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN) dan sebagainya.
c. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya mencakup:
   1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
   2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan
   3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.
d. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Strategi Manajemen Risiko

Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain.

Strategi manajemen risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:

a. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
b. Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank;
c. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

3. Considering the experience of past losses and the ability of the human resources that manage them.

4. Ensuring that positions that exceed the predetermined limit receive the attention of the Risk Management Division, the Risk Management Committee and the Board of Director.

b. The determination of the limit is carried out with due observance of the provisions of the Financial Services Authority and other applicable regulations, including the provisions concerning the Minimum Capital Adequacy (KPMM), the Maximum Lending Limit (BMPK), the Net Open Position (NOP) and so on.
c. Procedures and determination of risk limits include at least:
   1. Accountability and a clear level of delegation of authority;
   2. Adequate documentation of procedures and limit setting to facilitate the review and audit trail; and
   3. Conduct a review of procedures and limit setting periodically at least once a year or more frequently, according to the type of risk, needs and development of the Bank.
d. In the event of a limit exceeding, the Bank must immediately make adjustments and anticipate the exceeding so that it does not affect the amount of capital allocation for the risk that has been previously determined.

7. Risk Management Strategy

The Bank formulates a risk management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into account the level of risk to be taken and risk tolerance. The risk management strategy is designed to ensure that the Bank's risk exposures are managed in a controlled manner in accordance with the Bank's internal policies and procedures as well as laws and other regulations.

The risk management strategy is based on the following general principles:

a. The risk management strategy must be long-term oriented to ensure the continuity of the Bank's business by considering economic conditions or cycles;
b. A comprehensive risk management strategy can control and manage Bank risks;
c. Achieve the expected capital adequacy accompanied by adequate allocation of resources.

Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko Bank;
b. Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
c. Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Bank mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
d. Bauran serta diversifikasi portofolio Bank.

Strategi Bank dalam menerapkan manajemen risiko agar berjalan dengan efektif adalah melalui sinergi dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Pengelolaan Risiko
   Meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko di semua lini Perusahaan. Semua alur transaksi dievaluasi dan bila diperlukan dilakukan proses ulang dengan tujuan agar risiko dapat diminimalkan.
b. Mengembangkan Infrastruktur Manajemen Risiko Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Regulator dan *best practice* yang berlaku.
c. Proses Pengelolaan Lingkungan Manajemen Risiko
   Membentuk suatu lingkungan kerja yang meliputi budaya, komunikasi pengukuran kinerja berbasis risiko dan sebagainya untuk mendukung implementasi manajemen risiko secara keseluruhan. Ketiga kegiatan diatas adalah alat (*tools*) yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan manajemen risiko.

8. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan:

a. Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi Bank baik risiko keseluruhan atau komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;

The risk management strategy is prepared by considering the following factors:

a. Economic and industrial developments and their impact on Bank risks;
b. Bank Organization including the adequacy of human resources and supporting infrastructure;
c. The Bank's financial condition includes the ability to generate earnings, and the Bank's ability to manage risks arising as a result of changes in external and internal factors; and
d. The mix and diversification of the Bank's portfolio.

The Bank's strategy in implementing risk management to run effectively is through the synergy of 3 (three) activities as follows:

a. The Risk Management Process
   Improve the quality of risk management processes in all lines of the Company. All transaction flows are evaluated and if necessary reprocessed with the aim of minimizing risk.
b. Developing Risk Management Infrastructure
   Develop infrastructure that supports the overall implementation of risk management in accordance with the provisions of the Regulator and applicable best practices.
c. Environmental Management Process Risk Management (RiskEnvironment)
   Establish a work environment that includes culture, communication of risk-based performance measurement and so on to support the overall implementation of risk management. The three activities above are the tools needed to support the achievement of risk management objectives.

8. Risk Management Information System

The risk management information system is part of the management information system that must be owned and developed in accordance with the needs of the Bank in order to implement effective risk management. As part of the risk management process, the Bank's risk management information system is used to support the implementation of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk.

The risk management information system must be able to ensure:

a. The availability of accurate, complete, informative, timely and reliable information that can be used by the Board of Director, Board of Commissioners, and related work units in implementing risk management to assess, monitor and mitigate risks faced by the Bank both overall or composite risks as well as risks and / or in the framework of the decision making process by the Board of Director;

b. Efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; dan
c. Tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, laporan profil risiko disusun secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Bank yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Sistem informasi manajemen risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank. Dalam hal Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.

b. The effectiveness of the application of risk management includes risk management policies and procedures as well as setting risk limits; and
c. The availability of information about the results or realization of the implementation of risk management compared to the targets set by the Bank in accordance with the policies and strategies for implementing risk management.

The risk management information system and the resulting information must be adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business activities and be adaptive to changes. The adequacy of the scope of information generated from the risk management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage is adequate in accordance with the development of the level of complexity of the Bank's business activities.

As part of the risk management information system, risk profile reports are prepared periodically by the Risk Management Division which is independent of the work units that carry out business activities. The frequency of submission of reports to relevant Board of Director and Risk Management Committees must be increased as needed especially in the event that market conditions change rapidly.

The risk management information system must support the implementation of reporting to the Financial Services Authority. In developing new information systems and software technologies, the Bank must ensure that the application of new information systems and technologies will not interfere with the sustainability of the Bank's information system. In the event that the Bank decides to assign outsourced workforce in software development and system improvement, the Bank must ensure that the decision to appoint a third party is made objectively and independently. In an agreement or contract power must be included clauses regarding maintenance and updating as well as anticipatory steps to prevent disruptions that may occur in operation.

Before implementing a new management information system, the Bank must carry out tests to ensure that the processes and outputs produced have gone through an effective and accurate process of development, testing and revaluation, and the Bank must ensure that accounting and management data can be accessed by the new system or software well.

Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

The Bank administers and updates system documentation that contains hardware, software, databases, parameters, process steps, assumptions used, data sources, and outputs produced so as to facilitate inherent control and implementation of audit trails.

Program Divisi Manajemen Risiko Bank Tahun 2019

Selama tahun 2019, melalui Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Pendukung dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan kajian-kajian pada seluruh aktifitas fungsional Bank secara keseluruhan terkait risiko-risiko yang ada di kantor pusat dan cabang.
- Mengkaji Kebijakan yang bersifat Umum dan Strategik.
- Mengadakan pendidikan & pelatihan terkait Risiko-risiko yang dikelola.
- Menyampaikan Hasil Monitoring kepada Direksi dan Unit terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap Manajemen, Perencanaan, pengembangan dan pengadaan, Operasional Teknologi Informasi, Jaringan komunikasi, Pengamanan Informasi, serta penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- Melakukan pengujian terhadap kebijakan *User Security Policy*.
- Melakukan pengujian terhadap *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Centre*.
- Melaporkan kepada manajemen hasil pemantauan langsung.
- Pendidikan dan Pelatihan terkait Penerapan Manajemen Risiko dalam Teknologi Informasi.
- Pemantauan pada Divisi Manajemen Modal Manusia dalam rangka melakukan analisa atas sistem yang digunakan.
- Meneliti dan Merekapitulasi Hasil Kajian Manajemen Risiko.
- Melakukan penelaahan kebijakan-kebijakan regulator.
- Melakukan Pengusulan barang-barang Inventaris & Non Inventaris.
- Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi di beberapa kantor cabang.
- Menetapkan petugas yang melaksanakan Uji coba dan mengajukan ke Manajemen untuk mendapat persetujuan pelaksanaan.
- Melakukan pelatihan dan membentuk team penyusunan kebijakan *BCM Liquidity*.
- Melakukan *monitoring* dan *Stress test* dan Melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Melakukan *monitoring, review* dan mitigasi.

Bank Risk Management Division Program Program 2019

During 2019, through the Risk Management Department and the Supporting and Reporting Department, the following activities were carried out:

- *Conduct studies on all the functional activities of the Bank as a whole related to the risks that exist in the head office and branches.*
- *Reviewing General and Strategic Policies.*
- *Conduct education & training related to Risks that are managed.*
- *Delivering Monitoring Results to the Board of Director and related Units.*
- *Monitor Management, Planning, Development and Procurement, Information Technology Operations, Communication Networks, Information Security, and the use of Information Technology service providers.*
- *Testing the User Security Policy.*
- *Testing the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Center.*
- *Report to management the results of direct monitoring.*
- *Education and training related to the application of risk management in information technology.*
- *Monitoring in the Human Management Division in order to analyze the system used.*
- *Research and Recapitulate Risk Management Study Results.*
- *Reviewing regulator policies.*
- *Carry out Inventory & Non-Inventory items.*
- *Conduct Training and Outreach in several branch offices.*
- *Assign officers who carry out trials and submit to Management for approval of implementation.*
- *Conduct training and form a BCM Liquidity policy-making team.*
- *Carry out monitoring and stress tests and report to the Board of Director and Commissioners.*
- *Conduct monitoring, review and mitigation.*

- Menyampaikan kepada manajemen tentang membuat kajian atau *Review* Laporan Keuangan dan Analisa-analisa rasio sesuai kaidah atau regulasi yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan di beberapa Kantor Cabang.
- Melakukan *review* aplikasi yang digunakan untuk Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan *review* bobot dan parameter yang ada pada setiap risiko.
- Melaporkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Me*review* parameter dan bobot komponen *Internal Capital Adequacy Assessment Process* Bank.
- Menghitung KPMM Risiko Kredit, Pasar dan Operasional sesuai aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan dilaporkan kepada Direksi.
- Memastikan dan menyampaikan laporan perhitungan KPMM telah sesuai dengan ketentuan dan perubahannya.
- Melaksanakan Pelatihan terkait Identifikasi, Pengukuran dan Mitigasi Risiko (Kredit, Pasar, Operasional, Likuiditas, Hukum, Kepatuhan, Stratejik & Reputasi).
- Melaksanakan pelatihan terkait pelaporan TKB, Profil Risiko dan KPMM, ICAAP dan LED.
- Melaksanakan Sertifikasi manajemen risiko dan program penyegaran sertifikasi untuk seluruh staf Manajemen Risiko Level 1 s/d 4.
- Mengadakan *workshop* dan Seminar terkait Manajemen Risiko.
- Melaksanakan studi banding pelaksanaan Manajemen Risiko Bank.

- *Submitting to Management about Making a Review or Review of Financial Statements and Ratio Analysis in accordance with applicable rules or regulations.*
- *Conducted outreach and training at several Branch Offices.*
- *Reviewing applications used for Bank Soundness.*
- *Carry out a review of the weights and parameters that exist at each risk.*
- *Report the Bank's Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to the Board of Director and Commissioners.*
- *Reviewing parameters and weighting of the Bank's Internal Capital Adequacy Assessment Process component.*
- *Calculate KPMM for Credit, Market and Operational Risk according to the rules of the Financial Services Authority (POJK) No. 34 / POJK.03 / 2016 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 concerning Minimum Capital Requirements for Commercial Banks and reported to the Board of Director.*
- *Ensure and submit KPMM calculation reports in accordance with the provisions and changes.*
- *Conduct Training related to Risk Identification, Measurement and Mitigation (Credit, Market, Operations, Liquidity, Legal, Compliance, Strategic & Reputation).*
- *Conduct training related to TKB reporting, Risk Profile and KPMM, ICAAP and LED.*
- *Carry out risk management Certification and certification refresher programs for all Level 1 to 4 Risk Management staff.*
- *Conduct workshops and Seminars related to Risk Management.*
- *Conduct comparative studies on the implementation of Bank Risk Management.*

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia, Bank telah melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) khususnya dilingkungan Divisi Manajemen Risiko Bank, dalam rangka sertifikasi manajemen risiko. Bank juga secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko maupun Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Competence Development in Risk Management

To enhance the development of Human Resources, the Bank has implemented a Human Resources development program in the field of education and training for risk management officials and includes all employees (in accordance with job specifications), especially within the Bank's Risk Management Division, in the context of risk management certification. The Bank also regularly conducts education and training and actively engages staff and officials in seminars related to risk management and the Risk Management Certification Exam.

Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Divisi Manajemen Risiko Bank selama tahun 2019, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Sesuai POJK 51/POJK.03/2017
2. *Stress Test* Risiko Pasar, Likuiditas dan Kredit
3. Pelatihan Designing Operating Procedure (SOP)
4. Pemahaman Teknis Penilaian Jaminan
5. Penerapan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Sesuai Peraturan POJK No.4/POJK.03/2016 & SEOJK No.14/SEOJK.03/2017
6. Implementasi IT *Risk Management*
7. Seminar PSAK 71 *For Board of Commissioner*
8. Legal *Drafting Training*
9. *Risk Profiling And Reporting Training*
10. Pelatihan *Business Continuity Management* (BCM) Kondisi Normal, Kondisi Bencana, Pasca Bencana
11. IHT - *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Semua Level I, II, III & IV
12. IHT-Pembekalan & Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 *Batch* 1,2, Dan 3
13. IHT-Sosialisasi Aplikasi LED dan PRC

Penerapan Manajemen Risiko

Beberapa program penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan Bank Papua adalah dengan melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian terhadap produk dan aktifitas baru bank, juga telah mengembangkan sebuah program sistem informasi manajemen risiko bank dan profil risiko bank yang dapat menyajikan data dan informasi yang berguna sebagai *early warning system* dalam upaya mitigasi risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai pedoman yang antara lain mengatur bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*), baik secara individual maupun secara konsolidasi

Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 96/DIR-BPD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Sistem Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank Papua, telah diaplikasikan kedalam sistem ketentuan tersebut dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

The competency development that was followed by members of the Bank's Risk Management Division in 2019 was as follows:

1. *Formulation of a Sustainable Financial Action Plan (RAKB) in accordance with POJK 51 / POJK.03 / 2017*
2. *Market, Liquidity and Credit Risk Stress Tests*
3. *Training on Designing Operating Procedure (SOP)*
4. *Technical Understanding of Guarantee Assessment*
5. *Application of Bank Sound Rating (TKB) in Accordance with POJK Regulation No.4 / POJK.03 / 2016 & SEOJK No.14 / SEOJK.03 / 2017*
6. *Implementation of IT Risk Management*
7. *PSAK 71 Seminar For the Board of Commissioner*
8. *Legal Drafting Training*
9. *Risk Profiling And Reporting Training*
10. *Business Continuity Management (BCM) Training in Normal Conditions, Disaster Conditions, Post Disasters*
11. *IHT - Refreshment of Risk Management Certification for All Levels I, II, III & IV*
12. *IHT-Debriefing & Risk Management Certification Tests Level 1 Batch 1,2, and 3*
13. *IHT-Socialization of LED and PRC Applications*

Implementation of Risk Management

Some of the programs for implementing risk management implemented by Bank Papua are by identifying, measuring and controlling new bank products and activities, and have also developed a bank risk management information system program and bank risk profile that can present data and information useful as an early warning system. in an effort to mitigate the risks inherent in each product or activity.

In connection with the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 4 / POJK.03 / 2016 concerning Rating of Commercial Bank Soundness and OJK Circular Letter Number 14 / SEOJK.03 / 2017 concerning Rating of Commercial Bank Sound Rating as a guideline which among others regulates that banks are required to carry out Self-Assessment of Bank Soundness (TKB) using a risk-based Bank Rating approach, both individually and on a consolidated basis

Whereas in accordance with the Decree of the Board of Director No. 96 / DIR-BPD / XII / 2011 dated 30 December 2011 concerning the Bank Papua Soundness Application System, it has been applied to the system of provisions with the scope of assessment covering the following factors:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*).
b. Good *Corporate Governance* (GCG).
c. Rentabilitas (*Earning*).
d. Permodalan (*Capital*).

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank (*Internal Risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko (*risk control system*) dalam keseluruhan aktivitas operasional bank. Cakupan risiko yang dinilai terdiri dari 8 (delapan) jenis yakni terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2019

Bank Papua sudah menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai *partner* kerja yaitu dengan membentuk manajemen risiko cabang. Dengan demikian terlaksanakannya penerapan bisnis yang mempunyai orientasi manajemen risiko, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis.

Dalam mengelola bank juga dipelukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan *Risk Management*, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan *judgment* yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikian, Bank Papua sebagai langkah mitigasi risiko menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan relatif cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengkonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para *stakeholders*.

a. Risk Profile.
b. Good Corporate Governance (GCG).
c. Profitability (Earning).
d. Capital (Capital).

Risk Profile factor assessment is an assessment of the risks inherent in the functional activities of the bank (Internal Risk) and the quality of the implementation of risk management (risk control system) in all bank operational activities. The scope of risk assessed consists of 8 types which consist of credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, strategic risk, reputation risk, legal risk and compliance risk.

Effectiveness of the Implementation of Risk Management in 2019

Bank Papua has implemented a risk management system by working with business units as partners, namely by establishing branch risk management. Thus the implementation of business that has a risk management orientation, it is expected that the application of risk management will be harmonious.

In managing banks, it is also necessary to harmonize between business development and Risk Management, so that there is a well-controlled work climate so that the ultimate goal of obtaining sustainable earnings can be achieved. The Bank realizes that by any measure, the problem of risk cannot be predicted accurately. Therefore, in making a decision, it is still necessary to have judgment that develops according to experience. Thus, Bank Papua as a risk mitigation step combines the science of risk measurement with art in every important decision making so that decisions can be taken relatively quickly without leaving quantitative calculations as the basis and part of the decision making.

With risk management as described above, banks can identify which business units or products provide the greatest added value for banks so that banks can concentrate on developing units that provide the greatest added value, or where banks have an advantage over competitors. Thus, banks can allocate their models and resources more efficiently in an effort to provide optimal returns for stakeholders.

Evaluasi atas rencana kerja kepatuhan selama tahun sebelumnya:

1. Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan *Assessment* terhadap rencana dan kinerja bank setiap bulan dan semester.
2. Divisi kepatuhan melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja secara bulanan kepada Direktur Kepatuhan, triwulan kepada OJK dan semester serta tahunan kepada pihak terkait yang dalam pelaksanaannya dipantau oleh Direktur Kepatuhan.

Evaluation of the compliance work plan during the previous year:

1. *The Compliance Division and the Bank's Risk Management Division conduct evaluations and assessments of the bank's plans and performance every month and semester.*
2. *The compliance division evaluates plans and performance on a monthly basis to the Compliance Director, quarterly to the OJK and the semester and yearly to related parties whose implementation is monitored by the Compliance Director.*

Profil Risiko Bank Papua

Bank Papua Risk Profile

Profil Risiko Tahun 2019 *Risk Profile For 2019*							
No	Jenis Risiko	Periode Sekarang (Dec-2019)			Periode Sebelumnya (Sep-2019)		
		Inherent Risk (60%)	Kualitas Penerapan Management Risiko (40%)	Komposit	Inherent Risk (60%)	Kualitas Penerapan Management Risiko (40%)	Komposit
		Predikat	Predikat	Pk	Predikat	Predikat	Pk
1	Risiko Kredit	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
2	Risiko Pasar	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
3	Risiko Likuiditas	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
4	Risiko Operasional	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*Moderate*	*Satisfactory*	PK-3
5	Risiko Hukum	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
6	Risiko Stratejik	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
7	Risiko Kepatuhan	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
8	Risiko Reputasi	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2	*LowMod*	*Satisfactory*	PK-2
Nilai Komposit		***LOWMOD***	***SATISFACTORY***	**PK-2**	***LOWMOD***	***SATISFACTORY***	**PK-2**

Secara keseluruhan Profil Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2019 berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua) dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Overall Risk Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Papua in 2019 is in the Composite Rating 2 (Two) which reflects the Bank's generally healthy condition, so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions and other external factors.

Secara keseluruhan Profil Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2019 berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua) dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Overall Risk Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Papua in 2019 is in the Composite Rating 2 (Two) which reflects the Bank's generally healthy condition, so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions and other external factors.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai dengan memperhatikan empat parameter penilaian yaitu profil risiko (*risk profile)*, Tata Kelola Perusahaan (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Pedoman dan alat pengukuran tingkat kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berikut disampaikan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk periode Desember 2019.

Bank Sound Rating

The level of soundness of the Bank is assessed by taking into account four assessment parameters, namely risk profile, Corporate Governance (GCG), earnings (earnings) and capital (capital). Guidelines and tools for measuring the soundness of the Bank are based on the Financial Services Authority Regulation Number 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks and SEOJK Number 14 / SEOJK.03 / 2017 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks.

Following are the results of the assessment of the Bank's Soundness Level for December 2019.

No	Faktor	PERINGKAT(RATING)	
		Jun-2019	DEC-2019
1	Risk Profile	2	2
2	GCG	2	2
3	*Capital*	2	2
4	Earnings	3	2
Nilai Komposit		**2**	**2**
Deskripsi			
Mencerminkan kondisi Bank Semester II tahun 2019 yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.	*Reflecting the condition of the Bank in the Second Semester 2019 which is generally healthy, so that it is considered capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors reflected in the rating factors rating, including: risk profile, GCG implementation, profitability, and capital generally good. If there are weaknesses, in general these weaknesses are less significant.*		

Analisis Faktor

1. **Risk Profile**

   Secara keseluruhan Profil Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode semester II tahun 2019 berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua) dimana Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. **GCG**

   Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2019.

3. ***Capital***

   Penilaian Permodalan Bank semester II tahun 2019 dinilai memadai, terdapat beberapa faktor penilaian antara lain :

   A. Faktor Kecukupan Modal Bank :
      1. Rasio Modal dibagi ATMR periode Desember 2019 adalah sebesar 21,43% mengalami penurunan sebesar -0,78% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 22,21%.
      2. Rasio Modal Inti terhadap Total ATMR semester II tahun 2019 sebesar 20,45%.
      3. Rasio Penanganan aset produktif bermasalah semester II tahun 2019 sebesar 3,48%.
      4. Rasio penangan Aset Kualitas Rendah semester II tahun 2019 sebesar 3,34%.

      Dewan Komisaris sudah maksimal dalam melakukan *monitoring* KPMM secara berkala dengan melakukan kajian-kajian terhadap kebutuhan permodalan Bank dimasa mendatang.

   B. Pengelolaan permodalan Bank :
      1. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosesdur KPMM sesuai profil risiko yang tertuang dalam SK Direksi nomor 21/DIR-BPD/IV/2016 tentang Pedoman Internal *Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP).
      2. Bank hanya memiliki kemampuan akses permodalan yang bersumber dari pemegang saham sedangkan dari sumber internal tidak dapat diandalkan dikarenakan rentabilitas bank yang belum mendukung.

Factor Analysis

1. ***Risk Profile***

   Overall Risk Profile of PT Bank Pembangunan Daerah Papua for the second semester of 2019 is at Composite Rating 2 (Two) which reflects the Bank's generally healthy condition, so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions and other external factors.

2. ***GCG***

   Reflecting that bank management has implemented Good Governance in general. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. If there are weaknesses and the application of commercial bank governance principles, in general these weaknesses do not have a significant impact but require sufficient attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and the Bank's Business Plan for the second semester of 2019.

3. *Capital*

   Assessment of Bank Capital in the second semester of 2019 is considered adequate, there are several assessment factors including:

   A. Bank Capital Adequacy Factors:
      1. *Capital Ratio divided by RWA for the December 2019 period was 21.43% experiencing decrease of -0.78% YoY compared to the previous period in December 2018 which was 22.21%.*
      2. *Core Capital Ratio to Total RWA of semester II of 2019 of 20.45%.*
      3. *Nnon performing earning assets settlement ratio in semester II of 2019 of 3.48%.*
      4. *Low Quality Assets Handling Ratio in semester II of 2019 of 3.34%. The Board of Commissioners has maximally monitored KPMM periodically by conducting studies on the Bank's capital requirements in the future.*

   B. Bank capital management:
      1. *The Bank has KPMM policies and procedures in accordance with the risk profile contained in the Decree of the Board of Director number 21 / DIR-BPD / IV / 2016 concerning the Guidelines for Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).*
      2. *Banks only have the ability to access capital sourced from shareholders while from internal sources cannot be relied on due to bank profitability that does not yet support.*

4. Earnings

Penilaian *Earning* Bank Semester II tahun 2019 dinilai memadai, hal ini didasarkan pada beberapa penilaian :

A. Kinerja Rentabilitas
   1. *Return on Assets* (ROA) periode Desember 2019 sebesar 1,35% mengalami pertumbuhan sebesar 0,11% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 1,24%.
   2. *Return on Equitiy* (ROE) periode Desember 2019 sebesar 7,71% mengalami pertumbuhan sebesar 0,06% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 7,65%.
   3. *Net Interest Margin* (NIM) periode Desember 2019 sebesar 7,00% mengalami pertumbuhan sebesar 0,18% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 6,82%.
   4. Rasio BOPO periode Desember 2019 sebesar 85,18% mengalami penurunan sebesar -2,59%YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 87,77%.

B. Sumber-sumber yang mendukug Rentabilitas
   1. Pendapatan bunga bersih terhadap total aset periode Desember 2019 sebesar 5,61% mengalami penurunan sebesar -1,25%YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 6,86%.
   2. Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga Dibagi Rata-rata Total Aset periode Desember 2019 adalah sebesar 0,96% mengalami penurunan sebesar -0,01% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 0,98%.
   3. Rasio Beban *Overhead* periode Desember 2019 adalah sebesar 31,90% mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 27,25%
   4. Rasio Beban Pencadangan periode Desember 2019 adalah sebesar 54,99% mengalami perbaikkan sebesar -22,09% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 77,08%.

C. Komponen yang mendukung Rentabilitas
   1. Rasio *Core* ROA periode Desember 2019 adalah sebesar 3,95% mengalami pertumbuhan sebesar 3,8% YoY jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Desember 2018 adalah sebesar 0,15%.
   2. Secara prospek rentabilitas, Bank memiliki

4. Earnings

Assessment of Earning Bank Semester II of 2019 is considered adequate, this is based on several assessments:

A. Rentability Performance
   1. Return on Assets (ROA) for the December 2019 period of 1.35% experienced a growth of 0.11% YoY compared to the previous period in December 2018 of 1.24%.
   2. Return on Equity (ROE) for December 2019 of 7.71% experienced a growth of 0.06% YoY when compared to the previous period in December 2018 amounting to 7.65%.
   3. Net Interest Margin (NIM) for the December 2019 period of 7.00% experienced a growth of 0.18% YoY compared to the previous period in December 2018 of 6.82%.
   4. The OEOI ratio for the December 2019 period of 85.18% experienced an decrease of -2.59% YoY when compared to the previous period in December 2018 of 87.77%.

B. Resources that support Profitability
   1. Net interest income to total assets for the December 2019 period of 5.61% experienced a decrease of -1.25% YoY compared to the previous period in December 2018 of 6.86%.
   2. Operating Income Other than Interest Income Divided by Average Total Assets for the December2019 period was 0.96%, experiencing a decrease of -0.01% YoY when compared to the previous period in December 2018 amounting to 0.98%.
   3. Overhead Expense Ratio for December 2019 is 31.90%, experiencing growth of 4.65% YoY when compared to the previous period in December 2018 amounting to 27.25%
   4. The Reserve Expense Ratio for the December 2019 period was 54.99% experiencing an increase of -22.09% YoY when compared to the previous period in December 2018 which was 77.08%.

C. Components that support Profitability
   1. The Core ROA ratio for the December 2019 period was 3.95%, experiencing a growth of 3.8% YoY when compared to the previous period in December 2018 which was 0.15%.
   2. In terms of profitability prospects, the Bank has the

kemampuan dalam mengelola sumber rentabilitas, namun dengan kondisi yang saat ini dihadapi Bank mengenai meningkatnya risiko kredit maka bank diwajibkan membentuk CKPN yang cukup besar yang bersumber dari pendaptan Bank. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi menurunkan kinerja rentabilitas Bank dan mengurangi porsi permodalan.

D. Manajemen Rentabilitas :
Secara keseluruhan Manajemen rentabilitas Bank dinilai baik hal ini sebagai dampak dari usaha Bank dalam melakukan perbaikan kualitas dibidang perkreditan.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen

Dalam rangka mendukung proses evaluasi efektivitas Sistem Manajemen Risiko, Bank Papua sudah menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai partner kerja yaitu dengan membentuk manajemen risiko cabang. Dengan demikian, unit manajemen risiko mempunyai orientasi bisnis dan unit bisnis juga mempunyai orientasi manajemen risiko, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis.

Dalam mengelola bank juga diperlukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan *Risk Management*, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan *judgment* yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikian, Bank Papua sebagai langkah mitigasi risiko menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan relatif cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengkonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para *stakeholders*.

ability to manage sources of profitability, but with the current conditions faced by the Bank regarding increased credit risk, banks are required to form a large CKPN sourced from the Bank's income. So that this condition greatly affects the performance of the Bank's profitability and reduces the share of capital.

D. Rentability Management:
Overall, the Bank's rentability management is considered good as a result of the Bank's efforts to improve quality in the field of credit.

Adequacy of Management Information Systems

In order to support the evaluation process of the effectiveness of the Risk Management System, Bank Papua has implemented a Risk Management system in collaboration with business units as work partners, namely by establishing branch Risk Management. Thus, the Risk Management unit has a business orientation and the business unit also has a Risk Management orientation, it is expected that the application of Risk Management will be harmonious.

In managing the bank also requires harmonization between business development and Risk Management, so that there is a well-controlled work climate so that the ultimate goal of obtaining earnings on an ongoing basis can be achieved. The bank realizes that with any measure, the risk problem cannot be accurately predicted. Therefore, in making decisions, judgment is needed that develops according to increasing experience. Thus, Bank Papua as a risk mitigation step combines the science of risk measurement with art in every important decision making so that decisions can be taken relatively quickly without leaving quantitative calculations as the basis and part of the decision making.

With Risk Management as described above, banks can identify which business units or products provide the greatest added value to banks so that banks can concentrate development on units that provide the greatest value added, or where banks have advantages over competitors. Thus, banks can allocate models and resources owned more efficiently, in an effort to provide optimal returns for stakeholders.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Secara umum Sistem Pengendalian internal didefinisikan oleh Bank Papua sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

In general, the Internal Control System is defined by Bank Papua as an integral process of actions and activities carried out continuously by leaders and employees to provide adequate confidence in the achievement of the Company's goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security of the Company's assets and obedience to laws and regulations.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

The Internal Control System is a monitoring process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis whose implementation is influenced by the Board of Commissioners, Board of Director and all officials and employees of the Bank, which are designed to be able to provide adequate confidence in maintaining and securing the Bank's assets, ensuring the availability of reports accurate, increase compliance with applicable regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violation of prudential aspects, and increase organizational effectiveness and improve cost efficiency.

Sistem pengendalian internal perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank ialah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bank, antara lain :

1. Kurangnya pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian internal pada seluruh jenjang organisasi.
2. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank.
3. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas *risk exposure* dan kinerja bank.
4. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas *risk exposure* dan penerapan tindakan perbaikan.
5. Kurang memadainya atau kurang efektifnya program audit internal dan kegiatan pemantauan lainnya.

The internal control system needs to get the attention of the bank, bearing in mind that one of the factors causing bank business difficulties is the existence of various weaknesses in the implementation of the bank's internal control system, including:

1. *Lack of supervision, unclear accountability from bank management and failure to develop a culture of internal control at all levels of the organization.*
2. *Inadequate implementation of identification and assessment of risks from the Bank's operational activities.*
3. *There is no or failure of a basic control of bank operations, such as the separation of functions, authorization, verification and review of risk exposure and bank performance.*
4. *Lack of communication and information between levels in a bank organization, especially information at the decision making level about the quality of risk exposure and the implementation of corrective actions.*
5. *Inadequate or ineffective internal audit program and other monitoring activities.*

6. Kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian internal dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank.

Definisi kontrol internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan Direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat *reasonable assurance* mengenai :
1. Efektifitas dan efisiensi operasional;
2. Reliabilitas pelaporan keuangan;
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut, maka pengendalian internal Bank Papua merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :
1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dasar Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Sebagai pedoman operasional penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Bank Papua telah menyusun Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Sistem Pengendalian Internal Bank Papua mengacu pada Surat Edaran Nomor 35 /SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu pengurus Bank Papua menjaga aset Bank Papua, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank Papua terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

6. *Lack of commitment by bank management to carry out internal control processes and apply strict sanctions for violations of applicable regulations, policies and procedures established by banks.*

The definition of internal control according to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is a process carried out by the board of Board of Director, management, and staff, to make reasonable assurance regarding:
1. *Operational effectiveness and efficiency;*
2. *Reliability of financial reporting;*
3. *Compliance with applicable laws and regulations.*

From this definition, Bank Papua's internal control is a supervision mechanism established by bank management on an ongoing basis (on going basis), in order to:

1. *Maintain and secure bank assets.*
2. *Guarantee the availability of more accurate reports.*
3. *Improve compliance with applicable regulations.*
4. *Reducing financial impacts / losses, irregularities including fraud / fraud, and violation of prudential aspects.*

5. *Increase organizational effectiveness and improve cost efficiency.*

Internal Control System Basic Policy

As an operational guideline for the implementation of the internal control system, Bank Papua has compiled a Corporate Guidebook (BPP) for the Internal Control System of Bank Papua, referring to Circular Letter Number 35 /SEOJK.03/2017 regarding the Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks.

An effective Internal Control System can help Bank Papua management safeguard Bank Papua assets, ensure the availability of credible financial and managerial reporting, increase Bank Papua's compliance with applicable laws and regulations, and reduce the risk of loss, irregularities, and violations of prudential aspects.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan internal yang ditetapkan Bank sendiri;
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu;
3. Memastikan efektivitas kegiatan usaha Bank khususnya dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh;
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem pendendalian internal Bank Papua mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian internal artinya: suatu proses,yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset perusahaan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang material terhadap laporan keuangan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal Bank Papua mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian internal artinya: suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa

The Purpose of Implementing an Internal Control System

The Internal Control System aims to include the following:

1. *Ensuring Bank compliance with applicable laws and regulations means that all business activities of the Bank have been carried out in accordance with applicable laws and regulations, both those issued by the government and the Bank's supervisory authority as well as internal policies, regulations, and regulations determined by the Bank alone;*
2. *Ensuring the availability of correct, complete and timely financial and management information;*
3. *Ensuring the effectiveness of the Bank's business activities, especially in using assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss;*
4. *Increasing the effectiveness of risk culture in the organization as a whole;*
5. *Reducing the impact of losses, irregularities including fraud / fraud and violation of prudential aspects.*

Bank Papua's internal control system refers to the internal control system of COSO. Internal control system means: a process, which is influenced by the Board of Commissioners, management and other personnel of an entity, which is designed to provide reasonable assurance / assurance relating to the achievement of objectives in several categories

Internal controls are designed to provide reasonable assurance or assurance relating to the prevention or early detection of unauthorized taking, use, or disappearance of company assets, so as to have a material effect on the financial statements.

Internal Control System Framework

Bank Papua's internal control system refers to the internal control system of COSO. Internal control system means: a process, which is influenced by the Board of Commissioners, management, and other personnel of an entity, which is designed to provide reasonable assurance / assurance regarding the achievement of objectives in several categories. Internal controls are designed to provide

kategori. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset perusahaan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang material terhadap laporan keuangan.

reasonable assurance or assurance relating to the prevention or early detection of unauthorized taking, use, or disappearance of company assets, so as to have a material effect on the financial statements.

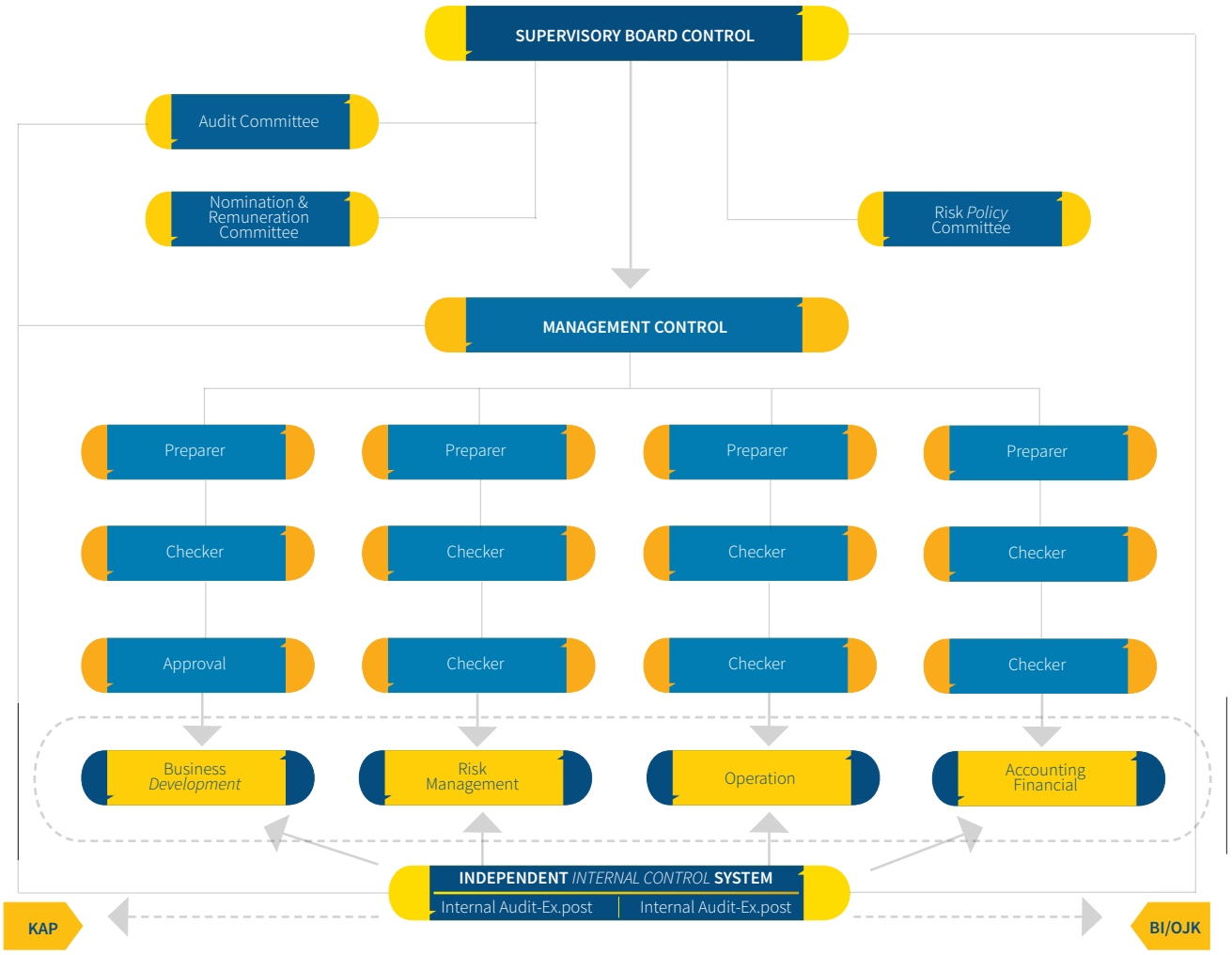

Sistem Pengendalian Internal terkait Pengendalian Keuangan

Sistem Pengendalian Internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontorol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dpatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan menejemen atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian internal terkait pengendalian keuangan di Bank Papua telah dilakukan dengan cara :

1. Bank Papua telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi Bank Papua secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan Bank Bank Papua, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Bank Papua.
3. Direksi secara aktif melakukan/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Bank Papua.
4. Bank Papua telah melaksanakan prose pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

Internal Control System related to Financial Control

Internal Control System in accounting has an important role because the internal control system is a procedure or system designed to control, supervise, direct the organization in order to achieve a goal. The system can be used by management to plan and control the company's operations, help provide reliable accounting information for financial statements, and guarantee compliance with applicable laws and regulations.

The internal control system basically covers the organization, methods and measures that are coordinated to safeguard the wealth of the organization, examine the accuracy and reliability of financial data, encourage efficiency and fulfillment of management policies or in other definitions, internal control is a policy and procedure that protects the organization's assets from possible misuse, ensuring that information has been presented accurately and ensuring that regulations have been followed accordingly.

The internal control system related to financial control at Bank Papua has been carried out by:

1. *Bank Papua has prepared a Bank Business Plan that discusses Bank Papua's overall strategy which includes the direction of business development.*
2. *Determination of the strategy has taken into account the impact on Bank Papua's capital, including projected capital & KPMM (Minimum Capital Requirement), discussion / providing input and monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the business strategy of Bank Bank Papua .*
3. *The Board of Director actively conducts / provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly influence the business strategy of Bank Bank Papua.*
4. *Bank Papua has implemented a process of financial control through the monitoring of realization compared to finance in reports that are made periodically and brought to the Board of Director' meeting when a Board of Director follow up is needed.*

Kerangka Sistem Pengendalian Internal terkait Pengendalian Operasional

Secara umum, Pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal merupakan kumpulan dari pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Terkait pengendalian operasional, Bank Papua telah melakukan langkah sebagai berikut

1. Bank Papua telah melengkapi standar operating procedure/ manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Bank Bank Papua terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Bank Papua telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dimana:
   - Bank Bank Papua memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
   - Bank Bank Papua telah memiliki Satuan Kerja / divisi Kepatuhan yang besifat bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
   - Adanya laporan bulanan pemantauan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Bank Bank Papua yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Internal Control System Framework related to Operational Control

In general, Internal Control is part of each system that is used as a procedure and guideline for the operational implementation of a particular company or organization. While the Internal Control System is a collection of internal controls that are integrated, related and mutually supporting one another.

Related to operational control, Bank Papua has taken the following steps

1. *Bank Papua has completed standard operating procedures / work manuals detailing the work procedures for each banking operational transaction conducted at Bank Bank Papua related to new products and activities including related operational risk mitigation.*
2. *Bank Papua has established a well-organized organizational structure, equipped with a supervisory / control unit so that it can support operational control.*
3. *Compliance with other laws and regulations, where:*
   - *Bank Bank Papua has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.*
   - *Bank Bank Papua has a Compliance Work Unit / division that is independent of operational work units in carrying out the compliance function.*
   - *Monthly monitoring reports on Bank Papua's Precautionary Provisions are submitted to the Board of Commissioners and Board of Director.*

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka yang Diakui secara Internasional (*COSO International Control Framework*)

Conformity of the Internal Control System with the Internationally Recognized Framework (COSO International Control Framework)

Sistem Pengendalian Internal Bank Papua mengadopsi pada prinsip *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Komponen Pedoman Sistem Pengandalian Internal terdiri atas lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Activities*),
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*),
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*),
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*),
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies)*

Bank Papua's Internal Control System adopts the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) principle. The Internal Control System Guidelines Component consists of five main elements which are interrelated to one another, namely:

1. *Oversight by Management and Management Oversight and Control Activities,*
2. *Risk Recognition and Assessment,*
3. *Control Activities and Separation of Functions (Control Activities and Segregation of Duties),*
4. *Accounting, Information and Communication Systems (Accountancy, Information and Communication),*
5. *Monitoring Activities and Corrective Actions of Deviations (Monitoring Activities and Correcting Deficiencies)*

Berikut uraian dari ke lima elemen tersebut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi Bank Papua. Adapun pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan Sistem Pengendalian Internal Bank Papua, antara lain:

1. Dewan Komisaris
   a. Dewan komisaris mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
      - Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan;
      - Memahami risiko utama yang dihadapi bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*) dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko tersebut;
      - Mengesahkan struktur organisasi;
      - Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.
   b. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab tersebut, maka dewan komisaris:
      - Harus dapat bersikap obyektif serta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko bank;
      - Harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektifitas sistem pengendalian internal, seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pimpinan dan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum dan audit internal;
      - Secara berkala mengadakan pertemuan dengan Direksi dan pejabat eksekutif bank untuk membahas efektifitas sistem pengendalian internal;
      - Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh Direksi, Divisi Audit Internal (DAI) dan auditor eksternal;

The following description of the five elements:

1. Supervision by Management and Control Culture

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the supervision of the Bank Papua organization. As for the parties involved or the parties concerned in the supervision of the Bank Papua Internal Control System, among others:

1. Board of Commissioners
   a. The board of commissioners has the following responsibilities:
      - *To approve and periodically review the bank's overall business policies and strategies;*
      - *Understand the main risks faced by banks, determine the level of risk that can be tolerated (risk tolerance) and ensure that the Board of Director has taken the steps necessary to identify, measure, monitor and control those risks;*
      - *To approve the organizational structure;*
      - *Ensuring that the Board of Director has monitored the effectiveness of the implementation of the internal control system.*
   b. In order to fulfill these responsibilities, the board of commissioners:
      - *Must be able to be objective and have knowledge and ability and curiosity about business activities and bank risks;*
      - *Must play an active role to ensure improvements in bank problems that can reduce the effectiveness of the internal control system, such as obstacles in the flow of information from subordinates to the leadership and weaknesses in the implementation of financial, legal and internal audit functions;*
      - *Periodically hold meetings with the Board of Director and executive officers of the bank to discuss the effectiveness of the internal control system;*
      - *Reviewing the results of evaluating the implementation of internal control made by the*

- Secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh regulator / otoritas bank, auditor internal dan auditor eksternal;
- Secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi bank yang telah ditetapkan.

2. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank;
- Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggungjawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
- Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten;
- Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal; dan
- Memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian internal.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- Menugaskan para pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian internal terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi;
- Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggungjawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi bank;
- Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian internal telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai;

Board of Director, DAI and external auditors;

- *Periodically make efforts to ensure that the Board of Director has followed up appropriately with findings and recommendations submitted by bank regulators / authorities, internal auditors and external auditors;*
- *Periodically review the validity of the established bank strategy.*

2. *Board of Director*

The Board of Director have the following responsibilities:

- *Implement policies and strategies that have been approved by the Board of Commissioners;*
- *Develop procedures to identify, measure, monitor and control risks faced by banks;*
- *Maintain an organizational structure that reflects authority, responsibilities and clear reporting relationships;*
- *Ensuring that effective delegation of authority is supported by consistent application of accountability;*
- *Establish policies and strategies and procedures for internal control; and*
- *Monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system.*

In order to carry out these responsibilities, the Board of Director must take steps, including:

- *Assign officials responsible for certain activities or functions to develop policies and procedures for internal control over operational activities and organizational adequacy;*
- *Carry out effective controls to ensure that officials and employees have developed and implemented established policies and procedures;*
- *Documenting and disseminating organizational structure that clearly illustrates the lines of authority and responsibility for reporting and organizes an effective communication system for all levels of the bank's organization;*
- *Take appropriate steps to ensure that the activities of the internal control function have been carried out by managers / officials and employees who have*

- Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor internal dan/atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya

3. Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankankepada seluruh Pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank.

Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Bank, antara lain:

1. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat;
2. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku; dan/atau
3. Meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya pegawai mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh kebijakan, standar, dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait.

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank harus menghindari kebijakan dan praktik yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran, seperti penekanan pada pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang hanya menitikberatkan pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif, dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang dilakukan.

adequate experience and ability;

- *Implement effective corrective steps or recommendations from internal auditors and / or external auditors, among others by assigning employees responsible for implementing them*

3. *Control Culture*

The Board of Director and Board of Commissioners are responsible for improving work ethics and high integrity and creating an organizational culture that emphasizes all Bank Employees regarding the importance of internal control in the Bank.

In order to create a culture of control, the steps that must be considered and carried out by the Bank include:

1. *The Board of Director and Board of Commissioners must be role models for all employees or have a high personal commitment to the development of a healthy Bank;*
2. *The Board of Director and the Board of Commissioners must be able to manage human resources, including in the process of assigning employees according to their skills, knowledge and behavior; and / or*
3. *Raising awareness for all Bank employees regarding the importance of the effectiveness of carrying out their respective duties and responsibilities and subsequently communicating to management concerned about any problems that occur in the Bank's operational activities.*

To support this control culture, all policies, standards and operational procedures must be documented in writing and made available to all relevant employees.

In order to strengthen ethical values, the Bank must avoid policies and practices that can lead to impetus or opportunities to commit irregularities or violations, such as the emphasis on achieving short-term targets by ignoring the impact of long-term risks, a compensation system that only focuses on long-term performance short, ineffective separation of functions, and imposition of sanctions that are too light or too excessive for violations committed.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Sistem Pengendalian Internal yang efektif mengharuskan Bank Papua secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilain risiko harus dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain:

1. Perubahan kegiatan operasional Bank;
2. Perubahan susunan personalia;
3. Perubahan sistem informasi;
4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
5. Perkembangan teknologi;
6. Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru;
7. Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi Bank;
8. Perubahan dalam sistem akuntansi;
9. Ekspansi usaha;
10. Perubahan hukum dan peraturan; dan
11. Perubahan perilaku serta ekspektasi Nasabah.

Suatu SPI yang efektif mengharuskan Bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian risiko ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut. Metodologi penilaian risiko harus menjadi tolak ukur pembuatan profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang diperbaharui secara berkala. Penilaian risiko juga meliputi penilaian risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

2. Risk Identification and Assessment

An effective Internal Control System requires Bank Papua to continuously identify and assess risks that can affect the achievement of targets. Risk assessment must be carried out by internal auditors so that the scope of the audit is wider and more comprehensive.

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Director in the context of identification, analysis, and assessing the risks faced by the Bank in the context of achieving the targets set.

Risks can arise or change according to the conditions of the Bank, including:

1. *Changes in Bank operational activities;*
2. *Changes in the composition of personnel;*
3. *Changes in information systems;*
4. *Fast growth in certain business activities;*
5. *Technology development;*
6. *Development of new services, products or activities;*
7. *Business mergers, business mergers, takeovers, and bank restructuring occur;*
8. *Changes in the accounting system;*
9. *Business expansion;*
10. *Changes in laws and regulations; and*
11. *Changes in customer behavior and expectations.*

An effective SPI requires the Bank to continuously identify and assess risks that can affect the achievement of targets. Risk assessments must also be carried out by internal auditors so that the scope of the audit is wider and more comprehensive.

This risk assessment must be able to identify the types of risks faced by the Bank, the determination of risk limits, and risk management techniques. The risk assessment methodology must be a benchmark for making risk profiles in the form of data documentation, which is updated regularly. Risk assessment also includes assessments of risks that can be measured (quantitative) and cannot be measured (qualitative) or to risks that can be controlled and cannot be controlled, taking into account the costs and benefits. Furthermore, the Bank must decide to take the risk or not, by reducing certain business activities.

Penilaian risiko tersebut harus mencakup semua Risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko Stratejik, dan risiko kepatuhan.

The risk assessment must cover all risks faced, both individual and aggregate risks, which include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

Pengendalian internal perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.

Internal controls need to be re-assessed appropriately in the event that there are risks that have not been controlled, both those that have already existed and those that have just emerged. The review is carried out, among others, by continuously evaluating the effect of any changes in the environment and conditions as well as the impact of achieving targets or effectiveness of internal control in the operations and organization of the Bank.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh Pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

a. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

3. Activity Control and Separation of Functions

Control activities must involve all Bank Personnel, including the Board of Director. Therefore, control activities will run effectively if planned and implemented to control the risks that have been identified. Control activities also include the establishment of control policies and procedures as well as early verification processes to ensure that these policies and procedures are consistently adhered to, and are activities that are inseparable from each of the daily functions or activities of the Bank.

a. Control Activities

Control activities include policies, procedures, and practices that provide confidence of officials and employees of the Bank that the directives of the Bank's Board of Director and Board of Commissioners have been carried out effectively. These control activities will be able to assist the Board of Director and Board of Commissioners of the Bank in managing and controlling risks that can affect the performance or result in Bank losses.

1. Management Review (Top Level Reviews)

The Board of Director of the Bank periodically requests explanations (information) and operational performance reports from officials and employees to make it possible to review the results of progress (realization) compared to the targets to be achieved, such as financial statements compared to the budget plans set. Based on the review, the Board of Director immediately detected problems such as control weaknesses, financial reporting errors, or fraud.

2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
   Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (DAI) dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam kaji ulang kinerja operasional, Divisi Audit Internal (DAI):
   i. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank;
   ii. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank; dan
   iii. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
      (a) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan; dan
      (b) Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).
3. Pengendalian Sistem Informasi
   Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal.

   Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
   a) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal; dan
   b) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

2. *Operational Performance Review (Functional Review)*
   This review is carried out by DAI with a higher frequency, both daily, weekly and monthly reviews. In reviewing operational performance, DAI:

   i. Reviewing the risk assessment (risk profile report) produced by the Risk Management Division;

   ii. analyze operational data, both data related to risk and financial data, i.e. verify the details and transaction activities compared to the outputs (reports) produced by the Risk Management Division; and

   iii. conduct a review of the realization of the implementation of the work plan and budget, in order to:
      (a) identify the cause of significant deviations; and
      (b) establish requirements for corrective actions.

3. *Control of Information Systems*
   The Bank verifies the accuracy and completeness of the transaction and carries out the authorization procedure, in accordance with internal regulations.

   Information system control activities can be classified into 2 (two) criteria, namely:
   a) General control, including control of data center operations, software procurement and maintenance systems, security of access, and development and maintenance of existing application systems. This general control is applied to mainframes, servers, and users' workstations, as well as internal-external networks; and

   b) Application control, applied to the program used by the Bank in processing transactions and to ensure that all transactions are true, accurate, and have been properly authorized. In addition, application control must be able to ensure the availability of an effective audit process and to check the accuracy of the audit process.

4. Pengendalian Aset Fisik
   Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.
5. Dokumentasi
   Bank paling sedikit harus memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, serta harus diinformasikan kepada Pejabat dan Pegawai Bank Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, akuntan publik, dan pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non-rutin.

b. Pemisahan Fungsi
   1. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*".
   2. Dalam hal diperlukan karena perubahan karakteristik kegiatan usaha dan transaksi serta organisasi Bank, Direksi Bank harus menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
   3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti akuntan publik.

4. *Control of Physical Assets*
   Control of physical assets is carried out to ensure the implementation of physical security of the Bank's assets. This activity includes safeguarding assets, records, and limited access to computer programs and data files, as well as comparing the value of the Bank's assets and liabilities with the values listed in the control notes, specifically checking asset values periodically.
5. *Documentation*
   The Bank must at least formalize and document adequate policies, procedures, systems and accounting standards, and audit processes. These documents must be updated periodically to describe the Bank's actual operational activities, and must be informed of Bank Officers and Employees Upon request, documents must always be available for the benefit of internal auditors, public accountants, and bank supervision by the Financial Services Authority. The accuracy and availability of documents must be assessed by internal auditors when conducting audits on a routine or non-routine basis.

b. *Separation of Functions*
   1. *Separation of functions is intended so that everyone in his office does not have the opportunity to make and hide mistakes or irregularities in the implementation of tasks at all levels of the organization and all steps of operational activities. Banks must adhere to the principle of separation of functions, known as the "Four-Eyes Principle".*
   2. *If necessary due to changes in the characteristics of business activities and transactions as well as the Bank's organization, the Board of Director of the Bank must establish procedures (authority) including the determination of a list of officers who can access a transaction or high-risk business activity.*
   3. *An effective SPI requires segregation of functions and avoids the granting of authority and responsibility which can lead to various conflicts of interest. All aspects that can cause conflicting interests must be identified, minimized and monitored carefully by other independent parties, such as public accountants.*

4. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank harus melakukan langkah-langkah, antara lain:
   i. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa
   ii. orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
   iii. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
      (a) Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;
      (b) Rekening Nasabah dan rekening Pemilik Bank;
      (c) Transaksi dalam pembukuan Bank;
      (d) Pemberian informasi kepada Nasabah Bank;
      (e) Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan atau pembiayaan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit atau pembiayaan;
      (f) Kegiatan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan; dan
      (g) Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Hal ini secara jelas tercermin dalam jenjang organisasi Bank Papua dalam menetapkan fungsi dan tugas tertentu yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang, dan pemisahan fungsi pada kegiatan *back office*, *front office* dan lain-lain.

a. Sistem Akuntansi
   1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis,
   2. mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
   3. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala atau paling sedikit setiap

4. In carrying out the separation of functions, the Bank must take steps, including:
   i. Assign certain functions or tasks to the Bank that must be separated or allocated to several
   ii. people in order to reduce the risk of manipulation of financial data or misuse of Bank assets;
   iii. The separation of functions is not limited to front and back office activities, but also in order to control:
      (a) Approval of expenditure of funds and realization of expenditure;
      (b) Customer's account and bank owner's account;
      (c) transactions in the books of the Bank;
      (d) Provision of information to Bank Customers;
      (e) Assessment of the adequacy of credit or financing documentation and debtor monitoring after credit or financing disbursement;
      (f) Other business activities that may cause significant conflicts of interest; and
      (g) Independence of risk management functions at the Bank.

4. Accounting, Information and Communication Systems

An adequate accounting, information and communication system is intended to be able to identify problems that may arise and be used as a means of exchanging information in the context of carrying out tasks in accordance with their respective responsibilities. This is clearly reflected in the level of organization of Bank Papua in determining certain functions and tasks that are separated or allocated to several people, and the separation of functions in back office, front office activities and others.

a. Accounting system
   1. The accounting system includes methods and records in order to identify, classify, analyze,
   2. classifying, recording or recording, and reporting Bank transactions.
   3. To guarantee accounting data that is accurate and consistent with available data based on the results of the processed system, the reconciliation process between accounting data and management information systems must be carried out regularly or at

bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.

b. Sistem Informasi
   1. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
   2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif paling sedikit menyediakan data atau informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, informasi pasar (kondisi eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
   3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) paling sedikit menyediakan sistem informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor internal), dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
   4. Bank paling sedikit harus mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) serta sistem rekam cadang (*back-up*) telah bekerja secara efektif, pelaksanaan prosedur, proses, dan sistem rekam cadang (*back-up*) harus didokumentasikan dan diuji kembali efektivitasnya secara berkala. Bank harus mendokumentasikan pelaksanaan pengujian secara berkala dan Direksi harus memberikan perhatian yang penuh terhadap temuan kelemahan pada prosedur, proses, dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

least every month. Every deviation that occurs must be immediately investigated and the problem resolved. The reconciliation process must also be documented as part of the overall audit trail process requirements.

b. Information Systems
   1. The information system must be able to produce reports on business activities, financial conditions, application of risk management, and fulfillment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Director and the Board of Commissioners.
   2. Effective SPI at least provides sufficient and comprehensive internal data or information regarding finances, the Bank's compliance with laws and regulations, market information (external conditions), and any events and conditions needed in order to make the right decisions and can be accounted for.
   3. SPI at least provides a credible information system regarding all functional activities of the Bank, especially significant functional activities that have high risk potential. The information system including the storage and use of electronic data must be guaranteed security, monitored by an independent party (internal auditor), and supported by an adequate contingency program.
   4. Banks must at least organize a contingency recovery plan and a back-up system to prevent high-risk business failures. To ensure that all contingency recovery plans and back-up systems have worked effectively, the implementation of procedures, processes and back-up systems must be documented and periodically tested for effectiveness. . The bank must document the implementation of the testing periodically and the Board of Director must pay full attention to the findings of weaknesses in procedures, processes and systems based on the test results and then take the necessary corrective steps.

5. Bank paling sedikit harus memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak Risiko, Bank harus mengendalikan secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbul kerugian Bank yang signifikan.
6. Dalam rangka pengendalian internal terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   i. Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit. Proses jejak audit harus dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomasi telah bekerja secara efektif dan akurat. Divisi Audit Internal (DAI) harus melakukan penilaian terhadap efektivitas dan akurasi proses jejak audit ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal Bank.
   ii. Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general controls*) maupun pengendalian terhadap aplikasi perangkat lunak dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
   iii. Antisipasi terjadinya Risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin Bank sehingga Bank harus menyelenggarakan sistem pemulihan (*recovery*) dan rencana kontijensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi sebelumnya (*disaster and recovery plan*).
   iv. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
   v. Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem informasi harus didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.

5. Banks must at least have and maintain a management information system that is implemented, both in electronic and non-electronic forms. Considering that electronic information systems and the use of information technology have a risk impact, the Bank must control effectively in order to avoid any business disruption and the possibility of significant Bank losses.

6. In the context of internal control over the implementation of information systems and technology, Banks must pay attention to the following matters:
   i. The availability of adequate evidence and documents in order to support the audit trail process. The audit trail process must be carried out effectively and documented to ensure that the automation process has worked effectively and accurately. DAI must assess the effectiveness and accuracy of the audit trail process when evaluating the implementation of the Bank's internal controls.
   ii. Implementation of control of computer systems and security (general controls) as well as control of software applications and other manual procedures (application controls).
   iii. Anticipation of the risk of disruption or loss caused by factors that are beyond the reach of the Bank's routine control so that the Bank must carry out a recovery system and contingency plans as well as checking periodically for possible things that are difficult to predict beforehand (disaster and recovery plan) .
   iv. Information systems must provide data and information that is relevant, accurate, timely, accessible to interested parties, and presented in a consistent format.
   v. As part of the recording or bookkeeping process, the information system must be supported by a good accounting system, including the establishment of procedures and retention schedules for recording transactions.

c. Sistem Komunikasi
   1. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan, auditor eksternal, pemegang saham, dan nasabah Bank.
   2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan Pegawai Bank sepenuhnya memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
   3. Direksi Bank harus menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur Risiko, dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.
   4. Struktur organisasi Bank harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan kerja atau unit kerja, sebagai berikut:
      I. Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif Bank mengetahui risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi harus dapat merespon dengan baik sehingga menghasilkan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
      II. Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
      III. Informasi lintas satuan kerja atau Unit Kerja untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

c. Communication system
   1. The communication system must be able to provide information to all parties, both internal and external such as the Financial Services Authority, external auditors, shareholders and Bank customers.
   2. The Bank's SPI must ensure that there are effective channels of communication so that all Bank officials and employees fully understand and comply with policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities.
   3. The Board of Director of the Bank must establish an effective communication channel so that the information needed is affordable by interested parties. This requirement applies to every information, both regarding policies and procedures that have been set, risk exposures, and actual transactions as well as regarding the operational performance of the Bank.
   4. The organizational structure of the Bank must allow for an adequate flow of information, that is information up, down, and across work units or work units, as follows:
      I. Upward information to ensure that the Board of Director, Board of Commissioners, and executive officers of the Bank are aware of the risks and operational performance of the Bank. The information channel must be able to respond well so that it results in the implementation of corrective measures and can be known by management.
      II. Information down to ensure that the Bank's objectives, strategies and expectations as well as policies and procedures have been communicated to managers at the lower levels and implementers.
      III. Information across work units or work units to ensure that information known to a particular work unit can be conveyed to other relevant work units, specifically to prevent conflicts of interest in decision making and to create adequate coordination.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank Papua melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan utama Bank Papua dilakukan oleh seluruh unit operasional dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank Papua sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

a. Kegiatan Pemantauan
   1. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*Risk Taking Unit*) maupun oleh Divisi Audit Internal (DAI).
   2. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
   3. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, paling sedikit:
      i. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
      ii. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
      iii. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
      iv. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review*, laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi* atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;

5. Monitoring Activities and Deviation Corrective Actions

Bank Papua conducts continuous monitoring of the overall effectiveness of the implementation of internal control. Bank Papua's main monitoring is carried out by all operational units and functions as part of the daily activities of Bank Papua including periodic evaluations.

a. Monitoring activities
   1. Banks must continuously monitor the overall effectiveness of internal control. The Bank's main risk monitoring must be prioritized and function as part of daily Bank activities including periodic evaluations, both by the operational work unit (Risk Taking Unit) and by the DAI.

   2. Banks must monitor and evaluate the adequacy of SPI continuously in relation to changes in internal and external conditions and must increase the capacity of the SPI so that its effectiveness can be improved.

   3. Steps that must be taken by the Bank in order to carry out effective monitoring activities, at least:

      i. Ensure that the monitoring function is clearly defined and well-structured within the Bank's organization;
      ii. Establish work units or employees assigned to monitor the effectiveness of internal control;

      iii. Establish appropriate frequencies for monitoring activities based on risks inherent in the Bank and the nature or frequency of changes that occur in operational activities;

      iv. Integrate SPI into operational activities and provide routine reports such as bookkeeping journals, management reviews, reports on approval of exceptions or deviations from established policies and procedures (justification of irregularities) which are then reviewed;

v. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan

vi. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

b. Fungsi Divisi Audit Internal (DAI)

1. Bank harus menyelenggarakan audit internal yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (DAI) harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki
2. jumlah yang memadai.
3. Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), Divisi Audit Internal (DAI) harus melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila ada), direktur utama, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4. Divisi Audit Internal (DAI) harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas Divisi Audit Internal (DAI) maka Bank harus berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit internal.

c. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), Divisi Audit Internal (DAI), maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian internal yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian internal, antara lain:

v. Conduct a review of the documentation and evaluation results of the work units or employees assigned to carry out monitoring; and

vi. Establish information or feedback (feedback) in an appropriate format and frequency.

b. DAI function

1. Banks must conduct effective and comprehensive internal audits of the Internal Control System (SPI). The internal audit carried out by the Internal Audit Division (DAI) must be supported by an independent, competent, and owned auditor

2. Adequate amount.
3. As part of the Internal Control System (SPI), the Internal Audit Division (DAI) must report the findings directly to the Board of Commissioners or the Audit Committee (if any), the president director, and the director in charge of the compliance function.

4. DAI must conduct an independent assessment of the adequacy of and compliance of the Bank with established policies and procedures.

5. In determining the position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope of DAI's duties, the Bank must also refer to the provisions of the legislation concerning the implementation of the commercial bank compliance function and the standard implementation of the internal audit function.

c. Correction of Weaknesses and Corrective Deviations

1. Weaknesses in internal control, both those identified by the operational work unit (risk taking unit), DAI, and other parties, must be immediately reported to and the attention of authorized officials and / or Board of Director. Material internal control weaknesses must be reported to the Board of Commissioners.

2. Corrective measures that must be taken by the Bank in order to improve the weaknesses of internal control, including:

I. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait;
II. Divisi Audit Internal (DAI) harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan direktur utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti;
III. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu
IV. sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan; dan
V. Direksi dan Dewan Komisaris harus menerima laporanNBsecara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal.

I. Every report regarding weaknesses in internal control or the ineffectiveness of Bank risk control must be immediately followed up by the Board of Director, Board of Commissioners, and related executive officers;
II. DAI must conduct an adequate review or other monitoring step for the weaknesses that occur and immediately report to the Board of Commissioners, the Audit Committee (if any), and the president director in case there are still weaknesses that have not been corrected or recommendations for corrective actions that have not been followed up;

III. To ensure that all weaknesses are immediately followed up, the Board of Director must create a

IV. a system that can track weaknesses in internal control and take corrective steps; and

V. The Board of Director and Board of Commissioners must receive periodic NB reports in the form of summaries of the results of the identification of all problems in internal control.

Prosedur Mengenai Hasil *Review* atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Tahun 2019

Prosedur mengenai hasil *review* dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian pada tahun buku, Bank Papua melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh fungsi *1st line of defense* sebagai *risk owner* yang melakukan evaluasi secara terus menerus dalam kegiatan operasional bank, fungsi *2nd line of defense* yakni jajaran Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang secara berkala memastikan kecukupan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan, serta fungsi *3rd line of defense* yang melakukan kegiatan audit.

Divisi Audit Internal (DAI) melaksanakan evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal dilakukan dengan tujuan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan secara memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Evaluasi kecukupan sistem pengendalian internal dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem atau mekanisme yang dikembangkan Bank Papua dalam rangka mencapai tujuan kepatuhan, tujuan informasi dan tujuan operasional.

Procedure Regarding Review Results for the Implementation of the 2019 Control System

Procedures regarding the results of the reviewing are carried out on the implementation of the control system in the financial year, Bank Papua to evaluate the effectiveness of the implementation of SPI on an ongoing basis, whether carried out by the 1st line of defense function as a risk owner who evaluates continuously in the bank's operational activities, the 2nd line of defense function namely the Risk Management and Compliance staff who regularly ensure the adequacy of risk management and compliance with regulations, as well as the 3rd line of defense function that carries out audit activities.

The Internal Audit Division performs an evaluation of the adequacy of the internal control structure carried out in order to assess the reliability of the internal control system so that it is expected to provide sufficient confidence that the company's goals and objectives can be achieved efficiently and economically. Evaluation of the adequacy of the internal control system is carried out through a review of policies, regulations, systems or mechanisms developed by Bank Papua in order to achieve compliance, information and operational objectives.

1st Risk Taking Unit or 1st Line of Defence
2st Risk Control unit or 2nd Line of Defence
3st Risk Assurance Unit or 3rd Line of Defence

Risk Owner bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*Day to day*) *Risk Management and Control*.

- bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (*Day to day*)bisnis atau fungsinya
- Identifikasi, mengukur, mitigasi memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/ fungsi sesuai dengan strategi kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh *2nd line of defense*

Risk Control bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko bank

- Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko termasuk *risk, appetite & limits*
- menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkap, metodologi, dan standar pengelolaan risiko
- Sebagai *risk oversignt unit*, melakukan agregasi dan pelaporan risiko secara keseluruhan
- *Advice* dan rekomendasi ke *1st Line defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan
- Melakukan eskalasi permasalahan atau keputusan penting kepada *Senior Management*/Direksi dan/atau Komite Risiko dan Kapital Sub Komite Manajemen Risiko dan/ atau Komite manajemen Risiko Terintegrasi (*Risk Management Committee*)

Risk Assurance, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi managemen risiko dan pengendali intern

- Melakukan Audit internal secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal
- Menyusun rekomendasi Corretive *action* memonitor pelaksanaannya
- Melaporkan hasil Audit ke Komite Audit dan *Key Stake* sesuai kewenangan

Risk Owners are responsible for the risks taken, their execution and their results (Dy to day) Risk Management and Control.

- *responsible for managing and controlling risks inherent in day to day business activities or functions*
- *Identify, measure, mitigate, monitor and report risks inherent in business activities / functions in accordance with the policy strategy / risk parameters set by the 2nd line of defense*

Risk Control is responsible for preparing the framework, policies, principles, and methodology of bank risk management

- *Prepare risk management strategies and policies including risk, appetite & limits*
- *develop a framework, policies, principles, pitfalls, methodology, and risk management standards*
- *As a risk oversignt unit, carry out aggregation and overall risk reporting*
- *Advice and recommendations to the 1st Line defense in implementing risk policies according to authority*
- *Escalate issues or important decisions to the Senior Management / Directors and / or the Risk Committee and Capital Committee of the Risk Management Sub-Committee and / or the Integrated Risk Management Committee (Risk Management Committee)*

Risk Assurance, is responsible for independently evaluating the effectiveness of the implementation of risk management and internal control

- *Conducting Internal Audit independently and periodically for the implementation of risk management and internal control*
- *Compiling recommendations for action monitoring the implementers*
- *Report the results of the Audit to the Audit Committee and Key Stake according to authority*

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Divisi Audit Internal berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Bank Papua. Pengendalian Internal merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Hasil *self assesment* kecukupan Sistem Pengendalian internal tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Internal Control System Evaluation Results

The Internal Audit Division plays a role in evaluating the adequacy and effectiveness of internal control carried out by the management of Bank Papua. Internal Control is an integrated part of the system and procedures in every activity in the work unit so that if deviations occur, they can be known early and corrective steps are taken by the relevant work unit.

The results of the 2019 internal control system adequacy self assessment are as follows:

Bank Papua	Risiko Kredit	Risiko Pasar	Risiko Likuiditas	Risiko Kredit	Risiko Operasional	Risiko Hukum	Risiko Stratejik	Risiko Kepatuhan	Risiko Reputasi	Risiko Komposit
Peringkat	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Berdasarkan hasil evaluasi Divisi Audit Internal (DAI), secara umum kecukupan struktur pengendalian internal telah memadai dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan
   Fungsi Kepatuhan Bank Papua telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengujian prinsip kehati-hatian atas rencana kebijakan dan/atau keputusan Bank Papua (termasuk produk dan/ atau aktivitas baru).
   b. Dilaksanakan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil pengujian prinsip kehati-hatian (*monitoring*).
   c. Dilaksanakan *review* terhadap kebijakan internal Bank Papua.
   d. Dilaksanakan analisa dampak ketentuan eksternal.

   Seluruh hasil kegiatan tersebut di atas telah disampaikan secara berkala sebagai laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Papua.
2. Tujuan Informasi
   Bank Papua telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Lebih lanjut, Bank Papua telah memiliki kebijakan tentang Pengelolaan Dokumen (administrasi dokumen, pengelolaan kontrol/ register, penyimpanan serta retensi dokumen).

Based on the results of the evaluation of the Internal Audit Unit, in general the adequacy of the internal control structure is sufficient with the following evaluation results:

1. *Purpose of Compliance*
   The Compliance Function of Bank Papua has implemented the following matters:
   a. Testing prudential principles for Bank Papua's policy plans and / or decisions (including new products and / or activities).
   b. Carry out monitoring and follow-up on the results of testing the prudential principle (monitoring).
   c. A review of Bank Papua's internal policies was carried out.
   d. An analysis of the impact of external provisions was carried out.

   All the results of the above activities have been submitted periodically as a report on the implementation of Bank Papua's compliance function.
2. *Purpose of Information*
   Bank Papua has policies and procedures for implementing transparency in financial and non-financial conditions. Furthermore, Bank Papua has a policy on Document Management (document administration, control management / registers, document retention and retention).

3. Tujuan Operasional
   Bank Papua telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan usaha Bank Papua, antara lain:
   a. Bidang operasional
      Telah disusun Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan kebijakan operasional lainnya sebagai pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Bank Papua telah memiliki kebijakan pengelolaan aktiva tetap, kebijakan pengadaan barang dan jasa.
   b. Bidang perkreditan
      Bank Papua telah memiliki BPP Kredit dan kebijakan kredit lainnya sebagai pedoman bagi Pejabat Kredit dalam melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman.
   c. Bidang SDM
      Bank Papua memiliki arsitektur *human capital*, kebijakan pengelolaan *human capital*, kebijakan pengembangan *human capital*, kebijakan penilaian kinerja dan remunerasi.
   d. Bidang teknologi informasi
      Dalam rangka mengembangkan dan mengelola operasional teknologi informasi, Bank Papua telah memiliki kebijakan teknologi informasi yang disusun dengan mengacu prinsip-prinsip IT *Governance*.
4. Tujuan Budaya Risiko
   Bank Papua telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko, terdapat Fungsi Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja yang bertanggungjawab mengkoordinasikan proses penerapan Manajemen Risiko di masing-masing Unit Kerja.

3. Operational Objectives
Bank Papua already has policies, regulations, systems and procedures that govern Bank Papua's business activities, including:
a. Operational field
The Implementation Handbook (BPP) and other operational policies have been prepared as guidelines for workers in carrying out their duties and responsibilities. Bank Papua has a policy of managing fixed assets, policies on procurement of goods and services.

b. Credit field
Bank Papua already has a Credit BPP and other credit policies as a guide for Credit Officers in carrying out lending activities.
c. Human Resource
Bank Papua has a human capital architecture, human capital management policies, human capital development policies, performance appraisal policies and remuneration.

d. Information technology
In the context of developing and managing information technology operations, Bank Papua has developed an information technology policy that has been prepared in accordance with IT Governance principles.
4. Risk Cultural Objectives
Bank Papua already has an adequate organizational structure to support the application of risk management. Furthermore, to optimize the implementation of Risk Management, there is a Risk Management Function in each Work Unit that is responsible for coordinating the process of implementing Risk Management in each Work Unit.

Perkara Penting yang Sedang dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi

Important Cases Faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners, and Board of Director

Aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan lingkup usaha menjadi komitmen Perusahaan dalam menjalankan bisnis.

The aspect of compliance with applicable regulations as well as regulations that have relevance to the scope of business is the Company's commitment to conduct business.

Sepanjang tahun 2019, jumlah permasalahan hukum (perdata, pidana dan PHI) yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Throughout 2019, the number of legal issues (civil, criminal and PHI) that have been completed (which have permanent legal force) and which are still in the process of completion can be presented through the following table.

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2018-2019
Table of Amount of Legal Cases Year 2018-2019

Permasalahan hukum	Jumlah									
	PHI		PERDATA		PERDATA KHUSUS		PTUN		PIDANA	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /upaya perdamaian)	1	2	12	19	-	1	-	1	-	4
Dalam proses penyelesaian	2	-	16	7	7	9	1	-	-	0
Total	**3**	**2**	**28**	**26**	**7**	**10**	**1**	**1**		**4**

Perkara Penting Yang Dihadapi

Dari beberapa perkara/permasalahan hukum tersebut diatas, tidak terdapat perkara penting yang mencakup perkara/gugatan yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat, sehingga tidak terdapat atau tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat.

Important Issues Faced

Of the several legal cases / problems mentioned above, there are no important cases that cover cases / claims being faced by the company, members of the Board of Director and / or members of the Board of Commissioners, so there are no or no sanctions imposed on the company, members of the Board of Director and / or members of the Board of Commissioners in office.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access Information and Company Data

Menjamin ketersediaan informasi bagi seluruh *stakeholders* dan Pemegang Saham menjadi komitmen Bank Papua melalui penyediaan sarana dan media yang memadai guna mempermudah akses.

Ensuring the availability of information for all stakeholders and Shareholders is the commitment of Bank Papua through the provision of adequate facilities and media to facilitate access.

Website

Konten informasi yang disampaikan melalui *website* cukup lengkap dan terkini, antara lain terkait dengan informasi kegiatan operasional dan kinerja Bank Papua serta berbagai informasi penting lainnya. Alamat *website* : www.bankpapua.co.id.

Website

The information content delivered through the website is quite complete and up-to-date, including information on the operational activities and performance of Bank Papua as well as various other important information. Website address : www.bankpapua.co.id

Contact Center

Bank Papua *Hotline*
+62 - 967 532011

Contact Center

Bank Papua Hotline
+62 - 967 532011

Media Sosial

Media sosial yang dimiliki adalah akun Facebook, twitter dan Instagram

- fanpage facebook : **@bankpapua1966**
- Twitter : **@bankpapua1966**
- Instagram : **bankpapua_id**

Social media

The social media that is owned is a Facebook, twitter and Instagram account

- *Facebook fanpage: **@bankPapua1966***
- *Twitter: **@bankpapua1966***
- *Instagram: **bankpapua_id***

Tampilan Website
Website Display

Tampilan Facebook
Facebook Display

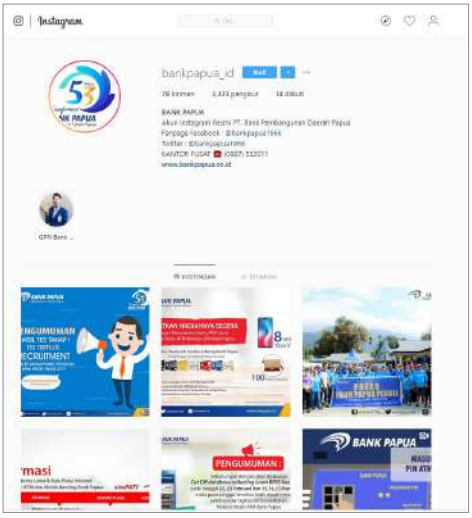

Tampilan Instagram
Instagram Display

Bank Papua telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bank Papua antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi melalui website **www.bankpapua.co.id**
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi *Call Center* 62 - 967 532011
3. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, *poster* dan *banner*.
4. Bank Papua juga menyampaikan informasi melalui upaya transparansi penyampaian palaporan, laporan kepada regulator, *analyst meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Di dalam *website* bank telah menyampaikan informasi mengenai:

1. *Corporate Identity*
2. Produk dan Layanan
3. Laporan Tahunan, GCG dan CSR
4. Pengurus bank
5. Visi dan Misi Bank

Bank Papua has provided information to stakeholders that enables stakeholders to exercise their rights. Information dissemination of Bank Papua is carried out through the following media:

1. *The company always makes it easy for stakeholders to access information, including financial and company information, publications, products and Corporate actions through the website* ***www.bankpapua.co.id***
2. *To get more information, customers can contact Call Center 62 - 967 532011*
3. *Information through other media, including mass media (Press Releases), internal magazines / bulletins, posters and banners.*
4. *Bank Papua also conveyed information through efforts to transparency in reporting reports, reports to regulators, analyst meetings, press conferences, and so forth.*

On the website the bank has submitted information about:

1. *Corporate Identity*
2. *Products and Services*
3. *Annual Report, GCG and CSR*
4. *Bank management*
5. *Bank's Vision and Mission*

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi :
To get more information about the Company, the general public and investors can contact:

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretry

Alamat Kantor :
Jl. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111

Nomor Telepon :
62-967 532011,533608,531944,532351

Nomor Fax :
Fax. 62-967 533019

Email :
sekper@bankpapua.co.id

Kode Etik Perusahaan

Company Code of Conduct

Pengaturan dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik (GCG) memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic Policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan.

The regulation and implementation of the implementation of good Bank Corporate Governance (GCG) requires commitment from top management and all levels of the organization. The implementation starts with the establishment of a basic policy (strategic policy) and a code of ethics that must be obeyed by all parties in the company.

Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

For Indonesian banks, adherence to the code of ethics, which is manifested in only words and deeds, is an important factor as a basis for implementing good corporate governance in the Bank.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Papua mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan pedoman perilaku dan etika bisnis untuk menunjang pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada setiap insan Bank Papua.

In carrying out its business activities, Bank Papua strives to apply the best ethical standards in accordance with the code of conduct and business ethics to support the implementation of Good Corporate Governance for all people of Bank Papua.

Keberadaan Kode Etik Bank Papua

The Existence of the Bank Papua Code of Conduct

Kode Etik Bank Papua ditetapkan oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi segenap insan Bank Papua dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi yang berlaku di dalam bisnis entitas secara umum, dengan harapan akan membawa pengaruh bagi pertumbuhan kedepannya secara sehat. Peluncuran kode etik sejak tahun 2004, diharapkan menjadi momentum yang tepat bagi seluruh insan Bank Papua untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kearah sikap dan perilaku yang lebih berintegritas, efisien dan efektif.

The Bank Papua Code of Conduct was established by management to be used as a guide for all people of Bank Papua to behave and behave in accordance with high ethical standards that apply in the entity's business in general, with the hope that it will have an influence on future healthy growth. The launch of the code of ethics since 2004, is expected to be the right momentum for all people of Bank Papua to make changes and adjustments towards attitudes and behaviors that are more integrity, efficient and effective.

Penerapan kode etik oleh seluruh insan Bank Papua dimaksudkan untuk :

1. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan benturan kepentingan atau potensi munculnya benturan kepentingan.
3. Menjaga kerahasiaan informasi Bisnis Bank Papua dan Informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Bank Papua.

The application of the code of conduct by all Bank Papua personnel is intended to:

1. *Comply with all applicable laws and regulations.*
2. *Avoiding activities that can cause a conflict of interest or a potential conflict of interest.*
3. *Maintaining the confidentiality of Bank Papua Business information and information relating to parties who have business relations with Bank Papua.*

Sedangkan isi dan nilai-nilai Kode Etik Bank Papua, yakni:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan.
2. Hubungan dengan pelanggan eksternal.
3. Hubungan dengan pelanggan internal.
4. Hubungan dengan masyarakat sekitar
5. Hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan insan Bank Papua.
6. Kebijakan Periklanan/Promosi.
7. Kerahasiaan informasi.
8. Ketepatan Pembukaan.
9. Transaksi dengan Nasabah dan Pemasok.
10. Benturan Kepentingan.
11. Pemberian Hadiah.
12. Penerimaan Hadiah.
13. Kontribusi dan Aktivitas Politik.

Pokok-pokok Kode Etik Bank Papua

Pedoman Kode Etik Bank Papua mengandung penerapan standar etika bisnis dalam hubungan dengan berbagai *stakeholder* yaitu :

1. Kepatuhan terhadap peraturan.
   - Seluruh Pengurus dan Insan Bank Papua harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan bank yang berlaku.
   - Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan pegawai bank melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
   - Bank Papua telah melakukan pencatatan atas harta, hutang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Penerapan Standar Layanan bagi seluruh Insan Bank Papua.
3. Kerahasiaan dan Informasi Perusahaan.
4. Seluruh Insan Bank Papua senantiasa memanfaatkan data dan informasi bank untuk meningkatkan *Corporate value* dan pengambilan keputusan dengan cara menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta kelaziman dalam dunia usaha dengan cara :
   - Menggunakan sistem keamanan data yang terbaik.
   - Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bank.
   - Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

While the contents and values of the Bank Papua Code of Conduct, namely:

1. *Compliance with Laws and Policies.*
2. *Relationships with external customers.*
3. *Relations with internal customers.*
4. *Relations with the surrounding community*
5. *Good industrial relations between the company and the people of Bank Papua.*
6. *Advertising / Promotion Policy.*
7. *Confidentiality of information.*
8. *Accuracy of Opening.*
9. *Transactions with Customers and Suppliers.*
10. *Conflicts of Interest.*
11. *Giving Gifts.*
12. *Acceptance of Prizes.*
13. *Political Contributions and Activities.*

Main points of the Bank Papua Code of Conduct

The Bank Papua Code of Conduct Code contains the application of business ethics standards in relations with various stakeholders, namely:

1. *Compliance with regulations.*
   - *All Management and Personnel of Bank Papua must implement applicable laws and bank regulations.*
   - *The Board of Commissioners must ensure that the Board of Director and bank employees implement the laws and bank regulations in accordance with applicable regulations.*
   - *Bank Papua has recorded assets, debts and capital properly in accordance with applicable accounting principles.*
2. *Application of Service Standards for all Bank Papua Individuals.*
3. *Confidentiality and Company Information.*
4. *All Bank Papua Personnel always utilize bank data and information to improve Corporate value and decision making by maintaining the confidentiality of company information in accordance with statutory regulations, Bank Indonesia regulations and the Financial Services Authority, and prevalence in the business world by:*
   - *Using the best data security system.*
   - *Provide relevant and proportional information to stakeholders while taking into account the interests of the bank.*
   - *Avoid disseminating data and information to other interested parties both during work and after stopping work.*

- Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
- Menjaga kerahasiaan informasi kepada konsumen.

5. Setiap pengurus dan seluruh insan Bank Papua dilarang menyalah gunakan informasi yang berkaitan dengan bank dan mengungkapkan informasi yang menjadi perusahaan yang diperolehnya selama menjabat, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik bank.
6. Penanganan benturan kepentingan Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara :

   Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
   - Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank Papua harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank Papua diatas kepentingan pribadi dan keluarga, maupun pihak lainnya.
   - Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai Bank Papua dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
7. Pemberian dan penerimaan hadiah Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Papua dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat Negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Pegawai Bank Papua dapat memberikan hadiah/ cinderamata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat menunjang kepentingan bank, tidak dimaksudkan untuk menyuap, telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank, dan apabila dalam bentuk hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama bank.

Setiap pengurus dan pegawai Bank Papua dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Donasi oleh Bank ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh bank, donasi untuk amal dapat dibenarkan.

- *Submit all data related to the company at the time of stopping work.*
- *Maintain the confidentiality of information to consumers.*

5. *All management and all members of Bank Papua personnel are prohibited from misusing information relating to the bank and disclosing information that the company obtained during their tenure, unless such information is required for inspection and investigation in accordance with statutory regulations, or is no longer a bank's secret.*
6. *Handling conflicts of interest Employees always avoid conditions, situations or the appearance of a conflict of interest and abuse of position by:*

   Comply with established regulations, systems and procedures.
   - *In carrying out its duties and obligations, members of the Board of Commissioners and Board of Director as well as Bank Papua employees must always put Bank Papua's interests ahead of personal and family interests, as well as other parties.*
   - *Members of the Board of Commissioners and Board of Director and Bank Papua Employees are prohibited from misusing their position for personal, family and other parties' interests and benefits.*
7. *Giving and receiving gifts of Board of Commissioners, Board of Director and Employees of Bank Papua is prohibited from giving or offering anything, directly or indirectly, to State officials and or individuals representing business partners who are intended to influence decision making. Bank Papua employees can provide gifts / souvenirs and entertainment to other parties on the condition that it supports the interests of the bank, is not intended to bribe, has been budgeted in the Bank Business Plan, and if in the form of gifts / souvenirs in the form of objects then must include the logo / bank name.*

Every Bank Papua management and employee is prohibited from receiving anything for the benefit, either directly or indirectly from business partners that can influence decision making. Donations by the Bank or giving a company assets to a political party or one or more candidates for legislative and executive members, may only be done in accordance with statutory regulations. Within the limits of propriety as determined by the bank, donations for charity can be justified.

Di dalam kode etik juga diatur mengenai bagaimana cara Bank untuk memperkuat Budaya Perusahaan, yaitu dengan :

- Melakukan evaluasi terhadap Rumusan Nilai dan perilaku Utama Budaya Kerja.
- Perancangan PIN teladan Kepatuhan (perumusan Kriteria dan evaluasi).
- Diusulkan kepada unit terkait untuk melakukan penilaian terhadap pencanangan budaya patuh

The code of ethics also regulates how the Bank can strengthen the Corporate Culture, namely by:

- *Evaluate the Formulation of Values and Main Behavior of Work Culture.*
- *Compliance Exemplary PIN Design (Criteria formulation and evaluation).*
- *Proposed to related units to conduct an assessment of the promotion of compliant culture*

Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen Bank Papua untukpatuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja bank melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode Etik berlaku bagi seluruh insan Bank Papua, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Bank Papua mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Statement of Code of Conduct Applies to All Levels of Organization

The Code of Conduct is a form of Bank Papua's commitment to comply with legal provisions and the highest ethical standards wherever banks conduct business / operational activities. In addition to complying with applicable laws and regulations, the Company Management must also uphold ethical norms and values. The Code of Conduct applies to all people of Bank Papua, namely the Board of Commissioners, Board of Director, and all Employees. All people of Bank Papua have the awareness to practice good ethics that will enhance and strengthen the Company's reputation.

Penyebarluasan Kode Etik

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kode Etik tersebut, Bank Papua telah membuat Buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Bank Papua dan telah diberitahukan kepada seluruh Insan Bank Papua. Selain itu secara berkala dilakukan sosialisasi Kode Etik melalui dan pelatihan GCG dan Kode Etik bagi pegawai Bank Papua baik pegawai baru maupun lama serta pengarahan yang dilakukan oleh atasan pegawai. Akses terhadap Kode Etik Bank Papua dapat diperoleh melalui *website* perusahaan www.bankpapua.co.id.

Dissemination of the Code of Conduct

In the context of the socialization and internalization of the values of the Code of Conduct, Bank Papua has prepared a Code of Conduct for the Implementation of the Bank Papua Code of Conduct and has been notified to all Bank Papua Individuals. In addition, the Code of Conduct is regularly conducted through socialization and GCG training and the Code of Conduct for Bank Papua employees, both new and old employees, and briefings conducted by the employee's supervisor. Access to the Bank Papua Code of Conduct can be obtained through the company's website www.bankpapua.co.id.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi yang diberikan kepada insan Bank Papua yaitu :

- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III.
- Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.
- Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.
- Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Penurunan *Grade* 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Pemutusan Hubungan Kerja.

Sanctions for the Code of Conduct Violation

The types of sanctions given to Bank Papua employees are:

- *Written reprimands in the form of a warning letter I.*
- *Written reprimands in the form of a warning letter II.*
- *Written reprimands in the form of a warning letter III.*
- *Postponement of periodic salary for 1 year at the most.*
- *Postponement of Promotion in Largest 1 Year.*
- *Decreasing Grade One Level Lower Than Previous Ranking.*
- *Decreased Grade 2 (Two) Level Lower Than Previous Ranking.*
- *Work termination.*

Jumlah Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 3 (tiga) jumlah kasus dalam hal ini pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Namun karena dianggap pelanggaran yang dilakukan tidak terlau signifikan maka keputusan sanksi tidak diberikan kepada pegawai tersebut. Dengan kata lain pada tahun 2019 jumlah kasus dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dianggap TIDAK ADA KASUS (NOL).

Number of Code of Conduct Violations in 2019

In 2019, there were 3 (three) cases in this case employees who violated the code of ethics. However, because it was considered a violation that was committed was not too significant, the sanction decision was not given to the employee. In other words, in 2019 the number of cases and sanctions against violations of the code of ethics are considered NO CASE (ZERO).

Trend Kualitas Penerapan Kode Etik

Kecenderungan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan Bank Papua selama tahun 2019 dikatakan menurun, karena pada tahun 2019 tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai/insan Bank Papua.

Trends Quality on the Implementation of the Code of Conduct

The tendency of code of ethics violations committed by Bank Papua employees during 2019 is said to decrease, because in 2019 there were no code of conduct violations committed by employees / employees of Bank Papua.

Sosialisasi Kebijakan Kode Etik kepada Karyawan dan Direksi

Bank Papua telah melakukan sosialisasi kebijakan kode etik karyawan dan Direksi pada tahun 2019 melalui program pendidikan, kegiatan *workshop, In House Training*, Pembinaan dan *Monitoring* secara *onsite*, pembelajaran atau *e-Learning* melalui portal internal Bank Papua, forum *group discussion*, dan lain-lain.

Dissemination of Code of Conduct Policy to Employees and Directors

Bank Papua has carried out information dissemination on the code of ethics for employees and Board of Director in 2019 through education programs, workshops, In House Training, Guiding and Monitoring onsite, learning or e-Learning through Bank Papua's internal portal, group discussion forums, etc. .

Akses Terhadap Kode Etik

Agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Bank Papua, di tahun 2019 Perusahaan telah melakukan sosialisasi Standar Etika Perusahaan secara langsung ke Pegawai di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta melalui pelatihan dan email pegawai. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan.

Access to the Code of Conduct

In order to be able to provide understanding to all Bank Papua Individuals, in 2019 the Company has conducted socialization of the Company's Ethical Standards directly to Employees at the Head Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices as well as through employee training and e-mail. If the information that has been published is incomplete, employees can at any time ask their superiors directly or to the work unit responsible for implementing GCG, the Corporate Secretary Division.

Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik

Setiap tahun bagi Pengurus dan Pegawai Bank Papua diharuskan membuat pernyataan tahunan Pegawai Bank Papua tentang Kode Etik Bank Papua yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor: 64/DIR-BPD/IX/2013 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Declaration of Compliance with the Code of Conduct

Every year Bank Papua Management and Employees are required to make an annual statement of Bank Papua Employees regarding the Bank Papua Code of Conduct that has been regulated in a Board of Director Decree number: 64 / DIR-BPD / IX / 2013 Concerning the Compliance Manual of the Company. Bank Pembangunan Daerah Papua .

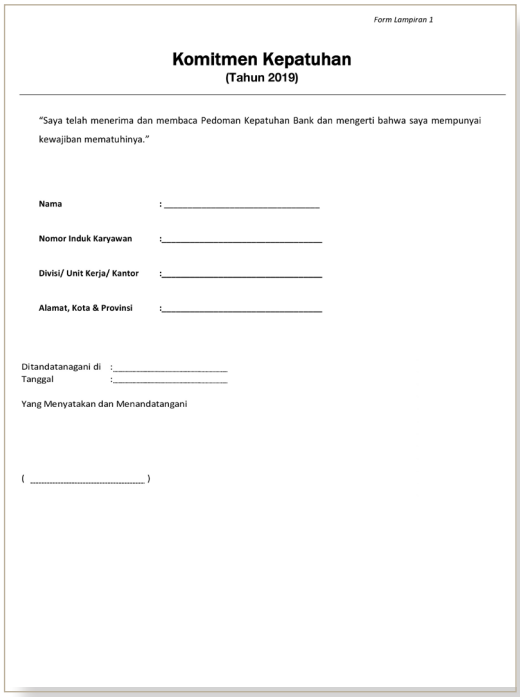

Form Lampiran 1

Komitmen Kepatuhan
(Tahun 2019)

"Saya telah menerima dan membaca Pedoman Kepatuhan Bank dan mengerti bahwa saya mempunyai kewajiban mematuhinya."

Nama : _____

Nomor Induk Karyawan : _____

Divisi/ Unit Kerja/ Kantor : _____

Alamat, Kota & Provinsi : _____

Ditandatanagani di : _____
Tanggal : _____

Yang Menyatakan dan Menandatangani

(_____)

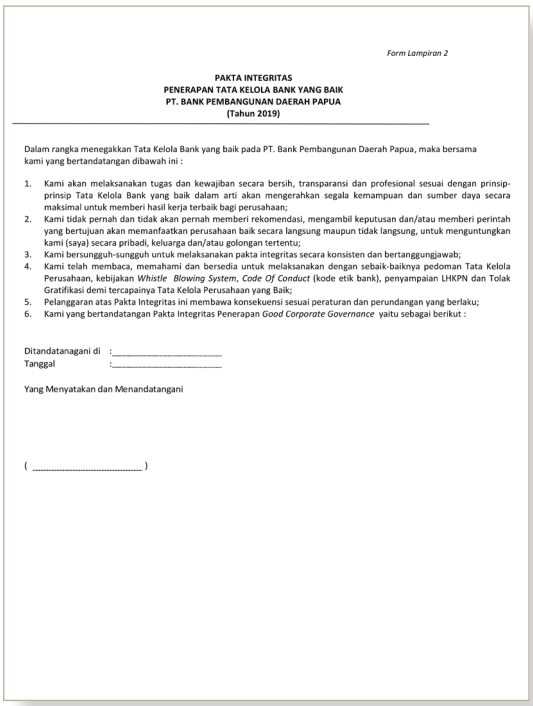

Form Lampiran 2

PAKTA INTEGRITAS
PENERAPAN TATA KELOLA BANK YANG BAIK
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
(Tahun 2019)

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Bank yang baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka bersama kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparansi dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank yang baik dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberi hasil kerja terbaik bagi perusahaan;
2. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah memberi rekomendasi, mengambil keputusan dan/atau memberi perintah yang bertujuan akan memanfaatkan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan kami (saya) secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu;
3. Kami bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pakta integritas secara konsisten dan bertanggungjawab;
4. Kami telah membaca, memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya pedoman Tata Kelola Perusahaan, kebijakan *Whistle Blowing System*, *Code Of Conduct* (kode etik bank), penyampaian LHKPN dan Tolak Gratifikasi demi tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
5. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
6. Kami yang bertandatangan Pakta Integritas Penerapan *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut :

Ditandatanagani di : _____
Tanggal : _____

Yang Menyatakan dan Menandatangani

(_____)

Pencegahan Tindakan Korupsi & Gratifikasi

Dalam rangka penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, Bank Papua melalui penerapan etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi & Gratifikasi bagi seluruh jajaran Bank Papua. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan dan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

Prevention of Corruption & Gratification

In the context of strengthening the implementation of good Bank Corporate Governance, Bank Papua through the application of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention / Anti-Corruption & Gratification for all levels of Bank Papua. This is related to the joint commitment as set out in the Code of Conduct and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibitions on misuse of positions and integrity arrangements of Bank employees, who are very aware of the need to maintain good cooperative relations with customers, partners and all stakeholders by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions categorized as gratuities and creating an anti-corruption culture.

Laporan Gratifikasi Untuk Periode 2016 - 2019			
Tahun	**Jumlah laporan Yang Masuk**	**Sudah Ditindaklanjuti/Sanksi**	**Belum Ditindaklanjuti/DalamProses Report**
2016	-	-	-
2017	2	2	-
2018	-	-	-
2019	-	-	-

Whistleblowing System (WBS)

Dasar Pembentukan

Upaya penting dilakukan oleh Bank Papua dalam menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan dalam operasional perbankan khususnya *fraud* yang dapat merugikan bank dan *stakeholder*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bank mengatur penanganan pengaduan pelanggaran oleh insan Bank Papua dan masyarakat dalam suatu keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, yakni Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 95/DIR-BPD/XII/2012, No. 123/DKBPD/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing System*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Pengelola *Whistleblowing System*

Penanggung Jawab WBS di Bank Papua adalah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Manajemen. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung Jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), Direktur Kepatuhan menunjuk Pemimpin Departemen *Anti Fraud* sebagai Pengelola WBS.

Departemen *Anti Fraud* adalah unit kerja yang menangani langsung Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing System*) di Bank Papua. Departemen *Anti Fraud* berupaya untuk membangun dan menerapkan *whistle-blowing system* (WBS) yaitu suatu sistem yang mengelola pengaduan atau pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum dan/atau perbuatan tidak etis atau tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pengurus dan pegawai Bank Papua dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua.

Basic Formation

An important effort made by Bank Papua in upholding good Corporate governance principles is to try to prevent cases of irregularities in banking operations, especially fraud that can harm banks and stakeholders. In connection with this, the bank regulates the handling of complaints of violations by Bank Papua personnel and the community in a joint decision of the Board of Commissioners and Board of Director, namely the Joint Decree of the Board of Director and Board of Commissioners No. 95 / DIR-BPD / XII / 2012, No. 123 / DKBPD / 2012 dated December 14, 2012 concerning the Whistle-blowing System of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

Management of Whistleblowing System

The person in charge of the WBS at Bank Papua is the Director of Compliance and Management Risk Management. In carrying out its duties as the person in charge of the Whistleblowing System (WBS), the Compliance Director appoints the Leader of the Anti Fraud Work Unit as the WBS Manager.

The Anti Fraud Work Unit is a work unit that handles directly the Whistle-blowing System at Bank Papua. The Anti-Fraud Work Unit seeks to establish and implement a whistle-blowing system (WBS), a system that manages complaints or disclosures about unlawful behavior and / or unethical or improper conduct, which are used to optimize the role of management and employees of Bank Papua and partners in uncovering violations that occur within the Bank Papua.

Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan/pengungkapan yang ditindaklanjuti dalam *whistle-blowing system* (WBS), meliputi :

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melanggar pedoman etika bank, meliputi benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang dan nilai etik lainnya;
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional bank;
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun nonfinansial;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Keberadaan *Whistleblowing System*

Bagi Bank Papua, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank Papua diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkapkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk :

1. Menerapkan budaya kerja Bank Papua secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas.
2. Memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam rangka menjaga serta melindungi aset/ kepentingan Bank Papua.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal Bank Papua sebelum dilakukan penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum yang dianggap perlu.
4. Meningkatkan reputasi Bank Papua.

Scope of Complaints

The scope of complaints / disclosures that are followed up in a whistle-blowing system (WBS), includes:

1. *Violating laws and regulations, including signature forgery, corruption, embezzlement, mark-up, drug use, property damage and violations of other laws and regulations;*
2. *Violating bank ethics guidelines, including conflicts of interest, harassment, involvement in prohibited community activities and other ethical values;*
3. *Violating generally accepted accounting principles;*
4. *Violates bank policies and operational procedures;*
5. *Other fraudulent actions that can result in financial or non-financial losses;*
6. *Actions that endanger work safety.*

Existence of Whistleblowing System

For Bank Papua, the existence of a WBS is part of the internal control system in preventing the occurrence of irregularities. In other words it can be said that the existence of a WBS for Bank Papua is expected to be an effective system in expressing the occurrence of various forms of fraud and being able to solve it in a short time and aiming to:

1. *Implementing the work culture of Bank Papua consistently, especially the implementation of cultural integrity values.*
2. *Strengthening the supervision environment and encouraging reporting on matters that can cause financial losses, including things that can damage the image of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . in order to protect and protect the assets / interests of Bank Papua.*
3. *Makes it easier for management to deal quickly and effectively with violations that occur within the Bank Papua while simultaneously empowering and optimizing the settlement of Bank Papua before external solutions are made through legal channels deemed necessary.*
4. *Improving the reputation of Bank Papua.*

Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Berdasarkan SK Direksi Nomor: 02.A /DIR-BPD/II/2018, tanggal: 07 Februari 2018 dijabarkan tentang Prosedur Pengelolaan *whistleblowing System* sebagai berikut:

1. *Whistle-blowing System* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank oleh pelapor pelanggaran.
2. Pada saat melakukan identifikasi dan investigasi terhadap laporan pengaduan, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Uji sumber pengaduan (misal: cek identitas, kredibilitas, kemampuan mengetahui kecurangan tersebut, dan keandalan dari si pelapor/pengadu)
   - Tentukan apakah pelapor mengetahui informasi dari tangan pertama (secara pribadi mengetahui terjadinya kecurangan) atau dari pihak lain.
   - Tentukan apa motif dari pelapor (balas dendam, cemburu, jengkel, uang).
   - Waspada, apabila pelapor meminta uang sebelum memberi penjelasan lebih jauh. Jangan memberikan *Reward* sebelum informasi yang akurat diberikan dan dikonfirmasi dengan saksi yang dapat dipercaya dan dengan dokumen.
   - Uji lebih jauh dugaan kecurangan tersebut dengan sumber independen dan dokumen.
   - Jangan mengambil tindakan disiplin tanpa catatan lengkap mengenai tuduhan kecurangan, termasuk identitas pelapor dan keterangan tertulisnya (keterangan lisan tidak cukup).
   - Konfirmasi tuduhan tersebut melalui dokumen dan pengakuan/testimony (tertulis dan berkaitan dengan) saksi-saksi lain yang mengetahuinya.
   - Lakukan pendekatan dengan pemasok atau pihak-pihak lain yang diduga terlibat untuk memperoleh jawaban dan kerjasama mereka.
   - Lakukan interview terhadap karyawan yang diduga terlibat untuk mengetahui versinya mengenai dugaan kecurangan tersebut (misalnya, apakah pemasok yang mengajukan penawaran atau karyawan yang menetapkan harga dari pemasok).

Procedure for managing Whistleblowing Systems

Based on the Board of Director' Decree Number: 02.A / DIR-BPD / II / 2018, dated: 07 February 2018 described the Procedure for Management of the whistle-blowing system as follows:

1. *The Whistle-blowing System is the disclosure of violations or disclosure of acts that are against the law, unethical / immoral actions or other actions that can harm the Bank by the reporting violator.*
2. *When identifying and investigating complaints reports, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group performs the following steps:*
   - *Test the source of the complaint (for example: check identity, credibility, ability to know the fraud, and reliability of the reporter / complainant)*
   - *Determine whether the reporter knows information from first hand (personally aware of the occurrence of fraud) or from another party.*
   - *Determine what is the motive of the reporter (revenge, jealousy, annoyance, money).*
   - *Be alert, if the reporter requests money before giving further explanation. Do not give a Reward before accurate information is given and confirmed by a witness who can be trusted and with documents.*
   - *Further test the alleged fraud with independent sources and documents.*
   - *Do not take disciplinary action without a complete record of allegations of fraud, including the identity of the reporter and his written statement (verbal information is not enough).*
   - *Confirmation of these allegations through documents and acknowledgment / testimony (written and related to) other witnesses who know about it.*
   - *Approach suppliers or other parties suspected of involvement to get their answers and cooperation.*
   - *Interview employees suspected of involvement to find out about the version of the alleged fraud (for example, whether the supplier submitted an offer or the employee who set the price from the supplier).*

3. Pelapor menyampaikan tindakan pelanggaran kepada Departemen *Anti Fraud* (DAF), melalui aplikasi *Whistle-blowing System*, minimal berisikan data dan/atau informasi sebagai berikut:
   - Identitas terlapor mencakup:
   - Nama
   - Jabatan
   - Informasi pelanggaran
   - Pihak-pihak yang terlibat
   - Perkiraan kerugian yang terjadi
   - Tempat dan waktu kejadian

   Berdasarkan laporan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* melakukan identifikasi awal. Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun rekomendasi hasil identifikasi awal kepada pejabat berwenang sesuai dengan kategori terlapor (Sebagaimana dimaksud pada *Whistleblow*er dalam kapasitasnya sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku).

   Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang memutuskan tindak lanjut tehadap hasil identifikasi awal.

   Untuk keputusan identifikasi awal yang dilanjutkan ketahap investigasi, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* melakukan investigasi secara internal dan/atau berkerja sama atau melimpahkan kepada external investigator untuk melakukan investigasi.

4. Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) berupa :
   - Jumlah laporan pelanggaran yang masuk
   - Jumlah laporan yang ditindaklanjuti
   - Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya
   - Jumlah laporan hasil identifikasi awal yang ditindaklanjuti

3. The reporter submits a violation action to Anti-Fraud Department (DAF), through the Whistle-blowing System application, at least containing data and / or information as follows:
   - *Reported identity includes:*
   - *Name*
   - *Position*
   - *Information violations*
   - *The parties involved*
   - *Estimated loss incurred*
   - *Place and time of occurrence*

Based on reports of violations as referred to above, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group conducts initial identification. The Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares recommendations from initial identification to the authorized officials in accordance with the reported category (As referred to in the Whistleblower in his capacity as a witness entitled to receive witness protection as stipulated in the applicable Witness and Victim Protection Act).

Based on the results of the recommendations referred to above, the authorized official decides on the follow-up to the results of the initial identification.

For initial identification decisions which are continued at the investigation stage, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group conducts internal investigations and / or cooperates or delegates to external investigators to conduct investigations.

4. Anti-Fraud Detection and Investigation Groups collect data and / or information on the implementation of the whistle-blowing system in the form of:
   - *Number of reports of violations entered*
   - *Number of reports followed up*
   - *The number of reports that were not followed up and the reasons*
   - *The number of reports on the initial identification results that were followed up*

Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* mentabulasikan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud diatas. Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah ditabulasikan, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun analisis efektifitas pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) yang minimal mencakup :

- Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
- Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.
- Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.
- Hasil analisis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

The Anti-Fraud Detection and Investigation Group tabulates data and / or information as referred to above. Based on tabulated data and / or information, the Detection and Anti-Fraud Investigation Group compiles an analysis of the effectiveness of the implementation of a whistle-blowing reporting system that at a minimum includes:

- *The development of the number of incoming reports.*
- *The development of the number of reports that meet the criteria for follow-up.*
- *Suggested suggestions for improvements to the implementation of a whistle-blowing system.*
- *The results of the analysis referred to above are carried out on a monthly basis and subsequently submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director.*

Suprise Audit

1. Bagi unit kerja yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*, dilakukan pemeriksaan melalui Suprise Audit yakni audit yang dilakukan secara mendadak atau acak dan bersifat rahasia.
2. Pelaksanaan suprise audit diputuskan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Divisi Audit Internal (DAI).
3. Rekomendasi pelaksanaan suprise audit minimal memuat:
   Latar belakang dilaksanakannya suprise audit.
   - Data dan informasi auditee dan pedukung lainnya.
   - Analisis dan kesimpulan.
   - Rekomendasi dan usul saran.
4. Departemen *Anti Fraud* menghimpun data dan/atau informasi berupa :
   - Hasil identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
   - Hasil audit rutin yang berisikan tingkat pelanggaran yang tinggi dan memiliki kecenderungan (*trend*) yang meningkat.
   - Hasil kuesioner risiko *fraud* yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja.
5. Berdasarkan data dan/atau informasi pada butir (4) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun rekomendasi pelaksanaan Surprise Audit.
6. Rekomendasi Surprise Audit yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
7. Untuk rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan Suprise Audit.

Suprise Audit

1. *For work units that are at high risk or prone to fraud, an inspection through Suprise Audit is conducted that is a sudden or random audit.*
2. *The suprise audit was decided by the President Director based on recommendations submitted by Internal Audit Division (DAI).*
3. *Recommendations for the implementation of a suprise audit at a minimum include:*
   - *The background for the implementation of the suprise audit.*
   - *Auditee data and information and other supporters.*
   - *Analysis and conclusions.*
   - *Recommendations and suggestions.*
4. *The Anti-Fraud Work Unit collects data and / or information in the form of:*
   - *The results of identification of vulnerabilities carried out by the Risk Management Division.*
   - *The results of routine audits that contain a high level of violations and have an increasing trend.*
   - *The fraud risk questionnaire delivered by the Leader of the work unit.*
5. *Based on the data and / or information in point (4) above, the Detection and Anti-Fraud Investigation Group prepares recommendations for implementing Surprise Audit.*
6. *Surprise Audit recommendations that have been signed by the Leader of Internal Audit Division (DAI) are submitted to the President Director for a decision.*
7. *For recommendations that have been approved, then followed up in the form of the implementation of the Suprise Audit.*

8. Pelaksana Suprise Audit menyusun laporan hasil Suprise Audit kepada Direktur Utama.

Departemen *Anti Fraud* menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :
1. Analisis tingkat pelanggaran dan akar permasalahan
2. Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup:
   - Tindakan untuk menekan tingkat pelanggaran
   - Saran perbaikan terkait pelaksanaan suprise audit.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Surveillance System

1. Untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*, dilakukan dengan *Surveillance System* yakni suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
2. Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menghimpun data dan/atau informasi. berupa:
   - Hasil identifikasi kerawanan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
   - Hasil penilaian audit internal terkait aktivitas yang memiliki tingkat pelanggaran yang cenderung (*trend*) meningkat dan berpotensi *fraud*.
   - Hasil laporan keluhan nasabah yang disampaikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.
3. Berdasarkan data dan/atau informasi pada angka 2) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun rekomendasi pelaksanaan *Surveillance System*.
4. Rekomendasi *Surveillance System* yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
5. Rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut pelaksanaan *Surveillance System* mengacu skenario yang telah ditetapkan.
6. Pelaksana *Surveillance System* menyusun laporan hasil *Surveillance System* yang disampaikan kepada Direktur Utama.
7. Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :
   - Analisis terkait skenario pelaksanaan *surveillance system*.
   - Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup saran perbaikan terkait pelaksanaan *Surveillance System*.

8. *The Implementing Suprise Audit prepares the Suprise Audit report to the President Director.*

The Anti-Fraud Department compiles analysis of evaluation results based on the data above, which at least contains:
1. *Analysis of the level of violations and root causes*
2. *Suggestions, suggestions and / or recommendations include:*
   - *Actions to reduce the level of violations*
   - *Suggestions for improvements related to the implementation of the suprise audit.*

The results of the evaluation referred to above are submitted to the President Director and sent to the Compliance Director.

Surveillance System

1. *To monitor and test the effectiveness of anti-fraud policies, carried out by the Surveillance System, an action of testing or examination carried out without being known or realized by the party being tested or examined.*
2. *Anti-Fraud Detection and Investigation Groups collect data and / or information. in the form of:*
   - *Results of identification of vulnerabilities delivered by the Risk Management Division.*
   - *The results of the internal audit Assessment related to activities that have a tendency to increase trend (trend) and potentially fraud.*
   - *The results of reports of customer complaints submitted by the Corporate Secretary Division.*
3. *Based on the data and / or information in number 2) above, the Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares recommendations for the implementation of the Surveillance System.*
4. *Surveillance System recommendations that have been signed by the Leader of the Internal Audit Division (DAI) are submitted to the President Director for a decision.*
5. *Recommendations that have been agreed upon are then followed up. The follow-up mechanism for implementing the Surveillance System refers to the prescribed scenario.*
6. *The Surveillance System Implementer prepares reports on the Surveillance System that are submitted to the President Director.*
7. *Detection and Anti-Fraud Investigation Groups compile analysis of evaluation results based on the above data, which at least contains:*
   - *Analysis related to the scenario of surveillance system implementation.*
   - *Suggestions, suggestions and / or recommendations include suggestions for improvements related to the implementation of the Surveillance System.*

8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 7) diatas disampaikan kepada Direktur Utama.

Kewenangan Penanganan Laporan

Kewenangan penangan laporan pelanggaran ada pada :

1. Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI), jika terlapor pegawai selain pejabat eksekutif;
2. Direktur Utama jika terlapor adalah pejabat eksekutif dan Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris jika terlapor adalah Direksi .
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* melakukan kegiatan Investigasi, laporan dan Rekomendasi Sanksi atas terjadinya *Fraud* yang dilakukan oleh pejabat/ karyawan Bank;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* wajib menyusun kebijakan standar investigasi, mekanisme laporan yang efektif atas pelaksanaan invetigasi *Fraud* serta rekomendasi sanksi secara internal yang tepat pada pihak yang terlibat *Fraud*;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* mengajukan darft kebijakan dan kegiatan Investigasi, laporan dan rekomendasi Sanksi kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan diberlakukannya kebijakan serta pengenaan sanksi pelaku *Fraud*;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyusun program, laporan atas Investigasi, serta rekomendasi sanksi *Fraud* kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menindaklanjuti atas rekomendasi Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas laporan dan sanksi kepada pejabat/karyawan yang melakukan *Fraud* kepada Unit/ Divisi yang terkait untuk penyelesaian *Fraud*;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyampaikan laporan *Fraud* kepada OJK atas persetujuan Direktur Utama serta dukungan Dewan Komisaris;
   - Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* melakukan dokumentasi semua kegiatan, laporan, surat-surat baik yang berasal dari unit lain maupun yang berasal dari internal, serta surat/dokumen yang berasal dari pihak eksternal, sehingga dokumen yang tersusun rapih dan mudah diperoleh akan memberikan kesempurnaan dalam laporan atas investigasi dan pengenaan sanksi

8. The results of the evaluation referred to in number 7) above are submitted to the President Director.

Authority for Handling Reports

The authority for handling violation reports is at:

1. *Leader of Internal Audit Division (DAI), if an employee is reported other than an executive officer;*
2. *The President Director if the reported party is an executive officer and the Board of Commissioners;*
3. *The Board of Commissioners if reported is the Board of Director.*
   - *Anti Fraud Detection and Investigation Group conducts Investigation activities, reports and Recommendations for Sanctions for the occurrence of Fraud conducted by Bank officials / employees;*
   - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group is obliged to prepare standard investigative policies, effective reporting mechanisms for the implementation of fraud investigations and internal sanctions recommendations that are appropriate for parties involved in fraud;*
   - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group submits from the policies and activities of Investigation, Sanctions reports and recommendations to the President Director and is submitted to the Board of Commissioners as a form of coordination to obtain approval and ratification of the enactment of policies and imposition of sanctions for Fraud offenders;*
   - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group prepares programs, reports on Investigations, and recommendations for Fraud sanctions to the President Director and is submitted to the Board of Commissioners as a form of coordination;*
   - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group follows up on the recommendation of the President Director and the Board of Commissioners for reports and sanctions to officials / employees who carry out Fraud to the Unit / Division related to Fraud settlement;*
   - *Anti-Fraud Detection and Investigation Group submits Fraud reports to OJK with the approval of the President Director and the support of the Board of Commissioners;*
   - *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group documents all activities, reports, letters both from other units as well as from internal sources, as well as letters / documents originating from external parties, so documents that are neatly arranged and easily obtained will provide perfection in report on the investigation and*

terjadinya *Fraud* yang merugikan Bank Papua, maupun pihak lain yang berhubungan bisnis.

4. Proses
   - Investigasi
     Investigasi dilakukan untuk menentukan apakah suatu kecurigaan, pengaduan atau dugaan atas suatu pelanggaran, kecurangan, kejahatan telah terjadi dan menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab.

     Pelaksana investigasi adalah Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* tanpa atau bersama dengan Satuan Kerja Audit Intern.

     Prosedur Pelaksanaan Investigasi mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Investigasi Audit Internal yang berlaku.
   - Laporan
     Laporan atas hasil investigasi dan peristiwa/kejadian *fraud* dilaksanakan melalui 2 mekanisme :
     - laporan secara internal yakni kepada Direksi .
     - laporan kepada OJK.

     Laporan atas Pelaksanaan Investigasi dapat berupa :
     - Terbukti ditemukannya kejadian *fraud* apabila terbukti ditemukan adanya kejadian *fraud* , maka laporan disampaikan kepada Direksi dan juga OJK.
     - Tidak terbukti ditemukannya kejadian *fraud* apabila tidak terbukti ditemukannya kejadian *fraud*, maka laporan hanya disampaikan kepada Direksi.

Laporan dilakukan oleh Divisi Audit Internal (DAI) kepada Direktur Utama secara tertulis dan dilakukan pada kesempatan pertama saat terbukti ditemukan terjadinya *fraud* .

Laporan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Akurat dalam arti bahwa seluruh materi laporan misalnya menyangkut kecurangan atau kejahatan yang terjadi serta informasi penting lainnya, termasuk penyebutan nama, tempat atau tanggal adalah benar sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan;
2. Jelas dalam arti bahwa laporan harus disampaikan secara sistematik dan setiap informasi yang disampaikan mempunyai hubungan yang logis. Sementara itu, istilah-istilah yang bersifat teknis harus dihindari dan kalau tidak bisa dihindari harus dijelaskan secara memadai;

imposition of sanctions for fraud that harm Bank Papua, as well as other parties related to business.

4. Process
   - *Investigation*
     Investigation is carried out to determine whether a suspicion, complaint or suspicion of a violation, fraud, crime has occurred and determine the parties responsible.

     Executing investigations are the Anti-Fraud Detection and Investigation Group without or together with the Internal Audit Work Unit.

     The Investigation Implementation Procedure refers to the applicable Internal Audit Investigation Implementation Guidelines.
   - *Report*
     Reports on the results of investigations and fraud events / events are carried out through 2 mechanisms:
     - *reports internally to the Board of Director.*
     - *report to OJK.*

     The report on the Implementation of the Investigation can be in the form of:
     - *Proved the discovery of fraud cases if it was found to be found to have been a fraud event, the report was submitted to the Board of Director and also the OJK.*
     - *It is not proven that fraud cases have been found if there is no evidence of fraud occurring, the report is only submitted to the Board of Director.*

Reports are carried out by Internal Audit Division (DAI) to the President Director in writing and carried out at the first opportunity when fraud is found.

Reports are prepared with the following conditions:
1. *Accurate in the sense that all report material, for example, concerns fraud or crimes that occur and other important information, including the mention of name, place or date is correct in accordance with the evidence that has been collected;*
2. *It is clear in the sense that the report must be delivered systematically and that any information submitted has a logical relationship. Meanwhile, technical terms must be avoided and if unavoidable they must be adequately explained;*

3. Tidak memihak dalam arti bahwa laporan tidak mengandung bias atau prasangka dari yang menyusun laporan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil laporan. Laporan hanya memuat fakta-fakta dan tidak memuat opini atau pendapat pribadi auditor;
4. Relevan dalam arti bahwa laporan hanya mengungkap informasi yang berkaitan langsung dengan kecurangan atas kejahatan yang terjadi.
5. Tepat waktu dalam arti bahwa laporan harus disusun segera setelah pekerjaan dilapangan selesai dilaksanakan dan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. It is impartial in the sense that the report does not contain bias or prejudice from the person who prepared the report or other parties that could influence the results of the report. The report only contains facts and does not contain the auditor's personal opinions or opinions;
4. Relevant in the sense that the report only discloses information that is directly related to fraud for the crime that occurred.
5. Timely in the sense that the report must be prepared as soon as the work in the field has been completed and immediately delivered to the parties concerned.

Laporan peristiwa *fraud* minimal memuat :
1. Nama pelaku.
2. Bentuk penyimpangan/jenis *fraud*.
3. Tempat/lokasi kejadian.
4. Informasi terkait motif/modus pelaku.
5. Kronologis kasus (didukung dengan dokumen pendukung).
6. Pihak-pihak yang terlibat.
7. Indikasi kerugian.
8. Usulan tindak lanjut/tuntutan.
9. Tempat, tanggal, dan tanda tangan.

A minimum fraud report contains:
1. Name of perpetrator.
2. Forms of fraud / type of fraud.
3. Place / location of the incident.
4. Information related to the motive / mode of the perpetrator.
5. Chronological case (supported by supporting documents).
6. The parties involved.
7. Indication of loss.
8. Proposed follow-up / demands.
9. Place, date and signature.

Laporan *fraud* kepada OJK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peristiwa *fraud* diketahui oleh Bank, apabila :
1. *Fraud* diperkirakan berdampak signifikan terhadap Bank (dengan kerugian material lebih besar atau sama dengan 500 juta Rupiah) dan/atau
2. Berpotensi menjadi perhatian publik (akan atau telah dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan media website)

A fraud report to the OJK is carried out no later than 3 (three) working days after the fraud event is known by the Bank, if:
1. Fraud is estimated to have a significant impact on the Bank (with material losses greater than or equal to 500 million Rupiah) and / or
2. Potential to become public attention (will or has been published in print, electronic and media websites)

Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku *Fraud* sebagai berikut :
1. Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku *fraud* maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan *fraud*.
2. Divisi Audit Internal (DAI) berdasarkan hasil investigasi, menetapkan pelaku *fraud* dan menyampaikannya kepada Direksi untuk diberikan keputusan.
3. Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) bertanggungjawab merekomendasikan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku*fraud*.
4. Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan *fairness*.
5. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Imposition of Sanctions for Fraud Actors :
1. Imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect both to perpetrators of fraud and to employees or administrators of banks who intend to commit fraud.
2. Internal Audit Division (DAI) is based on the results of the investigation, determines the fraud perpetrator and submits it to the Board of Director for a decision.
3. The Employee Advisory Committee (KPP) is responsible for recommending the form of sanctions given to the perpetrators.
4. The sanction is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.
5. The procedure for awarding sanctions refers to the Company Regulations PT. Papua Regional Development Bank.

Pemantauan tindak lanjut terhadap kejadian-kejadian *fraud* dilakukan oleh Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud*. Pemantauan dilakukan terhadap :

1. Sanksi/tindakan yang diambil/dikenakan terhadap pelaku *fraud* serta penerapannya.
2. Konsistensi pelaksanaan sanksi.
3. Akar permasalahan dalam penerapan tindak lanjut peristiwa *fraud*.
4. Kecendrungan (*trend*) kejadian *fraud* terkait dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*).
5. Hasil pemantauan digunakan untuk melihat efektifitas penegakan hukum dilingkungan internal bank dan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyerahkan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* kepada Kepala Pemimpin Departemen *Anti Fraud* (DAF) untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika terdapat perubahan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* dikembali ke Petugas Departemen *Anti Fraud* (DAF) untuk di perbaiki.

Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa *fraud* yang telah ditandatangani diserahkan kepada direktur Utama sebagai bahan masukan terkait Pelaksanaan Penerapan Strategi *Anti Fraud* .

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan strategi anti *fraud*.

Evaluasi terhadap sistem pengendalian *fraud* dilakukan secara berkala minimal mencakup :

- Efektifitas program anti *fraud awareness*, yang mencakup :
  - Pelaksanaan anti *fraud* statement.
  - Program *employee awareness*.
  - Program *customer awareness*
- Efektifitas identifikasi kerawanan.
- Efektifitas *know your employee*.
- Efektifitas Program Bantuan Pegawai.
- Efektifitas sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle-blowing system*).
- Efektifitas Surprise Audit.
- Efektifitas *Surveillance System*.

Monitoring of follow-up of fraud events is carried out by the Detection and Anti-Fraud Investigation Group. Monitoring is carried out on:

1. *Sanctions / actions taken / imposed on fraud perpetrators and their application.*
2. *Consistency in implementing sanctions.*
3. *The root of the problems in implementing follow-up fraud cases.*
4. *The trend of fraud events is related to the existence of law enforcement.*
5. *The results of monitoring are used to see the effectiveness of law enforcement in the bank's internal environment and as input for carrying out repairs.*

The Anti-Fraud Detection and Investigation Group submitted a draft of the Follow-up Monitoring Report on the fraud incident to the Head of the Anti-Fraud Department Head (DAF) for inspection and signing. If there is a change in the Draft Monitoring Report, the follow-up to the fraud event is returned to the Anti-Fraud Department Officer (DAF) to be corrected.

The monitoring report of the follow-up of the signed fraud event is submitted to the President Director as input regarding the Implementation of the Anti-Fraud Strategy.

Evaluation aims to determine the weaknesses and causes of fraud and determine the corrective steps needed in the implementation of anti fraud strategies.

Evaluation of the fraud control system is carried out regularly including at least:

- *The effectiveness of the anti fraud awareness program, which includes:*
  - *Implementation of anti fraud statement.*
  - *Employee awareness program.*
  - *Customer awareness program*
- *Effectiveness of identification of vulnerabilities.*
- *Effectiveness of know your employee.*
- *Effectiveness of Employee Donation Programs.*
- *Effectiveness of the violation reporting system (Whistle-blowing system).*
- *Surprise Audit Effectiveness.*
- *Surveillance System Effectiveness.*

Tindak Lanjut

- Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.
- Unit kerja mengirimkan laporan/data/informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut peristiwa *fraud* yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada Departemen *Anti Fraud* (DAF).
- Laporan evaluasi operasional oleh Departemen *Anti Fraud* (DAF) diatas disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan Laporan Evaluasi Manajemen disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Data/informasi/dokumen terkait dengan peristiwa *fraud* disimpan dalam lemari tahan api dan hanya dapat diakses oleh Kepala Pemimpin Departemen *Anti Fraud* (DAF) dan/ atau Direksi atau pihak yang diberi wewenang oleh Direksi.

Media Komunikasi dalam Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dapat ditujukan kepada Departemen *Anti Fraud* melalui :

Follow-up

- *The follow-up mechanism is based on the results of evaluations of fraud incidents to correct weaknesses and strengthen the internal control system in order to prevent the recurrence of fraud due to similar weaknesses.*
- *The work unit sends reports / data / information related to the implementation of the follow-up of fraud incidents carried out by the work unit to the Anti Fraud Department (DAF).*
- *The operational evaluation report by the Anti Fraud Department (DAF) above is prepared no later than 10 (ten) working days after the reporting month and submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director. While the Management Evaluation Report is submitted to the Board of Commissioners.*
- *Data / information / documents related to fraud incidents are stored in a fireproof cabinet and can only be accessed by the Head of the Anti-Fraud Department (DAF) and / or Board of Director or parties authorized by the Board of Director.rector.*

Communication Media in Submission of Reporting Violations

Violation Reporting can be addressed to the Anti-Fraud Department through:

Aplikasi *Whistleblowing System*

Telephone
0967-532011 (ext 757,754,737)

Facsimile
0967-522264

Email
skaf.bankPapua@yahoo.com
Info-saf@bankpapua.co.id

Surat
Departemen *Anti Fraud*, Lantai 7
Gedung PT. Bank Pembangunan Daerah
Papua, Jl. A. Yani No. 5 – 7, Jayapura

Setiap laporan yang disampaikan paling kurang berisikan data dan informasi sebagai berikut :

1. Identitas Pelapor antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kepegawaian (NIK), tempat/tanggal lahir, dan unit kerja pelapor serta ditandatangani oleh Pelapor;
2. Uraian tindak pelanggaran;
3. Terlapor dan pihak-pihak yang terlibat;
4. Tempat dan waktu kejadian;
5. Dokumen pendukung dan/atau bukti-bukti lainnya.

Seluruh proses penerimaan laporan pengaduan, diadministrasikan secara baik oleh petugas *whistleblowing System*. Catatan penerimaan laporan pengaduan, memuat sekurangnya :

- Nomor registrasi;
- Tanggal penerimaan;
- Petugas penerima;
- Deskripsi singkat.

Publikasi dan Sosialisasi

Bank wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Laporan Pelanggaran kepada seluruh pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua maupun *stakeholder* melalui media perusahaan seperti :

1. Mencetak, mensosialisasikan dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini;
2. Website perusahaan;
3. Forum internal pegawai;
4. Aplikasi Strategi *Anti Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Perlindungan bagi Whistleblower

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor baik secara fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor. Perlindungan kepada Pelapor adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman atau tindakan yang didapat akibat dari laporan pelanggaran yang disampaikan. Perlindungan bagi pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. Dalam hal Pelapor menerima ancaman terhadap fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor, maka Pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab *whistleblowing System*, yakni Pemimpin Departemen *Anti Fraud*.

Each report submitted contains at least the following data and information:

1. *Reporting identity includes full name, Employee Identification Number (NIK), place / date of birth, and reporting work unit and signed by the Reporting Party;*
2. *Description of violations;*
3. *The Reported Party and the parties involved;*
4. *Place and time of occurrence;*
5. *Supporting documents and / or other evidence.*

The entire process of receiving complaints reports is properly administered by whistleblowing System officers. Note on receipt of complaint reports, containing at least:

- *Registration number;*
- *Receipt date;*
- *Recipient officer;*
- *Short description.*

Publication and Socialization

Banks are required to publish and socialize the Violation Report Management Policy to all employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and stakeholders through Corporate media such as:

1. *Print, socialize and distribute this Policy document;*
2. *Company website;*
3. *Internal employee forum;*
4. *Anti Fraud Strategy Application PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .;*

Protection for Whistleblowers

The bank provides protection for whistle-blowers both physically, work, and receipts and facilities received by reporters. Protection to the Reporting Entity is the right of the Reporting Entity to provide security to the Reporting Party related to threats or actions obtained as a result of reports of violations submitted. Protection for reporters is intended to encourage courage to report violations. In the event that the Reporting Entity receives threats to the physical, work, or reception and facilities received by the reporter, the Reporting Entity may submit a request for protection to the person in charge of the whistleblowing System, namely the Leader of the Anti-Fraud Department.

Sanksi Bagi Pelapor dan Terlapor

Bank dapat memberikan penghargaan kepada pelapor terkait dengan informasi pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Bank dapat diselamatkan. Bentuk dan besaran penghargaan yang diberikan diputuskan melalui kebijakan Direksi setalah mendapat rekomendasi dari Departemen *Anti Fraud*.

Punishment diberikan kepada pelaku *fraud* yang telah diputus oleh manajemen Bank dalam Rapat Direksi Khusus (RDK). Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan *fairness*. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku *fraud* maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan *fraud*.

Efektifitas dan Perbaikan *Whistleblowing System*

1. Departemen *Anti Fraud* menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) berupa :
   - Jumlah laporan yang masuk.
   - Jumlah laporan yang ditindaklanjuti.
   - Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya,
2. Departemen *Anti Fraud* menyusun efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang mencakup :
   - Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
   - Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.
   - Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan WBS.

Departemen *Anti Fraud* (DAF) membuat laporan efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) setiap bulan dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Utama

Sanctions for Whistleblower

Banks can give awards to whistleblower related to proven violation information so that the Bank's assets / finances can be saved. The form and magnitude of the awards given are decided through the Board of Director' Policy after obtaining recommendations from the Anti-Fraud Work Unit.

Punishment is given to perpetrators of fraud that have been decided by the management of the Bank at the Special Board of Director' Meeting (RDK). The sanction is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The procedure for awarding sanctions refers to the Company Regulations PT. Papua Regional Development Bank. Imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect both to perpetrators of fraud and to employees or administrators of banks who intend to commit fraud.

Whistleblowing System Effectiveness and Improvement

1. *The Anti-Fraud Work Unit collects data and / or information on the implementation of the violation reporting system (WBS) in the form of:*
   - *Number of reports entered.*
   - *Number of reports followed up.*
   - *Number of reports not followed up and the reasons,*

2. *The Anti-Fraud Work Unit develops the effectiveness of implementing a violation reporting system (WBS) which includes:*
   - *The development of the number of incoming reports.*
   - *Development of the number of reports that meet the criteria for follow-up.*
   - *Suggested suggestions for improvements to the implementation of the WBS.*

DAF reports on the effectiveness of the implementation of the violation reporting system (WBS) every month and submits it to the Director of Compliance and the Board of Commissioners with a copy to the President Director

Untuk meningkatkan *Awareness* dan mengoptimalkan fungsi yang ada maka secara berkala dilakukan sosialisasi ke segenap pegawai antara lain melalui poster, buku saku, sharing session dan media-media lain yang mudah diakses. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, efektifitas yang dirasakan adalah terdeteksinya kecurangan-kecurangan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih rinci, sehingga sangat mempermudah proses pengawasan dilakukan di internal, karena cakupan aktivitas dan jumlah karyawan yang sangat banyak. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran maka dapat mencegah an mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian *financial* atau *non financial* terhadap perusahaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

To increase awareness and optimize existing functions, socialization to all employees is carried out regularly, including posters, pocket books, sharing sessions and other easily accessible media. With the existence of this Violation Reporting System, the perceived effectiveness is the detection of fraud in a relatively short and more detailed time, so that it greatly facilitates the supervision process carried out internally, because the scope of activities and the number of employees is very large. With the existence of the Violation Reporting System, it can prevent actions that can cause financial or non financial losses to companies such as Corruption, Collusion and Nepotism.

Data *Whistleblowing System*

Whistleblowing System Data

Laporan yang masuk ke Departemen *Anti Fraud* (DAF) kebanyakan menggunakan *whistle-blowing system* berupa Surat Resmi dan di email ke Departemen *Anti Fraud* (DAF). Berikut ini adalah data *whistle-blowing system* selama tahun 2016 - 2019.

Most reports that go to DAF use a whistle-blowing system in the form of an Official Letter and are emailed to SKAF. The following are whistle-blowing system data during 2016 - 2019.

Data *Whistleblowing System*
Whistleblowing System Data

Tahun	Jumlah Laporan Yang Masuk	Sudah Ditindaklanjuti (STL)	Belum Ditindaklanjuti (BTL)
2016	13	10	3
2017	27	27	-
2018	20	20	-
2019	25	24	1

Skema & Mekanisme *Whistleblowing System*

Whistleblowing System Schemes & Mechanisms

Setiap pegawai Bank dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bank lainnya yang terjadi di lingkungan Bank sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS. Mekanisme pelaporan tergambar pada skema dibawah ini :

Every Bank employee can report violations committed by other Bank employees that occur within the Bank in accordance with the form of violations that can be reported through the WBS. The reporting mechanism is illustrated in the scheme below:

Pelaporan Pelanggaran melalui Aplikasi Whistle blowing
Froud Reporting through Whistleblowing System

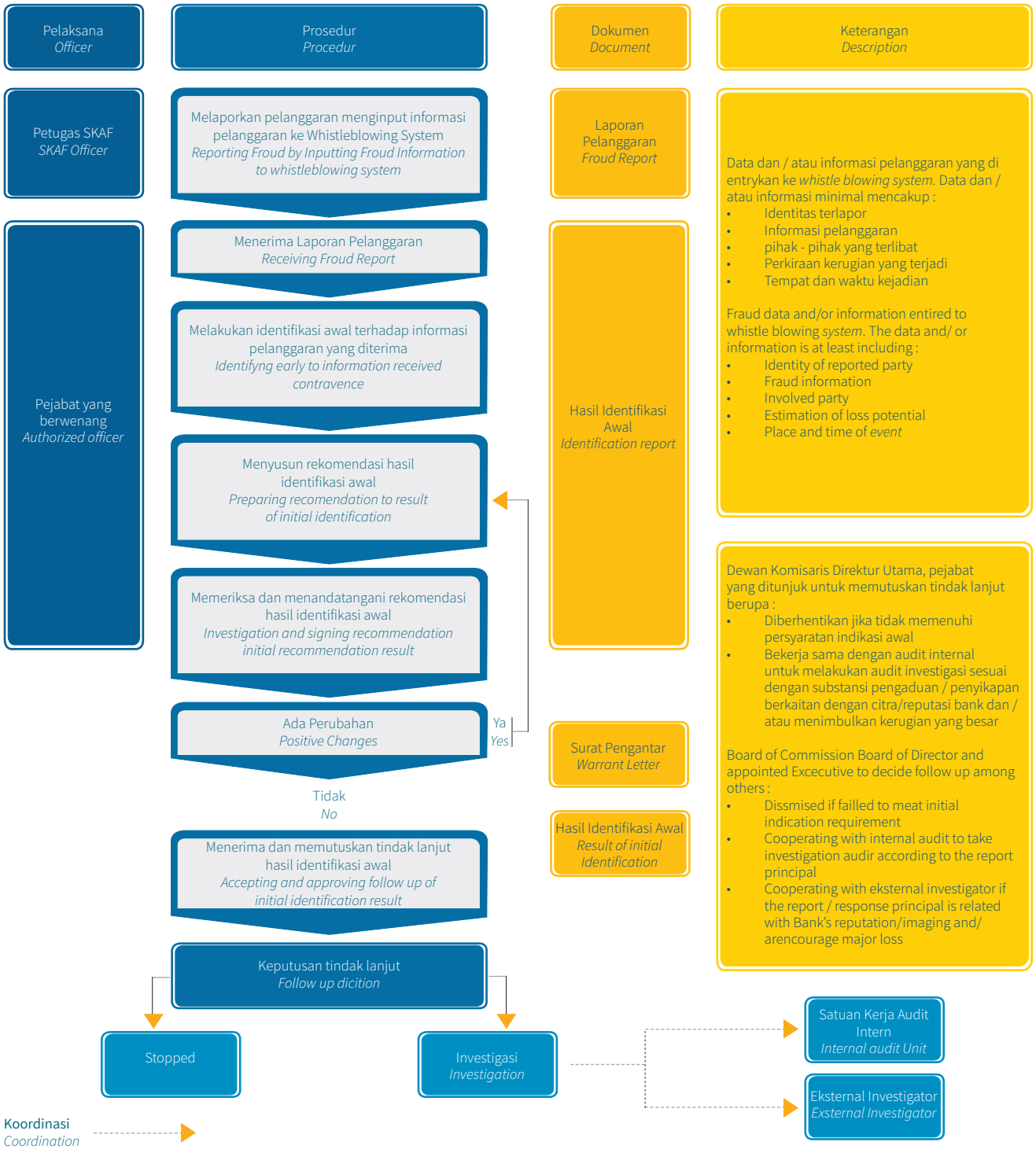

Pelaporan Pelanggaran melalui Telepon, SMS, E-mail
Whistleblowing via Phone, SMS, E-mail

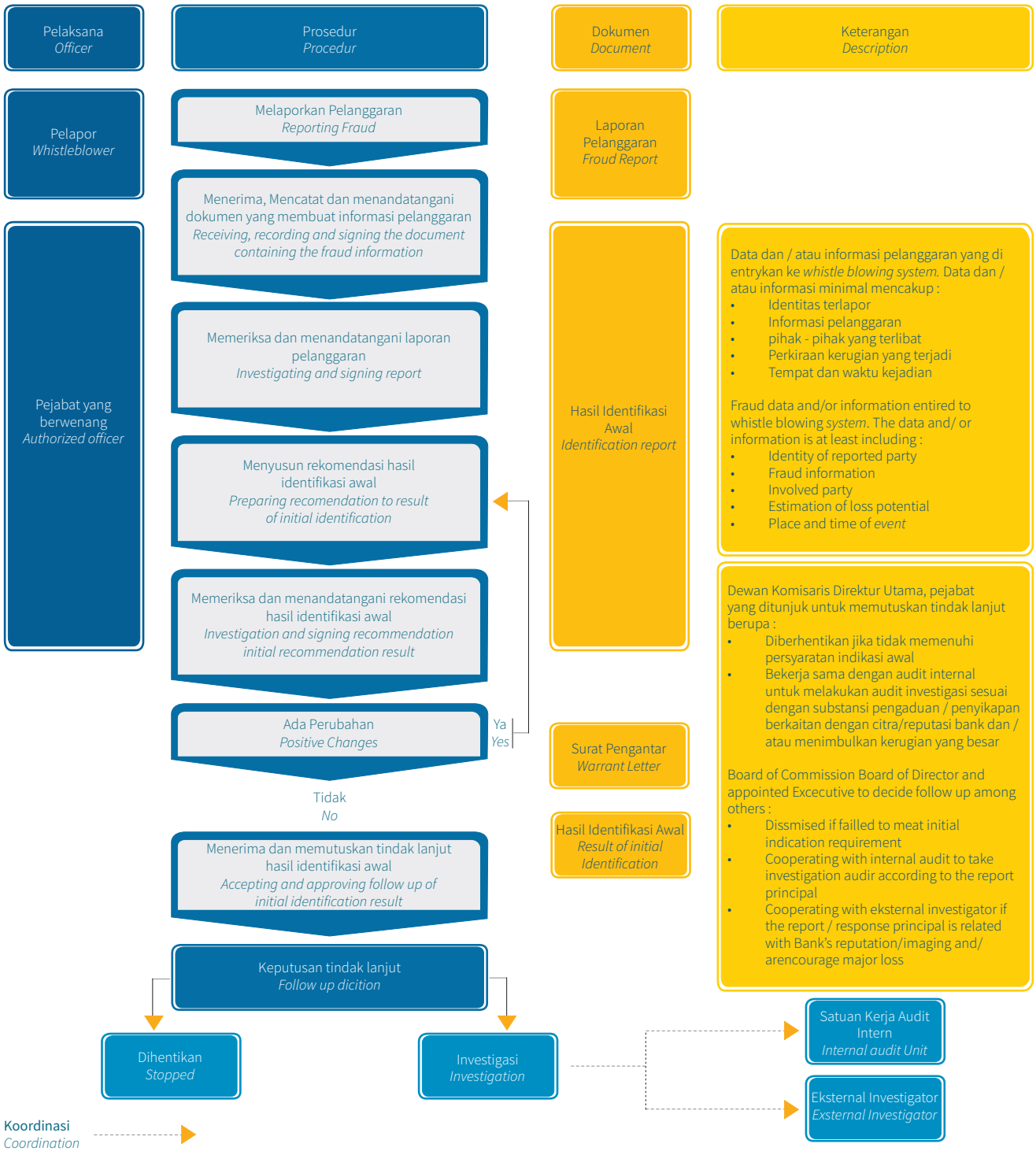

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat p*reventi*f (*ex-ante*) kuratif (*expost*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number: 46 / POJK.03 / 2017 regarding the Implementation of the Commercial Bank Compliance Function, that the Compliance Function is a series of actions or measures that are preventive (ex-ante) curative (expost) to ensure that the policy , provisions, systems and procedures, as well as business activities conducted by the Bank in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of the legislation, as well as ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and / or other supervisory authorities authorized.

Kegiatan usaha Bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin besar, diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat p*reventi*f (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat p*reventi*f (*ex-ante*) sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

The Bank's business activities continue to experience changes and improvements in line with the development of information technology, globalization and financial market integration so that the complexity of its activities is increasingly high. The increasing complexity of the Bank's business activities has resulted in challenges and greater risk exposure. Seeing the growing development of the Bank's business challenges and risks, various efforts are needed to mitigate these risks. These efforts can be both preventive (ex-ante) and curative (ex-post). Preventive (ex-ante) efforts are needed to reduce or minimize the potential risks of the Bank's business activities that are expected to occur. Therefore it is necessary to increase the role and Compliance Function and compliance work unit in managing Compliance Risk.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Dengan demikian peran dan Fungsi Kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat p*reventi*f (*ex-ante*) melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Good and timely management of Compliance Risk is expected to minimize the impact of risk as early as possible. Thus the role and Compliance Function and the compliance work unit in the future will not only see a preventive (ex-ante) event but also must be able to manage Compliance Risk to be in line with applicable regulations.

Struktur Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas :

1. Direktur Kepatuhan adalah anggota Direksi yang memiliki integritas dan pengalaman yang memadai mengenai ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan independensi.
2. Divisi Kepatuhan membawahi fungsi kepatuhan bank dan satuan kerja kepatuhan pada Bank
3. Divisi Kepatuhan adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
4. Dewan Komisaris adalah yang berkewajiban melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Papua No. 54/DIR-BPD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (Job Profile) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Hukum serta Departemen *Anti Fraud* sebagaimana yang tergambar pada struktur dibawah ini:

Compliance Function Structure

The organizational structure of the Bank's Compliance Function Refers to the Financial Services Authority Regulation Number: 46 / POJK.03 / 2017 concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions and has been regulated in the bank's internal policies consisting of:

1. *The Compliance Director is a member of the Board of Director who has sufficient integrity and experience regarding OJK provisions and statutory provisions and fulfills independence requirements.*
2. *The Compliance Division oversees the compliance function of the bank and the compliance work unit at the Bank*
3. *The Compliance Division is a Work Unit at the Head Office which is a Compliance Unit at the Bank and is tasked with implementing the Bank's Compliance Function.*
4. *The Board of Commissioners is obliged to actively monitor the implementation of the Bank's Compliance Function.*

In accordance with Decree of the Board of Director of Bank Papua No. 54 / DIR-BPD / XI / 2019 dated 26 November 2019 concerning Organizational Structure and Job Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , to carry out its functions, duties and responsibilities, the Compliance Director is assisted by the Compliance Division, the Bank's Risk Management Division and the Legal Division and the Anti Fraud Department as illustrated in the structure below:

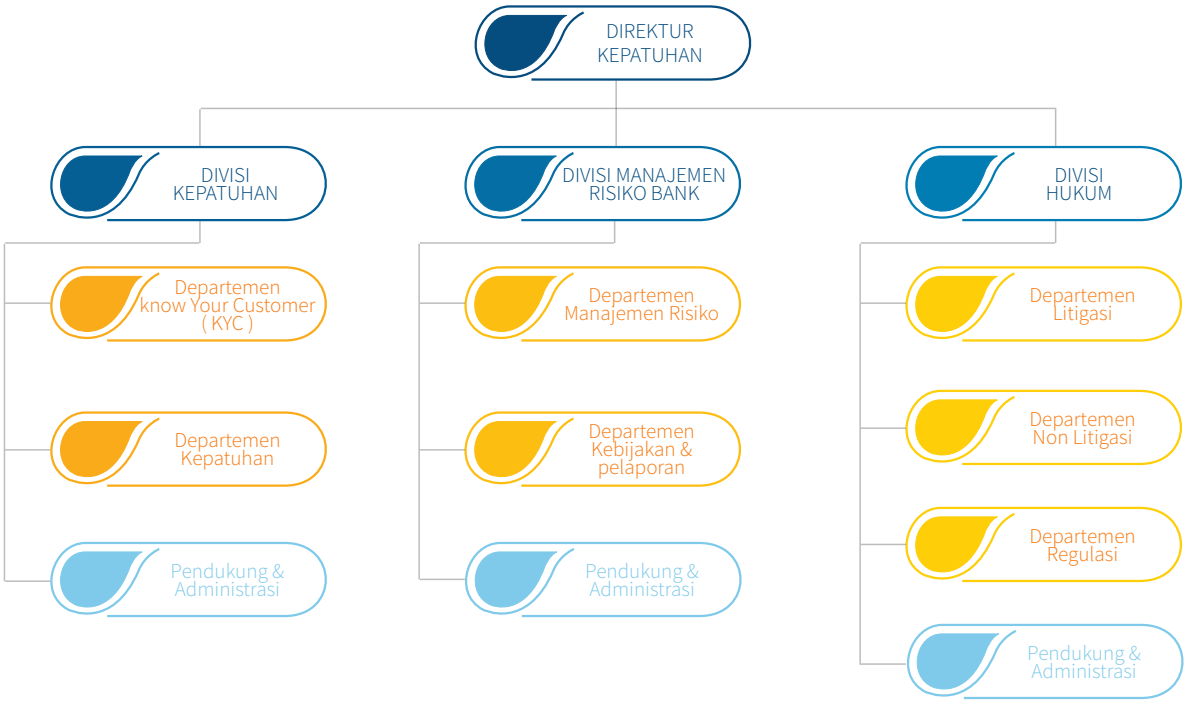

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan di Bank dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan yang membawahi fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Dalam hal Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan;
4. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya (bisnis & operasional, aktivitas yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, logistik & pengadaan barang dan jasa);
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

The Director in charge of the Compliance Function at the Bank is carried out by the Compliance Director. The process of appointment, dismissal and / or resignation of the Director in charge of the Company's Compliance Function has been carried out and arranged as follows:

1. *Appointment, dismissal, and / or resignation of the Director in charge of the Compliance Function refers to the provisions concerning the appointment, dismissal, and / or resignation of members of the Board of Director as referred to in the POJK regulation Number 46 / POJK.03 / 2017 which regulates commercial bank compliance functions and has passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions of the applicable Financial Services Authority;*
2. *In the case of the Compliance Director who oversees the compliance function is temporarily unable to carry out his duties and responsibilities for more than 7 (seven) consecutive work days, the implementation of the duties and responsibilities concerned must be temporarily replaced by the other Director up to the Director in charge the compliance function can carry out its duties and responsibilities;*
3. *In the event that the Director in charge of the Compliance Function resigns or expires, the Bank immediately appoints a replacement Director in charge of the Compliance Function and during the process of replacing the Director in charge of the Compliance Function, one of the other Board of Director will temporarily carry out the duties of Director in charge of the Compliance Function;*
4. *The Director who carries out his duties as a Director in charge of the Compliance Function, is not held by the President Director and or Deputy President Director and / or Director in charge of functions that can affect his independence (business & operations, activities that make decisions on bank business activities, logistics & procurement of goods and services); Each replacement of the position of Director in charge of the Compliance Function is always reported to the Financial Services Authority.*
5. *Each replacement of the position of Director in charge of the Compliance Function is always reported to the Financial Services Authority.*

Profil Singkat Direktur Kepatuhan Bank Papua

Direktur Kepatuhan Bank Papua saat ini dijabat oleh Jefri Sani P. S, Lahir di Palu, 17 Agustus 1963. Terhitung tanggal 06 Maret 2018 resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Pertanian tahun 1989 di Universitas Cenderawasih. Jabatan terakhir Kepala Kantor Bank Papua Cabang Timika sejak Bulan Maret 2016.

Brief Profile of Bank Papua Compliance Director

Bank Papua's Compliance Director is currently held by Jefri Sani P. S, born in Palu, 17 August 1963. As of March 6, 2018 officially served as Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the period 2017-2021. He completed his Bachelor of Agricultural Economics in 1989 at Cenderawasih University. The last position was the Head of Bank Papua Branch Office in Timika since March 2016.

Tugas dan Tanggungjawab

Dalam Pasal 10 Ayat (1) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup :

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah,
e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan laporan Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dan tahunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Duties and Responsibilities

In Article 10 Paragraph (1) concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Functions, it is explained that the duties and responsibilities of the Director in charge of Compliance Function, at least include:

a. Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;
b. Propose compliance policies or compliance principles to be set by the Board of Director;
c. Establish compliance systems and procedures that will be used to develop Bank internal provisions and guidelines;

d. Ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with Bank Indonesia regulations and applicable laws and including sharia principles for sharia commercial banks and sharia business units,

e. Minimizing Bank Compliance Risk;
f. Take precautionary measures so that the policies and / or decisions taken by the Board of Director of the Bank or the Leader of a Foreign Bank Branch Office do not deviate from the provisions of Bank Indonesia and applicable laws and regulations;
g. Perform other tasks related to the Compliance Function.

In connection with the implementation of duties and responsibilities, the Compliance Director has submitted a report on the implementation of the Compliance Director's duties to the President Director with copies sent to the Board of Commissioners on a quarterly basis and Compliance Director reports to the Financial Services Authority (OJK) every semester according to the set deadline.

Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh Divisi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Bank dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan.

Compliance Unit

To carry out its functions, duties and responsibilities, the Bank Compliance Director is assisted by a Compliance work unit which in this case is the Compliance Division. The Compliance Unit is an independent unit that assists the implementation of duties from the Director in charge of the Compliance Function and is directly responsible to the Director who oversees the Compliance Function. The Bank Compliance Work Unit is led by a Division Leader who has met the criteria as Leader of the Compliance Unit as stipulated in POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 dated 12 July 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks.

In carrying out the compliance function, the Compliance Director and the Compliance Division must uphold independence in giving opinions without taking sides to the interests of other parties, upholding integrity and not using information obtained for personal / group interests outside of the Bank's interests. Officials and staff in the compliance work unit are prohibited from being placed in a position to face a conflict of interest in carrying out the responsibilities of the Compliance Function.

Kriteria & Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Kriteria kepala satuan kerja kepatuhan:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.

Criteria & Appointment of Head of Compliance Work Unit

Criteria for compliance work unit Leaders:

1. *Meet the independence requirements;*
2. *Mastering the Financial Services Authority (OJK) and the applicable laws and regulations;*
3. *Not carrying out other duties outside the Compliance Function; and*
4. *Having a high commitment to implement and develop a Compliance Culture.*

Appointment, dismissal, or replacement of the Leader of the compliance work unit must be reported to Bank Indonesia / OJK.

Profil Singkat Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Papua

Divisi Kepatuhan Bank Papua dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi Kepatuhan yaitu Dadang Supriatna, SH. Lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1965. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 421/KEPEG/XII/2017. Memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 1990.

Brief Profile of the Bank Papua Compliance Division Leader

The Bank Papua Compliance Division is led by a Compliance Division Leader, Dadang Supriatna, SH. Born in Bandung on April 10, 1965. Worked at Bank Papua since 1991. He has occupied as Leader of the Compliance Division since December 14, 2017 based on the Board of Director Decree Number: 421/KEPEG/XII/2017. Obtained a Bachelor of Laws degree from Padjadjaran University in 1990.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan Bank, satuan kerja kepatuhan telah menyusun program kerja Fungsi Kepatuhan untuk tahun 2019 yang meliputi serangkaian aktifvtas pelaksanaan sebagai berikut :

- Overview Kepatuhan terhadap seluruh Kebijakan dan Prosedure yang diprioritaskan.
- Pemantauan kecukupan Ketentuan di unit kerja Divisi dan Cabang.
- Mengoptimalkan fungsi seluruh pegawai Divisi kepatuhan serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan.
- Pemantauan yang dilakukan secara *on site visit* dan atau *On desk* .
- Kerjasama dengan Unit kerja yang menjadi sasaran pembinaan atau sosialisasi baik secara *on site visit* dan/atau *on desk*.
- Mengikuti Pelatihan IHT, *workshop* dan studi banding terkait kepatuhan.
- Melaksanakan Progress Tindaklanjut penyempurnaan Aplikasi APU PPT Versi *WebBased*.
- Penyusunan SOP/BPP penyelesaian dan penanganan pengaduan nasabah / dan penyelesaian pengaduan konsumen (SiPEDULI dan LKPBU) BI dan OJK.
- *Review* Laporan APU & PPT Rutin Internal dan External (Permintaan Data dari Lembaga Negara).
- Mengikuti Pelatihan dengan *Provider/ Trainer.*
- Mengikuti Seminar atau pertemuan bersama pihak eksternal.
- IHT APU & PPT di Kantor Pusat dan seluruh cabang.
- Melakukan Koodinasi dengan Kantor Cabang dan Divisi Terkait (Divisi TI, Akuntansi).
- Sosialisasi dan Pengumpulan Data LHKPN di Kantor Pusat dan Seluruh Cabang.

Independensi Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 pasal 12 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dimana Satuan Kerja Kepatuhan telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan, yaitu: **Satuan Kerja Kepatuhan wajib independen.**

Implementation of Compliance Function Work Program

In order to improve the Bank's compliance culture, the compliance work unit has established a Compliance Function work program for 2019 which includes a series of implementation activities as follows:

- *Overview Compliance with all policies and procedures prioritized.*
- *Monitoring the adequacy of the Provisions in the Division and Branch work units.*
- *Optimizing the functions of all employees of the Compliance Division and increasing competence through education.*
- *Monitoring is done on site visit and or on desk.*
- *Collaboration with work Units that are targeted for coaching or outreach both on site visits and or on desks.*
- *Following IHT Training, workshops and comparative studies related to compliance.*
- *Implement Progress Follow-up improvements to the APB PPT WebBased Version.*
- *Compilation of SOP / BPP settlement and handling of customer complaints / and settlement of consumer complaints (SiPEDULI and LKPBU) BI and OJK.*
- *Review of Internal and External APU & PPT Reports (Data Requests from State Institutions).*
- *Following training with Provider / Trainer.*
- *Attending a seminar or meeting with external parties.*
- *APU & PPT IHT at Head Office and all branches.*
- *Coordinate with Branch Offices and Related Divisions (IT, Accounting).*
- *Dissemination and Collection of LHKPN Data at Head Office and All Branches.*

Independence of the Compliance Function

In accordance with the POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 article 12 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, where the Compliance Unit has fulfilled the specified qualifications, namely: ***The Compliance Unit must be independent.***

Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Komitmen Bank dalam Pelaksanaan Kepatuhan

Dalam pelaksanaan kepatuhan, Bank mempunyai komitmen sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua jenjang atau tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Melaksanakan kepatuhan secara total sehingga kegiatannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Kepatuhan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis secara harfiah, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Hal ini penting untuk menjaga reputasi Bank sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan.
4. Seluruh jajaran Bank bertanggung jawab penuh secara individu sebagai *first line of defense* untuk memastikan kepatuhan dalam setiap kegiatan di bidang masing-masing.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Divisi Kepatuhan melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan sertifikasi kepatuhan, seminar baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh pegawai dan pejabat Divisi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

Officials and staff in the compliance work unit are prohibited from being placed in a position to face conflict of interest in carrying out their Compliance Function responsibilities.

Bank Commitments in the Implementation of Compliance

In implementing compliance, the Bank has the following commitments:

1. *Grow and realize a Compliance Culture at all levels or levels of the organization and business activities of the Bank.*
2. *Carry out compliance in total so that its activities are in line with the laws and regulations, applicable provisions and apply the prudential principle.*
3. *Compliance is not only limited to what is literally written, but also to the soul and the underlying spirit. This is important to maintain the reputation of the Bank as an institution engaged in financial services.*
4. *All levels of the Bank are fully responsible individually as the first line of defense to ensure compliance in every activity in their respective fields.*

Competency Development Compliance Function

The Compliance Unit seeks to develop competencies and the quality of Human Resources within the Compliance Work Unit through participation in education, compliance certification training, seminars both held by internal Banks and external parties. The competency and quality development program for Human Resources in 2018 that has been implemented by Compliance Division officials and officials is as follows:

No	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Penyelengara *Organizer*
1	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	06-07 Februari 2019	GRIYA PERBANAS LT.3 JL.PERBANAS KARET KUNINGAN SETIABUDI - JAKARTA SELATAN	FORUM KOMUNIKASI DIREKTUR KEPATUHAN PERBANKAN (FKDKP)
2	UJIAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	09 Februari 2019	KAMPUS STIA LAN JL.ADMINISTRASI II, PEJOMPONGAN - JAKARTA	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN (LSPP)
3	IHT-APU PPT *BATCH* 1	20-21 Februari 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
4	IHT-APU PPT *BATCH* 2	22-23 Februari 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
5	IHT-APU PPT *BATCH* 3	25-26 Februari 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
6	IHT-APU PPT *BATCH* 4	27-28 Februari 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
7	IHT-APU PPT *BATCH* 7	08-09 MARET 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
8	IHT-APU PPT *BATCH* 8	11-12 Maret 2019	LANTAI 3 KANTOR CABANG ABEPURA	PT.COLLEGA INTI PRATAMA, DIV TI, DIV KEPATUHAN
9	PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 1	27-28 Maret 2019	GRIYA PERBANAS LT. 3, JL. PERBANAS KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN	FORUM KOMUNIKASI DIREKTUR KEPATUHAN PERBANKAN (FKDKP)
10	PELATIHAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)	8-11 April 2019	PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (APU PPT -PPATK)	PUSDIKLAT APU-PPT, JL. TAPOS RAYA NO. 82 CIMPAEUN, TAPOS, DEPOK, JAWA BARAT
11	SOSIALISASI DARI BI TTG PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 21/5/PADG/2019 TGL 29 MARET 2019	12 April 2019	KOMPLEKS PERKANTORAN BANK INDONESIA, JL. M.H. THAMRIN NO. 2 JAKARTA	BANK INDONESIA
12	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 2	31 Juli -1 Agustus 2019	GRIYA PERBANAS LT.3 JL. PERBANAS KARET KUNINGAN, SRETIABUDI, JAKARTA SELATAN	FORUM KOMUNIKASI DIREKTUR KEPATUHAN PERBANKAN (FKDKP)
13	SERTIFIKASI KEPATUHAN LEVEL 2	3 Agustus 2019	KAMPUS LAN JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT	LSPP
14	*WORKSHOP* PERSIAPAN IMPLEMENTASI APLIKASI OBOX	2 Oktober 2019	MANADO, SULAWESI UTARA	OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)
15	SOSIALISASI KETENTUAN BANK UMUM	2 Oktober 2019	MANADO, SULAWESI UTARA	OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

Penyesuaian dengan Peraturan yang Ada

Bank telah menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, ter*update* dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bank.

Sepanjang tahun 2019, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/OJK, Regulasi lainnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, serta melakukan perubahan beberapa ketentuan internal bank sehingga sesuai dengan ketentuan regulator dan kondisi saat ini.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank selama tahun 2019 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari :

Adjustments to Existing Regulations

The Bank has provided of guidelines, systems and procedures for all work units, both operational and non-operational, up-to-date properly and in accordance with applicable regulations and laws. To support the implementation of these various rules, the bank launched the implementation of consultative functions and outreach, so that the targets set could be realized and will be pursued in stages with priority scale in accordance with the needs of the Bank.

Throughout 2019, the Bank has sought to maintain compliance with the PBI / POJK and applicable laws and regulations, other compliance standards that have been set internally, provisions regarding Good Corporate Governance, and fulfillment of agreed commitments, both to internal parties and externally, and make changes to SDMe of the bank's internal provisions so that they are in accordance with the regulatory provisions and current conditions.

Even so, there are still things that need to be improved, concerning employee understanding and discipline as well as the control system for the implementation of applicable regulations, so that continuous improvements will continue to be made so that the implementation of the principles of Good Corporate governance and compliance culture is truly inherent in carrying out daily work. In general, the implementation of compliance has been going well with the increase in the implementation of the prudential principle, the acceleration of the completion of compliance tests with the procedures and policies, the analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies and better frequency.

Compliance Indicator

In relation to the implementation of the prudential principle, the Bank's operational activities during 2019 do not deviate from the applicable provisions, this can be reflected in:

Indikator Limit Risiko Rasio Bank *Bank Ratio Risk Limit Indicators*					
No.	**Parameter/ Eksposur Risiko**	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*	**Pertimbangan**	*Consideration*
1	KPMM	14,00%	>18,5%	Bentuk perwujudan dalam penerapan visi misi Bank	*Form of embodiment in the implementation of the mission vision of the Bank*
2	*Non Performing Loan* (NPL) *Gross*	4,85%	<7,75%	Bentuk perwujudan bank dalam penyelesaian kredit bermasalah	*Form of bank embodiment in the settlement of non performing loan*
3	*Non Performing Loan* (NPL) Net	2,48%	<3,11%	Batas maksimum regulator rasion NPL net 5%.	*The maximum limit of NPL net rate regulator is 5%.*
4	BOPO	78%	<85%	Menjaga tingkat efisiensi Bank	*Maintain Bank efficiency*
5	ROA	3,20%	>1,65%	Menjaga kestabilan pertumbuhan dan kelangsungan usaha Bank tanpa mengabaikan risiko bisnis yang dihadapi.	*Maintaining the stability of growth and business continuity of the Bank without ignoring the business risks faced.*
6	ROE	22,53%	>11,27%	Bentuk perwujudan dalam pencapaian visi dan misi Bank.	*Form of embodiment in achieving the vision and mission of the Bank.*
7	NIM	8,53%	>6,53%	Bentuk perwujudan dalam pencapaian visi dan misi Bank.	*Form of embodiment in achieving the vision and mission of the Bank.*
8	RIM	78%	<92%	Batas bawah ketentuan BI = 80%	*The lower limit of BI terms = 78%*

Dari parameter yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2019 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

From the parameters set by Bank Indonesia, the average ratio of Bank Soundness in 2019 shows a sound level of the Bank's ratio and there are no significant violations of Bank Indonesia regulations and other applicable laws and regulations.

Benturan Kepentingan

Bank Papua memiliki ketentuan tentang Pencegahan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 60/DIR-BPD/IX/2008 tanggal 23 September 2008 dan telah memiliki Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Buku III, SK Direksi No.101.A/DIR-BPD/XI/2013 yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan dan jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Conflict of Interest

Bank Papua has provisions regarding the prevention of conflicts of interest within the PT. Bank Pembangunan Daerah Papua . according to Board of Director Decree Number 60 / DIR-BPD / IX / 2008 dated 23 September 2008 and has a Conflict of Interest Work Guidebook Book III, Board of Director Decree No.101.A / DIR-BPD / XI / 2013 which can used as a guideline for employees in dealing with customers, partners and fellow employees and types of transactions that contain potential conflicts of interest.

Larangan Menerima dan/atau Memberi Hadiah

Dalam SK Direksi No.69.DIR-BPD/X/2018 Bank Papua sudah memuat tentang pemberian atau penerimaan hadiah baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk uang, barang, atau sesuatu yang berharga maupun jamuan kepada nasabah, pemasok, atau pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan/ berpotensi berkurangnya Independensi atau Objektifitas dalam pengambilan keputusan

Prohibition of Gratification

In the Board of Director Decree No.69.DIR-BPD / X / 2018 Bank Papua has included giving / or receiving gifts both directly and indirectly in the form of money, goods, or SDMething of value or entertainment to customers, suppliers or government officials with the purpose of influencing the decision-making process / potentially reducing independence or objectivity in decision making

Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Bank terus berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang berlaku, dan berupaya untuk turut mencegah, mendeteksi serta melaporkan kepada pihak berwenang. Untuk mendukung hal tersebut Bank telah memiliki Departemen Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang berada di bawah Divisi Kepatuhan. Komitmen ini ditunjukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No. 42.4/DIR-BPD/VII/2018 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Aplikasi APU PPT versi Web Based Berbasis *Risk Based Approach* (RBA).

Beberapa aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan aplikasi APU-PPT dalam modul RBA yang dilaksanakan oleh Divisi Teknologi Informasi dalam hal ini Divisi Kepatuhan sebagai end user/pengguna.
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan APU PPT Modul RBA, Pengkinian Data, Perlindungan Konsumen dan RBA APU-PPT sesuai POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan pada bulan Mei 2018. Sosialisasi ini melibatkan PT. CIP, Divisi teknologi Informasi dan sebagian KC dan KCP .
3. Mengolah data Laporan Permintaan dari Regulasi ekstern (PPATK/OJK dan BI).
4. Penyempurnaan Pelaporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dari Cabang (didalam sistem dan diluar sistem) serta pengaduan lewat website yaitu publikasi negatif melalui Website yang dikoordinasikan dengan Divisi Sekretaris Perusahaan. SOP terkait pengaduan nasabah sementara disempurnakan oleh Divisi Perencanaan Strategis.
5. Melaksanakan Pelaporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (LKPBU) dan Pelaporan Penyelesaian Pengaduan Konsumen (SiPEDULI OJK) dan SIPESAT PPATK.

Implementation of Anti Money Laundering (APU) Program and Prevention of Terrorism Funding (PPT)

The Bank continues to be committed to implementing the Laws and Regulations concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Funding (PPT) Program, and seeks to contribute to preventing, detecting and reporting to the authorities. To support this, the Bank has an Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Department (APU-PPT) under the Compliance Division. This commitment is shown by the issuance of Decree of the Board of Director No. 42.4 / DIR-BPD / VII / 2018 concerning the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT) Manual and the Web Based AML PPT Application Based on Risk Based Approach (RBA).

Some activities related to the Implementation of Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Funding (PPT) programs throughout 2019 are as follows:

1. *Completion of the APU-PPT application in the RBA module implemented by the Information Technology Division in this case the Compliance Division as an end user / user.*
2. *Dissemination of the provisions of the RBS APU PPT Module, Data Update, Consumer Protection and APU-PPT RBA in accordance with POJK Number 12 / POJK.01 / 2017 concerning the Implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector in May 2018. involving PT. CIP, Information Technology Division and part of KC and KCP.*
3. *Processing Demand Report data from external regulations (PPATK / OJK and BI).*
4. *Completion of Customer Handling Report and Complaint Settlement from Branches (within the system and outside the system) as well as complaints through the website, namely negative publications through a Website coordinated with the Corporate Secretary Division. SOP related to customer complaints is temporarily refined by the Strategic Planning Division.*
5. *Carry out Customer Complaint Handling and Complaints Reporting (LKPBU) and Reporting on Consumer Complaint Settlement (OJK SULULULI) and SIPESAT PPATK.*

6. Penyampaian Laporan LTKT, LTKM, LKPBU , SiPESAT, dan SiPEDULI OJK secara rutin dan tepat waktu.
7. *Update* Data teroris dan Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal DPRK (Korea Utara) yang dikeluarkan oleh POLRI, OJK , dan PPATK ke dalam Sistem Aplikasi APU PPT dan *Core Banking* OLIBS 724.
8. Mengikuti seminar atau pertemuan bersama PPATK, KPK, BPKRI, dan lain-lain. Pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengikuti 1(satu) kali kegiatan seminar/pertemuan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Pengawasan Penyelesaian Cleansing CIF Ganda.
10. Memastikan pelaksanaan progress penyelesaian pengkinian data agar berjalan dengan baik.
11. Pada Triwulan II Thaun 2018 telah dilakukan UAT bersama pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Collega Inti Pratama (PT. CIP) untuk penyempurnaan aplikasi.
12. Pembuatan manual guide/buku petunjuk dan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu tentang tata cara penggunaan APlikasi APU-PPT terbaru. Dalam hal ini belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu migrasi sistem APU-PPT versi desktop ke web berbasis RBA.

Laporan Pelaksanaan APU & PPT

1. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan

Dalam upaya membantu Pemerintah Indonesia melaksanakan UU TPPU No. 8 tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bank Papua terus melakukan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di semua lini, dengan prinsip utama terdiri dari :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan Prosedur,
3. Pengendalian Intern,
4. Sistem Informasi Manajemen, dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

6. *Submission of LTKT, LTKM, LKPBU, SiPESAT, and OJK SiPEDULI Reports on a regular and timely basis.*
7. *Terrorist Data Update and Proliferation of Weapons of Mass Destruction of DPRK (North Korea) issued by POLRI, OJK, and PPATK into APU PPT Application Systems and OLIBS 724 Core Banking.*
8. *Following seminar or meeting with PPATK, KPK, BPKRI, and others. On Mei 21, 2019, it has participated in 1 (one) seminar / meeting held by the Corruption Eradication Commission (KPK).*
9. *Double CIF Cleansing Settlement Supervision.*
10. *Ensure the implementation of progress in updating data to run properly.*
11. *In the second quarter of 2018, UAT and the third party (three) were conducted, namely PT. Inti Pratama Collega (PT. CIP) for improving the application.*
12. *Making manual guides / manuals and outreach to Branch Offices and Sub-Branch Offices about the procedures for using the latest APU-PPT applications. In this case it has not been implemented because it is still waiting for the desktop version of the APU-PPT migration to RBA-based web.*

Report on the Implementation of AML & PPT

1. Obligations for Reporting on Financial Transactions

In an effort to help the Government of Indonesia implement TPPU Law No. 8 of 2010, concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law No. 9 of 2013, Regarding the Prevention and Eradication of Criminal Acts on Terrorism Funding, Bank Papua continues to carry out programs to implement Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding in all lines, with the main principles consisting of:

1. *Active Supervision of the Board of Director and Board of Commissioners*
2. *Policies and Procedures,*
3. *Internal Control,*
4. *Management Information Systems, and*
5. *Human Resources and Training.*

Wujud keseriusan dan kepatuhan bank terhadap regulasi, Bank Papua bekerja sama dengan PT. Collega Inti Pratama telah mengembangkan aplikasi APU-PPT versi web berbasis risiko (Risk based approach) yang telah dilaunching pada tanggal 24 Juni 2019, dengan berpedoman pada SK Direksi No. 42.4/DIR-BPD/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 tentang BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) APU dan PPT tahun 2018 dan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 18.1/DIR-BPD/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang Struktur Organisasi PT. BPD Papua, Departemen APU-PPT telah berubah nama menjadi Departemen KYC (Know Your Customer)

Beberapa aktivitas terkait penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) selama tahun 2019, sebagai berikut :

1. Telah di terbitkan Surat Edaran Direksi PT. BPD Papua PEP (Politically Exposed Person) nomor : 06/SE-PEP/I/2019, tanggal 31 Januari 2019,
2. Telah dilaksanakan In house *training* internal tentang Program APU dan PPT sekaligus Implementasi aplikasi APU-PPT v.2, terhitung mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 12 Maret 2019 dengan peserta petugas dan *supervisor* dari seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu,
3. Pada tanggal 24 Juni 2019, telah di lunching aplikasi APU-PPT versi web berbasis Risiko (Risk based approach) yang telah disesuaikan dengan regulasi terkini dan kebutuhan bank, antara lain :
   3.1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai,
   Yaitu : Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam, dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

   Terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 14.253 (empat belas ribu dua ratus lima puluh tiga) transaksi yang submit melalui aplikasi GRIPS PPATK
   3.2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,
   Yaitu : Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan dan sejak di ketahui oleh pihak bank.

A form of seriousness and bank compliance with regulations, Bank Papua in collaboration with PT. Collega Inti Pratama has developed a risk-based approach to the APU-PPT web-based version of the risk-based approach that was launched on June 24, 2019, based on Board of Director Decree No. 42.4 / DIR-BPD / VII / 2018, dated July 3, 2018 concerning BPP (Implementation Manual) of APU and PPT in 2018 and in accordance with Board of Director Decree No. 18.1 / DIR-BPD / III / 2019, dated March 25, 2019, concerning the Organizational Structure of PT. BPD Papua, the APU-PPT Department has changed its name to the KYC (Know Your Customer) Department

Some activities related to the implementation of the Anti-Money Laundering and Preventing Terrorism Funding (APU and PPT) program in 2019, as follows:

1. *Has been issued Circular Letter of Board of Director of PT. BPD Papua PEP (Politically Exposed Person) number: 06 / SE-PEP / I / 2019, dated January 31, 2019,*
2. *Internal in-house training on APU and PPT Program has been carried out as well as the implementation of APU-PPT v.2 application, starting from February 20 to March 12, 2019 with officers and supervisors from all Branch Offices and Supporting Branches,*

3. *On June 24, 2019, the web-based APU-PPT application based on the Risk-based web version was adjusted to the latest regulations and bank requirements, including:*

   3.1. Cash Financial Transaction Report,
   Namely: Financial Transactions conducted using banknotes and / or coins, in an amount of at least Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) or with a foreign currency of equal value, which is carried out either in one transaction or several Transaction times in 1 (one) working day.

   As from January 1 to December 31, 2019, there were 14,253 (fourteen thousand two hundred and fifty three) transactions that submitted through the GRIPS PPATK application
   3.2. Suspicious Financial Transaction Reports,
   Namely: Financial Transactions that deviate from the profile, characteristics, or habits of the pattern of Transactions of the relevant Service Users and since known by the bank.

Terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) transaksi yang submit melalui aplikasi GRIPS PPATK

As from January 1 to December 31, 2019, 166 (one hundred sixty six) transactions were submitted via the GRIPS PPATK application

Tabel Pelaporan Informasi Transaksi Keuangan Periode 2016 - 2019
Table of Reporting on Financial Transaction Information for 2016 - 2019 Period

Laporan	Periode				Fluktuatif	
	2016	2017	2018	2019	(Yoy)	(%)
LTKT	17.065	16.680	13.075	14.253	1.178	8,26%
LTKM	329	66	345	166	-179	-107,83%
Total	**17.394**	**16.746**	**13.420**	**14.419**	**999**	**6,93%**

3.3. Suspect CIF Ganda,
Sebanyak 15.595 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh lima), sedang di kerjakan oleh seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.

3.4. Cleansing data nasabah
a) Rencana tahun 2019 sebanyak 1.110.741 (satu juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh satu) terdiri dari :
   - Perorangan, sebanyak 1.043.000 (satu juta empat puluh tiga ribu) data.
   - Non perorangan sebanyak 67.441 (enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu) data.

b) Realisasi tahun 2019, sebanyak 1.029.921 (satu juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu) terdiri dari :
   - Perorangan, sebanyak 966.931 (sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu).
   - Non perorangan, sebanyak 62.990 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh).

c) Persentage pencapaian 93%.

3.3. Double CIF Suspect,
A total of 15,595 (fifteen thousand five hundred ninety-five) are being carried out by all Branch Offices and Sub-Branch Offices.

3.4. Cleansing customer data
a) 2019 plans for 1,110,741 (one million one hundred ten thousand seven hundred forty-one) consisting of:
   - *Individuals, as many as 1,043,000 (one million forty-three thousand) data.*
   - *Non-individuals totaling 67,441 (sixty seven thousand four hundred forty-one) data.*

b) Realization in 2019, a total of 1,029,921 (one million twenty nine thousand nine hundred and twenty one) consists of:
   - *Individuals, 966,931 (nine hundred sixty six thousand nine hundred thirty one).*
   - *Non-individuals, as many as 62,990 (sixty two thousand nine hundred ninety).*

c) Achievement percentage of 93%.

2. Pelaporan SIPESAT PPATK

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK (PERKA) No. 02/1.02/PPATK/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) maka setiap Bank wajib menyampaikan laporan SIPESAT ke PPATK secara periodik triwulanan.

Selama tahun 2019 Bank Papua telah menyampaikan Laporan SIPESAT sebanyak 4 (Empat) kali yaitu : Periode Triwulan I (Januari-Maret 2018) dan Periode Triwulan II (April –Juni 2018), Triwulan III (Juli – September), Triwulan IV (Oktober – Desember).

2. Reporting of the PPATK SIPESAT

In accordance with Regulation of the Head of PPATK (PERKA) No. 02 / 1.02 / PPATK / 2014 concerning the Integrated Service User Information System (SIPESAT), each Bank is required to submit SIPESAT reports to PPATK on a quarterly basis.

During 2019 Bank Papua has submitted SIPESAT Reports 4 (four) times, namely: Quarter I Period (January-March 2018) and Quarter II Period (April-June 2018), Quarter III (July-September), Quarter IV (October - December).

Tabel Pelaporan Informasi Pengguna Jasa Terpadu Tahun 2016 - 2019
Table of Integrated Service User Information Reporting 2016 - 2019

Periode	Tahun				Fluktuatif	
	2016	2017	2018	2019	(Yoy)	(%)
Triwulan I	5.887	10.854	21.922	37.849	15.927	72,65%
Triwulan II	17.564	16.983	19.609	23.320	3.711	18,92%
Triwulan III	35.890	32.642	26.318	58.893	32.575	123,77%
Triwulan IV	59.689	16.655	41.745	29.763	-11.982	-28,70%
Total	**119.030**	**77.134**	**109.594**	**149.825**	**40.231**	**36,71%**

Penyampaian laporan SIPESAT dilakukan secara *online* oleh Departemen APU PPT melalui fasilitas Secured Email Communication (SEC) PPATK oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki fasilitas login SEC PPATK. Khusus untuk Pelaporan SIPESAT Triwulan IV, tidak dilakukan melalui fasilitas SEC tetapi melalui pelaporan SIPESAT berbasis web.

Submission of SIPESAT reports is done online by the PPU APU Department through the PPATK Secured Email Communication (SEC) facility by designated officers who have SEC PPATK login facilities. Specifically for SIPESAT Reporting for Quarter IV, it is not done through SEC facilities but through web-based SIPESAT reporting.

3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Nasabah

Divisi Kepatuhan berkordinasi dengan Kantor Cabang Pelapor dan Divisi/Unit Kerja terkait dalam melakukan penanganan dan penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan nasabah baik secara lisan dan tertulis.

Untuk pemantauan pengaduan nasabah dan publikasi negatif yang sampaikan oleh nasabah dan masyarakat melalui website resmi Bank Papua dilakukan melalui kordinasi antara Divisi Kepatuhan dengan Divisi Sekretaris Perusahaan serta unit pengelola website Bank Papua.

3. Implementation of Customer Complaints Handling

The Compliance Division coordinates with Reporting Branch Offices and related Division / Work Units in handling and resolving complaints submitted by customers both verbally and in writing.

Monitoring of customer complaints and negative publicity submitted by customers and the public through the official website of Bank Papua is carried out through coordination between the Compliance Division with the Corporate Secretary Division and the Bank Papua website management unit.

Manajemen Bank Papua telah diterbitkan SOP (System operating procedure) terkait Pengaduan Nasabah sesuai Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2/SK-DIR/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 yang mengacu pada regulasi, antara lain :

1. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
2. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
3. SEOJK No. 2/SEOJK.07/2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada PUJK

Selama tahun 2019, terdapat pengaduan nasabah yang terjadi dan diselesaikan :

1. Penghimpunan dana : 3.
2. Penyaluran Kredit : 3.
3. Sistem Pembayaran
   - ATM dan Kartu elektronik : 637.
   - Kelalaian nasabah :131.

Bank Papua Management has issued SOP (System operating procedure) related to Customer Complaints in accordance with Board of Director Decree number: 18.2 / SK-DIR / III / 2019, dated March 25, 2019 which refers to regulations, including:

1. *POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector;*
2. *POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector;*
3. *SEOJK No. 2 / SEOJK.07 / 2014, concerning Service and Settlement of Consumer Complaints at PUJK*

During 2019, there were customer complaints that occurred and were resolved:

1. *Fund raising : 3.*
2. *Credit Distribution : 3.*
3. *Payment System*
   - *ATM and electronic cards : 637.*
   - *Customer negligence : 131.*

Tabel Penanganan Pengaduan Nasabah Tahun 2016- 2019
Table of Customer Complaints Handling for 2016-2019

Periode	Tahun				Fluktuatif	
	2016	2017	2018	2019	(YoY)	(%)
Triwulan I	105	145	91	110	19	118,68
Triwulan II	98	89	45	199	154	433,33
Triwulan III	232	124	60	241	181	401,67
Triwulan IV	213	116	53	224	171	349,06
Total	**648**	**474**	**249**	**774**	**525**	**292,77**

Kebijakan *Anti Fraud*

Anti Fraud Policy

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *Fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank Papua, maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Manajemen maupun karyawan.

In order to prevent cases of operational irregularities in the banking sector, especially Fraud that could harm customers or Bank Papua, it is necessary to increase the effectiveness of internal control, as an effort to minimize the risk of fraud by implementing anti-fraud strategies. During this time, both directly and indirectly, the implementation of Fraud prevention has been carried out by the Bank, among others through the implementation of Risk Management specifically the internal control system and the implementation of good governance. However, in order for its implementation to be effective efforts are still needed to improve so that fraud prevention is truly the focus of attention and culture in the Bank in all aspects of the organization, both by Management and employees.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang dilakukan Bank saat ini merupakan pelaksanaan atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi SK Nomor 28/DIR-BPD/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT. BPD Papua. Melalui Departemen *Anti Fraud*, maka penerapan Strategi *Anti Fraud* diwujudkan oleh manajemen Bank sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank.

The implementation of the Anti Fraud Strategy currently carried out by the Bank is the implementation of the issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 39 / POJK.03 / 2019 dated 19 December 2019 concerning the Implementation of the Anti Fraud Strategy for Commercial Banks and Board of Director Decree SK Number 28 / DIR- BPD / III / 2020 dated 24 March 2020 concerning Standard Operating Procedures (SOPs) Organizational Structure of PT. BPD Papua. Through the Anti Fraud Department, the implementation of the Anti Fraud Strategy is realized by the Bank's management as a form of company commitment in controlling the Fraud that is implemented in the form of a Fraud control system which is part of the Bank's internal control system.

Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggungjawab Manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh Manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *Awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* pada Bank. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

The effectiveness of Fraud control in the business process is the responsibility of Management, so that it requires a proper and comprehensive understanding of fraud by Management in order to provide direction and foster Awareness to control fraud risk at the Bank. The anti-fraud strategy is a manifestation of the Bank's management commitment in controlling fraud that is implemented in the form of a fraud control system. This strategy requires Management to mobilize resources so that the fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

Kebijakan Umum *Anti Fraud*

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* (*fraud*er) memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Strategi anti *fraud* adalah strategi bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Penerapan strategi anti *fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.

Keberhasilan strategi anti *fraud* dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud*.

Implementasi Strategi Anti-*Fraud* Bank Papua dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan yaitu:

1. Fungsi Pencegahan.
2. Fungsi Deteksi
3. Fungsi Investigasi Pelaporan dan sanksi
4. Fungsi pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut

Kebijakan Strategi *Anti Fraud* Bank Papua merupakan wujud komitmen Direksi dalam pengendalian *fraud*. Direksi tidak memberikan toleransi pada setiap bentuk *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Papua. Departemen *Anti Fraud* sebagai koordinator dalam penerapan Strategi *Anti Fraud* melakukan *monitoring* secara konsisten penerapan Strategi *Anti Fraud* di Bank Papua. Dengan penerapan Strategi *Anti Fraud* secara konsisten diharapkan dapat menekan angka kejadian *fraud*.

Anti Fraud General Policy

Fraud is an act of deviation or omission that intentionally deceives, cheat, or manipulates banks, customers, or other parties that occur within the bank and / or uses bank facilities so that banks, customers or other parties suffer losses and / or fraud perpetrators (frauder) obtain financial benefits both directly and indirectly. The types of actions classified as fraud are cheat, deceives, asset embezzlement, information leakage, banking crime (fraud), and other actions that can be equated with it.

The anti fraud strategy is the bank's strategy in controlling fraud that is designed by referring to the process of fraud by taking into account the characteristics and range of potential frauds that are arranged comprehensively-integralistic and implemented in the form of a fraud control system. The implementation of an anti fraud strategy is part of the application of Risk Management, specifically related to aspects of the internal control system.

The success of the anti fraud strategy is influenced by the environment that supports the creation of conducive conditions so that all parties involved can play a good role in implementing the fraud control system.

The implementation of Bank Papua's Anti-Fraud Strategy is elaborated through 4 (four) pillars of interconnected fraud control strategies, namely:

1. *Prevention function.*
2. *Detection Functions.*
3. *Reporting and sanction investigation functions*
4. *Monitoring, evaluation and follow-up functions*

Bank Papua's Anti-Fraud Strategy is a manifestation of the Board of Director' commitment to fraud control. The Board of Director does not tolerate any form of fraud both from internal and external Bank Papua. The Anti-Fraud Work Unit as the coordinator in implementing the Anti-Fraud Strategy consistently monitors the implementation of the Anti-Fraud Strategy at Bank Papua. By implementing the Anti-Fraud Strategy consistently it is expected to reduce the number of fraud cases.

Departemen *Anti Fraud*

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 18.1/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Struktur Organisasi, unit kerja Departemen *Anti Fraud* telah dilebur/digabung dengan Divisi Audit Internal, dengan diterbitkan SK tersebut diatas maka Satuan Kerja *Anti Fraud* diubah menjadi **Departemen *Anti Fraud* (DAF).**

Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank memiliki unit kerja yang menangani implementasi strategi anti *Fraud* yaitu Departemen *Anti Fraud* yang berada langsung di bawah supervisi Direktur Utama, akan melengkapi fungsi sistem pengendalian internal Bank Papua.

Dalam pembentukan unit atau fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut :

1. Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi telah disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
2. Penetapan uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas;
3. Pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada Direktur Utama, serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas

Struktur Organisasi Departemen *Anti Fraud* (DAF) sesuai Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 54/DIR-BPD/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Anti Fraud Department

Based on Board of Director' Decree (SK) Number 18.1 / DIR-BPD / III / 2019 dated March 25, 2019 concerning Organizational Structure, the Anti-Fraud Department work unit has been merged / merged with the Internal Audit Division, with the issuance of the Decree mentioned above, the Anti-Fraud Work Unit is amended became the Anti Fraud Department (DAF).

Organizational Structure and Responsibility

To support the effectiveness of the implementation of the anti Fraud strategy, the Bank has a work unit that handles the implementation of the anti Fraud strategy, namely the Anti Fraud Department which is directly under the supervision of the President Director, will complete the function of Bank Papua's internal control system.

In forming such units or functions, at least the following:

1. *The establishment of units or functions in the organizational structure has been adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business activities;*
2. *Establishing clear job descriptions and responsibilities;*
3. *Responsibility of the unit or function directly to the President Director, as well as communication and reporting relationships directly to the Board of Commissioners*
4. *The implementation of tasks in the unit or function must be carried out by Human Resources who have competence, integrity and independence, and are supported with clear accountability*

Anti-Fraud Department Organizational Structure (DAF) according to the Appendix of Board of Director Decree Number 54 / DIR-BPD / XI / 2019 dated November 26, 2019.

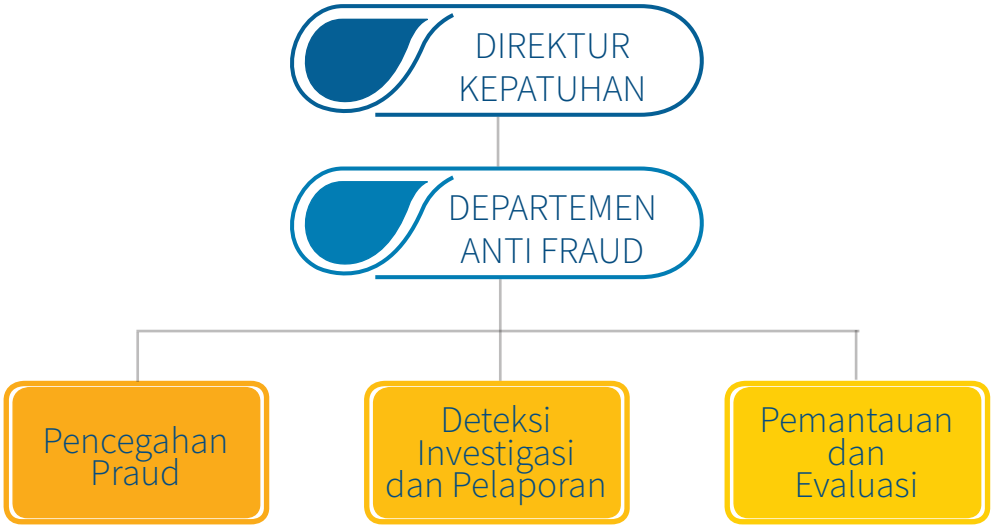

Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Departemen *Anti Fraud* diantaranya :

1. Bertanggungjawab atas Penerapan Strategi *Anti Fraud* diantaranya :
   - Fungsi Pencegahan;
   - Fungsi Deteksi;
   - Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi;
   - Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.
2. Departemen *Anti Fraud* menjadi pengelola dan pelaksanan *whistle-blowing system* (WBS). Departemen *Anti Fraud* menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) berupa :
   - Jumlah laporan yang masuk;
   - Jumlah laporan yang ditindaklanjuti;
   - Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya;
   - Jumlah laporan hasil awal yang ditindaklanjuti.

Program Pencegahan Tindakan Fraud

Pencegahan *Fraud* yang dilakukan oleh Bank sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Anti Fraud Awareness*
   Dalam rangka menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait, Bank menetapkan strategi yang terdiri dari :
   a. *Anti Fraud* Statement.
      - *Anti Fraud* Statement terdiri dari :
        - Anti *fraud* statement Direksi dan Komisaris.
        - Anti *fraud* statement pegawai.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Anti-Fraud Work Unit include:

1. *Responsible for the Application of Anti-Fraud Strategies including:*
   - *Prevention Function;*
   - *Detection function;*
   - *Investigation, Reporting and Sanctions Functions;*
   - *Function of Monitoring, Evaluation and Follow-up.*
2. *The Anti-Fraud Work Unit becomes the manager and implementation of a whistle-blowing system (WBS). The Anti-Fraud Work Unit collects data and / or information on the implementation of the violation reporting system (WBS) in the form of:*
   - *Number of reports entered;*
   - *Number of reports followed up;*
   - *Number of reports not followed up and the reasons;*
   - *The number of reports on initial results followed up.*

Fraud Action Prevention Program

Fraud prevention carried out by the Bank includes at least the following:

1. *Anti Fraud Awareness*
   In order to raise awareness about the importance of prevention of fraud by all relevant parties, the Bank sets a strategy consisting of:
   a. Anti Fraud Statement.
      - *Anti Fraud Statement consists of:*
        - *Anti fraud statement of Board of Director and Commissioners.*
        - *Anti employee statement fraud.*

- Anti *fraud* statement ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank dan disosialisasikan pada semua tingkatan organisasi Bank secara berkala minimal 2 kali setahun oleh Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Modal Manusia.
- *Anti Fraud* Statement dievaluasi oleh Divisi Kepatuhan secara berkala minimal 2 kali setahun.
- Hasil evaluasi kepatuhan anti *fraud* statement menjadi sebagai salah satu bahan laporan penerapan strategi anti *fraud*.

- Sosialisasi *Anti Fraud* Statement

  Sosialisasi dilakukan sekurang-kurangnya memuat :
  - Latar belakang pelaksanaan sosialisasi.
  - Data dan informasi untuk pertimbangan Direksi .
  - Usul saran yang memuat jadwal pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi, instruktur sosialisasi dam mekanisme pelaksanaan sosialisasi.
  - Pelaksanaan sosialisasi dibuktikan dengan surat pemberitahuan pelaksanaan sosialisasi ke unit kerja berikut daftar pegawai yang mengikuti, daftar absensi pegawai yang mengikuti, dokumentasi/photo pelaksanaan sosialisasi.
  - Setelah sosialisasi dilaksanakan, setiap pegawai diharuskan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan/komitmen terhadap pelaksanaan strategi anti *fraud*.

b. Program *Employee Awareness*
- Program *Employee Awareness* dilakukan dalam bentuk :
  - Pelatihan, *Workshop* atau seminar untuk meningkatkan pemahaman terkait *fraud*.
  - Melakukan publikasi internal terkait anti *fraud*.
- Rencana program *Employee Awareness* disusun oleh Departemen *Anti Fraud* (DAF) yang didasarkan pada hasil evaluasi penerapan strategi anti *fraud*.
- Pelaksanaan program *Employee Awareness* terkait dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Divisi Manajemen Modal Manusia berdasarkan rekomendasi dari Divisi Audit Internal (DAI).
- Pelaksanaan program *Employee Awareness* terkait dengan publikasi internal dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dalam bentuk penyampaian artikel melalui media *system* anti *fraud* atau media publikasi bank.

- *Anti fraud statements are signed by all Bank employees and are socialized at all levels of the Bank's organization at least twice a year by the Compliance Division in coordination with the Human Capital Management Division.*
- *The Anti Fraud Statement is regularly evaluated by the Compliance Division at least 2 times a year.*
- *The results of the anti fraud statement compliance evaluation became one of the reports on the implementation of the anti fraud strategy.*

- *Anti-Fraud Statement socialization*

  The socialization is carried out at least containing:
  - *Background of dissemination.*
  - *Data and information for consideration by the Board of Director.*
  - *Suggested suggestions that include the schedule for the dissemination, participants of the socialization, instructor socialization and the mechanism for conducting the socialization.*
  - *The information dissemination was proven by a notification letter on the implementation of socialization to the work unit along with a list of employees who attended, the attendance list of employees who participated in the documentation / photo of the socialization.*
  - *After the socialization is carried out, each employee is required to sign a statement of compliance / commitment to the implementation of the anti fraud strategy.*

b. Employee Awareness Program
- *Employee Awareness Program takes the form of:*
  - *Training, workshops or seminars to improve understanding regarding fraud.*
  - *Conduct internal publications related to anti fraud.*
- *Plans for Employee Awareness programs are prepared by SKAF based on the results of evaluating the implementation of anti fraud strategies.*
- *The implementation of an Employee Awareness program related to education and training is carried out by the Human Capital Management Division based on recommendations from DAI.*
- *The implementation of the Employee Awareness program related to internal publications is carried out by the Compliance Division in the form of submitting articles through anti-fraud media systems or bank publication media.*

- Pelatihan, *Workshop* atau seminar sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh :
  - Pihak Internal.
  - Pihak Eksternal.
  - Pihak luar yang menyelenggarakan atau diminta untuk menyelenggarankan pelatihan, *workshop* atau seminar.
- Pelaksanaan pelatihan, *workshop* atau seminar terkait anti *fraud* dilaksanakan secara berkala, konsisten dan berkelanjutan.
- Divisi Manajemen Modal Manusia melakukan evaluasi terhadap program *Employee Awareness* secara berkala dan hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Operasional dan ditembuskan kepada Divisi Audit Internal (DAI) dan Divisi Kepatuhan.
- Evaluasi dilakukan dalam bentuk :
  - Pengujian terkait pemahaman pegawai terhadap strategi anti *fraud* setelah dilakukan sosialisasi.
  - Analisis dan kaji ulang terhadap efektifitas program *employee awareness*.

c. Program *Customer* Dan Third Party *Awareness*
- Program *Customer Awareness* dilakukan dalam bentuk :
  - Pembuatan brosur, stiker dan banner anti *fraud*
  - Pemberitahuan dalam bentuk notifikasi SMS
- Program *Customer Awareness* dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan berdasarkan memo permintaan dari Divisi Audit Internal (DAI).
- Pengadaan brosur, stiker dan banner anti *fraud* dilakukan oleh Divisi Umum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- Program *Customer Awareness* dievaluasi secara berkala oleh Divisi Sekretaris Perusahaan melalui penyampaian kuesioner kepada nasabah.
- Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program *Customer Awareness* disampaikan kepada Direkstur Utama dan ditembuskan ke Divisi Audit Internal (DAI), Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Kepatuhan.
- Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki program *customer awareness* selanjutnya.
- Program *Third Party Awareness* dilakukan kepada vendor, *supplier*, *merchant* dan rekanan bahwa Bank telah menerapkan kebijakan strategi anti fraud dan tidak mentolerir segala bentuk *fraud*.
- Program *Thrid Party Awareness* dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa, *third party gathering* dan *service meeting & gathering*.

- *Training, workshops or seminars referred to above are carried out by:*
  - *Internal side.*
  - *External parties.*
  - *Outside parties that organize or are asked to present training, workshops or seminars.*
- *The implementation of training, workshops or seminars related to anti fraud is carried out periodically, consistently and continuously.*
- *The Human Resources Division periodically evaluates the Employee Awareness program and the results of the evaluation are submitted to the Banking Operation Director and are distributed to DAI and the Compliance Division.*
- *Evaluation is done in the form of:*
  - *Tests related to employee understanding of anti fraud strategies after socialization.*
  - *Analysis and review of the effectiveness of employee awareness programs.*

c. *Customer and Third Party Awareness Program*
- *Customer Awareness Program is carried out in the form of:*
  - *Making anti-fraud brochures, stickers and banners*
  - *Notification in the form of SMS notifications*
- *Customer Awareness Program is carried out by the Corporate Secretary Division based on a request memo from DAI.*
- *Procurement of brochures, stickers and anti fraud banners is carried out by the General Division in accordance with the provisions of the applicable goods and services.*
- *The Customer Awareness Program is regularly evaluated by the Division of Corporate Secretary through the submission of questionnaires to customers.*
- *Report on the results of the evaluation of the implementation of the Customer Awareness program delivered to the Main Director and sent to DAI, the Bank's Risk Management Division and the Compliance Division.*
- *Evaluation results are used as input material to improve subsequent customer awareness programs.*
- *The Third Party Awareness Program is carried out to vendors, suppliers, merchants and partners that the Bank has implemented anti fraud strategy policies and does not tolerate all forms of fraud.*
- *The Thrid Party Awareness Program is carried out through the signing of an integrity pact in the procurement of goods and services, a third party gathering and service meetings & gatherings.*

2. Identifikasi Kerawanan
   a. Identifikasi kerawanan dilakukan terhadap seluruh aktivitas yang mengandung risiko *fraud* baik yang bersumber dari aktivitas Bank.
   b. Identifikasi kerawanan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank berdasarkan hasil kajian risiko terhadap produk dan / atau aktivitas Bank.
   c. Identifikasi kerawanan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, disampaikan ke Direktur Kepatuhan dan ditembuskan ke Divisi Audit Internal (DAI).
   d. Identifikasi kerawanan minimal berisikan :
      - Nama produk dan/atau aktivitas.
      - Satuan Kerja Perumus produk dan/atau aktivitas.
      - Proses bisnis yang berpotensi menimbulkan *fraud*.
      - Hasil kajian risiko.

Realisasi Program Kerja Departemen *Anti Fraud*

Realisasi program Kerja Departemen *Anti Fraud* pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan
   - Pelaksanaan Sosialisasi, di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
   - Mengikuti kegiatan *workshop*, seminar dan pelatihan yang terkait dengan *fraud*.
   - Mengurus Artikel baik melalui media majalah bank Papua maupun melalui aplikasi yang tersedia.
   - Mengkoordinasikan kesiapan Divisi Sekretaris Perusahaan dalam pengusulan pembuatan brosur, stiker dan benner anti *fraud* dan usulan notifikasi SMS.
   - Memonitor, identifikasi kerawanan sesuai dengan hasil kajian Divisi Manajemen Risiko Bank
   - *Monitoring* kegiatan Divisi Manajemen Modal Manusia dalam bentuk : rekrutmen pegawai ; rotasi, mutasi, promosi atau demosi pegawai ; kebijakan mengenali pegawai ; penerapan cuti wajib bagi pegawai.
   - Melakukan *monitoring* kegiatan konseling yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Modal Manusia.
   - Melakukan *monitoring* tindak lanjut atas hasil temuan audit internal maupun eksternal sesuai dengan komitmen auditee.
   - Me*monitoring* kondisi Tingkat Kesehatan Bank sesuai hasil perhitungan yang berlaku.

2. Bidang Deteksi
   - Melakukan sosialisasi *whistleblo*wing di KP , KCU dan KC.
   - Melakukan *update* atas SK perlindungan saksi, sehubungan dengan *Whistleblower*.

2. *Identification of vulnerability*
   a. *Identification of vulnerability is carried out on all activities that contain fraud risk both from Bank activities.*
   b. *Identification of vulnerabilities is carried out by the Bank's Risk Management Division based on the results of a risk Assessment of the Bank's products and / or activities.*
   c. *Identification of vulnerability as referred to in the points above, submitted to the Compliance Director and sent to DAI.*
   d. *Identification of vulnerability must contain at least:*
      - *Name of product and / or activity.*
      - *Product Formulation Unit for products and / or activities.*
      - *Business processes that have the potential to cause fraud.*
      - *Risk Assessment results.*

Realization of the Anti Fraud Work Unit Program

The realization of the Anti Fraud Work Unit Work Program in 2018 is as follows:

1. *Prevention Field*
   - *Implementation of Socialization, at the Leader Office and Branch Offices.*
   - *Participating in workshops, seminars and training related to fraud.*
   - *Take care of articles either through the media of the Papua bank magazine or through the available applications.*
   - *Coordinating the readiness of the Secretary in proposing the making of brochures, stickers and anti-fraud and proposed SMS notifications.*
   - *Monitor, identify vulnerabilities in accordance with the results of the Risk Management Division study.*
   - *Monitoring the activities of the Human Capital Management Division in the form of: employee recruitment; rotation, transfer, promotion or demotion of employees; Policy of recognizing employees; application of mandatory leave for employees.*
   - *Monitoring counselling activities carried out by the Human Capital Management Division.*
   - *Monitor follow-up actions on internal and external audit findings in accordance with the auditee's commitment.*
   - *Monitor the condition of the Bank's Soundness in accordance with the results of the applicable calculation.*

2. *Detection Field*
   - *Disseminate to whistle-blowing at KP, KCU and KC.*
   - *Updated Decree witness protection, in connection with the Whistle-blower.*

- Melakukan *follow* up atas laporan dari *whistleblower* internal dan eksternal sesuai dengan BPP Strategi anti fraud.
- Melakukan *surprise* audit terhadap kegiatan yang diindikasikan rawan terjadi *fraud*.
- Melakukan kegiatan *survellance* terhadap suatu kegiatan audit sesuai dengan prosedure BPP Strategi anti fraud.

3. Bidang Investigasi dan Pelaporan
   - Melakukan investigasi terhadap pejabat, pegawai maupun kegiatan yang diduga telah terindikasi *Fraud*, baik atas dasar laporan pengaduan maupun atas keyakinan berdasarkan data/fakta untuk memastikan apakah terjadi *fraud* atau bukan *fraud*.
   - Menyampaikan laporan wajib maupun laporan yang bersifat insidentil kepada Direksi, Komisaris ,maupun kepada pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prosedur penyampaian laporan sebagaimana BPP Srtategi *Anti Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Melakukan *monitoring* terhadap penerapan sanksi atas pejabat/pegawai yang dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan Manajemen/Komite Pertimbangan pegawai.

Laporan Penyimpangan Internal

Untuk pencegahan dan pemberantasan fraud Bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program seperti pelatihan fraud *awareness*, audit internal, quality *Assessment*, Know Your Employee, Tone of the Top dan komitmen manajemen senior melalui e-mail kepada seluruh karyawan sudah dijalankan secara rutin.

Sampai dengan akhir Desember 2019, jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

- *Follow up on reports from internal and external whistle-blowers in accordance with BPP Anti Fraud.*
- *Conduct a surprise audit of activities that are indicated to be prone to fraud.*
- *Conduct surveillance activities on an auditee activity in accordance with the BPP Anti Fraud procedure*

3. *Investigation and Reporting Field*
   - *Investigate officials, employees and activities suspected of fraud, both on the basis of complaint reports and on data / fact based beliefs to ascertain whether fraud or fraud occurred.*
   - *Submitting mandatory and incidental reports to the Board of Director, Commissioners and external parties, the Financial Services Authority (OJK) Procedure for submitting reports as BPP Anti Fraud Strategic PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ..*
   - *Monitor the implementation of sanctions on officials / employees who are subject to sanctions in accordance with the Decree of the Management / Employee Advisory Committee.*

Internal Fraud Report

For fraud prevention and eradication the Bank has implemented prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, and monitoring, evaluation and follow-up. Programs such as fraud awareness training, internal audits, quality assessment, Know Your Employee, Tone of the Top and senior management commitments via e-mail to all employees have been carried out routinely.

Until the end of December 2019, the number of internal deviations can be seen in the table as follows:

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total *Fraud*	-	-	27	17	-	1
Telah diselesaikan	-	-	7	4	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	19	11	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	2	-	-

Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku Fraud

1. Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku fraud maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan fraud.
2. Departemen *Anti Fraud* berdasarkan hasil investigasi, menetapkan pelaku fraud dan menyampaikannya kepada Direksi untuk diberikan keputusan.
3. Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) bertanggungjawab merekomendasikan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku fraud.
4. Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, resposibility, independensi dan fairness.
5. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Pemantauan

1. Pemantauan tindak lanjut terhadap kejadian-kejadian fraud dilakukan oleh Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud*.
2. Pemantauan dilakukan terhadap:
   a. Sanksi/tindakan yang diambil/dikenakan terhadap pelaku fraud serta penerapannya.
   b. Konsistensi pelaksanaan sanksi.
   c. Akar permasalahan dalam penerapan tindak lanjut peristiwa fraud.
   d. Kecendrungan (trend) kejadian fraud terkait dengan adanya penegakan hukum (law enforcement).
3. Hasil pemantauan digunakan untuk melihat efektifitas penegakan hukum dilingkungan internal bank dan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
4. Kelompok Deteksi dan Investigasi *Anti Fraud* menyerahkan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud kepada Kepala Departemen *Anti Fraud* untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika terdapat perubahan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud dikembali ke Petugas Departemen *Anti Fraud* untuk di perbaiki.
5. Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud yang telah ditandatangani diserahkan kepada Direktur Utama sebagai bahan masukan terkait Pelaksanaan Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Imposition of Sanctions for Fraud Actors

1. *Imposition of sanctions is aimed at providing a deterrent effect to fraudsters as well as to bank employees or management who intend to commit fraud.*
2. *The Anti Fraud Department based on the results of the investigation, determines the perpetrators of fraud and submits them to the Board of Director for decision.*
3. *The Employee Advisory Committee (KPP) is responsible for recommending sanctions for perpetrators of fraud.*
4. *Sanctions are based on the principles of transparency, accountability, resposibility, independence and fairness.*
5. *Sanction Procedure refers to Company Regulations PT. Papua Regional Development Bank.*

Monitoring

1. *Follow-up monitoring of fraud incidents is carried out by the Anti Fraud Detection and Investigation Group.*
2. *Monitoring is carried out on:*
   a. *Sanctions / actions taken / imposed on fraud perpetrators and their application.*
   b. *Consistent implementation of sanctions.*
   c. *The root of the problem in implementing a follow-up to a fraud event.*
   d. *Trends (trends) fraud incidents associated with the existence of law enforcement (law enforcement).*
3. *The monitoring results are used to see the effectiveness of law enforcement in the bank's internal environment and as input for making improvements.*
4. *The Anti-Fraud Detection and Investigation Group submits the Draft Follow-Up Monitoring Report to the fraud incident to the Head of the Anti-Fraud Department to be examined and signed. If there is a change in the Draft Monitoring Report, the follow-up to the fraud event will be returned to the Anti Fraud Department Officer to be corrected.*
5. *The follow-up monitoring report on the fraud event that has been signed is submitted to the President Director as input for the implementation of the Anti Fraud Strategy Implementation.*

Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan strategi anti fraud. Evaluasi terhadap sistem pengendalian fraud dilakukan secara berkala minimal mencakup:

1. Efektivitas program anti fraud *awareness*, yang mencakup :
   - Pelaksanaan anti fraud statement.
   - Program employee *awareness*.
   - Program customer *awareness*
2. Efektivitas identifikasi kerawanan.
3. Efektivitas know your employee.
4. Efektivitas Program Bantuan Pegawai.
5. Efektivitas sistem pelaporan pelanggaran (Whistle-blowing *system*).
6. Efektivitas Surprise Audit.
7. Efektivitas Surveillance System.

Tindak Lanjut

Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Unit kerja mengirimkan laporan/data/informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut peristiwa fraud yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada Departemen *Anti Fraud*. Laporan evaluasi operasional oleh Departemen *Anti Fraud* diatas disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan Laporan Evaluasi Manajemen disampaikan kepada Dewan Komisaris. Data/ informasi/dokumen terkait dengan peristiwa fraud disimpan dalam lemari tahan api dan hanya dapat diakses oleh Kepala Departemen *Anti Fraud* dan/atau Direksi atau pihak yang diberi wewenang oleh Direksi .

Evaluation

The evaluation aims to find out the weaknesses and causes of fraud and determine the corrective steps needed in implementing an anti-fraud strategy. Evaluations of the fraud control system are carried out periodically at a minimum including:

1. *The effectiveness of anti fraud awareness programs, which include:*
   - *Implementation of anti-fraud statements.*
   - *Employee awareness program.*
   - *Customer awareness program*
2. *Effectiveness of vulnerability identification.*
3. *Effectiveness of know your employee.*
4. *Effectiveness of Employee Donation Programs.*
5. *The effectiveness of the whistle-blowing system.*
6. *Effectiveness of Surprise Audit.*
7. *Effectiveness of Surveillance System.*

Follow-up

The follow-up mechanism is based on the evaluation results of fraud incidents to correct weaknesses and strengthen the internal control system in order to prevent the recurrence of fraud due to similar weaknesses. The work unit sends reports/data/information related to the implementation of the follow-up of the fraud event carried out by the work unit to the Anti Fraud Department. The operational evaluation report by the Anti Fraud Department above is prepared no later than 10 (ten) working days after the reporting month and submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director. While the Management Evaluation Report is submitted to the Board of Commissioners. Data / information / documents related to fraud events are stored in a fireproof cabinet and can only be accessed by the Head of the Anti-Fraud Department and / or the Board of Director or parties authorized by the Board of Director.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website yang tersedia secara tepat waktu, lengkap dan akurat. Transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan tersebut diantaranya adalah Laporan Tahuan, Laporan Publikasi, Info Produk dan Jasa Bank, serta info seputar kegiatan Bank yang dimuat pada halaman website, majalah, brosur, dan banner perusahaan.

The Bank has made transparency on financial and non-financial conditions for stakeholders including publication financial reports and has submitted the report to relevant parties such as the Financial Services Authority and stakeholders according to applicable regulations. All reports on financial and non-financial conditions have been delivered transparently to the public through various print and electronic media facilities, including the publication of financial statements on websites that are available in a timely, complete and accurate manner. Transparency of the financial and non-financial conditions includes the Statement of Reports, Publication Reports, Bank Product and Service Info, as well as information about the Bank's activities which are posted on the website pages, magazines, brochures, and company banners.

Informasi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan disusun dan disampaikan kepada *stakeholders* dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi.Informasi tersebut selalu diungkapkan dan diunggah di website Perusahaan secara berkala.

Information on transparency of financial and non-financial conditions is prepared and submitted to stakeholders by preparing and presenting reports in accordance with procedures, types and coverage as stipulated in Bank Indonesia regulations, consisting of Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports and Financial Reports Consolidation. This information is always disclosed and uploaded on the Company's website regularly.

Selain hal tersebut, Bank Papua juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional selain melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Papua.

In addition to this, Bank Papua has also announced Quarterly Publication Financial Reports in local and national daily newspapers in addition to reporting them to related institutions, in the hope that the public can obtain complete and accurate information about the financial condition of Bank Papua.

Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Papua telah mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Homepage* Bank Papua telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank Papua. Selain itu juga menyampaikan informasi produk dan layanan bank, yang mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya,
2. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/

To fulfill the non-financial transparency aspect, Bank Papua has revealed various information in the following forms:

1. *The homepage of Bank Papua has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Published Financial Reports, GCG Implementation Reports, Branch Office, Sub-Branch Offices, Cash Offices, and Bank Papua ATM locations. In addition, it also provides information on bank products and services, which include product types, interest rates, third party bill payment services and so on,*
2. *Provide product brochures at each Branch Office / Sub-Branch*

Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Papua,
3. Menginformasikan tingkat suku bunga dan kurs pada papan informasi elektronik,
4. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah,
5. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sesuai dengan pasal 57 dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum diatur bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Berdasarkan ketentuan OJK diatas, Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta debitur inti. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, Bank menyusun dan melakukan pengkinian daftar rincian pihak terkait secara terus menerus yang mempunyai hubungan pengendali dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan.

/ Cash Office of Bank Papua,
3. Inform interest rates and exchange rates on electronic information boards,
4. Inform the procedures for handling and resolving customer complaints,
5. Establish a unit and / or function of customer complaints at the Leader Office and at each Branch Office.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

In accordance with Article 57 and 58 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks it is regulated in order to avoid bank business failure as a result of concentrating the provision of funds and increasing the independence of the Bank's Board of Director and Board of Commissioners towards the potential for intervention from related parties, Banks are required to apply the prudential principle in the provision of funds, among others, by implementing a portfolio distribution or diversification of the provision of funds provided.
The implementation of the provision of funds to related parties and / or large exposures must be guided by the provisions governing the maximum lending limit for commercial banks.

Based on the OJK provisions above, the Bank has implemented the prudential principle in the provision of funds to related parties and the provision of large funds in accordance with:
1. Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. Bank Indonesia Regulation Number 7/3 / PBI / 2005 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13 / PBI / 2006.

The Bank has established an internal policy regarding LLL and allocation of funds for related parties and core debtors. In addition, to improve and facilitate oversight of the provision of funds to related parties, the Bank compiles and updates the list of details of related parties continuously that has a controlling relationship with the Bank, both directly and indirectly, through ownership, management and or financial relations.

Selama tahun 2019, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal BMPK dimaksud diatas secara konsekwen dan tepat waktu. Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Papua selama tahun 2019:

During 2019, the Bank never violated or exceeded the LLL. The Bank has submitted regular reports to the Financial Services Authority (OJK) regarding the LLL referred to above on a consistent and timely basis. The table below explains the provision of funds to related parties as well as individual and group debtors at Bank Papua during 2019:

No	Penyediaan Dana	Jumlah		*Provision of Funds*
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)	
1	Kepada Pihak Terkait	15	1.513.359.137.905	*To Related Parties*
2	Kepada debitur inti :			*To the core debtor:*
	a. Individu	16	2.245.023.765.427	*a. Individual*
	b. Group	9	1.502.494.328.786	*b. The group*

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Skala Perbandingan

The Highest and Lowest Salary Ratio in the Comparison Scale

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

For the ratio / salary ratio between the highest Board of Commissioners' salary and the lowest, the highest Board of Director' salary with the lowest, the highest employee's salary with the lowest, and between the highest Board of Director' salary with the highest employee salary throughout 2019 can be seen in the following table.

Tabel Perbandingan Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Comparison Table

No	Jabatan	Gaji		Rasio Perbandingan	*Position*
		Tertinggi	Terendah		
1	Gaji Dewan Komisaris	90.000.000	81.000.000	1,11	*Salary of the Board of Commissioners*
2	Gaji Direksi	150.000.000	135.000.000	1,11	*Board of Director' Salary*
3	Gaji Pegawai Tetap	33.038.100	3.680.997	8,98	*Permanent Employee Salary*
4	Gaji Pegawai Tidak Tetap	35.000.000	4.000.000	8,8	*Non-permanent employee salaries*
5	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	150.000.000	33.038.100	4,6	*The highest salary for directors & employees remains highest*

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflicts of Interest

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi , Pejabat Eksekutif, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

The Bank always upholds personal integrity and noble professionalism, which is set forth in the form of internal policies regarding the Code of Conduct and Corporate Cultural Values that must be obeyed by all levels of Commissioners, Board of Director, Executive Officers, employees and parties related to cooperation with the Bank. The Code of Conduct and Conduct Guidelines regulate matters that must be avoided to prevent potential conflicts of interest in any activity, including in decision making.

Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan ban

A conflict of interest occurs if the owner, a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Director, an Executive Officer, a Decision-Making Officer or an Actor makes a decision and in that decision concerns the personal interests of the party concerned including the interests of his family members. In the event that the party that is supposed to make a decision has a conflict of interest against the Bank, then the party must disclose the conflict of interest as well as not be involved in any decision making stages and not be allowed to take actions that can harm the bank because it is highly likely that the decision is not independent, so potentially harm or reduce tire earnings

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan;
2. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan; dan
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

The basic elements that must be fulfilled by all employees and management in managing conflicts of interest are as follows:

1. *Comply with and obey applicable laws and regulations, corporate culture and internal company provisions;*
2. *Avoid activities that can cause a conflict of interest; and*
3. *Storing and maintaining the confidentiality of company information and information related to parties that have business relations with the company.*

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam setiap kegiatan Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Compliance with laws and regulations is manifested in every activity of the Bank, including the Board of Commissioners of the Bank not involved in making decisions on operational activities, except in the case of providing funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning LLL for Commercial Banks and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners of the Bank is also required to make disclosures in the event of a conflict of interest.

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2019, there were no reports of transactions containing conflicts of interest.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan				
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai transaksi (Rp)	Keterangan
Names and Position with *Conflict of Interest*	Name and Position of Decision Maker	Transaction Type	Transaction value (Rp)	Information
NIHIL	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2019, Bank Papua tidak melakukan *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi*, sehingga bank tidak memperoleh dan menggunakan dana dari *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi*.

Buy Back Shares and Buy Back Bonds

As of December 31, 2019, Bank Papua did not conduct Buy Back Shares and Buy Back Bonds, so banks did not obtain and use funds from Buy Back Shares and Buy Back Bonds.

Buy Back Share Dan Buy Back Obligasi			
Penjelasan Kebijakan ***Buy Back*** Obligasi	Jumlah ***Buy Back*** Obligasi	Harga ***Buy Back***	Peningkatan Laba dari hasil ***Buy Back*** Obligasi (jutaan Rp)
Explanation of Bond Buy Back *Policy*	Bond Buy Back Amount	Buy Back Price	Increase in Earning from Bond Buy Back results (millions of Rp)
NIHIL	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**

Shares Option

Sampai dengan akhir Desember 2019, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Papua, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Selama dan dalam periode tahun pelaporan 2019 tidak terdapat opsi untuk membeli saham Bank Papua oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Shares Option

As of the end of December 2019, members of the Board of Commissioners and Board of Director of the Bank do not have shares in Bank Papua, other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled both inside and outside the Papua and West Papua Provinces. During and in the 2019 reporting period there was no option to buy shares of Bank Papua by members of the Board of Commissioners, Board of Director and Executive Officers carried out through stock offers or stock option offers in the framework of providing compensation given to members of the Board of Commissioners, Board of Director and Bank Executive Officers.

Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan/ atau Kegiatan Politik

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Papua telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dll.

Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
2. Sepanjang tahun 2018, Pemberian Dana untuk kegiatan social yang dikemas Bank Papua adalah dengan melaksanakan berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Provision of Funds for Social Interest and / or Political Activities

In order to realize concern for the social environment and its surroundings Bank Papua has provided funds for social activities in order to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, etc.

Funding for social activities and political activities during the reporting period, namely:

1. *The bank does not provide funds for political activities.*
2. *Throughout 2018, Funding for social activities packaged by Bank Papua was carried out by implementing various Corporate Social Responsibility (CSR) activities.*

Rencana Bisnis Bank
Bank Business Plan

Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan Bank perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis, sebagai landasan dan acuan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai visi dan misi Bank.

In order to achieve business goals that are guided by the vision and mission that has been determined the Bank needs to develop and set strategic goals and a set of Corporate values. Furthermore, the strategic goals and values of the company are further elaborated in the Business Plan, as the basis and reference for carrying out operational activities in accordance with the Bank's vision and mission.

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan Bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha Bank. Rencana Bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi.

In order to achieve the objectives in accordance with the vision and mission, the preparation of the Bank's Business Plan needs to be done carefully and realistically while taking into account the prudential principle and the application of Risk Management. In addition, the Bank's planning must be comprehensive in order to better reflect the complexity of the business and can accommodate the direction of the Bank's business development. A comprehensive Business Plan can also increase the Bank's operational flexibility in facing increasingly high business competition.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Bank juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis. Rencana Bisnis yang realistis merupakan salah satu upaya dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, khususnya risiko stratejik.

In preparing a Business Plan, the Bank must also consider external factors and internal factors that can directly or indirectly affect the sustainability of the Bank's business so that it can produce a realistic plan. A realistic Business Plan is one of the efforts to implement Risk Management effectively, especially strategic risk.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa di tahun 2016 pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dengan diterbitkannya POJK tersebut Bank perlu memenuhi ketentuan tersebut yang diseleraskan dengan Rencana Bisnis Bank.

Based on the foregoing, in 2016 the Financial Services Authority has issued the Financial Services Authority Regulation Number 5POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning the Bank's Business Plan. With the issuance of the POJK, the Bank needs to fulfill these provisions which are completed by the Bank's Business Plan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut penyusunan Rencana Bisnis Bank harus disusun secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank Papua. Rencana Bisnis Bank yang disusun haruslah memuat hal-hal yang diatur di dalam POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut antara lain meliputi :

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 5 / POJK.03/2016, the preparation of the Bank Business Plan must be formulated in a realistic manner and has been approved by the Board of Commissioners, and communicated to shareholders and all levels of the organization at Bank Papua. The Bank Business Plan that is prepared must contain the matters stipulated in POJK Number 5 / POJK.03/2016, which include:

1. Ringkasan eksekutif;
2. Kebijakan dan strategi manajemen;
3. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
4. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6. Rencana pendanaan;
7. Rencana penanaman dana;
8. Rencana penyertaan modal;
9. Rencana permodalan;
10. Rencana pengembangan organisasi dan Sumber Daya Manusia;
11. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
12. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
13. Informasi lainnya.

Bank Papua sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi di daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan di Nusantara akan terus berupaya menjadi Bank yang kuat, unggul dan terpercaya, serta mengintegrasikan dengan program-program BPD Transformasi untuk menjadi bank yang terbaik dengan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, arah kebijakan Bank Papua pada tahun 2019 adalah dengan memfokuskan pada langkah-langkah strategis yang akan ditempuh, antara lain :

1. Bank Fokus dan Berkomitmen dalam menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* 4,90% dan NPL Net 2.45% pada tahun 2019
2. Rencana Hapus Buku Kredit Tahun 2019 sebesar Rp730.975 Juta
3. Penghimpunan Dana Pihak ketiga (DPK), yaitu dengan melakukan langkah-langkah :
   - Optimalisasi penghimpunan DPK masyarakat melalui mengefektifkan *marketing/Funding Officer* dalam memahami serta megaplikasikan langkah teknis pelaksanaan pemasaran produk dengan target disamping meningkatkan standar performa tenaga *marketing*
   - Rekruitmen tenaga pemasaran menjadi perpanjangan tangan dalam menjalankan program yang dibentuk oleh Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan *e-Banking* untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga dari masyarakat dapat maksimal
   - Pemberian *Special Rate* sebagai daya tarik nasabah dan optimalisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga serta membantu dalam melakukan ekspansi bisnis.

1. *Executive summary;*
2. *Management policies and strategies;*
3. *Implementation of current Bank Risk Management and performance;*
4. *Projected financial statements along with assumptions used;*
5. *Projected ratios and certain other items;*
6. *Funding plan;*
7. *Plans for planting funds;*
8. *Plans for equity participation;*
9. *Capital plan;*
10. *Organizational development plans and Human Resources;*
11. *Plan for the issuance of products and / or the implementation of new activities;*
12. *Plan for the development and / or change of office network; and*
13. *Other information.*

Bank Papua as a financial institution operating in the regions of Papua and West Papua Provinces and in the Archipelago will continue to strive to be a strong, superior and trustworthy Bank, and integrate with BPD Transformation programs to become the best bank with results that are in accordance with target set. For this reason, the Policy direction of Bank Papua in 2019 is to focus on the strategic steps that will be taken, including:

1. *Banks Focus and Commit to reduce Gross Non Performing Loans (NPL) 4.90% and Net NPL 2.45% in 2019*
2. *The 2019 Loan Book Delete Plan is Rp730,975 Million*
3. *Third Party Funds (TPF), namely by taking steps:*
   - *Optimizing the collection of community deposits through effective marketing / Funding Officers in understanding and applying technical measures to target product marketing in addition to improving marketing personnel performance standards*
   - *Recruitment of marketing personnel into an extension of the program run by the Fund Management, Services and e-Banking Division to collect deposits from the public can be maximized*
   - *Giving Special Rate as the attractiveness of customers and optimizing deposits collection and assisting in business expansion.*

- Mendukung program Pemerintah sesuai surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1866SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- Melakukan promosi Program *Canvasing, Open Counter* dan *Advertising*
- Memberikan kewenangan biaya promosi kepada masing-masing kantor cabang guna menyelenggarakan *gathering community* dengan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dalam rangka menjaga hubungan dengan pemilik dana dan dana yang telah disimpan di Bank Papua perlu dikelola dengan baik.
- Menjalin kerjasama dengan Mitra Kerja untuk menghimpun DPK Bank Papua.
- Menetapkan *Sales / Account Oficer* untuk masing-masing segementasi pelayanan.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
   - Komitmen Penurunan *Non Performing Loan*s (NPL) *Gross* tahun 2019 dengan *Risk Tolerance* <5.00% dari target NPL *Gross* 4,90%
   - Penyempurnaan implementasi kredit *Four Ayes Principle*, Penagihan dan Restrukturisasi Kredit serta Rencana Hapus Buku Kredit tahun 2019 sebesar Rp730.975 Juta.
   - Segmentasi pengelolaan Kredit (Kredit Konsumsi & UMKM, Kredit komersial kecil s.d 5 Milyar di kelola Kantor Cabang, diatas 5 Milyar di kelola oleh Divisi).
   - Wewenang Pemimpin Cabang dan Pemimpin KCP untuk memutus kredit, di prioritaskan Kredit Konsumtif yang ada *payroll* atau pembayaran gaji di Bank Papua (terutama pegawai Pemda), dan kredit UMKM (s/d Rp500 juta), KPR LKPP, sedangkan kredit komersial, kecil sesuai *track record* & ditetapkan dengan SK tersendiri secara Individual.
   - Melakukan upaya penjualan *asset*/agunan debitur NPL untuk menurunkan nilai kredit
   - Memenuhi kekurangan CKPN kredit bagi debitur NPL. Pembentukan LGD minimal 100% untuk kredit kualitas macet yang tidak ada prospek lagi.
   - Pemberian kredit kepada pengusaha di Papua – Papua Barat yang bonafide
   - Fokus pembiayaan di Tanah Papua
   - Pembatasan pemberian kredit (*house limit*) yaitu untuk individu Rp100 Miliar dan group Rp150 Miliar;
   - Pemberian kredit diatas *house limit* tersebut akan dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.

- *Support the Government program in accordance with Minister of Home Affairs Circular Number: 910 / 1866SJ dated April 17, 2017 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in the Provincial Government.*
- *Promoting the Canvasing, Open Counter and Advertising Programs*
- *Providing promotion fee authority to each branch office to hold a gathering community with national, multinational and regional government companies. This approach in order to maintain relations with the owners of funds and funds that have been deposited at Bank Papua needs to be managed properly.]*

- *Collaborating with Working Partners to collect Bank Papua Deposits.*
- *Establish Sales / Account Officers for each service segment.*

4. *Settlement of Non Performing Loans with the following steps:*
   - *Commitment to Decrease Gross Non Performing Loans (NPL) in 2019 with Risk Tolerance <5.00% of Gross NPL target 4.90%*
   - *Completion of the implementation of the Four Ayes Principle Loan, Billing and Loan Restructuring as well as the 2019 Loan Book Delete Plan of Rp30,975 Million.*
   - *Loan management segmentation (Consumption Loan & MSMEs, small commercial loans up to 5 billion managed by Branch Offices, above 5 billion managed by the Division).*
   - *Authority of the Branch Leader and Leader of the KCP to decide on loan, prioritize existing Consumptive Payroll Loans or payroll at Bank Papua (especially local government employees), and MSME loans (up to Rp500 million), LKPP mortgages, while commercial loans, small in accordance with the track record & individually determined by SK.*
   - *Make efforts to sell NPL debtors / assets to reduce loan value*
   - *Fulfill the lack of loan CKPN for NPL debtors. The formation of LGD is at least 100% for bad quality loans that have no prospects.*
   - *Providing loan to entrepreneurs in Papua - West Papua who are bona fide*
   - *Focus on financing in Papua*
   - *Limitation of loan (house limit), which is for individuals Rp100 Billion and group Rp150 billion;*
   - *Giving loan above the house limit will be consulted with the Board of Commissioners.*

5. Menetapkan Kredit *Recovery Plan* sebagai *action plan* sebagai program kerja Divisi Pengelolaan Aset Khusus dengan target 2019 jaminan yang akan siap dilakukan penjualan/ pelelangan cabang maupun divisi sebesar Rp144.669 juta
6. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang handal dengan penyempurnaan bidang Managemen Sumber Daya Manusia agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Bank Papua dalam menopang kegiatan bisnisnya.
7. Pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung kualitas atas pengembangan produk dan layanan perbankan sehingga fungsi Teknologi Informasi Bank Papua secara maksimal digunakan guna menopang/menumbuhkan bisnis perusahaan
8. Menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan para *Stakeholders*/*Customer* dengan memberikan pelayanan yang baik secara cepat dan tepat

Selain hal tersebut diatas maka untuk mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank di Tahun 2019 perlu adanya produktivitas karyawan dan profesionalisme dalam meningkatkan kinerja perusahaan maka diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai alat untuk memastikan kelangsungan perusahaan serta untuk menjaga kepentingan nasabah.

Bank Papua tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh aspek operasional perusahaan.

Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Corporate Plan Bank Papua ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor : 77/DIR-BPD/XI/2018 tentang *Corporate Plan* Bank Papua Tahun 2018-2022. *Corporate Plan* 2018-2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ini merupakan arahan strategis yang memuat rencana jangka panjang Bank selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: konsolidasi, pengembangan kompetensi, penataan ulang posisi dan fokus bisnis, penguatan permodalan untuk memperkuat daya saing Bank Papua sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, dan sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas.

5. *Establish a Recovery Plan Loan as an action plan as a work program for the Special Asset Management Division with a target of 2019 guarantees that will be ready for sale / auction of branches and divisions of Rp144,122 million.*
6. *Improving the quality and management of reliable Human Resources (Human Resources) by improving the Human Resources Management field to comply with the provisions and needs of Bank Papua in supporting its business activities.*
7. *Development of Information Technology that supports the quality of banking product and service development so that the functions of Bank Papua Information Technology are maximally used to sustain / grow the company's business*
8. *Maintain good partnership relationships with stakeholders / customers by providing good service quickly and precisely*

In addition to the above, in order to support the achievement of the Bank's Business Plan in 2019, it is necessary to have employee productivity and professionalism in improving company performance. It is necessary to implement Good Corporate Governance (GCG) as a tool to ensure the continuity of the company and safeguard the interests of customers.

Bank Papua still pays attention to the prudential principle by applying Risk Management to all aspects of the company's operations.

Long Term Plan (Corporate Plan)

Bank Papua's Corporate Plan is determined based on the Board of Director' Decree Number: 77 / DIR-BPD / XI / 2018 concerning Bank Papua Corporate Plans for 2018-2022. Corporate Plan 2018-2022 PT Bank Pembangunan Daerah Papua is a strategic direction that contains the Bank's long-term plan for the next 5 (five) years by considering several things such as: consolidation, competency development, rearrangement of positions and business focus, strengthening capital to strengthen power Bank Papua's competitiveness is in accordance with internal and external conditions, and in line with policies issued by the authorities.

Berdasarkan analisa lingkungan bisnis dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal melalui Analisa SWOT dan Matriks BCG, Bank Papua disarankan menerapkan strategi *grow and build* secara bertahap. Hal ini didasari oleh Analisa SWOT yang menunjukkan masuknya pesaing dari luar Bank Papua sangat agresif.

Based on the analysis of the business environment by integrating internal and external factors through SWOT Analysis and BCG Matrix, Bank Papuas are advised to implement the grow and build strategy in stages. This is based on SWOT Analysis which shows that the entry of competitors from outside Bank Papua is very aggressive.

Diperlukan penataan ulang perangkat dan proses bisnis, serta transformasi pada beberapa bidang yang kritikal dari business enabler untuk dapat menerapkan strategi *grow and build,* serta mencapai visi 2022 yaitu menjadi Bank Regional yang Kuat, Terpercaya, Berdaya Saing, dan Mendukung Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua.

Reorganization of business tools and processes is needed, as well as transformation in several critical areas of business enablers to be able to implement the grow and build strategy, and achieve the 2022 vision of becoming a Regional Bank that is Strong, Reliable, Competitive, and Supports Economic Development in Papua.

Pencapaian sasaran strategis dan implementasi strategi Bank Papua tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan kuat dari semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan sehingga transformasi harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup revitalisasi manajemen HC, perubahan budaya perusahaan, penguatan GCG, dan peningkatan kompetensi perangkat bisnis inti.

Achieving the strategic goals and strategy implementation of Bank Papua cannot be realized without strong support from all functions contained within the company so that transformation must be carried out thoroughly which includes revitalizing HC management, changing Corporate culture, strengthening GCG, and increasing the competence of core business devices.

Eksekusi *Corporate Plan* 2018 - 2022 Bank Papua terbagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu:

- Fase I - *Back on Track* (2018 - 2019)
- Fase II - *Competence Enhancement & Captive Market Marking* (2020 - 2021)
- Fase III - *Healthy Growth* (2022)

Execution of Corporate Plan 2018 - 2022 Bank Papua is divided into 3 (three) phases, namely:

- *Phase I - Back on Track (2018 - 2019)*
- *Phase II - Competence Enhancement & Captive Market Marking (2020 - 2021)*
- *Phase III - Healthy Growth (2022)*

Selama menjalankan 3 fase tersebut terdapat 3 (tiga) bidang utama (butir 1, 2 dan 3) yang merupakan prioritas dan 3 (tiga) bidang lainnya (butir 4, 5 dan 6) yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam mengeksekusi *Corporate Plan*, yaitu :

1. *Human Capital Management.*
2. *Corporate Culture.*
3. *Risk Management* dan *Asset Recovery*.
4. Perangkat Bisnis Utama.
5. Kanal Distribusi dan Produk.
6. Teknologi Pendukung.

During the 3 phases there are 3 (three) main fields (points 1, 2 and 3) which are priorities and 3 (three) other fields (points 4, 5 and 6) that need special attention in executing the Corporate Plan, namely:

1. *Human Capital Management.*
2. *Corporate Culture.*
3. *Risk Management and Asset Recovery.*
4. *Main Business Devices.*
5. *Distribution Channels and Products.*
6. *Supporting Technology.*

- 07 -

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Memberdayakan mereka yang mau berusaha, mereka yang berdisiplin, mereka yang pekerja keras, mereka yang optimis guna memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Empowering those who want to try, those who are disciplined, those who work hard, those who are optimistic in order to provide benefits to the society of Papua.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) merupakan kontribusi Perusahaan dalam membangun bangsa melalui kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan, ketenagakerjaan serta kepada konsumen yang dimiliki.

Corporate social responsibility (CSR) is the company's contribution in building the nation through concern for social life, the environment, employment and consumers.

Seiring dengan kemajuan perusahaan, Perusahaan menyadari bahwa kemajuan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar ini, Bank berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa keberlanjutan usaha Bank sangat tergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh Pemangku Kepentingan.

Along with the company's progress, the Company realizes that the Company's progress cannot be separated from external or internal factors. On this basis, the Bank is committed to fulfilling its social responsibilities based on the awareness that the sustainability of the Bank's business is highly dependent on the creation of a mutually beneficial relationship between all stakeholders.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Commitment to Corporate Social Responsibility

Kami menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan, merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci kerberhasilan Perusahaan. Hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan.

We realize that the Company's positive performance is not only measured by growth and business performance alone. Environmental preservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction, are part of the positive and key performance of the Company's success. This is part of corporate social responsibility / Corporate Social Responsibility (CSR) which is consistently carried out by the Company.

Program CSR Perusahaan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta perlindungan dan pelayanan prima kepada Nasabah

The Company's CSR program is carried out in various initiatives that focus on sustainable environmental management, social and economic development of the community, improving the quality of labor management, Occupational Health and Safety (K3), as well as protection and excellent service to Customers

Kebijakan CSR

Dalam rangka mendukung peran Bank Papua dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable *development*), selain mencetak laba (earning), Bank Papua berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan (planet) melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR)) yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Komitmen Bank Papua tersebut sejalan dan mengacu pada ketentuan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Bank Papua menyakini implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi Bank Papua, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

CSR Policy

In order to support the role of Bank Papua in sustainable development, in addition to making earnings, Bank Papua is committed to being actively involved in meeting the welfare of the people (people) and contributing to protecting the environment (planet) through the Corporate Social Responsibility program (Corporate Social Responsibility / CSR)) which is integrated with the principles of Good Corporate Governance. Bank Papua's commitment is in line with and refers to government regulations related to corporate social responsibility, including:

1. *Act Number 40 of 2007 concerning Limited Company (UU PT)*
2. *Law Number 25 Year 2007 concerning Investment (UU PM)*
3. *Government Regulation Number 32 of 1998 concerning the Development and Development of Small Businesses.*
4. *Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises*
5. *Law Number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor*
6. *Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning Business Responsibility Forum in the implementation of Social Welfare.*
7. *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.*
8. *Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.*
9. *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 Year 2017 Concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals.*

Bank Papua believes that the implementation of CSR in the long term will provide many benefits for Bank Papua, especially in aspects of growing trust, creating harmony and enhancing reputation, which in turn has implications for the creation of added value that encourages the smooth stability and growth of the Company's business.

Metode CSR

Strategi pelaksanaan CSR Bank Papua pada tahun 2019 dilaksanakan dalam bentuk 2 (dua) bidang program, yaitu:

1. Program kemitraan
2. Program Bina Lingkungan dengan pembagian kegiatan seperti pada gambar sebagai berikut:

CSR Method

The strategy of implementing Bank Papua CSR in 2019 is implemented in the form of 2 (two) program areas, namely:

1. *Partnership program*
2. *Community Development Program with the division of activities as shown below:*

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Bank Papua adalah Komitmen Bank Papua untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial dimana Bank Papua berada yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan yang berkelanjutan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Bank Papua's Corporate Social Responsibility (CSR) Program is the commitment of Bank Papua to build the quality of community life and the social environment in which Bank Papua is carried out in an integrated manner with sustainable activities through the Partnership Program and the Community Development Program.

Program Kemitraan Bank Papua adalah wujud kepedulian Bank Papua kepada masyarakat sekitarnya, terutama pengusaha Mikro dan pengusaha kecil serta kampung binaan dalam bentuk peningkatan dan penguatan kapasitas usaha, pengembangan sarana dan kelembagaan usaha serta kegiatan perluasan jaringan pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha agar menjadi tangguh dan Papua.

The Bank Papua Partnership Program is a form of Bank Papua's concern for the surrounding community, especially Micro and small-scale entrepreneurs and fostered villages in the form of enhancing and strengthening business capacity, developing business facilities and institutions as well as marketing network expansion activities with the aim of increasing business capacity to become resilient and Papua.

Prinsip Pelaksanaan CSR Perusahaan

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program CSR. Di samping itu, Bank telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) CSR yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program-program CSR agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan program CSR.

Program CSR Bank Papua

Dalam menjalankan seluruh kegiatan CSR perusahaan di sepanjang 2019, Bank Papua telah mengemas seluruh program CSR dengan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, dan mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Secara umum, pilar-pilar Program CSR Bank Papua di sepanjang 2019 tetap mengacu pada 4 (empat) aspek yaitu:

Principles of CSR Corporate Implementation

Referring to the aforementioned number of policies, the Company compiles CSR policies and programs both in concept and in written implementation objectives. The company has written policies from the leadership of the Company regarding the CSR program. In addition, the Bank has a CSR Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs in order to be effective and have an optimal impact on stakeholders. The SOP is also intended to uphold the principles of good governance in the implementation of CSR programs.

Bank Papua CSR Program

In carrying out all the company's CSR activities throughout 2019, Bank Papua has packaged all CSR programs with careful, responsible planning, and refers to the rules and regulations that apply in Indonesia. In general, the pillars of the Bank Papua CSR Program throughout 2019 continue to refer to 4 (four) aspects, namely:

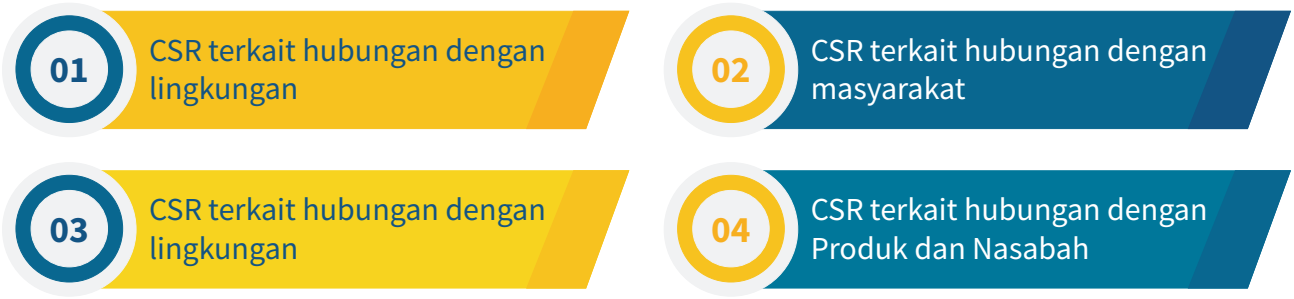

Organisasi Pelaksana

Berdasarkan SK Direksi No. 56/DIR-BPD/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, ditetapkan bahwa unit kerja pengelola Program CSR adalah Divisi Sekertaris Perusahaan, Departemen Humas & CSR.

Implementing Organization

Based on Board of Director Decree No. 56 / DIR-BPD / IX / 2019 concerning Organizational Structure and Work Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua , it was determined that the work unit managing the CSR Program was the Corporate Secretary Division, the Department of Public Relations & CSR.

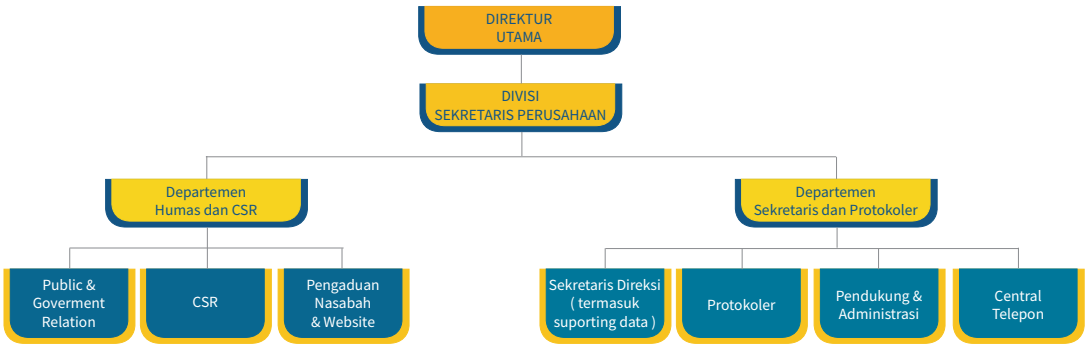

Dalam pelaksanaan Program CSR, kegiatan Program Bina Lingkungan di koordinir oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan kegiatan Program Kemitraan di koordinir oleh Divisi Bisnis UMK dan Konsumer, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Membuat Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
b. Membuat standar pelaksanaan Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan bantuan untuk Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
e. Menyiapkan dan mengkoordinir serta menyalurkan dana bantuan Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
f. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan atas Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan.
g. Menyampaikan laporan pelaksanaan program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan kepada Direksi Bank Papua.

In implementing the CSR Program, the Community Development Program activities are coordinated by the Corporate Secretary Division and the Partnership Program activities are coordinated by the SME and Consumer Business Divisions, with the following task details:

a. Creating an Environmental Development Program and Partnership Program.
b. Make a standard implementation of the Community Development Program and the Partnership Program.
c. Prepare Work Plan and Budget for Community Development Program and Partnership Program.
d. Conduct an evaluation and selection of the feasibility of assistance for the Community Development Program and the Partnership Program.
e. Prepare and coordinate and distribute aid funds Community Development Program and the Partnership Program.
f. Administer and bookkeeping the Community Development Program and the Partnership Program.
g. Submit reports on the implementation of the Community Development Program and the Partnership Program to the Board of Director of Bank Papua.

Sumber Dana CSR

Untuk membiayai pelaksanaan program CSR, Bank Papua menganggarkan sejumlah dana dari anggaran biaya operasional perusahaan yang diperuntukkan bagi keperluan program CSR perusahaan. Pengalokasian anggaran CSR dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja yang disusun setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, jumlah dana yang dianggarkan Bank Papua untuk menjalankan program CSR adalah sebesar Rp6.000.000.000 dan angka realisasi sebesar Rp3.436.346.777.

CSR Funding Sources

To finance the implementation of CSR programs, Bank Papua has budgeted a number of funds from the company's operational cost budget that is intended for the needs of the company's CSR program. The allocation of the CSR budget is budgeted every year in accordance with the work plan prepared annually.

In 2019, the amount of funds budgeted by Bank Papua to carry out CSR programs amounted to Rp6,000,000,000 and a realization rate of Rp3,436,346,777.

Alokasi dan Penggunaan Dana CSR

Titik berat pelaksanaan program CSR Bank Papua adalah pada :

a. Bantuan Korban Bencana Alam
   Yang dapat didanai adalah bencana alam yang menurut penilaian bank membutuhkan bantuan bank.
b. Bantuan Pendidikan & Olahraga
   Kriteria bantuan pendidikan diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah, Pimpinan perguruan tinggi dimana pelajar/ mahasiswa tersebut menuntut ilmu dan surat keterangan dari lurah/Kepala Desa bagi pelajar/ mahasiswa tidak mampu. Bantuan dimaksud dapat berupa bea siswa, maupun bantuan peralatan sekolah.
c. Bantuan Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu
   Peningkatan kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan dimaksud berupa bantuan pengobatan berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau kepala desa serta surat keterangan dari Dokter maupun Rumah Sakit.
d. Bantuan Peningkatan Prasarana dan/atau Sarana Umum
   Peningkatan sarana dan Prasarana umum diperuntukkan untuk masyarakat luas. Bantuan berupa sarana penunjang bagi masyarakat umum.
e. Bantuan Sarana Ibadah
   Bantuan sarana ibadah, baik berupa pembangunan sarana dan prasarana ibadah diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan.
f. Bantuan Pelestarian Alam
   Bantuan pelestarian lingkungan dilakukan dalam bentuk penghijauan dan konservasi lingkungan.
g. Bantuan Kesejahteraan Sosial
   Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
   - Kemiskinan.
   - Ketelantaran.
   - Kecacatan.
   - Keterpencilan.
   - Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku.
   - Korban Bencana.
   - Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

Allocation and Use of CSR Funds

The emphasis of implementing the Bank Papua CSR program is on:

a. Donation to Natural Disaster Victims
   What can be funded is natural disasters which, according to the bank's assessment, require bank assistance.
b. Education & Sports Donation
   Criteria for educational assistance is intended for high-achieving and disadvantaged students, as evidenced by a certificate from the Principal, Head of the university where the student / student is seeking knowledge and a certificate from the village head / village head for students / underprivileged students. The assistance can be in the form of scholarships, or assistance with school equipment.
c. Health Improvement Donation for Poor People
   Health improvement is intended for people who can not afford. This assistance is in the form of medical assistance based on a statement of disability from the Lurah or village head and a certificate from the Doctor or Hospital.
d. Donation for Increasing Infrastructure and or Public Facilities
   Improvement of public facilities and infrastructure is intended for the wider community. Donation in the form of supporting facilities for the general public.
e. Donation for Worship Facilities
   Donation for religious facilities, both in the form of construction of worship facilities and infrastructure, is provided in accordance with the company's capability level.
f. Donation for Nature Conservation
   Donation for environmental preservation is carried out in the form of greening and environmental conservation.
g. Social Welfare Donation
   Providing Social Welfare Donation to individuals, families, groups and / or communities who have a life that is not humanly feasible and has criteria for social problems:
   - *Poverty.*
   - *Abandonment.*
   - *Disability.*
   - *remoteness.*
   - *Social Disability and Deviance Behavior.*
   - *Disaster victims.*
   - *Victims of Violence, Exploitation and Discrimination.*

h. Program Kemitraan Bank Papua
Pemberian bantuan berupa peralatan, pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tata cara penyaluran dana program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan Bank Papua diatur sebagai berikut :

a. Bank Papua dalam hal ini Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Bisnis UMK & konsumer, bersama-sama dengan Kantor Cabang Bank Papua terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sasaran dengan melihat kondisi dan kebutuhan di seluruh wilayah Bank Papua.
b. Dalam hal permohonan bantuan melalui Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melakukan kajian terhadap permohonan tersebut serta berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, untuk selanjutnya diusulkan kepada Direksi Bank Papua.
c. Khusus untuk bantuan bencana alam, Divisi Sekretaris Perusahaan dapat langsung mengusulkan dana bantuan kepada Direksi Bank Papua setelah melakukan survey di lokasi bencana alam dan tetap berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang Bank Papua di lokasi bencana.
d. Pencairan dana CSR Bina Lingkungan dilakukan pemindahbukuan dari rekening biaya CSR ke rekening penerima di Bank Papua dan/atau berupa barang.
e. Pelaksanaan penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Papua.

Pemanfaatan alokasi dana CSR Bank Papua sesuai prioritas mengacu pada SOP sebagai berikut:

h. Bank Papua Partnership Program
Providing assistance in the form of equipment, training and assistance for micro, small and medium businesses in order to improve community welfare.

The procedures for channeling funds for the Community Development Program and the Bank Papua Partnership Program are regulated as follows:

a. Bank Papua, in this case the Corporate Secretary Division and the SME & Consumer Business Division, together with the Bank Papua Branch Office first conduct a survey and identify targets by looking at conditions and needs in all areas of Bank Papua.

b. In the case of a request for assistance through a Branch Office, the Branch Office is required to conduct a review of the request and coordinate with the Corporate Secretary Division, to be further proposed to the Board of Director of Bank Papua.

c. Specifically for natural disaster relief, the Corporate Secretary Division can directly propose assistance funds to the Board of Director of Bank Papua after conducting surveys at the location of natural disasters and continue to coordinate with Bank Papua branch offices at the disaster locations.
d. Disbursement of Environmental Development CSR funds is carried out from the CSR cost account to the beneficiary account at Bank Papua and / or in the form of goods.
e. The distribution of the Community Development Program Fund is carried out by the Corporate Secretary Division of Bank Papua.

Utilization of Bank Papua CSR fund allocations according to priority refers to the following SOP:

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Growth		DESCRIPTION
					+/-	%	
Program Bina Lingkungan	**3.666.295.652**	**1.300.117.884**	**1.604.063.322**	**2.288.701.798**	**684.638.476**	**42,68%**	*Environmental Bina Program*
1. Keagamaan	1.490.890.217	251.141.224	382.666.000	259.250.000	-123.416.000	-32,25%	*1. Religious*
2. Pendidikan	436.483.028	57.680.000	677.403.822	145.459.490	-531.944.332	-78,53%	*2. Education*
3. Olahraga	15.625.000	40.000.000	20.000.000	18.381.000	-1.619.000	-8,10%	*3. Sports*
4. Kesehatan	916.659.074	296.289.000	113.408.000	59.500.000	-53.908.000	-47,53%	*4. Health*
5. Lingkungan	499.673.500	635.089.000	338.540.000	1.670.044.402	1.331.504.402	393,31%	*5. Environment*
6. Sosial	306.964.833	19.918.660	72.045.500	136.066.906	64.021.406	88,86%	*6. Social*
Program Kemitraan	**1.327.162.275**	**-**	**1.350.498.033**	**1.147.644.979**	**-202.853.054**	**-15,02%**	*Partnership Programs*
Total Realisasi CSR	**4.993.457.927**	**1.300.117.884**	**2.954.561.355**	**3.436.346.777**	**481.785.422**	**16,31%**	*Total Realized CSR*

BANK PAPUA

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility for the Environment

Kebijakan

Bank Papua berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya. Komitmen Bank Papua untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus pelestarian lingkungan telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Direksi Bank Papua.

Kebijakan Bank Papua terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Policy

Bank Papua is committed to carrying out the Company's social responsibility towards the environment in order to reduce the environmental impact of the Company's activities and human activities in general. Bank Papua's commitment to maintain and preserve and preserve the environment has been stated in the form of a Decree of the Board of Director of Bank Papua.

Bank Papua's policies relating to environmental management and protection are manifested in the form of appeals, announcements and Company Regulations in order to minimize the impact of the Company's operations on the environment.

Kegiatan dan Dampak

- Lingkungan Hidup

  Implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup serta untuk mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar perusahaan diwujudkan dalam program yang mengacu kepada perundangan dan peraturan terkait serta dari best practice yang ada.

  Kepedulian Bank Papua terhadap lingkungan pada tahun 2019, telah dibuktikan dengan menyalurkan dana sebesar Rp 1.670.044.402 melalui kegiatan sebagai berikut :

Activity and Impact

- *Living Environment*

  Implementation of corporate responsibility for the environment and to eliminate environmental and social conflicts around the company is manifested in programs that refer to relevant laws and regulations as well as from existing best practices.

  Bank Papua's concern for the environment in 2019 has been proven by channeling funds amounting to Rp1,670,044,402 through the following activities:

NO.	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	Nominal	*NAME OF ACTIVITY*
1	15 Januari 2019	Bantuan 3 unit mesin Pompa Air untuk perumahan yang terkena banjir bandang di Perum Gajah Mada Sentani-Kabupaten Jayapura	Rp 33.918.000	*3 units of Water Pump machines for housing affected by flash floods in Perum Gajah Mada Sentani, Jayapura Regency*
2	13 Maret 2019	Bantuan kepada korban banjir di Kotaraja, Abepura dan sekitarnya Kota Jayapura	Rp 405.000.000	*Donation to flood victims in Kotaraja, Abepura and surrounding Jayapura City*
3	27 Maret 2019	Bantuan kepada korban banjir bandang Sentani, Doyo sekitarnya Kab.Jayapura	Rp 427.500.000	*Donation to victims of flash floods Sentani, Doyo surrounding Kab. Jayapura*
4	8 Mei 2019	CSR Gerakan Peduli Sampah di Kampung Waena Kota Jayapura	Rp 10.000.000	*CSR Waste Care Movement in Waena Village, Jayapura City*
5	16 Mei 2019	Bantuan korban banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura	Rp 10.000.000	*Donation for victims of flash floods in Sentani, Jayapura Regency*
6	28 Mei 2019	Bantuan kegiatan Himpunan Ahli Tehnik Tanah Indonesia	Rp 6.000.000	*Donation for the Indonesian Land Engineering Association*
7	31 Juli 2019	Pengadaan mobil Truk Sampah Kabupaten Supiori (UM 30% dari 491,887,000)	Rp 147.566.100	*Supiori Regency Garbage Truck Procurement (30% UM from 491,887,000)*
8	12 Agustus 2019	Bantuan korban banjir bandang di Sentani, Doyo, dan sekitarnya Kabupaten Jayapura	Rp 49.923.200	*Donation for victims of flash floods in Sentani, Doyo, and surrounding Jayapura Regency*
9	9 September 2019	Bantuan korban bencana angin puting beliung an. Yanti Bonay di Dok IX Kota Jayapura	Rp 5.300.000	*Help for tornado victims. Yanti Bonay at Doc IX Jayapura City*
10	20 Desember 2019	Bantuan ke Pemda Supiori, 1 unit mobil Truck Sampah kebersihan Kota	Rp 344.320.900	*Donation to Supiori local government, 1 unit of City cleanliness Garbage Truck*
11	27 Desember 2019	Bantuan pembuatan taman sebagai paru-paru kota di kota Timika	Rp 230.516.202	*Donation in making parks as city lungs in Timika city*
JUMLAH			**Rp 1.670.044.402**	*TOTAL*

- Program *Green Office*

  Program *green office* merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pihak manajemen kantor beserta seluruh pekerja berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti hemat kertas penghematan listrik serta hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Bank Papua. Kegiatan dan aktivitas dalam mendukung terciptanya *Green Office* dilakukan melalui penggunaan material dan pemakaian energi.

- *Green Office Program*

  The green office program is a tangible form of contribution to environmental management around the central office in supporting environmentally friendly office management. In its implementation, the office management and all employees try to implement various savings programs such as saving paper electricity savings and saving water through socialization and advice. The program can provide tangible benefits such as reducing operational costs, increasing efficiency, and also improving the image of Bank Papua. Activities and activities in support of the creation of a Green Office are carried out through the use of materials and energy usage.

- Penggunaan Material

  Bank Papua membagi kategori penggunaan material untuk keperluan bisnis atas lingkup keperluan kantor dan material yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional lain. Pembahasan terkait pengungkapan material yang digunakan di kantor berupa penggunaan kertas dan bahan bakar. Isu penghematan pemakaian kertas telah menjadi hal mendesak yang dilakukan oleh Bank Papua dalam beberapa tahun terakhir mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari penebangan pohon secara masif serta limbah dari proses produksi konsumsi kertas, seperti mendukung sistem dokumentasi tanpa kertas (*paperless*), memanfaatkan email sebagai media untuk menyebarluaskan pengumuman atau sosialisasi di internal perusahaan, menggunakan kertas bekas atau daur ulang ataupun print bolak-balik untuk mencetak dokumen yang dirasa tidak terlalu penting.

- *Material Use*

  Bank Papua divides the categories of material use for business purposes over the scope of office needs and materials needed in other operational activities. Discussion related to the disclosure of material used in the office in the form of the use of paper and fuel. The issue of saving paper usage has become an urgent matter carried out by Bank Papua in recent years given the negative impacts caused as a result of massive tree felling and waste from the paper consumption production process, such as supporting paperless documentation systems, utilizing email as media to disseminate announcements or socialization internally within the company, using used or recycled paper or print back and forth to print documents that are considered not too important.

Dampak

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang. Sedangkan program efisiensi di lingkugan kantor, adalah menekan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank Papua. Selain itu, dengan dibiasakannya bertindak secara efisien, dapat berdampak pula terhadap tingkah laku yang akan dibawa dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas, sehingga secara tidak langsung dapat membantu program pemerintah dalam hal hemat enegi dan lainnya.

Impact

Corporate social responsibility to the environment is important for every company to be able to manage, process and use the environment as well as possible to not only benefit and improve the business efficiency of each company, but also for the environment and social impacts in the future. While the efficiency program in the office environment is to reduce operational costs incurred by Bank Papua. In addition, accustomed to acting efficiently, can also have an impact on the behavior that will be brought in the family and the wider community, so that it can indirectly help government programs in terms of energy saving and others.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Per 31 Desember 2019, Bank Papua belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan, namun demikian, Bank Papua berkomitmen untuk senantiasa melakukan berbagai kegiatan terkait program pelestarian lingkungan.

Certification in the Environmental Field

As of December 31, 2019, Bank Papua did not have certification in the environmental field, however, Bank Papua was committed to continuing to carry out various activities related to environmental preservation programs.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial dan Masyarakat

Corporate Social Responsibility Against Social and Society

Bank Papua senantiasa menjaga komitmennya untuk tidak semata hanya mementingkan keuntungan perusahaan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Rangkaian program CSR Bank Papua bagi masyarakat sekitar telah diimplementasikan dalam bentuk *community development*.

Bank Papua always maintains its commitment not only to prioritize the company's earning, but also to realize the welfare of the community and the surrounding environment. The series of Bank Papua CSR programs for the surrounding community has been implemented in the form of community development.

Kebijakan

Kebijakan Bank Papua yang terkait dengan tanggung jawab terhadap masyarakat telah diatur dan ditetapkan dalam Standar dan Prosedur yang berisi tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan program Bina Lingkungan.

Policy

Bank Papua's policies relating to community responsibilities have been regulated and stipulated in Standards and Procedures that contain the implementation of the Partnership Program and the Community Development program.

Kegiatan dan Dampak

Sebagai bagian dari masyarakat, Bank Papua senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Papua berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat Papua dan sejahtera.

Pada tahun 2019, Bank Papua telah mengadakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi:

- Program Sosial dan Masyarakat
  Program ini adalah program rutin CSR yang diadakan Bank Papua untuk masyarakat tanah Papua. Program ini dikelompokan menjadi 5 bidang utama, yaitu bidang agama, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang Olah raga. Besarnya dana CSR yang berhasil disalurkan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Activity and Impact

As part of the community, Bank Papua always harmonizes its presence and business activities in the community. Therefore, the Bank Papua is committed to continuing to carry out community development and empowerment programs in order to achieve a prosperous and prosperous Papuan community.

In 2019, Bank Papua held a number of programs and activities in the social sector, including:

- *Social and Community Programs*
  This program is a routine CSR program organized by Bank Papua for the people of Papua. The program is grouped into 5 main areas, namely religion, social affairs, health, education and sports. The amount of CSR funds that were successfully channeled during 2019 is as follows:

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Nominal	*Name of activity*
Sosial				
1	13 Maret 2019	Bantuan kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua	Rp 10.000.000	*Donation for the activities of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Papua Province*
2	8 Juli 2019	Bantuan sumur bor untuk korban banjir di Sentani melalui melalui alumni APDN Jayapura	Rp 23.185.106	*Drilling well donation for flood victims in Sentani through the Jayapura APDN alumni*
3	9 Juli 2019	Bantuan kegiatan PAM GKI PNIEL Kotaraja Abepura Kota Jayapura	Rp 10.000.000	*Donation for PAM GKI PNIEL Kotaraja Abepura Jayapura City*
4	19 November 2019	Bantuan sembako bagi pengungsi dampak kerusuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya di Jayapura	Rp 7.500.000	*Basic food donation for refugees from the riots in Wamena, Jayawijaya Regency in Jayapura*
5	02 Desember 2019	Bantuan ke pengungsi akibat kerusuhan di kota Wamena Kabupaten Jayawijaya	Rp 50.000.000	*Donation to refugees due to riots in the city of Wamena, Jayawijaya Regency*
6	02 Desember 2019	Bantuan ke pengungsi pasca kerusuhan di Kota Jayapura (akibat rumah-rumah dibakar)	Rp 35.381.800	*Donation to refugees after the riots in Jayapura City (as houses were burned)*
		JUMLAH	**Rp 136.066.906**	*TOTAL*
Pendidikan				
1	12 Februari 2019	Bantuan kegiatan Dies Natalis GMKI Jayapura ke-69	Rp 3.375.000	*Donation for the 69th GMKI Jayapura Anniversary*
2	13 Maret 2019	Bantuan prasarana pembangunan Gedung *Kids Centre* Putali Sentani Kabupaten Jayapura	Rp 15.000.000	*Infrastructure development donation for Putali Sentani Kids Center Building, Jayapura Regency*
3	27 Maret 2019	Bantuan seragam drumband PAUD Al-Fitrah Jaya Asri Entrop Kota Jayapura	Rp 6.000.000	*Relief uniforms from PAUD Al-Fitrah Jaya Asri Entrop Jayapura City*
4	27 Maret 2019	Bantuan kegiatan KKN Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM lokasi Arso - Kabupaten Keerom	Rp 10.000.000	*Donation for KKN activities at the Faculty of Economics & Business UGM, Arso location - Keerom Regency*
5	31 Mei 2019	Bantuan sarana komputer SMP Advent Sogokmo Wamena Kabupaten Jayawijaya	Rp 29.550.000	*Computer donation for Advent Sogokmo Wamena Junior High School Jayawijaya Regency*
6	18 Juni 2019	Bantuan studi akhir SDr. Herman Wawuru	Rp 6.500.000	*Final study donation Herman Wawuru*
7	27 September 2019	Bantuan study akhir S1 an. Fransina Dandiwaru	Rp 5.500.000	*Final study donation S1. Fransina Dandiwaru*
8	23 Desember 2019	Bantuan pembuatan tugu oleh mahasiswa STIH di Kabupaten Fak-fak	Rp 20.100.000	*Donation in the making of monuments by STIH students in Fak-Fak Regency*
9	27 Desember 2019	Bantuan pelatihan komputer bagi pendeta-pendeta Badan Klasis Port Numbay di Kota Jayapura	Rp 29.434.490	*Computer training donation for pastors of the Port Numbay Klasis Agency in Jayapura City*
10	31 Desember 2019	Bantuan 4 (empat) unit Komputer untuk SD Negeri Inpres Harapan Sentani	Rp 20.000.000	*Donation of 4 (four) Computer units for Harapan Sentani State Elementary School*
		JUMLAH	**Rp 145.459.490**	*TOTAL*
Olahraga				
1	8 Februari 2019	Bantuan kegiatan PERBASI Provinsi Papua	Rp 5.881.000	*Donation for PERBASI Papua Province activities*
2	18 Februari 2019	Bantuan turnamen sepakbola U-18 Agapura Cup II 2019	Rp 5.000.000	*Help with the 2019 Agapura Cup II U-18 soccer tournament*
3	19 Agustus 2019	Bantuan ke Sekolah Liga Sepakbola Pelajar Indonesia	Rp 7.500.000	*Donation to Indonesian Student Soccer League Schools*
		JUMLAH	**Rp 18.381.000**	*TOTAL*

Agama				
1	19 Februari 2019	Bantuan prasarana pembangunan mesjid Al-Mahdi Angkasa Kota Jayapura	Rp 14.600.000	*Donation with infrastructure for the construction of the Al-Mahdi Angkasa mosque in Jayapura City*
2	15 Maret 2019	Bantuan prasarana pembangunan renovasi Gereja GPDI Jemaat Parakletos Waena Kota Jayapura	Rp 20.000.000	*Infrastructure development donation for renovating GPDI Church, Jayapura Parakletos Congregation, Jayapura City*
3	29 Mei 2019	Bantuan prasarana pembangunan Gedung Gereja Jemaat Getsemani Bhayangkara III Kota Jayapura	Rp 15.000.000	*Donation with infrastructure for the construction of the Gethsemane Church Building, Bhayangkara III Jayapura City*
4	1 April 2019	Bantuan CSR kegiatan pemuda & pemudi Jemaat GPDI Baethania	Rp 15.000.000	*CSR donation for young person in the GPDI Baethania Church*
5	8 Juli 2019	Bantuan pembangunan Gereja jemaat Irene Naramben - Arso	Rp 10.100.000	*Donation for the construction of the Church of the congregation Irene Naramben - Arso*
6	7 Agustus 2019	Bantuan pembangunan gereja baru Paroki Kristus Jaya	Rp 20.000.000	*Donation with the construction of the new church of Paroki Kristus Jaya*
7	8 Agustus 2019	Bantuan penggalangan dana (makan sumbang) pembangunan asrama Pastori di Sentani	Rp 5.000.000	*Fundraising donation (food donations) for the construction of the Pastor's dormitory in Sentani*
8	13 September 2019	Bantuan kegiatan Sidang Raya XVII PGI 2019 di Sumba Timur - NTT	Rp 15.000.000	*Donation for PGI 2019 XVII Grand Session in East Sumba - NTT*
9	26 September 2019	Bantuan pembangunan Gereja GKII Agape	Rp 21.000.000	*Donation for construction of the Agape GKII Church*
10	07 Oktober 2019	Bantuan CSR penginjilan tubuh kristus	Rp 5.000.000	*CSR donation for Tubuh Kristus evangelize*
11	28 Oktober 2019	Bantuan pembangunan mesjid Jamiatul Muslimin di Teminabuan	Rp 10.500.000	*Donation for construction of the Jamiatul Muslimin mosque in Teminabuan*
12	30 Oktober 2019	Bantuan pembangunan gedung sekolah Minggu GKI Eden di Jayapura	Rp 8.050.000	*Donation for construction of GKI Eden School Sunday in Jayapura*
13	31 Oktober 2019	Bantuan Kepada Panitia Pembangunan kamp. Kerja Unsur-Unsur Jemaat Kabupaten Keerom	Rp 10.000.000	*Donation to the Camp Construction Committee. Working Elements of the Keerom Regency Congregation*
14	21 November 2019	Bantuan CSR ke KSKM Kota Jayapura peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Rp 5.000.000	*CSR donation to Jayapura City KSKM commemorating the birthday of Prophet Muhammad SAW*
15	12 Desember 2019	Bantuan renovasi Gereja Emaus di LP Abepura Kota Jayapura	Rp 25.000.000	*Donation for renovation of Emmaus Church in Abepura prison, Jayapura City*
16	13 Desember 2019	Bantuan sembako pada Natal bagi gabungan mahasiswa/i Papua	Rp 15.000.000	*Basic food donation at Christmas for joint Papuan students*
17	26 Desember 2019	Bantuan pembangunan rumah pastori Getsemani Wehali di Teminabuan	Rp 50.000.000	*Donation for the construction of the Gethsemane Wehali mansion in Teminabuan*
		JUMLAH	**Rp264.250.000**	*TOTAL*
Kesehatan				
1	30 Januari 2019	Bantuan kegiatan donor darah di Grand Abepura-Kota Jayapura	Rp 1.500.000	*Donation of blood activity in Grand Abepura-Jayapura City*
2	2 Agustus 2019	Bantuan ke Panitia Konferensi Internasional AIDS	Rp 16.000.000	*Donation to the AIDS International Conference Committee*
3	28 Agustus 2019	Bantuan II ke Panitia Konferensi Internasional AIDS	Rp 25.000.000	*2nd donationto the International AIDS Conference Committee*
4	26 November 2019	Bantuan prasarana kursi tunggu pada Puskesmas Imbi Kota Jayapura	Rp 12.000.000	*Donation for waiting chair at the Imbi Health Center Jayapura City*
		JUMLAH	**Rp 54.500.000**	*TOTAL*

- Program Kemitraan

Tujuan dari diadakannya program kemitraan adalah :

1. Penguatan sumber daya manusia khusus orang asli Papua dalam rangka membentuk pola pikir dan kePapuaan menciptakan usaha-usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada dalam usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup penduduk.
2. Menciptakan *pioneer* sebagai kader yang dapat menjadi motivator, trainer, wirausahawan yang menjadi sumber inspirasi di sekitarnya dan menjadi perpanjangan tangan Bank Papua untuk bersama membangun perekonomian di Kabupaten/Kota yang ada di Tanah Papua.
3. Dapat menambah wawasan serta mengubah *mindset*, dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih maju dan kompetitif

- *Partnership Program*

The objectives of holding a partnership program are:

1. *Strengthening the special human resources of indigenous Papuans in order to form mindsets and Papuans, creating new businesses and developing existing businesses in an effort to realize economic growth in the region, create jobs, and improve the standard of living of the population.*
2. *Creating a pioneer as a cadre who can be a motivator, trainer, entrepreneur who is a source of inspiration around him and an extension of the Bank Papua to jointly develop the economy in the City / Regency in the Land of Papua.*
3. *Can add insight and change the mindset, and ready to make changes in a more advanced and competitive direction*

Selama tahun 2019, Bank Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait CSR Bidang Kemitraan antara lain :

During 2019, Bank Papua has carried out various CSR in the Field of Partnership related activities including:

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Nominal	*Name of activity*
1	5 Juli 2019	Bantuan peralatan kopi petani distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang	Rp 22.578.000	*Donation of Coffee equipment for farmers in the Kiwirok district, Pegunungan Bintang Regency*
2	29 Maret 2019	Bantuan sarung bantal kapal berlogo Bank Papua di Sorong (KM Belibis)	Rp 50.000.000	*Aid for pillowcases with the logo of Bank Papua in Sorong (KM Belibis)*
3	20 Mei 2019	Bantuan pembelian mesin parut kelapa kepada pedagang binaan Bank Papua	Rp 87.695.850	*Donation of the purchase of a coconut grate machine to Bank Papua fostered traders*
4	5 Juli 2019	Bantuan mesin parut kelapa dan mesin peras kelapa di Kabupaten Biak Numfor	Rp 82.727.850	*Donation of coconut shredder and coconut press machine in Biak Numfor Regency*
5	07 Agustus 2019	Pembangunan 4 unit pondok kelapa bagi mitra binaan	Rp 400.717.200	*Construction of 4 units of coconut huts for fostered partners*
6	22 Oktober 2019	Pembuatan meja bangku dan pemasangan listrik di Bukit Jokowi	Rp 29.015.300	*Making bench tables and installing electricity in Bukit Jokowi*
7	28 Oktober 2019	Pembuatan Papan Nama Binaan Bank Papua di Bukit Jokowi	Rp 3.020.000	*Making Bank Papua Guided Nameplate in Bukit Jokowi*
8	18 Desember 2019	Bantuan kegiatan penyerahan pondok kelapa di Bukit Jokowi	Rp 18.700.398	*Donation of the coconut huts on Bukit Jokowi*
9	27 Desember 2019	Bantuan pembuatan 4 (empat) unit Pondok Kelapa di Bukit Jokowi di Kota Jayapura	Rp 422.112.433	*Donation in making 4 (four) units of Pondok Kelapa at Bukit Jokowi in Jayapura City*
10	18 Juli 2019	Pengadaan mesin cetak kemasan kopi bagi petani kopi Robusta di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen	Rp 66.560.000	*Procurement of coffee packaging machines for Robusta coffee farmers in Kampung Ambaidiru, Kosiwo District, Kepulauan Yapen Regency*
11	13 Desember 2019	Bantuan ke petani di Festival Kopi di Bank Indonesia Kota Jayapura	Rp 32.245.798	*Donation to farmers at the Coffee Festival in Bank Indonesia, Jayapura City*
12	5 Juli 2019	Dukungan pasar murah di Bank Indonesia Jayapura bagi mitra binaan UMKM Bank Papua	Rp 15.000.000	*Low-cost market support at Bank Indonesia Jayapura for Bank Papua SME development partners*
13	18 Desember 2019	Biaya mesin parut kelapa	(Rp82.727.850)	*CORRECTION date 5/7/2019 Cost of a coconut grated machine*
		JUMLAH	**Rp 1.147.644.979**	*TOTAL*

Dampak

Dampak positif bagi perusahaan adalah meningkatkan citra Bank Papua di masyarakat yang peduli akan lingkungan sekitar. Sedangkan bagi masyarakat, program ini adalah :

1) Peningkatan dan penguatan kapasitas usaha
2) Pengembangan sarana dan kelembagaan usaha
3) Perluasan jaringan pemasaran
4) Pembiayaan kampung-kampung binaan Bank Papua

Impact

The positive impact for the company is to improve the image of Bank Papua in the community who care about the environment. As for the community, this program is:

1) Increasing and strengthening business capacity
2) Development of business facilities and institutions
3) Expansion of network marketing
4) Funding villages built by Bank Papua

Sertifikasi

Per 31 Desember 2019, Bank Papua belum memiliki sertifikasi di bidang sosial kemasyarakat, namun demikian, Bank Papua berkomitmen untuk senantiasa melakukan berbagai kegiatan terkait program sosial kemasyarakatan.

Certification

As of December 31, 2019, Bank Papua did not yet have certification in the social sector, however, Bank Papua was committed to continuously carrying out various activities related to social community programs.

Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Responsibility for Health, Safety, and Work (HSW)

Bank Papua senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, Bank Papua berkomitmen tinggi untuk memberikan perhatian dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan tanpa adanya diskriminasi

Bank Papua always complies with the rules and regulations in force in the field of employment, safety and occupational health (K3) for the creation of optimal work productivity. Therefore, Bank Papua is highly committed to paying attention and ensuring the safety and health of all employees without discrimination

Kebijakan

Bank Papua memandang bahwa seluruh karyawan merupakan aset berharga yang dapat menunjang keberlangsungan bisnis perusahaan. Menyadari hal tersebut, Bank Papua menilai bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan agar profesionalisme kerja dapat terjamin. Oleh karena itu, dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Bank Papua mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Policy

Bank Papua considers that all employees are valuable assets that can support the company's business sustainability. Realizing this, Bank Papua considers that the Occupational Safety and Health (K3) of employees is the main thing that needs to be considered so that work professionalism can be guaranteed. Therefore, in managing Human Resources (HR), Bank Papua refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning employment.

Kegiatan dan Dampak

Pada tahun 2019, Bank Papua telah melaksanakan sejumlah program di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

- Kesejahteraan Karyawan

  Bank Papua senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan karyawan diberikan baik secara material maupun non-material, dimana program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi karyawan dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang transportasi, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian.

Activity and Impact

In 2019, the Bank Papua has implemented a number of programs in the field of Occupational Safety and Health (K3) as follows:

- *Employee Welfare*

  Bank Papua always pays attention to the welfare of all of its employees so that they can work together in synergy to create optimal work productivity. Employee welfare improvement programs are provided both materially and non-materially, where a material program is a welfare program that is directly related to employee performance and compensation can be provided in the form of transportation, food, pension, holiday allowances, position allowances, bonuses , education money, medical allowance, official clothing, vacation leave and death money.

- **Kesetaraan Gender Dan Kesempatan Kerja**

  Dalam melakukan perekrutan karyawan, Bank Papua senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Bank Papua tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

- **Kesetaraan Dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**

  Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas karyawan, Bank Papua secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Bank Papua menjamin bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Program Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan di sepanjang 2019 dapat dilihat pada Bab Tinjauan Pendukung Bisnis, sub-bab Sumber Daya Manusia.

- **Pengembangan Karir**

  Terkait pengembangan Karir, Bank Papua senantiasa menjamin kesempatan berKarir yang sama kepada karyawan pria maupun wanita dengan membangun sistem jenjang Karir yang didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi karyawan yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Bank Papua menilai praktik pengembangan Karir merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap pegawai, meningkatkan sikap kerja, menciptakan kepuasan kerja demi mencapai tujuan perusahaan.

- **Hubungan Industrial**

  Sebagai perusahaan yang taat peraturan, Bank Papua mendukung penuh kebebasan setiap karyawan untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat melalui Serikat Pekerja. Saat ini terdapat satu Serikat Pekerja yang menjadi wadah komunikasi dan aspirasi para pegawai. Manajemen berusaha membina hubungan industrial sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Melalui pembentukan Serikat Pekerja tersebut, diharapkan dapat kesepakatan untuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangbertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban

- *Gender Equality and Job Opportunities*

  In recruiting employees, Bank Papua always gives equal rights and opportunities to all people regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, color, gender, or other physical conditions. Likewise in the case of appointing prospective workers, Bank Papua does not discriminate for any reason because it bases its decisions on the results of the selection, the results of the evaluation on probation and workers' orientation.

- *Equality in Education and Training Programs*

  In order to increase the ability and capacity of employees, Bank Papua continuously organizes several methods of education and training programs to support the company's operational activities. Bank Papua guarantees that every employee has an equal opportunity to participate in every education and training program that is opened in accordance with the needs and development plans of the company. Further explanation about the Training and Education Program that has been implemented throughout 2019 can be seen in the Business Support Review Chapter, sub-chapter Human Resources.

- *Career Development*

  Regarding Career development, Bank Papua always guarantees equal career opportunities for male and female employees by building a Career path system based on job qualifications and employee competencies integrated with the performance appraisal system. Bank Papua assesses that the practice of career development is an important thing that can spur the productivity of every employee, improve work attitude, create job satisfaction in order to achieve company goals.

- *Industrial Relations*

  As a law-abiding company, Bank Papua fully supports the freedom of every employee to gather, associate, and hold opinions through trade unions. At present there is one trade union that is a vehicle for communication and aspirations of employees. Management seeks to foster industrial relations in accordance with applicable labor regulations. Through the formation of the Workers Union, it is hoped that an agreement can be made for a Collective Labor Agreement (PKB) aimed at protecting the rights and obligations of Bank Papua employees. However, management efforts and goodwill have

karyawan Bank Papua. Namun usaha dan niat baik manajemen belum dipandang serius oleh pegawai, dimana Serikat Pekerja tersebut tidak aktif di beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, saat ini terdapat beberapa club yang menjadi wadah komunikasi, aspirasi, menyalurkan bakat bagi seluruh pegawai. Melalui wadah ini, pegawai dapat secara rutin mengadakan berbagai pertemuan dan forum komunikasi. Beberapa club olah raga yang aktif diikuti pegawai Bank Papua diantaranya: bulutangkis, sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, golf, catur, karate, futsal, bilyar, sepak takraw dan swim & dive. Disamping aktifnya beberapa club olah raga, manajemen juga memfasilitasi pegawai Bank Papua membentuk wadah club untuk kegiatan seni diantaranya: photography, vocal grup, dan grup band.

not been taken seriously by employees, where the Trade Unions have been inactive in recent years. However, at present there are several clubs that become a forum for communication, aspirations, channeling talent to all employees. Through this forum, employees can routinely hold various meetings and communication forums. Some sports clubs that are actively participated by Bank Papua employees include: badminton, soccer, field tennis, table tennis, golf, chess, karate, futsal, billiards, sepak takraw and swim & dive. Besides being active in several sports clubs, management also facilitates Bank Papua employees to form club clubs for artistic activities including: photography, vocal groups, and band groups.

- Remunerasi

Bank Papua telah menaati semua aturan yang berlaku terkait remunerasi, dimana besaran remunerasi seluruh karyawan telah disesuaikan berada diatas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Papua. Terkait dengan remunerasi, Bank Papua senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

- *Remuneration*

Bank Papua has complied with all applicable regulations regarding remuneration, whereby the amount of remuneration for all employees has been adjusted to be above the Minimum Wage standard in force in the operational area of Bank Papua. With regard to remuneration, Bank Papua always strives to maintain the gap of salaries for all employees so that there are no differences that are too high.

No	Jabatan	Rasio Perbandingan	*Position*
1	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	*Highest and Lowest Board of Commissioners Salary*
2	Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11	*Highest and Lowest Board of Director Salary*
3	Gaji Pegawai Tetap Tertinggi dan Terendah	12,00	*Employee Salary remains highest and lowest*
4	Gaji Pegawai Tidak Tetap Tertinggi dan Terendah	4,38	*Employee Salary Does Not Remain Highest and Lowest*
5	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	4,60	*The highest salary for directors & employees remains highest*

- Keselamatan Kerja

Selain kesehatan, keselamatan kerja juga menjadi salah satu aspek yang turut mendapatkan porsi perhatian besar dari manajemen. Bank Papua selalu berupaya untuk meminimalisir seluruh risiko kecelakaan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman demi mengoptimalkan produktivitas kinerja perusahaan. Sebagai wujud komitmen Bank Papua dalam menjaga keselamatan kerja seluruh karyawannya, Bank Papua juga sudah melakukan pengelolaan risiko kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas, antara lain:

- *Work safety*

In addition to health, work safety is also one aspect that also receives a large portion of attention from management. Bank Papua always strives to minimize all risks of work accidents in order to create a safe and comfortable work environment in order to optimize the productivity of company performance. As a form of commitment of Bank Papua in maintaining the safety of all employees, Bank Papua has also managed the risk of occupational accidents in accordance with the needs of employees in the office and in the field during service, including:

- Mengadakan pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala.
- Mengadakan pelatihan dasar terhadap penggunaan alat pemadam kebakaran.
- Melengkapi seluruh kantor operasional dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan (Peralatan P3K.

- Jaminan Sosial

  Dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh karyawan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi atau risiko lainnya seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja, maka Bank Papua mengikutsertakan seluruh karyawannya sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program yang diikuti Bank Papua antara lain Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK)

Dampak

Dengan menerapkan tanggung jawab sosial dalam K3, secara psikologi pegawai menjadi lebih tenang dan pasti mendapat hak kesejahteraan dari Bank untuk memacu kinerjanya. Kinerja yang baik akan menghasilkan dampak yang positif terhadap Bank . Sebaliknya, dengan timbulnya kecelakaan kerja dapat mempengaruhi aktivitas kerja serta dapat merugikan pekerja maupun perusahaan.

Sertifikasi

Per 31 Desember 2019, Bank Papua belum mendapatkan sertifikasi dalam hal Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- *Conduct training and provide evacuation information from high-rise buildings on a regular basis.*
- *Conduct basic training on the use of fire extinguishers.*

- *Equipping all operational offices with relevant basic safety equipment and (First Donation Equipment).*

- *Social Security*

  In order to provide a sense of security and certainty for all employees against socio-economic risks or other risks such as during work accidents, disabilities, old age and death, which results in a reduction or interruption in labor income, Bank Papua includes all of its employees as Worker Social Security participants (Jamsostek) through BPJS Employment. The programs that were joined by Bank Papua included the Old Age Insurance Program (JHT), the Work Accident Insurance Program (JKK), and the Death Insurance Program (JK)

Impact

By implementing social responsibility in OHS, psychologically employees become calmer and surely receive welfare rights from the Bank to spur their performance. Good performance will produce a positive impact on the Bank. Conversely, the occurrence of work accidents can affect work activities and can harm both workers and companies.

Certification

As of December 31, 2019, Bank Papua had not yet received certification in terms of Employment, Health and Safety.

Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Nasabah

Responsibility for Products and Customers

Menyadari kegiatan usaha Bank Papua yang bergerak di sektor perbankan, maka Bank Papua menilai bahwa seluruh nasabah Bank Papua merupakan salah satu pemangku kepentingan eksternal penting yang menjadi ujung tombak keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.

Oleh karena itu, Bank Papua senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap produk dan layanan yang diberikan agar dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan yang maksimal kepada seluruh nasabah. Dalam menjalankan tanggung jawab produk dan nasabah.

Kebijakan

Untuk mempertahankan jumlah nasabah, Bank Papua menjalankan program serta kegiatan tanggung jawab sosial di bidang produk dan nasabah dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah. Untuk melengkapi peraturan tersebut, Bank Papua juga telah menyusun pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan pengaduan nasabah dalam bentuk Standar Pedoman Operasional (SPO) Pengelolaan Pengaduan Nasabah.

Kegiatan dan Dampak

- Pengaduan Nasabah

  Pengaduan merupakan ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial.

  Bank Papua menyediakan ketentuan internal dan sarana pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Unit pengelola pengaduan nasabah di Bank Papua berada dibawah Divisi Keuangan dan Operasional.

Aware of the business activities of Bank Papua which is engaged in the banking sector, Bank Papua considers that all customers of Bank Papua are one of the important external stakeholders who spearhead the sustainability of the company's operational activities.

Therefore, Bank Papua always strives to improve the quality of each product and service provided in order to provide maximum satisfaction and comfort to all customers. In carrying out product and customer responsibilities.

Policy

To maintain the number of customers, Bank Papua runs social responsibility programs and activities in the field of products and customers with reference to policies and regulations that apply in Indonesia, namely Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Bank Indonesia Regulation No. 10/10 / PBI / 2008 concerning Customer Protection. To complete the regulation, Bank Papua has also compiled comprehensive guidelines related to the management of customer complaints in the form of a Standard Operational Guidelines (SPO) for Customer Complaints Management.

Activity and Impact

- *Customer Complaints*

  Complaints are an expression of customer dissatisfaction caused by a loss or potential financial loss.

  Bank Papua provides internal provisions and means of customer complaints and dispute resolution to customers guided by the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority. The customer complaint management unit at Bank Papua is under the Finance and Operations Division.

Pengaduan nasabah selama tahun 2019 tergambar pada tabel berikut :

Customer complaints during 2019 are illustrated in the following table:

No	Uraian	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Jumlah
1	Penghimpunan Dana		3		39	42
2	Penyaluran Dana	2	1			3
3	ATM/Kartu Debit	75	151	225	185	636
4	Elektronik Banking	1				1
5	Lainnya (Sebutkan CDM)	32	44	16		92
	Total	**110**	**199**	**241**	**224**	**774**

Pengaduan nasabah dalam proses pada periode laporan diselesaikan pada periode laporan berikutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengaduan nasabah telah diselesaikan.

Customer complaints in the process during the reporting period are resolved in the next reporting period, so it can be concluded that overall customer complaints have been resolved.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Nasabah yang dilakukan oleh internal Bank meliputi sebagai berikut :

Mechanisms for Handling Customer Complaints conducted by internal Banks include the following:

1. Media Komunikasi Pengaduan Nasabah
   Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui sarana antara lain tatap muka, surat, telepon/Call Centre, dan media elektronik lainnya yang disediakan oleh Bank, yaitu :

1. *Customer Complaints Communication Media*
   Customers can submit complaints to the Bank through means including face to face, letters, telephone / Call Centers, and other electronic media provided by the Bank, namely:

Divisi Sekretaris Perusahaan
Gedung Bank Papua
Jl. A. Yani No. 5-7
Jayapura 99111
Call Center : +62 - 967 532011
email : sekper@bankpapua.co.id

2. Proses Penanganan Pengaduan Nasabah
   Setelah menerima pengaduan nasabah, Bank melakukan :
   a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
   b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan

2. *The Process of Handling Customer Complaints*
   After receiving customer complaints, the Bank makes:
   a. Internal inspection of complaints competently, correctly and objectively
   b. Conduct analysis to ensure the truth of complaints

3. Solusi Penyelesaian Pengaduan Nasabah
   Penyelesaian pengaduan oleh Bank dilakukan berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :
   a. Pernyataan Maaf
      Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara bank dan nasabah maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis
   b. Mediasi Perbankan
      Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dalam hal ini fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh OJK atau LPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

      Apabila Bank telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun nasabah tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau proses penyelesaian pengaduan telah melewati batas waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka nasabah dapat melanjutkan upaya pengaduan melalui Mediasi Perbankan.

Dalam merespons keluhan nasabah, Bank Papua senantiasa menerima pengaduan dengan baik, sebagai bentuk keterbukaan Bank Papua atas setiap pengaduan nasabah, bahkan memfasilitasi melalui berbagai media pengaduan seperti melalui website maupun mengisi formulir pengaduan yang tersedia di *Customer Service*.

- Informasi Produk
  Untuk mempermudah edukasi kepada nasabah dalam memahami seluruh produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Papua, serta dalam rangka mempermudah pemberian layanan dan akses kepada nasabah, maka Bank Papua melakukan sosialisasi mengenai produknya melalui:

  Website **www.bankpapua.co.id**
  On site pada kantor cabang terdekat.

3. Solution for Customer Complaint Resolution
Settlement of complaints by the Bank is carried out based on the principle of deliberation to reach consensus. Completion of complaints can be made with the following matters:
a. Sorry Statement
Since the "apology statement" is an act of both parties between the bank and the customer, the procedure for granting an "apology statement" is based on agreement. In the event that there is no agreement between the bank and the customer, an "apology statement" is made in writing
b. Banking Mediation
Banking mediation is a dispute resolution process involving a mediator to help the parties involved in voluntary approval of all the disputed difficulties. In this case the administration of banking mediation is carried out by the OJK or LPS (Alternative Dispute Resolution Institution) which is contained in the list of Alternative Dispute Resolution Institutions determined by the Financial Services Authority (OJK).

If the Bank has approved the complaint but cannot receive the request or the process of the complaint has passed the agreed time limit above, then payment can be made through Banking Mediation.

In responding to customer complaints, Bank Papua always receives complaints properly, as a form of Bank Papua's openness to every customer complaint, even facilitating through various media complaints such as through the website or filling out complaint forms available at Customer Service.

- *Product Information*
  To facilitate customer education in understanding all products and services owned by Bank Papua, and in order to facilitate the provision of services and access to customers, Bank Papua conducts socialization regarding its products through:

*Website **www.bankpapua.co.id***
On site at the nearest branch office.

Dalam menjaga informasi mengenai kerahasiaan nasbah, Bank meminta persetujuan tertulis dari Nasabah bahwa Bank tidak akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain boleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam permintaan persetujuan Bank terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada pihak Lain.

In maintaining information regarding the confidentiality of the customer, the Bank requests written approval from the Customer that the Bank will not provide and / or disseminate Customer Personal Data to Other Parties for commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations. In a request for approval from the Bank, it must first explain the purpose and consequences of granting and / or disseminating Customer's Personal Data to other parties.

Dampak

Dengan memberikan fasilitas pengaduan, nasabah akan merasa nyaman apabila pada suatu saat mengalami masalah dalam bertransaksi melalui Bank Papua. Kegagalan bertransaksi tidak menjadikan trauma bagi nasabah untuk menggunakan jasa perbankan di kemudian hari. Jaminan keamanan melalui perlindungan konsumen, serta meyediakan informasi yang baik diharapkan nasabah akan menerima hak-haknya serta yang paling penting adalah merasa terjamin saat menyimpan uangnya di bank

Penyampaian informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Papua dimaksudkan untuk mempermudah pemberian layanan dan akses kepada nasabah. Kemudahan layanan serta akses kepada nasabah lebih jauh telah memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan serta pangsa pasar Perseroan. Di 2019, laba bersih Bank Papua tercatat meningkat sebesar 14,39% sedangkan pangsa pasar yang dimiliki oleh Bank Papua untuk produk tabungan sebesar 3,14% dan pangsa pasar untuk kredit yang disalurkan sebesar 1,97%.

Impact

By providing complaints facilities, customers will feel comfortable if at any time they experience problems in making transactions through Bank Papua. Failure to transact does not create trauma for customers to use banking services in the future. Security guarantees through consumer protection, as well as providing good information is expected that customers will receive their rights and the most important thing is to feel secure when depositing money in the bank

Submission of information and education to the public regarding products and services owned by the Papua Bank is intended to facilitate the provision of services and access to customers. The ease of service and access to customers has further impacted the Company's revenue and market share. In 2019, Bank Papua net earning increased by 14.39% while the market share owned by Bank Papua for savings products was 3.14% and the market share for loans was 1.97%.

Sertifikasi

Per 31 Desember 2019, Bank Papua belum mendapatkan sertifikasi dalam hal pelayanan kepada nasabah ataupun produk.

Certification

As of December 31, 2019, Bank Papua had not yet received certification in terms of services to customers or products.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia

Social Responsibility For Human Rights

Kebijakan

Bank Papua memandang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" Sebagai Bank yang bertanggung jawab HAM, yang berdasarkan Undang Undang yang berlaku di negara Indonesia. Wujud tanggung jawab tersebut kami implementasikan dalam perlakuan tanpa membeda bedakan SARA. Bank Papua berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dan Prinsip-prinsip HAM.

Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia meliputi:

1. Kewajiban Menunaikan Ibadah sesuai dengan Agamanya masing-masing
   Menjalankan kegiatan keagamaan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu Bank Papua telah melaksanakan kegiatan kebijakan menunaikan/ menjalankan kewajiban beragama sebagai berikut :
   - Bank Papua senantiasa memberikan waktu yang secukupnya kepada Pegawai untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaannya masing-masing.
   - Bank Papua memberikan izin untuk melaksanakan perjalanan suci masing-masing umat beragama.

Policy

The Bank Papua views Human Rights as a set of rights inherent in the nature and existence of human beings as God's creatures and is a gift that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and everyone for the sake of honor and protection of dignity and human dignity "As a Bank responsible for human rights, which is based on the laws in force in Indonesia. We implement these responsibilities in the form of treatment without discrimination. SARA is committed to complying with all legal provisions and Human Rights Principles.

Activity

Activities in corporate social responsibility related to human rights include:

1. *Obligations to worship in accordance with their respective religions*
   Carrying out religious activities is a very basic human right. Therefore Bank Papua has implemented policy activities to fulfill / carry out religious obligations as follows:
   - *Bank Papua always gives sufficient time to employees to carry out worship that is required by their respective religions or beliefs.*
   - *Bank Papua gives permission to carry out the holy journey of each religious community.*

2. Cuti Kerja, Cuti Melahirkan, dan Izin Tidak Masuk Kerja
   Bank Papua memberikan cuti kerja, cuti melahirkan dan izin tidak masuk kerja sesuai dengan pengajuan surat permohonan dari pegawai kepada atasan masing-masing Divisi.

   Cuti dan Izin yang senantiasa diajukan pegawai antara lain:
   - Izin pernikahan;
   - Menikahkan anak;
   - Kelahiran anak dari istri atau istri mengalami keguguran kandungan;
   - Baptisan anak;
   - Khitanan anak;
   - Kematian anggota Keluarga; dll.

Untuk musibah antara lain kebakaran, banjir, bencana alam yang menimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal atau kejadian tersebut menyebabkan pegawai tidak dapat mencapai tempat bekerja, dapat diberikan izin tidak masuk kerja, kecuali untuk *force majeure* yang sifatnya regional atau nasional diatur tersendiri.

Dampak

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja.

2. Work Leave, Childbirth Leave, and Permission to Leave Work
Bank Papua provides work leave, maternity leave and permission to not come to work in accordance with the submission of an application from the employee to the supervisor of each Division.

Leave and Permit which are always submitted by employees include:
- *Marriage permit;*
- *marry off the child;*
- *Birth of a child from a wife or wife has a miscarriage;*
- *child baptism;*
- *Circumcision of children;*
- *Death of a family member; etc.*

For disasters such as fire, flood, natural disaster which caused heavy damage to the residence or the incident caused the employee to not be able to reach the place of work, permission to not be able to come to work can be granted, except for regional or national force majeure which is regulated separately.

Impact

By giving leave permission and guaranteeing the implementation of worship of each employee, it has an impact on improving employee performance and seriousness in working.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Regarding Fair Operations

Kebijakan

Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan operasi yang adil dituangkan pada beberapa kebijakan khususnya kebijakan anti korupsi yang meliputi pencegahan benturan kepentingan, gratifikasi, dan penerapan whistleblowing *system* dan code of conduct

Kegiatan

1. Larangan Memberi Menerima Hadiah atau Cinderamata
   Sesuai dengan 10 Pedoman Perilaku dalam budaya perusahaan Bank Papua, dimana seluruh pegawai harus memiliki sikap jujur, tulus dan berempati, maka serluruh pegawai Bank Papua dilarang:
   a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
   c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara secara pribadi dengan tujuan agar yang bersangkutan melakukan transaksi dengan Bank Papua.
   d. Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Policy

Corporate social responsibility policies related to fair operations are outlined in several policies, especially anti-corruption policies which include preventing conflicts of interest, gratification, and implementing a whistleblowing system and code of conduct

Activity

1. *Prohibition of Giving to Receive Gifts or Souvenirs*
   In accordance with the 10 Code of Conduct in Bank Papua's corporate culture, where all employees must have an honest, sincere and empathetic attitude, all Bank Papua employees are prohibited from:
   a. Receive compensation directly or indirectly in any form from any party related to their duties and responsibilities.
   b. Illegal levies in any form in carrying out their duties for personal, group or other party interests.
   c. Giving, promising or offering directly or indirectly gifts in any form to civil servants or State administrators personally in order for the person concerned to conduct transactions with Bank Papua.
   d. Give gifts, banquets or other facilities to business partners, coworkers, and customers in accordance with prohibitions set out in the applicable legal provisions.

Gratifikasi

Salah satu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Papua adalah dengan menerapkan kebijakan pengendalian Gratifikasi di dalam aktivitas operasionalnya. Untuk itu, Bank Papua membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditempatkan di Divisi Kepatuhan. Setiap awal tahun seluruh insan Bank Papua melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang salah satu poinnya adalah sebagai berikut: "Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun nasabah debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan/ atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal."

Gratuity

One of the implementation of good corporate governance at Bank Papua is by implementing a Gratification control policy in its operational activities. For this reason, Bank Papua established the Gratification Control Unit which is placed in the Compliance Division. At the beginning of the year, all Papuan employees sign an Employee Integrity Pact, one of the points being as follows: "Do not give, promise and / or receive compensation in any form to or from fund customers or customers of debtors, vendors, partners, partners and / or other parties both external and internal. "

Whistleblowing System

Bank Papua telah membangun *Whistleblowing System* (WBS) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Bank Papua juga berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan. Mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di Bank Papua yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal–hal yang dapat merusak image Bank Papua diimplementasikan melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Whistleblowing System

Bank Papua has established a Whistleblowing System (WBS) to realize good corporate governance. Bank Papua is also committed to running the company professionally based on corporate behavior in accordance with the code of ethics and work culture so that it can improve the effectiveness of the implementation of corporate governance. Early detection mechanism for the occurrence of a violation at Bank Papua that can cause financial losses including things that can damage the image of Bank Papua is implemented through the Whistleblowing System (WBS).

Dampak

Dampak diterapkannya kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan operasi yang adil adalah terciptanya kegiatan usaha yang sehat, sehingga meningkatkan kinerja operasional dan keuangan dengan cukup signifikan di tahun 2019.

Impact

The impact of implementing social responsibility activities related to fair operations is the creation of sound business activities, thus significantly increasing operational and financial performance in 2019.

Referensi Laporan Tahunan

Annual Report Reference

Referensi Laporan Tahunan Annual Report Reference			
No.	**Kriteria / Criteria**	**Penjelasan / Explanation**	**Hal/ Page**
I	**Umum/** ***General***		
	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. *The annual report is presented in the Indonesian language is good and true and recommended serving also in English*		✔
	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. *The annual report is printed with good quality and using the type and size of letters are easy to read*		✔
	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas *The annual report clearly mentions corporate identities*	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: a Sampul muka; b. Samping; c.. Sampul belakang; dan d. Setiap halaman *The company name and the year the annual report is displayed in:* *a. The cover;* *b. Side;* *c. Cover the back; and* *d. Each page*	✔
	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan *The annual report is displayed on the company's website*	Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya *The annual report includes the current and previous years*	✔
II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting /** ***Financial Highlights***		
	1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *1. Information the company's business results in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha; b. Laba (rugi); • Distribusikan kepada pemilik entitas induk • Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Distribusikan kepada pemilik entitas induk • Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali d. Laba (rugi) per saham. *Information includes among others:* *a. Sales / revenues;* *b. Income (loss);* *c. Total income (loss) Comprehensive; and* *d. Earnings (loss) per share.*	13-23

II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting / *Financial Highlights***			
	2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *2. The company's financial position information in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat antara lain: a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; b. Jumlah Asset; c. Jumlah liabilitas; dan d. Jumlah ekuitas. *Information includes among others:* *a. The amount of investments in associates;* *b. Total assets;* *c. Total liabilities; and* *d. The amount of equity.*	13-23
	3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *3. Financial ratios in the comparative period of 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. *Information includes five (5) financial ratios are common and relevant toindustrial companies.*	13-23
	4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik *4. Stock price information in the form of Table.s and graphs*	a. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat : • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. *a. Information in table form that contains:* *b. Information in table form that contains:* • *Market capitalization based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed.* • *The highest, lowest and closing stock prices are based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed.* • *The trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.* *c. Information in graphical form that contains at least:* • *The closing price is based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed.* • *The trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed. for every quarter in the last 2 (two) financial years.*	25
	5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir *5. Information on bonds, securities or convertible bonds that are still circulating in the two (2) last fiscal year*	Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); b. Tingkat bunga/imbalan; c. Tanggal jatuh tempo; dan d. Peringkat obligasi/sukuk. *Information includes:* *a. Number of bonds / securities / convertible bonds outstanding (outstanding);* *b. The interest rate / yield;* *c. The maturity date; and* *d. Rating bonds / sukuk.*	25

IV	**Profil Perusahaan**		
	1. Laporan Dewan Komisaris *1. Report of the Board of Commissioners*	Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada). *Contains the following:* *a. Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the company and the basis of its assessment;* *b. A view of the business prospects of the company compiled by the Board of Directors and their basic considerations;* *c. A View of the implementation / management of a whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS* *d. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes (if any).*	36-43
	2. Laporan Direksi *2. Board of Directors Report*	Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • Kebijakan strategis. • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan. • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya. b. Analisis tentang prospek usaha c. Perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan pada tahun buku; dan d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. *Contains the following:* *a. Analysis of company performance, which includes:* *• Strategic policy.* *• Comparison of the results achieved with those targeted.* *• Constraints faced by the company and the completion steps.* *b. Analysis of business prospects* *c. The development of the implementation of corporate governance in the financial year; and* *d. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.*	44-59
	3. Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris *3. Signature member of the Board of Directors and Board of Commissioners*	Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; b. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; c. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. *Contains the following:* *a. Signatures are written on separate sheets;* *b. Statement that the Board of Directors and Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;* *c. Signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners by stating their names and positions; and* *d. Written explanation in a separate letter from the concerned in the event that there are members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners who do not sign the annual report, or written explanations in separate letters from other members in the event that there is no written explanation from the concerned.*	60-61

IV	**Profil Perusahaan**		
	1. Nama dan alamat lengkap perusahaan *1. Full name and address of the company*	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website *Contains information including name and address, zip code, no. Tel, no. Fax, email, and website*	64-65
	2. Riwayat singkat perusahaan *2. Brief history of the company*	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada) *Include: date / year of establishment, the name and corporate name change (if any)*	66
	3. Bidang usaha *3. Business fields*	Uraian mengenai antara lain: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. *Descriptions include:* *a. Company business activities according to the latest articles of association;* *b. Business activities carried out; and* *c. Products and / or services produced.*	83
	4. Struktur Organisasi *4. Organizational structure*	dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. *In chart form, include the name and position at least until the structure of the Board of Directors.*	96-97
	5. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan *5. Vision and mission of the company*	mencakup: a. Visi perusahaan; b. Misi perusahaan; dan c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. *includes:* *a. Company vision;* *b. Company mission; and* *c. Information that the vision and mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners.* *d. Statement regarding corporate culture owned by the company.*	71-77
	6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris *6. Identity and brief resume of members of the Board of Commissioners*	Informasi memuat antara lain: a. Nama. b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain). c. Umur. d. Domisili. e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan). f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat). g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. *Information includes:* *a. Name.* *b. Position and period of office (including positions at other companies or institutions).* *c. Age.* *d. Domicile.* *e. Education (Field of Study and Educational Institutions).* *f. Work experience (Position, Agency, and Period of Service).* *g. Appointment history (period and position) as a member of the Board of Commissioners at the Company from the time it was first appointed.*	104-111

IV	**Profil Perusahaan**		
	7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi *7. Identity and brief resume of members of the Board of Directors*	Informasi memuat antara lain: a. Nama b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) c. Umur d. Domisili e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. *Information includes:* *a. Name* *b. Position and period of office (including positions at other companies or institutions)* *c. Age* *d. Domicile* *e. Education (Field of Study and Educational Institutions)* *f. Work experience (Position, Agency, and Period of Service)* *g. Appointment history (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company from the time it was first appointed.*	112-121
	8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) *8. Number of employees (comparative 2 years) and a description of the Development of competence (eg aspects of education and training of employees)*	Informasi memuat antara lain: a. Jumlah karyawan untuk masing-masing *level* organisasi b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (*level* jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan. e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. *Information includes:* *a. Number of employees for each level of the organization* *b. Number of employees for each level of education* *c. Number of employees based on employment status* *d. Data on employee competency development that has been carried out in the financial year consisting of parties (position level) who attend training, type of training, and training objectives.* *e. Employee competency development costs that have been spent in the financial year.*	140-147
	9. Komposisi Pemegang saham *9. Composition of shareholders*	Informasi memuat antara lain: a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham • Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. *Information includes:* *a. Details of the names of shareholders which include the 20 largest shareholders and the percentage of ownership;* *b. The details of shareholders and the percentage of ownership include:* *• Name of shareholders who own 5% or more shares* *• Group of community shareholders with share ownership of less than 5% each.* *c. Names of Directors and Commissioners as well as direct and indirect share ownership. Note: if the Director and Commissioner do not have direct and indirect shares, they should be disclosed.*	158-162

IV	**Profil Perusahaan**		
	10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel *10. List of subsidiaries and / or associates in table form*	Informasi memuat antara lain: a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; b. Persentase kepemilikan saham ; c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). *Information includes among others:* *a. Name of the subsidiaries and / or associates;* *b. Percentage of share ownership;* *c. Description of the business areas the subsidiaries and / or associated company; and* *d. Description of subsidiaries operating status and / or an associate (have operating or not operating).*	170
	11. Struktur grup perusahaan *11. Structural Group of Companies*	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), *The structure of group companies in the form of a chart that describes its subsidiaries, associated entities, joint ventures, and special purpose vehicle (SPV),*	171
	12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. *12. Chronology of share issuance (including a private placement) and / or listing of shares from the beginning of the issuance to the end of the financial year.*	Mencakup antara lain: a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action) b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action) c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. *Includes among others:* *a. Year of issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, and price of stock offer for each corporate action* *b. The number of shares listed after each corporate action* *c. Name of the exchange where the company's shares are listed.* *Note: if the company does not have a chronology of listing shares, it should be disclosed.*	170
	13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. *13. Chronology of the issuance and / or recording of other securities from the beginning of the issuance to the end of the financial year.*	Mencakup antara lain: a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; b. Nilai penawaran efek lainnya c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan d. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. *Includes among others:* *a. Other securities names, other securities issuance years, interest rates / other securities benefits, and other securities maturity dates;* *b. Other securities offer value* *c. Name of exchange where other securities are listed* *d. Securities rating.* *Note: if the company does not have a chronology of publishing and recording other securities, it should be disclosed.*	170
	14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang, informasi memuat antara lain: *14. Name and address of supporting institutions and / or professions, information includes:*	Informasi memuat antara lain: a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. *Information includes:* *a. Name and address of the Registrar / party administering the company's shares* *b. Name and address of the Public Accounting Firm* *c. Name and address of securities rating company.*	171

IV	Profil Perusahaan		
	15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala Nasional maupun Internasional *15. Awards received in the last fiscal year and / or certification is still valid in the last financial year both national and international*	Informasi memuat antara lain: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; b. Tahun perolehan; c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan d. Masa berlaku (untuk sertifikasi). *Information includes:* *a. Name of award and / or certificate;* *b. Year of acquisition;* *c. Awarding institution and / or certificate; and* *d. Validity period (for certification).*	172-174
	16. Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) *16. Name and address of its subsidiaries or branches or representative offices (if any)*	Memuat informasi antara lain: a. nama dan alamat entitas anak; dan b. nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan *Contains information such as:* *a. The name and address of the subsidiary; and* *b. The name and address of the branch office / representative.* *Note: if the company does not have subsidiaries/branches/representatives, in order to be disclosed*	175-184
	17. Informasi pada Website Perusahaan *17. Information on the Company's Website*	Meliputi paling kurang: a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; b. Isi Kode Etik; c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. *Includes at least:* *a Shareholder information up to the individual final owner;* *b. Contents of the Code of Conducts;* *c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) includes at least the material of the agenda discussed in the GMS, summary of minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS, the date of the GMS summary summary.* *d. Separate annual financial statements (last 5 years)* *e. Profile of the Board of Commissioners and Directors* *f. Charter / Charter of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit.*	185
	18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. *18. Education and / or training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit followed in the financial year.*	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan *Includes the least information (types and relevant parties to follow):* *a. Education and / or training for the Board of Commissioners* *b. Education and / or training for Directors* *c. Education and / or training for the Audit Committee* *d. Education and / or training for the Nomination and Remuneration Committee* *e. Education and / or training for Other Committees* *f. Education and / or training for the Corporate Secretary* *g. Education and / or training for the Internal Audit Unit* *Note: if there is no education and / or training in the financial year, it should be disclosed*	150-157

V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**		
	1. Tinjauan operasi per segmen usaha *1. Review of operations per business segment*	Memuat uraian mengenai: a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: • Produksi. • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi. • Penjualan/pendapatan usaha. • Profitabilitas. *Contains descriptions of:* *a. Explanation of each business segment.* *b. Performance per business segment, including:* • *Production* • *Increase / decrease in production capacity* • *Sales / business income* • *Profitability.*	219
	2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan *2. Description of the financial performance of companies*	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/ penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: a. Asset lancar, Asset tidak lancar, dan total Asset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas. *Financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of increase / decrease (in the form of narratives and tables), among others regarding:* *a. Current assets, non-current assets, and total assets;* *b. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;* *c. Equity;* *d. Sales / business income, expenses and profits (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and* *e. Cash flow.*	258
	3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan *3. Discussion and analysis of the ability to pay debts and receivable collection company, by presenting the relevant ratio calculation in accordance with the type of industrial companies*	Penjelasan tentang : a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan b. Tingkat kolektibilitas piutang. *Explanation of :* *a. The ability to pay debts, both short and long term; and* *b. Collectability of accounts receivable.*	292-297
	4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) *4. Discussion on the capital structure (capital structure), and management policies on capital structure (capital structure policy)*	**Penjelasan atas:** a. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/ sukuk dan ekuitas b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. *Explanation of:* *a. Details of capital structure consisting of interest / sukuk-based debt and equity* *b. Management policies on capital structure (capital structure policies)* *c. Basic selection of management policies on capital structure.*	301

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
	5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. *5. Discussion of capital expenditure agreement (not fundingagreement) in the last financial year.*	Penjelasan tentang: a. Nama pihak yang melakukan ikatan. b. Tujuan dari ikatan tersebut. c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; d. Mata uang yang menjadi denominasi. e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. *Explanation of:* *a. Name of the party making the agreement.* *b. The purpose of the agreement.* *c. The source of funds expected to fulfill these agreements.* *d. Currency that is the denomination.* *e. Steps planned by the company to protect risks from related foreign currency positions.* *Note: if the company does not have a bond regarding capital investment in the last financial year to be disclosed.*	304
	6. Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir *6. Discussion of the investment on capital expenditure agreement realized in the last fiscal year*	Penjelasan tentang: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan *Explanation of:* *a. Type of capital expenditure investments;* *b. The investment objective of capital goods; and* *c. The value of capital investments incurred in the last fiscal year.* *Note: if there is no realization of capital investments, in order todisclosed*	305
	7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku denga hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. *7. Information comparison between the target at the beginning of the fiscal year results achieved premises (realization), and the target or projected to be achieved for the coming year regarding revenue, earnings, capital structure, or other that are considered important for the company*	Informasi memuat antara lain: a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang. *Information includes among others:* *a. Comparison between the targets at the beginning of the financial year with the results achieved (realized); and* *b. Target or projected to be achieved in the coming years.*	307
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan *8. Information and material facts occurring after the date of the auditor's report*	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. *Description of important events after the date of the auditor's report, including its impact on the performance and business risk in the future.* *Note: if there is no important events after the date of the auditor's report, to be disclosed*	314
	9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan *9. The description of the company's business prospects*	Dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. *Related with industry and the economy in general, accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.*	329
	10. Uraian tentang aspek pemasaran *10. Description of the marketing*	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. *Description of the marketing of products and / or services of other companies, including marketing strategy and market share.*	315

V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**		
11.	Uraian mengenai kebijakan *Dividen* dan jumlah *Dividen* kas per saham dan jumlah *Dividen* per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. *11. Description of the Dividend policy and the amount of cash Dividends per share and total Dividend per year declared or paid during the two (2) last fiscal year*	Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian *Dividen*; b. Total *Dividen* yang dibagikan; c. Jumlah *Dividen* kas per saham; d. Payout ratio; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran *Dividen* kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian *Dividen*, agar diungkapkan alasannya *Containg description of:* *a. The Dividend distribution policy;* *b. Total Dividend;* *c. The amount of the cash Dividend per share;* *d. Payout ratio; and* *e. Date of the announcement and payment of cash Dividends for each year.* *Note: if there is no Dividend distribution, that disclosed the reason*	332
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). *12. Employee stock ownership program and / or management held company (ESOP / MSOP)*	Memuat uraian mengenai: a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; b. Jangka waktu; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. *Containg description of:* *a. The number of shares of ESOP / MSOP and realization;* *b. Duration;* *c. Terms of the employees and / or management of the beneficiaries; and* *d. The exercise price.* *Note: if it does not have such programs, in order to be disclosed*	333
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). *13. Actual use of proceeds from public offering (in which case the company is obliged to submit reports on realization of the use of funds)*	Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana; b. Rencana penggunaan dana; c. Rincian penggunaan dana; d. Saldo dana; dan e. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. *Contains descriptions of:* *a. Total fund acquisition;* *b. Plan for use of funds;* *c. Details of the use of funds;* *d. Fund balance; and* *e. Date of approval of the GMS for changes in the use of funds (if any).* *Note: if you do not have information on the realization of the use of the proceeds from the public offering, it should be disclosed.*	333
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. *14. Information on material transactions that contain conflicts of interest and / or transactions with affiliated parties.*	Memuat uraian mengenai: a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi c. Alasan dilakukannya transaksi d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. *Contains descriptions of:* *a. The name of the party to the transaction and the nature of the affiliate relationship* *b. A description of the fairness of the transaction* *c. The reason for the transaction* *d. Realization of transactions in the last fiscal year period* *e. Company policy is related to the review mechanism for transactions* *f. Compliance with relevant rules and regulations.* *Note: if you do not have the intended transaction, it should be disclosed.*	334

V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**		
	15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir *15. A description of the changes in legislation that significantly influence the company*	**Uraian memuat antara lain:** Uraian memuat antara lain: a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. *The description includes:* *a. Name of legislation that changes; and* *b. The impact (quantitative and / or qualitative) on the company (if significant) or the statement that the impact is not significant.* *Note: if there have been no changes to the legislation in the last fiscal year, it should be disclosed.*	337
	16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. *16. A description of changes in accounting policies applied by the company in the last fiscal year.*	Uraian memuat antara lain: a. Perubahan kebijakan akuntansi b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. *The description includes:* *a. Changes in accounting policies* *b. Reasons for changes in accounting policies* *c. The impact is quantitative on financial statements.* *Note: if there is no change in accounting policy in the last financial year, it should be disclosed.*	342
	17. Informasi kelangsungan usaha *17. Information on business continuity*	Pengungkapan informasi mengenai: a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1 c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. *Disclosure of information about:* *a. Matters that have the potential to significantly influence the business continuity of the company in the last financial year* *b. Management assessment of matters in number 1* *c. Assumptions used by management in conducting assessments.* *Note: if there are no matters that have the potential to have a significant effect on the business continuity of the company in the last fiscal year, disclosure of the assumptions underlying management in believing that there are no matters that have the potential to significantly influence the business continuity of the company in the last fiscal year.*	345
VI	**Good Corporate Governance**		
	1. Uraian Dewan Komisaris. *1. Description Board of Commissioners*	Uraian memuat antara lain: a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). *The description includes:* *a. Description of the Board of Commissioners' responsibilities* *b. Assessment of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis of the assessment* *c. Disclosures regarding the Board Charter (guidelines and work rules of the Board of Commissioners).*	423

VI	Good Corporate Governance		
	2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). *2. Independent Commissioners (the amount is at least 30% of the total Board of Commissioners).*	Meliputi antara lain: a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. *These include:* *a. Criteria for determining Independent Commissioners; and* *b. Statement about the independence of each Independent Commissioner.*	448
	3. Uraian Direksi *3. Board of Directors description*	Memuat antara lain: a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada). c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). *Includes among others:* *a. The scope of work and the responsibilities of each member of the Board of Directors.* *b. Assessment of the performance of the committees under the Board of Directors (if any).* *c. Disclosures regarding Board Charter (Directors' guidelines and work procedures).*	452
	4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. *4. Assessment of GCG Implementation for fiscal year 2018 which includes at least aspects of the Board of Commissioners and Directors.*	Memuat uraian mengenai: a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian. b. Pihak yang melakukan penilaian. c. Skor penilaian masing-masing kriteria. d. Rekomendasi hasil penilaian. e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku, agar diungkapkan. *Contains descriptions of:* *a. Criteria used in the assessment.* *b. The party making the assessment.* *c. Scoring scores for each criterion.* *d. Recommended assessment results.* *e. Reasons for not / not implementing recommendations.* *Note: if there is no assessment of GCG implementation for the financial year, it should be disclosed.*	401
	5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. *5. Description of remuneration policies for the Board of Commissioners and Directors.*	Mencakup antara lain: a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. *Includes among others:* *a. Disclosure of proposal procedures up to the determination of the remuneration of the Board of Commissioners* *b. Disclosure of proposal procedures up to the determination of the remuneration of the Directors* *c. Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners;* *d. Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors* *e. Disclosure of indicators for determining the remuneration of Directors* *f. Disclosure of performance bonuses, non-performance bonuses and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors (if any).* *Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, so that they are disclosed*	479

VI	Good Corporate Governance		
	6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). *6. Meeting Frequency and Attendance Level attended by the majority of members at the Board of Commissioners meeting (at least 1 time in 2 months), Board of Directors Meetings (minimum 1 time in 1 month), and Joint Board of Commissioners and Directors Meetings (at least 1 time in 4 months) .*	Informasi memuat antara lain: a Tanggal Rapat b. Peserta Rapat c. Agenda Rapat untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. *Information includes:* *a. Meeting Date* *b. Meeting participants* *c. Meeting agenda* *for each of the Board of Commissioners, Directors and joint meetings.*	485
	7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. *7. Information on major shareholders and controllers, either directly or indirectly, to the individual owner.*	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. . Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. *In the form of a scheme or diagram that separates the major shareholders from the controlling shareholders. . Note: what is meant by the main shareholders is the party which, directly or indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting rights of all shares that have voting rights issued by a Company, but not the controlling shareholder.*	410
	8 Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali *8. Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Main Shareholders and / or controllers*	Mencakup antara lain: a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan *Include:* *a. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with members of the Board of Directors;* *b. Affiliate Relations between members of the Board of Directors and Board of Commissioners* *c. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with Major Shareholder and / or control;* *d. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliation with members of other Commissioners; and* *e. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliated with Major Shareholder and / or controllers.* *Note: if it is not affiliated in question, in order to be disclosed*	493
	9. Komite Audit *9. The Audit Committee*	Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; c. Independensi anggota komite audit; d. Uraian tugas dan tanggung jawab; e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. *Includes among others:* *a. Name, position, and term of office of audit committee members;* *b. Educational history (Field of Study and Educational Institution) and work experience (Position, Institution, and Period of Occupation) of audit committee members;* *c. Independence of audit committee members;* *d. Description of duties and responsibilities;* *e. Description of the activities of the audit committee in the financial year; and* *f. Frequency of meetings and the level of attendance of the audit committee.*	496

VI	**Good Corporate Governance**		
	10. Komite Remunerasi dan Nominasi *10. Nomination and Remuneration Committee*	Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan g. Kebijakan mengenai suksesi direksi. *Includes among others:* *a. Name, title, and brief curriculum vitae of members of the nomination committee and / or remuneration;* *b. Independence of nomination and / or remuneration committees;* *c. Description of duties and responsibilities;* *d. Description of the activities of the nomination committee and / or remuneration in the financial year;* *e. The frequency of meetings and the level of attendance of the nomination committee and / or remuneration;* *f. Statement of nomination committee and / or remuneration guidelines; and* *g. Policy regarding the succession of directors.*	510
	11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. *11. Other committees under the Board of Commissioners held by the company*	Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; b. Independensi komite lain; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. *Include:* *a. Name, position and brief resume of the other committee members;* *b. The independence of the other committee;* *c. Description of the tasks and responsibilities;* *d. Description of the activities of other committees; and* *e. Frequency of meetings and attendance of other committees.*	503
	12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan *12. Description of the tasks and functions the Corporate Secretary*	Mencakup antara lain: a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; b. Domisili; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. *Includes among others:* *a. Name, and brief occupational history of the company secretary;* *b. Domicile;* *c. Description of duties and responsibilities; and* *d. The description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year.*	540
	13. Uraian mengenai unit audit *Internal* *13. A description of the Internal audit unit*	Mencakup antara lain: a. Nama ketua unit audit internal; b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. *Includes among others:* *a. Name of chairman of the internal audit unit;* *b. Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit;* *c. Certification as an internal audit profession;* *d. Position of internal audit unit in company structure;* *e. Description of the implementation of internal audit unit activities in the financial year; and* *f. The party that appoints and dismiss the chairman of the internal audit unit.*	546

VI	Good Corporate Governance		
	14. Akuntan Publik *14. Public Accountants*	Informasi memuat antara lin: a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. *Information includes:* *a. Name and year of public accountants who have audited annual financial statements for the past 5 years;* *b. Name and year of the Public Accountant Office that audits the annual financial statements for the past 5 years;* *c. The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accountant Office in the last financial year; and* *d. Other services provided by the Public Accountant Office and public accountants in addition to the annual financial statement audit services in the last fiscal year.* *Note: if no other service is intended, it should be disclosed.*	563
	15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan *15. A description of the corporate risk management*	Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. *Includes among others:* *a. A description of the risk management system implemented by the company;* *b. A description of the results of the review conducted on the risk management system in the financial year;* *c. A description of the risks faced by the company; and* *d. Efforts to manage these risks.*	568
	16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern *16. A description of the Internal control system*	Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara Internasional (COSO – Internal control framework); dan c. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. *Include:* *a. A brief description of the Internal control system, among others, include both financial and operational control;* *b. Explanation of the suitability of the Internal control system with internationally recognized framework (COSO - Internal control framework); and* *c. A description of the evaluation conducted on the effectiveness of Internal control systems.*	608

VI	**Good Corporate Governance**		
	17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait Tata Kelola Perusahaan Tanggung jawab sosial. *17. A description of corporate social responsibility related to social responsibility governance.*	Mencakup antara lain : a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial. b. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan. c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. d. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan. e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder. g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan. h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. *Includes among others:* *a. Information on commitment to social responsibility.* *b. Information about methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of company activities.* *c. Information about important stakeholders affected or influences the impact of company activities.* *d. Information on important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities.* *e. Information about the scope of corporate social responsibility that is both an obligation and an obligation.* *f. Information about the company's strategies and work programs in handling social, economic and environmental issues in the effort of stakeholder engagement and increasing value for stakeholders and shareholders.* *g. Information about various programs that exceeds the company's minimum responsibilities that are relevant to the business being implemented.* *h. Information about financing and social responsibility budgets.*	696
	18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck Hak Azasi Manusia. *18. A description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights.*	Mencakup antara lain : a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. *Includes among others:* *a. Information about the commitment and policy of core social responsibility is subject to Human Rights* *b. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility core is subject to Human Rights* *c. Information about planning corporate social responsibility in the field of Human Rights* *d. Information about implementing human rights CSR initiatives* *e. Information about achievements and awards for human rights CSR initiatives*	720

VI	**Good Corporate Governance**		
	19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck Operasi yang adil. *19. A description of corporate social responsibility related to the core subject of a fair operation.*	Mencakpup antara lain : a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck Operasi yang adil b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck operasi yang adil c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. *Includes among others :* *a. Information about core social responsibility commitments and policies is subject to fair operations* *b. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility core is subject to fair operations* *c. Information about planning corporate social responsibility in the field of fair operations* *d. Information about implementing fair operations CSR initiatives* *e. Information about achievements and awards for fair operations CSR initiatives.*	722
	20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang ; *20. Description of corporate social responsibility related to the environment, delivery of information about;*	Mencakup antara lain : a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan e. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. *Includes among others :* *a. Information about environmental commitments and policies* *b. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company* *c. Information about the target / plan of activities in 2018 determined by management;* *d. Information about activities carried out and related to environmental programs related to the company's operational activities* *e. Information about the implementation of CSR initiatives related to the environment* *f. Information about the achievement of quantitative impacts on these activities; and, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, the company's waste treatment system, the mechanism of complaints of environmental problems, consideration of environmental aspects in providing credit to customers, and others.* *g. Owned environmental certification.*	704

VI	**Good Corporate Governance**		
	21. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. *21. Description of corporate social responsibility related to employment, health and work safety.*	Mencakup antara lain informasi tentang: a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. *Includes information about:* *a. Labor policies and corporate social responsibility core commitments* *b. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment* *c. Information regarding the 2018 target / plan of activities determined by management; and* *d. Activities carried out and quantitative impacts on these activities* *e. Information related to employment, health and safety and security practices, such as gender equality and employment opportunities, work facilities and safety, employee turnover rates, occupational accident rates, remuneration, complaints mechanism, labor issues, and others.*	712
	22. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. *22. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers.*	Mencakup antara lain: a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. *Includes among others:* *a. Target / plan of activities which in 2018 are determined by management; and* *b. Activities carried out and impacts on these activities* *c. Related to product responsibility, such as consumer health and safety, product information, facilities, number and countermeasures for consumer complaints, and others.*	716
	23. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. *23. A description of corporate social responsibility related to social and community development*	Mencakup antara lain informasi tentang: a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck pengembangan sosial dan kemasyarakatan b. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan c. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan e. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan g. Biaya yang dikeluarkan h. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. *Includes information about:* *a. Core corporate social responsibility policies and commitments are subject to social and community development* *b. Information about social issues that are relevant to the company* *c. Information about social risks managed by the company* *d. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development* *e. Target / plan of activities in 2018 set by management;* *f. Activities carried out and impacts on these activities; and* *g. Cost incurred* *h. Related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of communities around the company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication about anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.*	707

VI	**Good Corporate Governance**		
	24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan. *24. Case in point being faced by the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who served during the period of annual report*	Mencakup antara lain: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. *Includes among others:* *a. Principal case / claim;* *b. Status of settlement of case / claim;* *c. The risks faced by the company and the nominal value of the claim / claim; and* *d. Administrative sanctions imposed on companies, members of the Board of Commissioners and Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that they are not subject to administrative sanctions).* *Note: in the case of companies, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors do not have important matters to disclose.*	632
	25. Akses informasi dan data perusahaan *25. Access to information and corporate data*	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *Mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya *A description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), the mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.*	633
	26. Bahasan mengenai kode etik *26. Discussion of the Code of Conducts*	Memuat uraian antara lain: a. Pokok-pokok kode etik; b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh *level* organisasi; c. Penyebarluasan kode etik; d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. *Include among others:* *a. Principles of the Code of Conducts;* *b. Disclosure that the Code of Conducts applies to all levels of the organization;* *c. Dissemination of the Code of Conducts;* *d. Sanctions for each type of violation stipulated in a Code of Conducts (normative); and* *e. Number of violations of the Code of Conducts along with sanctions given in the last fiscal year.* *Note: if there is no violation of the Code of Conducts in the last financial year, it should be disclosed.*	636

VI	**Good Corporate Governance**		
	27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system *27. Disclosures regarding whistleblowing system*	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: a. Penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi whistleblower; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. *Contains a description of the mechanism of the whistleblowing system, including:* *a. Submission of reports of violations;* *b. Protection for whistleblowers;* *c. The handling of complaints;* *d. The party managing the complaint; and* *e. The number of complaints entered and processed in the last fiscal year; and* *f. Sanctions / follow-up on complaints that have been processed in the financial year.* *Note: if there are no complaints that enter and have been processed in the last financial year, it should be disclosed.*	642
	28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. *28. Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors.*	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. *Description of the Company's written policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.* *Note: if there is no policy in question, the reasons and considerations are disclosed.*	477
VII	**Informasi Keuangan/ *Financial information***		
	1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. *1. Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners on Responsibility for Financial Statements*	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan *Compliance with the relevant regulations concerning the Responsibility for Financial Statements*	ii-iii
	2. Opini auditor independen atas laporan keuangan. *2. Independency auditor's opinion on the financial statements*		v
	3. Deskripsi Auditor Independen di Opini *3. Description Independency Auditor in Opinion*	Deskripsi memuat tentang: a. Nama & tanda tangan; b. Tanggal Laporan Audit; dan c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. *Description contains about:* *a. Name and signature;* *b. Date of Audit Report; and* *c. KAP license number and license number of Certified Public Accountants.*	vi

VII	**Informasi Keuangan/ *Financial information***		
	4. Laporan keuangan yang lengkap *4. Complete financial statement*	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan; f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). *Complete elements of financial statements:* *a. Statement of financial position;* *b. Report on profit and loss and other comprehensive income;* *c. Statement of Changes in Equity;* *d. Cash flow statement;* *e. Notes to financial statements;* *f. Comparative information about the previous period; and* *g. The statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies the items in its financial statements (if relevant).*	1-8
	5. Perbandingan tingkat profitabilitas *5. Comparison of the level of profitability*	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya *Comparison of* net *income (loss) for the year with the previous year*	3-4
	6. Laporan Arus Kas *6. Cash flow statement*	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. *Meet the following requirements:* *a. Grouping into three categories of activity: operating, investing and financing activities;* *b. The use of the direct method (direct method) to report cash flows from operating activities;* *c. The separation between the presentation of cash receipts and disbursements for a year or run on operating, investing and financing activities; and* *d. Disclosure of Non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.*	7-8
	7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi *7. Summary of Accounting Policies*	Meliputi sekurang-kurangnya: a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; c. Pengakuan pendapatan dan beban; d. Imbalan kerja; dan e. Instrumen Keuangan. *Includes at least:* *a. Statement of compliance with IFRSs;* *b. Basis of measurement and preparation of financial statements;* *c. Recognition of income and expense;* *d. Employee benefits; and* *e. Financial Instruments.*	14-42
	8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi *8. Disclosure of related party transactions*	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total Asset atau liabilitas. *Things are disclosed, among others:* *a. Name of related parties, and the nature and relationships with related parties;* *b. The transaction value and the percentage of total income and expensesRelated; and* *c. The balance amount and the percentage of the total assets or liabilities.*	87

VII	**Informasi Keuangan/ *Financial information***		
	9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan *9. Disclosures relating to taxation*	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; d. Rincian Asset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah Asset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. *Things that should be disclosed:* *a. Reconciliation fiscal and current income tax expense calculation;* *b. Explanation of the relationship between expense (income) and income tax accounting;* *c. A statement that the taxable income (CGC) the reconciliation as basis for charging Agency Annual Income Tax Return;* *d. Details of the assets and the deferred tax liabilities recognized in the statement of financial position for all periods presented, and the amount of expense (income) Deferred tax recognized in the income statement if the number is not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities are recognized in the statement of position finance; and* *e. Disclosure or no tax disputes.*	74-75
	10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Asset tetap *10. Disclosures relating to fixed assets*	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar Asset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar Asset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Asset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. *Things that should be disclosed:* *a. The depreciation method used;* *b. A description of the accounting policies selected between the revaluation model and the cost model;* *c. The method and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (to the revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (to the cost model); and* *d. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period showing: addition, subtraction and reclassification.*	63-65
	11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi *11. Disclosures relating to operating segments*	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, Asset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, Asset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada *level* entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. *Things that should be disclosed:* *a. General information covering factors used to identify reporTable. segment;* *b. The information about income, assets and liabilities reporTable. segment;* *c. Reconciliation of total segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other segments of the material elements of the corresponding number in the entity; and* *d. Disclosures on the entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and major customers.*	

VII	**Informasi Keuangan/ *Financial information***		
	12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan *12. Disclosures related to Financial Instruments*	Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. *Things that must be disclosed:* *a. Details of financial instruments owned based on their classification;* *b. Fair value and hierarchy for each group of financial instruments;* *c. Risk explanation related to financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;* *d. Risk management policy; and* *e. Risk analysis related to financial instruments quantitatively.*	84-86
	13. Penerbitan laporan keuangan *13. Financial statements*	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. *Things are disclosed, among others:* *a. The date the financial statements were authorized for issue; and* *b. The party responsible for authorizing the financial statements.*	vi

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

2019

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua

bersama membangun Indonesia

SURAT PENYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : F. Zendrato
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ir. Sadar Sebayang
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Bisnis
3. Nama : Rudhy Dharma
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Keuangan
4. Nama : Isak Samuel Wopari
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Operasional
5. Nama : Ir. Jefri Sanni Pither Siing
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Kepatuhan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

We the undersigned:

1. *Name* : *F. Zendrato*
   Office Address : *Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Ir. Sadar Sebayang*
   Office Address : *Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia*
   Position : *Business Director*
3. *Name* : *Rudhy Dharma*
   Office Address : *Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia*
   Position : *Financial Director*
4. *Name* : *Isak Samuel Wopari*
   Office Address : *Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia*
   Position : *Operations Director*
5. *Name* : *Ir. Jefri Sanni Pither Siing*
   Office Address : *Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia*
   Position : *Compliance Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with indonesian financial accounting standards, and:*
   a. *All information in the PT Bank Pembangunan Daerah Papua financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The PT Bank Pembangunan Daerah Papua financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact;*
3. *We are responsible for the PT Bank Pembangunan Daerah Papua internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

KANTOR PUSAT
Jln. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111
Kotak Pos 1536, Telp. (0967) 532011 (hunting)
Fax. 0967 – 533207, Telex. 76198

info@bankpapua.co.id
www.bankpapua.co.id

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua

bersama membangun Indonesia

Jayapura, 4 Maret 2020 / *March 4, 2020*

Direktur Utama /
President Director

F. Zendrato

Direktur Bisnis /
Business Director

Ir. Sadar Sebayang

Direktur Keuangan /
Financial Director

Rudhy Dharma

Direktur Operasional /
Operations Director

Isak Samuel Wopari

Direktur Kepatuhan /
Compliance Director

Ir. Jefri Sanni Pither Siing

KANTOR PUSAT
Jln. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111
Kotak Pos 1536, Telp. (0967) 532011 (hunting)
Fax. 0967 – 533207, Telex. 76198

info@bankpapua.co.id
www.bankpapua.co.id

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2019
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2019
And for the Year then Ended
With Independent Auditors' Report

Daftar Isi	*Halaman / Page*	*Table of Contents*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4	*Statement Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 - 8	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	9 - 110	*Notes to the Financial Statements*

*****

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

No: 00071/2.1000/AU.1/07/0136-3/1/III/2020

Laporan Auditor Independen
Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

The Shareholders, Boards of Commisioners and Directors
PT Bank Pembangunan Daerah Papua

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, the statements of profit and loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

MEMBER TIAG
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Papua as of December 31, 2019, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

Drs. Hertanto, M.S. Ak, CPA., CPMA., CA.
Register Akuntan Publik / *Register of Public Accountant* No. AP.0136

Jakarta, 4 Maret / March *4, 2020*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December* 2019	2018	
ASET				***ASSETS***
Kas	*2d,3*	1,700,443,554,400	996,584,733,247	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	*2d,2e,4*	2,178,386,178,747	1,589,283,079,427	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - Pihak ketiga		28,726,299,339	7,874,890,109	*Current accounts with other banks Third parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	2d,2e,5	28,726,299,339	7,874,890,109	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - Pihak ketiga		4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	*Placements with Bank Indonesia and other banks Third parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	2d,2f,6	4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	
Efek - efek - Pihak ketiga		965,254,034,558	975,161,491,787	*Marketable securities Third parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: allowance for impairment losses*
	2d, 2g, 2v,7	965,254,034,558	975,161,491,787	
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Pihak ketiga		3,163,385,119,775	1,315,051,787,700	*Marketable securities purchased under agreements to resell Third parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	2d,2h 2v,8	3,163,385,119,775	1,315,051,787,700	
Pinjaman yang diberikan:				*Loans:*
- Pihak berelasi		1,508,983,608,968	971,821,917,195	*Related parties -*
- Pihak ketiga		14,551,694,455,730	13,175,395,466,576	*Third parties -*
Jumlah Pinjaman yang diberikan		16,060,678,064,698	14,147,217,383,771	*Total loans*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	*2j,9m*	(568,875,538,393)	(739,513,466,600)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2c,2d, 2i,2v,9	15,491,802,526,305	13,407,703,917,171	
Aset tetap		601,490,858,668	595,995,543,805	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	*2j,2u,2v, 10*	(354,585,765,116)	(346,237,862,997)	*Less: Accumulated depreciation*
		246,905,093,552	249,757,680,808	
Aset Lain-lain	*2d, 2u, 2k, 11*	242,765,749,681	275,608,521,825	*Other Assets*
JUMLAH ASET		**28,183,685,506,901**	**22,456,758,784,122**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December* 2019	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	*2d,2l,12, 18*	1,353,706,069,617	828,362,191,181	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	*2c,2d,2*			*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	*m,2n,*	7,052,242,032,425	4,739,773,151,610	*Related parties -*
- Pihak ketiga	*13*	15,792,692,443,411	13,189,287,683,665	*Third parties -*
Simpanan dari bank lain	*2c,2d,*			*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	*2m,2n,14*	115,954,491,073	64,754,831,518	*Third parties -*
Pinjaman yang diterima				*Borrowings*
- Pihak ketiga	*2d,2o,15*	77,564,357,372	198,757,242,619	*Third parties -*
Liabilitas lain-lain	*2s, 2v, 2t, 17*	353,379,310,861	264,956,265,286	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**24,745,538,704,759**	**19,285,891,365,879**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Seri A - nilai nominal Rp5.000 per saham				*Class A- Rp5,000 per share*
Seri B - nilai nominal Rp5.000 per saham				*Class B- Rp5,000 per share*
Modal dasar				*Share capital - authorized*
Seri A - 728.000 saham				*Class A - 728,000 shares*
Seri B - 72.000 saham				*Class B - 72,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and fully paid*
Seri A				*Class A*
- 2019 : 449.167 saham				*2019 : 449,167 shares -*
- 2018 : 395.296 saham				*2018 : 395,296 shares -*
Seri B				*Class B*
- 2019 : 10.993 saham				*2019 : 10,993 shares -*
- 2018 : 10.893 saham	*19*	2,300,800,000,000	2,030,945,000,000	*2018 : 10,893 shares -*
Tambahan modal disetor	*19*	133,311,022,106	173,233,073,144	*Additional paid-in capital*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek - efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak		75,141,853	2,979,016,050	*Unrealized gain on available-for-sale marketable securities and Government Bonds net of tax*
Saldo Laba				*Retained earnings*
- Telah ditentukan penggunaannya		997,059,831,208	909,629,475,278	*Appropriated reserve -*
- Belum ditentukan penggunaannya		6,900,806,975	54,080,853,771	*Unappropriated reserve -*
JUMLAH EKUITAS		**3,438,146,802,142**	**3,170,867,418,243**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**28,183,685,506,901**	**22,456,758,784,122**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year then Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December* 2019	2018	
PENDAPATAN BUNGA				***INTEREST INCOME***
Pendapatan bunga	*2p,21*	1,997,425,451,415	1,892,775,470,925	*Interest income*
Beban bunga	*2p,22*	(415,346,588,236)	(351,762,508,984)	*Interest expense*
Jumlah pendapatan bunga - bersih		**1,582,078,863,179**	**1,541,012,961,940**	***Total interest income - net***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan operasional lainnya	*21*	144,528,875,917	123,171,046,562	*Other operational income*
Pendapatan provisi dan komisi	*2q, 21*	100,552,130,618	100,228,155,761	*Provision and commission income*
Beban provisi dan komisi	*22*	(1,915,620,665)	(1,688,732,694)	*Provision and commission expense*
Jumlah pendapatan operasional lainnya - bersih		**243,165,385,870**	**221,710,469,630**	***Total other operating income - net***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES***
Aset produktif	*23*	(178,021,160,319)	(484,460,936,769)	*Productive assets*
Aset non produktif	*23*	(2,601,750,000)	(46,230,800,000)	*Non productive assets*
Jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai		**(180,622,910,319)**	**(530,691,736,769)**	***Total allowance for impairment losses***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Tenaga kerja dan tunjangan	*26*	(580,075,743,000)	(487,233,629,998)	*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi	*25*	(503,398,768,152)	(504,907,598,153)	*General and administrative*
Penyusutan dan amortisasi	*24*	(27,903,653,414)	(44,469,862,115)	*Depreciation and amortization*
Imbalan manfaat karyawan	*30*	(234,595,943,050)	(49,881,525,380)	*Post-employment benefits*
Jumlah beban operasional lainnya		**(1,345,974,107,616)**	**(1,086,492,615,646)**	***Total other operating expenses***
LABA OPERASIONAL		**298,647,231,114**	**145,539,079,155**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL				***NON OPERATING INCOMES (EXPENSES)***
Pendapatan bukan operasional	*27*	50,270,555,399	141,621,745,570	*Non operating incomes*
Beban bukan operasional	*28*	(6,293,595,499)	(3,367,763,583)	*Non operating expense*
Jumlah pendapatan (beban) bukan opersional		**43,976,959,900**	**138,253,981,988**	***Total non operating income (expenses)***
LABA SEBELUM PAJAK		**342,624,191,014**	**283,793,061,143**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSE***
Pajak kini	*18c*	(111,332,706,500)	(65,225,893,000)	*Current income tax*
Manfaat pajak tangguhan	*18c,18e*	18,745,777,450	8,721,681	*Deffered income tax*
Jumlah beban pajak		**(92,586,929,050)**	**(65,217,171,319)**	***Total income tax expense***
LABA TAHUN BERJALAN		**250,037,261,964**	**218,575,889,824**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year then Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December* 2019	2018	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE):***
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(93,699,697,573)	188,385,891,477	*Remeasurement of post employment benefit*
Beban pajak Tangguhan atas Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		15,058,278,637	(47,096,472,869)	*Deffered expense tax Remeasurement of post employment benefit*
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga		(3,871,832,263)	3,920,837,151	*Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan atas Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga		967,958,066	(980,209,288)	*Deffered income tax Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Jumlah penghasilan komprehensif lain		**(81,545,293,133)**	**144,230,046,471**	***Total other comprehensive income***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**168,491,968,831**	**362,805,936,295**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM				***EARNING PER SHARE***
Laba operasional	*32*	613,463	330,144	*Operating income*
Laba bersih	*32*	513,611	495,822	*Net income*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Year Ended December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / *Notes*	Modal Disetor / *Paid-in Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan / *Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Government Bonds Net of Deferred Tax*	Saldo Laba / *Retained Earning*			Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	*Description*
					Dicadangkan /*Appropriated* Cadangan Umum dan Wajib/ *General and Legal Reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unapproprited*		
Saldo per 31 Desember 2018		**2,030,945,000,000**	**173,233,073,144**	**2,979,016,050**	**909,629,475,278**	**54,080,853,771**	**3,170,867,418,243**	***Balance December 31, 2018***
Setoran Modal Sebelum RUPS 2019		-	(39,922,051,038)	-	-	-	(39,922,051,038)	*Paid in capital before GSHM 2018*
Pengesahan Setoran Modal oleh RUPS		269,855,000,000	-	-	-	-	269,855,000,000	*Shareholders' approval on paid in capital*
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	(2,903,874,197)	-	(78,641,418,936)	(81,545,293,133)	*Comprehensif Income*
Pembagian Laba Tahun 2018								*Net income 2018 distribution:*
Cadangan Umum	*20*	-	-	-	87,430,355,930	(87,430,355,930)	-	*General reserve*
Dividen	*20*	-	-	-	-	(131,145,533,894)	(131,145,533,894)	*Dividend*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	250,037,261,964	250,037,261,964	*Current year net income*
Saldo per 31 Desember 2019		**2,300,800,000,000**	**133,311,022,106**	**75,141,853**	**997,059,831,208**	**6,900,806,975**	**3,438,146,802,142**	***Balance December 31, 2019***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas, neto setelah pajak sebesar Rp60.233.114.547

opropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to Rp60,233,114,547

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

www.bankpapua.co.id
info@bankpapua.co.id
Call BANK PAPUA 0967-532011

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
Year Ended December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / *Notes*	Modal Disetor / *Paid-in Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan / *Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Government Bonds Net of Deferred Tax*	Saldo Laba / *Retained Earning*		Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	*Description*
					Dicadangkan /*Appropriated* Cadangan Umum dan Wajib/ *General and Legal Reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unapproprited*		
Saldo per 31 Desember 2017		**1,907,850,000,000**	**95,306,705,785**	**38,388,187**	**864,320,411,214**	**(192,511,794,502)**	**2,675,003,710,684**	***Balance December 31, 2017***
Setoran Modal Sebelum RUPS 2018		-	77,926,367,359	-	-	-	77,926,367,359	*Paid in capital before GSHM 2018*
Pengesahan Setoran Modal oleh RUPS		123,095,000,000	-	-	-	-	123,095,000,000	*Shareholders' approval on paid in capital*
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	2,940,627,863	-	141,289,418,608	144,230,046,471	*Comprehensif Income*
Pembagian Laba Tahun 2017								*Net income 2016 distribution:*
Cadangan Umum	*20*	-	-	-	45,309,064,064	(45,309,064,064)	-	*General reserve*
Dividen	*20*	-	-	-	-	(67,963,596,095)	(67,963,596,095)	*Dividend*
Laba (Rugi) bersih Tahun berjalan		-	-	-	-	218,575,889,824	218,575,889,824	*Current year net income*
Saldo per 31 Desember 2018		**2,030,945,000,000**	**173,233,073,144**	**2,979,016,050**	**909,629,475,278**	**54,080,853,771**	**3,170,867,418,243**	***Balance December 31, 2018***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas, neto setelah pajak sebesar Rp141.289.418.608

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to Rp141,289,418,608*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS
Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December* 2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi		2,105,410,505,280	1,895,880,757,030	*Recipts From Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi		(417,223,447,737)	(353,451,241,678)	*Payment of Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Kepada Karyawan		(824,750,320,453)	(537,115,155,378)	*Payment of Employee's Benefit*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi		(313,266,743,482)	(443,319,840,528)	*Payment of General and Administrative Expenses*
Penerimaan Kredit Hapus Buku		105,547,555,131	97,122,869,647	*Recoveries from Loan Debt Written - off*
Penerimaan Operasional Lainnya		38,981,320,786	117,406,657,825	*Receipts from Operating Income*
Penerimaan Bukan Operasional		44,360,476,220	4,664,828,389	*Receipts from Non Operating Income*
Penerimaan (Pembayaran) Perpajakan		16,767,294,138	(61,587,757,625)	*Receipts (Payments) of Taxation*
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi		**755,826,639,883**	**719,601,117,682**	***Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities***
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:				*Decreasing (increasing) in assets:*
Penempatan pada Bank Lain	*6*	(526,284,268,496)	(689,794,898,223)	*Placement with Other Bank*
Surat Berharga	*7*	7,003,583,032	628,456,949,382	*Marketable Securities*
Reverse Repo	*8*	(1,848,333,332,075)	(307,464,726,240)	*Reverse Repo*
Kredit yang Diberikan	*9*	(2,262,119,769,453)	(1,993,972,496,220)	*Loans*
Aset Lain-lain	*11*	(131,154,308,305)	135,064,159,259	*Other Assets*
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi		**(4,760,888,095,297)**	**(2,227,711,012,042)**	***Decreasing (Increasing) in Assets***
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:				*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:*
Simpanan		4,967,073,300,116	1,338,240,256,829	*Deposits*
Liabilitas Segera	*18*	525,343,878,436	135,044,309,152	*Current Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	*17*	(127,553,456,110)	61,813,303,932	*Other Liabilities*
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi		**5,364,863,722,442**	**1,535,097,869,913**	***Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities***
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1,359,802,267,028**	**26,987,975,553**	***Cash Net Provided from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	*10*	(23,820,489,146)	(9,802,786,849)	*Acquisition of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	*10*	237,022,000	7,550,000	*Proceeds from Sale of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih (digunakan) Diperoleh dari Aktivitas Investasi		**(23,583,467,146)**	**(9,795,236,849)**	***Net Cash (Used In) Provided From Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan (Pelunasan) Pinjaman yang Diterima	*15*	(121,192,885,247)	190,162,619,328	*Receiving (Settlement) of Borrowing*
Penambahan Modal Disetor	*19*	229,932,948,962	201,021,367,359	*Additional Paid up Capital*
Pembayaran Deviden	*20*	(131,145,533,894)	(67,963,596,095)	*Payment of Dividend*
Arus Kas Bersih (Digunakan) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**(22,405,470,179)**	**323,220,390,592**	***Net cash (used in) provided from Financing Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December* 2019	2018	
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**1,313,813,329,703**	**340,413,129,296**	***Net Increase in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas awal tahun	*3*	2,593,742,702,783	2,253,329,573,487	*Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year*
Kas dan Setara Kas akhir tahun		**3,907,556,032,486**	**2,593,742,702,783**	***Cash and Cash Equivalents at The End of the Year***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and Cash Equivalents at the End of The Year:*
Kas		1,700,443,554,400	996,584,733,247	*Cash*
Giro Bank Indonesia	*4*	2,178,386,178,747	1,589,283,079,427	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank Lain	*5*	28,726,299,339	7,874,890,109	*Current Accounts with other banks*
Jumlah kas dan setara kas		**3,907,556,032,486**	**2,593,742,702,783**	*Total cash and cash equivalents*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") pada awalnya didirikan di Indonesia dengan nama "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat", berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 tanggal 13 April 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar Rp4.000.000 dan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor: 1 Tahun 1970.

Selanjutnya "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" pada tahun 1970, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 7 Tahun 1976 Tanggal 30 Oktober 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, dengan modal dasar menjadi Rp500.000.000.

Kemudian "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Papua" pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan modal dasar Rp150.000.000.000.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank Papua melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Sirkulasi Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., tanggal 12 Agustus 2014 dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor: AHU-28059.40.22-2014 Tanggal 5 September 2014, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Modal Dasar Bank Papua menjadi Rp4.000.000.000.000.

b. Lingkup Usaha

Berdasarkan anggaran dasar, tujuan Bank Papua adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai tujuannya ini, Bank Papua menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Menyalurkan kredit;
- Menerbitkan Surat Pengakuan Utang;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Bank Papua

In the beginning PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") was established as local bank under the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" according to the Decree of Governor of West Irian Province, No. 37/GIB/1966 dated April 13, 1966 concerning Provincial Development Bank with a paid up capital of Rp4,000,000 and Local Regulation of Irian Jaya Province No. 1 year 1970.

Further, the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" changed into "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" according to Province Regulation of Irian Jaya (First Degree) No. 7 year 1976 dated October 30, 1976 concerning Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya with paid up capital in the amount of Rp500,000,000.

Subsequently "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" change its name again into "Bank Pembangunan Daerah Papua" made in 2002 according to Local Province Regulation No.2 year 2002 dated May 21, 2002 concerning Bank Pembangunan Daerah Papua with a paid up capital of Rp150,000,000,000.

In the latest amendment made to Bank Papua Articles of Association as refer to the Deed of Declaration of the General Meeting of Stockholders made in the circulation letter about the changes of article of association of PT Bank Pembangunan Daerah Papua on notarial deed dated July 21, 2013 of Maryatie Simanjuntak, S.H., which already approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05850.40.21-2014 and No. AHU-28059.40.22-2014 dated September 5, 2014 concerning the approval on changes of the article of association, paid capital to become Rp4,000,000,000,000 of the Bank Papua.

b. Scope of Business

Based on the articles of association, the objectives of Bank Papua is to provide banking services. To achieve this objective, Bank Papua provides its services as follows:

- *Accumulating fund from people in the form of current account, time deposit, certificate deposit, saving and / or other form similarly;*
- *Providing loans;*
- *Issues letter of debt;*
- *Purchase, sell, or provide guarantees on its own risk for the interest of its customers;*
- *Transfer of money on its own funds or its customers;*
- *Placement of fund, to borrow fund from or to lend fund to other banks, by issuing a note, thru telecomunication either with wessel or check or other devices;*
- *Receiving payment from receivable of marketable securities and perform yield calculations with or between concerning parties;*
- *Provides safe deposit services for valuable goods and marketable security;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Lingkup Usaha (lanjutan)

- Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Garansi);
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank Papua berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Papua memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor cabang, sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama Jayapura
2. Kantor Cabang Utama Manokwari
3. Kantor Cabang Jakarta
4. Kantor Cabang Sorong
5. Kantor Cabang Merauke
6. Kantor Cabang Biak
7. Kantor Cabang Fak Fak
8. Kantor Cabang Wamena
9. Kantor Cabang Serui
10. Kantor Cabang Nabire
11. Kantor Cabang Timika
12. Kantor Cabang Sentani
13. Kantor Cabang Kaimana
14. Kantor Cabang Teminabuan
15. Kantor Cabang Bintuni
16. Kantor Cabang Sarmi
17. Kantor Cabang Arso
18. Kantor Cabang Waisai
19. Kantor Cabang Mulia
20. Kantor Cabang Enarotali
21. Kantor Cabang Agats
22. Kantor Cabang Aimas
23. Kantor Cabang Keppi
24. Kantor Cabang Karubaga
25. Kantor Cabang Waren
26. Kantor Cabang Oksibil

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Scope of Business (continued)

- *Accepting placement of funds on behalf of other party based on an agreement;*
- *Conducting placement of fund from customer to another, in form of marketable securities which is not recorded in stock exchange;*
- *Buying collateral through auction agency, either all or in part in the event the debtor does not fulfill its obligations to Bank Papua, provided that collateral is liquidated immediately purchased;*
- *Conduct activities of equity participation in banks or other companies in the field of venture, securities companies, insurance companies, clearing (settlement) companies in compliance with the terms defined by the regulator;*
- *Conduct activities to address the temporary capital due to credit failure, in condition that Bank Papua must be pull back its shares to meet the provisions stipulated by the regulator;*
- *Act as a founder of pension fund in accordance with provision on valid regulation concerning pension fund;*
- *Supporting Local Government to develop Bank Perkreditan Rakyat (Citizen Credit Bank) owned by Local Province Government (First Degree) and Local Regency Government (Second Degree) of Papua and West Papua;*
- *Other activity which is commonly done by bank as long as agree with valid regulations;*

c. Office Network

Bank Papua's head office is located at Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. As of December 31, 2018, Bank Papua has 36 (thirty six) branch offices, as follows:

1. *Jayapura Main Branch Office*
2. *Manokwari Main Branch Office*
3. *Jakarta Branch Office*
4. *Sorong Branch Office*
5. *Merauke Branch Office*
6. *Biak Branch Office*
7. *Fak Fak Branch Office*
8. *Wamena Branch Office*
9. *Serui Branch Office*
10. *Nabire Branch Office*
11. *Timika Branch Office*
12. *Sentani Branch Office*
13. *Kaimana Branch Office*
14. *Teminabuan Branch Office*
15. *Bintuni Branch Office*
16. *Sarmi Branch Office*
17. *Arso Branch Office*
18. *Waisai Branch Office*
19. *Mulia Branch Office*
20. *Enarotali Branch Office*
21. *Agats Branch Office*
22. *Aimas Branch Office*
23. *Keppi Branch Office*
24. *Karubaga Branch Office*
25. *Waren Branch Office*
26. *Oksibil Branch Office*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Jaringan Kantor (lanjutan)

27. Kantor Cabang Surabaya
28. Kantor Cabang Makassar
29. Kantor Cabang Tanah Merah
30. Kantor Cabang Kasonaweja
31. Kantor Cabang Yogyakarta
32. Kantor Cabang Abepura
33. Kantor Cabang Ilaga
34. Kantor Cabang Waghete
35. Kantor Cabang Wasior
36. Kantor Cabang Dekai

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***The Board of Commissioners***
Komisaris Utama	T.E.A Hery Dosinaen,S.IP, M.KP, M.si	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*President Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dortheis Sesa,S.E.	*President Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	Drs.Nataniel Dominggus Mandacan	*President Non Independent Commissioner*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	F. Zendrato	*President Director*
Direktur Bisnis	Ir. Sadar Sebayang	*Business Director*
Direktur Keuangan	Rudhy Dharma, SE	*Financial Director*
Direktur Operasional	Isak Semuel Wopari, SE.MM	*Operations Director*
Direktur Kepatuhan	Ir. Jefri Sanni Pither Siing	*Compliance Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2019 didasarkan oleh:

1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor:41 tanggal 29 Maret 2019;
2) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 01/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 02/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Non Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) Surat Keputusan RUPS Nomor: 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) Surat Keputusan RUPS Nomor: 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
8) Surat Keputusan RUPS Nomor: 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

1. *GENERAL INFORMATION (continued)*

c. *Office Network (continued)*

27. *Surabaya Branch Office*
28. *Makassar Branch Office*
29. *Tanah Merah Branch Office*
30. *Kasonaweja Branch Office*
31. *Yogyakarta Branch Office*
32. *Abepura Branch Office*
33. *Ilaga Branch Office*
34. *Waghete Branch Office*
35. *Wasior Branch Office*
36. *Dekai Branch Office*

d. *Organizational and Management Stucture*

The Board of Commissioners, Board of Directors and the Audit Committee of Bank Papua as of December 31, 2019 are as follows:

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2019 based upon:

1) *Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.41 dated March 29, 2019;*
2) *GMS Decree No.03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 on the Appointment of President Commisioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
3) *GMS Decree No. 01/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
4) *GMS Decree No. 02/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
5) *GMS Decree No. 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
6) *GMS Decree No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 on the Appointment of Organizational Stucture of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
7) *GMS Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
8) *GMS Decree No. 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Business Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2019 didasarkan oleh: (lanjutan)

9) Surat Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
10) Surat Keputusan RUPS Nomor: 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
11) Surat Keputusan RUPS Nomor: 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***The Board of Commissioners***
Komisaris Utama	T.E.A Hery Dosinaen,S.IP, M.KP, M.si	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*President Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dortheis Sesa,S.E.	*President Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	Drs.Nataniel Dominggus Mandacan	*President Non Independent Commissioner*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	F. Zendrato	*President Director*
Direktur Bisnis	Ir. Sadar Sebayang	*Business Director*
Direktur Keuangan	Rudhy Dharma, SE	*Financial Director*
Direktur Operasional	Isak Semuel Wopari, SE.MM	*Operations Director*
Direktur Kepatuhan	Ir. Jefri Sanni Pither Siing	*Compliance Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2018 didasarkan oleh:

1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor:54 tanggal 27 April 2018;
2) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 01/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 02/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) Surat Keputusan RUPS-LB Nomor: 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Non Independen Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) Surat Keputusan RUPS Nomor: 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) Surat Keputusan RUPS Nomor: 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
8) Surat Keputusan RUPS Nomor: 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
9) Surat Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2019 based upon: (continued)

9) GMS Decree No. 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
10) GMS Decree No. 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Operations Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
11) GMS Decree No. 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Compliance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

The Board of Commissioners, Board of Directors and the Audit Committee of Bank Papua as of December 31, 2018 are as follows:

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2018 based upon:

1) Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.54 dated April 27, 2018;
2) GMS Decree No.03/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 on the Appointment of President Commisioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) GMS Decree No. 01/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) GMS Decree No. 02/SK/SIRKULER-BPD/VI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) GMS Decree No. 04/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018 on the Appointment of the Board of Commissioners Non Independent PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) GMS Decree No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 on the Appointment of Organizational Stucture of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) GMS Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
8) GMS Decree No. 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Business Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
9) GMS Decree No. 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2018 didasarkan oleh: (lanjutan)

10) Surat Keputusan RUPS Nomor: 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
11) Surat Keputusan RUPS Nomor: 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 48/DIR-BPD/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode 2018 sampai 2021.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2018 based upon: (continued)

10) GMS Decree No. 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Operations Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
11) GMS Decree No. 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Compliance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Based on the Decree of Directors No. 48/DIR-BPD/VII/2017 dated July 30, 2018 concerning Appointment of Member of Board of Commissioner Committee of the PT Bank Pembangunan Daerah Papua for period 2018 until 2021.

Komite Remunerasi Dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Chairman*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	*Member*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Dortheis Sesa, SE	*Member*
Anggota	Octovina Paulina	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Chairman*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	*Member*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Dortheis Sesa, S.E.	*Member*
Anggota	Jonathan Sesa, S.E.	*Member*
Anggota	Ivan B. Simamora, S. Sos	*Member*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Dortheis Sesa, S.E.	*Chairman*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	*Member*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Member*
Anggota	Jonathan Sesa, S.E	*Member*
Anggota	Marthin Yanis Warikar, S.E	*Member*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 18.3/DIR-BPD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Based on the Decree of Directors No. 18.3/DIR-BPD/III/2019 dated March 25, 2019 concerning Appointment of Member of Board of Commissioner Committee of the PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Komite Remunerasi Dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Chairman*
Anggota	T.E.A Hery Dosinaen,S.IP, M.KP, M.si	*Member*
Anggota	Drs.Nataniel Dominggus Mandacan	*Member*
Anggota	Dortheis Sesa, SE.	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Chairman*
Anggota	T.E.A Hery Dosinaen,S.IP, M.KP, M.si	*Member*
Anggota	Drs.Nataniel Dominggus Mandacan	*Member*
Anggota	Dortheis Sesa, SE.	*Member*
Anggota	Jonathan Sesa, S.E	*Member*
Anggota	Ivant B. Simamora, S.Sos.	*Member*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Dortheis Sesa, SE.	*Chairman*
Anggota	T.E.A Hery Dosinaen,S.IP, M.KP, M.si	*Member*
Anggota	Drs.Nataniel Dominggus Mandacan	*Member*
Anggota	Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, S.E., M.M	*Member*
Anggota	Jonathan Sesa, S.E	*Member*
Anggota	Marthin Yanis Warikar, S.E	*Member*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Jumlah pegawai Bank Papua adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	Tetap/ *Permanent*	Tidak tetap/ *Non-Permanent*	Total	
2019	2331	399	2,730	*2019*
2018	2434	6	2,440	*2018*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

The members and composition of the Board of Commissioners and Directors were already approved by Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

The number of employees of Bank Papua are as follows (unaudited):

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank Papua ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 6 Maret 2020.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank Papua dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia, juga standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of Bank Papua were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on March 6, 2020.

The principal accounting policies adopted and consistently applied by Bank Papua, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2019 are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements for the year ended December 31, 2019 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared in accordance with prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority, as well as accounting standards and Accounting Guidelines for Indonesian Banking Sector (PAPI) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, as except available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilites (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting.

The cash flows statement were prepared by direct method whereby cash flow classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents classification consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other bank and Certificates of Bank Indonesia maturing within three months from the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

Currency used for this report in this financial statements is the Indonesia Rupiah (Rp). All figures presented in the financial statements, unless otherwise stated specifically, are full in Rupiah amount.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2019, Bank menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing - masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

1) Penyesuaian 2018 PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis
2) Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja
3) Penyesuaian 2018 PSAK No. 26: Biaya Pinjaman
4) Amandemen 2018 PSAK No. 46: Pajak Penghasilan
5) Penyesuaian 2018 PSAK No. 66: Pengaturan Bersama
6) ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
7) ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank Papua.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika:

a. suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank Papua; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank Papua; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank Papua;
b. suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank Papua;
c. suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank Papua sebagai *venturer*;
d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank Papua;
e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat individu yang diuraikan dalam huruf (a) atau (d);
f. suatu pihak dalam entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam huruf (a) atau (e);
g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank Papua atau entitas terkait Bank Papua.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

On 1 January 2019, the Bank adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

1) Annual Improvement 2018 of SFAS No. 22: Business Combination
2) Amendments of SFAS No. 24: Employee Benefits
3) Annual Improvement 2018 of SFAS No. 26: Loan Costs
4) Amendments of SFAS No. 46: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
5) Annual Improvement 2018 of SFAS No.66: Joint Arrangements
6) ISFAS No. 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration
7) ISFAS No. 34: Uncercainty over Income Tax Treatments

c. Transaction with Related Parties

In the normal course of its business, Bank Papua implemented the changes on SFAS No. 7 "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has a impact to the related disclosure in the financial statements of Bank Papua.

The Bank Papua consider the following as their related parties:

a. a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or controlled by, under common control with Bank Papua, (ii) has significant influence over Bank Papua, or (iii) has joint control over Bank Papua;
b. an entity which is a member of the same group as Bank Papua;
c. an entity which is a joint ventures of a third party in which Bank Papua have ventured in;
d. a member of key management personel of Bank Papua;
e. a close family member of the person described in clause (a) or (d);
f. an entity which is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (a) or (e);
g. an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either Bank Papua or an entity related to Bank Papua.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank Papua terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, kredit yang diberikan, dan aset lain-lain (piutang lain-lain dan piutang bunga).

Liabilitas keuangan Bank Papua terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lain-lain.

(i) Klasifikasi

Bank Papua mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan amortisasi.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank Papua terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaction with Related Parties (continued)

This transaction is made on the basis of terms agreed by both parties, where such terms are not the same as other transactions which may be undertaken with unrelated parties.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the notes to financial statements those that relevant and its the detail are presented in Note 33 of the financial statements.

d. Financial Assets and Liabilities

Bank Papua's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, securities purchased under repo agreement, loans, and other assets (other receivables and interest receivables).

Bank Papua's financial liabilities consist of current liabilities, deposits from customers, deposits from other banks, borrowings from others, and other liabilities.

(i) Classification

Bank Papua classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value based on comprehensive income, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets as being held for trading purposes;*
- *Loans and receivables;*
- *Held-to-maturity investments; and*
- *Available-for-sale financial assets.*

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- *Financial liabilities which recognized at Fair Value based on comprehensive income, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Financial liabilities measured at amortized cost.*

Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consist of financial assets and liabilities that Bank Papua acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the statement of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank Papua untuk segera dijual dalam waktu dekat yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank Papua mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset Keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank Papua mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untukinstrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif saat pengakuan liabilitas.

Bank Papua menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that Bank Papua intends to sell immediately or in the short term which are classified as held for trading, and those that initial recognition designates are measured at fair value based on income;*
- *those that Bank Papua upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or*
- *those for which Bank Papua may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables had its value have declined, which shall be classified as available-for-trading.*

Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments consists of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which Bank Papua has the positive intent and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

Available-for-sale-financial assets

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

Other financial liabilities

Other financial liabilities are the financial liabilities that are not held for trading nor designated at fair value based on comprehensive income upon the liability recognition.

Bank Papua determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan lain (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Other financial liabilities (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ *Category as defined by SFAS 55*		Golongan/*Class*	Subgolongan/ *Subclasses*
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/*Financial assets held for trading*	Efek-efek/*Marketable securities*
			Obligasi Pemerintah/ Government Bonds
			Tagihan derivatif - Tidak terkait lindung nilai/*Derivative receivables – Non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Kas/*Cash*	
		Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain/*Current accounts with other banks*	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/*Placements with other banks and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under agreements to resell*	
		Pinjaman yang diberikan/*Loans*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
			Piutang bunga/*Interest receivables*
			Lain-lain/*Others*
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/*Held-to-maturity investments*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/*Available-for-sale financial assets*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
		Penyertaan saham/*Equity investments*	
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial liabilities held for trading*	Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative payables - non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas segera/*Obligation due immediately*	
		Simpanan nasabah/*Deposits from customers*	
		Simpanan dari bank lain/*Deposits from other banks*	
		Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*	Setoran jaminan/*Security deposit*
			Utang bunga/*Interest payable*
			Utang nasabah/*Payable to customers*
			Lain-lain/*Others*
		Pinjaman yang diterima/*Borrowings*	
Kontrak jaminan keuangan/*Financial guarantee contract*		Garansi bank yang diberikan/*Bank guarantees issued*	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Bank Papua berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank Papua, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that Bank Papua commit to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

Bank Papua, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value based on the profit or loss (fair value option). Subsequently, this designation can be changed into loans and receivables if hey meet the terms of the loans and there is intention and ability to hold for the foreseeable future or until maturity. The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates inconsistency valuation and recognition or accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of the financial instruments portfolio whereby its the risks are managed and reported to key management based on the fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan
- (a) Bank Papua telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank Papua tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Bank Papua telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*) dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank Papua yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank Papua dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iii) Subsequent measurement

a. Financial assets under classification of available-for-sale and financial assets and liabilities recognized at fair value through profit and loss are subsequently measured at its fair value.

b. Loans and receivables and held-tomaturity investments and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and*
- *Either (a) Bank Papua has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) Bank Papua has neither transferred nor retained substantially all the risks and substantially all the risks and reward of the asset, but has transferred control of the asset.*

When Bank Papua has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of Bank Papua continuing involvement on the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between Bank Papua and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statements of comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank Papua tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank Papua tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iv) Discontinue of recognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Where an existing financial liability is replaced by another instrument from the same lender at a substantially different conditions, or at the condition of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference resulted from such an arrangement are recognized in the statements of comprehensive income respectively.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest method.

b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

(vi) Reclassification of financial assets

Bank Papua tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank Papua cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 (two) preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity invesments) other than sales or reclassifications that:

a. are so close to maturity or to the repurchase date of financial assets whereby changes on the rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

b. terjadi setelah Bank Papua telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank Papua telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank Papua, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank Papua.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank Papua memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar *(arm's length transaction)* pada tanggal pengukuran.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

b. occur after Bank Papua has collected substantially all of the original principal of the financial assets according to the scheduled payments or Bank Papua has recieved early repayments; or

c. are attributable to an isolated event that is beyond Bank Papua's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by Bank Papua.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial asset and at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offsetting to each other and the net amount is presented in the financial statement when, and only when, Bank Papua have a legal right to offset on the recognized amounts and there is an intention either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortization cost of a financial asset or a financial liability is the amount of the financial asset or liability valued at initial recognition less principal repayments, added or deducted by the cumulative amortization using the effective interest rate method calculated by the difference between the initial recognized value with the maturity value, and deducted by impaired value.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction on the measurement date.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model *risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-thecounter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity* instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

a. Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).

c. Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan , Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

d. *Financial Assets and Liabilities (continued)*

(ix) Fair value measurement (continued)

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

a. Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).

c. Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets

At each statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b. a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
c. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d. it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e. the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1) Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2) Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

f. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

The Bank first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Bank will determines whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for anindividually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

a) Financial assets carried at amortised cost

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

1) Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2) Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criterias, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

1. *Loans which individually have insignificant value;*
2. *Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*
3. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Based on the above criterias, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik *migration analysis method* untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method which is migration analysis to assess the allowance for impairment losses.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain an, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

c) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

b) Financial assets classified as available-for–sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a Bank of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognised in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available - for - sale shall not be reversed through profit or loss.

c) Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Bank Indonesia (OJK),Bank implements Bank Indonesia Regulation No.14/15/PBI/2012 dated 24 October 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 dated 21 August 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Commercial Banks" which is valid until 21 August 2017.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan masing-masing sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

f. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain terdiri dari *Deposito On Call (DOC)*, *Interbank Call Money (ICM),* dan Deposito Berjangka. Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI).

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

g. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek -efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, reksadana, dan obligasi lainnya yang diperdagangkan di bursa efek.

Surat pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Pengukuran Efek - efek dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek - efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bank Papua tidak mengklasifikasikan surat-surat berharga sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank Papua telah menjual atau mereklasifikasi surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

   Penurunan yang signifikan atau jangka panjang atas nilai wajar surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Current accounts with other banks and Bank Indonesia

Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

f. Placements with other banks and Bank Indonesia

Placements with other banks consist of Deposito On Call (DOC), Interbank Call Money (ICM), and Time Deposit. Placements with Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI).

Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

g. Marketable securities and Government bonds

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, government bonds, mutual funds, and bonds traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted for depending on their classification as available-for-sale, held-to-maturity or fair value through profit or loss.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Measurement of marketable securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. *Held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are carried at amortized cost using the effective interest method. Bank Papua does not classify marketable securities or Government Bonds as held-to-maturity financial assets if Bank Papua has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity marketable securities or Government Bonds before maturity other than sale or reclassifications that are defined in SFAF No. 55 (Revised 2011).*

   Any significant or prolonged decline in the fair value of securities classified as held-to-maturity and available-for-sale is charged to profit and loss in the current year.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

2. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat-surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

   Atas penjualan portofolio surat-surat berharga untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana surat-surat berharga tersebut dijual.

   Bank Papua melakukan pengukuran apabila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai.

   Untuk surat-surat berharga yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisir, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk surat-surat berharga yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat-surat berharga ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat-surat berharga tersebut. Bank Papua menggunakan harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal pelaporan sebagai nilai wajar.

   Penurunan nilai wajar permanen atas surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

   Surat berharga yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi telah tercatat sebagai penghasilan atau beban dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan atau beban.

   Pemindahan surat berharga dari kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemindahan, yang menjadi biaya amortisasi baru.

3. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Marketable securities and Government bonds (cotinued)

2. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year statements of comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the statements of comprehensive income according to the terms of the contract.

Upon sale of portfolio of their value through profit or loss marketable securities, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the marketable securities are sold.

Bank Papua assess if there is an indication of impairment using the impairment methodology.

For marketable securities that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchanges at the date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For marketable securities where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities. Bank Papua used quoted market prices by the stock exchange at the date close to the reporting date as their fair value.

Any permanent decline in the fair value of securities held-to-maturity and available-for-sale is charged to the statements of comprehensive income in the period incurred.

For securities reclassified from the held-to-trading category to held-to-maturity category, unrealized gains or losses on the date of the reclassification have been recorded as income or expense and therefore shall not be reversed. For securities reclassified from the held-to-maturity category to fair value through profit or loss category, unrealized gains or losses on the date of the reclassification are recorded as income or expense.

The reclassification of marketable securities from fair value through profit or loss category to held-to-maturity category is recorded at fair value at the reclassification date, which becomes the new amortised cost.

3. Marketable securities classified as available-for-sale investment are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale on marketable securities and Government Bonds are recognized in the statements of comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until these marketable securities are sold or experiencing impairment, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity must be recognized in the statements of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek - efek yang dibeli dengan Janji dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali di masa tertentu di masa yang akan datang tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Kas yang dibayarkan, termasuk bunga yang belum diamortisasi dicatat pada laporan keuangan dalam "Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali", yang menggambarkan substansi ekonomi transaksi sebagai pinjaman yang diberikan oleh Bank. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diamortisasi selama jangka waktu perjanjian menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat pada "Pendapatan bunga neto".

Jika kemudian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dijual kepada pihak ketiga, maka kewajiban untuk mengembalikan surat berharga tersebut dicatat sebagai short sale dalam "Liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan", dan diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang ada dimasukkan dalam "Pendapatan trading bersih".

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (*Reverse Repo*) diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Pinjaman yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan meliputi modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan, konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan meriviu kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Marketable securitas purchased under agreements to resell

Securities purchased under agreements to resell at a specified future date are not recognized in the statements of financial position. The consideration paid, including unamortized interest, is recorded in the statements of financial position, within "Marketable securities purchased under agreements to resell", reflecting the economic substance of the transaction as a loan by the Bank. The difference between the purchase and resale prices is amortized over the life of the agreement using the effective interest rate method and recorded in 'Net interest income'.

If securities purchased under agreements to resell are subsequently sold to third parties, the obligation to return the securities is recorded as a short sale in 'Financial liabilities held-for-trading' and measured at fair value with any gains or losses included in 'Net trading income'.

Marketable securities purchased under agreements to resell (Reverse Repo) are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Loans are classified as loans and receivables.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borned by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and / or a combination of both.

When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due.

Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang diberikan yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi pinjaman yang diberikan bermasalah dengan cara konversi pinjaman yang diberikan yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat pinjaman yang diberikan.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman yang diberikan yang baru dalam rangka restrukturisasi pinjaman yang diberikan dicatat sebagai pendapatan bunga ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase tagihan bunga *non-performing* yang dikapitalisasi terhadap pokok pinjaman yang diberikan baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loan restructuring (continued)

Losses occured due to loan restructuring in respect of the modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash flows which have been specified in the new terms of the loans, including both cash flow designated as interest and as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

For loan restructuring experiencing problems by way of converting loans given into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity or other financial instruments received, deducted by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the recorded value of the loan.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b. A breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
c. The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d. It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
   1) Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
   2) National or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Deferred interest, which is capitalized into loans given under new restructuring agreements, is recorded as deferred interest income and will be recognized as income at its amortized value proportionately based on the portion of interest receivable on non-performing that is capitalized into a loan principal times the instalments on loan repayment.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank Papua dalam restrukturisasi pinjaman yang diberikan bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank Papua dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Selama tahun 2019 dan 2018, Bank Papua melakukan hapus buku atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp306.297.605.058 dan Rp1.117.663.026.607

Penerimaan pokok (termasuk bunga) kredit hapus buku pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp112.950.286.758 dan Rp100.646.674.103

j. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap berupa bangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus, sedangkan untuk aset tetap selain bangunan disusutkan dengan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun / Years	
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*
Perlengkapan	4 - 8	*Office Equipment*

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

i. Loans (continued)

Loan restructuring (continued)

Expenses incurred by Bank Papua on loan restructuring experiencing problems is recorded as expenses as incurred.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when Bank Papua's relationship with the borrowers has ceased. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income.

During the year 2019 and 2018, Bank Papua has done any write-off for loans a amounted to Rp306,297,605,058 and Rp1,117,663,026,607

Recoveries from loan debt write-off (include interest) as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp112,950,286,758 and Rp100,646,674,103 respectively.

j. Fixed assets and depreciaton

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statements of income upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets as building are depreciated using the straight-line method, whereas fixed assets except building are depreciated using the double decline methode over their expected useful lives as follows:

Land are stated at cost and not depreciated.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

k. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" di dalam sub akun aset tidak produktif.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo pinjaman yang diberikan di atas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif.

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada bank lain.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets and depreciaton (continued)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in progress

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

k. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account, in the non productive asset sub account.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of collateral sales.

Maintenance and repair costs are charged as an expense in the statements of income when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Any such write-down is recognized in the statements of comprehensive income.

l. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities occured, either to public customers or other Banks.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at cost to be amortized.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank Papua.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

n. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 (sembilan puluh) hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Deposits from customers

Current accounts represent customer's cash saved in Bank Papua that may be used as instruments of payments, and which may be withdrawn at any time by cheque or other orders of payments or transfers.

Saving account represent deposits of customer in Bank Papua that may only be withdrawn over the counter and Automated Teller Machine (ATM) or via SMS banking to order overbooking on accounts when certain agreed conditions are met, but which mat not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in Bank Papua that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and Bank Papua.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at cost to be amortized using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

n. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 (ninety) days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at cost to be amortised using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

o. Borrowed fund

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at its fair value and subsequently measured at cost to be amortized using the effective interest rate method. Cost to be amortized is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank Papua mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian pinjaman yang diberikan di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pinjaman yang diberikan yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) dan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pada saat pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai.

q. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Interest income and interest expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in the statements of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instruments (or, where appropriate, a shorter period) to arrive at the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, Bank Papua estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not to include future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

If a financial asset or Bank Papua of similar financial assets has diminished its value as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans, and interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

q. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of comprehensive income.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan an. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

s. Imbalan kerja dan dana pensiun

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank Papua. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank Papua dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted asat reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed or objected against, when the results of the appeal and objection are determined.

s. Employee benefits and pension plan

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank Papua's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Imbalan kerja dan dana pensiun (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*. Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi nilai wajar aset program dan keuntungan aktuaria yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan / kerugian kurtailmen.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas liabilitas, keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan keputusan No. KEP-057/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Jumlah kontribusi untuk dana pensiun adalah sebesar 7,5% dari penghasilan karyawan dan donasi dari pihak bank sebesar 17,5%. Beban manfaat pensiun meliputi beban jasa kini, beban amortisasi, beban jasa lalu, dan beban amortisasi koreksi perhitungan aktuaria. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta dana pensiun yang masih aktif bekerja. Penilaian liabilitas aktuaria menggunakan metode *Aggregated Cost Method-Modified*.

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

t. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Employee benefits and pension plan (continued)

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method. The estimated benefit liability at statements of financial position date represents the present value of the defined benefits obligation at statements of financial position date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognized actuarial gains, non-vested past service costs, termination costs and curtailment gain or loss.

The post-employment benefits expense recognized during the current year consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees' contributions and expected return on plan assets.

The Bank run a defined benefit pension program for all its permanent employees. The Establishment of the Employee Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya has been legalized by the Minister of Finance with the decree No. KEP-057/KM.17/2000 dated Februari, 14, 2000. Each employee should contribute 7.5 % from salary and Bank Papua donates 17.5 % of the salary.The cost of pension plan cover current service cost, amortization cost, past service cost, and amortization expense on actuarial corrections. Amortization is applied using the straight line method during the prediction of average work period of the corresponding pension fund participants which are still in active work. Actuarial liability valuation uses modified Aggregated Cost Method.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. Furthermore, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year/period. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the aforementioned 10% threshold are recognized on a straightline method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Actuarial gains or losses and past service costs from other long-term employee benefits are recognized directly in the statement of comprehensive income of the current period.

t. Allowance for impairment losses on nonearning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b. perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c. Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

v. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan an dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Impairment of non-financial assets

The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

a. significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
b. significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c. significant negative industry or economic trends.

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

v. Use of Estimates and Consideration

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets
In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika
terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai hargapasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai
wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback model* atas *likuiditas volatilitas* untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Use of Estimates and Consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

a. Allowances for impairment losses of financial assets (continued)

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and ssumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for erivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

d. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

e. Umur ekonomis dari aset tetap

Bank Papua memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
2) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
3) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Use of Estimates and Consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

d. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

e. Useful life of premises and equipment

Bank Papua estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, astimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstences. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

f. Deferred Tax Asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

g. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicates that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
3) Significant negative industry or economic trends.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Use of Estimates and Consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

g. Impairment of non-financial assets

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

3. KAS

Kas seluruhnya dalam mata uang rupiah, terdiri dari:

	2019	2018	
Kas Besar dan Kas Kecil	1,404,330,954,400	830,725,233,247	*Cash on Strong Room and Teller*
Kas pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	296,112,600,000	165,859,500,000	*Cash In Automated Teller Machine (ATM)*
Jumlah Kas	**1,700,443,554,400**	**996,584,733,247**	***Total Cash***

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dimiliki oleh Bank.

3. *CASH*

All of cash are denominated in Rupiah, consists of:

The Cash as of 31 December 2019 and 2018, is owned by the Bank.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2019	2018	
Rupiah	2,178,386,178,747	1,589,283,079,427	*Rupiah*
Jumlah Giro pada Bank Indonesia	**2,178,386,178,747**	**1,589,283,079,427**	***Total Current Accounts With Bank Indonesia***

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 dan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018.

4. *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

Bank is required to maintain statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 which have been further amended with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated 25 June 2015, PBI No.17/21/PBI/2015 dated 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated 10 March 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated 18 August 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated 17 April 2017 and PBI No. 20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Giro Wajib Minimum:			*Statutory Reserves:*
- GWM Primer	6.00%	6.50%	*Primary Minimum Statutory Reserve -*
Harian *)	3.00%	3.50%	*Daily*
Rata - rata *)	3.00%	3.00%	*Average*
- PLM **)	4.00%	4.00%	*PLM **) -*

*) Mulai Berlaku per 1 Juli 2019

**) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) dan GWM LFR berubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM Bank dibawah minimum LFR dan
RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Rasio GWM Bank Papua pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Giro Wajib Minimum:			*Statutory Reserves:*
- GWM Primer	6.28%	6.55%	*Primary Minimum Statutory Reserve -*
Harian	3.00%	3.50%	*Daily*
Rata - rata	3.28%	3.05%	*Average*
- PLM	4.80%	4.24%	*PLM -*
- RIM	2.52%	1.37%	*RIM -*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank Papua telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

4. *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of December 31, 2019 dan 2018 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

*) Effective on July 1, 2019

**) *As of 16 July 2018, based on PBI No.20/4/PBI/ 2018 dated 29 March 2018, the term GWM Secondary changed to PLM (Macroprudential Liquidity Buffer) and the LFR GWM changed to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio)*

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve is the minimum reserves that should be maintained by the Bank, comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represent the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve (GWM) Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Statutory Reserves Ratios as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

As of December 31, 2019 and 2018, Bank Papua has complied with Bank Indonesia regulations concerning the Statutory Reserves Ratio for Commercial Bank.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	2019	2018	
Rupiah	28,726,299,339	7,874,890,109	*Rupiah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**28,726,299,339**	**7,874,890,109**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh giro pada bank lain merupakan transaksi giro dengan pihak ketiga.

5. *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK*

a. By currency

b. By relationship

As of December 31, 2019 and 2018, the current accounts with other banks ballances represent current account transactions with third parties.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / 5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK (continued)

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *By Bank Indonesia's collectibility classification*

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of December 31, 2019 and 2018 were classified as current.

Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

Bank Papua assessed impairment on current accounts with other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen Bank Papua berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperlukan.

Management of Bank Papua believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other bank's as of December 31 2019 and 2018 are not required.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

	2019	2018	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-	*Provision during the year*
Saldo akhir	**-**	**-**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Kisaran tingkat suku bunga per tahun / *Range of annual interest rates*

	Rupiah/*Rupiah* %	
2019	0.00% - 1.25%	*2019*
2018	0.00% - 1.25%	*2018*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2019 and 2018 there are no current accounts with other banks balances which are used as collateral.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / 6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan jenis / *By type*

	2019	2018	
Promes	3,455,000,000,000	1,880,000,000,000	*Promissory notes*
Deposito *On Call*	315,000,000,000	100,000,000,000	*Deposit On Call*
Sertifikat Deposito Bank Lain	236,035,837,203	-	*Time deposits*
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	159,981,113,341	1,659,732,682,048	*Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)*
Jumlah	4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**4,166,016,950,544**	**3,639,732,682,048**	***Net***

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2019 and 2018, the placement with Bank Indonesia and Other Banks are in Rupiah currency.

Rincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Details of placements with other banks and Bank Indonesia are as follows:

	2019	2018	
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	159,981,113,341	1,659,732,682,048	*Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)*
Deposito *On Call*:			*Deposit On Call:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200,000,000,000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	115,000,000,000	100,000,000,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Jumlah deposito *on call*	315,000,000,000	100,000,000,000	*Total deposit on call*
Sertifikat deposito bank lain:			*Time deposits:*
PT BPD Jawa Tengah	98,398,500,344	-	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD DKI Jakarta	98,825,622,190	-	*PT BPD DKI Jakarta*
PT BPD Sumsel Babel	38,811,714,669	-	*PT BPD Sumsel Babel*
Jumlah sertifikat deposito bank lain	236,035,837,203	-	*Total time deposits*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

	2019	2018	
Promes:			*Promissory notes:*
PT Bank Mega Tbk	800,000,000,000	-	*PT Bank Mega Tbk*
PT BPD Sumsel Babel	315,000,000,000	10,000,000,000	*PT BPD Sumsel Babel*
PT Bank OCBC NISP Tbk	250,000,000,000	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT BPD Jawa Timur	250,000,000,000	-	*PT BPD Jawa Timur*
PT BPD DKI Jakarta	200,000,000,000	200,000,000,000	*PT BPD DKI Jakarta*
PT BPD Kalimantan Timur	200,000,000,000	100,000,000,000	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT BPD Maluku	150,000,000,000	100,000,000,000	*PT BPD Maluku*
PT BPD Yogyakarta	150,000,000,000	100,000,000,000	*PT BPD Yogyakarta*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	140,000,000,000	150,000,000,000	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT BPD Sulawesi Utara	125,000,000,000	50,000,000,000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT BPD Sulawesi Selatan Barat	100,000,000,000	100,000,000,000	*PT BPD Sulawesi Selatan Barat*
PT BPD Kalimantan Selatan	100,000,000,000	-	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT Bank Bukopin Tbk	100,000,000,000	-	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT BPD Sulawesi Tengah	95,000,000,000	125,000,000,000	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Riau	75,000,000,000	200,000,000,000	*PT BPD Riau*
PT BPD Sulawesi Tenggara	75,000,000,000	50,000,000,000	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT BPD Jambi	70,000,000,000	150,000,000,000	*PT BPD Jambi*
PT BPD Jawa Tengah	70,000,000,000	-	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD Lampung	55,000,000,000	50,000,000,000	*PT BPD Lampung*
PT BPD Sumatera Utara	50,000,000,000	50,000,000,000	*PT BPD Sumatera Utara*
PT BPD Bengkulu	50,000,000,000	-	*PT BPD Bengkulu*
PT BPD Banten	35,000,000,000	100,000,000,000	*PT BPD Banten*
PT Bank Muamalat Tbk	-	150,000,000,000	*PT Bank Muamalat Tbk*
PT Bank Victoria International Tbk	-	75,000,000,000	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	75,000,000,000	*PT Bank Mega Syariah*
PT BPD Bali	-	45,000,000,000	*PT BPD Bali*
Jumlah promes	3,455,000,000,000	1,880,000,000,000	*Total promisory notes*
Jumlah	4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**4,166,016,950,544**	**3,639,732,682,048**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga.

b. By relationship

As of December 31, 2019 and 2018, the placements with other banks balances represent placements with third parties.

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar.

c. By Bank Indonesia's collectibility classification

Bank Papua assessed impairment in placements with other banks and Bank Indonesia individually based on whether an objective evidence of impairment exist.

All placement with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018 were classified as current.

d. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

d. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks that pledged as collateral as of December 31, 2019 dan 2018.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

e. Allowance for impairment losses

	2019	2018	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-	*Provision during the year*
Saldo akhir	**-**	**-**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / 6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

f. Kisaran tingkat suku bunga dan setara bagi hasil per tahun / *f. Range of annual interest and equal to profit sharing*

	Rupiah/*Rupiah* %	
2019	4.25% - 8.50%	*2019*
2018	3.50% - 5.70%	*2018*

g. Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / *g. Classification of placement period by residual period to maturity date*

	2019	2018	
Penempatan Rupiah:			*Rupiah Placement:*
sampai dengan 1 bulan	3,929,981,113,341	3,639,732,682,048	*up to 1 month*
1 - 3 bulan	148,449,582,844	-	*1 to 3 months*
3 - 12 bulan	87,586,254,359	-	*3 to 12 months*
Jumlah Penempatan	4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	*Total Placement*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**4,166,016,950,544**	**3,639,732,682,048**	***Net***

7. EFEK-EFEK / 7. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2019		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			***Fair value through profit and loss statement***
Obligasi Pemerintah	150,000,000,000	163,124,000,000	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	150,000,000,000	163,124,000,000	***Total fair value through profit and loss statement***
Tersedia untuk dijual			***Available-for-sale***
Reksadana	197,280,703,863	197,380,893,000	*Mutual Fund*
Total tersedia untuk dijual	**197,280,703,863**	**197,380,893,000**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp678.746.442)	135,735,000,000	135,056,253,558	*Certificates of Bank Indonesia (net of unamortized discount or premium of Rp678,746,442)*
Obligasi Korporasi sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar RpNihil)	147,000,000,000	147,000,000,000	*Held to Maturity of Corporate Bonds (net of amortized discount or premium of RpNihil)*
Obligasi Pemerintah sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp2.692.888.000	320,000,000,000	322,692,888,000	*Held to Maturity of Government Bonds (net of amortized discount or premium of Rp2,692,888,000)*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	**602,735,000,000**	**604,749,141,558**	***Total held-to-maturity***
Jumlah efek-efek	**950,015,703,863**	**965,254,034,558**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Efek-efek - bersih	**950,015,703,863**	**965,254,034,558**	***Marketable securities - net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / 7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *a. By type (continued)*

	2018 Nilai Nominal / *Nominal Value*	2018 Nilai Tercatat / *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			***Fair value through profit and loss statement***
Obligasi Pemerintah	150,000,000,000	146,931,148,125	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	**150,000,000,000**	**146,931,148,125**	***Total fair value through profit and loss statement***
Tersedia untuk dijual			***Available - for - sale***
Reksadana	477,016,417,138	476,012,021,400	*Mutual Fund*
Total tersedia untuk dijual	**477,016,417,138**	**476,012,021,400**	***Total available - for - sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Obligasi Korporasi sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar RpNihil)	192,000,000,000	192,000,000,000	*Held to Maturity of Corporation Bonds (net of amortized discount or premium of RpNil)*
Obligasi Pemerintah sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp218.322.262)	160,000,000,000	160,218,322,262	*Held to Maturity of Government Bonds (net of amortized discount or premium of Rp218,322,262)*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	**352,000,000,000**	**352,218,322,262**	***Total held-to-maturity***
Jumlah efek-efek	**979,016,417,138**	**975,161,491,787**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Efek-efek - bersih	**979,016,417,138**	**975,161,491,787**	***Marketable securities - net***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat transaksi efek-efek dengan pihak berelasi.

As of December 31, 2019 and 2018, there were no marketable securities transactions with related parties.

	2019	2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Obligasi	632,816,888,000	499,149,470,387	*Bonds*
Reksadana	197,380,893,000	476,012,021,400	*Mutual funds*
Sertifikat Bank Indonesia	135,056,253,558	-	*Certificate of Bank Indonesia*
Jumlah pihak ketiga	965,254,034,558	975,161,491,787	*Total third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Jumlah	**965,254,034,558**	**975,161,491,787**	***Total***

c. Berdasarkan penerbit / *c. By issuer*

	2019	2018	
Pemerintah Republik Indonesia	683,197,781,000	783,161,491,787	*Government of the Republic of Indonesia*
Korporasi	147,000,000,000	192,000,000,000	*Corporates*
Bank Indonesia	135,056,253,558	-	*Bank Indonesia*
Jumlah	965,254,034,558	975,161,491,787	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Jumlah	**965,254,034,558**	**975,161,491,787**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***7. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

	2019			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Fair value through profit and loss***
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah	-	-	163,124,000,000	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			**163,124,000,000**	***Total fair value through profit and loss***
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Reksadana	-	-	197,380,893,000	*Mutual Funds*
Jumlah tersedia untuk dijual			**197,380,893,000**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Sertifikat				*Certificate of*
Bank Indonesia	-	-	135,056,253,558	*Bank Indonesia*
Sub jumlah			135,056,253,558	*Sub total*
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:				*Government Bonds:*
FR0075	Fitch	BBB	173,131,172,115	*FR0075*
FR0064	Fitch	BBB	59,184,507,187	*FR0064*
FR0053	Fitch	BBB	50,858,230,689	*FR0053*
FR0061	Fitch	BBB	20,464,198,227	*FR0061*
FR0065	Fitch	BBB	19,054,779,782	*FR0065*
Sub jumlah			322,692,888,000	*Sub total*
Obligasi Korporasi:				*Corporate Bonds:*
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	Pefindo	AA	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016	Fitch	A	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016	Pefindo	AAA	15,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016	Pefindo	A+	12,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I Tahun 2017 Seri A	Pefindo	AA+	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I Tahun 2017 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri tahap III Tahun 2018	Pefindo	AAA	10,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri tahap III Tahun 2018*
Obligasi Berkelanjutan II SMI tahap I Tahun 2019 Seri C	Pefindo	AAA	50,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II SMI tahap I Tahun 2019 Seri C*
Sub Jumlah			147,000,000,000	*Sub Total*
Jumlah obligasi			469,692,888,000	*Total bonds*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			**604,749,141,558**	***Total held to maturity***
Jumlah efek-efek			**965,254,034,558**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah efek-efek - bersih			**965,254,034,558**	***Marketable securities - net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***7. MARKETABLE SECURITIES (continued)***

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2018			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Fair value through profit and loss***
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah	-	-	146,931,148,125	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			**146,931,148,125**	***Total fair value through profit and loss***
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Reksadana	-	-	476,012,021,400	*Mutual Funds*
Jumlah tersedia untuk dijual			**476,012,021,400**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Sertifikat Deposit Bank Indonesia	-	-	-	*Certificate Deposit of Bank Indonesia*
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:				*Government Bonds:*
SR008	Fitch	BBB+	50,071,006,929	*SR008*
FR0069	Fitch	BBB+	110,147,315,333	*FR0069*
Jumlah			160,218,322,262	*Total*
Obligasi Korporasi:				*Corporate Bonds:*
Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B	Pefindo	AAA	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B*
Olbligasi berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 2016	Pefindo	AAA	50,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 2016*
Obligasi berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	Pefindo	AA	20,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016	Fitch	A+	20,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan II BTN tahap II th 2016	Pefindo	AA+	25,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan II BTN tahap II th 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016	Pefindo	AAA	15,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016	Pefindo	A+	12,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016*
Obligasi III Bank BTN Tahap 1 Tahun 2017 Seri A	Pefindo	AA+	20,000,000,000	*Obligasi III Bank BTN Tahap 1 Tahun 2017 Seri A*
Obligasi berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	Pefindo	AAA	10,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018*
Sub Jumlah			192,000,000,000	*Sub total*
Jumlah obligasi			352,218,322,262	*Total bonds*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			**352,218,322,262**	***Total held to maturity***
Jumlah efek-efek			**975,161,491,787**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah efek-efek - bersih			**975,161,491,787**	***Marketable securities - net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / 7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Berdasarkan kolektibilitas / e. *By collectibility*

	2019			
	Pokok/ *Principal*	Cadangan/ *Allowance*	Bersih/ *Net*	
Lancar	965,254,034,558	-	965,254,034,558	*Current*
Kurang lancar	-	-	-	*Substandard*
Macet	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**965,254,034,558**	**-**	**965,254,034,558**	***Total***

	2018			
	Pokok/ *Principal*	Cadangan/ *Allowance*	Bersih/ *Net*	
Lancar	975,161,491,787	-	975,161,491,787	*Current*
Kurang lancar	-	-	-	*Substandard*
Macet	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**975,161,491,787**	**-**	**975,161,491,787**	***Total***

f. Cadangan kerugian penurunan nilai / f. *Allowance for impairment losses*

Perubahan Cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

	2019	2018	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Pengembalian cadangan selama tahun berjalan	-	-	*Allowance repayment during the current year*
Saldo akhir	-	-	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai. / *Management believe that the allowance for impairment losses is adequate.*

g. Tingkat suku bunga per tahun / g. *Annual interest rates*

	Rupiah/*Rupiah* %	
Suku bunga kontrak		*Contractual rate*
2019	5.93% - 10.25%	*2019*
2018	7.15% - 9.25%	*2018*

h. Klasifikasi efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut: / h. *Clasification of owned securities until maturity dates based on residual age until maturity date are as follows:*

	2019	2018	
sampai dengan 1 bulan	110,792,977,772	20,012,415,988	*up to 1 month*
1 - 3 bulan	24,263,275,786	29,924,988,877	*1 to 3 months*
3 - 12 bulan	20,000,000,000	434,386,982,605	*3 to 12 months*
12 - 60 bulan	361,446,428,916	292,126,403,417	*12 to 60 months*
di atas 60 bulan	448,751,352,084	197,426,272,000	*over 60 months*
Jumlah efek-efek	965,254,034,558	973,877,062,887	*Total marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah efek-efek - bersih	**965,254,034,558**	**973,877,062,887**	***Marketable securities - net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN DIJUAL KEMBALI

8. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Rincian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2019 dan 2018 were as follows:

2019

Pihak penjual/ *Counterparty*	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal jual kembali/ *Resell date*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Nilai jual kembali/ *Resell amount*	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ *Unrealized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*
Surat utang negara/ *Goverment Bonds*						
Bank Indonesia						
FR0061	14 hari/days	06-Jan-20	243,837,632,660	244,143,265,320	305,632,660	243,837,632,660
FR0061	14 hari/days	06-Jan-20	243,837,632,660	244,143,265,320	305,632,660	243,837,632,660
FR0078	91 hari/days	08-Jan-20	106,393,425,772	107,700,351,543	1,306,925,772	106,393,425,772
FR0061	14 hari/days	09-Jan-20	292,935,384,385	293,180,268,770	244,884,385	292,935,384,385
FR0077	28 hari/days	20-Jan-20	254,430,679,230	254,750,858,460	320,179,230	254,430,679,230
FR0077	28 hari/days	20-Jan-20	254,430,679,230	254,750,858,460	320,179,230	254,430,679,230
FR0078	28 hari/days	23-Jan-20	103,510,175,572	103,597,051,144	86,875,572	103,510,175,572
FR0078	28 hari/days	23-Jan-20	258,775,438,930	258,992,627,860	217,188,930	258,775,438,930
FR0078	28 hari/days	23-Jan-20	258,775,438,930	258,992,627,860	217,188,930	258,775,438,930
FR0063	28 hari/days	24-Jan-20	234,021,200,250	234,184,900,500	163,700,250	234,021,200,250
Bank Rakyat Indonesia						
FR0077	29 hari/days	28-Jan-20	304,237,871,438	304,237,871,438	92,060,719	304,145,810,719
FR0077	30 hari/days	29-Jan-20	304,237,871,438	304,237,871,438	92,060,719	304,145,810,719
FR0077	31 hari/days	30-Jan-20	304,237,871,438	304,237,871,438	92,060,719	304,145,810,719
			3,163,661,301,931	**3,167,149,689,550**	**3,764,569,775**	**3,163,385,119,775**

2018

Pihak penjual/ *Counterparty*	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal jual kembali/ *Resell date*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Nilai jual kembali/ *Resell amount*	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ *Unrealized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*
Surat utang Negara/ *Goverment Bonds*						
Bank Indonesia						
FR 0052	14 hari/days	04-Jan-19	287,070,500,000	287,762,658,872	692,158,872	287,070,500,000
FR 0054	91 hari/days	18-Jan-19	106,345,330,000	108,052,320,248	1,706,990,248	106,345,330,000
Bank Rakyat Indonesia						
FR 0059	14 hari/days	11-Jan-19	168,246,536,400	168,704,540,860	458,004,460	168,246,536,400
FR 0059	14 hari/days	11-Jan-19	210,308,170,500	210,880,676,075	572,505,575	210,308,170,500
FR 0068	14 hari/days	14-Jan-18	271,540,625,400	272,269,259,411	728,634,011	271,540,625,400
FR 0068	14 hari/days	14-Jan-18	271,540,625,400	272,269,259,411	728,634,011	271,540,625,400
			1,315,051,787,700	**1,319,938,714,877**	**4,886,927,177**	**1,315,051,787,700**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

	Persentase/*Percentage* (%)	
Suku bunga kontrak:		*Contractual interest rate:*
2019	5,05% - 7,02%	2019
2018	6,20% - 7,00%	2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN / 9. LOANS

a. Berdasarkan jenis dan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga / *a. By type and transactions with related parties and third parties*

	2019	2018	
Pihak berelasi			*Related parties*
Modal kerja	1,508,983,608,968	969,350,863,063	*Working capital*
Konsumsi	-	2,471,054,132	*Consumer*
Jumlah pihak berelasi	1,508,983,608,968	971,821,917,195	*Total related parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,422,891)	(971,819)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	1,508,982,186,077	971,820,945,376	*Net related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	1,908,251,619,065	2,357,606,581,194	*Working capital*
Konsumsi	8,451,814,413,440	7,491,536,623,821	*Consumer*
Investasi	1,260,898,887,661	1,339,115,632,129	*Investment*
Sindikasi	2,352,607,970,445	1,520,243,174,951	*Syndicated*
Karyawan	491,365,459,225	413,282,796,178	*Employees*
Program pemerintah	86,756,105,894	53,610,658,303	*Government programs*
Jumlah pihak ketiga	14,551,694,455,730	13,175,395,466,576	*Total third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(568,874,115,502)	(739,512,494,781)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	13,982,820,340,228	12,435,882,971,795	*Net third parties*
Jumlah kredit yang diberikan	**15,491,802,526,305**	**13,407,703,917,171**	***Total loans***

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka dan jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank Papua.

Loans were generally collateralized by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, current accounts, saving accounts, time deposits and by other guarantees that were accepted by Bank Papua.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2019 and 2018, the placement with Bank Indonesia and Other Banks are in Rupiah currency.

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2019	2018	
Rumah Tangga	8,957,133,376,149	7,934,675,211,993	*Household*
Konstruksi	2,110,603,113,761	1,734,298,576,180	*Construction*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,195,232,771,538	1,186,723,899,989	*Hotel, food and beverages*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,509,175,028,581	969,589,480,595	*Government administration, defense and social securities*
Perdagangan besar dan eceran	928,893,602,408	1,122,675,393,209	*Wholesale and groceries*
Industri Pengolahan	335,631,069,033	89,529,584,436	*Manufacturing Industry*
Perantara keuangan	259,351,453,630	305,067,149,319	*Financial services*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	257,225,127,918	170,163,652,819	*Transportation, warehousing and communications*
Listrik, gas dan air	188,723,016,576	248,220,497,082	*Electricity, gas and water*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	135,292,908,025	166,274,766,791	*Social culture, and other entertainment service*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	90,466,523,903	106,393,805,411	*Real estate, rent, and service company*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	53,932,739,892	53,882,225,714	*Agriculture, hunting, and forestry*
Pertambangan dan penggalian	12,989,611,644	17,574,449,017	*Mining and excavation*
Perikanan	12,838,980,170	17,541,187,263	*Fishery*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga dan kegiatan yang belum jelas batasannya	8,321,615,921	12,863,811,545	*Individual and household services and others activities*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,095,964,949	9,004,893,636	*Health and social service*
Jasa pendidikan	1,433,209,735	2,415,491,869	*Education service*
Bukan lapangan usaha	337,950,865	323,306,903	*Not in business sector*
Jumlah	16,060,678,064,698	14,147,217,383,771	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(568,875,538,393)	(739,513,466,600)	*Allowances for impairment losses*
Bersih	**15,491,802,526,305**	**13,407,703,917,171**	***Net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***9. LOANS (continued)***

c. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual / *c. By assessment as collective and individual*

	2019	2018	
Pokok			***Principal***
Individual	573,800,865,259	686,168,875,691	*Individual*
Kolektif	15,486,877,199,439	13,461,048,508,080	*Collective*
	16,060,678,064,698	14,147,217,383,771	
Cadangan kerugian penurunan nilai			***Allowance for impairment losses***
Individual	(105,862,581,826)	(43,944,660,614)	*Individual*
Kolektif	(463,012,956,567)	(695,568,805,986)	*Collective*
	(568,875,538,393)	(739,513,466,600)	
Bersih	**15,491,802,526,305**	**13,407,703,917,171**	***Net***

d. Berdasarkan kolektibilitas / *d. By collectibility*

	2019			
	Pokok / *Principal*	**Penyisihan / *Allowance***	**Bersih / Net**	
Lancar	14,445,702,958,070	445,656,307	14,445,257,301,763	*Current*
Dalam perhatian khusus	801,764,417,737	75,984,949,816	725,779,467,921	*Special mention*
Kurang lancar	40,470,821,091	21,100,124,966	19,370,696,125	*Substandard*
Diragukan	44,875,256,925	36,292,465,748	8,582,791,177	*Doubtful*
Macet	727,864,610,875	435,052,341,556	292,812,269,319	*Loss*
Jumlah	16,060,678,064,698	568,875,538,393	15,491,802,526,305	*Total*

	2018			
	Pokok / *Principal*	**Penyisihan / *Allowance***	**Bersih / Net**	
Lancar	12,189,738,835,024	1,866,736,247	12,187,872,098,777	*Current*
Dalam perhatian khusus	903,415,301,589	29,454,311,871	873,960,989,718	*Special mention*
Kurang lancar	39,825,171,092	21,894,157,792	17,931,013,300	*Substandard*
Diragukan	77,175,593,423	45,913,646,933	31,261,946,490	*Doubtful*
Macet	937,062,482,643	640,384,613,757	296,677,868,886	*Loss*
Jumlah	14,147,217,383,771	739,513,466,600	13,407,703,917,171	*Total*

e. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia / *e. By types and collectibility of Bank Indonesia*

	2019					
	Lancar/*Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*
Konsumsi / *Consumer*	7,906,510,658,579	336,453,332,138	13,694,405,417	20,373,402,545	174,782,614,761	8,451,814,413,440
Modal kerja / *Working Capital*	2,971,549,192,775	189,666,686,748	18,715,624,946	14,875,170,089	222,428,553,475	3,417,235,228,033
Investasi / *Investment*	654,405,138,692	265,107,446,309	7,103,909,792	7,714,886,424	326,567,506,444	1,260,898,887,661
Sindikasi / *Syndicated*	2,350,612,137,114	1,995,833,331	-	-	-	2,352,607,970,445
Karyawan / *Employees*	482,216,764,575	3,888,436,878	225,024,470	1,665,273,990	3,369,959,313	491,365,459,225
Program Pemerintah / *Goverment Program*	80,409,066,336	4,652,682,333	731,856,466	246,523,877	715,976,882	86,756,105,894
Jumlah/*Total*	14,445,702,958,070	801,764,417,737	40,470,821,091	44,875,256,925	727,864,610,875	16,060,678,064,698
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(445,656,307)	(75,984,949,816)	(21,100,124,966)	(36,292,465,748)	(435,052,341,556)	(568,875,538,393)
Neto	14,445,257,301,763	725,779,467,921	19,370,696,125	8,582,791,177	292,812,269,319	15,491,802,526,305

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

9. *LOANS (continued)*

e. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan)

e. *By types and collectibility of Bank Indonesia (continued)*

2018

	Lancar/*Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*
Konsumsi / *Consumer*	6,881,873,960,552	320,191,999,675	22,166,562,057	27,197,563,886	242,577,591,783	7,494,007,677,953
Modal kerja / *Working Capital*	2,554,929,965,044	390,629,671,131	13,992,830,843	31,913,060,590	335,491,916,649	3,326,957,444,257
Investasi / *Investment*	777,649,897,982	185,706,989,852	3,374,272,961	17,840,478,834	354,543,992,500	1,339,115,632,129
Sindikasi / *Syndicated*	1,520,243,174,951	-	-	-	-	1,520,243,174,951
Karyawan / *Employees*	403,338,523,075	5,807,438,225	-	222,617,903	3,914,216,975	413,282,796,178
Program pemerintah / Government program	51,703,313,420	1,079,202,706	291,505,231	1,872,210	534,764,736	53,610,658,303
Jumlah / *Total*	12,189,738,835,024	903,415,301,589	39,825,171,092	77,175,593,423	937,062,482,643	14,147,217,383,771
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(1,866,736,247)	(29,454,311,871)	(21,894,157,792)	(45,913,646,933)	(640,384,613,757)	(739,513,466,600)
Neto	12,187,872,098,777	873,960,989,718	17,931,013,300	31,261,946,490	296,677,868,886	13,407,703,917,171

e. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia

e. *By sector economic types and Collectibility of Bank Indonesia*

2019

	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	Kurang Lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet /*Loss*	Jumlah /*Total*	
Pertanian, perburuan dan kehutanan	45,406,984,952	3,013,464,092	667,829,629	1,381,713,919	3,462,747,300	53,932,739,892	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	6,907,236,936	5,303,899,927	13,563,337	153,446,631	460,833,339	12,838,980,170	*Fishery*
Pertambangan dan penggalian	12,432,552,484	27,305,142	-	-	529,754,018	12,989,611,644	*Mining and excavation*
Industri Pengolahan	322,467,399,530	3,606,482,009	230,519,165	-	9,326,668,328	335,631,069,033	*Manufacturing Industry*
Listrik, gas dan air	188,704,680,616	18,335,960	-	-	-	188,723,016,576	*Utilities industry*
Konstruksi	1,754,566,224,155	48,739,470,118	6,295,452,845	4,297,019,560	296,704,947,083	2,110,603,113,761	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	730,078,004,603	91,523,690,104	10,410,485,546	14,504,365,934	82,377,056,221	928,893,602,408	*Wholesale and groceries*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	841,792,133,356	234,628,379,015	5,647,016,144	849,606,462	112,315,636,561	1,195,232,771,538	*Providing Accomodation, food, and beverages*
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	246,687,198,342	3,380,085,226	141,003,511	612,163,148	6,404,677,691	257,225,127,918	*Transportation, warehousing, and communication*
Perantara keuangan	259,295,443,708	-	-	-	56,009,922	259,351,453,630	*Financial services*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	56,484,950,266	10,306,952,751	65,762,818	504,031,056	23,104,827,012	90,466,523,903	*Real estate, rental business, and service company*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,509,175,028,581	-	-	-	-	1,509,175,028,581	*Government administration defense, and social securities*
Jasa pendidikan	711,260,077	26,362,047	-	-	695,587,611	1,433,209,735	*Education service*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,604,550,830	914,888,028	-	-	576,526,091	3,095,964,949	*Health and social service*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	62,337,480,652	56,691,876,264	3,079,758,209	373,789,248	12,810,003,652	135,292,908,025	*Social culture, entertainment,and other individual service*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	5,712,724,259	2,107,016,796	-	-	501,874,866	8,321,615,921	*Individual and household service*
Rumah Tangga	8,401,001,153,858	341,476,210,258	13,919,429,887	22,199,120,967	178,537,461,180	8,957,133,376,149	*Household*
Bukan lapangan usaha	337,950,865	-	-	-	-	337,950,865	*Not in business sector*
Jumlah	14,445,702,958,070	801,764,417,737	40,470,821,091	44,875,256,925	727,864,610,875	16,060,678,064,698	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(445,656,307)	(75,984,949,816)	(21,100,124,966)	(36,292,465,748)	(435,052,341,556)	(568,875,538,393)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	14,445,257,301,763	725,779,467,921	19,370,696,125	8,582,791,177	292,812,269,319	15,491,802,526,305	*Net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan)

9. LOANS (continued)

e. By sector economic types and Collectibility of Bank Indonesia (continued)

2018

	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	Kurang Lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah / *Total*	
Pertanian, perburuan dan kehutanan	43,575,405,210	4,278,789,550	750,006,649	588,101,260	4,689,923,045	53,882,225,714	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	15,976,298,796	686,684,131	28,101,376	30,388,571	819,714,389	17,541,187,263	*Fishery*
Pertambangan dan penggalian	207,891,625	2,099,412,444	-	10,232,310,657	5,034,834,291	17,574,449,017	*Mining and excavation*
Industri Pengolahan	66,141,370,382	11,086,674,332	315,346,244	528,245,137	11,457,948,341	89,529,584,436	*Manufacturing Industry*
Listrik, gas dan air	243,453,524,013	4,465,973,069	-	-	301,000,000	248,220,497,082	*Utilities industry*
Konstruksi	1,349,734,572,791	49,879,080,978	595,558,699	22,130,242,042	311,959,121,670	1,734,298,576,180	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	869,807,863,411	91,247,209,920	11,612,214,677	9,349,189,970	140,658,915,231	1,122,675,393,209	*Wholesale and groceries*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	902,213,474,195	119,144,544,973	2,448,369,786	996,672,432	161,920,838,603	1,186,723,899,989	*Providing Accomodation, food, and beverages*
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	149,907,412,282	10,417,226,373	147,531,484	626,138,673	9,065,344,007	170,163,652,819	*Transportation, warehousing, and communication*
Perantara keuangan	256,379,238,249	48,622,110,169	-		65,800,901	305,067,149,319	*Financial services*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	69,150,493,499	17,599,957,385	362,967,728	911,932,167	18,368,454,632	106,393,805,411	*Real estate, rental business, and service company*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	770,064,593,067	199,524,887,528	-	-	-	969,589,480,595	*Government administration defense, and social securities*
Jasa pendidikan	1,230,853,188	331,741,958	487,899,992	-	364,996,731	2,415,491,869	*Education service*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,359,153,252	554,388,382	640,507,187	-	2,450,844,815	9,004,893,636	*Health and social service*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	127,837,510,666	15,566,431,214	270,105,213	1,342,244,031	21,258,475,667	166,274,766,791	*Social culture, entertainment, and other individual service*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	7,616,353,386	1,437,530,080	-	3,019,946,694	789,981,385	12,863,811,545	*Individual and household service*
Rumah Tangga	7,310,759,520,109	326,472,659,103	22,166,562,057	27,420,181,789	247,856,288,935	7,934,675,211,993	*Household*
Bukan lapangan usaha	323,306,903	-	-	-	-	323,306,903	*Not in business sector*
Jumlah	12,189,736,835,024	903,415,301,589	39,825,171,092	77,175,593,423	937,062,482,643	14,147,217,383,771	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1,866,736,247)	(29,454,311,871)	(21,894,157,792)	(45,913,646,933)	(640,384,613,757)	(739,513,466,600)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,187,872,098,777	873,960,989,718	17,931,013,300	31,261,946,490	296,677,868,886	13,407,703,917,171	*Net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

9. *LOANS (continued)*

f. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	2019	2018	
Konstruksi	307,297,419,488	334,684,922,411	*Construction*
Rumah Tangga	214,656,012,034	297,443,032,781	*household service*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	118,812,259,167	165,365,880,821	*Provision of accommodation and provisionof drinking meals*
Perdagangan besar dan eceran	107,291,907,701	161,620,319,878	*Wholesale and groceries*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	16,263,551,109	22,870,824,911	*Social culture, and other entertainment service*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	23,674,620,886	19,643,354,527	*Real estate, rent, and service company*
Pertambangan dan Penggalian	529,754,018	15,267,144,948	*Mining and excavation*
Industri Pengolahan	9,557,187,493	12,301,539,722	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	7,157,844,350	9,839,014,164	*Transportation, warehousing and communications*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	5,512,290,848	6,028,030,954	*Agriculture, hunting, and forestry*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga.	501,874,866	3,809,928,079	*Individual and household service*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	576,526,091	3,091,352,002	*Health and social service*
Perikanan	627,843,307	878,204,336	*Fishery*
Jasa pendidikan	695,587,611	852,896,723	*Education service*
Listrik, gas dan air	-	301,000,000	*Utilities*
Perantara keuangan	56,009,922	65,800,901	*Financial services*
Jumlah	813,210,688,891	1,054,063,247,158	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(492,444,932,270)	(708,192,418,482)	*Allowances for impairment losses*
Bersih	320,765,756,621	345,870,828,676	*Net*

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL - bruto) Bank Papua, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, terhadap jumlah pinjaman pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang diberikan sebesar 5.06% dan 7.45%.

The ratio of gross non-performing loans (gross NPL ratio) of Bank Papua to total loans, based on Bank Indonesia Regulations (PBI) as of December 31, 2019 and 2018 were 5.06% dan 7.45% respectively.

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rates

	Rupiah/*Rupiah* %	
Bunga kontrak		*Contractual interest*
2019	3,50% - 25.58%	*2019*
2018	3,50% - 24.00%	*2018*

Seluruh kredit yang diberikan pada tahun 2019 dan 2018 dalam mata uang Rupiah.

Loans for the years 2019 and 2018 all in Rupiah currency.

h. Kredit yang direstrukturisasi

h. Restructured loans

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2019 dan 2018:

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2019 and 2018:

	2019	2018	
Perpanjangan waktu Kredit yang diberikan	1,515,560,464,787	1,631,872,508,713	*Extension of loan maturity dates*
Jumlah	1,515,560,464,787	1,631,872,508,713	*Total*

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility are as follows:

	2019	2018	
Lancar	850,893,124,973	1,121,606,811,404	*Current*
Dalam perhatian khusus	360,857,020,469	167,790,115,869	*Special mention*
Kurang lancar	9,435,626,754	5,420,903,190	*Substandard*
Diragukan	5,882,175,263	21,479,222,694	*Doubtful*
Macet	288,492,517,328	315,575,455,556	*Loss*
Jumlah	1,515,560,464,787	1,631,872,508,713	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

i. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit)

	2019	2018	
Nilai Pokok			Principal
sampai dengan 1 tahun	2,252,135,725,296	2,511,166,607,611	up to 1 year
1 - 2 tahun	303,712,765,689	428,750,810,841	1 to 2 years
2 - 5 tahun	2,503,594,452,750	2,900,054,487,597	2 to 5 years
di atas 5 tahun	11,001,235,120,964	8,307,245,477,722	over 5 years
Jumlah kredit yang diberikan	16,060,678,064,698	14,147,217,383,771	Total loan

j. Sisa Umur Jatuh Tempo

	2019	2018	
Nilai Pokok			Principal
1 bulan	745,414,061,489	1,786,741,372,247	1 month
1 - 6 bulan	536,246,127,677	878,049,614,535	1 to 6 months
6 - 12 bulan	1,326,635,854,524	1,066,562,084,429	6 - 12 months
di atas 12 bulan	13,452,382,021,008	10,415,864,312,560	over 12 months
Jumlah kredit yang diberikan	16,060,678,064,698	14,147,217,383,771	Total loan

k. Kredit Program Pemerintah

Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit koperasi dan anggota, kredit ketahanan pangan, Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Investasi (KI) KUR, KMK KUR R/C Perdagangan, kredit KMK KUR Konstruksi dan KUR Mikro Modal Kerja dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.

l. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan Bank Papua dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.352.607.970.445 dan Rp1.520.243.174.951

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Porsi Partisipasi	1.86% - 64.81%	1.87% - 64.81%	Portion of Participation

m. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Saldo awal	739,513,466,600	1,506,740,709,523	Beginning balance
Cadangan kerugian selama tahun berjalan	178,021,160,319	484,460,936,769	Provision during the current year
Pengembalian penyisihan selama tahun berjalan	(42,361,483,468)	(134,025,153,085)	Allowance repayment during the current year
Penghapusan selama tahun berjalan	(306,297,605,058)	(1,117,663,026,607)	Write-offs during the current year
Saldo akhir	568,875,538,393	739,513,466,600	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

9. *LOANS (continued)*

i. Terms (based on agreements covering loan)

j. Remaining Period to Maturity

k. Government Credit Program

Government Credit Program consists of Member Cooperative Loans, Food Stability Loans, Working Capital Loans (KMK) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Investment Loans (KI) KUR, KMK KUR Trading Loans, KMK KUR Construction Loans and KUR Micro Working Capital Loans which can be partially and/or fully funded.

l. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans provided to borrowers under syndication agreements with other banks.

Bank Papua's participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2019 and 2018 were respectively amounted to Rp2,352,607,970,445 and Rp1,520,243,174,951

The Bank's percentage participation in syndicated loans with other banks is as follow:

m. Allowance for impairment losses

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

n. Kredit yang diberikan yang dihapusbukukan

Kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan oleh Bank Papua dicatat sebagai pinjaman yang diberikan ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. Bank Papua terus melakukan usaha penagihan atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan tersebut. Total saldo pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing - masing sebesar Rp306.297.605.508 dan Rp1.117.663.026.607.

o. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan dan bank lain

Bank Papua memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan dan bank lain, yaitu:

	2019	2018	
Bank lain:			*Other banks:*
BPR Palu Lokadana Utama	117,711,538,464	63,327,498,999	*BPR Palu Lokadana Utama*
BPR Modern Express Ambon	40,012,538,734	31,949,878,512	*BPR Modern Express Ambon*
BPR Hasa Mitra	38,658,192,093	48,622,110,169	*BPR Hasa Mitra*
BPR Irian Sentosa	37,699,277,094	37,945,123,351	*BPR Irian Sentosa*
BPR Arfak Indonesia	15,833,333,306	130,010,137,337	*BPR Arfak Indonesia*
BPR Papua Mandiri Makmur	2,999,999,995	3,780,999,998	*BPR Papua Mandiri Makmur*
BPR Nusa Intim	-	1,579,406,353	*BPR Nusa Intim*
Jumlah	252,914,879,686	317,215,154,719	*Total*

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

1) Sehubungan dengan diterbitkannya PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran No. 7/14/DPnP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Direksi, Kepala Departemen, Kepala Divisi dianggap sebagai pihak berelasi dengan Bank Papua. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi adalah 10% dari modal Bank Papua.

2) Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar / melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

3) Rasio kredit usaha kecil, mikro dan menengah terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Papua per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 57,12% dan 69,24%.

9. LOANS (continued)

n. Loans written off

The loans written off by Bank Papua are recorded as extra-comptable (off statements of financial position) in the administrative account. Bank Papua continues to pursue the collection of loans previously written off. The outstanding balance as of December 31, 2019, and 2018 amounted to Rp306,297,605,508 dan Rp1,117,663,026,607.

o. Financing facilities with multi-finance companies and other banks

Bank Papua has financing arrangements with several multi-finance companies and other banks, there are:

p. Other significant information related to loans

1) In relation to the issuance of Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 and the Circular Letter No. 7/14/DPnP dated April 18, 2005 on the Legal Lending Limit ("LLL") of Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by Bank Papua through ownership, management or financial, such as Director, Head Department, Head Division are considered related parties of Bank Papua. Under this regulation, the legal lending limit (LLL) for related parties borrowers is 10% of Bank Papua's capital.

2) For the years ended December 31, 2019 and 2018, there were no loans granted which breach / exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia.

3) The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Papua as of December 2019 and 2018 were 57.12% dan 69.24%, respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

4) Sektor usaha lainnya merupakan kredit konsumtif yang diberikan dalam bentuk Kredit Griya Bhakti, Kredit Purna Bhakti, Kredit Wira Bhakti serta kredit yang tidak dapat diklasifikasikan pada sektor-sektor di atas.

- Kredit Griya Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah.
- Kredit Abdi Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para karyawan Bank Papua berpenghasilan tetap untuk keperluan biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.
- Kredit Wira Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumtif seperti biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Adapun rincian kredit yang diberikan sektor lain-lain adalah sebagai berikut :

	2019	2018	
Wira Bhakti	6,581,988,881,320	5,456,937,724,025	*Wira Bhakti*
Griya Bhakti	344,321,374,164	368,798,356,624	*Griya Bhakti*
Abdi Bhakti	470,725,267,119	394,687,428,045	*Abdi Bhakti*
Purna Bhakti	43,833,296,096	39,231,086,063	*Purna Bhakti*
Kendaraan	3,372,371,432	1,339,828,607	*Vehicles*
Multiguna	1,393,006,560	6,857,913,625	*Multiguna*
Lain-lain	1,511,837,130,324	1,639,438,137,142	*Other*
Jumlah	8,957,471,327,014	7,907,290,474,130	*Total*

5) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.

6) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

7) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.

8) Kredit program pemerintah terdiri dari, kredit kepada Koperasi dan anggotanya, kredit pengusaha kecil dan mikro, kredit ketahanan pangan dan kredit program pemerintah PHBK. Saldo pinjaman yang diberikan dari program yang disalurkan dengan sistem *chanelling* dapat dirinci sebagai berikut:

	2019	2018	
KMK KUR Ritel	58,708,973,514	35,872,627,096	*KMK KUR Retail*
KMK KUR Mikro	13,390,361,334	8,512,623,317	*KMK KUR Micro*
KI KUR Ritel	13,758,036,107	5,920,166,669	*KI KUR Retail*
KPP KKP-E Peternakan	531,829,324	2,385,745,585	*KPP KKP-E Farmer*
KPP KI KUR	195,674,445	309,344,150	*KPP KI KUR*
KPP KKP-E Perikanan	59,900,786	245,899,200	*KPP KKP-E Fishery*
KPP KKP-E Pertanian	12,055,555	147,722,195	*KPP KKP -E Agruculture*
KPP KMK KUR	-	145,822,412	*KPP KMK KUR*
KUR Mikro Investasi	-	71,083,333	*KUR Micro Investment*
Total	**86,656,831,065**	**53,611,033,957**	***Total***

9. *LOANS (continued)*

p. Other significant information related to loans (continued)

4) Other business sector are consumer loans granted in form of Griya Bhakti Loan, Purna Bhakti Loan, Wira Bhakti Loan, and loan not classified in the above sector.

- *The Griya Bhakti Loan is a Loan facility granted to government employees who have fixed income for the purpose of house development or renovation.*
- *The Abdi Bhakti loan is a loan facility granted to Bank Papua Employees who fixed income for consumer usage such as school fees, purchasing of house appliances, etc.*
- *The Wira Bhakti loan is a loan facility granted to fixed income Government Employees for consumer usage such us school fee, purchasing of home appliance, etc.*

The details of Other Sector loans are as follows :

5) Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell, and other collateral banks commonly accept.

6) Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.

7) Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.

8) Credit of government programs consist of credit to cooperations and its members, micro and small-scale business, food sustainability and government programs PHBK. Details of the channeling loans are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

9) Kredit yang dijamin pemerintah adalah pinjaman yang diberikan yang dijamin oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun Kota pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu sebesar nihil.

10) Pinjaman yang diberikan kepada karyawan bank merupakan pinjaman yang diberikan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga pada tahun 2019 dan 2018 berkisar 3,50% - 6,24% per tahun dengan jangka waktu kredit sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

11) Syarat, kondisi dan perlakuan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.

12) Kebijakan pemberian pinjaman yang diberikan ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses analisa pinjaman yang diberikan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, kecukupan agunan pinjaman yang diberikan, asas-asas perpinjaman yang diberikanan yang sehat, ketentuan BMPK serta pemantauan dan evaluasi.

13) Persetujuan pemberian pinjaman yang diberikan dilakukan melalui suatu komite (komite pinjaman yang diberikan) yang melibatkan analis pinjaman yang diberikan, Kepala Bagian pinjaman yang diberikan, Kepala Bagian dana jasa, wakil pemimpin untuk KCU, pemimpin cabang divisi (untuk pinjaman yang diberikan yang melebihi wewenang cabang). Pengajuan persetujuan pinjaman yang diberikan dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap.

14) Bank Papua telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Lampung sesuai dengan Akta Notaris Titiek Irawati S.S.H No.27 tanggal 6 Agustus 2010, perjanjian addendum I No.27 tanggal 27 April 2012 dan perjanjian addendum II No.103 tanggal 21 Desember 2012. Jumlah komitmen pembelian piutang ini sebesar Rp150.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp75.007.212.794 yang terdiri dari 1.254 debitur. Selama tahun 2018 telah terdapat pelunasan dari debitur, yang terdiri dari pelunasan dipercepat dan pelunasan dikarenakan jatuh tempo pinjaman. Jumlah yang tercatat pada laporan keuangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.472.198 yang terdiri dari 2 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank Papua dan Bank Papua memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

9) Credit which guaranted by Government is the credit that guaranted by the Province Government, Regency and Municipalities Government as of December 31, 2019 and 2018 amounted nil.

10) Credit to employees are for housing, vehicle, and other with interest rates at 2019 and 2018 ranging from 3,50% - 6,24% annually to fifteen years. Such loans will be repaid through salary cutting monthly for each employee receiving the loans.

11) Terms, conditions, and treatment of loans granted to related parties are similar to those granted to the third party.

12) Credit granted policies stated through an analysis process conforming to prudent policy, adequacy of collaterals, credit soundness, legal lending limit, monitoring and evaluation.

13) The approval of credit is conducted by credit committee involving credit analyst, chairman of development, fund service departement, vice general manager (for branches), general manager and division (when credit exceeding branch authority). The application is submitted when complete data from debtor has been completely received.

14) Bank Papua purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung) based on the agreement between Bank Papua and BPD Lampung which was notarized under Notarial Deed No.27 dated August 6, 2010 of Titiek Irawati S.S.H, First addendum agreement No.27 dated April 27, 2010 and Second Addendum No. 103 dated December 21,2012. The total commitment of the loans purchased amounted to Rp150,000,000,000. Up to December 31,2013, the total realization of the loans of purchased amounted to Rp75,007,212,794 which consist of 1,254 debtors. During the year 2018 there were repayment of debtors, which consists of the advance payment and loan repayment due to the maturity. Total outstanding amount in the statements of financial position as of December 31,2019 was amounted to Rp21,472,198 which consist of 2 debtor.

The loans purchased transaction is a without recourse transaction. All right's, ownership's and interest of the loans are transferred to the Bank Papua and the Bank Papua obtains all benefits and risks on the loan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Lampung akan bertindak sebagai pengelola pembayaran dari debitur dan administrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam akta notaris Titiek Irawati S.S.H No.29 tanggal 6 Agustus 2010 tentang pengelolaan piutang antara Bank Papua dan BPD Lampung. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Lampung mendapat imbalan sebesar 4% dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Lampung dan diterima oleh Bank Papua.

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Lampung secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan bank sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Lampung akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan bank dan melakukan penyetoran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan atau liabilitas lainnya yang menjadi hak bank termasuk dalam pembayaran dipercepat dari debitur.

Pinjaman yang diberikan tersebut merupakan kredit konsumsi "PANTAS" (Pinjaman Aman Terbatas) yang disalurkan BPD Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota se-provinsi Lampung, dengan kriteria, (a) memiliki kolektibiltas 1 (satu) / lancar, (b) jaminan telah dilindungi oleh asuransi, (c) jangka waktu disesuaikan dengan sisa masa dinas setiap debitur. (d) suku bunga adalah sebesar suku bunga yang diatur dalam perjanjian kredit antara debitur dengan BPD Lampung, namun dibatasi minimal 10% (sepuluh persen).

15) Bank telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Sumsel Babel sesuai dengan akta notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 Nopember 2012. Perjanjian Jual Beli Piutang No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012. Jumlah komitmen pembelian piutang ini sebesar Rp500.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp49.782.271.868 yang terdiri dari 595 debitur. Selama tahun 2018 telah terdapat pelunasan dari debitur, yang terdiri dari pelunasan dipercepat dan pelunasan dikarenakan jatuh tempo pinjaman. Jumlah yang tercatat pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.005.645.837 yang terdiri dari 30 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank Papua dan Bank Papua memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

After the purchase of loans, BPD Lampung act as an agent, or the party by managing the payment from debtors and administering the debtor's loans document based on notary deed No.29 dated August 6, 2010 of Titiek Irawati S.S.H. As an agent, BPD Lampung will receive a fee at 4% of every debtor interest obligation paid by BPD Lampung and received by the Bank Papua.

In the terms of debtors default, BPD Lampung is obliged to conduct the collection procedures from the debtors for the Bank's interest in accordance with the applicable procedures. After the purchase of loan, BPD Lampung will act as a party who collect from debtors,maintain and adminstrate the loan for the Bank's interest and transfer the payment received from the debtors such as principal, interest and other liabilities payment, including advance payment from debtors.

These loans are consumer loan "PANTAS" (Pinjaman Aman Terbatas) which are provided by BPD Lampung to government employees (PNS), member of House of Representatives of Province and municipalities / regencies in the province of Lampung with criteria of among others, (a) collectibility 1 (one) / current, (b) collateral covered by insurance, (c) period of loans adjusted by remaining official duty for each debtors, (d) interest rate based on loans agreement between debtor with BPD Lampung but is limited at least 10%.

15) Bank Papua purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) based on the agreement between the Bank Papua and BPD Sumsel Babel which was notarized under Notarial Deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H,. Sales agreement No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012 and Cassie agreement No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012. The total commitment of the loans purchased amounted to Rp500,000,000,000. Up to December 31,2013, the total realization of the loans of purchased amounted to Rp49,782,271,868 which consist of 595 debtors. During the year 2018 there were repayment of debtors, which consists of the advance payment and loan repayment due to the maturity. The total outstanding amount in the statements of financial position as of December 31,2018 amounted to Rp1,005,645,837 which consist of 30 debtors.

The loans purchased transaction is a without recourse transaction. All right, ownership and interest of the loans are transferred to the Bank Papua and the Bank Papua obtains all benefits and risks on the loan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan (lanjutan)

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak sebagai pengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 November 2012 tentang hal pengelolaan piutang antara Bank Papua dan BPD Sumsel Babel. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Sumsel Babel mendapat imbalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Sumsel Babel dan diterima oleh Bank Papua.

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Sumsel Babel secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan Bank Papua sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan Bank Papua dan melakukan penyetoran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan atau liabilitas lainnya yang menjadi hak Bank Papua termasuk dalam pembayaran dipercepat.

Kredit tersebut merupakan kredit yang disalurkan BPD Sumsel Babel kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-provinsi Sumsel Babel, dengan kriteria, (a) memiliki kolektibiltas 1 (satu) / lancar, (b) jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu kredit setiap debitur maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal pengalihan, (c) suku bunga adalah sebesar suku bunga yang diatur dalam perjanjian kredit antara debitur dengan BPD Sumsel Babel.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

After the purchase of loans, BPD Lampung act as an agent, or the party which manages the payment from debtors and administrative the debtor's loans document based on deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H. As an agent, Sumsel Babel will receive a fee at 30% (thirty percent) of every debtor interest obligation paid by BPD Sumsel Babel and received by the Bank Papua.

In the terms the debtors default, BPD Sumsel Babel is obliged to conduct the collection procedures from the debtors for the Bank Papua's interest in accordance with the applicable procedures. After the purchase of loan. BPD Sumsel Babel will act as a party who collect from debtors, maintain and adminstrate the loan for the Bank's interest and transfer the payment received from the debtors such as principal, interest and other liabilities payment, including advance payment from debtors.

These loans are consumptive loan which are provided by BPD Sumsel Babel to government employees (PNS), member of House of Representatives of Province and municipalities / regencies in the province of Sumsel Babel with criteria, (a) collectibility 1(one) / current, (b) period of loans adjusted for each debtor to maximum 180 (one hundred eighty) month since purchase date, (c) period of loans adjusted by remaining official duty between the debtor and BPD Sumsel Babel.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

Rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut :

Details of acquisition cost, accumulated depreciation, and book values of fixed assets is as follows:

	2019				
	Saldo Awal 1 Januari 2019 / *Beginning Balance January 1, 2019*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Disposals*	Reklasifikasi dan penyesuaian / *Reclasification and adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember 2019/ *Ending Balance December 31, 2019*
Biaya perolehan (*Cost*)					
Tanah (*Land*)	37,453,615,976	12,500,000	-	304,401,440	37,770,517,416
Bangunan Kantor (*Buildings*)	286,977,638,389	3,833,980,367	852,989,368	4,043,885,388	294,002,514,776
Perumahan Dinas (*Houses*)	21,195,405,499	131,590,001	345,291,000	-	20,981,704,500
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	11,498,587,438	511,215,000	2,006,925,999	-	10,002,876,439
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	211,751,459,657	7,850,813,065	12,919,824,038	-	206,682,448,684
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	6,673,357,775	376,578,100	879,293,633	-	6,170,642,242
Inventaris Lainnya (*Others*)	8,023,776,683	2,268,450,371	742,901,685	-	9,549,325,369
Inventaris Dalam Penyelesaian (*Equipment In Progress*)	882,350,000	965,300,000	-	(882,350,000)	965,300,000
Bangunan Dalam Penyelesaian (*Building In Progress*)	11,539,352,388	7,870,062,242	-	(4,043,885,388)	15,365,529,242
Total biaya perolehan (*Total cost*)	**595,995,543,805**	**23,820,489,146**	**17,747,225,723**	**(577,948,560)**	**601,490,858,668**
Akumulasi penyusutan (*Accumulated depreciation*)					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	126,362,928,986	12,132,938,659	852,989,368	6,636,867	137,649,515,144
Perumahan Dinas (*Houses*)	8,522,933,763	1,072,299,743	345,291,000	170,812,537	9,420,755,043
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	10,207,419,914	583,721,575	2,006,925,999	-	8,784,215,490
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	190,922,052,827	9,611,563,128	12,919,824,038	272,599,641	187,886,391,558
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	5,211,336,301	666,313,115	879,293,633	20,316,429	5,018,672,212
Inventaris Lainnya (*Others*)	5,011,191,206	1,407,753,302	742,901,685	150,172,846	5,826,215,669
Total akumulasi penyusutan (*Total accumulated depreciation*)	**346,237,862,997**	**25,474,589,522**	**17,747,225,723**	**620,538,320**	**354,585,765,116**
Nilai buku (*Book value*)	**249,757,680,808**				**246,905,093,552**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

	2018				
	Saldo Awal 1 Januari 2018 / *Beginning Balance January 1, 2018*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Disposals*	Reklasifikasi dan penyesuaian / *Reclasification and adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember 2018/ *Ending Balance December 31, 2018*
Biaya perolehan (*Cost*)					
Tanah (*Land*)	36,948,650,376	-	-	504,965,600	37,453,615,976
Bangunan Kantor (*Buildings*)	280,348,174,486	1,177,799,260	180,470,607	5,632,135,250	286,977,638,389
Perumahan Dinas (*Houses*)	21,234,127,869	157,906,000	196,628,370	-	21,195,405,499
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	15,416,129,847	318,387,300	4,235,929,709	-	11,498,587,438
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	224,042,614,478	5,604,578,251	18,538,328,072	642,595,000	211,751,459,657
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	7,921,314,175	594,405,700	1,842,362,100	-	6,673,357,775
Inventaris Lainnya (*Others*)	7,144,681,385	1,085,389,838	206,294,540	-	8,023,776,683
Inventaris Dalam Penyelesaian (*Equipment In Progress*)	2,474,612,800	632,195,400	-	(2,224,458,200)	882,350,000
Bangunan Dalam Penyelesaian (*Building In Progress*)	18,720,097,396	232,125,100	-	(7,412,870,108)	11,539,352,388
Total biaya perolehan (*Total cost*)	**614,250,402,812**	**9,802,786,849**	**25,200,013,398**	**(2,857,632,458)**	**595,995,543,805**
Akumulasi penyusutan (*Accumulated depreciation*)					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	100,566,478,643	25,960,443,600	163,993,257	-	126,362,928,986
Perumahan Dinas (*Houses*)	7,677,463,857	1,037,141,896	191,671,990	-	8,522,933,763
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	13,589,911,158	847,871,182	4,230,362,426	-	10,207,419,914
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	197,137,369,556	12,012,785,137	18,228,101,866	-	190,922,052,827
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	6,183,595,410	798,148,982	1,770,408,091	-	5,211,336,301
Inventaris Lainnya (*Others*)	4,083,761,447	1,231,212,775	303,783,016	-	5,011,191,206
Total akumulasi penyusutan (*Total accumulated depreciation*)	**329,238,580,071**	**41,887,603,572**	**24,888,320,646**	**-**	**346,237,862,997**
Nilai buku (*book value*)	**285,011,822,741**				**249,757,680,808**

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: / *Details of gain on sale of fixed assets are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2019	**2018**	
Harga Jual	237,022,000	7,550,000	*Proceeds*
Nilai Buku	-	-	*Book Value*
Kerugian	**237,022,000**	**7,550,000**	***Loss***

Penjualan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp237.022.000 dan Rp7.550.000 merupakan Aset Tetap yang dihapuskan pada tahun 2018, 2017 dan 2016.

The Sale as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp237,022,000 dan Rp7,550,000 are Fixed Assets that were eliminated in 2018, 2017,and 2016 .

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp25.474.589.522 dan Rp41.886.935.100 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The balances of depreciation amounting to Rp25.474.589.522 dan Rp41,886,935,100 as of 31 December 2019 and 2018, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap Bank Papua pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada perusahaan-perusahaan asuransi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, fixed assets of the Bank Papua were insured against risk of fire and theft.

As of December 31, 2019 and 2018 there were no fixed assets pledged as collateral.

The details of constructions in progress as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember 2019	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	*Estimasi penyelesaian/ Estimated completion*	*December 31, 2019*
Bangunan	23.00%	15,365,529,242	2020	*Building*
Inventaris	85.00%	9,549,325,369	2020	*Equipment*
Total		24,914,854,611		***Total***

31 Desember 2018	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	*Estimasi penyelesaian/ Estimated completion*	*December 31, 2017*
Bangunan	21.16%	11,539,352,388	2019	*Building*
Inventaris	95.00%	838,232,500	2019	*Equipment*
Total		12,377,584,888		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, bangunan dalam penyelesaian terdiri dari rumah dinas Direksi, renovasi ruangan lantai 6, pembangunan gedung ex Irjasakti, pembangunan gedung KC Bintuni, Renovasi gedung KC Timika, Pembangunan Cabang Sentani, Pembangunan Cabang Waisai dan Pembangunan Cabang Teminabuan dan Inventaris dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan mobil box remisi , Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Online dan Server Aplikasi Pengelolaan Data Tableau Creator & Four (PT.Sisnet Mitra Sejahtera)

On December 31, 2019, the building under construction consisted of Directors' official houses, renovation of the 6th floor room, construction of the ex Irjasakti building, construction of the Bintuni KC building, renovation of the Timika KC building, construction of the Sentani Branch, Waisai Branch Development and Teminabuan Branch Development and Inventory in completion consists of the procurement of remission box cars and the Tableau Creator & Four Data Management Application Server (PT.Sisnet Mitra Sejahtera)

Pada tanggal 31 Desember 2018, bangunan dalam penyelesaian terdiri dari pembangunan gedung Kantor Cabang SP IV Timika, Kantor Cabang Pembantu Prafi, perencanaan Cabang Sentani, Pembangunan Gedung KC Bintuni, Rehab barak Kepala Departemen Waisai dan Kantor Cabang Timika dan Inventaris dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan IP CCTV Kantor Pusat, Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Online Serta Pengadaan Furniture Elektrikal Gedung KCP Prafi.

As of December 31, 2018, the building under construction consisted of the construction of the SP IV Timika Branch Office building, Prafi Sub-Branch Office, Sentani Branch planning, Construction of the KC Bintuni Building, Rehab barracks Head of the Waisai Department and Timika Branch Office and Inventory in completion consisted of IP procurement CCTV Head Office, Online Business Plan (RBB) Application And Procurement of Electrical Furniture Prafi KCP Building.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET LAIN-LAIN / *11. OTHER ASSETS*

	2019	2018	
Aset pajak tangguhan (lihat Catatan 18.e)	76,553,967,443	41,781,953,290	*Deffered tax asset (see Note 18.e)*
Aset tidak produktif	59,539,116,813	62,749,866,813	*Assets - non productive*
Taksiran pajak penghasilan badan lebih bayar (PPh 28A) (lihat Catatan 18.a)	479,964,022	730,745,714	*Estimated claimed tax refund (income tax art.28A) (see Note18.a)*
Piutang bunga Pinjaman	37,544,457,003	41,726,018,177	*Interest receivables*
Uang muka lainnya	26,659,717,928	43,150,910,807	*Other prepayment*
Biaya dibayar di muka	19,228,135,731	17,918,012,512	*Prepaid expenses*
Beban ditangguhkan lainnya	4,796,565,384	5,067,075,576	*Deffered other expenses*
Bunga atas penempatan pada bank lain	4,785,801,872	7,518,880,323	*Placement and marketable securities accrued interest*
Persediaan lainnya	4,463,710,795	3,385,483,097	*Other inventory*
Persediaan kantor	2,191,343,183	2,511,203,595	*Office supplies*
Uang jaminan	2,085,228,000	2,106,798,000	*Security deposit*
Bunga atas penempatan pada bank lain	2,378,276,389	2,575,401,776	*Interest on placement at other bank*
Lainnya	2,059,465,118	44,386,172,144	*Printing matters*
Total	242,765,749,681	275,608,521,825	*Total*

Aset tidak produktif / *Assets - non productive*

Rincian atas aset tidak produktif adalah sebagai berikut: / *Details of assets - non productive are as follows:*

	2019	2018	
Agunan yang diambil alih	123,371,666,813	123,980,666,813	*Foreclosed assets*
Properti terbengkalai	169,210,927	169,210,927	*Abandoned property*
Total	123,540,877,740	124,149,877,740	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai:			*Allowance for impairment losses:*
Aset yang diambil alih	63,832,550,000	61,230,800,000	*Foreclosed assets*
Properti terbengkalai	169,210,927	169,210,927	*Abandoned property*
Total penyisihan	64,001,760,927	61,400,010,927	*Total allowance*
Bersih	**59,539,116,813**	**62,749,866,813**	***Net***

Saldo agunan yang diambil alih atau kompensasi pinjaman yang diberikan berupa tanah. Per 31 Desember 2019 Bank Papua melakukan penyisihan penghapusan AYDA untuk Kantor Cabang Merake dan Properti Terbengkalai untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang Merauke sesuai dengan PBI 14/15/PBI/2012 sebesar 100% dikarenakan telah diambil alih lebih dari 5 (lima) tahun.

Foreclosed assets comprise of land structure. As of December 31, 2019 Bank of Papua conduct of allowance for foreclosed assets for Merauke Branch Office and abandoned property for Head Office and Merauke Branch Office in accordance with PBI 14/15/PBI/2012 amounted to 100% because the item has been taken more than 5 (five) years.

Saldo aset tidak produktif per 31 Desember 2019 sebesar Rp124.149.877.740 terdiri dari Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp123.980.666.813 dengan rincian Rp.100.000.000.000 untuk Kantor Cabang Utama Jayapura, Rp13.772.256.813 untuk Kantor Cabang Merauke dan Rp10.208.410.000 untuk Kator Cabang Jakarta dan properti terbengkalai sebesar Rp169.210.927 dengan rincian Kantor Pusat sebesar Rp89.887.050 dan Kantor Cabang Merauke sebesar Rp79.323.877. Dengan penyisihan penghapusan sebesar Rp64.001.760.927 dengan rincian untuk AYDA Rp63.832.550.000 dan properti terbengkalai sebesar Rp169.210.927.

Non productive assets as of December 31, 2019 amounted Rp124,149,877,740 consist of foreclosed assets in amount Rp123,980,666,813 with details Rp100,000,000,000 for Jayapura Main Branch Office and Rp13,772,256,813 for Merauke Branch Office and Rp10,208,410,000 for Jakarta Branch Office and abandoned property of Rp169.210.927 with details of Head Office for Rp89,887,050 and Merauke Branch Office of Rp79,323,877 With allowance for possible losses of Rp64,001,760,927 with details for foreclosed assets of Rp63,832,550,000 and Abandoned Property of Rp169,210,927.

Berdasarkan risalah Komite Kredit tanggal 18 Desember 2015 dan 13 Oktober 2017, diputuskan pengambil alihan agunan atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dari PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer. Kesepakatan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tersebut sudah disahkan dengan Akta Notaris tentang Akta Kesepakatan Penyerahan Secara Sukarela. Posisi liabilitas PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp100.000.000.000 dan Rp10.208.410.000.

On December 18, 2015 and October 13, 2017, credit commitee decided to take over the collateral of PT Trah Maju Tama and PT Njonja Meneer as foreclosed asset. The agreement of foreclosed asset has been ratified by Notarial Deed on Agreement of Voluntary Commitment. The liability of PT Trah Maju Tama and Njonja Meneer ended December 31, 2019 in amount Rp100,000,000,000 and Rp10,208,410,000.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset tidak produktif

Saldo agunan sebesar Rp38.071.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. SHM No.09985 SU No.02781/2002, SHM No.07866 SU No.00350/2013,dan SHM No.4850 SU No.7547/1995 atas nama Sukron Hadiwijaya, total luas masing-masing 426 m2, 847 m2, dan 1.054 m2, terletak di Kel. Caturtunggal Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, dan Kel. Condongcatur Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta dengan nilai agunan Rp33.272.000.0000.

b SHGB sebanyak 6 sertifikat terdiri dari No.11, 12, 13, 14, 15, 16 atas nama PT Purni Mekar Perkasa Jaya, luas masing-masing 24 M2 untuk 5 sertifikat dan 26 M2 untuk 1 sertifikat. Terletak di Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur dengan nilai agunan Rp1.771.000.000. Jatuh tempo tanggal 29 April 2043 untuk semua sertifikat.

c SHM No.212 atas nama Kasmini dengan luas 5.100 M2. Terletak di Kel. Kumitir Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan nilai agunan sebesar Rp3.028.200.000.

Nilai atas kedua agunan tersebut di atas diperoleh dari hasil penilaian appraisal independen pada tahun 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Guntur,Eki,Andri & Rekan.

Saldo agunan sebesar Rp11.477.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. SHGB No.497 atas nama PT Njonja Meneer, total luas 1.269m2, terletak di Jl. Raden Parag 177 kel. Mlatibaru dengan nilai agunan sebesar Rp5.156.000.000. Pada tahun 2019 AYDA ini telah terjual dengan harga Rp5.312.000.000

b. SHM No.504 dan 513 atas nama Charles Saerang, total luas masing-masing 205 m2 dan 579 m2, terletak di Kompleks bukit sari Jl bukit indah no.16 di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp5.556.200.000.

c. SHM No.842 atas nama Charles Saerang, total luas 807m2, terletak di Jl Bukit Wisnu di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp5.921.400.000.

Nilai atas agunan tersebut di atas diperoleh dari hasil penilaian appraisal independen pada tahun 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset - aset yang disebutkan di atas telah memadai.

Biaya dibayar dimuka

Per 31 Desember 2019, biaya dibayar dimuka sebesar Rp19.228.135.731 termasuk didalamnya merupakan sewa dibayar dimuka atas sewa kantor sebesar Rp15.790.031.842.

Per 31 Desember 2018, biaya dibayar dimuka sebesar Rp17.918.012.512 termasuk didalamnya merupakan sewa dibayar dimuka atas sewa kantor sebesar Rp17.333.622.278.

11. OTHER ASSETS (continued)

Assets - non productive

Collateral position amounted to Rp38,071,000,000 are as follows:

a. Land ownership certificate (SHM) No.09985 SU No.02781/2002, SHM No.07866 SU No.00350/2013, and SHM No.4850 SU No.7547/1995 on behalf Sukron Hadiwijaya, the total area each of 426 m2, 847 m2, and 1.054 m2, located on Kel. CaturTunggal Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta, and Kel. Condongcatur Kab. Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta with collateral amounted Rp33,272,000,0000.

c. Lands Right to Use certificate (SHGB) with 6 certificates consist of No.11, 12, 13, 14, 15, 16 on behalf PT Purni Mekar Perkasa Jaya, the total area each 24 M2 for 5 certificates and 26 M2 for 1 certificate. Located on Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, East Java with collateral amounted Rp1,771,000,000. Maturity date on April 29, 2043 for all certificates.

d. Land ownership certificate (SHM) No.212 on behalf Kasmini with total area 5,100 M2. Located on Kel. Kumitir Kec Jatirejo Kab. Mojokerto, East Java Province with collateral amounted Rp3,028,200,000.

Value of both collateral mentioned above were obtained from the results of an independent appraisal in 2018 by the Office of Public Appraisal Service Guntur, Eki, Andri & Partner.

Collateral position amounted to Rp11,478,000,000 are as follows:

a. Lands Right to Use certificate (SHGB) No.497 on behalf PT Njonja Meneer, the total area of 1,269m2, located on Jl. Raden Parag 177 kel. Mlatibaru with collateral amounted Rp5,156,000,000.In 2019 this AYDA was sold at a price of Rp5,312,000,000

b. Land ownership certificate (SHM) No.504 and 513 on behalf Charles Saerang, the total area each 205 m2 and 579 m2, located on Kompleks bukit sari Jl Bukit Indah No.16 in Kel. Jagli Kec. Temalang Semarang City with collateral amounted Rp5,556,200,000.

c. Land ownership certificate (SHM) No.842 on behalf Charles Saerang, the total area of 807m2, located on Jl Bukit Wisnu in Kel. Jagli Kec. Temalang Semarang City with collateral amounted Rp5.921.400.000.

Value of both collateral mentioned above were obtained from the results of an independent appraisal in 2019 by the Office of Public Appraisal Service Damianus Ambur & Partner.

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

Prepaid expenses

As of December 31, 2019, prepaid expenses amounted to Rp19,228,135,731 comprise of prepaid office rent amounted to RpRp15,790,031,842.

As of December 31, 2018, prepaid expenses amounted to Rp17,918,012,512 comprise of prepaid office rent amounted to Rp17,333,622,278.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. LIABILITAS SEGERA / 12. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY

Akun ini merupakan kewajiban Bank Papua yang harus segera dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

This account consists of obligation due immediately of Bank Papua, is as follows:

	2019	2018	
Rekening titipan	996,100,299,212	605,242,727,892	*Accounts not yet setteld*
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara	346,984,524,809	213,398,902,642	*Liabilities to the State Treasury and Cash Office*
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	5,426,598,394	5,095,928,338	*Matured security deposits not yet collected by customers*
Utang Bunga	5,194,647,202	4,624,632,310	*Interest Payable*
Total liabilitas segera lainnya	**1,353,706,069,617**	**828,362,191,181**	***Total Obligation Due Immediatelly***

Rekening Titipan / *Deposit Account*

Rekening titipan terdiri dari titipan transfer keluar sebesar Rp45.211.314.046, titipan kliring sebesar Rp246.046.378.993, titipan RTGS sebesar Rp424.185.687.724 dan titipan lain lain, yang diselesaikan pada tahun buku berikutnya.

The deposit account consisted of outgoing transfers of Rp45,211,314,046, clearing deposits amounting to Rp.246,046,378,993, RTGS deposits amounting to Rp424,185,687,724 and other deposits, which were settled in the following financial year.

Titipan Dana *Block Grand* / *Deposit Funds of Block Grand*

Titipan dana *Block Grand* merupakan rekening titipan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program RESPEK di wilayah distrik, kelurahan dan kampung-kampung di Propinsi Papua dan Papua Barat.

Deposit funds of Block Grand are account not yet settled from the special autonomy fund. The funds are used for programs in the region RESPEK districts and villages in the provinces of Papua and West Papua.

Pengelolaan dana *Block Grand* di seluruh wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan oleh Bank Papua. Adapun seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan Bank Papua.

Fund management Block Grand on the whole territory of Papua and West Papua Provinces held by Bank Papua. As for all the costs incurred to be dependents by Bank Papua.

Per 31 Desember 2019 saldo titipan dana *Block Grand* sejumlah Rp562.431.600 terdiri dari penerimaan dana untuk penyaluran tahun 2016 sebesar Rp362.431.600, penyaluran tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 dan penyaluran tahun 2009 sebesar Rp100.000.000.

As of December 31, 2019 the balance of deposit funds Block Grand amounted Rp562,431,600 consist of receiving funds for distribution in 2016 amounted of Rp362,431,600, distibution in 2012 amounted of Rp100,000,000 and the distribution in 2009 amount of Rp100,000,000.

Per 31 Desember 2019 rincian dana *Block Grand* berdasarkan tahun penyaluran dan cabang adalah sebagai berikut:

as of Desember 31, 2019 details of Block Grant funds by year and branch distribution are as follows:

Cabang/*Branch*	Tahun Penyaluran/*Distribution Years*				Jumlah per 31 Desember 2019 / *Total as of December 31, 2019*
	2019 - 2018	2016	2012	2009	
KC Kepi	-	362,431,600	-	-	362,431,600
KCU Manokwari	-	-	-	100,000,000	100,000,000
KC Aimas	-	-	100,000,000	-	100,000,000
Jumlah/Total	-	362,431,600	100,000,000	100,000,000	562,431,600

Titipan Lainnya / *Other Deposits*

Titipan lainnya merupakan titipan atas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang belum dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Other deposits are deposits of SP2D (Fund Disbursement Order) that have not been disbursed until December 31, 2019

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SIMPANAN NASABAH / 13. *DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang / *By Type and Currency*

	2019	2018	
Giro	11,086,816,914,065	8,151,732,824,174	*Current accounts*
Tabungan	8,804,223,014,941	7,361,170,495,527	*Saving accounts*
Deposito berjangka	2,953,894,546,830	2,416,157,515,574	*Time accounts*
Jumlah	**22,844,934,475,836**	**17,929,060,835,275**	***Total***

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank Papua adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of 31 December 2019 and 2018, Bank Papua was a participant of that guarantee program.

b. Berdasarkan Hubungan / *By relationship*

	2019	2018	
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro	5,104,074,874,308	3,194,184,163,287	*Current accounts*
Tabungan	6,159,764,849	24,349,988,323	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,942,007,393,268	1,521,239,000,000	*Time accounts*
Jumlah pihak berelasi	7,052,242,032,425	4,739,773,151,610	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro	5,982,742,039,757	4,957,548,660,887	*Current accounts*
Tabungan	8,798,063,250,092	7,336,820,507,204	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,011,887,153,562	894,918,515,574	*Time accounts*
Jumlah pihak ketiga	15,792,692,443,411	13,189,287,683,665	*Total third parties*
Jumlah	**22,844,934,475,836**	**17,929,060,835,275**	***Total***

c. Berdasarkan jenis / *By type*

	2019	2018	
Giro			*Current accounts*
Pemerintah Kabupaten / Kota	3,310,708,392,075	2,637,331,933,149	*Local Regency Government*
Swasta	5,307,069,539,948	4,498,245,744,262	*Privates*
Pemerintah Provinsi	1,935,291,762,919	665,902,156,160	*Local Government*
Pemerintah Lainnya	451,551,974,653	264,973,766,577	*Other Government*
Lainnya	82,195,244,470	85,279,224,026	*Others*
Jumlah giro	11,086,816,914,065	8,151,732,824,174	*Total current accounts*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / **13. *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

c. Berdasarkan jenis / *c. By type*

	2019	2018	
Tabungan			*Saving accounts*
Simanja	3,479,460,523,887	2,914,843,706,016	*Simanja*
Simpeda	3,057,034,324,830	2,920,696,126,511	*Simpeda*
Tabungan Dana Desa	729,640,319,442	417,732,495,539	*Tabungan Dana Desa*
Tabungan KPE	727,490,613,640	539,051,129,874	*Tabungan KPE*
Tabunganku	412,651,596,064	328,825,890,407	*Tabunganku*
Pemberdayaan Masyarakat	163,257,383,024	135,447,209,165	*Pemberdayaan Masyarakat*
Tabungan Simanja Lanny MCS	70,580,359,100	-	*Tabungan Simanja Lanny MCS*
Tabungan Simanja Bangga Papua	51,600,274,000	36,261,000,000	*Tabungan Simanja Bangga Papua*
Tabungan SIMPEL	48,819,135,988	40,045,678,976	*Tabungan SIMPEL*
Tabungan Simanja BSPS	29,795,064,000	1,012,050,000	*Tabungan Simanja BSPS*
Tabungan Simanja DAK BRS	10,743,316,215	1,752,632,424	*Tabungan Simanja DAK BRS*
Tabunganku LPMAK	7,808,053,572	14,495,768,304	*Tabunganku LPMAK*
Tabungan Simanja Asmat Pintar	7,076,548,753	3,661,614,459	*Tabungan Simanja Asmat Pintar*
Tabungan Simpel PIP PA	2,630,891,051	2,324,872,651	*Tabungan Simpel PIP PA*
Tabungan Simanja UNIPA	1,940,033,477	1,267,620,843	*Tabungan Simanja UNIPA*
Tabungan BSM SD	1,778,029,714	2,006,553,530	*Tabungan BSM SD*
Tabungan BSM SMP	824,878,384	926,018,384	*Tabungan BSM SMP*
Tabungan Simanja Pensiun	447,101,003	172,194,358	*Tabungan Simanja Pensiun*
Tabungan BSM SMA	345,183,315	361,723,983	*Tabungan BSM SMA*
Tabungan BSM SMK	163,302,438	160,542,438	*Tabungan BSM SMK*
Tabungan gaji Jakarta	127,861,172	117,445,793	*Tabungan gaji Jakarta*
Tabungan Simanja TNP	8,221,872	8,221,872	*Tabungan Simanja TNP*
Jumlah tabungan	8,804,223,014,941	7,361,170,495,527	*Total saving accounts*
Deposito berjangka			*Time deposit*
1 (satu) bulan	1,331,146,910,798	941,458,749,982	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	1,255,033,370,170	1,162,269,659,045	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	154,386,010,287	137,007,870,644	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	158,832,848,908	121,747,169,236	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	54,495,406,667	53,674,066,667	*24 (twenty four) month*
Jumlah deposito berjangka	2,953,894,546,830	2,416,157,515,574	*Total time deposit*
Jumlah	**22,844,934,475,836**	**17,929,060,835,275**	**Total**

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

	2019	2018	
Giro	517,872,229,012	105,952,012,365	*Current accounts*
Tabungan	226,062,168,337	186,609,640,107	*Saving accounts*
Deposito berjangka	18,212,900,000	1,686,234,100	*Time accounts*
Jumlah	762,147,297,349	294,247,886,572	*Total*

d. Tingkat suku bunga per tahun / *d. Annual interest rates*

2019	2018
0.00% - 7.50%	0.00% - 6.25%

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN / 14. *DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang / *By Type and Currency*

	2019	2018	
Giro	46,754,360,591	54,714,989,552	*Current accounts*
Tabungan	6,246,260,482	4,241,841,966	*Saving accounts*
Deposito berjangka	62,953,870,000	5,798,000,000	*Time accounts*
Jumlah	**115,954,491,073**	**64,754,831,518**	***Total***

b. Berdasarkan Hubungan / *By relationship*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro	46,754,360,591	54,714,989,552	*Current accounts*
Tabungan	6,246,260,482	4,241,841,966	*Saving accounts*
Deposito berjangka	62,953,870,000	5,798,000,000	*Time accounts*
Jumlah pihak ketiga	115,954,491,073	64,754,831,518	*Total third parties*
Jumlah	**115,954,491,073**	**64,754,831,518**	***Total***

c. Berdasarkan jenis / *By type*

	2019	2018	
Giro			*Current accounts*
Bank Swasta Lainnya	39,609,101,991	53,924,688,930	*Other Private banks*
Bank pemerintah	7,083,719,560	727,689,672	*Government banks*
Bank BPD	61,539,040	62,610,950	*BPD banks*
Jumlah Giro	46,754,360,591	54,714,989,552	*Total current accounts*
Tabungan			*Saving accounts*
Tabungan bank lainnya	6,246,260,482	4,241,841,966	*Saving of other banks*
Jumlah tabungan	6,246,260,482	4,241,841,966	*Total saving accounts*
Deposito berjangka			*Time deposit*
1 (satu) bulan	-	2,300,000,000	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	62,500,000,000	-	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	248,000,000	248,000,000	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	200,000,000	3,250,000,000	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	5,870,000	-	*24 (twenty four) month*
Jumlah deposito berjangka	62,953,870,000	5,798,000,000	*Total time deposit*
Jumlah	**115,954,491,073**	**64,754,831,518**	**Total**

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *Deposits blocked and pledged as collateral*

	2019	2018	
Giro	29,750,000,000	17,600,000,000	*Current accounts*
Tabungan	500,000,000	-	*Savings*
Jumlah	30,250,000,000	17,600,000,000	*Total*

e. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

2019	2018
0.00% - 7.25%	0.00% - 5.35%

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA / 15. BORROWINGS

Pinjaman diterima terdiri dari: / *Borrowing consist of:*

	2019	2018	
KUMK SUP-005	584,931,986	5,057,948,630	*KUMK SUP-005*
Program Dana FLPP	76,979,425,386	43,699,293,989	*FLPP Fund Program*
Pinjaman ICM Bank Umum	-	150,000,000,000	*ICM Commercial Bank loans*
Total pinjaman yang diterima	77,564,357,372	198,757,242,619	*Total borrowing*

a. Pinjaman KUMK SUP-005

Pinjaman yang berasal dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 untuk digunakan dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Pemerintah diwakili oleh Direktur Jendral Pembendaharaan Departemen Keuangan telah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp35.000.000.000 sesuai perjanjian pinjaman No.KP-23/DP3/2004 tanggal 26 Juli 2004 sebagaimana dan perubahan perjanjian pinjaman nomor: AMA-8/KP-023/DP3/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan nomor: AMA-57/KP-023/DSMI/2009 tanggal 14 September 2009 serta perubahan nomor: AMA-82/KP-023/DSMI/2015 tanggal 12 Januari 2015. Jangka waktu pinjaman dari tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan 10 Desember 2009 dan diperpanjang sampai dengan 10 Desember 2019 dengan tingkat suku bunga sesuai dengan suku bunga SBI berjangka 3 bulan yang dibayarkan setiap tri-wulan tanggal 10. Untuk angsuran pokok dibayar tiap tengah semester dimulai tanggal 10 Desember 2017 dan berakhir tanggal 10 Desember 2019. Pada tanggal 27 Mei 2019 dan 6 Desember 2019 dilakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 dan Rp2.000.000.000 sehingga sisa pinjaman menjadi sebesar RpNihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pembayaran bunga sebesar Rp176.945.173 dan Rp297.360.730.

a. KUMK SUP-005 Borrowing

Borrowing from the Government Debt Securities (GDS) No.SU005/MK/1999 dated December 29, 1999 for the purpose of funding of Micro and Small Business Loans (KUMK). According to the borrowing agreement No.KP-23/DP3/2004 dated July 26, 2004 which modified with number AMA-8KP.023/DP3/2004 dated December 15, 2004, and AMA-57/KP-023/DSMI/2009 dated September 14, 2009 and AMA82/KP-023/DSMI/2015 tanggal Januari 12, 2015, the government represented by the Director General of Treasury of the Minister of Finance has granted a borrowing facility amounted to Rp35,000,000,000. The borrowing period from July 26, 2004 to December 10, 2009 and were rescheduled until December 10, 2019, with the interest rate is according to interest rate of Bank Indonesia Certificate, and the borrowing payments are on the 10th of every 3 months. For the payments of borrowing principal are made on the 10th of every six months, starting from December 10, 2017 until December 10, 2019. On May 27, 2019 and December 6, 2019, bank has made repayment of the loan amounted to Rp2,000,000,000 and Rp2,000,000,000, so that the rest of the loans amounted to RpNihil. As of December 31, 2019 and 2018, the amount of interest payment were Rp176,945,173 and Rp297.360.730.

b. Program Dana FLPP

Berdasarkan perjanjian kerjasama operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT BPD Papua No.HK.02.03.-Sg.DL/57/2017 atau No.60/PKS-BPD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017. perjanjian tersebut mengalami perubahan dengan Adendum No.45/PKS/Sg/2018 atau No.63/PKS-BPD/VIII/2018 terkait penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengalami ekspansi dengan perjanjian No.71/PKS/Sg/2019 atau No.90/PKS-BPD/XII/2019 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sisa dana FLPP per 31 Desember 2019 sebesar Rp76.979.425.386.

b. FLPP Fund Program

Based on an operational cooperation agreement between the Central Management of Housing Fund Financing of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia with PT BPD Papua No.HK.02.03.-Sg.DL / 57/2017 or No.60 / PKS-BPD / XII / 2017 dated 21 December 2017. The agreement was amended with Addendum No.45 / PKS / Sg / 2018 or No63 / PKS-BPD / VIII / 2018 related to the distribution of funds for housing finance liquidity facilities through housing loans for low-income communities and experienced expansion with agreements No.71 / PKS / Sg / 2019 or No.90 / PKS-BPD / XII / 2019 concerning channeling housing finance liquidity facilities through loans / financing of sharia prosperous housing / prosperous housing for low-income people. The remaining FLPP funds as of December 31, 2019 amounted to Rp76,979,425,386

c. Pinjaman ICM Bank Umum

Pada tanggal 31 Desember 2018 Terdapat saldo ICM Bank Umum sebesar Rp150.000.000.000 dan atas pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman ICM dari BPD Kalimantan Timur
- Senilai Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga 7,10%, Jangka waktu 19 Desember 2018 sampai dengan 02 Januari 2019. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 02 Januari 2019.

Pinjaman ICM dari BPD Kalimantan Timur
- Senilai Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga 7,40%, Jangka waktu 05 Desember 2018 sampai dengan 04 Januari 2019. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 04 Januari 2019.

c. ICM Commercial Bank Loans

On December 31, 2018 There is a ICM Commercial Bank Amounted to Rp150,000,000,000 and above the loan was repaid in 2019 with the following details:

ICM loan from BPD Kalimantan Timur
- *Amounted Rp100,000,000,000 with an interest rate of 7.10%, due on December 19, 2018 until January 02, 2019. This loan was fully repaid on January 04, 2019.*

ICM loan from BPD Kalimantan Timur
- *Amounted Rp50,000,000,000 with an interest rate of 7.40%, due on December 05, 2018 until January 04, 2019. This loan was fully repaid on January 04, 2019.*

16. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI / *16. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Papua yang dicatat pada *extra-comptable* adalah sebagai berikut:

a. Commitments and contingent transactionsin the normal course of Bank Papua's activities that have recorded on extra-comptable are as follows:

	2019	2018	
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	1,258,943,386,264	939,397,232,368	*Unused loan facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	228,830,379,068	203,618,459,443	*Bank guarantees issued*
Saldo Akhir Tahun	**1,487,773,765,332**	**1,143,015,691,811**	***Ending balance***

b. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi:

b. Movements of estimated losses on commitments and contingencies:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	-	-	*Beginning balance*
(Pembalikan Penyisihan) Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	-	-	*(Reversal of provision) Provision during the current year*
Saldo Akhir Tahun	**-**	**-**	***Ending balance***

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tentang Penyesuaian Pelaporan di LBU, penyajian di Laporan Keuangan, dan Perhitungan KPMM terkait dengan Penerbitan SE No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2012 mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum tanggal 23 Desember 2012, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) untuk aset non produktif dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) tidak diperhitungkan lagi di posisi Laporan Keuangan (laporan posisi keuangan) dan Laporan Laba Rugi Bank.

Based on the Letter of Bank Indonesia on 13/658/DPNP/IDPnP about Adjustment Reporting in LBU, the presentation of the financial statements, and the calculation of CAR associated with the issuance of the SE No. 13/30/DPNP dated December 16, 2012 concerning Quarterly Financial Reports and Monthly Commercial Bank dated December 23, 2012, allowance for assets (PPA) for non-productive assets and Off-statements of financial position Transaction (TRA) are not counted again in the position of Bank's Financial Statements (statements of financial position) and Income Statement.

Hal tersebut di atas dilakukan sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia (SE LKP) yang terbit tanggal 16 Desember 2012, maka sejak pelaporan posisi Desember 2012, LKP disajikan sesuai format pada Lampiran SE dimaksud.

The foregoing relates to the issuance of Bank Indonesia Circular Letter No.13/30/DPNP perihall Third Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No. 3/30/DPNP dated December 14, 2001 concerning Quarterly Financial Report and Monthly Report of Commercial Banks and Terrtentu submitted to Bank Indonesia (SE CGC), published on December 16, 2012, since reporting positions December 2012, CGC is presented in conformity format with Appendix SE.

Kolektibilitas atas transaksi komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 digolongkan lancar. Manajemen bank berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontijensi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak terealisasinya transaksi komitmen dan kontijensi.

Collectibility of commitment and contingencies bearing credit risk as of December 31, 2018 and 2017 are classified as current. Management states that such estimates are adequate to cover the posible loss arising from such unrealized commitments and contingencies.

17. LIABILITAS LAIN-LAIN / *17. OTHER LIABILITIES*

Rincian akun liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

Detail of other liabilities is as follows:

	2019	2018	
Liabilitas manfaat karyawan (lihat Catatan 30)	219,668,265,313	160,171,040,066	*Post-employment benefit (see Note 30)*
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas (lihat Catatan 26)	86,647,793,590	63,574,724,983	*Bonuses and Directors and Boards of Regulatory's tantiems (see Note 26)*
Rekening titipan	22,213,799,226	27,530,368,462	*Temporary account*
Biaya yang masih harus dibayar	14,911,138,737	5,898,004,748	*Accrued expenses*
Bunga deposito	5,411,914,623	3,176,125,911	*Interest of time deposit*
Setoran jaminan	3,804,108,450	4,046,316,295	*Bonds*
Pendapatan diterima dimuka	57,279,350	57,279,350	*Unearned revenues*
Lainnya	665,011,572	502,405,471	*Others*
Jumlah liabilitas lain-lain	353,379,310,861	264,956,265,286	*Total other liabilities*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Titipan

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo titipan pada rekening titipan sebesar Rp23.974.725.201 terdiri dari titipan notaris yang berasal dari proses Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT), dan Asuransi Kredit masing - masing sebesar Rp7.307.909.625 dan Rp2.296.153.839.

Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar antara lain biaya kantor, listrik, air dan telekomunikasi.

17. OTHER LIABILITIES (continued)

Deposit

As of December 31, 2018, there is a deposit balance on deposit account amounted to Rp23,974,725,201 consist of deposit from notary arises from the process of binding of mortgage (APHT) and Loan Assurance amounted to Rp7,307,909,625 and Rp2,296,153,893 respectively.

Accrued expenses

Acrued expenses consist of office exepenses, electrical, water and telecomunication.

18. PERPAJAKAN / *18. TAXES*

a. Uang Muka Pajak / *a. Prepaid Taxes*

	2019	2018	
PPh Pasal 28A	479,964,022	730,745,714	*Income tax article 28A*
Jumlah	479,964,022	730,745,714	*Total*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2019	2018	
PPN Keluaran	14,048,679,556	7,257,680,521	*VAT out*
PPh Lainnya	13,599,928,489	16,783,605,790	*Other income tax*
PPh Pasal 21	6,460,691,802	4,379,638,228	*Income tax article 21*
PPh 29 Badan	8,534,390,067	28,964,007,457	*Corporate income tax article 29*
Jumlah	42,643,689,914	57,384,931,996	*Total*

c. Beban Pajak Penghasilan - Bersih / *c. Current Income Tax Expenses - Net*

	2019	2018	
Pajak kini	(111,332,706,500)	(65,225,893,000)	*Current income tax*
Pajak tangguhan	18,745,777,450	8,721,681	*Deferred income tax*
Jumlah	(92,586,929,050)	(65,217,171,319)	*Total*

d. Perhitungan Pajak Kini / *d. Calculation of Current Corporate Income Tax*

	2019	2018	
Laba (Rugi) sebelum Pajak	342,624,191,014	283,793,061,143	*Income (loss) before income tax*
Beda Temporer			*Temporary differences*
Tantiem	86,647,793,590	10,928,794,491	*Bonuses*
Penyisihan beban imbalan kerja	42,191,776,758	49,881,525,380	*Provision for employee benefits*
Jumlah	128,839,570,348	60,810,319,871	*Total*
Beda Tetap			*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(29,163,023,654)	(83,699,808,739)	*Non - deductible expenses*
Jumlah beda tetap	(29,163,023,654)	(83,699,808,739)	*Total*
Laba kena pajak	442,300,737,708	260,903,572,275	*Taxable income*
Laba kena pajak pembulatan	445,330,826,000	260,903,572,000	*Taxable income rounded*
Beban pajak penghasilan badan	111,332,706,500	65,225,893,000	*Corporate inceme tax expense*
Dikurangi pajak dibayar dimuka	(102,798,316,433)	(36,261,855,543)	*less prepaid tax*
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan	8,534,390,067	28,964,037,457	*Income tax (liability) /receivable*

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***18. TAXES (continued)***

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of computation of commercial income with prevailing tax rates is as follows:

	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan	85,656,047,754	70,948,265,286	*Income before income tax*
Beda Temporer			*Temporary differences*
Penyisihan beban imbalan kerja	32,209,892,587	15,202,579,968	*Provision for employee benefits*
Jumlah Beda temporer	32,209,892,587	15,202,579,968	*Total*
Beda Tetap			*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(7,290,755,914)	(20,924,952,419)	*Non - deductible expenses*
Jumlah beda tetap	(7,290,755,914)	(20,924,952,419)	*Total*
Beban Pajak Kini	111,332,706,500	65,225,893,000	*Current income tax*

e. Pajak tangguhan / *e. Deffered tax*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Details of deffered tax asset and liabilities as of December 31, 2019 and 2018, are as follows:

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charges to Equity*	Saldo Akhir
Kenaikan (Penurunan) Nilai pasar Surat berharga Tersedia untuk dijual / *Increase (Decrease) In Marketable Securities Available for sale*	(993,005,350)	-	967,958,066	(25,047,284)
Tantiem/*Bonuses*	2,732,198,623	18,929,749,775	-	21,661,948,398
Imbalan manfaat karyawan/ Post-employment benefit	40,042,760,017	(183,972,325)	15,058,278,637	54,917,066,329
Jumlah	**41,781,953,290**	**18,745,777,450**	**16,026,236,703**	**76,553,967,443**

	31 Desember 2018 / December 31, 2018			
	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charges to Equity*	Saldo Akhir
Kenaikan (Penurunan) Nilai pasar Surat berharga Tersedia untuk dijual / *Increase (Decrease) In Marketable Securities Available for sale*	(12,796,062)	-	(980,209,288)	(993,005,350)
Tantiem/*Bonuses*	-	2,732,198,623	-	2,732,198,623
Imbalan manfaat karyawan/ Post-employment benefit	89,862,709,828	(2,723,476,942)	(47,096,472,869)	40,042,760,017
Jumlah	**89,849,913,766**	**8,721,681**	**(48,076,682,157)**	**41,781,953,290**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM / 19. SHARE CAPITAL

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2019

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership* (%)	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership* (%)
Saham seri A/ *Class A shares*			
a. Provinsi Papua:			
Province of Papua:			
Pem.Prov. Papua	97,721	21.24	488,605,000,000
Pem.Kab. Jayawijaya	7,802	1.70	39,010,000,000
Pem.Kab. Merauke	17,477	3.80	87,385,000,000
Pem.Kota. Jayapura	14,579	3.17	72,895,000,000
Pem.Kab. Jayapura	9,616	2.09	48,080,000,000
Pem.Kab. Yapen	9,094	1.98	45,470,000,000
Pem.Kab. Puncak Jaya	10,350	2.25	51,750,000,000
Pem.Kab. Biak Numfor	5,005	1.09	25,025,000,000
Pem.Kab. Mimika	15,346	3.33	76,730,000,000
Pem.Kab. Asmat	8,600	1.87	43,000,000,000
Pem.Kab. Sarmi	12,500	2.72	62,500,000,000
Pem.Kab. Pegunungan Bintang	11,400	2.48	57,000,000,000
Pem.Kab. Mappi	6,400	1.39	32,000,000,000
Pem.Kab. Nabire	6,356	1.38	31,780,000,000
Pem.Kab. Paniai	3,700	0.80	18,500,000,000
Pem.Kab. Tolikara	7,631	1.66	38,155,000,000
Pem.Kab. Keerom	6,000	1.30	30,000,000,000
Pem.Kab. Waropen	5,510	1.20	27,550,000,000
Pem.Kab. Boven Digul	5,622	1.22	28,110,000,000
Pem.Kab. Yahukimo	2,591	0.56	12,955,000,000
Pem.Kab. Lanni Jaya	2,500	0.54	12,500,000,000
Pem.Kab. Supiori	3,931	0.85	19,655,000,000
Pem.Kab. Memberamo Raya	4,600	1.00	23,000,000,000
Pem.Kab. Nduga	3,333	0.72	16,665,000,000
Pem.Kab. Dogiyai	4,474	0.97	22,370,000,000
Pem.Kab. Intan Jaya	2,147	0.47	10,735,000,000
Pem.Kab. Puncak	3,400	0.74	17,000,000,000
Pem.Kab. Memberamo Tengah	1,036	0.23	5,180,000,000
Pem.Kab. Yalimo	1,419	0.31	7,095,000,000
Pem.Kab. Deiyai	1,800	0.39	9,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	291,940	63.44	1,459,700,000,000
b. Provinsi Papua Barat:			
Province of West Papua:			
Pem.Prov. Papua Barat	66,128	14.37	330,640,000,000
Pem.Kab. Manokwari	10,128	2.20	50,640,000,000
Pem.Kab. Fak-Fak	10,085	2.19	50,425,000,000
Pem.Kab. Raja Ampat	13,238	2.88	66,190,000,000
Pem.Kab. Kaimana	6,000	1.30	30,000,000,000
Pem.Kab. Manokwari Selatan	2,475	0.54	12,375,000,000
Pem.Kab. Sorong	6,355	1.38	31,775,000,000
Pem.Kab. Sorong Selatan	9,800	2.13	49,000,000,000
Pem.Kab. Teluk Bintuni	12,900	2.80	64,500,000,000
Pem.Kab. Teluk Wondama	5,400	1.17	27,000,000,000
Pem.Kota Sorong	3,453	0.75	17,265,000,000
Pem.Kab. Maybrat	3,815	0.83	19,075,000,000
Pem.Kab. Tambrauw	3,650	0.79	18,250,000,000
Pem.Kab. Pengunungan Arfak	3,800	0.83	19,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	157,227	34.17	786,135,000,000
Jumlah Saham seri A/ *Total Class A shares*	**449,167**	**97.61**	**2,245,835,000,000**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***19. SHARE CAPITAL (continued)***

2019

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership* (%)	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership* (%)
Saham seri B/ *Class B shares*			
c. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	10,993	2.39	54,965,000,000
Jumlah Saham seri B/ *Total Class B shares*	**10,993**	**2.39**	**54,965,000,000**
Jumlahl Modal/*Capital*	**460,160**	**100**	**2,300,800,000,000**
Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid up Capital*	**26,662**	**-**	**133,311,022,106**

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp2.434.111.022.106

Total paid up by shareholders as of December 31, 2019 amounted to Rp2,434,111,022,106

Tambahan modal disetor sebesar Rp269.855.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Irnawati Nazar, SH no. 41 tanggal 29 Maret 2019, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Tambahan modal disetor sebesar Rp133.311.022.106 merupakan setoran modal dari kabupaten di Papua selama tahun 2019 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2020.

Additional paid-in capital of Rp269,855,000,000 thereon ratified into the capital stock by virtue of notary deed Irnawati Nazar, SH no. 41 dated March 29, 2019, regarding Annual General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Additional paid-in capital of Rp133,311,022,106 is a capital contribution of new districts in Papua during 2019 which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2020.

2018

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership* (%)	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership* (%)
Saham seri A/ *Class A shares*			
a. Provinsi Papua:			
Province of Papua:			
Pem.Prov. Papua	77,721	19.13	388,605,000,000
Pem.Kab. Jayawijaya	7,802	1.92	39,010,000,000
Pem.Kab. Merauke	13,477	3.32	67,385,000,000
Pem.Kota. Jayapura	11,579	2.85	57,895,000,000
Pem.Kab. Jayapura	9,616	2.37	48,080,000,000
Pem.Kab. Yapen	9,094	2.24	45,470,000,000
Pem.Kab. Puncak Jaya	10,350	2.55	51,750,000,000
Pem.Kab. Biak Numfor	5,005	1.23	25,025,000,000
Pem.Kab. Mimika	15,346	3.78	76,730,000,000
Pem.Kab. Asmat	8,600	2.12	43,000,000,000
Pem.Kab. Sarmi	10,500	2.59	52,500,000,000
Pem.Kab. Pegunungan Bintang	10,400	2.56	52,000,000,000
Pem.Kab. Mappi	5,900	1.45	29,500,000,000
Pem.Kab. Nabire	5,756	1.42	28,780,000,000
Pem.Kab. Paniai	3,700	0.91	18,500,000,000
Pem.Kab. Tolikara	7,631	1.88	38,155,000,000
Pem.Kab. Keerom	5,029	1.24	25,145,000,000
Pem.Kab. Waropen	5,510	1.36	27,550,000,000
Pem.Kab. Boven Digul	4,300	1.06	21,500,000,000
Pem.Kab. Yahukimo	2,591	0.64	12,955,000,000
Pem.Kab. Lanni Jaya	2,500	0.62	12,500,000,000
Pem.Kab. Supiori	3,931	0.97	19,655,000,000
Pem.Kab. Memberamo Raya	4,600	1.13	23,000,000,000
Pem.Kab. Nduga	3,333	0.82	16,665,000,000
Pem.Kab. Dogiyai	3,274	0.81	16,370,000,000
Pem.Kab. Intan Jaya	1,747	0.43	8,735,000,000
Pem.Kab. Puncak	3,400	0.84	17,000,000,000
Pem.Kab. Memberamo Tengah	1,036	0.26	5,180,000,000
Pem.Kab. Yalimo	1,419	0.35	7,095,000,000
Pem.Kab. Deiyai	1,200	0.30	6,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	256,347	63.11	1,281,735,000,000

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan) / *19. SHARE CAPITAL (continued)*

2018

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership* (%)	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership* (%)
b. Provinsi Papua Barat:			
Province of West Papua:			
Pem.Prov. Papua Barat	56,128	13.82	280,640,000,000
Pem.Kab. Manokwari	10,128	2.49	50,640,000,000
Pem.Kab. Fak-Fak	8,885	2.19	44,425,000,000
Pem.Kab. Raja Ampat	13,238	3.26	66,190,000,000
Pem.Kab. Kaimana	6,000	1.48	30,000,000,000
Pem.Kab. Manokwari Selatan	1,850	0.46	9,250,000,000
Pem.Kab. Sorong	6,155	1.52	30,775,000,000
Pem.Kab. Sorong Selatan	8,800	2.17	44,000,000,000
Pem.Kab. Teluk Bintuni	10,100	2.49	50,500,000,000
Pem.Kab. Teluk Wondama	5,400	1.33	27,000,000,000
Pem.Kota Sorong	2,400	0.59	12,000,000,000
Pem.Kab. Maybrat	3,215	0.79	16,075,000,000
Pem.Kab. Tambrauw	3,250	0.80	16,250,000,000
Pem.Kab. Pengunungan Arfak	3,400	0.84	17,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	138,949	34.21	694,745,000,000
Jumlah Saham seri A/ *Total Class A shares*	**395,296**	**97.32**	**1,976,480,000,000**
Saham seri B/ *Class B shares*			
c. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	10,893	2.68	54,465,000,000
Jumlah Saham seri B/ *Total Class B shares*	**10,893**	**2.68**	**54,465,000,000**
Jumlahl Modal/*Capital*	**406,189**	**100**	**2,030,945,000,000**
Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid up Capital*	**34,647**	**-**	**173,233,073,144**

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai Rp2.204.178.073.144.

Total paid up by shareholders as of December 31, 2018 amounted to Rp2,204,178,073,144.

Tambahan modal disetor sebesar Rp123.095.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Maryatie Simanjuntak, SH no. 54 tanggal 27 April 2018, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Tambahan modal disetor sebesar Rp173.233.073.144 merupakan setoran modal dari kabupaten di Papua selama tahun 2018 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2019.

Additional paid-in capital of Rp123,095,000,000 thereon ratified into the capital stock by virtue of notary deed Maryatie Simanjuntak, SH no. 54 dated April 27, 2018, regarding Annual General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Additional paid-in capital of Rp173,233,075,144 is a capital contribution of new districts in Papua during 2018 which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2019.

20. PEMBAGIAN LABA BERSIH / *20. DISTRIBUTION OF NET INCOME*

Penggunaan laba tahun 2018 ditetapkan berdasarkan akta notaris Irnawati Nazar, SH No.41 tanggal 29 Maret 2019 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Net income distribution for the year 2018 was made based on virtue of notarial deed Irnawati Nazar, SH. No.41 dated March 29, 2019 regarding General Shareholder's Extraordinary Meeting.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba tahun 2018 dan 2017 ditetapkan sebagai berikut:

Based on the above General Shareholder's Meeting, the distributions of income for the financial years 2018 and 2017, were as follows:

	2018	2017	
Dividen	55.00%	55.00%	*Dividends*
Cadangan umum	40.00%	40.00%	*General reserve*
Tantiem	5.00%	5.00%	*Tantiems*
Jumlah laba yang dibagikan	100%	100%	*Total earning distribution*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN BUNGA DAN OPERASIONAL / *21. INTEREST AND OPERATING INCOMES*

	2019	2018	
Pendapatan Bunga			***Interest and Operating Income***
Pendapatan bunga kredit			*Loan interest income*
Bunga kredit konsumsi	947,368,345,855	945,637,291,020	*Consumer loans interest*
Bunga kredit modal kerja	288,607,609,307	296,071,897,989	*Working capital loans interest*
Bunga kredit investasi	87,390,381,739	97,548,851,728	*Investment loans interest*
Bunga kredit sindikasi	149,911,890,944	100,368,362,381	*Syndicated loans interest*
Bunga kredit karyawan	25,059,291,556	25,693,337,105	*Employee loans interest*
Bunga kredit program pemerintah	8,392,906,062	3,627,807,962	*Government program credit interest*
Bunga Kredit Unwinding	7,446,818,971	21,815,550,046	*Employee loans interest*
Jumlah pendapatan bunga kredit	1,514,177,244,434	1,490,763,098,230	*Total loan interest income*
Pendapatan bunga penempatan			*Placement interest income*
Bunga penempatan bank lain	197,952,059,477	162,265,923,356	*Placement interest other bank*
Bunga penempatan bank Indonesia	6,897,959,398	6,321,733,787	*Deposits interest*
Bunga Efek-efek	278,398,188,106	233,424,715,552	*Investment interest*
Jumlah Pendapatan bunga penempatan	483,248,206,981	402,012,372,695	*Total Placement interest income*
Jumlah	1,997,425,451,415	1,892,775,470,925	*Total*
Pendapatan operasional lainnya			***Operational Income***
Pendapatan hapus buku	105,547,555,131	97,122,869,647	*Written off income*
Pendapatan operasional lainnya	49,837,296,769	58,612,237,436	*Other operational income*
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan	(10,855,975,983)	(32,564,060,521)	*Unrealized gain (loss) on changes in fair value and sale of financial instruments*
Jumlah	144,528,875,917	123,171,046,562	*Total*
Pendapatan provisi dan komisi			***Provision and commisions income***
Provisi lainnya	63,807,322,641	63,469,033,908	*Other provision*
Hasil komisi	36,744,807,977	36,759,121,854	*Comissions*
Jumlah	100,552,130,618	100,228,155,761	*Total*
Jumlah pendapatan bunga dan operasional	**2,242,506,457,950**	**2,116,174,673,247**	***Total interest and operational income***

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan provisi dan komisi selain dari aktivitas pinjaman yang diberikan.

Provision and comission income generated from activities other than loans.

22. BEBAN BUNGA DAN OPERASIONAL / *22. INTEREST AND OPERATING EXPENSES*

	2019	2018	
Beban bunga dan operasional			***Interest and operating expenses***
Beban bunga			*Interest expenses*
Bunga pada pihak ketiga bukan bank	285,142,492,494	231,211,578,474	*Interest to third parties non bank*
Jasa giro pemerintah	117,322,580,788	105,313,272,933	*Government current deposit service*
Jasa giro swasta	7,264,820,537	7,136,925,569	*Private current deposit service*
Bunga pada bank lain	5,593,246,337	8,063,761,744	*Interest of other bank*
Jasa giro lainnya	23,448,080	36,970,265	*Other demand deposit service*
Jumlah beban bunga	415,346,588,236	351,762,508,984	*Total interest expenses*
Beban provisi dan komisi			*Provision and commisions expenses*
Komisi/Provisi pinjaman	128,487,458	180,710,747	*Loan provision /comissions*
Komisi/Provisi lainnya	1,787,133,207	1,508,021,947	*Other provision /comissions*
Jumlah beban provisi dan komisi	1,915,620,665	1,688,732,694	*Total provision and commisions expenses*
Jumlah beban bunga dan operasional	**417,262,208,901**	**353,451,241,679**	***Total interest and operating expenses***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *23. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	2019	2018	
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif:			*Provision / (recovery) for possible losses for productive assets:*
Pinjaman yang diberikan	178,021,160,319	484,460,936,769	*Loans*
Surat-surat berharga	-	-	*Marketable securities*
Jumlah	178,021,160,319	484,460,936,769	*Total*
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif:			*Provision / (recovery) for possible losses for non productive assets:*
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	2,601,750,000	46,230,800,000	*Allowance collateral*
Properti Terbengkalai	-	-	*Abandonned property*
Jumlah	2,601,750,000	46,230,800,000	*Total*
Jumlah	180,622,910,319	530,691,736,769	*Total*

24. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI / *24. DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE*

	2019	2018	
Beban penyusutan	25,474,589,522	41,886,935,100	*Depreciation expenses*
Beban amortisasi	2,429,063,892	2,582,927,015	*Amortisation expenses*
Jumlah	27,903,653,414	44,469,862,115	*Total*

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2019	2018	
Beban umum kantor	125,152,045,247	111,365,362,608	*General expenses*
Beban riset dan pengembangan	85,880,028,988	71,593,477,515	*Research and development expenses*
Beban premi asuransi	54,982,144,441	50,964,466,106	*Insurance premium expenses*
Beban barang dan jasa	49,071,397,347	55,905,073,052	*Goods service expenses*
Beban sewa	48,844,551,907	54,961,062,093	*Rent expenses*
Beban pendidikan dan pelatihan	43,062,980,057	16,715,374,270	*Education and training expenses*
Beban pemeliharaan	37,612,766,344	35,223,853,324	*Maintenance expenses*
Beban promosi	25,839,054,294	21,099,909,769	*Promotion expenses*
Beban iuran-iuran	11,969,590,815	9,763,055,350	*Contribution expenses*
Beban lainnya	10,084,558,416	11,595,599,721	*Others expenses*
Beban pembinaan karyawan	4,397,171,683	1,481,007,800	*Employees training expenses*
Beban pajak-pajak	3,499,500,339	61,587,757,625	*Taxes expenses*
Beban perbaikan	2,610,598,345	2,312,990,868	*Repair expenses*
Beban retribusi	392,379,929	338,608,051	*Retribution expenses*
Jumlah	503,398,768,152	504,907,598,153	*Total*

26. BEBAN TENAGA KERJA / *26. PERSONEL EXPENSES*

	2019	2018	
Upah tetap dan tidak tetap	309,844,108,080	242,529,186,793	*Salary and wages*
Upah kerja lainnya	123,302,078,738	120,700,361,202	*Other allowance*
Bonus dan insentif	86,340,668,038	63,428,794,491	*Bonus and incentives*
Iuran tenaga kerja	60,588,888,144	60,575,287,512	*Daily worker wages*
Jumlah	580,075,743,000	487,233,629,998	*Total*

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja pegawai dan Bank, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees and the Bank's performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Bank Papua dan Komite Audit.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, and Commissioners of Bank Papua, and Audit Committee.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

27. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL / 27. NON OPERATING INCOMES

	2019	2018	
Pendapatan bukan operasional lainnya	42,598,558,172	137,904,937,914	*Other non operating income*
Penerimaan bunga excomp	7,402,731,627	3,523,804,456	*Excomp interest income*
Penerimaan sewa	269,265,600	193,003,200	*Rent income*
Jumlah	50,270,555,399	141,621,745,570	*Total*

28. BEBAN BUKAN OPERASIONAL / 28. NON OPERATING EXPENSES

	2019	2018	
Kerugian lainnya	5,460,240,354	2,901,954,097	*Others losses*
Kerugian aset rusak / hilang	833,355,145	465,809,486	*Asset losses*
Jumlah	6,293,595,499	3,367,763,583	*Total*

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTINJENSI / 29. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENT AND CONTINGENCIES

	2019	2018	
Komitmen			*Commitment:*
Liabilitas komitmen:			*Commitment liabilities*
Komitmen kredit yang belum ditarik	(1,258,943,386,264)	(939,397,232,368)	*Unused loan facility granted*
Liabilitas komitmen - neto	(1,258,943,386,264)	(939,397,232,368)	*Liabilities - net*
Tagihan kontinjensi :			*Contingencies recivables:*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	455,368,839,378	491,676,143,428	*Interest receivable on non performing loan*
Liabilitas kontinjensi :			*Contingencies liabilities:*
Garansi yang diterbitkan:			*Quarantee granded:*
Pelaksanaan	(51,135,070,105)	(52,320,669,625)	*Performance*
Pemeliharaan	(16,339,735,762)	(11,911,506,985)	*Retention*
Uang muka	(80,986,779,647)	(59,510,615,859)	*Advanced payment*
Tender	(2,006,979,225)	(1,609,982,603)	*Tender*
Lainnya	(78,361,814,329)	(78,265,684,371)	*Others*
	(228,830,379,068)	(203,618,459,443)	
Liabilitas kontinjensi bersih	226,538,460,310	288,057,683,985	*Net contingencies liability*
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	(1,032,404,925,954)	(651,339,548,383)	*Total commitment and contingencies liability - net*

30. IMBALAN PASCA KERJA / 30. POST-EMPLOYMENT BENEFIT

Program pensiun manfaat pasti

Bank Papua memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua yang pesertanya meliputi semua karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Tujuan perhitungan ini adalah untuk menentukan kewajiban imbalan pasca kerja bagi PT. Bank Papua periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 dan 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019 sesuai ketentuan PSAK-24 revisi 2016.

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Papua yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Papua No. 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-564/NB.1/2015 tanggal 12 Nopember 2015.

Defined benefit pension plan

Bank Papua has a defined benefit pension plan through the Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua, with participants covering all employees who are aged 18 years or married. The purpose of these evaluations are determining the employment benefits for PT Bank Pembangunan Daerah Papua for period January 01, 2018 to December 31, 2018 and January 01, 2019 to December 31, 2019, in respect to PSAK - 24 revision 2016.

Employee Benefits are calculated based on the Regulation of Dana Pensiun Bank Papua as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Papua No. 69 / DIR-BPD / X / 2014 dated October 22, 2014 and has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-564 / NB.1 / 2015 dated November 12, 2015.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / 30. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaris terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018 were prepared by a registered actuarial consulting firm PT Sentra Jasa Aktuaria using the "Projected Unit Credit" method.

Jumlah pegawai Bank Papua yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 2.181 orang dan 2.250 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

The total number of qualified employees of Bank Papua who are entitled to the benefits are 2,181 employees and 2,250 employees as of December 31, 2019 and 2018, respectively (unaudited).

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan aktuaria PT Sentra Jasa Aktuaria masing-masing pada tanggal 2 Maret 2020 dan 5 Maret 2019 disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the pension plan as of December 31, 2019 and 2018 based on the actuarial reports of PT Sentra Jasa Aktuaria dated March 2, 2020 and March 5, 2019 respectively, are as follows:

	2019	2018	
Nilai wajar aset dana pensiun	(743,289,875,130)	(628,628,428,732)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	857,087,377,660	701,981,537,404	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih pendanaan	113,797,502,530	73,353,108,672	*Funding difference*
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	*Unrecognized actuarial past service cost*
Laba aktuaria yang belum diakui	-	-	*Unrecognized actuarial gain*
Beban dibayar di muka (cadangan)	**113,797,502,530**	**73,353,108,672**	***Prepaid (provision for) pension benefit cost***

Rekonsiliasi atas perubahan beban dibayar di muka (cadangan) kewajiban imbalan pasca kerja selama tahun 2019 dan 2018 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

A reconsiliation of the movements of prepaid (provision for) pension benefit cost during year 2019 and 2018 that is recognized in pension fund financial position are follows :

	2019	2018	
Beban dibayar di muka (cadangan) awal tahun	73,353,108,672	241,431,391,738	*Prepaid (provision for) pension benefit cost at beginning of year*
Pembayaran Imbalan	-	-	*Payment*
Beban tahun berjalan	41,455,887,458	49,881,525,380	*Current year expenses*
Pendapatan Komprehensif lain	59,868,487,972	(175,185,159,570)	*Other Comprehensive income*
Kontribusi Pemberi Kerja	(60,879,981,572)	(42,774,648,876)	*Employer's contributions*
Beban dibayar di muka (cadangan) akhir tahun	113,797,502,530	73,353,108,672	*Prepaid (provision for) pension benefit cost at end of year*

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in the statements of comprehensive income, are as follows:

	2019	2018	
Biaya jasa kini	35,264,885,086	32,498,465,175	*Current service cost*
Biaya bunga	59,247,241,757	60,416,100,064	*Interest cost*
Hasil yang diharapkan dari aset	(53,056,239,385)	(43,033,039,859)	*Result are expected from asset*
Laba / Rugi Aktuaria	-	-	*Actuarial profit / loss*
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	41,455,887,458	49,881,525,380	*Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement*

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / 30. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah: / *The key assumptions used in the above calculation are:*

	2019	2018	
Tingkat kematian	TMI'11	*TMI'11*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% tingkat kematian	*10% Mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 tahun	*6% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of 45 years old*	*Resignation rate*
Tingkat pensiun dini	1% dari tingkat kelangsungan hidup	*1% of survival rate*	*Early Retirement Rate*
Tingkat bunga			*Interest rate*
- Tingkat Diskonto pada tanggal evaluasi	7.3% per tahun/*per annum*	8.4% per tahun/*per annum*	*Discount rate at valuation date*
- Kenaikan gaji masa depan	3% *per annum*	*5% per annum*	*Future salary increase*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya. / *The liability for other long-term employee benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.*

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 2 Maret 2020 dan 5 Maret 2019. / *The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated March 2, 2019 and March 5, 2019.*

Jumlah pegawai Bank Papua yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 2.345 orang dan 2.412 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit). / *The total number of qualified employees of Bank Papua who are entitled to the benefits are 2,345 employees and 2,412 employees as of December 31, 2019 and 2018, respectively (unaudited).*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank Papua pada laporan laba rugi komprehensif: / *Employee benefit expense recognized by Bank Papua in the statements of income:*

	2019	2018	
Biaya jasa kini	192,069,344,479	10,859,985,190	*Current service cost*
Biaya bunga	5,993,935,158	8,497,400,226	*Interest cost*
Laba / Rugi Aktuaria	-	-	*Actuarial profit / loss*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(4,923,224,045)	(25,114,224,152)	*Remeasurement of Other Long Term Employee Benefits*
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	193,140,055,592	(5,756,838,736)	*Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement*

Perubahan liabilitas yang diakui Bank Papua pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / *The movements of the employee benefits liability recognized by in the statements of financial position are as follows:*

	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	105,870,762,783	86,817,931,394	*Liability present value*
Nilai wajar aset	-	-	*Assets fair value*
Status pendanaan	105,870,762,783	86,817,931,394	*Status of funding*
Liabilitas transisi yang belum diakui		-	*Unrecognized transition liability*
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	*Unrecognized past service expenses*
Laba / Rugi Aktuaria yang belum diakui	-	-	*Profit / loss of unrecognized actuarial*
Biaya dibayar dimuka (Liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan	105,870,762,783	86,817,931,394	*Prepaid expenses (Liability) which is recognized in the statements of financial position*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

30. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *30. POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Other long-term employee benefits (continued)***

Rekonsiliasi Biaya dibayar dimuka (cadangan) adalah sebagai berikut: / *Reconciliation Prepaid expenses (reserves) are as follows:*

	2019	2018	
Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal	86,817,931,394	118,019,447,572	*Beginning balance Prepaid expenses (reseves)*
Pembayaran Imbalan	(19,451,850,778)	(12,243,945,535)	*Payment of benefit*
Beban (Pendapatan)	193,140,055,592	(5,756,838,736)	*Expenses (income)*
Pendapatan komprehensif lainnnya	364,626,575	(13,200,731,907)	*Other Comprehensive Income*
Kontribusi pemberi kerja	(155,000,000,000)	-	*Employer's contributions*
Biaya dibayar dimuka (cadangan) akhir	105,870,762,783	86,817,931,394	*Ending Prepaid expenses (reseves)*

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: / *The key assumptions used in the calculation of the above estimated expense and liability are as follows:*

	2019	2018	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto pada tanggal valuasi	5.42% - 8.19% *p.a*	8,44% *p.a*	*Annual discount rate*
Kenaikan gaji masa depan	3% *p.a*	5% *p.a*	*Future salary increase*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Tingkat kematian	TMI'11	TMI'11	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% tingkat kematian	10% Mortality rate	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	6% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pension normal	6% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of two years before normal retirement age	*Resignation rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN / *31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS*

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal pelaporan ini.

The following table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2019 and 2018, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occured after this reporting date.

	2019		2018		
	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	1,700,443,554,400	1,700,443,554,400	996,584,733,247	996,584,733,247	*Cash*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	150,000,000,000	163,124,000,000	150,000,000,000	146,931,148,125	*Government Bonds*
	150,000,000,000	163,124,000,000	150,000,000,000	146,931,148,125	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	197,380,893,000	197,280,703,863	476,012,021,400	477,016,417,138	*Mutual funds*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	2019		2018		
	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	135,056,253,558	135,735,000,000	-	-	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	-	-	-	-	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-		*Government Treasury Bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	320,000,000,000	322,692,888,000	160,000,000,000	160,218,322,262	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	147,000,000,000	147,000,000,000	192,000,000,000	192,000,000,000	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	3,163,385,119,775	3,163,661,301,931	1,315,051,787,700	1,315,051,787,700	*Reverse Repo*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	3,765,441,373,333	3,769,089,189,931	1,667,051,787,700	1,667,270,109,962	***Total available-for-sale***
Pinjaman dan piutang					***Loans and receivables***
Pinjaman yang diberikan	15,491,802,526,305	15,491,802,526,305	13,407,703,917,171	13,407,703,917,171	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	2,178,386,178,747	2,178,386,178,747	1,589,283,079,427	1,589,283,079,427	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	28,726,299,339	28,726,299,339	7,874,890,109	7,874,890,109	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	3,770,000,000,000	3,770,000,000,000	1,980,000,000,000	1,980,000,000,000	*Placement with other banks and Bank Indonesia*
Aset lain-lain *)	242,101,510,962	242,101,510,962	272,558,989,780	272,558,989,780	*Other assets *)*
Jumlah pinjaman dan piutang	21,711,016,515,353	21,711,016,515,353	17,257,420,878,500	17,257,420,876,487	***Total loans and receivables***
Jumlah	**27,524,282,336,086**	**27,540,953,963,547**	**20,547,069,420,847**	**20,545,223,284,959**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	1,353,706,069,617	1,353,706,069,617	828,362,191,181	828,362,191,181	*Obligation due immadiately*
Simpanan nasabah	22,844,934,475,836	22,844,934,475,836	17,929,060,835,275	17,929,060,835,275	*Deposits from customers*
Simpanan bank lain	115,954,491,073	115,954,491,073	64,754,831,518	64,754,831,518	*Deposits from other banks*
Pinjaman diterima	77,564,357,372	77,564,357,372	198,757,242,619	198,757,242,619	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain **)	353,379,310,861	353,379,310,861	264,956,265,286	264,956,265,286	*Other liabilities **)*
Jumlah	**24,745,538,704,759**	**24,745,538,704,759**	**19,285,891,365,880**	**19,285,891,365,880**	***Total***

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang lain-lain dan piutang bunga.
**) Liabilitas lain-lain terdiri dari beban yang masih harus dibayar, setoran jaminan, utang bunga, dan utang lainnya.

*) *Other assets consist of other receivables and interest receivables.*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, interest payable, and other payables.*

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar aset dan liabilitas tertentu selain surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diterima, dan obligasi subordinasi mendekati nilai tercatat karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Fair values of certain assets and liabilities other than held-to-maturity marketable securities, borrowing, and subordinated bond approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate.

Nilai wajar dari surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

The fair value of held-to-maturity marketable securities is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2019 and 2018.

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan obligasi subordinasi dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

The fair value of borrowing and subordinated bond is calculated using dicounted cash flows using market rate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

a. Tingkat 1: Dikutip dari harga pasar di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
b. Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);
c. Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The table below shows the financial instrument recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

a. Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
b. Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
c. Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	2019				
		Nilai Wajar / Fair Value			
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tingkat 1 / *Level 1*	Tingkat 2 / *Level 2*	Tingkat 3 / *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	150,000,000,000	163,124,000,000	-	-	*Government Bonds*
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	197,380,893,000	197,380,893,000	-	-	*Mutual funds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	135,056,253,558	135,056,253,558	-	-	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	-	-	-	-	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	*Government Treasury bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	320,000,000,000	320,000,000,000	-	-	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	147,000,000,000	147,000,000,000	-	-	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	3,163,385,119,775	3,163,385,119,775	-	-	*Reverse Repo*
	3,765,441,373,333	3,765,441,373,333	-	-	
Jumlah	**3,962,822,266,333**	**3,962,822,266,333**	**-**	**-**	***Total***

	2018				
		Nilai Wajar / Fair Value			
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Tingkat 1 / *Level 1*	Tingkat 2 / *Level 2*	Tingkat 3 / *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	146,931,148,125	146,931,148,125	-	-	*Government Bonds*
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	476,012,021,400	476,012,021,400	-	-	*Mutual funds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-	-	-	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	-	-	-	-	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	*Government Treasury Bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	160,218,322,262	160,218,322,262	-	-	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	192,000,000,000	192,000,000,000	-	-	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	1,315,051,787,700	1,315,051,787,700	-	-	*Reverse Repo*
	1,667,270,109,962	1,667,270,109,962	-	-	
Jumlah	**2,143,282,131,362**	**2,143,282,131,362**	**-**	**-**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

32. LABA PER SAHAM / *32. EARNING PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah saham biasa akhir tahun yang biasa beredar pada tahun yang bersangkutan.

Net earning per share is computed by dividing the net earning to the shareholders with total ordinary shares at end of year generally that outstanding during the related year.

	2019	2018	
Laba Operasional	298,647,231,114	145,539,079,155	*Operating Income*
Laba Bersih	250,037,261,964	218,575,889,824	*Net Income*

Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham ditempatkan dan setor penuh:

Weighted average total of issued and fully-paid share units:

	2019	2018	
Rata-rata tertimbang lembar saham	486,822	440,836	*Weighted average*
Laba Operasional per saham	613,463	330,144	*Operating income per*
Laba bersih per saham	513,611	495,822	*Net income per share*

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *33. RELATED PARTY TRANSACTION*

	2019	2018	
Kredit			*Loan*
Karyawan kunci	-	2,471,054,132	*Key employees*
Persentase dari total kredit	0.00%	0.02%	*Percentage to total loans*
Pemegang saham	1,508,983,608,968	969,350,863,063	*Share holders*
Persentase dari total kredit	10.79%	7.79%	*Percentage to total loans*
Simpanan			*Savings*
Karyawan kunci	13,284,764,849	40,940,958,955	*Key employees*
Persentase dari total Simpanan	0.06%	0.23%	*Percentage to total savings*
Pemegang saham	7,038,957,267,576	6,499,613,844,786	*Shareholders*
Persentase dari total simpanan	30.66%	36.12%	*Percentage to total loans*
Pendapatan bunga			*Interest income*
Pendapatan bunga karyawan kunci	-	-	*Interest income key employees*
Persentase dari total pendapatan bunga	0.0%	0.0%	*Percentage to total interest income*
Pendapatan bunga pemegang saham	73,169,717,548	52,962,424,672	*Interest income shareholders*
Persentase dari total pendapatan bunga	3.7%	2.8%	*Percentage to total interest income*
Beban bunga			*Interest expense*
Beban bunga karyawan kunci	27,482,523	12,749,291	*Interest expense key employees*
Persentase dari total beban bunga	0.01%	0.00%	*Percentage to total interest expense*
Beban bunga pemegang saham	106,906,455,742	93,527,736,542	*Interest expense shareholders*
Persentase dari total beban bunga	25.74%	26.59%	*Percentage to total interest expense*

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Detailed of relation nature and type of transaction with related parties are as follows:

No.	Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
1.	Pemerintah Propinsi Papua	Pemegang Saham	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Beban Bunga
2.	Karyawan kunci	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Wakil Kepala Cabang, Kepala Divisi	a. Pinjaman Kredit b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan c. Pendapatan bunga, dan d. Beban bunga

No.	*Related Parties*	*Types of Relation*	*Related Party Transactions*
1.	*The Government of Papua*	*Shareholder*	*a. Demand Deposit* *b. Time Deposit* *c. Interest Expense*
2.	*Key Employees*	*Directors, Commisioners, Heads of Branch, Heads of Divisions.*	*a. Loan* *b. Fund placements in form of savings* *c. Interest Income, and* *d. Interest Expense*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank Papua secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai proses penilaian risiko.

Bank Papua memiliki rencana untuk memperbaharui pelaksanakan *Credit Scoring Model* (CSM) yang mana akan menjadi dasar untuk pemberian kredit dengan penerapan dari CSM dimana hal tersebut dilakukan dengan penilaian 3 (tiga) pilar sesuai PBI 14/15/2012 tentang penilaian Kualitas Aktiva. Dengan demikian Bank Papua akan dapat memproses kredit secara masal untuk meningkatkan pelayanan dan akurasi data.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit secara proporsional pada setiap segmen usaha dan jenis kredit.

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loan* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018	
Rasio NPL - Bruto	5.06%	7.45%	*NPL Ratio - Gross*
Rasio NPL - Net	2.00%	2.44%	*NPL Ratio - Nett*

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset (nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			*Fair value through profit and loss*
Obligasi pemerintah	163,124,000,000	146,931,148,125	*Government bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Hold to maturity*
Efek-efek	282,056,253,558	192,000,000,000	*Securities*
Obligasi pemerintah	322,692,888,000	160,218,322,262	*Government bonds*
Reverse Repo	3,163,385,119,775	1,315,051,787,700	*Reverse Repo*
Kredit dan piutang			*Loan and receivable*
Giro pada			*Current accounts with*
Bank Indonesia	2,178,386,178,747	1,589,283,079,427	*Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28,726,299,339	7,874,890,109	*Current accounts with other bank*
Penempatan pada BI			*Placement with Bank Indonesia*
dan bank lain	4,166,016,950,544	3,639,732,682,048	*and other bank*
Kredit yang diberikan			*Loan*
Konsumsi	7,092,130,620,841	6,192,397,080,673	*Consumer*
Modal kerja	3,417,235,228,033	3,326,957,444,257	*Working capital*
Investasi	1,260,898,887,661	1,339,115,632,129	*Investment*
Sindikasi	2,352,607,970,445	1,520,243,174,951	*Syndicated*
Pemilikan rumah	1,359,683,792,599	1,301,610,597,280	*Home loan*
Direksi dan karyawan	491,365,459,225	413,282,796,178	*Directors and employees*
Program Pemerintah	86,756,105,894	53,610,658,303	*Government programs*
Jumlah	26,365,065,754,661	21,198,309,293,442	*Total*

a. *Credit Risk*

Regulation of the Financial Services Authority Number 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks where credit risk is defined as the risk arising from the failure of the debtor and / or other parties in fulfilling their obligations to the Bank.

Bank Papua regularly review and update the Guidelines for Risk Management Policy and Guidelines for the Credit Policy and Financing Bank loans and financing as the risk assessment process.

Bank Papua has a plan to renew the implementation of the Credit Scoring Model (CSM) which will be the basis for lending with the implementation of CSM where it is carried out by evaluating 3 (three) pillars in accordance with PBI 14/15/2012 concerning valuation of Quality Assets, thus Banks Papua will be able to process credit massively to improve service and data accuracy.

Another strategic step in the Bank's credit risk management is to make the distribution of credit risk and credit concentration control by increasing the loan portfolio in proportion to each business segment and type of loan.

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2019 and 2018:

(i) The maximum exposure to credit risk without taking into account collateral and other credit support.

Credit risk exposure to assets (net value less allowance for impairment losses) on the statements of financial position as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	2018	
Fasilitas kredit yang belum digunakan	1,258,943,386,264	939,397,232,368	*Unused loan facilities*
Garansi yang diberikan	228,830,379,068	203,618,459,443	*Guarantees issued*
Jumlah	1,487,773,765,332	1,143,015,691,811	*Total*

Saldo tersebut menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar 9,26% dan 8,08% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses kredit, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis Teknologi.
b. Bank Papua telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut
c. Bank Papua telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
d. Bank Papua telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
e. Bank Papua telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
f. Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, personal loans dan fasilitas antar bank.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

Credit risk exposures related to administrative accounts items as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

The amount above represents credit risk exposures at maximum of Bank Papua as of December 31, 2018 and 2017, without taking into account any collateral held or other credit enhancements. The exposures set out above are based on net carrying amounts of the assets as reported in the statements of financial position.

As of 31 December 2019 and 2018, the total maximum credit risk exposure in statement of financial position from loans is 9.26% and 8.08%, respectively.

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

a. The process of improving credit management in a sustainable manner by improving credit processes, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.
b. Bank Papua has a documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transactions must adhere to the requirements of the Bank's policy.
c. Bank Papua has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.
d. Bank Papua has done stress test on credit risk to assess the ability of Bank to stay in the non-normal condition and as an instrument for decision making for the Bank.
e. Bank Papua has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.
f. All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Bank menentukan struktur kredit termasuk penentuan covenant yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan, garansi/penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut intemal rating dan internal scoring yang ada agar sejalan dengan Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach) , yaitu dengan mengembangkan Basel II Risk Paramater model Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) dan Exposure Al Default (EAD) untuk segmen Wholesale , Retail dan Consumer . Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan Expected Credit Loss yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 71).

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Papua pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

Bank determines the structure of credit including the determination of the right covenant according to the needs and conditions of the debtor, so that the credit given is truly effective and profitable for both the debtor and the Bank. Types of collateral owned by the Bank are cash, deposits, collateral tied to mortgages and mortgage rights, third party guarantees / guarantees (including credit guarantees by insurance companies) and guarantees in the form of other assets. The estimated fair value of the collateral used by the Bank is based on the collateral value assessed by internal and external appraisers

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), namely by developing the Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) model, Loss Given Default (PD) LGD) and Al Default (EAD) Exposure for Wholesale, Retail and Consumer segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of Expected Credit Loss needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (PSAK 71)

The carrying value of bank financial assets other than loans and securities purchased with agreements to resell generally reflect the maximum exposure to credit risk.

The following amount provide the details of the Bank Papua credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2019 and 2018:

	2019				
	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /individuals*	
Giro pada Bank Indonesia	2,178,386,178,747	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	28,726,299,339	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3,929,981,113,341	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek	-	-	-		*Marketable securities*
Reverse Repo	3,163,385,119,775				*Reverse Repo*
Reksadana	197,380,893,000		-		*mutual funds*
Obligasi pemerintah	485,816,888,000	-	-	-	*Government bonds*
Kredit yang diberikan	1,508,983,608,968	317,215,154,719	5,351,443,162,743	8,883,036,138,268	*Loans*
Jumlah	7,533,952,688,490	4,275,922,567,399	3,883,642,886,944	8,883,036,138,268	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

2018

	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /individuals*	
Giro pada Bank Indonesia	1,589,283,079,427	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	7,874,890,109	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3,639,732,682,048	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek	-	172,000,000,000	20,000,000,000	-	*Marketable securities*
Reverse repo	1,315,051,787,700	-	-	-	*Reverse repo*
Reksadana	47,601,202,140	-	-	-	*mutual funds*
Obligasi pemerintah	307,149,470,387	-	-	-	*Government bonds*
Kredit yang diberikan	1,025,277,700,623	317,215,154,719	4,897,434,054,298	7,907,290,474,131	*Loans*
	4,284,363,240,277	4,136,822,726,876	4,917,434,054,298	7,907,290,474,131	

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2019 and 2018, are as follows:

2019

	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan / individuals*	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya.	42,974,195,425	-	1,215,969,190,839	-	*Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties*
Garansi yang diterbitkan	-	-	228,830,379,068		*Guarantee issued*
Jumlah	42,974,195,425	-	1,444,799,569,907	-	*Total*

2018

	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /individuals*	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya.	35,251,072,000	58,000,000,000	846,146,160,368	-	*Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties*
Garansi yang diterbitkan	-	-	203,618,459,443	-	*Guarantee issued*
Jumlah	35,251,072,000	58,000,000,000	1,049,764,619,811	-	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Giro pada bank lain

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(iii) Current accounts with other banks

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets is impaired either individually or collectively in accordance with Bank Indonesia.

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	28,726,299,339	-	28,726,299,339	*Rupiah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	28,726,299,339	-	28,726,299,339	*Net*

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	6,303,099,349	-	6,303,099,349	*Rupiah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	6,303,099,349	-	6,303,099,349	*Net*

(iv) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(iv) Placement with other bank and Bank Indonesia

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are not impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

(v) Efek - efek

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(v) Marketable securities

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Sertifikat Bank Indonesia	135,056,253,558	-	135,056,253,558	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	*Certificate Deposits of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	*Treasury note bills (SPN)*
Reksadana	197,380,893,000	-	197,380,893,000	*Mutual Funds*
Obligasi	632,816,888,000	-	632,816,888,000	*Bonds*
Reverse Repo	3,163,385,119,775	-	3,163,385,119,775	*Reverse Repo*
Jumlah	4,128,639,154,333	-	4,128,639,154,333	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	4,128,639,154,333	-	4,128,639,154,333	*Net*

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(v) Efek - efek (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(v) Marketable securities (continued)

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	*Total / Total*	
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	*Certificate Deposits of Bank Indonesia*
Reksadana	476,012,021,400	-	476,012,021,400	*Mutual Funds*
Obligasi	499,149,470,387	-	499,149,470,387	*Bonds*
Reverse Repo	1,315,051,787,700	-	1,315,051,787,700	*Reverse Repo*
Jumlah	2,290,213,279,487	-	2,290,213,279,487	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	2,290,213,279,487	-	2,290,213,279,487	*Net*

(vi) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per 31 Desember 2019 dan 2018, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai. (lihat Catatan 16)

(vi) Estimated losses on commitments and contingencies

As of December 31, 2019 and 2018, statements of financial position is not impaire. (see Note 16)

(vii) Kredit yang diberikan

Per 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 55). Ikhtisar kredit yang diberikan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

(vii) Loans

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are impaired either individually or collectively in accordance with SFAS No. 55. Summary of loans granted on December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Pertanian, perburuan dan kehutanan / *Agriculture, hunting, and forestry*	48,420,449,044	-	5,512,290,848	53,932,739,892
Perikanan / *Fishery*	12,211,136,863	-	627,843,307	12,838,980,170
Pertambangan dan penggalian / *Mining and excavation*	12,459,857,626	-	529,754,018	12,989,611,644
Industri Pengolahan / *Manufacturing Industry*	326,073,881,539	-	9,557,187,493	335,631,069,033
Listrik, gas dan air / *Utilities industry*	188,723,016,576	-	-	188,723,016,576
Konstruksi / *Construction*	1,803,305,694,273	175,397,414,698	131,900,004,790	2,110,603,113,761
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and groceries*	821,601,694,707	-	107,291,907,701	928,893,602,408
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / *Hotel, food and beverages*	1,076,420,512,371	107,478,808,844	11,333,450,323	1,195,232,771,538
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehousing, and communication*	250,067,283,568	-	7,157,844,350	257,225,127,918
Perantara keuangan / *Financial services*	259,295,443,708	-	56,009,922	259,351,453,630
Real estase, usaha persewaan, dan jasa perusahaan / *Real estate, rent, and service company*	66,791,903,017	-	23,674,620,886	90,466,523,903
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense, and social securities*	1,509,175,028,581	-	-	1,509,175,028,581
Jasa pendidikan / *Education service*	737,822,124	-	695,587,611	1,433,209,735
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healty and social service*	2,519,438,858	-	576,526,091	3,095,964,949

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(vii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(vii) Loans (continued)

	2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *social culture and other entertainment service*	119,029,356,915	-	16,263,551,109	135,292,908,025
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual and household services*	7,819,741,055	-	501,874,866	8,321,615,921
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya / *International services*	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *Others activities*	-	-	-	-
Rumah tangga/ *Household*	8,742,477,364,116	-	214,656,012,034	8,957,133,376,149
Bukan lapangan usaha / *Not in business sector*	337,950,865	-	-	337,950,865
Jumlah / *Total*	15,247,467,377,826	282,876,223,542	530,334,465,349	16,060,678,064,698
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(76,430,606,123)	(48,294,611,982)	(444,150,320,289)	(568,875,538,393)
Bersih / *Net*	15,171,036,771,703	234,581,611,560	86,184,145,060	15,491,802,526,305

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Pertanian, perburuan dan kehutanan / *Agriculture, hunting, and forestry*	47,854,194,760	-	6,028,030,954	53,882,225,714
Perikanan / *Fishery*	16,662,982,927	-	878,204,336	17,541,187,263
Pertambangan dan penggalian / *Mining and excavation*	2,307,304,069	10,000,000,000	5,267,144,948	17,574,449,017
Industri Pengolahan / *Manufacturing Industry*	77,228,044,714	-	12,301,539,722	89,529,584,436
Listrik, gas dan air / *Utilities industry*	247,919,497,082	-	301,000,000	248,220,497,082
Konstruksi / *Construction*	1,399,613,853,769	147,127,213,207	187,557,709,204	1,734,298,576,180
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and groceries*	961,055,073,331	-	161,620,319,878	1,122,675,393,209
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / *Hotel, food and beverages*	1,021,358,019,168	147,095,104,832	18,270,775,989	1,186,723,899,989
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehousing, and communication*	160,324,638,655	-	9,839,014,164	170,163,652,819
Perantara keuangan / *Financial services*	305,001,348,418	-	65,800,901	305,067,149,319
Real estase, usaha persewaan, dan jasa perusahaan / *Real estate, rent, and service company*	86,750,450,884	-	19,643,354,527	106,393,805,411
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense, and social securities*	969,589,480,595	-	-	969,589,480,595
Jasa pendidikan / *Education service*	1,562,595,146	-	852,896,723	2,415,491,869
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healty and social service*	5,913,541,634	-	3,091,352,002	9,004,893,636

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(vii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(vii) Loans (continued)

	2018			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *social culture and other entertainment service*	143,403,941,880	-	22,870,824,911	166,274,766,791
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual and household services*	9,053,883,466	-	3,809,928,079	12,863,811,545
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya / *International services*	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *Others activities*	-		-	-
Rumah tangga/ *Household*	7,637,232,179,212		297,443,032,781	7,934,675,211,993
Bukan lapangan usaha / *Not in business sector*	323,306,903		-	323,306,903
Jumlah / *Total*	13,093,154,136,613	304,222,318,039.00	749,840,929,119.00	14,147,217,383,771
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(31,321,048,118)	(39,166,539,018)	(669,025,879,464)	(739,513,466,600)
Bersih / *Net*	13,061,833,088,495	265,055,779,021	80,815,049,655	13,407,703,917,171

(viii) Nilai wajar agunan

Bank Papua memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, bangunan, kendaraan, hak tagih dan properti lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank Papua didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

(viii) Fair value of collateral

Bank Papua hold collateral against loans in the form of cash deposits, building, vehicle, receivables and others property. Estimates of fair value of collateral held by the Bank are based on the value of collateral assessed internally or externally by the independent appraisers.

(ix) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) :

(ix) The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses) that are neither past due nor impaired:

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / *Neither pas due nor impaired*		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Pas-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*
	Tingkat tinggi / *High grade*	Tingkat standar / *Standard grade*			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / *Fair value through profit and loss*					
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	163,124,000,000	-	-	-	163,124,000,000
Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to maturity securities*	282,056,253,558	-	-	-	282,056,253,558
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	322,692,888,000	-	-	-	322,692,888,000
Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*					
Reksadana / *Mutual funds*	197,380,893,000	-	-	-	197,380,893,000

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan) / 34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan) / a. Credit Risk (continued)

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / *Neither pas due nor impaired*		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Pas-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*
	Tingkat tinggi / *High grade*	Tingkat standar / *Standard grade*			
Kredit dan piutang / *Loan and receivable*					
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	2,178,386,178,747	-	-	-	2,178,386,178,747
Giro pada bank lain / *Current account with other banks*	28,726,299,339	-	-	-	28,726,299,339
Penempatan pada BI dan bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	4,166,016,950,544	-	-	-	4,166,016,950,544
Kredit yang diberikan / *Loan*					
Konsumer / *Consumer*	-	8,242,963,990,716	-	208,850,422,723	8,451,814,413,440
Modal kerja / *Working capital*	1,508,983,608,968	1,652,232,270,555	-	256,019,348,510	3,417,235,228,033
Investasi / *Investment*	-	919,512,585,001	-	341,386,302,660	1,260,898,887,661
Karyawan / *Employee*	-	486,105,201,453	-	5,260,257,772	491,365,459,225
Sindikasi / *Syndicated*	-	2,352,607,970,445	-	-	2,352,607,970,445
Program Pemerintah / *Government Program*	-	85,061,748,669	-	1,694,357,225	86,756,105,894
Jumlah / *Total*					16,060,678,064,698
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(1,508,981)	(76,429,097,142)		(492,444,932,270)	(568,875,538,393)
Netto / *Net*	(1,508,981)	(76,429,097,142)	-	(492,444,932,270)	15,491,802,526,305

*) terdiri dari tagihan dana pihak ketiga / *Consist of third party receivables*

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

The credit quality are defined as follows:

Tingkat tinggi

a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit; debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio laporan posisi keuangan yang konservatif.

High grade

a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the Sovereign, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.

b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative statements of financial position ratios.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ix) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) : (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat tinggi (lanjutan)

c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal idBBB- (Pefindo) atau BBB- (Fitch).

Tingkat standar

a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.

c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau BB+ sampai dengan B (Fitch).

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, liabilitas kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank Papua. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank Papua. Bank Papua mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank Papua saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank Papua memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aset. Bank Papua memelihara *primary reserve* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Kas di cabang-cabang.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(ix) The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses) that are neither past due nor impaired: (continued)

The credit quality are defined as follows: (continued)

High grade (continued)

c) Securities and government bonds are securities issued by government, investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB- (Pefindo) or BBB- (Fitch).

Standard grade

a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.

b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over; smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.

c) Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or BB+ to B (Fitch).

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as Risk as a result of the Bank's inability to meet the maturing obligations of cash flow fund sources and / or of high quality liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

The amounts of third party funds, asset liquidity, liabilities to counterparties and loan commitments to debtors are potential liquidity sources for the Bank. The incapability to raise funds with tolerable cost will impact the Bank Papua's profitability. The Bank manages its liquidity risk to fulfill each agreed financial liability on a timely basis and to maintain an adequate and optimum liquidity position at any time.

The policy on liquidity risk management covers, among others, the maintenance of optimum liquidity reserve, determination of funding strategy and maintaining an adequate access to the market. The Bank Papua current liquidity is measured through its primary and secondary reserves. The Bank maintains its primary and secondary reserves to fulfill its liquidity needs in order to satisfy unexpected withdrawals or expansion of assets. Bank Papua maintains its primary reserve through the minimum reserve requirements imposed by Bank Indonesia and cash in its branches.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktivitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan, Bank Papua melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal termasuk kondisi ekstrim/krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank Papua dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti : sekuritisasi aset, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*Government bond*).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

b. Liquidity Risk (continued)

The policy on liquidity risk management is prepared in accordance with the business activities carried out by operational units and considers the needs to expand the business. The Bank Papua conducts liquidity scenarios which include normal, abnormal and extreme conditions.Bank Papua is able to fulfill liquidity needs through alternative sources of financing other than through third party funds, which include asset securitization, securities under repurchase agreements or sale of securities, including Government bonds.

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2019 and 2018:

	2019					
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Lainnya / *Others*	1 Bulan / *1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Months*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Months*	> 12 Bulan / *> 12 Months*
ASET / *ASSETS*						
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	2,178,386,178,747	-	2,178,386,178,747	-	-	-
Giro pada Bank lain / *Current account with other banks*	28,726,299,339	-	28,726,299,339	-	-	-
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and Other banks*	3,929,981,113,341	-	3,929,981,113,341	-	-	-
Surat-surat berharga - bruto / *Marketable securities - gross*						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / *Fair value through profit and los*	163,124,000,000	163,124,000,000	-	-	-	-
Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held-to-maturity*	604,749,141,558	604,749,141,558				
Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*	197,380,893,000	197,380,893,000	-	-	-	-
Reverse Repo - bruto/ *Reverse Repo - gross*	3,163,385,119,775		3,163,385,119,775			
Kredit yang diberikan - bruto / *Loans - gross*	16,060,678,064,698	-	745,414,061,489	536,246,127,677	1,326,635,854,524	13,452,382,021,008
Bunga yang masih akan diterima / *Interest receivable*	44,708,535,264	44,708,535,264	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	26,371,119,345,722	1,009,962,569,822	10,045,892,772,691	536,246,127,677	1,326,635,854,524	13,452,382,021,008
LIABILITAS / *LIABILITIES*						
Liabilitas segera / *Obligation due immediately*)	1,353,706,069,617	-	1,353,706,069,617	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	22,844,934,475,836	19,891,039,929,006	1,331,146,910,798	1,409,419,380,457	158,832,848,908	54,495,406,667
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	115,948,621,073	53,000,621,073	-	62,748,000,000	200,000,000	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	77,564,357,372	77,564,357,372	-	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	20,323,053,360	20,323,053,360	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	24,412,476,577,258	20,041,927,960,811	2,684,852,980,415	1,472,167,380,457	159,032,848,908	54,495,406,667
Perbedaan jatuh tempo / *Maturity difference*	1,958,642,768,464	(19,031,965,390,989)	7,361,039,792,276	(935,921,252,780)	1,167,603,005,616	13,397,886,614,341

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan) / ***34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)***

b. Risiko Likuiditas (lanjutan) / ***b. Liquidity Risk (continued)***

	2018					
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Lainnya / *Others*	1 Bulan / *1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Months*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Months*	> 12 Bulan / *> 12 Months*
ASET / *ASSETS*						
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	1,589,283,079,427	-	1,589,283,079,427	-	-	-
Giro pada Bank lain / *Current account with other banks*	7,874,890,109	-	7,874,890,109	-	-	-
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and Other banks*	3,639,732,682,048	-	3,639,732,682,048	-	-	-
Surat-surat berharga - bruto / *Marketable securities - gross*						
- Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*	476,012,021,400	476,012,021,400	-	-	-	-
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / *Fair value through profit and los*	146,931,148,125	146,931,148,125				
Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held-to-maturity*	352,218,322,262	352,218,322,262				
Reverse Repo - bruto/ *Reverse Repo - gross*	1,315,051,787,700		1,315,051,787,700			
Kredit yang diberikan - bruto / *Loans - gross*	14,147,217,383,771	-	762,576,509,452	836,019,101,251	912,570,996,908	11,636,050,776,160
Bunga yang masih akan diterima / *Interest receivable*	52,141,458,511	52,141,458,511	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	21,726,462,773,353	1,027,302,950,298	7,314,518,948,736	836,019,101,251	912,570,996,908	11,636,050,776,160
LIABILITAS / *LIABILITIES*						
Liabilitas segera / *Obligation due*	828,362,191,181	-	828,362,191,181	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	17,929,060,835,276	15,512,903,319,701	941,458,749,982	1,299,277,529,690	121,747,169,236	53,674,066,667
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	64,754,831,518	58,956,831,518	2,300,000,000	248,000,000	3,250,000,000	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	198,757,242,619	48,757,242,619	150,000,000,000	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	9,074,130,659	9,074,130,659	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	19,030,009,231,254	15,629,691,524,498	1,922,120,941,163	1,299,525,529,690	124,997,169,236	53,674,066,667
Perbedaan jatuh tempo / *Maturity difference*	2,696,453,542,099	(14,602,388,574,200)	5,392,398,007,573	(463,506,428,439)	787,573,827,672	11,582,376,709,493

*) Terdiri dari titipan nasabah, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

*) *Consists of deposit customers, time deposits and interest on time deposits which have not been taken by the customers.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan) / *34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)*

b. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *b. Liquidity Risk (continued)*

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

The table below shows the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows (principal and interest):

	2019					
	Jumlah / *Total*	*On demand*	1 Bulan / *1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Month*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*
Liabilitas segera / *Current liabilities* *)	1,353,706,069,617	1,353,706,069,617	-	-	-	-
Simpanan nasabah / *Deposits from customers*	22,844,934,475,836	19,891,039,929,006	1,331,146,910,798	1,409,419,380,457	158,832,848,908	54,495,406,667
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	115,948,621,073	53,000,621,073	-	62,748,000,000	200,000,000	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	77,564,357,372	77,564,357,372	-	-	-	
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	20,323,053,360	20,323,053,360	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	24,412,476,577,258	21,395,634,030,428	1,331,146,910,798	1,472,167,380,457	159,032,848,908	54,495,406,667

*) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

*) *Consists of customer deposit's, undistributed profit sharing, time deposits and interest on time deposits which have not collected by customers*

c. Risiko Pasar / *c. Market Risk*

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Bank Papua. Secara umum Bank Papua terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Market risk is defined as the risk due to variable market factors and movements in the Bank Papua's portfolio. In general, the Bank Papua is exposed to interest rate and foreign currency risks.

Bank Papua juga melakukan *stress-testing* untuk mengevaluasi kemampuan Bank Papua agar dapat mengikuti berbagai macam perubahan kondisi eksternal.

Bank Papua also conducts stress-testing to evaluate the ability of the Bank Papua to keep up with various kinds of external condition changes.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.

Included in the market risk is the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and changes in currency exchange rates.

a. Risiko tingkat suku bunga / *a. Interest rate risk*

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows of the fair values of financial instruments.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for period ended December 31, 2019 and 2018:

	2019	2018	
ASET			***ASSETS***
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	4.25% - 8.50%	4.00% -8.40%	*Placements with Bank Indonesia and Other banks*
Efek-efek	5.93% - 10.25%	6.00% - 9.25%	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah			*Government bonds*
Tingkat bunga tetap	5.93% - 7.44%	7.85% - 8.04%	*Fixed interest rate*
Reverse Repo	5,05% - 7,02%	5.6% - 8.05%	*Reverse Repo*
Kredit yang diberikan	3,50% - 25.58%	5.00% - 24.47%	*Loans*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00% - 7.50%	0% - 6.98%	*Customer saving*
Simpanan dari bank lain	0.00% - 7.25%	0% - 6.98%	*Other cistomer saving*
Pinjaman diterima	3,50% - 25.58%	8.00% - 8.30%	*Borrowings*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank Papua terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) tidak diaudit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank Papua's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited) as of December 31, 2019 and 2018:

	2019					
	< 3 bulan / *< 3 month*	3 - 12 Bulan / *3 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*	Suku bunga tetap / *Fixed interest rate*	dikenakan bunga / *Non interest*	Jumlah / *Total*
Aset keuangan / *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	1,700,443,554,400	-	-	-	-	1,700,443,554,400
Giro pada BI / *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	-	2,178,386,178,747	-	2,178,386,178,747
Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	-	-	-	28,726,299,339	-	28,726,299,339
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	4,166,016,950,544	-	4,166,016,950,544
Efek-efek / *Marketable securities*	-	-	-	282,056,253,558	-	282,056,253,558
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	485,816,888,000	-	485,816,888,000
Reksadana / *Mutual fund*	-	-	-	197,380,893,000	-	197,380,893,000
Reverse Repo	3,163,385,119,775					3,163,385,119,775
Kredit yang diberikan / *Loans*		2,252,135,725,296	13,808,542,339,402	-		16,060,678,064,698
Bunga yang masih harus diterima / Accrued interest receivable	44,708,535,264	-	-	-	-	44,708,535,264
Jumlah Aset keuangan / Total financial assets	4,908,537,209,439	2,252,135,725,296	13,808,542,339,402	7,338,383,463,188	-	28,307,598,737,325
Dikurangi / *Less* :						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	-	(318,505,167,144)	(1,188,235,542,379)	-		(1,506,740,709,523)
Bersih / *Netto*	4,908,537,209,439	1,933,630,558,152	12,620,306,797,023	7,338,383,463,188	-	26,800,858,027,802
Liabilitas keuangan / *Financial liabilities*						
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	2,740,566,291,255	158,832,848,908	54,495,406,667	19,891,039,929,006	-	22,844,934,475,836
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	62,748,000,000	200,000,000	-	53,000,621,073	-	115,948,621,073
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	-	-	77,564,357,372	-	-	77,564,357,372
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	5,194,647,202	-	-		-	5,194,647,202
Jumlah liabilitas keuangan / *Total financial liabilities*	2,808,508,938,457	159,032,848,908	132,059,764,039	19,944,040,550,079	-	23,043,642,101,483
Gap repricing suku bunga - kotor / *Gross interest repricing gap*	2,100,028,270,982	1,774,597,709,244	12,488,247,032,984	(12,605,657,086,891)	-	3,757,215,926,319

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Resiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

	2018					
	< 3 bulan / *< 3 month*	3 - 12 Bulan / *3 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*	Suku bunga tetap / *Fixed interest rate*	dikenakan bunga / *Non interest*	Jumlah / *Total*
Aset keuangan / *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	996,584,733,247	-	-	-	-	996,584,733,247
Giro pada BI / *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	-	1,589,283,079,427	-	1,589,283,079,427
Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	-	-	-	7,874,890,109	-	7,874,890,109
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	3,639,732,682,048	-	3,639,732,682,048
Efek-efek / *Marketable securities*	-	-	-	192,000,000,000	-	192,000,000,000
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	307,149,470,387	-	307,149,470,387
Reksadana / *Mutual fund*	-	-	-	476,012,021,400	-	476,012,021,400
Revese Repo	1,315,051,787,700					1,315,051,787,700
Kredit yang diberikan / *Loans*		2,511,166,607,611	11,636,050,776,160	-		14,147,217,383,771
Bunga yang masih harus diterima / *Accrued interest receivable*	52,141,458,511	-	-	-	-	52,141,458,511
Jumlah Aset keuangan / *Total financial assets*	2,363,777,979,458	2,511,166,607,611	11,636,050,776,160	6,212,052,143,371	-	22,723,047,506,600
Dikurangi / *Less* :						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	-	(318,505,167,144)	(1,188,235,542,379)	-		(1,506,740,709,523)
Bersih / *Netto*	2,363,777,979,458	2,192,661,440,467	10,447,815,233,781	6,212,052,143,371	-	21,216,306,797,077
Liabilitas keuangan / *Financial liabilities*						
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	2,240,736,279,672	121,747,169,236	53,674,066,667	15,512,903,319,701	-	17,929,060,835,276
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	248,000,000	3,250,000,000	-	58,956,831,518	-	62,454,831,518
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	-	-	48,757,242,619	-	-	48,757,242,619
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	-	-	-	4,624,632,309	-	4,624,632,309
Jumlah liabilitas keuangan / *Total financial liabilities*	2,240,984,279,672	124,997,169,236	102,431,309,286	15,576,484,783,529	-	18,044,897,541,723
Gap repricing suku bunga - kotor / *Gross interest repricing gap*	122,793,699,786	2,067,664,271,231	10,345,383,924,495	(9,364,432,640,158)	-	3,171,409,255,354

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2018. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva penghasilan.

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank Papua as of December 31, 2018. The total sensitivity of statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Resiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif Bank Papua terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2019:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank Papua's statement of income and statement of comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2019:

31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Perubahan basis poin / *Change in basis point*	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif / *Impact to statements of comprehensive income*
+ 100 bps	154,101,296
- 100 bps	(154,101,296)

b. Risiko nilai tukar

Bank Papua tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank Papua tidak menghadapi risiko valuta asing.

b. Foreign exchange risk

Bank Papua do not have balances and transactions in foreign currencies. Thus, Bank Papua do not have foreign exchange risk.

35. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang berasal dari proses internal, sumber daya manusia dan sistim atau dari kejadian eksternal yang tidak memadai atau gagal.

Para indentifikator risiko Bank Papua melibatkan pengelompokkan kejadian risiko operasional, risiko mengidentifikasi risiko operasional yang material di cabang konvensional dan melaporkannya ke *Chief Risk Officer* setiap bulan dalam bentuk *checklist* .

Bank menerapkan Basic Indicator Approach, yang didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID), untuk menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko .

Satuan Kerja Audit Internal Bank Papua bertanggung jawab untuk memantau risiko operasional dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. RMD memastikan bahwa identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian proses telah efektif dalam setiap aktivitas fungsional, produk atau jasa baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank Papua. RMD bertugas untuk memastikan bahwa Bank Papua telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi disaster (bencana), Bank Papua juga sudah mempunyai kebijakan Business Continuity Management (BCM), yaitu suatu mekanisme yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan,dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha Bank Papua.

35. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

The risk indentification of Bank Papua involves classifying operational risk events, identifying material operational risk at conventional branches and reporting them to the Chief Risk Officer on a monthly basis in the form of a checklist.

The Bank applies the Basic Indicator Approach, based on Circular Letter of Financial Services Authority Number 24 / SEOJK.03 / 2016 dated July 14, 2016 concerning Risk Weighted Asset Calculation (ATMR) for Operational Risk calculated by Basic Indicator Approach (PID), to calculate the need minimum capital (CAR) for operational risk. This function is performed by the Division of Risk Management.

The Bank Papua's Internal Audit Division is responsible for monitoring operational risk by conducting an appraisal on the implementation of risk management policies and procedures. The RMD ensures that the risk identification, measurement, monitoring and control processes are effective in each of the functional activities, new products or services.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by unit within Bank Papua. RMD ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each unit in conducting its daily transactions and activities in accurately, efficiently and timely manner.

In relation to business continuity in the event of a disaster condition, Bank Papua also has a Business Continuity Management (BCM) policy, a mechanism that combines strategies, policies and procedures developed to ensure the operational continuity of business functions. critical at a certain level of service in the event of a disruption or disaster. This policy covers all business units of Bank Papua.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO HUKUM

Bank Papua melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan RMD dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh RMD untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank Papua. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan reviu secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan mitra Bank Papua.

36. LEGAL RISK

Bank Papua identifies legal risk based on Factor's causing risk's include legal litigation, absence of support in law or regulation and weaknesses agreement. At the same time, each division together with the RMD and Corporate Secretary Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted by the Management Risk Deivision and Corporate Secretary Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by the RMD to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with Bank Papua's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, the Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and conducts a regular review of agreements with counterparty.

37. RISIKO REPUTASI

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup aspek keterbukaan, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank Papua, perilaku karyawan Bank Papua dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank Papua.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank Papua dikelolah oleh Divisi Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, di bangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan *trend*, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank Papua. Dalam hal ini, Bank Papua melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank Papua dengan harapan pemangku kepentingan/pemegang saham pada umumnya dan nasabah khususnya, dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bank.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

37. REPUTATIONAL RISK

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including transparency aspects, customer complaints against Bank Papua, employee attitude when providing services to customers and Bank Papua's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the evaluation of the factors causing reputational risk. Bank of Papua's reputational risk is managed by the Risk Management Division, together with the Division of Corporate Secretariat and reported to Bank Indonesia.

In order to monitor the risk of reputation, a reputation built monitoring system is designed to routinely check transactions, regulatory, and technological trends, developments and changes that potentially affect the business of Bank Papua. In this case, Bank Papua perform a gap analysis between the performance of Bank Papua with stakeholders' expectations in general and customers in particular, and taking notes of the things that could potentially pose a reputation risk as well as by optimizing the function of Corporate Secretary of Bank.

In control reputational risk, the unit serves as corporate secretary is responsible for the implementation of policies relating to the handling and resolution of negative news or information to avoid counter-productive as well as for the functioning of the Public Service Obligation (PSO) in order to implement corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO STRATEJIK

Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menatausahakan setiap kejadian terkait risiko stratejik dalam suatu *database* yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Pengukuran risiko stratejik dilakukan berdasarkan kinerja Bank Papua, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, divisi dan kantor cabang meriviu strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank Papua, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

38. STRATEGIC RISK

Strategic Risk identification is based on the risk factors that cause the functional activities, such as activities of lending, treasury and investment, as well as the operations and services. Then, each division and branch offices record and administer all strategic risk-related events in a database that can be used to project potential losses over a period of specific and functional activity.

Strategic risk measurement is based on the performance of Bank Papua, by comparing the results achieved (expected result) with the actual results, evaluate the functional performance of individuals, and examine the progress that has been achieved with the set targets.

Strategic risk monitoring conducted by the Division of Risk Management at regular intervals by identifying functional strategies being executed along with its targets. Furthermore, the Board of Commissioners and Directors, divisions and branches reviewing basic strategy and focus on change management of the Bank Papua's, corporate lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

39. RISIKO KEPATUHAN

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk diriviu.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank Papua untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk meriviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank Papua.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

39. COMPLIANCE RISK

In compliance risk identification, the Compliance Unit made a list of rules and laws that apply to the entire unit. In addition, the Compliance Unit analyzes the events that led to the emergence of compliance risk and inform the matter to the Division of Risk Management and Risk Management Committee for review.

Compliance risk measurement performed to measure the potential losses caused by non-compliance and the inability of the Bank to comply with the regulations. The magnitude of compliance risks are estimated based on the Bank's ability to meet all the regulations of Bank Papua at the past and future. These activities include reviewing all penalties, litigation and complaints ever received by Bank Papua.

In monitoring compliance risk, Division of Risk Management, and Compliance Division tasked to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management on a regular basis to monitor compliance with all kinds of activities that could potentially pose a risk compliance.

40. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank Papua mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

40. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managin its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank Papua's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policiesm and processes from the previous period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk - Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

40. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank has complied with all capital requirements.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Aset tertimbang menurut risiko			*Risk weighted assets*
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	12,107,435,377,056	10,193,679,264,317	*Without market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko pasar	69,583,880,000	57,501,271,186	*With market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	3,437,658,752,959	3,396,481,538,244	*With operational risk* -
Modal			*Capital*
- Modal inti	3,681,253,200,389	3,336,522,854,088	*Core capital* -
- Modal pelengkap	153,258,675,659	127,420,990,804	*Supplementary capital* -
- Unsur pengurang modal	(487,755,586,184)	(433,327,435,438)	
Jumlah modal	3,346,756,289,864	3,030,616,409,454	*Total capital*
Rasio kecukupan modal			*Capital adequacy ratio*
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	27.64%	29.73%	*Without market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko pasar	27.48%	29.56%	*With market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	21.43%	22.21%	*With operational risk* -
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang tanpa memperhitungkan risiko pasar	26.38%	28.48%	*Ratio of core capital to risk weighted assets without market risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	11.00%	11.00%	*Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

41. KONTINJENSI

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan Perkara Perdata No. 96/Pdt.Bth/2019/PN.Smg tanggal 04 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Semarang an. Charles Saerang sebagai Penggugat, PT Bank Papua KC Jakarta sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagai Turut Tergugat II, dan Pujianto sebagai Tergugat III.

   Inti Materi Gugatan:
   Bahwa isi gugatan adalah Objek Sengketa Tanah. Penggugat menuduh/menganggap Lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 842 atas nama Penggugat adalah tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum.

   Progres Penanganan Perkara:
   - Bahwa perkara ini telah diputus pada tanggal 11 Februari 2020.
   - Bahwa atas putusan ini Penggugat tidak mengajukan upaya banding sehingga per 31 Desember 2019 progres penanganan perkara ini adalah menunggu putusan.

b. Gugatan Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 23 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Sorong an. Hasbi Nurlah Hasyim sebagai Penggugat, PT Bank Papua KC Teminabuan sebagai Tergugat I, Muhammad Nur sebagai Tergugat II, dan Yulianty Husain sebagai Tergugat III.

   Inti Materi Gugatan:
   Bahwa isi gugatan ini adalah Wanprestasi. Penggugat menuduh Tergugat I telah ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit No. 97/KMK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 karena tidak menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 tanggal 10 Oktober 1997, dengan luas 1.236m2 yang terletak di Desa Wermit Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atas nama Tergugat III.

   Progres Penanganan Perkara:
   - Bahwa perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Januari 2020.
   - Bahwa atas putusan ini Tergugat I mengajukan upaya banding sehingga per 31 Desember 2019 progres penanganan perkara ini adalah menunggu putusan.

c. Gugatan Perkara Perdata No. 169/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 22 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Edward Jimmy Demonstein Rahail sebagai Penggugat, PT Bank Papua KCU Jayapura sebagai Tergugat, Kepala KPKNL Jayapura sebagai Turut Tergugat I, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU sebagai Turut Tergugat II, dan Elpina Kogoya sebagai Turut Tergugat III.

   Inti Materi Gugatan:
   Bahwa isi gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat menuduh Tergugat dengan melibatkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menetapkan Limit Lelang atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53 tanggal 12 Mei 1984 an. Tony Rahail berikut Surat Ukur No. 687/1982 tanggal 07 Desember 1982 seluas 1.800m2, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03867 tanggal 22 September 2014 an. Anthonius Rahail berikut Surat Ukur No. 67/Vim/2014 tanggal 12 Maret 2014 seluas 400m2.

   Progres Penanganan Perkara:
   Bahwa perkara ini akan diputus pada tanggal 18 Maret 2020, sehingga per 31 Desember 2019 progres penanganan perkara ini adalah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

41. CONTINGENCIES

In carrying out its business, The Company is not apart from any legal suits or claims concerned the compliance to contracts, agreements, government's law, and assets ownership. Up to statement of financial position completion date, there is several on-going lawsuits in the court, there are:

a. Civil Lawsuit No. 96/Pdt.Bth/2019/PN.Smg on March 4, 2019 at the Semarang District Court on behalf of Charles Saerang as the Plaintiff, PT Bank Papua KC Jakarta as Defendant I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang as the Defendant II, and Pujianto as Defendant III.

   Core Material of Lawsuit:
   That the content of the lawsuit are Land Disputes. The Plaintiff accused/considered the Auction of Certificate of Ownership (SHM) No. 842 in the name of the Plaintiff is invalid because it was done against the law.

   Progress of Case Completion:
   - That this case was decided on February 11, 2020.
   - That upon this decision, the Plaintiff did not submit an appeal and as of 31 December 2019 the progress of this case was waiting for decision.

b. Civil Lawsuit No. 52/Pdt.G/2019/PN.Son on May 23, 2019 at the Sorong District Court on behalf of Hasbi Nurlah Hasyim as Plaintiff, PT Bank Papua KC Teminabuan as Defendant I, Muhammad Nur as Defendant II, and Yulianty Husain as Defendant III.

   Core Material of Lawsuit:
   That the content of this lawsuit are Default. The Plaintiff accused Defendant I of breaking a promise with the Credit Agreement No. 97/KMK/XII/2016 dated 30 December 2016 for not submitting collateral in the form of a Certificate of Ownership (SHM) No. 43 dated October 10, 1997, with a land area of 1,236m2 located in Wermit Village, Teminabuan District, South Sorong Regency in the name of Defendant III.

   Progress of Case Completion:
   - That this case was decided on January 28, 2020.
   - That upon this decision, Defendant I submitted an appeal and as of 31 December 2019 the progress of this case was waiting for decision.

c. Civil Lawsuit No. 169/Pdt.G/2019/PN.Jap on August 22, 2019 at the Jayapura District Court on behalf of Edward Jimmy Demonstein Rahail as Plaintiff, PT Bank Papua KCU Jayapura as Defendant, Head of Jayapura KPKNL as Co-Defendant I, MBPRU Public Appraisal Service Office (KJPP) as Co-Defendant II, and Elpina Kogoya as Co-Defendant III.

   Core Material of Lawsuit:
   That the content of this lawsuit is an Illegal Actions. The Plaintiff accused the Defendant involving the Defendant II had committed an Illegal Actions in determining the Tender Limit of collateral in the form of Certificate of Ownership (SHM) No. 53 dated May 12, 1984 in the name of Tony Rahail along with the Measurement Letter No. 687/1982 dated December 7, 1982 along with a land area of 1,800m2, and Certificate of Ownership (SHM) No. 03867 dated 22 September 2014 in the name of Anthonius Rahail along with Measurement Letter No. 67/Vim/2014 dated March 12, 2014 covering an area of 400m2.

   Progress of Case Completion:
   That this case will be decided on March 18, 2020, as of December 31, 2019 the progress of this case is witnessing testimony presented by the Plaintiff.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

41. KONTINJENSI (lanjutan)

d. Gugatan Perkara Perdata No. 184/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 17 September 2019 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Muhamad Rusly sebagai Penggugat, PT Bank Papua KC Sentani sebagai Tergugat, dan KPKNL Jayapura sebagai Turut Tergugat I.

Inti Materi Gugatan:
Bahwa isi gugatan adalah Wanprestasi. Penggugat menuduh Tergugat telah ingkar janji terhadap:
1) Perjanjian Kredit No. 01/KI-DANA SENDIRI/8/2012 tanggal 02 Agustus 2012 berikut addendumnya Perjanjian Kredit No. 01/KI-DANA SENDIRI/8/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dan
2) Perjanjian Kredit No. 06/KATT-DANA SENDIRI/IV/2014 tanggal 02 April 2014, dan melakukan lelang terhadap SHM No. 528 dengan luas tanah 1.960m2 dan bangunan hotel di atasnya, lokasi terletak di Desa/Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura an. Haji M.Yunus Budi.

Progres Penanganan Perkara:
Bahwa perkara ini akan diputus pada tanggal 18 Maret 2020, sehingga per 31 Desember 2019 progres penanganan perkara ini adalah pembuktian surat dari Penggugat.

e. Gugatan Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 26 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Jayapura an. PT Sasana Agung Eglesia dan Frederik Eri Linggi, S.H. sebagai Penggugat, PT Bank Papua KCU Jayapura sebagai Tergugat, KPKNL Jayapura sebagai Turut Tergugat I, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Jayapura sebagai Turut Tergugat II.

Inti Materi Gugatan:
Bahwa isi gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Progres Penanganan Perkara:
Bahwa perkara ini telah diputus pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga progres penanganan perkara ini per 31 Desember 2019 adalah kesimpulan dari Para Pihak.

f. Gugatan Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2018/PN.Jap tanggal 19 September 2018 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Hendriko Manurung sebagai Penggugat, PT Bank Papua sebagai Tergugat I, PT Bank Papua KCU Jayapura sebagai Tergugat II, PT Bank Papua KC Sentani sebagai Tergugat III.

Inti Materi Gugatan:
Bahwa isi gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Progres Penanganan Perkara:
- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa atas putusan diatas Penggugat mengajukan upaya banding dan pada tanggal 20 September 2019 dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengeluarkan putusannya.
- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi.
- Bahwa progres penanganan perkara ini per 31 Desember 2019 adalah menunggu putusan dari Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

h. Gugatan Perkara Perdata No. 144/Pdt.G/2018/PN.Jap tanggal 04 September 2018 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Hendriko Manurung sebagai Penggugat dan Direktur Utama Bank Papua sebagai Tergugat.

Inti Materi Gugatan:
Bahwa isi gugatan ini adalah Wanprestasi. Penggugat menuduh Tergugat telah ingkar janji terhadap Kesepakatan Damai Nomor 95/PKS-BPD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2017.

Progres Penanganan Perkara:
- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa atas putusan diatas Penggugat mengajukan upaya banding dan pada tanggal 20 September 2019 dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengeluarkan putusannya.
- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi.
- Bahwa progres penanganan perkara ini per 31 Desember 2019 adalah menunggu putusan dari Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

41. CONTINGENCIES (continued)

d. Civil Lawsuit No. 184/Pdt.G/2019/PN.Jap on September 17, 2019 at the Jayapura District Court on behalf of Muhamad Rusly as Plaintiff, PT Bank Papua KC Sentani as Defendant, and KPKNL Jayapura as Co-Defendant I.

Core Material of Lawsuit:
That the content of the lawsuit is Default. The Plaintiff accused the Defendant of breaking promises against:
1) Credit Agreement No. 01/KI-SELF DANA/8/2012 dated August 2, 2012 following the addendum of Credit Agreement No. 01/KI-SELF DANA/8/2012 dated August 3, 2012, and
2) Credit Agreement No. 06/KATT-DANA OWN/IV/2014 dated April 2, 2014, and conducted an auction against SHM No. 528 with a land area of 1,960m2 and a hotel building above it, located in Sentani Village/Sentani City, Sentani District, Jayapura Regency in the name of Haji M. Yunus Budi.

Progress of Case Completion:
That this case will be decided on March 18, 2020, as of 31 December 2019 the progress of this case is proofing the letter from the Plaintiff.

e. Civil Lawsuit No. 91/Pdt.G/2019/PN.Jap on August 26, 2019 at the Jayapura District Court on behalf of PT Sasana Agung Eglesia and Frederik Eri Linggi, S.H. as Plaintiffs, PT Bank Papua KCU Jayapura as Defendant, KPKNL Jayapura as Co-Defendant I, Head of Jayapura City State Land Agency (BPN) as Co-Defendant II.

Core Material of Lawsuit:
That the content of the lawsuit is Illegal Acts.

Progress of Case Completion:
That this case will be decided on January 27, 2020, as of December 31, 2019 the progress of this case is to make a conclusion from each parties.

f. Civil Lawsuit No. 150/Pdt.G/2018/PN.Jap on September 19, 2018 at the Jayapura District Court on behalf of Hendriko Manurung as Plaintiff, PT Bank Papua as Defendant I, PT Bank Papua KCU Jayapura as Defendant II, PT Bank Papua KC Sentani as Defendant III.

Core Material of Lawsuit:
That the content of the lawsuit is Illegal Acts.

Progress of Case Completion:
- That this case will be decided by the First District Court on March 12, 2019.
- That upon the decision, the Plaintiff submitted an appeal and on September 20 2019 and the Jayapura High Court issued its decision.
- That upon the decision, the Plaintiff filed an cassation.
- That the progress of this case as of December 31, 2019 is waiting for a decision of the cassation from of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

h. Civil Lawsuit No. 144/Pdt.G/2018/PN.Jap on September 4, 2018 at the Jayapura District Court on behalf of Hendriko Manurung as Plaintiff and President Director of Bank Papua as Defendant.

Core Material of Lawsuit:
That the contents of this lawsuit are Default. The Plaintiff accused the Defendant of breaking promise of the Peace Treaty Number 95/PKS-BPD/XII/2013 dated December 31, 2017.

Progress of Case Completion:
- That this case will be decided by the First District Court on March 12, 2019.
- That upon the decision, the Plaintiff submitted an appeal and on September 20 2019 and the Jayapura High Court issued its decision.
- That upon the decision, the Plaintiff filed an cassation.
- That the progress of this case as of December 31, 2019 is waiting for a decision of the cassation from of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

42. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (deferral approach) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (overlay approach) untuk aset keuangan yang ditetapkan.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang' terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material berlaku efektif 1 Januari 2020

  Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

42. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

- *SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more eneral requirements based on management's judgment.

- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.*

  This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analizing before recognazing the revenue.

- *SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers.*

  This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- *Amendments to SFAS 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with SFAS 62 Insurance Contract, effective 1 January 2020.*

  This amendments allows those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of SFAS 71 (deferral approach) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.

- *Amendments to SFAS 71: Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*

  These amendments clarify that a financial asset passes the 'solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding' criterion regardless of an event or circumstance that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable compensation for the early termination of the contract.

- *Amendment to SFAS 1 and SFAS 25: Definition of Material, effective 1 January 2020*

  This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant SFAS. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

42. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persayaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020

PSAK 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kakek kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank Papua masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank Papua.

43. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang di otorisasi untuk terbit pada tanggal 4 Maret 2020.

42. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Effective beginning on or after 1 January 2021

Amendments to SFAS 22: Definition of Business, effective from 1 January 2021

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

Effective beginning on or after 1 January 2021

SFAS 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective 1 January 2022, and earlier application is permitted, but not before the entity applies SFAS 71 and SFAS 72.

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, SFAS 74 will replace SFAS 62 Insurance Contracts. SFAS 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.

A few scope exceptions will apply. The overall objective of SFAS 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contracs to the requirement in SFAS 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:

- *A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable direct participation features (the variable fee approach)*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.*

As at the authorisation date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

43. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The management of Bank Papua is responsible for the preparation and presentation of the finance statements which were authorized for issuance on March 4, 2020.

*****

BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Laporan Tahunan 2019
Annual Report

Kantor Pusat
Central Office

Jl. Achmad Yani No.5-7 Jayapura, Kotak Pos 1536
Telp. 0967 532011, 531546, 533608, 531944, 532351, 532940
Fax. 0967 53301a9, 533207, 533274
Telex. 76198 BEPEDE IA
E-mail : sekper@bankpapua.co.id
Website : www.bankpapua.co.id